Transition to Net Zero Emissions

Transisi Menuju *Net Zero Emissions*

LAPORAN TAHUNAN **2021** *ANNUAL REPORT*

Cerita Sampul
Cover Story

Target terdekat yang hendak diraih oleh PLN dalam rangka Transisi Menuju *Net Zero Emissions* adalah mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Dan dalam upaya untuk mencapai target bauran energi tersebut, PLN mengambil strategi diantaranya: mengupayakan keberhasilan COD pembangkit-pembangkit EBT dengan percepatan izin, eksplorasi dan pembebasan lahan, program de-dieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS, pembangunan PLTS dan PLTB, implementasi Program *Co-firing* bio massa, merencanakan penggantian beberapa pembangkit *baseload* dari PLTU dengan pembangkit EBT, serta merencanakan *retirement* beberapa PLTU mulai tahun 2030.

The closest target aimed by PLN in the Transition to Net Zero Emissions is to achieve an NRE energy mix of 23% by 2025. In an effort to achieve the NRE energy mix target, PLN takes strategies including: pursuing the success of COD for NRE plants with the acceleration of permits, exploration and land acquisition, the de-dieselization program of PLTD spread to PLTS, construction of PLTS and PLTB, implementation of the Biomass Co-firing Program, planning to replace several baseload generators from PLTU with NRE plants, as well as planning the retirement of several PLTUs starting in 2030.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

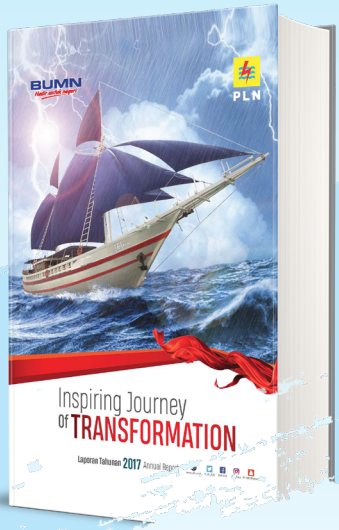

2017

Inspiring Journey of Transformation
Inspiring Journey of Transformation

Berbagai tantangan kami hadapi dalam perjalanan transformasi menuju ekselen, namun PLN tetap kokoh melewatinya demi memberi sumbangsih terbaik bagi Indonesia.

We encountered challenges during our transformation journey to excellence. Despite this, PLN has remained solid in sailing through the journey to deliver the best efforts for Indonesia.

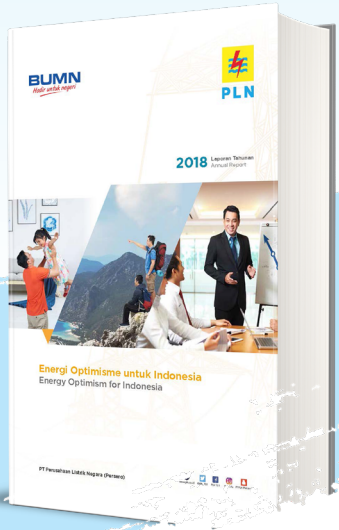

2018

Energi Optimisme Untuk Indonesia
Energy Optimism For Indonesia

Sepanjang tahun 2018, PLN masih menghadapi berbagai tekanan eksternal usaha seperti kenaikan harga energi primer dan penurunan nilai tukar mata uang Rupiah. Meskipun begitu, PLN memaknai setiap tantangan sebagai motivasi untuk lebih tangguh, lebih kapabel, dan lebih mumpuni lagi dalam

During 2018, PLN still faced various external business pressures, such as the increasing primary energy price and the declining Rupiah exchange rate. Nevertheless, PLN accepted every challenge as a motivation to be more resilient, more capable, and more proficient in carrying out its commitment to provide electricity

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2018

Energi Optimisme Untuk Indonesia

Energy Optimism For Indonesia

mengemban komitmen menyediakan listrik ke seluruh penjuru nusantara dan meningkatkan keandalan layanan dengan tarif terjangkau.

throughout Indonesia and to improve service reliability at an affordable tariff.

Fokus kami adalah menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan, membangun sinergi saling menguntungkan dengan pemasok, dan mengefisiensikan Biaya Pokok Penyediaan. Dalam pengimplementasiannya, kami mendorong seluruh unit dan anak perusahaan untuk meningkatkan efisiensi di semua lini dan terus berinovasi untuk mencapai tingkat layanan pelanggan yang prima. Semangat ini harus dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kinerja terbaik dan menjadi kontributor penting bagi profitabilitas Perusahaan.

Our focus is on completing ongoing projects, building mutually beneficial synergies with suppliers, and streamlining the cost of supply. In implementing this, we have encouraged all units and subsidiaries to improve efficiency in all lines and to introduce innovations to ensure an excellent customer service level. This enthusiasm must be shared to achieve top performance and to become a significant contributor to the Company's profitability.

PLN sangat memahami bahwa semua pencapaian yang telah diraih adalah hasil kerja keras, semangat, dan motivasi tinggi seluruh insan PLN. Apapun tantangan yang dihadapi, seluruh insan PLN terus bekerja melistriki negeri hingga ke pelosok dan daerah terisolir. Merekalah yang menebarkan energi untuk meraih kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena kami telah berkomitmen untuk terus memberikan energi optimisme untuk Indonesia.

PLN is well aware that all achievements are the result of hard work, enthusiasm, and high motivation of all PLN's personnel. Whatever challenges are faced, all PLN's personnel continue to work to electrify the entire country, including reaching remote and isolated areas. PLN's personnel are the ones who distribute the energy to achieve a better life for the community in line with our commitment to share energy optimism for Indonesia.

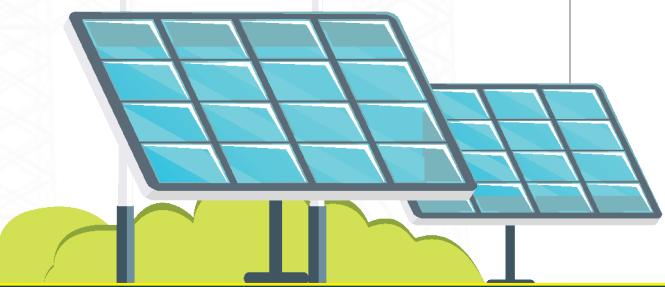

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2019

Memaknai Tantangan, Meningkatkan Layanan
Redefining Challenges, Enhancing Services

Dari waktu ke waktu PLN terus menghadapi tantangan bisnis yang silih berganti dan semakin kompleks. Namun PLN tetap berpegang teguh pada misi untuk terus menjaga kepuasan pelanggan, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menjadi pendorong kegiatan ekonomi serta tetap fokus dalam menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Sepanjang tahun 2019, PLN tetap melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur kelistrikan yang telah dimulai sebelumnya. Di tahun ini penambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dan non EBT, penambahan kapasitas transmisi serta gardu induk bisa melampaui target yang ditetapkan.

From time to time, PLN have been facing different and increasingly complex business challenges. However, PLN still adheres to its missions, which are maintaining customer satisfaction, making electricity as a medium to improve quality of life of the public, driving economic activity, and focusing on carrying out environmentally-friendly business activities. During 2019, PLN continued to complete the construction of electricity infrastructure which had been started in the previous year. This year, the additional capacity of new and renewable energy (NRE) and non-NRE power plants, the additional capacity of transmission and substations exceeded the predetermined targets.

Komitmen PLN dalam menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan turut dibuktikan dengan beroperasinya 462,89 MW pembangkit EBT serta diraihnya 5 PROPER emas oleh 5 unit pembangkit listrik di lingkungan PLN Group. Upaya untuk menurunkan biaya pokok penyediaan pun terus dilakukan di antaranya dengan terus menekan penggunaan bahan bakar minyak dan mengoptimalkan produksi

PLN's commitment to carry out environmentally-friendly business activities is also reflected in the operations of 462.89 MW NRE power plant and the achievement of 5 Gold PROPER by 5 power plants under PLN Group. Continuous efforts to reduce cost of electricity supplies are also made by, among others, reducing the use of fuel oil and optimizing power production from primary energy sources of lower prices in order to

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2019

Memaknai Tantangan, Meningkatkan Layanan
Redefining Challenges, Enhancing Services

listrik dari sumber energi primer yang lebih murah demi menjalankan amanah Pemerintah untuk tetap mempertahankan harga listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri.

carry out the Government's mandate to keep electricity prices stable to maintain people's purchasing power and industrial competitiveness.

PLN juga terus meningkatkan akses masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) untuk ikut menikmati energi listrik lewat berbagai program seperti Lisa (Listrik Pedesaan), Penyambungan Listrik Gratis, *One Man One Hope*, pembangunan PLTS Komunal, penggunaan tabung listrik (Talis) dan lain sebagainya. Untuk memastikan seluruh proses bisnis di PLN dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, di tahun 2019 PLN semakin melengkapi berbagai infrastruktur tata kelola di antaranya melalui aktivitas pengambilan keputusan dengan mekanisme GRC (*Governance, Risk, and Compliance*), merevitalisasi tata nilai dan etika bisnis insan PLN menjadi PLN Terbaik, memperbaiki pedoman manajemen risiko serta pedoman pengadaan barang dan jasa, membangun sistem manajemen *anti-fraud* dan memulai pembangunan sistem manajemen anti suap.

PLN also continues to improve public access in 3T (foremost, outermost, and disadvantaged) areas to be electrified through various programs, such as Lisa (Rural Electrification), Free Power Connection, One Man One Hope, Communal PLTS development, use of electric tubes (Talis), and so forth. To ensure that all business processes in PLN are carried out in accordance with good corporate governance principles, in 2019, PLN also improved various governance infrastructure by, among others, decision making with GRC (Governance, Risk, and Compliance) mechanism, revitalizing value system and code of conducts of PLN's personnel to become the Best PLN, refining guidelines for risk management and procurement of goods and services, developing anti-fraud management system, and commencing development of anti-bribery management system.

Berkat dedikasi seluruh insan PLN yang telah bekerja secara profesional, berorientasi pada hasil, dan senantiasa mematuhi setiap ketentuan yang berlaku, PLN berhasil menutup tahun 2019 dengan catatan kinerja keuangan yang solid dan kinerja operasional yang positif.

Owing to the dedication of all PLN's personnel who worked professionally, were results-oriented, and always complied with the applicable laws and regulations, PLN concluded the year 2019 with solid financial performance and positive operational performance.

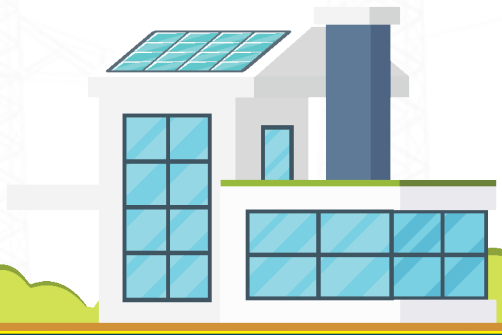

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

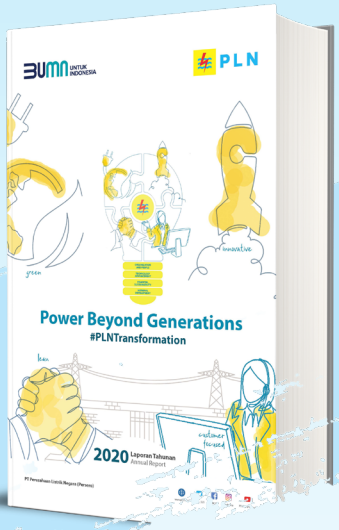

2020

Power Beyond Generations
Power Beyond Generations

75 tahun sudah PLN mengiringi perjalanan bangsa, mengatasi berbagai tantangan, terus memperluas akses listrik ke seluruh penjuru Nusantara. Bagi PLN, listrik bukan hanya sekadar alat penerang, tetapi penggerak kehidupan bagi seluruh masyarakat.

It has been 75 years that PLN has accompanied the nation's journey, overcoming various challenges and continuing to expand access to electricity throughout Nusantara. For PLN, electricity is not just a means of lighting, but a driver of life for the entire community.

Seiring berjalannya waktu, banyak hal telah berubah dengan tantangan yang semakin berat. Dunia telah memasuki era *volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity* (VUCA) di mana perubahan terjadi sangat cepat, seringkali tidak terduga, dan dipengaruhi banyak faktor yang sulit dikontrol. PLN pun menghadapi sejumlah tantangan baru: disrupsi teknologi, ketidakstabilan pasar, persaingan yang semakin tinggi, serta paradigma baru pelayanan pelanggan.

Along with time, many things have changed with getting tougher challenges. The world has entered an era of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) where change occurs very fast, unpredictably, and influenced by many uncontrollable factors. PLN also faces a number of new challenges: technology disruption, market instability, increased competition, and new paradigm of customer care.

Dinamika global yang sangat cepat mendorong insan PLN untuk berlari cepat menyongsong perubahan. Semangat untuk berubah tumbuh menjadi sebuah aspirasi besar dan tekad yang kuat bertransformasi untuk kreatif menangkap peluang dan mencari solusi. Melalui Transformasi PLN: *Power Beyond Generations*, insan PLN telah memilih untuk terus bergerak maju membawa perubahan mengarungi zaman berikutnya untuk menerangi Indonesia, memajukan bangsa.

The rapid global dynamics encourage PLN's personnel to run fast to meet changes. The spirit to change grows into a big aspiration and a strong determination to transform to creatively seize opportunities and find solutions. Through PLN Transformation: Power Beyond Generations, PLN's personnel have chosen to continue to move forward bringing changes across the next era to brighten Indonesia, advancing the nation.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2021

Transition to Net Zero Emissions
Transisi Menuju *Net Zero Emissions*

Proses transformasi yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak hanya sekedar menangkap peluang dan mencari solusi untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan yang semakin berat dan perubahan yang terjadi sangat cepat. PLN sebagai salah satu aset bangsa memiliki peran strategis berkomitmen senantiasa mendukung kebijakan pemerintah *Net-Zero Emissions* (NZE) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060. Untuk mewujudkan visi Indonesia yang berkomitmen mencapai netralitas karbon tersebut, pada tahun 2021 PLN memulai langkah melalui terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang disebut sebagai RUPTL paling *green* yang pernah terbit selama ini.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 menjadi salah satu peta jalan (*roadmap*) untuk mewujudkan transformasi bisnis PLN yakni bertransisi menuju energi bersih. Jika sebelumnya konsep konvensional pengembangan pembangkit listrik mengacu pada 2 (dua) pilar, yaitu *affordability* (*least cost*) dan *security of supply* (keandalan), maka ditambahkan 1 pilar lagi yaitu *acceptability* (*environmental consideration*), sehingga untuk itu PLN terus berupaya menambah instalasi listrik baru yang mengutamakan penggunaan teknologi Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

The transformation process carried out by the Perusahaan Listrik Negara (PLN) is not only about capturing opportunities and finding solutions to maintain business continuity in the midst of increasingly severe challenges and changes that occur in a rapid stream of events. PLN as one of the nation's assets has a strategic role that is committed to always supporting the government's Net-Zero Emissions (NZE) policy which is targeted to be achieved by 2060. To realize Indonesia's vision which is committed to achieving carbon neutrality, in 2021 PLN took steps through the issuance of the Business Plan for Provision of Electric Power (RUPTL) 2021-2030 which is called the greenest RUPTL ever published so far.

The Business Plan for Provision of Electric Power (RUPTL) 2021 – 2030 is one of the roadmaps to realize PLN's business transformation, namely the transition to clean energy. If previously the conventional concept of power plant development referred to 2 (two) pillars, namely affordability (least cost) and security of supply (reliability), then one more pillar was added, namely acceptability (environmental consideration), so that for this reason PLN continued to try to add electricity installations, which prioritizes the use of New and Renewable Energy (NRE) technology.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

Dalam 10 tahun ke depan direncanakan terjadi penambahan kapasitas pembangkit PLN sebanyak 40,6 GW, dimana komposisi penambahan pembangkit teknologi EBT ditargetkan mencapai 51,6 persen dari jumlah tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan rencana penambahan pembangkit EBT pada RUPTL sebelumnya (RUPTL 2019-2028) yaitu sebanyak 29,6% dari target penambahan kapasitas pembangkit. Eksekusi rencana ini tentu saja akan selalu mempertimbangkan keekonomian proyek agar dapat mengurangi biaya pokok penyediaan listrik, keseimbangan *supply demand*, dan kesiapan sistem kelistrikan.

Target terdekat dalam rangka Transisi Menuju Net Zero Emissions yang hendak diraih oleh PLN adalah mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Dan dalam upaya untuk mencapai target bauran energi tersebut PLN mengambil strategi di antaranya: mengupayakan keberhasilan COD pembangkit-pembangkit EBT dengan percepatan izin, eksplorasi dan pembebasan lahan, program de-dieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS, pembangunan PLTS dan PLTB, implementasi Program *Co-firing* bio massa, merencanakan penggantian beberapa pembangkit *baseload* dari PLTU dengan pembangkit EBT, serta merencanakan *retirement* beberapa PLTU mulai tahun 2030.

In the next 10 years, PLN plans to increase PLN's generating capacity of 40.6 GW, where the composition of the addition of NRE technology plants is targeted to reach 51.6 percent of this amount, much higher than the planned addition of NRE plants in the previous RUPTL (RUPTL 2019-2028), which is as much as 29.6% of the target for additional generating capacity. Of course, the execution of this plan will always consider the economics of the project in order to reduce the basic cost of electricity supply, balance supply and demand, and the readiness of electricity system.

The closest target aimed by PLN in the Transition to Net Zero Emissions is to achieve an NRE energy mix of 23% by 2025. And in an effort to achieve the energy mix target, PLN takes strategies including: pursuing the success of COD for NRE plants by accelerating permits, exploration and land acquisition, the de-dieselization program of PLTD spread to PLTS, PLTS and PLTB construction, implementation of the Biomass Co-firing Program, plans to replace several baseload generators from PLTU with NRE plants, and plans to retire several PLTUs starting in 2030.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan operasional, keuangan, proyeksi dan rencana bisnis, penerapan strategi dan kebijakan, serta tujuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Kecuali informasi yang bersifat historis, pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis di mana PLN menjalankan kegiatan usaha. PLN tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

This Annual Report contains the statements of operational and financial conditions, business projections and plans, implementation of strategies and policies, as well as objectives of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN. Except historical information, such statements are subject to prospective risks and uncertainties, in which actual developments may differ materially from the report.

These prospective statements are prepared based on assumptions of the current conditions and predictions of future events in the environment where PLN conducts business. PLN does not guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

Keunggulan Kompetitif
Competitive Advantages

Keunggulan kompetitif yang dimiliki PLN dibandingkan perusahaan penyedia energi lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

PLN has competitive advantages from other energy companies in Indonesia as follows:

No	Keunggulan Kompetitif / *Competitive Advantage*	Keterangan / *Description*
1	Perusahaan penyedia energi listrik yang terintegrasi penuh di Indonesia / A fully-integrated Indonesian electric utility company	Kegiatan usaha terintegrasi dari pembangkitan, transmisi, distribusi, pembangunan infrastruktur kelistrikan, hingga pemasaran energi listrik. / Integrated business activities from power generation, transmission, distribution, construction of electricity infrastructure, to marketing of electricity.
2	Posisi pasar yang superior / Superior market position	Posisi sangat dominan dalam hal *power generation* dan memiliki jaringan transmisi dan distribusi yang sangat luas di Indonesia. / Having remarkably dominant position in power generation and expansive transmission & distribution network in Indonesia.
3	Dukungan kuat dan terbukti dari Pemerintah RI / Strong and demonstrated support from the Indonesian Government	• Kepemilikan saham sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia / The Company's shares are wholly owned (100%) by the Indonesian Government. • Menerima penjaminan dari Pemerintah diantaranya atas pinjaman yang diterima dan efek utang yang diterbitkan. / Guaranteed by the Government in terms of loans received and debt securities issued. • Menerima subsidi dan kompensasi dari Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam APBN terkait fungsi vital PLN sebagai *Public Service Obligation* (PSO) / Receiving subsidy and compensation revenue from the Government as regulated in the State Budget related to PLN's vital function as a Public Service Obligation (PSO)
4	Fleksibilitas keuangan yang tinggi / High financial flexibility	• Kualitas kredit terbaik setara dengan peringkat efek utang Pemerintah Republik Indonesia. / Best credit quality on par with the rating of the Indonesian Government's debt securities. a. Lembaga Pemeringkat Internasional: / International Rating Agency: Moody's (Baa2/*Stable*); S&P (BBB/Negatif); dan Fitch (BBB/*Stable*) / Moody's (Baa2/Stable); S&P (BBB/Negative); and Fitch (BBB/Stable) b. Lembaga Pemeringkat Nasional: / National Rating Agency: Pefindo (AAA/*Stable*) • Diversifikasi pendanaan dari penerbitan efek utang berupa obligasi konvensional, sukuk baik berdenominasi Rupiah yang diterbitkan di Indonesia maupun *global bond* yang berdenominasi valuta asing dan diterbitkan di pasar keuangan dunia serta penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) oleh Entitas Anak. / Diversification of funding from the issuance of debt securities in the form of conventional bonds and sukuk in Rupiah issued in Indonesia and global bonds in foreign currency issued in global financial markets, in addition to the issuance of Asset-Backed Securities (ABS) by Subsidiaries. • Dukungan pendanaan dari berbagai perbankan nasional maupun asing. / Financing support from various national and foreign banks. • Dukungan pendanaan dari *two step loans* atau penerusan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada PLN untuk pembiayaan berbagai proyek-listrik. / Financing support from two-step loans or the Indonesian Government's foreign loans which are not bound by guarantees and forwarded to PLN to finance numerous electricity projects.
5	Pengelolaan perusahaan secara profesional / Professional company management	Dikelola oleh manajemen yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak panjang dan teruji di bidang ketenagalistrikan. / Experienced management with long-standing and tested track record in the electricity industry.

Dukungan Kuat Pemerintah Kepada PLN

Strong Government Support For PLN

Dukungan Keuangan Pemerintah / Financial Support by the Government	• Dukungan pinjaman dari Pemerintah yang berkesinambungan, termasuk restrukturisasi pinjaman yang dilakukan dengan mengubah pinjaman yang telah jatuh tempo dan denda menjadi ekuitas pada tahun 1998. • Penerusan pinjaman dari Pemerintah selaku penerima pinjaman dari luar negeri (*two step loan*). • Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur pemberian subsidi listrik. • Jaminan dari Pemerintah yang bersifat *irrevocable* dan *unconditional* untuk *Fast Track Program I*. • Pemerintah memberikan *Business Viability Guarantee Letters* (BVGL) untuk *Fast Track Program II* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 4 tahun 2010 yang selanjutnya diamandemen dengan PERPRES No. 48 Tahun 2011 dan PERPRES No. 194 Tahun 2014. • Pemerintah memberikan jaminan untuk pinjaman selain untuk *Fast Track Program*. • Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai wujud injeksi modal (ekuitas) dari Pemerintah.	• Continuous loan support from the Government, including loan restructuring carried out by changing matured loans and penalties into equity in 1998. • Forwarding of loans from the Government as the recipient of foreign loans (two-step loans). • Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Law No. 30 of 2009 on Electricity that regulates the provision of electricity subsidy. • Irrevocable and unconditional guarantee from the Government for Fast Track Program I. • The Government provides Business Viability Guarantee Letters (BVGL) for Fast Track Program II as regulated in Presidential Regulation No. 4 of 2010 which was amended by Presidential Regulation No. 48 of 2011 and Presidential Regulation No. 194 of 2014. • The Government provides loan guarantee other than the Fast Track Program. • State Equity Participation (PMN) as capital (equity) injection from the Government.
Partisipasi Aktif Pemerintah Indonesia / Active Participation of the Government	• Terlibat dalam setiap tahapan operasional PLN: penetapan anggaran, perencanaan belanja modal, pengembangan IPP dan pasokan energi primer. • Keterlibatan langsung dan partisipasi aktif dari berbagai kementerian seperti Kementerian BUMN, ESDM, Keuangan dan KLH • Instansi Pemerintah membantu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	• Involved in every operational stage of PLN: budget determination, capital expenditure planning, IPP development, and primary energy supply. • Direct involvement and active participation of various ministries, such as the Ministries of SOEs, Energy and Mineral Resources, Finance, and Forestry and Environment. • Government institutions help the implementation of good corporate governance (GCG), such as the Financial and Development Supervision Agency (BPKP), the Indonesian Audit Board (BPK), and the Corruption Eradication Commission (KPK).

Dukungan Kuat Pemerintah Kepada PLN
Strong Government Support For PLN

Pemberian Subsidi Tepat Waktu dan Memadai / Provision of Timely and Adequate Subsidy	• Kajian yang berkelanjutan untuk memastikan pembayaran subsidi yang memadai dan tepat waktu untuk menjaga kondisi keuangan PLN sekaligus menjaga kepentingan nasional dalam menyediakan listrik yang terjangkau untuk seluruh masyarakat. • Margin untuk penjualan listrik bersubsidi ditetapkan oleh kementerian BUMN dan ESDM	• Continuous review to ensure adequate and timely payment of subsidy to maintain PLN's financial condition while safeguarding the national interest in providing affordable electricity for the entire community. • Margin for subsidized electricity sale is determined by the Ministries of SOEs and Energy and Mineral Resources.
Dukungan dari sisi regulasi / Regulatory Support	• Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 yang diamandemen oleh PERPRES No. 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan. • Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik. • Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik. • Keputusan Menteri ESDM No. 1395K/30/MEM/2018 yang selanjutnya diamandemen Keputusan Menteri ESDM No. 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021. • Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga listrik.	• Presidential Regulation No. 4 of 2016, which was amended by Presidential Regulation No. 14 of 2017 on Accelerated Development of Electricity Infrastructure. • Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2018, which replaces Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 48 of 2017 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2017 on Principles of Electricity Sale and Purchase Agreement. • Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 45 of 2017 on Utilization of Natural Gas for Power Plants. • Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 19 of 2017 on Utilization of Coal for Power Plants and Purchase of Excess Electricity Power. • Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1395K/30/MEM/2018 which was amended by Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 66.K/HK.02/MEM.B/2021 on Fulfillment of Domestic Coal Demand in 2021. • Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2020 on Utilization of Natural Gas for Power Plants.

Capaian Penting 2021
Significant Achievements in 2021

OPERASIONAL / OPERATIONS

JUMLAH UNIT PEMBANGKIT* / *TOTAL POWER PLANTS**

6.760
unit / *units*

▲ 1,24% YoY

KAPASITAS TERPASANG* / *INSTALLED CAPACITY**

64.553,04
MW

▲ 1,92% YoY

PRODUKSI LISTRIK / *ELECTRICITY PRODUCTION*

289.471
GWh

▲ 5,32% YoY

DAYA MAMPU / *POWER CAPACITY*

57.679,27
MW

▲ 10,36% YoY

PANJANG JARINGAN TRANSMISI / *LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK*

64.807
kms

▲ 5,66% YoY

PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI / *LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK*

1.022.124
kms

▲ 1,58% YoY

PENJUALAN TENAGA LISTRIK / *SALE OF ELECTRICITY*

257,63
TWh

▲ 5,77% YoY

*termasuk milik PLN, IPP dan Sewa / *including power plants owned by PLN, IPP, and Leased

Capaian Penting 2021
Significant Achievements in 2021

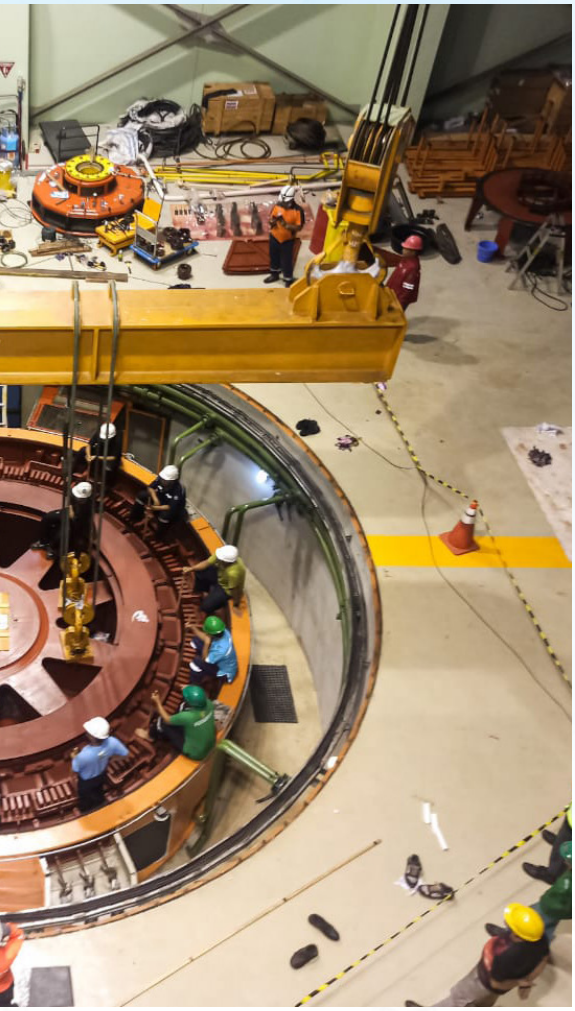

PENAMBAHAN PELANGGAN / *NUMBER OF CUSTOMERS*

3.543.947
MW

▲ 7,57% YoY

TOTAL PRODUKSI LISTRIK / *TOTAL ELECTRICITY PRODUCTION*

289,47
TWh

▲ 5,32% YoY

***SYSTEM AVERAGE INTERRUPTION DURATION INDEX* (SAIDI)**

540,12
menit/pelanggan / *minutes/customer*

▼ 10,36% YoY

***SYSTEM AVERAGE INTERRUPTION FREQUENCY INDEX* (SAIFI)**

6,70
kali/pelanggan / *times/customer*

▼ 27,62% YoY

BAURAN ENERGI BBM+BBN TANPA IPP / *FUEL OIL + BIO FUEL ENERGY MIX WITHOUT IPP*

5,71
%

▲ 18,01% YoY

BAURAN ENERGI BBM+BBN DENGAN IPP / *FUEL OIL + BIOFUEL ENERGY MIX WITH IPP*

3,91
%

▲ 7,48% YoY

BAURAN ENERGI EBT TANPA IPP / *NRE ENERGY MIX WITHOUT IPP*

8,93
%

▼ 1,36% YoY

Capaian Penting 2021
Significant Achievements in 2021

BAURAN ENERGI EBT DENGAN IPP / *NRE ENERGY MIX WITH IPP*

12,74
%

▼ 2,58% YoY

PENAMBAHAN DAYA TERSAMBUNG / *INCREASE IN CONNECTED POWER*

8.887,75
MVA

▲ 34,63% YoY

KEUANGAN / FINANCE

TOTAL ASET / *TOTAL ASSETS*

Rp
1.613,22
triliun / *trillion*

▲ 1,53% YoY

TOTAL EKUITAS / *TOTAL EQUITY*

Rp
981,61
triliun / *trillion*

▲ 4,45% YoY

PENDAPATAN USAHA / *NET REVENUE*

Rp
368,17
triliun / *trillion*

▲ 6,59% YoY

PENJUALAN LISTRIK / *SALES OF ELECTRICITY*

Rp
288,86
triliun / *trillion*

▲ 5,08% YoY

PENYAMBUNGAN PELANGGAN / *CUSTOMER CONNECTION FEES*

Rp
0,49
triliun / *trillion*

▲ 57,79% YoY

Capaian Penting 2021
Significant Achievements in 2021

SUSUT ENERGI / *ENERGY LOSSES*

8,59
%

▼ 6,12% YoY

RASIO ELEKTRIFIKASI / *ELECTRIFICATION RATIO*

99,45

▲ 0,25% YoY

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN / *CUSTOMER SATISFACTION SURVEY*

95,17
%

▲ 1,05% YoY

SUBSIDI PEMERINTAH / *GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY*

Rp **49,80**
triliun / *trillion*

▲ 3,77% YoY

PENDAPATAN KOMPENSASI / *COMPENSATION INCOME*

Rp **24,59**
triliun / *trillion*

▲ 37,36% YoY

PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN / *OTHER OPERATING INCOME*

Rp **4,43**
triliun / *trillion*

▲ 2,66% YoY

EBITDA

Rp **89,17**
triliun / *trillion*

▲ 2,86% YoY

LABA BERSIH / *NET PROFIT*

Rp **13,17**
triliun / *trillion*

▲ 119,82% YoY

TINGKAT KESEHATAN KONSOLIDASI / *CONSOLIDATED HEALTH LEVEL*

107,49
nilai / *score*

▲ Sehat AAA / *Health AAA*

Daftar Isi
Table of Contents

28 **Kilas Kinerja**
Performance Highlights

62 **Laporan Manajemen**
Management Report

116 **Profil Perusahaan**
Company Profile

194 **Analisis dan Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis

266 **Tata Kelola Perusahaan**
Good Corporate Governance

456 **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**
Corporate Social and Environmental Responsibility

Daftar Isi
Table of Contents

Cerita Sampul
Cover Story
2 Kesinambungan Tema
Theme Continuity
8 Sanggahan dan Tanggung Jawab
Disclaimer
9 Keunggulan Kompetitif
Competitive Advantages
10 Dukungan Kuat Pemerintah Kepada PLN
Strong Government Support For PLN
12 Capaian Penting 2021
Significant Achievements in 2021
16 Daftar Isi
Table of Contents
20 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

01 KILAS KINERJA
PERFORMANCE HIGHLIGHTS

30 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
34 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights
35 Ikhtisar Kinerja Lainnya
Other Performance Highlights
35 Ikhtisar Infrastruktur Ketenagalistrikan
Electricity Infrastructure Highlights
42 Ikhtisar Saham
Share Highlights
43 Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds Highlights
48 Aksi Korporasi
Corporate Action
49 Peringkat Surat Utang
Debt Securities Rating
50 Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

02 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

64 Laporan Dewan Komsaris
Board of Commissioners Report
86 Laporan Direksi
Board of Directors Report

03 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

118 Informasi Perusahaan
Company Information
120 Riwayat Singkat
The Company at A Glance
123 Kronologis Perubahan Nama Perusahaan
Chronology of Name Change
124 Jejak Langkah
Milestones
126 Bidang Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir
Line of Business Based on the Latest Articles of Association
129 Produk dan Layanan
Products and Services
130 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values
136 Makna Logo Perusahaan
Company Logo Meaning
138 Struktur Organisasi
Organization Structure
140 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
151 Profil Direksi
Board of Directors Profile
162 Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2021
Changes in the Management Composition After the 2021 Fiscal Year
165 Profil SDM Perusahaan
Profile of Corporate Human Capital
168 Keanggotaan Dalam Asosiasi
Association Membership
169 Struktur & Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition & Structure
170 Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan *Special Purpose Vehicles* (SPV)
Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)
177 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professionals
182 Informasi pada *Website*
Information on the Website
184 Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi
Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

Daftar Isi
Table of Contents

04 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

197 Tinjauan Perekonomian Dunia dan Indonesia
Overview on Global and Indonesia Economics
205 Tinjauan Industri Ketenagalistrikan
Overview of the Electricity Industry
214 Tinjauan Segmen Operasi
Overview on Operating Segment
215 Tinjauan Keuangan
Financial Review
215 Laporan Posisi Keuangan
Statements of Financial Position
220 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
230 Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statements of Cash Flows
231 Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Solvency, Receivables Collectability, and Other Financial Ratios
232 Kemampuan Membayar Utang
Solvency
232 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal serta Dasar Penentuan Kebijakan
Capital Structure and Management Policy of Capital Structure and the Basis of Policy Determination
234 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Goods Investment
236 Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment
237 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Facts and Information Subsequent to Accountant's Reporting Date
239 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2021 Serta Proyeksi 2022
Comparison Between the Target and Realization of 2021 and the Projection of 2022
240 Prospek Usaha Perusahaan
Business Outlook
242 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
248 Kebijakan Dividen dan Pembagiannya
Policy on Dividend and Its Distribution
248 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/ MSOP)
Employee and/or Management Stock Option Program (ESOP/MSOP)
249 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Proceeds from Public Offering
249 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi
Material Transaction Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/ Related Parties
253 Informasi Material Transaksi Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi
Transaction Material Related to Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring
254 Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Changes in Regulation and Their Impact on the Company
258 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya yang Diterapkan
Changes to Accounting Policies and the Impact
259 Kontribusi Terhadap Negara
Contribution to the Country
259 Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

05 TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

268 Komitmen Tata Kelola
Corporate Governance Commitment
270 Dasar Penerapan GCG
Basis of GCG Implementation
272 *Milestone* GCG
GCG Milestone
274 Kebijakan Perusahaan
Company Regulations
277 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Mechanism of Corporate Governance
278 Penilaian GCG
GCG Assessment
284 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
292 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
314 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners
314 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners
316 Komite Audit
Audit Committee
325 Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee
334 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
341 Direksi
Board of Directors
380 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
383 Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)
Internal Audit Unit
389 Akuntan Publik
Public Accountant
390 Manajemen Risiko
Risk Management
406 Kepatuhan
Compliance
411 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Daftar Isi
Table of Contents

415 Permasalahan Hukum
Legal Issues
417 Sanksi Administratif oleh Regulator
Administrative Sanction Imposed by Regulator
417 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data
419 Transformasi Budaya Perusahaan
Transformation of Corporate Culture
422 Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct
425 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services
428 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
Whistleblowing System
433 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Management of State Officials Assets Report
434 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Lainnya
Other Corporate Governance Implementation
441 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

458 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Corporate Social and Environmental Responsibility Governance
465 Lingkup Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Scope of Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility
470 Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Operasi yang Adil
Corporate Responsibilities in Fair Operating Practices
477 Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Hak Asasi Manusia
Corporate Responsibilities in Human Rights
483 Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup
Corporate Responsibilities in Environment
499 Tanggung Jawab Perusahaan Di Bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Corporate Responsibilities in Occupational Safety and Health
531 Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Responsibilities in Social and Community Development
538 Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Produk dan Jasa
Corporate Responsibilities in Products and Services

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2021 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan • Awards

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima oleh Perseroan hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Awards and certifications received by the Company in the period ended on December 31, 2021 are as follows:

Penyelenggara / *Organizer*	Nama Penghargaan / *Name of Award*	Penerima Penghargaan / *Awardee*	Tanggal Perolehan / *Date of Award*
Penghargaan PT PLN (Persero) / *Awards of PT PLN (Persero)*			
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia / Hajj Financial Managing Agency of the Republic of Indonesia	Mitra Investasi Kategori Emiten dengan Scoring Terbaik 2020 / Investment Partner of Issuer Category with the Best Score of 2020	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	3 Februari 2021 / February 3, 2021
Serikat Perusahaan Pers / Association of Press Companies	The Best of E-Magazine State Own Enterprise Inhouse Magazine (InMA) 2021 Silver Winner – FOKUS Edisi April 2020 / The Best of E-Magazine for State-Owned Enterprise Inhouse Magazine (InMA) 2021 Silver Winner – FOKUS April 2020 Edition	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	24 Februari 2021 / February 24, 2021
REM Asia	Renewable Energy Markets™ (REM™) Asia Awards	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	10 Maret 2021 / March 10, 2021
PR Indonesia	Silver Winner Sub Kategori Marketing PR pada Public Relation Indonesia Award - Program Satu Juta *Downloader* PLN Mobile / Silver Winner of Marketing PR Subcategory at Public Relation Indonesia Award – One Million Downloaders Program PLN Mobile	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	31 Maret 2021 / March 31, 2021
	Gold Winner Sub Kategori E-Magazine pada Public Relation Indonesia Award - FOKUS Edisi Januari 2020 / Gold Winner of E-Magazine Subcategory at Public Relation Indonesia Award - FOKUS January 2020 Edition	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	31 Maret 2021 / March 31, 2021
	Gold Winner Sub Kategori Aplikasi pada Public Relation Indonesia Award – PLNKita / Gold Winner of Application Subcategory at Public Relation Indonesia Award - PLNKita	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	31 Maret 2021 / March 31, 2021
The La Tofi School of CSR	Mengembangkan Keanekaragaman Hayati IGA AWARD 2021 / Developing Biodiversity IGA AWARD 2021	PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UIP JBTB I	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UIW NTT	7 April 2021 / April 7, 2021
	Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu IGA AWARD 2021 / Developing Integrated Waste Management IGA AWARD 2021	PT PLN (Persero) UIW NTB	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UIP Tanjung Jati B	7 April 2021 / April 7, 2021
	Penanganan Sampah Plastik IGA AWARD 2021 / Plastic Waste Handling IGA AWARD 2021	PT PLN (Persero) UID Jakarta	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UID Lampung	7 April 2021 / April 7, 2021
	Pengembangan Wisata Konservasi Alam IGA AWARD 2021 / Natural Conservation Tourism Development IGA AWARD 2021	PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UIW Sulutenggo	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UIW Aceh	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN Persero) UI Interkoneksi Sumatera Jawa	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UIW Sumatra Barat	7 April 2021 / April 7, 2021
	Penyelamatan Sumber Daya Air IGA AWARD 2021 / Water Resources Conservation IGA AWARD 2021	PT PLN (Persero) UIW Kalimantan Timur	7 April 2021 / April 7, 2021
The La Tofi School of CSR	Rekayasa Teknologi Dalam Menghemat Energi/Penggunaan EBT IGA AWARD 2021 / Technology Engineering for Energy Saving/NRE Usage IGA AWARD 2021	PT PLN (Persero) UIP JBTB I	7 April 2021 / April 7, 2021
		PT PLN (Persero) UIW Bangka Belitung	7 April 2021 / April 7, 2021

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penyelenggara / *Organizer*	Nama Penghargaan / *Name of Award*	Penerima Penghargaan / *Awardee*	Tanggal Perolehan / *Date of Award*
Top Business	CSR PLN Transformation for Creating Share Value and Sustainable Business Growth Based on SDG's Achievement – Top CSR Awards	PT PLN (Persero)	22 April 2021 / April 22, 2021
Bisnis Indonesia	CSR PLN Transformation for Creating Share Value and Sustainable Business Growth Based on SDG's Achievement – Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2021	PT PLN (Persero)	22 April 2021 / April 22, 2021
TOP CSR AWARD 2021	Top CSR Awards 2021 # Star 5	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	22 April 2021 / April 22, 2021
	TOP LEADER ON CSR COMMITMENT 2021	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	22 April 2021 / April 22, 2021
Beritasatu Media Holdings & Bumi Global Karbon	Kategori Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN non Perbankan 'Green' pada Penghargaan Emisi Korporasi 2021 / Corporate Emission Reduction Category of Non-Banking SOE Sector 'Green' at Corporate Emission Award 2021	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	2 Mei 2021 / May 2, 2021
	Kategori Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor BUMN Non Perbankan 'Silver' pada Penghargaan Emisi Korporasi 2021 / Corporate Emission Calculation Transparency Category of Non-Banking SOE Sector 'Silver' at Corporate Emission Award 2021	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / PT PLN (Persero) Head Office	2 Mei 2021 / May 2, 2021
Balai Pustaka	Kontingen Tim Terbanyak Mengirim Video Berbalas Pantun Nasional Kategori Milenial BUMN / Team Contingent with the Most Pantun Video Submission Nationally for SOE Millennial Category	PT PLN (Persero)	10 Juni 2021 / June 10, 2021
The Iconomics	Indonesia Best CEO Awards Employees' Choice 2021 – Best CEO in Electric Power Category	PT PLN (Persero)	23 Juli 2021 / July 23, 2021
ASEAN Centre for Energy (ACE)	ASEAN Coal Awards – Best Practices in Clean Coal Use and Technology for Small Scale Power Generation	PT PLN (Persero) UIKL Sulawesi	8 Agustus 2021 / August 8, 2021
Contact Center World	Best Contact Center – 2021 Global Top Ranking Performance Award Contact Center World	PT PLN (Persero)	15 September 2021 / September 15, 2021
	Best Use Social Media – 2021 Global Top Ranking Performance Award Contact Center World	PT PLN (Persero)	15 September 2021 / September 15, 2021
	Best Use of Self-Service Technology – 2021 Global Top Ranking Performance Award Contact Center World	PT PLN (Persero)	15 September 2021 / September 15, 2021
Infobrand.id dan Tras N Co Indonesia	Top Corporate Social Responsibility (CSR) of the Year 2021	PT PLN (Persero)	20 Agustus 2021 / August 20, 2021
Asosiasi GRC Indonesia / Indonesian GRC Association	Governance Risk and Compliance (GRC) Lifetime Achievement 2021 - Direktur Utama / Governance Risk and Compliance (GRC) Lifetime Achievement 2021 – President Director	PT PLN (Persero)	26 Agustus 2021 / August 26, 2021
Economic Review	The Best Indonesia Director for CSR of The Year 2021	Direktur MSDM PT PLN (Persero) / Director of MSDM of PT PLN (Persero)	27 Agustus 2021 / August 27, 2021
	The Best-CSR of The Year 2021 Category: State Owned Enterprises Company	PT PLN (Persero)	27 Agustus 2021 / August 27, 2021
	The Best of The Best-CSR of The Year 2021 Category: State Owned Enterprises Company	PT PLN (Persero)	27 Agustus 2021 / August 27, 2021
	Nusantara CSR Award – Kategori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas / Nusantara CSR Award – Community Economic Empowerment Category	PT PLN (Persero) UIP Nusra	15 September 2021 / September 15, 2021
The La Tofi School of CSR	Nusantara CSR Award – Kategori Pelibatan Komunitas dalam Menangani Sampah / Nusantara CSR Award – Community Engagement in Waste Management Category	PT PLN (Persero) UIW Kalselteng	15 September 2021 / September 15, 2021
	Nusantara CSR Award – Kategori Pengembangan Desa Wisata / Nusantara CSR Award – Tourism Village Development Category	PT PLN (Persero) UID Bali	15 September 2021 / September 15, 2021
	Nusantara CSR Award – Kategori Peningkatan Mutu Kesehatan / Nusantara CSR Award – Health Quality Improvement Category	PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar	15 September 2021 / September 15, 2021

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penyelenggara / *Organizer*	Nama Penghargaan / *Name of Award*	Penerima Penghargaan / *Awardee*	Tanggal Perolehan / *Date of Award*
The La Tofi School of CSR	Nusantara CSR Award – Kategori Pemberdayaan Penyandang Disabilitas / Nusantara CSR Award – Disabled Community Empowerment Category	PT PLN (Persero) UIK TJB	15 September 2021 / September 15, 2021
	Nusantara CSR Award – Kategori Peningkatan Mutu Pendidikan / Nusantara CSR Award – Education Quality Improvement Category	PT PLN (Persero) UIP Nusra	15 September 2021 / September 15, 2021
Economic Review	1st The Best of The Best – Indonesia Human Capital – 2021 atau Juara Umum-I-2021 Platinum-A-Very Excellent untuk Kategori Perusahaan Non Publik / 1st The Best of The Best – Indonesia Human Capital – 2021 or the General Champion-I-2021 Platinum-A-Very Excellent for Non-Public Company Category	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	The Best Indonesia Human Capital of The Year 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	The Best Indonesia Strategic Human Capital Director 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	1st The Best Indonesia Human Capital 2021 Platinum-A-Very Excellent untuk Kategori SOE's Company / 1st The Best Indonesia Human Capital 2021 Platinum-A-Very Excellent for SOE Category	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Top Leadership on SDGs – Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	The Most Committed Corporate on Environment Pilar – Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	The Most Committed Corporate on Economy Pilar – Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
PR INDONESIA	Gold Winner – Kategori Website Terinovatif Anugerah Humas Indonesia 2021 / Gold Winner – Most Innovative Website Category at Indonesia PR Award 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	Gold Winner – Kategori Aplikasi Terinovatif Anugerah Humas Indonesia 2021 / Gold Winner – Most Innovative Application Category at Indonesia PR Award 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	Gold Winner – Kategori PPID Utama Terbaik Anugerah Humas Indonesia 2021 Anugerah Humas Indonesia 2021 / Gold Winner – The Best Main PPID Category at Indonesia PR Award 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	Silver Winner – Kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik Terinovatif Anugerah Humas Indonesia 2021 / Silver Winner – Most Innovative Public Information Management and Presentation Category at Indonesia PR Award 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	BUMN Non Tbk yang Terpopuler di Media Digital Anugerah Humas Indonesia 2021 / Most Popular Non-Public SOE in Digital Media at Indonesia PR Award 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
	Pemimpin BUMN Non Tbk yang Terpopuler di Media Digital Anugerah Humas Indonesia 2021 / Most Popular Non-Public SOE Leader in Digital Media at Indonesia PR Award 2021	PT PLN (Persero)	17 September 2021 / September 17, 2021
ISDA 2021	Peningkatan Akses Energi Baru – Gold / New Energy Access Improvement – Gold	PT PLN (Persero) UIW Bangka Belitung	17 September 2021 / September 17, 2021
	Pengolahan Limbah untuk Kesejahteraan Masyarakat – Gold / Waste Management for Community Welfare – Gold	PT PLN (Persero) UID Jaya	17 September 2021 / September 17, 2021
	Peningkatan Peluang Usaha dan Kerja Masyarakat – Platinum / Improvement of Business and Work Opportunities for the Community – Platinum	PT PLN (Persero) UIW NTT	17 September 2021 / September 17, 2021
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Inovasi – Gold / Community Capacity Building through Innovation – Gold	PT PLN (Persero) UIK TJB	17 September 2021 / September 17, 2021
	Ekonomi Desa Mandiri – Platinum / Independent Village Economy – Platinum	PT PLN (Persero) UID Jatim	17 September 2021 / September 17, 2021
	Konservasi Pesisir dan Laut – Platinum / Coastal and Marine Conservation – Platinum	PT PLN (Persero) UIK SBS	17 September 2021 / September 17, 2021
Warta Ekonomi	Best TJSL 2021 with Outstanding Program in Local Community Basic Needs Support, Kategori Pelaku Industri Energi, Minyak dan Gas / Best CSR 2021 with Outstanding Program in Local Community Basic Needs Support for Energy, Oil, and Gas Industry Category	PT PLN (Persero)	25 September 2021 / September 25, 2021

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penyelenggara / *Organizer*	Nama Penghargaan / *Name of Award*	Penerima Penghargaan / *Awardee*	Tanggal Perolehan / *Date of Award*
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) / Ministry of Energy and Mineral Resources	Juara 1 Kategori Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik – Seller untuk PLTU Non Mulut Tambang di Atas 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi Tahun 2021 / 1st Place in the Carbon Emission Reduction and Trading Category in the Power Generation Sector – Seller for Non-Mine Mouth Power Plants Above 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Unit 4	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 2 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik - Seller untuk PLTU MT (Mulut Tambang) 100 - 400 MW - Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 2nd Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector - Seller for Mine Mouth PLTU 100 - 400 MW - Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT PLN (Persero) UIK Kalimantan	28 September 2021 / September 28, 2021
	Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021 – Predikat Muda / Dharma Karya Award for Energy and Mineral Resources (ESDM) 2021 – Junior Predicate	PT PLN (Persero) – Tim Charge.IN	28 September 2021 / September 28, 2021
	Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021 – Predikat Muda / Dharma Karya Award for Energy and Mineral Resources (ESDM) 2021 – Junior Predicate	PT PLN (Persero) – Tim PLN Mobile	28 September 2021 / September 28, 2021
	Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021 – Predikat Muda / Dharma Karya Award for Energy and Mineral Resources (ESDM) 2021 – Junior Predicate	PT PLN (Persero) – Tim Strategi Pemasaran Energi Listrik pada Pertanian Buah Naga Tradisional (SPG BUGAR) / PT PLN (Persero) – Team for Electricity Energy Marketing Strategy for Traditional Dragonfruit Farming (SPG BUGAR)	28 September 2021 / September 28, 2021
Majalah TopBusiness	TOP GRC Awards 2021 Level Bintang Lima (#5 Stars)	PT PLN (Persero)	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	The Most Committed GRC Leader 2021	Direktur Utama PT PLN (Persero) / President Director of PT PLN (Persero)	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021 for Board of Commissioner	PT PLN (Persero)	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	Special Appreciation on GRC Culture Development	PT PLN (Persero)	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu / State Treasury Service Office (KPPN) for Investment – Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance	Debitur Berkinerja Terbaik Tahun 2020 / Debtor with the Best Performance in 2020	PT PLN (Persero)	12 Oktober 2021 / October 12, 2021
BUMN Track	Juara 1 BUMN Program CSR Pilar Lingkungan pada TJSL dan CSR Award 2021 / 1st Winner of SOE Environmental CSR Program at the CSR Award 2021	PT PLN (Persero)	14 Oktober 2021 / October 14, 2021
The Best Contact Center Indonesia 2021 (TBCCI 2021)	• 15 Medali Platinum / 15 Platinum Medals • 15 Medali Emas / 15 Gold Medals • 12 Medali Perak / 12 Silver Medals • 9 Medali Perunggu / 9 Bronze Medals	PT PLN (Persero)	21 Oktober 2021 / October 21, 2021
Asian Power Awards	Corporate Social Responsibility of the Year – Indonesia	PT PLN (Persero)	4 November 2021 / November 4, 2021
GridOto Awards 2021	Kontribusi untuk Negeri Award 2021 / Contribution to the Nation Award 2021	PT PLN (Persero)	7 November 2021 / November 7, 2021
Gatra Media Group	Gatra Awards 2021 untuk kategori Teknologi / Gatra Awards 2021 for Technology Category	PT PLN (Persero)	1 Desember 2021 / December 1, 2021
Komisi Pemberantasan Korupsi / Corruption Eradication Commission	Atas Komitmen yang Tinggi dalam Upaya Sertifikasi dan Penyelamatan Aset PT PLN (Persero) / Strong Commitment in Certification and Asset Recovery Efforts of PT PLN (Persero)	PT PLN (Persero)	7 Desember 2021 / December 7, 2021

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penyelenggara / *Organizer*	Nama Penghargaan / *Name of Award*	Penerima Penghargaan / *Awardee*	Tanggal Perolehan / *Date of Award*
HumanResourcesOnline.Net.	HRExcellence Awards 2021 peringkat Gold dalam Kategori Excellence in CSR Strategy / HRExcellence Awards 2021 Gold rating for Excellence in CSR Strategy Category	PT PLN (Persero)	8 Desember 2021 / December 8, 2021
	HRExcellence Awards 2021 peringkat Silver dalam kategori Excellence in Workplace Culture / HRExcellence Awards 2021 Silver rating for Excellence in Workplace Culture Category	PT PLN (Persero)	8 Desember 2021 / December 8, 2021
CNBC Indonesia	The Best State Owned Enterprise in Nation Building, CNBC Indonesia Awards	Direktur Utama PT PLN (Persero) / President Director of PT PLN (Persero)	10 Desember 2021 / December 10, 2021
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ministry of Education, Culture, Research, and Technology	Kontribusi DUDI untuk Pendidikan Vokasi pada Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Awards tahun 2021 / Business and Industrial Community Contribution for Vocational Education at the Business and Industrial Community Awards 2021	PT PLN (Persero)	10 Desember 2021 / December 10, 2021
PR Indonesia	Pemimpin Humas/Public Relation Berpengaruh 2021 / Influential Public Relations Leader 2021	PT PLN (Persero)	14 Desember 2021 / December 14, 2021
	Most Popular Leader in Social Media	EVP KOM PT PLN (Persero)	15 Desember 2021 / December 15, 2021
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Ministry of Environment and Forestry	8 PROPER EMAS / 8 GOLD PROPER	PT PLN (Persero)	28 Desember 2021 / December 28, 2021
	20 PROPER HIJAU / 20 GREEN PROPER	PT PLN (Persero)	28 Desember 2021 / December 28, 2021
Penghargaan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) / Awards for Subsidiaries of PT PLN (Persero)			
The La Tofi School of CSR	Mengembangkan Keanekaragaman Hayati IGA AWARD 2021 / Developing Biodiversity IGA AWARD 2021	PT. Indonesia Power	7 April 2021 / April 7, 2021
	Pengembangan Wisata Konservasi Alam IGA AWARD 2021 / Natural Conservation Tourism Development IGA AWARD 2021	PT. PJB	7 April 2021 / April 7, 2021
Beritasatu Media Holdings & Bumi Global Karbon	Kategori Penurunan Emisi Korporasi Sektor Non Emiten dan Non BUMN 'Green' pada Penghargaan Emisi Korporasi 2021 / Corporate Emission Reduction Category for Non-Issuer and Non-SOE Sector 'Green' at Corporate Emission Award 2021	PT Pembangkitan Jawa Bali	2 Mei 2021 / May 2, 2021
	Kategori Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Non Emiten dan Non BUMN 'Silver' pada Penghargaan Emisi Korporasi 2021 / Corporate Emission Calculation Transparency Category for Non-Issuer and Non-SOE Sector 'Green' at Corporate Emission Award 2021	PT Pembangkitan Jawa Bali	2 Mei 2021 / May 2, 2021
ASEAN Centre for Energy (ACE)	ASEAN Coal Awards – Best Practices in Clean Coal Use and Technology for Medium Scale Power Generation	PT Indonesia Power	8 Agustus 2021 / August 8, 2021
	ASEAN Coal Awards – 1st Runner Up Best Practices in Clean Coal Use and Technology for Large Scale Power Generation	PT Indonesia Power	8 Agustus 2021 / August 8, 2021
Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Top Leadership on SDGs – Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021	PT PJB	17 September 2021 / September 17, 2021
	The Most Committed Corporate for SDGs on Social Pillar – Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021	PT PJB	17 September 2021 / September 17, 2021
	The Most Committed Corporate for SDGs on Economy Pillar – Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021	PT PJB	17 September 2021 / September 17, 2021
	Gold Category for Corporate Category – Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021	PT Indonesia Power	17 September 2021 / September 17, 2021
ISDA 2021	Peningkatan Infrastruktur Desa dan Ekonomi Masyarakat – Gold / Village Infrastructure and Community Economic Improvement – Gold	PLN PJB UBJOM Indramayu	17 September 2021 / September 17, 2021
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan – Gold / Women Economic Empowerment – Gold	PLN PJB Unit Pembangkit Gresik	17 September 2021 / September 17, 2021
	Konservasi Darat Berbasis Masyarakat – Gold / Community-Based Land Conservation – Gold	PLN IP Kamojang Pomu	17 September 2021 / September 17, 2021
	Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular – Gold / Handling and Prevention of Communicable Diseases – Gold	PLN IP Unit Bali	17 September 2021 / September 17, 2021
	Juara 3 – Manajemen Energi di Gedung Kecil dan Menengah – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 3rd Place – Energy Management in Small and Medium Buildings – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	Gedung Kantor PT. Indonesia Power Bali PGU	28 September 2021 / September 28, 2021

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penyelenggara / *Organizer*	Nama Penghargaan / *Name of Award*	Penerima Penghargaan / *Awardee*	Tanggal Perolehan / *Date of Award*
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) / Ministry of Energy and Mineral Resources	Juara 2 – Manajemen Energi di Industri Pertambangan dan Energi – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 2nd Place – Energy Management in the Mining and Energy Industry – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT. Indonesia Power Priok POMU	28 September 2021 / September 28, 2021
	Manajemen Energi di Gedung dan Industri – Inovasi Khusus – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / Energy Management in Buildings and Industry – Special Innovations – Subroto Award for Energy Efficiency 2021	PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) UP Pation	28 September 2021 / September 28, 2021
	Manajemen Energi di Gedung dan Industri – Inovasi Khusus – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / Energy Management in Buildings and Industry – Special Innovations – Subroto Award for Energy Efficiency 2021	PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) UP Muara Tawar	28 September 2021 / September 28, 2021
	Manajemen Energi di Gedung dan Industri – Inovasi Khusus – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / Energy Management in Buildings and Industry – Special Innovations – Subroto Award for Energy Efficiency 2021	PT. Indonesia Power Semarang PGU	28 September 2021 / September 28, 2021
	Manajemen Energi di Gedung dan Industri – Inovasi Khusus – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / Energy Management in Buildings and Industry – Special Innovations – Subroto Award for Energy Efficiency 2021	PT. Indonesia Power Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU	28 September 2021 / September 28, 2021
	Manajemen Energi di Gedung dan Industri – Inovasi Khusus – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / Energy Management in Buildings and Industry – Special Innovations – Subroto Award for Energy Efficiency 2021	PT. Pembangkitan Jawa Bali UBJ&OM Rembang	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 1 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Seller untuk PLTU Non MT 100 – 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 1st Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Seller for Non MT PLTU 100 – 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 2 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Seller untuk PLTU Non MT 100 - 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 2nd Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Seller for Non MT PLTU 100 - 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 3 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Seller untuk PLTU Non MT 100 - 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 3rd Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Seller for Non MT PLTU 100 - 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT PJB	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 1 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Buyer untuk PLTU Non MT di atas 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 1st Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Buyer for Non MT PLTU above 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 2 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Buyer untuk PLTU Non MT di atas 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 2nd Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Buyer for Non MT PLTU above 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 1 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Seller untuk Buyer PLTU Non MT 100 – 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 1st Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Seller for Buyers of Non MT PLTU 100 – 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 2 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Seller untuk Buyer PLTU Non MT 100 – 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 2nd Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Seller for Buyers of Non MT PLTU 100 – 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT PJB	28 September 2021 / September 28, 2021
	Juara 3 Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik – Seller untuk Buyer PLTU Non MT 100 – 400 MW – Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021 / 3rd Place in Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector – Seller for Buyers of Non MT PLTU 100 – 400 MW – Subroto Award for Energy Efficiency in 2021	PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penyelenggara / *Organizer*	Nama Penghargaan / *Name of Award*	Penerima Penghargaan / *Awardee*	Tanggal Perolehan / *Date of Award*
Presiden RI / President of the Republic of Indonesia	Anugerah Satyalancana Pembangunan / Satyalancana Development Award	Mustofa Abdillah, Kepala Divisi Operasi Sistem dan Pengendalian Kontrak-2 PT PJB UP Paiton / Mustofa Abdillah, Head of System Operation and Contract Control Division-2 PT PJB UP Paiton	28 September 2021 / September 28, 2021
	Anugerah Satyalancana Wira Karya / Satyalancana Wira Karya Award	Andi Taufik Saputra, Supervisor Senior Life Cycle Management, Investasi dan Manajemen Risiko JPR OMU PT Indonesia Power / Andi Taufik Saputra, Senior Supervisor of Life Cycle Management, Investment and Risk Management JPR OMU PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021
	Anugerah Satyalancana Wira Karya / Satyalancana Wira Karya Award	Hendra Yudisaputro, Supervisor Senior Efisiensi, Kinerja, dan Sistem Informasi JPR OMU PT Indonesia Power / Hendra Yudisaputro, Senior Supervisor of Efficiency, Performance, and Information System JPR OMU PT Indonesia Power	28 September 2021 / September 28, 2021
Majalah TopBusiness	TOP GRC 2021 dengan level #5 Stars / TOP GRC 2021 with level #5 Stars	PT Indonesia Power	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	TOP Leader The Most Committed GRC Leader 2021	Direktur Utama PT Indonesia Power / President Director of PT Indonesia Power	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021	PT Indonesia Power	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	Special Appreciation on Applications to support GRC Implementation	PT Indonesia Power	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	TOP GRC 2021, level #4 Stars	PT PLN Batubara	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	TOP Leader The Most Committed GRC Leader 2021	Direktur Utama PT PLN Batubara / President Director of PT PLN Batubara	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
	Special Appreciation on Applications to support GRC Infrastructure	PT PLN Batubara	7 Oktober 2021 / October 7, 2021
Asian Power Awards	Power Utility of the Year Indonesia	PT PJB	4 November 2021 / November 4, 2021
	Geothermal Power Project of The Year – Silver	PT Indonesia Power	4 November 2021 / November 4, 2021
	Information Technology Project of The Year – Indonesia	PT Indonesia Power	4 November 2021 / November 4, 2021
	Power Plant Upgrade of The Year – Indonesia	PT Indonesia Power	4 November 2021 / November 4, 2021

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Sertifikasi • Certifications

Standar Sertifikasi yang Telah Disertifikasi di Unit Induk / Standard Certification at Parent Unit	Jumlah / *Total*	Keterangan / Description
Integrated Management System (IMS)	37	
SNI ISO 9001:2015 / ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu / Quality Management System (SMM)	37	
**Sistem Manajemen K3	PP No 50 Tahun 2012 (SMK3) /** OSH Management System	Government Regulation No. 50 of 2012 (SMK3)	39	
**Sistem Manajemen K3 /ISO 45001:2018 / OHS Management System	ISO 45001:2018** *Occupational Health and Safety Management Systems* (SMK3) / Occupational Health and Safety Management Systems (SMK3)	19	
SNI ISO 14001:2015 / ISO 14001 : 2004 Sistem Manajemen Lingkungan / Environmental Management System (SML)	127	
SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan / Anti Bribery Management System (SMAP)	49	
SNI ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset / Asset Management System (SMA/EAM)	5	
SNI ISO 50001:2012 Sistem Manajemen Energi / Energy Management System (SME)	1	
SNI ISO 17025 Akreditasi Laboratorium	*Testing and Calibration Laboratories* (LAB Pengujian dan Kalibrasi / *Testing and Callibration Laboratories*) / Laboratory Accreditation	Testing and Calibration Laboratories	2	
SNI ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System* (BCMS)	1	
SNI ISO 17065:2015 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) / SNI ISO 17065:2015 – Product Certification Institution	1	
SNI ISO 31000:2009 Sistem Manajemen Risiko / Risk Management System		*Guideline* Sistem Manajemen / Management System Guideline
SNI ISO 26000:2010 *Corporate Social Responsibility* (CSR)		*Guideline* Sistem Manajemen / Management System Guideline

01

Kilas Kinerja
Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(Dalam jutaan Rupiah / In millions of Rupiah)

	2017	2018	2019	2020*	2021
ASET / ASSETS					
ASET TIDAK LANCAR / NON-CURRENT ASSETS					
Aset tetap / Property, plant, and equipment	1.204.568.429	1.336.478.233	1.400.685.118	1.401.888.487	1.427.058.358
Aset hak-guna / Right-of-use assets	-	-	-	31.193.985	29.762.537
Properti investasi / Investment properties	4.723.070	5.125.448	5.283.708	5.408.572	5.451.410
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama / Investment in associates and joint venture	6.878.498	8.726.339	10.300.765	14.112.585	17.810.839
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes	-	-	-	8.898.076	17.112.377
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	9.566.473	7.578.386	2.215.963	195.289	264.705
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	237.181	1.031.237	951.643	1.309.326	1.160.081
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	7.487.709	5.688.712	5.980.703	5.882.934	4.861.882
Piutang lain-lain / Other receivables	634.949	961.377	824.545	886.052	1.145.976
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	-	-	-	17.275.490	18.254.891
Aset tidak lancar lain / Other non-current assets	7.064.097	13.482.762	7.445.895	4.635.419	4.422.025
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	**1.241.160.406**	**1.379.072.494**	**1.433.688.340**	**1.491.686.215**	**1.527.305.081**
ASET LANCAR / CURRENT ASSETS					
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	42.291.959	33.294.560	46.598.783	54.735.434	37.968.399
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	-	-	-	-	206.279
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	286.697	1.216.886	334.153	366.708	297.720
Piutang usaha / Trade receivables	22.466.843	23.802.663	25.130.538	21.278.416	23.802.386
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	-	-	45.426.981	819.067	8.300.000
Piutang subsidi listrik / Receivables on electricity subsidy	7.588.977	-	-	-	-
Piutang lain-lain / Other receivables	1.672.237	9.507.768	2.024.103	1.746.344	1.249.618
Piutang kompensasi / Compensation receivables	-	23.173.464	-	-	-
Persediaan / Inventories	12.828.118	15.506.567	12.934.233	10.277.289	10.393.419
Pajak dibayar dimuka / Prepaid taxes	4.997.393	5.894.120	17.634.137	7.287.693	2.701.520
Biaya dibayar dimuka dan uang muka / Prepaid expenses and advances	1.629.609	1.007.572	1.206.785	640.881	808.968
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	5.294	5.954	4.719	76.673	183.066
Aset lancar lain / Other current assets	30.124	5.697	72.241	-	-
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	**93.797.251**	**113.415.251**	**151.366.673**	**97.228.505**	**85.911.375**
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	**1.334.957.657**	**1.492.487.745**	**1.585.055.013**	**1.588.914.720**	**1.613.216.456**

*) Direklasifikasikan kembali / Reclassified

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

	2017	2018	2019	2020*	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS / LIABILITIES AND EQUITY					
EKUITAS / EQUITY					
Modal saham / Capital stock	109.826.526	109.826.526	115.181.002	135.342.182	135.460.886
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham / Stock subscription from Government in issuance process	-	-	10.528.230	-	10.075.210
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	20.871.265	20.179.333	9.919.958	5.216.571	34.608
Saldo laba / Retained earnings	119.758.355	131.017.926	131.332.627	136.585.580	149.619.244
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	618.462.276	665.849.322	661.509.952	661.734.097	685.408.045
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owners of the parent	868.918.422	926.873.107	928.471.769	938.878.430	980.597.993
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	498.182	540.750	908.644	934.162	1.009.130
Jumlah Ekuitas / Total Equity	**869.416.604**	**927.413.857**	**929.380.413**	**939.812.592**	**981.607.123**
LIABILITAS JANGKA PANJANG / NON-CURRENT LIABILITIES					
Liabilitas pajak tangguhan / Deferred tax liabilities	2.066.364	13.420.136	28.121.540	31.746.600	43.696.222
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun / Long-term liabilities – net of current portion					
Penerusan pinjaman / Two-step loans	31.485.476	36.105.279	35.251.741	35.501.803	31.778.793
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	6.309.173	5.343.629	4.359.569	3.649.146	2.927.754
Utang sewa / Lease liabilities	15.713.269	14.468.336	11.569.377	14.035.913	10.471.903
Utang bank / Bank loans	116.017.364	152.965.997	184.023.820	154.489.751	139.045.012
Utang obligasi dan sukuk ijarah / Bonds payable and sukuk ijara	100.440.360	131.681.821	174.292.298	192.850.308	187.734.643
Utang listrik swasta / Electricity purchase payable	7.026.434	7.115.916	6.431.448	6.097.857	5.711.211
Utang KIK – EBA / KIK – EBA loans	2.907.986	2.221.167	1.354.642	655.772	-
Utang pihak berelasi / Payable to related parties	794	1.000	92	9.432	-
Utang lain-lain / Other payables	940.153	94.427	133.662	182.093	466.379
Pendapatan ditangguhkan / Deferred revenue	-	-	-	5.644.472	13.271.056
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefits liabilities	43.559.022	43.760.226	50.838.258	54.609.453	48.087.727
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	**326.466.395**	**407.177.934**	**496.376.447**	**499.472.600**	**485.070.853**
LIABILITAS JANGKA PENDEK / CURRENT LIABILITIES					
Utang usaha / Trade payables	43.711.425	48.607.674	52.002.783	39.148.555	47.904.756
Utang pajak / Taxes payable	2.387.864	2.560.128	2.383.288	1.747.279	1.998.768
Biaya masih harus dibayar / Accrued expenses	11.477.437	14.809.018	11.043.469	6.990.380	6.528.616
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / Short-term employee benefits liabilities	8.562.927	5.873.558	10.943.638	8.959.711	10.320.993
Uang jaminan langganan / Customer's security deposits	12.642.333	13.465.735	14.235.879	14.802.396	15.584.069
Utang biaya proyek / Project cost payables	723.992	315.828	150.664	153.983	114.546

*) Direklasifikasikan kembali / Reclassified

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

	2017	2018	2019	2020*	2021
Pendapatan ditangguhkan / Deferred revenue	1.218.400	929.947	1.049.231	1.617.725	740.906
Liabilitas derivative / Derivative liabilities	-	-	-	327.544	107.271
Utang jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun / Current maturities of long-term liabilities					
Penerusan pinjaman / Two-step loans	2.735.992	2.530.273	2.725.805	3.033.168	2.920.412
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	1.043.793	1.860.649	1.998.476	2.416.967	1.960.686
Utang sewa / Lease liabilities	4.871.908	2.624.629	2.540.107	4.450.390	4.570.040
Utang bank / Bank loans	26.548.747	28.145.737	21.693.338	18.816.957	26.841.397
Utang obligasi dan sukuk ijarah / Bonds payable and sukuk ijara	914.000	2.120.612	6.946.478	14.970.000	5.420.392
Utang listrik swasta / Electricity purchase payable	349.968	394.403	399.458	427.974	457.545
Utang KIK – EBA / KIK – EBA loans	630.600	686.819	586.620	871.177	569.578
Utang lain-lain / Other payables	21.255.272	32.970.944	30.598.919	30.895.322	20.498.505
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	**139.074.658**	**157.895.954**	**159.298.153**	**149.629.528**	**146.538.480**
JUMLAH LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES	**465.541.053**	**565.073.888**	**655.674.600**	**649.102.128**	**631.609.333**
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	**1.334.957.657**	**1.492.487.745**	**1.585.055.013**	**1.588.914.720**	**1.613.216.456**

*) Direklasifikasikan kembali / Reclassified

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Dalam jutaan Rupiah / In millions of Rupiah)

	2017	2018	2019	2020*	2021
PENDAPATAN USAHA / *REVENUE*					
Penjualan tenaga listrik / Sales of electricity	246.586.856	263.477.551	276.061.925	274.898.464	288.862.726
Penyambungan pelanggan / Customer connection fees	7.113.454	7.309.172	6.934.597	312.725	493.437
Subsidi listrik Pemerintah / Government electricity subsidy			51.711.774	47.988.114	49.796.949
Pendapatan kompensasi / Compensation income			22.253.517	17.904.508	24.594.425
Lain-lain / Others	1.594.933	2.111.019	2.644.067	4.311.826	4.426.733
Jumlah Pendapatan Usaha / Total Revenue	**255.295.243**	**272.897.742**	**359.605.880**	**345.415.637**	**368.174.270**
BEBAN USAHA / *OPERATING EXPENSES*					
Bahan bakar dan pelumas / Fuel and lubricants	116.947.824	137.266.678	136.084.482	106.014.285	118.419.490
Pembelian tenaga listrik / Purchased electricity	72.426.641	84.267.611	83.563.991	96.250.367	103.553.472
Sewa / Leases	6.592.161	4.272.082	3.617.376	5.502.571	4.772.014
Pemeliharaan / Maintenance	19.515.606	20.737.601	22.328.178	21.940.509	22.600.774
Kepegawaian / Personnel	23.124.511	22.950.087	25.908.771	24.965.707	25.092.756
Penyusutan aset tetap / Property, plant, and equipment depreciation	29.160.597	30.744.712	35.318.071	36.662.917	38.327.468
Penyusutan aset hak-guna / Right-of-use assets depreciation	-	-	-	2.479.663	3.113.803
Lain-lain / Others	7.706.754	7.950.118	8.620.069	7.192.146	7.239.348
Jumlah Beban Usaha / Total Operating Expenses	**275.474.094**	**308.188.889**	**315.440.938**	**301.008.165**	**323.119.125**
LABA (RUGI) USAHA / OPERATING PROFIT (LOSS)	**(20.178.851)**	**(35.291.147)**	**44.164.942**	**44.407.472**	**45.055.145**

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

	2017	2018	2019	2020*	2021
Subsidi listrik Pemerintah / Government electricity subsidy	45.738.215	48.101.754	-	-	-
Pendapatan kompensasi / Compensation income	-	23.173.464	-	-	-
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI / OPERATING PROFIT AFTER SUBSIDY	**25.559.364**	**35.984.071**	**44.164.942**	**44.407.472**	**45.055.145**
Penghasilan/(beban) lain-lain – bersih / Other income/(expenses) – net	3.409.941	15.663.363	(3.667.666)	1.916.966	(4.921.682)
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing – bersih / (Loss)/gain on foreign exchange – net	(2.935.144)	(10.926.741)	9.486.326	(7.742.152)	2.676.145
Penghasilan keuangan / Finance income	1.066.842	804.321	755.103	1.125.519	787.231
Beban keuangan / Finance costs	(18.556.931)	(21.624.176)	(24.619.495)	(27.415.886)	(20.375.755)
LABA SEBELUM PAJAK / PROFIT BEFORE TAX	**8.544.072**	**19.900.838**	**26.119.210**	**12.291.919**	**23.221.084**
BEBAN PAJAK / INCOME TAX EXPENSE	**(4.115.955)**	**(8.325.082)**	**(21.797.080)**	**(6.298.491)**	**(10.046.207)**
LABA TAHUN BERJALAN / PROFIT FOR THE YEAR	**4.428.117**	**11.575.756**	**4.322.130**	**5.993.428**	**13.174.877**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak / Other comprehensive income for the year after tax	(10.697.667)	47.387.046	(4.295.591)	308.766	24.007.703
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	**(6.269.550)**	**58.962.802**	**26.539**	**6.302.194**	**37.182.580**
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: / Income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	4.410.210	11.568.286	4.270.922	5.950.884	13.128.626
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	17.907	7.470	51.208	42.544	46.251
Jumlah / Total	**4.428.117**	**11.575.756**	**4.322.130**	**5.993.428**	**13.174.877**
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: / Total comprehensive income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	(6.287.457)	58.955.332	(24.669)	6.259.650	37.107.612
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests	17.907	7.470	51.208	42.544	74.968
Jumlah / Total	**(6.269.550)**	**58.962.802**	**26.539**	**6.302.194**	**37.182.580**
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (dalam Rupiah penuh) / EARNINGS PER SHARE BASIC/DILUTED (in Rupiah full amount)	**50.541**	**105.332**	**37.516**	**48.439**	**96.972**

*) Direklasifikasikan kembali / Reclassified

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(Dalam jutaan Rupiah / In millions of Rupiah)

	2017	2018	2019	2020*	2021
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi / Net cash provided by operating activities	56.843.655	35.042.025	39.682.505	91.609.951	68.621.074
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi / Net cash used in investing activities	(87.108.235)	(100.155.597)	(100.981.652)	(69.015.717)	(59.552.028)
Kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas pendanaan / Net cash (used in)/provided by financing activities	30.609.689	55.638.471	75.002.591	(14.664.905)	(25.880.660)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas / Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents	345.109	(9.475.101)	13.703.444	7.974.329	(16.811.614)
Kas dan setara kas awal tahun / Cash and cash equivalents at beginning of the year	41.909.223	42.291.959	33.294.560	46.598.783	54.735.434
Kas dan setara kas akhir tahun / Cash and cash equivalents at end of the year	42.291.959	33.294.560	46.598.783	54.735.434	37.968.399

*) Direklasifikasikan kembali / Reclassified

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

RASIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIOS

	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Solvabilitas (%) / *Solvency Ratio (%)*					
Total Liabilitas terhadap Aset / Debt to Asset Ratio	34,87	37,86	41,37	40,86	39,15
Total Liabilitas terhadap Ekuitas / Liability to Equity Ratio	53,55	60,93	70,55	69,08	64,34
Debt to equity ratio	36,46	41,78	48,77	47,95	42,71
EBITDA to interest expense	305,0	315,5	331,7	316,2	437,6
Rasio Likuiditas (%) / *Liquidity Ratio (%)*					
Rasio Lancar / Current Ratio	67,44	71,83	95,02	64,98	58,63
Rasio Kas / Cash Ratio	30,62	21,86	29,46	36,83	26,11
Rasio Rentabilitas (%) / *Rentability Ratio (%)*					
Rasio Laba terhadap Ekuitas / Net Return on Equity	0,51	1,25	0,47	0,64	1,34
Rasio Laba terhadap Aset / Net Return on Investment	0,33	0,78	0,27	0,38	0,82
Rasio Profitabilitas (%) / *Profitability Ratio (%)*					
Margin Laba Usaha / Operating Profit Margin	8,49	10,46	12,28	12,86	12,24
Margin Laba Bersih / Net Profit Margin	1,47	3,36	1,20	1,74	3,58
EBITDA Margin	18,80	19,82	22,71	25,10	24,22
Rasio Operasional (x) / *Operational Ratio (x)*					
Perputaran Piutang Usaha / Receivable Turnover	11,16	11,39	11,28	11,85	12,82
Collection Period (Hari / Days)	32,70	32,05	32,35	30,89	28,48
Perputaran Aset Tetap / Fixed Asset Turnover	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pembangkit (unit) */ Total power plants (unit)*	6.221	6.545	6.723	6.677	6.760
Kapasitas terpasang (MW)* / Installed capacity (MW)*	55.926	57.822	62.833	63.336	64.553
Jumlah Pelanggan (Juta) / Number of Customer (Mio)	68.068.283	71.917.397	75.705.614	79.000.033	82.543.980
Produksi Listrik (GWh) / Electricity Production (GWh)	254.660	267.085	278.941	274.851	289.471
Daya mampu (MW) / Power capacity (MW)	49.611	51.343	58.506	52.263	57.679
Panjang jaringan transmisi (kms) / Length of transmission network (kms)	48.901	53.278	58.959	61.334	64.807
Panjang jaringan distribusi (kms) / Length of distribution network (kms)	1.028.679	953.460	979.855	1.006.265	1.022.124
Penjualan tenaga listrik (GWh) / Sales of electricity (GWh)	223.134	234.618	245.518	243.583	257.634
Susut jaringan (%) / Network losses (%)	9,72	9,51	9,32	9,15	8,59
Rasio elektrifikasi (%) / Electrification ratio (%)	95,35	98,30	98,89	99,20	99,45

* = termasuk pembangkit milik PLN, sewa dan IPP

* = including PLN's own generators, leased, and IPP

Ikhtisar Kinerja Lainnya
Other Performance Highlights

	2017	2018	2019	2020	2021
Survei kepuasan pelanggan / Customer satisfaction survey	88,52%	89,16%	91,09%	90,75%	95,17%
Biaya *Training* (Rp Miliar) / Training Cost (Rp Billion)	605,1	445,2	553,5	255,9	182,0
Good Corporate Governance (GCG) Assessment					
• Skor / Score	87,14	87,40	88,11	89,56	90,46
• Kategori / Category	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent
Tingkat Kesehatan Perusahaan / *Corporate Soundness Level*					
• Skor KPI Korporat / Corporate KPI Score	96,61	96,53	96,41	103,46	107,49
• Kategori / Category	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA

Ikhtisar Infrastruktur Ketenagalistrikan
Electricity Infrastructure Highlights

ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

Program Transformasi EBT

Saat ini PLN sedang melakukan transformasi dalam rangka menjawab tantangan kedepan, terdapat 4 (empat) fokus utama dalam strategi transformasi, yaitu:

NEW AND RENEWABLE ENERGY (NRE)

NRE Transformation Program

Currently, PLN is making transformation to address future challenges. There are 4 (four) main focuses in the transformation strategy:

Green	Meningkatkan kapasitas pembangkitan dengan fokus pada EBT, untuk mendukung tercapainya pengadaan listrik yang lebih ramah lingkungan. Pada sasaran *Green* ditetapkan tiga *breakthrough*, yaitu Implementasi RJPP EBT 2019-2024, *Launch* "Green Booster", dan *Launch* "*Large Scale Renewables*". / Increasing generation capacity by focusing on NRE to support the realization of more environmentally friendly electricity supply. The green target sets out three breakthroughs, namely 2019-2024 NRE RJPP, "Green Booster" Launch, and "Large Scale Renewables" Launch.
Innovative	Menciptakan model bisnis inovatif dalam ekosistem ketenagalistrikan yang memberikan kontribusi terhadap *revenue* PLN, di luar penjualan kWh. / Creating an innovative business model in an electricity ecosystem that contributes to the revenue of PLN outside kWh sales.
Customer-focused	Memberikan kepuasan dan pengalaman lebih baik untuk para pelanggan PLN. / Delivering satisfaction and better experience for PLN's customers.
Lean	Memastikan pengadaan listrik yang handal dan efisien. / Ensuring reliable and efficient electricity supply.

Dalam Pilar Transformasi *Green*, terdapat 3 program utama, yaitu:

In the Green Transformation Pillar, there are 3 main programs, namely:

1.
Implementasi program RJPP 2019-2024 (target COD maksimum di 2024).
2019-2024 RJPP program implementation (COD target by 2024 at maximum).

2.
Program *Green Booster* antara lain Program *Co-firing*, pelaksanaan konversi PLTD ke pembangkit EBT.
Green Booster program, including co-firing program, implementation of PLTD conversion to NRE power plant.

3.
Pengembangan pembangkit EBT lainnya a.l PLTP, PLTA, PLTS, PLTB dll. (ditargetkan COD 2025).
Development of other NRE power plants, such as PLTP, PLTA, PLTS, PLTB, etc. (COD target by 2025).

Dalam strategi *objective* tersebut, peran EBT untuk fokus pada energi bersih dan ramah lingkungan menjadi tantangan dalam perkembangan PLN. Untuk itu didukung pula dengan *strategic initiative* yang menjadi target Korporat, yaitu:

In this strategic objective, the role of NRE to focus on clean and environmentally friendly energy becomes a challenge in PLN's development. To that end, it is supported by strategic initiatives that serve as the corporate targets, namely:

1. Implementasi *Co-firing* biomassa pada pembangkit PLTU PLN sebesar 100 MW di tahun 2021. / Implementation of biomass co-firing in PLN PLTU 100 MW in 2021.
2. Kerja sama kemitraan strategis dengan BUMN untuk menjaga ketersediaan dan keekonomian pasokan biomasa untuk program *Co-firing*. / Strategic partnership cooperation with SOEs to secure the availability and economic value of biomass supply for co-firing program.
3. Program Konversi PLTD ke Pembangkit EBT tahap 1 dengan 200 lokasi sebesar 250 MW. / Conversion program from PLTD to NRE power plants phase 1 in 200 locations at 250 MW.
4. Penambahan kapasitas pembangkit Energi Baru dan Terbarukan yang ditargetkan beroperasi dengan target di tahun 2021 sebesar 475 MW. Target COD PLT EBT Tahun 2021 adalah 26 lokasi dengan total kapasitas sebesar 475 MW, yang terdiri dari: / Capacity increase of new and renewable energy power plants which are targeted to operate in 2021 at 475 MW. The NRE power plant COD target in 2021 is in 26 locations with total capacity of 475 MW, consisting of:
   a. 3 PLTA dengan total kapasitas 295 MW; / 3 PLTA with total capacity of 295 MW;
   b. 20 PLTM dengan toal kapasitas 121,3 MW; / 20 PLTM with total capacity of 121.3 MW;
   c. 2 PLTP dengan total kapasitas 50 MW; / 2 PLTP with total capacity of 50 MW;
   d. 1 PLTSa dengan total kapasitas 9 MW. / 1 PLTSa with total capacity of 9 MW;
5. Penyelesaian dokumen perencanaan seperti *Feasibility Study* proyek, dokumen perencanaan pengadaaan dan dokumen pengadaan Konsultan untuk kelanjutan proyek. / The completion of planning documents, such as project feasibility study, procurement planning documents, and consultant procurement documents for project continuity.

Progress Transformasi EBT

Realisasi dari *strategic inisiative* terkait EBT sampai dengan Desember 2021 yaitu :

1. Implementasi *Co-firing* sebanyak 26 lokasi dengan realisasi energi *Co-firing* sebesar 215,7 GWh atau setara dengan penggunaan biomasa sebesar 232,2 ribu ton. Adapun 26 lokasi PLTU yang telah beroperasi dengan *Co-firing*, yaitu:

(1) PLTU Paiton	(8) PLTU Rembang	(15) PLTU Adipala	(22) PLTU Kendari
(2) PLTU Pacitan	(9) PLTU Labuan	(16) PLTU Tj Awar-awar	(23) PLTU Asam-asam
(3) PLTU Jeranjang	(10) PLTU Lontar	(17) PLTU Indramayu	(24) PLTU Sintang
(4) PLTU Suralaya	(11) PLTU Suralaya 5-7	(18) PLTU Kupang Baru	(25) PLTU Pulang Pisau
(5) PLTU Ketapang	(12) PLTU Paiton 9	(19) PLTU Bukit Asam	(26) PLTU Nagan Raya
(6) PLTU Sanggau	(13) PLTU Pelabuhan Ratu	(20) PLTU Ropa Ende	
(7) PLTU Anggrek	(14) PLTU Barru	(21) PLTU Suralaya 8	

Untuk target penyelesaian uji coba *Co-firing* PLTU tahun 2021 sebanyak 17 PLTU, dan telah terealisasi sebanyak 16 PLTU (termasuk tambahan 1 lokasi), yaitu:

(1) PLTU Tarahan Baru/ Sebalang	(6) PLTU Tanjung Awar-Awar	(10) PLTU Ombilin	(14) PLTU Tanjung Balai Karimun
(2) PLTU Tidore	(7) PLTU Tanjung Jati B Unit 3-4	(11) PLTU Berau	(15) PLTU Labuhan Angin
(3) PLTU Asam-Asam Unit 1 - 4	(8) PLTU Bangka Baru/Air Anyir	(12) PLTU Suralaya-8	(16) PLTU Sumbawa Barat
(4) PLTU Pangkalan Susu	(9) PLTU Teluk Sirih	(13) PLTU Amurang	(17) PLTU Tanjung Jati B Unit 1-2
(5) PLTU Punagaya			

2. Kerja sama kemitraan strategis dengan BUMN untuk menjaga ketersediaan dan keekonomian pasokan biomasa untuk program *Co-firing*. Saat ini telah dilakukan finalisasi pembahasan dengan pihak PSE UGM bersama dengan Perhutani dan PTPN untuk menyusun studi ketersediaan biomassa dan keekonomian ketersediaan pasokan biomassa untuk implementasi *Co-firing*.

NRE Transformation Progress

The realization of NRE strategic initiatives until December 2021 is as follows:

1. Co-firing implementation in 26 locations with co-firing energy realization at 215.7 GWh or equivalent to the use of 232.2 thousand tons of biomass. The 26 PLTU locations which have operated through co-firing are as follows:

The target for PLTU co-firing trial completion in 2021 was 17 PLTU and realized at 16 PLTU (including 1 additional location) as follows:

2. Strategic partnership cooperation with SOEs to secure the availability and economic value of biomass supply for co-firing program. Finalization discussions with PSE UGM have been conducted with Perhutani and PTPN to prepare study on biomass availability and economic value of biomass supply for co-firing implementation.

3. Program Konversi PLTD ke Pembangkit EBT akan dilakukan secara bertahap, tahap 1 sebesar 250 MW di 200 lokasi. Dari 200 lokasi tersebut, terdapat tujuh belas (17) lokasi yang dikeluarkan dari rencana pengadaan. Akan dilakukan evaluasi kembali atas pilihan teknologi yang memberikan keekonomian yang layak sehingga untuk tahap I akan dilakukan pada 183 lokasi yang akan diklusterisasi dan diproses secara bertahap.

3. Conversion program from PLTD to NRE power plants will be carried out in stages, phase 1 at 250 MW in 200 locations. Out of 200 locations, 17 (seventeen) locations were removed from the procurement plan. The choice of technology will be reevaluated to provide fair economic value, so that the phase 1 will cover 183 locations which will be clustered and processed gradually.

4. Pembangkit EBT telah COD sampai dengan Desember 2021 sebesar 622,98 MW yang tersebar pada 24 lokasi, terdiri dari:

4. NRE power plants entering COD until December 2021 were at 622.98 MW spreading across 24 locations, namely:

(1) PLTM Cikaso-3 sebesar 10 MW / / PLTM Cikaso-3 10 MW	(7) PLTM Kumbi Sedau 0,9 MW	(13) PLTBg Pasir Mandoge 2,04 MW	(19) PLTM Cikaengan-2 7,32 MW
(2) PLTM Cibuni Mandiri 2 MW	(8) PLTM Gunung Wugul 3,33 MW	(14) PLTM Induring 2 MW	(20) PLTM Lambur 4,16 MW
(3) PLTSa Benowo 12 MW	(9) PLTM Parmonangan-2 11 MW	(15) PLTA Poso 260 MW	(21) PLTM Tunggang 9,96 MW
(4) PLTM Cikandang 6 MW	(10) PLTP Sorik Merapi 56,95 MW	(16) PLTM Lae Kombih-3 sebesar 11,2 MW	(22) PLTM Padang Guci-2 7,82 MW)
(5) PLTM Lawe Sikap 7,8 MW	(11) PLTM Pelangai Hulu 9,8 MW	(17) PLTM Siamang Bunyi 2 MW	(23) PLTBg Arung Dalam 2,4 MW
(6) PLTM Cibanteng 4,4 MW	(12) PLTA Malea 90 MW	(18) PLTM Ciherang 1,5 MW	(24) PLTP Rantau Dedap 98,4 MW

5. Penyelesaian dokumen perencanaan EBT, yaitu:
   a. *Feasibility Study* proyek, sebanyak 21 dokumen yaitu (1) FS PLTA Sawangan, (2) FS FS PLTM Kukusan-2 (3) FS PLTM Sukarame, (4) FS PLTM Jatibarang, (5) FS PLTM Gerak Serayu, (6) FS PLTS Tanjung, (7) FS PLTB Pandeglang, (8) FS PLTA Nua, (9) FS PLTP Dieng Small Scale Binary, (10) FS PLTP Lahendong Small Scale Binary, (11) FS PLTS Koba, (12) FS PLTS Jatim, (13) FS PLTBio Halmahera, (14) FS PLTBio Malinau, (15) FS SRF Payakumbuh, (16) FS PLTS Batu Goyang dan Wat Masa, (17) FS PLTS Kalbar, (18) FS PLTA Maiting Hulu-2, (19) FS PLTB Sukabumi, (20) FS PLTM Pantan Cuaca, (21) FS PLTM Totabuan
   b. *Bidding Document* maupun *draft Bidding Document* selesai sebesar 37 dokumen yaitu PLTA Kumbih 3 (Pekerjaan Sipil), PLTA Kumbih 3 (Pekerjaan E&M), PLTA Asahan III, PLTM Jawa Bali 15 MW, PLTM Jawa Bali 16,7 MW, PLTM Sulbagut 8,3 MW, PLTM Sulbagsel 7,4 MW, PLTM Sulbagsel 20 MW, PLTM Lombok 1,8 MW, PLTA Kalseltengtimra 200 MW, PLTS Flores 30 MW, PLTB Sumbawa-Bima 10 MW, PLTB Kalbar 30 MW, PLTB Timor 22 MW, PLTBio Bangka 5 MW, PLTBio Belitung 6 MW, PLTBio Bangka 2 MW, PLTBio Sinabang 3 MW, PLTBm Kalseltengtimra 10 MW, PLTBg Khatulistiwa Kalbar 2 MW, PLTBg Khatulistiwa Kalbar 7 MW, PLTBio Khatulistiwa Kalbar 10 MW, PLTBm Khatulistiwa Kalbar 5 MW, PLTBg Air Upas

5. The completion of NRE planning documents, namely:
   a. Project Feasibility Study amounting to 21 documents, namely (1) FS PLTA Sawangan, (2) FS FS PLTM Kukusan-2 (3) FS PLTM Sukarame, (4) FS PLTM Jatibarang, (5) FS PLTM Gerak Serayu, (6) FS PLTS Tanjung, (7) FS PLTB Pandeglang, (8) FS PLTA Nua, (9) FS PLTP Dieng Small Scale Binary, (10) FS PLTP lahendong Small Scale Binary, (11) FS PLTS Koba, (12) FS PLTS Jatim, (13) FS PLTBio Halmahera, (14) FS PLTBio Malinau, (15) FS SRF Payakumbuh, (16) FS PLTS Batu Goyang dan Wat Masa, (17) FS PLTS Kalbar, (18) FS PLTA Maiting Hulu-2, (19) FS PLTB Sukabumi, (20) FS PLTM Pantan Cuaca, (21) FS PLTM Totabuan
   b. Bidding Document or draft of Bidding Document amounting to 37 documents, namely PLTA Kumbih 3 (Civil Work), PLTA Kumbih 3 (E&M Work), PLTA Asahan III, PLTM Jawa Bali 15 MW, PLTM Jawa Bali 16,7 MW, PLTM Sulbagut 8,3 MW, PLTM Sulbagsel 7,4 MW, PLTM Sulbagsel 20 MW, PLTM Lombok 1,8 MW, PLTA Kalseltengtimra 200 MW, PLTS Flores 30 MW, PLTB Sumbawa-Bima 10 MW, PLTB Kalbar 30 MW, PLTB Timor 22 MW, PLTBio Bangka 5 MW, PLTBio Belitung 6 MW, PLTBio Bangka 2 MW, PLTBio Sinabang 3 MW, PLTBm Kalseltengtimra 10 MW, PLTBg Khatulistiwa Kalbar 2 MW, PLTBg Khatulistiwa Kalbar 7 MW, PLTBio Khatulistiwa Kalbar 10 MW, PLTBm Khatulistiwa Kalbar 5 MW, PLTBg Air Upas

2 MW, PLTBg Kendawangan 2,5 MW, PLTBg Nanga Tayap 2,5 MW, PLTBg Sei Melayu 2,5 MW, PLTBio Seram 6 MW, PLTBui Sanana-2 10 MW, PLTBm Halmahera 10 MW, PLTB IPP Jabar 100 MW, PLTB IPP Jateng 60 MW, PLTS IPP Jabar 50 MWac, PLTS IPP Jateng 50 MWac dan RFP Program Konversi PLTD ke EBT Tahap 1 IPP Pilot Project (PLTS + BESS)

c. Acuan Pengadaan EBT sebanyak 9 dokumen yaitu dokumen *Due Diligence* PLTA PLTM PUPR, dokumen *draft* PJBL PLTA PLTM PUPR, RFP PLTS, draft PPA PLTS, RFP PLTB, *draft* PPA PLTB, dokumen Penyusunan FS Hidro PLN, dan acuan DPT PV Module.

2 MW, PLTBg Kendawangan 2,5 MW, PLTBg Nanga Tayap 2,5 MW, PLTBg Sei Melayu 2,5 MW, PLTBio Seram 6 MW, PLTBui Sanana-2 10 MW, PLTBm Halmahera 10 MW, PLTB IPP Jabar 100 MW, PLTB IPP Jateng 60 MW, PLTS IPP Jabar 50 MWac, PLTS IPP Jateng 50 MWac and RFP Conversion Program from PLTD to NRE phase 1 IPP Pilot Project (PLTS + BESS)

c. NRE procurement reference amounting to 9 documents, namely Due Diligence PLTA PLTM PUPR, draft PJBL PLTA PLTM PUPR, RFP PLTS, draft of PPA PLTS, RFP PLTB, draft of PPA PLTB, preparation document of FS Hidro PLN, and reference of DPT PV Module.

Pengembangan Solar PV

Rencana pengembangan PV Berdasarkan RUPTL 2021 – 2030

Adapun rencana pengembangan solar PV berdasarkan RUPTL 2021-2030 adalah sebesar 4.680 MW atau sebesar 22,36% dari total pembangkit EBT yang akan dikembangkan sampai dengan Tahun 2030, dapat dilihat pada tabel berikut:

Solar PV Development

PV development plan based on 2021-2030 RUPTL

The solar PV development plan based on 2021-2030 RUPTL amounting to 4,680 MW or 22.36% of total NRE power plants to be developed until 2030 is described in the following table:

No.	Pembangkit - EBT / *Power Plant – NRE*	Satuan / *Unit*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah / *Total*
1.	PLTP	MW	136	108	190	141	870	290	123	450	240	808	**3.355**
2.	PLTA	MW	400	53	132	87	2.478	327	456	1.611	1.778	1.950	**9.272**
3.	PLTM	MW	144	154	277	289	189	43	-	2	13	6	**1.118**
4.	PLT Surya	MWp	60	287	1.308	624	1.631	127	148	165	172	157	**4.680**
5.	PLT Bayu	MW	-	2	33	337	155	70	-	-	-	-	**597**
6.	PLT Biomassa/ Sampah / PLT biomass/waste	MW	12	43	88	191	221	20	-	15	-	-	**590**
7.	PLT EBT *Base*	MW	-	-	-	-	-	100	265	215	280	150	**1.010**
8.	PLT EBT *Peaker*	MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	**300**
	Jumlah / Total	**MW**	**752**	**648**	**2.028**	**1.670**	**5.544**	**979**	**991**	**2.458**	**2.484**	**3.370**	**20.923**

Pengembangan PLTS yang sedang berlangsung

Komitmen PLN adalah mendukung program Pemerintah untuk peningkatan bauran EBT 23% di tahun 2025. PLN telah menandatangani PPA untuk Proyek IPP PLTS Terapung di Waduk Cirata Kapasitas 145 MWac pada tanggal 12 Januari 2020, dengan tarif yang disepakati sebesar 5,8179 cUSD/kWh, dengan pengembang PT Pembangkit Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE) yang merupakan *Joint Venture* antara PT PJBI dan Anak Usaha Mubadala Investment Company, Masdar (UEA). Progress pembangunan PLTS Cirata sudah mencapai 14,17%, saat ini sedang proses *engineering design*, pembuatan *access road*, *site leveling* dan manufaktur peralatan.

Ongoing PLTS development

PLN is committed to supporting the Government's program to increase the NRE mix by 23% in 2025. PLN has signed PPA for the Floating PLTS IPP Project in the Cirata Reservoir with a Capacity of 145 MWac on January 12, 2020, with an agreed tariff of 5.8179 cUSD/kWh, with the developer PT Pembangkit Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE), which is a Joint Venture between PT PJBI and a subsidiary Mubadala Investment Company, Masdar (UAE). The progress of the Cirata PLTS development has reached 14.17%. Currently ongoing processes are engineering design, developing access roads, site leveling, and equipment manufacturing.

Selain pengembangan PLTS Terapung 145 MW di Waduk Cirata tersebut, pada Desember 2020 PT PLN (Persero) telah menerbitkan LoI kepada pengembang Konsorsium Medco Power dan Solar Philippines untuk PLTS di Bali Barat 25 MWp dan Bali Timur 25 MWp, yang saat ini masih tahap finalisasi PPA. Persetujuan harga dari MESDM telah terbit, dengan tarif untuk PLTS Bali Barat 25 MWp sebesar 5,9248 cUSD/kWh dan PLTS Bali Timur 25 MWp sebesar 5,5922 cUSD/kWh.

Rencana Pengembangan Proyek PLTS

1. Program Konversi PLTD ke EBT

   PLN memiliki PLTD tersebar di 2.130 lokasi, dengan pemakaian BBM tahun 2020 sebesar Rp. 15 triliun. Dalam rangka pengurangan pemakaian BBM tersebut akan dilaksanakan program konversi PLTD secara bertahap, dengan 3 model yaitu:

   a) Konversi PLTD ke pembangkit EBT, dengan menggunakan teknologi PLTS dan BESS (*Battery Energy Storage System*) antara lain skema *hybrid* PLTD dengan baterai di sistem *isolated* yang tidak dimungkinkan pembangunan transmisi untuk interkoneksi ke *grid*;
   b) Gasifikasi dan pembangunan pembangkit gas.
   c) Interkoneksi sistem *isolated* ke *grid*.

   Sebagai tindak lanjut atas RUPTL 2021-2030, program Konversi PLTD ke Pembangkit EBT ("Dedieselisasi") akan dilaksanakan bertahap dengan skema IPP sebagaimana tertuang dalam RUPTL, sehingga akan dilaksanakan pengadaan Pembelian Tenaga Listrik IPP.

   Program Konversi PLTD ke Pembangkit Berbasis EBT (Dedieselisasi) dilaksanakan dengan tujuan menurunkan BPP PLTD *existing*, dengan manfaat: (i) mengurangi pemakaian BBM (ii) menurunkan emisi CO2 serta (iii) meningkatkan bauran EBT.

   Mengingat jumlah lokasi banyak dan tersebar, diperlukan persiapan lebih dini Program Dedieselisasi yaitu sejak *launching* Program Transformasi PLN pada April 2020 (Pilar *Green – Green Booster)* sebelum dituangkannya dalam RUPTL PLN.

   Sejak diterbitkannya RUPTL 2021-2030 pada 28 September 2021 dan *launching* pada 5 Oktober 2021 bahwa Program Dedieselisasi telah tertuang dalam RUPTL tersebut maka diperlukan *review* atas kajian

In addition to the development of the 145 MW Floating PLTS in the Cirata Reservoir, in December 2020, PT PLN (Persero) has issued a LoI to the developer Medco Power and Solar Philippines Consortium for PLTS in West Bali 25 MWp and East Bali 25 MWp, which is currently still in the finalization stage of the PPA. The price approval from MESDM has been issued with the tariff for PLTS West Bali 25 MWp at 5.9248 cUSD/kWh and PLTS East Bali 25 MWp at 5.5922 cUSD/kWh.

PLTS Project Development Plan

1. PLTD to NRE Conversion Program

   PLN has PLTD spread across 2,130 locations with fuel oil consumption in 2020 of Rp15 trillion. To reduce fuel oil consumption, the PLTD conversion program will be implemented in stages using 3 models, namely:

   a) Conversion of PLTD to NRE power plants, using PLTS and BESS (Battery Energy Storage System) technology, including hybrid PLTD schemes with batteries in isolated systems where it is not possible to build transmissions for interconnection to the grid;
   b) Gasification and construction of gas plants.
   c) Isolated system interconnection to the grid.

   As a follow-up to the 2021-2030 RUPTL, the PLTD conversion program to NRE power plants ("De-dieselization") will be carried out in stages with the IPP scheme as stated in the RUPTL, so the procurement of IPP Power Purchase will be carried out.

   The PLTD Conversion Program to NRE-Based Power Plants (De-dieselization) is implemented to reduce the BPP of existing PLTD, with the following benefits: (i) reducing fuel consumption (ii) reducing CO2 emissions and (iii) increasing the NRE mix.

   Given the numerous and dispersed locations, early preparation of the De-dieselization Program is necessary, namely since the launch of the PLN Transformation Program in April 2020 (Green Pillar – Green Booster) before it is stated in the PLN RUPTL.

   Since the issuance of the 2021-2030 RUPTL on September 28, 2021 and the launch of the De-dieselization Program as stated in the RUPTL on October 5, 2021, it is necessary to review the studies that have

yang telah dilaksanakan sesuai dengan skema di RUPTL yaitu skema IPP dengan menggunakan teknologi PLTS dan BESS (*Battery Energy Storage System*) dan persiapan rencana pengadaan pembelian listrik pada tahun 2022 yang akan dilakukan secara klasterisasi dan bertahap.

2. Pengembangan Pembangkit VRE (*Variable Renewable Energy*)
   Pengembangan pembangkit VRE juga tertuang dalam program Transformasi *Green* yang merupakan langkah PLN dalam peningkatan bauran energi EBT menjadi sebesar 23% pada 2025.

3. Tantangan Pengembangan Pembangkit PLTS
   Dalam pengembangan pembangkit PLTS terdapat tantangan yang perlu ditinjau lebih lanjut guna kelancaran dalam tahap eksekusi nantinya.
   a) Intermitensi PLTS
      Kemampuan jaringan PLN untuk menerima listrik dari PLTS menyebabkan peningkatan biaya investasi, juga di sisi PLN.
      - Investasi tambahan termasuk: *Automatic Generation Control, Precise Forecasting Generation, Automatic Dispatch System, SCADA system upgrading*, dll.
      - Penambahan *spin reserve capacity* (sebagai *back up* pembangkitan)
      - Pengetatan *Grid Code*, merupakan biaya tambahan untuk IPP dan PLN

   b) Optimalisasi TKDN
      Optimalisasi TKDN dalam rangka memenuhi regulasi pemerintah (Kementerian Perindustrian) terkait penggunaan TKDN (Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia tanggal 06 Agustus 2019 perihal "TKDN Minimal Produk Modul Surya untuk PLTS") yaitu Ketentuan dalam Peraturan Meteri Perindustrian No. 05/M-IND/PER/2/2017 pasal 13 B untuk nilai minimal TKDN Modul Surya sebesar 60% namun ditunda pelaksanaannya dan saat ini diberlakukan nilai modul surya 40%. Saat ini PLN masih dalam proses penyusunan Peraturan Direksi terkait implementasi TKDN.

   c) Lahan
      Pengembangan pembangkit PLTS membutuhkan lahan yang cukup besar yaitu sekitar 1,2 - 1.4 Ha untuk kapasitas 1 MWp PLTS, sehingga perlu koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat serta

been carried out in accordance with the scheme in the RUPTL, namely the IPP scheme using PLTS and BESS (Battery Energy Storage System) technology and preparation of plans for the procurement of electricity purchases in 2022 which will be carried out in a clustered and gradual manner.

2. Development of VRE (Variable Renewable Energy) Power Plants
   The development of VRE plants is also stated in the Green Transformation program as PLN's initiative to increase the NRE energy mix to 23% by 2025.

3. Development Challenge of Solar Power Plant (PLTS)
   In the development of PLTS, there are challenges that need to be addressed to support the execution in the later stages.
   a) PLTS Intermittence
      The ability of the PLN network to receive electricity from PLTS leads to rising investment costs, also for PLN.
      - Additional investments include: Automatic Generation Control, Precise Forecasting Generation, Automatic Dispatch System, SCADA system upgrading, etc.
      - Addition of spin reserve capacity (as back up generator)
      - Tightening of the Grid Code, an additional cost for IPP and PLN

   b) TKDN optimization
      Optimization of TKDN (Domestic Component Level) to comply with government regulation (Ministry of Industry) related to the use of TKDN (Letter of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia dated August 6, 2019 regarding "Minimum TKDN of Solar Module Products for PLTS"), namely the provisions in the Regulation of the Minister of Industry No. 05/M-IND/PER/2/2017 article 13 B for a minimum value of 60% TKDN for Solar Modules, but its implementation has been postponed and currently a 40% value for solar module is applied. Currently, PLN is still drafting a Board of Directors Regulation related to the implementation of TKDN.

   c) Land
      The development of PLTS requires a large expanse of land, approximately 1.2 - 1.4 Ha for a capacity of 1 MWp PLTS, thus requiring intensive coordination with the local government and local stakeholders.

stakeholder setempat. Kemudahan perijinan dan pembebasan lahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek PLTS.

d) Sumber Pendanaan

Beberapa masukan dari pengembang yang terkendala, menyampaikan keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri dengan tingkat bunga yang relatif tinggi.

Ease of licensing and land acquisition become factors of consideration in the implementation of PLTS projects.

d) Source of funding

Several inputs from developers that faced constraints convey the limited sources of domestic financing with relatively high interest rates.

PROGRAM PLTS ATAP

Realisasi Pelanggan PLTS Atap Triwulan IV Tahun 2021

Realisasi pelanggan PLTS Atap sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 4.794 Pelanggan, dengan Kapasitas PLTS atap terdaftar adalah 48.798.717 WP (*Watt Peak*).

PV ROOFTOP PROGRAM

PV Rooftop Customer Realization in Quarter IV 2021

The realization of PV Rooftop customers up to Quarter IV amounted to 4,794 customers, with registered PV rooftop capacity at 48,798,717 WP (Watt Peak).

Tabel Data Pelanggan PLTS Atap Per Golongan Tarif s.d. Desember 2021 / Table of Rooftop PLTS Customer Data Per Tariff Class until December 2021

No.	Tarif/Daya / *Tariff/Capacity*	Jumlah Pelanggan / *Total Customers*	Kapasitas PLTS Atap (*Watt Peak*) / *PV Rooftop Capacity (Watt Peak)*
1.	S.2/1.300 VA	1	1.200
2.	S.2/2.200 VA	14	22.700
3.	S.2/3.500 VA s/d 200 KVA	253	4.114.670
4.	S.3/200 KVA	20	2.389.786
5.	R.1/900 VA (RTM)	-	-
6.	R.1/1.300 VA	112	106.320
7.	R.1/2.200 VA	953	1.037.445
8.	R.2/3.500 VA s/d 500 VA	1.810	3.819.549
9.	R.3/6.600 VA ke atas	1.021	7.459.754
10.	B.1/1.300 VA	2	2.180
11.	B.1/2.200 VA s/d 5.500 VA	57	164.470
12.	B.2/6.600 VA s/d 200 KVA	312	4.896.390
13.	B.3/>200 KVA	19	3.406.415
14.	I.2/>14 KVA s/d 200 KVA	18	668.200
15.	I.3/> 200 KVA	29	15.557.414
16.	P.1/2.200 VA s/d 5.500 VA	23	47.556
17.	P.1/6.600 VA s/d 200 KVA	114	3.139.625
18.	P.2/>200 KVA	17	1.745.045
19.	L	19	219.998
Total		**4.794**	**48.798.717**

Tabel Data Pelanggan PLTS Atap per UID/UIW s.d. Desember 2021 / Table of PV Rooftop Customer Data Per UID/UIW until December 2021

Kode Unit / *Unit Code*	Wilayah/Distribusi / *Distribution Area*	Jumlah Pelanggan / *Total Customers*	Kapasitas PLTS Atap (*Watt Peak*) / *PV Rooftop Capacity (Watt Peak)*
11	Aceh	28	326.200
12	Sumatera Utara / North Sumatera	16	598.613
13	Sumatera Barat / West Sumatera	5	122.200
14	S2JB	28	830.070
16	Bangka Belitung	11	250.000
17	Lampung	6	1.174.000
18	Riau dan Kepri / Riau and Kepri	13	174.460
21	Kalimantan Barat / West Kalimantan	8	180.950
22	Kalimantan Selatan dan Tengah / Central and South Kalimantan	10	830.405
23	Kalimantan Timur / East Kalimantan	37	449.980
31	Suluttenggo	26	681.505
32	Sulserabar	9	509.000
41	Maluku dan Maluku Utara / Maluku and North Maluku	20	445.575
42	Papua dan Papua Barat / Papua and West Papua	1	100.000
43	Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara	17	339.055
44	Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara	12	263.735
51	Jawa Timur / East Java	366	6.396.784
52	Jawa Timur dan DIY / East Java and DIY	289	8.041.815
53	Jawa Barat / West Java	1.016	12.517.101
54	Jakarta Raya	1.473	8.834.015
55	Bali	225	2.136.824
56	Banten	1.178	3.596.430
Total		**4.794**	**48.798.717**
Regional SUMKAL		**162**	**4.936.878**
Regional SULMAPANA		**85**	**2.338.870**
Regional JMB		**4.547**	**41.522.969**

Trend Pelanggan PLTS Atap Januari s.d Desember 2021

Dari data Realisasi PLTS Atap Januari 2021 s.d Desember 2021 terlihat bahwa *trend* pelanggan mengalami peningkatan, dimana peningkatan jumlah pelanggan juga sebanding dengan peningkatan kapasitas PLTS Atap. *Trend* kenaikan pelanggan dan kapasitas PLTS Atap tersebut dapat terlihat pada grafik sebagai berikut:

PV Rooftop Customer Trend, January-December 2021

The data of PV Rooftop realization from January 2021 to December 2021 shows that the trend of total customers increased, which was proportional to the increase in the capacity of PV Rooftop. The trend of increasing customers and capacity of PV Rooftop are illustrated in the following charts:

Gambar *Trend* Jumlah Pelanggan PLTS Atap / *Chart of Total PV Rooftop Customer Trend*

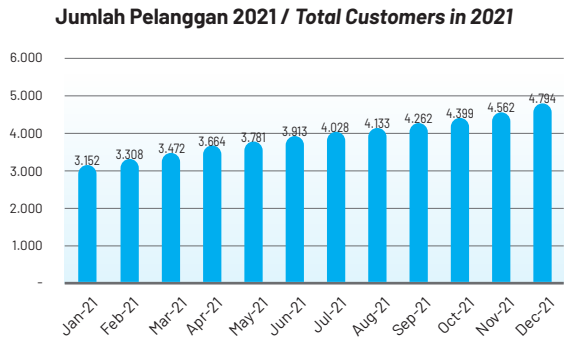

Ikhtisar Saham
Share Highlights

JUMLAH SAHAM

Jumlah saham PLN yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari 439.000.000 lembar saham yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham di samping modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan mencapai 135.460.886 lembar saham. Perseroan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik sampai dengan akhir tahun 2021.

TOTAL SHARES

The shares of PLN wholly owned (100%) by the Government of the Republic of Indonesia as of December 31, 2021 consisted of 439,000,000 shares, which are divided into 439,000,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share, in addition to the subscribed and paid-up capital of the Company amounting to 135,460,886 shares. The Company did not trade its shares to the public until the end of 2021.

INFORMASI SAHAM

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, PLN tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Oleh karena itu, PLN tidak menyajikan informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar; kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan, tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham tersebut dicatatkan.

SHARE INFORMATION

As of the period ended on December 31, 2020 or the date of the submission of this data/information, PLN neither conducted Initial Public Offering of Shares nor traded its shares on any stock exchange. Therefore, PLN does not present information on the number of outstanding shares; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; highest, lowest, and closing share price based on the price on the stock exchange where the shares are listed; and trade volume on the stock exchange where the shares are listed, year of share issuance, number of shares, par value of shares, share offering price for every corporate action, number of listed shares after each corporate action, and name of the stock exchange where the shares are listed.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds Highlights

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PLN tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, peringkat obligasi/sukuk.

In the period ended on December 31, 2021, PLN did not list any bonds, sukuk, or convertible bonds, or other securities. Therefore, the Company does not present information on the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/return rate, maturity date, and bonds/sukuk rating.

Adapun obligasi korporasi yang telah diterbitkan sebelumnya dan belum jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Previously issued corporate bonds that had not matured as of December 31, 2021 are as follows:

OBLIGASI DOMESTIK BERDENOMINASI RUPIAH

DOMESTIC BONDS IN RUPIAH

No.	Nama Obligasi Domestik / *Name of Domestic Bonds*	Nominal (Rp Miliar) / *Value (Rp Billion)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Peringkat (PEFINDO) / *Rating (PEFINDO)*
1	PLN IX 2007 SERI B / PLN IX 2007 SERIES B	1.200	10,90%	15	10-Jul-07	10-Jul-22	idAAA
2	PLN XII 2010 SERI B / PLN XII 2010 SERIES B	1.855	10,40%	12	08-Jul-10	08-Jul-22	idAAA
3	PLN SUKUK IJARAH V SERI B / PLN SUKUK IJARAH V SERIES B	340	10,40%	12	08-Jul-10	08-Jul-22	idAAA(sy)
4	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds I Phase I Series B	697	8,25%	10	05-Jul-13	05-Jul-23	idAAA
5	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds I Phase II Series B	651	9,60%	10	10-Dec-13	10-Dec-23	idAAA

No.	Nama Obligasi Domestik / *Name of Domestic Bonds*	Nominal (Rp Miliar) / *Value (Rp Billion)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Peringkat (PEFINDO) / *Rating (PEFINDO)*
6	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara I Phase II Series B	108	9,60%	10	10-Dec-13	10-Dec-23	idAAA(sy)
7	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase I Series A	214	7,70%	5	11-Jul-17	11-Jul-22	idAAA
8	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase I Series B	169	8,10%	7	11-Jul-17	11-Jul-24	idAAA
9	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase I Series C	1.217	8,50%	10	11-Jul-17	11-Jul-27	idAAA
10	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase I Series A	186	7,70%	5	11-Jul-17	11-Jul-22	idAAA(sy)
11	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase I Series B	214	8,50%	10	11-Jul-17	11-Jul-27	idAAA(sy)
12	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase II Series A	451,5	7,20%	5	03-Nov-17	03-Nov-22	idAAA
13	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase II Series B	201	7,50%	7	03-Nov-17	03-Nov-24	idAAA
14	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase II Series C	800	8,20%	10	03-Nov-17	03-Nov-27	idAAA
15	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase II Series D	1.093	8,70%	15	03-Nov-17	03-Nov-32	idAAA
16	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase II Series A	83,5	7,20%	5	03-Nov-17	03-Nov-22	idAAA(sy)
17	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase II Series B	121	8,20%	10	03-Nov-17	03-Nov-27	idAAA(sy)
18	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase II Series C	490	8,70%	15	03-Nov-17	03-Nov-32	idAAA(sy)
19	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase III Series A	457	6,50%	5	22-Feb-18	22-Feb-23	idAAA
20	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase III Series B	10	6,80%	7	22-Feb-18	22-Feb-25	idAAA
21	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase III Series C	341	7,25%	10	22-Feb-18	22-Feb-28	idAAA
22	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase III Series D	362	8,20%	15	22-Feb-18	22-Feb-33	idAAA
23	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds II Phase III Series E	1.365	8,75%	20	22-Feb-18	22-Feb-38	idAAA
24	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase III Series A	104	6,50%	5	22-Feb-18	22-Feb-23	idAAA(sy)
25	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase III Series B	88	7,25%	10	22-Feb-18	22-Feb-28	idAAA(sy)
26	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase III Series C	57,5	8,20%	15	22-Feb-18	22-Feb-33	idAAA(sy)
27	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara II Phase III Series D	449	8,75%	20	22-Feb-18	22-Feb-38	idAAA(sy)
28	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase I Series A	78,5	7,80%	5	10-Jul-18	10-Jul-23	idAAA
29	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase I Series B	442	8,35%	7	10-Jul-18	10-Jul-25	idAAA
30	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase I Series C	138	8,40%	10	10-Jul-18	10-Jul-28	idAAA
31	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase I Series D	281	8,90%	15	10-Jul-18	10-Jul-33	idAAA
32	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase I Series E	339	9,00%	20	10-Jul-18	10-Jul-38	idAAA
33	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase I Series A	127	7,80%	5	10-Jul-18	10-Jul-23	idAAA(sy)

No.	Nama Obligasi Domestik / *Name of Domestic Bonds*	Nominal (Rp Miliar) / *Value (Rp Billion)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Peringkat (PEFINDO) / *Rating (PEFINDO)*
34	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase I Series B	150	8,35%	7	10-Jul-18	10-Jul-25	idAAA(sy)
35	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase I Series C	258	8,40%	10	10-Jul-18	10-Jul-28	idAAA(sy)
36	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase I Series D	105	8,90%	15	10-Jul-18	10-Jul-33	idAAA(sy)
37	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase I Series E	110	9,00%	20	10-Jul-18	10-Jul-38	idAAA(sy)
38	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase II Series A	210	8,65%	5	10-Oct-18	10-Oct-23	idAAA
39	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase II Series B	483	9,00%	7	10-Oct-18	10-Oct-25	idAAA
40	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase II Series C	78	9,10%	10	10-Oct-18	10-Oct-28	idAAA
41	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase II Series D	15	9,30%	15	10-Oct-18	10-Oct-33	idAAA
42	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase II Series E	46	9,65%	20	10-Oct-18	10-Oct-38	idAAA
43	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase II Series A	114	8,65%	5	10-Oct-18	10-Oct-23	idAAA(sy)
44	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase II Series B	45	9,00%	7	10-Oct-18	10-Oct-25	idAAA(sy)
45	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase II Series C	15	9,10%	10	10-Oct-18	10-Oct-28	idAAA(sy)
46	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase II Series D	50	9,65%	20	10-Oct-18	10-Oct-38	idAAA(sy)
47	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase III Series A	369	8,50%	3	19-Feb-19	19-Feb-22	idAAA
48	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase III Series B	1.212	9,10%	5	19-Feb-19	19-Feb-24	idAAA
49	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase III Series C	183	9,35%	7	19-Feb-19	19-Feb-26	idAAA
50	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase III Series D	211	9,60%	10	19-Feb-19	19-Feb-29	idAAA
51	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase III Series E	263	9,80%	15	19-Feb-19	19-Feb-34	idAAA
52	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase III Series F	155	9,95%	20	19-Feb-19	19-Feb-39	idAAA
53	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase III Series A	263	8,50%	3	19-Feb-19	19-Feb-22	idAAA(sy)
54	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase III Series B	263	9,10%	5	19-Feb-19	19-Feb-24	idAAA(sy)
55	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase III Series C	204	9,35%	7	19-Feb-19	19-Feb-26	idAAA(sy)
56	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase III Series D	45	9,60%	10	19-Feb-19	19-Feb-29	idAAA(sy)
57	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase III Series E	60	9,80%	15	19-Feb-19	19-Feb-34	idAAA(sy)
58	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase III Series F	28	9,95%	20	19-Feb-19	19-Feb-39	idAAA(sy)
59	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase IV Series A	637	8,00%	5	1-Aug-19	1-Aug-24	idAAA
60	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase IV Series B	315,25	8,50%	7	1-Aug-19	1-Aug-26	idAAA
61	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase IV Series C	549	8,70%	10	1-Aug-19	1-Aug-29	idAAA

No.	Nama Obligasi Domestik / *Name of Domestic Bonds*	Nominal (Rp Miliar) / *Value (Rp Billion)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Peringkat (PEFINDO) / *Rating (PEFINDO)*
62	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase IV Series D	395	9,50%	15	1-Aug-19	1-Aug-34	idAAA
63	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase IV Series E	1.057,37	9,98%	20	1-Aug-19	1-Aug-39	idAAA
64	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase IV Series A	274	8,00%	5	1-Aug-19	1-Aug-24	idAAA(sy)
65	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase IV Series B	368	8,50%	7	1-Aug-19	1-Aug-26	idAAA(sy)
66	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase IV Series C	20	8,70%	10	1-Aug-19	1-Aug-29	idAAA(sy)
67	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase IV Series D	49	9,50%	15	1-Aug-19	1-Aug-34	idAAA(sy)
68	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase IV Series E	539	9,98%	20	1-Aug-19	1-Aug-39	idAAA(sy)
69	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase V Series A	795,7	7,90%	5	1-Oct-19	1-Oct-24	idAAA
70	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase V Series B	445	8,40%	7	1-Oct-19	1-Oct-26	idAAA
71	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase V Series C	6,2	8,60%	10	1-Oct-19	1-Oct-29	idAAA
72	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase V Series D	166	9,40%	15	1-Oct-19	1-Oct-34	idAAA
73	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase V Series E	500	9,90%	20	1-Oct-19	1-Oct-39	idAAA
74	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase V Series A	6,5	7,90%	5	1-Oct-19	1-Oct-24	idAAA(sy)
75	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase V Series B	10	8,40%	7	1-Oct-19	1-Oct-26	idAAA(sy)
76	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase V Series C	92	8,60%	10	1-Oct-19	1-Oct-29	idAAA(sy)
77	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase V Series D	135	9,40%	15	1-Oct-19	1-Oct-34	idAAA(sy)
78	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase V Series E	554	9,90%	20	1-Oct-19	1-Oct-39	idAAA(sy)
79	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VI Series A	540,63	7,20%	5	18-Feb-20	18-Feb-25	idAAA
80	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VI Series B	672,5	7,70%	7	18-Feb-20	18-Feb-27	idAAA
81	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VI Series C	544,25	8,00%	10	18-Feb-20	18-Feb-30	idAAA
82	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VI Series D	1,459	8,70%	15	18-Feb-20	18-Feb-35	idAAA
83	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VI Series E	1.596,05	9,05%	20	18-Feb-20	18-Feb-40	idAAA
84	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase VI Series A	40,5	7,70%	7	18-Feb-20	18-Feb-27	idAAA(sy)
85	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase VI Series B	3,5	8,00%	10	18-Feb-20	18-Feb-30	idAAA(sy)
86	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase VI Series C	9	8,70%	15	18-Feb-20	18-Feb-35	idAAA(sy)
87	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara III Phase VI Series D	62,5	9,05%	20	18-Feb-20	18-Feb-40	idAAA(sy)
88	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VII Series A	316,7	7,92%	3	6-May-20	6-May-23	idAAA
89	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VII Series B	99,155	8,25%	5	6-May-20	6-May-25	idAAA
90	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VII Series C	312,18	8,55%	7	6-May-20	6-May-27	idAAA
91	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds III Phase VII Series D	1.009,1	9,10%	10	6-May-20	6-May-30	idAAA

No.	Nama Obligasi Domestik / *Name of Domestic Bonds*	Nominal (Rp Miliar) / *Value (Rp Billion)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Peringkat (PEFINDO) / *Rating (PEFINDO)*
92	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A / PLN Shelf-Registration Bonds IV Phase I Series A	312	6,70%	5	08-Sep-20	08-Sep-25	idAAA
93	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B / PLN Shelf-Registration Bonds IV Phase I Series B	28.	7,25%	7	08-Sep-20	08-Sep-27	idAAA
94	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C / PLN Shelf-Registration Bonds IV Phase I Series C	158	7,90%	10	08-Sep-20	08-Sep-30	idAAA
95	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D / PLN Shelf-Registration Bonds IV Phase I Series D	841	8,65%	15	08-Sep-20	08-Sep-35	idAAA
96	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E / PLN Shelf-Registration Bonds IV Phase I Series E	161	8,86%	20	08-Sep-20	08-Sep-40	idAAA
97	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara IV Phase I Series A	39	6,70%	5	08-Sep-20	08-Sep-25	idAAA(sy)
98	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara IV Phase I Series B	35	7,25%	7	08-Sep-20	08-Sep-27	idAAA(sy)
99	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara IV Phase I Series C	200	7,90%	10	08-Sep-20	08-Sep-30	idAAA(sy)
100	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara IV Phase I Series D	56	8,65%	15	08-Sep-20	08-Sep-35	idAAA(sy)
101	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E / PLN Shelf-Registration Sukuk Ijara IV Phase I Series E	46,5	8,86%	20	08-Sep-20	08-Sep-40	idAAA(sy)

OBLIGASI INTERNASIONAL BERDENOMINASI VALUTA ASING

INTERNATIONAL BONDS IN FOREIGN CURRENCY

No.	Kode Obligasi Internasional / *Code of International Bonds*	Nama / *Name*	Mata Uang / *Currency*	Nominal (juta) / *Value (million)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	S&P	Moody's	Fitch	Japan Credit
									Rating	Rating	Rating	Rating
1	56068TAD9 N54360AD9	GLOBAL BOND II Tr. B	USD	288,312	7,875%	30	28-Jun-07	29-Jun-37	BBB	Baa2	BBB	–
2	71568PAA7 71568QAA5	GMTN 1st DD 2011	USD	1.000	5,50%	10	22-Nov-11	22-Nov-21	BBB	Baa2	BBB	–
3	71568PAB5 71568QAB3	GMTN 2nd DD 2012	USD	1.001	5,25%	30	24-Oct-12	24-Oct-42	BBB	Baa2	BBB	–
4	71568PAC3 71568QAC1	GMTN 2017 Tranche A	USD	1.500	4,125%	10	15-May-17	15-May-27	–	Baa2	BBB	–
5	71568PAD1 71568QAD9	GMTN 2017 Tranche B	USD	500	5,25%	30	15-May-17	15-May-47	–	Baa2	BBB	–
6	71568PAE9 71568QAE7	GMTN 2018 Seri 1	USD	1.000	5,45%	10	21-May-18	21-May-28	–	Baa2	BBB	–
7	71568PAF6 71568QAF4	GMTN 2018 Seri 2	USD	1.000	6,15%	30	21-May-18	21-May-48	–	Baa2	BBB	–
8	71568PAG4 71568QAG2	GMTN 2018 Seri 3	USD	500	5,375%	10	25-Oct-18	25-Jan-29	–	Baa2	BBB	–
9	71568PAH2 71568QAH0	GMTN 2018 Seri 4	USD	500	6,25%	30	25-Oct-18	25-Jan-49	–	Baa2	BBB	–
10	XS1895571328 XS1891336932	GMTN 2018 Seri 5	EUR	500	2,875%	7	25-Oct-18	25-Oct-25	BBB	Baa2	BBB	–
11	71568PAJ8 71568QAJ6	GMTN 2019 – Seri 6	USD	700	3,875%	10	17-Jul-19	17-Jul-29	BBB	Baa2	BBB	–
12	71568PAK5 71568QAK3	GMTN 2019 – Seri 7	USD	700	4,875%	30	17-Jul-19	17-Jul-49	BBB	Baa2	BBB	–

No.	Kode Obligasi Internasional / *Code of International Bonds*	Nama / *Name*	Mata Uang / *Currency*	Nominal (juta) / *Value (million)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Issuance Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	S&P	Moody's	Fitch	Japan Credit
									Rating	Rating	Rating	Rating
13	JP536002AK96 JP536002AK96	Japanese Yen Bond 2019 Seri 1 – 3Y	JPY	3.700	0,430%	3	20-Sep-19	20-Sep-22	BBB	Baa2	BBB	BBB+
14	JP536002BK95 JP536002BK95	Japanese Yen Bond 2019 Seri 2 – 5Y	JPY	18.500	0,87%	5	20-Sep-19	20-Sep-24	BBB	Baa2	BBB	BBB+
15	JP536002DK93 JP536002DK93	Japanese Yen Bond 2019 Seri 4 – 10Y	JPY	1.000	1,05%	10	20-Sep-19	20-Sep-29	BBB	Baa2	BBB	BBB+
16	71568PAL3 71568QAL1	GMTN 2019 Seri 8	USD	500	3,375%	10	05-Nov-19	05-Feb-30	BBB	Baa2	BBB	–
17	71568PAM1 71568QAM9	GMTN 2019 Seri 9	USD	500	4,375%	30	05-Nov-19	05-Feb-50	BBB	Baa2	BBB	–
18	XS2073758612 XS2073758885	GMTN 2019 Seri 10	EUR	500	1,875%	12	05-Nov-19	05-Nov-31	BBB	Baa2	BBB	–
19	71568PAN9 71568QAN7	GMTN 2020 Seri 11	USD	500	3,00%	10	30-Jun-20	30-Jun-30	BBB	Baa2	BBB	–
20	71568PAP4 71568QAP2	GMTN 2020 Seri 12	USD	1.000	4,00%	30	30-Jun-20	30-Jun-50	BBB	Baa2	BBB	–

Aksi Korporasi
Corporate Action

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham tunggal PLN memberikan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp5 triliun. Pemberian PMN ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 10 Agustus 2021.

Pemberian PMN ini tidak terlepas dari penugasan Pemerintah kepada PLN antara lain berupa program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.

The Government of the Republic of Indonesia as the sole shareholder of PLN increased the State Equity Participation (PMN) amounting to Rp5 trillion. The PMN derives from the State Budget for 2021 Fiscal Year and signed by the President of the Republic of Indonesia in Government Regulation No. 83 of 2021 on Addition of the Republic of Indonesia State Equity Participation in the Share Capital of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Corporation on August 10, 2021.

The provision of PMN is inseparable from the Government's assignment for PLN, among others, the electricity infrastructure funding program, transmission substations development, and village electricity distribution for the development year of 2021-2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. S-603/MBU/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021, pemegang saham menyetujui penambahan penyertaan modal saham Pemerintah sebesar 118.704 saham (dalam jumlah penuh) dengan nilai Rp118,70 miliar yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Pemerintah di PT Energy Management Indonesia (EMI).

Based on Decree of the Minister of SOEs No. S-603/MBU/08/2021 dated August 20, 2021, the shareholders approved the addition of the Government's share capital investment of 118,704 shares (in full amount) with a value of Rp118.70 billion, which came from the transfer of all series B shares owned by the Government in PT Energy Management Indonesia (EMI).

Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan melakukan akuisisi 95% saham MCTN dengan biaya perolehan sebesar Rp647,19 miliar. Tujuan dari akuisisi MCTN ini adalah untuk menjamin pasokan listrik PLN ke Pertamina Hulu Rokan.

On August 6, 2021, the Company acquired 95% of MCTN shares at a cost of Rp647.19 billion. The purpose of this MCTN acquisition is to guarantee PLN's electricity supply to Pertamina Hulu Rokan.

Peringkat Surat Utang
Debt Securities Rating

Sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, PLN telah mendapatkan peringkat kredit dari beberapa lembaga pemeringkat yang berskala domestik maupun berskala internasional sebagai berikut:

Until the periods ended on December 31, 2021 and December 31, 2020, PLN had earned credit rating from several domestic and international rating agencies as follows:

No	Lembaga Pemeringkat / *Rating Agency*	Peringkat / *Rating*		Keterangan Peringkat / *Rating Description*
		2020	2021	
	Domestik / Domestic			
1	Pefindo	AAA	AAA	Stable
	Internasional / International			
1	S&P	BBB	BBB	Negative
2	Moody's	Baa2	Baa2	Stable
3	Fitch Ratings	BBB	BBB	Stable
4	Japan Credit Rating (JCR)	BBB+	BBB+	Stable

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

4 Januari • January

PLN menerapkan pilar *Green* dalam transformasinya, PLN berkomitmen dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Melalui anak perusahaannya, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG) menggandeng PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dalam *joint study* untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Langkah strategis ini bertujuan untuk menyinergikan potensi masing-masing dalam pengembangan PLTP. Adapun lokasi yang akan dilakukan kajian untuk pengembangan di wilayah kerja PGE, khususnya di Area Ulubelu (Lampung) dan Area Lahendong (Sulawesi Utara).

PLN applies the Green pillar in its transformation, PLN is committed to the development of New and Renewable Energy (NRE). Through its subsidiary, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG) cooperates with PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) in a joint study for the development of a Geothermal Power Plant (PLTP). This strategic step aims to synergize each other's potential in PLTP development. The locations that will be studied for development are in the PGE work area, especially in the Ulubelu Area (Lampung) and Lahendong Area (North Sulawesi).

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan peran EBT pada bauran energi nasional yang ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025, PLN GG siap untuk menjalankan peran dalam mewujudkan target EBT tersebut dengan berperan aktif dalam pengembangan Pembangkit Panas Bumi.

In line with the government's plan to increase the role of NRE in the national energy mix which is targeted to reach 23% by 2025, PLN GG is ready to play a role in realizing the NRE target by playing an active role in the development of Geothermal Power Plants.

26 Februari • February

PLN menargetkan peningkatan kapasitas Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 16 *Giga Watt* (GW) pada tahun 2024. Guna mencapai target tersebut, salah satu langkah yang dijalankan PLN yakni melakukan uji coba Program *Co-firing* pada 26 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. *Co-firing* merupakan proses penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batubara di PLTU. PLN berencana untuk dapat melakukan *co-firing* pada 52 lokasi PLTU Batubara eksisting sampai dengan tahun 2024.

PLN is targeting to increase the capacity of New Renewable Energy (NRE) to 16 Giga Watt (GW) in 2024. In order to achieve this target, one of the steps taken by PLN is to conduct Co-firing Program trials on 26 Steam Power Plants (PLTU) in Indonesia. Co-firing is the process of adding biomass as a partial replacement fuel or coal mixture in PLTU. PLN plans to be able to carry out Co-firing at 52 existing Coal PLTU locations until 2024.

Pengujian *co-firing* yang telah dilakukan dengan komposisi campuran *sawdust* 3% dan 5% menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Parameter operasional peralatan tetap aman selama masa ujicoba dan emisi yang dihasilkan masih di bawah Baku Mutu Emisi sesuai Permen KLHK No. 15 Tahun 2019.

Co-firing trials that have been carried out with a mixture of sawdust composition of 3% and 5% showed satisfactory results. The operational parameters of the equipment remained safe during the trial period and the emissions produced were still below the Emission Quality Standard according to Regulation of the Ministry of Environment and Forestry No. 15 of 2019.

9 Maret • March

PLN kembali memberikan harga spesial biaya penyambungan tambah daya kepada konsumen melalui program Layanan Paket Listrik 2021. Hal ini merupakan upaya PLN memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan penambahan daya listrik guna meningkatkan produktivitas di tengah pandemi Covid-19.

PLN continued to provide special prices for additional power connection costs to consumers through the 2021 Electricity Package Service program. This is PLN's effort to make it easier for customers to add electrical power to increase productivity in the midst of the Covid-19 pandemic.

Terdapat dua produk yang ditawarkan, yaitu "*Super Electrilife*" dan "Super Hemat UMKM" yang berlaku hingga 31 Maret 2021. Melalui program ini pelanggan hanya perlu membayar sebesar Rp202.100,- (dua ratus dua ribu seratus rupiah), dari harga normal sampai dengan Rp4,9 juta untuk tambah daya dari 1.300 VA ke 5.500 VA atau sampai dengan Rp10 juta untuk tambah daya dari 450 VA ke 11.000 VA. Kemudian melalui "Super Hemat UMKM", harga spesial Biaya Penyambungan Tambah Daya diberikan kepada *merchant* /mitra bisnis dari *E-Commerce/Marketplace* yang bekerja sama dengan PLN tanpa pembelian alat elektronik apapun.

There were two products offered, namely "Super Electrilife" and "Super Savings UMKM" which were valid until March 31, 2021. Through this program, customers only needed to pay Rp202,100 (two hundred two thousand one hundred rupiah), from the normal price up to Rp4.9 million to add power from 1,300 VA to 5,500 VA or up to Rp10 million to add power from 450 VA to 11,000 VA . Then through "Super Saving UMKM", special prices for Added Power Connection Costs were given to merchants / business partners from E-Commerce / Marketplaces who work with PLN without purchasing any electronic equipment.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

Maret • March 31

PLN dan 9 BUMN Konstruksi yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, serta 1 BUMN Perbankan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi Nasional demi mewujudkan energi bersih melalui gerakan penggunaan kompor induksi.

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara. Dalam sambutannya, Menteri BUMN menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkrit dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional yaitu dengan memastikan penyerapan energi dalam negeri.

PLN and 9 state-owned construction companies, namely PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), and Perum Perumnas, as well as 1 Banking BUMN, namely PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk signed a memorandum of understanding to embody independence and national energy security in order to realize clean energy through the use of an induction cooker.

The purpose of this memorandum of understanding is to increase the use of induction cookers in the household sector to reduce LPG imports and save foreign exchange. In his remarks, the Minister of SOEs said that this synergy was a concrete step from SOEs in an effort to encourage increased national energy security, namely by ensuring the absorption of domestic energy.

April • April 8

PLN meraih The Best Indonesian Green Award setelah memenangkan enam kategori penghargaan pada ajang Indonesia Green Awards (IGA) 2021 yang diselenggarakan oleh The La Tofi School of CSR. Pada ajang ini PLN mendapatkan 17 penghargaan atas program inisiatif lingkungan guna menjaga kelestarian alam yang telah dilaksanakan. Penghargaan IGA Awards ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan melalui berbagai ragam kreativitas.

PLN won The Best Indonesian Green Award after winning six award categories at the Indonesia Green Awards (IGA) 2021 organized by The La Tofi School of CSR. In this event, PLN received 17 awards for its environmental initiative programs to preserve nature that have been implemented. The IGA Awards are given to companies that have a high concern for the environment through a variety of creativity.

April • April 23

PLN menerima penghargaan sebagai Platinum Champion in Corporate Social Responsibility pada ajang Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2021. Penghargaan ini diberikan atas upaya PLN yang terus melakukan transformasi program CSR dan menjalankan program CSR secara berkelanjutan.

Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen (*embedded*) menjalankan program CSR yang *feasible* (dapat dilakukan), memiliki dampak yang efektif terhadap penerima program, terukur secara *Social Return of Investment*, serta memiliki program yang inklusif dan berkelanjutan.

PLN received an award as a Platinum Champion in Corporate Social Responsibility at the 2021 Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA). This award was given for PLN's efforts to continue to transform CSR programs and run CSR programs in a sustainable manner.

The award is given to companies that are committed (embedded) to running CSR programs that are feasible (can be done), have an effective impact on program recipients, are measurable in terms of Social Return on Investment, and have inclusive and sustainable programs.

April • April 28

PLN group berhasil meraih 9 penghargaan dalam ajang TOP CSR Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) serta sejumlah asosiasi CSR terkemuka nasional lainnya. Raihan ini merupakan hasil dari komitmen PLN group menjalankan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan secara konsisten.

The PLN group won 9 awards at the TOP CSR Awards 2021 organized by Top Business Magazine in collaboration with the National Committee for Governance Policy (KNKG) and a number of other leading national CSR associations. This achievement is the result of the PLN group's commitment to consistently carry out sustainable social responsibility.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

1 Juni • June

PLN melalui anak usahanya, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) meluncurkan layanan *fixed broadband internet*. Bertajuk ICONNET, layanan internet ini telah resmi disajikan kepada pelanggan di seluruh Indonesia secara andal, terjangkau dan tanpa batas.

PLN through its subsidiary, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), launched fixed broadband internet services. Titled ICONNET, this internet service has been officially served to customers throughout Indonesia in a reliable, affordable, and unlimited manner.

30 Juni • June

PLN bersama PT Bank Mandiri Tbk menandatangani nota kesepahaman kerja sama *knowledge sharing* ketenagalistrikan. Kolaborasi dua BUMN besar di Indonesia ini, diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sektor ketenagalistrikan, perbankan dan berbagai sektor lainnya dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Dengan kerja sama ini, PLN dan Bank Mandiri akan melakukan *knowledge transfer*, FGD, *sharing session*, pertukaran data, informasi dan publikasi yang dilakukan secara periodik dalam lingkup sektor ketenagalistrikan, keuangan ataupun lingkup lainnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

PLN and PT Bank Mandiri Tbk signed a memorandum of understanding for the cooperation in Electricity Knowledge Sharing. The collaboration between the two big SOEs in Indonesia is expected to be able to contribute to the development of the electricity sector, banking and various other sectors in order to move the wheels of the economy in Indonesia.

With this collaboration, PLN and Bank Mandiri will conduct knowledge transfers, FGDs, sharing sessions, exchange of data, information and publications that are carried out periodically in the electricity, finance or other scopes, both short term and long term.

6 Juli • July

PT PLN (Persero) resmi menandatangani *Sales and Purchase Agreement* (SPA) atau perjanjian jual beli saham sehubungan dengan akuisisi atas 100 persen saham PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) yang dimiliki oleh Chevron Standard Limited. Penandatanganan SPA dilakukan oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dan Regional Director Chevron Standard Limited, Jennifer Ferratt secara daring. Kesepakatan ini juga disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini serta manajemen Chevron Standard Limited sebagai pemilik saham mayoritas MCTN.

PT PLN (Persero) officially signed a sales and purchase agreement (SPA) in connection with the acquisition of 100 percent of PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) shares owned by Chevron Standard Limited. The signing of the SPA was carried out online by the Director of Commerce and Customer Management of PLN, Bob Saril, and the Regional Director of Chevron Standard Limited, Jennifer Ferratt. This agreement was also witnessed by Minister of Energy and Mineral Resources Arifin Tasrif, Deputy Minister I of BUMN Pahala Nugraha Mansury, Head of SKK Migas Dwi Soetjipto, President Commissioner of PLN Amien Sunaryadi, President Director of PLN Zulkifli Zaini and the management of Chevron Standard Limited as the majority shareholder of MCTN.

16 Juli • July

PLN, PTPN Group dan Perhutani bersinergi dalam pelaksanaan Program *Co-Firing* di 52 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hal ini diresmikan lewat penandatanganan *Head of Agreement* (HoA) penyediaan biomassa dan pengembangan industri biomassa untuk *co-firing* PLTU batu bara oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani, dan Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro. Turut menyaksikan penandatanganan secara daring adalah Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana. HoA ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyediaan dan pengembangan industri biomassa untuk *co-firing* PLTU.

PLN, PTPN Group, and Perhutani cooperated in synergy for the implementation of Co-firing Program at 52 coal-fired Steam Power Plants (PLTU). This was inaugurated through the signing of the Head of Agreement (HoA) for the supply of biomass and the development of the biomass industry for co-firing of coal PLTU by PLN President Director Zulkifli Zaini, PTPN Group President Director Mohammad Abdul Ghani, and Perhutani President Director Wahyu Kuncoro. Also watching the signing online were Deputy Minister of BUMN I Pahala Nugraha Mansury, Director General of EBTKE of the Ministry of Energy and Mineral Resources Dadan Kusdiana, and Director General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources Rida Mulyana. This HoA will be followed up with the supply and development of the biomass industry for co-firing PLTU.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

Juli • July 31

PT PLN (Persero) secara konsisten melanjutkan transformasi sejak gagasan ini dirilis pada April 2020 tahun lalu. Salah satu bagian dari transformasi ini melahirkan e-Procurement Academy yang dibangun sebagai wadah pembelajaran berbasis digital bagi seluruh jajaran PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Adapun e-Procurement Academy diinisiasi PLN sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan kompetensi insan PLN di bidang pengadaan barang dan jasa. Terobosan ini diharapkan akan memberi manfaat besar bagi PLN dan pengguna lain di lingkungan BUMN. "Dengan adanya terobosan ini, kami manajemen PLN berharap proses belajar bagi insan PLN di seluruh Indonesia untuk meningkatkan *knowlegde, skill*, kapasitas dan kapabilitas berdasarkan *best leading practice* khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa".

PT PLN (Persero) has consistently continued its transformation since this idea was released in April 2020 last year. One part of this transformation put forth the e-Procurement Academy which was built as a digital-based learning platform for all levels of PLN and other State-Owned Enterprises (SOEs). The e-Procurement Academy was initiated by PLN as an effort to build and improve the competence of PLN's personnel in the field of procurement of goods and services. This breakthrough is expected to provide great benefits for PLN and other users in the SOEs environment. "With this breakthrough, we hope that PLN management will have a learning process for PLN's personnel throughout Indonesia to improve their knowledge, skills, capacity, and capability based on best leading practice, especially in the field of procurement of goods and services".

Agustus • August 9

Bertujuan untuk menjaga pasokan listrik demi ketahanan energi NKRI, PLN memastikan keandalan pasokan listrik untuk Wilayah Kerja (WK) Rokan, sebagai bukti nyata mendukung keberlanjutan blok migas yang penyumbang 25 persen dari total produksi minyak nasional. Langkah ini merupakan upaya PLN demi menjaga ketahanan energi di Tanah Air. PLN resmi mulai mengalirkan listrik dan uap ke WK Rokan mulai 9 Agustus 2021 Pukul 00.00 WIB. Hal ini sejalan dengan alih kelola Blok Rokan dari perusahaan migas asal Amerika Serikat, PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Sebab sejak 1951 dikelola Chevron, akhirnya blok migas terbesar di Indonesia tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

To maintain electricity supply for the sake of energy security of the Republic of Indonesia, PLN ensures the reliability of electricity supply for the Rokan Working Area (WK), as tangible evidence of supporting the sustainability of the oil and gas block which contributes 25 percent of the total national oil production. This step is PLN's effort to maintain energy security in the country. PLN has officially started supplying electricity and steam to WK Rokan starting August 9, 2021 at 00.00 WIB. This is in line with the transfer of management of the Rokan Block from an oil and gas company from the United States, PT Chevron Pacific Indonesia, to PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). This is an important milestone for Indonesia. Because since 1951 it has been managed by Chevron, and finally the largest oil and gas block in Indonesia has returned to the hands of Indonesian citizens.

Agustus • August 15

PT PLN (Persero) merampungkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1,2 triliun di Jawa Timur demi memperkuat keandalan pasokan listrik di Jawa Bali. Infrastruktur kelistrikan tersebut terdiri dari SUTT 150 kV Paiton – Kraksaan, SUTT 150 kV Kraksaan – Probolinggo, SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung, SUTT 150 kV New Tulungagung – New Wlingi, GI 150 kV New Tulungagung, dan GI 150 kV New Wlingi. Meski di tengah pandemi, pemberian tegangan (*energize*) pada 6 PSN di Jawa Timur tersebut berhasil diselesaikan pada semester I tahun 2021.

PT PLN (Persero) has completed 6 National Strategic Projects (PSN) worth Rp1.2 trillion in East Java to strengthen the reliability of electricity supply in Java and Bali. The electricity infrastructure consists of SUTT 150 kV Paiton – Kraksaan, SUTT 150 kV Kraksaan – Probolinggo, SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung, SUTT 150 kV New Tulungagung – New Wlingi, GI 150 kV New Tulungagung, and GI 150 kV New Wlingi. Even in the midst of the pandemic, the provision of voltage (energize) to 6 PSNs in East Java was successfully completed in the first semester of 2021.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

19 Agustus • August

PT PLN (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT KAI (Persero) berkomitmen menjaga pasokan batu bara untuk mempertahankan keandalan listrik bagi masyarakat. Kepastian pasokan batu bara dalam jangka panjang merupakan faktor penting bagi PLN dalam penyediaan dan keberhasilan mempertahankan keandalan listrik bagi seluruh pelanggan. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Strategis BUMN Pengaman Rantai Pasokan untuk Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dilakukan oleh Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra Prastowo, Direktur Pengembangan Usaha PTBA Fuad Fachrudin, dan Direktur Niaga KAI Dadan Rudiansyah, dengan disaksikan secara langsung oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto, dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.

PT PLN (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), and PT KAI (Persero) are committed to maintaining the supply of coal to maintain electricity reliability for the community. The certainty of coal supply in the long term is an important factor for PLN in supplying and successfully maintaining electricity reliability for all customers. The signing of the Memorandum of Understanding for Strategic Cooperation of BUMN Supply Chain Security for National Electricity Security was carried out by PLN Primary Energy Director Rudy Hendra Prastowo, PTBA Business Development Director Fuad Fachrudin, and KAI Commercial Director Dadan Rudiansyah, witnessed directly by PLN Deputy President Director Darmawan Prasodjo, PTBA President Director Suryo Eko Hadianto, and KAI President Director Didiek Hartantyo.

25 Agustus • August

Dukung PON XX Papua, Perkuatan Keandalan Sistem Kelistrikan Merauke Siap 100 Persen, PT PLN (Persero) berhasil merampungkan kontruksi infrastruktur kelistrikan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Merauke, Papua. Perseroan menjamin keandalan pasokan listrik demi menyukseskan gelaran kompetisi olah raga nasional empat tahunan tersebut.

Supporting PON XX Papua, Merauke Electricity System Reliability Strengthening is Ready to 100 Percent, PT PLN (Persero) has successfully completed the construction of electricity infrastructure to support the National Sports Week (PON) XX in Merauke, Papua. The company guarantees the reliability of electricity supply for the success of the four-year national sports competition.

7 September • September

PLN dan GIIC Deltamas berkolaborasi dalam mengembangkan Pusat Data Nasional pertama di Indonesia, Kehadiran Pusat Data Nasional di Greenland International Industrial Centre (GIIC) Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, menjadi langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai *hub data center* internasional. PT PLN (Persero) siap memasok listrik sebesar 993 *Mega Volt Ampere* (MVA) ke pusat data berstandar internasional pertama di Indonesia tersebut. Keandalan suplai listrik 24 jam dibutuhkan untuk mendukung operasional pusat data yang rencananya dibangun kawasan GIIC-Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. PLN menyiapkan infrastruktur kelistrikan yang andal, berkualitas, dan *green* dengan tarif kompetitif.

PLN and GIIC Deltamas collaborated to develop the first National Data Center in Indonesia. The National Data Center at Greenland International Industrial Center (GIIC) Kota Deltamas, Cikarang, West Java, is the government's first step in realizing Indonesia's vision as an international data center hub. PT PLN (Persero) is ready to supply 993 Mega Volt Ampere (MVA) of electricity to the first international standard data center in Indonesia. A reliable 24-hour electricity supply is needed to support the operation of the data center which is planned to be built in the GIIC-Kota Deltamas area, Cikarang, West Java. PLN prepares reliable, quality, and green electricity infrastructure at competitive rates.

9 September • September

Kementerian BUMN secara resmi meluncurkan e-Procurement Academy BUMN untuk meningkatkan mutu sistem pengadaan BUMN pada Kamis (9/9/2021). Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan PLN sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University. Kehadiran e-Procurement Academy BUMN akan menjadi wadah sinergi, pusat informasi, edukasi dan *sharing knowledge* bagi seluruh insan pengadaan di BUMN. Dengan adanya *platform ini*, Erick berharap kapasitas dan kapabilitas seluruh insan pengadaan di lingkungan BUMN bakal semakin meningkat.

The Ministry of SOEs officially launched the SOEs e-Procurement Academy to improve the quality of the SOEs procurement system on Thursday (9/9/2021). Minister of SOEs Erick Thohir assigned PLN to manage the SOEs e-Procurement Academy through PLN Corporate University. The presence of the SOEs e-Procurement Academy will be a place for synergy, information center, education and knowledge sharing for all procurement personnel in SOEs. With this platform, Erick hoped that the capacity and capability of all procurement personnel in the SOEs environment would increase.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

September • September 15

PT PLN (Persero) raih penghargaan dari Contact Center World dalam ajang 2021 Global Top Ranking Perfomance Award Contact Center World yang diikuti oleh lebih dari 1.600 peserta tahunan, dan menghadirkan perusahaan-perusahaan terbaik dari 50 negara lebih. Tahun ini PLN berhasil meraih 3 penghargaan yakni *Gold Winner* untuk 2 kategori yakni *Best Contact Center* dan *Best Use Social Media in the Contact Center*, serta satu *Silver Winner* untuk kategori *Best Use of Self-Service Technology*.

PT PLN (Persero) won an award from Contact Center World in the 2021 Global Top Ranking Performance Award Contact Center World, which was attended by more than 1,600 annual participants, and presented the best companies from more than 50 countries. This year PLN won 3 awards, namely Gold Winner for 2 categories namely Best Contact Center and Best Use Social Media in the Contact Center, and one Silver Winner for Best Use of Self-Service Technology category.

Oktober • October 2

Kesuksesan pembukaan PON XX Papua, Sabtu (2/10) malam, membuat Indonesia dipandang oleh seluruh dunia. Kilau lampu yang mengiringi acara pembukaan selama tiga jam tersebut bahkan sempat *trending topic worldwide platform* Twitter. Kemewahan pembukaan ini tak lepas dari kontribusi PLN dalam memastikan keandalan listrik selama acara berlangsung. Untuk memastikan keandalan listrik selama PON XX Papua, PLN telah meningkatkan kompetensi para petugas PLN terutama di 230 titik strategis yang tersebar di empat klaster, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Merauke

The success of the opening of the PON XX Papua, Saturday (2/10) night, made Indonesia seen by the whole world. The sparkling lights that accompanied the three-hour opening ceremony even had a chance to become a worldwide trending topic on Twitter. The grandeur of this opening was also realized due to the efforts of PLN in ensuring the reliability of electricity during the event. To ensure electricity reliability during PON XX Papua, PLN has increased the competence of PLN officers, especially at 230 strategic points spread across four clusters, namely Jayapura City, Jayapura Regency, Timika Regency, and Merauke.

Oktober • October 5

PT PLN (Persero) siap menyambut era baru Indonesia lebih hijau hingga 2030 mendatang. Hal ini ditandai dengan terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Dalam RUPTL yang baru ini, pemerintah memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Langkah ini sekaligus menjawab *Paris Agreement* dan membuat Indonesia berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon. PLN menyatakan siap untuk bisa mendukung rencana pemerintah dalam komitmen menuju Indonesia bersih. PLN mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai bauran energi baru terbarukan 23% pada 2025.

PT PLN (Persero) is ready to welcome a new era of greener Indonesia to be realized in 2030. This is marked by the issuance of the Business Plan for Provision of Electric Power (RUPTL) 2021 – 2030. In this new RUPTL, the government enlarges the portion of New and Renewable Energy (NRE) power plants in the energy mix. This step also answers the Paris Agreement and makes Indonesia play an active role in reducing carbon emissions. PLN said it was ready to support the government's plan in its commitment to a clean Indonesia. PLN fully supports the government's efforts to achieve a 23% new and renewable energy mix by 2025.

Oktober • October 7

Dedikasi PT PLN (Persero) dan anak usahanya dalam mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi, secara terintegrasi mendapatkan pengakuan dalam penghargaan TOP GRC Awards 2021. Total, PLN, PT Indonesia Power (IP), dan PT PLN Batubara memborong 11 penghargaan dalam ajang yang diadakan oleh Majalah TopBusiness. GRC memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan transformasi PLN dengan aspirasi *Green, Lean, Innovative,* dan *Customer Focused*. Maka dari itu, dirinya bersama dengan jajaran manajemen PLN bertekad untuk terus melanjutkan kinerja bisnis dengan didasari penerapan prinsip-prinsip GRC secara optimal.

The dedication of PT PLN (Persero) and its subsidiaries in encouraging the improvement of the company's business through the development of policies and implementation of corporate governance, risk management, and compliance with regulations, has been recognized in an integrated manner in the TOP GRC Awards 2021. Total, PLN, PT Indonesia Power (IP), and PT PLN Batubara won 11 awards in the event held by TopBusiness Magazine. GRC has a strategic role in encouraging the acceleration of PLN's transformation with the aspirations of Green, Lean, Innovative, and Customer Focused. Therefore, GRC and the management of PLN are determined to continue business performance based on the optimal application of GRC principles.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

8 Oktober • October

PLN berhasil merampungkan penambahan kapasitas dan *energize* (pemberian tegangan perdana) Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Wotu sebesar 250 Mega Volt Ampere (MVA) yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, GITET Wotu Extension (Ext) 275/150kV memiliki kapasitas IBT sebesar 90 MVA, dengan bertambahnya kapasitas ini membuat GITET Wotu menjadi GITET terbesar di Indonesia Bagian Timur. Penambahan kapasitas ini merupakan upaya PLN untuk menghadirkan listrik yang berkualitas dan andal, khususnya di pulau Sulawesi. GITET Wotu memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 44%.

PLN has succeeded in completing the addition of capacity and energizing (primary voltage) of the Wotu Extra High Voltage Substation (GITET) of 250 Mega Volt Ampere (MVA) located in East Luwu Regency, South Sulawesi. Previously, GITET Wotu Extension (Ext) 275/150kV had an IBT capacity of 90 MVA, with this increase in capacity making GITET Wotu the largest GITET in Eastern Indonesia. This additional capacity is PLN's effort to provide quality and reliable electricity, especially on the island of Sulawesi. GITET Wotu has a Domestic Component Level (TKDN) of 44%.

12 Oktober • October

Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi – Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) atas komitmen Perseroan dalam memenuhi kewajiban kepada Negara. PLN mendapatkan apresiasi sebagai Debitur Berkinerja Terbaik Tahun 2020. Sepanjang lima tahun terakhir yaitu Tahun 2015-2020, tercatat pinjaman PLN bertambah sekitar Rp199 triliun, sementara besar biaya investasi PLN pada periode tersebut mencapai Rp448 triliun. Hal tersebut menunjukkan dana pinjaman digunakan untuk investasi, diantaranya penambahan aset berupa pembangkit total 10.000 megawatt, transmisi sepanjang 23.000 kilometer sirkuit, dan total gardu induk 84.000 MvA. Dengan penambahan investasi tersebut, PLN berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dari 88,3% pada Tahun 2015 menjadi 99,2% pada Tahun 2020.

The Ministry of Finance through the State Treasury Service Office (KPPN) for Investment Special – Directorate General of Treasury gives appreciation to PT PLN (Persero) for the Company's commitment to fulfill obligations to the State. PLN received an appreciation as the Best Performing Debtor in 2020. During the last five years, 2015-2020, PLN's loans increased by around Rp199 trillion, while PLN's investment costs for that period reached Rp448 trillion. This shows that the loan funds were used for investment, including the addition of assets in the form of a total 10,000-megawatt generator, transmission along 23,000 circuit kilometers, and a total of 84,000 MvA substations. With this additional investment, PLN succeeded in increasing the electrification ratio from 88.3% in 2015 to 99.2% in 2020.

13 Oktober • October

PT PLN (Persero) memberikan kemudahan untuk peningkatan pelayanan pelanggan dalam mengakses kebutuhan dan informasi kelistrikan. Salah satunya dengan menghadirkan mini denominasi token Rp5.000 melalui aplikasi PLN Mobile. Terobosan ini, menjadi bagian dari program transformasi PLN sebagai *One Stop Solution* bagi pelanggan. Kali ini PLN menghadirkan *Major Launch* atau *Grand Launching* PLN Mobile, dengan sejumlah fitur canggih baru untuk kemudahan layanan bagi pelanggan.

PT PLN (Persero) provides convenience for improving customer service in accessing electricity needs and information. One of them is by presenting a mini token denomination of Rp5,000 through the PLN Mobile application. This breakthrough is part of PLN's transformation program as a One Stop Solution for customers. This time, PLN presented a Major Launch or Grand Launching of PLN Mobile, with a number of new advanced features for ease of service for customers.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

Oktober • October 16

PLN kembali menggelar kegiatan *Virtual Charity Run and Ride* pada 16 Oktober s.d. 07 November 2021. *Virtual Charity Run and Ride* sendiri merupakan ajang lari dan bersepeda yang bisa dilakukan di mana saja kapan saja dan dapat "dicicil" jarak lari dan bersepedanya untuk tujuan beramal. Dengan mengangkat tema "Terang Negeriku, Tangguh Indonesiaku", kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Listrik Nasional ke-76. Peserta akan diajak untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga lari dan sepeda. Setiap kilometer yang ditempuh oleh pelari dan pesepeda nantinya akan dikonversikan dalam bentuk rupiah yang nantinya digunakan untuk membiayai penyambungan listrik masyarakat tidak mampu.

PLN again held a virtual charity run and ride on October 16 to November 07, 2021. Virtual Charity Run and Ride is a running and cycling event for charity purposes, which can be done anywhere at anytime and the distance of running and cycling can be completed in multiple sessions. With the theme "Brighter My Nation, Stronger My Indonesia", this activity is part of the commemoration of the 76th National Electricity Day. Participants would be invited to adopt a healthy lifestyle through running and cycling. Every kilometer traveled by runners and cyclists would later be converted into rupiah which will later be used to finance electricity connection for the poor.

Oktober • October 18

PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Nusa Tenggara Barat berhasil menuntaskan seluruh persiapan kelistrikan yang akan menyuplai Jalan Kawasan Khusus The Mandalika atau Mandalika International Street Circuit (MISC). Hal ini ditandai dengan keberhasilan serangkaian *commissioning test* yang telah dilakukan sejak awal September 2021. *Commissioning test* ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian persiapan PLN melistriki MISC, untuk menguji seluruh aspek dari komponen atau peralatan yang terbangun, yakni ketahanan, fungsi peralatan, dan lainnya. Khusus untuk WSBK 2021 dan MotoGP yang akan dihelat pada 2022, PLN telah mempersiapkan skenario *Zero Down Time*, yakni sistem suplai listrik berlapis, sehingga listrik di kawasan Mandalika andal dan berkualitas dan tidak mengalami gangguan, walaupun hanya sesaat.

PT PLN (Persero) through the West Nusa Tenggara Main Unit has successfully completed all electricity preparations that will supply The Mandalika Special Area Road or Mandalika International Street Circuit (MISC). This was marked by the success of a series of commissioning tests that have been carried out since early September 2021. This commissioning test was the final stage of the entire series of preparations for PLN to electrify the MISC, to test all aspects of the components or equipment built, namely durability, equipment function, and others. Especially for WSBK 2021 and MotoGP which will be held in 2022, PLN has prepared a Zero Down Time scenario, namely a layered electricity supply system, so that electricity in the Mandalika area is reliable and of good quality and does not experience interruptions, even if only for a moment.

Oktober • October 22

Pemerintah secara resmi mengalihkan seluruh saham seri B negara pada PT Energy Management Indonesia (Persero) ke PT PLN (Persero). Hal ini juga ditandai dengan bergabungnya EMI sebagai anak perusahaan PLN yang diresmikan secara *hybrid* (virtual dan daring) dalam acara *launching* PT Energy Management Indonesia (EMI) ke dalam PLN Group untuk Mendukung Inisiatif Dekarbonisasi Menuju *Green Economy* yang berlangsung di Jakarta, Jumat (22/10). Kehadiran EMI sebagai anak usaha PLN diharapkan dapat memperkuat transformasi energi bersih sekaligus mengakselerasi *green economy* atau ekonomi hijau untuk Indonesia. Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

The government has officially transferred all state B series shares in PT Energy Management Indonesia (Persero) to PT PLN (Persero). This was also marked by the joining of EMI as a subsidiary of PLN which was inaugurated in a hybrid (virtual and online) at the Launching of PT Energy Management Indonesia (EMI) into the PLN Group to Support the Decarbonization Initiative Towards a Green Economy which took place in Jakarta, Friday (22/10). The presence of EMI as a subsidiary of PLN was expected to strengthen the transformation of clean energy while accelerating the green economy for Indonesia. A green economy is an economic idea that aims to improve the welfare and social equality of the community, while significantly reducing the risk of environmental damage.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

26 Oktober • October

- PT PLN (Persero) meraih penghargaan 51 medali atas kualitas layanan prima *Contact Center* PLN 123 pada ajang *The Best Contact Center* Indonesia 2021 (TBCCI 2021). Penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi PLN yang terus meningkatkan kualitas *Contact Center* PLN 123 (CC PLN 123) sebagai layanan bagi pelanggan. Pada pelaksanaan ke 15 TBCCI, CC PLN 123 berhasil meningkatkan perolehan dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Total CC PLN 123 mendapatkan 15 medali platinum, 15 medali emas, 12 medali perak dan 9 medali perunggu dari tiga kategori yang diikuti, yakni kategori Korporat, kategori *Teamwork*, dan kategori Individual.
- PT PLN (Persero) terus melakukan usaha-usaha dalam mengelola risiko dan mengantisipasi segala bentuk ketidakpastian atau gangguan yang dapat memengaruhi aktivitas perusahaan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penyerahan Sertifikat Conformity ISO 31000:2018 Risk Management System untuk PT PLN (Persero) dan sertifikasi ISO 23001:2019 *Business Continuity Management System* untuk PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (UIP2B Jamali). Setidaknya ada tiga poin penting, yang melatarbelakangi Sertifikasi ISO 31000:2018 dan ISO 22301:2019. Pertama, menjadi bagian dari upaya pemenuhan pencapaian *Maturity Level* ERM (*Enterprise Risk Management*) di 4.0 pada 2024.

- PT PLN (Persero) won 51 medals for the excellent service quality of the PLN 123 Contact Center at The Best Contact Center Indonesia 2021 (TBCCI 2021). The award is en evidence to PLN's consistency in continuously improving the quality of the PLN 123 Contact Center (CC PLN 123) as a service for customers. In the 15th implementation of TBCCI, CC PLN 123 managed to increase its revenue compared to the achievements of previous years. Total CC PLN 123 won 15 platinum medals, 15 gold medals, 12 silver medals, and 9 bronze medals from the three categories that were followed, namely the Corporate category, Teamwork category, and Individual category.
- PT PLN (Persero) continues to make efforts to manage risk and anticipate all forms of uncertainty or disturbances that may affect the company's activities. This commitment is evidenced by the submission of the ISO 31000:2018 Risk Management System Conformity Certificate for PT PLN (Persero) and the ISO 23001:2019 Business Continuity Management System certification for PT PLN (Persero) Java, Madura, and Bali Load Control Center Parent Unit (UIP2B Jamali) . There are at least three important points behind the ISO 31000:2018 and ISO 22301:2019 certifications. First, it is part of efforts to fulfill the Maturity Level ERM (Enterprise Risk Management) achievement at 4.0 in 2024.

27 Oktober • October

Indonesia kian benderang di pekan peringatan Hari Listrik Nasional ke-76 berkat gencarnya pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PT PLN (Persero) di seluruh penjuru Tanah Air, terutama di kawasan Indonesia timur. Jumlah kapasitas terpasang pembangkit di wilayah Maluku, Papua dan Nusa Tenggara terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen PLN untuk memberikan akses energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, PLN turut mendukung Program Listrik Desa yang juga merupakan strategi mengurangi kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi di daerah. PLN pun terus mendorong Rasio Desa Berlistrik (RDB) yang merupakan rasio antara desa yang berlistrik dengan jumlah desa di Indonesia.Hingga September 2021, sebanyak 83.125 desa di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil dilistriki. Capaian ini mendorong Rasio RDB mencapai 99,62%. Meski di tengah pandemi, angka ini melampaui capaian tahunan 2020 lalu yang mencatat realisasi listrik desa sebanyak 82.569 desa dengan capaian RDB 99,52%.

Indonesia is getting brighter in the week of commemorating the 76th National Electricity Day thanks to the incessant development of electricity infrastructure by PT PLN (Persero) throughout the country, especially in eastern Indonesia. The total installed capacity of power plants in the Maluku, Papua, and Nusa Tenggara regions has continued to grow in the last five years. This shows PLN's commitment to provide equitable access to energy for all Indonesians. Collaborating with the government and all relevant stakeholders, PLN also supports the Village Electricity Program which is also a strategy to reduce poverty and grow the local economy. PLN also continues to encourage the Electric Village Ratio (RDB), which is the ratio between villages with electricity and the number of villages in Indonesia. As of September 2021, as many as 83,125 villages in all parts of Indonesia have been successfully electrified. This achievement pushed the RDB Ratio to 99.62%. Even in the midst of the pandemic, this figure exceeded the 2020 annual achievement which recorded the realization of village electricity as many as 82,569 villages with an RDB achievement of 99.52%.

28 Oktober • October

PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) menjadi lembaga pertama dan satu-satunya saat ini yang bisa memberikan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), capaian ini dapat mengakselerasi terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN Pusertif memiliki kewenangan dalam memberikan sertifikasi SPKLU, setelah meraih sertifikat akreditasi perluasan lingkup Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

PLN Certification Center (Pusertif) is the first and only institution currently able to provide Indonesian National Standards (SNI) for Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU). This achievement can accelerate the creation of an electric vehicle ecosystem in Indonesia. PLN Pusertif has the authority to provide SPKLU certification, after obtaining an accreditation certificate for the expansion of the scope of the Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) from the National Standardization Agency (BSN).

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

Oktober • October 30

PT PLN (Persero) melalui Institut Teknologi (IT) PLN meresmikan laboratorium gasifikasi biomassa dan sampah pertama di Indonesia. Fasilitas ini akan menjadi ruang uji coba rekayasa dan inovasi teknologi untuk memproduksi listrik dari pengelolaan limbah. Salah satu langkah strategis PLN dalam mengurangi emisi karbon adalah melalui Program *Co-Firing* yaitu mencampur batu bara dengan biomassa untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hingga Oktober 2021, terdapat 25 PLTU yang telah menjalankan program *co-firing*. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2023 ditargetkan sebanyak 52 PLTU yang akan memakai teknologi *co-firing*.

PT PLN (Persero) through the PLN Institute of Technology (IT) inaugurated the first biomass and waste gasification laboratory in Indonesia. This facility will be a testing ground for engineering and technological innovation to produce electricity from waste management. One of PLN's strategic steps in reducing carbon emissions is through a Co-firing Program, namely mixing coal with biomass to fuel steam power plants (PLTU). As of October 2021, there were 25 PLTUs that have run the co-firing program. Furthermore, until 2023, it is targeted that 52 steam power plants will use co-firing technology.

November • November 1

PT PLN (Persero) berkomitmen mengurangi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara guna mendukung target pemerintah menuju Carbon Neutral 2060. Upaya ini mendapat dukungan finansial dari lembaga keuangan internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB). Dukungan ini direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) antara Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Director General Southeast Asia Department ADB, Ramesh Subramaniam, di sela rangkaian COP 26, di Glasgow, Senin (1/11) waktu setempat. Adapun lingkup kerjasama PLN dan ADB meliputi, studi kelayakan penuh yang mencakup aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara. Berikutnya adalah, evaluasi struktur ETM, mencari program atau mekanisme lain yang sesuai dan merancang program bantuan teknis transisi yang adil.

PT PLN (Persero) is committed to reducing carbon emissions from coal-fired power plants to support the government's target of achieving Carbon Neutral 2060. This effort is supported financially by an international financial institution, namely the Asian Development Bank (ADB). This support was realized by the signing of a memorandum of understanding (MoU) between PLN President Director Zulkifli Zaini and ADB Director General of Southeast Asia Department, Ramesh Subramaniam, on the sidelines of the COP 26 series, in Glasgow, Monday (1/11) local time. The scope of the cooperation between PLN and ADB includes a full feasibility study covering the technical and financial aspects of reducing coal-fired power plants. Next is to evaluate the structure of the ETM, look for other suitable programs or mechanisms, and design an equitable transitional technical assistance program.

November • November 7

Komitmen PLN mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), mendapat apresiasi dari GridOto Awards 2021. PLN meraih penghargaan dengan kategori 'Kontribusi untuk Negeri Award 2021'. GridOto Award merupakan penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku industri otomotif di Indonesia. Mengangkat tema 'Better Mobility,' GridOto ingin mengapresiasi industri otomotif nasional dalam menghadirkan kendaraan dengan fitur dan teknologi yang lebih baik dan lengkap.

PLN's commitment to accelerate the electric vehicle ecosystem in Indonesia by providing a Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU), received an appreciation from the 2021 GridOto Awards. PLN won an award in the 'Contribution to the Nation Award 2021' category. GridOto Award is an award given as a form of appreciation to automotive industry players in Indonesia. With the theme 'Better Mobility,' GridOto wanted to appreciate the national automotive industry in presenting vehicles with better and more complete features and technology.

November • November 19

PT PLN (Persero) mampu menghasilkan oksigen sebanyak 2.654 tabung dalam satu tahun, hal ini merupakan hasil inovasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PTGU) Priok yang dioperatori anak usaha PLN yaitu PT Indonesia Power. Pengolahan gas buang menjadi oksigen ini merupakan inovasi PLN yang terinspirasi dari kasus gelombang dua pandemi Covid-19. Minimnya stok oksigen di rumah sakit menggerakan PLN untuk bisa memproduksi tambahan oksigen.

PT PLN (Persero) is able to produce 2,654 oxygen cylinders in one year. This is the result of innovation from the Priok Gas Steam Power Plant (PTGU) operated by PLN's subsidiary, PT Indonesia Power. Processing exhaust gas into oxygen is an innovation by PLN which was inspired by the case of the second wave of the Covid-19 pandemic. The lack of oxygen stock in hospitals has moved PLN to produce additional oxygen.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

24 November • November

Upaya PT PLN (Persero) mencapai Carbon Neutral 2060 melalui transisi energi kali ini mendapatkan dukungan dari Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/AFD). Komitmen ini tertuang melalui penandatanganan Surat Niatan penguatan kerja sama Prancis dan Indonesia di bidang energi pada Rabu (24/11/2021). Surat Niatan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Duta Besar Prancis di Indonesia Olivier Chambard, dan Direktur Badan Pembangunan Prancis (AFD) Indonesia Resident Mission Emmanuel Baudran, di hadapan Menteri Luar Negeri dan Eropa Jean Yves Le Drian dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Melalui penandatanganan tersebut, Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama dengan memobilisasi dukungan teknis dan keuangan dari Grup AFD untuk transisi energi dan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satu poin perjanjian ini adalah komitmen jumlah indikatif dukungan sebesar 500 juta euro untuk 5 tahun ke depan.

PT PLN (Persero)'s efforts to achieve Carbon Neutral 2060 through the energy transition this time received the support of the French Development Agency (Agence Française de Développement/AFD). This commitment was stated through the signing of a Letter of Intent to strengthen cooperation between France and Indonesia in the energy sector on Wednesday (11/24/2021). The Letter of Intent was signed by the Deputy for Coordination of Maritime Sovereignty and Energy Basilio Dias Araujo, President Director of PLN Zulkifli Zaini, French Ambassador to Indonesia Olivier Chambard, and Director of the French Development Agency (AFD) Indonesia Resident Mission Emmanuel Baudran, in the presence of the Minister of Foreign Affairs and Europe Jean Yves Le Drian and Mr. Luhut Binsar Panjaitan, Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment. Through the signing, Indonesia and France strengthened cooperation by mobilizing technical and financial support from the AFD Group for the transition of energy and new and renewable energy (NRE) in Indonesia. One of the points of this agreement is the commitment of an indicative amount of support of 500 million euros for the next 5 years.

1 Desember • December

PT PLN (Persero) menempati peringkat teratas di Asia Tenggara dan Selatan sebagai perusahaan yang melakukan transisi rendah karbon. Hasil tersebut disampaikan pada acara *launching* the Electric Utilities Benchmark yang dilaksanakan secara daring, Rabu (1/12). The WBA Electric Utilities Benchmark 2021 menyajikan peringkat 50 perusahaan listrik dunia berdasarkan penilaian terhadap komitmen menekan emisi karbon. Ajang WBA Electric Utilities Benchmark 2021, PLN menempati peringkat ke-30, di atas perusahaan-perusahaan listrik di Asia Tenggara. WBA Electric Utilities Benchmark 2021 menggunakan metodologi pendekatan Transisi Rendah Karbon (ACT) seperti TNB (Malaysia) dan EGAT (Thailand).

PT PLN (Persero) ranked top in Southeast and South Asia as a company making a low-carbon transition. The results were presented at the launching of the Electric Utilities Benchmark which was held online, Wednesday (1/12). The WBA Electric Utilities Benchmark 2021 ranks the world's 50 power companies based on an assessment of their commitment to reduce carbon emissions. In the WBA Electric Utilities Benchmark 2021, PLN is ranked 30th, above the power companies in Southeast Asia. WBA Electric Utilities Benchmark 2021 applied the Low Carbon Transition (ACT) approach methodology such as TNB (Malaysia) and EGAT (Thailand).

7 Desember • December

PT PLN (Persero) meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas komitmennya dalam menyelamatkan aset negara melalui percepatan sertifikasi tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pimpinan KPK Nawawi Pomolango kepada Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril dan disaksikan secara daring oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Dunia yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (07/12). PLN telah berkolaborasi dengan KPK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pemerintah daerah untuk menyelamatkan aset melalui sertifikasi tanah.

PT PLN (Persero) won an award from the Corruption Eradication Commission (KPK) for its commitment to save state assets through accelerating land certification spread throughout Indonesia. The award was handed over by KPK Leader Nawawi Pomolango to PLN's Director of Commerce and Customer Management, Bob Saril, and witnessed online by PLN President Director Darmawan Prasodjo, in commemoration of World Anti-Corruption Day held in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), Tuesday (07/12). PLN has collaborated with the KPK, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and local governments to save assets through land certification.

Peristiwa Penting 2021
2021 Significant Events

Desember • December 12

PT PLN meraih penghargaan Pemimpin *Humas/Public Relations* Berpengaruh 2021 pada ajang tahunan Jambore PR Indonesia (Jampiro). PLN sedang fokus untuk mengkomunikasikan semangat transformasi PLN. Tak hanya itu, PLN juga terus mendorong *electrifying lifestyle* kepada pelanggan. Tujuannya, agar masyarakat makin produktif dan menyadari pentingnya penggunaan energi bersih.

PT PLN won the 2021 Influential Public Relations Leader award at the annual PR Indonesia Jamboree (Jampiro). PLN is focusing on communicating the spirit of PLN's transformation. Not only that, PLN also continues to encourage electrifying lifestyles for customers. The goal is to make people more productive and aware of the importance of using clean energy.

Desember • December 15

PT PLN (Persero) meraih penghargaan *The Best State Owned Enterprise In Nation Building* dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2021. Prestasi tersebut diraih atas usaha yang konsisten dalam menyediakan pasokan listrik terjangkau yang ramah insentif dan menjalankan transisi energi hijau. Penghargaan ini diberikan kepada entitas bisnis yang dikendalikan oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) dan menjalankan peran krusial karena menyediakan produk barang dan atau jasa yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Selain itu, perusahaan juga secara khusus dinilai memberikan andil terbesar di tengah pemulihan pandemi sepanjang tahun ini.

PT PLN (Persero) won the Best State-Owned Enterprise in Nation Building award at the CNBC Indonesia Awards 2021. This achievement was obtained for consistent efforts in providing affordable electricity supplies that are incentive-friendly and implementing a green energy transition. This award is given to business entities that are controlled by the government (State-Owned Enterprises/SOEs) and plays a crucial role because they provide goods and or services that affect the lives of the wider community. In addition, the company is also specifically considered to have given the biggest contribution in the midst of the pandemic recovery so far this year.

Desember • December 18

PT PLN (Persero) meraih Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Awards tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas dedikasi dalam pembangunan pendidikan vokasi di Tanah Air. Penghargaan Program TJSL berbasis pendidikan ini diberikan Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berdasarkan usulan-usulan satuan pendidikan vokasi, baik dari jenjang SMK, perguruan tinggi vokasi, dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Program TJSL berbasis pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan di bidang ketenagalistrikan yang terdiri atas kompetensi pembangkit, kompetensi transmisi, kompetensi distribusi, dan program vokasi generasi penerang bangsa.

PT PLN (Persero) won the World Business Industry (DUDI) Awards in 2021 from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) for its dedication in developing vocational education in the country. This education-based TJSL program award was given by the Ministry of Education and Culture through the Directorate General of Vocational Education based on the proposals of vocational education units, both from the SMK level, vocational colleges, and course and training institutions (LKP). This education-based TJSL program is intended to improve the competence of Vocational High School students in the electricity sector, which consists of generator competence, transmission competence, distribution competence, and vocational programs for the nation's light generation.

Desember • December 28

PT PLN (Persero) melalui pilar *Green* dalam transformasinya terus berkomitmen untuk mengelola pembangkit yang ramah lingkungan. Tahun ini, PLN menyabet 8 penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Emas. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12). Selain itu, PLN juga mendapatkan 20 Proper Hijau.

PT PLN (Persero) through the Green pillar in its transformation maintained its commitment to managing environmentally friendly power plants. This year, PLN won 8 awards for the Gold Company Performance Rating Program (Proper). This award was presented by Vice President Ma'ruf Amin and witnessed by the Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya at the Vice President's Palace, Tuesday (28/12). In addition, PLN also received 20 Green Proper.

02

Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT PLN (Persero) masih mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik selama tahun 2021. Melalui laporan ini, izinkan kami selaku jajaran Dewan Komisaris PT PLN (Persero) untuk menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang memuat informasi tentang pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pengelolaan kinerja Perusahaan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga agar kegiatan operasional PLN dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, visi dan misi, Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Let us praise God the Almighty for His blessings and grace that enabled PT PLN (Persero) to record good performance achievements throughout 2021. Through this report, the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) will deliver the Supervisory Report of the Board of Commissioners which contains information on the implementation of supervision on the management of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2021. The supervision aims to maintain the operational activities of PLN in accordance with the objectives, vision and mission, Articles of Association of the Company, and the prevailing laws and regulations.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Tahun 2021 merupakan tahun di mana aktivitas perekonomian mulai kembali normal secara bertahap pascapandemi Covid-19 yang sempat memberi tekanan cukup besar terhadap pelaksanaan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pada tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong ekonomi global tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) berjudul *World Economic Outlook* edisi Januari 2022, ekonomi global diestimasikan tumbuh sebesar 5,9%, berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga -3,5%.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

In 2021, economic activities resumed to normal gradually after the Covid-19 pandemic that put great pressure to economic activities and public mobility in the previous year. It encouraged a positive growth of the global economy in 2021. Based on the report by the International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook January 2022 edition, the global economy was estimated to grow 5.9%, in contrast to the growth contraction of 2020 at -3.5%.

Membaiknya kondisi perekonomian global selama tahun 2021 menyebabkan permintaan atas komoditas energi di pasar global mengalami kenaikan, sehingga mendorong harga energi mengalami kenaikan. Berdasarkan S&P *Goldman Sachs Commodity Index* (GSCI), harga energi per akhir tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 59% dibandingkan dengan harga pada hari perdagangan pertama pada tahun 2021. Kontributor terbesar terhadap kenaikan indeks harga energi tersebut berasal dari 2 (dua) tolok ukur minyak mentah global, yaitu jenis *West Texas Intermediate* (WTI) dan *Brent* yang menyumbang sekitar 70% dari bobot indeks harga energi.

Improving global economic conditions during 2021 caused the demand for energy commodities in the global market to increase, ultimately raising energy prices. Based on the S&P Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), energy prices as of the end of 2021 rose 59% compared to prices on the first market day in 2021. The largest contributor to the increase in the energy price index came from 2 (two) global crude oil benchmarks, namely West Texas Intermediate (WTI) and Brent, which accounted for about 70% of the weight of the energy price index.

Di antara komoditas energi, harga produk minyak bumi seperti RBOB (bensin grosir) dan ULSD (*Ultra-Low Sulphur Diesel*, biasa digunakan sebagai *benchmark* untuk perdagangan minyak pemanas) mengalami peningkatan paling tinggi selama tahun 2021, masing-masing sebesar 67% dan 64%. Harga minyak mentah WTI dan Brent masing-masing mengalami kenaikan sebesar 62% dan 55%. Harga berjangka untuk gasoil (sebutan untuk ULSD di Eropa) meningkat sebesar 54% selama tahun 2021. Sedangkan untuk harga gas alam mengalami kenaikan hingga 38%.

Among energy commodities, the price of petroleum products such as RBOB (wholesale gasoline) and ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, commonly used as a benchmark for heating oil trading) saw the highest increase during 2021 by 67% and 64%, respectively. WTI and Brent crude oil prices increased by 62% and 55%, respectively. Futures prices for gasoil (the term for ULSD in Europe) increased by 54% during 2021, while natural gas prices increased by 38%.

Hal yang sama juga terjadi pada komoditas batu bara. Berdasarkan Laporan International Energy Agency (IEA), permintaan batu bara global pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,6%. Kenaikan tersebut didorong oleh permintaan listrik dan output industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan pulihnya kondisi perekonomian di sejumlah negara, khususnya China, India, dan kawasan Asia Tenggara. Tingginya permintaan batu bara di pasar global mendorong harga batu bara diestimasikan naik menjadi USD56,7 per juta ton pada tahun 2021 dari harga tahun 2020 sebesar USD53,9 per juta ton, berdasarkan Laporan *Short-Term Energy Outlook* yang dirilis oleh The US Energy Information Administration.

Similar conditions occurred for coal commodity. As reported by the International Energy Agency (IEA), global coal demand in 2021 increased by 2.6%, driven by higher demand for electricity and industrial output compared to the previous year as economic conditions in several countries began to recover, particularly in China, India, and the Southeast Asia region. The high demand for coal in the global market pushed coal prices to USD56.7 per million tons in 2021 from USD53.9 per million tons in 2020, based on the Short-Term Energy Outlook Report released by The US Energy Information Administration.

Sejalan dengan kondisi perekonomian global yang membaik, kondisi perekonomian nasional turut menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 mencapai 3,69%, kontras dengan angka pertumbuhan di tahun 2020 yang berada di zona negatif sebesar -2,07%. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,02% YoY, naik signifikan dari tahun 2020 yang mengalami kontraksi di level -2,17%.

In line with the improving global economic conditions, national economic conditions also grew positively. According to Statistics Indonesia (SI), the national economic growth rate in 2021 reached 3.69%, in contrast to the negative growth in 2020 at -2.07%. The Gross Domestic Product (GDP) in 2021 grew 5.02% YoY, a significant increase from the contraction in 2020 at -2.17%.

Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2021 tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi selama masa pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2021, pemerintah meningkatkan anggaran program PEN hingga Rp619 triliun. Sebagian besar dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi serta pemberian insentif perpajakan untuk dunia usaha. Stimulus tersebut efektif dalam mendongkrak aktivitas perekonomian nasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan yang positif.

The positive economic growth rate in 2021 was inseparable from the government's efforts to provide economic stimulus during the Covid-19 pandemic through the National Economic Recovery (PEN) program. In 2021, the government increased the PEN program budget to Rp619 trillion. Most of the budget is allocated to support the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector and corporate financing as well as to provide tax incentives for businesses. The stimulus was effective in boosting national economic activity and ultimately encouraged positive growth.

Berdasarkan Lapangan Usaha, sektor Industri Pengolahan menjadi kontributor tertinggi terhadap struktur PDB tahun 2021, yaitu sebesar 18,80%. Sektor Industri Pengolahan selama tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif di level 4,92% YoY, kontras dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya yang berada di level negatif sebesar -3,14%. Membaiknya kinerja Industri Pengolahan juga tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI-BI) yang dirilis oleh Bank Indonesia pada triwulan IV 2021 sebesar 50,17%, mengalami kenaikan dari kuartal sebelumnya maupun secara *Year on Year*.

Based on Business Sector, the Manufacturing Industry sector was the largest contributor to the GDP structure in 2021 at 18.80%. The Manufacturing Industry Sector during 2021 recorded positive growth of 4.92% YoY, in contrast to the negative growth in the previous year at -3.14%. The improving performance of the Manufacturing Industry is also reflected in the Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) released by Bank Indonesia in Q4/2021 at 50.17%, an increase from the previous quarter and on a Year-on-Year basis.

Sedangkan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar terhadap struktur PDB tahun 2021, yaitu sebesar 52,91%. Selama tahun 2021, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 3,55%, kontras dengan pertumbuhan di tahun 2020 sebesar -3,61%. Komponen dari konsumsi rumah tangga yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara *Year on Year* adalah transportasi dan komunikasi sebesar 5,34%, diikuti oleh makanan dan minuman (selain restoran) sebesar 3,24% dan perumahan & perlengkapan rumah tangga sebesar 3,09%.

In terms of GDP growth according to Expenditure, Household Consumption was the largest contributor to the GDP structure in 2021 at 52.91%. In 2021, Household Consumption grew by 3.55%, in contrast to the growth in 2020 at -3.61%. The components of Household Consumption that saw the highest growth year-on-year were Transportation and Communication at 5.34%, followed by Food and Beverages (excluding Restaurants) at 3.24%, and Housing & Household Equipment at 3.09%.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Era pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi PLN. Agar stabilitas kinerja dan pertumbuhan Perusahaan di era *New Normal* tetap terjaga, PLN berinisiatif untuk melakukan perubahan besar dalam tata kelola dan cara kerja Perusahaan melalui Program Transformasi. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendorong terwujudnya visi PLN di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis, yaitu menjadi perusahaan

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Covid-19 pandemic era posed new challenges for all layers of society, including PLN. To maintain the stability of the Company's performance and growth in the New Normal era, PLN took the initiative to make major changes in the governance and workings of the Company through the Transformation Program. This initiative aims to support the realization of PLN's vision amid an increasingly dynamic era, namely to become the leading electricity company

Kami senantiasa merekomendasikan Direksi dan seluruh Insan PLN untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan sesuai dengan *best practices* yang mengacu pada standar GCG terbaik.

listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Program Transformasi ini menjadi landasan PLN dalam mencapai perbaikan kinerja yang berkelanjutan, baik dari sisi operasional maupun keuangan hingga tahun 2024 mendatang.

Program Transformasi PLN terdiri dari 4 (empat) Aspirasi, yaitu:

1. Aspirasi *Green* yang berfokus dalam memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan energi terbarukan yang cepat dan efisien.
2. Aspirasi *Lean* yang berfokus dalam menyediakan listrik yang lebih andal, efektif, efisien, dan optimal bagi para pelanggan, baik masyarakat maupun pelaku bisnis dan industri.
3. Aspirasi *Innovative* yang berfokus untuk terus berinovasi, adaptif terhadap perubahan, kreatif dalam menangkap peluang, dan aktif dalam menentukan solusi.
4. Aspirasi *Customer Focused* yang berfokus dalam menyediakan pelayanan yang andal, terintegrasi, dan terkonsolidasi.

Di sisi lain, selama tahun 2021 aktivitas ekonomi di tingkat nasional mengalami pemulihan, tercermin dari pertumbuhan dari sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga berdampak positif terhadap kenaikan permintaan listrik. Kami mengapresiasi inisiatif Direksi dalam mengoptimalkan peluang bisnis tersebut melalui strategi *creating demand* yang ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta memanfaatkan *captive market* yang masih potensial

in Southeast Asia and the number one customer choice for energy solutions. This Transformation Program is PLN's foundation in achieving sustainable performance improvements, both in terms of operations and finances until 2024.

The PLN Transformation Program consists of 4 (four) Aspirations, namely:

1. Green Aspiration that focuses on leading Indonesia's energy transition through the rapid and efficient increase of renewable energy.
2. Lean aspiration that focuses on providing more reliable, effective, efficient, and optimal electricity for customers, both the community as well as business and industry entities.
3. Innovative aspiration that focuses on continuously innovating, being adaptive to change, creative in seizing opportunities, and active in determining solutions.
4. Customer Focused aspiration that focuses on providing reliable, integrated, and consolidated services.

On the other hand, national economic activities in 2021 began to recover as reflected in the growth of the Manufacturing Industry and Household Consumption sectors, which had a positive impact on the increasing demand for electricity. We appreciate the initiatives of the Board of Directors in optimizing these business opportunities through the strategy of creating demand, which was pursued through intensification and extensification efforts as well as by

We constantly advise the Board of Directors and all PLN's personnel to implement Good Corporate Governance (GCG) within the Company in accordance with best practices that refer to the best GCG standards.

dengan program *electrifying agriculture* dan *electrifying marine* untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan.

Strategi pemasaran yang diimplementasikan selama tahun 2021 cukup efektif dalam mendongkrak penjualan listrik selama tahun 2021 yang terealisasi sebesar 257,63 TWh, naik sebesar 5,77% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 243,58 TWh dan tercapai sebesar 103,46% dari target 2021. Peningkatan penjualan tenaga listrik ini sejalan dengan adanya penambahan pelanggan sebanyak 3.543.947 pelanggan, naik 7,57% dari tahun 2020 sebanyak 3.294.419 pelanggan atau 10,59% berada di atas target 2021 sebesar 3.204.722 pelanggan.

Dalam upaya mendukung ketersediaan pasokan listrik, selama tahun 2021 PLN mengoperasikan sebanyak 6.760 unit pembangkit listrik, baik milik sendiri, *Independent Power Plant* (IPP), dan sewa, dengan total kapasitas terpasang sebesar 64.553 MW. Dari jumlah pembangkit listrik tersebut, PLN mampu menghasilkan energi listrik selama tahun 2021 sebesar sebesar 289,47 TWh, naik 5,32% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 274,85 TWh dan tercapai 101,64% dari target 2021. Untuk mendukung proses penyaluran didistribusi listrik, selama tahun 2021 PLN melakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.332,3 MW, penambahan jaringan transmisi sepanjang 3.563,1 kms, dan penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 7.601 MVA.

seizing the potential captive market with electrifying agriculture and electrifying marine programs for the agriculture, livestock, plantation, fisheries, and marine sectors.

The marketing strategy implemented during 2021 was effective in boosting electricity sales during 2021, which was realized at 257.63 TWh, up 5.77% compared to 2020 of 243.58 TWh and reached 103.46% of the 2021 target. The increase in electricity sales was in line with the addition of 3,543,947 customers, up 7.57% from 2020 at 3,294,419 customers or 10.59% above the 2021 target of 3,204,722 customers.

To improve the availability of electricity supply, in 2021 PLN operated 6,760 power plants, including self-owned, Independent Power Plant (IPP), and leased, with a total installed capacity of 64,553 MW. Of these power plants, PLN was able to produce electrical power in 2021 amounting to 289.47 TWh, an increase of 5.32% compared to 2020 at 274.85 TWh and reached 101.64% of the 2021 target. To support the electricity distribution process, in 2021 PLN increased its power generation capacity by 1,332.3 MW, extended its transmission network by 3,563.1 kms, and increased the capacity of substations by 7,601 MVA.

Meningkatnya kinerja penjualan listrik selama tahun 2021 berdampak positif terhadap kinerja keuangan PLN. Pada tahun 2021, PLN membukukan pendapatan usaha senilai Rp368,17 triliun, tumbuh 6,59% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp345,42 triliun dan tercapai sebesar 99,60% dari target 2021. Dari realisasi pendapatan usaha tahun 2021, kontributor terbesar berasal dari penjualan tenaga listrik sebesar 78,45%, diikuti oleh subsidi listrik dari pemerintah sebesar 13,52%, pendapatan kompensasi sebesar 6,67%, pendapatan usaha lain-lain sebesar 1,20%, dan penyambungan pelanggan sebesar 0,13%.

The increased performance of electricity sales during 2021 has a positive impact on PLN's financial performance. In 2021, PLN recorded operating revenues of 368.17 trillion, growing 6.59% compared to the previous year of 345.42 trillion and reached 99.60% of the 2021 target. From the realization of operating revenues in 2021, the largest contributor came from sales of electricity by 78.45%, followed by electricity subsidies from the government by 13.52%, compensation income by 6.67%, other operating income by 1.20%, and customer connection by 0.13%.

Tumbuhnya pendapatan usaha tersebut mendorong nilai EBITDA dan laba tahun berjalan 2021 terealisasi masing-masing sebesar Rp89,17 triliun dan Rp13,17 triliun, meningkat 3,39% dan 119,82% dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi masing-masing sebesar Rp83,86 triliun dan Rp5,99 triliun. Selain ditopang dari peningkatan penjualan listrik, pencapaian ini juga dipengaruhi oleh efisiensi beban keuangan yang tercermin dari kemampuan Perusahaan untuk melunasi kewajibannya kepada pihak berelasi dan pihak ketiga.

The growth in operating income pushed the EBITDA value and profit for the year 2021 to be realized at Rp89,17 trillion and 13.17 trillion, respectively, an increase of 3.39% and 119.82% compared to 2020 which was realized at 83.86 trillion and 5.99 trillion. Apart from being supported by an increase in electricity sales, this achievement was also influenced by the efficiency of the finance costs as reflected in the Company's ability to pay off its obligations to related parties and third parties.

Pada tahun 2021, nilai ekuitas tumbuh sebesar 4,45% dari tahun 2020 sebesar Rp939,81 triliun menjadi Rp981,61 triliun. Kenaikan ekuitas ini terutama disebabkan oleh adanya dukungan finansial dari pemerintah kepada PLN berupa Penyertaan Modal Negara dan kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

In 2021, the equity value increased by 4.45% from Rp939.81 trillion in 2020 to Rp981.61 trillion. Such increase was mainly due to financial support from the government to PLN in the form of State Equity Participation and an increase in retained earnings that had not been determined yet.

Sementara itu, total aset tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.613,22 triliun, tumbuh 1,53% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.588,86 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh utang bank jangka panjang, utang obligasi dan sukuk ijarah akibat diversifikasi pendanaan melalui penerbitan efek utang berupa obligasi maupun sukuk korporasi dalam mata uang asing maupun valuta asing dan diterbitkan di domestik dan di luar negeri serta penurunan utang lain – lain.

Meanwhile, total assets in 2021 were realized at Rp1,613.22 trillion, growing 1.53% compared to 2020 at Rp1,588.86 trillion. The decrease was caused by long-term bank loans, bonds payable, and sukuk ijara due to diversification of funding through the issuance of debt securities in the form of bonds and corporate sukuk in foreign currencies and foreign exchange and issued domestically and abroad as well as a decrease in other debt.

Mengacu pada pencapaian kinerja produksi, penjualan, dan keuangan, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan melihat pencapaian target Perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2021. Secara keseluruhan, total skor KPI tahun 2021 berhasil terealisasi sebesar 107,49, lebih tinggi dari bobot maksimal sebesar 100,00, sehingga

In addition to the achievement of production, sales, and financial performance, the performance assessment of the Board of Directors also takes account of the achievement of the Company's targets set by the shareholder in the Key Performance Indicators (KPI) in 2021. Overall, the total KPI score in 2021 was realized at 107.49, higher than the maximum value of 100.00, thus classified into the AAA

termasuk dalam kategori SEHAT AAA. Adapun rincian mengenai realisasi skor untuk kelima perspektif dalam KPI adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, dengan realisasi skor sebesar 43,51;
2. Inovasi Model Bisnis, dengan realisasi skor sebesar 21,68;
3. Kepemimpinan Teknologi, dengan realisasi skor sebesar 16,81;
4. Pengembangan Investasi, dengan realisasi skor sebesar 11,00; dan
5. Pengembangan Talenta, dengan realisasi skor sebesar 14,49.

Realisasi skor KPI tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 103,46. Pencapaian tersebut menunjukkan keseriusan Direksi dan seluruh jajaran manajemen PLN dalam memperbaiki kinerja operasional dan keuangan selama tahun buku. Kami selaku jajaran Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya Direksi dan manajemen dalam meningkatkan kinerja Perusahaan selama tahun buku demi mendorong tercapainya target yang ditetapkan oleh pemegang saham.

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas dalam mengawasi dan memonitor seluruh pengelolaan bisnis dan operasional yang dijalankan oleh Direksi. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan dengan mekanisme *check and balances* dengan tujuan akhir untuk mencapai peningkatan kinerja dan kemajuan usaha Perusahaan.

Untuk memastikan agar pengelolaan Perusahaan dilakukan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta target dan sasaran yang ditetapkan oleh pemegang saham, Direksi PLN telah menyusun strategi bisnis sebagai acuan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasionalnya. Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan dan memberi saran kepada Direksi atas implementasi strategi bisnis yang disusun, yaitu strategi bisnis jangka panjang yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), strategi bisnis jangka pendek yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan pencapaian target-target *breakthrough* Transformasi PLN.

SOUND category. The score details for the five perspectives in the KPI are as follows:

1. Economic and Social Value for Indonesia, with the realized score of 43.51;
2. Business Model Innovation, with the realized score of 21.68;
3. Technology Leadership, with the realized score of 16.81;
4. Investment Development, with the realized score of 11.00; and
5. Talent Development, with the realized score of 14.49.

The KPI score realization in 2021 was higher than the previous year of 103.46. This achievement shows the seriousness of the Board of Directors and all personnel of PLN management in improving operational and financial performance during the fiscal year. The Board of Commissioners would like to express our greatest appreciation for the efforts of the Board of Directors and management in improving the Company's performance during the fiscal year to achieve the targets set by the shareholder.

SUPERVISION MECHANISM FOR CORPORATE STRATEGY IMPLEMENTATION

Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is in charge of supervising and monitoring all business and operational management carried out by the Board of Directors. Supervision of the Board of Commissioners is carried out through a check and balances mechanism with the ultimate goal of improving the performance and business progress of the Company.

To ensure that the management of the Company aligns with the vision, mission, goals, and targets set by the shareholder, the Board of Directors of PLN has developed a business strategy as a reference for the Company's business and operational activities. The Board of Commissioners always supervises and provides advice to the Board of Directors on the implementation of the prepared business strategies, namely the long-term business strategy set out in the Company's Long-Term Plan (RJPP), the short-term business strategy set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and achievement of PLN Transformation breakthrough targets.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Selain melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberikan nasihat, saran dan arahan terhadap Direksi, baik terkait kebijakan dan strategi, kondisi atau isu-isu strategis terkini maupun implementasi action plan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Perusahaan selama tahun buku berjalan serta menjaga keberlangsungan bisnis di masa depan. Pemberian arahan Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan melalui Rapat Konsultasi dengan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tertentu. Selama tahun 2021, kami menyelenggarakan Rapat Konsultasi dengan seluruh anggota Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan 35 (tiga puluh lima) kali Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi tertentu, melebihi dari yang ditargetkan dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2021 sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dalam setahun.

FREQUENCY AND METHOD OF ADVICE PROVISION TO THE BOARD OF DIRECTORS

In addition to carrying out the supervisory function, the Board of Commissioners is also tasked with providing advice, suggestions, and direction to the Board of Directors related to policies and strategies, current conditions or strategic issues, as well as the implementation of action plans to support the Company's performance during the current fiscal year and maintain business continuity in the future. The provision of direction from the Board of Commissioners to the Board of Directors is carried out through a Consultation Meeting with the Board of Directors and a Board of Commissioners Meeting with certain Directors. During 2021, we held 12 (twelve) Consultation Meetings with all members of the Board of Directors and 35 (thirty five) Board of Commissioners Meetings by inviting certain Directors, exceeding the target in the 2021 Board of Commissioners Work Program Plan of 24 (twenty four) times a year.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kami senantiasa merekomendasikan Direksi dan seluruh Insan PLN untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan sesuai dengan *best practices* yang mengacu pada standar GCG terbaik. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan tetap berada dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendorong terwujudnya budaya korporasi yang Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (TARIF). Penerapan GCG di PLN tidak hanya mencakup tata kelola (*governance*) saja, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau dikenal dengan istilah *Governance, Risk Management*, dan *Compliance* (GRC).

Praktik GCG di PLN telah dijalankan dengan sangat baik, tercermin dari perolehan skor penilaian GCG yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Tim Internal PLN pada tahun 2021 dengan skor sebesar 90,46, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Realisasi skor tersebut lebih tinggi dari perolehan skor penilaian GCG pada tahun 2020 sebesar 89,56 dilakukan oleh asesor independen BPKP dan tahun 2019 yang juga dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) sebesar 88,11, keduanya termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

OPINION ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

We constantly advise the Board of Directors and all PLN's personnel to implement Good Corporate Governance (GCG) within the Company in accordance with best practices that refer to the best GCG standards. This aims to align the implementation of the Company's business activities with the applicable laws and regulations and to encourage a corporate culture that realizes Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF) principles. The implementation of GCG at PLN does not only cover governance, but also includes risk management and compliance with laws and regulations, otherwise known as Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).

GCG practices at PLN have been carried out properly as reflected in the score of GCG self-assessment carried out independently by PLN Internal Team in 2021 with a score of 90.46, which falls under "Excellent" category. The realization of this score is higher than the GCG assessment score obtained in 2020 at 89.56 carried out by independent assessors of BPKP and in 2019 which was also carried out independently (self-assessment) at 88.11, both of which were classified in the "Excellent" category.

Kami juga mengapresiasi inisiatif Direksi untuk memperkuat struktur tata kelola PLN selama tahun 2021 dengan membentuk Komite Investasi yang berada di bawah Direksi. Komite tersebut bertugas untuk mengelola manajemen investasi berdasarkan *four-eyes principles*. Selain itu, Direksi PLN juga membentuk Divisi Pusat Kebijakan (*Central Policy Division*) yang bertugas untuk melakukan pengembangan dan peninjauan secara terus menerus terhadap standar kebijakan yang berlaku di Perusahaan; harmonisasi kebijakan dan prosedur baik dari internal maupun eksternal; dan mengelola sistem manajemen terintegrasi untuk peningkatan efektivitas organisasi secara keseluruhan yang berdampak pada aspek keuangan, teknis, dan citra Perusahaan. Divisi ini berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko di PLN, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam Perusahaan serta mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di Perusahaan.

Selama tahun 2021, PLN melakukan implementasi ERM PT PLN (Persero) secara korporat. Implementasi tersebut didukung oleh adanya pembaharuan terhadap Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0071.P/DIR/2021 pada tanggal 15 April 2021 untuk menjaga agar PLN tetap dalam koridor pengelolaan usaha yang berkehati-hatian dalam setiap aktivitas yang dilakukannya melalui pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal terkait dengan penerapan GCG. Untuk melengkapi pedoman manajemen risiko terintegrasi tersebut, PLN menetapkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0010.E/DIR/2021 tentang Prosedur Pelaksanaan *Four-Eyes Principles* (4EP) Dalam Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Desember 2021.

We also appreciate the Board of Directors' initiative to strengthen PLN's governance structure during 2021 by establishing an Investment Committee under the Board of Directors. The committee is tasked with managing investment based on the four-eyes principles. In addition, the Board of Directors of PLN also established a Central Policy Division with the duty to carry out continuous development and review of the policy standards applicable in the Company; harmonization of policies and procedures both internally and externally; and an integrated management system to improve the overall effectiveness of the organization, which affects the financial, technical, and reputational aspects of the Company. This division works under the Directorate of Finance and Risk Management.

OPINION ON RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In supervising the implementation of risk management at PLN, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Management Committee. Based on the Risk Management Committee Charter, the duties and responsibilities of the Risk Management Committee include coordinating the implementation and monitoring of the existence and effectiveness of each component of Enterprise Risk Management (ERM) within the Company as well as measuring the effectiveness of each component of ERM that has been established in the Company.

During 2021, PLN applied PT PLN (Persero) ERM on a corporate basis. This implementation was supported by an update to the General Guidelines for Integrated Risk Management stipulated in Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0071.P/DIR/2021 dated April 15, 2021 to maintain prudent business management in every aspect of PLN's business activity through compliance with the provisions of laws and regulations and internal regulations related to GCG implementation. To complete the integrated risk management guidelines, PLN has issued a Circular Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0010.E/DIR/2021 on Procedures for Implementation of the Four-Eyes Principles (4EP) in Decision Making dated December 22, 2021.

Keseriusan Direksi dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi juga tercermin dari adanya *Statement of Corporate Intent* tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero) yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi pada tanggal 14 April 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh dinamika ketidakpastian di masa mendatang penuh dengan peluang dan risiko yang harus ditanggapi secara cermat, tepat, dan *prudent* berlandaskan praktik *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) yang andal untuk mencapai visi 2024 PLN yakni menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan sebagai pilihan pertama para pelanggan untuk solusi energi.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian dari implementasi manajemen risiko secara berkesinambungan, PLN melakukan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko atau *Risk Management Maturity* (RMM). Pengukuran RMM di PLN dilakukan setiap semester, pada seluruh entitas yaitu Divisi/Satuan Kantor Pusat, Unit Induk/Pusat-Pusat, Anak Perusahaan, dan secara Korporat. Pengukuran RMM di PLN menggunakan level skala 5, dengan polaritas positif (semakin tinggi semakin baik). Ringkasan hasil pengukuran RMM pada semester 2 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Skor RMM Korporat pengukuran dilakukan oleh asesor independen eksternal dengan hasil sebesar 2,65 (target 2,60).
2. Skor rata-rata RMM 69 Divisi Kantor Pusat sebesar 3,01 (rata-rata target 2,60).
3. Skor rata-rata RMM 48 Unit Induk/Pusat-Pusat sebesar 3,41 (rata-rata target 3,28).
4. Skor rata-rata RMM 12 Anak Perusahaan sebesar 2,62 (rata-rata target 2,60).

PANDANGAN ATAS KINERJA KEPATUHAN

Aspek Kepatuhan (*Compliance*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan praktik GRC di lingkungan PLN. Aspek ini bertujuan untuk memastikan agar sistem, regulasi, kebijakan, dan proses bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk mendukung pelaksanaan Kepatuhan, Direksi membentuk Divisi Kepatuhan yang salah satunya bertugas untuk mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan *fraud risk management system* dan *fraud risk management information system*, membangun kompetensi dan lingkungan yang memadai untuk implementasi program *anti fraud*.

The seriousness of the Board of Directors in implementing Integrated Risk Management is also reflected in the Statement of Corporate Intent regarding the Implementation of Integrated Risk Management of PT PLN (Persero) which was signed by all members of the Board of Directors on April 14, 2021. This was motivated by the uncertainties in the future that is full of opportunities and risks that must be addressed in a careful, precise, and prudent manner based on reliable Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) practices to achieve PLN's 2024 vision, namely to become the leading electricity company in Southeast Asia and the customers' first choice for energy solutions.

To determine the success of risk management implementation on an ongoing basis, PLN conducts an assessment of the Risk Management Maturity (RMM) level. The measurement of RMM at PLN is carried out every semester in all entities, namely Divisions/Units of the Head Office, Parent Units/Centers, Subsidiaries, and Corporate. The RMM measurement at PLN uses a 5-level scale, with a positive polarity (the higher the better). The summary of the RMM measurement results in the second half of 2021 is as follows:

1. The corporate RMM score was measured by an external independent assessor with a result of 2.65 (target 2.60).
2. The average RMM score of 69 Head Office Divisions was 3.01 (average target 2.60).
3. The average RMM score of 48 Parent Units/Centers was 3.41 (average target 3.28).
4. The average RMM score of 12 Subsidiaries was 2.62 (average target 2.60).

OPINION OF COMPLIANCE PERFORMANCE

The Compliance aspect is an integral part of GRC implementation at PLN. This aspect aims to ensure that the systems, regulations, policies, and business processes run by the Company are in accordance with the principles of GCG. To support the implementation of Compliance, the Board of Directors established a Compliance Division which has the duty of developing and evaluating policies on fraud risk management system and fraud risk management information system, building adequate competency and environment for the implementation of anti-fraud programs.

Menurut pandangan kami, kinerja *Compliance* telah dilakukan dengan baik. Pandangan tersebut didukung oleh pencapaian kinerja Divisi Kepatuhan selama tahun 2021 yang tercermin dari rata-rata *Maturity Level* Kepatuhan Unit Induk rata-rata pada level 4,09 dari skala 5,00 dan Divisi/Satuan rata-rata pada level 4,16 dari skala 5,00, hasil evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi UPG PLN yang dilakukan oleh KPK sebesar 84,10, konfirmasi kejadian Gratifikasi dan *Conflict of Interest* rata-rata sampai dengan Desember 2021 sebesar 97,84%, hasil Survei *Awareness* Kepatuhan rata-rata tahun 2021 untuk seluruh Unit dan Divisi sebesar 99%, dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencapai 100%, dengan total Wajib Lapor LHKPN sebanyak 8.672 orang.

We are of the opinion that Compliance has been carried out properly based on the Compliance Division's performance achievement in 2021. This was reflected in the average Compliance Maturity Level of the Parent Units at 4.09 on a scale of 5.00 and the average of Divisions/Units at 4.16 on a scale of 5.00, the evaluation results of the UPG PLN gratification control by the KPK at 84.10, confirmation of Gratification and Conflict of Interest events on average until December 2021 at 97.84%, the results of the Compliance Awareness Survey on average in 2021 for all Units and Divisions at 99%, and submission of State Officials Assets Reports (LHKPN) at 100%, with a total of 8,672 LHKPN subjects.

Pada tahun 2021, PLN mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk seluruh Divisi/Satuan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (70 Divisi/Satuan), 48 Unit Induk, dan 11 Anak Perusahaan. Selain itu, pada tahun 2021 PLN meraih penghargaan "Pengelolaan LHKPN Terbaik untuk Kategori >1000 Wajib Lapor" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

In 2021, PLN received the SNI ISO 37001:2016 Certificate regarding Anti-Bribery Management System for all Divisions/Units at PT PLN (Persero) Head Office (70 Divisions/Unit), 48 Parent Units, and 11 Subsidiaries. In addition, in 2021 PLN won "The Best LHKPN Management for Category >1000 Mandatory Reports" from the Corruption Eradication Commission (KPK).

PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Dalam rangka mendukung penerapan GCG di lingkungan PLN, Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan atas pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Pengelolaan WBS ini bertujuan untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, dan praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG. Menurut pandangan kami, pengelolaan WBS di PLN telah dijalankan dengan baik, didukung oleh adanya Surat Edaran Direksi No. 008.E/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Sistem Pelaporan yang menjadi pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan PLN, meliputi mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor, dan tindak lanjut atas laporan pengaduan yang diterima.

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) MANAGEMENT

To support GCG implementation at PLN, the Board of Commissioners continuously monitors the management of the Whistleblowing System (WBS). WBS management aims to prevent and combat corruption, bribery, and other fraudulent practices that are contrary to GCG principles. We believe that the management of WBS at PLN has been carried out properly, supported by Circular Letter of the Board of Directors No. 008.E/DIR/2016 dated September 30, 2016 on Reporting System which serves as the guideline for WBS implementation within PLN, including reporting mechanisms, protection of whistleblowers, and follow-up on reports received.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pengelolaan Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Manajemen Risiko. Ketiga komite tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah diatur dalam *Charter* masing-masing komite. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah menandatangani pemutakhiran Komite Nominasi dan Remunerasi *Charter* pada tanggal 17 Juni 2021 dan Komite Manajemen Risiko *Charter* pada tanggal 21 Desember 2021.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris menilai bahwa ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan *charter* yang dimiliki. Selain itu, penilaian kinerja komite juga tercermin dari hasil *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing komite pada tahun buku.

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki beberapa tugas di antaranya melakukan telaah untuk menilai keandalan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN dan memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) PLN. Selain itu, Komite Audit juga bertugas untuk melakukan telaah atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan.

Kinerja Komite Audit selama tahun 2021 yang tercermin pada hasil KPI Komite Audit tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik, dengan skor 99 dari bobot maksimal sebesar 100. Komite Audit secara aktif menghadiri rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali, mengadakan rapat internal Komite Audit sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, dan melakukan kunjungan kerja ke Unit/Anak Perusahaan sebanyak 5 (lima) kali.

PERFORMANCE ASSESSMENT TO COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties as supervisor of the management of the Company, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Committee. The three committees have their respective duties and responsibilities which have been regulated in the respective committee's charter. In 2021, the Board of Commissioners has signed an update to the Nomination and Remuneration Committee Charter on June 17, 2021 and the Risk Management Committee Charter on December 21, 2021.

During 2021, the Board of Commissioners considered that the three committees had carried out their duties and responsibilities well in accordance with their charters. In addition, the evaluation of the committee's performance is also reflected in the results of the Key Performance Indicators (KPI) of each committee for the fiscal year.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has several duties including conducting a review to assess the reliability and effectiveness of the PLN's Internal Control System and ensuring the effectiveness of the implementation of activities and audit results carried out by the PLN's Internal Audit Unit (SPI). In addition, the Audit Committee is also tasked with reviewing the Company's compliance with laws and regulations, particularly those relating to reporting to stakeholders.

The performance of the Audit Committee during 2021 as reflected in the results of the KPI of the Audit Committee in 2021 showed good results, with a score of 99 out of a maximum weight of 100. The Audit Committee actively attended 63 (sixty three) meetings with the Board of Commissioners, held 32 (thirty two) internal Audit Committee meetings, and made 5 (five) working visits to Units/Subsidiaries.

Selain itu, pada tahun 2021 Komite Audit juga berpartisipasi dalam melakukan *review* dan memberikan tanggapan atas usulan Direksi tentang RKAP 2021 dan RKAP Revisi 2021, Laporan Manajemen Triwulanan I, II, III 2021, Laporan Manajemen Tahunan Tahun Buku 2020, serta usulan penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dan Piutang Ragu-Ragu (PRR).

In addition, in 2021 the Audit Committee will also participate in reviewing and providing responses to the Board of Directors' proposals regarding the 2021 RKAP and 2021 Revised RKAP, Quarterly Management Reports on Q1, Q2, Q3, of 2021, Annual Management Reports for Fiscal Year 2020, as well as proposals for the elimination of Fixed Assets. Operations (ATTB) and Doubtful Accounts (PRR).

PENILAIAN KINERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki beberapa tugas di antaranya melakukan telaah atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur, melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut, dan mengevaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap Perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee has several duties including conducting a review of the Company's risk management which includes various risks faced by the Company, strategies, systems and policies of the Company's risk management, the Company's internal control, including policies, methodologies and infrastructure, evaluating the risk measurement model used by the Company and provide recommendations for further improvement, and evaluate the results of the risk assessment and other documents submitted by the Board of Directors as a complement to the proposed investment/funding/transaction plan and other operational activities that have a major impact on the Company and provide feedback to the Board of Commissioners on the proposal of the Board of Directors.

Kinerja Komite Manajemen Risiko selama tahun 2021 yang tercermin pada hasil KPI Komite Manajemen Risiko tahun 2021 menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan skor yang mencapai bobot maksimal sebesar 100. Komite Manajemen Risiko aktif dalam melakukan evaluasi dan memberikan saran atas *top risks* yang dilaporkan secara periodik dan sewaktu-waktu (*ad hoc*) pada *executive dashboard*, kebijakan, metodologi, dan proses *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam menghasilkan risiko-risiko utama, usulan Direksi terkait rencana kerja Perusahaan yang tertuang dalam RKAP 2021 dan RKAP Revisi 2021, serta kinerja Perusahaan yang tercermin dalam Laporan Manajemen Triwulanan I, II, III 2021, Laporan Manajemen Tahunan Tahun Buku 2020, dan hasil KPI PLN Tahun 2020 dan 2021.

The performance of the Risk Management Committee during 2021 as reflected in the results of the KPI of the Risk Management Committee in 2021 showed satisfactory results, with a score that reached a maximum weight of 100. The Risk Management Committee is active in evaluating and providing advice on top risks that are reported periodically and at any time (ad hoc) on the executive dashboard, policies, methodologies, and Enterprise Risk Management (ERM) processes in generating key risks, the Board of Directors' proposals regarding the Company's work plan as contained in the 2021 RKAP and 2021 Revised RKAP, as well as the Company's performance reflected in Quarterly Management Reports on Q1, Q2, Q3, of 2021, Annual Management Reports for Fiscal Year 2020, and PLN KPI results for 2020 and 2021.

Selain itu, pada tahun 2021 Komite Manajemen Risiko melakukan evaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan

In addition, in 2021 the Risk Management Committee will evaluate the results of the risk assessment and other documents submitted by the Board of Directors as a complement to the proposed investment/funding/

Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Saat Penerbitan Laporan / Board of Commissioners of PT PLN (Persero) during the Issuance of this Report

MOHAMAD IKHSAN
Komisaris
Commissioner

SUSIWIJONO MOEGIARSO
Komisaris
Commissioner

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

SUAHASIL NAZARA
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

DUDY PURWAGANDHI
Komisaris
Commissioner

EKO SULISTYO
Komisaris
Commissioner

TEDI BHARATA
Komisaris
Commissioner

RIDA MULYANA
Komisaris
Commissioner

HERU WINARKO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

ALEX ISKANDAR MUNAF
Komisaris Independen
Independent Commissioner

kegiatan operasional lainnya, memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut, serta mengawasi dan memantau mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional yang berdampak besar pada Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko juga telah melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan permintaan dan arahan Dewan Komisaris, di antaranya terkait dengan *update* dan rencana aksi proyek terkendala, pemanfaatan limbah *Fly Ash Bottom Ash* (FABA), pemenuhan kebutuhan batu bara, program *co-firing* sampah (SRF), dan *review digital procurement*.

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang efektif terkait pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Nominasi) dan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya (Remunerasi).

Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2021 yang tercermin pada hasil KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2021 menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan skor yang mencapai bobot maksimal sebesar 100. Komite Nominasi dan Remunerasi secara aktif menghadiri rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 66 (enam puluh enam) kali dan mengadakan rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali.

Selain itu, pada tahun 2021 Komite Nominasi dan Remunerasi juga berpartisipasi dalam melakukan telaah atas usulan Direksi tentang Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan, penugasan Dewan Komisaris selain tentang Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan, dan usulan Surat Keputusan (SK) terkait internal Dewan Komisaris (SK Komite, Insentif Kesejahteraan (IKS), Tunjangan Hari Raya (THR), dll).

transaction plan and other operational activities, provide feedback to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposal, as well as supervise and monitor risk mitigation to investment and operational activities that have a major impact on the Company.

The Risk Management Committee has also carried out other tasks according to the request and direction of the Board of Commissioners, including those related to updates and action plans for constrained projects, utilization of Fly Ash Bottom Ash (FABA) waste, meeting coal needs, waste co-firing programs (SRF), and digital procurement reviews.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is assigned with assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and providing effective advice regarding the proposal of a person to be placed in a position as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners (Nomination) and the remuneration is determined and given to members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on their position and role. given in accordance with the duties, authorities, and responsibilities (Remuneration).

The performance of the Nomination and Remuneration Committee during 2021 as reflected in the KPI results of the Nomination and Remuneration Committee in 2021 showed satisfactory results, with a score that reached a maximum weight of 100. The Nomination and Remuneration Committee actively attended 66 (sixty six) meetings with the Board of Commissioners and held 33 (thirty three) internal Nomination and Remuneration Committee meetings.

In addition, in 2021 the Nomination and Remuneration Committee will also participate in reviewing the recommendations of the Board of Directors regarding the Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries, the assignment of the Board of Commissioners other than the Directors and Commissioners of Subsidiaries, and the proposed Decree (SK) related to the internal Board of Commissioners (SK Committee, Welfare Incentives (IKS), Holiday Allowances (THR), etc).

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris meyakini bahwa PLN memiliki prospek yang cerah di masa depan. Dengan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN mendapatkan dukungan finansial yang kuat dari pemerintah selaku pemegang saham Perusahaan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pemegang saham untuk menghasilkan dan menyediakan energi listrik bagi seluruh masyarakat serta pelaku bisnis dan industri di Indonesia.

Dari sisi eksternal, kondisi perekonomian diperkirakan masih akan tumbuh positif. Berdasarkan Laporan *World Economic Outlook* (WEO) *International Monetary Fund* (IMF) edisi Januari 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diestimasikan berada di level 4,4%. Di tingkat nasional, pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menguat di level 5,2%, tingkat inflasi sebesar 3% yoy, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mencapai Rp14.350/USD, dan tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun sebesar 6,82%.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kami mengapresiasi langkah Direksi untuk mengoptimalkan tren pemulihan ini melalui penyusunan strategi *Business Outlook* PLN Tahun 2022. Dalam menyusun strategi ini, Direksi telah mempertimbangkan 3 (tiga) faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan, yaitu *Energy Trend Outlook, Technology Trend Outlook*, dan *Lifestyle Trend Outlook*. Selain itu, penyusunan strategi tersebut juga mempertimbangkan perubahan perilaku konsumen yang kini mengandalkan penggunaan teknologi dan elektrifikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini tentu dapat menjadi suatu peluang bisnis yang dapat berdampak positif terhadap kinerja PLN di masa depan, sehingga perlu dioptimalkan dengan baik demi mewujudkan pertumbuhan Perusahaan yang positif dan berkelanjutan.

Meski demikian, kami menghimbau kepada Direksi untuk mewaspadai adanya isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mulai memanas di awal tahun 2022. Isu tersebut diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan perdagangan global. Selain itu, konflik di Eropa Timur ini turut menyebabkan kenaikan harga komoditas energi di pasar global. Pada tanggal 7 Maret 2022, harga 2 (dua) jenis minyak mentah dunia, yaitu jenis WTI dan *Brent* mengalami kenaikan masing-masing sebesar USD125,6 per barel dan USD130,84 per barel.

OPINION ON BUSINESS OUTLOOK

The Board of Commissioners is confident in PLN's bright prospects in the future. With its status as a State-Owned Enterprise (SOE), PLN leverages on strong financial support from the government as the Company's shareholder to carry out the mandate given by the shareholder to produce and provide electrical energy for the people and for business and industry players in Indonesia.

External economic conditions are predicted to continue its positive growth. Based on the January 2022 edition of the World Economic Outlook (WEO) of the International Monetary Fund (IMF), the global economic growth rate in 2022 is estimated at 4.4%. At the national level, the government in the 2022 State Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBN) targets economic growth at 5.2%, inflation rate at 3% yoy, the exchange rate of the Rupiah against the United States Dollar at Rp14,350/USD, and the 10-Year SUN Interest Rate at 6.82%.

In line with the economic recovery after the Covid-19 pandemic, we appreciate the measures taken by the Board of Directors to optimize this recovery trend through the preparation of strategies in the PLN 2022 Business Outlook. In its preparation, the Board of Directors has considered 3 (three) main factors that affect the Company's performance, namely the Energy Trend Outlook, Technology Trend Outlook, and Lifestyle Trend Outlook. In addition, the formulation of the strategy also takes account of changes in consumer behavior, which now relies on the use of technology and electrification as an inseparable part of daily activities. This condition opens business opportunities that can have a positive impact on PLN's performance in the future, so it needs to be optimized properly to realize positive and sustainable growth of the Company.

However, we remind the Board of Directors to be aware of geopolitical issues between Russia and Ukraine that began in early 2022. This issue is expected to affect global economic and trading activities. In addition, the conflict in Eastern Europe has also led to an increase in energy commodity prices on the global market. On March 7, 2022, the global prices of 2 (two) types of crude oil, namely WTI and Brent, increased by USD125.6 per barrel and USD130.84 per barrel, respectively.

Di sisi lain, kami memberi saran kepada Direksi untuk terus mencermati adanya isu geopolitik global di awal tahun 2022 yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Keterlibatan Rusia dalam konflik geopolitik dengan Ukraina juga diperkirakan akan mempengaruhi rantai pasokan gas di tingkat global pada tahun 2022 mendatang. Hal ini diperkuat bahwa Rusia merupakan salah satu produsen gas terbesar di Eropa dan dunia. Dengan adanya konflik ini, sejumlah negara di Eropa diprediksi akan mulai beralih menggunakan sumber energi dari batu bara sehubungan dengan larangan impor migas dari Rusia sebagai bagian dari sanksi negara Barat terhadap Rusia. Dengan demikian, permintaan batu bara diperkirakan akan mengalami peningkatan.

On the other hand, we advise the Board of Directors to keep a close watch on global geopolitical issues in early 2022 that could affect global economic and trading activities. Russia's involvement in the geopolitical conflict with Ukraine is also expected to affect gas supply chains at the global level in 2022 due to Russia's position as one of the largest gas producers in Europe and the world. With this conflict, a number of countries in Europe are predicted to start switching to energy sources from coal in connection with the ban on oil and gas imports from Russia as part of Western sanctions against Russia. Thus, the demand for coal is expected to increase.

Meningkatnya permintaan batu bara menyebabkan harga komoditas batu bara melonjak tajam. Pada awal Maret 2022, harga batu bara global menembus USD400 per metrik ton, mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Seiring dengan naiknya harga batu bara di pasar global, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada bulan Maret 2022 sebesar USD203,69 per ton, naik USD15,31 per ton dari HBA bulan Februari 2022 sebesar USD188,38 per ton. Kenaikan harga batu bara ini tentu akan berdampak terhadap rantai pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLTU yang dioperasikan oleh PLN dan kinerja keuangan Perusahaan di tahun depan, sehingga perlu disiasati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

The rising demand for coal has led to a sharp increase in coal commodity prices. In early March 2022, global coal prices surpassed USD400 per metric ton, reaching an all-time high. Along with the increase in coal prices in the global market, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) set the Coal Reference Price (HBA) in March 2022 at USD203.69 per ton, an increase of USD15.31 per ton from the February 2022 HBA of USD188.38 per ton. Such increase in coal prices will certainly affect the coal supply chain to meet the needs of PLTU operated by PLN and the Company's financial performance in the next year, so it requires proper handling to prevent negative impact on the Company's operational and financial performance.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2021, komposisi Dewan Komisaris PLN mengalami beberapa kali perubahan susunan anggota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik No. SK-90/MBU/03/2021. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris Perusahaan dan mengangkat Bapak Ardan Adiperdana sebagai Komisaris Perusahaan yang baru.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In 2021, the composition of the Board of Commissioners of PLN underwent several changes with the following details:

1. The first change occurred on March 17, 2021 based on Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-90/MBU/03/2021. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN agreed to honorably dismiss Mr. Muhammad Yusuf Ateh as Commissioner of the Company and appoint Mr. Ardan Adiperdana as the new Commissioner of the Company.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per tanggal 17 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

a. Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Amien Sunaryadi
b. Wakil Komisaris Utama : Suahasil Nazara
c. Komisaris : Rida Mulyana
d. Komisaris : Ilya Avianti
e. Komisaris : Mohamad Ikhsan
f. Komisaris : Dudy Purwagandhi
g. Komisaris : Ardan Adiperdana
h. Komisaris : Mohammad Rudy Salahuddin
i. Komisaris : Eko Sulistyo
j. Komisaris Independen : Deden Juhara
k. Komisaris Independen : Murtaqi Syamsuddin

2. Perubahan kedua terjadi berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk:
   - Memberhentikan dengan hormat Ibu Ilya Avianti dan Bapak M. Rudy Salahuddin sebagai Komisaris serta Bapak Deden Juhara dan Bapak Murtaqi Syamsuddin sebagai Komisaris Independen Perusahaan; dan
   - Mengangkat Bapak Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris serta Bapak Heru Winarko dan Bapak Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Independen.

   Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris sejak 16 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

   a. Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Amien Sunaryadi
   b. Wakil Komisaris Utama : Suahasil Nazara
   c. Komisaris : Rida Mulyana
   d. Komisaris : Susiwijono Moegiarso
   e. Komisaris : Mohamad Ikhsan
   f. Komisaris : Dudy Purwagandhi
   g. Komisaris : Ardan Adiperdana
   h. Komisaris : Eko Sulistyo
   i. Komisaris Independen : Heru Winarko
   j. Komisaris Independen : Alex Iskandar Munaf

Therefore, the Board of Commissioners composition as of March 17, 2021 was as follows:

a. President Commissioner and Independent Commissioner : Amien Sunaryadi
b. Vice President Commissioner : Suahasil Nazara
c. Commissioner : Rida Mulyana
d. Commissioner : Ilya Avianti
e. Commissioner : Mohamad Ikhsan
f. Commissioner : Dudy Purwagandhi
g. Commissioner : Ardan Adiperdana
h. Commissioner : Mohammad Rudy Salahuddin
i. Commissioner : Eko Sulistyo
j. Independent Commissioner : Deden Juhara
k. Independent Commissioner : Murtaqi Syamsuddin

2. The second change occurred based on Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN agreed to:
   - Honorably dismiss Ms. Ilya Avianti and Mr. M. Rudy Salahuddin as Commissioners and Mr. Deden Juhara and Mr. Murtaqi Syamsuddin as Independent Commissioners of the Company; and
   - Appoint Mr. Susiwijono Moegiarso as Commissioner and Mr. Heru Winarko and Mr. Alex Iskandar Munaf as Independent Commissioners.

   Therefore, the Board of Commissioners composition since July 16, 2021 until December 31, 2021 is as follows:

   a. President Commissioner and Independent Commissioner : Amien Sunaryadi
   b. Vice President Commissioner : Suahasil Nazara
   c. Commissioner : Rida Mulyana
   d. Commissioner : Susiwijono Moegiarso
   e. Commissioner : Mohamad Ikhsan
   f. Commissioner : Dudy Purwagandhi
   g. Commissioner : Ardan Adiperdana
   h. Commissioner : Eko Sulistyo
   i. Independent Commissioner : Heru Winarko
   j. Independent Commissioner : Alex Iskandar Munaf

Setelah tahun buku 2021 berakhir hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, terdapat pergantian susunan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ardan Adiperdana dari jabatannya sebagai Komisaris dan mengangkat Bapak Tedi Bharata sebagai Komisaris PLN yang baru.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris setelah periode tahun buku 2021 berakhir hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

a. Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Amien Sunaryadi
b. Wakil Komisaris Utama : Suahasil Nazara
c. Komisaris : Rida Mulyana
d. Komisaris : Susiwijono Moegiarso
e. Komisaris : Mohamad Ikhsan
f. Komisaris : Dudy Purwagandhi
g. Komisaris : Tedi Bharata
h. Komisaris : Eko Sulistyo
i. Komisaris Independen : Heru Winarko
j. Komisaris Independen : Alex Iskandar Munaf

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN yang terjadi selama tahun 2021 sampai dengan diterbitkannya laporan ini, kami segenap jajaran Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Ibu Ilya Avianti, Bapak M. Rudy Salahuddin, Bapak Deden Juhara, Bapak Murtaqi Syamsuddin dan Bapak Ardan Adiperdana atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PLN. Kepada anggota Dewan Komisaris yang baru dilantik, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru.

After the end of the 2021 fiscal year until the publication of this Annual Report, there were changes in composition of the Board of Commissioners based on the Letter of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN approved to honorably dismiss Mr. Ardan Adiperdana from his position as Commissioner and appoint Mr. Tedi Bharata as the new Commissioner of PLN.

Thus, the composition of the Board of Commissioners after the 2021 fiscal year period ends until this Annual Report is published is as follows:

a. President Commissioner and Independent Commissioner : Amien Sunaryadi
b. Vice President Commissioner : Suahasil Nazara
c. Commissioner : Rida Mulyana
d. Commissioner : Susiwijono Moegiarso
e. Commissioner : Mohamad Ikhsan
f. Commissioner : Dudy Purwagandhi
g. Commissioner : Tedi Bharata
h. Commissioner : Eko Sulistyo
i. Independent Commissioner : Heru Winarko
j. Independent Commissioner : Alex Iskandar Munaf

Regarding the change in PLN's Board of Commissioners composition that occurred during 2021 until the publication of this report, the Board of Commissioners would like to express our deepest gratitude to Mr. Muhammad Yusuf Ateh, Ms. Ilya Avianti, Mr. M. Rudy Salahuddin, Mr. Deden Juhara, Mr. Murtaqi Syamsuddin, and Mr. Ardan Adiperdana for their dedication and hard work while serving as members of the Board of Commissioners of PLN. We would like to welcome newly inaugurated members of the Board of Commissioners and wish them success in carrying out their duties.

PENUTUP

Menutup Laporan ini, kami selaku Dewan Komisaris PLN menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama ini, sehingga Perusahaan dapat mencatatkan kinerja yang baik selama tahun 2021. Rasa terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Direksi, Manajemen, serta seluruh Insan PLN yang telah memberikan dedikasi dan kerja kerasnya sehingga sejumlah target yang telah ditetapkan berhasil terealisasi dengan optimal.

Ke depannya, kami senantiasa berharap agar PLN dapat terus memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan seluruh pemangku kepentingan demi mendorong terwujudnya visi PLN untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi serta mampu memberikan kontribusi dan manfaat positif secara berkelanjutan bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia.

CLOSING

To conclude this report, the Board of Commissioners of PLN would like to express our utmost gratitude to the Shareholder and Stakeholders for the trust and support thus far that helped the Company record a good performance during 2021. Our sincere gratitude and appreciation also extend to the Board of Directors, Management, and all PLN's personnel for their dedication and hard work that supported the optimal realization of numerous targets.

In the future, we hope that PLN can continue to maintain mutually beneficial relationships with all stakeholders to support the realization of PLN's vision to become the leading electricity company in Southeast Asia and the number one customer's choice for energy solutions and to give positive contributions and benefits continuously for the people and the state of the Republic of Indonesia.

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners

PT PLN (Persero)

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report

DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Mengawali laporan ini, izinkan kami untuk mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT PLN (Persero) mampu melewati tahun 2021 dengan capaian kinerja yang memuaskan. Pada kesempatan ini, kami selaku Direksi PLN akan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan ini menyajikan informasi mengenai analisis kinerja Perseroan sepanjang tahun buku, analisis tentang prospek usaha ke depan, dan perkembangan implementasi tata kelola perusahaan yang baik selama tahun 2021.

To begin, let us express our gratitude to God the Almighty for His blessings and grace that helped PT PLN (Persero) to pass the year 2021 with satisfying performance. On this occasion, the Board of Directors of PLN will deliver the report on the management of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2021. This report presents the analysis on the Company's performance during the fiscal year, future business outlook, and development of good corporate governance implementation throughout 2021.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) berjudul *World Economic Outlook* edisi Januari 2022, ekonomi global diestimasikan mengalami pertumbuhan sebesar 5,9%, kontras dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang berada di zona negatif sebesar -3,5%. Pemulihan ini dipengaruhi oleh adanya akselerasi program vaksinasi yang dilakukan di sejumlah negara dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

Global economic growth in 2021 demonstrated an improvement from the previous year. Based on the International Monetary Fund's (IMF) report, World Economic Outlook January 2022 edition, the global economy was estimated to grow by 5.9%, in contrast to the negative growth of -3.5% in the previous year. This recovery was influenced by the accelerated vaccination programs in numerous countries in order to suppress the rate of Covid-19 transmission.

Berdasarkan data Bloomberg per 8 Januari 2022, pemberian vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia mencapai sekitar 9,39 miliar dosis yang mencakup 184 negara, dengan rata-rata pemberian vaksinasi per hari mencapai 35,5 juta dosis. Program vaksinasi ini cukup efektif dalam mengendalikan laju penularan Covid-19, sehingga pemerintah di sejumlah negara pun secara bertahap mulai melakukan pelonggaran restriksi demi memulihkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

According to data by Bloomberg as of January 8, 2022, the distribution of Covid-19 vaccines worldwide has reached around 9.39 billion doses covering 184 countries, with an average vaccination per day reaching 35.5 million doses. The vaccination program was quite effective in controlling the rate of Covid-19 transmission to the extent that governments in several countries were gradually easing restrictions in order to restore economic activity and community mobility.

Membaiknya tingkat pertumbuhan ekonomi global juga dapat dilihat dari aktivitas perdagangan global yang menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya permintaan global. Berdasarkan laporan *World Trade Organization* yang diterbitkan pada bulan Oktober 2021, pertumbuhan perdagangan dunia diestimasikan tumbuh hingga 10,8%, lebih tinggi dari estimasi di bulan Maret 2021 sebesar 8,0%. Harga sejumlah komoditas energi juga mengalami kenaikan selama tahun 2021.

The improving rate of global economic growth was also reflected in the positive trend of global trade activity in line with increasing global demand. As reported by the World Trade Organization in October 2021, global trade growth was estimated to grow 10.8%, higher than the estimate in March 2021 of 8.0%. Prices of several energy commodities also increased during 2021.

Berdasarkan data dari World Bank, rata-rata harga per bulan batu bara Australia di tahun 2021 sebesar USD138,05 per juta ton, naik signifikan hingga 127,09% dibandingkan rata-rata harga batu bara per bulan di tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD60,79 per juta ton. Harga rata-rata minyak mentah (*crude oil*) juga tumbuh signifikan hingga 72,88% menjadi USD67,96 per barel di tahun 2021 dibandingkan rata-rata harga di tahun sebelumnya senilai USD39,31 per barel. Sementara itu, rata-rata harga bulanan gas alam mencapai USD3,85 per juta British Thermal Unit (MMBTU) pada tahun 2021, sedangkan LNG sebesar USD10,55 per MMBTU. Pada tahun sebelumnya, rata-rata harga kedua komoditas ini masing-masing berada di level lebih rendah senilai USD2,01 per MMBTU dan USD8,31 per MMBTU.

Based on data from the World Bank, the average monthly price of Australian coal in 2021 was USD138.05 per million tons, a significant increase by 127.09% compared to the average monthly coal price of USD60.79 per million tons in the previous year. The average price of crude oil also surged 72.88% to USD67.96 per barrel in 2021 compared to the average price in the previous year of USD39.31 per barrel. Meanwhile, the average monthly price of natural gas reached USD3.85 per million British Thermal Unit (MMBTU) in 2021, while LNG was at USD10.55 per MMBTU. In the previous year, the average prices of these two commodities were lower by USD2.01 per MMBTU and USD8.31 per MMBTU, respectively.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi global, kondisi perekonomian nasional turut mengalami pertumbuhan di zona positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 mencapai 3,69%, berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan di tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga level -2,07%. Katalis utama perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 adalah pertumbuhan signifikan atas ekspor barang hingga mencapai 26,42% *year-on-year* (YoY) dan peningkatan realisasi investasi, baik dari aspek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masing-masing sebesar 10,0% YoY dan 8,10% YoY.

In line with global economic recovery, national economic conditions also grew positively. Based on data from Statistics Indonesia (SI), the national economic growth rate in 2021 reached 3.69%, in contrast to the -2.07% contraction in 2020. The main catalysts for the rising national economic growth in 2021 were the significant growth of goods exports by 26.42% year-on-year (YoY) and increased investment realization, both from Foreign Investment (PMA) and Domestic Investment (PMDN) by 10.0% YoY and 8.10% YoY, respectively.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mengendalikan aktivitas perekonomian dari situasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Keseriusan tersebut tercermin dari adanya peningkatan anggaran program PEN pada tahun 2021 hingga Rp619 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp533,1 triliun. Anggaran PEN tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi sebesar Rp156,06 triliun. Selain itu, program pemulihan ekonomi juga didukung oleh pemberian insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp42 triliun.

The recovery of national economic growth was inseparable from the government's commitment to provide economic stimulus through the National Economic Recovery (PEN) program to control economic uncertainties arising from the Covid-19 pandemic. This seriousness was reflected in the budget increase of the PEN program budget to Rp619 trillion from previously Rp533.1 trillion. The PEN budget would be allocated mostly to support the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector and corporate financing amounting to Rp156.06 trillion. In addition, the economic recovery program was also supported by the provision of tax incentives for businesses amounting to approximately Rp42 trillion.

Di sisi lain, tingkat inflasi tahun 2021 relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy). Menurut Bank Indonesia, rendahnya tingkat inflasi ini disebabkan oleh permintaan domestik yang belum kuat. Untuk mengendalikan tingkat inflasi agar tetap berada pada kisaran target, Bank Indonesia menetapkan kebijakan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%.

On the other hand, the inflation rate in 2021 was relatively lower than the previous year. Based on data by SI, the Consumer Price Index (CPI) inflation in 2021 remained low below the target range of 3.0±1%. The 2021 CPI inflation was recorded at 1.87% (yoy), an increase from the 2020 CPI inflation of 1.68% (yoy). According to Bank Indonesia, the low rate of inflation was due to weak domestic demand. To control the inflation rate within the target range, Bank Indonesia set a policy to maintain the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) interest rate at 3.50%, the Deposit Facility interest rate at 2.75%, and the Lending Facility interest rate of 4.25%.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga cukup terkendali akibat meningkatnya aliran modal keluar dari negara di tengah terjaganya pasokan valuta asing domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah pada bulan Desember 2021 melemah terbatas 1,52% dari Rp14.050 per USD pada bulan Desember 2020 menjadi Rp14.263 per USD. Dalam upaya mengendalikan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

The Rupiah exchange rate against the United States dollar was fairly under control due to increased capital outflows from the country, coupled by maintained supply of domestic foreign currency and positive outlook of the national economy. Based on data from Bank Indonesia, the Rupiah exchange rate in December 2021 slightly weakened by 1.52% from Rp14,050 per USD in December 2020 to Rp14,263 per USD. To control the Rupiah exchange rate, Bank Indonesia will continue to strengthen its policy of stabilizing the Rupiah exchange rate along with its fundamentals and market mechanisms through effective monetary operations and the sufficient market liquidity.

Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi sinyal perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan dan berada pada fase ekspansi pada triwulan IV 2021. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, *Prompt Manufacturing Index* (PMI-BI) tercatat sebesar 50,17%

The performance of the manufacturing sector signaled an improvement in national economic growth, which entered an expansion phase in Q4/2021. Based on data from Bank Indonesia, the Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) was recorded at 50.17% in Q4/2021, higher from that of Q3/2021

Secara keseluruhan, PLN mampu mencatatkan kinerja yang baik selama tahun 2021. Penjualan tenaga listrik selama tahun buku mengalami peningkatan sebesar 5,77% dari tahun 2020 sebesar 243,58 TWh menjadi 257,63 TWh.

pada triwulan IV 2021, lebih tinggi dari triwulan III 2021 sebesar 48,75%. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI, dengan indeks tertinggi pada komponen Volume Produksi, Volume Total Pesanan dan Volume Persediaan Barang Jadi. Berdasarkan subsektor, peningkatan terjadi pada mayoritas subsektor, dengan indeks tertinggi pada Makanan, Minuman dan Tembakau (51,84%), Logam Dasar Besi dan Baja (51,80%), Tekstil, Barang Kayu dan Alas Kaki (50,98%), serta Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya (50,66%). PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan sektor Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang positif dan meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 0,50%.

at 48.75%. This increase occurred in all components of the PMI-BI, with the highest indexes in the components of Production Volume, Total Order Volume, and Finished Goods Inventory Volume. By sub-sector, the increase occurred in most sub-sectors, with the highest indexes being Food, Beverages, and Tobacco (51.84%), Iron and Steel Basic Metals (51.80%), Textiles, Wood Goods and Footwear (50.98%), and Vehicle, Machinery, and Equipment (50.66%). The PMI-BI was in line with developments in the Manufacturing Industry based on the result of the Business Activity Survey (SKDU) which was positive and improving with a Weighted Net Balance (WNB) of 0.50%.

Selain kenaikan PMI-BI, konsumsi rumah tangga juga turut mengalami pertumbuhan sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian nasional, meski pertumbuhan tersebut relatif rendah dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari BPS, konsumsi rumah tangga menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2021 tumbuh 2,02%, kontras dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi hingga -2,63%. Sedangkan menurut besaran PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai Rp9,24 kuadriliun pada tahun 2021 atau berkontribusi sebesar 54,42% dari total PDB yang mencapai Rp16,97 kuadriliun.

In addition to the increase in the PMI-BI, household consumption also grew along with the improving national economic conditions, although this growth was relatively low compared to the pre-pandemic period. Based on data from SI, household consumption according to Gross Domestic Product (GDP) at Constant Prices in 2021 grew by 2.02%, a contrast to the previous year's contraction of -2.63%. Meanwhile, according to GDP at Current Prices, the household consumption expenditure component reached Rp9.24 quadrillion in 2021 or contributed 54.42% of the total GDP of Rp16.97 quadrillion.

Overall, PLN was able to record a good performance during 2021. Sales of electricity during the fiscal year increased by 5.77% from 243.58 TWh in 2020 to 257.63 TWh in 2021.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah turut memberikan stimulus listrik dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,02 triliun selama tahun 2021. Berdasarkan Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rincian pemberian stimulus listrik adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
2. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.

Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang penetapan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik, termasuk mobil listrik. Penetapan peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor

To support the national economic recovery, the government also provided an electricity stimulus with a budget of Rp12.02 trillion during 2021. Pursuant to the letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources, the details of the electricity stimulus are as follows:

1. Customers in the categories of household with 450 Volt Ampere power, small business with 450 VA power, and small industry with 450 VA power were given a 50% discount on electricity rates with a maximum usage of 720 hours.
2. Subsidized 900 VA household customers were given a 25% discount on electricity rates with a maximum usage of 720 hours.
3. Exemption from expense or subscription fees, as well as exemption from the minimum account requirement of 50% for industrial, business, and social customers.

In 2021, the government stipulated Government Regulation (PP) No. 74 of 2021 on Amendments to Government Regulation No. 73 of 2019 on Taxable Goods Classified as Luxury Goods in the Form of Motorized Vehicles Subject to Sales Tax on Luxury Goods. Among other things, this regulation covers the determination of sales tax rates on luxury goods (PPnBM) for electric vehicles, including electric cars. The stipulation of this regulation aimed to support government policies in accelerating the reduction of exhaust emissions from motorized vehicles by expediting the development of battery-based electric motorized

melalui percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan ekosistemnya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan dan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021

Kebijakan Strategis

Era pandemi Covid-19 yang terus berlangsung selama tahun 2021 memberi dampak yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian dan sosial. Meski demikian, kondisi ini tidak menghentikan langkah PLN untuk mewujudkan visinya sebagai perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Untuk mendukung hal tersebut, PLN melakukan perubahan besar dalam tata kelola dan cara kerja Perusahaan melalui Program Transformasi untuk mencapai visi sekaligus beradaptasi dengan tantangan perubahan jaman.

Program Transformasi PLN memiliki empat Aspirasi yang menjadi arah perubahan PLN, yaitu *Green, Lean, Innovative*, dan *Customer Focused*. Melalui Aspirasi *Green*, PLN terus meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan untuk menghasilkan listrik. Dengan Aspirasi *Lean*, PLN memastikan pengadaan listrik yang andal dan efisien. Dengan Aspirasi *Innovative*, PLN akan memperluas sumber pendapatan baru. Terakhir, melalui Aspirasi *Customer Focused* akan menjadikan PLN sebagai pilihan nomor satu pelanggan dalam solusi energi dan mencapai 100 persen elektrifikasi. Program Transformasi ini menjadi landasan PLN dalam mencapai perbaikan kinerja yang berkelanjutan, baik dari sisi operasional maupun keuangan hingga tahun 2024 mendatang.

Untuk mencapai strategi tersebut, hingga tahun 2021 PLN telah menyusun 24 *breakthrough program*, dengan uraian sebagai berikut:

vehicles and their ecosystem. This regulation is expected to encourage the increased use and investment of electric vehicles in Indonesia.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS IN 2021

Strategic Policy

The Covid-19 pandemic era that continued throughout 2021 had a significant impact on economic and social activities. However, this condition did not stop PLN from realizing its vision to become the leading electricity company in Southeast Asia and the number one customer's choice for energy solutions. To that end, PLN made major changes in the governance and workings of the Company through the Transformation Program to achieve its vision and adapt to the challenges of changing times.

The PLN Transformation Program contains four aspirations that serve as the direction of change for PLN, namely Green, Lean, Innovative, and Customer Focused. Through the Green Aspiration, PLN increases the use of new and renewable energy to generate electricity. Through the Lean Aspiration, PLN ensures reliable and efficient electricity supply. Through the Innovative Aspiration, PLN will expand new sources of income. Finally, through Customer Focused Aspiration, PLN will be the number one choice for customers in energy solutions and achieve 100 percent electrification ratio. This Transformation Program is PLN's foundation in realizing sustainable performance improvements, both in terms of operations and finances until 2024.

To achieve this strategy, until 2021 PLN has prepared 24 breakthrough programs with the following descriptions:

	Lean	Green	Innovative	Customer Focused
Tujuan Strategis / Strategic Objectives	1. Digital power plant 2. Digital procurement 3. Digitally enabled distribution excellence 4. Dispatch optimization 5. Investment prioritization (short term and long term) 6. Optimize primary energy 7. Anti black-out 8. Advanced Metering Infrastructure 9. Centralized Planning	10. Implement 5.0 GW renewable development 11. Launch 'green boosters' 12. Launch large scale renewables	13. Billing and collection optimization 14. Fiber optics rollout 15. Electric vehicles infrastructure 16. Captive power	17. Outage management 18. PLN mobile relaunch
Enabler Strategis / Strategic Enabler	19. Organization structure 20. Streamline subsidiary 21. Digitally enabled execution machine 22. Digitalization of centralized payment 23. Regulatory, sector structure, and tariff optimization 24. Increased used of domestic product			

Membaiknya aktivitas industri dan konsumsi rumah tangga yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional selama tahun 2021 disambut positif oleh PLN untuk mendongkrak penjualan listrik. Dalam upaya mengoptimalkan peluang bisnis ini, PLN akan berfokus pada strategi *creating demand* yang ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi dilakukan PLN melalui berbagai *bundling* dan promo untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari atau *electrifying lifestyle*.

The improvement in industrial activity and household consumption that has driven national economic growth during 2021 was embraced by PLN to boost electricity sales. To optimize this business opportunity, PLN focused on the strategy of creating demand through intensification and extensification efforts. PLN carried out the intensification strategy through various bundling and promotions to increase customer convenience and electrified lifestyle, namely using electronic equipment in everyday life.

Sedangkan untuk strategi ekstensifikasi, PLN akan melakukan program *win back*, yaitu mengakuisisi *captive power* atau mengganti kelistrikan perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan pembangkit sendiri dengan pasokan listrik dari PLN agar perusahaan bisa lebih fokus menjalankan *core business*-nya. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan *captive market* yang masih potensial dengan program *electrifying agriculture* dan *electrifying marine* untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan.

For the extensification strategy, PLN will carry out a win back program, namely acquiring captive power or replacing the electricity of companies that still use their own generators with the electricity from PLN so that the companies can focus on their core business. Another way is to take advantage of the potential captive market through the electrifying agriculture and electrifying marine programs for the agriculture, livestock, plantation, fisheries, and marine sectors.

Sementara itu, PLN juga telah menyiapkan strategi pengelolaan keuangan melalui penerapan *revenue management* dan *cost management*. Dari sisi pendapatan, PLN berfokus untuk meningkatkan pendapatan langsung dari pelanggan dengan cara menciptakan produk-produk yang atraktif dalam program *electrifying agriculture* dan *electrifying marine* serta berbagai produk inovatif yang dapat mempercepat penurunan tunggakan listrik. Sedangkan dari sisi *cost*, PLN akan melakukan efisiensi terhadap *Operational Expenditure* (OPEX) maupun *Capital Expenditure* (CAPEX). Efisiensi OPEX akan difokuskan pada biaya-biaya operasional yang dapat ditekan, sedangkan efisiensi CAPEX difokuskan pada alokasi investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi *demand* dan *supply* saat ini.

PLN has also prepared a financial management strategy through the implementation of revenue management and cost management. In terms of revenue, PLN focused on increasing direct revenue from customers by creating attractive products in electrifying agriculture and electrifying marine programs as well as various innovative products that can speed up the reduction of electricity arrears. Meanwhile, in terms of cost, PLN will strive for efficiency in Operational Expenditure (OPEX) and Capital Expenditure (CAPEX). OPEX efficiency will be focused on operational costs that can be reduced, while CAPEX efficiency will be focused on investment allocation in accordance with current demand and supply.

Sehubungan dengan ditetapkannya PP No. 74 Tahun 2021, PLN berkomitmen untuk mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dalam upaya memastikan ketersediaan listrik bagi pemilik KBLBB, PLN berencana untuk terus melakukan pengembangan unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Dalam upaya mendukung pengembangan SPKLU, PLN membuka peluang bisnis bagi para investor untuk berkolaborasi menyediakan SPKLU melalui layanan *partnership* SPKLU PLN. Selain itu, PLN juga memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik melalui *platform* Charge.IN yang terintegrasi dengan *superapps* PLN Mobile dan produk *Home Charging Service*.

In accordance with the stipulation of PP No. 74 of 2021, PLN is committed to supporting the Battery-Based Electric Motorized Vehicle (KBLBB) ecosystem. To secure electricity supply for KBLBB owners, PLN plans to develop Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) which will be opened throughout Indonesia. To support the development of SPKLU, PLN opens business opportunities for investors to collaborate in providing SPKLU through PLN's SPKLU partnership services. In addition, PLN also provides convenience to electric vehicle users through the Charge.IN platform which is integrated with PLN Mobile superapp and Home Charging Service product.

PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021

Pencapaian Kinerja Operasional

Secara keseluruhan, PLN mampu mencatatkan kinerja yang baik selama tahun 2021. Penjualan tenaga listrik selama tahun buku mengalami peningkatan sebesar 5,77% dari tahun 2020 sebesar 243,58 TWh menjadi 257,63 TWh. Apabila dibandingkan dengan target 2021 sebesar 249 TWh, realisasi penjualan tenaga listrik mampu tercapai hingga 103,46% dari target 2021. Peningkatan penjualan tenaga listrik ini sejalan dengan adanya penambahan pelanggan sebanyak 3.543.947 pelanggan, naik 7,57% dari tahun 2020 sebanyak 3.294.419 pelanggan atau 10,59% berada di atas target 2021 sebesar 3.204.722 pelanggan.

COMPANY PERFORMANCE ACHIEVEMENT IN 2021

Operational Performance Achievement

Overall, PLN was able to record a good performance during 2021. Sales of electricity during the fiscal year increased by 5.77% from 243.58 TWh in 2020 to 257.63 TWh in 2021. Compared to the 2021 target of 249 TWh, electricity sales were realized at 103.46% of the 2021 target. The increase in electricity sales was in line with the addition of 3,543,947 customers, up 7.57% from 2020 at 3,294,419 customers or 10.59%, above the 2021 target of 3,204,722 customers.

Meningkatnya kinerja penjualan listrik tidak terlepas dari upaya PLN untuk memastikan ketersediaan pasokan daya listrik bagi para pelanggan. Selama tahun 2021, PLN mengoperasikan pembangkit listrik, baik milik sendiri, *Independent Power Plant* (IPP), dan sewa, dengan total sebanyak 6.760 unit atau bertambah sebanyak 83 unit dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 6.677 unit. Adapun kapasitas terpasang dari pembangkit listrik yang dioperasikan tahun 2021 tercatat sebesar 64.553 MW, naik 1,92% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 63.336 MW.

The increase in electricity sales performance was inseparable from PLN's efforts to secure electricity supply for customers. In 2021, PLN operated power plants, including self-owned, Independent Power Plant (IPP), and leased, with a total of 6,760 units or an increase of 83 units compared to 2020 at 6,677 units. The installed capacity of power plants operated in 2021 was recorded at 64,553 MW, an increase of 1.92% compared to 2020 of 63,336 MW.

Dari jumlah pembangkit listrik yang dioperasikan selama tahun 2021, PLN mampu memproduksi energi listrik sebesar 289,47 TWh, naik 5,32% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 274,85 TWh atau 1,64% di atas target 2021 sebesar 284,80 TWh. Untuk mendukung proses penyaluran didistribusi listrik, selama tahun 2021 PLN melakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.332,3 MW, penambahan jaringan transmisi sepanjang 3.563,1 kms, dan penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 7.601 MVA.

From the total power plants operated during 2021, PLN produced electrical power amounting to 289.47 TWh, an increase of 5.32% compared to 2020 at 274.85 TWh or 1.64% above the 2021 target of 284.80 TWh. To support the process of electricity distribution, in 2021 PLN increased its power generation capacity by 1,332.3 MW, expanded its transmission network by 3,563.1 kms, and increased the capacity of substations by 7,601 MVA.

PLN senantiasa mendukung penuh upaya pemerintah untuk menurunkan emisi GRK hingga 29% pada tahun 2030 mendatang dan karbon netral pada tahun 2060 mendatang. Hal tersebut tercermin dari adanya bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2021 yang mampu dipertahankan di angka 12,74% sedikit lebih rendah dari 13,07% di tahun 2020. Meski demikian, capaian bauran EBT tersebut masih berada di bawah target 2021 yang tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 14,5%. Hal ini disebabkan oleh beroperasinya pembangkit-pembangkit fosil baru dari proyek 35 GW yang jumlahnya lebih besar dari beroperasinya pembangkit EBT baru.

PLN fully supports the government's efforts to reduce GHG emissions by up to 29% in 2030 and to become carbon neutral in 2060. This is reflected in the New and Renewable Energy (NRE) mix in 2021 which was maintained at 12.74%, slightly lower than 13.07% in 2020. However, the achievement of the NRE mix remained below the 2021 target set out in the National Energy General Plan (RUEN) of 14.5%. This was due to the operation of new fossil-fueled generators from the 35 GW project, which are larger than the operation of new NRE plants.

Beberapa capaian yang berkontribusi menyumbang bauran energi dari EBT yang dicapai di tahun 2021 yaitu: *co-firing* pembangkit PLTU dengan bio massa, penyelesaian COD pembangkit EBT dimana di tahun 2021 berhasil COD sebanyak 624 MW melampaui target COD sebesar 475 MW, serta peningkatan produksi listrik dari pengguna PLTS Atap yang terkoneksi ke sistem PLN.

Some of the achievements that have contributed to the NRE energy mix in 2021 were the co-firing of PLTU using biomass, completion of COD for NRE plants, where 624 MW of COD was realized in 2021, exceeding the COD target of 475 MW, as well as increasing electricity production from Rooftop PLTS users who are connected to the PLN system.

Pencapaian KPI Perusahaan

Selain itu, pencapaian kinerja PLN selama tahun 2021 juga tercermin dari pencapaian seluruh target Perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam *Key Performance Indicators* (KPI). Realisasi total skor KPI pada tahun 2021 sebesar 107,49 atau di atas bobot maksimal sebesar 100,00, sehingga termasuk dalam kategori SEHAT AAA. Terdapat 5 indikator utama yang menjadi kinerja kunci PLN, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta.

NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA

Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia merupakan variabel KPI untuk mengukur kinerja keuangan, operasional, dan sosial (termasuk peran BUMN sebagai *agent of development*) secara berkesinambungan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko (*risk appetite*) Perusahaan yang ditetapkan. Pada tahun 2021, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 43,51 atau di atas bobot maksimal sebesar 40,00. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. Nilai EBITDA dan Laba Tahun Berjalan yang masing-masing terealisasi sebesar Rp89,17 triliun dan Rp13,17 triliun, tercapai sebesar 106,18% dan 116,04% dari target 2021 masing-masing sebesar Rp81,48 triliun dan Rp11,35 triliun. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penjualan energi listrik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian serta efisiensi beban keuangan yang disebabkan oleh kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban kepada pihak berelasi dan pihak ketiga.
2. ROIC-WACC yang terealisasi sebesar 0,98% atau berada di atas target 2021 sebesar -6,6%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan mampu mengoptimalkan pemanfaatan modal untuk menghasilkan laba dan pengembalian bagi pemegang saham.
3. *Interest Bearing Debt to EBITDA* yang terealisasi sebesar 4,71x, lebih rendah dari target 2021 sebesar 5,9x. Rendahnya rasio tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utang yang berbunga, termasuk utang obligasi, dengan menggunakan EBITDA. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki risiko yang relatif lebih rendah dari peluang gagal bayar utang yang berbunga, sehingga mampu mendorong kepercayaan para investor secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

The Company's KPI Achievement

PLN's performance during 2021 was also reflected in the achievement of all the Company's targets set by the shareholder in the Key Performance Indicators (KPI). The realization of the total KPI score in 2021 was 107.49 or above the maximum value of 100.00, earning the AAA SOUND category. There are 5 main indicators of PLN's key performance, namely Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development.

ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA

Economic and social value for Indonesia is a KPI variable to measure financial, operational, and social performance (including the role of SOEs as agent of development) on an ongoing basis, taking into account the risk appetite of the Company that has been determined. In 2021, the score for this indicator was realized at 43.51 or above the maximum value of 40.00. This achievement was influenced by:

1. EBITDA and Profit for the Year, which were realized at Rp89.17 trillion and Rp13.17 trillion, respectively, an achievement of 106.18% and 116.04% of the 2021 target at Rp81.48 trillion and Rp11.35 trillion, respectively. This achievement was affected by the increasing sales of electrical power in line with the improving economic conditions as well as the efficiency of financial costs due to the Company's ability to pay off obligations to related parties and third parties.
2. The realization of ROIC-WACC at 0.98% or above the 2021 target of -6.6%. This achievement shows that the Company was able to optimize capital to generate profits and returns for the shareholder.
3. The realization of Interest-Bearing Debt to EBITDA at 4.71x, which was lower than the 2021 target of 5.9x. The low ratio indicates that the Company was able to pay interest-bearing debt, including bonds payable, using EBITDA. This condition also shows that the Company has a relatively lower risk of default on interest-bearing debts, thus increasing investor confidence in the long term.

4. *Cash From Operation* (CFO) yang terealisasi sebesar Rp88,85 triliun atau 60,81% di atas target 2021 sebesar Rp55,25 triliun. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh Perusahaan dari aktivitas operasional lebih besar dari pengeluaran operasional, sehingga Perusahaan mampu mencatatkan laba operasional.
5. *Emergency Response Time* (*System Recovery Time*) terealisasi sebesar 2,06 jam, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3 jam. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan gangguan listrik hingga aliran listrik kembali normal relatif lebih cepat, sehingga menunjukkan adanya komitmen PLN dalam memperbaiki pelayanan kepada pelanggan.
6. *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) yang masing-masing terealisasi sebesar 540,12 menit per pelanggan dan 6,70 kali per pelanggan, atau berada di bawah target 2021 masing-masing sebesar 860,00 menit per pelanggan dan 9,50 kali per pelanggan. Rendahnya capaian SAIDI dan SAIFI ini menunjukkan bahwa PLN terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan listrik kepada masyarakat.
7. Persetujuan model mekanisme perubahan subsidi listrik dan struktur tarif listrik oleh Kementerian ESDM yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2021, lebih cepat dari target yang ditetapkan yaitu dalam periode Semester I 2021.
8. Rata-rata Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang terealisasi sebesar 48,88% atau di atas target 2021 sebesar 40%. Hal ini menunjukkan komitmen PLN untuk terus berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan industri domestik dalam berbagai proyek kelistrikan demi mendongkrak pertumbuhan industri dan ekonomi nasional.
9. Rasio Elektrifikasi Nasional berhasil terealisasi sebesar 99,45% atau berada di atas target 2021 sebesar 99,25%. Pencapaian ini menunjukkan upaya PLN dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Cash from Operation (CFO) was realized at Rp88.85 trillion or 60.81% above the 2021 target of Rp55.25 trillion. This achievement shows that all incomes earned by the Company from operational activities was greater than the operating expenses, so that the Company recorded operating profit.
5. Emergency Response Time (System Recovery Time) was realized at 2.06 hours, lower than the target set at 3 hours. This achievement shows that the time needed to repair electricity disruptions until electricity returns to normal was relatively faster, thus showing PLN's commitment to improving services to customers.
6. System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) were realized at 540.12 minutes per customer and 6.70 times per customer, respectively, or below the 2021 target of 860.00 minutes per customer and 9.50 times per customer, respectively. The low figures of SAIDI and SAIFI show that PLN is committed to improving the quality of electricity services to the people.
7. Approval of the mechanism model for changing the electricity subsidy and electricity tariff structure by the Ministry of Energy and Mineral Resources was carried out on May 6, 2021, earlier than the set target in the first half of 2021.
8. The realization of Average Domestic Component Level Usage was 48.88% or above the 2021 target of 40%. This shows PLN's commitment to increase the use of domestic products and involve domestic industries in various electricity projects to boost industrial growth and the national economy.
9. The National Electrification Ratio was realized at 99.45% or above the 2021 target of 99.25%. This achievement shows PLN's efforts to support the government's program to accelerate equitable access to electricity throughout the Republic of Indonesia.

INOVASI MODEL BISNIS

Inovasi model bisnis merupakan variabel KPI untuk mengukur keberhasilan inovasi perusahaan, antara lain inovasi model bisnis inti, restrukturisasi, penciptaan ekosistem, mitra (partner) serta kolaborasi usaha mikro, kecil dan menengah, ; dan/atau pengembangan konten lokal dan hilirisasi (*downstream*). Pada tahun 2021, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 21,68 atau di atas bobot maksimal sebesar 20,00. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. Jumlah Pengguna Aktif Aplikasi PLN Mobile mencapai 18.362.953 pelanggan atau tercapai lebih dari 6 kali lipat di atas target 2021 sebesar 3.000.000 pelanggan. Aplikasi PLN Mobile merupakan salah satu terobosan penting dalam bisnis model PLN saat ini dalam rangka memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan serta sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam pelayanan. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kehadiran PLN Mobile sebagai *platform* digital unggulan berhasil memenuhi ekspektasi pelanggan.
2. Pendapatan Usaha di luar Penjualan Tenaga Listrik dan Biaya Penyambungan yang terealisasi sebesar 1,20% atau berada di atas target 2021 sebesar 0,98%. Pencapaian ini menunjukkan inovasi yang dilakukan PLN untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar sektor kelistrikan sebagai *core business* Perusahaan. Pendapatan usaha lainnya berasal dari penjualan batu bara dari pihak eksternal PLN, pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo, dan jasa-jasa administratif lainnya.
3. Pembangunan Infrastruktur *Electric Vehicle* telah direalisasikan sebanyak 67 SPKLU, jauh lebih banyak dari target 2021 sebesar 16 SPKLU. Pembangunan ini sejalan dengan upaya PLN untuk mendukung pengembangan ekosistem KBLBB di Indonesia.
4. Peningkatan Konsumsi Tenaga Listrik PLN pada Pelanggan *Captive* yang terealisasi senilai Rp2.944,47 miliar atau 239,62% di atas target 2021 sebesar Rp867 miliar. Pencapaian ini merupakan dampak dari upaya PLN untuk mengakuisisi penggunaan listrik dari pelanggan yang memiliki pembangkit listrik sendiri (*captive power*) untuk beralih menggunakan listrik PLN termasuk dari sektor pertanian, budi daya ikan, dan perkebunan melalui program *electrifying agriculture* dan *electrifying marine* dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja di sektor tersebut.

BUSINESS MODEL INNOVATION

Business model innovation is a KPI variable to measure the success of a company's innovation, including core business model innovation, restructuring, ecosystem creation, partners and collaboration of micro, small, and medium enterprises, and/or development of local content and downstream. In 2021, the score for this indicator was 21.68 or above the maximum value of 20.00. This achievement was influenced by:

1. The number of active users of the PLN Mobile Application reached 18,362,953 customers or more than 6 times of the 2021 target of 3,000,000 customers. The PLN Mobile application is one of the important breakthroughs in the current business model of PLN to provide the best experience for customers as well as an effort to answer the challenges of an era that demands speed, convenience, and efficiency in service. This achievement is an evidence that the presence of PLN Mobile as a leading digital platform has succeeded in meeting customer expectations.
2. Operating income excluding electricity sales and connection costs was realized at 1.20% or above the 2021 target of 0.98%. This achievement shows the innovations made by PLN to obtain additional income outside the electricity sector as the Company's core business. Other operating income came from coal sales from PLN's external parties, network services and telecommunications services, transformer rental, and other administrative services.
3. Electric Vehicle Infrastructure Development was realized at 67 SPKLU, more from the 2021 target of 16 SPKLU. This development was in line with PLN's efforts to support the development of the KBLBB ecosystem in Indonesia.
4. The increase in PLN's Electricity Consumption for Captive Customers was realized at Rp2,944.47 billion or 239.62% above the 2021 target of Rp867 billion. This achievement was due to PLN's efforts to acquire electricity usage from customers who have their own power plants (captive power) to switch to using PLN's electricity, which covers the agriculture, fisheries, and plantation sectors through the electrifying agriculture and electrifying marine programs to increase the efficiency and productivity of the sectors.

5. *Maturity Level Enterprise Risk Management* yang mencapai level 2,65, lebih tinggi dibandingkan dengan target 2021 yang berada di level 2,6. Pencapaian ini menunjukkan upaya Perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi Manajemen Risiko dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup PLN.

KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI

Kepemimpinan teknologi merupakan variabel KPI untuk mengukur keberhasilan dalam mengembangkan dan menginstitusionalkan kapabilitas teknologi/digital pada skala umum, penciptaan nilai (*value*) dari kumpulan data (*big data*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan/atau dukungan Indonesia menjadi yang terdepan pada area teknologi strategis. Pada tahun 2021, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 16,81 atau di atas bobot maksimal sebesar 16,00. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. Jumlah unit *Power Plant* yang sudah mengimplementasikan teknologi digital terealisasi sebanyak 42 unit atau 75,00% di atas target 2021 sebanyak 24 unit. *Digital Power Plant* merupakan salah satu program terobosan dari Transformasi PLN yang menekankan pada penerapan teknologi digital pada pembangkit PLN di seluruh lini, mulai dari pemantauan, pengendalian, dan optimalisasi pembangkit. Akselerasi PLN dalam mendigitalkan tata kelola pembangkitnya di tengah pandemi Covid-19 ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan daya saing pembangkit PLN melalui penggunaan *platform* digital, seperti meningkatkan faktor kesiapan atau *Equivalent Availability Factor* (EAF) sekaligus menurunkan tingkat pemadaman atau *Equivalent Force Outage Rate* (EFOR), meningkatkan efisiensi generator dan konsumsi bahan bakarnya (*Net Plant Heat Rate* atau NPHR), dan meningkatkan kualitas layanan kelistrikan kepada para pelanggan PLN.
2. Implementasi *Digital Procurement* yang telah terealisasi sebesar 17,06% atau jauh melampaui target 2021 sebesar 2%. Implementasi *Digital Procurement* merupakan salah satu program terobosan dari Transformasi PLN yang bertujuan untuk meningkatkan sistem *supply chain* agar semakin terintegrasi, efektif, dan efisien, serta mendorong terwujudnya proses pengadaan yang lebih fair, transparan, dan akuntabel.
3. Implementasi *Smart Grid* yang telah terealisasi di 3 lokasi sebanyak 67.371 meter dari total seluruh indonesia sebanyak 101.257 meter dan komisioning AMI baru sebanyak 3.079 meter atau telah mencapai target

5. Enterprise Risk Management Maturity Level reached 2.65, higher than the 2021 target of 2.6. This achievement shows the Company's efforts to optimize the Risk Management function and the implementation of Good Corporate Governance within PLN.

TECHNOLOGY LEADERSHIP

Technology leadership is a KPI variable to measure success in developing and institutionalizing technology/digital capabilities on a general scale, creating value from big data and artificial intelligence, and/or supporting Indonesia to be at the forefront of strategic technology. In 2021, the score for this indicator was 16.81 or above the maximum value of 16.00. This achievement was influenced by:

1. The number of Power Plant units that have implemented digital technology amounted to 42 units or 75.00% above the 2021 target of 24 units. The Digital Power Plant is one of the breakthrough programs from the PLN Transformation which emphasizes the application of digital technology in PLN's power plants in all lines, from monitoring, controlling, and optimizing power plants. PLN's acceleration in the governance digitalization of its power plants amid the Covid-19 pandemic aimed to improve the reliability, efficiency, and competitiveness of PLN's power plants through the use of digital platforms, such as increasing the Equivalent Availability Factor (EAF) and reducing the level of blackouts or Equivalent Force Outage Rate (EFOR), increasing generator efficiency and fuel consumption (Net Plant Heat Rate or NPHR), and improving the quality of electricity services to PLN's customers.
2. Implementation of Digital Procurement which was realized at 17.06% or far exceeding the 2021 target of 2%. The Digital Procurement is one of the breakthrough programs from the PLN Transformation which aims to improve the supply chain system to be more integrated, effective, and efficient, as well as to encourage the realization of a more fair, transparent, and accountable procurement process.
3. The implementation of Smart Grid in 3 locations covering 67,371 meters from a total of 101,257 meters throughout Indonesia and the commissioning of new AMIs covering 3,079 meters or reaching the 2021 target of 3 locations.

2021 sebanyak 3 lokasi. Pengembangan *Smart Grid* ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik nasional, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan fleksibilitas transmisi agar dapat lebih banyak menerima *Variable Renewable Energy* (VRE).

4. *IT Maturity Level* yang terealisasi di level 3,03, lebih tinggi dari target 2021 yang berada di level 3. Posisi ini menunjukkan bahwa PLN senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) di Perusahaan dalam rangka memastikan pengembangan TI dapat selalu menunjang pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan. Penerapan tata kelola TI ini tidak terlepas dari inisiatif digitalisasi sebagai wujud pelaksanaan Transformasi PLN dalam upaya menghadapi tantangan dan dinamika industri akibat pandemi Covid-19.
5. *Distribution Efficiency Rate* terealisasi sebesar 8,59%, lebih rendah dari target 2021 sebesar 9%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem jaringan listrik PLN semakin efisien dan handal seiring dengan upaya pengembangan infrastruktur kelistrikan dan peningkatan kesadaran pelanggan untuk menggunakan listrik sesuai dengan prosedur.

The development of the Smart Grid aims to increase the reliability of the national electric power system, increase efficiency in public services, and increase transmission flexibility to receive more Variable Renewable Energy (VRE).

4. IT Maturity Level was realized at 3.03, higher than the 2021 target at 3. This position shows that PLN strives to optimize Information Technology (IT) governance in the Company to ensure that IT development can support the Company's business and operations. The implementation of IT governance is inseparable from the digitalization initiative in the implementation of PLN Transformation to face the challenges and dynamics of the industry due to the Covid-19 pandemic.
5. The Distribution Efficiency Rate was realized at 8.59%, lower than the 2021 target of 9%. This shows that the PLN electricity network system is increasingly efficient and reliable in line with efforts to develop electricity infrastructure and increase customer awareness to use electricity in accordance with procedures.

PENGEMBANGAN INVESTASI

Pengembangan investasi merupakan variabel KPI untuk mengukur produktivitas dari aset berwujud (*tangible assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible assets*); keberhasilan menarik investasi luar dari *private*, asing, dan investor sosial; efektivitas adopsi mekanisme kondisi pasar (*market-based*); dan/atau efektivitas implementasi kelincahan (*agile*) dalam birokrasi, dan kemudahan dalam melaksanakan bisnis. Pada tahun 2021, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 11,00 atau di atas bobot maksimal sebesar 10,00. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. Penambahan kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga mencapai 624,02 MW atau 31,37% di atas target 2021 sebesar 475 MW.
2. *Co-Firing Biomass* yang terealisasi mampu menghasilkan daya listrik hingga mencapai 0,296 GW atau 195,94% di atas target 2021 sebesar 0,1 GW.

INVESTMENT DEVELOPMENT

Investment development is a KPI variable to measure the productivity of tangible and intangible assets, the success of attracting foreign investment from private, foreign, and social investors, the effectiveness of the adoption of market-based mechanisms, and/or the effectiveness of agility implementation in the bureaucracy, as well as the ease of doing business. In 2021, the score for this indicator was realized at 11.00 or above the maximum value of 10.00. This achievement was influenced by:

1. The addition of New and Renewable Energy (NRE) generator capacity reaching 624.02 MW or 31.37% above the 2021 target of 475 MW.
2. The realization of Biomass Co-Firing capable of generating electrical power up to 0.296 GW or 195.94% above the 2021 target of 0.1 GW.

Pengelolaan investasi untuk mendukung pengembangan pembangkit EBT dan *Co-Firing Biomass* ini tidak terlepas dari komitmen PLN untuk mendukung misi pemerintah dalam mencapai karbon netral pada tahun 2060 mendatang dan menghasilkan energi hijau.

Investment management to support the development of NRE and Co-Firing Biomass plants is inseparable from PLN's commitment to supporting the government's mission to achieve carbon neutral by 2060 and produce green energy.

PENGEMBANGAN TALENTA

Pengembangan talenta merupakan variabel KPI untuk mengukur seberapa baik Perusahaan dalam meningkatkan kemampuan dan melatih tenaga kerja terkait teknologi terbaru; meningkatkan *governance* dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; membentuk wadah talenta BUMN (*talent pool*) pada level menengah; dan/atau menerapkan lingkungan yang inklusif, dinamis, inovatif, dan ber-AKHLAK. Pada tahun 2021, skor untuk indikator ini terealisasi sebesar 14,49 atau di atas bobot maksimal sebesar 14,00. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. *Organizational Health Index* dengan realisasi skor sebesar 81 atau sesuai dengan target 2021. Pencapaian ini menunjukkan bahwa organisasi PLN berada pada tingkat budaya yang sehat dan sebagian besar anggota mendukung serta melaksanakan budaya yang telah disepakati.
2. *Human Capital Readiness* yang terealisasi di level 4,45, lebih tinggi dari target 2021 yang berada di level 4,35. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM pada perusahaan terus mengembangkan dan mempersiapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. *Organizational Capital Readiness* yang terealisasi di level 4,42, lebih tinggi dari target 2021 yang berada di level 4,35. Pencapaian ini menunjukkan bahwa organisasi siap dalam mencapai tujuan perusahaan melalui penyelarasan target perusahaan, penyiapan budaya perusahaan serta *team work* yang kuat.
4. Pemenuhan *Talent Pool* dan *Talent Mobility* melalui pelibatan perempuan dalam *nominated talent* dengan proporsi sebesar 16,67% atau melebihi target 2021 sebesar 15% dan pelibatan generasi milenial (<40 tahun) dalam *top talent* dengan proporsi sebesar 52,41% atau melebihi target 2021 sebesar 50%. Pelibatan perempuan dalam *nominated talent* merupakan perwujudan dari

TALENT DEVELOPMENT

Talent development is a KPI variable to measure a company's success in improving capabilities and training its workforce based on the latest technology, improving governance in the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, forming a talent pool for SOEs at the middle level, and/or implementing an environment that is inclusive, dynamic, innovative, and based on the AKHLAK values. In 2021, the score for this indicator was realized at 14.49 or above the maximum value of 14.00. This achievement was influenced by:

1. Organizational Health Index with a score of 81 or meeting the 2021 target. This achievement shows that PLN's organization is culturally healthy and most members support and implement the agreed culture.
2. Human Capital Readiness was realized at 4.45, higher than the 2021 target at 4.35. This achievement shows that HR management in the company continues to develop and prepare the competencies needed to achieve company goals.
3. Organizational Capital Readiness was realized at 4.42, higher than the 2021 target at 4.35. This achievement shows that the organization is ready to achieve company goals through alignment of company targets, preparation of corporate culture, and strong teamwork.
4. Fulfillment of Talent Pool and Talent Mobility through the involvement of women as nominated talents with a proportion of 16.67% or exceeding the 2021 target of 15% and the involvement of millennials (<40 years) as top talents with a proportion of 52.41% or exceeding the 2021 target of 50%. The involvement of women in the nominated talent is a manifestation of the Women

program *Women Empowerment*. Sedangkan pelibatan generasi milenial merupakan salah satu cara PLN untuk memperkuat eksistensinya melalui pengembangan inovasi berbasis teknologi digital. Generasi milenial dipercaya lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Empowerment program, while the involvement of the millennial generation is one of PLN's ways to strengthen its existence through the development of innovations based on digital technology. The millennial generation is believed to be more adaptive to the increasingly rapid technological developments.

TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional selama tahun 2021, PLN menghadapi beberapa tantangan. Meski demikian, tantangan tersebut tidak terlalu masif atau berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan. Tantangan yang cukup masif berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan batu bara yang tercermin dari Hari Operasi Persediaan (HOP) yang berada di bawah ketentuan minimum, yaitu sekitar 20 hari. Apabila HOP kurang dari 20 hari, maka kinerja PLTU yang dioperasikan oleh PLN akan terganggu. Terbatasnya persediaan batu bara ini disebabkan oleh adanya fenomena La Nina yang menyebabkan terhambatnya proses distribusi batubara yang mayoritas dilakukan lewat transportasi laut. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas batubara di pasar internasional sehingga terjadi kecenderungan perusahaan tambang batubara lebih memprioritaskan ekspor.

CHALLENGES FACED AND STRATEGIC STEPS IMPLEMENTED

In carrying out business and operational activities during 2021, PLN faced several challenges. The massive challenge was related to the limited supply of coal as reflected in the Inventory Operation Day (HOP), which was below the minimum requirement of around 20 days. If the HOP is less than 20 days, the performance of the PLTU operated by PLN will be disrupted. The limited supply of coal was due to the La Nina phenomenon which caused delays in the coal distribution process, which is mostly carried out by sea transportation. In addition, it was also influenced by the high price of coal commodities in the international market, resulting in a tendency of coal mining companies to prioritize exports.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PLN melakukan koordinasi dengan regulator terkait, khususnya Kementerian ESDM; menyampaikan kalkulasi-kalkulasi yang lebih akurat; melakukan upaya pemetaan secara menyeluruh pada kebutuhan batu bara dan logistiknya; membangun suatu sistem informasi yang terintergrasi yang dapat langsung dimonitor secara *real time* mengenai kondisi *supply* batu bara di seluruh PLTU milik PLN dan dikomunikasikan secara *real time* kepada Kementrian ESDM agar dapat mengambil langkah-langkah proteksi hingga pencabutan izin ekspor dari perusahaan tambang yang tidak mampu memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan *contract delivery amount* yang diatur dalam kontrak pengadaan batu bara dengan PLN.

To overcome these obstacles, PLN coordinated with the relevant regulators, particularly the Ministry of Energy and Mineral Resources; delivered more accurate calculations; carried out a thorough mapping of coal needs and logistics; built an integrated information system that can be directly monitored in real time regarding the condition of coal supply in all PLTU owned by PLN and communicated in real time to the Ministry of Energy and Mineral Resources, so that it can take protective measures until the revocation of export permits from mining companies that are unable to fulfill their obligations in accordance with the contract delivery amount stipulated in the coal procurement contract with PLN.

Selain itu, PLN melakukan pemusatan dalam penyediaan batu bara sehingga seluruh pembelian batu bara terkonsolidasi secara terpusat di PLN selaku induk usaha. Sebelumnya, mekanisme kontrak pembelian batu bara dilakukan oleh anak perusahaan PLN, yaitu PLN Batubara.

In addition, PLN is centralizing the supply of coal so that all coal purchases are consolidated at PLN as the parent company. Previously, the mechanism for the coal purchase contract was carried out by a subsidiary of PLN, namely PLN Batubara. To ensure the reliability and certainty of

Untuk menjamin keandalan dan kepastian pasokan batu bara, PLN juga melakukan kontrak langsung dengan perusahaan tambang, mengubah kontrak yang semula bersifat jangka pendek menjadi kontrak jangka panjang, hingga mempercepat proses pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok batu bara, dengan batas waktu maksimal 14 hari setelah dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar oleh PLN.

Kendala lainnya berasal dari situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya logistik material maupun pembangunan konstruksi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan lainnya, PLN telah melakukan identifikasi atas risiko-risiko usaha yang berpotensi dapat menghambat kelancaran aktivitas bisnis dan operasional dan menyusun upaya-upaya mitigasi yang tepat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu praktik pengelolaan Perusahaan secara amanah dan *prudential* dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders*. Dengan menerapkan praktik GCG, maka pengelolaan sumber daya Perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan Perusahaan dan memperhatikan kepentingan *stakeholders* secara berimbang.

Melihat pentingnya peran GCG bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan, maka kami selaku Direksi PLN berkomitmen untuk menjalankan praktik-praktik GCG tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan dengan mengacu pada *best practices*. Penerapan GCG di PLN juga tidak hanya mencakup tata kelola (*governance*) saja, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko dan kepatuhan, atau dikenal dengan istilah *Governance, Risk,* dan *Compliance* (GRC).

Untuk mendukung penerapan GCG di lingkungan PLN, Perusahaan telah melakukan pembaruan terhadap beberapa *soft-structure* GCG selama tahun 2021 agar lebih relevan

coal supply, PLN also entered direct contracts with mining companies, converted short-term contracts into long-term contracts, thus accelerating the payment process to all parties involved in the coal supply chain with a maximum time limit of 14 days after the billing document is received completely and correctly by PLN.

Another obstacle arose from the Covid-19 pandemic which disrupted material logistics and construction development. To overcome other challenges, PLN identified business risks that could potentially hamper the course of business and operational activities and developed appropriate mitigation efforts to minimize the impact of these risks.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Good Corporate Governance (GCG) is a practice of managing the Company in a trustworthy and prudent manner by balancing the interests of all stakeholders. By implementing GCG practices, the management of the Company's resources is expected to be efficient, effective, economical, and productive, being oriented to the Company's goals and taking into account the interests of stakeholders in a balanced manner.

Considering the important role of GCG for the sustainability of the Company's business, the Board of Directors of PLN is committed to carrying out GCG principles not only as a form of compliance with the prevailing laws and regulations, but as an inseparable part of the Company's business and operational activities by referring to best practices. The implementation of GCG at PLN covers not only governance, but also risk and compliance management, otherwise known as Governance, Risk, and Compliance (GRC).

To support GCG implementation at PLN, the Company has updated several GCG soft structures during 2021 to maintain their relevance to industry developments. Some

untuk diimplementasikan sesuai dengan perkembangan industri. Beberapa *soft-structure* GCG yang mengalami pembaruan antara lain Piagam Komite Manajemen Risiko, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero), Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), dan Kebijakan Strategis Sentralisasi Pembayaran PT PLN (Persero).

of the GCG soft structures that have been renewed include the Risk Management Committee Charter, Guidelines for the Procurement of Goods/Services of PT PLN (Persero), Guidelines for the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero), and the Strategic Payment Centralization Policy of PT PLN (Persero).

Selain itu, kami juga melakukan pembaruan terhadap Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0071.P/DIR/2021 pada tanggal 15 April 2021 untuk menjaga agar PLN tetap dalam koridor pengelolaan usaha yang berkehati-hatian dalam setiap aktivitas yang dilakukannya melalui pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal terkait dengan penerapan *good corporate governance*. Untuk melengkapi pedoman manajemen risiko terintegrasi tersebut, PLN menetapkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0010.E/DIR/2021 tentang Prosedur Pelaksanaan *Four-Eyes Principle* (4EP) Dalam Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Desember 2021.

In addition, we also updated the General Guidelines for Integrated Risk Management as stipulated in Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0071.P/DIR/2021 dated April 15, 2021 to keep PLN in a prudent business management in every activity through compliance with the provisions of laws and regulations as well as internal regulations related to good corporate governance implementation. To complete the integrated risk management guidelines, PLN has issued Circular Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0010.E/DIR/2021 on Procedures for the Implementation of the Four-Eyes Principle (4EP) in Decision Making dated December 22, 2021.

Sementara itu, pada tahun 2021 kami membentuk Komite Investasi yang merupakan komite di bawah Direksi. Komite ini bertugas untuk mengelola manajemen investasi berdasarkan *four eyes principle*, di mana setiap keputusan investasi tidak dapat dilakukan tanpa diverifikasi atau divalidasi dahulu oleh Tim Verifikasi dan Validasi. Tim tersebut merupakan bagian dari Komite Investasi yang bertugas untuk melakukan verifikasi di dalam sebuah instrumen investasi agar dapat mengetahui kelayakan dari berbagai proyek investasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkait dengan rencana investasi tersebut.

In 2021, we established the Investment Committee which is a committee under the Board of Directors. This committee is in charge of managing investment based on the four-eyes principle, where every investment decision cannot be made without being verified or validated first by the Verification and Validation Team. The team is part of the Investment Committee of which duty is to verify investment instruments in order to determine the feasibility of various investment projects and adapt them to the conditions related to the investment plan.

Di samping itu, kami juga membentuk Divisi Pusat Kebijakan (*Central Policy Division*) yang berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko pada tahun 2021. Divisi ini bertugas untuk melakukan pengembangan dan peninjauan secara terus menerus terhadap standar kebijakan yang berlaku di Perusahaan; harmonisasi kebijakan dan prosedur baik dari internal maupun eksternal; dan mengelola sistem manajemen terintegrasi untuk peningkatan efektivitas organisasi secara keseluruhan yang berdampak pada aspek keuangan, teknis, dan citra Perusahaan.

In addition, we also established a Central Policy Division under the Directorate of Finance and Risk Management in 2021. This division oversees the continuous development and review of policy standards applicable in the Company; harmonization of policies and procedures both internally and externally; and an integrated management system to improve the overall effectiveness of the organization which has an impact on the financial, technical, and reputational aspects of the Company.

Kesungguhan kami dalam menerapkan praktik *Governance, Risk*, dan *Compliance* (GRC) tercermin dari hasil *assessment* GCG yang dilakukan secara mandiri (*Self-assessment*) pada tahun 2021 dengan skor sebesar 90,456, termasuk dalam kategori "Sangat Baik" dan *Maturity Level Entriprise Risk Management* yang mencapai level 2,65 dari skala 4,00. Sedangkan dari sisi *Compliance*, pencapaian kinerja tercermin dari rata-rata *Maturity Level* Kepatuhan Unit Induk rata-rata pada level 4,09 dari skala 5,00 dan Divisi/ Satuan rata-rata pada level 4,16 dari skala 5,00, hasil evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi UPG PLN yang dilakukan oleh KPK sebesar 84,10, konfirmasi kejadian Gratifikasi dan *Conflict of Interest* rata-rata sampai dengan Desember 2021 sebesar 97,84%, hasil Survei *Awareness* Kepatuhan rata-rata tahun 2021 untuk seluruh Unit dan Divisi sebesar 99%, dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencapai 100%, dengan total Wajib Lapor LHKPN sebanyak 8.672 orang.

Our seriousness in implementing Governance, Risk, and Compliance (GRC) practices is reflected in the results of the GCG self-assessment in 2021 with a score of 90.456, which was classified in the "Excellent" category and the Enterprise Risk Management Maturity Level which scored 2.65 out of 4.00 scale. Meanwhile, in terms of Compliance, the performance achievement is reflected in the average Compliance Maturity Level of the Parent Unit at 4.09 on a scale of 5.00 and the Division/Unit average at 4.16 on a scale of 5.00, the results of the evaluation of UPG PLN gratification control carried out by the KPK at 84.10, confirmation of Gratification and Conflict of Interest events on average until December 2021 at 97.84%, the results of the Compliance Awareness Survey on average in 2021 for all Units and Divisions at 99%, and submission of State Officials Assets Report (LHKPN) at 100% with a total of 8,672 LHKPN subjects.

ANALISIS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Kondisi perekonomian di tahun 2022 mendatang diprediksi akan tetap berada di zona positif meski sedikit mengalami moderasi. Berdasarkan Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diestimasikan berada di level 4,4%, lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan di tahun 2021. Pelemahan tersebut terutama disebabkan oleh munculnya varian virus Covid-19 baru, yaitu Omicron yang menyebabkan laju penularan Covid-19 kembali mengalami peningkatan. Hal ini menuntut pemerintah dunia untuk menerapkan kembali kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.

Selain itu, isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mulai memanas di awal tahun 2022 diprediksi turut mempengaruhi dinamika ekonomi dan perdagangan global serta harga komoditas energi dan non-energi. Pada tanggal 7 Maret 2022, harga minyak dunia jenis Brent melonjak hingga USD12,73 menjadi USD130,84 per barel. Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak dunia jenis WTI yang menguat hingga USD9,92 menjadi USD125,6 per barel. Melambungnya harga komoditas minyak ini dipicu oleh risiko larangan AS dan Eropa terhadap produk-produk Rusia.

ANALYSIS OF COMPANY BUSINESS OUTLOOK

Economic conditions in 2022 are predicted to remain positive despite a slight moderation. According to the January 2022 edition of the World Economic Outlook (WEO) by the International Monetary Fund (IMF), the global economic growth rate in 2022 is estimated at 4.4%, lower than the growth rate in 2021. The downturn is mainly due to the emergence of the new Omicron variant of the Covid-19 virus, which caused another increase in Covid-19 transmission rate. This requires world governments to re-implement policies on activity and mobility restrictions in order to suppress the rate of Covid-19 transmission.

In addition, geopolitical issues between Russia and Ukraine which sparked in early 2022 are expected to affect the global economy and trade dynamics as well as energy and non-energy commodity prices. On March 7, 2022, the gobal price of Brent oil surged USD12.73 to USD130.84 per barrel. The global price of WTI oil also rose USD9.92 to USD125.6 per barrel. The soaring price of oil commodity was triggered by the risk of US and European bans on Russian products.

Kenaikan harga minyak ini turut mendorong peningkatan harga komoditas batu bara global. Pada awal Maret 2022, harga batu bara global mencapai titik tertinggi dalam sejarah, yakni menembus USD400 per metrik ton. Kementerian ESDM pun menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada bulan Maret 2022 sebesar USD203,69 per ton atau naik USD15,31 per ton dari bulan Februari 2022 sebesar USD188,38 per ton. Selain akibat konflik Rusia-Ukraina, peningkatan konsumsi listrik di China turut menyebabkan harga batu bara global melambung tinggi.

The increase in oil price also boosted global coal commodity prices. In early March 2022, the global coal price reached an all-time high in history, breaking through USD400 per metric ton. The Ministry of Energy and Mineral Resources has also set the Coal Reference Price (HBA) in March 2022 at USD203.69 per ton, an increase of USD15.31 per ton from February 2022 at USD188.38 per ton. Apart from the impact of the Russia-Ukraine conflict, the increase in China's electricity consumption also caused global coal prices to soar.

Di samping itu, dampak konflik ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa Timur ini juga menyebabkan ketidakpastian pasokan gas. Rusia merupakan salah satu produsen gas terbesar dunia yang terlibat dalam konflik tersebut, sehingga akan terjadi kendala dalam rantai pasokan gas di Eropa. Kondisi ini menyebabkan sejumlah negara di Eropa mulai beralih ke batu bara sebagai sumber energi. Hal ini diprediksi akan mempengaruhi peningkatan permintaan batu bara di wilayah Eropa.

In addition, geopolitical tensions in Eastern Europe also caused uncertainties in gas supply. Russia is one of the world's largest gas producers and involved in the conflict, so the gas supply chain in Europe will be disrupted. This condition has forced several countries in Europe to resort to coal as an energy source. This is expected to increase coal demand in the European region.

Di tingkat nasional, pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menguat di level 5,2% di tahun depan. Prediksi ini sejalan dengan adanya tren pemulihan kesehatan dan aktivitas ekonomi selama tahun 2021. Sementara itu, tingkat inflasi di tahun 2022 ditargetkan sebesar 3% yoy, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai Rp14.350/USD, tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun sebesar 6,82%. Dari sisi energi, harga minyak mentah Indonesia diprediksi mencapai USD63 per barrel, *lifting* minyak mentah dan gas ditargetkan masing-masing sebesar 703 ribu barel per hari dan 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

At the national level, the government through the 2022 State Revenue and Expenditure Budget (RAPBN) targets economic growth at 5.2% next year. This prediction is in line with the improving trend of health and economic activities during 2021. Meanwhile, the inflation rate in 2022 is targeted at 3% yoy, the Rupiah exchange rate against the US Dollar is expected to reach Rp14,350/USD, and the 10-year SUN Interest Rate at 6.82%. In terms of energy, Indonesia's crude oil price is predicted to reach USD63 per barrel, crude oil and gas lifting are targeted at 703 thousand barrels per day and 1,036 thousand barrels of oil equivalent per day, respectively.

Seiring dengan pemulihan ekonomi global dan nasional, PLN memperkirakan konsumsi listrik juga akan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2022 mendatang. Dalam rangka menyambut tren peningkatan konsumsi listrik di tahun depan, PLN telah menyusun *Business Outlook* PLN Tahun 2022 sebagai strategi untuk menghadapi peningkatan persaingan usaha ketenagalistrikan. Penyusunan *Business Outlook* PLN Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan kajian mega analisis, analisis makro, analisis mikro, serta perilaku konsumen.

In line with the global and national economic recovery, PLN estimates a significant increase in electricity consumption in 2022. To address the trend of increasing electricity consumption next year, PLN has prepared the 2022 PLN Business Outlook as a strategy to face increased competition in the electricity business. The 2022 PLN Business Outlook was prepared using the approach of mega analysis, macro analysis, micro analysis, and consumer behavior.

Dari sisi mega analisis, terdapat 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan, yaitu *Energy Trend Outlook, Technology Trend Outlook*, dan *Lifestyle Trend Outlook*. Di tengah tren transisi energi, terdapat kecenderungan pelaku usaha untuk mengikuti penggunaan energi berkelanjutan. Hal ini dapat menjadi suatu peluang bagi PLN untuk mengoptimalkan gelombang ini, diperkuat dengan adanya sejumlah produk berbasis *green economy* yang dimiliki oleh PLN, seperti PLTS Atap, *Renewable Energy Certificate* (REC), Konversi PLTD ke EBT, *Captive Acquisition*, dan Lelang EBT *Bundle*.

In terms of mega analysis, there are 3 (three) factors that influence the performance of the Company, namely Energy Trend Outlook, Technology Trend Outlook, and Lifestyle Trend Outlook. Amid the trend of energy transition, business entities tend to convert to sustainable energy. This can be an opportunity for PLN to take advantage of this trend, supported by a series of PLN's green economy products, such as PV Rooftop, Renewable Energy Certificate (REC), PLTD to NRE Conversion, Captive Acquisition, and NRE Bundle Auction.

Kemudian dari sisi *technology*, tren kemajuan teknologi yang semakin pesat memunculkan adanya 3 (tiga) peluang utama terkait teknologi yang terjadi di skala global maupun nasional yng dapat dioptimalkan, yaitu *Electric Vehicle, Electrifying Agriculture*, dan *Electrifying Marine*. Terakhir, *lifestyle trend outlook* melihat adanya perubahan perilaku konsumen maupun pelaku industri selama masa pandemi Covid-19. Dari sisi konsumen, masyarakat kini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan perangkat elektronik yang dapat menunjang aktivitas dan gaya hidup mereka. Sedangkan dari sisi industri, kebutuhan listrik diprediksi akan mengalami peningkatan sejalan dengan aktivitas masyarakat dan ekonomi yang mulai kembali bangkit serta digitalisasi yang semakin dikembangkan guna mendukung aktivitas industri.

In terms of technology, rapid technological advancement has given rise to 3 (three) main opportunities related to technology on a global and national scale that can be optimized, namely Electric Vehicles, Electrifying Agriculture, and Electrifying Marine. Lastly, the lifestyle trend outlook sees changes in consumer behavior and industry players during the Covid-19 pandemic. In terms of consumer, people today are highly dependent on electronic devices that can support their activities and lifestyle. Meanwhile, in terms of industry, electricity demand is expected to increase along with the recovery of community and economic activities and the development of digitalization to support industrial activities.

Pada tahun 2022, PLN masih akan tetap melanjutkan program Transformasi PLN yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu *Green, Lean, Innovative*, dan *Customer Focused*. Untuk mendukung Transformasi tersebut, PLN telah menambahkan 1 *breaktrough program*, yaitu *Carbon Neutral* sebagai tujuan strategis untuk pilar *Green*.

In 2022, PLN will continue the PLN Transformation program which consists of 4 (four) pillars, namely Green, Lean, Innovative, and Customer Focused. To support this transformation, PLN has added 1 breakthrough program, namely Carbon Neutral as a strategic goal for the Green pillar.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2021, komposisi Direksi PLN mengalami beberapa kali perubahan, baik perubahan susunan anggota maupun perubahan nomenklatur jabatan.

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

During 2021, the composition of the Board of Directors of PLN underwent several changes, both in terms of member composition and the nomenclature of positions.

1. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik No. SK-49/MBU/02/2021. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

   - Direktur Mega Project menjadi Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan;
   - Direktur Energy Primer menjadi Direktur Energi Primer;
   - Direktur Human Capital dan Management menjadi Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia;
   - Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
   - Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan.

   Dengan demikian, komposisi Direksi setelah perubahan nomenklatur jabatan adalah sebagai berikut:

   a. Direktur Utama : Zulkifli Zaini
   b. Wakil Direktur Utama : Darmawan Prasodjo
   c. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Sinthya Roesly
   d. Direktur Perencanaan Korporat : Muhammad Ikbal Nur
   e. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia : Syofvi Felienty Roekman
   f. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan : Bob Saril
   g. Direktur Energi Primer : Rudy Hendra Prastowo
   h. Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali : Haryanto W.S
   i. Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan : Wiluyo Kusdwiharto
   j. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara : Syamsul Huda
   k. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan : M. Ikhsan Asaad

1. The first change occurred on February 17, 2021 based on Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No. SK-49/MBU/02/2021. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN agreed to change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors as follows:

   - Director of Mega Projects into Director of Mega Projects and New and Renewable Energy;
   - Director of Primary Energy into Director of Primary Energy;
   - Director of Human Capital and Management into Director of Human Capital Management;
   - Director of Finance into Director of Finance and Risk Management;
   - Director of Regional Business for Sumatera Kalimantan into Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan.

   Therefore, the Board of Directors composition after the change of position nomenclatures is as follows:

   a. President Director : Zulkifli Zaini
   b. Vice President Director : Darmawan Prasodjo
   c. Director of Finance and Risk Management : Sinthya Roesly
   d. Director of Corporate Planning : Muhammad Ikbal Nur
   e. Director of Human Capital Management : Syofvi Felienty Roekman
   f. Director of Commerce and Customer Management : Bob Saril
   g. Director of Primary Energy : Rudy Hendra Prastowo
   h. Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali : Haryanto W.S
   i. Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan : Wiluyo Kusdwiharto
   j. Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara : Syamsul Huda
   k. Director of Mega Projects and New and Renewable Energy : M. Ikhsan Asaad

2. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik No. SK-200/MBU/06/2021. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk:
   - Memberhentikan dengan hormat Bapak M. Ikhsan Asaad dari jabatannya sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan;
   - Mengalihkan penugasan Bapak Muhammad Ikbal Nur dari jabatan semula sebagai Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan serta Bapak Wiluyo Kusdwiharto dari jabatan semula Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan menjadi Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan;
   - Mengangkat Bapak Evy Haryadi sebagai Direktur Perencanaan Korporat.

   Dengan demikian, komposisi Direksi per tanggal 16 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Direktur Utama	: Zulkifli Zaini
b.	Wakil Direktur Utama	: Darmawan Prasodjo
c.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Sinthya Roesly
d.	Direktur Perencanaan Korporat	: Evy Haryadi
e.	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia	: Syofvi Felienty Roekman
f.	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan	: Bob Saril
g.	Direktur Energi Primer	: Rudy Hendra Prastowo
h.	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	: Haryanto W.S
i.	Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan	: Muhammad Ikbal Nur
j.	Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	: Syamsul Huda
k.	Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan	: Wiluyo Kusdwiharto

2. The second change occurred on June 16, 2021 based on Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No. SK-200/MBU/06/2021. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN agreed to:
   - Honorably dismiss Mr. M. Ikhsan Asaad from his position as the Director of Mega Projects and New and Renewable Energy;
   - Transferred the assignment of Mr. Muhammad Ikbal Nur from his initial position as the Director of Corporate Planning to the Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan and Mr. Wiluyo Kusdwiharto from his initial position as the Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan to the Director of Mega Projects and New and Renewable Energy;
   - Appointed Mr. Evy Haryadi as the Director of Corporate Planning.

   Therefore, the Board of Directors composition as of June 16, 2021 is as follows:

a.	President Director	: Zulkifli Zaini
b.	Vice President Director	: Darmawan Prasodjo
c.	Director of Finance and Risk Management	: Sinthya Roesly
d.	Director of Corporate Planning	: Evy Haryadi
e.	Director of Human Capital Management	: Syofvi Felienty Roekman
f.	Director of Commerce and Customer Management	: Bob Saril
g.	Director of Primary Energy	: Rudy Hendra Prastowo
h.	Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali	: Haryanto W.S
i.	Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan	: Muhammad Ikbal Nur
j.	Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	: Syamsul Huda
k.	Director of Mega Projects and New and Renewable Energy	: Wiluyo Kusdwiharto

3. Perubahan ketiga terjadi pada tanggal 6 Desember 2021 berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik No. SK-389/MBU/12/2021. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Zulkifli Zaini dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan mengalihkan penugasan Bapak Darmawan Prasodjo dari jabatan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama.

   Sedangkan perubahan terakhir terjadi pada tanggal 7 Desember 2021 berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik No. SK-392/MBU/12/2021. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk:
   - Memberhentikan dengan hormat Ibu Syofvi Felienty Roekman dari jabatannya sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Muhammad Ikbal Nur dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, serta Bapak Syamsul Huda dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
   - Mengangkat Bapak Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Adi Lumakso sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, serta Bapak Adi Priyanto sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

   Dengan demikian, komposisi Direksi setelah perubahan susunan anggota tanggal 6 dan 7 Desember 2021 sampai dengan akhir tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:
   a. Direktur Utama : Darmawan Prasodjo
   b. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Sinthya Roesly
   c. Direktur Perencanaan Korporat : Evy Haryadi
   d. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia : Yusuf Didi Setiarto
   e. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan : Bob Saril

3. The third change occurred on December 6, 2021 based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No. SK-389/MBU/12/2021. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN agreed to honorably dismiss Mr. Zulkifli Zaini from his position as the President Director and to transfer the assignment of Mr. Darmawan Prasodjo from his initial position as Vice President Director to President Director.

   The last change occurred on December 7, 2021 based on Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No. SK-389/MBU/12/2021. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN agreed to:
   - Honorably dismiss Ms. Syofvi Felienty Roekman from her position as the Director of Human Capital Management, Mr. Muhammad Ikbal Nur from his position as the Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan, and Mr. Syamsul Huda from his position as the Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara;
   - Appoint Mr. Yusuf Didi Setiarto as the Director of Human Capital Management, Mr. Adi Lumakso as the Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan, and Mr. Adi Priyanto as the Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara.

   Therefore, the Board of Directors composition after the change in member composition on December 6 and 7, 2021 until end of year 2021 is as follows:
   a. President Director : Darmawan Prasodjo
   b. Director of Finance and Risk Management : Sinthya Roesly
   c. Director of Corporate Planning : Evy Haryadi
   d. Director of Human Capital Management : Yusuf Didi Setiarto
   e. Director of Commerce and Customer Management : Bob Saril

f. Direktur Energi Primer : Rudy Hendra Prastowo
g. Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali : Haryanto W.S
h. Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan : Adi Lumakso
i. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara : Adi Priyanto
j. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan : Wiluyo Kusdwiharto

Setelah tahun buku 2021 berakhir hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, terdapat pergantian susunan anggota Direksi berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-2/MBU/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Dalam surat tersebut, Menteri BUMN selaku pemegang saham PLN menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Rudy Hendra Prastowo dari jabatannya sebagai Direktur Energi Primer dan mengangkat Bapak Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer yang baru.

Dengan demikian, komposisi Direksi setelah periode tahun buku 2021 berakhir hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

a. Direktur Utama : Darmawan Prasodjo
b. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Sinthya Roesly
c. Direktur Perencanaan Korporat : Evy Haryadi
d. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia : Yusuf Didi Setiarto
e. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan : Bob Saril
f. Direktur Energi Primer : Hartanto Wibowo

f. Director of Primary Energy : Rudy Hendra Prastowo
g. Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali : Haryanto W.S
h. Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan : Adi Lumakso
i. Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara : Adi Priyanto
j. Director of Mega Projects and New and Renewable Energy : Wiluyo Kusdwiharto

After the end of the 2021 fiscal year until the publication of this Annual Report, there was a change in the member composition of the Board of Directors based on Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6, 2022. In the letter, the Minister of SOEs as the shareholder of PLN agreed to honorably dismiss Mr. Rudy Hendra Prastowo from his position as the Director of Primary Energy and appoint Mr. Hartanto Wibowo as the new Director of Primary Energy.

Therefore, the Board of Directors composition after the end of the 2021 fiscal year period until the publication of this Annual Report is as follows:

a. President Director : Darmawan Prasodjo
b. Director of Finance and Risk Management : Sinthya Roesly
c. Director of Corporate Planning : Evy Haryadi
d. Director of Human Capital Management : Yusuf Didi Setiarto
e. Director of Commerce and Customer Management : Bob Saril
f. Director of Primary Energy : Hartanto Wibowo

Direksi PT PLN (Persero) Saat Penerbitan Laporan / Board of Directors of PT PLN (Persero) during the Issuance of this Report

EVY HARYADI
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

HARTANTO WIBOWO
Direktur Energi Primer
Director of Primary Energy

DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama
President Director

BOB SARIL
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan
Director of Commerce and Customer Management

SINTHYA ROESLY
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

ADI LUMAKSO
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan
Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan

ADI PRIYANTO
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara

HARYANTO WS
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali

YUSUF DIDI SETIARTO
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital Management

WILUYO KUSDWIHARTO
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan
Director of Mega Project and New Renewable Energy

g. Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali : Haryanto W.S

h. Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan : Adi Lumakso

i. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara : Adi Priyanto

j. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan : Wiluyo Kusdwiharto

g. Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali : Haryanto W.S

h. Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan : Adi Lumakso

i. Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara : Adi Priyanto

j. Director of Mega Projects and New and Renewable Energy : Wiluyo Kusdwiharto

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Direksi PLN yang terjadi selama tahun 2021 maupun setelah tahun buku 2021 berakhir, kami segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Zulkifli Zaini, Ibu Syofvi Felienty Roekman, Bapak M. Ikhsan Asaad, Bapak Muhammad Ikbal Nur, Bapak Syamsul Huda, dan Bapak Rudy Hendra Prastowo atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi PLN. Kepada anggota Direksi yang baru dilantik, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru.

In connection with the changes in the PLN Board of Directors composition that occurred during 2021 and after the end of the 2021 fiscal year, the Board of Directors would like to express our deepest gratitude to Mr. Zulkifli Zaini, Ms. Syofvi Felienty Roekman, Mr. M. Ikhsan Asaad, Mr. Muhammad Ikbal Nur, Mr. Syamsul Huda, and Mr. Rudy Hendra Prastowo for their dedication and hard work while serving as members of the Board of Directors of PLN. We would like to welcome the newly inaugurated members of the Board of Directors and wish them success in carrying out their new duties.

PENUTUP

Mengakhiri laporan ini, kami selaku jajaran Direksi PLN mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham PLN dan Dewan Komisaris atas setiap rekomendasi, saran, dan nasihat yang diberikan demi mendorong kemajuan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan secara berkelanjutan.

CLOSING

To conclude this report, the Board of Directors of PLN would like to thank the government of the Republic of Indonesia as the shareholder of PLN and the Board of Commissioners for any recommendations, suggestions, and advice that encouraged the progress and sustainable growth of the Company's business.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja, kreditur, pelanggan dan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan dukungan dan kepercayaannya, sehingga PLN mampu menjalankan kinerja bisnis dan operasional dengan baik.

We also express our gratitude to all business partners, creditors, customers, and the public, as well as other stakeholders for their support and trust, so that PLN was able to deliver a good business and operational performance.

Tak lupa, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Insan PLN yang telah berkarya dengan penuh dedikasi, kerja keras, dan tekad yang kuat, sehingga PLN mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19.

Our highest appreciation also extends to all PLN's personnel for their dedication, hard work, and strong determination that helped PLN record good performance achievements amid the uncertainty of the Covid-19 pandemic.

Ke depannya, kami berharap agar kerja sama antara PLN dengan seluruh pemangku kepentingan yang telah terbangun dengan baik dan saling menguntungkan ini dapat terus terpelihara demi mendorong pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional PLN di masa depan sekaligus mewujudkan visi PLN untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi yang dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia.

Going forward, we hope that the well-established and mutually beneficial cooperation between PLN and all stakeholders can be maintained to support PLN's business and operational activities in the future while realizing PLN's vision to become the leading electricity company in Southeast Asia and the number one customer's choice for energy solutions that continues to make positive contribution to the people and country of the Republic of Indonesia.

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

PT PLN (Persero)

DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama
President Director

03

Profil Perusahaan
Company Profile

Informasi Perusahaan
Company Information

Nama Perseroan
Company Name

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Tanggal Berdiri
Date of Establishment

30 Jul - 1994

Pertama kali berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945. Selanjutnya menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero) berdasarkan Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris. / *Established as the Electricity and Gas Bureau based on Government Decree No.1 SD/1945 dated October 27, 1945. Furthermore, it became a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero) based on Deed 169, July 30, 1994 from Sutjipto, Notary.*

Bidang Usaha
Line of Business

Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa Lain Terkait Kelistrikan. / *Generation, Distribution, Transmission, and Other Services Related to Electricity*

Jumlah Karyawan
Total Employees

42.755
orang / *people*

Kode Obligasi
Bonds Code

PPLN

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp **439.000.000.000.000**

yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham. / *Rp439,000,000,000,000 divided into 439,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.*

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital

Rp **135.460.886.000.000**

yang terbagi atas 135.460.886 saham. / *Rp135,460,886,000,000 divided into 135,460,886 shares*

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

1. Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas.
2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perusahaan Umum Perusahaan Listrik Negara.
5. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero).

1. *Government Stipulation No. 1 SD/1945 dated October 27, 1945, it was as the Electricity and Gas Bureau.*
2. *Government Regulation No. 67 of 1961, it was changed to a State Company (Perusahaan Negara), and named as General Management Board of State Electricity Company.*
3. *Government Regulation No. 19 of 1965, it was established as State-Owned Electricity Company.*
4. *Government Regulation No. 18 of 1972, dated June 3, 1972, it was affirmed as a Public Corporation (Perum) of State Electricity.*
5. *Deed No. 169, July 30, 1994 from Sutjipto, Notary, it was changed to a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero).*

Pemegang Saham
Shareholder

Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan 100% / *Government of the Republic of Indonesia with ownership percentage of 100%*

Tanggal Pencatatan Obligasi Pertama Kali di Bursa
Initial Bonds Listing Date on the Stock Exchange

10 November 1992 / *November 10, 1992*

Nama Bursa
Stock Exchange Name

Bursa Efek Indonesia (dh. Bursa Paralel Indonesia) / *Indonesia Stock Exchange (dh. Indonesia Parallel Exchange)*

Wilayah Operasional
Operational Area

Kantor Pusat / Head Office
Jl. Trunojoyo Blok M I -135
Jakarta - 12160
Telp. : (021) 7261875; 7261122; 7262234; 7251234; 7250550
Fax. : (021) 7221330; 7397150
Home page : www.pln.co.id

Entitas Anak Perusahaan
Subsidiaries

Anak Perusahaan – Kepemilikan Langsung / Subsidiaries – Direct Ownership

- PT Indonesia Power
- PT Pembangkitan Jawa Bali
- PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
- PT Indonesia Comnets Plus
- PT PLN Tarakan
- PT PLN Batubara
- PT PLN Gas & Geothermal
- PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
- Majapahit Holding BV
- PT Haleyora Power
- PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
- PT Energy Management Indonesia
- PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara

Wilayah Operasional
Operational Area

- 1 Kantor Pusat di Jakarta / *1 Head Office in Jakarta*
- 5 Kantor Unit Penunjang / *5 Supporting Unit Offices*
- 5 Kantor Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban / *5 Transmission and Load Control Center Offices*
- 15 Kantor Wilayah / *15 Regional Offices*
- 5 Kantor Pembangkitan / *5 Generation Offices*
- 7 Kantor Distribusi / *7 Distribution Offices*
- 11 Kantor Unit Induk Pembangunan / *11 Parent Unit Construction Offices*

Riwayat Singkat

The Company at A Glance

Sejarah kelistrikan Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika perusahaan-perusahaan Belanda seperti pabrik gula dan pabrik teh membangun pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk umum dimulai pada tahun 1897 ketika N.V. Handelsvennootschap (sebelumnya bernama Maintz & Co.) yang berpusat di Amsterdam, Belanda mendirikan perusahaan listrik pertama di Batavia yang bernama Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM). Selanjutnya, di awal Perang Dunia II antara tahun 1942-1945 Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang sehingga terjadilah peralihan pengelolaan perusahaan – perusahaan Belanda tersebut kepada Jepang.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, Perusahaan Listrik Negara (PLN) diresmikan sebagai pengelola tenaga listrik milik negara. Perusahaan ini merupakan kelanjutan usaha dari beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Dalam hal ini, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

The history of Indonesian electricity began in the late 19th century when Dutch companies such as sugar factories and tea factories built power plants for their own use. Electricity for public began in 1897 when N.V. Handelsvennootschap (formerly Maintz & Co.) based in Amsterdam, the Netherlands founded the first electricity company in Batavia named Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM). Furthermore, at the beginning of World War II between 1942-1945, the Dutch surrendered to the Japanese troops, resulting in a shift in the management of these Dutch companies to the Japanese.

The process of power transfer reoccurred at the end of World War II in August 1945, when Japan surrendered to the Allies. This opportunity was used by the youth and electricity workers through the delegation of Electricity and Gas Workers/Employees, who together with the Head of the Central KNI took the initiative to meet President Soekarno to hand over these companies to the Government of the Republic of Indonesia. On October 27, 1945, President Soekarno established the Electricity and Gas Bureau under the Department of Public Works and Energy with a power generation capacity of 157.5 MW.

On January 1, 1961, the Electricity Bureau was changed to BPU-PLN (General Management Board of Directors for State Electricity Company), which was engaged in electricity, gas, and coke and later dissolved on January 1, 1965. At the same time, Perusahaan Listrik Negara (PLN) was inaugurated as the manager of state-owned electricity. The Company is a continuation of the business of several Dutch power companies, which were taken over by the Government of the Republic of Indonesia, including: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM, and NV WEMI.

Furthermore, based on Government Regulation No. 19 of 1965, the Company's status changed to a legal entity company. Subsequently, it was determined to be a Public Corporation (Perum) based on Government Regulation No. 30 of 1970, which was confirmed by Government Regulation No. 18 of 1972. In this case, the status of Perusahaan Listrik Negara (PLN) was determined as the Public Corporation of State Electricity and as the Holder of Authority to Conduct Electricity Business (PKUK) with the mandate of providing electricity for the public interest.

Riwayat Singkat
The Company at A Glance

Kemudian berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 169 tanggal 30 Juli 1994, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero) dan tetap sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Then, based on deed No. 169 Dated July 30, 1994 from Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, the legal status of the Company changed to a Limited Liability Company under the name of Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara, abbreviated as PT PLN (Persero), which remained as Electricity Business Authority Holder (PKUK) in providing electricity for the public interest. The government is obliged to provide compensation for all costs incurred by SOEs, including the expected margin to SOEs that are given special assignments as regulated in Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs).

Pasca terbitnya UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, PLN tidak lagi bertindak sebagai PKUK melainkan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

After the issuance of Law No. 30 of 2009 concerning electricity, PLN no longer acts as a PKUK but becomes a State-Owned Enterprise (SOE) holder of an Electric Power Supply Business License (IUPTL) with the task of providing electricity for the public interest.

Saat ini PLN telah berkembang sebagai salah satu korporasi dengan aset terbesar di Indonesia. Total daya pembangkit milik PLN berkembang menjadi 44.464,75 MW dan juga mengelola 18,722,32 MW pembangkit milik *Independent Power Producer* (IPP) serta 1.365,97 MW Pembangkit Sewa sehingga total pembangkit yang dikelola sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 64.553,04 MW

Currently, PLN has developed as one of the largest corporations by assets in Indonesia. Total power generation owned by PLN has grown to 44,464.75 MW and also manages 18,722.32 MW of Independent Power Producer (IPP) generators and 1,365.97 MW of Leased Generators, so that the total power plants managed as of the end of 2021 was 64,553.04 MW.

Kronologis Perubahan Nama Perusahaan

Chronology of Name Change

27 Oktober 1945
October 27, 1945

Sesuai PP No. 1SD/1945, Perusahaan berdiri dengan nama Jawatan Listrik dan Gas, di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.
Based on Government Stipulation No. 1SD/1945, the Company was established as the Electricity and Gas Bureau under the Department of Public Works and Energy.

1 Januari 1961
January 1, 1961

Sesuai PP No. 67/1961, Perusahaan berubah nama menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara).
Based on Government Regulation No. 67/1961, the Company changed its name to BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara/General Management Board of State Electricity Company).

1 Januari 1965
January 1, 1965

Sesuai PP No. 19/1965 BPU PLN dipecah menjadi 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).
Based on Government Regulation No. 19/1965, BPU PLN demerged into 2 state companies, namely Perusahaan Listrik Negara (PLN) and Perusahaan Gas Negara (PGN).

3 Juni 1972
June 3, 1972

Sesuai PP No. 18/1972, Perusahaan berubah nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara.
Based on Government Regulation No. 18/1972, the Company changed its name to Public Corporation (Perum) of State Electricity.

16 Juni 1994
June 16, 1994

Sesuai PP No. 23/1994 Perusahaan berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara atau PT PLN (Persero).
Based on Government Regulation No. 23/1994, the Company changed its name to Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara or PT PLN (Persero).

Jejak Langkah

Milestones

Akhir abad 19
End of 19th Century

Perusahaan-perusahaan Hindia Belanda di bidang pabrik gula dan perkebunan teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan operasional mereka sendiri. / Dutch companies (sugar factories and tea plantations) constructed power plants for their own operational use.

1942–1945

Seluruh perusahaan penyedia tenaga listrik eks-Hindia Belanda diambil alih pemerintah Jepang. / All of the electricity generating facilities under the Dutch rule were taken over by the Japanese occupying forces.

27 Oktober 1945
October 27, 1945

Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. / President Soekarno established the Electricity and Gas Bureau operating under the Department of Public Works and Energy.

01 Januari 1961
January 01, 1961

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. / The Electricity and Gas Bureau reconstituted into BPU-PLN (General Management Board of State Electricity Company) engaged in generating power, gas, and coke.

01 Januari 1965
January 01, 1965

BPU-PLN dibubarkan, dibentuklah Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas. / BPU-PLN was dismissed and two state companies were established, i.e., Perusahaan Listrik Negara (PLN) that managed the electricity sector and Perusahaan Gas Negara (PGN) that managed the gas sector.

1970

Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1970. / The Company's status was changed to Public Corporation (Perum) in accordance with the Government Regulation No. 30 of 1970.

1972

Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. / PLN's status was changed to Public Corporation of State Electricity and acted as the Holder of Authority to Conduct Electricity Business (PKUK) with the mandate to provide electricity for the public interest.

1994

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta No. 169 Tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta. / Legal status was changed into Limited Liability Company, according to Deed No. 169 dated July 30, 1994 from Sutjipto, S.H., notary in Jakarta.

2005

PLN memulai program transformasi menjadi perusahaan penyedia dan penyalur listrik kelas dunia. / PLN began its transformation program into a world-class electricity provider and distributor.

2006

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2006, PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I). / Based on Presidential Regulation No. 71 of 2006, PLN was mandated to build a coal-fired Steam Power Plant with a capacity of 10,000 MW under Fast Track Project phase I (FTP I).

2009

Sesuai Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2009, PLN tidak lagi bertindak sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. / Based on Law No. 30 of 2009, PLN was no longer designated as PKUK, but operated as a State-Owned Enterprise (SOE) with the mandate to provide electricity for the public interest.

2010

Sesuai Perpres No.4 Tahun 2010, PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara, gas maupun panas bumi dalam bentuk program percepatan tahap kedua (FTP II). / Based on Presidential Regulation No. 4 of 2010, PLN was mandated to build coal, gas, and geothermal steam power plants under Fast Track Project phase II (FTP II).

2011

Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero). / The Government handed over the SOE shares of PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) to PT PLN (Persero) on August 5, 2011, thus establishing BAG as a subsidiary of PT PLN (Persero).

2013

PLN mengoperasikan *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai bahan bakar pengganti BBM untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban puncak (*peaker*). / PLN operated Compressed Natural Gas (CNG) as an alternative for fossil fuel to meet the needs of peak load generators (peakers).

2014

PLN menjadi salah satu dari kelompok perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia versi Fortune 500. / PLN became one of the companies with the largest revenues in the world according to Fortune 500.

2017

Tidak ada lagi sistem kelistrikan di Indonesia yang mengalami defisit. Artinya, masalah pemadaman akibat kekurangan pasokan daya listrik sudah terselesaikan. / There was no longer deficit in Indonesia's electricity system. This means the blackout problem due to the lack of electricity supply has been resolved.

2016

Untuk memenuhi amanat Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah untuk mengeksekusi proyek ketenagalistrikan dalam hal penjaminan, percepatan perizinan & non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, penyelesaian hambatan & permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi. / To fulfill the mandate of Presidential Decree No. 4 of 2016 on Acceleration of Electricity Infrastructure Development, PLN was fully supported by the Government to execute electricity projects in terms of guarantees, accelerated licensing & non-licensing, provision of primary energy, spatial planning, land provision, solving obstacles & problems, and solving all legal issues faced.

2015

- PLN mendeklarasikan dimulainya pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara, gas maupun panas bumi sebesar 35.000 MW dengan target penyelesaian 5 tahun ke depan. / PLN declared the commencement of the construction of coal, gas, and geothermal power plants with the capacity of 35,000 MW scheduled for completion in 5 years.
- PLN mulai merealisasikan proyek pembangunan PLTU berteknologi *ultra super critical* dengan kapasitas 2.000 MW di Batang (Jawa Tengah) melalui skema *Public Private Partnership*. / PLN began the construction project of a steam power plant using ultra super critical technology with a capacity of 2,000 MW in Batang (Central Java) through the Public Private Partnership scheme.

2018

Di tengah peningkatan harga energi primer dunia serta nilai tukar Rupiah yang melemah terhadap US Dolar, PLN tetap mampu menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus melanjutkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. / In the midst of increasing world primary energy prices and the weakening Rupiah exchange rate against the US Dollar, PLN was still able to provide affordable electricity to the public while continuing the electricity infrastructure development program.

2019

- Dengan terbitnya Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi Jalan, PLN mendukung penuh pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagai salah satu peluang bisnis baru di masa depan, diantaranya dengan menginisiasi pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). / Due to the issuance of Presidential Regulation No. 55 of 2019 on Acceleration of Battery Electric Vehicle Program for Road Transportation, PLN fully supported the development of electric vehicle ecosystem in Indonesia as one of new business opportunities in the future, including by initiating development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU).
- Pada tahun 2019 PLN memperkuat manajemen aset kelistrikan PLN melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan. / In 2019, PLN strengthened PLN's electricity asset management through synergy and collaboration with various parties, such as the Army, Police, and Attorney.

2021

- PLN mensosialisasikan RUPTL 2021- 2030 yang sangat mengedepankan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) / PLN disseminated the 2021-2030 RUPTL which prioritizes the use of New Renewable Energy (NRE).
- PLN mengakuisisi PT Energy Management Indonesia dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara untuk mengakselerasikan dan mendukung program-program Transformasi. / PLN acquired PT Energy Management Indonesia and PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara to accelerate and support Transformation programs.

2020

- PLN mencanangkan inisiatif strategis TRANSFORMASI, menetapkan Aspirasi PLN di tahun 2025 mendatang, meredefinisi Visi Perseroan dan menetapkan AKHLAK sebagai rumusan Nilai-nilai Perusahaan. / PLN launched the TRANSFORMATION strategic initiative, determined PLN's Aspirations in 2025, redefined the Company's Vision, and established AKHLAK as the formulation of Corporate Values.
- Penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT PLN (Persero). / Implementation of SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System at PT PLN (Persero).

2019

- PLN mencatatkan prestasi di bidang lingkungan hidup, dimana 5 unit pembangkit di lingkungan Grup PLN meraih PROPER Emas dan seluruh pembangkit listrik di Grup PLN tidak ada lagi yang mendapatkan predikat PROPER Merah dan Hitam. / PLN recorded achievements in the environmental field, with 5 power plants within PLN Group received PROPER Gold and no power plants within PLN Group received PROPER Red or Black.

Bidang Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Line of Business Based on the Latest Articles of Association

BIDANG USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Berdasarkan Anggaran Dasar bidang usaha Perseroan adalah menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan: Pembangkitan, Penyaluran, dan Distribusi, serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

1. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
2. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
3. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

LINE OF BUSINESS BASED ON THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on the Articles of Association, the Company's line of business is to carry out the electricity supply business, which includes the following activities: generation, supply, and distribution, as well as planning and building electricity supply facilities and development of electricity supply, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Moreover, the Company also runs electricity supporting businesses, which include the following activities:

1. Consultation related to electricity;
2. Construction and installation of electricity equipment;
3. Maintenance of electricity equipment;
4. Development of equipment technology that supports electricity supply.

Bidang Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir
Line of Business Based on the Latest Articles of Association

Berdasarkan Anggaran Dasar bidang usaha Perseroan adalah menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan: Pembangkitan, Penyaluran, dan Distribusi, serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Based on the articles of association, the Company's line of business is to carry out the electricity supply business, which includes the following activities: generation, supply, and distribution, as well as planning and building electricity supply facilities and development of electricity supply, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Selain melakukan usaha-usaha tersebut di atas, Perseroan dapat:

1. Ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan, antara lain: energi tidak terbarukan (antara lain batubara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomas, bahan bakar, nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik;
3. Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan listrik;

In addition to the aforementioned activities, the Company is also allowed to:

1. Participate in business activities and the utilization of natural resources and other energy sources related to electricity supply, including: non-renewable energy (such as coal, natural gas, petroleum), renewable energy (such as water, geothermal, solar, wind, biomass, fuels, biofuels, hybrids, sea waves), and other energy sources, such as nuclear, which can be developed in line with technological developments and pursuant to the applicable laws and regulations;
2. Provide operational and regulatory services (dispatchers) in the field of electricity generation, transmission, distribution and retail;
3. Carry out industrial activities in hardware and software in the electricity sector and other equipment related to electricity;

Bidang Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Line of Business Based on the Latest Articles of Association

4. Melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional telekomunikasi, dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha Perseroan, baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen, dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan, dan pelatihan manajemen jasa enjinering, penelitian dan pengembangan teknik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Enter into collaboration with other agencies or other parties or administering bodies in the electricity sector both from within the country and overseas in the fields of development, telecommunications operations, and information related to electricity, finance, human resources, research and development according to the field of business or other fields deemed necessary to support the Company's business, whether in the form of joint venture cooperation, production sharing cooperation, management contracts, and other forms, pursuant to the applicable laws and regulations;

5. Conduct service businesses related to the electricity sector, including consulting, construction, education, and training in engineering services management, research and development of electricity techniques and other services, pursuant to the applicable laws and regulations.

Produk dan Layanan
Products and Services

Adapun produk dan jasa yang dihasilkan oleh PLN adalah sebagai berikut:
The products and services offered by PLN are as follows:

1. **Jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik.**
   Services and provision of electricity.
2. **Jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan.**
   Certification of equipment and electricity installation services.
3. **Jasa konsultasi ketenagalistrikan.**
   Electricity consulting services.
4. **Jasa pembangunan, pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.**
   Construction, maintenance, and installation of electricity equipment services.
5. **Jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang).**
   Electricity development services (research and support).
6. **Jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan.**
   Other services in the power-generating sector.

Jasa-jasa yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh PLN melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 11 Unit Pembangkitan, 5 Unit Pembangkitan & Penyaluran, 11 Unit Induk Pembangunan, 5 Unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban dan 5 Unit Penunjang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia per 31 Desember 2021.

The services mentioned above are carried out by PLN through 15 Regional Units, 7 Distribution Units, 11 Generation Units, 5 Generation & Distribution Units, 11 Main Development Units, 5 Transmission and Load Control Center Units, and 5 Supporting Units spread throughout Indonesia as of December 31, 2021.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Values

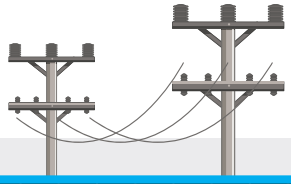

VISI • VISION

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

- **Perusahaan Listrik**
  Perusahaan memiliki bisnis utama berupa penyediaan tenaga listrik dengan tetap mengembangkan bisnis di sepanjang rantai nilai ketenagalistrikan mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan untuk mendukung sustainabilitas industri ketenagalistrikan di Indonesia.
- **Terkemuka se-Asia Tenggara**
  Perusahaan mampu menyediakan tenaga listrik dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia sehingga menjadikan Indonesia sebagai pilihan investasi utama di Asia Tenggara. Pelayanan kelas dunia yang dimaksud diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2024 di mana menjadi top 20 *World Bank getting electricity rank*.
- **Terpercaya #1 Pilihan Pelanggan**
  Perusahaan merupakan pilihan utama pelanggan karena kualitas dan pelayanan yang diberikan sehingga konsumen menjadi loyal.
- **Solusi Energi**
  Perusahaan dapat memberikan nilai kepada pelanggan berupa solusi total terhadap setiap permasalahan terkait energi sehingga perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan usaha, serta konsisten dalam pengembangan standar kerja.

To be the Leading Electricity Company in Southeast Asia and #1 Customer Choice for Energy Solutions.

- **Electricity Company**
  The Company has a core business to provide electricity by developing its business throughout the electricity value chain, starting from primary energy, generation, transmission, distribution and sales to help sustain the electricity industry in Indonesia.
- **Leading in Southeast Asia**
  The Company is able to provide electricity with world-class service quality standards, making Indonesia the main investment choice in Southeast Asia. PLN hopes to realize the referred world class service in 2024 where it targets to be amongst the Top 20 of the World World Bank's Getting Electricity.
- **Trusted #1 Customer Choice**
  The Company is the main choice of customers because of the quality and service provided, which will make the customers loyal.
- **Energy Solutions**
  The Company can provide values to customers in the form of a total solution to any energy-related issues, compelling it to be able to anticipate various business opportunities and challenges, and to remain consistent in developing work standards.

MISI • MISSION

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

- Running an electricity business and other related sectors, oriented to customer satisfaction, company members, and shareholders.
- Making electricity as a medium to improve life quality of the public.
- Making every effort for electricity as an economic booster.
- Operating an environmentally friendly business.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

MOTO • MOTTO

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Electricity for a Better Life ”

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PERSETUJUAN VISI DAN MISI

Penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan jangka panjang (RJP) perusahaan yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Seiring dengan penetapan Program Transformasi, visi Perseroan resmi diberlakukan melalui Keputusan Direksi Nomor 0244.K/DIR/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Visi Perusahaan PT PLN (Persero).

PURPOSE AND OBJECTIVE OF THE COMPANY

To organize an electricity business for public use in sufficient quantity and quality and also to earn profit and perform Government's assignment in electricity business in order to support the development of the country with the application of the principles of a Limited Liability Company.

VISION AND MISSION APPROVAL

The determination of the Company's Vision, Mission, and Values is an inseparable part of its long-term planning (RJP) cycle which is carried out every 5 (five) years.

In line with the establishment of the Transformation Program, the Company's new vision officially came into effect through Decree No.0244.K/DIR/2020 on December 10, 2020 on Determination of Vision of PT PLN (Persero).

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

TATA NILAI PERUSAHAAN • CORPORATE VALUES

AKHLAK

AMANAH • **K**OMPETEN • **H**ARMONIS • **L**OYAL • **A**DAPTIF • **K**OLABORATIF

Tata Nilai PLN adalah AKHLAK. AKHLAK merupakan akronim dari : / PLN's Value is AKHLAK. AKHLAK is an acronym of:

AMANAH / TRUSTWORTHYNESS	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan / Upholding the trust given	• Memenuhi janji dan komitmen / Keep promises and commitments • Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan / Responsible for the tasks, decisions, and actions carried out
KOMPETEN / COMPETENT	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas / Continuously learning and developing capabilities	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah / Improve self-competence to answer challenges that are always changing • Membantu orang lain belajar / Help others learn • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik / Complete tasks of the highest quality
HARMONIS / HARMONIOUS	Saling peduli dan menghargai perbedaan / Caring for each other and respecting differences	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya / Respect everyone regardless of their background • Suka menolong orang lain / Like to help others • Membangun lingkungan kerja yang kondusif / Build a conducive work environment
LOYAL / LOYAL	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara / Remaining dedicated and prioritizing the interests of the nation and the state	• Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN, dan Negara / Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOE, and the State • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar / Willing to sacrifice to achieve a greater goal • Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika / Obey the leaders as long as it is not against the law and ethics
ADAPTIF / ADAPTIVE	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan / Making continuous innovations and remaining enthusiastic in moving or facing changes	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik / Quickly adjust to being better • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi / Continuously making improvements to keep up with technological developments • Bertindak proaktif / Be proactive
KOLABORATIF / COLLABORATIVE	Membangun kerjasama yang sinergis / Building synergistic cooperation	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi / Provide opportunities for various parties to contribute • Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah / Open to work together to generate added value • Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama / Mobilizing the use of various resources for common goals

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

Pada tahun 2020, Kementerian BUMN menetapkan *Core Value* AKHLAK sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja BUMN secara berkelanjutan. *Core Values* ini selanjutnya wajib menjadi bagi seluruh BUMN, termasuk PLN.

In 2020, the Ministry of SOEs has set AKHLAK Core Value as the identity and uniting element of work culture to support sustainable improvements in SOEs performance. The Ministry has made it mandatory for all SOEs, including PLN.

Seiring implementasi inisiatif strategis Transformasi, PLN menjiwai dan mengimplementasikan tata nilai AKHLAK sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memegang teguh kepercayaan yang diberikan (Amanah), terus belajar dan mengembangkan kapabilitas (Kompeten), saling peduli dan menghargai perbedaan (Harmonis), berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara (Loyal), terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan (Adaptif) serta membangun kerjasama yang sinergis (Kolaboratif).

Along with the implementation of the strategic Transformation initiative, PLN aspires and is applying the AKHLAK values as a guiding principle in running its operations by upholding the trust given (*Amanah*/Trusworthy), continuously learning and developing capabilities (*Kompeten*/Competent), caring for each other and respecting differences (*Harmonis*/Harmonious), remaining dedicated and prioritizing the interests of the nation and the state (Loyal), making continuous innovations and remaining enthusiastic in moving or facing changes (*Adaptif*/Adaptive), and building synergistic cooperation (*Kolaboratif*/Collaborative).

Core Value AKHLAK ditetapkan sebagai rumusan Nilai-nilai Perusahaan pada tanggal 28 September 2020, melalui Keputusan Direktur Utama No. 0073.P/DIR/2020.

AKHLAK's Core Values were set as the Company's value formulation on September 28, 2020 based on Decree of President Director No. 0073.P/DIR/2020.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

SOSIALISASI DAN UPAYA PENCAPAIAN VISI DAN MISI PERSEROAN

Perseroan mempertimbangkan upaya pencapaian visi dan misi perusahaan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, Perseroan mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pegawai secara periodik. Proses penerimaan, evaluasi kinerja pegawai, promosi dan rotasi merupakan salah satu momen yang biasa digunakan Perseroan untuk melakukan proses sosialisasi visi dan misi perusahaan.

DISSEMINATION AND EFFORTS TO ACCOMPLISH THE COMPANY'S VISION AND MISSION

Efforts to achieve the Company's vision and mission are examined in each planning stage and throughout operational activities.

Periodically, the Company disseminates the vision and mission to all employees to ensure the Company's vision and mission are achieved. The Company uses recruitment process, employee's performance evaluation, promotion, and rotation as a momentum to disseminate its vision and mission.

TRANSFORMASI PLN

Tahun 2021, Perseroan masih melanjutkan implementasi aspirasi strategis Transformasi PLN, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

TRANSFORMATION OF PLN

As illustrated in the diagram below, in 2021 the Company continued the implementation of strategic aspiration for the transformation of PLN.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values

Untuk menuju visi "Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi", PLN dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya untuk menghadirkan listrik berbiaya rendah sementara di sisi lain PLN perlu memastikan keamanan dan kehandalan pasokan listrik, bertransisi dalam menyediakan listrik rendah karbon dan berkontribusi pada dekarbonisasi, menyediakan layanan dan harga listrik yang mampu bersaing dan memberikan layanan bernilai tinggi lebih dari sebatas kWh (energi listrik), serta menyediakan layanan berkualitas tinggi dan memanfaatkan teknologi digital.

Hal tersebut yang mendasari 4 *Strategic Goals* yang ditetapkan PLN, yaitu:

1 Aspirasi *Green* untuk memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan energi terbarukan yang cepat dan efisien,
2 Aspirasi *Innovative* untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan lewat bisnis model dan layanan yang inovatif,
3 Aspirasi *Customer Focused* untuk memuaskan konsumen lewat kualitas layanan kelas dunia, dan
4 Aspirasi *Lean* untuk bisa menyediakan listrik yang handal dengan harga yang terjangkau.

Keempat *Strategic Goals* tersebut perlu didukung oleh *enabler-enabler* strategis yaitu (1) Organisasi dan SDM yang handal, (2) Kemajuan teknologi, (3) Kemampuan keuangan yang berkelanjutan serta (4) Pembangunan nasional.

PLN faces challenges to achieve the vision of "To become the Leading Power-Generating Company in Southeast Asia and the #1 Customer Choice for Energy Solutions". For instance, PLN needs to ensure the safety and reliability of electricity supply and assure the transition into supplying low-carbon electricity and contributing to de-carbonization, while providing low-cost electricity, which will enable it to offer competitive prices and services and give high-value services, not just the kWh (electrical energy) generated, and remain capable of providing high-quality services with the use of digital technology.

These underlies the 4 Strategic Goals set by PLN, namely:

1 Green aspiration to lead Indonesia's energy transition through rapid and efficient upgrading of renewable energy,
2 Innovative aspiration to drive the Company's growth through innovative business models and services,
3 Customer-Focused aspiration to satisfy consumers through world-class service quality, and
4 Lean aspiration to be able to provide reliable electricity at an affordable price.

The four Strategic Goals need to be supported by strategic enablers, namely (1) reliable organization and human resources, (2) technological advances, (3) sustainable financial capabilities, and (4) national development.

Makna Logo Perusahaan
Company Logo Meaning

Bentuk Logo yang digunakan sebagai Identitas Perusahaan terdiri dari Logogram dan Logotype yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. Logogram tersusun dari 3 (tiga) elemen visual, yaitu:

1. Bidang Persegi sebagai dasar, berwarna kuning, dan tanpa garis pinggir.
   a. Bidang Persegi melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna.
   b. Warna kuning menggambarkan pencerahan seperti yang diharapkan PT PLN (Persero) bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Warna kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap Insan yang berkarya di PT PLN (Persero).
2. Petir atau Kilat, berwarna merah, bentuk atas tebal, bentuk bawah runcing, dan memotong/menembus tiga gelombang.
   a. Petir atau Kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PT PLN (Persero). Selain itu, Petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para Insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi pelanggannya.

The Logo used as the Company's Identity consists of the Logogram and Logotype which are an integral and inseparable part. The logogram is composed of 3 (three) visual elements, namely:

1. Yellow, borderless square shape as the base form.
   a. Square shape symbolizes that PT PLN (Persero) is a container or organization that is perfectly organized.
   b. The yellow color depicts enlightenment as expected from PT PLN (Persero) that electricity is able to create enlightenment for people's lives. The yellow color also symbolizes the fiery spirit of every individual who works at PT PLN (Persero).
2. Lightning shape in red color, thick top shape, pointed bottom shape, and cuts/pierces three waves.
   a. Lightning shape symbolizes the electric power contained in it as the core service produced by PT PLN (Persero). In addition, Lightning also means the fast and precise work of the personnel of PT PLN (Persero) in providing the best solutions for its customers.

Makna Logo Perusahaan
Company Logo Meaning

b. Warna merah memberikan representasi kedewasaan PT PLN (Persero) selaku perusahaan listrik pertama di Indonesia dan dinamisme gerak laju PT PLN (Persero) beserta Insan Perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

3. Tiga Gelombang, berwarna biru, berbentuk sinusodia (2 ½ perioda), ujung gelombang menghadap ke bawah, tersusun sejajar dalam arah mendatar, dan terletak di tengah-tengah pada dasar kuning.
   a. Tiga Gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti oleh PT PLN (Persero) yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para Insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya.
   b. Warna biru melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta keandalan yang dimiliki Insan PT PLN (Persero) dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Sedangkan *Logotype* terdiri dari akronim kalimat Perusahaan Listrik Negara yakni PLN yang disusun dari karakter huruf yang khas sehingga memiliki standar khusus dan hanya dimiliki oleh PT PLN (Persero).

b. The red color represents the maturity of PT PLN (Persero) as the first electricity company in Indonesia and the dynamism of the pace of PT PLN (Persero) and its personnel as well as courage in facing the challenges of the times.

3. Three Waves with blue color in sinusoidal wave shape (2½ period), the ends of the waves facing downwards, arranged parallel in the horizontal direction, and located in the middle of the yellow base.
   a. Three Waves means the propagation of electrical energy flowed by three main business fields that are engaged in by PT PLN (Persero), namely generation, power supply, and distribution which are in line with the hard work of PT PLN (Persero) personnel to provide the best service for its customers.
   b. The blue color symbolizes loyalty and dedication to the task to achieve prosperity and welfare of the Indonesian people, as well as the reliability of PT PLN (Persero) personnel in providing the best service for its customers.

Meanwhile, the Logotype consists of the acronym for the State Electricity Company, namely PLN, which is composed of distinctive letter characters so that it has special standards and is only owned by PT PLN (Persero).

Struktur Organisasi (31 Desember 2021)

Organization Structure (December 31, 2021)

Dengan mempertimbangkan dinamika penyediaan energi dan kegiatan usaha PLN, perlu diikuti dengan upaya penetapan sistem dan proses bisnis yang efektif dan efisien guna menunjang tercapainya target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan menetapkan struktur organisasi terbaru berdasarkan Keputusan Direksi No. 0162.P/DIR/2021 dan berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021.

Taking into account the dynamics in energy supply and PLN's business activities, it needs to to be followed by efforts to establish effective and efficient business systems and processes to support the achievement of performance targets. In line with such matter, the Board of Directors has determined the latest organizational structure based on Decision of the Board of Directors No. 0162.P/DIR/2021 and has come into effect as of October 28, 2021.

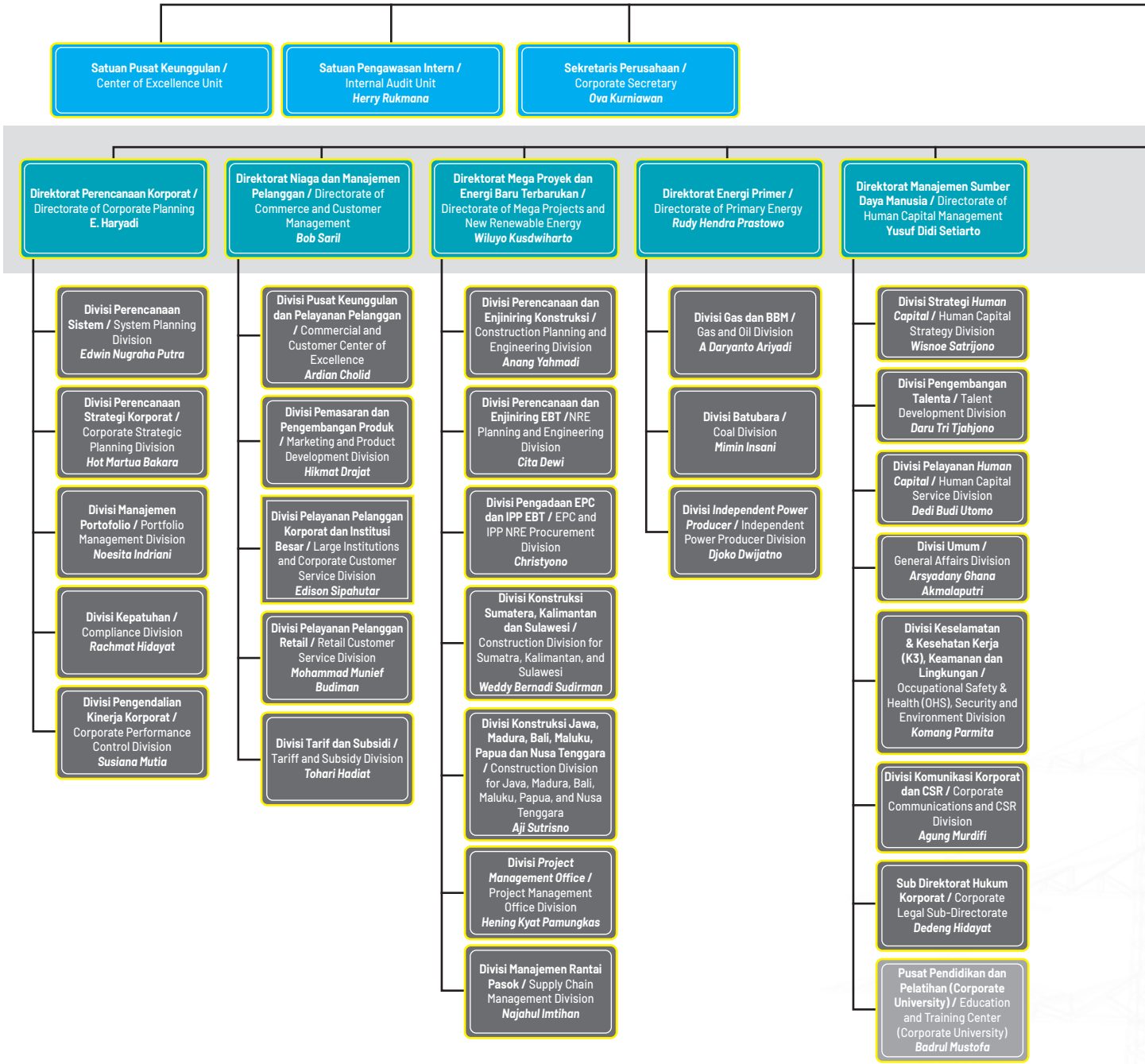

Struktur Organisasi
Organization Structure

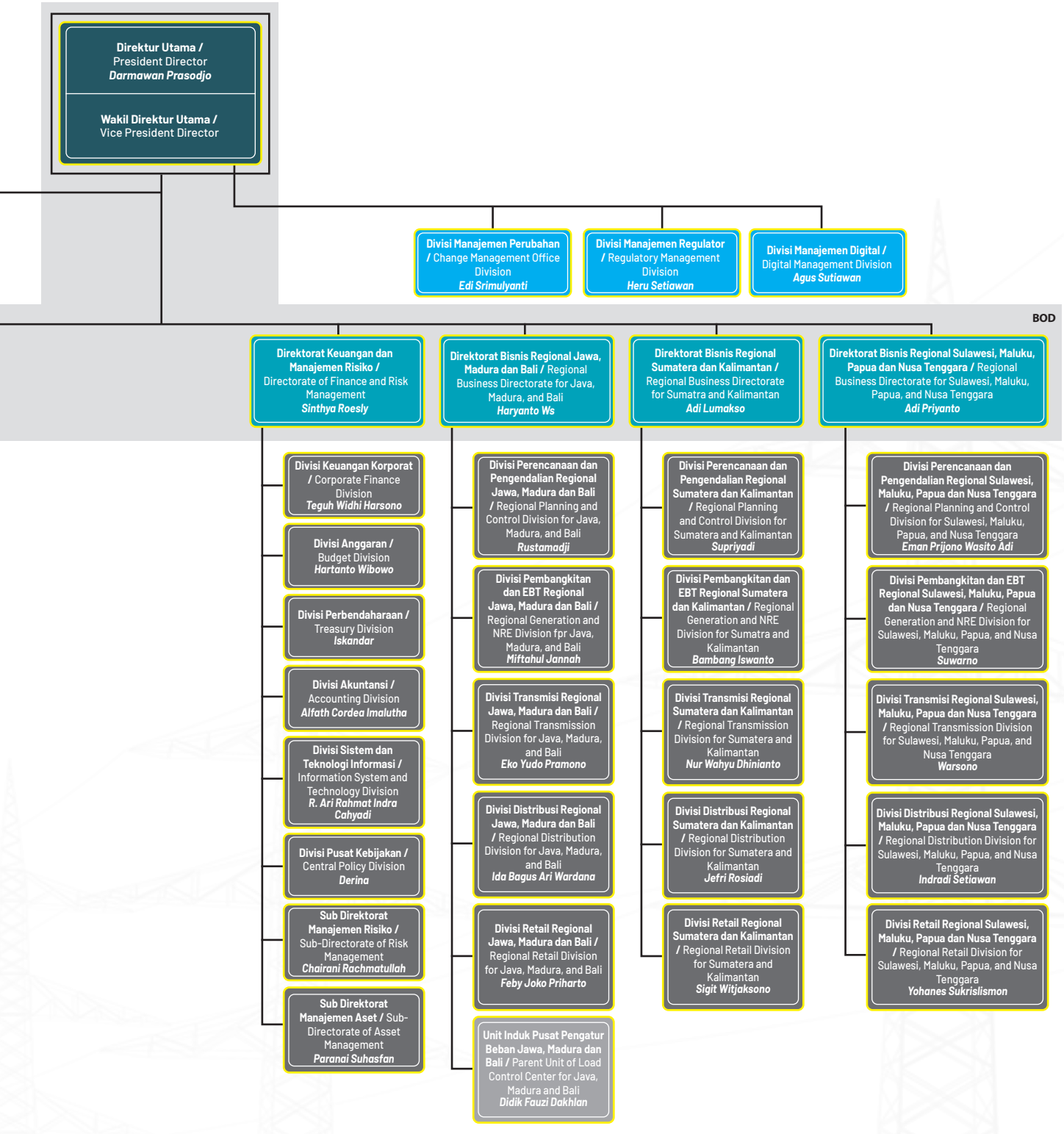

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Susunan Dewan Komisaris PLN mengalami beberapa kali perubahan di sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

There were changes in the Board of Commissioners composition throughout 2021 as follows:

	1 Januari 2021 - 16 Maret 2021 / *January 1, 2021 - March 16, 2021*	17 Maret 2021 – 15 Juli 2021 / *March 17, 2021 – July 15, 2021*	16 Juli 2021 – 31 Desember 2021 / *July 16, 2021 - December 31, 2021*
Landasan Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-330/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-330/MBU/10/2020 dated October 9, 2020	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-90/MBU/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-90/MBU/03/2021 dated March 17, 2021	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021
Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	Suahasil Nazara	Suahasil Nazara	Suahasil Nazara
Komisaris / Commissioner	Rida Mulyana	Rida Mulyana	Rida Mulyana
Komisaris / Commissioner	Ilya Avianti	Ilya Avianti	Susiwijono Moegiarso
Komisaris / Commissioner	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan
Komisaris / Commissioner	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi
Komisaris / Commissioner	Muhammad Yusuf Ateh	Ardan Adiperdana	Ardan Adiperdana
Komisaris / Commissioner	Mohammad Rudy Salahuddin	Mohammad Rudy Salahuddin	-
Komisaris / Commissioner	Eko Sulistyo	Eko Sulistyo	Eko Sulistyo
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Deden Juhara	Deden Juhara	Heru Winarko
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Murtaqi Syamsuddin	Murtaqi Syamsuddin	Alex Iskandar Munaf

Adapun profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris PLN untuk yang menjabat sampai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The profiles of each member of the Board of Commissioners of PLN who served as of the fiscal year ended December 31, 2021 are as follows:

AMIEN SUNARYADI

Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	61 tahun / 61 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Malang, 23 Januari 1960 / Malang, January 23, 1960
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / He was appointed as President Commissioner cum Independent Commissioner based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	
Pendidikan / Education	• Master of Professional Accounting (MPA), The School of Accountancy, Georgia State University, Atlanta, USA (1992) • Diploma IV (Akuntan), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1986) / Diploma IV (Accountant), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1986) • Diploma III (Ajun Akuntan), STAN (1982) / Diploma III (Junior Accountant), STAN (1982)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas (2014-2018) / Head of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities/SKK Migas (2014-2018) • *Partner* di Divisi *Fraud Investigation & Dispute Services* (FIDS) Ernst & Young Indonesia (2012-2014) / Partner in Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) Division at Ernst & Young Indonesia (2012-2014) • *Senior Governance and Anti-Corruption Officer* di World Bank Indonesia (2008-2012) / Senior Governance and Anti-Corruption Officer at World Bank Indonesia (2008-2012) • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (2003-2007) / Deputy Chairman of Corruption Eradication Commission/KPK (2003-2007)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	• *Partner* pada Firma Hukum Assegaf Hamzah and Partners/AHP (2019-sekarang) / Partner at Assegaf Hamzah and Partners Law Firm/AHP (2019-present) • Senior Advisor PT Integra Solusi Optima/ISO (2019-sekarang) / Senior Advisor of PT Integra Solusi Optima/ISO (2019-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

SUAHASIL NAZARA

Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	51 tahun / 51 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 23 November 1970 / Jakarta, November 23, 1970
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	
Pendidikan / Education	• Doctor of Philosophy (PhD), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2003) • Master of Science (MSc), Cornell University, USA (1997) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1994) / Bachelor of Economics, Universitas Indonesia (1994)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional/KEN (2013-2019) / Member of the Board of National Economic Committee/KEN (2013-2019) • Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2016) / Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2016) • Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/ TNP2K (2010-2015) / Coordinator of Policy Working Group at the Secretariat of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction/TNP2K (2010-2015) • Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD (2009-2015) / Deputy Chairman of Committee for the Monitoring of Regional Autonomy Implementation/KPPOD (2009-2015) • Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB Universitas Indonesia (2009-2013) / Head of Department of Economics, Faculty of Economics and Business/FEB, Universitas Indonesia (2009-2013) • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011) / Members of Assistance Team of the Minister of Finance for Fiscal Decentralization (2009-2011) • Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB, Universitas Indonesia (2005-2008) / Head of Demographic Institute, Faculty of Economics and Business/FEB, Universitas Indonesia (2005-2008)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	• Wakil Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2019-sekarang) / Vice Minister of Finance, The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2019-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

RIDA MULYANA

Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	58 tahun / 58 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Sumedang, 2 Mei 1963 / Sumedang, May 2, 1963
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Tangerang Selatan / South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019. / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019.	
Pendidikan / Education	• Master of Petroleum Engineering, University of London, UK (1992) • Sarjana Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (1988) / Bachelor of Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung (1988)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM (2013-2019) / Director General of New & Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources (2013-2019) • Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ESDM (2010-2013) / Bureau Head of Planning and Cooperation of Ministry of Energy and Mineral Resources (2010-2013) • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" (2009-2010) / Head of Research and Development Center for Oil and Gas Technology "Lemigas" (2009-2010) • Sekretaris Direktorat Jenderal Migas (2009) / Secretary of Directorate General of Oil and Gas (2009) • Kabid Program, Puslitbangtek Migas "Lemigas" (2008-2009) / Division Head of Program, Research and Development Center for Oil and Gas "Lemigas" (2008-2009) • Kabag Tata Usaha, Puslitbangtek Migas "Lemigas" (2002-2008) / Section Head of Administration, Research and Development Center for Oil and Gas "Lemigas" (2002-2008)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM (2019-sekarang) / Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2019-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham. / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders.	

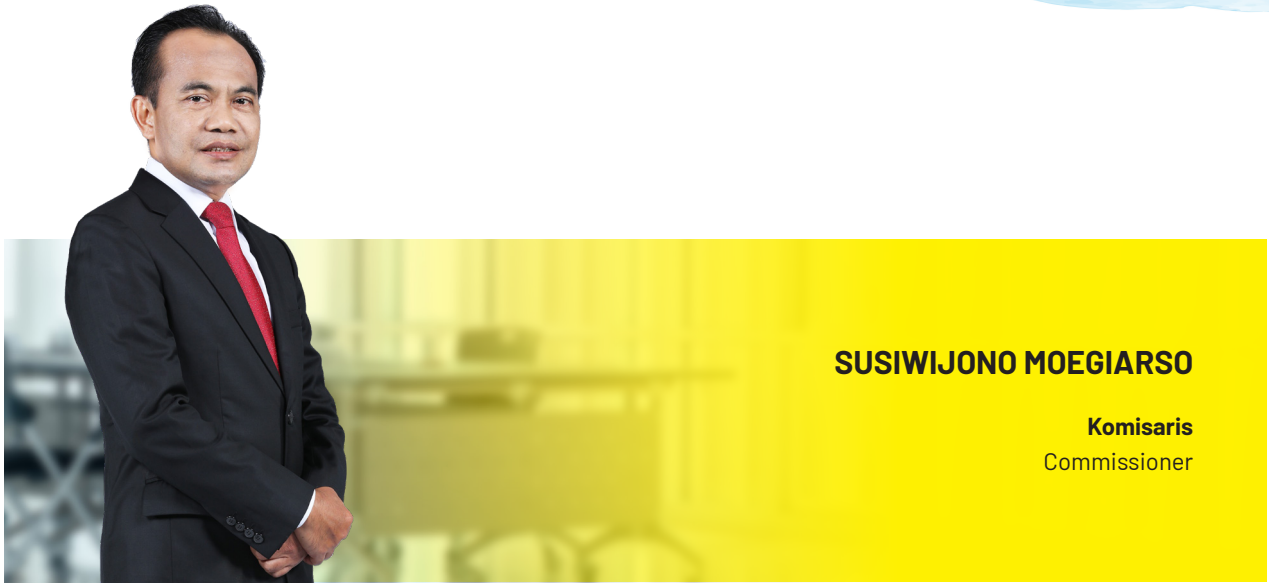

SUSIWIJONO MOEGIARSO

Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	52 tahun / 52 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Ponorogo, 17 Juli 1969 / Ponorogo, July 17, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	
Pendidikan / Education	• Magister Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta (2017) / Master of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta (2017) • Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Indonesia (1997) / Bachelor of Management Economics, Universitas Indonesia (1997)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018-sekarang) / Secretary of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2018-present) • Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan (2015-2018) / Expert Staff to the Minister of Finance for Organization, Bureaucracy, and Information Technology, Ministry of Finance (2015-2018) • Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan (2012-2015) / Director of Customs and Excise Revenue and Regulations, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2012-2015) • Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2010-2012) / Director of Customs and Excise Information, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2010-2012) • Kepala Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2006-2010) / Head of Sub-directorate of Automation Systems and Procedures, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2006-2010) • Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2005-2006) / Head of Sub-Directorate of Risk Management, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2005-2006)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018-sekarang) / Secretary of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2018-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

MOHAMAD IKHSAN

Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	57 tahun / 57 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Sigli, 7 November 1964 / Sigli, November 7, 1964
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019	
Pendidikan / Education	• Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Ilinois, Amerika Serikat (1999) / Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA (1999) • MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tenn, Amerika Serikat (1991) / MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tenn, USA (1991) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1988) / Bachelor of Economics, Universitas Indonesia (1988)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Anggota Tim Asistensi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2019) / Member of Assistance Team, Coordinating Minister for Economic Affairs (2017-2019) • Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI (2014-2019) / Member of Expert Team for Vice President of the Republic of Indonesia (2014-2019) • Komisaris PT PGN Tbk (2015-2019) / Commissioner at PT PGN Tbk (2015-2019) • Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) / Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) • Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) / Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) • Komisaris PT JICT (2011-2017) / Commissioner at PT JICT (2011-2017) • Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014) / Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014) • Komisaris PT Danareksa (2008-2015) / Commissioner at PT Danareksa (2008-2015)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	• Member of Advisory Board, Mandiri Institute (Desember 2019-Sekarang) / Member of Advisory Board, Mandiri Institute (December 2019-Present) • Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang) / Special Staff of Minister of SOEs (2019-present) • Member of Policy Advisory, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan (2015-sekarang) / Member of Policy Advisory, Asian Development Bank Institute, Japan (2015-present) • Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2010-sekarang) / Professor of Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2010-present) • Anggota Masyarakat Ekonomi Statistik, BPS dan Bappenas (2007-sekarang) / Member of the Statistical Economic Community, Statistics Indonesia and Bappenas (2007-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

DUDY PURWAGANDHI

Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First Period
	Usia / Age	51 tahun / 51 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Manado, 23 September 1970 / Manado, September 23, 1970
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020	
Pendidikan / Education	• Sarjana Hukum, Universitas Trisakti (1995) / Bachelor of Law, Universitas Trisakti (1995)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Direktur Seacons Trading Limited, Singapore (2011-2020) / Director of Seacons Trading Limited, Singapore (2011-2020) • Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (2019) / Deputy Treasurer of National Campaign Team (TKN), Koalisi Indonesia Maju (2019) • Staf Khusus Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2018-2019) / Special Staff of Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform (2018-2019) • Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019) / Commissioner at PT Satui Terminal Utama (2015-2019) • Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011) / Director at PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011) • Direktur PT Jhonlin Marine Trans (2008-2009) / Director at PT Jhonlin Marine Trans (2008-2009) • Direktur PT Jhonlin Air Transport (2008-2009) / Director at PT Jhonlin Air Transport (2008-2009)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

ARDAN ADIPERDANA

Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	62 tahun / 62 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Singkawang, 16 Juni 1959 / Singkawang, June, 16 1959
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-90/MBU/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-90/MBU/03/2021 dated March 17, 2021	
Pendidikan / Education	• Doktor Manajemen Stratejik, Program Paska Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2013) / Doctor of Strategic Management, Postgraduate Program of Management, Universitas Indonesia (2013) • Master Bisnis, MBA Program, Saint Mary's University (1992) / Master of Business, MBA Program, Saint Mary's University (1992) • D4 Akuntansi, STAN (1987) / Bachelor of Applied Sciences in Accounting, STAN (1987) • D3 Akuntansi, STAN (1980) / Associate Degree in Accounting, STAN (1980)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Komisaris PT Bank Mandiri (2016-2021) / Commissioner at PT Bank Mandiri (2016-2021) • Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019-2020) / Special Staff of the Minister of Tourism and Creative Economy (2019-2020) • Komisaris Utama PT Jasa Raharja (Persero) (2013-2016) / President Commissioner of PT Jasa Raharja (Persero) (2013-2016) • Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015) / Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (2015) • Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (2013) / Deputy Head of BPKP for Supervision of Government Agencies in the Economic Sector (2013) • Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2011-2013) / Commissioner at PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2011-2013) • Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2006) / Deputy Head of BPKP for State Accountants (2006)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Staf Khusus I Menteri BUMN (Jan 2021-sekarang) / Special Staff I to the Minister of SOEs (Jan 2021-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

EKO SULISTYO

Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	53 tahun / 53 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Kendal, 30 Maret 1968 / Kendal, March 30, 1968
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Surakarta, Jawa Tengah / Surakarta, Central Java
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 / Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020	
Pendidikan / Education	• Sarjana Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1994) / Bachelor of History, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1994)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Komisaris PT Danareksa (2016-2020) / Commissioner at PT Danareksa (2016-2020) • Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (2014-2019) / Deputy IV for Political Communication and Information Dissemination of Presidential Staff Office (2014-2019) • Konsultan Politik Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) / Political Consultant to the Governor of DKI Jakarta (2012-2014) • Konsultan Politik Walikota Surakarta (2008-2012) / Political Consultant to the Mayor of Surakarta (2008-2012) • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta (2003-2008) / Chairman of the General Election Commission (KPU) of Surakarta City (2003-2008) • Direktur Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (2000-2003) / Director of the Consortium for Monitoring and Empowerment of Public Institutions (2000-2003) • Pendiri Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) (2000-2003) / Founder of Women Solidarity for Humanity and Human Rights • Direktur Penelitian di Lembaga Gita Pertiwi Ecological Studies Project (1994-2000) / Research Director at Gita Pertiwi Institute for Ecological Studies Project (1994-2000) • Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Solo dan menjadi Koordinator KIPP Jawa Tengah (1996-1999) / Coordinator of the Independent Election Monitoring Committee (KIPP) Solo and became Coordinator of KIPP Central Java (1996-1999)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

HERU WINARKO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	59 tahun / 59 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 1 Desember 1962 / Jakarta, December 1, 1962
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	
Pendidikan / Education	Sarjana Hukum Universitas Airlangga (1996) / Bachelor of Law, Universitas Airlangga (1996)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Pati Bareskrim Polri (Kepala BNN) (2018) / High-Ranking Officer of Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Head of BNN) (2018) • Pati Bareskrim Polri (Deputi Penindakan KPK) (2015) / High-Ranking Officer of Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Deputy for Enforcement of KPK) (2015) • Pati SSDM Polri (2015) / High-Ranking Officer of Human Resources Staffs of the Indonesian National Police (2015) • KAPOLDA Lampung (2012) / Lampung Regional Police Chief (2012)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

ALEX ISKANDAR MUNAF

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	60 tahun / 60 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 16 Maret 1961 / Jakarta, March 16, 1961
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Tangerang Selatan / South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	
Pendidikan / Education	• Ph.D Program Economics, The American University, Washington DC, USA (1989) • Master of Arts in Applied Economics degree, The American University, Washington DC, USA (1987) • Bachelor of Science in Business Administration degree, The American University, Washington DC, USA (1984)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Lecturer, Swiss German University • Lecturer, IPMI International Business School (Institute Pengembangan Manajemen Indonesia) • Lecturer, President University • Lecturer, BINUS University • Lecturer, Thames Business College Jakarta • Lecturer, Bidakara International Education Institute • Lecturer, Universitas Atmajaya • Executive Director ALATIEF Corporation (1993 – 1996) • Director PT BISMATEK – Business and Management Consultant (1993 – 1996) • Head of Laboratory for Economics, Management and Quantitative – Economics School for Finance and Banking of Indonesia (STEKPI) Jakarta (1991 – 1993) • Head of Finance and Banking Program, Economics School for Finance and Banking of Indonesia (STEKPI) Jakarta (1991-1993) • Teaching Assistant in Macroeconomics, The American University, Washington DC, USA (1988-1989)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak ada / None	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders	

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Susunan Direksi PLN mengalami beberapa kali perubahan di sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

There were changes in the Board of Directors composition throughout 2021 as follows:

	1 Januari 2021 / *January 1, 2021*	**17 Februari 2021 / *February 17, 2021***	**16 Juni 2021 / *June 16, 2021***	**6 & 7 Desember 2021 - 31 Desember 2021 / *December 6 & 7, 2021 - December 31, 2021***
Direktur Utama / President Director	Zulkifli Zaini	Zulkifli Zaini	Zulkifli Zaini	Darmawan Prasodjo
Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Darmawan Prasodjo	Darmawan Prasodjo	Darmawan Prasodjo	-
Direktur Keuangan / Director of Finance	Sinthya Roesly	-	-	-
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	-	Sinthya Roesly	Sinthya Roesly	Sinthya Roesly
Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning	Muhammad Ikbal Nur	Muhammad Ikbal Nur	Evy Haryadi	Evy Haryadi
Direktur *Human Capital* dan Manajemen / Director of Human Capital and Management	Syofvi Felienty Roekman	-	-	-
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management	-	Syofvi Felienty Roekman	Syofvi Felienty Roekman	Yusuf Didi Setiarto
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan/ Director of Commerce and Customer Management	Bob Saril	Bob Saril	Bob Saril	Bob Saril
Direktur Energy Primer / Director of Primary Energy	Rudy Hendra Prastowo	-	-	-
Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy	-	Rudy Hendra Prastowo	Rudy Hendra Prastowo	Rudy Hendra Prastowo
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali	Haryanto W.S	Haryanto W.S	Haryanto W.S	Haryanto W.S
Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatera Kalimantan	Wiluyo Kusdwiharto	-	-	-
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan	-	Wiluyo Kusdwiharto	Muhammad Ikbal Nur	Adi Lumakso
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	Syamsul Huda	Syamsul Huda	Syamsul Huda	Adi Priyanto
Direktur Mega Project / Director of Mega Projects	M Ikhsan Asaad	-	-	-
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New Renewable Energy	-	M Ikhsan Asaad	Wiluyo Kusdwiharto	Wiluyo Kusdwiharto

Adapun profil dari masing-masing anggota Direksi PLN yang menjabat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The profiles of each member of the Board of Directors of PLN who served as of the fiscal year ended December 31, 2021 are as follows:

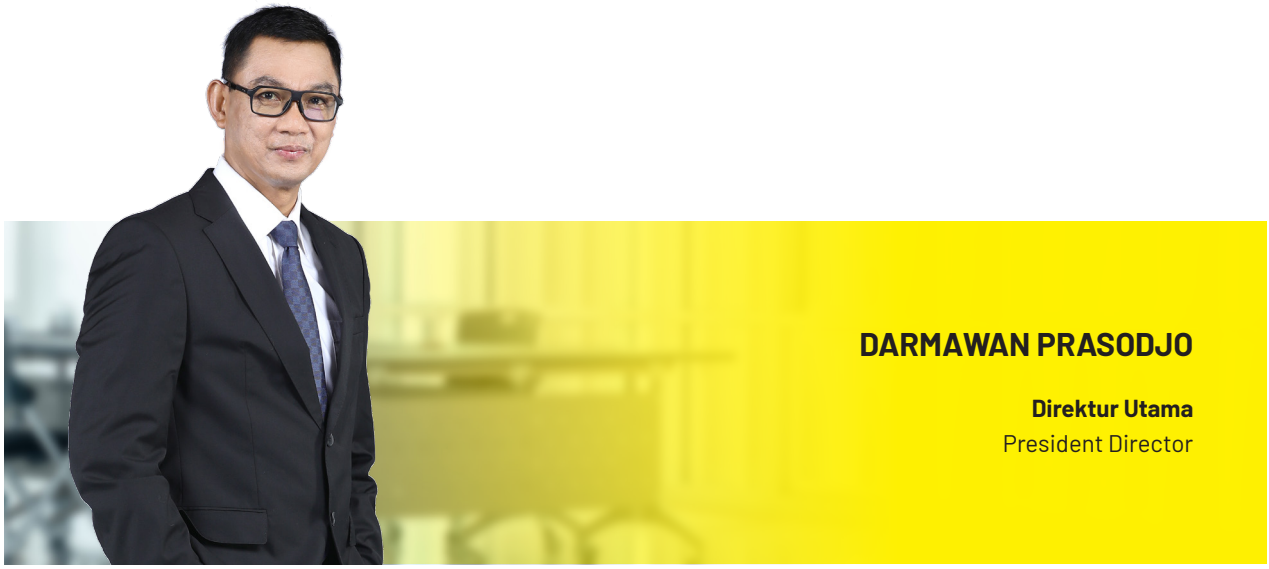

DARMAWAN PRASODJO

Direktur Utama
President Director

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	51 tahun / 51 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Magelang, 19 Oktober 1970 / Magelang, October 19, 1970
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 / Appointed as President Director based on Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021 • Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama pada 23 Desember 2019 berdasarkan SK Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-325/MBU/12/2019 / He was appointed as Vice President Director on December 23, 2019 based on Decree of Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-325/MBU/12/2019	
Pendidikan / Education	• Nicholas Institute, Duke University – USA (Sep 2009 – Des 2012) Post-Doctoral, Natural Resources dan Energy Policy / Nicholas Institute, Duke University – USA (Sep 2009 – Dec 2012) Post-Doctoral, Natural Resources and Energy Policy • Texas A&M University – USA (Jan 2004 – May 2011) Ph.D, Applied Economics, Natural Resources Economics • Texas A&M University – USA (Jan 1998 - Dec 1999) MCS, Computer Science with Software Engineering	
Pengalaman Kerja / Career History	• Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) (2019 - 2021) / Vice President Director at PT PLN (Persero) (2019 - 2021) • Komisaris PT PLN (Persero) (2018-2019) / Commissioner at PT PLN (Persero) (2018-2019) • Pendiri, Pemimpin Redaksi, dan Ekonom Energi di Petronomist.com (2011-sekarang) / Founder, Editor in Chief, and Energy Economist at Petronomist.com (2011-present) • Co-chair Post 2015 Millenium Development Goals (MDGs), Bali (2013) / Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals (MDGs), Bali (2013) • Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy, Surya University (2012-2013) / Director at Indonesia Center for Green Economy and Department Head of Green Economy Study Program, Surya University (2012-2013)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

SINTHYA ROESLY

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	52 tahun / 52 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Pekanbaru, 6 Oktober 1969 / Pekanbaru, October 6, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	SK Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-325/MBU/12/2019 / Decree of Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-325/MBU/12/2019	
Pendidikan / Education	• Magister Manajemen, IPMI International Business School (2003) / Master of Management, IPMI International Business School (2003) • Master of Business Administration, Monash University, Australia (2003) • Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (1996) • Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1993) / Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1993) • Diploma Sastra Inggris, Universitas Indonesia (1993) / Diploma in English Literature, Universitas Indonesia (1993)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Direktur Eksekutif/CEO merangkap Ketua Dewan Direktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI atau Indonesia Eximbank (2017-2019) / Executive Director/CEO cum Chairperson of Board of Directors, Indonesian Export Financing Institution/LPEI or Indonesia Eximbank (2017-2019) • Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII (2009-2017) / President Director at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII (2009-2017) • Deputi Direktur Perencanaan Strategis Korporat PT PLN (Persero) (2006–2009) / Deputy Director of Strategic Corporate Planning at PT PLN (Persero) (2006–2009) • Manajer Analisa & Evaluasi Sistem PT PLN (Persero) (2003–2006) / System Analysis & Evaluation Manager at PT PLN (Persero) (2003–2006) • Divisi Keuangan & Niaga PT PLN (Persero) (1996–2003) / Finance & Commerce Division at PT PLN (Persero) (1996–2003) • Power System Operations Engineer PT PLN (Persero) (1994–1996) / Power System Operation Engineer at PT PLN (Persero) (1994-1996) • Commissioning Engineer Thermal Power Generation Project PT PLN (Persero) (1993–1994) / Commissioning Engineer of Thermal Power Generation Project at PT PLN (Persero) (1993-1994)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain / No concurrent position in other Company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / She does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

EVY HARYADI

Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	52 tahun / 52 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Jakarta, 19 Desember 1969 / Jakarta, December 19, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-200/MBU/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK- SK-200/MBU/06/2021 dated June 16, 2021	
Pendidikan / Education	• Master of Power Engineering, Waseda University Tokyo (1999) • Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1993) / Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Kepala Satuan Pusat Keunggulan PT PLN (Persero)(2021) / Head of Center of Excellence at PT PLN (Persero) (2021) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (2019-2021) / General Manager of Java Bali Load Control Center at PT PLN (Persero) (2019-2021) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2017-2019) / General Manager of Center for Research and Development of Electricity at PT PLN (Persero) (2017-2019) • Staf Ahli Direksi PT PLN (Persero) (2016-2017) / Expert Staff to the Board of Directors of PT PLN (Persero) (2016-2017) • Kepala Divisi Operasi PLN Bisnis Regional Sumatera (2016) / Head of Operations Division of PLN Sumatra Regional Business (2016) • General Manager PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2013-2016) / General Manager at PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2013-2016) • Manajer Operasi Sistem PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2010-2013) / System Operations Manager at PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2010-2013) • Manajer Operasi Sistem PT PLN (Persero) P3B Sumatera (2009-2010) / System Operations Manager at PT PLN (Persero) P3B Sumatera (2009-2010) • Manajer Bidang Perencanaan Operasi PT PLN (Persero) Unit Bidding dan Operasi Sistem (2006-2009) / Operational Planning Manager at PT PLN (Persero) Bidding Unit and System Operation (2006-2009) • Manajer PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Bali (2003-2006) / Manager of PT PLN (Persero) Bali Distribution Management Area (2003-2006) • Kepala Cabang Solok PLN Wilayah Sumatera Barat (2001-2003) / Head of PLN Solok Branch for West Sumatera Region (2001-2003)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

YUSUF DIDI SETIARTO

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital Management

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	47 tahun / 47 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Padang, 17 Januari 1974 / Padang, January 17, 1974
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero) No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the General Meeting of Shareholders of PT PLN (Persero) No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	
Pendidikan / Education	• Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1999) / Bachelor of Law, Universitas Indonesia (1999) • Sarjana Ekonomi, Universitas Andalas Padang (1994) / Bachelor of Economics, Universitas Andalas Padang (1994)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Energi (Eselon 1B) pada Kantor Staf Presiden (KSP) (2015 – 2021) / Principal Expert Staff of the Deputy for Energy (Echelon 1B) at the Presidential Staff Office (KSP) (2015-2021) • CEO Advisor pada PT Pertamina (Persero) (2019 – 2020) / CEO Advisor at PT Pertamina (Persero) (2019-2020) • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) Dewan Komisaris pada PT Pertamina (Persero) (2017 – 2020) / Member of Risk Management Monitoring Committee (KPMR) of the Board of Commissioners at PT Pertamina (Persero) (2017-2020) • *Special Advisor* Menteri ESDM (2016) / Special Advisor of the Minister of ESDM (2016) • *Special Advisor* Wakil Menteri ESDM (2016 – 2019) / Special Advisor of the Deputy of the Ministry of ESDM (2017-2019) • Tenaga Ahli Kepala Biro Hukum KESDM (2017 – 2019) / Expert Staff of Head of Legal Bureau of KESDM (2017 - 2019) • SVP Legal/Kepala Divisi Hukum dan Formalitas BP Migas/SKK Migas (2013 – 2015) / SVP Legal/Head of Legal and Formalities Division of BP Migas/SKK MIgas (2013 - 2015) • VP of Commercial Contract BP Migas/SKK Migas (2011 – 2013) / VP of Commercial Contract at BP Migas/SKK Migas (2011-2013) • *Senior Lawyer* BP Migas/SKK Migas (2009 – 2011) / Senior Lawyer at BP Migas/SKK Migas (2009-2011) • *Junior Lawyer* BP Migas/SKK Migas (2003 – 2009) / Junior Lawyer at BP Migas/SKK Migas (2003-2009) • *Associate Lawyer* di Wiriadinata & Widyawan Law Offices (W&W) (2000 – 2003) / Associate Lawyer at Wiriadinata & Widyawan Law Offices (W&W) (2000-2003)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

BOB SARIL

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan
Director of Commerce and Customer Management

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	53 tahun / 53 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Palembang, 27 Oktober 1968 / Palembang, October 27, 1968
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	SK Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-147/MBU/05/2020 / Decree of Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-147/MBU/05/2020	
Pendidikan / Education	• Master of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (2002) • Sarjana Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya, Palembang (1993) / Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Sriwijaya, Palembang (1993)	
Pengalaman Kerja / Career History	• General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur (2019-2020) / General Manager at PT PLN (Persero) UID East Java (2019-2020) • General Manager PT PLN (Persero) UIW Sulawesi Selatan, Tenggara & Barat (2017-2019) / General Manager at PT PLN (Persero) UIW South, Southeast & West Sulawesi (2017-2019) • General Manager PT PLN (Persero) UIW Aceh (2015-2017) / General Manager at PT PLN (Persero) UIW Aceh (2015-2017)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

RUDY HENDRA PRASTOWO

Direktur Energi Primer
Director of Primary Energy

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	57 tahun / 57 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Bogor, 6 Juli 1964 / Bogor, July 6, 1964
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	SK Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-147/MBU/05/2020 / Decree of Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-147/MBU/05/2020	
Pendidikan / Education	• Magister Engineering Management, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2006) / Master of Engineering Management, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2006) • Master Manajemen Bisnis Administrasi & Teknologi, Institut Teknologi Bandung (2004) / Master of Business Administration & Technology Management, Institut Teknologi Bandung (2004) • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1990) / Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1990)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Direktur Utama PT PLN Batubara (2018-2020) / President Director at PT PLN Batubara (2018-2020) • Kepala Divisi Operasi Regional Kalimantan pada Direktorat Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) (2017-2018) / Head of the Kalimantan Regional Operations Division at the Kalimantan Regional Business Directorate of PT PLN (Persero) (2017-2018) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (2016-2017) / General Manager at PT PLN (Persero) Certification Center (2016-2017)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

HARYANTO WS

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode kedua / Second period
	Usia / Age	62 tahun / 62 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Boyolali, 6 April 1959 / Boyolali, April 6, 1959
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	• Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 / He was appointed as Director based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015 • Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 / He was appointed as Director of Regional Business for Western Part of Java based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017 • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham RUPS No SK- 325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya / He was appointed as Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 by continuing the remaining previous term of office • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-357/MBU/11/2020 tanggal 4 November 2020 / He was appointed as Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-357/MBU/11/2020 dated November 4, 2020	
Pendidikan / Education	• Magister Manajemen, STIE IPWIJA (2003) / Master of Management, STIE IPWIJA (2003) • Sarjana Elektro, Institut Teknologi Bandung (1983) / Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1983)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero) (2019-2020) / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali at PT PLN (Persero) (2019-2020) • Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) (2017-2019) / Director of Regional Business for Western Part of Java at PT PLN (Persero) (2017-2019) • Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN (Persero) (2015-2017) / Director of Regional Business for Maluku and Papua at PT PLN (Persero) (2015-2017) • General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015) / General Manager of PT PLN (Persero) Distribution for Jakarta Raya and Tangerang (2014-2015)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

ADI LUMAKSO

Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan
Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	52 tahun / 52 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Pati, 22 Juli 1969 / Pati, July 22, 1969
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-389/MBU/12/2021 dated Desember 6, 2021	
Pendidikan / Education	• S2 Magister Manajemen Bisnis, Universitas Tenaga Nasional, Malaysia / Master of Business Management, Universitas Tenaga Nasional, Malaysia • S2 Magister Manajemen Bisnis, Universitas Sriwijaya / Master of Business Management, Universitas Sriwijaya • S1 Listrik, Universitas Sriwijaya / Bachelor of Electricity, Universitas Sriwijaya • S1 Sipil (Bangunan), Universitas Diponegoro / Bachelor of Civil Engineering (Building), Universitas Diponegoro	
Pengalaman Kerja / Career History	• Expert Pengadaan pada Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Procurement Expert at the Mega Project and NRE Directorate of PT PLN (Persero) Head Office • Expert Pengadaan pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) / Procurement Expert at the Sumatera and Kalimantan Regional Business Directorate of PT PLN (Persero) • Excecutive Vice President Konstruksi Regional Sumatera pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) / Executive Vice President of Sumatera Regional Construction at the Directorate of Sumatera and Kalimantan Regional Business PT PLN (Persero) • Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Head of the Sumatera Regional Construction Division at the Directorate of Sumatra Regional Business PT PLN (Persero) Head Office • Kepala Divisi Administrasi Konstruksi pada Direktorat Pengadaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Head of the Construction Administration Division at the Procurement Directorate of PT PLN (Persero) Head Office • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V PT PLN (Persero) / General Manager of PT PLN (Persero) Main Unit Development V PT PLN (Persero) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X PT PLN (Persero) / General Manager of PT PLN (Persero) Development Unit X PT PLN (Persero)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

ADI PRIYANTO

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	55 Tahun / 55 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Tulungagung, 06 Februari 1966 / Tulungagung, February 06, 1966
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, & Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / He was appointed as Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua, & Nusa Tenggara based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	
Pendidikan / Education	• S2 Listrik - Institut Teknologi Bandung (1998) / Master of Electricity – Institut Teknologi Bandung (1998) • S2 Bidang Manajemen – IPWI Jakarta (1998) / Master of Management – IPWI Jakarta (1998) • S2 Manajemen Bisnis – Jakarta Institute Of Management Studies (1997) / Master of Business Management – Jakarta Institute of Management Studies (1997) • S1 Listrik Institut Teknologi Sepuluh November (1991) / Bachelor of Electricity - Institut Teknologi Sepuluh November (1991)	
Pengalaman Kerja / Career History	• General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distibusi Jawa TImur (2021) / General Manager of PT PLN (Persero) East Java Distribution Parent Unit (2021) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali (2020 -2021) / General Manager of PT PLN (Persero) Bali Distribution Parent Unit (2020 -2021) • Kepala Divisi Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) (2017-2020) / Head of System Planning Division at PT PLN (Persero) (2017-2020) • Mulai berkarir di PT PLN (Persero) sejak 1993 / Started his career at PT PLN (Persero) (1993)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

WILUYO KUSDWIHARTO

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan
Director of Mega Projects and New Renewable Energy

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	50 tahun / 50 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Surabaya, 25 Juli 1971 / Surabaya, July 25, 1971
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	• Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021 • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / He was appointed as Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020 • Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 / He was appointed as Director of Regional Business for Sumatra based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017	
Pendidikan / Education	• Magister Manajemen, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2005) / Master of Management, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2005) • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994) / Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan (2020-2021) / Regional Business Director for Sumatera and Kalimantan (2020-2021) • Direktur Bisnis Regional Sumatera (2017-2020) / Regional Business Director for Sumatera (2017-2020) • Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera PT PLN (Persero) (2015-2017) / Head of Regional Construction Division for Sumatera at PT PLN (Persero) (2015-2017) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII (2013-2015) / General Manager at PT PLN (Persero) for Development VIII Main Unit (2013-2015) • Mulai berkarir di PT PLN (Persero) sejak 1995 / Started his career at PT PLN (1995)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2021

Changes in the Management Composition After the 2021 Fiscal Year

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN BUKU 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero) Nomor: SK-85/MBU/03/2022, tanggal 25 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PT PLN (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-90/MBU/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
2. Mengangkat Sdr. Tedi Bharata sebagai Komisaris PT PLN (Persero).

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE 2021 FISCAL YEAR

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the General Meeting of Shareholders of PT PLN (Persero) No: SK-85/MBU/03/2022, dated March 25, 2022 on Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners stipulates to:

1. Honorably dismiss Mr. Ardan Adiperdana as Commissioner of PT PLN (Persero) who was appointed based on Decree of the Minister of SOEs No: SK-90/MBU/03/2021 dated March 17, 2021, with gratitude for all the contributions of his energy and thoughts during his tenure.
2. Appoint Mr. Tedi Bharata as Commissioner of PT PLN (Persero).

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN BUKU 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero) Nomor: SK-2/MBU/01/2022, tanggal 6 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 jo Nomor: SK- 49/MBU/02/2021 tanggal 17 Februari 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
2. Mengangkat Sdr. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer PT PLN (Persero).

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION AFTER THE 2021 FISCAL YEAR

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the General Meeting of Shareholders of PT PLN (Persero) No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6, 2022 on Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Directors stipulates to:

1. Honorably dismiss Mr. Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy of PT PLN (Persero) which was appointed based on Decree of Minister of SOEs No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020 jo No. SK-49/MBU/02/2021 dated February 17, 2021 with the highest appreciation for his efforts and ideas while serving in his position.
2. Appoint Mr. Hartanto Wibowo as Director of Primary Energy of PT PLN (Persero).

Berikut ini merupakan profil dari anggota Komisaris dan Direksi PLN yang baru menjabat setelah tahun buku 2021:

The profile of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PLN who were appointed after the 2021 fiscal year is as follows:

Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2021
Changes in the Management Composition After the 2021 Fiscal Year

TEDI BHARATA

Komisaris
Commissioner

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	38 tahun / 38 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Magelang, 31 Mei 1983 / Magelang, May 31, 1983
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Depok
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 / Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022	
Pendidikan / Education	• Master of Public Administration, Columbia University (2016) • Sarjana Sistem Informasi Manajemen, Universitas Pelita Harapan (2001-2005) / Bachelor Management Information System, Universitas Pelita Harapan (2001-2005)	
Pengalaman Kerja / Career History	• Staf Khusus V Menteri BUMN (Maret 2021-Juli 2021) / Special Staff V to the Minister of SOEs (March 2021-July 2021) • VP Office of the Board PT Indonesia Asahan Aluminium (2019-2021) / VP Office of the Board PT Indonesia Asahan Aluminum (2019-2021) • Kepala Seksi Industri Telematika Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016-2019) / Head of the Telematics Industry Section at Investment Coordinating Board (2016-2019) • Kepala Seksi Infrastruktur Energi Badan Koordinasi Penanaman Modal (2012-2014) / Head of the Energy Infrastructure Section at Investment Coordinating Board (2012-2014) • Wakil Direktur Indonesia Investment Promotion Center – New York (2009-2012) / Vice Director at Indonesia Investment Promotion Center – New York (2009-2012) • Staf Project Management PT Siemens Indonesia (2005-2008) / Project Management Staff at PT Siemens Indonesia (2005-2008)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Agustus 2021-sekarang) / Deputy of Human Resources, Technology and Information at the Ministry of State-Owned Enterprises (August 2021-present)	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2021

Changes in the Management Composition After the 2021 Fiscal Year

HARTANTO WIBOWO

Direktur Energi Primer
Director of Primary Energy

Biodata	Masa Jabatan / Tenure	Periode pertama / First period
	Usia / Age	46 tahun / 46 years old
	Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Boyolali, 9 Februari 1976 / Boyolali, February 9, 1976
	Kewarganegaraan / Citizenship	Indonesia
	Domisili / Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero) Nomor : SK-2/MBU/01/2022, tanggal 6 Januari 2022 / Decree of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the General Meeting of Shareholders of PT PLN (Persero) No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6, 2022	
Pendidikan / Education	• S1 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung / Bachelor of Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung • S2 Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Master of Management majoring in Financial Management, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	
Pengalaman Kerja / Career History	• EVP Anggaran PT PLN (Persero) (2021) / EVP of Budgeting at PT PLN (Persero) (2021) • EVP Risk Management PT PLN (Persero) (2020) / EVP of Risk Management at PT PLN (Persero) • Direktur Keuangan merangkap Direktur Pengembangan PT PLN Batu Bara (2018 - 2020) / Director of Finance cum Director of Development at PT PLN Batu Bara (2018-2020) • VP Portfolio Management (2016-2017) / VP of Portfolio Management (2016-2017) • Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Korporat PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016) / Head of Corporate Planning and Development at PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016)	
Rangkap Jabatan / Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / No concurrent position in other company	
Hubungan Afiliasi / Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham / He does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders	

Profil SDM Perusahaan

Profile of Corporate Human Capital

Seluruh pegawai PLN berstatus sebagai pegawai tetap yang memiliki hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, untuk beberapa pekerjaan pendukung PLN menerapkan sistem pemborongan pekerjaan melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan lain sebagai mitra kerja. Dengan demikian, para pegawai yang mengerjakan pekerjaan pendukung memiliki hubungan kerja dengan perusahaan mitra tersebut.

All PLN's employees are permanent employees who have employment rights in accordance with the prevailing regulations. However, for some supporting jobs, implements the outsourcing system through contractual agreements with other companies as work partners. Thus, employees who do the supporting work have the employment relationship with the partner companies.

Secara kumulatif, jumlah pegawai PLN mencapai 52.116 orang pada akhir tahun 2021 yang terdiri dari 42.755 pegawai *holding* dan 9.361 pegawai anak perusahaan.

Cumulatively, the total employees of PLN reached 52,116 people at the end of 2021, consisting of 42,755 holding's employees and 9,361 subsidiaries' employees.

Profil SDM Perusahaan
Profile of Corporate Human Capital

KOMPOSISI KARYAWAN *HOLDING* (PLN) DAN ANAK PERUSAHAAN PLN TAHUN 2019 - 2021

COMPOSITION OF EMPLOYEES OF HOLDING (PLN) AND PLN SUBSIDIARIES IN 2019-2021

Uraian / *Description*	2019	2020	2021
Jumlah Pegawai *Holding* (PLN) / Total Employees of Holding (PLN)	**44.826**	**43.994**	**42.755**
Anak Perusahaan / Subsidiary			
• PT Indonesia Power	4.318	4.222	4.228
• PT Pembangkitan Jawa Bali	3.191	3.091	3.008
• PT Indonesia Comnet Plus	728	768	793
• PT PLN Batu Bara	77	108	113
• PT PLN Gas dan Geothermal	27	52	57
• PT PLN Enjiniring	241	326	261
• PT PLN Tarakan	50	82	98
• PT PLN Batam	503	511	504
• PT BAG	39	47	66
• PT Haleyora Power	100	141	149
• PT Energy Management Indonesia	-	-	48
• PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	-	-	33
• Tugas Karya ke Anak Perusahaan Lain (YPK PLN, PT IBI dan PT Unelec Indonesia) / Work Assignments to Other Subsidiaries (YPK PLN, PT IBI, and PT Unelec Indonesia)	1	1	3
Jumlah Pegawai Anak Perusahaan / Total Employees of Subsidiaries	**9.275**	**9.349**	**9.361**
Total	**54.101**	**53.343**	**52.116**

Dari jumlah pegawai *holding* tersebut, pegawai laki-laki sebanyak 34.404 dan perempuan 8.351. Namun demikian, PLN tetap menerapkan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari kebijakan non-diskriminasi. Porsi pegawai laki-laki yang lebih banyak tersebut disebabkan sebagian besar bidang pekerjaan di PLN adalah penugasan di lapangan seperti pengoperasian pembangkit listrik dan gardu induk, pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi listrik serta pelayanan pelanggan yang berlangsung 24 jam sehingga kebutuhan pegawai laki-laki menjadi lebih dominan.

Seluruh pegawai PLN berstatus sebagai pegawai tetap yang memiliki hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, untuk beberapa pekerjaan pendukung seperti petugas baca meter, petugas *contact center*, petugas layanan teknik, satpam, *cleaning services* dan lainnya, PLN menerapkan sistem pemborongan pekerjaan melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan lain sebagai mitra kerja. Dengan demikian, para pegawai yang mengerjakan pekerjaan pendukung memiliki hubungan kerja dengan perusahaan mitra tersebut.

Of the total holding's employees, there are 34,404 male employees and 8,351 female employees. However, PLN always applies the principle of gender equality as part of its non-discrimination policy. The higher share of male employees is due to the fact that most of the fields of work at PLN are field assignments, such as operating power plants and substations, maintaining electricity transmission and distribution networks, as well as customer service which lasts 24 hours so that the need for male employees becomes more dominant.

All PLN's employees are permanent employees who have employment rights in accordance with the prevailing regulations. However, for several supporting jobs such as meter reading officers, contact center officers, technical service officers, security guards, cleaning services and others, PLN implements the outsourcing system through contractual agreements with other companies as work partners. Thus, employees who do supporting work have the employment relationship with the partner companies.

Profil SDM Perusahaan
Profile of Corporate Human Capital

KOMPOSISI KARYAWAN *HOLDING* (PLN) TAHUN 2019 - 2021

COMPOSITION OF EMPLOYEES OF HOLDING (PLN) IN 2019-2021

Jenis kelamin / *Gender*	2019	2020	2021
Perempuan / Female	8.482	8.504	8.351
Laki-laki / Male	36.344	35.490	34.404
Total	**44.826**	**43.994**	**42.755**

Usia / *Age*	2019	2020	2021
≤ 25	11.129	9.036	7.042
26 - 30	12.815	13.969	14.168
31 - 35	7.245	8.138	8.760
36 - 40	2.881	3.535	4.425
41 - 45	1.158	1.131	1.286
46 - 50	3.971	3.383	2.692
> 50	5.627	4.802	4.382
Total	**44.826**	**43.994**	**42.755**

Jabatan / *Position*	2019	2020	2021
Fungsional / Functional	29.208	28.300	27.988
Supervisori Dasar / Basic Supervisor	9.247	9.278	8.857
Supervisori Atas / Top Supervisor	3.972	4.015	3.688
Manajemen Dasar / Basic Management	1.784	1.816	1.663
Manajemen Menengah / Middle Management	486	470	442
Manajemen Atas / Top Management	129	115	117
Total	**44.826**	**43.994**	**42.755**

Tingkat pendidikan / *Educational Level*	2019	2020	2021
≤ D2 / ≤ Associate Degree 2	18.902	17.291	15.980
D3 / Associate Degree 3	9.553	9.843	9.795
S1 / Bachelor's Degree	15.164	15.518	15.527
S2 / Master's Degree	1.197	1.333	1.440
S3 / Doctoral Degree	10	9	13
Total	**44.826**	**43.994**	**42.755**

Profil SDM Perusahaan
Profile of Corporate Human Capital

Penugasan / *Assignment*			
Deskripsi / *Description*	**2019**	**2020**	**2021**
Unit Bisnis PLN / PLN Business Unit	41.753	40.984	39.230
PLN Kantor Pusat / PLN Head Office	3.073	3.010	3.525
Total	**44.826**	**43.994**	**42.755**

Status ketenagakerjaan / *Employment Status*			
Deskripsi / *Description*	**2019**	**2020**	**2021**
Permanen / Permanent	44.822	43.994	42.753
Kontrak / Contract	4	-	2
Total	**44.826**	**43.994**	**42.755**

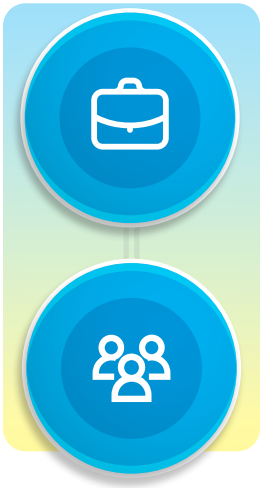

Keanggotaan Dalam Asosiasi
Association Membership

Di samping menjalankan usaha di sektor ketenagalistrikan, PLN juga aktif menjadi anggota dalam asosiasi sebagai berikut:

Aside from conducting business in electricity, PLN is also active as a member in a number of associations, which include:

Nama Organisasi / *Organization Name*	Status Anggota / *Member Status*
Heads of ASEAN Power Utilities/ Authorities (HAPUA)	Sekretariat Utama mewakili Indonesia / Main Secretariat representing Indonesia
Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and Western Pacific (AESIEAP)	Anggota / Member

Struktur & Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition & Structure

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga kepemilikan saham dengan porsi 5% atau lebih tidak disajikan karena sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PLN.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5%

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga kepemilikan saham dengan porsi kurang dari 5% tidak disajikan karena sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS INVESTOR DAN KEWARGANEGARAAN

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi jenis investor dan kewarganegaraan tidak disajikan karena sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

SHAREHOLDER COMPOSITION

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING WITH 5% OWNERSHIP OR MORE

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Thus, there were no other shareholders who owned 5% or more other than the Government of the Republic of Indonesia.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Hence, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners do not own any PLN shares.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING WITH LESS THAN 5% OWNERSHIP

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, information on shareholders with less than 5% ownership is not presented in this report.

COMPOSITION OF SHAREHOLDING BASED ON CLASSIFICATION OF INVESTOR TYPE AND NATIONALITY

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the information on shareholding composition based on investor type and nationality is not presented in this report.

Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan *Special Purpose Vehicles* (SPV)

Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)

ENTITAS ANAK

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PLN mempunyai entitas anak melalui kepemilikan langsung sebagai berikut:

SUBSIDIARIES

As of December 31, 2021, PLN directly owned a number of subsidiaries as follows:

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
PT Indonesia Power	Pembangkitan Tenaga Listrik / Electric Power Generation	Jakarta	1995	99,99%	99,99%	203.857.324	200.011.263	Beroperasi / Operating
PT Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkitan Tenaga Listrik / Electric Power Generation	Surabaya	1995	99,99%	99,99%	174.784.802	175.561.020	Beroperasi / Operating
PT Indonesia Comnets Plus	Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi / Telecommunication Network Provider	Jakarta	2000	99,99%	99,99%	5.326.349	4.443.773	Beroperasi / Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Penyediaan Tenaga Listrik / Electric Power Supplier	Batam	2000	99,99%	99,99%	20.373.849	20.065.370	Beroperasi / Operating
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jasa Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi / Engineering, Procurement, and Construction Services	Jakarta	2002	99,90%	99,90%	1.125.185	1.163.213	Beroperasi / Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi / Maintenance and operation	Balikpapan	2003	99,97%	99,97%	249.403	220.587	Beroperasi / Operating
PT PLN Batubara	Perdagangan Batubara / Coal Trading	Jakarta	2008	99,99%	99,99%	6.646.072	7.707.687	Beroperasi / Operating
PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal	Pengembangan infratsruktur midstream gas dan pembangkit listrik tenaga panas bumi / Midstream gas infrastructure development and geothermal power plant development	Jakarta	2009	99,99%	99,99%	889.746	876.168	Beroperasi / Operating
Majapahit Holding BV	Lembaga Keuangan / Financial Institution	Belanda	2006	100,00%	100,00%	5.514.000	5.345.000	Beroperasi / Operating
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Pelayaran / Shipping	Jakarta	1971	99,99%	99,99%	3.692.600	2.235.728	Beroperasi / Operating
PT Haleyora Power	Jasa pemeliharaan dan operasi / Maintenance and operation	Jakarta	2011	99,99%	99,99%	1.388.899	1.208.295	Beroperasi / Operating
PT Energy Management Indonesia	Jasa pengelolaan dan pemanfaatan energi / Energy management and utilization services	Jakarta	1987	99,99%	-	93.509	71.044	Beroperasi / Operating
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	Jasa pengelolaan energi/ pembangkitan (Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Uap) / Energy management/ generation services (Operation of Electricity and Steam Supply Installation)	Jakarta	2000	95%	-	518.540	719.390	Beroperasi / Operating

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PLN melalui entitas anak mempunyai kepemilikan tidak langsung sebagai berikut:

For the period ended on December 31, 2021, PLN through its subsidiaries has indirect ownership as follows:

Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan *Special Purpose Vehicles* (SPV)

Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and Special Purpose Vehicles (SPV)

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
PT INDONESIA POWER								
PT Cogindo Daya Bersama (CDB)	*Co-generation*, energi ketenagalistrikan, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik / Co-generation, electrical energy, operation and maintenance of power plants	Jakarta	1999	99,99%	99,99%	1.260.115	1.265.324	Beroperasi / Operating
PT Artha Daya Coalindo	Perdagangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara / Trading, transportation, loading and unloading, marketing and agency of coal	Jakarta	1998	80,00%	80,00%	948	495	Beroperasi / Operating
PT Indo Ridlatama Power	Pembangkitan tenaga listrik / Electric Power generation	Jakarta	2018	90,00%	90,00%	1.539.248	1.650.462	Beroperasi / Operating
PT Putra Indo Tenaga	Pembiayaan proyek dan *participating interest* / Project financing and participating interest	Jakarta	2016	99,99%	99,99%	4.214.717	3.445.077	Beroperasi / Operating
PT Indo Tenaga Hijau	Pengembangan energi baru dan terbarukan / Development of new and renewable energy	Jakarta	2019	95,45%	95,45%	86	84	Beroperasi / Operating
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI								
PT PJB Services	Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) / Operation & Maintenance (O&M) Services	Sidoarjo	2001	98,00%	98,00%	1.358.498	1.317.686	Beroperasi / Operating
PT Rekadaya Elektrika (RE)	Jasa *Engineering Procurement Construction* (EPC) / Engineering Procurement Construction (EPC) Services	Jakarta	2003	98,91%	98,91%	1.394.746	1.847.817	Beroperasi / Operating
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Investasi pembangkit Independent Power Producer (IPP) / Independent Power Producer (IPP) investment	Surabaya	2002	73,00%	73,00%	435.649	373.437	Beroperasi / Operating
PT PJB Investasi	Investasi ketenagalistrikan / Electricity investment	Jakarta	2015	99,99%	99,99%	6.409.360	5.440.404	Beroperasi / Operating
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Penyedia *spare part* dan jasa untuk Pembangkit / Provider of spare parts and services for power generators	Jakarta	2018	99,99%	99,99%	334.183	344.159	Beroperasi / Operating
PT Rekadaya Elektrika Consult	Jasa konsultansi bidang teknik, disain, manajemen SDM, studi perencanaan dan konstruksi / Consulting services in engineering, design, HR management, planning and construction studies	Jakarta	2010	99,80%	99,80%	123.054	167.540	Beroperasi / Operating
PT Mitra Karya Prima	Penyediaan SDM untuk *Operation & Maintenance* (O&M) / Provision of HR for Operation & Maintenance (O&M)	Sidoarjo	2004	92%	92%	135.952	112.374	Beroperasi / Operating
PT PJB Investindo	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal; Usaha pengadaan listrik / Financing in the form of equity participation; Electricity procurement business	Jakarta	2020	99,99%	99,99%	23.760	23.760	Beroperasi / Operating
PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal; Usaha pengadaan listrik / Financing in the form of equity participation; Electricity procurement business	Jakarta	2020	99,99%	99,99%	23.750	23.750	Beroperasi / Operating
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM								
PT Pelayanan Energi Batam	Pembangunan pipa gas dan energi Lainnya / Construction of gas pipeline and other energy	Batam	2014	99,99%	99,99%	904.331	848.219	Beroperasi / Operating

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING								
PT Prima Power Nusantara	EPC Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan pengalaman intensif pada proyek Transmisi dan GI / Electricity Infrastructure EPC with intensive experience in Transmission and GI projects	Jakarta	2016	99,99%	99,99%	241.466	277.619	Beroperasi / Operating
MAJAPAHIT HOLDING B.V. (MH)								
Majapahit Finance B.V. (MF)	Lembaga Keuangan / Financial Institution	Belanda / Netherland	2006	100,00%	100,00%	12.795.000	37.314.000	Beroperasi / Operating
PT HALEYORA POWER								
PT Haleyora Powerindo (HPI)	Bidang industri, perdagangan, pembangunan, jasa, pengangkutan dan pembengkelan / Industry, trade, construction, services, transportation and workshops	Jakarta	2002	95,00%	95,00%	527.202	496.832	Beroperasi / Operating
PT PLN BATUBARA								
PT Jambi Prima Coal	Pertambangan, Perniagaan, dan Penunjang Pertambangan batu bara / Mining, Commerce, and Coal Mining Support	Jambi	2010	60,00%	60,00%	278.558	222.250	Beroperasi / Operating
PT PLNBB Investasi	Perdagangan dan investasi terkait Energi Primer Batu Bara / Trading and investments related to Coal Primary Energy	Jakarta	2018	99,99%	99,99%	1.262.456	1.894.429	Beroperasi / Operating
PT PLNBB Niaga	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) / Wholesale of Solid, Liquid and Gas Fuels, and Related Products (YBDI)	Jakarta	2019	99,96%	99,96%	283.598	420.706	Beroperasi / Operating
PT Mahakarya Abadi Prima	Pertambangan batu bara / Coal mining	Jambi	2027	80,00%	80,00%	5.100	2.985	Belum beroperasi / Not operating
PT Bangun Persada Jambi Energi	Pertambangan batu bara / Coal mining	Jambi	2027	80,00%	80,00%	51.331	36.993	Belum beroperasi / Not operating
PT Prima Bara Indonesia	Usaha pertambangan batu bara dalam mendukung ketersediaan pasokan batu bara unit-unit pembangkit listrik IPP, khususnya PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 / Coal mining business in supporting the availability of coal supply for IPP power generation units, particularly the South Kalimantan Mine Mouth Power Plant 3	Jakarta	Sesuai RUPTL 2021-2030, proyek PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 dibatalkan / In accordance with 2021-2030 RUPTL, the South Kalimantan Mine Mouth Steam Power Plant 3 project is canceled	51,00%	51,00%	139.463	149.087	Belum beroperasi / Not operating
PT Banyan Koalindo Lestari	Pertambangan batu bara / Coal mining	Palembang	2018	51,00%	51,00%	480.562	403.645	Beroperasi / Operating
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN (PLN TARAKAN)								
PT Paguntaka Cahaya Nusantara	Manajemen *Building*, Penyedia Jasa Pekerja, Pengadaan Alat-alat Teknik, Mekanikal, dan Elektrikal / Building Management, Labor Service Providers, Procurement of Engineering, Mechanical, and Electrical Equipment	Jakarta	2018	99,96%	99,96%	92.791	89.815	Beroperasi / Operating
PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA								
PT Adhi Guna Putera	Badan Usaha Kepelabuhanan / Port Business Entity	Jakarta	1986	24,98%	24,98%	554.904	360.921	Beroperasi / Operating

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
PT ENERGI MANAGEMENT INDONESIA								
PT Energi Biomassa Indonesia	Industri bahan baku pembangkit EBT dan jasa pengolahan dan pengelolaan air bersih dan limbah / Industry of raw materials for NRE plant and clean water and waste water treatment and management	Jakarta	Belum beroperasi / Not operating	99%	99%	3.772	3.767	Belum beroperasi / Not operating
PT HALEYORA POWER								
PT Haleyora Powerindo	Kegiatan perusahaan meliputi bidang industri, perdagangan, Pembangunan,jasa, pengangkutan dan pembengkelan / Company activities include activities in the field of industry, service, freight, and machinery repair.	Jakarta	2002	95%	95%	527.202	496.832	Beroperasi / Operating

ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLES*

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PLN mempunyai Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama melalui kepemilikan langsung sebagai berikut:

ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES

As of December 31, 2021, PLN directly owned the following Associated Entities and Joint Ventures:

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
ENTITAS ASOSIASI / *ASSOCIATES*								
PT Geo Dipa Energi	Pembangkitan tenaga Listrik / Electric Power Generation	Jakarta	2002	5,50%	6,67%	5.239.800	4.805.933	Beroperasi / Operating
PT Unelec Indonesia	Penunjang Penyedia Tenaga Listrik / Electric Power Supply Supports	Jakarta	1969	32,25%	32,25%	700.919	1.118.325	Beroperasi / Operating
VENTURA BERSAMA / *JOINT VENTURE*								
PT Industri Baterai Indonesia	Industri EV Battery dan ESS / EV Battery and ESS Industry	Jakarta	-	25%	-	184.483	-	Beroperasi / Operating

ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLES*

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PLN mempunyai entitas Asosiasi dan Ventura Bersama melalui kepemilikan tidak langsung sebagai berikut:

ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES

As of December 31, 2021, PLN indirectly owned the following Associates and Joint Ventures:

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
ENTITAS ASOSIASI / *ASSOCIATES*								
PT Indo Pusaka Berau	Pembangkitan tenaga Listrik / Electric Power Generation	Berau	2005	96,53%/ PT IP	96,53%/ PT IP	286	265	Beroperasi / Operating
PT Sumber Segara Primadaya	"Independent Power Producer (IPP) PLTU Cilacap Unit 1,2,3, Expansi Unit 4"	Jakarta	2006	49,00%/ PT PJB	49,00%/ PT PJB	25.591.579	27.324.712	Beroperasi / Operating
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangkit PLTU Mamuju (2x25 MW) / Mamuju Steam Power Plant (2x25 MW)	Jakarta	2018	10,00%/ PT PJB	10,00%/ PT PJB	1.700.691	1.758.154	Beroperasi / Operating
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkit PLTU Jawa 7 (2x1000 MW) / Jawa 7 Steam Power Plant (2x1000 MW)	Jakarta	2019	30,00%/ PT PJBI	30,00%/ PT PJBI	32.156.993	29.934.396	Beroperasi / Operating

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	Pembangkit PLTU MT Sumbagsel 1 (2x150 MW) / PLTU MT Sumbagsel 1 Generation (2x150 MW)	Jakarta	Dalam tahap konstruksi / Under construction	10,00%/ PT PJBI	10,00%/ PT PJB	1.139.296	1.139.296	Beroperasi / Operating
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listik PLTU Jawa 7 (2x1000 MW) / Jawa 7 Power Plant Operation and Maintenance Services (2x1000 MW)	Jakarta	2019	30%/PT PJBI	30%/ PT PJBI	45.506	41.216	Beroperasi / Operating
PT North Sumatra Hydro Energy	Pembangkit PLTA Batang Toru (3x125) MW / Cirata 145 Mwac Floating Solar Power Plant	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / In development stage	25%/PT PJBI	25%/ PT PJBI	5.924.636	5.509.513	Beroperasi / Operating
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi	Pembangkit PLTS Terapung Cirata 145 Mwac / Cirata 145 Mwac Floating Solar Power Plant	Jakarta	Dalam tahap konstruksi / Under construction	51%/ PT PJB	51%/ PT PJB	616.293	46.317	Beroperasi / Operating
PT Mitra Energi Batam	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Batam	2003	30,00%/ PT PLN Batam	30,00%/ PT PLN Batam	685.691	682.089	Beroperasi / Operating
PT Dalle Energy Batam	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Batam	2005	20,00%/ PTPLN Batam	20,00%/ PTPLN Batam	677.286	715.639	Beroperasi / Operating
PT Tanjung Kasam Power	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Batam	2005	10,00%/PT PLN Batam	10,00%/ PTPLN Batam	2.557.623	2.686.851	Beroperasi / Operating
PT Riau Power	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Pekanbaru	2004	0,25%/ PTPLN Batam	0,25%/ PTPLN Batam	0	81.912	Tidak beroperasi / Not operating
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Listrik, jasa konstruksi, perdagangan, penyediaan air bersih, distribusi bahan bakar minyak dan limbah / Electricity, construction services, trade, clean water supply, distribution of fuel oil and waste	Jakarta	2013	45,00%/PT Haleyora Power	45,00%/PT Haleyora Power	189.901	175.927	Beroperasi / Operating
PT Komipo PJB	Operasi dan Pemeliharaan / Operation and Maintenance	Jepara	2010	49,00% / PT PJB	49,00%/ PT PJB	158.532	165.251	Beroperasi / Operating
PT Bajradaya Sentranusa	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Jakarta	2011	36,61% / PT PJB	36,61%/ PT PJB	6.147.869	6.102.177	Beroperasi / Operating
PT Bukit Pembangkit Innovative	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Jakarta	2015	37,25% / PT PJB	37,25% / PT PJB	5.603.849	5.836.086	Beroperasi / Operating
PT Pura Daya Prima	Pembangkitan Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) / Combined Cycle Power Plant	Jakarta	2006 (PLTG) 2008 (PLTGU)	15%/PT PLNE	15%/ PT PLNE	79.287	79.287	Beroperasi / Operating
PT Multi Daya Prima Elektrindo	Pembangkitan Tenaga Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) / Gas Engine Power Plant	Jakarta	2008	15%/PT PLNE	15%/ PT PLNE	193.414	105.521	Beroperasi / Operating
PT Energi Prima Elektrika	Pembangkitan Tenaga Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) / Gas Engine Power Plant	Jakarta	2006	7,5%/PT PLNE	7,5%/ PT PLNE	134.235	80.750	Beroperasi / Operating
PT GCL Indotenaga	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Jakarta	2020	35,00% / PT IP	35,00%/ PT IP	6.026.655	5.035.722	Beroperasi / Operating
PT Sriwijaya Bara Logistik	Pembangunan, jasa pertambangan, perdagangan, perindustrian dan pengangkutan darat / Development, mining services, trade, industry and land transportation	Jakarta	2012	25,60%/ PT PLNBB Investasi	25,60%/ PT PLNBB Investasi	567.113	541.782	Beroperasi / Operating
PT Musi Mitra Jaya	Pembangunan, jasa pertambangan, perdagangan, perindustrian dan pengangkutan darat / Development, mining services, trade, industry and land transportation	Jakarta	2012	25,60%/ PT PLNBB Investasi	25,60%/ PT PLNBB Investasi	849.523	741.520	Beroperasi / Operating

Nama / *Name*	Bidang Usaha / *Line of Business*	Domisili / *Domicile*	Tahun Mulai Beroperasi / *Year of Operations*	Kepemilikan Saham oleh Perseroan (%) / *Company Share Ownership Percentage (%)*		Jumlah Aset (RpJuta) / Total Assets (in millions of Rp)		Status Operasi / *Operational Status*
				2021	2020	2021	2020	
VENTURA BERSAMA / JOINT VENTURE								
PT Perta Daya Gas	Transportasi, penyimpanan, regasifikasi LNG / LNG transportation, storage, regasification	Semarang	2015	35,00%/ PT IP	35,00%/ PT IP	518	629	Beroperasi / Operating
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Cianjur	2019	51,00%/ PT IP	51,00%/ PT IP	2.266.049	2.428.480	Beroperasi / Operating
PT GCL Indo Tenaga	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Bengkayang, Kalimantan Barat	2020	35,00%/ PT IP	35,00%/ PT IP	6.026.655	5.035.722	Beroperasi / Operating
PT Indo Raya Tenaga	Pembangkitan tenaga listrik / Electric power generation	Cilegon	Dalam tahap pengembangan / In development stage	51,00%/ PT IP	51,00%/ PT IP	15.015.807	10.899.818	Belum beroperasi / Not operating
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	Manufaktur peralatan pengontrol (HV Switchgear Component) dan pendistribusian listrik / Control equipment (HV Switchgear Component) manufacturing and power distribution	Jakarta	2014	49,00%/PT PLNE	49,00%/PT PLNE	281.987	281.987	Beroperasi / Operating
PT Sokorla Geothermal Indonesia	Penyediaan Tenaga Listrik Panas Bumi / Geothermal Power Supply	Jakarta	Dalam tahap konstruksi / Under construction	2,00%/PT EMI	2,00%/PT EMI	1.541.450	1.541.450	Belum beroperasi / Not operating
PT Bakrie Darmakarya Energi	Penyediaan Tenaga Listrik Panas Bumi / Geothermal Power Supply	Jakarta	Dalam tahap konstruksi / Under construction	1,00%/PT EMI	1,00%/PT EMI	464.609	464.609	Belum beroperasi / Not operating
***SPECIAL PURPOSE VEHICLES* (SPV)**								
PT Suralaya Indo Tenaga	Ketenagalistrikan dan energi / Electricity and energy	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / In development stage	99,99%/ PT IP	99,99%/ PT IP	3.030.875	2.426.434	Belum beroperasi / Not operating
PT Putra Suralaya Indo Tenaga	Ketenagalistrikan dan energi / Electricity and energy	Jakarta	Dalam tahap pengembangan / In development stage	99,99%/ PT IP	99,99%/ PT IP	3.030.876	2.426.385	Belum beroperasi / Not operating

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham

Share Listing and Issuance Chronology

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, PLN tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian Perseroan tidak menyajikan informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

For the period ended December 31, 2021 or the date this information being disclosed, PLN did not carry out Initial Public Offerings or traded its shares on any stock exchange. Thus, the information on year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, offering price for each corporate action and number of shares listed after each corporate action, and the name of stock exchange where the Company listed its shares is not presented in this report.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

Untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung ekspansi bisnis, PLN telah beberapa kali penerbitan obligasi dan sukuk dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing di dalam negeri dan luar negeri.

To strengthen the capital structure and to support business expansion, PLN has issued a number of bonds and sukuk both in Rupiah and foreign currencies in Indonesia and abroad.

OBLIGASI DAN SUKUK YANG BELUM JATUH TEMPO DAN BELUM LUNAS

Pada 31 Desember 2021, terdapat beberapa obligasi dan sukuk yang belum jatuh tempo dalam mata uang Rupiah dengan total nilai Rp35,99 triliun dengan tenor 3 tahun sampai 20 tahun yang diterbitkan secara bertahap dari tahun 2007 sampai dengan 2020. Sedangkan obligasi dalam mata uang asing yang belum jatuh tempo mencapai US$11.188,31 juta, EUR1.000,00 juta, dan JPY23.200,00 juta. Daftar obligasi dan sukuk PLN yang belum jatuh tempo dan belum lunas tersebut telah disajikan dalam Sub Bab Ikhtisar Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi pada Laporan Tahunan ini.

BONDS AND SUKUK NOT YET MATURED AND NOT YET PAID-OFF

As of December 31, 2021, there were several bonds and sukuk that had not yet matured in Rupiah in the total value of Rp35.99 trillion with a tenor of 3 years to 20 years which were issued in stages from 2007 to 2020. Meanwhile, bonds denominated in foreign currencies that had not yet matured was a total of US$11,188.31 million, EUR1,000.00million, and JPY23,200.00 million. The list of PLN bonds and sukuk that had not matured and had not been paid off has been presented in the Sub-Chapter of Summary of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds in this Annual Report.

OBLIGASI DAN SUKUK YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2021

Adapun obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada tahun 2021 secara kumulatif mencapai Rp865 miliar dalam mata uang Rupiah sedangkan dalam valuta asing sebesar US$1.000,00 juta, dengan perincian sebagai berikut:

BONDS AND SUKUK MATURING IN 2021

The bonds and sukuk maturing in 2021 cumulatively reached RP865 billion in Rupiah while in foreign currencies it was accumulated to US$1,000.00 million, with the following details:

No.	Nama Obligasi Domestik / *Domestic Bond Name*	Nominal (Rp Miliar) / *Nominal Value (in billions of Rp)*	Kupon (%) / *Coupon (%)*	Tenor (Tahun) / *Tenor (Year)*	Tanggal Terbit / *Date Issued*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Peringkat / *Rating*
OBLIGASI DOMESTIK / *DOMESTIC BOND*							
1	PLN VIII 2006 Seri B	865	13,75	15	21 Juni 2006 / June 21, 2006	21 Juni 2021 / June 21, 2021	idAAA (PEFINDO)
OBLIGASI GLOBAL / *GLOBAL BOND*							
1	GMTN 1st DD 2011	1.000	5.5	10	22 November 2011 / November 22, 2011	22 November 2021 / November 22, 2021	- BBB (S&P Rating) - Baa2 (Moody's Rating) - BBB (Fitch Rating)

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professionals

PLN dalam menjalankan aktivitas usaha yang terkait dengan industri pasar modal didukung oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

In conducting its business activities on the capital market industry, PLN is supported by a number of institutions and professionals as follows:

Jenis Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal / *Type of Capital Market Supporting Institutions and Professionals*	**Nama & Alamat / *Name and Address***	**Periode Penugasan / *Service Period***	**Ruang Lingkup Penugasan / *Scope of Service***	**Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / *Supporting Service Fees per Year***
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Pricewaterhouse Coopers Indonesia) Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA	2021	1. PT PLN (Persero) 2. PT Indonesia Power dan Entitas Anak / PT Indonesia Power and Its Subsidiaries 3. PT Haleyora Power dan Entitas Anak / PT Haleyora Power and Its Subsidiaries 4. PT PLN Gas dan Geothermal 5. PT Pembangkitan Jawa Bali dan Entitas Anak / PT Pembangkitan Jawa Bali and Its Subsidiaries 6. PT PLN Batam dan Entitas Anak / PT PLN Batam and Its Subsidiaries 7. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 8. PT PLN Batu Bara dan Entitas Anak / PT PLN Batu Bara and Its Subsidiaries 9. PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan dan Entitas Anak / PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan and Its Subsidiaries 10. PT Indonesia Comnets Plus 11. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan Entitas Anak / PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and Its Subsidiaries 12. PT Energy Management Indonesia dan Entitas Anak / PT Energy Management Indonesia and Its Subsidiaries	Rp35,05 miliar / Rp35.05 billion
Biro Administrasi Efek / Share Registrar	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia	2004 – sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk PLN dinyatakan lunas / 2004 – until the Bonds of PLN and/or Sukuk of PLN are declared settled	Penatausahaan Pencatatan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Efek, Agen Pembayaran dan/atau jasa administrasi lainnya sehubungan dengan Efek Bersifat Utang PLN di di Bursa Efek Indonesia / Administering Registration of Ownership or Change of Ownership of Securities, Payment Agents, and/or other administrative services in connection with PLN's Debt Securities on Indonesia Stock Exchange	Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran: 0,05% dari bunga Efek Bersifat Utang dan bagi hasil untuk Sukuk yang dibayarkan. Biaya diperhitungan per seri dengan ketentuan min. Rp2.500.000 dan maks Rp10.000.000 atau sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI / Duty implementation of Payment Agent: 0.05% of interest on Debt Securities and profit sharing for Sukuk paid. The fee is calculated per series with the condition that min. Rp2,500,000 and a maximum of Rp10,000,000 or in accordance with the provisions of the service fee based on the KSEI Regulation
Wali Amanat Obligasi / Bond Trustees	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk Ijarah PLN dinyatakan lunas / Until Bonds of PLN and/or Sukuk Ijara of PLN are declared settled	Mewakili kepentingan para pemegang Obligasi PLN VIII seri B, Obligasi PLN IX seri B, Obligasi XII seri B, Obligasi Berkelanjutan I, II , III & IV PLN serta Sukuk Ijarah V seri B, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, II, III & IV PLN / Representing the interests of holders of PLN Bonds VIII series B, PLN Bonds IX series B, PLN Shelf Bonds XII series B, PLN Shelf Bonds I, II, III & IV and Shelf Sukuk Ijara V series B, PLN Shelf Sukuk Ijara I, II, III & IV	Sekurang-kurangnya Rp45.000.000 dan sebanyak-banyaknya Rp70.000.000 per masing- masing jenis Efek bersifat utang. / Trustee services for a minimum of Rp45,000,000 and a maximum of Rp70,000,000 per each type of debt securities
	Deutsche Bank Trust Company Americas 60 Wall Street, MS: NYC 60-1630, New York, New York 10005	Program Obligasi Internasional tahun 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, and 2020	Mewakili kepentingan para pemegang obligasi serta menjadi agen pembayaran transaksi yang berhubungan dengan para pemegang obligasi / Representing the interests of bondholders and acting as a payment agent for transactions related to the bondholders	±USD5.000 – USD7.000 per tranche

Jenis Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal / *Type of Capital Market Supporting Institutions and Professionals*	Nama & Alamat / *Name and Address*	Periode Penugasan / *Service Period*	Ruang Lingkup Penugasan / *Scope of Service*	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / *Supporting Service Fees per Year*
Agen Fiskal / Fiscal Agent	Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan	Program Obligasi Samurai (dalam mata uang Japanese Yen) tahun 2019 / Samurai Bonds Program (in Japanese Yen) in 2019	Agen yang bertanggung jawab pada proses pembayaran-pembayaran semua transaksi yang berhubungan dengan obligasi Samurai dari PLN ke pemegang obligasi dan sebaliknya serta menangani proses administrasi dan notifikasi terkait obligasi / Agent responsible for the payment process of all transactions related to Samurai bonds from PLN to the bondholders and vice versa and handling the administration and notification related to bond processes	JPY2.300.000 in advance
Perusahaan Pemeringkat Efek / Rating Agencies	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Panin Tower Senayan City 17th floor Jalan Asia Afrika Lot. 19	Sampai dengan PLN menginginkan diakhirinya kerja sama pemeringkatan/ dinyatakan pailit/ dibubarkan dan/atau sampai dengan seluruh Efek Bersifat Utang PLN dinyatakan lunas / Until PLN wants to end the rating cooperation/ declared bankruptcy/ dissolution and/or until the entire PLN Debt Securities are declared settled	Pemeringkatan atas Perusahaan dan Efek Bersifat Utang Perusahaan / Rating the Company and the Company's Debt Securities	- Biaya Jasa Pemeringkatan atas Obligasi/Sukuk (excld. PPN) (0,04% x nilai emisi setiap penerbitan Efek Bersifat Utang untuk realisasi penerbitan sampai dengan Rp20 triliun; 0,38% x nilai emisi setiap penerbitan Efek Bersifat Utang untuk realisasi penerbitan >Rp20 triliun). / Bond/Sukuk Rating Service Fee (Excld. VAT) (0.04% x issuance value of each issuance of Debt Securities for the realization of issuance up to Rp20 trillion; 0.38% x issuance value of each issuance of Debt Securities for the realization of issuance >Rp20 trillion) - Biaya Pemantauan Tahunan (excl. PPN) / (penjualan obligasi, dan/atau sukuk <= Rp5 triliun sebesar Rp125.000.000,00 penjualan obligasi, dan/atau sukuk >Rp5 triliun sebesar Rp175.000.000,00) / Annual Monitoring Fees (Excl. PPN) (sales of bonds, and/or sukuk <=Rp5 trillion in the amount of Rp125,000,000 sales of bonds, and/or sukuk >Rp5 trillion in the amount of Rp175,000,000)
	Moody's Investor Service Singapore Pte. Limited 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower Singapore, 048623	Program Obligasi Internasional tahun 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, and 2020	Pemeringkatan atas Perusahaan / Rating the Company	USD84.500/tahun / USD84,500/ year
	Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd 12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982	Program Obligasi Internasional tahun 2007, 2009, 2011, 2012, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2009, 2011, 2012, 2018, 2019, and 2020	Pemeringkatan atas Perusahaan / Rating the Company	- *Annual Fee*: USD40.000-USD70.000 per tahun. / Annual Fee: USD40,000/USD70,000 per year. - *Annual Surveillance Fees*: USD85.000-USD135.000 per tahun. / Annual Surveillance fees: USD85,000-USD135,000 per year.
	Fitch Ratings Ltd 30 North Colonnade London E14 5GN	Program Obligasi Internasional tahun 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, and 2020	Pemeringkatan atas Perusahaan / Rating the Company	USD75.000/tahun / USD75,000/ year
	Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) Jiji Press Building 5-15-8 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan	Program Obligasi Samurai (dalam mata uang Japanese Yen) tahun 2019 / Samurai Bonds Program (in Japanese Yen) in 2019	Pemeringkatan Perusahaan / Rating the Company	JPY1.000.000/tahun / JPY1,000,000/year

Jenis Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal / *Type of Capital Market Supporting Institutions and Professionals*	Nama & Alamat / *Name and Address*	Periode Penugasan / *Service Period*	Ruang Lingkup Penugasan / *Scope of Service*	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / *Supporting Service Fees per Year*
Bursa Efek / Stock Exchange	PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta – 12190	1992 - 2021	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka / The party organizing and providing systems and/or facilities to bring together securities sales offering and purchase of other parties that aims to trade securities between them	*Annual Fee* sekurang-kurangnya Rp10.000.000 dan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000 per masing-masing jenis Efek bersifat utang / Annual Fee of at least Rp10,000,000 and a maximum of Rp150,000,000 per each type of debt Securities
Bursa Efek / Stock Exchange	Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX) 2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1, Singapore 068804	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007 , 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, dan 2020 / International Bonds Programs of 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, and 2018	Penyelenggaraan dan penyediaan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan permintaan dan penawaran jual-beli Efek oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan perdagangan Efek (salah satunya obligasi) / Organizing and providing systems and/or facilities to bring together the demand and offering of securities sales and purchase of other parties related to the securities trading (one of which is bonds)	±SGD25,000 per establishment of the program
Notaris / Notary	Lenny Janis, SH Jln. Hang Lekir 9 No.1 Jakarta 12120	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	Pembuatan Akta Notaris dan Legalisir Akta / Preparing Notary Deeds and Legalizing Deeds	Rata-Rata ±2.800.000/Tahun / Average ±2,800.000/Year
	Muhammad Hanafi, SH Komp. Rukan Tendean Square No. 26 Jl. Walter Mongonsidi 122-124 Kebayoran Baru, Jakarta 12180	2021 s.d Selesai / 2021 until Completion	Pembuatan Akta Notaris dan Legalisir Akta / Preparing Notary Deeds and Legalizing Deeds	Rata-Rata ±500.000/Tahun / Average ±500,000/Year
	Notaris Lury Elza Alex Grand Galaxy City, Ruko Rose Garden 3 Nomor 8, Jakasetia, Bekasi	2021 s.d Selesai / 2021 until Completion	Pembuatan Akta Notaris dan Legalisir Akta / Preparing Notary Deeds and Legalizing Deeds	Rata-Rata ±1.475.000/Tahun / Average ±1,475,000/Year
	Utiek R Aburacman, SH., MLI., MKn Kebon Jeruk Business Park Blok C1 Jl Meruya Ilir Raya Kav 88, Jakrata Barat 11620	2021 s.d Selesai / 2021 until Completion	Pembuatan Akta Notaris dan Legalisir Akta / Preparing Notary Deeds and Legalizing Deeds	Rata-Rata ±7.692.308/Tahun / Average ±7,692,308/Year
Konsultan Hukum / Legal Consultant	Nahr Murdhono Mitra Building 9th Floor Suite 902 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930	2010 s.d Selesai / 2010 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-Rata ±428.679.601/Tahun / Average ±428,679,601/Year
	Soesilo Ariwibowo & Rekan Graha Deka Jl. TB Simatupang Kav. 8, Kebagusan Jakarta	2018 s.d Selesai / 2018 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±913.636.364/Tahun / Average ±913,636,364/Year
	Utomo Karim & Partner Hanurata Graha 2nd Floor Jl. Kebon Sirih 67-69 Jakarta Pusat 10430	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±510.577.771/Tahun / Average ±510,577,771/Year
	UMBRA Telkom Landmark Tower Tower 2, 49th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710	2018 s.d Selesai / 2018 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-Rata ±736.205.021/Tahun / Average ±736,205,021/Year
	Azwar Hadisupani Rum & Partners Menara Palma Lt. 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 6	2018 s.d Selesai / 2018 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Assistance	Rata-Rata ±836.809.667/Tahun / Average ±836,809,667/Year
	Tumbuan & Partners Jl. Gandaria Tengah III No. 8 RT 3/RW 1 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12240Azwar Hadisupani Rum & Partners Menara Palma Lt. 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Jakarta	2016 s.d Selesai / 2016 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-Rata ±299.380.782/Tahun / Average ±299,380,782/Year

Jenis Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal / *Type of Capital Market Supporting Institutions and Professionals*	Nama & Alamat / *Name and Address*	Periode Penugasan / *Service Period*	Ruang Lingkup Penugasan / *Scope of Service*	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / *Supporting Service Fees per Year*
Konsultan Hukum / Legal Consultant	Kantor Hukum Anullah & Partners Sampoerna Strategic Square Tower B 19th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta	2014 s.d Selesai / 2014 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±228.339.100/Tahun / Average ±228,339,100/Year
	Citra Lentera Hukum Gedung AKABA Jl. Sunan Kalijaga No. 63 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160	2015 s.d Selesai / 2015 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±129.891.667/Tahun / Average ±129,891,667/Year
	Ferisamad Perkantoran Royal Palace Blok C No. 10 Jl. Prof Soepomo No. 178 Jakarta 12870	2015 s.d Selesai / 2015 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±311.524.400/Tahun / Average ±311,524,400/Year
	Genta Darwin & Partner Ruko Mutiara Faza Blok RA. 9 Jl. Condet Raya No. 27 Jakarta Timur 13760	2017 s.d Selesai / 2017 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±258.800.000/Tahun / Average ±258,800,000/Year
	Hadiputranto Hadinoto & Partner (HHP) Pacific Century Palace level 55 SCBD District Lot 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	2014 s.d Selesai / 2014 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-Rata ±953.734.604/Tahun / Average ±953,734,604/Year
	Hogan Lovellls Lee & Lee 50 Coller Quay 20-01 OVE Bayfront, Singapore 049321	2016 s.d Selesai / 2016 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* dan *Finance* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance and Finance	Rata-Rata ±324.731.495/Tahun / Average ±324,731,495/Year
	Karsa Mandiri Kindo Square Blok C-8 Jl. Duren Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan 12790	2015 s.d Selesai / 2015 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Assistance	Rata-Rata ±262.936.907/Tahun / Average ±262,936,907/Year
	Abraham Hoed Yudianto JL Ridwan I No 25 Patal Senayan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan	2021 s.d Selesai / 2021 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±3.388.853.333/Tahun / Average ±3,388,853,333/Year
	Adhan Gusti & Associates JL. Jend. A. Yani VII No. 25A Medan	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±150.000.000/Tahun / Average ±150,000,000/Year
	Alfonso Law Firm The H Tower LT 15 Suite G Jl H.R Rasuna Said Kav 20 Kuningan Jakarta Selatan	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Assistance	Rata-Rata ±683.600.000/Tahun / Average ±683,600,000/Year
	Bambang Supriyanto JL Jati Indah I No 12 Pangkalan Jati, Cinere, Depok	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±46.000.000/Tahun / Average ±46,000,000/Year
	Bernard Nainggolan & Partners Kota Kasablanka Office Tower A Kav 88 Lantai 26 C Jl Kasablanka Raya Jakarta Selatan	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±140.000.000/Tahun / Average ±140,000,000/Year
	Moehamad Abdoeh & Partners A2 Taman Kantor A9 Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Jakarta Selatan	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±264.490.000/Tahun / Average ±264,490,000/Year
	Hendarsam Plaza Bazmar Lt 2 No 106 JL Mampang Prapatan Raya	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±308.000.000/Tahun / Average ±308,000,000/Year

Jenis Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal / *Type of Capital Market Supporting Institutions and Professionals*	Nama & Alamat / *Name and Address*	Periode Penugasan / *Service Period*	Ruang Lingkup Penugasan / *Scope of Service*	Biaya Jasa Penunjang Per Tahun / *Supporting Service Fees per Year*
	Janis & Associates Royal Palace Blok C11 Jalan Prof Soepomo No 178A, Jakarta Selatan	2018 s.d Selesai / 2018 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±1.297.574.311/Tahun / Average ±1,297,574,311/Year
Konsultan Hukum / Legal Consultant	JTAsyer Law Firm Kompleks Wijaya Graha Puri Blok 65 Jl Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±744.648.995/Tahun / Average ±744,648,995/Year
	Krismandro Family Lawyer & Partner JL Kapten A.Riva 1006 Ilir Barat I Palembang	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±122.666.667/Tahun / Average ±122,666,667/Year
	Lumban Tobing & Rekan GD. Lina LT.5 R 504, JL HR Rasuna Said Kav B7 Jakarta	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±1.125.000.000/Tahun / Average ±1,125,000,000/Year
	Lubis Santosa Maramis Gedung Equity Tower Lt 12 SCBD JL.Jendral Sudirman Kav.52-53	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±100.450.000/Tahun / Average ±100,450,000/Year
	LBH Adil JL Gusdur Kawasan Pertokoan SimPANG Tiga Blok E-16 Jombang	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Aid Assistance	Rata-Rata ±183.333.333/Tahun / Average ±183,333,333/Year
	LINKLATERS One George Street#17-01 Singapore 049145	2018 s.d Selesai / 2018 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* dan *Finance* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance and Finance	Rata-Rata ±1.360.044.615/Tahun / Average ±1,360,044,615/Year
	Melli Darsa & Co Gedung WTC LT. 3 JL Jend Sudirma Kav 29-31 Jakarta	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance	Rata-Rata ±1.042.488.333/Tahun / Average ±1,042,488,333/Year
	Nurruddin & Partners Gedung Arva LT 2 JL Cikini Raya No 60 Jakarta Pusat	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±54.400.000/Tahun / Average ±54.400.000/Year
	Oemar Seno Adji Jl Tuludong Bawah Blok D 3 Keb Baru Jakarta Selatan	2019 s.d Selesai / 2019 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±300.250.000/Tahun / Average ±300,250,000/Year
	Reggie Tentero & Partners Plaza Asia Lt 3 Suite 3D Jl Jend. Sudirman Kav 59 Jakarta Selatan	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* dan Pendampingan Bantuan Hukum / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance and Legal Assistance	Rata-Rata ±549.488.905/Tahun / Average ±549,488,905/Year
	Norton Rose Fulbright One Raffles Quay #31-01 North Tower	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi, Pendampingan *Project* dan *Finance* / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations, Project Assistance and Finance	Rata-Rata ±299.080.063/Tahun / Average ±299,080,063/Year
	Yerri Anullah JL Anggrek No 48	2020 s.d Selesai / 2020 until Completion	*Legal Opinion* Terkait Kontrak, *Legal Opinion* Terkait Regulasi / Legal Opinion Regarding Contracts, Legal Opinions Regarding Regulations	Rata-Rata ±50.000.000/Tahun / Average ±50,000,000/Year

Informasi pada *Website*

Information on the Website

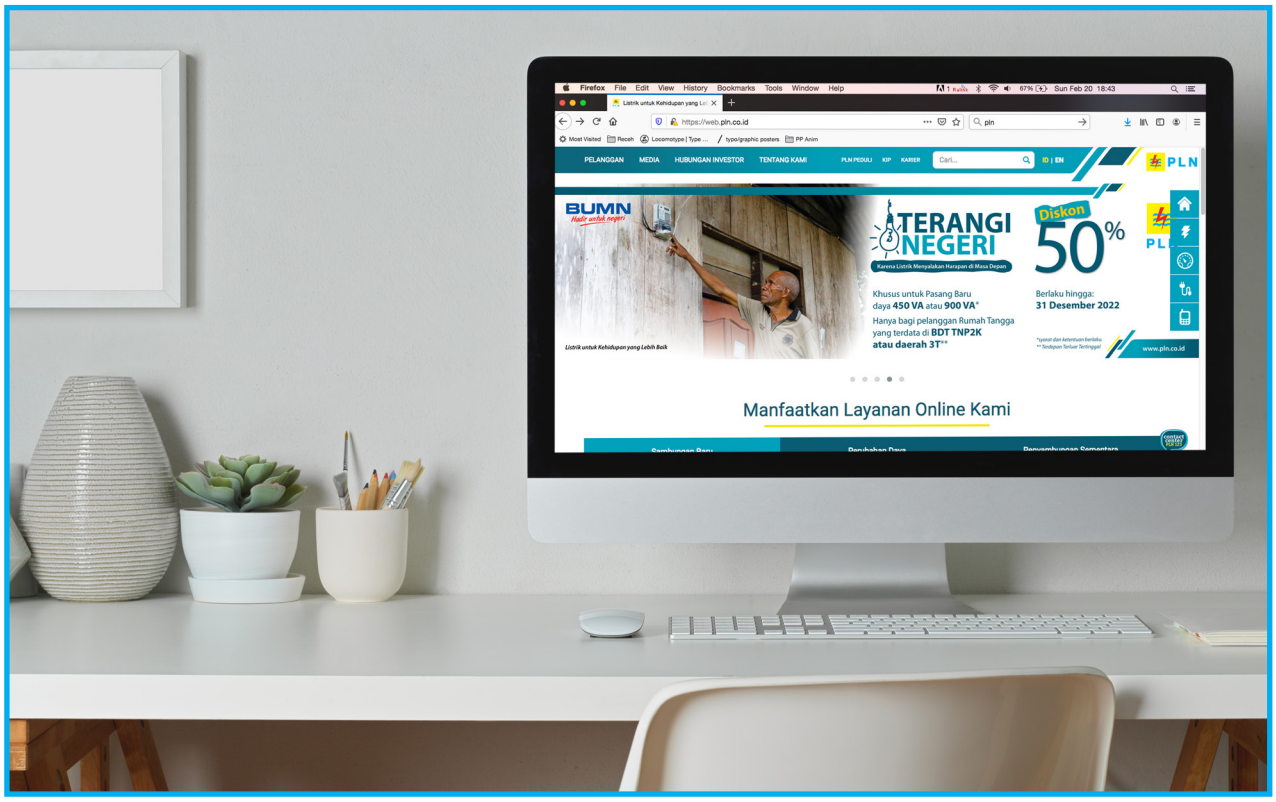

PLN mengadopsi berbagai peraturan dalam penerapan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan seperti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten. Situs web korporat PLN telah mencakup 4 bagian utama informasi yang wajib dimuat pada situs web Perusahaan, yaitu:

1. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi pemodal atau investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

PLN memiliki *corporate website* dengan alamat http://www.pln.co.id. PLN selalu berupaya menyempurnakan *corporate website* secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses dengan penyampaian secara dwibahasa (Inggris dan Indonesia) yang secara garis besar dibagi menjadi 6 bagian besar yang terdiri dari:

PLN has adopted some regulations in providing transparency in the Company's management, e.g. Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers. PLN corporate website includes 4 main sections of information that must be included on the company website, namely:

1. General information of the Issuer or Public Company;
2. Information for investors;
3. Corporate governance information; and
4. Corporate social responsibility information.

PLN has a corporate website at http://www.pln.co.id. PLN always strives to improve its corporate website on a regular basis to be more informative and convenient to access through bilingual delivery (English and Indonesian), which is broadly divided into 6 major sections consisting of:

Informasi pada *Website*
Information on the Website

1. Informasi terkait Pelanggan: Layanan Online, Promosi PLN, Listrik Pintar, Tarif Tenaga Listrik, Q&A Tarif Listrik, Uang Jaminan Pelanggan, Informasi P2TL, Kompensasi, Informasi Tagihan dan Token Listrik, dan Stimulus Covid-19.
2. Informasi terkait Hubungan Investor: Informasi Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Statistik, Informasi Saham, Informasi RUPS, Informasi Dividen, Informasi Obligasi, Informasi Prospektus, Peringkat Utang, Informasi Penunjang Pasar Modal, Informasi Investor, Informasi Fakta Material, *Independent Power Producers*, dan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Informasi tentang media: Siaran Pers, Warta PLN, Galeri Foto, Program 35.000MW, Video, *Journalist Award*, Inovasi dan Penghargaan.
4. Informasi terkait profil perusahaan (Tentang Kami): Profil Perusahaan, *Good Corporate Governance*, Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi, Anak Perusahaan, Buku Saku Covid-19 PLN, Pedoman Perilaku, Whistleblower's System, Ekspedisi Papua Terang, LHKPN Dewan Komisaris dan Direksi, Program Pengendalian Gratifikasi, LHKPN, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Workshop Penggunaan Listrik yang Aman dan Produktif, dan Tata Nilai Manajemen Risiko.
5. Informasi tentang Program PLN Peduli: PLN Peduli, *Corporate Social Responsibility,* Laporan PKBL & CSR, dan Video PLN Peduli.
6. Informasi tentang Keterbukaan Informasi Perusahaan (KIP), yang terhubung ke alamat domain KIP, yaitu eppid.pln.co.id. Layanan ini merupakan sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PLN.
7. Informasi terkait Karier: Informasi Rekrutmen PLN, Pendaftaran, dan Pengumuman *Test*.

Selain itu, website PLN juga memuat informasi-informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam kelistrikan dan lain-lain yang terkait dalam bisnis PLN.

1. Information on Customers: Online Services, PLN Promotions, Smart Electricity, Electricity Tariffs, Electricity Tariffs Q&A, Customer Security Deposits, P2TL Information, Compensation, Electricity Bills and Token Information, and Covid-19 Stimulus.
2. Information on Investor Relations: Financial Information, Annual Report, Sustainability Report, Statistical Report, Stock Information, GMS Information, Dividend Information, Bond Information, Prospectus Information, Debt Rating, Capital Market Supporting Information, Investor Information, Material Fact Information, Independent Power Producers, and Procurement of Goods/Services.
3. Information on the media: press releases, PLN news, 35,000 MW Program, Video, Journalist Award, Innovation and Awards.
4. Information on company profile (About Us): Company Profile, Good Corporate Governance, Organizational Structure, Board of Commissioners, Directors, Subsidiaries, PLN Covid-19 Pocket Book, Code of Conduct, Whistleblower's System, Bright Papua Expedition, LHKPN Board of Commissioners and Directors, Gratification Control Program, LHKPN, Anti-Bribery Management System, Workshop on Safe and Productive Use of Electricity, and Risk Management Values.
5. Information on PLN Peduli Program: PLN Peduli, Corporate Social Responsibility, PKBL & CSR Reports, and PLN Peduli Videos.
6. Information on Corporate Information Disclosure (KIP), which is linked to KIP's domain address, namely eppid.pln.co.id. This service is an online service facility for applicants for public information as a form of implementing public information disclosure at PLN.
7. Career-related information: PLN Recruitment Information, Registration, and Test Announcements.

In addition, the PLN website also contains other information as additional knowledge on electricity terminology and other information on PLN business.

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

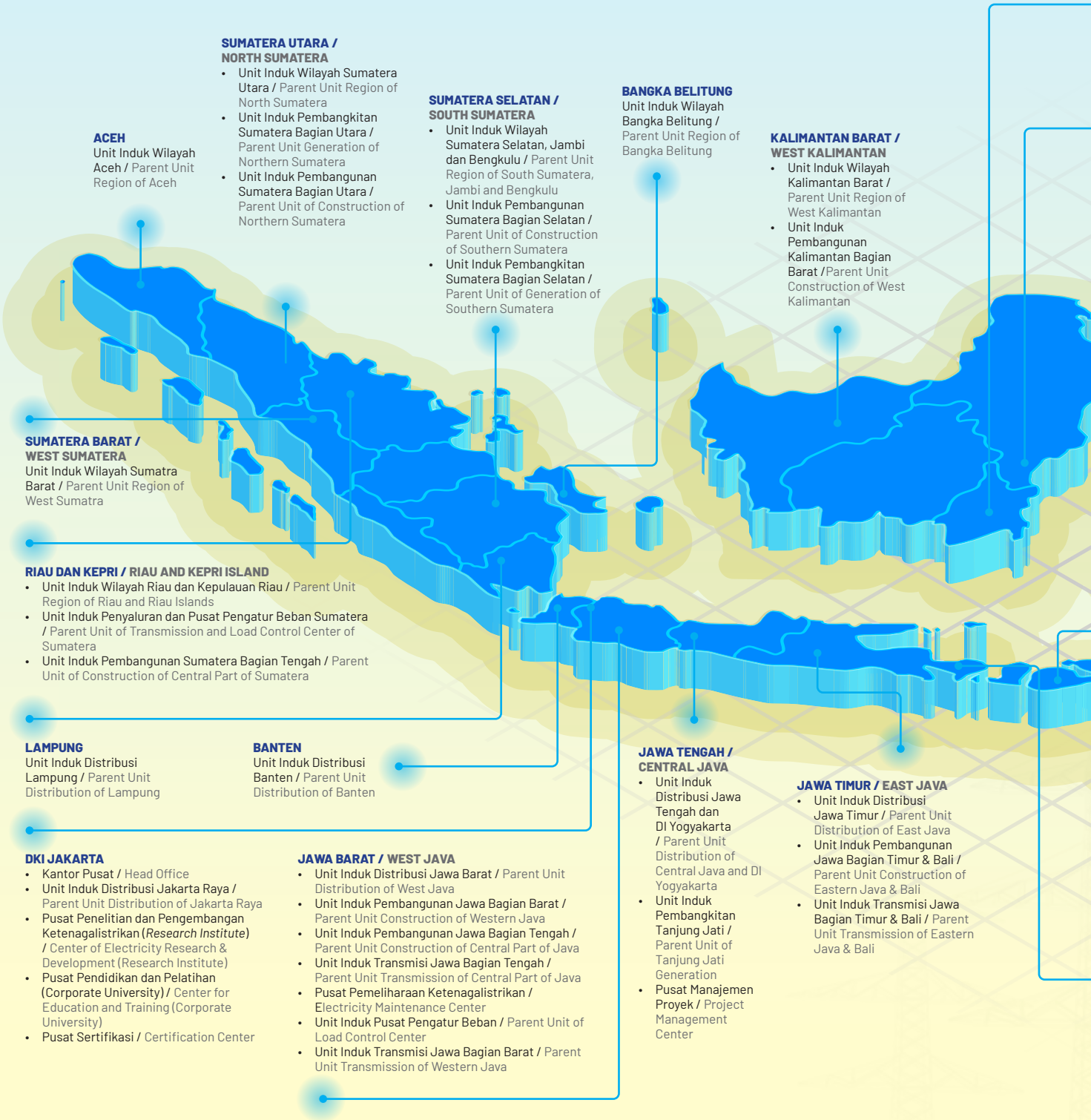

ACEH
Unit Induk Wilayah Aceh / Parent Unit Region of Aceh

SUMATERA UTARA / NORTH SUMATERA
- Unit Induk Wilayah Sumatera Utara / Parent Unit Region of North Sumatera
- Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / Parent Unit Generation of Northern Sumatera
- Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara / Parent Unit of Construction of Northern Sumatera

SUMATERA SELATAN / SOUTH SUMATERA
- Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / Parent Unit Region of South Sumatera, Jambi and Bengkulu
- Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan / Parent Unit of Construction of Southern Sumatera
- Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / Parent Unit of Generation of Southern Sumatera

BANGKA BELITUNG
Unit Induk Wilayah Bangka Belitung / Parent Unit Region of Bangka Belitung

KALIMANTAN BARAT / WEST KALIMANTAN
- Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat / Parent Unit Region of West Kalimantan
- Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat / Parent Unit Construction of West Kalimantan

SUMATERA BARAT / WEST SUMATERA
Unit Induk Wilayah Sumatra Barat / Parent Unit Region of West Sumatra

RIAU DAN KEPRI / RIAU AND KEPRI ISLAND
- Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau / Parent Unit Region of Riau and Riau Islands
- Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / Parent Unit of Transmission and Load Control Center of Sumatera
- Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah / Parent Unit of Construction of Central Part of Sumatera

LAMPUNG
Unit Induk Distribusi Lampung / Parent Unit Distribution of Lampung

BANTEN
Unit Induk Distribusi Banten / Parent Unit Distribution of Banten

JAWA TENGAH / CENTRAL JAVA
- Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta / Parent Unit Distribution of Central Java and DI Yogyakarta
- Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati / Parent Unit of Tanjung Jati Generation
- Pusat Manajemen Proyek / Project Management Center

JAWA TIMUR / EAST JAVA
- Unit Induk Distribusi Jawa Timur / Parent Unit Distribution of East Java
- Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur & Bali / Parent Unit Construction of Eastern Java & Bali
- Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur & Bali / Parent Unit Transmission of Eastern Java & Bali

DKI JAKARTA
- Kantor Pusat / Head Office
- Unit Induk Distribusi Jakarta Raya / Parent Unit Distribution of Jakarta Raya
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (*Research Institute*) / Center of Electricity Research & Development (Research Institute)
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) / Center for Education and Training (Corporate University)
- Pusat Sertifikasi / Certification Center

JAWA BARAT / WEST JAVA
- Unit Induk Distribusi Jawa Barat / Parent Unit Distribution of West Java
- Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat / Parent Unit Construction of Western Java
- Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah / Parent Unit Construction of Central Part of Java
- Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah / Parent Unit Transmission of Central Part of Java
- Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan / Electricity Maintenance Center
- Unit Induk Pusat Pengatur Beban / Parent Unit of Load Control Center
- Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat / Parent Unit Transmission of Western Java

WILAYAH OPERASI

Perusahaan membagi segmen operasi berdasarkan 3 wilayah regional, yaitu: Regional Sumatera dan Kalimantan, Regional Jawa, Madura dan Bali, serta Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, sebagai berikut:

OPERATIONAL AREA

The Company classifies its operational segments based on 3 regional areas, namely: Region of Sumatera and Kalimantan, Region of Java, Madura, and Bali, as well as Region of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara, as follows:

KALIMANTAN SELATAN / SOUTH KALIMANTAN
- Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / Parent Unit Region of South and Central Kalimantan
- Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah / Parent Unit Construction of Central Part of Kalimantan
- Unit Induk Pembangkitan Dan Penyaluran Kalimantan / Parent Unit Generation and Transmission of Kalimantan

KALIMANTAN TIMUR / EAST KALIMANTAN
- Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara / Parent Unit Region of East and North Kalimantan
- Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur / Parent Unit Construction of Eastern Kalimantan

SULAWESI UTARA / NORTH SULAWESI
Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah & Gorontalo / Parent Unit Region of North Sulawesi, Central Sulawesi & Gorontalo

MALUKU
- Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara / Parent Unit Region of Maluku and North Maluku

PAPUA
- Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat / Parent Unit Region of Papua and West Papua
- Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua / Parent Unit Construction of Maluku and Papua

NUSA TENGGARA TIMUR / EAST NUSA TENGGARA
Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur / Parent Unit Region of East Nusa Tenggara

SULAWESI SELATAN / SOUTH SULAWESI
- Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat / Parent Unit Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi & West Sulawesi
- Unit Induk Pembangunan Sulawesi / Parent Unit Construction of Sulawesi
- Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi / Parent Unit Generation and Transmission of Sulawesi

NUSA TENGGARA BARAT / WEST NUSA TENGGARA
- Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat / Parent Unit Region of West Nusa Tenggara
- Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara / Parent Unit Construction of Nusa Tenggara

BALI
Unit Induk Distribusi Bali / Parent Unit Distribution of Bali

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

Jaringan Unit bisnis dan Kantor Perwakilan

Business Unit Network and Representative Offices

No.	Jenis Kantor / *Type of Office*	Alamat / *Address*
I.	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Head Office	Jl. Trunojoyo Blok M I -135, Jakarta - 12160 Telp. : (021) 7261875; 7261122; 7262234; 7251234; 7250550 Fax. : (021) 7221330; 7397150 E-mail : investor.relation@pln.co.id Home page : www.pln.co.id
II.	PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan / Research and Development Center ISO/IEC 17025 -2005	Jl. Duren Tiga No. 102, Jakarta - 12760 Telp. : (021) 7973774, 7980190, 7989982 (Hunting) 7991155 (GM) Fax. : (021) 7991762, 7975414 E-mail : customercare@pln-litbang.co.id Home Page : www.pln-litbang.co.id Jwots : 13107,13109,13110,13111,13115,13121
III.	PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training Center	Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12550 Telp. : (021) 7811292, 7811293, 7800832, 7811368 (KPUSDIKLAT) Fax. : (021) 7811294, 7811295 (Sekretaris KPUSDIKLAT) 7829263 (SDM) Website : http://pln-pusdiklat.co.id Vicon Ruang Meeting : 192.168.13.178
IV.	PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan / Electricity Maintenance Center	Jl. Banten No. 10, Bandung - 40272 Telp. : (022) 7236791-3 Fax. : (022) 7236794 E-mail : pusharlis@pln.co.id Homepage : www.pln.co.id/pusharlis
V.	PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek / Project Management Center ISO 9001: 2000 LMK - KAN	Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur, Semarang - 50232 Telp. : (024) 8310060 Fax. : (024) 8317241 E-mail : pusmankon@pln.co.id
VI.	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi / Certification Center ISO 17021: 2011	Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan - 12760 Telp. : (021) 7900034 Fax. : (021) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots : 15192, 15193, 15194, 1595 E-mail : niaga.pusertif@pln.co.id Homepage : wwwpln.co.id/jaser Vicon : 192.168.1.154
VII. Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban / VIII. Transmission and Load Control Center		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban / Distribution Master Unit and Load Control Center Sumatera	Jl. Musyawarah/Nangka Ujung Kel.Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau - 28233 Telp. : (0761) 6700011, 6700012 Fax. : (0761) 6700015 E-mail : sekretariatp3bs@yahoo.co.id, p3bs@pln.co.id
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban / Load Control Center Parent Unit ISO 9001: 2000	Jl. JCC Cinere, Jakarta Selatan - 16514 Telp. : (021) 7542646, 7543566 Fax. : (021) 7542516 E-mail : sekr.p2b@gmail.com
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat / Transmission Master Unit for Western Java	Jl. JCC, Krukut Limo Cinere, Jakarta Selatan - 16514 Telp. : (021) 7543566 Fax. : (021) 7542380
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah / Transmission Master Unit for Central Java	Jl. Moch. Toha Km. 4 Komplek PLN Cigereleng, Bandung - 40255 Telp. : (022) 5201723 Fax. : (022) 5220214 E-mail : sekretariat.tjbt@gmail.com; sekr.induk@pln.co.id

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

No.	Jenis Kantor / *Type of Office*	Alamat / *Address*
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali / Transmission Master Unit for Eastern Java and Bali	Jl. Suningrat No. 45 Taman, Sidoarjo, Surabaya - 61257 Telp. : (031) 7882113, 7882114 Fax. : (031) 7882578, 7883266 E-mail : tjbtb1@pln.co.id
VIII. Kantor Wilayah / VIII. Regional Offices		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh / Transmission Master Unit for Aceh	Jl. H. Mohd. Tgk. Daud Bereueh No. 172 Lampriet, Banda Aceh, Aceh - 23243 Telp. : (0651) 22188 (Hunting 8 Saluran) Fax. : (0651) 21516 E-mail : sekretariat.wa@pln.co.id
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara / Transmission Master Unit for North Sumatera	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284, Medan - 20115 Telp. : (061) 6615155 Fax. : (061) 6613789 E-mail : plnsumut@plnwill.co.id
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat / Transmission Master Unit for West Sumatera	Jl. Dr. Wahidin No. 8, Padang - 25121 Telp. : (0751) 33446 Fax. : (0751) 29540, 31564 E-mail : plnw3@indosat.net.id
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri / Transmission Master Unit for Riau and Kepri	Jl. Musyawarah RT. 01 RW. 09 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau - 28295 Telp. : (0761) 855840, 855841, 853737, 855309 Fax. : (0761) 855310 E-mail : wrkr@pln.co.id
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu / Transmission Master Unit for South Sumatera, Jambi, and Bengkulu	Jl. Kapten A. Rivai No. 37, Palembang - 30129 Telp. : (0711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) Fax. : (0711) 310376, 356759 (GM) E-mail : gmws2jb@plnpalembang.co.id Website : http/www.plnpalembang.co.id
6	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung / Transmission Master Unit for Bangka Belitung	Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung - 33171 Telp. : (0717) 439300 (Hunting) Fax. : (0717) 439600 E-mail : wbabel@pln.co.id
7	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat / Transmission Master Unit for West Kalimantan	Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Pontianak, Kalimantan Barat - 78391 Telp. : (0561) 722037 Fax. : (0561) 721395 E-mail : kalbar@pln.co.id
8	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah / Transmission Master Unit for South Kalimantan and Central Kalimantan	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru, Kalimantan Selatan - 70711 Telp. : (0511) 4772520, 4774342, 4772261 Fax. : (0511) 4772442 E-mail : humas.kalseteng@pln.co.id
9	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara / Transmission Master Unit for East Kalimantan and North Kalimantan	Jl. MT. Haryono No. 384, Balikpapan - 76114 Telp. : (0542) 871840 (Hunting) Fax. : (0542) 876130 E-mail : kaltimra@pln.co.id
10	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo / Transmission Master Unit for North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo	Jl. Bethesda No. 32, Manado - 95116 Telp : (0431) 863644, 865651, 862444 (GM) Fax : (0431) 863660, 862360 E-mail : gmsutg@pln.co.id
11	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat / Transmission Master Unit for South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and West Sulawesi	Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206, Panakukang, Makassar - 90222 Telp. : (0411) 457155, 457157 Fax. : (0411) 444800

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

No.	Jenis Kantor / *Type of Office*	Alamat / *Address*
12	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara / Transmission Master Unit for Maluku and North Maluku	Jl. Diponegoro No. 2, Ambon - 97127 Telp. : (0911) 311810, 347766, 354696 Fax : (0911) 310910 E-mail : plnwilmaluku@plnmmu.co.id
13	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat / Transmission Master Unit for Papua and West Papua	Jl. Ahmad Yani No. 18, Jayapura - 99111 Telp. : (0967) 533891, 533981, 536637 Fax. : (0967) 534694 E-mail : wilpapua@pln.co.id
14	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat / Transmission Master Unit for West Nusa Tenggara	Jl. Langko No. 25-27 Ampenan, Mataram - 83114 Telp. : (0370) 643123 Fax. : (0370) 648692 E-mail : sekretariat.ntb@pln.co.id
15	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur / Transmission Master Unit for East Nusa Tenggara	Jl. Piet A. Tallo No. 101, Kupang - 85228 Telp. : (0380) 8554005 (Hunting) Fax. : (0380) 8554010 E-mail : ntt@pln.co.id Website : htpp//www.pln.co.id/ntt
IX. Unit Induk Distribusi / IX. Distribution Units		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur / Transmission Master Unit for East Java	Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21, Surabaya - 60271 Telp. : (031) 5340651 - 5340655 Fax. : (031) 5310057 Jwots : 71016 -18 Hunting E-mail : moch.sulatyo@pln.co.id Website : www.pln-jatim.co.id
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta / Transmission Master Unit for Central Java and D.I Yogyakarta	Jl. Teuku Umar No. 47, Semarang Telp. : (024) 8411991 (hunting) Fax. : (024) 8412268 E-mail : plnjatengdiy@pln.co.id Website : www.plnjateng.co.id E-mail : plnubd@plnjateng.co.id
3	PT Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat / Transmission Master Unit for West Java	Jl. Asia Afrika No. 63, Bandung - 40111 Telp. : (022) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) Fax. : (022) 4230822, 4207114 Jwots : 30995 E-mail : info.djbb@pln.co.id
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten / Transmission Master Unit for Banten	Jl. Jendral Sudirman No. 1, Tangerang - 15118 Telp. : (021) 5526716, 5526717 Fax. : (021) 5526721 E-mail : disbanten@pln.co.id
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya / Transmission Master Unit for Jakarta Raya ISO 9001: 2008	Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, Jakarta - 10110 Telp. : (021) 3454000, 3455000 Fax. : (021) 3456694 E-mail: humasjaya@pln.co.id
6	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali / Transmission Master Unit for Bali ISO 9001: 2000	Jl. Letda Tantular No. 1 Renon, Denpasar - 80234 Telp. : (0361) 221960 s.d 221968, 221957 Fax. : (0361) 227101
7	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung / Transmission Master Unit for Lampung ISO 9001: 2008	Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa, Bandar Lampung - 35144 Telp. : (0721) 774868 Fax. : (0721) 780247 E-mail : kanwil.lampung@pln.co.id
X. Pembangkitan / X. Generation Units		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / Generation Master Unit for North Sumatera	Jl. Brigjend Katamso No. 30 KM. 5,5 Titikuning, Medan - 20146 Telp : (061) 7869025 Fax : (061) 7867967 Website : http://www:pln.co.id/Kitsbu E-mail : plnksu@pln.co.id

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

No.	Jenis Kantor / *Type of Office*	Alamat / *Address*
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / Generation Master Unit for South Sumatera	Jl. Demang Lebar Daun No. 375, Palembang - 30128 Telp. : (0711) 374955 (Hunting) Fax. : (0711) 374958, 374959 E-mail : info.kitsbs@pln.co.id Website : http://www.pln.co.id/kitsbs/
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan / Distribution and Generation Master Unit for Kalimantan	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru, Kalimantan Selatan - 70711 Telp. : (0511) 4772520, 4772633, 4772261 Fax. : (0511) 4773283 E-mail : plnkitlur@pln.co.id
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi / Distribution and Generation Master Unit for Sulawesi	Jl. Letjen Hertasning Blok B Panakukkang, Makassar - 90222 Telp. : (0411) 444488 Fax. : (0411) 440888
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B / Generation Master Unit for Tanjung Jati B	Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara, Jawa Tengah - 59453 Telp. : (0291) 772121, 772123, 772124 Fax. : (0291) 772125 E-mail : tanjungjatib@pln.co.id
XI. Unit Induk Pembangunan / XI. Construction Parent Units		
1	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara / Construction Master Unit for North Sumatera	Jl. Dr. Cipto No. 12, Medan - 20152 Telp. : (061) 4144151, 4144152 Fax. : (061) 4144153 E-mail :sekrt.gm@pikitringsuar.co.id
2	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah / Construction Master Unit for Central Sumatera	Komplek Citra Garden Blok R1 No. 7 -11 dan R2 No. 1 - 3 Jl. Purwodadi Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau - 28294 Telp. : (0761) 6704881 Fax. : (0761) 6704882 E-mail : uipsumbagteng@gmail.com
3	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan / Construction Master Unit for South Sumatera	Jl. Residen A. Rozak No. 2180 Sekojo, Palembang - 30118 Telp. : (0711) 719103 s.d 719109 Fax. : (0711) 719102 E-mail : info@uipring-sumatera2.co.id
4	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat / Construction Master Unit for West Java	Jl. Ehave-Gandul Kel. Gandul Kec. Cinere, Depok - 16514 Telp. : (021) 7535500, 7548461, 7548467 Fax. : (021) 7535599
5	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I / Construction Master Unit for Central Java I	Jl. Karawitan No. 32, Turangga, Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat - 40264 Telp. : (022) 7320595 Fax. : (022) 7320596 E-mail : sekretariatuipjbt1@gmail.com
6	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I / Construction Master Unit for East Java and Bali I	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya - 60231 Telp. : (031) 8281200 Fax. : (031) 8280214 E-mail : sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
7	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur / Construction Master Unit for East Kalimantan	Jl. MT. Haryono No. 384, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur - 76114 Telp. : (0542) 871559 Fax. : (0542) 871558, 871565 E-mail : plnuipkalbagtim@pln.co.id
8	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat / Construction Master Unit for West Kalimantan	Jl. Letjen Suprapto No. 50 G, Pontianak, Kalimantan Barat 78121 Telp. : (0561) 762580 Fax. : (0561) 762579 E-mail : uip.kalimantan.barat@gmail.com
9	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara / Construction Master Unit for Nusa Tenggara	Jl. Yos Sudarso No. 2a, Mataram 83114 Telp. : (0370) 621732, 621733 Fax. : (0370) 621734 E-mail : pln@uip-nusra.co.id

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

No.	Jenis Kantor / *Type of Office*	Alamat / *Address*
10	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi / Construction Master Unit for Sulawesi	Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang, Makassar - 90222 Telp. : (0411) 852519 Fax. : (0411) 444339 E-mail : pln.uipsulbagsel@pln.co.id
11	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua / Construction Master Unit for Maluku and Papua	Jl. Baru Kotaraja, Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura Jayapura, Papua 99225 Telp. : (0967) 587773, 5180157, 581740 Fax. : (0967) 581740 E-mail : plnuippapua@pln.co.id

Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

ENTITAS ANAK / *SUBSIDIARIES*	
Entitas Anak – Kepemilikan Langsung / *Subsidiaries – Direct Ownership*	
PT Indonesia Power Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12950	PT Pembangkitan Jawa Bali Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231
PT Indonesia Comnets Plus Kawasan PLN Cawang Jl. Mayjend Sutoyo No. 1, Cililitan, Jakarta Timur 13640	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 12310
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Jl. Engku Putri No. 3, Batam Centre, Batam 29432	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan Jl. MT Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok, A5 No.1-5, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
PT PLN Batubara Jl. Warung Buncit Raya No.10 RT 011/009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740	PT PLN Gas dan Geothermal Gedung KMO (Kyai Maja Office) Tower Lantai 8 Jl. Kyai Maja Office No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Majapahit Holding BV Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, The Netherlands	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Jl. Kalibesar Timur No. 10-12, Jakarta Barat 11110
PT Haleyora Power Kindo Square, Blok A15-16 Jl. Duren Tiga Raya No.101, Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta 12760	PT Energy Management Indonesia Gedung Graha Pura Lantai 3, Jl. Pancoran Indah I No. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12780
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara Gedung Sentral Senayan II Jl.Asia Afrika No. 8 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	
ENTITAS AFILIASI ANAK / *AFFILIATED ENTITIES OF SUBSIDIARIES*	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Indonesia Power / *Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Indonesia Power*	
PT Cogindo Daya Bersama (CDB) Gedung COGINDO Jl. Raya Pasar Minggu No. 190, Jakarta	PT Artha Daya Coalindo Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Centennial Tower, Jakarta Selatan - 12950
PT Indo Ridlatama Power Jl. Jend Gatot Subroto Kav 18, Lt. 1 Jakarta Selatan 12950	PT Indo Tenaga Hijau Jl Jend Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan Lt. 1
PT Putra Indo Tenaga Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Centennial Tower, Jakarta Selatan - 12950	

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Pembangkitan Jawa Bali / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Pembangkitan Jawa Bali***	
PT PJB Services Jl. Raya Bandara Juanda No. 17, Sidoarjo 61253	PT Rekadaya Elektrika (RE) Office 18 Park Lantai 18, Jl. TB Simatupang No.18, Kebagusan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah, Khusus Ibukota Jakarta 12520
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231	PT PJB Investasi Menara Bidakara Tower 2, Jl. Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta - 12870
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang Recapital Building Lt. 3 Jl. Adityawarman Kav. 55, Jakarta Selatan 12160	PT Rekadaya Elektrika Consult Wisma BNI 46 BNI City Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman
PT Mitra Karya Prima Ruko Juanda Business Centre Blok A Nomor 4 – 6, Jalan Raya Juanda Nomor 1 Sidoarjo	PT PJB Investindo Menara Bidakara 2, Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan - 12870
PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata Menara Bidakara 2, Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan - 12870	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Pelayanan Listrik Nasional Batam / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Pelayanan Listrik Nasional Batam***	
PT Pelayanan Energi Batam Graha Energi Batam Jl. Brigjen Katamso 8, Kampung Taroka – Tanjung Uncang – Batam	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Prima Layanan Nasional Enjiniring / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Prima Layanan Nasional Enjiniring***	
PT Prima Power Nusantara Menara Enjiniring Lt. 7 Jl. Ciputat Raya No.123, RT 01/RW 08, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Majapahit Holding B.V. (MH) / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through Majapahit Holding B.V. (MH)***	
Majapahit Finance B.V. (MF) Herikerbergweg 88 1101 CM, Amsterdam, The Netherlands	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Haleyora Power / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Haleyora Power***	
PT Haleyora Powerindo (HPI) Jl. Kyai Tapa No. 216, Jakarta Barat	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT PLN Batubara / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT PLN Batubara***	
PT Jambi Prima Coal Komp. Citra Land NGK B-07 Walk Plaza AlegroMayang, Mangurai, Kota Baru, Jambi 36129	PT PLNBB Investasi Jl. Warung Buncit Raya No 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
PT PLNBB Niaga Jl. Warung Buncit Raya No 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)***	
PT Paguntaka Cahaya Nusantara Jl.RE Martadinata RT.52 No.35, Balikpapan, Kalimantan Timur 76121	

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Pelayaran Bahtera Adhiguna / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Pelayanan Bahtera Adhiguna***	
PT Adhi Guna Putera Jl. Kartini VII No. 2, RT 010/RW 004, Kartini, Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10750	
Entitas Afiliasi Anak – Kepemilikan Tidak Langsung Melalui PT Energy Management Indonesia / ***Affiliated Entities of Subsidiaries – Indirect Ownership through PT Energy Management Indonesia***	
PT Energi Biomassa Indonesia Gedung Graha Pura Lantai 3, Jl. Pancoran Indah I No. 52, Pancoran, Jakarta Selatan - 12780	
ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV) / ***ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV)***	
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Kepemilikan Langsung / ***Associates and Joint Ventures – Direct Ownership***	
PT Geo Dipa Energi Gedung Aldevco Octagon Lantai 5, Jl.Warung Jati Barat raya No.75 Jakarta Selatan - 12740	PT Unelec Indonesia Jl. Swadaya PLN Klender, RT.9/RW.2, Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta - 13930
PT Industri Baterai Indonesia Jakarta	
Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan SPV - Kepemilikan Tidak Langsung / ***Associates, Joint Ventures, and SPV – Indirect Ownership***	
PT Mitra Energi Batam Jl. Lintas Gas Negara Trans Barelang km 3,5 Panaran, Tembesi-Batu Aji, Batam 29438	PT Indo Pusaka Berau Jalan Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau 77311, Kalimantan Timur
PT Sumber Segara Primadaya Gedung Treasury Tower, 39th Fl. SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta	PT Dalle Energy Batam Jl. Lintas Gas Negara Trans Barelang km 3,5 Panaran, Tembesi-Batu Aji, Batam 29438
PT Tanjung Kasam Power Jl.Pattimura, Sei. Kasam RT/RW 003/002 Kel. Kabil Kec. Nongsa Batam 29467	PT Riau Power Jl.Pattimura, Sei. Kasam RT/RW 003/002 Kel. Kabil Kec. Nongsa Batam 29467
PT Energi Pelabuhan Indonesia Jl. Yos Sudarso No.30, RT.19/RW.5, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Adhi Guna Putra Jl. Kartini VII No. 2, RT. 010/RW. 004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
PT Bajradaya Sentranusa Jl. Wijaya III No.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 &4, Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, JawaTengah
PT Perta Daya Gas Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Jl. Ronggo Warsito No.1 Semarang, Jawa Tengah	PT Bukit Pembangkit Innovative Jl. Lintas Sumatera, Muara Enim-Lahat, Desa Gunung Kembang, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat, Sumatera Selatan
PT Crompton Power Switchgear Indonesia Jl. Wijaya I No. 61, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170	PT Rajamandala Electric Power PLTA Rajamandala Jl. PLTA Rajamandala, Kp. Bantarcaringin, Desa Cihea, RT 4 RW 10, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
PT Pura Daya Prima Jl. Raya Kelapa Hibrida PF 23/11, Jakarta 14240	PT Permata Prima Elektrindo Senayan City Lot 19, Panin Tower Lantai 11, Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan

Wilayah Operasi, Jaringan Unit Bisnis & Kantor Perwakilan serta Alamat Entitas Anak, Entitas Afiliasi Anak dan Entitas Asosiasi

Operational Area, Business Unit Network & Representative Offices, and the Addresses of Subsidiaries, Affiliated Entities of Subsidiaries, and Associated Entities

PT Multidaya Prima Elektrindo The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190	PT Energi Prima Elektrika The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
PT Rekind Daya Mamuju Gedung Nucira Lantai 4 JL. MT Haryono Kav. 27 Jakarta 12820, Indonesia	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali APL Tower, Lantai 39, Unit D1, Jl. Letjend. S Parman, Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
PT GCL Indotenaga PLTU Kalbar-1, Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali KYK Building, Jl. Cideng Barat No. 32-33, Jakarta Pusat
PT North Sumatra Hydro Energy Jl. Prapanca Raya, No. 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali APL Tower, Lantai 39, Unit D1, Jl. Letjend. S Parman, Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
PT Sriwijaya Bara Logistik Jl. Kemang Raya No 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730	PT Indo Raya Tenaga PLTU Jawa 9-10, Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Suralaya Merak, Cilegon, Banten
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi WTC 3 Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Pusat	PT Musi Mitra Jaya Jl. Kemang Raya No 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12730
PT Putra Suralaya Indo Tenaga Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2, Jakarta Selatan	PT Suralaya Indo Tenaga Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2, Jakarta Selatan
PT Bakrie Darmakarya Energi Bakrie Tower Lt. 34, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta	PT Sokorla Geothermal Indonesia Recapital Building Lt. 5, Jl. Adityawarman Kav. 55, Jakarta

BRAVIA
Government Support
2017
2018
2019
2020
Q3 2020
Q3 2021
SONY

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Jumlah Aset
Total Assets

(Dalam triliun Rupiah /
In trillion of Rupiah)

Jumlah Ekuitas
Total Equity

(Dalam triliun Rupiah /
In trillion of Rupiah)

Penjualan Tenaga Listrik
Sales of Electricity

(Dalam triliun Rupiah /
In trillion of Rupiah)

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Perekonomian Dunia

Perkiraan pemulihan ekonomi dunia mengalami ketidakpastian pasca merebaknya pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020. Sebagai sebuah kejadian luar biasa, pandemi tersebut telah menjadi *game changer* yang membalikkan arah situasi dunia, berawal dari krisis kesehatan hingga menjalar ke berbagai aspek sosial ekonomi. Pandemi ini terus memberikan tantangan serta ketidakpastian global dengan episenter yang terus bergeser meski berbagai respons cepat dan luar biasa telah dilakukan berbagai negara untuk menghadapi kondisi tersebut. Tiongkok, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, serta India adalah beberapa negara yang pernah menjadi pusat penyebaran pandemi COVID-19.

Di paruh kedua tahun 2021 negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Latin masih menjadi wilayah episenter COVID-19 yang menyumbang kasus dan kematian harian tertinggi. Hal ini terutama disebabkan munculnya berbagai varian baru COVID-19 yakni *Alpha* (pertama kali teridentifikasi di Inggris), *Beta* (Afrika Selatan), *Gamma* (Brazil), dan *Delta* (India) turut menghambat penyelesaian pandemi di seluruh dunia. Terakhir, Varian Delta memberikan dampak yang signifikan dan menyebabkan terjadinya gelombang baru di berbagai negara sejak bulan Mei 2021.

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 per 31 Desember 2021 mencapai sekitar 285,63 juta kasus lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2020 hanya sekitar 82,76 juta kasus.

OVERVIEW ON GLOBAL AND INDONESIA ECONOMICS

Global Economics

Estimation of global economic recovery was uncertain after the outbreak of the COVID-19 pandemic that emerged in early 2020. As an extraordinary event, the pandemic has become a game changer that reverses the direction of the global situation, starting from the health crisis to various socio-economic aspects. The pandemic has continued to pose global challenges and uncertainty, with the epicenter constantly shifting, despite the various rapid and extraordinary responses carried out by various countries to deal with these conditions. China, European countries, the United States, Latin America, and India are some of the countries that have been the epicenter of the COVID-19 pandemic.

In the second half of 2021, developing countries in Asia and Latin America were still the epicenter areas for COVID-19 that accounted for the highest daily cases and deaths. This was mainly due to the emergence of new variants of COVID-19, namely Alpha (first identified in the UK), Beta (South Africa), Gamma (Brazil), and Delta (India) which had hampered the handling of the worldwide pandemic. Lastly, the Delta Variant has had a significant impact and caused a new wave in various countries since May 2021.

The World Health Organization (WHO) stated that the total confirmed cases of COVID-19 as of December 31, 2021, reached around 285.63 million cases higher than that of 2020 at 82.76 million cases. The total death as of December 31, 2021

Jumlah kematian per 31 Desember 2021 mencapai sekitar 5,43 juta kematian lebih tinggi dari tahun 2020 yang mencapai sekitar 1,90 juta kasus. Berbagai negara di dunia kembali memperketat restriksi atau menunda rencana *re-opening*, sebagai akibat dari meningkatnya kasus COVID-19 terutama yang disebabkan oleh varian delta. Dengan demikian, harapan penyelesaian pandemi bergantung pada pemerataan akses dan kecepatan vaksinasi yang harus dipastikan berhasil di seluruh negara.

reached around 5.43 million deaths higher than the position at the end of 2020, which reached around 1.90 million cases. Various countries in the world retightened restrictions or postponed plans for re-opening the border as a result of the increased COVID-19 cases, especially those caused by the delta variant. Thus, the hope of resolving the pandemic hinged on equitable access and speed of vaccination, which must be ensured across the country.

Namun demikian, pemulihan ekonomi dunia tetap berlanjut ditandai dengan pelonggaran restriksi yang terjadi di berbagai negara ditopang dengan akselerasi vaksinasi yang menjadi faktor kunci untuk mendukung pemulihan ekonomi dunia di tengah tantangan pandemi yang masih berlanjut di tahun 2021 tersebut. Data *Bloomberg* per 8 Januari 2022 menjelaskan vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia mencapai sekitar 9,39 miliar dosis yang mencakup 184 negara dengan rata-rata pemberian vaksinasi per hari mencapai 35,5 juta dosis (*Bloomberg*).

However, the world economic recovery continues as marked by the easing of restrictions in various countries and it was supported by the acceleration of vaccination, which is key factor to encouraging the world's economic recovery amidst the pandemic that continued in 2021. Data from Bloomberg as of January 8, 2022 explains that COVID-19 vaccination worldwide has reached around 9.39 billion doses covering 184 countries with an average daily vaccination of 35.5 million doses (Bloomberg).

Ditopang dengan pelonggaran restriksi yang terjadi di berbagai negara dan akselerasi vaksinasi tersebut, berbagai indikator global masih menunjukkan adanya tren perbaikan. Perdagangan internasional terus tumbuh seiring meningkatnya permintaan global. World Trade Organization dalam laporan yang diterbitkan pada bulan Oktober 2021 memperkirakan pertumbuhan perdagangan dunia tumbuh 10,8% pada tahun 2021, lebih baik dari estimasi pada bulan Maret sebesar 8,0%. Tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi atas volume perdagangan pada tahun 2021 tersebut sebagian besar mencerminkan dari kemerosotan yang dipicu pandemi tahun sebelumnya, yang mencapai titik terendah pada kuartal kedua tahun 2020.

Supported by the easing of restrictions in various countries and the acceleration of vaccination, various global indicators still showed an improving trend. Moreover, international trade continued to grow as global demand increased. The World Trade Organization in a report published in October 2021 estimated that the world trade growth would grow by 10.8% in 2021, better than the estimation in March at 8.0%. The high annual growth rate of trading volume in 2021 largely reflected the slump triggered by the previous year's pandemic, which hit the lowest point in the second quarter of 2020.

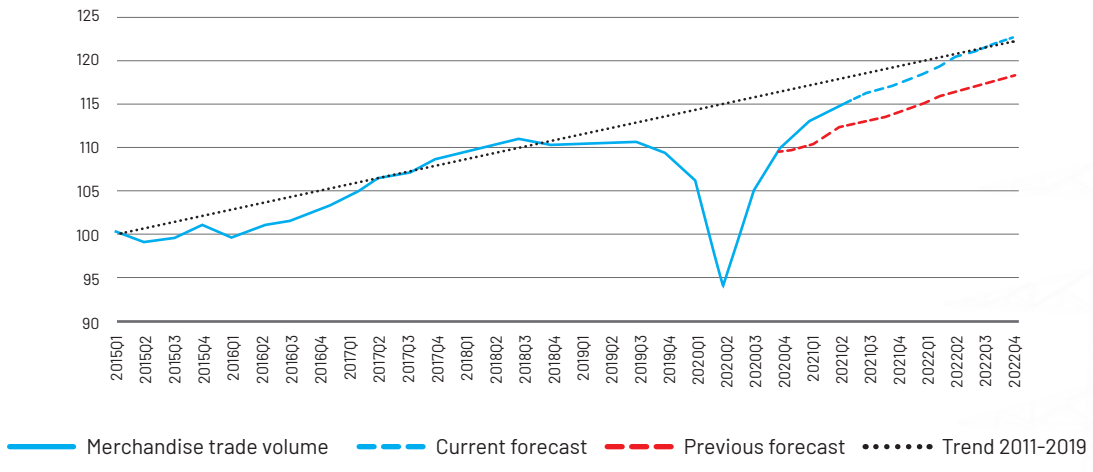

Sumber: World Trade Organization (WTO)

Source: World Trade Organization (WTO)

Harga-harga komoditas juga telah melewati level pra pandemi. Berdasarkan data dari World Bank, rata-rata harga per bulan batu bara (*Coal*, Australian) sebesar US$138,05/mt) di tahun 2021 atau naik signifikan dibandingkan rata-rata harga batu bara per bulan di tahun sebelumnya yang hanya mencapai US$60,79/mt. Harga komoditas dunia lainnya seperti minyak (*Crude Oil, average*) juga tumbuh signifikan menjadi US$67,96/bbl) di tahun 2021 dibandingkan rata-rata harga di tahun sebelumnya senilai US$39,31/bbl).

Seiring dengan kenaikan harga kedua komoditas dunia tersebut, harga gas alam dan LNG juga menunjukkan peningkatan. Rata-rata harga bulanan gas alam mencapai US$3,85/mmbtu pada tahun 2021 sedangkan LNG sebesar US$10,55/mmbtu. Pada tahun sebelumnya, rata-rata harga kedua komoditas ini masing-masing berada di level lebih rendah senilai US$2,01/mmbtu dan US$8,31/mmbtu.

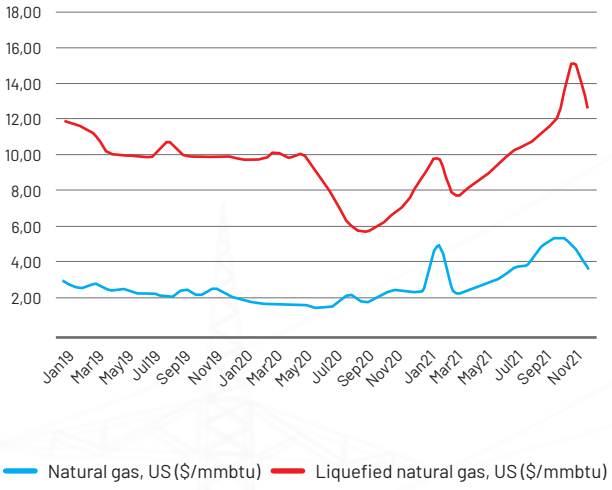

Sumber: World Bank, diolah

Perbaikan perdagangan dunia tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai program stimulus yang telah dijalankan oleh berbagai negara di dunia. Menurut IMF, lebih dari 193 negara mengeluarkan stimulus untuk penanganan COVID-19 dengan total stimulus lebih dari US$8 triliun atau sekitar 10% dari PDB dunia. Amerika Serikat dan Jepang juga mengeluarkan stimulus lebih dari 10% dari PDB. Jerman dilaporkan sebagai negara yang mengalokasikan total stimulus fiskal tertinggi yakni sekitar 24% dari PDB.

Sejalan dengan perkiraan perbaikan perdagangan dunia tersebut, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik di tahun 2021. Melalui publikasi laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan pada bulan Oktober 2021, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai 5,9% yoy.

Commodity prices have also passed those of pre-pandemic levels. Based on data from the World Bank, the average monthly price of coal (Coal, Australian) was US$138.05/mt) in 2021, a significant increase compared to the average monthly coal price at US$60.79/mt in the previous year. Prices of other world commodities, such as oil (Crude Oil, average) also grew significantly to US$67.96/bbl in 2021 compared to the average price in the previous year at US$39.31/bbl.

In line with the increase in the prices of these world commodities, the prices of natural gas and LNG increased as well. The average monthly price of natural gas reached US$3.85/mmbtu in 2021, while LNG reached US$10.55/mmbtu. In the previous year, the average prices for these two commodities were at a lower level of US$2.01/mmbtu and US$8.31/mmbtu, respectively.

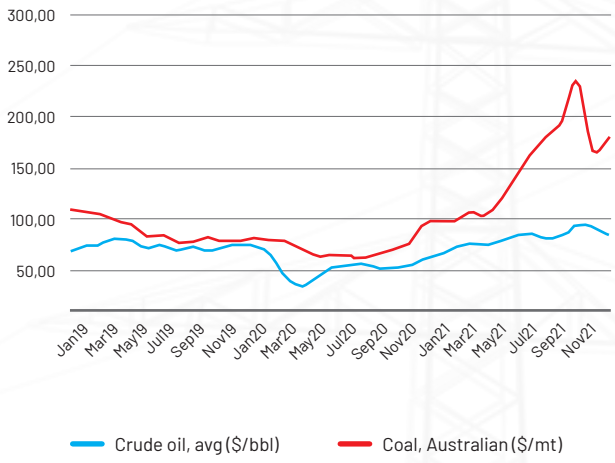

Source: World Bank, processed

The improvement in world trade was also influenced by numerous stimulus programs that had been carried out by various countries in the world. According to the IMF, more than 193 countries issued stimulus for handling COVID-19 with a total stimulus of more than US$8 trillion or around 10% of global GDP. The United States and Japan also issued stimulus of more than 10% of GDP. Germany was reported as the country that allocated the highest total fiscal stimulus at around 24% of GDP.

In line with the forecast for improvement of global trade, the IMF projected better global economic growth in 2021. Through the publication of the World Economic Outlook (WEO) report published in October 2021, global economic growth was estimated to reach 5.9% yoy.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 tumbuh sebesar 4,9% *yoy*. Hal ini sejalan dengan proyeksi perdagangan dunia yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,7% *yoy* pada tahun mendatang menurut WTO. Sementara itu, Bank Dunia dan OECD juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 4,3% *yoy* dan 4,5% *yoy* pada tahun 2022. Beberapa faktor kunci yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi global diantaranya adalah pengendalian pandemi, vaksinasi, serta dukungan stimulus.

Meanwhile, the projected global economic growth in 2022 was 4.9% yoy. This was in line with the projection of global trade, which was estimated to grow by 4.7% yoy in the coming year according to the WTO. Meanwhile, the World Bank and OECD also predicted global economic growth to reach 4.3% yoy and 4.5% yoy in 2022. Several key factors that will affect global economic growth include pandemic control, vaccination, and stimulus support.

Perekonomian Indonesia

Pandemi COVID-19 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2021. Puncak gelombang pertama pandemi COVID-19 terjadi pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2020 dengan kasus harian yang mencapai lebih dari 12 ribu kasus di awal Februari 2021. Selanjutnya, puncak gelombang kedua terjadi di sekitar pertengahan tahun 2021 dengan kasus harian tertinggi pernah mencapai lebih dari 56.757 kasus pada pertengahan bulan Juli. Kenaikan signifikan ini terutama disebabkan oleh tingginya mobilitas dan aktivitas sosial selama bulan Ramadan dan Hari Raya dan masuknya varian Delta yang lebih mudah menular. Menurut WHO, kasus COVID-19 mencapai sekitar 4,26 juta kasus pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 743.198 kasus.

Indonesian Economy

The COVID-19 pandemic remained the main factor that affected Indonesia's economic development throughout 2021. The peak of the first wave of the COVID-19 pandemic occurred after the 2020 Christmas and New Year holidays with daily cases reaching more than 12 thousand cases in early February 2021. Furthermore, the peak of the second wave occurred around the mid of 2021 with the highest daily cases ever reaching more than 56,757 cases in mid-July. This significant increase was mainly due to the high mobility and social activities during the month of Ramadan and Eid al-Fitr and the entry of the more contagious Delta variant. According to the WHO, COVID-19 cases reached around 4.26 million in 2021 compared to the previous year, which reached 743,198 cases.

Pemerintah secara bertahap memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat yakni antara lain dengan melakukan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 9 Februari – 2 Juli 2021. Selanjutnya diikuti oleh PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 yang kemudian diubah menjadi PPKM Level 1 hingga 4 seiring dengan semakin terkendalinya pandemi sejak 21 Juli hingga 31 Desember 2021.

The government has gradually imposed restrictions on community mobility, among others by implementing the Micro Community Activity Restrictions (PPKM) on February 9 – July 2, 2021, followed by Emergency PPKM from July 3 to July 20, 2021 which was later changed to PPKM Level 1 to 4 in line with the increasingly controlled pandemic from July 21 to December 31, 2021.

Pemerintah juga melakukan percepatan program vaksinasi di sepanjang tahun 2021. Sampai dengan awal tahun 2022, Indonesia berada di posisi 6 negara dengan capaian jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai sekitar 285,39 juta per 8 Januari 2022. Negara dengan tingkat penetrasi vaksin tertinggi di dunia adalah Tiongkok.

The government was also accelerating the vaccination program throughout 2021. As of the beginning of 2022, Indonesia was in the sixth position of countries with the highest number of vaccinations in the world. COVID-19 vaccination in Indonesia had reached around 285.39 million as of January 8, 2022. Country with the highest vaccine rate in the world was China.

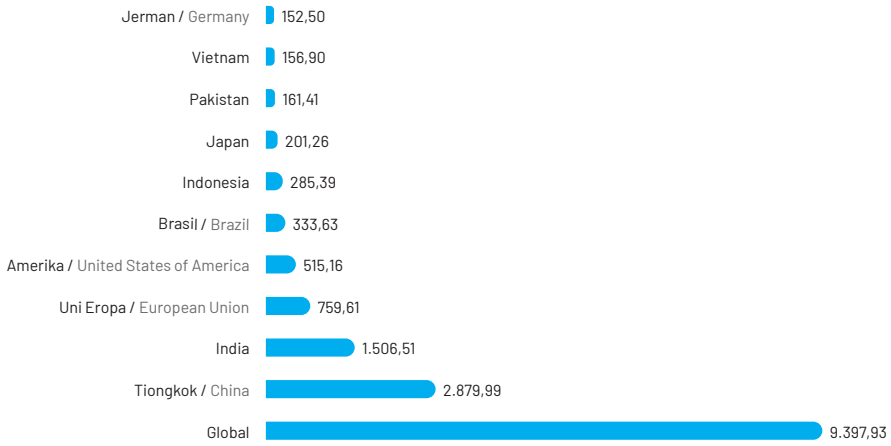

Sumber: Bloomberg Vaccine Tracker, diolah

Source: Bloomberg Vaccine Tracker, processed

Dari aspek ekonomi, Pemerintah memperkuat dukungan bagi masyarakat dan usaha kecil adalah melalui bantuan perlindungan sosial dan bantuan ekonomi untuk UMKM. Pemerintah Indonesia juga konsisten menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui akselerasi pengeluaran (konsumsi) pemerintah, pembangunan proyek yang banyak menyerap tenaga kerja dan pembangunan proyek strategis nasional, memperkuat dukungan atau stimulus untuk industri manufaktur, dan menstimulasi pengeluaran rumah tangga. Realisasi anggaran PEN mencapai Rp579,8 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan mencapai Rp572,4 triliun pada tahun 2021.

On the economic aspect, the Government strengthened support for the community and small businesses through social protection assistance and economic assistance for MSMEs. The Indonesian government has also consistently implemented the National Economic Recovery (PEN) program by accelerating government spending (consumption), building projects that absorbed a lot of labor and developing national strategic projects, strengthening support or stimulus for the manufacturing industry, and stimulating household spending. The realization of the PEN budget reached Rp579.8 trillion in 2020 and is estimated to reach Rp572.4 trillion in 2021.

Dampak dari implementasi beragam kebijakan dan stimulus dari Pemerintah untuk penanganan pandemi berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kuartal Indonesia mengalami tren perbaikan dan puncaknya di kuartal II tahun 2021 yang membukukan pertumbuhan positif sebesar 7,07% *yoy*. Perbaikan pertumbuhan PDB ini didukung oleh kenaikan Pengeluaran Konsumsi (PK) sebesar 6,14% *yoy* setelah pada kuartal II 2020 hingga kuartal I 2021 mengalami kontraksi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah dalam merealisasikan beragam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta berbagai stimulus yang diberikan oleh Pemerintah baik dari sisi fiskal maupun moneter. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021 mengalami tekanan dan menurun menjadi 3,51% *yoy* terutama dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas masyarakat di tengah implementasi PPKM Darurat/Level 3-4 akibat merebaknya COVID-19 varian Delta yang menyebabkan pertumbuhan konsumsi melemah menjadi sebesar 1,00% *yoy*.

The implementation of various policies and stimulus from the Government for handling the pandemic had a positive impact on the Indonesian economy. Indonesia's quarterly GDP growth experienced an improving trend and peaked in the second quarter of 2021, which posted a positive growth at 7.07% yoy. Such improvement in GDP growth was supported by an increase in Consumption Expenditure (PK) by 6.14% yoy after contracting in the second quarter of 2020 to the first quarter of 2021. This was inseparable from the Government's commitment to realizing various National Economic Recovery (PEN) programs as well as various stimulus provided by the Government both in terms of fiscal and monetary. Furthermore, the economic growth in the third quarter of 2021 was under pressure and decreased to 3.51% yoy, mainly influenced by the restrictions on community mobility in the midst of the implementation of Emergency PPKM/Level 3-4 due to the outbreak of the COVID-19 Delta variant which caused consumption growth to weaken to 1, 00% yoy.

PDB Indonesia akhirnya ditutup menguat kembali pada kuartal keempat dengan pertumbuhan sebesar 5,02% *yoy*. Pertumbuhan yang lebih tinggi ini seiring kenaikan pengeluaran konsumsi yang tumbuh sebesar 3,83% *yoy*. Selain itu, di saat pengeluaran konsumsi masih mengalami tekanan akibat pandemi, kontribusi ekspor barang mengalami kenaikan signifikan di sepanjang tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan kuartalan atas ekspor barang pada tahun 2021 mencapai sekitar 26,52% *yoy*.

Indonesia's GDP was higher in the fourth quarter with a growth of 5.02% yoy. Such higher growth was in line with the increase in consumption expenditure, which grew by 3.83% yoy. In addition, while consumption spending was still under pressure due to the pandemic, the contribution of exports of goods increased significantly throughout 2021. The average quarterly growth in exports of goods in 2021 reached around 26.52% yoy.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif pada tahun 2021 mencapai 3,69% *yoy*. Pencapaian pertumbuhan PDB ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan kenaikan PDB terkontraksi 2,07%. Katalis utama perbaikan PDB Indonesia pada tahun 2021 adalah kenaikan signifikan atas ekspor barang yang mampu tumbuh 26,42% *yoy* dan realisasi investasi yang ditunjukkan dengan kenaikan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 3,80%. Pertumbuhan kedua indikator ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan konsumsi sebesar 2,28% *yoy*.

Indonesia's economic growth in 2021 reached 3.69% yoy cumulatively. Such achievement of GDP growth was much better than the previous year with a contracted 2.07% increase in GDP. The main catalysts for improving Indonesia's GDP in 2021 were the significant increase in exports of goods, which were able to grow by 26.42% yoy, and the investment realization as indicated by the increase in Gross Domestic Fixed Capital Formation (PMTB) by 3.80%. The growth of these two economic indicators was higher than the increase in consumption by 2.28% yoy.

Kenaikan ekspor barang Indonesia didukung oleh membaiknya indikator ekonomi global yakni *Purchasing Managers' Index* global yang berada di atas 50 sepanjang bulan Oktober-Desember 2021, lebih tinggi secara rata-rata dibanding periode yang sama tahun 2020. Sejalan dengan permintaan dunia yang meningkat, harga-harga komoditas dunia mengalami kenaikan signifikan yang berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia terutama peningkatan pendapatan negara.

The increase in Indonesian goods exports was supported by the improving global economic indicators, namely the global Purchasing Managers' Index which was above 50 during October-December 2021, higher on average than the same period in 2020. In line with the increasing world demand, global commodity prices experienced a significant increase, which had a positive impact on the Indonesian economy, especially the increase in state revenue.

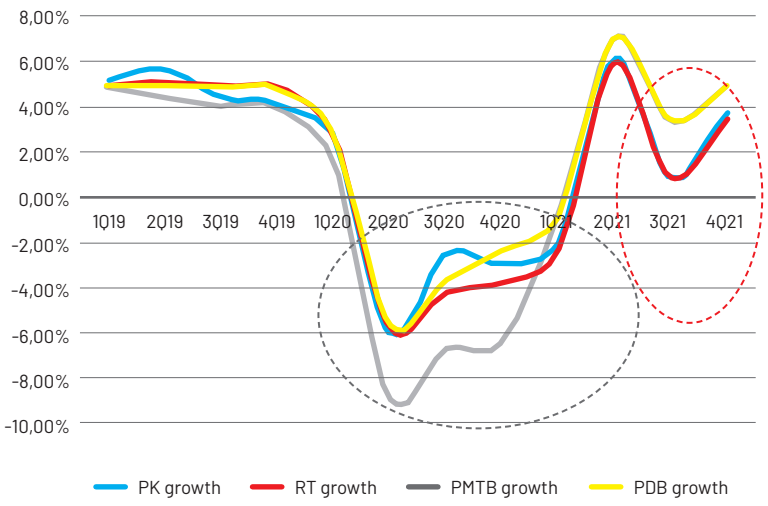

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Source: BPS, Bank Indonesia, processed

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 tersebut juga didorong oleh peningkatan realisasi investasi. Total realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) sebesar Rp901,0 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan kenaikan total nilai realisasi investasi ini seiring dengan kenaikan investasi PMA sebesar 10,0% *yoy* menjadi Rp454,0 triliun. Sementara itu, PMDM mencapai Rp447,0 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,10% *yoy*.

The economic growth in 2021 was also driven by an increase in investment realization. The total realization of investment both Foreign Investment (PMA) and Domestic Investment (PMDM) amounted to Rp901.0 trillion. The Investment Coordinating Board (BKPM) explained that the increase in the total realized value of this investment was in line with the increase in PMA investment by 10.0% yoy to Rp454.0 trillion. Meanwhile, PMDM reached Rp447.0 trillion with a growth of 8.10% yoy.

Walaupun membukukan pertumbuhan ekonomi, pengaruh pandemi masih terasa pada tahun 2021 yang membukukan inflasi relatif rendah sebesar 1,87% dibandingkan 1,68% pada tahun sebelumnya sejalan dengan permintaan yang belum kuat. Menurut Bank Indonesia (BI), inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Sejalan dengan perkembangan inflasi tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Desember 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%.

Despite the economic growth, the impact of the pandemic remained felt in 2021, which posted relatively low inflation at 1.87% compared to 1.68% in the previous year in line with the weak demand. According to Bank Indonesia (BI), core inflation remained low along with the weak influence of domestic demand, the maintained exchange rate stability, and the consistency of Bank Indonesia's policies in directing inflation expectations within the target range. In line with the inflation, Bank Indonesia's Board of Governors Meeting (RDG) on December 15-16, 2021 decided to maintain the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 3.50%, the Deposit Facility interest rate at 2.75%, and Lending Facility interest rate at 4.25%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021 tercatat sebesar US$13,5 miliar, jauh meningkat dibandingkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar US$2,6 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut ditopang oleh surplus transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Menurut Bank Indonesia, transaksi berjalan pada 2021 membukukan surplus sebesar US$3,3 miliar (0,3% dari PDB), setelah mencatat defisit pada 2020 sebesar 4,4 miliar dolar AS (0,4% dari PDB). Surplus tersebut terutama ditopang oleh pesatnya kinerja ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang dan tingginya harga komoditas global, di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik.

Indonesia's Balance of Payments in 2021 was recorded at US$13.5 billion, far increased compared to the surplus in the previous year at US$2.6 billion. This development was supported by the current account surplus and the capital and financial account surplus. According to Bank Indonesia, the current account in 2021 posted a surplus of US$3.3 billion (0.3% of GDP), after recording a deficit in 2020 of US$4.4 billion (0.4% of GDP). The surplus was mainly supported by rapid export performance in line with the increasing demand from trading partner countries and high global commodity prices, amid increasing imports as the domestic economy improved.

Nilai tukar Rupiah terjaga didukung oleh ketahanan sektor eksternal Indonesia dan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah pada bulan Desember 2021 melemah terbatas 1,52% menjadi 14.263/US$ dibandingkan 14.050/US$ pada bulan Desember 2020. Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut disebabkan oleh aliran modal keluar dari negara

The Rupiah exchange rate was maintained, supported by the resilience of Indonesia's external sector and Bank Indonesia's stabilization measures, amidst increasing uncertainty in global financial markets. Based on data from Bank Indonesia, the Rupiah exchange rate in December 2021 weakened by 1.52% to 14,263/US$ compared to 14,050/US$ in December 2020. The development of the Rupiah exchange rate was caused by capital outflows from developing countries amid

berkembang di tengah terjaganya pasokan valas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

maintained domestic forex supply and positive perception of the domestic economic outlook. Bank Indonesia continued to strengthen the Rupiah exchange rate stabilization policy in accordance with its fundamentals and the operation of market mechanisms, through the effectiveness of monetary operations and the availability of liquidity in the market.

Perkembangan positif yang terjadi di sepanjang tahun 2021 tersebut mendorong berbagai lembaga pemeringkat internasional mempertahankan *Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia pada level *investment grade* dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

The positive developments occurred throughout 2021 prompted various international rating agencies to maintain the Sovereign Credit Rating of the Republic of Indonesia at the investment grade level with a brief explanation as follows:

Tanggal *Release* Pemeringkatan Terakhir / *Last Rating Release Date*	Lembaga Pemeringkat / *Rating Agency*	Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia / *Indonesia's Sovereign Credit Rating*	Penjelasan Ringkas / *Brief Explanation*
22 April 2021 / April 22, 2021	Standard and Poor's (S&P)	BBB/outlook negatif / BBB/negative outlook	S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada level BBB karena prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan rekam jejak kebijakan yang berhati-hati yang tetap ditempuh otoritas. Pada sisi lain, S&P juga menyatakan bahwa risiko fiskal dan risiko eksternal terkait pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian. / S&P stated that Indonesia's rating was maintained at the BBB level due to the strong economic growth prospects and track record of prudent policies that the authorities continued to pursue. On the other hand, S&P also stated that fiscal risks and external risks related to the COVID-19 pandemic needed to be a concern.
22 November 2021 / November 22, 2021	Fitch Ratings (Fitch)	BBB/*stable outlook*	Lembaga tersebut mengatakan, peringkat ini menunjukkan pertumbuhan utang dalam jangka menengah yang masih menarik dan masih dalam kategori rendah, meski masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Meski rendah, utang nampak meningkat, utang pemerintah terhadap rasio PDB menunjukkan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, pendapatan pemerintah masih rendah, dan lebih rendahnya pembangunan struktural seperti indikator pemerintahan dan pendapatan per kapita bila dibandingkan dengan negara kategori BBB lainnya. / The agency the this rating showed debt growth in the medium term, which remained attractive and remained in the low category, despite some concerns. Although low, debt appeared to be increasing, government debt to GDP ratio showed dependence on external financing, low government income, and low structural development, such as government indicators and per capita income, when compared to other BBB category countries.
10 Februari 2022 / February 10, 2022	Moody's	Baa2/*stable outlook*	Afirmasi peringkat kredit Indonesia oleh Moody's ini didukung oleh ekonomi yang terbukti resilient dan juga ekspektasi Moody's terhadap efektivitas kebijakan makroekonomi dan kebijakan moneter akan terus terjaga untuk menghadapi risiko tren kenaikan suku bunga global ke depan. / Moody's affirmation of Indonesia's credit rating was supported by a proven resilient economy as well as Moody's expectations that the effectiveness of macroeconomic and monetary policies would continue to be maintained to deal with the risk of rising global interest rate trends going forward.

Sejalan dengan proyeksi perbaikan ekonomi dunia di tahun 2021 disertai dengan perbaikan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia serta akselerasi program vaksinasi sampai akhir tahun 2021, Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,5% dengan indikator-indikator perekonomian sebagai berikut:

In line with the projected improvement in the world economy in 2021 accompanied by improvements in the handling of the COVID-19 pandemic in Indonesia and acceleration of the vaccination program until the end of 2021, the Government of Indonesia estimated the economic growth at 5.0-5.5% with the following economic indicators:

Indikator / Indicators	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) / Economic Growth (%yoy)	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
Inflasi (%,yoy) / Inflation (%yoy)	1,8 - 2,5	3,0
Nilai Tukar (Rp/US$) / Exchange Rate (IDR/US$)	14.200 - 14.600	14.350
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)* / SUN 10-Year Interest Rate (%)*	6,34 - 7,24	6,82
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) / Indonesian Crude Oil Price (US$/barrel)	55 - 65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) / Crude Oil Lifting (thousand barrels per day)	680 - 705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) / Gas Lifting (thousand barrels equivalent of oil per day)	987 - 1.007	1.036

TINJAUAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

Pertumbuhan industri ketenagalistrikan pada tahun 2019 atau sebelum pandemi tumbuh sebesar 4,6% *yoy*. Pertumbuhan ini tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 5,0% *yoy*. Kontribusi industri ketenagalistrikan mencapai Rp97,62 triliun atau 0,89% dari total PDB Indonesia pada tahun tersebut. Memasuki masa pandemi mulai dari tahun 2020 hingga 2021, pertumbuhan industri ini mampu tumbuh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020 industri ketenagalistrikan mampu membukukan kontraksi lebih rendah sebesar 0,98%. Perbaikan lebih lanjut dari industri ini terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,61% *yoy*, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 3,69 *yoy*. Perbandingan pertumbuhan antara industri ketenagalistrikan dan PDB Indonesia per kuartal dari tahun 2019 hingga 2021 yang dipengaruhi oleh indikator *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia (PMI-BI) dijelaskan pada grafik berikut ini:

OVERVIEW ON THE ELECTRICITY INDUSTRY

The growth of the electricity industry in 2019 or before the pandemic was 4.6% yoy. Such growth was lower than the growth of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP), which increased by 5.0% yoy. The contribution of the electricity industry reached Rp97.62 trillion or 0.89% of Indonesia's total GDP in the year. Entering the pandemic period starting from 2020 to 2021, this industry managed to grow better than Indonesia's economic growth. When Indonesia's economic growth contracted by 2.07% in 2020, the electricity industry was able to record a lower contraction of 0.98%. Further improvement of this industry was seen in 2021 with the growth of 5.61% yoy, higher than Indonesia's GDP growth of 3.69 yoy. The comparison of growth between the electricity industry and Indonesia's GDP per quarter from 2019 to 2021 which was influenced by Bank Indonesia's Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) indicator is explained in the following chart

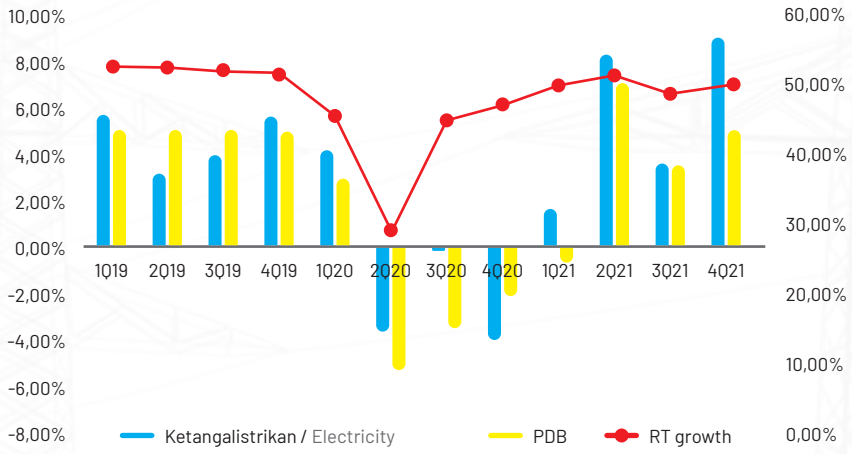

Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Source: BPS, Bank Indonesia, processed

Pertumbuhan industri ketenagalistrikan per kuartal mampu tumbuh lebih baik dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia sejak kuartal terakhir 2019 hingga kuartal IV tahun 2021, terkecuali untuk periode kuartal IV tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi industri ini adalah sebesar 9,07% *yoy* pada kuartal IV tahun 2021 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh 5,02% di kuartal tersebut. Pertumbuhan yang lebih baik di masa pandemi tersebut didukung oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang dengan penanganan pandemi yang semakin membaik oleh Pemerintah seperti akselerasi program vaksinasi, stimulus dari sisi fiskal maupun moneter, dan konsistensi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meski di tengah penerapan kebijakan pembatasan sosial. Kronologis dari penerapan kebijakan pembatasan sosial yang dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The electricity industry per quarter was able to grow better than Indonesia's GDP growth from the last quarter of 2019 to the fourth quarter of 2021, with the exception of the fourth quarter of 2020. The industry's highest growth was 9.07% yoy in the fourth quarter of 2021 in line with Indonesia's economy which managed to grow by 5.02% in the quarter. The better growth during the pandemic was supported by improved economic growth and the Government's better handling of the pandemic, such as the acceleration of the vaccination program, fiscal and monetary stimulus, and the consistency of the National Economic Recovery (PEN) program even in the midst of implementing social restriction policies. The chronology of the implementation of social restriction policy starting from 2000 to 2021 is as follows:

April 2020 / April 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) / Large-Scale Social Restrictions (PSBB)
Oktober 2020 / October 2020	PSBB Transisi / Transition PSBB
11 Januari – 8 Februari 2021 / January 11 - February 8, 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) / Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM)
9 Februari – 2 Juli 2021 / February 9 – July 2, 2021	PPKM Mikro / Micro PPKM
3 Juli – 20 Juli 2021 / July 3 – July 20, 2021	PPKM Darurat / Emergency PPKM
21 Juli – 31 Desember 2021 / July 21 - December 31, 2021	PPKM level 1-4 / Level 1-4 PPKM

Optimisme atas perbaikan ekonomi yang turut mendongkrak kinerja penjualan listrik di sepanjang tahun 2021 diantaranya perbaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 118,3 pada bulan Desember 2021, jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 96,5. Kenaikan IKK ini sejalan dengan peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) yang naik menjadi 99,99 pada bulan Desember 2021 dari hanya 68,8 pada tahun sebelumnya berdasarkan data dari Bank Indonesia.

Optimism over the economic improvement that helped boost electricity sales performance throughout 2021 included the improvement in the Consumer Confidence Index (IKK) which reached 118.3 in December 2021, much better than the same period in 2020 at 96.5. The increase in the IKK was in line with the increase in the Current Economic Condition Index (IKE) which rose to 99.99 in December 2021 from only 68.8 in the previous year based on the data from Bank Indonesia.

Sementara itu, dari sisi dunia usaha, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dari Bank Indonesia juga menjelaskan kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2021 tumbuh positif. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 7,10%, sedikit lebih rendah dari SBT sebesar 7,58% pada triwulan III 2021, namun meningkat dibandingkan dengan SBT sebesar -3,90% pada triwulan IV 2020. Perbaikan hasil survei ini sejalan dengan kenaikan indikator *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia (PMI-BI) pada triwulan terakhir tahun 2021. Menurut Bank Indonesia, kinerja sektor Industri Pengolahan triwulan IV 2021 terindikasi meningkat

Meanwhile, in terms of the business world, the Business Activity Survey (SKDU) from Bank Indonesia also described that business activities in the fourth quarter of 2021 grew positively. This was reflected in the Weighted Net Balance (SBT) of 7.10%, slightly lower than that of the third quarter of 2021 at 7.58%, but increased compared to the fourth quarter of 2020 at -3.90%. The improved results of this survey was in line with the increase in Bank Indonesia's Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) indicator in the last quarter of 2021. According to Bank Indonesia, the performance of the Manufacturing Industry sector in the fourth quarter of

dan berada pada fase ekspansi. Hal itu tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia (PMI-BI) sebesar 50,17%, meningkat dari 48,75% pada triwulan III 2021.

Posisi PLN di Industri Ketenagalistrikan

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) memiliki peran sangat penting dalam industri ketenagalistrikan atau energi di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal dari laporan ini tentang keunggulan kompetitif, peran vital PLN karena memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi dari *power generation*, *transmission*, *distribution*, *construction of power plants*, hingga *retail sales of electricity*. Selain itu, PLN memiliki posisi pasar yang superior karena memiliki posisi yang sangat dominan dalam hal *power generation* dan memiliki jaringan *transmission & distribution network* yang sangat luas di Indonesia.

Dari sisi *supply*, sampai dengan akhir Desember 2021, PLN mengoperasikan pembangkit milik sendiri, *Independent Power Plant* (IPP) dan sewa dengan total sebanyak 6.760 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 6.677 pembangkit. Dari keseluruhan 6.760 unit pembangkit listrik tersebut, pembangkit milik PLN adalah sebanyak 6.143 unit.

Dari sisi kapasitas terpasang (MW), pembangkit listrik milik PLN masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan jumlah pembangkit sebanyak 126 unit pada tahun 2021 memiliki kapasitas terpasang terbanyak pada tahun 2021, yaitu 20.365,00 MW. Diikuti dengan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG, PLTGU, PLTMG) sebesar 16.377,84 MW, pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (PLTA, PLTM, PLTMH, PLTP, PLTS, PLTB, PLTBM) sebesar 4.189,29 MW, dan PLTD sebesar 3.532,61 MW. Porsi pembangkit PLTD direncanakan akan semakin berkurang dengan strategi dedieselisasi yang akan mengkonversi pembangkit-pembangkit PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Tabel dan grafik berikut menjelaskan jumlah pembangkit dan kapasitas terpasang PLN selama lima tahun terakhir.

2021 was indicated to be improving and was in an expansion phase. This was reflected in Bank Indonesia's Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) at 50.17%, increasing from 48.75% in the third quarter of 2021.

PLN's Position in the Electricity Industry

PT Perusahaan Listrik Negara or PLN (Persero) has a vital role in the electricity or energy industry in Indonesia. As explained at the beginning of this report regarding competitive advantage, PLN's vital role is because it has integrated business activities from power generation, transmission, distribution, construction of power plants, to retail sales of electricity. In addition, PLN has a superior market position because of its highly dominant position in terms of power generation and its vast wide transmission & distribution network in Indonesia.

On the supply aspect, as of the end of December 2021, PLN operated its own power plant, Independent Power Plant (IPP) and leased with a total of 6,760 units compared to the previous year's 6,677 generators. From the total of 6,760 power plants, the power plants owned by PLN were 6,143 units.

In terms of installed capacity (MW), PLN's power plants were still dominated by Steam Power Plants (PLTU) with a total of 126 units of power plants in 2021 having the highest installed capacity in 2021, which was 20,365.00 MW. Followed by gas-fired power plants (PLTG, PLTGU, PLTMG) of 16,377.84 MW, power plants from new and renewable energy sources (PLTA, PLTM, PLTMH, PLTP, PLTS, PLTB, PLTBM) of 4,189.29 MW, and PLTD of 3,532.61 MW. The portion of PLTD generators is planned to decrease with a dedieselization strategy that will convert PLTD plants into solar power plants. The following tables and charts describe the number of generators and PLN's installed capacity for the last five years.

Jumlah Pembangkit Listrik Milik PLN — Total Power Plant Owned by PLN

	2017	2018	2019	2020	2021
PLTA/PLTM/PLTMH	240	266	243	244	246
PLTU	104	110	133	127	126
PLTG	97	98	68	66	66
PLGU	69	74	73	79	79
PLTP	15	22	18	18	18
PLTD	4.801	5.327	5.350	5.400	5.258
PLTMG					193
PLT Surya	57	78	96	118	150
PLT Bayu	6	5	5	5	5
PLTBM			1	2	2
Jumlah / Total	**5.389**	**5.980**	**5.987**	**6.059**	**6.143**

Tren Jumlah Pembangkit Listrik Milik PLN /
Trend of Total Power Plant Owned by PLN

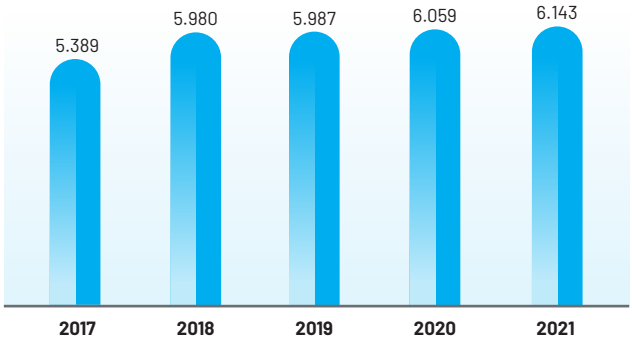

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik PLN (MW) — Installed Capacity of PLN's Power Plant (MW)

	2017	2018	2019	2020	2021
PLTA	3.582,98	3.583,98	3.584,08	3.584,08	3.587,72
PLTU	19.702,00	20.750,00	20.277,63	20.277,63	20.365,00
PLTG/GU/ MG	14.404,16	15.234,60	16.239,34	16.239,34	16.377,84
PLTP	579,50	579,50	579,26	579,26	579,26
PLTD	3.414,99	3.692,38	3.476,82	3.476,82	3.532,61
PLT Surya	12,07	14,65	16,71	16,71	21,34
PLT Bayu dan PLTBM	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Jumlah / Total	**39.652,10**	**41.696,67**	**43.856,58**	**44.174,80**	**44.464,75**

Kapasitas Terpasang Milik PLN (MW) /
Installed Capacity Owned by PLN (MW)

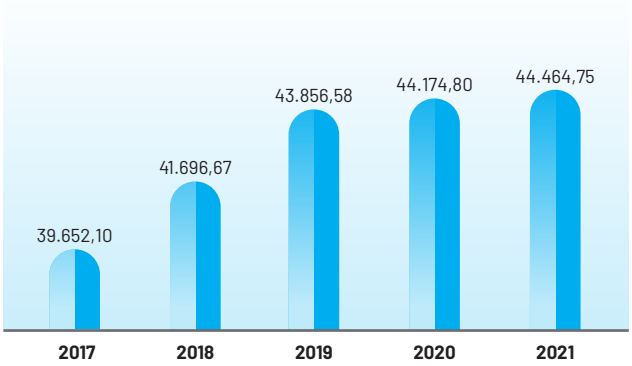

Sejalan dengan arah perbaikan ekonomi di sepanjang tahun 2021, total energi listrik yang diproduksi baik oleh pembangkit listrik PLN, sewa maupun IPP mencapai 289.470,57 GWh, tumbuh 5,32% dari tahun sebelumnya sebanyak 274.851,17 GWh. Peningkatan energi yang dihasilkan ini seiring dengan peningkatan konsumsi listrik yang menunjukkan pemulihan pada tahun 2021.

In line with the direction of economic improvement throughout 2021, total electrical energy produced by PLN, leased and IPP power plants reached 289,470.57 GWh, an increase of 5.32% from the previous year of 274,851.17 GWh. The increase in electricity produced was in line with the increase in electricity consumption, which indicated the recovery in 2021.

Energi yang Diproduksi (GWh) **Produced Energy (GWh)**

	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Listrik Pembangkit PLN / Electricity Production of PLN's Power Plant	167.978	178.194	186.457	172.622	177.485
Produksi Listrik dari Sewa / Electricity Production from Leased	13.447	10.505	7.086	5.070	5.488
Produksi Listrik dari IPP / Electricity Production from IPP	73.235	78.387	85.399	97.159	106.497
Total Produksi Listrik / Total Electricity Production	**254.660**	**267.085**	**278.942**	**274.851**	**289.471**

Energi yang Diproduksi (GWh) /
Produced Energy (GWh)

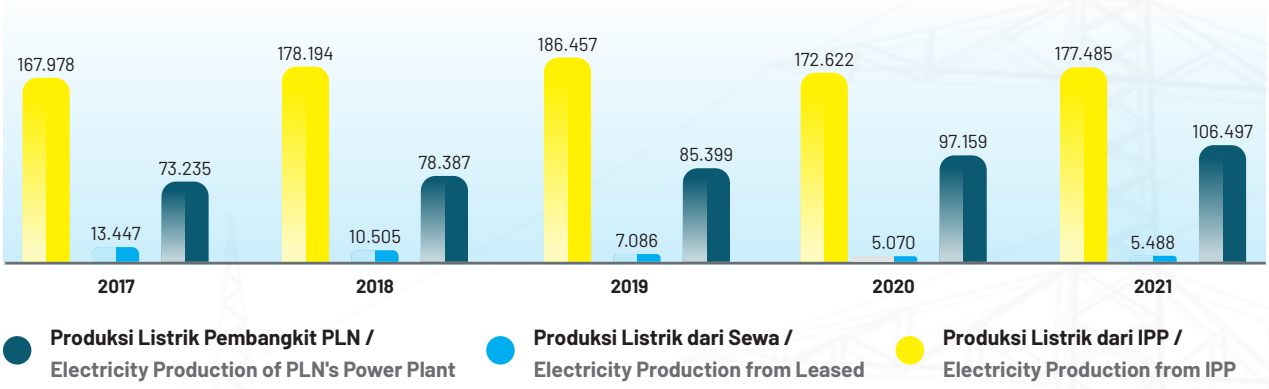

Peningkatan produksi energi yang dihasilkan tersebut diikuti dengan kenaikan panjang jaringan transmisi yang dilakukan oleh PLN setiap tahun. Padat tahun 2021, panjang transmisi PLN mencapai 423.808 kms atau tumbuh 2,17% dari tahun sebelumnya yang mencapai 414.800 kms.

This increase in energy production is followed by an increase in the length of the transmission network carried out by PLN every year. In 2021, PLN's transmission length reached 423,808 kms or grew 2.17% from the previous year at 414,800 kms.

Peningkatan pasokan energi listrik tersebut disebabkan oleh peningkatan permintaan (*demand*) energi oleh pelanggan. Energi terjual pada tahun 2021 mencapai 257.634,25 GWh di saat ekonomi Indonesia tumbuh 3,69% dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07% pada tahun sebelumnya. Pencapaian tahun 2021 ini lebih tinggi 5,77% daripada jumlah energi terjual pada tahun 2020 yang mencapai 243.582,75 GWh.

The increase in the supply of electrical energy was due to an increase in energy demand by customers. Energy sold in 2021 reached 257,634.25 GWh when the Indonesian economy grew 3.69% compared to the economic growth contraction of 2.07% in the previous year. This achievement in 2021 was 5.77% higher than the total energy sold in 2020 at 243,582.75 GWh.

Sejalan dengan peningkatan energi listrik yang terjual tersebut, PLN juga membukukan peningkatan daya tersambung ke setiap jumlah pelanggan pada tahun 2021 yang mencapai 153.565,96 MVA. Pada tahun sebelumnya,

In line with the increase in electrical energy sold, PLN also recorded an increase in connected power to customers in 2021 which reached 153,565.96 MVA. In the previous year, the power connected to each number of customer was

daya tersambung ke setiap jumlah pelanggan sebesar 144.678,21 MVA. Daya tersambung ke segmen rumah tangga masih dominan yang mencapai 76.566,84 MVA pada tahun 2021 atau 49,86% dari jumlah daya tersambung.

144,678.21 MVA. Power connected to the household segment was still dominant, reaching 76,566.84 MVA in 2021 or 49.86% of the total connected power.

Energi Terjual per Jenis Tegangan (GWh) / Energy Sold per Type of Voltage (GWh)

	2017	2018	2019	2020	2021
Rendah / Low	133.030,86	139.068,86	147.692,30	155.217,79	160.365,97
Menengah / Medium	73.495,63	77.305,52	80.301,73	72.618,09	78.719,41
Tinggi / High	16.607,23	18.243,50	17.524,10	15.746,87	18.548,88
Jumlah / Total	**223.133,72**	**234.617,88**	**245.518,13**	**243.582,75**	**257.634,25**

Energi Terjual per Jenis Tegangan (GWh) /
Energy Sold per Type of Voltage (GWh)

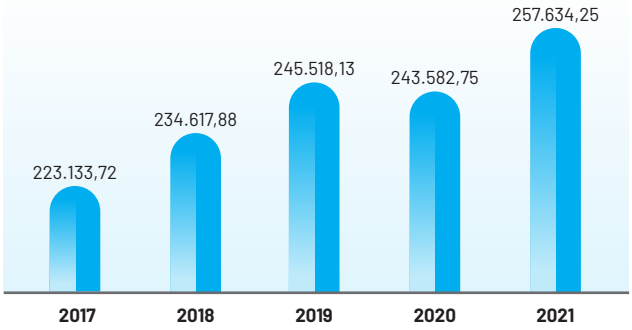

Daya Tersambung per Kelompok Pelanggan (MVA) / Connected Power per Customer Group (MVA)

	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga / Household	59.257,37	63.576,71	67.877,52	72.096,64	76.566,84
Industri / Industry	27.584,67	29.136,29	30.433,91	31.146,41	33.151,52
Bisnis / Business	26.197,72	27.751,75	29.180,45	30.277,65	31.974,05
Sosial / Social	4.897,48	5.462,73	5.993,45	6.431,26	6.954,40
Gdg. Kantor Pemerintah / Government Office Building	2.979,73	3.195,56	3.360,50	3.465,80	3.624,91
Penerangan Jalan Umum / Public Street Lighting	1.100,66	1.157,51	1.230,70	1.260,45	1.294,24
Jumlah / Total	**122.017,63**	**130.280,55**	**138.076,53**	**144.678,21**	**153.565,96**

Daya Tersambung per Kelompok Pelanggan (MVA) /
Connected Power per Customer Group (MVA)

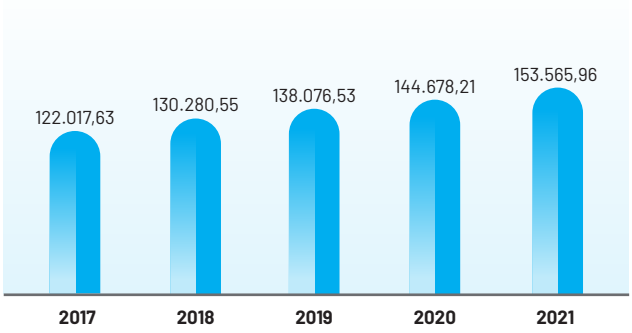

Ditopang dengan peningkatan energi yang terjual dan daya yang tersambung ke setiap jenis pelanggan di saat ekonomi mulai membaik pada tahun 2021, jumlah pendapatan tenaga listrik tahun 2021 meningkat menjadi Rp288,86 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi 4,9% pada tahun 2020 yang mencapai Rp274,89 triliun.

Supported by an increase in energy sold and power connected to every type of customer when the economy began to improve in 2021, PLN's sales of electricity amounted to Rp288.86 trillion, growing 4.9% from 2020 at Rp274,89 trillion.

Peningkatan penjualan listrik dan kenaikan panjang transmisi berdampak positif terhadap perbaikan rasio elektrifikasi PLN yang mencapai 97,26% pada tahun 2021, menyumbang kontribusi utama pada peningkatan rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,45%. Selama lima tahun rasio elektrifikasi PLN terus mengalami peningkatan sebagaimana yang dijelaskan pada grafik berikut ini:

The increase in electricity sales and the increase in transmission length have a positive impact on the improvement of PLN's electrification ratio, which reached 97.26% in 2021 contributing mainly on the increase in national electrification ratio of 99.45%. For five years, the electrification ratio of PLN has continued to increase as described in the following chart:

Rasio Elektrifikasi PLN Tahun 2017 - 2021 /
PLN's Electrification Ratio In 2017 - 2021

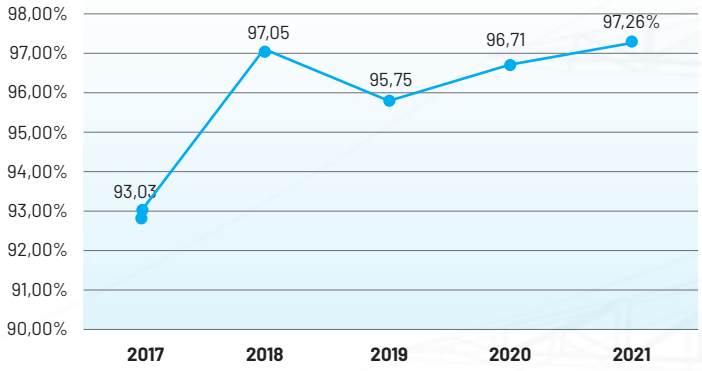

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PLN tidak hanya melihat dari sisi keuntungan semata melainkan juga memberikan subsidi kepada kelompok pelanggan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Pemerintah apalagi di masa pandemi di mana daya beli masyarakat menjadi lemah. Perbandingan antara Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dan Tarif Listrik Rata-rata selama kurun waktu 2017 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

In carrying out its business activities, PLN does not only view at the profit side but also provides subsidies to groups of customers who are entitled to receive them in accordance with Government regulations, especially during the pandemic where people's purchasing power was weak. The comparison between the Basic Cost of Electricity Supply (BPP) and the Average Electricity Tariff for the period 2017 to 2021 is as follows:

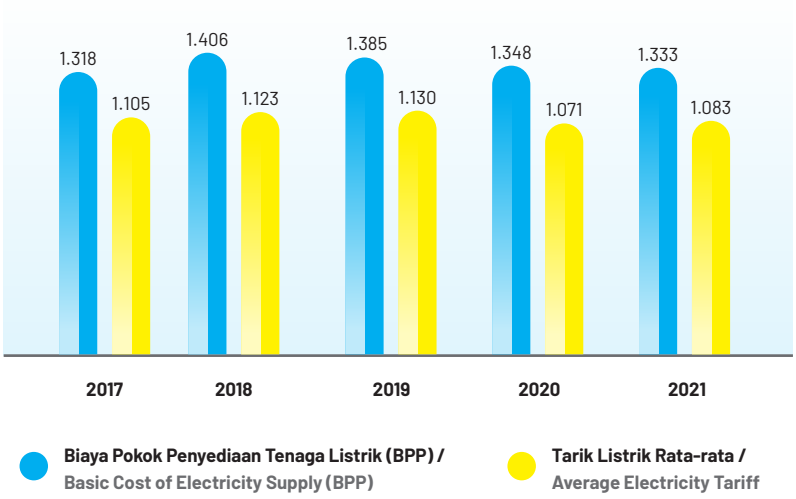

Sebagaimana dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), subsidi adalah transfer dana dari Pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Subsidi listrik bisa diartikan sebagai bentuk bantuan dari Pemerintah agar masyarakat bisa membayar tarif listrik lebih murah dari tarif keekonomian. Landasan hukum pemberian subsidi adalah:

- UU 30 Tahun 2007 tentang Energi: "Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu".
- UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: "Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: kelompok masyarakat tidak mampu".

As stated in the State Budget (APBN), subsidies are transfers of funds from the Government that make the price of goods or services cheaper. Electricity subsidies can be interpreted as a form of relief from the government so that people can pay electricity rates that are cheaper than the economic tariff. The legal bases for granting subsidies are:

- Law No. 30 of 2007 on Energy: "The government and local governments provide subsidy funds for underprivileged groups of people".
- Law No. 30 of 2009 on Electricity: "For the provision of electricity, the Government and local governments provide funds for: underprivileged community groups".

Saat ini, tarif keekonomian listrik adalah sekitar Rp1400-1500/kWh. Namun dengan adanya subsidi dari Pemerintah yang disalurkan melalui PT PLN, maka masyarakat yang menerima subsidi hanya perlu membayar sekitar Rp400-Rp600/kWh, tergantung jenis daya yang digunakan. Dinamika perubahan kebijakan subsidi listrik di Indonesia dari tahun ke tahun berdasarkan data dari kementerian keuangan adalah sebagai berikut:

Currently, the economic tariff for electricity is around Rp1,400-1,500/kWh. However, with the subsidy from the Government distributed through PT PLN, the people who receive the subsidy only need to pay around Rp400-Rp600/kWh, depending on the type of power used. The dynamics of changes in electricity subsidy policy in Indonesia from year to year based on the data from the Ministry of Finance are as follows:

Tahun / *Year*	Penjelasan / *Description*
2014	Perubahan kebijakan subsidi listrik yang dilakukan hanya berupa kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan tarif listrik, seperti kebijakan untuk menaikkan tarif listrik sebesar 10% di tahun 2010 dan sebesar 15% di tahun 2013. Akan tetapi, semua 38 golongan pelanggan PLN masih menerima subsidi listrik pada periode ini. / The changes to the electricity subsidy policy that were carried out were only in the form of policies to increase or decrease electricity tariffs, such as the policy to increase electricity tariffs by 10% in 2010 and by 15% in 2013. However, all 38 groups of PLN's customers still received electricity subsidies during the period.

Tahun / *Year*	Penjelasan / *Description*
2015	Pemerintah menghapus subsidi listrik untuk 12 jenis pelanggan PLN yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga daya 1300 VA ke atas, pelanggan golongan Industri Besar (200 VA ke atas), pelanggan golongan Bisnis Besar (6600 VA ke atas), dan pelanggan golongan Pemerintah (6600 VA ke atas). / The government removed electricity subsidies for 12 types of PLN's customers, consisting of household customers with the power of 1,300 VA and above, Large Industry customers (200 VA and above), Large Business customers (6,600 VA and above), and Government customers (6,600 VA and above). Kebijakan ini didasari pemahaman bahwa golongan pelanggan tersebut tidak berhak menerima subsidi listrik. Kebijakan ini secara signifikan mengurangi besaran anggaran subsidi listrik dari Rp99,30 triliun di 2014 menjadi Rp56,55 triliun di 2015. / This policy was based on the understanding that these customer groups were not entitled to receive electricity subsidies. This policy significantly reduced the electricity subsidy budget from Rp99.30 trillion in 2014 to Rp56.55 trillion in 2015.
2017	Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk terus melakukan perbaikan sasaran penerima subsidi listrik dengan melakukan reformasi subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. / The government and DPR RI agreed to continue to improve the target of electricity subsidy recipients by reforming electricity subsidies for the household groups with the power of 450 VA and 900 VA. Kebijakan ini dilakukan untuk mengembalikan mandat pemberian subsidi, yaitu untuk masyarakat kurang mampu. Reformasi ini dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu menyasar pelanggan rumah tangga 900 VA. Pelanggan rumah tangga 900 VA yang berhak menerima subsidi adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu/ BDT (sekarang menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS). / This policy was carried out to restore the mandate to provide subsidies, namely for the underprivileged. This reform was carried out in stages by first targeting household customers with the power of 900 VA. The household customers with the power of 900 VA who were entitled to receive the subsidy were the households registered in the Integrated Database/BDT (now the Integrated Social Welfare Data/DTKS). Untuk mengatasi adanya rumah tangga yang berhak menerima subsidi tapi tidak terdaftar dalam BDT, maka Pemerintah dan PLN menyediakan mekanisme pengaduan yang memungkinkan mereka untuk menerima tarif listrik bersubsidi. / To overcome the issue of households that were entitled to receive subsidies but were not registered with the BDT, the Government and PLN provided a complaint mechanism that allowed them to receive subsidized electricity tariffs.
2021	Saat ini semua pelanggan rumah tangga 450 VA masih menerima subsidi listrik. Pemerintah sedang mengupayakan untuk melanjutkan reformasi subsidi listrik. / Currently, all household customers with the power of 450 VA still receive electricity subsidies. The government is working to continue the electricity subsidy reformation.

Menurut Kementerian Keuangan, realisasi subsidi listrik selama kurun waktu tahun 2017–2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,5 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian diskon listrik di tahun 2020–2021 dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, realisasi subsidi listrik juga dipengaruhi oleh realisasi konsumsi listrik, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, serta pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga daya 900 VA non DTKS (R1 900 VA).

According to the Ministry of Finance, the realization of electricity subsidies during the 2017–2020 period experienced an average increase by 6.5 percent, This increase was mainly due to the policy on electricity discounts provision in 2020-2021 in order to handle the impact of the COVID-19 pandemic. In addition, the realization of electricity subsidies was also influenced by the realization of electricity consumption, the development of basic macroeconomic assumptions, as well as the implementation of targeted electricity subsidy policies for the non-DTKS household group with the power of 900 VA (R1 900 VA).

Selama kurun waktu tahun 2017–2021, pelanggan listrik bersubsidi mengalami penurunan dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 37,6 juta pelanggan pada tahun 2021. Adapun kebijakan diskon listrik telah dimanfaatkan oleh 30,8 juta pelanggan dari total 32,6 juta pelanggan rumah tangga, bisnis, industri daya 450 VA dan pelanggan rumah tangga daya 900 VA (DTKS) yang berhak mendapatkan diskon listrik.

During the period of 2017–2021, subsidized electricity customers decreased from 53.0 million customers in 2017 to 37.6 million customers in 2021. The electricity discount policy has been utilized by 30.8 million customers out of a total of 32.6 million household, business, and industrial customers with the power of 450 VA and household customers (DTKS) with the power of 900 VA who are entitled to electricity discounts.

TINJAUAN SEGMEN OPERASI

Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, rinciannya adalah sebagai berikut:

OVERVIEW ON OPERATING SEGMENT

Segment Information

Operating segments are identified based on internal reports regarding the components of the Group which are regularly reviewed by the "operational decision maker" in order to allocate resources and assess the performance of operating segments.

The information used by operational decision makers for resource allocation and assessment of their performance is categorized based on the geographic location where electricity sales are made.

The operating segments are prepared in accordance with the accounting policies adopted in the preparation and presentation of the consolidated financial statements. For management reporting purposes, as of December 31, 2021 and 2020, the Group was divided into geographical operations of Sumatra, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku and Papua. These geographic operations form the basis for reporting the Group's segment information, the details of which are as follows:

Informasi Keuangan Segmen Operasi Tahun 2021 (Rp Juta)

Financial Information of Operational Segment Year 2021 (Rp Million)

	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Jumlah/*Total*
Pendapatan usaha / Revenues	40.616.465	300.266.454	13.939.628	10.821.525	2.530.198	368.174.270
Beban usaha dan beban penyusutan / Operating Expenses and Depreciation Expenses	39.613.707	253.245.715	14.458.485	11.324.616	4.476.602	323.119.125
Laba/(rugi) usaha / Operating Profit/(Loss)	1.002.758	47.020.739	(518.857)	(503.091)	(1.946.404)	45.055.145
Laba/(rugi) tahun berjalan / Profit/(Loss) for the year	(2.490.542)	21.372.319	(1.449.220)	(1.550.657)	(2.707.023)	13.174.877
Aset segmen / Segment Assets	286.951.543	1.130.134.788	89.597.084	77.755.638	28.777.403	1.613.216.456
Liabilitas segmen / Segment Liabilities	279.265.620	147.252.735	91.308.439	78.313.229	35.469.310	631.609.333

Informasi Keuangan Segmen Operasi Tahun 2020 (Rp Juta)

Financial Information of Operational Segment Year 2020 2021 (Rp Million)

	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Jumlah/*Total*
Pendapatan usaha / Revenues	40.921.170	280.720.716	11.499.288	9.833.702	2.440.761	345.415.637
Beban usaha dan beban penyusutan / Operating and Depreciation Expenses	(37.176.289)	(240.534.586)	(11.021.312)	(8.952.649)	(3.323.329)	(301.008.165)

	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Jumlah/*Total*
Laba/(rugi) usaha / Operating Profit/(Loss)	3.744.881	40.186.130	477.976	881.053	(882.568)	44.407.472
Laba/(rugi) tahun berjalan / Profit/(Loss) for the year	(520.618)	7.768.141	(481.759)	313.608	(1.085.944)	5.993.428
Aset segmen / Segment Assets	284.561.500	1.118.103.838	84.838.936	73.464.390	28.091.117	1.589.059.781
Liabilitas segmen / Segment Liabilities	274.087.913	186.655.451	85.359.933	72.815.193	30.328.699	649.247.189

Penjelasan lebih lengkap terkait segmen operasi PLN dapat dilihat di catatan no. 54 pada laporan keuangan audit PLN yang merupakan bagian dari laporan tahunan ini.

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang disajikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasi PLN pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PWC) telah mengaudit laporan keuangan tersebut yang dilakukan oleh Akuntan Publik Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA dengan Surat Ijin Praktik Akuntan Publik No. AP0241.

Menurut opini KAP, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan tahun 2020 mengalami reklasifikasi agar konsisten dengan presentasi laporan keuangan konsolidasian 2021. Reklasifikasi tersebut tidak berdampak secara material karena reklasifikasi ini tidak mempengaruhi keputusan ekonomis yang dibuat oleh pengguna atas dasar laporan keuangan konsolidasian sehingga penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tiga periode tidak diperlukan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PLN membukukan pertumbuhan aset sebesar 1,53% menjadi Rp1.613,22 triliun pada tahun 2021 terutama didukung oleh kenaikan aset tidak lancar senilai Rp35,62 triliun atau 2,39%. Meski demikian, aset lancar mengalami

A more complete explanation regarding PLN's operating segments can be seen in note No. 54 of PLN's audited financial statements as an integral part of this annual report.

FINANCIAL REVIEW

The financial review presented below refers to the Consolidated Financial Statements of PLN as of December 31, 2021, as well as the consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

The Public Accounting Firm (KAP) of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PWC global network) has audited the financial statements, which is done by Public Accountant Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA with a Public Accountant Practice License No. AP0241.

The KAP is of the opinion that the consolidated financial statements is presented fairly, in all material respects, the consolidated financial position, financial performance, and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

The 2020 financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2021 consolidated financial statements. The reclassification does not have a material impact because this reclassification does not affect the economic decisions made by users on the basis of the consolidated financial statements so that a restatement of the three-period consolidated financial statements is not necessary.

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

PLN's asset grew by 1.53% to Rp1,613.22 trillion in 2021, mainly supported by the increase in non-current assets of Rp35.62 trillion or 2.39%. However, current assets decreased by 11.64% from 2020 to Rp85.91 trillion. In line with the increase

penurunan sebesar 11,64% dari tahun 2020 menjadi Rp85,91 triliun. Sejalan dengan kenaikan aset tersebut, ekuitas PLN tumbuh 4,45% menjadi Rp981,61 triliun. Sementara itu, total liabilitas Perseroan menurun 2,69% menjadi Rp631,61 triliun seiring penurunan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek masing-masing sebesar 2,88% dan 2,07% pada tahun 2021.

in assets, PLN's equity grew 4.45% to Rp981.61 trillion. Meanwhile, the Company's total liabilities decreased by 2.69% to Rp631.61 trillion as long-term liabilities and short-term liabilities decreased by 2.88% and 2.07%, respectively, in 2021.

Posisi Keuangan

(Dalam Jutaan Rupiah)

Financial Position

(In Millions of Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan / *Statements of Financial Position*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	1.527.305.081	1.491.686.215	35.618.866	2,39%
Aset Lancar / Current Assets	85.911.375	97.228.505	(11.317.130)	(11,64%)
Total Aset / Total Assets	1.613.216.456	1.588.914.720	24.301.736	1,53%
Ekuitas / Equity	981.607.123	939.812.592	41.794.531	4,45%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	485.070.853	499.472.600	(14.401.747)	(2,88%)
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	146.538.480	149.629.528	(3.091.048)	(2,07%)
Total Liabilitas / Total Liabilities	631.609.333	649.102.128	(17.492.795)	(2,69%)
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	1.613.216.456	1.588.914.720	24.301.736	1,53%

ASET

Aset Tidak Lancar

(Dalam Jutaan Rupiah)

ASSETS

Non-Current Assets

(In Millions of Rupiah)

Aset Tidak Lancar / *Non-Current Assets*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Aset tetap / Property, plant, and equipment	1.427.058.358	1.401.888.487	25.169.871	1,80%
Aset hak-guna / Right-of-use assets	29.762.537	31.193.985	(1.431.448)	(4,59%)
Properti investasi / Investment properties	5.451.410	5.408.572	42.838	0,79%
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama / Investments in associates and joint venture	17.810.839	14.112.585	3.698.254	26,21%
Pajak dibayar di muka / Prepaid tax	17.112.377	8.898.076	8.214.301	92,32%
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets	264.705	195.289	69.416	35,55%
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	1.160.081	1.309.326	(149.245)	(11,40%)
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	4.861.882	5.882.934	(1.021.052)	(17,36%)
Piutang lain-lain / Other receivables	1.145.976	886.052	259.924	29,34%
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	18.254.891	17.275.490	979.401	5,67%
Aset tidak lancar lain / Other non-current assets	4.422.025	4.635.419	(213.394)	(4,60%)
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	**1.527.305.081**	**1.491.686.215**	**35.618.866**	**2,39%**

Total aset tidak lancar PLN mengalami kenaikan sebesar 2,39% menjadi Rp1.527,31 triliun pada tahun 2021 dari Rp1.491,69 triliun pada tahun 2020. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp25,17 triliun disebabkan karena akuisisi EMI dan MCTN serta kenaikan surplus revaluasi sebesar Rp21,56 triliun berdasarkan hasil penilaian kembali atas nilai wajar aset

PLN's total non-current assets increased by 2.39% to Rp1,527.31 trillion in 2021 from Rp1,491.69 trillion in 2020. The increase was mainly influenced by the increase in fixed assets of Rp25.17 trillion as a result of the acquisition of EMI . EMI and MCTN as well as an increase in the revaluation surplus of Rp21.56 trillion based on the revaluation of the fair value of fixed assets carried out by the Public Appraisal

tetap yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid & Rekan yang pada periode pelaporan tanggal 31 Desember 2021.

Service Office (KJPP) Rengganis, Hamid & Partners which was carried out on the reporting period on December 31, 2021.

Kenaikan aset tidak lancar dan peningkatan laba bersih pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu meningkatnya rasio ROI menjadi 6,71% dibandingkan periode tahun lalu dengan capaian ROI sebesar 6,59%

The 2021 increase in non-current assets and increase in net profit impacted PLN's financial performance, namely on the increase in the ROI ratio to 6.71% compared to last year's period with the ROI of 6.59%

Aset Lancar

(Dalam Jutaan Rupiah)

Current Assets

(In Millions of Rupiah)

Aset Lancar / *Current Assets*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	37.968.399	54.735.434	(16.767.035)	(30,63%)
Rekening bank dibatasi penggunaannya / Restricted cash in banks	206.279	-	206.279	100,00%
Investasi jangka pendek / Short-term investments	297.720	366.708	(68.988)	(18,81%)
Piutang usaha / Trade receivables	23.802.386	21.278.416	2.523.970	11,86%
Piutang dari Pemerintah / Receivables from Government	8.300.000	819.067	7.480.933	913,35%
Piutang lain-lain / Other receivables	1.249.618	1.746.344	(496.726)	(28,44%)
Persediaan / Inventories	10.393.419	10.277.289	116.130	1,13%
Pajak dibayar dimuka / Prepaid taxes	2.701.520	7.287.693	(4.586.173)	(62,93%)
Biaya dibayar dimuka dan uang muka / Prepaid expenses and advances	808.968	640.881	168.087	26,23%
Piutang pihak berelasi / Receivables from related parties	183.066	76.673	106.393	138,76%
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	**85.911.375**	**97.228.505**	**(11.317.130)**	**(11,64%)**

Aset lancar PLN mengalami penurunan sebesar 11,64% menjadi Rp85,91 triiliun pada tahun 2021 dari Rp97,22 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan kas dan setara kas sebesar 30,63% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp54,74 triliun menjadi Rp37,97 triliun di tahun 2021 sebagai dampak dari penurunan penerimaan kompensasi di tahun 2021 dibandingkan dengan penerimaan kompensasi tahun 2020. Selain itu, kondisi likuiditas perusahaan masih stabil sehingga pada tahun 2021 tidak dilakukan penarikan pinjaman baru yang signifikan.

PLN's current assets decreased by 11.64% to Rp85.91 trillion in 2021 from Rp97.22 trillion in the previous year. This decrease mainly came from a decrease in cash and cash equivalents by 30.63% compared to 2020 of Rp54.74 trillion to Rp37.97 trillion in 2021 as a result of a decrease in compensation receipts in 2021 compared to compensation receipts in 2020. In addition, the company's liquidity condition was still stable so that in 2021 there would be no significant new loan withdrawals.

Penurunan aset lancar pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu penurunan terhadap rasio-rasio seperti *current ratio* dari 65,0% menjadi 58,6%, *cash ratio* dari 36,8% menjadi 26,1%, maupun *quick ratio* dari 51,0% menjadi 42,4%.

The 2021 decrease in current assets impacted PLN's financial performance, namely on the decrease in ratios such as the current ratio from 65.0% to 58.6%, the cash ratio from 36.8% to 26.1%, and the quick ratio from 51.0% to 42.4%.

EKUITAS

(Dalam Jutaan Rupiah)

EQUITY

(In Millions of Rupiah)

Ekuitas / *Equity*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Modal saham / Capital stock	135.460.886	135.342.182	118.704	0,09%
Tambahan modal disetor / Additional paid-in capital	34.608	5.216.571	(5.181.963)	(99,34%)
Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham / Stock subscription from Government in issuance process	10.075.210	-	10.075.210	100,00%
Saldo laba / Retained earnings	149.619.244	136.585.580	13.033.664	9,54%
Penghasilan komprehensif lain / Other comprehensive income	685.408.045	661.734.097	23.673.948	3,58%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to owners of the parent	980.597.993	938.878.430	41.719.563	4,44%
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interest	1.009.130	934.162	74.968	8,03%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	**981.607.123**	**939.812.592**	**41.794.531**	**4,45%**

Ekuitas PLN tumbuh 4,45% menjadi Rp981,61 triliun pada tahun 2021 dari Rp939,81 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan ekuitas ini terutama didorong oleh dukungan finansial yang kuat dari Pemerintah selaku pemegang saham kepada PLN berupa Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham senilai Rp10,08 triliun.

PLN's equity grew by 4.45% to Rp981.61 trillion in 2021 from Rp939.81 trillion in the previous year. This increase in equity was mainly supported by strong financial support from the Government as a shareholder to PLN in the form of State Equity Participation in the process of issuing shares worth Rp10.08 trillion.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 tahun 2021, tanggal 10 Agustus 2021, penambahan penyertaan modal Pemerintah secara tunai yang masih dalam proses penerbitan saham adalah sebesar Rp5,00 triliun. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 dan 122 tahun 2021, tanggal 6 Oktober 2021 dan 29 Desember 2021, penambahan penyertaan modal Pemerintah non-kas yang masih dalam proses penerbitan saham masing-masing adalah sebesar Rp802,01 miliar dan Rp4,27 triliun, sehingga total penambahan penyertaan modal non-kas selama tahun 2021 sebesar Rp5,08 triliun.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 83 of 2021, dated August 10, 2021, the additional capital participation of the Government in cash which was still in the process of issuing shares was Rp5.00 trillion. Furthermore, based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 103 and 122 of 2021, dated October 6, 2021 and December 29, 2021, the additional non-cash Government equity participation which was still in the process of issuing shares amounted to Rp802.01 billion and Rp4.27 trillion, respectively, so that the total additional non-cash equity participation cash during 2021 amounting to Rp5.08 trillion.

Pertumbuhan ekuitas pada tahun 2021 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

The 2021 equity growth did not impact PLN's financial performance.

LIABILITAS

Liabilitas Tidak Lancar

(Dalam Jutaan Rupiah)

LIABILITIES

Non-current Liabilities

(In Millions of Rupiah)

Liabilitas Tidak Lancar / *Non-current Liabilities*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Liabilitas pajak tangguhan / Deferred tax liabilities	45.576.375	31.746.600	13.829.775	43,56%
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun / Long-term liabilities – net of current portion				
Penerusan pinjaman / Two-step loans	31.778.793	35.501.803	(3.723.010)	(10,49%)

Liabilitas Tidak Lancar / *Non-current Liabilities*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	2.927.754	3.649.146	(721.392)	(19,77%)
Utang sewa / Lease liabilities	10.471.903	14.035.913	(3.564.010)	(25,39%)
Utang bank / Bank loans	139.045.012	154.489.751	(15.444.739)	(10,00%)
Utang obligasi dan sukuk ijarah / Bonds payable and sukuk ijara	187.734.643	192.850.308	(5.115.665)	(2,65%)
Utang listrik swasta / Electricity purchase payable	5.711.211	6.097.857	(386.646)	(6,34%)
Utang KIK – EBA / KIK-EBA loans	0	655.772	(655.772)	(100,00%)
Utang pihak berelasi / Payable to related parties	0	9.432	(9.432)	(100,00%)
Utang lain-lain / Other payables	466.379	182.093	284.286	156,12%
Pendapatan ditangguhkan / Deferred revenue	13.271.056	5.644.472	7.626.584	135,12%
Liabilitas imbalan kerja / Employee benefits liabilities	48.087.727	54.609.453	(6.521.726)	(11,94%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	**485.070.853**	**499.472.600**	**(14.401.747)**	**(2,88%)**

Penurunan liabilitas jangka panjang PLN terutama dipengaruhi oleh berkurangnya utang bank dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun, yaitu sebesar 10,00% atau setara dengan Rp15,44 triliun sehingga menjadi Rp139,05 triliun pada tahun 2021 sebagai akibat dari pelunasan yang dilakukan PLN lebih awal dan sukarela atas pokok pinjaman selama tahun 2021 sebesar USD614,17 juta (setara dengan Rp8,79 triliun) dan IDR12,40 triliun.

The decrease in PLN's non-current liabilities was mainly influenced by the decrease in bank loans with maturities of more than one year by 10.00% or equivalent to Rp15.44 trillion to Rp139.05 trillion in 2021 as a result of early repayment by PLN and voluntary loan principal during 2021 amounting to USD614.17 million (equivalent to Rp8.79 trillion) and Rp12.40 trillion.

Penurunan liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 turut menyumbang kontribusi positif pada meningkatnya kinerja keuangan PLN di tahun 2021.

The decrease in non-current liabilities contributed positively to the improvement of PLN's financial performance in 2021.

Liabilitas Jangka Pendek
(Dalam Jutaan Rupiah)

Current Liabilities
(In Millions of Rupiah)

Liabilitas Jangka Pendek / *Current Liabilities*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Utang usaha / Trade payables	47.904.756	39.148.555	8.756.201	22,37%
Utang pajak / Taxes payable	1.998.768	1.747.279	251.489	14,39%
Biaya masih harus dibayar / Accrued expenses	6.528.616	6.990.380	(461.764)	(6,61%)
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / Short-term employee benefits liabilities	10.320.993	8.959.711	1.361.282	15,19%
Uang jaminan langganan / Customer's security deposits	15.584.069	14.802.396	781.673	5,28%
Utang biaya proyek / Project cost payables	114.546	153.983	(39.437)	(25,61%)
Pendapatan ditangguhkan / Deferred revenue	740.906	1.617.725	(876.819)	(54,20%)
Liabilitas derivatif / Derivative liabilities	107.271	327.544	(220.273)	(67,25%)
Utang jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun / Current maturities of long-term liabilities				
Penerusan pinjaman / Two-steps loans	2.920.412	3.033.168	(112.756)	(3,72%)
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank / Government and non-bank government financial institution loans	1.960.686	2.416.967	(456.281)	(18,88%)
Utang sewa / Lease liabilities	4.570.040	4.450.390	119.650	2,69%
Utang bank / Bank loans	26.841.397	18.816.957	8.024.440	42,64%
Utang obligasi dan sukuk ijarah / Bonds payable and sukuk ijara	5.420.392	14.970.000	(9.549.608)	(63,79%)
Utang listrik swasta / Electricity purchase payables	457.545	427.974	29.571	6,91%

Liabilitas Jangka Pendek / *Current Liabilities*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Utang KIK – EBA / KIK-EBA loans	569.578	871.177	(301.599)	(34,62%)
Utang lain-lain / Other payables	20.498.505	30.895.322	(10.396.817)	(33,65%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	**146.538.480**	**149.629.528**	**(3.091.048)**	**(2,07%)**

Liabilitas jangka pendek PLN juga mengalami penurunan sebesar 2,07% menjadi Rp146,54 triliun pada tahun 2021. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya utang lain-lain sebesar 33,65% menjadi Rp20,50 triliun pada tahun 2021.

PLN's current liabilities also decreased by 2.07% to Rp146.54 trillion in 2021. This decrease was mainly due to a 33.65% reduction in other payables to Rp20.50 trillion in 2021.

Penurunan liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu penurunan terhadap rasio-rasio seperti *current ratio* dari 65,0% menjadi 58,6%, *cash ratio* dari 36,8% menjadi 26,1%, maupun *quick ratio* dari 51,0% menjadi 42,4%.

The 2021 decrease in current liabilities impacted PLN's financial performance, namely on the decrease in ratios such as the current ratio from 65.0% to 58.6%, the cash ratio from 36.8% to 26.1%, and the quick ratio from 51.0% to 42.4%.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(In Millions of Rupiah)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif / *Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Penjualan Tenaga Listrik / Electricity Sales	288.862.726	274.898.464	13.964.262	5,08%
Jumlah Pendapatan Usaha / Total Revenue	368.174.270	345.415.637	22.758.633	6,59%
Beban Usaha / Operating Expenses	323.119.125	301.008.165	22.110.960	7,35%
Laba Usaha / Operating Profit	**45.055.145**	**44.407.472**	**647.673**	**1,46%**
(Beban)/penghasilan lain-lain – bersih / (Expenses)/Other income – net	(4.921.682)	1.916.966	(6.838.648)	(356,74%)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing – bersih / Gain/(loss)on foreign exchange – net	2.676.145	(7.742.152)	10.418.297	(134,57%)
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	**23.221.084**	**12.291,919**	**10.929.165**	**88,91%**
Beban Pajak / Income Tax Expense	(10.046.207)	(6.298.491)	3.747.716	59,50%
Laba Bersih / Net Income	**13.174.877**	**5.993.428**	**7.181.449**	**119,82%**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak / Other comprehensive income for the year after tax				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: / Items that may be reclassified subsequently as profit or loss				
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama / Share of other comprehensive income from associates and joint ventures	610.789	107.890	502.899	466,12%
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: / Items that will not be reclassified subsequently as profit or loss				
Perubahan surplus revaluasi aset tetap / Changes in property, plant and equipment revaluation surplus	19.559.900	(1.657.836)	21.217.736	(1.279,85%)
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti / Remeasurement of defined benefit plans	8.533.129	1.915.369	6.617.760	345,51%
Beban pajak terkait / Related income tax expense	(4.696.115)	(56.657)	(4.639.458)	8.188,68%
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak / Other comprehensive income for the year after tax	24.007.703	308.766	23.698.937	7.675,37%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Total comprehensive income for the year	**37.182.580**	**6.302.194**	**30.880.386**	**489,99%**
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: / Profit for the year attributable to:				
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	13.128.626	5.950.884	7.177.742	120,62%
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interest	46.251	42.544	3.707	8,71%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif / *Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Jumlah / Total	**13.174.877**	**5.993.428**	**7.181.449**	**119,82%**
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: / Total comprehensive income for the year attributable to:				
Pemilik entitas induk / Owners of the parent	37.107.612	6.259.650	30.847.962	492,81%
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interest	74.968	42.544	32.424	76,21%
Jumlah / Total	**37.182.580**	**6.302.194**	**30.880.386**	**489,99%**
Laba Per Saham Dasar/Dilusian (dalam Rupiah penuh) / Earnings per share/diluted (in Rupiah full amount)	**96.972**	**48.439**	**48.533**	**100,19%**

Pendapatan Usaha

PLN mampu membukukan pendapatan usaha senilai Rp368,17 triliun pada tahun 2021 atau tumbuh 6,59% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp345,42 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi pendapatan usaha yang berasal dari penjualan tenaga listrik masih dominan yakni 78,46% dan 79,58% untuk tahun 2021 dan 2020. Sementara itu, subsidi dari pemerintah juga memiliki porsi cukup signifikan sebesar 13,53% dan 13,89% untuk periode yang sama. Kemudian, diikuti oleh pendapatan kompensasi yang memiliki porsi sebesar 6,68% dan 5,18%, pendapatan usaha lain-lain yang memiliki porsi sebesar 1,20% dan 1,25%, serta penyambungan pelanggan yang memiliki porsi sebesar 0,13% dan 0,09% untuk periode yang sama.

Pertumbuhan pendapatan usaha PLN pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu peningkatan laba setelah subsidi dan peningkatan EBITDA.

Revenue

PLN managed to book revenue amounting to Rp368.17 in 2021 trillion in 2021 or grew 6.59% compared to the previous year of Rp345.42 trillion. Of this amount, the contribution of revenue from the sale of electricity is still dominant, namely 78.46% and 79.58% for 2021 and 2020, respectively. Meanwhile, subsidies from the government also had a significant portion of 13.53% and 13.89% for the same period. Then, followed by compensation income which has a portion of 6.68% and 5.18%, other revenues which had a portion of 1.20% and 1.25%, and customer connection which had a share of 0.13%. and 0.09% for the same period.

The 2021 increase in PLN's revenue impacted PLN's financial performance, namely on the increase in profit after subsidies and increase in EBITDA.

Komposisi Pendapatan Usaha

Revenue Composition

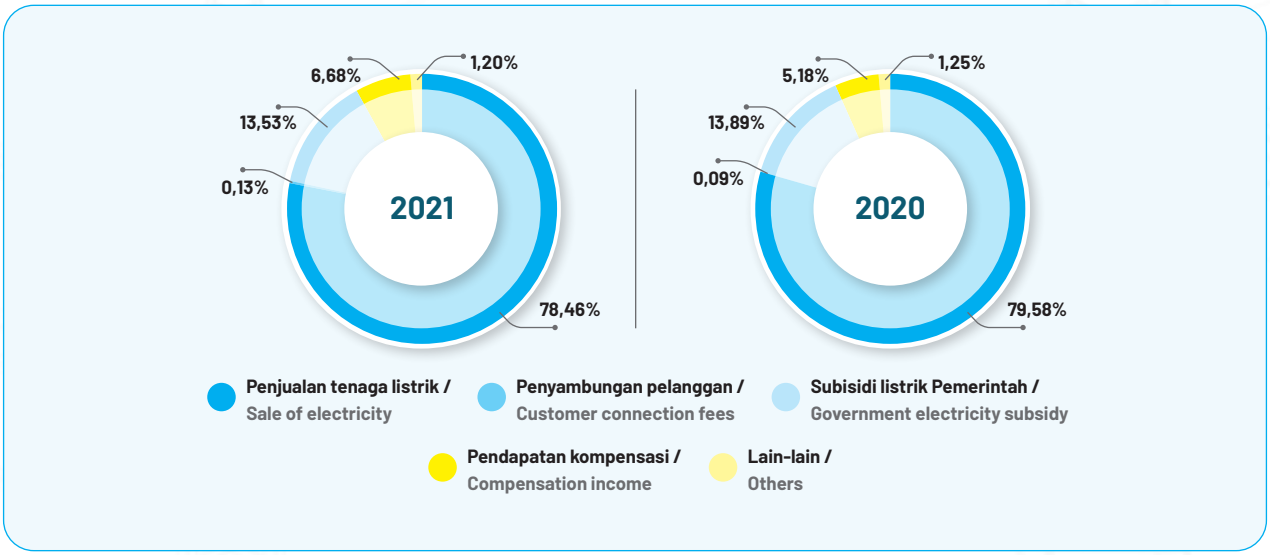

Penjualan Tenaga Listrik

Pendapatan usaha dari penjualan tenaga listrik membukukan pertumbuhan sebesar 5,02% menjadi Rp289,04 triliun pada tahun 2021. Pada proses pelaksanaan penjualan tenaga listrik, terdapat pengujian dan masa uji coba (*commissioning test*) yang merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa uji coba dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi secara komersial. Beban masa uji coba tercatat sebesar Rp180,49 miliar. Dengan demikian, hasil penjualan tenaga listrik bersih (setelah dikurangi masa uji coba) adalah sebesar Rp288,86 triliun pada tahun 2021.

Sale of Electricity

Revenue from electricity sales recorded a growth of 5.02% to Rp289.04 trillion in 2021. In the process of electricity sales, there was a trial and commissioning test period, which is a series of examination and testing of electrical installation that has been completed and ready to operate. Expenses and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test period are capitalized to assets under construction because the electrical installations are not yet operating commercially. The trial period expense was recorded at Rp180.49 billion. Thus, the net electricity sales revenue (after deducting the commissioning test period) was Rp288.86 trillion in 2021.

Kenaikan pendapatan dari penjualan listrik tersebut terutama ditopang oleh peningkatan penjualan dari segmen pelanggan umum yang tumbuh 5,05% menjadi Rp269,57 triliun pada tahun 2021. Kontribusi dari segmen pelanggan umum adalah 93,26% dan 93,24% untuk tahun 2021 dan 2020. Adapun komposisi pelanggan PLN digambarkan dalam grafik berikut ini:

The increase in revenue from sale of electricity was mainly supported by an increase in sales from the general customer segment, which grew by 5.05% to Rp269.57 trillion in 2021. The contribution from customer segment was 93.26% and 93.24% for 2020 and 2021, respectively. The composition of PLN customers is depicted in the following graph:

Komposisi Pelanggan PLN

PLN Customer Composition

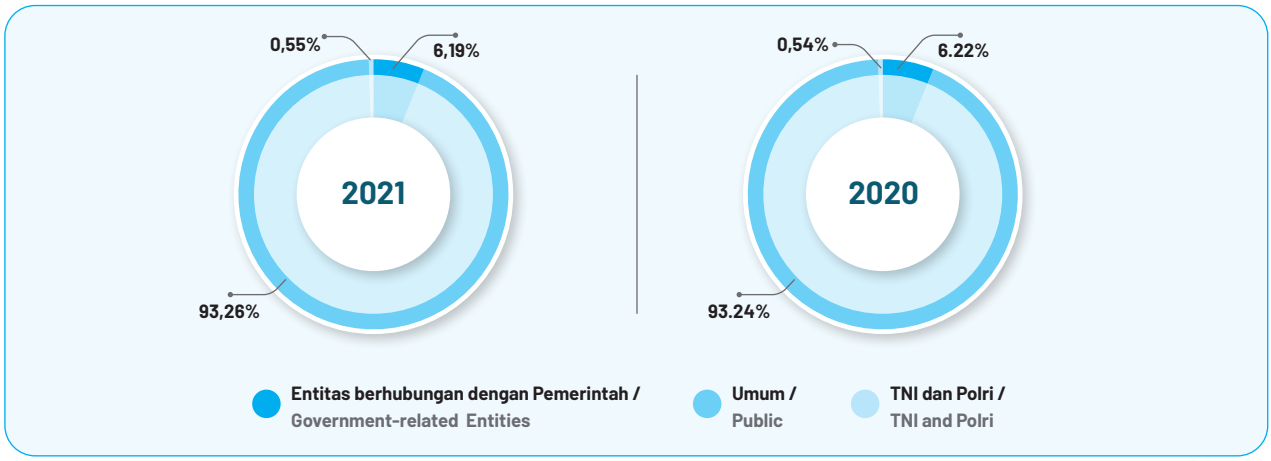

Penjualan tenaga listrik untuk tahun 2021 dan 2020 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Sale of electricity in 2021 and 2020 were based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:

- Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam.

- Regulation of the Minister of ESDM No. 28 of 2016 with the latest amendment of Regulation of the Minister of ESDM No. 3 of 2020.
- Regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 of 2017 on the tariff of electricity provided by PLN Batam.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, total penjualan tenaga listrik termasuk penerimaan stimulus COVID-19 dari pemerintah masing-masing adalah sebesar Rp9,97 triliun dan Rp14,26 triliun. Penerimaan stimulus COVID-19 terdiri dari diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri dan pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen.

For the year ended on December 31, 2021 and 2020, the total sales of electricity included receipts of COVID-19 stimulus from the Government of Indonesia amounting to Rp9.97 trillion and Rp14.26 trillion, respectively. Receipts of COVID-19 stimulus consisted of tariff discount for households, business and industrial customers and minimum account exemption, expenses, and subscription fees.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah menerima pembayaran stimulus COVID-19 terkait diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri, dan pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen masing-masing adalah sebesar Rp10,96 triliun dan Rp13,14 triliun. Program stimulus sektor ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. B-467/TL.04/DJL.03/2021 tanggal 2 Maret 2021 mengacu pada hasil Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020 serta tindak lanjut kesepakatan 3 (tiga) Menteri (Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN) tanggal 31 Desember 2020 yang membahas Kebijakan Subsidi Listrik dan Program Stimulus Sektor Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik Perusahaan bagi Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri Tahun 2021 diperpanjang untuk rekening listrik dan pembelian token bulan April sampai dengan Juni 2021, dengan ketentuan:
   a. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA):
      - Reguler (Pascabayar): rekening listrik diberikan diskon sebesar 50% (biaya pemakaian dan biaya beban);
      - Prabayar: diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50%;
   b. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA):

For the year ended on December 31, 2021 and 2020, the Company received COVID-19 stimulus payments related to tariff discount for households, business and industrial customers, exemption of minimum account, expense and subscription fees amounting to Rp10.96 trillion and Rp13.14 trillion, respectively. Stimulus program for electricity sector determined by the Government based on Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity No. B-467/TL.04/DJL.03/2021 dated March 2, 2021, refers to the results of the Limited Meeting on December 28, 2020 and the follow-up of agreement of the 3 (three) Ministers (Minister of ESDM, Minister of Finance, and Minister of SOEs) on December 31, 2020 which covered the Electricity Subsidy Policy and the Electricity Sector Stimulus Program with the following points:

1. The implementation of the Company's electricity tariff discounts for Households, Business, and Industrial Customers in 2021 was extended for electricity bills and token purchases from April to June 2021, with the following conditions:
   a. Customers of 450 VA (R1/TR 450 VA) power households, 450 VA (B1/TR 450 VA) small businesses and 450 VA power (I1/TR 450 VA) small industries:
      - Regular (Postpaid): electricity bills were given a discount of 50% (usage fees and charges);
      - Prepaid: given a 50% discount on electricity rates for token purchases;
   b. Subsidized 900 VA power household customers (R1/TR 900 VA):

- Reguler (Pascabayar): rekening listrik diberikan diskon sebesar 25% (biaya pemakaian dan biaya beban);
- Prabayar: diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 25%;

2. Dalam pemberian diskon tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada butir 1, Perusahaan wajib memperhatikan besaran konsumsi energi listrik pelanggan dengan mempertimbangkan batasan maksimal jam nyala per bulan;
3. Pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum diperpanjang untuk rekening bulan April sampai dengan Juni 2021 dengan ketentuan pembebasan sebesar 50%.

- Regular (Postpaid): electricity bills were given a discount of 25% (usage fees and load charges);
- Prepaid: given a 25% discount on electricity rates for token purchases;

2. In granting electricity tariff discounts as referred to in point 1, PT PLN (Persero) was obliged to pay attention to the amount of electricity consumption of customers by taking into account the maximum limit on usage hours per month;
3. Exemption from expense or subscription fees, as well as exemption from the application of the minimum account provisions was extended for accounts in April to June 2021 with a provision of 50% exemption.

Perpanjangan sampai dengan triwulan III disampaikan melalui surat tanggal 2 Juli 2021 dari Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B- 1641/TL.04/DJL.3/2021. Selanjutnya, perpanjangan sampai dengan triwulan IV disampaikan melalui surat tanggal 22 Juli 2021 dari Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B- 1734/TL.04/DJL.3/2021.

The extension until the third quarter was submitted by letter dated July 2, 2021 from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity No. B-1641/TL.04/DJL.3/2021. Furthermore, the extension until the fourth quarter was submitted by letter dated July 22, 2021 from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity Number B-1734/TL.04/DJL.3/2021.

Subsidi Listrik Pemerintah

Terkait dengan pendapatan dari subsidi pemerintah, PLN membukukan kenaikan pendapatan dari subsidi sebesar 3,77% menjadi Rp49,80 triliun pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar Rp47,99 triliun. Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah marjin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Government Electricity Subsidy

With regard to the revenue from government subsidies, PLN's revenue from subsidies recorded an increase by 3.77% to Rp49.80 trillion in 2021 from the previous year at Rp47.99 trillion. Subsidy income is the income from the Government of Indonesia on the difference between allowable costs plus a margin of 7% with the actual selling price per each group of tariffs except for groups that have received automatic tariff adjustments according to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 3 of 2020 on the fourth amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 28 of 2016 on electricity tariffs provided by PT PLN (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.02/2021, tanggal 7 Desember 2021 dan No. 174/PMK.02/2019, tanggal 22 November 2019. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif

The Government of the Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedures for calculation and payment of electricity subsidy for Budget 2021 and 2020 Fiscal Years referred to Regulations of Minister of Finance No. 178/PMK.02/2021, dated December 7, 2021 and No. 174/PMK.02/2019, dated November 22, 2019. The electricity subsidy was calculated

antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di bawah Kementerian ESDM.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2021 revisi ke-1 dan No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2020 revisi ke-1, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2021 dan 2020 ditetapkan masing-masing sebesar Rp53,59 triliun dan Rp62,82 triliun. Pagu tertinggi tersebut termasuk 7% marjin di atas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran, di bawah Kementerian Keuangan.

Pendapatan Kompensasi

Pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami perubahan kenaikan tarif. Kompensasi dari Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan/atau BPK Republik Indonesia dan jumlahnya telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai kompensasi merupakan estimasi manajemen yang pada akhir tahun akan direviu oleh BPKP dan/atau BPK.

Pada tahun 2021, PLN membukukan pendapatan kompensasi senilai Rp24,59 triliun, naik 37,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp17,90 triliun. Perolehan pendapatan kompensasi tersebut didasarkan pada Surat BPKP No. SP-137/D4/04/2022 tanggal 8 Februari 2022 kepada Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwa penggantian biaya pokok penyediaan dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2021 sebesar Rp24,59 triliun. Jumlah kompensasi ini kemudian dicatatkan sebagai bagian dari laporan laba rugi konsolidasian PLN tahun buku 2021.

from the negative difference between the average selling price of electricity (Rp/kWh) for each tariff class minus the basic cost of providing electricity (Rp/kWh) in the voltage in each tariff class multiplied by the sales volume (kWh) for each tariff group. The basic cost of providing electricity was calculated based on a formula determined by the Directorate General of Electricity, under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Based on the Letter of Approval of the Budget Implementation List (DIPA) No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2021 1st revision and No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2020 1st revision, the highest ceilings for electricity subsidies for the 2021 and 2020 fiscal years are set at Rp53.59 trillion and Rp62.82 trillion, respectively. The highest ceiling included a 7% margin above the cost of providing electricity.

The amount of electricity subsidy within a budget year was finalised based on the result of the compliance audit on the usage of electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

Compensation Income

Compensation income is income from the Government of Indonesia for non-subsidized tariffs, which since 2017 have not experienced changes in tariff increases. Compensation from the Government is recognized as income based on the Audit Results Report (LHP) of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and/or BPK of the Republic of Indonesia and the amount has been recognized as a liability by the Government of Indonesia. The compensation value is a management estimate which will be reviewed by BPKP and/or BPK at the end of the year.

In 2021, PLN recorded compensation income of Rp24.59 trillion, an increase of 37.36% compared to the previous year of Rp. 17.90 trillion. The compensation income is based on BPKP Letter No. SP-137/D4/04/2022 dated February 8, 2022 to the Minister of Finance, which states that the replacement of the basic cost of supply in the form of compensation from the Government for the loss of potential electricity revenue for the non-subsidized tariff class in 2021 was Rp24.59 trillion. This amount of compensation was then recorded as part of PLN's consolidated income statement for the 2021 fiscal year.

Pendapatan Usaha Lain-lain

Pendapatan usaha lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut telah diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan servis aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total servis yang akan diberikan karena pelanggan telah menerima dan menggunakan manfaat secara simultan.

Other Revenues

Other revenues represents income from network and telecommunication services, transformer rental and other administrative services. Revenue from rendering services is recognized in the accounting period in which the services are rendered. For fixed price contracts, revenue is recognized based on the actual services provided until the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided because the customers have received and used the benefits simultaneously.

Per 31 Desember 2021, PLN mencatatkan pendapatan usaha lain-lain sebesar Rp4,43 triliun, tumbuh 2,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4,31 triliun. Adapun rincian pendapatan usaha lain-lain adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, PLN recorded other revenues of Rp4.43 trillion, grew 2.66% compared to the previous year of Rp4.31 trillion . The details of other revenues are as follows:

Pendapatan Usaha Lain-lain / *Other Revenue*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Jaringan dan jasa telekomunikasi / Telecommunication network and service	1.730.517	1.623.099	107.418	6,62%
Penjualan batu bara / Coal sales	1.705.419	1.461.342	244.077	16,70%
Jasa pemeliharaan / Maintenance services	459.245	436.150	23.095	5,30%
Sewa transformator / Transformer rental	396.300	401.932	(5.632)	(1,40%)
Perubahan daya tersambung dan administrasi / Upgrading of electricity power and administration fees	58.974	3.445	55.529	1.611,87%
Lain-lain / Others	76.278	385.858	(309.580)	(80,23%)
Jumlah / Total	**4.426.733**	**4.311.826**	**114.907**	**2,66%**

Penyambungan Pelanggan

PLN menganggap biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang digunakan untuk membangun atau mengakuisisi aset tetap untuk menghubungkan pelanggan secara tidak langsung berkaitan erat dengan pasokan listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan merupakan satu kesatuan karena pelanggan tidak dapat memperoleh manfaat dari kedua layanan ini sendiri. Infrastruktur penyambungan berfungsi untuk memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan pada dasarnya sama, dan memiliki pola transfer yang sama ke pelanggan. Oleh karena itu, biaya penyambungan dan pasokan tenaga listrik merupakan satu kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, biaya penyambungan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi dengan tarif 5% per tahun terhitung sejak tanggal koneksi.

Customer Connection

PLN considers the connection fees received from customers that are used to build or acquire fixed assets to connect customers indirectly closely related to the supply of electricity to customers. The power supply and connection costs are integral as the customer cannot benefit from these two services alone. The connection infrastructure serves to fulfill the obligation to provide electricity to customers. The power supply and connection costs are essentially the same, and have the same transfer pattern to the customer. Therefore, the cost of connecting and supplying electricity is an implementation obligation. Accordingly, the connection fee is recognized as deferred revenue and amortized at a rate of 5% per annum from the connection date.

Pada tahun 2021, biaya jasa penyambungan listrik pelanggan yang diakui sebagai pendapatan usaha PLN adalah sebesar Rp493,44 miliar, naik 57,79% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp312,73 miliar. Biaya penyambungan diamortisasi sejak tanggal penyambungan sesuai masa estimasi konsumsi pelanggan. Konsumsi pelanggan diestimasi berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi.

In 2021, the cost of connecting customer electricity which was recognized as PLN's operating income is Rp.493.44 billion, an increase of 57.79% compared to 2020 of Rp312.73 billion. The connection fee is amortized from the connection date according to the estimated customer consumption period. Customer consumption is estimated based on the average useful life of the distribution assets.

Beban Usaha

Seiring dengan peningkatan penjualan PLN, beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 7,35% menjadi Rp323,12 triliun pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh:

- Kenaikan beban bakan bakar dan pelumas sebesar 36,65% menjadi Rp118,42 triliun pada tahun 2021 yang terjadi seiring dengan kenaikan aktivitas produksi;
- Kenaikan beban pembelian tenaga listrik sebesar 32,05% menjadi Rp103,55 triliun pada tahun 2021 yang disebabkan oleh naiknya pembelian tenaga listrik dari IPP yang semula 97,2GWh menjadi 106,5 GWh. Peningkatan pembelian tenaga listrik ini juga dipengaruhi oleh depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD turut mempengaruhi beban pembelian energi dari IPP dikarenakan kurang lebih sebesar 50% dari jumlah beban pembelian tenaga listrik menggunakan mata uang asing;
- Kenaikan beban penyusutan aset tetap sebesar 4,54% menjadi Rp38,33 triliun pada tahun 2021 yang disebabkan oleh kenaikan nilai aset selama tahun berjalan;
- Kenaikan beban pemeliharaan sebesar 3,01% menjadi Rp22,60 triliun pada tahun 2021 yang terutama disebabkan adanya peningkatan jumlah aset tetap yang perlu dilakukan perawatan serta adanya penambahan pelanggan dan meningkatnya infrastruktur ketenagalistrikan. Peningkatan beban pemeliharaan ini secara khusus juga dikarenakan pada periode 2020 terdapat penundaan minor atas pemeliharaan seiring dengan merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia sehingga mempengaruhi operasional perusahaan di awal wabah;
- Kenaikan beban penyusutan aset hak guna sebesar 25,57% menjadi Rp3,11 triliun pada tahun 2021 yang disebabkan oleh penambahan nilai aset hak guna tidak sebanding dengan penambahan nilai penyusutan aset hak guna;

Operating Expenses

Along with the increase in PLN's sales, the Company's operating expenses increased by 7.35% to Rp323.12 trillion in 2021. The increase was due to:

- Increase in fuel and lubricant expenses by 36.65% to Rp118.42 trillion in 2021 which occurred in line with the increase in production activities;
- Increase in electricity purchase expenses by 32.05% to Rp103.55 trillion in 2021 due to an increase in electricity purchases from IPP from 97.2GWh to 106.5 GWh. This increase in electricity purchases was also influenced by the depreciation of the Rupiah against the USD. Fluctuations in the exchange rate of the Rupiah against the USD also affected the cost of purchasing energy from IPP because approximately 50% of the total cost of purchasing electricity used foreign currency;
- Increase in depreciation expense on fixed assets by 4.54% to Rp38.33 trillion in 2021 due to the increase in asset value during the year;
- Increase in maintenance expenses by 3.01% to Rp22.60 trillion in 2021, which mainly due to an increase in the number of fixed assets that needed maintenance as well as additional customers and an increase in electricity infrastructure. This increase in maintenance burden was specifically due to the fact that in the 2020 period there was a minor delay in maintenance in line with the outbreak of the COVID-19 outbreak in Indonesia, which affected the company's operations at the start of the outbreak;
- Increase in depreciation expense for right-of-use assets by 25.57% to Rp3.11 trillion in 2021 due to the increase in the value of right-of-use assets that is not proportional to the increase in depreciation value of right-of-use assets;

- Kenaikan beban kepegawaian sebesar 0,51% menjadi Rp25,09 triliun pada tahun 2021 merupakan peningkatan natura beban kepegawaian seiring dengan peningkatan berkala tahunan dalam rangka pembinaan karir pegawai;

- Kenaikan beban usaha lain-lain sebesar 0,66% menjadi Rp7,24 triliun pada tahun 2021 yang disebabkan oleh kenaikan beban amortisasi; dan
- Penurunan beban sewa sebesar 13,28% menjadi Rp4,77 triliun pada tahun 2021 yang disebabkan oleh penurunan beban yang berkaitan dengan sewa atas pembayaran variabel yang tidak termasuk dalam utang sewa serta penurunan beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek.

- Increase in staffing expenses by 0.51% to Rp25.09 trillion in 2021 was an increase in in-kind staffing expenses in line with annual periodic increases in the context of employee career development;

- Increase in other operating expenses by 0.66% to Rp7.24 trillion in 2021 due to an increase in amortization expenses; and
- Decrease in lease expenses by 13.28% to Rp4.77 trillion in 2021 due to a decrease in rental-related expenses for variable payments that were not included in the lease payable as well as a decrease in expenses related to short-term leases.

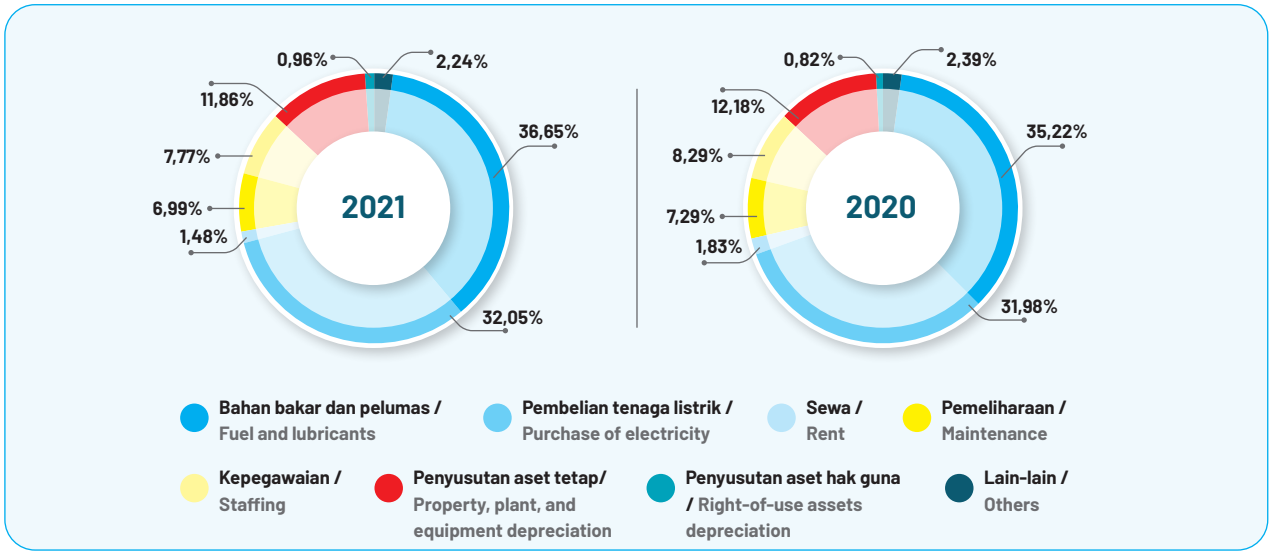

Kenaikan beban usaha PLN pada tahun 2021 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

The 2021 increase in PLN's operating expenses did not impact PLN's financial performance

Laba Usaha

Meskipun membukukan beban usaha yang lebih tinggi, laba usaha PLN tumbuh 1,46% menjadi Rp45,06 triliun pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya, laba usaha PLN mencapai Rp44,41 triliun. Hal ini terutama ditopang oleh kenaikan pendapatan Perseroan pada tahun 2021 yang mencapai Rp22,76 triliun.

Operating Profit

Despite posting higher operating expenses, PLN's operating profit grew by 1.46% to Rp45.06 trillion in 2021. In the previous year, PLN's operating profit amounted to Rp44.41 trillion. This was mainly supported by the increase in the Company's revenue in 2021 which reached Rp22.76 trillion.

Kenaikan laba usaha PLN pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu meningkatnya EBITDA.

The 2021 increase in PLN's operating profit impacted PLN's financial performance, namely on the increase in EBITDA.

(Beban)/Penghasilan Lain-lain – Bersih

Per 31 Desember 2021, PLN membukukan beban lain-lain – bersih sebesar Rp4,92 triliun, turun 356,74% dibandingkan dengan perolehan penghasilan lain-lain – bersih tahun 2020 sebesar Rp1,92 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak sebesar Rp4,52 triliun, penurunan nilai aset tetap sebesar Rp2,51 triliun, dan pengembalian kompensasi listrik berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp1,20 triliun.

Adanya beban lain-lain – bersih pada tahun 2021 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN,

Beban Keuangan

Beban keuangan PLN tercatat mengalami penurunan sebesar 25,68% dari tahun 2020 sebesar Rp27,42 triliun menjadi Rp20,38 triliun pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah utang berbunga karena PLN melakukan pelunasan utang lebih awal selama tahun 2021.

Penurunan beban keuangan PLN pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu penurunan BPP dari Rp1.348/kWh menjadi Rp1.333/kWh.

Laba Sebelum Pajak

Sejalan dengan kenaikan laba usaha PLN pada tahun 2021 tersebut yang dikombinasikan dengan adanya beban lain-lain – bersih senilai Rp4,92 triliun atau turun 356,74% dari tahun 2020, keuntungan kurs mata uang asing – bersih sebesar Rp2,68 triliun atau naik 134,57% dari tahun 2020, serta penurunan penghasilan keuangan dan beban keuangan masing-masing sebesar 30,06% dan 25,68% menjadi Rp787,23 miliar dan Rp20,38 triliun, laba sebelum pajak PLN tercatat naik sebesar 88,91% dari Rp12,29 triliun di tahun 2020 menjadi Rp23,22 triliun pada tahun 2021.

Kenaikan laba sebelum pajak PLN pada tahun 2021 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan PLN tahun 2021 mencapai Rp13,17 triliun pada tahun 2021. Pencapaian ini mengalami kenaikan signifikan hingga 119,82% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,99 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp13,13 triliun dengan pertumbuhan sebesar 120,62% dari tahun 2020.

(Expenses)/Other Income – net

As of December 31, 2021, PLN recorded other expenses – net of Rp4.92 trillion, a decrease of 356.74% compared to other income – net in 2020 of Rp1.92 trillion. This decrease was mainly due to the existence of reserves for uncertainty in tax treatment of Rp4.52 trillion, a decrease in the value of fixed assets of Rp2.51 trillion, and the return of electricity compensation based on the results of the BPK audit of Rp1.20 trillion.

Other expenses - net in 2021 did not impact PLN's financial performance

Financial Expenses

PLN's financial expenses were recorded to have decreased by 25.68% from Rp27.42 trillion in 2020 to Rp20.38 trillion in 2021. The decrease was mainly due to a decrease in the amount of interest-bearing debt because PLN paid off debt early during 2021.

The 2021 decrease in financial expenses impacted PLN's financial performance, namely a decrease in BPP from Rp1,348/kWh to Rp1,333/kWh.

Profit Before Tax

In line with the increase in PLN's operating profit in 2021 combined with expenses - net worth Rp.4.92 trillion, down 356.74% from 2020, foreign exchange gains - net of Rp. 2.68 trillion, an increase of 134 .57% from 2020, as well as a decrease in financial income and finance expenses by 30.06% and 25.68% respectively to Rp787.23 billion and Rp20.38 trillion, PLN's profit before tax recorded an increase of 88.91% from Rp12.29 trillion in 2020 to Rp23.22 trillion in 2021.

The 2021 increase in PLN's profit before tax did not impact PLN's financial performance

Profit for the Year

PLN's profit for the year amounted to Rp13.17 trillion in 2021. This achievement experienced a sharp increase by 119.82% compared to the previous year at Rp5.99 trillion. In line with this, the profit for the year attributable to the parent entity reached Rp13.13 trillion with a growth of 120.62% in 2020.

Kenaikan laba bersih PLN pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu meningkatnya rasio-rasio keuangan seperti ROI yang meningkat dari 6,59% menjadi 6,71%, ROA yang meningkat dari 0,38% menjadi 0,82%, ROE yang meningkat dari 0,64% menjadi 1,34%, dan Net Profit Margin yang meningkat dari 1,7% menjadi 3,6%.

The increase in PLN's net profit in 2021 impacted PLN's financial performance, namely the increase in financial ratios such as ROI which increased from 6.59% to 6.71%, ROA increased from 0.38% to 0.82%, ROE increased from 0.64% to 1.34%, and Net Profit Margin increased from 1.7% to 3.6%.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Ditopang dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yang mengalami kenaikan signifikan hingga 7.675,37% menjadi Rp24,01 triliun pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp308,77 miliar, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan mencapai Rp37,18 triliun pada tahun 2021. Pencapaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,30 triliun.

Comprehensive Profit for the Year

Supported by other comprehensive income for the year after tax which experienced a significant increase of up to 7,675.37% to Rp24.01 trillion in 2021 compared to the previous year of Rp308.77 billion, total comprehensive income for the year reached Rp37.18 trillion in 2021. This achievement was much higher than the previous year of Rp6.30 trillion.

Kenaikan laba komprehensif bersih PLN pada tahun 2021 berdampak terhadap kinerja keuangan PLN, yaitu meningkatnya laba per saham dasar/dilusian dari Rp48.439 menjadi Rp96.972.

The 2021 increase in PLN's comprehensive income for the year impacted PLN's financial performance, namely on the increase in basic/diluted earnings per share from Rp48,439 to Rp96,972.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(In Millions of Rupiah)

Laporan Arus Kas / *Statements of Cash Flows*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi / Net cash provided by operating activities	68.621.074	91.609.951	(22.988.877)	(25,09%)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi / Net cash used in investing activities	(59.552.028)	(69.015.717)	9.463.689	(13,71%)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan / Net cash for financing activities	(25.880.660)	(14.619.905)	(11.260.755)	77,02%
(Penurunan)/Kenaikan bersih kas dan setara kas / Net (decrease) increase in cash and cash equivalents	(16.811.614)	7.974.329	(24.785.943)	(310,82%)
Kas dan setara kas awal tahun / Cash and cash equivalents at beginning of the year	54.735.434	46.598.783	8.136.651	17,46%
Kas dan setara kas akhir tahun / Cash and cash equivalents at end of the year	37.968.399	54.735.434	(16.767.035)	(30,63%)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

PLN membukukan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp68,62 triliun, turun sebesar 25,09% dari tahun sebelumnya sebesar Rp91,61 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan kompensasi sebesar 60,59% serta kenaikan pembayaran surat ketetapan pajak dan pembayaran kas kepada pemasok masing-masing sebesar 2.904,25% dan 2,36%.

Cash Flows from Operating Activities

PLN recorded net cash obtained from operating activities of Rp68.62 trillion, a decrease of 25.09% from the previous year of Rp91.61 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in compensation receipts by 60.59% as well as an increase in payment of tax assessment letters and cash payments to suppliers by 2,904.25% and 2.36%, respectively.

Penurunan kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2021 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

The 2021 decrease in net cash from operating activities did not impact PLN's financial performance

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Secara kumulatif, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 mencapai Rp59,55 triliun, turun sebesar 13,71% dari tahun sebelumnya Rp69,02 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan atas perolehan aset tetap sebesar 14,74%.

Penurunan kas bersih untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

PLN membukukan kenaikan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 76,48% menjadi Rp25,88 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp14,66 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran dividen dan utang obligasi serta sukuk ijarah masing-masing sebesar 2.249,35% dan 118,33%.

Kenaikan kas bersih untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2021 tidak berdampak terhadap kinerja keuangan PLN.

Cash Flows from Investing Activities

Cumulatively, net cash used for investing activities in 2021 reached Rp59.55 trillion, a decrease of 13.71% from the previous year of Rp69.02 trillion. The decrease was mainly influenced by the decrease in acquisition of fixed assets by 14.74%.

The 2021 decrease in net cash for investing activities did not impact PLN's financial performance

Cash Flows for Financing Activities

PLN recorded an increase in net cash used for financing activities by 76.48% to Rp25.88 trillion from the previous year of Rp14.66 trillion. This was mainly influenced by the increase in dividend payments and bonds payable and sukuk ijara by 2,249.35% and 118.33%, respectively.

The 2021 increase in net cash used in financing activities did not impact PLN's financial performance

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTABILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

	2021	2020
Rasio Solvabilitas (%) / *Solvency Ratio (%)*		
Total Liabilitas terhadap Aset / Debt to Asset Ratio	39,15	40,86
Total Liabilitas terhadap Ekuitas / Liability to Equity Ratio	64,34	69,08
Debt to equity ratio	42,71	47,95
EBITDA to interest expense	437,6	316,2
Rasio Likuiditas (%) / *Liquidity Ratio (%)*		
Rasio Lancar / Current Ratio	58,63	64,95
Rasio Kas / Cash Ratio	26,11	36,83
Rasio Rentabilitas (x) / *Profitability Ratio (x)*		
Rasio Laba terhadap Ekuitas / Return on Equity	1,34	0,64
Rasio Laba terhadap Aset / Return on Assets	0,82	0,38
Rasio Profitabilitas (%) / *Profitability Ratio (%)*		
Margin Laba Kotor / Gross Profit Margin	12,24	12,86
Margin Laba Bersih / Net Profit Margin	3,58	1,74
EBITDA Margin	24,22	25,10
Rasio Operasional (x) / *Operational Ratio (x)*		
Perputaran Piutang Usaha / Receivables Turnover	12,82	11,85
Collection Period (Hari) / Collection Period (days)	28,48	30,89
Perputaran Aset Tetap / Fixed Asset Turnover	0,20	0,19

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang dapat diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Penjelasan atas kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi (liabilitas jangka pendek). Rasio likuditas yang digunakan untuk menganalisa adalah Rasio Lancar dan Rasio Kas. Rasio lancar di tahun 2021 tercatat sebesar 58,63%, lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 64,98%. Sementara itu, rasio kas di tahun 2021 tercatat sebesar 26,11%, lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 36,83%. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan yang terjadi pada tahun buku.

Rasio Solvabilitas

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi segala kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila Perseroan akan dilikuidasi diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas. PLN membukukan rasio Liabilitas terhadap Ekuitas dan Liabilitas terhadap Aset masing-masing sebesar 64,34% dan 39,15%, lebih rendah dari 69,07% dan 40,85% pada tahun 2020. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan liabilitas yang terjadi pada tahun buku.

Rasio Kolektibilitas Piutang

Kolektibilitas piutang usaha PLN mengalami penguatan pada tahun 2021 dengan jumlah hari perputaran piutang usaha di tahun 2021 mencapai 28,48 hari di tahun 2021, lebih singkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat selama 30,89 hari. Sejalan dengan profil kolektabilitas tersebut, rasio perputaran piutang usaha PLN adalah sebesar 12,82x di tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan 11,85x di tahun sebelumnya.

SOLVENCY

The Company's ability to repay its liabilities can be measured through the liquidity ratio and solvency ratio. The explanation of the two ratios is as follows:

Liquidity Ratio

The liquidity ratio reflects the Company's ability to pay off all obligations that must be fulfilled immediately (current liabilities). The liquidity ratio used to analyze is the Current Ratio and Cash Ratio. The current ratio in 2021 was recorded at 58.63%, lower than 2020 at 64.98%. Meanwhile, the cash ratio in 2021 was recorded at 26.11%, lower than 2020 at 36.83%. The decrease was in line with the decrease in cash and cash equivalents that occurred during the fiscal year.

Solvency Ratio

The Company's ability to fulfill all of its obligations both in the short and long term if the Company is to be liquidated is measured using the solvency ratio. PLN recorded the Debt to Equity ratio and Debt to Assets ratio of 64.34% and 39.15%, respectively, lower than 69.07% and 40.85% in 2020. The decrease was in line with the decrease in liabilities that occurred in fiscal year.

Receivable Collectability Ratio

The receivables collectability of PLN strengthened in 2021 with the number of trade receivables turnover days in 2021 reaching 28.48 days in 2021, longer than 2020 which was recorded at 30.89 days. In line with the collectability profile, PLN's trade receivables turnover ratio is 12.82x in 2021, higher than 11.85x in the previous year.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL SERTA DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN

PLN mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal PLN terdiri dari pinjaman yang merupakan akumulasi dari penerusan pinjaman, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non-

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY OF CAPITAL STRUCTURE AND THE BASIS OF POLICY DETERMINATION

PLN manages capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with capital adequacy ratio limits. PLN's capital structure consists of loans which are the accumulation of two-step loans, government and non-bank government financial institution loans, lease liabilites, bank loans, bonds payable,

bank, utang sewa, utang bank, utang obligasi, sukuk ijarah, dan Kredit Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK – EBA), dan utang listrik swasta, serta ekuitas pemegang saham induk yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba, dan tambahan modal disetor.

sukuk ijara, and Collective Investment Credit – Asset Backed Securities (KIK – EBA), and private electricity debt, as well as the equity of the parent shareholders consisting of issued capital, retained earnings, and additional paid-in capital.

(Dalam Jutaan Rupiah) (In millions of rupiah)

Struktur Modal / *Capital Structure*	2021	2020	Perubahan / *Change*	
			Nominal	%
Pinjaman / Loans				
Penerusan pinjaman / Two-step loans	34.699.205	38.534.971	(3.835.766)	(9,95%)
Utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non-bank / Government and non-bank Government financial institution loans	3.686.177	4.399.146	(712.969)	(16,21%)
Utang sewa / Lease liabilites	15.041.943	18.486.303	(3.444.360)	(18,63%)
Utang bank / Bank loans	165.886.409	173.306.708	(7.420.299)	(4,28%)
Utang obligasi, sukuk ijarah, dan KIK – EBA / Bonds payable and sukuk ijara, and KIK - EBA	193.724.613	209.347.257	(15.622.644)	(7,46%)
Utang listrik swasta / Electricity purchase payables	6.168.756	6.525.831	(357.075)	(5,47%)
Jumlah Pinjaman / Total Loans	**419.207.103**	**450.600.216**	**(31.393.113)**	**(6,97%)**
Ekuitas Pemegang Saham Induk / Equity Attributable to the Owners of the Parent				
Modal yang ditempatkan / Capital stock	145.536.096	135.342.182	118.704	0,09%
Saldo laba / Retained earnings	149.619.244	136.585.580	13.033.664	9,54%
Tambahan modal disetor / Additional paid in capital	34.608	5.216.571	(5.181.963)	(99,34%)
Jumlah Ekuitas Pemegang Saham Induk / Total Equity Attributable to the Owners of the Parent	295.189.948	277.144.333	7.970.405	2,88%
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio	1,42x	1,63x	0,21	12,88%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Pada tahun 2021, rasio pinjaman terhadap ekuitas Perusahaan tercatat sebesar 1,42x, lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 1,63x.

PLN berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan PLN dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

Management Policy on Capital Structure

The Company's loan limit requires, among other things, the fulfillment of a loan to equity ratio and a capital adequacy ratio. Management regularly monitors these requirements to ensure that there are no violations of the Company's loan limits.

In 2021, the Company's loan to equity ratio was recorded at 1.42x, lower than 2020 at 1.63x.

PLN strives to minimize borrowing costs so as to maximize the value of the Company. Therefore, PLN's policy of seeking funding through debt always takes into account the financial risks that may arise in the future.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan PLN. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan, seperti risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Basis for the Determination of Management Policy on Capital Structure

The Company's Board of Directors periodically reviews PLN's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks, such as market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Ikatan pengadaan untuk investasi barang modal dilakukan pada saat berlangsungnya pembangunan proyek, umumnya dilakukan sebelum atau sebagai bagian dari tahap *engineering*, *procurement*, and *construction* (EPC). Sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PLN melakukan ikatan material untuk pengerjaan Program Percepatan dan Konstruksi Rutin, dengan uraian sebagai berikut:

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Procurement commitments for capital goods investment are carried out during project development, generally before or as part of the engineering, procurement, and construction (EPC) phase. Until the period ended December 31, 2021, PLN has made material commitments for the Acceleration and Routine Construction Program, with the following description:

Uraian / *Description*	Mata Uang yang Menjadi Denominasi / *Value in Foreign Currency (Full Value)*	Nilai dalam Mata Uang Asing (Nilai Penuh) / *Converted to Rupiah (in millions of Rupiah)*	Konversi ke Rupiah (dalam Jutaan Rupiah) / *Converted to Rupiah (in millions of Rupiah)*
Program Percepatan / Fast Track Program			
1. Kontrak pembangkitan / Power plant contracts	USD	45.929.500	655.368
	Rupiah	-	1.301.947
2. Kontrak transmisi / Transmission contract	Rupiah	-	121.795
Kontrak Konstruksi Rutin / Regular construction contract	USD	817.364.382	11.662.976
	EUR	234.869.272	3.787.699
	JPY	22.542.890.164	2.792.834
	NZD	542.100	5.274
	Rupiah	-	35.407.623
	Lain-lain* / Others*	-	12
Jumlah / Total			**53.656.418**

*) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) Acquisition of capital goods in other foreign currencies is presented in an amount equivalent to USD using the exchange rate at the reporting date

Tujuan Ikatan Material Investasi Barang Modal

Kontrak pembangkitan merupakan kontrak yang dilakukan PLN untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa – Bali, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009. Sedangkan untuk kontrak transmisi bertujuan untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa.

Objective of Capital Goods Investment Material Bond

The power plant contract is a contract made by PLN to build coal-fired power plants in 42 locations in Indonesia, including 10 power plants with a total capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with a total capacity of 2,769 MW outside Java - Bali, as mandated in Regulation of President of the Republic of Indonesia No. 71 of 2006 dated July 5, 2006 which was later amended through Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009. Meanwhile, the transmission contract aims to upgrade and build new transmission lines and substations in Java and outside Java.

Di sisi lain, ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi.

On the other hand, capital goods procurement commitments for routine construction are contracts that have been signed for additional power generation and development of transmission and distribution networks.

Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan untuk mendanai ikatan untuk investasi barang modal berasal dari fasilitas pinjaman dari beberapa bank, hasil penerbitan Obligasi Terjamin, dan alokasi dana *capital expenditure* (capex) Perusahaan. Selain itu, PLN juga memperoleh pinjaman dari luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara untuk mendukung pendanaan pengerjaan konstruksi rutin.

Source of Funds

Sources of funds used to fund commitments for capital goods investment come from loan facilities from several banks, proceeds from the issuance of Guaranteed Bonds, and the allocation of the Company's capital expenditure (capex) funds. In addition, PLN also obtains loans from abroad, assistance and investment projects as part of the state budget to support funding for routine construction works.

Mata Uang Yang Menjadi Denominasi dan Mitigasi Risiko Mata Uang Asing

Selain mata uang rupiah, kontrak juga dapat menggunakan mata uang asing (USD, EUR, NZD, JPY). Perseroan telah melakukan transaksi lindung nilai terhadap beberapa eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya sejak tahun 2015 untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Denominations and Exchange Rate Risk Mitigation

Apart from rupiah, contracts can also be made in foreign currencies (USD, EUR, NZD, JPY). The Company has conducted hedging transactions against several bond and contingency exposures in its foreign currency since 2015 to mitigate the risk of fluctuations in foreign exchange rates.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya.

In relation to financial risk, the Company has established a management policy to carry out hedging transactions. As one of the state-owned enterprises, the management policy that has been approved is very important so that there are no issues during the implementation of hedge accounting. All derivative instruments are recorded in the consolidated statement of financial position based on their fair values.

Transaksi lindung nilai tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan teknis pelaksanaan terkait.

The hedging transaction is carried out in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No: 09/MBU/2013 on General Policy on Hedging Transactions of State-Owned Enterprises, along with the related technical implementing regulations.

Selain itu, untuk memitigasi risiko mata uang asing, Perusahaan telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Perusahaan kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat

In addition, to mitigate foreign currency risk, the Company has held discussions with Bank Indonesia to obtain a comprehensive understanding of market conditions. The Company will then factor in market conditions into their internal financial projections and develop mutually agreed strategies to mitigate foreign currency risk exposure by purchasing the required foreign currency instruments at the right time. The total net foreign currency exposure for the

yang tepat. Adapun jumlah eksposur mata uang asing bersih pada periode tahun 2021 telah diungkapkan dalam Catatan 53 dalam Laporan Keuangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

period 2021 has been disclosed in Note 53 to the Financial Statements which is an integral part of this Annual Report.

PLN juga melakukan analisis sensivitas mata uang asing untuk mengetahui setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing. Adapun rincian sensivitas mata uang asing pada periode tahun 2021 telah diungkapkan dalam Catatan 56.c dalam Laporan Keuangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

PLN also conducts foreign currency sensitivity analysis to find out every 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currency. Increases and decreases of 10% represent management's assessment of rational changes in exchange rates taking into account current economic conditions. This sensitivity analysis includes after-tax monetary item balances denominated in foreign currencies and adjusts for translation at year-end for 10% changes in foreign exchange rates. The details of foreign currency sensitivity for the period 2021 have been disclosed in Note 56.c to the Financial Statements which is an integral part of this Annual Report.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal

Perseroan secara rutin melakukan investasi berupa aset tetap. Secara kumulatif, total investasi barang modal Perseroan mencapai Rp48,39 triliun pada tahun 2021 dengan merujuk kepada penambahan aset tetap PLN sebagaimana yang tercantum pada catatan no. 6 tentang aset tetap dari laporan keuangan audit PLN sebagai bagian dari laporan tahunan ini.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Type, Purpose, and Value of Capital Goods Investment

The Company regularly invests in the form of fixed assets. Cumulatively, the Company's total investment in capital goods reached Rp48.39 trillion in 2021 with reference to the addition of PLN's fixed assets as stated in note No. 6 regarding fixed assets from PLN's audited financial statements as and integral part of this annual report.

Jenis Investasi Barang Modal / *Type of Capital Goods Investment*	2021	Tujuan / *Purpose*
Tanah dan hak atas tanah / Land and land rights	54.259	
Bangunan umum, waduk dan prasarana / Buildings, reservoirs, and infrastructure	170.390	Program investasi yang dijalankan pada tahun 2021 antara lain bertujuan untuk: / The investment program implemented in 2021, among others, aimed to: • memenuhi kebutuhan kapasitas dan energi listrik dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara *least-cost*, / meet the needs of capacity and electrical energy with the desired level of reliability at least-cost, • mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik yang terjadi pada beberapa daerah, / overcome the shortage of electricity supply that occurs in some areas, • menurunkan harga pasokan energi primer baik gas alam dan batubara, / lower the price of primary energy supply both natural gas and coal, • meningkatkan rasio pembangkit EBT seperti energi panas bumi, air dan surya, e) mencapai target rasio elektrifikasi, dan / increase the ratio of NRE generators such as geothermal, hydro and solar energy, e) achieving the electrification ratio target, and

Jenis Investasi Barang Modal / *Type of Capital Goods Investment*	2021	Tujuan / *Purpose*
Instalasi dan mesin pembangkit / Installations and power plants	659.128	• mewujudkan keandalan dan kualitas listrik yang makin membaik sehingga tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi. / realize the reliability and quality of electricity that is getting better so that electric power can be a catalyst for economic activity.
Perlengkapan transmisi / Transmission equipment	86.471	
Perlengkapan distribusi / Distribution equipment	93.123	
Perlengkapan umum / General equipment	230.661	
Kendaraan bermotor / Motor vehicles	45.457	
Material cadang / Spare parts	29.766	
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi / Telecommunications and data processing equipment	20.142	
Perlengkapan pengolahan - *Others telecommunication and data* data dan telekomunikasi lainnya / Other telecommunications and data processing equipment	1.751	
Kapal dan perlengkapan / Vessels and equipment	83.649	
Sub-jumlah / Sub-total	**1.474.797**	
Pekerjaan dalam pelaksanaan / Construction in progress	46.917.138	
Jumlah penambahan aset tetap / Total fixed asset addition	**48.391.935**	

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

(i) Berdasarkan surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-2/MBU/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 telah disetujui:
- Memberhentikan dengan hormat Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PT PLN (Persero);
- Mengangkat Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer PT PLN (Persero).

(ii) Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-106MBU/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 10.075.210 saham dengan nilai Rp10.075.210 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp145.536.096. Atas persetujuan Penyertaan Modal Negara tersebut, maka penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

(iii) Berdasarkan surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 telah disetujui:
- Memberhentikan dengan hormat Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PT PLN (Persero);
- Mengangkat Tedi Bharata sebagai Komisaris PT PLN (Persero).

MATERIAL FACTS AND INFORMATION SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

(i) Based on letter of the Minister of SOEs No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6, 2022, the following have been approved:
- Honourably discharged Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy of PT PLN (Persero);
- Appointed Hartanto Wibowo to become Director of Primary Energy of PT PLN (Persero).

(ii) Based on the letter of the Minister of SOEs No. S-106/MBU/02/2022 dated February 14, 2022 the decision of Minister of SOEs as the GMS approved additional Government equity participation of 10,075,210 shares for a value of Rp10,075,210, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp145,536,096. Following the approval of the Government Participation, the stock subscription from Government in issuance process has therefore been reclassified to subscribed and paid-up capital.

(iii) Based on letter of the Minister of SOEs No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022, the followings have been approved:
- Honourably discharged Ardan Adiperdana as Commissioner of PT PLN (Persero);
- Appointed Tedi Bharata to become Commissioner of PT PLN (Persero).

(iv) Penandatanganan perjanjian pinjaman baru pada tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank DKI sebesar Rp500.000.000.000 untuk fasilitas kredit modal kerja, jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan. Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp500.000.000.000.

Pada tanggal 21 Februari 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pembiayaan musyarakah dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk fasilitas kredit modal kerja dan tujuan korporasi umum, jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan. Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000.000.000.

Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pembiayaan Musyarakah dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk fasilitas kredit modal kerja dan tujuan korporasi umum, jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan.

Pada tanggal 6 April 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan MUFG Bank sebesar Rp1.000.000.000.000 jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun sejak tanggal perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari kreditur. Tujuan perjanjian ini untuk fasilitas kredit modal kerja dan tujuan korporasi umum sehubungan dengan Proyek Pembangkitan Listrik, dengan ketentuan bahwa tidak satu pun dari hasil fasilitas kredit akan dipergunakan untuk tujuan apa pun dalam bentuk yang berhubungan dengan batubara. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan.

(iv) Signing of new loan agreements on March 28, 2022, the Company entered into a loan agreement with Bank DKI amounting to Rp500,000,000,000 for working capital facilities, the term of the credit facility is 12 months from the signing of the agreement. This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurred. In 2022, the Company has made drawdown amounting to Rp500,000,000,000.

On February 21, 2022, the Company entered into a musyarakah financing agreement with PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk amounting to Rp1,000,000,000,000 for working capital facilities and general corporate purposes, the term of the agreement is 12 months from the signing of the agreement.

This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurs. In 2022, the Company has made drawdown amounting to Rp1,000,000,000,000.

On March 14, 2022, the Company entered into a Musyarakah financing agreement with PT Bank Maybank Indonesia, Tbk amounting to Rp1,000,000,000,000 for working capital facilities and general corporate purposes, the term of the agreement is 12 months from the signing of the agreement. This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurs.

On April 6, 2022, the Company entered into a loan agreement with MUFG Bank amounting to Rp1,000,000,000,000. The term of the agreement is one year from the date of the agreement and can be extended with the approval from the lender. The purpose of this agreement is for working capital facilities and general corporate purposes in relation with the Power Generation Project, provided that none of the proceeds of the credit facility will be used for any purpose in the form of coal-related. This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurred.

Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Penerusan Pinjaman dengan Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD380.000.000 (nilai penuh) dari International Bank for Reconstruction and Development Loan Agreement Nomor 9278-ID terkait dengan pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project dengan jangka waktu pinjaman adalah paling lama 24 tahun dan 6 bulan termasuk masa tenggang 9 tahun. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan ditambah *variable credit spread*.

On March 14, 2022, the Company entered into a twostep loan agreement with the Government of the Republic of Indonesia amounting to USD380,000,000 (full amount) from the International Bank for Reconstruction and Development Loan Agreement Number 9278-ID in relation with financing the Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project, with a maximum term of 24 years and 6 months including a grace period of 9 years. This loan bears interest rate in accordance with loan reference rate plus variable credit spread.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2021 SERTA PROYEKSI 2022

COMPARISON BETWEEN THE TARGET AND REALIZATION OF 2021 AND THE PROJECTION OF 2022

Keterangan / *Description*	Satuan / *Unit*	RKAP 2021 / *2021 RKAP*	Realisasi / *Realization*	Proyeksi 2022 / *Projection for 2022*
Keuangan / Finance				
Aset Tidak Lancar / Non-current Assets	(Jutaan Rupiah / Millions of Rupiah)	1.527.305.081	96,95%	1.635.992.094
Aset Lancar / Current Assets		85.911.375	99,73%	83.911.144
Total Aset / Total Assets		1.613.216.456	94,75%	1.719.903.238
Jumlah Ekuitas / Total Equity		981.607.123	97,08%	1.021.727.949
Liabilitas Jangka Panjang / Non-current Liabilities		485.070.853	95,80%	540.202.024
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities		146.538.480	79,15%	157.973.264
Pendapatan Usaha / Revenue		368.174.270	99,60%	414.733.233
Biaya Usaha / Operating Expense		323.119.125	98,23%	382.250.842
Laba Usaha / Operating Profit		45.055.145	110,63%	32.482.391
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year		13.174.877	116,07%	6.432.963
Produksi dan Penjualan / Production and Sales				
GWh Loko Sentral (*Bruto Production*)	GWh	284.799	289.471	300.035
GWh Penjualan Tenaga Listrik / Electricity Sales GWh	GWh	249.000	257.634	263.012
Susut Jaringan / Network Losses	%	8,95	8,59	8,91

Kebijakan Dividen Tahun 2022

Dividen Tahun 2022 kepada Pemegang Saham diusulkan sebesar Rp500 miliar dengan pertimbangan perseroan memerlukan investasi yang besar di mana salah satu sumbernya berasal dari laba operasi Perusahaan. Dalam rangka menyelesaikan program pembangunan infrastruktur kelistrikan (pembangkit, transmisi dan gardu induk), Perusahaan perlu menjaga pemenuhan *covenant* sehubungan dengan penerbitan (obligasi) di tahun-tahun sebelumnya.

Dividend Policy for 2022

The proposed 2022 dividend to shareholders is Rp500 billion with the consideration that the company requires a large investment, one of which comes from the Company's operating profit. In order to complete the electricity infrastructure development program (generation, transmission, and substation), the Company needs to maintain compliance with covenants related to issuance (bonds) in previous years.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Ekonomi Indonesia ditutup menguat di kuartal IV tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,02% *yoy* sehingga memperkuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menjadi 3,69% yoy. Pertumbuhan PDB tahun 2021 tersebut jauh lebih baik dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07% pada tahun 2020. Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tersebut, Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,5% pada tahun 2022. Di tengah kondisi pandemi yang masih berlanjut hingga laporan tahunan ini disusun, Perseroan memiliki program kerja khususnya terkait operasional untuk merespons perbaikan ekonomi di tahun mendatang yang diperkirakan akan memicu permintaan listrik yang lebih tinggi. Adapun program kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Penjualan Tenaga Listrik
  Dampak Pandemi Covid-19 pada konsumsi sektor energi masih dirasakan di Tahun 2022. Penjualan Tenaga Listrik tahun 2022 ditargetkan sebesar 263,0 TWh, terdiri dari penjualan (1) Anak Perusahaan dalam hal ini adalah penjualan PT PLN Batam (Persero) sebesar 2,6 TWh; (2) Regional Sumatera Kalimantan sebesar 54,3 TWh; (3) Regional Jawa, Madura, dan Bali sebesar 186,5 TWh; dan (4) Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar 19,7 TWh.
- Penyambungan Pelanggan dan Penambahan Daya Tersambung
  Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan penjualan tenaga listrik, PLN menargetkan penyambungan kepada 3,2 juta pelanggan dengan kapasitas daya penyambungan sebesar 7.122 MVA,
- Kegiatan Usaha Lainnya
  Selain penjualan tenaga listrik, PLN juga melakukan kegiatan usaha lainnya. Kegiatan ini sebagian besar dilakukan oleh Anak Perusahaan PLN yaitu PT ICON+, PT PLN BB, PT HPI, PT EMI, dan PT MCTN. Kegiatan usaha dilakukan dalam bentuk penjualan jasa telekomunikasi dan jaringan data ke masyarakat umum. Dalam usaha bisnis ini, PT ICON+ bersaing dengan beberapa Perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Indonesia. Di samping itu, kegiatan usaha lainnya juga berkaitan dengan perubahan daya tersambung, sewa transformator, komersialisasi aset properti dan jasa lainnya.

BUSINESS OUTLOOK

The Indonesian economy strengthened in the fourth quarter of 2021 with growth of 5.02% yoy, thus strengthening Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) growth to 3.69% yoy. GDP growth in 2021 was much better than the economic growth contraction by 2.07% in 2020. In line with the improvement of economic growth in 2021, the Government of Indonesia estimated economic growth at 5.0-5.5% in 2022. Despite the ongoing pandemic conditions until this annual report was prepared, the Company has a work program specifically related to operations to respond to economic improvements in the coming year which are expected to trigger higher electricity demand. The work program in question is as follows:

- Sale of Electricity
  The impact of the Covid-19 Pandemic on the consumption of the energy sector will still be felt in 2022. Sale of Electricity in 2022 is targeted at 263.0 TWh, consisting of sales of (1) Subsidiary, in this case the sales of PT PLN Batam (Persero) of 2.6 TWh; (2) Sumatra and Kalimantan Region of 54.3 TWh; (3) Java, Madura, and Bali Region of 186.5 TWh; and (4) Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara Region of 19.7 TWh.
- Customers Connection Fees and Connected Power Addition
  In order to support the increase in electricity sales revenue, PLN is targeting connection to 3.2 million customers with the connecting power capacity of 7,122 MVA,
- Other Business Activities
  Other than selling electricity, PLN also carries out other business activities. These activities are mostly carried out by PLN's subsidiaries, namely PT ICON+, PT PLN BB, PT HPI, PT EMI, and PT MCTN. Business activities are carried out in the form of selling telecommunications services and data networks to the public. In this business venture, PT ICON+ competes with several other companies operating in Indonesia. In addition, other business activities are also related to changes in connected power, transformer rental, commercialization of property assets and other services.

Di sisi lain, sebagai perusahaan penyedia Tenaga Listrik, merencanakan produksi tenaga listrik tentunya merupakan menjadi tahapan yang krusial di PT PLN (Persero). Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyeimbangkan produksi energi tenaga listrik di masing-masing pembangkit agar sesuai dengan kebutuhan beban tenaga listrik konsumen di setiap waktu secara handal. Selain itu, dalam struktur BPP tenaga listrik, biaya produksi tenaga listrik yang biasa disebut dengan biaya pembangkitan ini mempunyai porsi hingga 80% dari total BPP, di mana 70% di dalamnya didominasi oleh biaya energi primer.

On the other hand, as a power supply company, planning for electricity production is a crucial stage in PT PLN (Persero). The biggest challenge is how to balance the production of electrical energy in each power plant in order to reliably match the needs of the consumer's electrical power load at any time. Furthermore, in the electricity BPP structure, the cost of electricity production, which is commonly referred to as the generation cost, has a portion of up to 80% of the total BPP, of which 70% is dominated by primary energy costs.

Efisiensi di sisi perencanaan produksi tenaga listrik ini tentunya akan sangat berdampak pada efisiensi BPP korporasi secara keseluruhan. Untuk itu, agar diperoleh proses produksi tenaga listrik yang handal dan efisien, diperlukan suatu perencanaan produksi yang baik dengan mempertimbangkan karakteristik di masing-masing sistem ketenagalistrikan. Perencanaan produksi tenaga listrik ditentukan dari rencana penjualan tenaga listrik menggunakan metode analisa *input-output* energi yang dituangkan dalam diagram Neraca Energi sebagai berikut:

Efficiency in terms of electricity production planning will certainly have a major impact on the overall efficiency of corporate BPP. For this reason, in order to obtain a reliable and efficient electric power production process, a good production plan is required by considering the characteristics of each electricity system. Electric power production planning is determined from the electricity sales plan using the energy input-output analysis method as outlined in the Energy Balance diagram as follows:

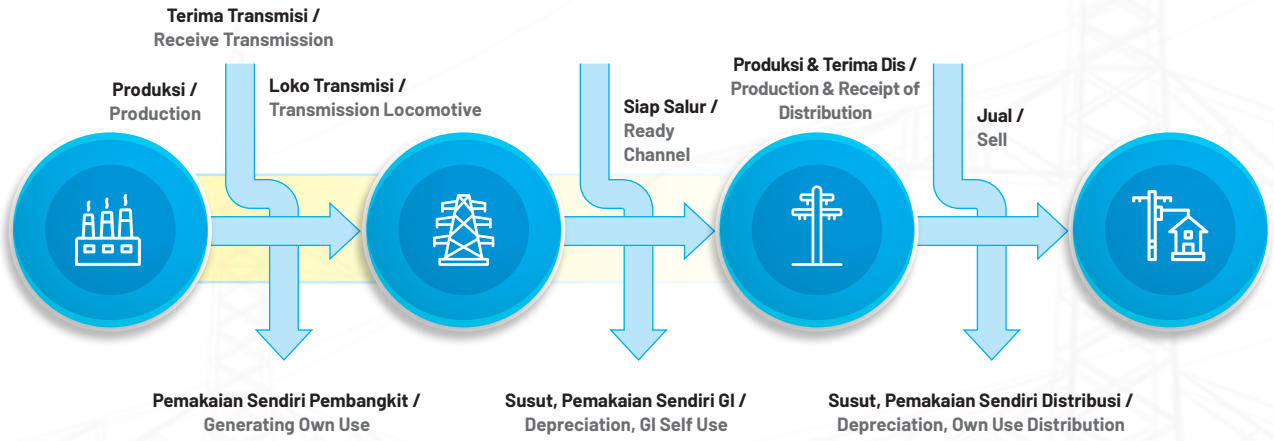

Selain itu, PLN berkomitmen untuk melakukan investasi ketenagalistrikan dengan target fisik program investasi di tahun mendatang berupa:

1. Program investasi distribusi menargetkan sambungan baru/penambahan pelanggan sebanyak 3,24 juta pelanggan atau setara 7.122 MVA daya tersambung yang dilayani dengan penambahan kapasitas trafo distribusi sebesar 2.952 MVA, penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 24,97 ribu kms dan penambahan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 18,08 ribu kms.

In addition, PLN is committed to investing in electricity with physical targets for investment programs in the coming year in the form of:

1. The distribution investment program targets 3.24 million new connections/customer additions or the equivalent of 7,122 MVA of connected power served with the addition of distribution transformer capacity of 2,952 MVA, the addition of medium voltage network (JTM) of 24.97 thousand kms and the addition of network low voltage (JTR) along 18.08 thousand kms.

2. Target fisik tersebut sudah termasuk program Listrik Pedesaan untuk peningkatan rasio elektrifikasi pada daerah yang belum memiliki akses listrik.
3. Program investasi transmisi yang direncanakan beroperasi dalam tahun 2022 adalah 4.537 kms serta rencana penambahan kapasitas gardu induk sebesar 4.930 MVA.
4. Menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik program 35 GW dengan target tambahan pembangkit di tahun 2022 sebesar 671 MW, serta pembangkit yang dibangun oleh IPP sebesar 8.182 MW.
5. Pemulihan dan peningkatan kapasitas aset pembangkit, transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi yang meliputi kegiatan *major overhaul*, rehabilitasi, *uprating*, dan perkuatan jaringan.

2. The physical target includes the Rural Electricity program to increase the electrification ratio in areas that do not yet have access to electricity.
3. The transmission investment program that is planned to operate in 2022 is 4,537 kms and the planned additional substation capacity is 4,930 MVA.
4. Completed the construction of a 35 GW power plant program with an additional target of 671 MW in 2022, and power plants built by IPP with the capacity of 8,182 MW.
5. Recovery and increase in capacity of generating assets, transmission, substations, and distribution networks which include major overhaul, rehabilitation, uprating, and network strengthening activities.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan berdasarkan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2021, maka ditetapkan 2 (dua) strategi pemasaran utama yaitu intensifikasi (strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik pada pelanggan eksisting dan mempertahankan pelanggan eksisting) dan ekstensifikasi (strategi yang ini bertujuan untuk meningkatkan kWh jual maupun pendapatan penjualan dengan melakukan penambahan pelanggan baru termasuk mengakuisi pelanggan yang memiliki *captive power* dan dedieselisasi).

Strategi intensifikasi terdiri dari:
1. Meningkatkan pemakaian pelanggan tanpa melakukan mutasi tambah daya (*regular* dan premium), migrasi premium, promo LWBP dan *electrifying lifestyle*.
2. Meningkatkan pemakaian pelanggan dengan menambah kapasitas daya tersambung (*regular* atau premium).
3. Meningkatkan pemakaian pelanggan melalui migrasi layanan *regular* ke premium.
4. Meningkatkan pemakaian pelanggan melalui promo LWBP.
5. Meningkatkan pemakaian pelanggan melalui perubahan gaya hidup menjadi *electrifying lifestyle*.

Strategi ekstensifikasi terdiri dari:
1. Meningkatkan penjualan melalui percepatan penyambungan baru pelanggan *regular* maupun premium sesuai dengan SLA penyambungan.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

To increase sales growth based on the targets that have been set in 2021, 2 (two) main marketing strategies have been set, namely intensification (this strategy aims to optimize the use of electrical energy for the existing customers and to retain the existing customers) and extensification (this strategy aims to increase kWh sold and sales revenue by adding new customers including acquiring customers with captive power and dedieselization).

The intensification strategy consists of:
1. Increasing customer usage without making power-added mutations (regular and premium), premium migration, LWBP promos and electrifying lifestyle.
2. Increasing customer usage by adding the connected power capacity (regular or premium).
3. Increasing customer usage through migration from regular to premium service.
4. Increasing customer usage through LWBP promos.
5. Increasing customer usage by changing their lifestyle to an electrifying lifestyle.

The extensification strategy consists of:
1. Increasing sales by accelerating new connections to regular and premium customers in accordance with the connection SLA.

2. Meningkatkan penjualan melalui akuisisi pelanggan yang memiliki *captive power* (akuisisi pelanggan *captive*, dedieselisasi dan pompanisasi).

Untuk merealisasikan strategi tersebut di atas perlu dilakukan program kerja seperti dibawah ini:

1. Internalisasi dan *awareness* kepada seluruh pegawai dan mitra PLN tentang kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) memperoleh pendapatan akibat keterlambatan penyalaan, baik keterlambatan di sisi teknis maupun administratif.
2. Membangun *Partnership Role*123 antara PLN dan *Key Account* (Pelanggan Kunci) sebagai berikut:
   a. GM membangun *partnership* dengan 10 pelanggan terbesar di Unit Induk;
   b. Manajer UP3 membangun *partnership* dengan minimal 20 pelanggan terbesar di Unitnya selain *partnership* pada poin 1;
   c. Manajer ULP membangun *partnership* dengan minimal 20 pelanggan terbesar di Unitnya selain *partnership* pada poin 1 dan 2.
3. Meningkatkan penjualan melalui dorongan pemakaian baru dengan cara sebagai berikut:
   a. Mendatangi pemakai listrik (industri, bangunan komersil) yang belum menggunakan listrik PLN, dan menawarkan dengan berbagai kemudahan agar listrik PLN sebagai sumber utama listrik konsumen;
   b. Mengalihkan pemakaian pemanas air gas menjadi pemanas air listrik;
   c. Mendorong lomba penggunaan listrik di bangunan publik untuk fasilitas publik sehingga menjadi bangunan yang bersih, sehat dan ramah lingkungan, misalnya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberi *award* bagi hotel/mall yang menggunakan *air dryer*, *exhaust fan*, kompor induksi, pemanas air dll;
   d. Mendorong regulasi daerah yang mengharuskan gedung komersil bertingkat menerangi gedung dengan lampu sorot yang menambah keindahan kota;
   e. Bekerja sama dengan pengembang perumahan, untuk menyediakan kompor induksi/listrik dan peralatan berbasis listrik lainnya di rumah-rumah, apartemen, atau bangunan kantor;
   f. Bekerja sama dengan warung kaki lima untuk memanfaatkan SPLU sebagai *charging station* dan keperluan bisnis lainnya (*cool case, juicer, coffee maker, electric cattle*, kompor induksi dll).

2. Increasing sales through the acquisition of customers who have captive power (acquisition of captive customers, dedieselization and pumping).

To realize the strategies above, it is necessary to carry out a work program as follows:

1. Internalization and development of awareness to all employees and partners of PLN about the opportunity loss in obtaining income due to delays in ignition, both technical and administrative delays.
2. Build Partnership Role123 between PLN and Key Accounts (Key Customers) as follows:
   a. GM establishes partnerships with the 10 largest customers in the Parent Unit;
   b. UP3 managers establishes partnerships with a minimum of 20 largest customers in their unit other than the partnership in point 1;
   c. The ULP Manager establishes partnerships with at least 20 of the largest customers in his unit apart from the partnerships in points 1 and 2.
3. Increase sales by encouraging new usage in the following ways:
   a. Visit electricity users (industrial, commercial buildings) who have not used PLN electricity, and offer various conveniences so that PLN electricity is the main source of consumer electricity;
   b. Switch the use of gas water heaters to electric water heaters;
   c. Encourage competitions to use electricity in public buildings for public facilities so that they become clean, healthy, and environmentally friendly buildings, such as collaborating with the Ministry of Environment to give awards to hotels/malls that use air dryers, exhaust fans, induction cookers, water heaters, etc.;
   d. Encourage local regulations that require high-rise commercial buildings to illuminate buildings with spotlights that add to the beauty of the city;
   e. Cooperate with housing developers, to provide induction/electric stoves and other electricity-based appliances in houses, apartments, or office buildings;
   f. Cooperate with street stalls to use SPLU as a charging station and other business needs (cool cases, juicers, coffee makers, electric cattle, induction cookers, etc.).

4. Bekerja sama dengan *stakeholder* untuk penambahan konsumsi energi listrik dengan melalui:
   a. Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk penyediaan es atau *freezer* bagi penampungan ikan nelayan, serta menciptakan usaha industri perikanan bagi nelayan (*Cold Storage*);
   b. Pemerintah Daerah untuk meningkatkan usaha kecil (UMKM), tambak udang, menambah penerangan jalan, pompa air, pemecah batu, penggilingan padi, dlll;
   c. Pengelola Pelabuhan untuk mengganti penggunaan listrik dari motor bakar di perahu maupun kapal, menjadi penggunaan listrik dari instalasi PLN, terutama saat kapal bersandar di pelabuhan (*shore-connection*);
   d. Kementerian/Dinas Pariwisata untuk pengembangan resort atau daerah-daerah wisata baru;
   e. *Event Organizer* pesta, penyewa jasa tenda pesta, pasar malam, untuk memakai listrik PLN dalam acaranya (misalnya AC *standing*, lampu terang benderang, *exhaust fan*, lemari pendingin untuk *coin box*, dll);
   f. Pengusaha makanan minuman ringan untuk memasang *cool-case* sebagai tempat memajang dan menjual makan/minuman panas atau dingin;
   g. Stasiun TV/Radio untuk menggunakan listrik PLN, dan bukan menggunakan genset.
5. Mendorong konsumen menggunakan peralatan listrik yang lebih banyak dalam mendukung aktivitas dengan melalui:
   a. Mengajak dan mengimbau pengembang Apartemen untuk langsung melengkapi unit apartemen dengan kelengkapan rumah tangga yang berbasis listrik. PLN dapat membantu dengan pemberian diskon biaya penyambungan baru.
   b. Mengampanyekan kenyamanan beraktivitas dengan penggunaan AC.
   c. Mendorong penggunaan dispenser untuk penyediaan air minum dingin dan panas di ruang kantor.
   d. Mendorong penggunaan *hot water boiler* di ruang rapat. *Boiler* jenis ini lebih cepat menyediakan air panas dibanding dispenser.
   e. Mendorong penyediaan *vending machine* untuk menjual makanan dan minuman panas/dingin.
   f. Mengampanyekan penggunaan *jet air dryer* dibanding kertas *tissue* untuk mengeringkan tangan.

4. Cooperate with stakeholders to increase the consumption of electrical energy through:
   a. Ministry of Marine Affairs and Fisheries to provide ice or freezer for fish storage, and create fishery industry business for fishermen (Cold Storage);
   b. Local government to increase small businesses (MSMEs), shrimp ponds, add street lighting, water pumps, stone crushers, rice mills, etc.;
   c. Port Manager to replace the use of electricity from motor fuels on boats and ships, to use electricity from PLN installations, especially when the ship is docked in the port (shore-connection);
   d. Ministry/Department of Tourism to develop new resorts or tourist areas;
   e. Party event organizers, party tent service tenants, night markets/bazaar, to use PLN electricity in the events (e.g. standing AC, bright lights, exhaust fans, refrigerators for coin boxes, etc.);
   f. Food and beverage entrepreneurs to install cool-cases as a place to display and sell hot or cold food/drinks;
   g. TV/Radio stations to use PLN electricity, and not using generators.
5. Encourage consumers to use more electrical equipment to support activities by:
   a. Inviting and urging apartment developers to immediately equip apartment units with electricity-based household equipment. PLN can help with discounting the cost of a new connection.
   b. Campaigning for comfortable activities with air conditioner usage control.
   c. Encouraging the use of dispensers to provide cold and hot drinking water in office spaces.
   d. Encouraging the use of hot water boilers in meeting rooms. This type of boiler provides hot water faster than the dispenser.
   e. Encouraging the provision of vending machines to sell hot/cold food and drinks.
   f. Campaigning for the use of a jet air dryer instead of tissue paper to dry hands.

g. Bekerja sama dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot atau asosiasi, untuk menyelenggarakan lomba menghias gedung dengan pencahayaan lampu pada malam hari.
h. PLN dapat membuat program paket listrik untuk pemakaian sementara pesta dengan persyaratan mudah, biaya murah, dan cepat saji, sehingga bila pemangku hajat membutuhkan listrik Pesta, akan terlayani dengan baik.

6. Melaksanakan akselerasi layanan pelanggan dan calon pelanggan potensial dengan upaya terobosan dalam percepatan nota kesepakatan, percepatan pembayaran dan percepatan penyalaan.
7. Proaktif menyampaikan informasi kesiapan kapasitas sistem dan produk layanan melalui dialog dengan setiap asosiasi (Besi Baja, Semen, Tekstil, Kimia, REI, APERSI, dll), perbankan dan segmen pelanggan, serta setiap instansi Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dll) minimal sekali per semester untuk menggali potensi pelanggan.
8. Melaksanakan promosi agresif secara *online* dan *offline* atas program promo PLN melalui kolaborasi dengan pemerintah, forum komunikasi, *buzzer* dan *stakeholder* lain. Beberapa strategi promosi agresif secara online Pemasaran produk-produk layanan melalui *digital marketing* meliputi:
   a. *Sms marketing*;
   b. *E-mail marketing*;
   c. *Search engine marketing* (*pay per click ads* (PPC Ads), *Search Engine Optimization* (SEO));
   d. *Social media marketing* (Facebook, Instagram, Twitter, dll);
   e. *Content marketing*;
   f. *Live sales* melalui Facebook & Instagram, memberikan peningkatan *follower* akun IG PLN yang signifikan, disamping itu dengan pemberian *voucher* dan *giveaway* berdampak pada *customer engagement* & citra positif terhadap PLN di media sosial dengan jumlah interaksi yang meningkat.
9. Memetakan pelanggan yang menggunakan *captive power* dan mendorong pengalihan kepada listrik PLN.
10. Mendorong tambah daya bagi pelanggan yang jam nyala minimumnya ≥ 400-600 jam.
11. Mendorong penggunaan listrik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM.

g. Cooperating with the Provincial Government/ Regency Government/City Government or associations, to organize competitions to decorate buildings with lighting at night.
h. PLN can make an electricity package program for the temporary use of a party with easy requirements, low cost, and fast response, so that if the stakeholders need electricity in a Party, they will be well served.

6. Accelerate services for customers and potential customers with breakthrough efforts to expedite agreement notes, expedite payments, and expedite ignition.
7. Proactively deliver information on the readiness of system capacity and service products through dialogue with each association (Steel, Cement, Textile, Chemical, REI, APERSI, etc.), banking and customer segments, as well as every local government agency (Governor, Regent/ Mayor, Bappeda, Department of Industry, Department of Energy and Mineral Resources, Department of Tourism, Department of Marine Affairs and Fisheries, etc.) at least once per semester to explore potential customers.
8. Carry out aggressive promotions online and offline for the PLN promo program through collaboration with the government, communication forums, buzzers and other stakeholders. Several aggressive online promotion strategies and marketing of service products through digital marketing includes:
   a. SMS marketing;
   b. e-mail marketing;
   c. Search engine marketing (pay per click ads (PPC Ads), Search Engine Optimization (SEO));
   d. Social media marketing (Facebook, Instagram, Twitter, etc.);
   e. Content marketing;
   f. Live sales through Facebook & Instagram, provide a significant increase in followers of PLN's IG account, in addition to giving vouchers and giveaways have an impact on customer engagement & a positive image of PLN on social media with an increased number of interactions.
9. Map customers using captive power and encourage transfer to PLN electricity.
10. Encourage additional power for customers whose minimum running hours are ≥ 400 hours-600 hours.
11. Encourage the use of electricity in the agricultural, plantation, fishery, livestock, and MSME sectors.

12. Mendorong budaya penggunaan peralatan listrik (*Electrifying lifestyle*) melalui:
    a. Memastikan kepemilikan dan penggunaan kompor induksi di seluruh pegawai PLN;
    b. Menggandeng pemerintah setempat sebagai wujud komitmen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat per kapita;
    c. Membuat *event* yang berhubungan dengan budaya penggunaan peralatan listrik.
13. Untuk menunjang kegiatan peningkatan penjualan dalam pencapaian target RKAP, maka dibutuhkan *supervisor* dan staf pemasaran di masing-masing ULP (Unit Layanan Pelanggan) yang menangani permasalahan penjualan dan pemasaran. Mulai dari me*monitoring* dan analisa evaluasi penjualan permasing-masing golongan tarif sampai per segmen pelanggan dan juga me*monitoring* kegiatan *probing* dari masing-masing tim KAM (*Key Account Marketing*) dan RAM (*Retail Account Marketing*) sampai dengan *closing*/pelanggan bayar biaya penyambungan dengan alokasi anggaran khusus untuk operasional KAM/PAE.
14. Memberikan insentif berupa *point reward* untuk setiap tenaga pemasar yang dapat melampaui target yang sudah ditetapkan.
15. Menggunakan *tool* dan sistem terpadu *Customer Relationship Management* (CRM) yang mampu membantu mengembangkan bisnis dan pemasaran PLN sesuai tuntutan *stakeholder* yang sudah terintegrasi dan dapat digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengendalikan prapenjualan dan kegiatan pasca penjualan dalam suatu organisasi, serta mampu melayani para pelanggan PLN masa kini dan mendatang yang semakin *demanding* (pelanggan 4.0) terutama di bidang *sales* (penjualan), *marketing* (pemasaran) maupun *service* (pelayanan pelanggan).
16. Melakukan pemasaran bersama produk-produk *bundling* yang sudah dikeluarkan dengan anak perusahaan (PLN SOLID).
17. Menjual produk listrik/kwh dengan partai besar pada listrik prabayar dengan melalui *main dealer* yang sudah bekerja sama dengan PLN untuk mendapatkan pendapatan lebih cepat.
18. Melakukan peran aktif dalam *probing* kepada pelanggan yang masuk ke dalam segmen *agriculture electrifiying* untuk menggunakan listrik yang bersumber dari PLN.
19. Penyelengaraan *marketing award* sebagai ajang kompetisi memicu kreativitas tenaga pemasaran yang ada di unit layanan.

12. Encourage a culture of using electrical appliances (Electrifying lifestyle) by:
    a. Ensuring ownership and use of induction cookers for all PLN employees;
    b. Cooperating with the local government as a form of commitment in improving the welfare of the people per capita;
    c. Organizing events related to the culture of using electrical equipment.
13. To support sales increase activities in achieving RKAP targets, supervisors and marketing staff are needed in each ULP (Customer Service Unit) that handles sales and marketing issues, starting from monitoring and analyzing sales evaluation for each tariff group to per customer segment and also monitoring the probing activities of each KAM (Key Account Marketing) and RAM (Retail Account Marketing) team until closing/customers pay the connection fee with the budget allocation specifically for KAM/PAE operations.
14. Provide incentives in the form of reward points for each marketer who can exceed the targets set.
15. Use an integrated Customer Relationship Management (CRM) tool and system that is able to help develop PLN's business and marketing according to the demands of stakeholders which have been integrated and can be used to plan, schedule, and control pre-sales and post-sales activities within an organization, as well as being able to serve the existing and future customers that are increasingly demanding (customers 4.0) especially in the fields of sales, marketing, and customer service.
16. Conduct joint marketing of bundling products that have been issued with subsidiaries (PLN SOLID).
17. Sell electricity/kwh products in bulk on prepaid electricity through main dealers who have collaborated with PLN to get faster income.
18. Take an active role in probing customers who enter the agriculture electrifying segment to use electricity sourced from PLN.
19. Organize marketing awards as a competition event that triggers the creativity of marketing personnel in the service unit.

20. Kemudahan pembelian token listrik melalui QR code.
21. Peningkatan Penjualan melalui *customer get customer* dengan menggunakan *referral code*.
22. Mendukung transformasi *outage management*, dalam hal ini memastikan Implementasi *Notification Management Scale Up* Implementasi *Reg Jamali Scale Up* Implementasi *Reg Sum – Kal* dan *Scale Up* Implementasi *Reg Sul* – MPNT.
23. Implementasi Integrasi ListriQu dengan *platform* CC PLN 123 dan integrasi platform lainnya.
24. Digitalisasi administrasi layanan penyambung dalam penerapan inovasi proses layanan pelanggan, percepatan proses layanan, *paperless* dan efisiensi reduksi biaya administrasi.
25. Implementasi standarisasi layanan *frontliner* dan *customer self service* di unit layanan.
26. Memperkuat platform sosial media CC PLN 123 dari sisi teknologi, konten layanan dan edukasi ke pelanggan, dan *telesales*.
27. Peningkatan *customer experience* melalui pengembangan layanan *omnichannel* PLN 123, sehingga layanan yang diberikan akan menjadi lebih konsisten walau pelanggan menghubungi *contact center* menggunakan media yang berbeda.
28. Me-*review* strategi perbaikan peringkat kemudahan mendapatkan listrik untuk konsumen bisnis dan industri daya 100-200 kVA (*getting electricity*).
29. CC PLN 123 berpartisipasi dalam Kompetisi ICCA (*Indonesia Contact Center Award*) 2021 untuk memenangkan ajang bergengsi dalam meningkatkan citra perusahaan dalam memberikan layanan *excellence* kepada pelanggan.
30. Peningkatan penjualan dan pendapatan dengan mendorong program insentif LWBP.
31. Peningkatan penjualan dan pendapatan dengan mengoptimalkan energi terbarukan melalui penawaran produk REC (*Renewable Energy Certificate*).
32. Melibatkan *stakeholder* terkait dalam koordinasi layanan untuk pelanggan besar (DJK, Dirjen Minerba, Kemenperin).
33. Meningkatkan dukungan kepada Pemerintah untuk menyukseskan program percepatan peningkatan penggunaan kompor gas-kompor listrik dengan menggandeng *provider* kompor dan peralatan masak listrik.

20. Ease of purchasing electricity tokens via QR code.
21. Sales increase through customer get customer by using a referral code.
22. Support outage management transformation, in this case ensuring the Implementation of Notification Management Scale Up, Implementation of Reg Jamali Scale Up, Implementation of Reg Sum – Kal and Scale Up, Implementation of Reg Sul – MPNT.
23. Implementation of ListriQu integration with the CC PLN 123 platform and other platform integrations.
24. Digitize the administration of connecting services in implementing customer service process innovations, accelerating service processes, paperless and efficiency in reducing administrative costs.
25. Implementation of frontliner service standardization and customer self-service in service units.
26. Strengthen the social media platform of CC PLN 123 in terms of technology, service content and education to customers, and telesales.
27. Improve customer experience through the development of the PLN 123 omnichannel service, so that the services provided will be more consistent even though customers reach the contact center using different media.
28. Review the strategies for improving the rating in terms of ease to obtain electricity for business consumers and the 100-200 kVA power industry (getting electricity).
29. CC PLN 123 participated in the 2021 ICCA (Indonesia Contact Center Award) Competition to win a prestigious event in order to enhance the Company's image in providing service excellence to customers.
30. Increase sales and revenue by encouraging the LWBP incentive program.
31. Increase sales and revenue by optimizing renewable energy through REC (Renewable Energy Certificate) product offering.
32. Involve relevant stakeholders in coordinating services for large customers (DJK, Director General of Mineral and Coal, Ministry of Industry).
33. Increase support for the Government to succeed in the program accelerating the increase in the use of gas-electric stoves by cooperating with providers of stoves and electric cooking utensils.

34. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan apresiasi dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan/ pelanggan asosiasi melalui *customer gathering*.

34. Improve service by giving appreciation and improve good relations with customers/customer associations through customer gatherings.

Strategi Pemasaran

PLN adalah pelaku bisnis utama di industri ketenagalistrikan di Indonesia sehingga dari produksi hingga distribusi ke pelanggan. Oleh karena itu untuk mengukur pangsa pasar PLN, *proxy* yang dipakai adalah dengan membandingkan dari sisi produksi (GWh) energi yang dihasilkan PLN dibandingkan dengan total GWh energi yang berasal dari energi produksi PLN ditambah yang dibeli oleh PLN. Pangsa pasar PLN berdasarkan parameter ini mencapai 64,65% pada tahun 2020.

Marketing Strategy

PLN is the main business actor in the electricity industry in Indonesia, from production to distribution to customers. Therefore, to measure PLN's market share, the proxy used is make a comparison in terms of production (GWh) between the energy produced by PLN and the total GWh of energy from the energy produced by PLN plus that is purchased by PLN. PLN's market share based on this parameter reached 64.65% in 2020.

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

Kebijakan Dividen

Kebijakan PLN dalam membagikan dividen atas laba bersih mengacu kepada keputusan pemegang saham, dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditetapkan berdasarkan kinerja tahun berjalan dan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang. Perseroan dalam menentukan kebijakan pembagian dividen dengan mempertimbangkan laba bersih yang didapat pada tahun buku, kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan, dan rencana modal dan pertumbuhan usaha ke depan.

Realisasi Pembagian Dividen

Pada tahun 2021 PLN membagikan dividen sejumlah Rp400,00 miliar kepada pemegang saham sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pembagian dividen sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut

POLICY ON DIVIDEND AND ITS DISTRIBUTION

Dividend Policy

PLN's policy in distributing dividends on net income refers to the decision of shareholders, in the General Meeting of Shareholders (GMS) forum, which is determined based on the current year's performance and long-term business development needs. In formulating the dividend distribution policy, the Company takes into account the net profit earned in the fiscal year, the financial condition and soundness of the Company, and the planned capital and business growth going forward.

Realization of Dividend Distribution

In 2021, PLN distributed dividends in the amount of Rp400.00 billion to shareholders, while in 2020 there was no dividend distribution as explained in the following table:

	Total dividen yang dibagikan (Rp Miliar) / *Total distributed dividend (Rp Billion)*	Jumlah dividen kas per saham / *Total cash dividend per share*	*Payout ratio*	Tanggal pengumuman / *Announcement Date*	Tanggal pembayaran dividen kas / *Date of cash dividend payment*
2021	400	3.256	0,03	28 Juni 2021 / June 28, 2021	26 Juli 2021 / July 26, 2021
2020	-	-	-	-	-

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/ MSOP)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan (ESOP/ MSOP). Dengan demikian, tidak disajikan informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; jangka waktu; persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan harga *exercise*.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM (ESOP/MSOP)

For the period ended on December 31, 2021, the Company did not have an employee and/or management stock option program (ESOP/MSOP). Thus, no information is presented regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization; period of time; requirements for eligible employees and/or management; and exercise price.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan tidak melakukan penawaran umum baik saham maupun obligasi di sepanjang tahun 2021. Sementara itu, seluruh dana dari hasil penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020 telah digunakan untuk keperluan ekspansi usaha, sehingga tidak terdapat sisa dana dari hasil penawaran umum tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai realisasi penggunaan hasil penawaran umum tidak relevan untuk disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

The Company did not conduct a public offering of either shares or bonds throughout 2021. Meanwhile, all proceeds from the offering of PLN PLN Shelf-Registration Bonds and Sukuk Ijara IV Phase I Year 2020 issued on August 31, 2020 have been used for business expansion purposes, so there is no remaining funds from the proceeds of the public offering. Thus, information regarding the realization of the use of the proceeds from the public offering is irrelevant to be presented in this Annual Report.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Grup PLN melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan OJK No. VIII.G.7. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/ RELATED PARTIES

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

The Company did not enter into transactions containing conflicts of interest during the reporting year ended on December 31, 2021.

Transactions with Affiliated or Related Parties

The PLN Group conducted transactions with related parties as defined by PSAK No. 7:"Related Party Disclosures" and OJK Regulation No. VIII.G.7. Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to the Government, Government agencies, and similar bodies both locally, nationally, and internationally. Entities related to the Government include entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments which are shareholders of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as proxy of the shareholder.

Sifat hubungan berelasi

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
c. Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Character of Affiliated Relationship

a. The government in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, who is the shareholder of the Company and SOEs.
b. The Company has an affiliated relationship with other SOEs that are jointly owned by the Ministry of Finance.
c. The Company has significant influence over investments in associates or joint ventures.
d. The Board of Commissioners and the Board of Directors are key management personnel of the Company.

Ketentuan Transaksi Berelasi

PLN menerapkan kebijakan sebagai berikut dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut:

1. Penjualan produk dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah *margin* tertentu sesuai kesepakatan.
2. Pengangkutan bahan bakar maupun suku cadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan marjin tertentu.
3. Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan *benefit* optimal pada Perusahaan.
4. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi syarat dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perusahaan.

Terms of Affiliated Transactions

PLN implements the following policies in conducting transactions with these related parties:

1. Sales of products and services to related parties are determined based on sales contracts, which generally use the prevailing market price basis plus a certain margin according to the agreement.
2. Transportation of fuel and spare parts by related parties is determined based on a mutually agreed freight in accordance with the results of negotiations by taking into account the existing cost elements plus a certain margin.
3. Fund placements are made based on needs and mutually beneficial agreements that provide optimal benefits to the Company.
4. Obtaining loan funds is carried out through negotiation of the most optimal terms and conditions for the Company's operational interests.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

Below is the list of related parties that engage in transactions with the Group:

Pihak-pihak berelasi / *Related parties*	**Sifat hubungan / *Nature of relations***	**Alasan Transaksi / *Nature of Transactions***	**Kewajaran Transaksi / *Transaction fairness***
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham akhir / Ultimate shareholders	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah / Receipt of electricity subsidy, two-step loan and government loan	Wajar / Fair
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan penerimaan utang bank / Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank Mandiri Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan penerimaan utang bank / Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans	Wajar / Fair

Pihak-pihak berelasi / *Related parties*	Sifat hubungan / *Nature of relations*	Alasan Transaksi / *Nature of Transactions*	Kewajaran Transaksi / *Transaction fairness*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan penerimaan utang bank / Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank DKI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank / Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank / Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	Wajar / Fair
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar / Purchase of fuels	Wajar / Fair
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas / Purchase of fuels and lubricants	Wajar / Fair
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar / Purchase of fuels	Wajar / Fair
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar / Purchase of fuels	Wajar / Fair
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan / Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels	Wajar / Fair
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah *nonbank* / Receipt of non-bank government financial institution	Wajar / Fair
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi / Construction services	Wajar / Fair
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair

Pihak-pihak berelasi / *Related parties*	Sifat hubungan / *Nature of relations*	Alasan Transaksi / *Nature of Transactions*	Kewajaran Transaksi / *Transaction fairness*
PT Riau Power	Entitas asosiasi / Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama / Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama / Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang / Purchase of electricity and issuance of long-term loan	Wajar / Fair
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama / Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama / Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Rajamandala Electric Power	Ventura bersama / Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik / Purchase of electricity	Wajar / Fair
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama / Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang / Issuance of long-term loans	Wajar / Fair
PT Transportasi Gas Indonesia	Pihak berelasi lainnya / Other related parties	Transaksi jasa penyaluran gas / Gas distribution services	Wajar / Fair
Pemerintah Daerah / Local Government	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah / Government related entity	Utang lain-lain / Other payables	Wajar / Fair

Adapun informasi lengkap terkait dengan saldo dengan pihak berelasi dapat dilihat di catatan no. 52 dari laporan keuangan audit tentang sifat dan transaksi dengan pihak berelasi.

The complete information related to balances with related parties can be seen in note no. 52 to the audited financial statements regarding the nature of and transactions with related parties.

Kebijakan Perusahaan terkait dengan Mekanisme *Review* atas Transaksi

Untuk meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan serta meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, Perusahaan mengembangkan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yang merupakan organisasi internasional yang menyediakan kerangka dan pedoman terkait manajemen risiko pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

The Company's Policies Related to Review Mechanism of Transactions

To improve the accountability of each decision as well as transparency and accuracy in recording business transactions, the Company developed internal control system with reference to COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions), which is an international organization that provides frameworks and guidelines for internal control risk management and fraud prevention.

Perusahaan mengadopsi standar COSO pada ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*). Penerapan ICoFR bertujuan untuk memenuhi kriteria COSO tentang pelaporan keuangan yang andal.

The Company adopts COSO standards on ICoFR (Internal Control over Financial Reporting). ICoFR implementation aims to meet COSO criteria of reliable financial reporting.

Penerapan ICoFR di PLN diharapkan tidak hanya membantu Perusahaan dalam mencapai keandalan laporan keuangan, tetapi untuk membuktikan bahwa proses bisnis sudah dijalankan dengan efektif.

ICoFR implementation in PLN is expected not only to assist the Company in achieving financial statements reliability, but also to provide evidence that the business process runs effectively.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

PLN berupaya menyesuaikan standar akuntansi keuangan yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *International Financial Report Standard* (IFRS).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan IFRS. Sasaran Konvergensi IFRS adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS, Konvergensi PSAK terhadap IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap, sehingga PSAK yang berlaku saat ini juga mengalami beberapa kali revisi agar sesuai dengan IFRS terkini.

PLN sebagai entitas yang sudah *listing* di Pasar Modal domestik maupun internasional, wajib mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK) yang berbasis pada IFRS dan Peraturan OJK yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh Perusahaan dituangkan dalam bentuk Kebijakan Akuntansi. Walaupun dalam praktik penyusunan laporan keuangan telah mengadopsi PSAK yang berlaku pada saat periode pelaporan, pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Perusahaan akan selalu dilakukan dengan berpedoman pada PSAK terkini dan peraturan-peraturan terbaru sebagai pedoman tertulis kepada para pelaku dan pelaksana penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Perusahaan.

Compliance with Regulations and Related Terms

PLN strives to adjust financial accounting standards used in the preparation of financial reports following the Financial Accounting Standards issued by the IAI Financial Accounting Standards Board, Financial Services Authority Regulations (OJK) ,and International Financial Report Standard (IFRS).

The Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) converged the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) with IFRS. The goal of IFRS Convergence is to revise PSAK so that it is materially in accordance with IFRS. The PSAK Convergence of IFRS in Indonesia is carried out in stages, so the current PSAK has also been revised several times to conform to the current IFRS.

PLN, as an entity that has been listed on the domestic and international capital markets, must follow the applicable financial accounting standards in Indonesia (PSAK) based on the prevailing IFRS and OJK regulations. Financial accounting standards used by the Company are outlined in the form of Accounting Policies. Although in practice the preparation of financial statements has adopted the prevailing PSAK during the reporting period, updating the Accounting Policy of the Company will always be carried out based on the latest PSAK and the latest regulations as written guidelines to the actors and executors of the preparation of Financial Statements within the Company.

INFORMASI MATERIAL TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Perseroan tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, dan restrukturisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga tidak disajikan informasi terkait:

1. Tanggal, nilai, dan objek transaksi;
2. Nama pihak yang melakukan transaksi;
3. Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);
4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan
5. Pemenuhan ketentuan terkait.

AKUISISI

Akuisisi PT Energy Management Indonesia (EMI)

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. S- 603/MBU/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021, pemegang saham menyetujui

MATERIAL INFORMATION ON TRANSACTIOIN RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

The Company did not invest, expand, divest, and restructure for the period ended on December 31, 2021, so that, the following information is not presented:

1. Transaction date, value, and object;
2. Name of the party conducting the transaction;
3. The nature of the Affiliate relationship (if any);
4. Explanation of the fairness of the transaction; and
5. Fulfillment of related provisions.

ACQUISITION

Acquisition of PT Energy Management Indonesia (EMI)

Based on Decree of the Minister of SOEs No. S-603/MBU/08/2021 dated August 20, 2021, shareholders approved

penambahan penyertaan modal saham Pemerintah sebesar 118.704 saham (dalam jumlah penuh) dengan nilai Rp118,70 miliar yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Pemerintah di PT Energy Management Indonesia (EMI).

the addition of the Government's share capital investment of 118,704 shares (in full amount) with a value of Rp118.70 billion, which was generated from the transfer of all series B shares owned by the Government in PT Energy Management Indonesia (EMI).

Efektif pada tanggal 7 September 2021, sesuai dengan Akta No. 34 dari Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan saham EMI, entitas sepengendali, dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan modal saham di mana Perusahaan mengakuisisi 15.554 lembar saham biasa atau setara dengan 99,99% kepemilikan atas EMI dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar Rp118,70 miliar. Jumlah tercatat aset bersih EMI untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar Rp11,95 miliar, sehingga selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah aset tercatat bersih yang diterima sebesar Rp106,75 miliar dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Effective from September 7, 2021, pursuant to Deed No. 34 of Dewi Kusumawati, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into an agreement to transfer shares of EMI, an entity under common control, from the Government of the Republic of Indonesia by issuing share capital whereby the Company acquired 15,554 shares of common stock or equivalent to 99.99% ownership in EMI for a total fee transferred amounting to Rp118.70 billion. The carrying amount of EMI's net assets for the Company's ownership portion was Rp11.95 billion, so the difference between the amount of the consideration transferred and the net carrying assets received of Rp106.75 billion was recorded in the equity account as additional paid-in capital.

Akuisisi PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN)

Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan melakukan akuisisi 95% saham MCTN dengan biaya perolehan sebesar Rp647,20 miliar. Perincian nilai wajar pada aset bersih MCTN yang di akuisisi adalah sebagai berikut:

Acquisition of PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN)

On August 6, 2021, the Company acquired 95% of MCTN's shares at a cost of Rp647.20 billion. The breakdown of the fair value of the acquired MCTN's net assets is as follows:

Akun / *Account*	(Rp Juta / *Rp Million*)
Aset Lancar / Current Assets	222,670
Aset tidak Lancar / Non-current assets	770,567
Liabilitas jangka pendek / Current liabilities	(122,628)
Liabilitas jangka panjang / Non-current liabilities	(7,033)
Aset bersih / Net assets	**863,576**

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Pemerintah menerbitkan regulasi yang terkait langsung dengan industri ketenagalistrikan pada tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

CHANGES OF REGULATIONS AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

The Government issued regulations directly related to the electricity industry in 2021 as presented in the following table:

No.	Jenis Peraturan / *Type of Regulation*	Perihal / *Subject*	Keterangan / *Description*	Dampak Terhadap Perseroan / *Impact to the Company*
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 / Law No. 7 of 2021	Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan / On Tax Regulation Harmonization	Penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif. / Adjustment of policies in the field of general provisions and procedures for taxation, income tax, value added tax, and excise as well as arrangement on carbon tax and policies on taxpayer voluntary disclosure program in 1 (one) comprehensive law.	1. Jumlah emisi karbon PLN selama 2018, 2019, dan 2020 adalah sebesar 155,5, 157,7 dan 149,9 juta ton. Dengan demikian, potensi pajak karbon yang harus dibayar PLN adalah sebesar Rp11,58 triliun (rata-rata 3 tahun). Hal tersebut tentunya berdampak pada peningkatan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. / PLN's total carbon emissions during 2018, 2019, and 2020 were 155.5, 157.7, and 149.9 million tons, respectively. Thus, the potential carbon tax that must be paid by PLN is Rp11.58 trillion (average of 3 years). This of course caused the increase in the cost of electricity supply (BPP). 2. Tambahan *cost of fund* jika pembayaran pajak karbon berasal dari Pinjaman, asumsi *rate* sebesar 6% - 7%. / Additional cost of fund if payment of carbon tax comes from Loans, assuming a rate of 6% - 7%. 3. Peningkatan BPP berdampak pada tambahan subsidi listrik dari Pemerintah dan kompensasi harga jual listrik dari Pemerintah jika tidak dibebankan ke Pelanggan. / The increase in BPP has an impact on additional electricity subsidies from the Government and compensation for the selling price of electricity from the Government if it is not charged to the customer. 4. *Cash flow* PLN akan terganggu, karena terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan yaitu PLN harus menyetorkan pajak karbon ke kas negara terlebih dahulu dibandingkan dengan waktu penerimaan dari Pemerintah atas tambahan subsidi dan kompensasi (jika kompensasi tidak dibebankan ke pelanggan). / PLN's cash flow will be disrupted, because there is a significant time difference, as PLN must deposit carbon taxes into the state treasury first compared to the time when the government receives additional subsidies and compensation (if compensation is not charged to the customer).
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 / Government Regulation No. 25 of 2021	Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral / Implementation of Energy and Mineral Resources Activities		1. Mengatur kewenangan menteri/pemerintah daerah untuk memasukan kebijakan ketenagalistrikan ke dalam RUPTL sehingga dapat berdampak pada perencanaan penganggaran./ Regulate the authority of the minister/local government to include electricity policy in the RUPTL so that it can have an impact on budget planning. 2. Mengatur usaha penyediaan tenaga listrik. / Regulate the business of providing electricity. 3. Mengatur skema *excess power*. / Set the excess power scheme. 4. Mengatur hak PLN untuk dapat melintasi BMN/BMD/BUMN/BUMD dengan berpedoman pada peraturan perundangan. / Regulate the rights of PLN to be able to cross BMN/BMD/SOEs/BUMD by referring to the laws and regulations. 5. Mengatur kewajiban PLN untuk memelihara tanaman dibawah ruang bebas. / Regulate PLN's obligation to maintain plants under free space. 6. Mengatur terkait sertifikat laik operasi. / Regulate on certificates of operation worthiness. 7. Mengatur terkait royalti batu bara. / Regulate coal royalties. 8. Mengatur terkait panas bumi. / Regulate related geothermal.
3.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 / Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 26 of 2021	Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum / On Solar Rooftop Power Plant Connected with Electricity Network and Holders of Business Permit for Providing Public Electricity	Pemerintah mendorong pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan untuk pembangkitan tenaga listrik menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap yang digunakan untuk kepentingan sendiri, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan mutu pelayanan pembangunan dan pemasangan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap serta pengaturan lain mengenai penggunaan sistem PLTS Atap. / The government encourages the use of environmentally friendly solar energy for electricity generation using a rooftop solar power generation system that is used for its own purposes, therefore it is necessary to improve the service quality of development and installation of a rooftop solar power generation system as well as other arrangements regarding the use of a Rooftop PLTS system.	PLN menanggung komponen *fixed cost* yang besar, terdapat kendala untuk menurunkan biaya yang terkait dengan kontrak jangka panjang, investasi yang telah dilakukan, dan kontrak *take or pay*, dengan masuknya PLTS Atap, maka potensi demand akan turun hal ini yang akan meningkatkan BPP yang harus ditanggung PLN pada tahun-tahun mendatang. /PLN bears a large fixed cost component, there are obstacles to lowering costs associated with long-term contracts, investments that have been made, and take or pay contracts, with the entry of PLTS Rooftop, the potential demand will decrease, this will increase the BPP that must be borne PLN in the years to come. Perubahan peraturan ini berpengaruh terhadap keandalan sistem. / These regulatory changes affect the reliability of the system.

No.	Jenis Peraturan / *Type of Regulation*	Perihal / *Subject*	Keterangan / *Description*	Dampak Terhadap Perseroan / *Impact to the Company*
4.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 / Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 13 of 2021	Ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik / Clearance space space and minimum clearance distance of the electric power transmission network and compensation for land, buildings and/or plants that are under the free space of the electric power transmission network		1. Penetapan besaran kompensasi lebih *legitimate* karena telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. / Determination of the amount of compensation is more legitimate because it has received approval from the government. 2. Memberikan kompensasi dengan nilai harga yang sesuai kondisi saat ini. / Provide compensation at a price that is in accordance with current conditions. 3. Memberikan jangka waktu kepada PLN untuk melakukan penitipan ke pengadilan negeri. / Provide a period of time for PLN to do the safekeeping with the district court. 4. PLN memiliki dasar hukum dalam penentuan ruang bebas dan kompensasi ROW manakala terdapat desain diluar yang tercantum Peraturan Menteri ESDM. / PLN has a legal basis in determining the free space and compensation for ROW when there is a design outside the Regulation of the Minister of ESDM. 5. Mempunyai legalitas untuk memberikan kompensasi pada tanaman yang berpotensi memasuki ruang bebas. / Has the legality to provide compensation for plants that have the potential to enter the clearance space. 6. PLN lebih memiliki legitimasi untuk melewati aset BMN yang dikonsesikan. / PLN has more legitimacy to pass the concessioned BMN assets.
5.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 / Regulation of the Minister of of Energy and Mineral Resources No. 11 of 2021	Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan / Implementation of Electricity Business	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (9), Pasal 27 ayat (9), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri ESDM / To implement the provisions of Article 25 paragraph (6), Article 26 paragraph (9), Article 27 paragraph (9), Article 28 paragraph (5), Article 31 paragraph (3), Article 52 paragraph (5), and Article 53 paragraph (4) of Government Regulation Number 25 of 2021 on Implementation of the Energy and Mineral Resources Sector, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources	1. Mengatur usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. / Regulate the business of providing electricity and supporting business of electric power. 2. Mengatur perizinan berusaha tenaga listrik. / Regulate the licensing of electric power business. 3. Mengatur penetapan wilayah usaha. / Regulate the determination of the business area. 4. Mengatur pengesahan RUPTL. / Set up RUPTL approval. 5. Mengatur Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri. / Regulate Business Licensing for Electricity Supply Business Activities for Own Interests. 6. Mengatur Layanan Penyediaan Tenaga Listrik. / Regulate Electricity Supply Services. 7. Mengatur Pemenuhan Kecukupan Pasokan Tenaga Listrik. / Regulate the Fulfillment of Sufficiency of Electric Power Supply. 8. Mengatur Pemenuhan Tingkat Mutu Mutu Pelayanan Tenaga Listrik. / Regulate the Fulfillment of the Quality Level of Electric Power Services. 9. Mengatur Pemenuhan Kewajaran Tarif Tenaga Listrik. / Regulate the Fulfillment of Fairness of Electricity Tariffs. 10. Mengatur Pelaksanaan Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik. / Regulate the Business Implementation of the Construction and Electrical Power Installations. 11. Mengatur Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasil, Multimedia, dan/atau Informatika. / Regulate the Utilization of the Electric Power Network for the Interests of Telecommunicationl, Multimedia, and/or Information Technology. • Ketentuan mengenai operasi paralel sudah tidak dikenakan biaya sehingga biaya keandalan sistem ditanggung oleh PLN yang mengakibatkan kenaikan BPP dan berpengaruh terhadap kinerja serta kenaikan subsidi. / Provisions for parallel operations are no longer charged so that the cost of system reliability is borne by PLN which results in an increase in BPP and affects performance and increases in subsidies. • Ketentuan penetapan wilayah usaha ditambah mengenai pemberian wilayah usaha kepada pelaku usaha kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya tanpa melibatkan dan mempertimbangkan kondisi sistem kelistrikan yang tersedia, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait kondisi ini karena akan menghilangkan potensi *demand* PLN. / Provisions for the determination of business areas are added regarding the granting of business areas to integrated area business actors who manage energy resources in an integrated manner according to the electricity need pattern of the business without involving and taking into account the condition of the available electricity system, further regulation is needed regarding this condition because it will eliminate the potential demand for PLN .

No.	Jenis Peraturan / *Type of Regulation*	Perihal / *Subject*	Keterangan / *Description*	Dampak Terhadap Perseroan / *Impact to the Company*
6.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 / Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 24 of 2021	Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit / Provision and Utilization of Biofuel in the form of Biodiesel in the Financing Framework by the Oil Palm Plantation Fund Management Agency		1. Untuk menjamin tata kelola penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel yang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, perlu mengatur proses penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel. / In order to ensure the governance of the supply and utilization of biofuel in the form of biodiesel which takes into account sustainable development aspects, it is necessary to regulate the process of supplying and utilizing BBN in the form of biodiesel. 2. Pengecualian pembangkit listrik dari pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar. / Exemption of power plants from mixing BBN in the form biodiesel with Diesel-Oil Type Fuel
7.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 / Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 19 of 2021	Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun / Procedures for Non-Hazardous and Toxic Waste Management		Walaupun FABA telah keluar dari Limbah B3, namun saat ini FABA menjadi Limbah non B3 yang terdaftar, sehingga perlu penanganan khusus terkait pengelolaan FABA. Hal ini akan berdampak pada penilaian PROPER dikarenakan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 01 tahun 2021, pengelolaan Limbah non-B3 terdaftar masuk dalam kriteria PROPER. Jika tidak ada juknis dalam pengelolaan FABA, maka unit PLTU berpotensi mendapatkan PROPER Merah. / Even though FABA has been excluded from B3 waste, currently FABA is a registered non-B3 waste, so special handling is needed for FABA management. This will have an impact on the PROPER assessment because based on Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 01 of 2021, non-B3 waste management is listed in the PROPER criteria. If there are no technical guidelines on FABA management, the PLTU unit has the potential to get a Red PROPER.
8.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139 Tahun 2021 / Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 139 of 2021	Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri / Fulfillment of Domestic Coal Needs	Melaksanakan ketentuan: / Implement the provisions of: • Permen ESDM tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penetapan Menteri dalam jumlah dan jenis kebutuhan Mineral dan Batuara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) / Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources on Mineral and Coal Mining Concessions related to the Minister stipulation on the amount and type of Mineral and Coal needs to fulfill domestic needs (domestic market obligation) • Permen ESDM tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara / Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources on Procedures for Determining Benchmark Prices for Sales of Metal Minerals and Coal	1. Menjamin pasokan batubara PLN untuk memenuhi kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. / Guarantee the supply of coal for PLN to meet the needs of electricity supply for the public interest. 2. Adanya keterlibatan Dirjen Minerba untuk mengantisipasi krisis pasokan batubara dalam negeri melalui penunjukan pemasok batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. / Involvement of the Director General of Mineral and Coal to anticipate the domestic coal supply crisis through the appointment of coal suppliers to meet domestic coal needs. 3. Menjamin pemenuhan kontrak perjanjian pasokan batubara PLN atau kuota DMO dengan mengatur adanya sanksi yang berbentuk: pelarangan ekspor sampai kontrak perjanjian/ kuota DMO terpenuhi, denda, dan dana kompensasi. / Guarantee the fulfillment of PLN's coal supply agreement contract or DMO quota by stipulating sanctions in the form of: export ban until the agreement contract/DMO quota is fulfilled, fines, and compensation funds. 4. Menjamin harga batubara untuk pasar domestik sebesar USD70. / Guarantee the price of coal for the domestic market at USD 70. 5. Mewajibkan PLN untuk membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang. / Require PLN to make plans for fulfilling coal needs every year by prioritizing long-term contract mechanisms.

No.	Jenis Peraturan / *Type of Regulation*	Perihal / *Subject*	Keterangan / *Description*	Dampak Terhadap Perseroan / *Impact to the Company*
9.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.998/ MENLHK/ SETJEN/ PLB.3/10/2021 / Decree of the Minister of Environment and Forestry Decree No. SK.998/ MENLHK/ SETJEN/ PLB.3/10/2021	Pemanfaatan Limbah Non B3 berupa *fly ash bottom ash* dari PLTU PLN / Utilization of Non-B3 Waste in the form of fly ash bottom ash from PLTU PLN		Bahwa limbah *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) yang dihasilkan oleh PT PLN (Persero) mempunyai volume yang besar dan lokasinya tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat dan berwawasan lingkungan, sehingga dengan memperhatikan banyaknya kebutuhan untuk memanfaatkan limbah FABA dari PT PLN (Persero), maka perlu dilakukan percepatan dalam pemanfaatan limbah sehingga perlu ditetapkan Keputusan Menteri untuk implementasi pemanfaatan limbah non-B3 berupa FABA dari PLTU PLN. / The volume of Fly Ash Bottom Ash (FABA) waste produced by PT PLN (Persero) was and its locations are scattered in various areas so that it requires proper and environmentally sound management, management. By taking into account the many needs to utilize FABA waste from PT PLN (Persero)), it is necessary to accelerate the utilization of waste and stipulate a Ministerial Decree to implement the utilization of non-B3 waste in the form of FABA from PLTU PLN. Terkait implementasi FABA saat ini yang diakomodir masih untuk yang skala kecil, sementara untuk yang skala besar masih belum diatur, sehingga mengakibatkan FABA yang diolah dan dihasilkan oleh Unit Pembangkit tidak seimbang sehingga berpotensi terjadinya penumpukan FABA. / Regarding the current implementation of FABA, the small scale ones are still accommodated, while the large scale ones have not been regulated, resulting in the FABA being processed and produced by the Generating Unit that is not balance so that it has the potential to accumulate FABA.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA YANG DITERAPKAN

Perseroan menyatakan terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan di tahun buku 2021 secara ringkas dijelaskan di tabel berikut ini:

CHANGES TO ACCOUNTING POLICIES AND THE IMPACT

The Company stated that there were changes of accounting policies implemented in the fiscal year of 2021, which are briefly explained in the following table:

No.	Jenis Perubahan PSAK / *Type of PSAK Change*	Tentang / *Subject*	Dampak terhadap Laporan Keuangan / *Impact on Financial Statements*
1.	PSAK No. 112	Akuntansi Wakaf / Wakaf Accounting	Penerapan PSAK baru tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi PLN dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan. / Implementation of New PSAK did not cause any significant changes to PLN's accounting policy and did not bring material impact to the amount stated in the consolidated financial statements for the year.
2.	Amandemen PSAK No. 22 / Amendment to PSAK No. 22	Kombinasi Bisnis – Definisi Bisnis / Business Combination - Definition of Business	
3.	• Amendemen PSAK No. 71: / Amendment to PSAK No. 71: • Amendemen PSAK No. 55; / Amendment to PSAK No. 55; • Amendemen PSAK No. 60; / Amendment to PSAK No. 60; • Amendemen PSAK No. 62; dan / Amendment to PSAK No. 62; and • Amendemen PSAK No. 73 / Amendment to PSAK No. 73	Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 / Interest Rate Reference Reformation - Stage 2	
4.	Penyesuaian tahunan PSAK No. 110 / Annual adjustments to PSAK No. 110	Akuntansi Sukuk / Sukuk Accounting	
5.	Penyesuaian tahunan PSAK No. 110 / Annual adjustments to PSAK No. 110	Akuntansi Wa'd / Wa'd Accounting	
6.	Penyesuaian tahunan PSAK No. 111 / Annual adjustments to PSAK No. 111	Covid-19 terkait Konsesi Rental / Covid-19 regarding Rental Concession	
7.	Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 1 / 2021 Annual adjustments to PSAK No. 1	Penyajian Laporan Keuangan / Financial Statements Presentation	

No.	Jenis Perubahan PSAK / *Type of PSAK Change*	Tentang / *Subject*	Dampak terhadap Laporan Keuangan / *Impact on Financial Statements*
8.	Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 48 / 2021 Annual adjustments to PSAK No. 48	Penurunan Nilai Aset / Asset Value Depreciation	
9.	Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 66 / 2021 Annual adjustments to PSAK No. 66	Pengaturan Bersama / Joint Regulation	
10.	Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 16 / 2021 Annual adjustments to PSAK No. 16	Pengaturan Jasa Konsesi / Concession Service Regulation	

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 dan No. 73, PLN saat ini memiliki beberapa pinjaman yang mengacu pada *US Dollar London Interbank Offered Rate* (LIBOR) dan berlaku hingga lebih dari tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

In connection with the amendments to PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 and No. 73, PLN currently has several loans that refer to the US Dollar London Interbank Offered Rate (LIBOR) and are valid until more than 2021. As of December 31, 2021, an alternative benchmark interest rate has not been determined.

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Selain memberikan dividen, PLN juga memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak. Tahun 2021, PLN telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dengan rincian sebagai berikut:

CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

In addition to providing dividends, PLN also contributes to the state in the form of taxes. In 2021, PLN has fulfilled all of its tax obligations with the following details:

Jenis Pajak / *Type of Tax*	2020	2021
PPh Final 4 Ayat 2 / Final Income Tax Article 4 Paragraph 2	927.618.916.609	817.797.467.740
PPh 21 / Income Tax Article 21	1.453.579.119.315	1.564.863.121.360
PPh 15, 22, 23 dan 26 / Income Tax Articles 15, 22, 23, and 26	5.145.470.439.904	4.544.176.674.239
PPh Badan *) / Corporate Income Tax *)	26.239.448.316	(*)
PPN dan PPnBM / VAT and Sales Tax on Luxury Goods	7.748.884.035.292	11.099.344.206.216
Bea Meterai / Stamp Duty	313.636.868.701	64.557.696.603
Bea Masuk / Import Duty	151.905.989.000	3.491.893.000
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / Regional Tax and Retribution	9.709.705.963.311	13.104.201.851.202
Jumlah / Total	**25.477.040.780.448**	**31.198.432.910.360**

*) Untuk PPh Badan 2021, Perusahaan melakukan perpanjangan pelaporan kepada DJP sd 30 Juni 2022 sesuai surat DJP No S-00004/WPJ.19/KP.0303/PPhBD/2022 tanggal 27 April 2022

*) For the 2021 Corporate Income Tax, the Company extended the reporting to DGT until June 30, 2022 according to DGT's letter No. S-00004/WPJ.19/KP.0303/PPhBD/2022 dated April 27, 2022

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Perbaikan Ekonomi di tengah Kondisi Pandemi

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi *downside risk* dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian. Namun demikian, perbaikan ekonomi tahun 2021 yang mampu tumbuh 3,69% *yoy* diharapkan menjadi katalis positif bagi peningkatan permintaan kebutuhan ketenagalistrikan di tahun mendatang. Hal ini diperkuat oleh indikator-indikator perekonomian pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 berdasarkan data dari Bank Indonesia:

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

POTENTIAL MATTERS THAT HAD SIGNIFICANT EFFECT ON THE COMPANY'S GOING CONCERN

Economic Recovery Amid the Pandemic

In the midst of optimism for economic recovery in 2022, the Covid-19 pandemic is estimated to remain uncertain. The dynamics of the Covid-19 pandemic will be a downside risk and have the potential to hold back the pace of economic recovery. However, the economic improvement in 2021 which was able to grow 3.69% yoy is expected to be a positive catalyst for increasing demand of electricity needs in the coming year. This was reinforced by the economic indicators at the end of 2021 and the beginning of 2022 based on data from Bank Indonesia:

- Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada kuartal IV tahun 2021 mengindikasikan bahwa kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2021 tumbuh positif. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 7,10%, sedikit lebih rendah dari SBT sebesar 7,58% pada triwulan III 2021, namun meningkat dibandingkan dengan SBT sebesar -3,90% pada triwulan IV 2020. Peningkatan kinerja usaha terindikasi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Pengangkutan, serta Komunikasi, didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai daerah, serta perayaan HBKN Natal dan libur akhir tahun.

  Pada triwulan I 2022, responden memperkirakan kegiatan usaha akan meningkat dengan SBT sebesar 9,39%. Peningkatan tersebut bersumber dari beberapa sektor utama yang mencatat kinerja positif, terutama sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, sejalan dengan periode panen raya tanaman bahan makanan, serta sektor Industri Pengolahan seiring dengan prakiraan meningkatnya permintaan.
- Kinerja sektor Industri Pengolahan triwulan IV 2021 terindikasi meningkat dan berada pada fase ekspansi. Hal itu tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia (PMI-BI) sebesar 50,17%, meningkat dari 48,75% pada triwulan III 2021. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI, dengan indeks tertinggi pada komponen Volume Produksi, Volume Total Pesanan dan Volume Persediaan Barang Jadi. Berdasarkan subsektor, peningkatan terjadi pada mayoritas subsektor, dengan indeks tertinggi pada Makanan, Minuman dan Tembakau (51,84%), Logam Dasar Besi dan Baja (51,80%), Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki (50,98%), serta Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya (50,66%). PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan sektor Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang positif dan meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 0,50%.
-

  Peningkatan kinerja sektor Industri Pengolahan diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2022. PMI-BI triwulan I 2022 diperkirakan sebesar 53,83%, lebih tinggi dari capaian pada triwulan sebelumnya. Peningkatan PMI-BI didorong seluruh komponen pembentuknya, terutama Volume Produksi, Volume Total Pesanan,

- The results of the Business Activity Survey (SKDU) in the fourth quarter of 2021 indicated that business activities in the fourth quarter of 2021 grew positively. This was reflected in the Weighted Net Balance (WNB) of 7.10%, slightly lower than the WNB of 7.58% in the third quarter of 2021, but increasing compared to the WNB of -3.90% in the fourth quarter of 2020. Improved performance was indicated in the business sectors of Manufacturing, Trade, Hotel and Restaurant and Transportation, and Communications, which was driven by the increasing demand in line with the easing of mobility restrictions in various regions, as well as the celebration of the national religious holiday of Christmas and year-end holidays.

  In the first quarter of 2022, respondents estimate that business activities will increase with WNB of 9.39%. The increase will be stemmed from a number of key sectors that recorded positive performance, particularly the Agriculture, Plantation, Livestock, Forestry and Fisheries sectors, in line with the period of harvesting food crops, as well as the Manufacturing Industry sector in line with the forecasted increase in demand.
- The performance of the Manufacturing Industry sector in the fourth quarter of 2021 was indicated to increase and was in the expansion phase. This was reflected in Bank Indonesia's Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) at 50.17%, increasing from 48.75% in the third quarter of 2021. The increase occurred in all components that make up the PMI-BI, with the highest index being the components of Production Production Volume, Total Order Volume and Finished Goods Inventory Volume. By sub-sector, the increase occurred in the majority of sub-sectors, with the highest indexes being Food, Beverages and Tobacco (51.84%), Iron and Steel Base Metals (51.80%), Textiles, Leather Goods and Footwear (50.98%), and Transportation Equipment, Machinery and Equipment (50.66%). The PMI-BI was in lien with the developments of the Manufacturing Industry sector as a result of the positive Business Activity Survey (SKDU) and an increase in a Weighted Net Balance (WNB) of 0.50%.

  The performance improvement of manufacturing sector's is expected to continue in the first quarter of 2022. PMI-BI in the first quarter of 2022 is estimated at 53.83%, higher than the achievement in the previous quarter. The increase in PMI-BI is driven by all of its constituent components, particularly Production

Volume Persediaan Barang Jadi dan Jumlah Karyawan yang berada pada fase ekspansi. Mayoritas subsektor diperkirakan akan meningkat, dengan indeks tertinggi pada subsektor Logam Dasar Besi dan Baja (54,06%), Makanan, Minuman dan Tembakau (53,86%) serta Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya (53,40%).

- Survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2022 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2022 sebesar 119,6, lebih tinggi dari 118,3 pada Desember 2021. Kenaikan IKK terpantau pada mayoritas kategori pengeluaran dan kelompok usia responden. Secara spasial, IKK meningkat di sebagian besar kota yang disurvei, tertinggi di Banten, diikuti Pontianak dan Makassar.

  Meningkatnya keyakinan konsumen pada Januari 2022 didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, terutama persepsi terhadap penghasilan saat ini dan pembelian barang tahan lama (*durable goods*). Sejalan dengan membaiknya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang juga tercatat membaik pada seluruh indeks pembentuknya, tertinggi pada indeks ekspektasi penghasilan.

Volume, Total Order Volume, Finished Goods Inventory Volume and Number of Employees who were in the expansion phase. The majority of sub-sectors are expected to increase, with the highest index being in the sub-sectors of Iron and Steel Base Metals (54.06%), Food, Beverages and Tobacco (53.86%) and Wood Goods and Other Forest Products (53.40%).

- The Bank Indonesia Consumer Survey in January 2022 indicates that consumer optimism for economic conditions will strengthen. This was reflected in the Consumer Confidence Index (IKK) in January 2022 at 119.6, higher than 118.3 in December 2021. The increase in the IKK was observed in the majority of expenditure categories and age groups of respondents. Spatially, the IKK increased in most of the surveyed cities, with the highest in Banten, followed by Pontianak and Makassar.

  The increased consumer confidence in January 2022 was driven by improved consumer perceptions of current economic conditions, especially perceptions of current income and purchases of durable goods. In line with improved perceptions of current economic conditions, consumer expectations of future economic conditions also improved across all of its constituent index, the highest being the income expectation index.

Potensi Energi Baru Terbarukan Yang Besar di Indonesia

Produksi energi fosil terutama minyak bumi yang berkurang serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Menurut PP tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target bauran energi primer tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Considerable New Renewable Energy Potential in Indonesia

The reduced production of fossil energy, especially oil, as well as the global commitment to reduce greenhouse gas emissions, encourage the Government to continuously increase the role of new and renewable energy as part of maintaining energy security and independence. According to the Government Regulation on National Energy Policy, the target of the new and renewable energy mix in 2025 is at least 23% and 31% in 2050. Indonesia has a fairly large potential for new and renewable energy to achieve the primary energy mix target, as shown in the following table:

Jenis Energi / *Type of Energy*	Potensi / *Potential*
Tenaga Air / Water-powered	94,3 GW
Panas Bumi / Geothermal	28,5 GW
Bio Energi / Bio Energy	PLT Bio: 32,6 GW dan BBN: 200 Ribu Bph / PLT Bio: 32.6 GW and BBN: 200 Thousand Bph
Surya / Solar-powered	207,8 GWp
Angin / Wind	60,6 GW
Energi Laut / Ocean-powered	17,9 GW

Sumber: Kementerian ESDM

Source: The Ministry of ESDM

Komitmen dan Dukungan Pemerintah Untuk Diversifikasi Energi

Pemerintah telah menerbitkan beragam peraturan untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di antaranya sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Keuangan No.03/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.
- Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 (Pasal 14) tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, mengamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan infrastruktur ketenagalistrikan mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan dan non-perizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-masing jenis sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN (Persero), dan/atau penyediaan subsidi.
- Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2017 merupakan penyempurnaan atas Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 merupakan revisi dari Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan iklim usaha makin baik dengan tetap mendorong praktik efisiensi serta mewujudkan harga listrik yang wajar dan terjangkau.
- Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
- Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang mewajibkan penggunaan biodiesel bagi PSO dan non PSO sesuai pasal 18 ayat (1b).

Government Commitment and Support for Energy Diversification

The government has issued various regulations to accelerate the development of New and Renewable Energy (NRE) as follows:

- Regulation of the Minister of Finance No.03/PMK.011/2012 on Procedures for Management and Accountability of Geothermal Fund Facilities.
- Presidential Regulation No. 4 of 2016 (Article 14) on Acceleration of Electricity Infrastructure Infrastructure, which mandates that the implementation of electricity infrastructure acceleration prioritizes the use of new and renewable energy. The Government and/or Local Governments can provide support in the form of fiscal incentives, ease of licensing and non-licensing, determining the purchase price of electricity from each type of new and renewable energy source, the establishment of a separate business entity in the context of providing electricity to be sold to PT PLN (Persero), and/or provision of subsidies.
- Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 49 of 2017 is an improvement of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2017 on Principles of Electricity Sale and Purchase Agreement.
- Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 50 of 2017 is a revision of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 12 of 2017 on Utilization of Renewable Energy Sources for the Provision of Electricity, which was issued in order to create a better business climate while still encouraging efficiency practices and realizing reasonable and affordable electricity prices.
- Regulation of the Minister of Finance No.177/PMK.011/2007 on Exemption of Import Duties on the Import of Goods for Upstream Oil and Gas and Geothermal Business Activities.
- Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 49 of 2018 on Utilization of Rooftop Solar Power Generation Systems by Consumers of PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Presidential Regulation No. 66 of 2018 on Second Amendment to Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Collection and Use of Palm Oil Plantation Funds, which requires the use of biodiesel for PSO and non-PSO in accordance with Article 18 paragraph (1b).

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2021-2030

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2021-2030. Pokok-pokok yang diatur dalam RUPTL tersebut antara lain:

a. Proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 4,9%;
b. Total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 40.575 MW dengan perincian:
    1. Pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sebesar 20.923 MW atau setara dengan 51,6% dari total pembangkit tenaga listrik;
    2. Pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi fosil sebesar 19,652 MW atau setara dengan 48,4% dari total pembangkit tenaga listrik;
c. Target bauran energi baru dan terbarukan pembangkit tenaga listrik tahun 2025 sebesar 23,0%;
d. Total rencana pembangunan jaringan transmisi sebesar 47.723 kms;
e. Total rencana pembangunan gardu induk sebesar 76.662 MVA;
f. Total rencana pembangunan jaringan distribusi sebesar 455.547 kms;
g. Total rencana pembangunan gardu distribusi sebesar 31.095 MVA;

PLN 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL)

The government through Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 ratified PLN's 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL). The points regulated in the RUPTL include:

a. The projected average growth in electricity demand is 4.9%;
b. The total plan for the construction of a power plant is 40,575 MW with the following details:
    1. Power plants sourced from new and renewable energy of 20,923 MW or equivalent to 51.6% of the total power plants;
    2. Power plants sourced from fossil energy is 19,652 MW or equivalent to 48.4% of the total power plant;
c. The target for new and renewable energy mix for power generation in 2025 is 23.0%;
d. The total plan for transmission network development is 47,723 kms;
e. The total plan for substation development is 76,662 MVA;
f. The total plan for distribution network development is 455,547 kms;
g. The total plan for distribution substation development is 31,095 MVA;

Penilaian Manajemen Terhadap Beragam Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha

Dalam menilai kelangsungan usaha Perseroan terkait faktor-faktor tersebut di atas, PLN melakukan pemetaan SWOT (*Strength Weakness Opportunity Threat*). Pemetaan ini dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan perusahaan untuk mencapai tujuan Perseroan.

Management's Assessment on Various Factors Affecting the Going Concern

In assessing the Company's business continuity regarding the factors mentioned above, PLN conducts a SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) mapping. This mapping is used as a reference in determining corporate policies to achieve the Company's goals.

Strength

- Dukungan penuh Pemerintah terhadap risiko investasi dan operasi / Government's full support for investment and operating risks
- PLN satu-satunya perusahaan listrik yang memiliki aset mencapai Rp1.500 triliun pelanggan lebih dari 70 juta pelanggan, jaringan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia / PLN is the only electricity company with assets of Rp1,500 trillion, more than 70 million customers, a network that covers all parts of Indonesia
- Portofolio bisnis PLN mencakup seluruh mata rantai proses bisnis ketenagalistrikan dan usaha/jasa penunjang / PLN's business portfolio covers the entire chain of electricity business processes and supporting businesses/services
- PLN sudah menjadi *generic brand* untuk listrik di Indonesia (listrik = PLN) / PLN has become a generic brand for electricity in Indonesia (electricity = PLN)
- Memiliki sistem pelayanan pelanggan yang terpusat yang melayani 24 jam (AP2T, P2APST, CC123, APKT, PLN Mobile) / Has a centralized customer service system that serves for 24 hours (AP2T, P2APST, CC123, APKT, PLN Mobile)
- Memiliki jumlah dan kompetensi SDM bidang kelistrikan yang kuat / Has a strong number and competence of HC in the electricity sector
- Rating investasi PLN setara dengan *sovereign rate* / PLN's investment rating is equivalent to the sovereign rate
- Tersedianya *fiber optic* di seluruh jaringan transmisi dan ROW di jaringan distribusi / Availability of fiber optic in the entire transmission network and ROW in the distribution network

Weakness

- Likuiditas terbatas khususnya untuk biaya investasi yang sangat tinggi / Limited liquidity especially for very high investment costs
- Struktur tarif dan model subsidi yang ada saat ini membuat PLN tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi / The current tariff structure and subsidy model means that PLN does not have the sufficient capacity to meet investment needs
- Klausul kontrak PP yang kurang menguntungkan PLN / PP contract clauses that are less favorable to PLN
- *Stakeholders management* belum optimal di berbagai level organisasi PLN / Stakeholder management has not been optimal at various levels of the PLN organization
- Pembinaan kompetensi, pembinaan karir pegawai dan kaderisasi kepemimpinan belum optimal / Competence development, employee career development and leadership regeneration are not optimal
- Sistem kerja dan koordinasi antar unit belum optimal dan sistematis sehingga memengaruhi kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan / The work system and coordination between units is not yet optimal and systematic so that it affects the quality and speed of decision making
- PLN belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengatasi *disruptive technology* / PLN is yet to have an integrated system to overcome disruptive technology

Opportunity

- Pengembangan bisnis turunan dari portofolio bisnis dan aset PLN / Development of derivative businesses from PLN's business portfolio and assets
- Penguasaan bisnis kelistrikan di Kawasan Industri Khusus dan Kawasan Ekonomi Khusus / Mastery of electricity business in Special Industrial Zones and Special Economic Zones
- Pemanfaatan teknologi *big data, internet of things* dan *smart grid* untuk peningkatan efisiensi, kualitas pasokan dan layanan, serta pengembangan potensi bisnis baru / Utilization of big data technology, internet of things, and smart grid to increase efficiency, supply and service quality, as well as to develop new business potential
- Pertumbuhan populasi, konsumsi energi listrik per kapita yang masih rendah, rasio elektrifikasi yang belum 100% dan pertumbuhan ekonomi masih membuka peluang pasar bagi PLN / Population growth, low per capita electricity consumption, the electrification ratio is not yet 100%, and the economic growth still opens up market opportunities for PLN
- Tidak ada regulasi yang melarang pengembangan bsinis ke hulu dan ke hilir dalam industri ketenagalistrikan / There is no regulation that prohibits upstream and downstream business development in the electricity industry
- Model bisnis B2B yang meningkatkan keuntungan / Profit-enhancing B2B business model
- Kebijakan Pemerintah terhadap kendaraan listrik meningkatkan penjualan / Government policies on electric vehicles increase sales
- Melakukan bisnis hulu energi primer untuk memastikan tarif yang *affordable*, menjadi *economic driver* dan menjaga keberlangsungan pasokan energi primer (PLN sebagai *captive market*) / Conducts upstream primary energy business to ensure affordable tariffs, become economic drivers, and maintain the continuity of primary energy supply (PLN as a captive market)
- Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan membutuhkan pengembangan infrastruktur kelistrikan yang masif berbasis energi terbarukan dengan perkiraan konsumsi listrik mencapai 4.000 kWh/kapita/tahun pada tahun 2029 dengan keandalan ekstra dan pemanfaatan energi terbarukan dari angin dan hidro / The plan for relocation of the National Capital City to Kalimantan requires massive development of a renewable energy-based electricity infrastructure with an estimated electricity consumption of 4,000 kWh/capita/year by 2029 with extra reliability and the use of renewable energy from wind and hydro
- Tren penggunaan kendaraan listrik yang akan mengkonversi kebutuhan BBM menjadi energi listrik sehingga akan berpengaruh terhadap penjualan tenaga listrik, pola pembebanan dan juga keekonomian tarif listrik. / Trends in the use of electric vehicles that will convert the need for fuel oil into electrical energy so that it will affect the sales of electric power, the pattern of loading and also the economics of electricity tariffs.

Threat

- *Legal risk* dalam pengambilan keputusan bisnis strategis / Legal risk in strategic business decision making
- Penerbitan wilayah usaha yang memiliki potensi bagus dan akan membangun pembangkit sendiri / Issuance of business areas that have good potential and they will build their own power plants
- Pertumbuhan konsumsi energi untuk industri mengalami penurunan / Energy consumption growth for industry has decreases
- PLN rentan diintervensi oleh berbagai kepentingan karena memiliki aset yang besar dan memiliki peran strategis dalam dinamika perekonomian Indonesia / PLN is vulnerable to intervention by various interests because it has large assets and has a strategic role in the dynamics of the Indonesian economy
- Isu lingkungan dan perizinan berdampak pada aspek komersial dan kelangsungan operasional pembangkit / Environmental and licensing issues have an impact on the commercial and operational sustainability aspects of power plant
- Kebijakan energi primer diperlakukan sebagai komoditas / Primary energy policy is treated as a commodity
- Penguasaan energi primer oleh swasta mengancam security of supply baik dari sisi harga maupun jumlah / Private ownership of primary energy threatens security of supply both in terms of price and quantity
- Rencana implementasi parameter efisiensi yang sangat ketat untuk perhitungan BPP / Highly strict efficiency parameter implementation plan for BPP calculation
- Tarif EBT yang belum affordable / Unaffordable NRE rates
- *Disruption technology* yang dapat mengurangi pasar penjualan tenaga listrik / Disruption technology that can reduce the electricity sales market

Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*

Perseroan menggunakan beberapa pertimbangan dalam melakukan *assessment* tersebut. Asumsi yang digunakan mengacu kepada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan kebijakan Pemerintah lainnya seperti asumsi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan jumlah penduduk, inflasi, target elektrifikasi dan target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Proyeksi pertumbuhan ekonomi memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor ekonomi dan waktu pemulihan untuk setiap sektor terkait. Asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut menggunakan 2 (dua) skenario: optimis dan moderat. Disamping itu, PLN menggunakan data daftar tunggu pelanggan besar serta program pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Wisata Super Prioritas, dan lain-lain.

Assumptions used by the management in conducting assessment

The Company considers several matters in conducting the assessment. The assumptions used refer to the National Electricity General Plan (RUKN) and other Government policies, such as assumptions of economic growth, population growth and number, inflation, electrification targets, and targets for the development of New and Renewable Energy (NRE). Economic growth projections take into account the impact of the COVID-19 pandemic on economic sectors and the recovery duration for each related sector. The assumption of the economic growth projection uses 2 (two) scenarios: optimistic and moderate. In addition, PLN uses waiting list data for large customers as well as government programs, such as Special Economic Zones (SEZ), Industrial Estates (KI), Priority Tourism Destinations (DPP), Super Priority Tourist Destinations, and others.

05

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

KOMITMEN TATA KELOLA

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN senantiasa menjunjung tinggi norma moral dan sosial serta kepentingan masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *good corporate governance* (GCG) dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, implementasi GCG selalu berpedoman kepada pada peraturan perundang-undangan dan *best practice* untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, pegawai, pelanggan, mitra usaha dan masyarakat sekitar. Hal ini merupakan wujud dari komitmen PLN menjadi entitas bisnis yang baik, bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, serta mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITMENT

In carrying out business activities, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN always upholds moral and social norms and the interests of the community based on the principles of good corporate governance (GCG). In addition, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) always refers to the laws and regulations, as well as best practices to produce optimal benefits for shareholders, employees, customers, business partners and the surrounding community. This is a manifestation of PLN's commitment to become a good business entity, act and behave in accordance with laws, regulations, and ethics, and implement an effective management system.

PLN senantiasa menyempurnakan dan memutakhirkan *soft structure* GCG untuk mendukung kinerja struktur GCG dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar selalu sesuai dengan praktik terbaik di lingkungan bisnis, merespons kondisi dan perkembangan usaha Perusahaan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PLN continuously improves and updates the GCG soft structure to support the performance of the GCG structure in the implementation of Good Corporate Governance so that it is always in accordance with best practices in the business environment, responding to the Company's business conditions and developments, as well as changes in the applicable laws and regulations.

PLN mengeluarkan beragam kebijakan terkait GCG, melakukan penguatan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, serta penyempurnaan perangkat pengendalian internal dalam rangka memperkuat dan menerapkan *best practice* implementasi GCG di segenap lingkungan usaha PLN. Adapun beragam kegiatan GCG yang dilakukan PLN di sepanjang tahun 2021 di antaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Self Asessment* GCG periode tahun 2021;
2. Implementasi Aplikasi GCG *Monitoring and Control System*;
3. *Monitoring* dan pemenuhan *Area of Improvement* Asesmen GCG periode tahun sebelumnya;
4. Proses *review* dan pembahasan untuk pemutakhiran Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan;
5. Induksi kepada Dewan Komisaris dan Direksi baru;
6. Implementasi *Maturity Level* Kepatuhan;
7. Implementasi *Maturity Level* Manajemen Risiko (ERM);

PLN issues various policies related to GCG, strengthens the organization and improves services to customers, as well as improves internal control tools in order to strengthen and implement the best practices of GCG in all PLN business environments. The various GCG activities carried out by PLN throughout 2021 are as follows:

1. Implementation of GCG Self Assessment for 2021 period;
2. Implementation of GCG Monitoring and Control System Application;
3. Monitoring and fulfillment of the GCG Assessment Area of Improvement for the previous year;
4. The review and discussion process for updating the GCG Guidelines and the Company's Board Manual;
5. Induction to the new Board of Commissioners and Directors;
6. Implementation of Maturity Level Compliance;
7. Implementation of Maturity Level Risk Management (ERM);

8. Penyempurnaan pemantauan Kinerja Korporat dengan pemantauan Kinerja Individual Direksi yang disampaikan melalui Laporan Manajemen;
9. Pembentukan Divisi Pusat Kebijakan sebagai pusat data dan harmonisasi kebijakan Perusahaan;
10. Penguatan fungsi manajemen risiko dengan prinsip *Four Eyes Principles*.

8. Improvement of Corporate Performance monitoring by monitoring the Individual Performance of the Board of Directors submitted through Management Reports;
9. Establishment of the Policy Center Division as a data center and harmonization of Company policies;
10. Strengthening the risk management function with the Four Eyes Principles.

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG yang dilakukan PLN di semua lini usahanya berdasarkan beragam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG carried out by PLN in all its business lines is based on various policies and the prevailing laws and regulations as follows:

Dasar Hukum / *Legal Basis*	Jenis Regulasi / *Regulation*
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia / Law of the Republic of Indonesia	• UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs). • UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. / Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. / Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. / Law No. 14 of 2008 on Information Disclosure.
Peraturan Menteri (Permen) BUMN / Regulation of the Minister of SOEs	• Permen BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER- 01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No. PER-09/MBU/2012 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. • Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs. • Permen BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 on The Fourth Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. • Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 on General Guidelines for the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises. • Permen BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 on Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/2012 on Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises • Permen BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020, tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020, on The Fifth Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises • Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 on Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises • Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 on The Sixth Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises • Permen BUMN No. PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara / Regulation of the Minister of SOEs No. PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021 on The Second Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises

Dasar Hukum / *Legal Basis*	Jenis Regulasi / *Regulation*
Surat Keputusan/ Surat Edaran Kementerian BUMN / Decree/ Circular Letter of the Ministry of SOEs	• SE Menteri Negara BUMN No. SE-01/MBU/S/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, Dan/Atau Anggota Legislatif Dan/Atau Calon Anggota Legislatif. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-01/MBU/S/01/2019 dated January 22, 2019 on Involvement of the Board of Directors and Board of Commissioners of the SOE Group (SOEs, Subsidiaries of SOEs, and Affiliated Companies of SOEs) as Management of Political Parties, and/or Legislative Members, and/or Candidate of Legislative Members. • SE Menteri Negara BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan BUMN yang bersih melalui implementasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanganan kepentingan serta pengawasan intern. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019 on clean management of SOEs through the prevention of corruption, collusion, and nepotism and handling of interests and internal supervision. • SE Menteri Negara BUMN No. SE-7/MBU/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ketaatan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance*. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/12/2019 dated December 3, 2019 on Compliance with the Provisions of Laws and Regulations in the Framework of Implementing Good Corporate Governance. • SE Menteri Negara BUMN No. SE-8/MBU/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 Larangan Memberikan *Souvenir* atau Sejenisnya. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-8/MBU/12/2019 dated December 5, 2019 on Prohibition of Giving Souvenirs or the Like. • SE Menteri Negara BUMN No. SE-9/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penerapan Etika dan/atau kepatutan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-9/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 on Implementation of Ethics and/or Propriety in the Management and Supervision of Company. • SE Menteri Negara BUMN No. SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. SK-315/MBU/12/2019 dated December 12, 2019 on Structuring Subsidiaries or Joint Ventures within SOEs. • SE Menteri Negara BUMN No. 6/MBU/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Afiliasi yang Terkonsolidasi Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 6/MBU/06/2020 dated June 16, 2020 on General Meeting of Shareholders in Subsidiaries of State-Owned Enterprises and Consolidated Affiliation of State-Owned Enterprises. • SE Menteri Negara BUMN No. 7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 on Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises. • SE Menteri Negara BUMN No. 12/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober tentang Larangan Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) dan Penggunaan Sumber Daya BUMN Group dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 12/MBU/10/2020 dated October 27 on Prohibition of the Involvement of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Boards, and Employees of SOE Group (SOEs, Subsidiaries of SOEs, and Affiliated Companies of SOEs) and the Use of SOE Group's Resources in Practical Political Activities for Regional Head Elections (Pilkada). • SE Menteri Negara BUMN No. 7/MBU/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 7/MBU/05/2021 dated May 5, 2021 on Prevention of Corruption and Control of Gratifications Related to Holidays within the State-Owned Enterprise Group. • SE Menteri Negara BUMN No. 9/MBU/09/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 9/MBU/09/2021 dated September 10, 2021 on Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. • SE Menteri Negara BUMN No. 10/MBU/09/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Tatanan Kebiasaan Baru di Lingkungan Grup Badan Usaha Milik Negara. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 10/MBU/09/2021 dated September 16, 2021 on New Normal Arrangement in the State-Owned Enterprise Group. • SE Menteri Negara BUMN No. 15/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Larangan Insan Badan Usaha Milik Negara Terlibat dalam Tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. / Circular Letter of the Minister of SOEs No. 15/MBU/10/2021 dated October 29, 2021 on Prohibition of State-Owned Enterprise Personnel Engaging in Violent-Based Extremism Actions that Lead to Terrorism. • Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang tentang Indikator/ Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. / Decree of the Secretary of Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. • Pedoman Pelaksanaan Asesmen Bagi Talenta Direksi BUMN / Guidelines for the Implementation of Talent Assessment for Board of Directors in SOEs
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) / Regulation of Financial Services Authority (POJK)	• POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; / POJK No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; • POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; / POJK No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies; • POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; / POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies; • POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik; / POJK No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies; • POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit; / POJK No. 55/POJK.04/2015 on Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee; • POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; / POJK No. 56/POJK.04/2015 on Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter; • POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. / POJK No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies.

Dasar Hukum / *Legal Basis*	Jenis Regulasi / *Regulation*
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) / Circular Letter of Financial Services Authority (SE OJK)	• SE OJK No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. / SE OJK No. 55 /POJK.04/2015 dated December 29, 2015 on Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee. • SE OJK No. 30 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. / SE OJK No. 30 of 2016 on Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.
Lain-lain / Others	Pedoman Umum *Good Corporate Governance* dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). / General Guidelines for Good Corporate Governance from the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Dengan berpedoman kepada beragam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, PLN menyusun kebijakan perusahaan tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau *Code of Corporate Governance* yang terakhir dimutakhirkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menopang implementasi GCG yang dilakukan PLN dapat berjalan efektif dan efisien.

By referring to the aforementioned policies and the prevailing laws and regulations, PLN has drawn up a company policy regarding the Code of Corporate Governance, which was last updated on October 28, 2016 and signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors. This policy is expected to be able to support the implementation of GCG carried out by PLN to run effectively and efficiently.

MILESTONE GCG

Beragam pencapaian penting telah dilaksanakan oleh PLN dalam rangka implementasi GCG dari tahun 2002 hingga tahun 2021 yang dapat diringkas sebagai berikut:

GCG MILESTONE

Various important achievements have been carried out by PLN in the context of implementing GCG from 2002 to 2021 which can be summarized as follows:

Tahun / *Year*	Jenis Kegiatan / *Activities*
2002	Pengukuran/analisis gap implementasi GCG / Measurement/analysis of GCG implementation.
2003	• Deklarasi Komitmen GCG / Declaration of GCG Commitment • Peluncuran Pedoman GCG / Launch of GCG Guidelines
2009	• Peluncuran *Board Manual*. / Launch of Board Manual • Pembentukan Komite GCG Dewan Komisaris. / Establishment of GCG Committeeof the Board of Commissioners. • Pembentukan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. / Establishment of the Risk and Compliance Management Division. • GCG menjadi salah satu indikator kinerja Perusahaan / GCG is a part of the Company's performance indicators.
2010	Peluncuran buku saku Pedoman *Code of Conduct* / Launch of the Code of Conduct pocket book.
2012	• Peluncuran Pedoman Gratifikasi. / Launch of Gratuity Guidelines. • Peluncuran Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS). / Launch of Whistleblowing System (WBS) Policy. • Pemutakhiran Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. / Update of Guidelines for Procurement of Goods and Services.
2013	• Kerja sama dengan Transparansi International Indonesia (TII) terkait Program PLN Berintegritas. / Collaboration with Transparansi International Indonesia (TII) regarding the PLN Integrity Program. • Implementasi sistem pengendalian internal berbasis COSO-IcoFR. / Implementation of COSO-IcoFR-based internal control system.
2014	• Peluncuran Program PLN Bersih (Gratifikasi, LHKPN, *Complaint Handling System*). / Launch of "PLN Bersih" Program (Gratuity, LHKPN, Complaint Handling System). • Pembentukan *Change Agent* PLN Bersih. / Establishment of "PLN Bersih" Change Agent.
2015	Penguatan struktur CSR / Strengthening CSR structure
2016	• Pemutakhiran Pedoman GCG dan *Board Manual*. / Update of GCG Guidelines and Board Manual. • Pemutakhiran kebijakan *Whistleblowing System*. / Update of Whistleblowing System policy.
2017	• Pemutakhiran *Internal Audit Charter*. / Update of Internal Audit Charter. • Pemutakhiran *Code of Ethic dan Code of Conduct*. / Update of Code of Ethics and Code of Conduct. • Pemutakhiran Pedoman Gratifikasi dan LHKPN. / Update of Gratuity and LHKPN Guidelines.

Tahun / *Year*	Jenis Kegiatan / *Activities*
2018	• Pemutakhiran komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan. / Update of commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Code of Conduct and Business Ethics. • Pemanfaatan IT untuk memperluas komitmen terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. / Use of IT to expand commitment to Code of Conduct and Business Ethics. • Penguatan relasi dengan *stakeholders* lewat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 8 E/DIR/2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) di Lingkungan PT PLN (Persero). / Strengthening relations with stakeholders through the Circular Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 8E/DIR/2018 on Technical Guidelines for Stakeholder Governance within PT PLN (Persero). • Pembentukan Divisi Kepatuhan. / Establishment of Compliance Division. • Pembentukan Divisi *Change Management Office*. / Establishment of Change Management Office Division. • Pembentukan Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan. / Establishment of Business and Customer Service Department.
2019	• Sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis serta peluncuran Tata Nilai PLN dengan *tagline* "PLN Terbaik." / Dissemination of Code of Conduct and Business Ethics and launching of PLN Values with the tagline "PLN Terbaik." • Pembaharuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perdir No. 0164.P/DIR/2019 / Update of Guidelines for Procurement of Goods and Services pursuant to Regulation of Board of Directors No. 0164.P/DIR/2019. • Pembaharuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dengan Perdir No. 0117.P/DIR/2019 dan penetapan Perdir No. 0119.P/DIR/2019 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk kegiatan dan Rancangan Keputusan / Update of Guidelines for Implementation of Risk Management pursuant to Regulation of the Board of Directors No. 0117.P/DIR/2019 and Regulation of the Board of Directors No. 0119.P/DIR/2019 on Mechanisms for Preparing and Monitoring Risk Assessments for Activities and Draft of Decisions. • Penerbitan Perdir No. 0196.P/DIR/2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) / Issuance of Regulation of the Board of Directors No. 0196.P/DIR/2019 on Implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) • Penerbitan Perdir No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero) / Issuance of Regulation of the Board of Directors No. 0121.P/DIR/2019 on Anti-Fraud Policy within PT PLN (Persero). • Penerbitan Pedoman Direksi No. 0122.P/DIR/2019 mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero) / Issuance of Guidelines of the Board of Directors No. 0122.P/DIR/2019 on Management of Conflicts of Interest within PT PLN (Persero) • Pelaksanaan *Gap Analysis* SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan / Implementation of SNI ISO 37001: 2016 Gap Analysis on the Anti-Bribery Management System. • Perubahan atas Perdir No 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). / Amendment to Regulation of the Board of Directors No. 0051.P/DIR/2018 on Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero). • Perubahan Kedua atas Perdir No 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). / Second Amendment to Regulation of the Board of Directors No 0051.P/DIR/2018 on Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero).
2020	• Penerbitan Perdir Nomor 0048.P/DIR/2020 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero). / Issuance of Regulation of the Board of Directors No. 0048.P/DIR/2020 on Anti-Bribery Governance within PT PLN (Persero). • Implementasi *Pilot Project* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 di beberapa Divisi Kantor Pusat dan Unit Induk PLN dan Anak Perusahaan. / Implementation of SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System Pilot Project in several Head Office Divisions and PLN Main Development Units and Subsidiaries. • Sosialisasi SMAP untuk mitra kerja PLN. / Dissemination of SMAP for PLN business partners. • Penerbitan Pedoman *Maturity Level* Kepatuhan 2020. / Issuance of Guidelines for 2020 Compliance Maturity Level. • Inisiasi Aplikasi GCG *Control and Monitoring System.* / Initiation of GCG Control and Monitoring System Application. • Penerbitan Perdir Nomor 0063.P/DIR/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0004.P/DIR/2018 tentang Direktori Kompetensi PT PLN (Persero). / Issuance of Regulation of the Board of Directors Number 0063.P/DIR/2020 on Amendment to Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0004.P/DIR/2018 on Competency Directory of PT PLN (Persero).
2021	• Implementasi Maturity Level Manajemen Risiko (ERM). / Implementation of Maturity Level Risk Management (ERM). • Penerbitan Perdir No. 0162.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). / Issuance of Perdir No. 0162.P/DIR/2021 about Organization and Work Procedure at PT PLN (Persero. • Terbentuknya Komite Sustainability PT PLN (Persero). / The establishment of the PT PLN (Persero) Sustainability Committee.. • Penerbitan Perdir No. 0071.P/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero). / Issuance of Perdir No. 0071.P/DIR/2021 concerning General Guidelines for Integrated Risk Management of PT PLN (Persero). • Penerbitan Perdir No. 0141.P/DIR/2021 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero). / Issuance of Perdir No. 0141.P/DIR/2021 concerning Architecture and Policy Governance of PT PLN (Persero).

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

PLN memiliki beragam peraturan dan kebijakan (*soft structure*) yang diterbitkan dengan mengacu peraturan serta perundang-undangan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah dan regulator serta perubahan dari berbagai regulasi yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0141.P/DIR/2021 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero), arsitektur kebijakan PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

COMPANY REGULATIONS

PLN has a variety of regulations (soft structures) that are issued with reference to new regulations and laws issued by the Government and regulators as well as changes to various previously existing regulations. Based on the Board of Directors Regulation Number 0141.P/DIR/2021 concerning Architecture and Policy Governance of PT PLN (Persero), the policy architecture of PT PLN (Persero) is as follows:

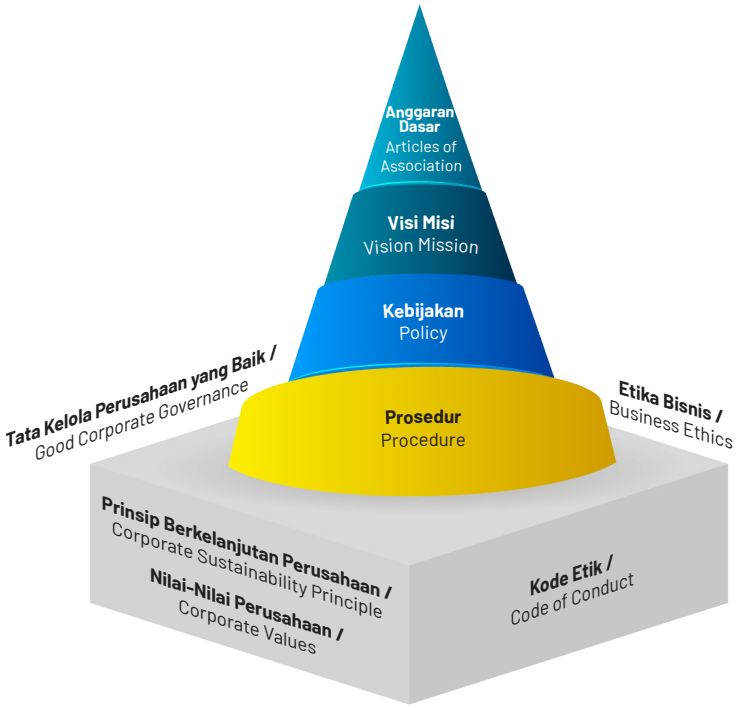

PLN senantiasa menyempurnakan dan memutakhirkan *soft structure* GCG untuk mendukung kinerja struktur GCG dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar selalu sesuai dengan praktik terbaik di lingkungan bisnis, merespons kondisi dan perkembangan usaha Perusahaan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan *soft structure* GCG secara umum telah sesuai dengan *best practices* penerapan *Good Corporate Governance*, yang terlihat dari adanya infrastruktur pendukung penerapan GCG yang telah dimiliki oleh Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

PLN continuously improves and updates the GCG soft structure to support the performance of the GCG structure in the implementation of Good Corporate Governance so that it is always in accordance with best practices in the business environment, responding to the Company's business conditions and developments, as well as changes in the applicable laws and regulations. The availability of the GCG soft structure in general is in accordance with the best practices for the implementation of Good Corporate Governance, which can be seen from the supporting infrastructure for the implementation of GCG that has been owned by the Company, including the following:

Jenis Peraturan / *Regulation*	Keterangan dan Pemutakhiran / *Description and Updates*
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / Articles of Association	Pada tahun 2021, keseluruhan pasal dalam Anggaran Dasar PT PLN (Persero) dinyatakan kembali dalam akta notaris Lenny Janis Ishak No.4, tanggal 3 September 2021. / In 2021, all articles in the Articles of Association of PT PLN (Persero) are restated in the notarial deed of Lenny Janis Ishak No.4, dated 3 September 2021.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan / GCG Code	• Pedoman GCG menjadi acuan bagi seluruh organ Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Pedoman GCG difokuskan pada fungsi dan tanggung jawab organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan GCG. Pedoman GCG ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan. / The GCG Code is a reference for all Company's organs in carrying out their respective duties and obligations. The GCG guidelines are focused on the functions and responsibilities of the Company's organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, as the frontline in the implementation of GCG. The GCG Code is reviewed periodically according to the needs of the Company. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh segenap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PLN. / Last updated on October 10, 2016 which was signed by the entire Board of Commissioners and Board of Directors of PLN.

Jenis Peraturan / *Regulation*	Keterangan dan Pemutakhiran / *Description and Updates*
Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) / Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors	• Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) menjadi panduan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Board Manual PLN terdiri dari Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris (Buku 1) yang mengatur tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, Board Manual Direksi (Buku 2) yang mengatur tata laksana hubungan kerja di organ Direksi dan Board Manual Buku Dewan Komisaris (Buku 3) yang mengatur tata laksana kerja di organ Dewan Komisaris. / The Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors serves as a guide for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission. The PLN Board Manual consists of the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Book 1) which regulates the procedures for working relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Board Manual of the Board of Directors (Book 2) which regulates the procedures for working relations in the organs of the Board of Directors and the Board Manual of the Board of Commissioners (Book 3) which regulates the work procedures in the organs of the Board of Commissioners. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh segenap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PLN. / Last updated on October 10, 2016 which was signed by the entire Board of Commissioners and Board of Directors of PLN.
Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan (*Code of Conduct*) / Code of Conduct	• Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) merupakan panduan bagi seluruh insan PLN untuk berperilaku sesuai dengan harapan Perusahaan, sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PLN dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Setiap tahun PLN melakukan internalisasi dan sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh insan PLN dan anak perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan pemimpin unit yang harus diikuti dengan menandatangani pernyataan komitmen untuk melaksanakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Penandatanganan komitmen dilakukan melalui media aplikasi KOMANDO sehingga dapat dijangkau oleh insan PLN di seluruh Indonesia. / The Code of Conduct is a guide for all PLN's personnel to behave in accordance with the Company's expectations, so that in the end it will be embedded and become a distinctive behavior that distinguishes PLN from other companies. Every year PLN internalizes and disseminates the Code of Conduct and Business Ethics to all employees of PLN and its subsidiaries, the Board of Commissioners, Board of Directors and unit leaders, which must be followed by signing a statement of commitment to implement the Code of Conduct and Business Ethics. The signing of the commitment is carried out through the KOMANDO application media so that it can be reached by PLN's personnel throughout Indonesia. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal Februari 2021 seiring dengan perubahan Tata Nilai menjadi Tata Nilai AKHLAK yang berlaku di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dokumen ini ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PLN. / Last updated in February 2021 in line with the change in the Corporate Values to AKHLAK Values, which apply to all State-Owned Enterprises (SOEs). This document is signed by the President Director and the President Commissioner of PLN.
Komite *Audit Charter* / Audit Committee Charter	• Piagam Komite Audit menjadi pedoman bagi Komite Audit yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris secara efisien, efektif, transparan profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. / The Audit Committee Charter is a guideline for the Audit Committee which regulates the position, duties, authorities, obligations and responsibilities as well as the rights of the Audit Committee in carrying out its duties and functions in assisting the Board of Commissioners in an efficient, effective, transparent, professional, independent and accountable manner. • Terakhir dimutakhirkan pada bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero). / Last updated in October 2019 signed by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero).
Komite Manajemen Risiko *Charter* / Risk Management Committee Charter	• Piagam Komite Manajemen Risiko menjadi pedoman bagi Komite Manajemen Risiko yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris secara efisien, efektif, transparan profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. / The Risk Management Committee Charter is a guideline for the Risk Management Committee that regulates the position, duties, authorities, obligations, and responsibilities as well as the rights of the Risk Management Committee in carrying out its duties and functions in assisting the Board of Commissioners in an efficient, effective, transparent, professional, independent, and accountable manner. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero). / Last updated on December 21, 2021 and signed by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero).
Komite Nominasi dan Remunerasi *Charter* / Nomination and Remuneration Committee Charter	• Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris secara efisien, efektif, transparan profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. / The Nomination and Remuneration Committee Charter serves as a guide for the Nomination and Remuneration Committee which regulates the positions, duties, authorities, obligations and responsibilities as well as the rights of the Nomination and Remuneration Committee in carrying out their duties and functions in assisting the Board of Commissioners in an efficient, effective, transparent, professional and independent manner. and accountable. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero). / Last updated on June 17, 2021, signed by the Board of Commissioners of PT PLN (Persero).
Piagam Pengawasan Internal / Internal Audit Charter	• Piagam Pengawasan Intern menjadi pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan kegiatan SPI. Piagam Pengawasan Intern tidak membatasi Auditor Internal untuk membuat pertimbangan profesional dan audit yang inovatif. / The Internal Audit Charter is the guidelines for the implementation of duties, responsibilities, authorities, and independence of the Internal Audit Unit (SPI) in carrying out its activities. The Internal Audit Charter does not restrict Internal Auditors from making professional judgments and innovative audits. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. / Last updated on September 04, 2020 which was signed by the President Director and President Commissioner.

Jenis Peraturan / *Regulation*	Keterangan dan Pemutakhiran / *Description and Updates*
Buku Pedoman Manajemen Risiko / Risk Management Guidelines Book	PLN memiliki Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0071.P/DIR/2021 pada tanggal 15 April 2021 untuk menjaga agar PLN tetap dalam koridor pengelolaan usaha yang berkehati-hatian dalam setiap aktivitas yang dilakukannya melalui pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal terkait dengan penerapan *good corporate governance*. Peraturan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0117.P/DIR/2019 dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0119.P/ DIR/2019. Untuk melengkapi pedoman manajemen risiko terintegrasi tersebut, PLN menetapkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0010.E/DIR/2021 tentang Prosedur Pelaksanaan Four-Eyes Principle (4EP) dalam Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Desember 2021. / PLN has Integrated Risk Management General Guidelines as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0071.P/DIR/2021 dated April 15, 2021 to keep PLN in the prudent business management in every activity it undertakes through compliance with the laws and regulations and internal regulations related to the implementation of good corporate governance. The regulation also revokes the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0117.P/DIR/2019 and the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2019. To complete the integrated risk management guidelines, PLN has issued a Circular of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2021 concerning Procedures for Implementation of the Four-Eyes Principle (4EP) in Decision Making on December 22, 2021.
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa / Guidelines for Procurement of Goods and Services	• Ketentuan pengadaan barang dan jasa diatur melalui Perdir Nomor 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Perdir ini memuat petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sesuai dengan praktik terbaik. / Provisions for the procurement of goods and services are regulated in Regulation of the Board of Directors No. 0022.P/DIR/2020 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services in PT PLN (Persero). This regulation contains technical instructions for the procurement of goods and services within PLN so that the process of procurement of goods and services can be carried out efficiently, effectively, transparently and accountably, in accordance with best practices. • Terakhir dimutakhirkan pada tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). / Last updated on August 30, 2021, signed by the President Director by virtue of Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0156.P/DIR/2021 on Amendments to Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0022.P/DIR/2020 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services in PT PLN (Persero).
Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System	• Perusahaan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang diatur dalam Surat Edaran Direksi (EDIR) Nomor 21.E/DIR/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan telah diperbarui melalui EDIR Nomor 0008.E/DIR/2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tanggal 30 September 2016. / The Company implements a whistleblowing system, which is regulated in Circular Letter of the Board of Directors No. 21.E/DIR/2012 on Whistleblowing System and has been updated pursuant to Circular Letter of the Board of Directors No. 0008.E/DIR/2016 on Whistleblowing System dated September 30, 2016.
Pedoman Organisasi / Guidelines for Organization	Pedoman terkini tentang organisasi dan tata kerja PLN diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0162.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja PT PLN (Persero) yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021 sebagai acuan organisasi Perusahaan yang bertujuan untuk menyesuaikan organisasi dengan perubahan nomenklatur jabatan Direksi PLN dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab, akuntabilitas, koordinasi dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. / Latest Guidelines on the organization and work procedures of PLN are regulated in the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0162.P/DIR/2021 on the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero) which was stipulated on October 28, 2021 as a reference for the Company's organization which aims to adjust the organization by changing the nomenclature of the position of the Board of Directors of PLN and increasing the effectiveness of the implementation of responsibilities, accountability, coordination, and decision making quickly and accurately.
Kebijakan Pelaporan LHKPN / LHKPN Reporting Policy	Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat struktural di lingkungan PLN diatur dalam Perdir Nomor 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero). / The obligation to submit a State Administrators Asset Report (LHKPN) for structural officials within PLN is regulated in Regulation of the Board of Directors No. 0074.P/DIR/2017 on Guidelines for State Administrators Asset Reports (LHKPN) within PT PLN (Persero).
Kebijakan Transaksi Keuangan Perusahaan / Company Financial Transaction Policy	• Perdir Nomor 0054.K/DIR/2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja Guna Mendukung PLN Bersih. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindarkan insan PLN dari segala bentuk penyimpangan praktik bisnis termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. / Board of Directors Regulation No. 0054.K/DIR/2014 on Guidelines for Financial Transactions between PT PLN (Persero) and the Business Partners to Support Clean PLN. This policy aims to prevent PLN's personnel from any forms of business practice irregularities including corruption, collusion, and nepotism. • Perdir No. 0168.2021 tentang Penyampaian Peraturan Direksi tentang Kebijakan Strategis Sentralisasi Pembayaran PT PLN (Persero). / Board of Directors No.0168.2021 on Submission of Regulation of the Board of Directors on the Strategic Policy of Centralized Payments of PT PLN (Persero). • Perdir Nomor 0069.P/DIR/2021 tentang Pedoman Investasi Pengembangan dan Pengelolaan Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang bertujuan untuk memastikan proses perencanaan investasi dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian disertai dengan mekanisme *check and balance* serta mempercepat pengambilan keputusan dalam penetapan proyek investasi yang akan dilaksanakan di lingkungan PLN termasuk urutan prioritasnya. / Board of Directors Regulation No. 0069.P/DIR/2021 concerning Guidelines for Investment in the Development and Management of Electricity in PT PLN (Persero) which aims to ensure that the investment planning process is carried out carefully and with prudence accompanied by a check and balance mechanism and accelerates decision making in determining investment projects to be implemented within PLN, including the order of priority.
Kebijakan Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan / Policy on Prevention of Gratification and Conflict of Interest	Kebijakan pencegahan gratifikasi diatur dalam Perdir Nomor 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi insan PLN untuk mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih dan sehat serta bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Terkait potensi benturan kepentingan dalam proses bisnis, PLN menerbitkan Perdir Nomor 0122.P/DIR/2019 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PLN. Selanjutnya, pada tahun 2020, PLN menerbitkan Perdir Nomor 0048.P/DIR/2020 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero). / Policy on prevention of gratification is regulated in Regulation of the Board of Directors No. 0076.P/DIR/2017 on Guidelines for Gratification Control at PLN. This policy is the guidelines for PLN's personnel to take a firm stance on gratification in order to realize a clean and healthy management of the Company and free from any forms of corruption, collusion, and nepotism. Regarding potential conflicts of interest in business processes, PLN issued Regulation of the Board of Directors No. 0122.P/DIR/2019 on Management of Conflict of Interest within PLN. Furthermore, in 2020, PLN issued Regulation of the Board of Directors No. 0048.P/DIR/2020 on Anti-Bribery Governance within PT PLN (Persero).

Jenis Peraturan / *Regulation*	Keterangan dan Pemutakhiran / *Description and Updates*
Kebijakan Manajemen Portofolio Bisnis / Business Portfolio Management Policy	PLN menerbitkan Perdir Nomor 1780.P/DIR/2018 sebagai pedoman untuk menyelaraskan arah dan strategi manajemen portofolio bisnis PLN beserta anak perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi Grup PLN secara keseluruhan, memperjelas akuntabilitas interaksi antara PLN sebagai perusahaan induk dengan anak perusahaan, meningkatkan sinergi antara Grup PLN secara keseluruhan dan melakukan manajemen portofolio bisnis PLN dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Misi manajemen portofolio bisnis PLN dikenal dengan SOLID (*Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capability, Increasing Profit Contribution dan Developing New Edge*). / PLN issued Regulation of the Board of Directors No. 1780.P/DIR/2018 as the guidelines to align the direction and strategy of the management of the business portfolio of PLN and its subsidiaries in order to provide added value to the PLN Group as a whole, clarify the accountability of interactions between PLN as the parent company and its subsidiaries, enhance synergies between the PLN Group as a whole and manage PLN's business portfolio by applying the principles of GCG. PLN's business portfolio management mission is known as SOLID (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capability, Increasing Profit Contribution and Developing New Edge).
Kebijakan Pelayanan Pelanggan / Customer Service Policy	Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, Perusahaan memiliki sejumlah kebijakan terkait pelayanan pelanggan di antaranya yaitu Keputusan Direksi (Kepdir) Nomor 022.K/DIR/2012 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik di Lingkungan PT PLN (Persero), Edir Nomor 004.E/DIR/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan, Edir Nomor 0001.E/DIR/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya Bagi Pelanggan Tegangan Rendah Dengan Daya 100 sampai dengan 200 kVA dan lain-lain. / In order to provide the best service for customers, the Company has a number of policies related to customer service, namely the Decree of the Board of Directors No. 022.K/DIR/2012 on Quality Level of Electricity Supply Services within PT PLN (Persero), Circular Letter of the Board of Directors No. 004.E/ DIR/2012 on Procedures for Implementing Compensation for Service Quality Levels, Board of Directors Decree No. 0001.E/DIR/2016 concerning Procedures for Accelerating New Connections and Changes in Power for Low Voltage Customers with 100 to 200 kVA Power and others.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh organ utama GCG yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Kemudian Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan menasihati Direksi yang bertugas melakukan pengelolaan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya RUPS bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh Organ Pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pelaksanaan tugas Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, satuan kerja lainnya di bawah Direksi baik selevel Sub Direktorat maupun Divisi, Unit-Unit Bisnis dan Penunjang serta Komite-Komite yang di bawah Direksi, diantaranya Komite IPP dan Kerja Sama Kemitraan, Komite Energi Primer, Komite Investasi dan Pendanaan, Komite Niaga, Komite SDM dan Organisasi, Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi, Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset, Komite Operasional, dan Komite *Sustainability*.

Selain itu, PLN telah menerapkan proses audit independen terhadap penyajian laporan keuangan tahunan, laporan hasil evaluasi kinerja dan laporan tingkat kepatuhan perusahaan

MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

The mechanism of corporate governance is a process of implementing the principles of corporate governance supported by the main organs of GCG, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, with the highest position being the GMS. Then the Board of Commissioners has the function of supervising and advising the Board of Directors that is in charge of managing the Company.

In its implementation, the GMS together with the Board of Commissioners and the Board of Directors are assisted by the Supporting Organs under the Board of Commissioners consisting of the Audit Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

The implementation of the duties of the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, other work units under the Board of Directors at the level of the Sub-Directorate and Division, Business and Supporting Units as well as Committees under the Board of Directors, including the IPP and Partnership Cooperation Committee, Energy Committee Primary, Investment and Funding Committee, Commerce Committee, HR and Organization Committee, Subsidiaries and Affiliates Committee, Asset Write-off and Disposal Committee, Operational Committee, and Sustainability Committee.

In addition, PLN has implemented an independent audit process on the preparation of the annual financial statements, performance evaluation result report and

yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Proses ini menunjukkan transparansi, serta pertanggungjawaban PLN selaku BUMN dan emiten atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaannya.

corporate compliance level by a Public Accountant. This process reflects the performance of PLN as an SOE and issuer of debt securities at home and abroad that has been carried out by the management.

Tanggung Jawab Pelaksanaan GCG

PLN menunjuk Direktur Utama sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG, sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 0162.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

Responsibilities of GCG Implementation

PLN appoints the President Director as the person-in-charge of implementing and monitoring GCG, in accordance with Board of Directors Regulation Number 0162.P/DIR/2021 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero).

PENILAIAN GCG

PLN melakukan penilaian (*assessment*) atas implementasi GCG yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik-praktik terbaik (*Best Practices*) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan penyempurnaan dapat diidentifikasi. Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dua tahun sekali dan di antara periode tersebut Perusahaan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*). Hasil penilaian GCG akan memberikan gambaran terkini terkait kondisi penerapan GCG di Perusahaan.

GCG ASSESSMENT

PLN conducts an assessment of the GCG implementation with the aim of obtaining an overview of the conditions of such implementation based on the prevailing regulations and associating it with the best practices for the GCG implementation, so that the areas that require improvement can be identified. The assessment is carried out by an independent external party every two years and in between that period the Company conducts a self-assessment. The results of the GCG assessment will provide an updated overview on the condition of GCG implementation in the Company.

Penilaian GCG tersebut menggunakan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator / Parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

The GCG Assessment is based on the standard test tool for the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Penilaian GCG tahun 2021

Pada awal tahun 2022, PLN melaksanakan *self-assessment* GCG dilakukan untuk menilai implementasi GCG periode tahun 2021. Penilaian ini dilakukan oleh asesor internal dari PT PLN (Persero) dengan informasi ringkas terkait penilaian *self-assessment* GCG sebagai berikut:

GCG Assessment in 2021

In early 2022, PLN carried out a self-assessment GCG to evaluate the GCG implementation for the period of 2021. This assessment was carried out by an internal assessor from PT PLN (Persero) with brief information related to the self-assessment GCG as follows:

Aspek / *Aspect*	Keterangan / *Description*
Jenis Penilaian / Type of Assessment	*Self-assessment* atas Penerapan *Good Corporate Governance* / *Self-assessment* on Good Corporate Governance implementation
Penilai / Assessor	Tim Internal PT PLN (Persero) / Internal Team of PT PLN (Persero)
Metode Penilaian / Assessment Method	Kegiatan reviu dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi / Document review activities, questionnaires, interviews, and observations
Periode Penerapan / Implementation Period	1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 / January 1, 2021 until December 31, 2021
Tahun Pengukuran / Assessment Year	2021

Self-assessment GCG pada tahun 2021 berdasarkan *review* dokumen yang disediakan oleh PLN, hasil wawancara, kuesioner dan konfirmasi ulang sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati para pihak. Hasil laporan Konsultan ini semata-mata dimaksudkan sebagai masukan bagi PLN dalam rangka memetakan kondisi penerapan GCG dengan mengetahui sejauh mana perbaikan praktik GCG telah dilakukan, serta memberikan skoring atas penerapan GCG di Perusahaan.

The GCG self-assessment in 2021 was based on the document review provided by PLN, the results of interviews, questionnaires, and reconfirmations in accordance with the planned work implementation schedule that has been agreed upon by the parties. The results of this Consultant's report are solely intended as input for PLN in order to map the conditions of GCG implementation by knowing the extent to which GCG practice improvements have been made, as well as providing a scoring on the implementation of GCG in the Company.

Kriteria yang Digunakan Dalam Penilaian

Penilaian penerapan GCG di PLN mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Proses penilaian GCG menggunakan standar alat uji yang diatur di dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Aspek-aspek GCG yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dengan 153 parameter. Penilaian mencakup tingkat kesesuaian penerapan GCG berdasarkan pemenuhan parameter/ *scorecard* pada 6 aspek berikut ini:

Assessment Criteria

Assessment of GCG implementation at PLN refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. GCG assessment process applies testing instrument standards set out in Decision of Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. The GCG aspects assessed are summarized in 43 indicators with 153 parameters. The assessment covers alignment of GCG implementation based on fulfillment of parameters/scorecards in the following 6 aspects:

Hasil Penilaian GCG Periode Tahun 2021

Penilaian *Self-assessment* GCG periode tahun 2021 oleh Tim Internal PT PLN (Persero) menitikberatkan pada evaluasi pemenuhan rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement/ AoI*) hasil penilaian GCG oleh BPKP pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan hasil penilaian GCG periode tahun 2021 mencapai skor 90,46.

2021 GCG Assessment Results

The 2021 GCG self-assessment by Internal Team of PT PLN (Persero) focused on evaluation of fulfillment of Area of Improvement (AoI) revealed by the previous GCG assessment by BPKP. Overall, the 2021 GCG assessment results reached a score of 90.46.

Tabel berikut menjelaskan aspek penilaian dan perbandingan skor GCG tahun buku 2020 dan 2021:

The following table describes aspects of the assessment and comparison of GCG scores for the fiscal years 2020 and 2021:

No	Aspek Pengujian / *Assessment Aspect*	Bobot / *Value*	2020		2021	
			Pencapaian / *Achievement*	%	Pencapaian / *Achievement*	%
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,000	6,848	97,83	6,848	97,83
2	Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS	9,000	7,900	87,78	8,119	90,21
3	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	35,000	33,263	95,04	33,677	96,22
4	Direksi / Board of Directors	35,000	32,024	91,50	32,290	92,26
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,000	8,274	91,93	8,272	91,91
6	Aspek Lainnya / Other Aspects	5,000	1,250	25,00	1,250	25,00
	Total Skor / Total Score	**100,000**	**89,559**	**-**	**90,456**	**-**
	Peringkat Kualitas Penerapan GCG / Quality Rating of GCG Implementation		**SANGAT BAIK / VERY GOOD**		**SANGAT BAIK / VERY GOOD**	

Rekomendasi Hasil Penilaian GCG Tahun 2021

Terhadap parameter pada masing-masing aspek pengujian yang masih memerlukan perbaikan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEPADA PEMEGANG SAHAM/ RUPS DIREKOMENDASIKAN UNTUK:
   a. Membuat berita acara hasil penilaian Uji Kesesuaikan Kompetensi (UKK) yang dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh tim;
   b. Menerima masukan secara formal dari Departemen Teknis BUMN untuk calon Anggota Komisaris;
   c. Membuat berita acara berdasarkan proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris sesuai pedoman;
   d. Menunjukkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang terpilih sesuai dengan hasil akhir penilaian;
   e. Mengesahkan RJPP Perusahaan secara tepat waktu sesuai ketentuan (selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP atau Revisi RJPP);
   f. Mengesahkan RKAP tepat waktu sesuai SK-16/S;MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN yaitu sebelum dimulainya tahun RKAP;
   g. Menetapkan Kontrak Manajemen Direksi secara Individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan menjadi bagian dari risalah RUPS;

Recommendation for the 2021 GCG Assessment Results

From the results of the Self-Assessment, there are parameters in each Aspect of Testing (indicators) that still need improvement, such as:

1. TO THE SHAREHOLDERS/GMS, IT IS RECOMMENDED TO:
   a. Make a report on the results of the Competency Conformity Test (UKK) assessment conducted by the Professional Institute and evaluated by the team;
   b. Receive formal input from the BUMN Technical Department for candidates for Commissioners;
   c. Prepare minutes based on the evaluation process of candidates for members of the Board of Commissioners according to the guidelines;
   d. Indicate that all members of the Board of Commissioners who are elected are in accordance with the final results of the assessment;
   e. Approve the Company's RJPP in a timely manner according to the provisions (no later than 60 (sixty) days after the receipt of the RJPP Draft or Revised RJPP);
   f. Approve the RKAP on time according to SK-16/S; MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of BUMN GCG Assessment, namely before the start of the RKAP year;
   g. Establish an Individual Board of Directors Management Contract which contains at least the main performance indicators and becomes part of the minutes of the GMS;

h; Memberi persetujuan secara tepat waktu (khususnya untuk persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 (tujuh) hari untuk pelepasan asset belum sepenuhnya dilaksanakan;

i. Membuat pedoman/ kebijakan terkait dividen yang bisa diakses oleh Perusahaan (saat ini yang tersedia berupa SoP internal KBUMN);

j. Menyusun rencana tindak atas *Area of Improvement* (AoI) dan menindaklanjuti *Area of Improvement* (AoI) Tata Kelola Perusahaan.

2. KEPADA DEWAN KOMISARIS DIREKOMENDASIKAN UNTUK:

a. Menyusun laporan dan dokumentasi hasil kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris;

b. Memberi tanggapan secara tepat waktu atas persetujuan RKAP dan RJP dan dari Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham belum sesuai dengan ketentuan *Board Manual*;

c. Menyesuaikan antara RKAP dengan RJPP Perusahaan;

d. Mencantumkan secara khusus/eksplisit topik-topik bahasan di bawah ini dalam RKA dan Risalah Rapat Dewan Komisaris, yaitu terkait:
   - Kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya oleh Dewan Komisaris;
   - Kebijakan mutu dan layanan;
   - Keluhan *Stakeholder*;
   - Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan;
   - Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi sesuai dengan *IT Master Plan* Perusahaan (ITMP);
   - Pelaksanaan Sistem SDM (Promosi, Mutasi, Demosi) dan Organisasi;
   - Pelaksanaan Kebijakan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan;
   - Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa serta pelaksanaannya;
   - Efektivitas Auditor Eksternal dan Auditor Internal beserta tindak lanjut temuannya;
   - Kebijakan dan pengelolaan Anak Perusahaan.

e. Seluruh Anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan;

f. Lebih memperhatikan tingkat kesegeraan komunikasi keputusan dan pemberian persetujuan/ tanggapan secara tepat waktu (7 - 14 hari) ;

h. Provide approval in a timely manner (especially for approval/decision within a period of no later than 30 (thirty) days for KSO/BOT and a maximum of 7 (seven) days for asset disposal has not been fully implemented;

i. Prepare guidelines/policies related to dividends that can be accessed by the Company (currently available in the form of KBUMN internal SoP);

j. Develop an action plan for the Area of Improvement (AoI) and follow up on the Area of Improvement (AoI) of Corporate Governance.

2. TO THE BOARD OF COMMISSIONERS, IT IS RECOMMENDED TO:

a. Prepare reports and documentation of the results of training activities attended by the Board of Commissioners;

b. Respond timely manner to the approval of the RKAP and RJP and from the Board of Directors to the Board of Commissioners and Shareholders not in accordance with the provisions of the Board Manual;

c. Adjust the RKAP with the Company's RJPP;

d. Include specifically/explicitly the topics of discussion below in the RKA and Minutes of Meetings of the Board of Commissioners, which are related to:
   - Policy/design of internal control system and its implementation by the Board of Commissioners;
   - Quality and service policies;
   - Stakeholder Complaints;
   - Policy and implementation of the Company's Risk Management;
   - Implementation of Information Technology System in accordance with the Company's IT Master Plan (ITMP);
   - Implementation of HR System (Promotion, Transfer, Demotion) and Organization;
   - Implementation of Accounting and Financial Reporting Policies;
   - Policies on the Procurement of Goods and services and their implementation;
   - Effectiveness of External Auditors and Internal Auditors and their follow-up findings;
   - Subsidiary policies and management.

e. All members of the Board of Commissioners to n the Quarterly Management Report;

f; Pay more attention to the level of immediacy of decision communication and timely approval/ response (7 - 14 days);

g. Seluruh Anggota Dewan Komisaris membuat Daftar Khusus Kepemilikan Saham;
h. Membuat telaah khusus atas hasil *Assessment* GCG untuk disampaikan kepada Direksi;
i. Membuat rencana dan membuat progress realisasi tindak lanjut pada *Area of Improvement* untuk GCG;
j. Membuat surat kuasa saat tidak hadir pada Rapat Dewan Komisaris;
k. Membahas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya saat pelaksanaan rapat konsultasi Dewan Komisaris - Direksi.

3. KEPADA DIREKSI DIREKOMENDASIKAN UNTUK:

a. Mencantumkan secara eksplisit rencana pelatihan/ peningkatan kompetensi Direksi secara khusus dalam RKAP Perusahaan;
b. Membuat laporan terkait dengan pelatihan/ peningkatan kompetensi Direksi;
c. Menetapkan sepenuhnya uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkat jabatan, serta mensosialisasikan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut kepada seluruh karyawan;
d. Menetapkan seluruh proses bisnis memiliki SOP, terutama pada proses bisnis inti;
e. Melakukan *review* terhadap seluruh SOP setiap terjadi perubahan proses dan kondisi perusahaan, atau minimal satu tahun sekali;
f. Menggunakan seluruh hasil audit untuk penyempurnaan SOP;
g. Menginformasikan semua SOP dan SPM secara terbuka;
h. Memenuhi tenggat waktu dalam penyampaian rancangan RJP kepada Dewan Komisaris dan RUPS sesuai dengan *Board Manual*;
i. Menyampaikan sosialisasi atas RJP yang telah disahkan kepada seluruh karyawan Perusahaan;
j. Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris dan RUPS sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati dalam *Board Manual*, dimana RKAP yang disusun mengacu pada RJP yang sudah diformalkan;
k. Melaksanakan seluruh penempatan karyawan pada berbagai level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan;

g. All Members of the Board of Commissioners to make special Register of Register of Share Ownership
h. Make a special review of the results of the GCG Assessment to be submitted to the Board of Directors;
i. Make plans and make progress on the realization of follow-up in the Area of Improvement for GCG;
j. Draft power of attorney when not present at the Board of Commissioners Meeting;
k. Discuss the follow-up to the results of the previous meeting during the consultation meeting of the Board of Commissioners - Drectors.

3. TO THE BOARD OF DIRECTORS, IT IS RECOMMENDED TO:

a. Explicitly mention the training/competency improvement plan for the Board of Directors specifically in the Company's RKAP.
b. Prepare reports related to training/competency improvement of the Board of Directors.
c. Fully define the job descriptions and responsibilities for all levels of positions, and disseminate the job descriptions and responsibilities to all employees.
d. Establish that all business processes have SOPs, especially on core business processes.
e. Review all SOPs every time there is a change in the company's processes and conditions, or at least once a year.
f. Use all audit results to improve SOPs.
g. Inform all SOP and SPM openly.
h. Meet the deadline for submitting the RJP draft to the Board of Commissioners and the GMS in accordance with the Board Manual.
i. Disseminate the approved CPR to all employees of the Company.
j. Submit the draft RKAP to the Board of Commissioners and the GMS in accordance with the terms agreed in the Board Manual, where the RKAP drawn up refers to the RJP that has been formalized.
k. Carry out all employee placements at various levels of positions in accordance with the assigned job specifications.

l. Menginformasikan kepada karyawan terkait daftar urut kepangkatan, serta objektivitas dan transparansi penempatan karyawan pada setiap level jabatan;
m. Menuntaskan permasalahan proyek terkendala/ bermasalah;
n. Melaksanakan sertifikasi atas kebijakan mutu;
o. Meningkatkan rencana dan implementasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa;

p. Memiliki mekanisme untuk job tender untuk 1 level di bawah Direksi;
q. Memperbarui kebijakan remunerasi secara berkala;
r. Menetapkan *subsidiary governance*;
s. Melaksanakan penanganan atas masing-masing risiko yang telah disetujui oleh Komisaris dan/atau RUPS;
t. Menerapkan *assessment* dan survei kepuasan pemasok secara konsisten, terstruktur, dan sistematis;
u. Memenuhi ekspektasi pemegang saham untuk terus meningkatkan persentase dividen secara konsisten;
v. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan Dewan Komisaris tepat waktu;
w. Sekretaris Perusahaan membuat, menerima, menyimpan Risalah Rapat Direksi mencangkup pemenuhan butir:
    - Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada);
    - Risalah Rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat);
    - Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya;
    - Risalah rapat memuat keputusan rapat sebelumnya;
    - Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Direksi maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai dilaksanakan.
x. Pimpinan Fungsi Audit belum seluruhnya memiliki sertifikasi profesi di bidangnya;
y. Staf Audit Internal belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi dalam jenjang jabatan Fungsi Auditor Internal.

l. Inform employees regarding the rank list, as well as the objectivity and transparency of employee placement at each level of position.

m. Solve the problem of the project is constrained / problematic;
n. Carry out certification of quality policies;
o. Improve the planning and implementation of goods and services procurement activities in accordance with the Goods and Services Procurement Regulations;
p. Have a mechanism for job tenders for 1 level below the Board of Directors;
q. Update the remuneration policy regularly;
r. Establish subsidiary governance;
s. Carry out the handling of each risk that has been approved by the Commissioner and/or GMS;

t. Implement supplier satisfaction assessments and surveys in a consistent, structured, and systematic manner;
u. Meet the expectations of shareholders to continue to increase the percentage of dividends consistently;
v. Quarterly and Annual Management Reports to be submitted by the Board of Commissioners on time;
w. The Corporate Secretary prepares, receives, and stores the Minutes of the Board of Directors Meeting which includes the fulfillment of the following points:
    - The minutes of the meeting must also include a dissenting opinion from what was decided at the Board of Directors Meeting (if any);
    - Minutes of the Meeting include the course of the meeting (the dynamics of the meeting).
    - The minutes of the meeting contain the results of the evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting.
    - Minutes of the meeting contain the decisions of the previous meeting;
    - Validate the minutes of the meeting in accordance with the established rules. Minutes of the meeting must be completed and circulated to the entire Board of Directors no later than 7 (seven) days after the meeting is over.
x. The Head of the Audit Function does not all have professional certification in their field;
y. The Internal Audit staff does not yet fully possess the knowledge and expertise required to obtain professional certification in the Internal Auditor Function level.

4. KETERBUKAAN INFORMASI
   a. Merekap data biaya peningkatan kompetensi SDM dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
   b. Melaksanakan pengelolaan website perusahaan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

4. INFORMATION DISCLOSURE
   a. Recap the data on HC competency improvement costs in the Company Annual Report
   b. Manage the Company's website in accordance with the guidelines.

Tindaklanjut *Area of Improvement* GCG 2020 di Tahun 2021
Berdasarkan Pemantauan atas Area of Improvement GCG PT PLN (Persero) Periode tahun 2020, terdapat 76 Area of Improvement GCG. Pada tahun 2021, Perusahaan berhasil menindaklanjuti selesai 20 AoI, serta 56 AoI dalam proses tindaklanjut.

Follow-up to the 2020 GCG Area of Improvement in 2021
Based on the monitoring of the PT PLN (Persero) GCG Area of Improvement for the 2020 period, there were 76 GCG Areas of Improvement. In 2021, the Company succeeded in following up on the completion of 20 AoI, and 56 AoI in the follow-up process.

Nilai *assessment GCG* yang dicapai PLN memiliki kecenderungan membaik sejak penilaian tersebut dilakukan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

The GCG assessment value achieved by PLN has a tendency to improve since the assessment was carried out, as shown in the table below:

Deskripsi / *Description*	2017	2018	2019	2020	2021
	Self Assessment	BPKP	*Self Assessment*	BPKP	*Self Assessment*
Nilai *assessment* GCG / GCG assessment value	87,39	87,96	88,11	89,56	90,46
Kriteria / Criteria	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent	Sangat Baik / Excellent

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Menteri BUMN bertindak selaku RUPS karena seluruh saham Perseroan dimiliki sepenuhnya oleh Negara. Menteri BUMN dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's Organ which has the authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in this Law and/or the Articles of Association. The Minister of SOEs acts as the GMS because all of the Company's shares are fully owned by the government. The Minister of SOEs may grant power of attorney with substitution rights to individuals or legal entities to represent them at the GMS.

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola PLN, RUPS terdiri dari:

a. RUPS Tahunan
   RUPS Tahunan merupakan RUPS yang diadakan berkala oleh Perseroan, di mana dalam RUPS tersebut Pemegang Saham memberikan persetujuan terhadap laporan atas realisasi rencana Perseroan tahun lampau dan pengesahan rencana Perseroan untuk tahun mendatang.

   RUPS diadakan setiap tahun yang terdiri dari:
   1. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan;
   2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

Based on the PLN Governance Code, the GMS consists of:

a. Annual GMS
   The Annual GMS is a GMS held periodically by the Company, in which the Shareholders give their approval to the report on the realization of the Company's plans for the past year and the ratification of the Company's plans for the coming year.

   The GMS is held annually consisting of:
   1. Annual GMS to approve the Annual Report and ratify the Annual Calculations;
   2. Annual GMS to ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
RUPSLB adalah RUPS yang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Perseroan yang bersifat mendesak dan signifikan. Pelaksanaan RUPSLB dapat diusulkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham. Selain RUPSLB yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perseroan secara fisik, dikenal juga RUPSLB di mana pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak memerlukan pelaksanaan RUPS secara fisik, yang juga dikenal sebagai RUPS Sirkuler. RUPSLB tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS biasa.

b. Extraordinary GMS (EGM)
EGM is a GMS held at any time if it is deemed that there are certain matters that require urgent and significant discussion and decision making on the Company. The implementation of the EGM may be proposed by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an EGM in accordance with a written request from the Board of Commissioners or Shareholders. In addition to the EGM which is held with the physical presence of all the Company's organs, there is also an EGM that does not require the physical implementation of the GMS, which is also known as the Circular GMS. The EGM has the same legal force as the ordinary GMS.

Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS

Pelaksanaan RUPS dapat diusulkan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perusahaan secara fisik, dikenal juga RUPS yang tidak memerlukan pelaksanaan secara fisik atau yang dikenal sebagai RUPS Sirkuler. RUPS Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS yang diselenggarakan secara fisik.

Shareholders' Authority through GMS

The implementation of GMS can be proposed by the Board of Directors and or the Board of Commissioners and or Shareholders. The Board of Directors is required to hold a GMS in accordance with a written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

In addition to the GMS which is held with the physical presence of all the Company's Organs, there is also a GMS that does not require physical implementation or is known as the Circular GMS. A Circular GMS has the same legal force as a GMS that is held physically.

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah pemilik Perseroan yang memiliki segala kewenangan yang tidak termasuk dalam kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan mengacu pada Keputusan Menteri BUMN sebagai Pembina seluruh BUMN di Indonesia dan Anggaran

Shareholders

Shareholders are the owners of the Company who have all the authorities that are not included in the authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The GMS and/or Shareholders may not intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations, including replacing or dismissing members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

PLN is a State-Owned Enterprise (BUMN) that is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the procedures and order for the implementation of GMS refer to the Decree of the Minister of SOEs as the Advisor of all SOEs in Indonesia and the Company's Articles

Dasar Perusahaan. Kepemilikan saham di PT PLN (Persero) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

of Association. Share ownership of PT PLN (Persero) as of December 31, 2021 is as follows:

100%

Saham dimiliki Pemerintah Republik Indonesia
Share owned by Goverment of the Republic of Indonesia

Nama Pemegang Saham / *Shareholder Name*	Jumlah Saham (Lembar)* / *Total Shares (share)**	Persentase / *Percentage*
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	135.460.886	100%

*Satu lembar saham senilai Rp1.000.000

*One share worth Rp1,000,000

Kepentingan Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik Perseroan memiliki kepentingan terhadap:

1. Peningkatan keuntungan Perseroan;
2. Peningkatan nilai Perseroan; dan
3. Bagaimana Perseroan dijalankan.

Shareholders Interest

Shareholders as owners of the Company have an interest in:

1. Increasing the Company's profits;
2. Improving the value of the Company; and
3. The course of the Company's operation.

Akuntabilitas Pemegang Saham

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Tata Kelola Perusahaan yang baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Shareholders' Accountability

Shareholders do not interfere with the Company's operational activities, which are the responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Good Corporate Governance is implemented by the Shareholders in accordance with their authorities and responsibilities. Shareholders have the responsibilities to monitor the implementation of GCG principles in the Company's management process. Shareholders do not interfere with the Company's operational activities, which are the responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Informasi Mengenai Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021

Pada tahun 2021 PLN menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2021 dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan Tahun 2020.

Information on the Implementation of the 2021 GMS

In 2021 PLN held 2 (two) Annual General Meetings of Shareholders, namely the 2021 RKAP Validation GMS and the 2020 Annual Accountability GMS.

Untuk pelaksanaan RUPS RKAP Tahun buku 2021, dilaksanakan pada 26 Januari 2021, sedangkan pelaksanaan RUPS LPT Tahun buku 2020 dilaksanakan pada 28 Juni 2021. Kedua RUPS tersebut diadakan secara *hybrid* yaitu rapat fisik dan daring.

The 2021 Fiscal Year RKAP GMS was held on January 26, 2021, while the 2020 Fiscal Year LPT GMS was held on June 28, 2021. Both GMS was convened via the hybrid method of online and physical meeting.

Berikut adalah pelaksanaan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) di Tahun 2021:

Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT PLN (Persero) in 2021:

<table>
<tr><th>Tanggal / Date</th><th>Agenda / Agenda</th><th>Keputusan / Resolution</th><th>Realisasi / Realization</th></tr>
<tr><td>17 Februari 2021 / February 17, 2021</td><td>RUPSLB tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perseroan / EGM regarding Changes in the Nomenclature of Position and Transfer of Duties of Members of the Company's Board of Directors</td><td>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-49/MBU/02/2021 menetapkan Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: / In connection with the enactment of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as PLN's GMS No. SK-49/MBU/02/2021, it is specified that the Changes in the Nomenclature of Position and Transfer of Duties of Members of the Company's Board of Directors are as follows:
<table>
<tr><th>Nama Direktur / Director's Name</th><th>Semula / From</th><th>Menjadi / To</th></tr>
<tr><td>Muhammad Ikhsan Asaad</td><td>Direktur Mega Project / Director of Mega Projects</td><td>Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New Renewable Energy</td></tr>
<tr><td>Rudy Hendra Prastowo</td><td>Direktur Energy Primer / Director of Primary Energy</td><td>Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy</td></tr>
<tr><td>Syofvi Felienty Roekman</td><td>Direktur Human Capital dan Management / Director of Human Capital and Management</td><td>Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management</td></tr>
<tr><td>Sinthya Roesly</td><td>Direktur Keuangan / Director of Finance</td><td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management</td></tr>
<tr><td>Wiluyo Kusdwiharto</td><td>Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatera Kalimantan</td><td>Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan</td></tr>
</table>
Susunan Direksi PLN terbaru berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut: / The latest composition of the Board of Directors of PLN based on the description above is as follows:
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama / Name</th><th>Jabatan / Position</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Zulkifli Zaini</td><td>Direktur Utama / President Director</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Darmawan Prasodjo</td><td>Wakil Direktur Utama / Vice President Director</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sinthya Roesly</td><td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Syofvi Felienty Roekman</td><td>Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Muhammad Ikbal Nur</td><td>Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bob Saril</td><td>Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Rudy Hendra Prastowo</td><td>Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Muhammad Ikhsan Asaad</td><td>Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New Renewable Energy</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Wiluyo Kusdwiharto</td><td>Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Syamsul Huda</td><td>Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Haryanto W.S.</td><td>Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali</td></tr>
</table>
</td><td>Telah terealisasi / Realized</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tanggal / Date</th><th>Agenda / Agenda</th><th>Keputusan / Resolution</th><th>Realisasi / Realization</th></tr>
<tr><td>17 Maret 2021 / March 17, 2021</td><td>Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN</td><td>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-90/MBU/03/2021 menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sebagai berikut: / In connection with the stipulation of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as PLN's GMS No. SK-90/MBU/03/2021, it is specified that the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) are as follows:
• Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Yusuf Ateh sebagai PT PLN (Persero) dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. / Confirming the honorable discharge of Mr. Muhammad Yusuf Ateh as Commissioner of PT PLN (Persero) with gratitude for all the contributions of his energy and thoughts while holding this position.
• Mengangkat Sdr. Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PT PLN (Persero). / Appointing Mr. Ardan Adiperdana as Commissioner of PT PLN (Persero).

Susunan Komisaris PLN terbaru berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut: / The latest composition of the Board of Commissioners of PLN based on the description above is as follows:
<table><tr><th>No</th><th>Nama / Name</th><th>Jabatan / Position</th></tr><tr><td>1</td><td>Amien Sunaryadi</td><td>Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner</td></tr><tr><td>2</td><td>Suahasil Nazara</td><td>Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner</td></tr><tr><td>3</td><td>Deden Juhara</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr><tr><td>4</td><td>Murtaqi Syamsuddin</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr><tr><td>5</td><td>Rida Mulyana</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr><tr><td>6</td><td>Ilya Avianti</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr><tr><td>7</td><td>Mohamad Ikhsan</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr><tr><td>8</td><td>Dudy Purwagandhi</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr><tr><td>9</td><td>Ardan Adiperdana</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr><tr><td>10</td><td>Mohammad Rudy Salahuddin</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr><tr><td>11</td><td>Eko Sulistyo</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr></table></td><td>Telah terealisasi / Realized</td></tr>
<tr><td>16 Juni 2021 / June 16, 2021</td><td>Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PLN / Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PLN</td><td>• Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Ihksan Asaad sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.: SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 jo No.: SK-49/MBU/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut; / Honorably dismissing Mr. M. Ihksan Asaad as Director of Mega Projects and New Renewable Energy of PT PLN (Persero) who was appointed based on Decree of the Minister of SOEs No.: SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020 j.o No.: SK-49/MBU/02/2021 dated February 17, 2021 with gratitude for all the contributions of his energy and thoughts while holding this position;
• Mengalihkan penugasan Sdr. Muhammad Ikbal Nur semula sebagai Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan; / Transferring the assignment of Mr. Muhammad Ikbal Nur who was originally the Director of Corporate Planning to become the Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan;
• Mengalihkan penugasan Sdr. Wiluyo Kusdwiharto semula sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan menjadi Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan; / Transferring the assignment of Mr. Wiluyo Kusdwiharto who was originally the Director of Regional Business of Sumatra and Kalimantan to become the Director of Mega Projects and New Renewable Energy;
• Mengangkat Sdr. Evy Haryadi sebagai Direktur Perencanaan Korporat / Appointing Mr. Evy Haryadi as the Director of Corporate Planning</td><td>Telah terealisasi / Realized</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tanggal / Date</th><th>Agenda / Agenda</th><th>Keputusan / Resolution</th><th>Realisasi / Realization</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Susunan Direksi PLN terbaru berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut: / The latest composition of the Board of Directors of PLN based on the description above is as follows:
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama / Name</th><th>Jabatan / Position</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Zulkifli Zaini</td><td>Direktur Utama / President Director</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Darmawan Prasodjo</td><td>Wakil Direktur Utama / Vice President Director</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sinthya Roesly</td><td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Syofvi Felienty Roekman</td><td>Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Evy Haryadi</td><td>Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bob Saril</td><td>Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Rudy Hendra Prastowo</td><td>Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Wiluyo Kusdwiharto</td><td>Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New Renewable Energy</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Muhammad Ikbal Nur</td><td>Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Syamsul Huda</td><td>Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Haryanto W.S.</td><td>Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>16 Juli 2021 / July 16, 2021</td><td>Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN</td><td>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-239/MBU/07/2021 menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: / In connection with the stipulation of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as PLN's GMS No. SK-239/MBU/07/2021, it is specified that the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) are as follows:
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut in sebagai anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero): / Honorably dismissing the following names as members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama / Name</th><th>Jabatan / Position</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ilya Avianti</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mohammad Rudy Salahuddin</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Deden Juhara</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Murtaqi Syamsuddin</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr>
</table>
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero): / Appointing the following names as members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero):
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama / Name</th><th>Jabatan / Position</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Susiwijono Moegiarso</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Heru Winarko</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alex Iskandar Munaf</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr>
</table></td><td>Telah terealisasi / Realized</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Tanggal / Date</th><th>Agenda / Agenda</th><th>Keputusan / Resolution</th><th>Realisasi / Realization</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Susunan Komisaris PLN terbaru berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut: / The latest composition of the Board of Commissioners of PLN based on the description above is as follows:
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama / Name</th><th>Jabatan / Position</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Amien Sunaryadi</td><td>Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Suahasil Nazara</td><td>Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Heru Winarko</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Alex Iskandar Munaf</td><td>Komisaris Independen / Independent Commissioner</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Susiwijono Moegiarso</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Rida Mulyana</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Mohamad Ikhsan</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Dudy Purwagandhi</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Ardan Adiperdana</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Eko Sulistyo</td><td>Komisaris / Commissioner</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>6 Desember 2021 / December 6, 2021</td><td>Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi PLN / Dismissal, Changes of Nomenclature of Position, and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of PLN</td><td>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-389/MBU/12/2021 menetapkan Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: / In connection with the stipulation of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the PLN's GMS No. SK-389/MBU/12/2021 stipulates the Changes of Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Company's Board of Directors as follows:
• Memberhentikan dengan hormat Sdr. Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.: SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut; / Honorably dismissing Mr. Zulkifli Zaini as President Director of PT PLN (Persero) who was appointed based on Decree of the Minister of SOEs No.: SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 with gratitude for all the contributions of his energy and thoughts during his tenure;
• Mengubah nomenklatur jabatan di mana sebelumnya terdapat Wakil Direktur Utama menjadi tidak ada nomenklatur jabatan Wakil Direktur Utama / Changing the nomenclature of positions where previously there was a Vice President Director to a nomenclature with no position of Vice President Director
• Mengalihkan penugasan Sdr. Darmawan Prasodjo yang semula sebagai Wakil Direktur Utama yang diangkat berdasarkan SK-325/MBU/12/2019 menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pada SK tersebut. / Transferring the assignment of Mr. Darmawan Prasodjo, who was originally the Vice President Director who was appointed based on SK-325/MBU/12/2019, to become the President Director of PT PLN (Persero) with a term of office continuing the remaining term of office in the Decree.</td><td>Telah terealisasi / Realized</td></tr>
<tr><td>7 Desember 2021 / December 7, 2021</td><td>Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PLN / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PLN</td><td>Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku RUPS PLN No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT PLN (Persero), menyetujui untuk memberhentikan: / In connection with the stipulation of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as PLN's GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) approves the dismissals of:
• Sdri. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Sumber Daya Manusia / Mrs. Syofvi Felienty Roekman as the Director of Human Capital Management
• Sdr. Muhammad Ikbal Nur sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Mr. Muhammad Ikbal Nur as the Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan
• Sdr. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Mr. Syamsul Huda as the Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara

Dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT PLN (Persero): / And appointing the following names as members of the Board of Directors of PT PLN (Persero):
• Sdr. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Mr. Yusuf Didi Setiarto as the Director of Human Capital Management
• Sdr. Adi Lumakso sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Mr. Adi Lumakso as the Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan
• Sdr. Adi Priyanto Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Mr. Adi Priyanto as the Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara</td><td></td></tr>
</table>

Tanggal / *Date*	Agenda / *Agenda*	Keputusan / *Resolution*	Realisasi / *Realization*

Susunan Direksi PLN terbaru berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut: / The latest composition of the Board of Directors of PLN based on the description above is as follows:

No	Nama / *Name*	Jabatan / *Position*
1	Darmawan Prasodjo	Direktur Utama / President Director
2	Sinthya Roesly	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management
3	Yusuf Didi Setiarto	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management
4	Evy Haryadi	Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning
5	Bob Saril	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management
6	Rudy Hendra Prastowo	Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy
7	Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Projects and New Renewable Energy
8	Adi Lumakso	Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan
9	Adi Priyanto	Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara
10	Haryanto W.S	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali

INFORMASI MENGENAI KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Pada tahun 2020 Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan 5 (lima) kali berupa Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero). RUPS Tahunan tahun 2020 terdiri dari RUPS Tahunan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2020 dan RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 18 Juni 2020.

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) di tahun:

1. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 16 Januari 2020
2. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 14 Mei 2020.

INFORMATION ON RESOLUTIONS OF THE PREVIOUS GMS

Implementation of 2020 GMS

The Company held 2 (two) Annual GMS and 5 (five) in the form of a Decree of the Minister of BUMN as the GMS of PT PLN (Persero) in 2020. The 2020 Annual GMS consisted of the Annual GMS for Ratification of the Company's 2020 Work Plan and Budget (RKAP) which was held on January 27, 2020 and the Annual GMS for Approval of the 2019 Annual Report which was held on June 18, 2020.

Decree of the Minister of BUMN as the GMS of PT PLN (Persero):

1. Decree of the Minister of BUMN as the GMS of PT PLN (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara on January 16, 2020.
2. Decree of the Minister of BUMN as the GMS of PT PLN (Persero) regarding Dismissal, Changes of Nomenclature of Position, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara on May 14, 2020.

3. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 23 September 2020.
4. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 9 Oktober 2020.
5. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 4 November 2020.

3. Decree of the Minister of BUMN as the GMS of PT PLN (Persero) regarding Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara on September 23, 2020.
4. Decree of the Minister of BUMN as the GMS of PT PLN (Persero) regarding Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara on October 9, 2020.
5. Decree of the Minister of BUMN as the GMS of PT PLN (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara on November 4, 2020.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Atau Belum Direalisasikan

Seluruh Keputusan RUPS tahun 2020 telah direalisasikan pada tahun 2020.

Resolutions of the Previous Year's GMS that Were Realized or Not Realized in the Current Fiscal Year

All resolutions of the 2020 GMS have been realized in 2020.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pedoman GCG yang dimiliki oleh PLN, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas mengawasi dan memberikan nasihat terhadap jalannya Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, dalam pedoman GCG tersebut juga diatur bahwa Dewan Komisaris adalah bersifat kolegial atau merupakan majelis dan setiap Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Panduan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman kepada Pedoman GCG Perseroan dan Tata Laksana Kerja (*Board Manual*). PLN memiliki *Board Manual* yang terakhir ditandatangani oleh semua jajaran Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 10 Oktober 2016.

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Tujuan dari Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah:

BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the GCG Code owned by PLN, the Board of Commissioners is the Company's Organ which has the task of supervising and providing advice on the running of the Company carried out by the Board of Directors. In addition, the GCG code also stipulates that the Board of Commissioners is collegial or an assembly and each Commissioner cannot act alone, but based on the decisions of the Board of Commissioners.

Board Manual

The Board of Commissioners in carrying out their duties and authorities is guided by the Company's GCG Guidelines and Work Procedures (Board Manual). PLN has a Board Manual which was last signed by all levels of the Board of Directors and Board of Commissioners on October 10, 2016.

The Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners is intended to describe the working relationship of the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their duties in order to create a professional, transparent, and efficient management of the Company. The objectives of this Board Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di antara kedua Organ Perseroan tersebut.

2. Semakin mudahnya bagi Organ-Organ di bawah Direksi dan Organ-Organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara Organ-Organ tersebut.

Hal-hal yang dibahas dalam *Board Manual* tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan
- Tata Laksana Kerja Terkait Batas Kewenangan
- Tata Laksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan
- Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan, kedudukan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan mempertimbangkan kinerja Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang setara dengan Direksi dan RUPS, walaupun Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

3. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, serta menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku

1. Clearer duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the working relationship between the two Organs of the Company.
2. Facilitates Organs under the Board of Directors and the Organs under the Board of Commissioners to understand the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the task relationship between these Organs.

The matters covered in the Board Charter are as follows:

- Preliminary
- Board Charter related to Position
- Board Charter related to Limits of Authority
- Board Charter related to Implementation and Supervision of the Company's Operations
- Workflow on the Authority of the Board of Directors that requires approval from the Board of Commissioners and the authority of the Board of Directors that requires approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners

Positions, Duties, and Authorities of the Board of Commissioners

As stipulated in the Code of Corporate Governance, the positions, duties, and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners of the Company is appointed and dismissed by the GMS by taking into account the needs of the Company and considering the performance of the Commissioners in carrying out their duties and responsibilities.
2. The Board of Commissioners has an equal position with the Board of Directors and the GMS, although the Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS.
3. The Board of Commissioners is tasked with supervising and providing advice on the Company's operations carried out by the Board of Directors, as well as carrying out duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the resolutions of the GMS as well as the prevailing laws and regulations.

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Adapun tugas dan kewajiban Dewan Komisaris menurut Pedoman GCG PLN adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran
2. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, menelaah laporan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terkait kinerja dan strategi Perseroan, menyusun rencana kerja, dan melaporkan tugas pengawasan kepada RUPS.

Pemilihan dan Pengangkatan Komisaris

1. Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas untuk mengawasi Perseroan.
2. Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS. Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar atau oleh RUPS. Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
3. Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen adalah Komisaris yang bukan merupakan representasi dari Pemegang Saham, yang diharapkan memiliki fungsi kontrol bahwa Pemegang Saham tidak memperlakukan Perseroan secara sewenang-wenang yang akan mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
4. Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik swasta maupun milik Negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Apabila dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, maka proses tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan akan didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners according to PLN's Code of GCG are as follows:

1. In carrying out its duties, the Board of Commissioners shall comply with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations and shall implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. In carrying out the supervisory function, the Board of Commissioners has the duties and obligations to supervise the Company's management policies, review the Company's reports, provide opinions and suggestions to the GMS regarding the performance and strategy of the Company, prepare work plans, and report supervisory duties to the GMS.

Election and Appointment of Commissioners

1. The Board of Commissioners is the Company's Organ in charge of supervising the Company.
2. The Board of Commissioners is elected and appointed by the GMS. The procedures for nomination, appointment, replacement and dismissal of Commissioners are regulated in the Articles of Association or by the GMS. The appointment of Commissioners does not coincide with the appointment of Directors, except the appointment for the first time at the time of establishment.
3. The composition of the Board of Commissioners is at least 20% (twenty percent) of Independent Commissioners as determined in the appointment decision. Independent Commissioner is a Commissioner who is not a representative of the Shareholders, who is expected to have a control function so that the Shareholders do not treat the Company arbitrarily which will result in losses for the Company.
4. Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as Directors or other positions in other companies, both private and state-owned, which may cause a conflict of interest.

Policy for Resignation of Members of the Board of Commissioners When Involved in Financial Crimes

If in carrying out his/her duties, a member of the Board of Commissioners is involved in a financial crime, the follow-up process carried out by the Company will be based on the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Program Pengenalan Direktur dan/atau Komisaris yang Baru Diangkat

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola GCG dan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi PLN, Direktur dan/atau Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perseroan, agar lebih memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur atau Komisaris, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya. Program Pengenalan meliputi:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
d. Keterangan mengenai audit internal dan eksternal, sistem pengendalian internal dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
e. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Program Pengenalan Direktur dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur tersebut. Program Pengenalan Komisaris dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Komisaris tersebut.

Pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) anggota Komisaris yang baru pertama kali diangkat dan kesemuanya telah mengikuti program pengenalan perusahaan untuk Komisaris baru. Keempat anggota Komisaris baru tersebut diangkat berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel terkait komposisi anggota Dewan Komisaris.

Introduction Program for Newly Appointed Directors and/or Commissioners

Based on the Code of GCG and the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors of PLN, Directors and/or Commissioners who are appointed for the first time must be given an Introduction Program regarding the Company in order to better understand the duties and responsibilities as a Director or Commissioner, the Company's business processes, and to be able to work in harmony with the other Company's Organs. The Introduction Program includes:

a. Implementation of GCG principles by the Company;
b. Description of the Company in relation to the objectives, nature, and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
c. Information related to the delegated authority
d. Information on internal and external audits, internal control systems and internal control policies, including the Audit Committee;
e. Information on the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as prohibited matters.

The Company's Introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company in which the program is implemented. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary or whoever performs the function as the Corporate Secretary. The Director Introduction Program is implemented no later than 1 (one) month after the appointment of the Director. The Commissioner Introduction Program is implemented no later than 3 (three) months after the appointment of the Commissioner.

In 2021, there were 4 (four) members of the Board of Commissioners who were appointed for the first time and all of them have participated in the Company's introduction program for new Commissioners. The four new members of the Board of Commissioners are appointed based on the Ministerial Decree (Kepmen) of SOEs as the GMS which was stipulated in 2021 as explained in the table related to the composition of the members of the Board of Commissioners.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2021

Pada tahun 2021 susunan keanggotaan Dewan Komisaris mengalami perubahan beberapa kali seiring dengan keputusan yang diambil oleh Menteri BUMN selaku RUPS PLN. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada bagian RUPS yang telah dibahas sebelumnya dan bab profil perusahaan sub bab Dewan Komisaris. Adapun susunan, jumlah, komposisi dan dasar pengangkatan anggota Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Structure, Number, Composition, and Basis for the Appointment of Members of the Board of Commissioners in 2021

In 2021, the composition of the membership of the Board of Commissioners changed several times in line with the decisions taken by minister of SOE as the GMS of PLN.. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners can be seen in the GMS section that was discussed previously and the Company's profile chapter in the Board of Commissioners sub-chapter. The structure, number, composition, and basis of appointment of members of the Board of Commissioners as of December 31, 2021 are as follows:

No	Nama / *Name*	Inisial / Initial	Jabatan / *Position*	Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*	Akhir Masa Jabatan / *End of Tenure*
1	Amien Sunaryadi	AS	Komisaris Utama dan Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK- 326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 / December 23, 2024
2	Suahasil Nazara	SN	Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 / December 23, 2024
3	Heru Winarko	HW	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS selaku RUPS No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2026 / July 16, 2026
4	Alex Iskandar Munaf	AIM	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS selaku RUPS No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2026 / July 16, 2026
5	Susiwijono Moegiarso	SM	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS selaku RUPS No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2026 / July 16, 2026
6	Rida Mulyana	RM	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019	28 Februari 2024 / February 28, 2024
7	Mohamad Ikhsan	MI	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019	26 Desember 2024 / December 26, 2024
8	Dudy Purwagandhi	DP	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020	16 Januari 2025 / January 16, 2025
9	Ardan Adiperdana	AA	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-90/MBU/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-90/MBU/03/2021 dated March 17, 2021	17 Maret 2026 / March 17, 2026
10	Eko Sulistyo	ES	Komisaris / Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-330/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 / Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-330/MBU/10/2020 dated October 9, 2020	9 Oktober 2025 / October 9, 2025

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of members of the Board of Commissioners refers to Article 28 Paragraph 3 of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, which is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office, without prejudice to the right of the GMS to make replacements at any time before their term of office ends.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris membagi tugas dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang bertugas di Komite Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 adalah:

Division of Duties of the Board of Commissioners

In carrying out their duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners and three committees consisting of the Audit Committee, Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners divides the duties and authorities among the members of the Board of Commissioners by appointing the Commissioners as heads or members of these committees. The members of the Board of Commissioners serving on the Committee of the Board of Commissioners as of December 31, 2021 are as follows:

Komite Audit / Audit Committee	Komite Manajemen Risiko / *Risk Management Committee*	Komite Nominasi & Remunerasi / *Nomination and Remuneration Committee*
Amien Sunaryadi (Ketua / Head)	Mohamad Ikhsan (Ketua / Head)	Amien Sunaryadi (Ketua / Head)
Heru Winarko	Rida Mulyana	Suahasil Nazara
Alex Iskandar Munaf	Susiwijono Moegiarso	Dudy Purwagandhi
	Ardan Adiperdana	Eko Sulistyo

Informasi Mengenai Komisaris Independen

Berdasarkan Pedoman GCG serta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi PLN, Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang:

a. Berasal dari luar Perseroan;
b. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direktur atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Information on Independent Commissioner

Based on the Code of GCG and the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors of PLN, an Independent Commissioner is a Member of the Board of Commissioners who:

a. Comes from outside the Company;
b. Does not own shares directly or indirectly in the Company;
c. Has no affiliation with the Company, Commissioners, Directors, or Major Shareholders of the Company; and
d. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities

Pemenuhan Kriteria Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4 serta pemenuhannya disajikan dalam tabel berikut:

Criteria Fulfillment Independent Commissioners

The criteria for determining Independent Commissioner refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, Article 13 paragraphs 3 and 4, and the fulfillment is presented in the following table:

Kriteria / *Criteria*	AS	HW	AIM
Tidak memiliki hubungan keuangan / Has no financial relationship	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan / Has no management relationship	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepemilikan saham / Does not have share ownership	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali / Does not have a family relationship with other members of the Board of Commissioners/Supervisory Board, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali / Has no relationship with the controlling shareholders	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan dengan BUMN yang bersangkutan / Does not have a relationship with the concerned SOE	✓	✓	✓

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan menghindari adanya keputusan dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Komisaris Independen turut mempertahankan reputasi Perusahaan dengan menjalankan prinsip GCG yang benar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, yang tercermin dalam sikap, perbuatan dan segala kebijakan yang diambil, baik secara individual dan mufakat.

Statement of Independency of Independent Commissioner

The Independent Commissioner is committed to upholding independence, objectivity, and fairness in carrying out duties and responsibilities, by avoiding decisions and policies that have the potential to cause a conflict of interest or preference for the interests of one party. The Independent Commissioner also maintains the Company's reputation by implementing the correct GCG principles in accordance with the prevailing guidelines and regulations, which is reflected in the attitudes, actions and all policies taken, both individually and by consensus.

INDEPENDENSI, HUBUNGAN AFILIASI SERTA KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Independensi

Anggota Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas di setiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah dalam satu tahun tersebut terdapat situasi benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Pakta Integritas pada tahun 2021 yang berisi butir-butir berikut:

INDEPENDENCE, AFFILIATION, AND SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Independence

Members of the Board of Commissioners sign an Integrity Pact at the beginning of each year to state their independence status and at the end of each year to state whether in one year there was a conflict of interest situation by the Board of Commissioners on the actions taken. The Secretary to the Board of Commissioners is tasked with ensuring that this practice has been implemented in accordance with the GCG principles. All members of the Board of Commissioners have signed an Integrity Pact in 2021 which contained the following points:

Pakta Integritas Dewan Komisaris / *Integrity Pact of the Board of Commissioners*	AS	SN	HW	AIM	SM	RM	MI	DP	AA	ES
Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan / Able to carry out the mandate on the basis of trust	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mengupayakan capaian kinerja Perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip- prinsip GCG. / Strive to achieve the Company's maximum performance by heeding the principles of GCG.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent* / Behave and make careful and prudential decisions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya Perusahaan / Dare to take full responsibility for the running of the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. / Consistently put the best for the interests of the Company above personal interests.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pakta Integritas Dewan Komisaris / *Integrity Pact of the Board of Commissioners*	AS	SN	HW	AIM	SM	RM	MI	DP	AA	ES
Menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual. / Avoid any forms of conflict of interest, both potential and actual.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mematuhi semua ketentuan perundangan yang berlaku. / Comply with all of the prevailing laws and regulations.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selama menjabat, tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu. / During his/her tenure, he/she will not take advantage of his/her position in the Company, either directly or indirectly for personal, family and relative interests, as well as certain groups.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hubungan Afiliasi

PLN memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi maupun hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham untuk menjaga independensi, menghindari adanya benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berkomitmen menaati aturan tersebut sehingga antar anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pengungkapan hubungan afiliasi anggota Dewan komisaris dapat dilihat di bab profil perusahaan sub bab Dewan Komisaris.

Affiliation

PLN has rules prohibiting both direct and indirect affiliation or family relationships between members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders to maintain independence, avoid conflicts of interest, and maintain accountability in every decision making and in the implementation of operational activities.

All members of the Board of Commissioners are committed to complying with these rules so that the currently serving members of the Board of Commissioners do not have financial or family relationships up to the third degree with the other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors either vertically or horizontally, including relationships arising from marriage.

Disclosure of the affiliation of members of the Board of Commissioners can be seen in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners sub-chapter.

Kepemilikan Saham

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham di Perusahaan baik secara pribadi maupun anggota keluarganya, dan tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain baik secara pribadi maupun keluarganya.

Share Ownership

All members of the Board of Commissioners do not have share ownership in the Company, either personally or by their family members, and do not have share ownership in other companies, either personally or by their families.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Beberapa anggota Dewan Komisaris Perusahaan memiliki jabatan pada beberapa institusi lain. Meski demikian, perangkapan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana ditetapkan dalam kriteria Dewan Komisaris Perusahaan. Pengungkapan rangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris PLN dapat dilihat di bab profil perusahaan sub bab Dewan Komisaris.

Concurrent Position of Board of Commissioners

Several members of the Company's Board of Commissioners have positions in several other institutions. However, these concurrent positions do not conflict with the provisions on the prohibition of concurrent positions as stipulated in the criteria for the Company's Board of Commissioners. Disclosure of concurrent positions of members of the Board of Commissioners of PLN can be seen in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners sub-chapter.

Rapat Dewan Komisaris

Mengacu kepada Pedoman GCG PLN, Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris harus dilaksanakan secara kolegial, di mana seluruh Komisaris harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara rutin atau sewaktu-waktu bila perlu. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Setiap Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk Komisaris yang diwakilinya.

Meetings of the Board of Commissioners

Referring to PLN's Code of GCG, decision making by the Board of Commissioners must be carried out collegially, where all Commissioners must be involved in the decision-making process. Decision making by the Board of Commissioners is done through the mechanism of the Meetings of the Board of Commissioners, which are held regularly or at any time if necessary. The decisions of Meetings of the Board of Commissioners must be made based on deliberation and consensus. If this cannot be implemented, the decision is taken by voting. Each Commissioner is entitled to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the Commissioner he/she represents.

Dewan Komisaris PLN menyelenggarakan 34 kali rapat internal di sepanjang tahun 2021 dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

PLN's Board of Commissioners held 34 internal meetings throughout 2021 with the following attendance and meeting agenda:

Tabel: Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris (1 Januari – 16 Maret 2021)

Table: Attendance of Members of the Board of Commissioners at the Meetings of the Board of Commissioners (January 1 – March 16, 2021)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	AS	SN	RM	IA	MI	DU	MYA	MRS	ES	DJ	MS	
7 Januari 2021 / January 7, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
18 Januari 2021 / January 18, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	91
19 Januari 2021 / January 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	91
4 Februari 2021 / February 4, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	91
11 Februari 2021 / February 11, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	82
18 Februari 2021 / February 18, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	91
25 Februari 2021 / February 26, 2021	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	45
2 Maret 2021 / March 2, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
4 Maret 2021 / March 4, 2021	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	73

Tabel: Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris (17 Maret – 15 Juli 2021)

Table: Attendance of Members of the Board of Commissioners at the Meetings of the Board of Commissioners (March 17 – July 15, 2021)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	AS	SN	RM	IA	MI	DU	AA*	MRS	ES	DJ	MS	
18 Maret 2021 / March 18, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
20 April 2021 / April 20, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
29 April 2021 / April 29, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
6 Mei 2021 / May 6, 2021	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
27 Mei 2021 / May 27, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
3 Juni 2021 / June 3, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
10 Juni 2021 / June 10, 2021	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	82

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	AS	SN	RM	IA	MI	DU	AA*	MRS	ES	DJ	MS	
17 Juni 2021 / June 17, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
24 Juni 2021 / June 24, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
15 Juli 2021* / July 15, 2021*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

*) Ada 2 kali rapat internal di 15 Juli 2021

*) There are 2 internal meetings on 15 July 2021

Tabel: Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris (16 Juli – 31 Desember 2021)

Table: Attendance of Members of the Board of Commissioners at the Meetings of the Board of Commissioners (July 16 – December 31, 2021)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*										Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	AS	SN	HW*	AIM*	SM*	RM	MI	DU	AA	ES	
19 Juli 2021 / July 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
12 Agustus 2021 / August 12, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
19 Agustus 2021 / August 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
2 September 2021 / September 2, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
16 September 2021 / September 16, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	90
23 September 2021/ September 23, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
21 Oktober 2021 / October 21, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
28 Oktober 2021 / October 28, 2021	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	60
11 November 2021 / November 11, 2021	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	100
18 November 2021 / November 18, 2021	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90
29 November 2021 / November 29, 2021	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60
2 Desember 2021 / December 2, 2021	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	100
16 Desember 2021 / December 16, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
31 Desember 2021 / December 31, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

Keterangan daftar anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat:
MYA= Muhammad Yusuf Ateh; IA = Ilya Avianti; MRS = Mohammad Rudy Salahuddin; MS = Murtaqi Syamsuddin

*) Komisaris yang baru diangkat pada periode tersebut

Information on the list of members of the Board of Commissioners who were honorably dismissed:
MYA= Muhammad Yusuf Ateh; IA = Ilya Avianti; MRS = Mohammad Rudy Salahuddin; MS = Murtaqi Syamsuddin

*) Newly appointed Commissioners in the period

Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan *Board Manual* PT PLN (Persero), Rapat Konsultasi adalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi atau rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan penjelasan dan/atau informasi tambahan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan baik melalui penjelasan tertulis maupun melalui Rapat Konsultasi.

Consultation Meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors, a Consultation Meeting is a meeting of the Board of Commissioners attended by the Board of Directors or a meeting of the Board of Directors attended by the Board of Commissioners. In the event that the Board of Commissioners requires an explanation and/or additional information, the Board of Commissioners may request the Board of Directors to complete and/or provide an explanation either through a written explanation or a Consultation Meeting.

Rapat konsultasi dilaksanakan untuk mendapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai pengawas, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional. Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat konsultasi sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Consultation meetings are held to obtain a unified view and alignment of actions between the Board of Commissioners as the supervisor and the Board of Directors as the operational executor. The Board of Commissioners and the Board of Directors held 12 consultation meetings with the attendance level and meeting agenda as follows:

Tabel Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Konsultasi (1 Januari – 16 Maret 2021)

Table of Board of Commissioners Attendance in Consultation Meeting (January 1 – March 16, 2021)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	AS	SN	RM	IA	MI	DU	MYA	MRS	ES	DJ	MS	
28 Januari 2021 / January 28, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	91
25 Februari 2021 / February 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

Tabel Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Konsultasi (17 Maret – 15 Juli 2021)

Table of Board of Commissioners Attendance in Consultation Meeting (March 17 – July 15, 2021)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	AS	SN	RM	IA	MI	DU	AA*	MRS	ES	DJ	MS	
25 Maret 2021 / March 25, 2021	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	82
22 April 2021 / April 22, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	91
20 Mei 2021 / May 20, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
24 Juni 2021 / June 24, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

Tabel Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Konsultasi (16 Juli – 31 Desember 2021)

Table of Board of Commissioners Attendance in Consultation Meeting (July 16 - December 31, 2021)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*										Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	AS	SN	HW*	AIM*	SM*	RM	MI	DU	AA	ES	
22 Juli 2021 / July 22, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
26 Agustus 2021 / August 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
23 September 2021 / September 23, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
21 Oktober 2021 / October 21, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
25 November 2021 / November 25, 2021	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	70
23 Desember 2021 / December 22, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

*) Komisaris yang baru diangkat pada periode tersebut

*) Newly appointed Commissioners in the period

Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi Tertentu

Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi tertentu untuk membahas permasalahan terkait permasalahan/Direktorat terkait. PLN melaporkan terdapat 35 kali rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi tertentu pada tahun 2021.

Meetings of the Board of Commissioners with Certain Directors

The Board of Commissioners may invite certain Directors to discuss issues related to relevant issues/Directorates. PLN reports that there were 35 meetings between the Board of Commissioners and certain Directors in 2021.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, antara lain:

Board of Commissioners Competency Development Program

Throughout 2021, the Board of Commissioners participated in the following training and competency development programs:

Jabatan / *Position*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / *Training and Competency Development*	Periode / *Period*
Amien Sunaryadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner and Independent Commissioner	Seminar/*workshop* "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab" / Seminar/workshop "Becoming a Competent and Responsible Commissioner"	12 – 13 Agustus 2021 / August 12 - 13, 2021
	Seminar/*workshop* "Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan" / Seminar/workshop "Responsibility of the Audit Committee When the Company Is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements"	23 September 2021 / September 23, 2021
	Seminar/*workshop* "National Anti Fraud Conference 2021"	12 – 13 Agustus 2021 / August 12 - 13, 2021
Dudy Purwagandhi Komisaris / Commissioner	Seminar/*workshop* "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab" / Seminar/workshop "Becoming a Competent and Responsible Commissioner"	12 – 13 Agustus 2021 / August 12 - 13, 2021
Ardan Adiperdana Komisaris (Periode 2021) / Commissioner (2021 Period)	Seminar/*workshop* "National Anti Fraud Conference 2021"	26 – 27 November 2021 / November 26 - 27, 2021
Eko Sulistyo Komisaris / Commissioner	Seminar/*workshop* "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab" / Seminar/workshop "Becoming a Competent and Responsible Commissioner"	12 – 13 Agustus 2021 / August 12 - 13, 2021
Heru Winarko Komisaris Independen / Independent Commissioner	Seminar/*workshop* "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab" / Seminar/workshop "Becoming a Competent and Responsible Commissioner"	12 – 13 Agustus 2021 / August 12 - 13, 2021
	Seminar/*workshop* "Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan" / Seminar/workshop "Responsibility of the Audit Committee When the Company Is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements"	23 September 2021 / September 23, 2021
	Seminar/*workshop* "National Anti Fraud Conference 2021"	26 – 27 November 2021 / November 26 - 27, 2021
Alex Iskandar Munaf Komisaris Independen / Independent Commissioner	Seminar/*workshop* "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab" / Seminar/workshop "Becoming a Competent and Responsible Commissioner"	12 – 13 Agustus 2021 / August 12 - 13, 2021
	Seminar/*workshop* "Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan" / Seminar/workshop "Responsibility of the Audit Committee When the Company Is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements"	23 September 2021 / September 23, 2021
	Seminar/*workshop* "National Anti Fraud Conference 2021"	26 – 27 November 2021 / November 26 - 27, 2021

Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021

Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Aspek pengarahan dan pengawasan
   a. *Review* atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
   b. *Review* dan pemberian tanggapan atas kinerja Perusahaan;
   c. *Review* tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal;
   d. Rapat Dewan Komisaris;
   e. Memberi tanggapan, persetujuan, teguran, nasihat dan saran kepada Direksi.
2. Aspek Pelaporan
   a. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan;

Work Plan of the Board of Commissioners in 2021

The Board of Commissioners prepares a Work Plan of the Board of Commissioners based on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, which consists of:

1. Direction and supervision aspect
   a. Review of the Company's Work Plan and Budget;
   b. Review and provide feedback on the Company's performance;
   c. Follow-up review of internal and external audit findings;
   d. Meetings of the Board of Commissioners;
   e. Provide responses, approvals, warnings, advices, and suggestions to the Board of Directors.
2. Reporting Aspect
   a. Develop and deliver the annual work program;

b. Menyampaikan laporan/pendapat kepada Pemegang Saham/RUPS;
c. Menyampaikan laporan tugas pengawasan.

3. Aspek Dinamis
   a. Program pengenalan/induksi;
   b. Program peningkatan kompetensi;
   c. Pengesahan RKAP dan LPT (RUPS).

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris tahun 2021

Dewan Komisaris melakukan penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat atas pengendalian internal Perusahaan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat di dalam Perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjalankan tugas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka tugas pengawasan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Pengawasan atas Efektivitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi**
   a. Pengawasan atas efektivitas pengelolaan organisasi dan SDM.
      Pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektivitas organisasi dan tata kerja, antara lain: efektivitas implementasi struktur organisasi dan pengelolaan jabatan strategis serta manajemen SDM. Pengawasan dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat/persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi terkait struktur organisasi, pengisian jabatan satu tingkat di bawah Direksi, Direksi anak perusahaan, dan Kepala SPI.

   b. Pengawasan atas usulan RKAP Tahun 2021 yang diajukan oleh Direksi.
      - Memastikan bahwa rencana kerja yang tertuang dalam RKAP telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan serta penugasan dari pemerintah;
      - Sasaran yang ditetapkan dalam usulan RKAP dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

b. Submit reports/opinions to Shareholders/GMS;
c. Submit a supervisory task report.

3. Dynamic Aspect
   a. Introduction/induction program;
   b. Competency improvement program;
   c. Validation of RKAP and LPT (GMS).

Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2021

The Board of Commissioners reviews, discusses, and provides advice on the Company's internal control, namely all systems and processes within the Company that are designed to provide adequate assurance on the achievement of the Company's objectives, particularly in increasing the effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with the prevailing laws and regulations in order to carry out the duties of the supervisory function and providing advice to the Board of Directors.

The activities of the Board of Commissioners in the context of supervisory duties throughout 2021 are as follows:

1. **Monitoring the Effectiveness and Efficiency of Operations and Investments**
   a. Supervision of the effectiveness of organizational and HR management.
      Supervision is carried out to assess the effectiveness of the organization and work procedures, among others: the effectiveness of the implementation of organizational structure and management of strategic positions as well as HR management. Supervision is carried out through discussion and giving opinion/approval of the Board of Commissioners on the recommendation of the Board of Directors regarding the organizational structure, filling positions one level below the Board of Directors, Directors of subsidiaries, and Head of SPI.
   b. Supervision of the proposed 2021 RKAP submitted by the Board of Directors.
      - Ensure that the work plans contained in the RKAP have been prepared in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company as well as assignments from the government;
      - The targets set in the proposed RKAP can be achieved more effectively and efficiently.

c. Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP dan KPI 2021.

Pengawasan atas pelaksanaan RKAP dan KPI Tahun 2021 dilakukan melalui penelaahan dan pembahasan laporan pelaksanaan RKAP, hambatan dalam pelaksanaan RKAP serta langkah- langkah yang dilakukan oleh Direksi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelaahan dan pembahasan dilakukan berdasarkan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan serta Laporan Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI). Selain itu juga dilakukan pembahasan tersendiri untuk permasalahan tertentu.

d. Pengawasan atas pengelolaan risiko.
   - Melakukan telaahan atas analisis risiko yang dilakukan Direksi terutama yang terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi tertentu (aksi korporasi) dengan mengkaji apakah analisis risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan;
   - Melakukan telaahan atas risiko dengan level tinggi dan ekstrem serta mengingatkan proses monitoring terhadap mitigasi yang dilakukan serta memberikan saran-saran atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi.

2. Pengawasan atas Keandalan Informasi/Pelaporan Keuangan

Pengawasan atas keandalan sistem informasi dilakukan dengan menelaah, membahas dan memberikan nasihat atas:

a. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan sistem informasi yang telah berjalan serta memastikan bahwa program pengembangan teknologi informasi berjalan sesuai rencana;
b. Temuan audit oleh KAP atas Laporan Keuangan Perusahaan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan tersebut.

3. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP melalui Laporan Manajemen dan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Korporat

Melakukan penelaahan atas Laporan Manajemen dan Realisasi KPI triwulanan dan tahunan guna memastikan akurasi dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Manajemen tersebut.

c. Supervision of the Implementation of the 2021 RKAP and KPI.

Supervision of the implementation of the 2021 RKAP and KPI was carried out through a review and discussion of the RKAP implementation report, obstacles in the implementation of the RKAP, and the steps taken by the Board of Directors to overcome these obstacles. The review and discussion is carried out based on the Quarterly Management Report and Annual Management Report as well as the Key Performance Indicators (KPI) Achievement Report. Apart from that, a separate discussion was also conducted for certain issues.

d. Supervision of risk management.
   - Review the risk analysis carried out by the Board of Directors, especially those related to the requests for recommendations or approvals from the Board of Commissioners on certain action plans of the Board of Directors (corporate actions) by reviewing whether the risk analysis carried out is adequate in accordance with the provisions of risk management within the Company;
   - Review the high and extreme levels of risk as well as remind the monitoring process of the mitigation carried out as well as provide suggestions for risks that may not have been identified.

2. Supervision of Reliability of Information/Financial Reporting

Supervision of the reliability of information systems is carried out by reviewing, discussing, and providing advice on:

a. Procedures for preparing consolidated financial statements and information systems that have been running and ensuring that the information technology development program is running according to plan;
b. Audit findings by KAP on the Company's Financial Statements, weaknesses in the internal control system, and compliance with the prevailing laws and regulations to ensure that the Board of Directors has followed up these findings.

3. Supervision of RKAP implementation through Management Reports and realization of Corporate Key Performance Indicators (KPI)

Review the Management Report and KPI Realization quarterly and annually to ensure the accuracy and reliability of the data/information presented in the Management Report.

Selain itu juga dilakukan pengawasan atas pelaksanaan audit PT PLN (Persero) Tahun 2021 oleh KAP yang meliputi: Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Keuangan PKBL Perusahaan, kinerja dan kepatuhan Perusahaan, dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja

4. Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Pengawasan atas efektivitas audit internal
   - Pengawasan dilakukan dengan pertemuan secara regular dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
   - Penelaahan laporan hasil audit internal untuk ditindaklanjuti oleh manajemen.
   - Penelaahan atas pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Audit Tahunan (PKPT) SPI.

b. Pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal
   Pengawasan dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan audit oleh KAP dan BPK telah ditindak lanjuti oleh Direksi.

c. Pengawasan atas penerapan unsur GCG
   Pengawasan atas penerapan unsur GCG (misalnya: transaksi tidak terdapat benturan kepentingan, objektivitas transaksi, prinsip kehati-hatian) dilakukan dengan memastikan bahwa semua usulan yang diajukan Direksi kepada Dewan Komisaris yang meminta persetujuan maupun rekomendasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pengawasan atas pengelolaan TJSL

Pembahasan dan penelaahan dilakukan atas langkah-langkah yang telah dilakukan Perusahaan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan TJSL.

6. Nasihat dan Teguran

Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan peringatan kepada Direksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang dilakukan serta dari penyampaian surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

7. Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat atas Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang juga mencantumkan realisasi KPI Triwulanan dan Tahunan.

In addition, there is also supervision over the implementation of the 2021 PT PLN (Persero) audit by KAP, which includes: the Company's Financial Statements, the Company's PKBL Financial Reports, the Company's performance and compliance, and other reports in accordance with the work agreements/ contracts.

4. Supervision of compliance with the prevailing laws and regulations

a. Supervision of the effectiveness of internal audit
   - Supervision is carried out through regular meetings with the Internal Audit Unit (SPI).
   - Review the report on the results of the internal audit to be followed up by management.
   - Review the implementation of the SPI Annual Audit Work Program (PKPT).

b. Supervision of the follow-up to the external audit findings
   Supervision is carried out by reviewing, discussing, and providing advice to ensure that the recommendations of audit findings by KAP and BPK have been followed up by the Board of Directors.

c. Supervision of the implementation of GCG elements
   Supervision of the implementation of GCG elements (for example: transactions without conflict of interest, objectivity of transactions, principle of prudence) is carried out by ensuring that all proposals submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners for approval or recommendations are in accordance with the prevailing regulations.

5. Supervision of TJSL management

Discussions and reviews are carried out on the steps that have been taken by the Company to increase transparency and accountability in the management of TJSL.

6. Advice and Reprimand

The Board of Commissioners has provided advice and reprimand to the Board of Directors based on the information obtained from the evaluation results in the work visits carried out as well as from the delivery of letters addressed to the Board of Commissioners, both from internal and external parties of the Company.

7. Performance of the Board of Directors

Performance appraisal of the Board of Directors is carried out through discussion and giving opinions on the Quarterly and Annual Management Reports, which also include the

Produk Pengawasan

Atas permintaan Direksi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan pendapatnya terkait rencana tindakan yang memerlukan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar. Produk pengawasan Dewan Komisaris dapat berupa: (1) Persetujuan atau Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi; (2) Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada RUPS; (3) Nasihat atau Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi dan (4) Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris kepada RUPS.

Produk pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Persetujuan atau Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi

- Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris atas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dan Material;
- Perolehan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri;
- Tanggapan Tertulis Atas Permohonan Perpanjangan Kontrak Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) PT PLN (Persero);
- Tanggapan Tertulis Atas Pemberitahuan Mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris Pada Anak Perusahaan PT PLN (Persero);
- Perolehan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri dengan nilai di atas kewenangan;
- Tanggapan atas Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020;
- Tanggapan atas Usulan Rekomendasi Penunjukkan KAP Audit Tahun Buku 2021;
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2021;
- RKAP tahun 2022;
- Penambahan modal dasar dan modal disetor anak perusahaan;
- Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Pembentukan anak perusahaan/perusahaan patungan/ akuisisi perusahaan.
- Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Tahun 2020 (*Unaudited*) dan Tahun 2020 (Audited);

Supervisory Product

At the request of the Board of Directors, the Board of Commissioners provides recommendations and opinions regarding action plans that require recommendation or approval from the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association. The supervisory products of the Board of Commissioners can be in the form of: (1) The Board of Commissioners' written approval or response to the Board of Directors; (2) The Board of Commissioners' written response to the GMS; (3) Advice or Directions from the Board of Commissioners to the Board of Directors and (4) the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners to the GMS.

The supervisory products of the Board of Commissioners throughout 2021 were as follows:

Board of Commissioners Written Approval to the Board of Directors:

- Approval and Recommendation of the Board of Commissioners on the Write-off and Transfer of Non-operating Fixed Assets (ATTB) and Materials;
- Obtaining loans both from within and outside the country;
- Written Response to the Application for Contract Extension for the Head of the Internal Control Unit (KSPI) of PT PLN (Persero);
- Written Response to Notification Regarding Dismissal and Appointment of Directors and Board of Commissioners at the Subsidiary PT PLN (Persero);
- Obtaining loans both from within and outside the country with a value above the authority;
- Responses to the Proposed Use of the Company's Net Profit for the 2020 Fiscal Year;
- Responses to the Proposed Recommendation for Appointment of KAP Audit for the 2021 Fiscal Year;
- Establishment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit Consolidated Financial Statements and PT PLN (Persero) Partnership and Community Development Program for the 2021 Fiscal Year;
- RKAP 2022;
- Additional authorized and paid-up capital of subsidiaries;
- Written Response of the Board of Commissioners on the establishment of a subsidiary/joint venture/company acquisition.
- Written Response of the Board of Commissioners on the Management Reports of PT PLN (Persero) for 2020 (Unaudited) and 2020 (Audited);

- Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Triwulan I, II, dan III Tahun 2021;
- Laporan Pencapaian KPI Triwulanan dan Tahunan tahun 2021.

- Written Response of the Board of Commissioners on the Management Report of PT PLN (Persero) Quarter I, II, and III of 2021;
- Quarterly and Annual KPI Achievement Report 2021.

Tanggapan tertulis Dewan Komisaris kepada RUPS

- Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris tahun 2021;
- Usulan Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2021 dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
- Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2022.

Board of Commissioners Written Response to the GMS

- Work Plan and KPI of the Board of Commissioners for 2021;
- Proposal of Salary for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners in 2021 and Tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2020;
- Board of Commissioners' response to the 2022 RKAP Proposal.

Nasihat atau Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi

- Nasihat atau Arahan Dewan Komisaris disampaikan melalui surat Persetujuan atau Tanggapan kepada Direksi serta disampaikan secara langsung dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 kali Rapat Konsultasi dengan seluruh Direksi dan 35 kali Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tertentu.

Board of Commissioners Advices or Directions to the Board of Directors

- The advice or direction of the Board of Commissioners is submitted through an Approval or Response letter to the Board of Directors and delivered directly in the Board of Commissioners' Meeting with the Board of Directors.
- In 2021, the Board of Commissioners has held 12 times of Consultation Meetings with all Directors and 35 times of Board of Commissioners' Meetings with certain Directors.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan kepada RUPS

Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2021.

Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners to the GMS

Board of Commissioners duty implementation report and Board of Commissioners KPI realization in 2021

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pemegang Saham melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris yang tertuang dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Kontrak Manajemen tahun 2021 telah ditetapkan dan disetujui Pemegang Saham dalam RUPS RKAP 2021 tanggal 26 Januari 2021. KPI Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN.

Performance Appraisal of the Board of Commissioners

Shareholders evaluate the performance of the Board of Commissioners based on the achievement of the Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners contained in the Management Contract between the Board of Commissioners and the Shareholders. The 2021 Management Contract has been determined and approved by the Shareholders at the 2021 RKAP GMS dated January 26 2021. The KPI of the Board of Commissioners is prepared by taking into account the duties and responsibilities of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and regulations of the Ministry of SOEs.

Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris

Realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2021 sebagai berikut:

Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI) Realization

Board of Commissioners KPI realization in 2021 is as follows:

No	Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	KPI 2021			
			Sasaran / *Target*	Bobot / *Value*	Realisasi / *Realization*	Bobot / *Value*
Dewan Komisaris dengan Direksi						
1	*Review* dan tanggapan rencana Perusahaan / Review and response on the Company's plan	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas RKAP Tahun Buku 2021, KPI Tahun 2021 dan RJP (*Review*), Revisi RKAP Tahun Buku 2021 jika ada / Discussion, suggestions and or approval of the 2021 Fiscal Year RKAP, 2021 KPI and RJP (Review), Revision of 2021 Fiscal Year RKAP if any	2 kali setahun / 2 times a year	4	• RKAP 2021 • Revisi RKAP 2021 / 2021 RKAP Revision • KPI Per Direktorat / KPI of each Directorate • Capaian KPI Semester 1 2021 / KPI Achievements in the 1st Half of 2021	4
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah *draft* diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat / Timeliness of response after draft is obtained from the Board of Directors with accurate data	14 hari kerja / 14 work days	2	3 hari kerja / 3 work days	2
2.	Pembahasan mengenai progres Transformasi PLN / Discussion on the progress of PLN's Transformation	Pembahasan progres 20 *breaktrough* yang akan dijalankan selama tahun 2021 / Discussion on the progress of 20 breakthroughs that will be carried out during 2021	12 kali setahun / 12 times a year	9	Lebih dari 75% / More than 75%	9
		Pembahasan sasaran strategis dan inisiatif strategis selain 20 *breaktrough* yang akan dijalankan selama tahun 2021 dan tahun berikutnya / Discussion of strategic targets and strategic initiatives in addition to the 20 breakthroughs that will be carried out during 2021 and the following year	6 kali setahun / 6 times a year	3	Lebih dari 75% / More than 75%	3
3.	*Review* dan tanggapan kinerja perusahaan / Company performance reviews and responses	Pembahasan, tanggapan dan persetujuan atas: LM dan KPI PLN Triwulanan Tahun 2020, LM dan KPI PLN Tahun 2021, KPI Direktorat Tahun 2020 / Discussion, response and approval of: 2020 Quarterly PLN LM and KPIs, LM and PLN KPI 2021, Directorate KPI 2020	5 kali setahun / 5 times a year	9	• LM 2020 (*Unaudited*) • LM 2020 (*Audited*) • LM TW 2021 • LM TW II 2021 • Pembahasan KPI Per Direktorat / KPI Discussion of each Directorate	9
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah *draft* diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat / Timeliness of response after draft is obtained from the Board of Directors with accurate data	14 hari kerja / 14 work days	2	9 hari kerja / 9 work days	2
4.	*Review* tindak lanjut hasil/ temuan audit internal/eksternal / Follow-up review of internal/external audit results/ findings	Pembahasan dan tanggapan/saran atas laporan pemeriksaan internal dan monitoring tindak lanjut temuan auditor eksternal / Discussion and feedback/suggestions on internal audit reports and follow-up monitoring of external auditor findings	6 kali setahun / 6 times a year	9	6 kali / 6 times	9

No	Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	KPI 2021			
			Sasaran / *Target*	Bobot / *Value*	Realisasi / *Realization*	Bobot / *Value*
5.	Memberi tanggapan tertulis/ persetujuan/ nasehat/ saran/ teguran kepada Direksi / Provision of written response/ approval/advice/ suggestion/ reprimand to the Board of Directors.	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas permintaan Direksi setelah data lengkap / Discussion and provision of written responses/ approvals at the request of the Board of Directors after complete data	usulan Direksi ditanggapi / Board of Directors suggestions responded	10	100 % usulan Direksi ditanggapi / 100% of Board of Directors suggestions responded	10
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah usulan diperoleh dari Direksi dengan data dan dokumen pendukung yang lengkap / Timeliness of response after the proposal is obtained from the Board of Directors with complete supporting data and documents	14 hari kerja / 14 work days	2	11 hari kerja / 11 Working days	2
		Pemberian nasehat/saran/teguran / Provision of advices/suggestions	4 kali / 4 times	4	56 surat berisi arahan nasehat/saran / 56 letters containing directions advice/ suggestion	4
Dewan Komisaris dengan RUPS / Board of Commissioners with the GMS				**20**		**19**
6.	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan / Submission of Board of Commissioner Annual work program and KPI	Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2021 / Board of Commissioners Work Plan and KPI in 2021	1 berkas / file	3	1 berkas / file	3
		Ketepatan waktu penyampaian / Timeliness of Submission	sebelum RUPS / before the GMS	2	sebelum RUPS / before the GMS	2
7.	Menyampaikan pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS / Submission of opinions/ suggestions of the Board of Commissioners to the Shareholders/ GMS	Pendapat atas : RJP/*Review* RJP jika ada, RKAP Tahun Buku 2021, LM & KPI PLN Tahun 2020 / Opinion on : RJP/ Review of RJP if any, RKAP for 2021 Fiscal Year, 2020 PLN LM & KPIs. Timeliness of submission: Proposal for establishing a Public Accounting Firm (KAP) for 2021 Fiscal Year, Proposed Remuneration for 2021 Fiscal Year	4 (empat) pendapat atau usulan dalam setahun / 4 (four) opinions or suggestions in a year	4	Surat Tanggapan Usulan RKAP 2021 Surat Tanggapan atas LM / Letter of Response to the 2021 and Letter of Response to the LM	4
		Ketepatan waktu penyampaian: Usulan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2021, Usulan Remunerasi tahun Buku 2021 / Timeliness of submission: Proposal for the appointment of Public Accounting Firm (KAP) for Fiscal Year 2021, Proposal for Remuneration for Fiscal Year 2021	sebelum RUPS / before the GMS	2	7 hari kerja sebelum RUPS / 7 work days before the GMS	1
8.	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris / Submission of reports on supervisory duties of the Board of Commissioners	Laporan terdiri atas : Laporan Progres KPI Semesteran Tahun 2021 / The reports consist of: KPI Biannual Progress Report in 2021 Laporan Pengawasan dan KPI Tahun 2020 / 2021 Supervisory and KPI Report	2 laporan setahun / 2 reports a year	4	Laporan Progres KPI semester 1 tahun 2021 / KPI Biannual Progress Report in 2021 Laporan Pengawasan tahun 2020 / 2020 Supervisory Report	4
		Ketepatan waktu penyampaian: / Timeliness of submission Laporan KPI Semesteran Tahun 2021 / KPI Biannual Report in 2021	30 hari kerja sejak berakhirnya periode / 30 working days from the end of the period	1	Laporan KPI Semesteran / KPI Biannual Report	1
		Laporan Pengawasan Tahun 2020 / 2020 Supervisory Report	sebelum RUPS / before the GMS	2	11 hari kerja sebelum RUPS / 11 work days before the GMS	2

No	Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	KPI 2021			
			Sasaran / *Target*	Bobot / *Value*	Realisasi / *Realization*	Bobot / *Value*
9.	RUPS / GMS	Kehadiran Komisaris kuorum pada RUPS RKAP Tahun Buku 2021, RUPS Tahunan/ LPT tahun 2020 / Board of Commissioner quorum in the: 2021 Fiscal Year RKAP GMS 2020 Annual/LPT GMS	2 kali setahun / 2 times a year	2	Kuorum pada RUPS RKAP dan LPT / Quorum in the RKAP and LPT GMS	2
Internal Dewan Komisaris / Board of Commissioners Internal				**26**		**26**
10.	Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari: Rapat Internal dan Rapat Konsultasi dengan Direksi / Konsultasi dengan Direksi. / Board of Commissioners Meeting consist of: Internal Meeting and Consultation Meeting with the Board of Directors	24 kali setahun / 24 times a year	20	81 Rapat / 81 Meetings	20
11.	Pengenalan/ Induksi/ peningkatan kompetensi / Introduction/ Induction/ competency improvement	Mengikuti seminar/*workshop* di luar negeri maupun dalam negeri/Induksi jika ada Komisaris baru / Participation of seminar/workshop overseas or in Indonesia Induction when there's new Board of Commissioners member	2 kali setahun / 2 times a year	2	4 kali seminar *workshop* 1 kali induksi / 4 seminars/workshops, 1 induction	2
12.	Pengelolaan GCG / GCG Management	Penunjukan assessor GCG Tahun 2021 / Appointment of the 2021 GCG assessor Pencapaian skor assesmen GCG Dewan Komisaris Tahun 2021 / Achievement of the 2021 GCG assessment score of the Board of Commissioners	1 kali setahun / once a year Capaian Skor minimum 80% / Minimum Score Achievement of 80%	1 3	*Self Assessment* Pencapaian skor GCG 96,2% / GCG score achievement of 96.2%	1 3
Jumlah / Total				**100**		**99**

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya No. 01/MBU/05/2019 menjadi acuan prosedur penetapan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris PLN di tahun 2021. Besaran remunerasi Dewan Komisaris adalah: honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran remunerasi Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran remunerasi

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Procedure for Determination of Remuneration of the Board of Commissioners

The Company refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Salaries of the Board of Directors and Board of Commissioners of SOEs and amendment No. 01/MBU/05/2019 for the procedure for determining and amount of remuneration of PLN's Board of Commisioners in 2021. The amount of remuneration of the Board of Commissioners is: honorarium of the President Commissioner is 45% of the salary of the President Director, the Vice President Commissioner is 42.5% of the salary of the President Director, and other Commissioners is 90% of the honorarium of the President Commissioner.

Structure and Amount of Remuneration of the Board of Commissioners

The amount of remuneration of the Board of Commissioners is adjusted to the Company's financial conditions and capabilities and may not conflict with the laws and regulations. The determination of the remuneration

tersebut menerapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*), kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia. Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan dan tantiem dengan perincian sebagai berikut:

amount applies the Industry Adjustment Factor that takes into account similar industrial sectors that are measured (benchmarks), conditions of business competition (competitiveness), business complexity, and scarcity of human resources. The remuneration received by the Board of Commissioners consists of honorarium, allowances, and tantiem with the following details:

No	Jenis Remunerasi / *Type of Remuneration*	Komisaris Utama / *President Commissioner*	Komisaris / *Commissioner*	Keterangan / *Description*
1.	**Honorarium per bulan / Honorarium per month**	**Rp 186.300.000**	**Rp167.670.000**	• Komisaris Utama: 45% gaji Direktur Utama / President Commissioner: 45% of President Director's Salary • Wakil Komisaris Utama: 42,5% gaji Direktur Utama / Vice President Commissioner: 42.5% of President Director's Salary • Komisaris: 90% honorarium Komisaris Utama / Commissioner: 90% of President Commissioner's honorarium
2.	**Tunjangan / Allowance**			
	Tunjangan hari raya keagamaan / Religious holiday allowance	1 (satu) bulan honorarium / 1 (one) month honorarium		
	Tunjangan transportasi / Transportation allowance	20% dari Honorarium / 20% of Honorarium		
	Asuransi purna jabatan / Post-tenure insurance	Premi yang ditanggung 25% dari honorarium dalam satu tahun / The premium covered 25% of the honorarium in one year		
3.	**Fasilitas / Facilities**			
	Fasilitas kesehatan / Health Facility	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun / 1 wife and 3 children at maximum 25 years old		
	Fasilitas bantuan hokum / Legal aid facility	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / Given in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations		
	Fasilitas keanggotaan klub bisnis / Business club membership facilities	1 (satu) keanggotaan klub bisnis / 1 (one) business club membership		
	Pakaian Seragam / Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun / 2 (two) sets every 1 (one) year		

Total remunerasi Dewan Komisaris yang diterima pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The total remuneration for the Board of Commissioners received in 2021 is as follows:

Jenis Remunerasi / *Type of Remuneration*	Jumlah / *Total*	Besaran (juta Rp) / *Amount (million Rp)*
Remunerasi / Remuneration		
Honorarium / Honorarium	15 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2021) / 15 Commissioners (including those who have resigned in 2021)	Rp21.519.773.228
Tantiem	16 Komisaris (termasuk mantan direksi tahun buku 2020) / 16 Commissioners (including former directors for 2020 fiscal year)	Rp32.966.794.100
Tunjangan / Allowance		
Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	15 Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2021) / 15 Commissioners (including those who have resigned in 2021)	Rp4.303.930.644
Tunjangan Hari Raya / Holiday Allowance	14 Komisaris (termasuk mantan direksi tahun buku 2020) / 14 Commissioners (including those who have resigned in 2021)	Rp1.675.672.828
Jumlah / Total		**Rp60.466.170.800**

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Nonkinerja, dan/atau Opsi Saham yang Diterima Dewan Komisaris

Berdasarkan Permen BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya yang terakhir Nomor 01/MBU/05/2019 Dewan Komisaris berhak menerima bagian dari keuntungan Perusahaan (tantiem). Realisasi tantiem Dewan Komisaris pada tahun 2021 senilai Rp32.966.794.100 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). Besaran tantiem terlampir merupakan hasil pertimbangkan capaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan (TKP).

Disclosure of Performance Bonuses, Non-Performance Bonuses, and/or Stock Options Received by the Board of Commissioners

Based on Regulation of the Minister of SOEs No: PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Salaries of the Board of Directors and Board of Commissioners of SOEs and the latest amendment No. 01/MBU/05/2019, the Board of Commissioners is entitled to receive a share of the Company's profits (tantiem). Realization of the Board of Commissioners tantiem in 2021 amounting to Rp32,966,794,100 (Thirty Two Billion Nine Hundred Sixty Six Million Seven Hundred Ninety Four Thousand One Hundred Rupiah). The amount of bonus attached is the result of considering KPI achievements and company soundness level (TKP).

Mengingat PLN bukan sebuah perusahaan publik, maka PLN tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Ownership Program*).

Considering that PLN is not a public company, PLN does not have an Employee Stock Option Program/Management Stock Option Program implemented by the Company.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antar Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dan/Atau Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris PLN tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Disclosure of Affiliation Between Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Shareholders

Members of PLN's Board of Commissioners do not have any affiliation, neither financially nor familial, with each other, as well as between the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders as described in the following table:

Nama	Hubungan Keluarga dengan / *Familial Relation with*						Hubungan Keuangan dengan / *Financial Relation with*					
	Anggota Dewan Komisaris / *Members of the Board of Commissioners*		Anggota Direksi / *Members of the Board of Directors*		Pemegang Saham / *Shareholders*		Anggota Dewan Komisaris / *Members of the Board of Commissioners*		Anggota Direksi / *Members of the Board of Directors*		Pemegang Saham / *Shareholders*	
	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*
Amien Sunaryadi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Suahasil Nazara	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Heru Winarko	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Alex Iskandar Munaf	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Susiwijono Moegiarso	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rida Mulyana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Mohamad Ikhsan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dudy Purwagandhi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ardan Adiperdana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Eko Sulistyo	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris PLN dapat dilihat dari keberagaman keahlian dan pengalaman yang mencakup berbagai bidang seperti ekonomi/keuangan, hukum, dan teknik kelistrikan seperti terlihat pada tabel berikut:

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

The diversity of the composition of PLN's Board of Commissioners can be seen from the diversified expertise and experience covering various fields, such as economics/finance, law, and electrical engineering as shown in the following table:

Nama / *Name*	Jenis Kelamin / *Gender*	Usia per 31 Des 2021 / *Age as of December 31, 2021*	Pendidikan / Education			Keahlian / Expertise			
			S1 / *Bachelor's Degree*	S2 / *Master's Degree*	S3 / *Doctoral Degree*	Ekonomi/ Keuangan / *Economy/ Finance*	Hukum / Legal	Teknik / *Engineering*	Lain-lain / *Others*
Amien Sunaryadi	Laki-laki / Male	61		✓		✓			
Suahasil Nazara	Laki-laki / Male	51			✓	✓			
Heru Winarko	Laki-laki / Male	59	✓				✓		
Alex Iskandar Munaf	Laki-laki / Male	60			✓	✓			
Susiwijono Moegiarso	Laki-laki / Male	52		✓		✓			
Rida Mulyana	Laki-laki / Male	58		✓				✓	
Mohamad Ikhsan	Laki-laki / Male	57			✓	✓			
Dudy Purwagandhi	Laki-laki / Male	51	✓				✓		
Ardan Adiperdana	Laki-laki / Male	62			✓	✓			
Eko Sulistyo	Laki-laki / Male	53	✓						✓

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris sebagai pimpinan kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan Dewan Komisaris dan sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan dengan masa jabatan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners may appoint a Secretary of the Board of Commissioners as the head of the secretariat of the Board of Commissioners to carry out secretarial activities for the Board of Commissioners and as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties. The Secretary to the Board of Commissioners comes from outside the Company with tenure determined by the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris diatur di dalam *Board Manual*, yakni sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners are regulated in Board Manual, as follows:

1. Lead and organize activities in the secretariat within the Board of Commissioners, the details of which are further regulated by Board of Commissioners.

2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/ informasi lainnya mengenai Perseroan.
3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi Rapat serta pembuatan risalah Rapat, serta tugas – tugas lain yang terkait.
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasikan kegiatan Komite Dewan Komisaris.
6. Menyusun dan mengadministrasikan risalah Rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Menetapkan prosedur teknis Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.
8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
9. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

2. Coordinate the provision of information required by the Board of Commissioners, such as periodic reports from Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, SPI Audit Results Reports) as well as other reports/information regarding the Company).
3. Prepare and finalize reports and documents that are the obligations of the Board of Commissioners, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Commissioners' Work Plan and Budget.
4. Organize meetings of the Board of Commissioners, prepare and send invitations, deliver meeting materials and prepare minutes of meetings, and other related tasks.
5. Coordinate and facilitate the activities of the Board of Commissioners' committees.
6. Compile and administer minutes of meeting and other Board of Commissioners' documents and distribute meeting decisions to the interested parties.
7. Establish technical procedure for Board of Commissioners' Working Visit.
8. Ensure that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and implements GCG principles.
9. Serve as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.
10. Entitled to access notes or information about employees, funds, assets, and other resources belonging to the Company related to the implementation of their duties based on the written letter of assignment from the Board of Commissioners and required to report the assignment result in writing.
11. Secretary and Secretariat Staff of Board of Commissioners are required to maintain the confidentiality of documents, data, and information of the Company, both from internal and external parties and only used for the benefit of their duties.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary to the Board of Commissioners

ACHMAD TAUFIK

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Usia / *Age*	45 tahun / 45 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• Graduate, The Federal Bureau Investigation/ FBI • National Academy, USA. • S1 Akuntansi, Universitas Indonesia / Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Indonesia
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	• Akuntan Beregister / Registered Accountant • *Certified Fraud Examiner* (CFE) • *Certified* ISO 31000 *Risk Management*
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	SK Dewan Komisaris No 16/SK/DK-PLN/2020 tanggal 6 Mei 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 16/SK/DK-PLN/2020 dated May 6, 2020
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• Senior Specialist pada Deputi Informasi dan Data – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) / Senior Specialist under the Deputy of Information and Data – Corruption Eradication Commission (KPK) • Associate Auditor pada Kantor Akuntan Publik AAJ-RSM / Associate Auditor at Public Accounting Firm AAJ-RSM • Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jakarta / Executive Director of the Indonesian Institute of Accountant (IAI) Jakarta
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for Competence Improvement*	• Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk manager (28-30 Jan 2021) / Risk Management ISO 31000 Risk manager training (Jan 28-30, 2021) • Sertifikasi PECB Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk Manager (6 Feb 2021) / ISO 31000 Risk Management PECB Certification at Risk Manager level (Feb 6, 2021)

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola PLN, Komite Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan penasihatan terhadap jalannya Perseroan. Anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris adalah orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman khusus dalam satu atau lebih area keilmuan tertentu yang dapat membantu Dewan Komisaris secara efektif. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lain apabila diperlukan dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Perseroan terkait Komite.

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dasar pembentukan Komite Audit adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE

Based on the PLN's Code of Corporate Governance, the Board of Commissioners' Committee was established to assist the duties of the Board of Commissioners in supervising and advising the operation of the Company. Committee members who are not from the Board of Commissioners are people who have special competence and experience in one or more specific scientific areas and can assist the Board of Commissioners effectively. The Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee and may establish other committees if necessary, with due observance of the prevailing laws and regulations for the Company regarding the Committee.

The Board of Commissioners established Audit Committee to assist the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners. The Audit Committee was established based on:

- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Nomor 01/SK/DK-PLN/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Komite Audit PT PLN (Persero).

- Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners,
- Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, and
- Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2015 dated January 15, 2015 on Audit Committee of PT PLN (Persero).

Piagam Komite Audit

Dewan Komisaris mengesahkan Piagam Komite Audit tahun 2019, yang merupakan revisi atas Piagam Komite Audit Tahun 2015, sebagai pedoman kerja komite audit.

Piagam Komite Audit tersebut menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit.

Komposisi Komite Audit

Susunan Komite Audit PLN terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota, dan 3 (tiga) anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee Charter

The Board of Commissioners validated the 2019 Audit Committee Charter, a revision of the 2015 Audit Committee Charter as the working guidelines for the audit committee.

The Audit Committee Charter outlines the duties, responsibilities, and obligations of the Audit Committee.

Composition of Audit Committee

The composition of the Audit Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner as head, 2 (two) Independent Commissioners as members, and 3 (three) members from independent external parties with expertise and experience in accordance with the required qualifications. The members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

No	Anggota / *Member*	Inisial / *Initial*	Posisi di Komite / *Position in Committee*	Jabatan di PLN / *Position in PLN*	Periode / *Period*
1	Amien Sunaryadi	AS	Ketua merangkap Anggota / Head cum Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner cum Independent Commissioner	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris / The same as their tenure as Commissioners
2	Heru Winarko	HW	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner	
3	Alex Iskandar Munaf	AIM	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner	
4	Tomi Parisianto Wibowo	TPW	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Member of Non-Commissioner Committee	1 Desember 2021 - 30 November 2024 / December 1, 2021 - November 30, 2024
5	Krisna Simbaputra	KS	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Member of Non-Commissioner Committee	1 Oct 2017-1 Oct 2018/ Oct 1, 2017 – Octr 1, 2018 1 Oct 2018-30 Sep 2020/ Oct 1, 2018 – Sep 30, 2020 1 Oct 2020-30 Sep 2022 / Oct 1, 2020 – Sep 30, 2022
6	Nizam Burhanudin	NB	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Member of Non-Commissioner Committee	8 Apr 2019-7 Apr 2020 / Apr 8, 2019 – Apr7, 2020 8 Apr 2020-7 Apr 2022 / Apr 8, 2020 – Apr 7, 2022

Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota komite audit yang menjadi anggota Dewan Komisaris PLN dapat dilihat di bab profil perusahaan sub bab Dewan Komisaris. Sedangkan profil anggota komite audit non anggota dewan komisaris sebagai berikut:

Profile of Audit Committee's Members

Profile of audit committee's members who are members of PLN's Board of Commissioners PLN can be seen in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners sub-chapter. Meanwhile, the profile of the audit committee's members who are not members of the Board of Commissioners are as follows:

TOMI PARISIANTO WIBOWO

Anggota Komite Audit Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Audit Committee

Usia / *Age*	48 tahun / 48 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997) / Bachelor of Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1997)
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	-
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Non Komisaris pada 1 November 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 25/SK/DK-PLN/2021 / Appointed as a Non-Commissioner Audit Committee Member on November 1, 2021 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 25/SK/DK-PLN/2021
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• SEVP Finance, Accounting & Strategic Performance, PT Bank Victoria International Tbk (2018-2021) • EVP Head of Finance and Accounting, PT Bank QNB Indonesia Tbk (2013-2018) • Group Head of Financial Control and Corporate Planning, PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2011-2013) • Senior Manager, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan / PricewaterhouseCoopers (2006-2011) • Associate Manager, KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja / Ernst & Young (1997-2006)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees in SOEs.

R. KRISNA SIMBAPUTRA

Anggota Komite Audit Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Audit Committee

Usia / *Age*	61 tahun / 61 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S2 Information Management, Sheffield University, UK (1995) / Master's Degree in Information Management, Sheffield University, UK (1995) • S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1985) / Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1985)
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	Certified ISO 31000 Risk Management

Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	• SK Dewan Komisaris No. 16/SK/DK-PLN/2017 tanggal 20 September 2017 / Decree of the Board of Commissioners No. 16/SK/DK-PLN/2017 dated September 20, 2017 • SK Dewan Komisaris No. 19/SK/DK-PLN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 / Decree of the Board of Commissioners No. 19/SK/DK-PLN/2018 dated October 23, 2018 • SK Dewan Komisaris No. 26/SK/DK-PLN/2020 tanggal 21 September 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 26/SK/DK-PLN/2020 dated September 21, 2020
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan (2013-2017) / Head of Risk Management & Compliance Division (2013-2017) • General Manager PLN Wilayah Sumatera Utara (2011-2013) / General Manager of PLN Region for North Sumatera (2011-2013) • General Manager PLN Wilayah Sumatera Barat (2010-2011) / General Manager of PLN Region for West Sumatera (2010-2011) • Manager Bidang PLN Distribusi Jawa Timur (2009) / Manager of PLN Distribution for East Java (2009) • Manager Bidang Operasi PLN P3B Jawa Bali (2008-2009) / Manager of Operations of PLN P3B for Java Bali (2008-2009) • Manager Bidang Perencanaan PLN Wilayah Kalimantan Timur (2006-2008) / Manager of Planning of PLN Region for East Kalimantan (2006-2008) • Manajer PLN Area Cimahi (2000-2006) / Manager of PLN Area for Cimahi (2000-2006)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees in SOEs.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for Competence Improvement*	• Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk manager (28-30 Januari 2021) / ISO 31000 Risk Management Training for Risk manager level (January 28-30, 2021) • Sertifikasi PECB Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk Manager (6 Februari 2021) / ISO 31000 Risk Management PECB Certification at Risk Manager level (February 6, 2021) • Smart Grid Webinar Series "Advanced Metering" (27 Mei 2021) / Smart Grid Webinar Series "Advanced Metering" (May 27, 2021) • Pendalaman Materi Manajemen Risiko Lanjutan yang diselenggarakan oleh UPDL Jakarta (24 Juni 2021) / Exploration of Advanced Risk Management Materials organized by UPDL Jakarta (June 24, 2021) • MKI Smart Grid Webinar Series "The Road Ahead for E-Mobility & Electric Vehicle" (30 Juni 2021) / MKI Smart Grid Webinar Series "The Road Ahead for E-Mobility & Electric Vehicle" (June 30, 2021) • Webinar "Tanggung Jawab Komite Audit saat Persero Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan"yang diselenggarakan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (23 September 2021) / Webinar "Responsibility of the Audit Committee when the Company is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements" held by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) (September 23, 2021) • Webinar "*Cyber Risk Management: Stop Cyber Attack Before They Stop You*" yang diselenggarakan oleh ERMA - (*Enterprise Risk Management Academy*) (15 Juli 2021) / Webinar "Cyber Risk Management: Stop Cyber Attack Before They Stop You" organized by ERMA - (Enterprise Risk Management Academy) (July 15, 2021) • Riskhub International Webinar "Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage" yang diselenggarakan oleh ERMA (*Enterprise Risk Management Academy*) dan IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association) (27 September 2021) / Riskhub International Webinar "Accelerating ESG: Benefits to Creating the Competitive Advantage" organized by ERMA (Enterprise Risk Management Academy) and IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association) (September 27, 2021) • Webinar Kolaborasi FEB UI dan Oxford University "A Conversation on the Global Economy in the midst of Covid-19" yang diselenggarakan oleh FEB UI (19 Oktober 2021) / FEB UI and Oxford University Collaboration Webinar "A Conversation on the Global Economy in the midst of Covid-19" organized by FEB UI (October 19, 2021) • "Menuju COP26 Glasgow: Transisi Energi, Financing, dan Kesiapan Industri" yang diselenggarakan oleh SIGMAPHI INDONESIA (29 Oktober 2021) / "Towards COP26 Glasgow: Energy Transition, Financing and Industrial Readiness" organized by SIGMAPHI INDONESIA (October 29, 2021) • National Anti Fraud Conference 2021 yang diselenggarakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ()26-27 November 2021 / National Anti Fraud Conference 2021 organized by Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (November 26-27, 2021)

NIZAM BURHANUDIN

Anggota Komite Audit Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Audit Committee

Usia / *Age*	63 tahun / 63 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S3 Ilmu Hukum, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011) / Doctoral Degree in Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011) • S2 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia (1997) / Master's Degree in Law, Universitas Indonesia (1997) • S1 Hukum Perdata, Universitas Muhamadiyah Jakarta (1986) / Bachelor's Degree in Law, Universitas Muhamadiyah Jakarta (1986)
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	• Sertifikasi Legal Audit – Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia / Legal Audit Certification - Indonesian Certification Institute of Legal Auditor Profession • Certified ISO 31000 Risk Management
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	• SK Dewan Komisaris No. 6/SK/DK-PLN/2019 tanggal 27 Maret 2019 / Decree of the Board of Commissioners No. 6/SK/DK-PLN/2019 dated March 27, 2019 • SK Dewan Komisaris No. 4/SK/DK-PLN/2020 tanggal 19 Maret 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 4/SK/DK-PLN/2020 dated March 19, 2020
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	Pegawai negeri sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) (1979-2019) dengan jabatan terakhir Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (2010-2019) / Civil service employee at The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) (1979-2019) with the last position as Head of Main Directorate of Legal Development of State Financial Audit (2010-2019)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees in SOEs.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for Competence Improvement*	• Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk manager (28-30 Januari 2021) / ISO 31000 Risk Management Training for Risk manager level (January 28-30, 2021) • Sertifikasi PECB Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk Manager (6 Februari 2021) / ISO 31000 Risk Management PECB Certification at Risk Manager level (February 6, 2021) • Integrated Auditing for the Public Sector yang diselenggarakan oleh Institut Pemeriksa Keuangan Negara (22 Juni 2021) / Integrated Auditing for the Public Sector organized by the State Audit Institute (June 22, 2021) • Webinar "Tanggung Jawab Komite Audit saat Persero Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan"yang diselenggarakan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (23 September 2021) / Webinar "Responsibility of the Audit Committee when the Company is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements" held by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) (September 23,2021) • National Anti Fraud Conference 2021 yang diselenggarakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ()26-27 November 2021) / National Anti Fraud Conference 2021 organized by Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (November 26-27, 2021)

Pernyataan Independensi Komite Audit

Berdasarkan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER01/MBU/2011, salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Seluruh anggota Komite harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Statement of Independence of Audit Committee

Based on Regulation of the Minister of SOEs No. PER01/MBU/2011, one of the criteria to become a member of the Audit Committee is to be independent and free from conflicts of interest so that they can be objective in providing opinions on the issues encountered. All members of the Committee shall act professionally in carrying out their duties and in providing opinions to the Board of Commissioners.

Pengukuran terhadap Independensi Komite Audit dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana yang dimaksud yaitu:

The independence of the Audit Committee is measured by referring to the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee. All members of the Audit Committee have met the independence criteria as follows:

Kriteria Independensi / *Independence Criteria*	AS	HW	AIM	TPW	KS	NB
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PLN dalam 6 bulan terakhir. / He/she is not an employee in a public accounting Firm, legal consulting office, public appraisal service office, or any other parties providing insurance services, non-insurance services, appraisal services, and/or other consulting services to PLN within the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan PLN dalam 6 bulan terakhir. / He/she is not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise PLN's activities within the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN. / He/she does not have neither direct nor indirect business relationship related to PLN's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. / He/she does not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate of or serve as head/deputy head of local government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatan di PLN. / He/she does not have other positions that may cause a conflict of interest related to the position at PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tugas Komite Audit

Tugas Komite Audit sebagaimana dijabarkan di dalam Piagam Komite Audit adalah:

1. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh PLN, seperti Laporan Keuangan, RKAP, Laporan Manajemen dan Informasi Keuangan Lainnya.
2. Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dan melakukan telaah untuk memastikan efektivitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh KAP;
3. Melakukan telaah untuk menilai keandalan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN;
4. Melakukan telaah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) PLN;
5. Melakukan telaah atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan;
6. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PLN;

Duties of Audit Committee

The duties of Audit Committee as described in Audit Committee Charter are as follows:

1. Review financial information to be issued by PLN, such as Financial Statements, RKAP, Management Reports, and Other Financial Information.
2. Appoint a Public Accounting Firm (KAP) that will carry out an audit of the Financial Statements and conduct a review to ensure the effectiveness of the activities and results of the audit carried out by the KAP;
3. Conduct a study to assess the reliability and effectiveness of PLN's Internal Control System;
4. Conduct a study to ensure the effectiveness of the implementation of activities and results of the audit carried out by PLN's Internal Supervisory Unit (SPI);
5. Review the Company's compliance with the laws and regulations, particularly in relation to the reporting to stakeholders;
6. Review complaints related to PLN;

7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah: (a) Melakukan penelaahan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut Direksi atas temuan auditor internal, (b) Memastikan bahwa penghapusan piutang, persediaan dan aktiva tidak beroperasi telah dilaksanakan sesuai peraturan/perundangan yang berlaku, (c) Tugas-tugas khusus lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Program Kerja Komite Audit pada Tahun 2021. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *review* terhadap proses penetapan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2021;
2. Melakukan *review* terhadap progres dan hasil akhir pekerjaan KAP sebelum disajikan dalam Laporan Keuangan;
3. Menelaah dan memberi tanggapan terhadap surat Direksi perihal permintaan persetujuan dan atau rekomendasi penghapusan ATTB;
4. Melakukan monitoring/pengawasan aktivitas SPI;
5. Menelaah dan menyusun usulan tanggapan atas tanggapan atas Laporan Manajemen tahun 2020 *Unaudited* dan *Audited*;
6. Menelaah dan memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I, II dan III tahun 2021;
7. Menelaah Usulan RKAP 2021;
8. Menelaah atas usulan Hasil Penilaian Wajar Properti Investasi tahun 2020 pada PT PLN (Persero);
9. Menelaah dan menyusun usulan Tanggapan Tertulis atas Pembentukan Yayasan Indonesia Energy and Electricity Institute (IEEI)
10. Memberikan tanggapan tertulis atas pendirian dan setoran modal awal PLN kepada Indonesia *Battery Corporation* ("IBC")/PT Industri Baterai Indonesia ("PT IBI") sebagai *Holding* Bisnis Baterai Bumn Indonesia;
11. Tanggapan atas Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.

Rapat Komite Audit

Komite Audit menyelenggarakan 181 kali rapat, melampaui rencana 104 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota Komite non-Komisaris, serta rapat dengan manajemen

7. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners, including: (a) Reviewing the audit by the internal auditor and supervising the follow-up of the Board of Directors on the findings of the internal auditor, (b) Ensuring that the write-off of receivables, inventories, and non-operating assets have been carried out in accordance with the prevailing regulations/laws, (c) Other special tasks in accordance with the prevailing laws and regulations.

Implementation of Audit Committee's Duties in 2021

Audit Committee has conducted its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee's Work Programs for 2021. The realization of Audit Committee's duties included:

1. Reviewing the process of determining the KAP that will audit the Company's financial statements for 2021;
2. Reviewing the progress and final results of the work of KAP before being presented in the Financial Statements;
3. Reviewing and responding to the letter of the Board of Directors regarding the request for approval and or recommendation for the write-off of ATTB;
4. Reviewing monitoring/supervision of SPI's activities;
5. Reviewing and preparing proposed responses to responses to the 2020 Unaudited and Audited Management Reports;
6. Reviewing the Management Reports of Q I, Q II, and Q III in 2021 and preparing their responses;
7. Reviewing the 2021 RKAP;
8. Reviewing the proposed 2020 Investment Property Fair Assessment Results at PT PLN (Persero);
9. Reviewing and preparing a written response proposal for the establishment of the Indonesia Energy and Electricity Institute (IEEI) Foundation
10. Providing a written response on the establishment and initial investment of PLN to Indonesia Battery Corporation ("IBC")/PT Industri Battery Indonesia ("PT IBI") as the Indonesian State Owned Enterprise Battery Business Holding;
11. Responses to the Proposed Use of the Company's Net Profits for the 2020 Fiscal Year.

Meetings of Audit Committee

The Audit Committee held 181 meetings, exceeding the planned 104 meetings, which consisted of internal Committee meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, non-Commissioner Committee member

Perusahaan dan auditor eksternal. Penjelasan lebih lanjut terkait rapat tersebut adalah sebagai berikut:

meetings, as well as meetings with the Company's management and external auditors. Further explanation regarding the meetings is as follows:

No	Jenis Rapat Komite Audit / *Type of Audit Committee's Meetings*	Jumlah / *Total*
1	Rapat dengan Dewan Komisaris / Meeting with the Board of Commissioners	35
2	Rapat internal dengan Komite Audit / Internal meeting with Audit Committee	33
3	Rapat dengan Komite lain / Meeting with othe Committees	16
4	Rapat dengan Direktur, SEVP, EVP Terkait / Meeting with Related Directors, SEVP, EVP	74
5	Rapat dengan SPI, BPK, BPKP, KAP / Meeting with Public Accounting Firm (KAP)	23
	Jumlah Rapat / Total Meetings	**181**

Key Performance Indicators (KPI) Komite Audit

Anggota Komite Audit melakukan *self-assessment* untuk penilaian kinerja. Hasil pencapaian KPI Komite Audit di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Key Performance Indicators (KPI) of Audit Committee

Members of the Audit Committee conduct self-assessment for performance appraisal. The results of the Audit Committee's KPI achievements in 2021 were as follows:

Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Komite Audit

Realisasi KPI Komite Audit Tahun 2021 sebagai berikut:

Realization of Key Performance Indicator (KPI) of Audit Committee

Realization of KPI of Audit Committee in 2021 is as follows:

Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	Kuantitas / Tolak Ukur / *Quantity/Benchmark*		Nilai Perolehan	
		Setahun / *In a year*	Bobot / *Value*		
1. Menyampaikan Rencana Kerja dan KPI Komite / Submitting the Committee's Work Plan and KPIs	Rencana Kerja dan KPI Komite Tahunan / Annual Committee Work Plan and KPI	1 paper	4	1 paper	4
	Ketepatan waktu penyampaian / Delivery time	Triwulan 1 2021 / Quarterly in 2021	3	17 Maret 2021 / March 17, 2021	3
2. *Review* dan tanggapan atas usulan Direksi tentang RKAP 2021 / Review and response to the Board of Directors' proposal regarding RKAP 2021	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas RKAP 2021 dan RKAP Revisi dari Direksi setelah data lengkap. / Discussion, suggestions, and/or approval of the 2021 RKAP and Revised RKAP from the Board of Directors after complete data.	2 kali setahun / Twice a year	10	1 tanggapan tertulis atas 1 usulan*) / 1 written response to 1 suggestion*)	10
	Ketepatan waktu penyampaian tanggapan. / Timeliness of submission of responses.	14 hari kerja / 14 working days	6	4 hari kerja / 4 working days	6
3. *Review* dan tanggapan atas Laporan Manajemen dan KPI Direktorat / Review and response to the Directorate's Management Report and KPI	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas Laporan Manajemen dan KPI Direktorat dari Direksi setelah data lengkap. / Discussion, suggestions, and/or approval of the Management Report and KPI of the Directorate from the Board of Directors after the data is complete.	5 kali setahun / 5 times a year	10	5 Tanggapan Tertulis atas: / 5 Written Responses on: • LM Tahun 2020 (*Unaudited*) / LM Year 2020 (Unaudited) • LM Tahun 2020 (*Audited*) / LM Year 2020 (Audited) • LM Triwulan I Tahun 2021 / LM Quarter I of 2021 • LM Triwulan II Tahun 2021 / LM Quarter II of 2021 • LM Triwulan III tahun 2021 / LM Quarter III of 2021	10
	Ketepatan waktu penyampaian tanggapan. / Timeliness of submission of responses.	14 hari kerja / 14 working days	3	Rata-rata 9 hari kerja / Average 9 working days	3
4. *Review* dan tanggapan atas usulan Direksi tentang usulan penghapusan ATTB dan PRR 2021 / Review and response to the recommendation of the Board of Directors regarding the proposed abolition of ATTB and PRR 2021	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas Usulan Penghapusan ATTB dan PRR dari Direksi setelah data lengkap. / Discussion, suggestion, and/or approval of the Proposed Elimination of ATTB and PRR from the Board of Directors after complete data.	Usulan Direksi ditanggapi / The Board of Directors' proposals are responded to	8	3 rekomendasi dan persetujuan tertulis / 3 recommendations and written approval	8
	Ketepatan waktu penyampaian tanggapan. / Timeliness of submission of responses.	14 hari kerja / 14 working days	3	Rata-rata 17 hari kerja**) / Average 17 working days **)	2

Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	Kuantitas / Tolak Ukur / *Quantity/Benchmark*		Nilai Perolehan	
		Setahun / *In a year*	Bobot / *Value*		
5. Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI Komite Triwulanan dan Tahunan / Submitting Quarterly and Annual Committee Activity and KPI Realization Reports	Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI Komite Triwulan dan Tahunan / Quarterly and Annual Committee Activity and KPI Realization Report	4 kali setahun / 4 times a year	10	4 kali setahun: / 4 times a year: • Laporan TW IV tahun 2020 / Quarterly Report IV of 2020 • Laporan TW I tahun 2021 / Quarterly Report I of 2021 • Laporan TW II Tahun 2021 / Quarterly Report II of 2021 • Laporan TW III Tahun 2021 / Quarterly Report III of 2021	10
	Ketetapan waktu penyampaian laporan. / Timeliness of report submission.	30 hari sejak berakhirnya periode / 30 days since the end of the period	3	30 hari kerja / 30 working days	3
6. Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting	Menghadiri Rapat Dewan Komisaris. / Attending the Board of Commissioners Meeting	24 kali setahun / 24 times a year	15	35 kali / 35 times	15
7. Rapat Internal Komite Audit / Audit Committee Internal Meeting	Menghadiri Rapat Internal Komite Audit / Attending the Audit Committee Internal Meeting	5 kali setahun / 5 times a year	15	33 kali / 33 times	15
8. Kunjungan Kerja ke Unit / Working Visit to Unit	Melakukan kunjungan kerja ke Unit / AP / Make a working visit to the Unit / AP	6 kali setahun / 6 times a year	5	5 kali***) / 5 times***)	5
9. Pengenalan/Induksi/ Peningkatan kompetensi / Introduction/Induction/ Improvement of competence	Mengikuti seminar/*workshop* / Participating in seminars/workshops	2 kali setahun / Twice a year	3	11 kegiatan peningkatan kompetensi diikuti oleh Komite Audit (Komisaris dan Non Komisaris) / 11 competency improvement activities attended by the Audit Committee (Commissioners and Non-Commissioners)	3
10. *Self Assesment* GCG Komite / Self-Assessment of GCG Committee	Pemenuhan kriteria GCG untuk Komite / Fulfillment of GCG criteria for the Committee	*Charter* Komite / Committee Charter	2	Piagam Komite Audit tahun 2019 (Masih berlaku) / 2019 Audit Committee Charter (Still valid)	2
Total			**100**		**99**

*) Penugasan dialihkan ke Komite Manajemen Risiko

**) 1 Surat Permohonan ATTB ditanggapi dalam 28 hari disebabkan karena terbitnya Surat dari Kementrian BUMN mengenai perubahan wewenang Dewan Komisaris dalam memberikan Rekomendasi dan Persetujuan dalam penghapusbukuan AT/ATTB

***) Disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19

*) Assignment was transferred to the Risk Management Committee

**) 1 Application for ATTB was responded to within 28 days due to the issuance of a letter from the Ministry of SOE regarding the change in the authority of the Board of Commissioners in providing Recommendations and Approval in the write-off of AT/ATTB

***) Due to the Covid-19 pandemic

Remunerasi Komite Audit

Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara mengatur ketentuan remunerasi Komite Audit. Penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Remuneration of Audit Committee

Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board in State-Owned Enterprises regulates the provisions on the remuneration of the Audit Committee. The income of members of the Audit Committee is in the form of a maximum honorarium of 20% of the salary of the Company's President Director, provided that the tax is borne by the Company and they are not allowed to receive any other income other than the honorarium.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Landasan hukum pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Nomor 04/KR/DK-PLN/2015 tanggal 6 Mei 2015 serta perubahannya pada SK Nomor 17/SK/DK-PLN/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Komite Manajemen Risiko.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris mengesahkan Piagam Komite Manajemen Risiko pada tahun 2021 yang merupakan revisi dari Piagam Manajemen Risiko Tahun 2019. Piagam tersebut menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Manajemen Risiko.

Komposisi Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko PLN terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris sebagai ketua, 3 (tiga) orang Komisaris sebagai anggota, dan 3 (tiga) anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Board of Commissioners established a Risk Management Committee to assist the implementation of duties and functions of the Board of Commissioners. The legal basis for the establishment of the Risk Management Committee is the Decree of the Minister of SOEs No. KEP-117/M-MBU/2002 on Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises and Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 04/KR/DK -PLN/2015 dated May 6, 2015 and its amendment to Decree No. 17/SK/DK-PLN/2015 dated May 22, 2015 on Risk Management Committee.

Risk Management Committee Charter

The Board of Commissioners validated the Risk Management Committee Charter in 2021, which is a revision of the 2019 Risk Management Charter. The charter outlines the duties, responsibilities, and obligations of the Risk Management Committee.

Composition of Risk Management Committee

The Board of Commissioners appoints and dismisses members of the Risk Management Committee. PLN's Risk Management Committee consists of 1 (one) Commissioner as chairman, 3 (three) Commissioners as members, and 3 (three) members from independent external parties with expertise and experience in accordance with the required qualifications.

No	Anggota / *Member*	Inisial / *Initial*	Posisi di Komite / *Position in Committee*	Jabatan di PLN / *Position in PLN*	Periode / Period
1.	Mohamad Ikhsan	MI	Ketua merangkap Anggota / Head cum Member	Komisaris / Commissioner	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris / The same as their tenure as Commissioners
2.	Rida Mulyana	RM	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	
3.	Susiwijono Moegiarso	SM	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	
4.	Ardan Adiperdana	AA	Anggota / Member	Komisaris / Commissioner	
5.	Firman Dini	FD	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	1 Okt 2016-1 Okt 2017 / Oct 1, 2016 – Oct 1, 2017 1 Okt 2017-1 Okt 2019 / Oct 1, 2017 – Oct 1, 2019 2 Okt 2019-1 Okt 2021 / Oct 2, 2019 – Oct 1, 2021
6.	Widhyawan Prawiraatmadja	WP	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	1 Jun 2020-31 Mei 2023 / June 1, 2020 – May 31, 2023
7.	Saguh Pangaribowo	SP	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	1 Maret 2021- 29 Februari 2024 / March 1, 2021 - February 29, 2024
8.	I Made Ro Sakya	MR	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Non-Commissioner Committee Member	2 Oktober 2021-1 Maret 2024 / October 2, 2021 – March 1, 2024

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil anggota Komite Manajemen Risiko yang menjadi anggota Dewan Komisaris PLN dapat dilihat di bab profil perusahaan sub bab Dewan Komisaris. Sedangkan profil anggota komite audit non anggota dewan komisaris sebagai berikut:

Profile of Risk Management Committee's Members

Profile of the Risk Management Committee's members who are members of PLN's Board of Commissioners can be seen in the Company Profile chapter, the Board of Commissioners sub-chapter. Meanwhile, the profile of the audit committee's members who are not members of the Board of Commissioners are as follows:

FIRMAN DINI

Anggota Komite Manajemen Risiko Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Risk Management Committee

Usia / *Age*	64 tahun / 64 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1983) / Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1983)
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	• Certified Public Accountant (CPA) • Certified ISO 31000 Risk Management
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	• SK Dewan Komisaris No. 23/SK/DK-PLN/2016 tanggal 23 September 2016 / Decree of the Board of Commissioners No. 23/SK/DK-PLN/2016 dated September 23, 2016 • Perpanjangan melalui SK Dewan Komisaris No. 15/SK/DK-PLN/2017 tanggal 20 September 2017 / Extended tenure by Decree of the Board of Commissioners No. 15/SK/DK-PLN/2017 dated September 20, 2017 • Perpanjangan melalui SK Dewan Komisaris No. 14/SK/DK-PLN/2019 tanggal 4 September 2019 / Extended tenure by Decree of the Board of Commissioners No. 14/SK/DK-PLN/2019 dated September 4, 2019
Pengalaman Kerja / Work Experience	• Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo (2012- 2014) / President Commissioner at PT Artha Daya Coalindo (2012-2014) • Komisaris PT Rekadaya Elektrika (2012-2014) / Commissioner of PT Rekadaya Elektrika (2012-2014) • Anggota Badan Pengawas Harian STT-PLN (2012-2014) / Member of STT-PLN Daily Supervisory Agency (2012-2014) • Anggota Badan Pengawas Harian Dana Pensiun PLN (2010-2013) / Member of PLN Pension Fund Daily Supervisory Agency (2010-2013) • Direktur SDM PT Indonesia Power (2009-2013) / HR Director at PT Indonesia Power (2009-2013)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees in SOEs.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for* Competence Improvement	• Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk manager (28-30 Januari 2021) / ISO 31000 Risk Management Training for Risk manager level (January 28-30, 2021) • Sertifikasi PECB Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk Manager (6 Februari 2021) / ISO 31000 Risk Management PECB Certification at Risk Manager level (February 6, 2021)

WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA

Anggota Komite Manajemen Risiko Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Risk Management Committee

Usia / *Age*	61 tahun / 61 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S3 Ekonomi, University of Hawaii / Doctoral Degree in Economics, University of Hawaii • S2 Ekonomi, University of Hawaii / Master's Degree in Economics, University of Hawaii • S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung / Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Institut Teknologi Bandung
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	Certified ISO 31000 Risk Management
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	SK Dewan Komisaris No. 19/SK/DK-PLN/2020 tanggal 20 Mei 2020 / Decree of the Board of Commissioners No. 19/SK/DK-PLN/2020 dated May 20, 2020
Pengalaman Kerja / Work Experience	• Gubernur Indonesia untuk OPEC/Organization of the Petroleum Exporting Countries (2015-2016) / Governor of Indonesia for OPEC/Organization of the Petroleum Exporting Countries (2015-2016) • Kepala Unit Pengendalian Kinerja (UPK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2016) / Head of Performance Control Unit (UPK) of Ministry of Energy and Mineral Resources (2014- 2016) • Komisaris PT Pertamina Persero (2015-2016) / Commissioner of PT Pertamina Persero (2015- 2016) • Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2016) / Special Staff of Minister of Energy and Mineral Resources (2014-2016) • Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas/Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2013-2014) / Deputy of Commercial Control at SKK Migas/Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (2013-2014) • Deputy Chairman for Commercial – SKK Migas (2013-2014)/ Deputy Chairman for Commercial at SKK Migas (2013-2014) • Indonesia Country Executive for GE Energy (2010-2011)/ Indonesia Country Executive for GE Energy (2010-2011) • Senior Vice President - Corporate Planning, Business Development & Transformation PT Pertamina Persero (2005-2009) / Senior Vice President - Corporate Planning, Business Development & Transformation at PT Pertamina Persero (2005-2009)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees in SOEs.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for* Competence Improvement	• Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk manager (28-30 Jan 2021) / ISO 31000 Risk Management Training for Risk manager level (January 28-30, 2021) • Sertifikasi PECB Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk Manager (6 Feb 2021) / ISO 31000 Risk Management PECB Certification at Risk Manager level (February 6, 2021)

I MADE RO SAKYA

Anggota Komite Manajemen Risiko Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Risk Management Committee

Usia / *Age*	62 tahun (per 31 Desember 2021) / 62 years old (as of December 31, 2021)
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S2 – Fac of Engineering Melbourne University / Master's Degree – Faculty of Engineering Melbourne University • S1 – Dep Elektroteknik ITB / Bachelor's Degree – Electrical Engineering Department at ITB
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	SK Dewan Komisaris No.21/SK/DK-PLN/2021 tanggal 15 September 2021 / Decree of the Board of Commissioners No.21/SK/DK-PLN/2021 dated September 15, 2021
Pengalaman Kerja / Work Experience	• Senior Technical Advisor di GIZ (2016 - 2022) / Senior Technical Advisor at GIZ (2016 - 2022) • Power System Techinal Advisor di ADB (2016 – 2021) / Power System Techinal Advisor at ADB (2016 – 2021) • Short Term Technical Consultant di IBRD – World Bank (2015 – 2020) / Short Term Technical Consultant at IBRD – World Bank (2015 – 2020) • Kepala Divisi Perencanaan Sistem – PT PLN Persero (2013 – 2015) / Head of System Planning Division – PT PLN Persero (2013 – 2015) • Kepala Divisi Perencanaan Korporat - PT PLN Persero (2011 – 2013) / Head of Corporate Planning Division - PT PLN Persero (2011 – 2013)

SAGUH PANGARIBOWO

Anggota Komite Manajemen Risiko Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Risk Management Committee

Usia / *Age*	53 tahun (per 31 Desember 2021) / 53 years old (as of December 31, 2021)
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S2 Master of Business Administration, Internatonal University of Japan • S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia / Bachelor's Degree in Economics, Universitas Indonesia
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	• Certified Risk Management Assurance (CRMA) • Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) • Certified Internal Auditor (CIA)
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	SK Dewan Komisaris No. 05/SK/DK-PLN/2020 tanggal 25 Februari 2021 / Decree of the Board of Commissioners No. 05/SK/DK-PLN/2020 dated February 25, 2021

Pengalaman Kerja / Work Experience	• Risk Management Technical Advisor PT Lippo Karawaci Tbk, 2021. / Risk Management Technical Advisor at PT Lippo Karawaci Tbk, 2021. • Konsultan Mandiri PT Pertamina (Persero), 2021. / Independent Consultant at PT Pertamina (Persero), 2021. • Associate Partner PT Ernst & Young Indonesia (2005-2020). / Associate Partner at PT Ernst & Young Indonesia (2005-2020). • Koordinator and Pengajar Bina Nusantara CIA Executive Program (2005-2012). / Coordinator and Lecturer at Bina Nusantara CIA Executive Program (2005-2012). • Dosen paruh waktu Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara (2002-2008). / Part-time lecturer at the Faculty of Economics, Universitas Bina Nusantara (2002-2008). • Quality Assurance Tim Corporate Governance BPKP (2001-2005). / Corporate Governance Quality Assurance Team at BPKP (2001-2005). • Narasumber Audit Kinerja BUMN-BUMN oleh Ditjen Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2002-2005). / Speaker for BUMN-BUMN Performance Audit by the Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance (2002-2005). • Tugas belajar ke Jepang dari Overseas Training Office Bappenas 1999-2001. / Assignment to study in Japan from the Overseas Training Office of Bappenas 1999-2001. • Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Perwakilan DKI Jakarta (1990-1999). / Auditor of the Financial and Development Supervisory
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees in SOEs.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for* Competence Improvement	• Germany's Coal Phase Out and Australia's Practical Implementation to Support Energy Transition in Indonesia, 26 Oktober 2021, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeil (GIZ) GmbH. / Germany's Coal Phase Out and Australia's Practical Implementation to Support Energy Transition in Indonesia, October 26, 2021, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeil (GIZ) GmbH. • Diseminasi RUPTL PLN 2021 s.d 2030 sesuai Kepmen ESDM No. 188/HK.02/MEM.L/2021, 5 Oktober 2021, Kementerian ESDM Ditjen Ketenagalistrikan. / Dissemination of PLN 2021 to 2030 RUPTL according to ESDM Ministerial Decree No. 188/HK.02/MEM.L/2021, October 5, 2021, Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Electricity. • Transisi Energi Net Zero Emission: Tantangan Ketahanan Energi dan Transformasi Sektor, 27 September 2021, Dewan Energi Nasional. / Net Zero Emission Energy Transition: Energy Security Challenges and Sector Transformation, September 27, 2021, National Energy Council.

Pernyataan Independensi Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Seluruh anggota Komite harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite MR telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

Statement of Independence of Risk Management Committee

Members of the Risk Management Committee of PT PLN (Persero) are independent and free from conflicts of interest so that they can be objective in providing opinions on the issues encountered. All members of the Committee shall act professionally in carrying out their duties and in providing opinions to the Board of Commissioners. All members of the Risk Management Committee have met the independence criteria as follows:

Kriteria Independensi / *Independence Criteria*	SM	RM	MI	AA	FD	WP	SP	MR
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN. / He/she does not have neither direct nor indirect business relationship related to PLN's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. / He/she does not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate of or serve as head/deputy head of local government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatan di PLN. / He/she does not have other positions that may cause a conflict of interest related to the position at PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite MR sebagaimana dijabarkan di dalam Piagam Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komite;
2. Melakukan penelaahan atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko perusahaan;
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam Perusahaan;
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di Perusahaan;
8. Mengevaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap Perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut;
9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional Perusahaan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten;
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
13. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan dan Tahunan Komite kepada Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

The duties and responsibilities of Risk Management Committee as described in Risk Management Committee Charter are as follows:

1. Prepare the Committee's annual work plan and budget;
2. Review the Company's risk management that includes various risks encountered by the Company, risk management strategies, systems, and policies, internal control, including policies, methodologies, and infrastructure;
3. Evaluate various risk measurement models utilized by the Company and provide recommendations for further improvements;
4. Monitor conformity of various potential risks encountered by the Company;
5. Evaluate the Company's risk management policies;
6. Coordinate the implementation and supervision of the existence and effectiveness level of each component of Enterprise Risk Management (ERM) within the Company;
7. Assess the effectiveness of each ERM component in the Company;
8. Review the risk assessment results and other documents submitted by the Board of Directors as complement to the proposed investment/funding/transaction plan and other operational activities that have significant impact on the Company, as well respond to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals;
9. Supervise and monitor that the risk mitigation on the Company's investment and operational activities which have significant impact has been done consistently;
10. Identify matters that require attention of the Board of Commissioners;
11. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations;
12. Coordinate with the Secretary of the Board of Commissioners for smooth implementation of the Committee's duties;
13. Submit the Committee's Quarterly Duty Implementation Report to the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko 2021

Komite Manajemen Risiko telah melakukan 21 kajian atas permintaan Direksi untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris, dan melakukan kajian atas kegiatan atau Tindakan Direksi yang perlu mendapatkan nasihat atau pun teguran Dewan Komisaris.

Implementation of Risk Management Committee's Duties in 2021

The Risk Management Committee has reviewed the 21 requests of the Board of Directors to obtain a recommendation or approval from the Board of Commissioners, and reviewed the activities or actions of the Board of Directors that require advice or a warning from the Board of Commissioners.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan 109 kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota Komite non-Komisaris, serta rapat dengan manajemen Perusahaan sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Meetings of Risk Management Committee

The Risk Management Committee held 109 meetings consisting of internal Committee meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, non-Commissioner Committee member meetings, and meetings with the Company's management as described in the following table:

No	Jenis Rapat Komite Risiko / *Type of Risk Management Committee's Meetings*	Jumlah / *Total*
1	Rapat dengan Dewan Komisaris / Meeting with the Board of Commissioners	21
2	Rapat internal dan dengan Komite lainnya / Internal meeting with other Committees	35
3	Rapat pembahasan dengan Direktorat terkait (membahas permasalahan di masing-masing Direktorat) / Meeting with the related Directorates (discussion on issues in each directorate)	30
4	Pembahasan dengan manajemen untuk menelaah permohonan persetujuan atau rekomendasi pendanaan / Discussions with management to review the requests for approval or recommendations of funding	23
	Jumlah Rapat / Total Meetings	**109**

***Key Performance Indicators* (KPI) Komite Manajemen Risiko**

Anggota Komite Manajemen Risiko melakukan *self-assessment* untuk penilaian kinerja. Hasil pencapaian KPI Komite Manajemen Risiko di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Key Performance Indicators (KPI) of Risk Management Committee

Members of the Risk Management Committee conduct self-assessment for performance appraisal. The results of the Risk Management Committee's KPI achievements in 2021 were as follows:

Realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) Komite Manajemen Risiko

Realisasi KPI Komite Manajemen Risiko Tahun 2021 sebagai berikut :

Realization of Key Performance Indicator (KPI) of Risk Management Committee

Realization of KPI of Risk Management Committee in 2021 is as follows:

No	Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	Kuantitas/ Tolok Ukur / *Quantity/Benchmark*		Nilai Perolehan / *Acquisition Value*	
			Setahun / *In a year*	Bobot / *Value*		
1	Rencana kerja tahunan / Annual work plan	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komite / Prepare the Committee's annual work plan and budget	1 kali setahun / Once a year	2	Ada / Realized • Rencana Kerja KMR tahun 2021 / 2021 KMR Work Plan	2
2	Evaluasi periodik atas risiko-risiko utama (*top risks*) Perusahaan. / Periodic evaluation of the Company's top risks.	Evaluasi, pembahasan kepada Pejabat Perseroan, dan pemberian saran atas *top risks* yang dilaporkan secara periodik dan sewaktu-waktu (*ad hoc*) pada *executive dashboard*. / Evaluation, discussion with Company Officers, and providing advice on top risks which are reported periodically and from time to time (ad hoc) on the	3 kali setahun / 3 times a year	12	3 kali / 3 times • Pembahasan terkait pasokan batubara. / Discussion related to coal supply. • Pembahasan periodik KMR dengan SEVP MR/DirKeu / Periodic discussion of KMR with SEVP MR/Director of Finance	12

No	Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	Kuantitas/ Tolok Ukur / *Quantity/Benchmark*		Nilai Perolehan / *Acquisition Value*	
			Setahun / *In a year*	Bobot / *Value*		
3	Evaluasi kebijakan, metodologi dan proses ERM. / Evaluation of ERM policies, methodologies, and processes.	Evaluasi kebijakan, metodologi dan proses ERM dalam menghasilkan risiko-risiko utama. / Evaluation of ERM policies, methodologies, and processes in generating key risks.	2 kali setahun / Twice a year	8	2 kali / Twice • Pembahasan terkait pasokan batubara. / Discussion related to coal supply. • Pembahasan periodik KMR dengan SEVP MR/DirKeu / Periodic discussion of KMR with SEVP MR/Director of Finance	8
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah dokumen diperoleh dari Direksi/ manajemen (dengan memenuhi syarat kelengkapan). / Timeliness of response after documents are obtained from the Board of Directors/management (full requirements).	14 hari kerja / 14 working days	4	7 s.d 14 hari kerja / 7 up to 14 working days	4
4	Evaluasi dan tanggapan terhadap kajian risiko dan dokumen pendukung lainnya atas usulan rencana investasi/ pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya. / Evaluation and response to risk review and other supporting documents on proposed investment/funding/ transaction plans and other operational activities.	Evaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/ pen-danaan/ transaksi dan kegiatan operasional lainnya serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut. / Evaluation of the results of the risk assessment and other documents submitted by the Board of Directors as a complement to the proposed investment/ funding/transaction plan and other operational activities as well as providing feedback to the Board of Commissioners on the proposal of the Board of Directors.	2 kali setahun / Twice a year	8	2 kali / Twice • Terdapat 21 rekomendasi tanggapan tertulis/persetujuan usulan rencana investasi/ pendanaan/ transaksi dan kegiatan operasional	8
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi (dengan memenuhi syarat kelengkapan dan legalitas dokumen, data yang akurat). / Timeliness of response after the draft is obtained from the Board of Directors (by fulfilling the requirements for completeness and legality of documents, accurate data).	14 hari kerja / 14 working days	4	7 s.d 14 hari kerja / 7 up to 14 working days	4
5	Pengawasan dan pemantauan mitigasi risiko investasi dan operasional yang signifikan. / Supervision and monitoring of significant investment and operational risk mitigation.	Mengawasi dan memantau mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional yang berdampak besar pada Perusahaan. / Supervise and monitor risk mitigation on investment and operational activities that have a major impact on the Company.	2 kali setahun / Twice a year	8	2 kali / Twice • Terdapat 21 rekomendasi/ persetujuan yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan operasional Perusahaan / There are 21 recommendations for written responses/approval of proposed investment/ funding/transaction plans and operational activities	8
6	*Review* dan tanggapan Rencana Perusahaan / Review and feedback on Company Plan	• Pembahasan, saran, dan/atau persetujuan atas pelaksanaan RKAP dan KPI tahun buku 2021. / Discussion, suggestions, and/or approval on the implementation of the RKAP and KPI for the 2021 fiscal year. • RJP/*Review* RJP. / RJP/RJP Review. • Revisi RKAP Tahun Buku 2021 (jika ada). / Revised RKAP for 2021 Fiscal Year (if any).	3 kali setahun / 3 times a year	12	3 kali / 3 times • Surat Tanggapan Usulan RKAP 2021. / Response Letter to Proposed 2021 RKAP.	12
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah dokumen diperoleh dari Direksi/ manajemen (dengan memenuhi syarat kelengkapan). / Timeliness of response after documents are obtained from the Board of Directors/management (full requirements).	14 hari kerja / 14 working days	4	7 s.d 14 hari kerja / 7 up to 14 working days	4

No	Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	Kuantitas/ Tolok Ukur / *Quantity/Benchmark*		Nilai Perolehan / *Acquisition Value*	
			Setahun / *In a year*	Bobot / *Value*		
7	*Review*, pembahasan, tanggapan, persetujuan kinerja Perusahaan / Review, discussion, feedback, approval of the Company's performance	• LM dan KPI PLN Triwulanan Tahun 2020; / 2020 Quarterly LM and KPIs of PLN; • KPI Direktorat Tahun 2020; / Directorate KPI for 2020; • LM dan KPI PLN Tahun 2021; / LM and KPI of PLN for 2021;	6 kali setahun / 6 times a year	12	76%-100% • Surat Tanggapan atas LM 2020, LM TW I,II,III 2021 / Response Letter on LM 2020, LM TW I, II, III 2021	12
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah *draft* diperoleh dari Direksi (dengan memenuhi syarat kelengkapan dan legalitas dokumen, data yang akurat). / Timeliness of response after the draft is obtained from the Board of Directors (by fulfilling the requirements for completeness and legality of documents, accurate data).	14 hari kerja / 14 working days	4	7 s.d 14 hari kerja / 7 up to 14 working days • Rata-rata waktu penyampaian tanggapan adalah 10 hari kerja / Average response time is 10 working days	4
8	Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dekom. / Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners.	Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai permintaan dan arahan Dewan Komisaris. / Carry out other duties as requested and directed by the Board of Commissioners.	2 kali setahun / Twice a year	10	Lebih dari 2 kali / More than 2 times • *Update* dan rencana aksi proyek terkendala / Updates and project action plans are constrained • Pemanfaatan FABA / Utilization of FABA • Pemenuhan kebutuhan batubara / Fulfillment of coal needs • *Co-firing* sampah (SRF) / Garbage co-firing (SRF) • *Review digital procurement*	10
9	Pengenalan/ induksi/ peningkatan kompetensi. / Introduction/ induction/competency improvement.	Mengikuti seminar/workshop di luar negeri maupun dalam negeri. / Participate in seminars/workshops abroad and domestically.	2 kali setahun / Twice a year	4	2 kali • Pengenalan/ Induksi Komisaris Bapak Ardan Adiperdana / Introduction/Induction of Commissioner Mr. Ardan Adiperdana • Pengenalan/ Induksi Komisaris Bapak Susiwijono Moegiarso / Introduction/Induction of the Commissioner Mr. Susiwijono Moegiarso • Seminar/*workshop* yang diikuti oleh AKNK / Seminar/workshop attended by AKNK	4
10	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan Komite kepada Dewan Komisaris / Submitting the Committee's quarterly Task Implementation Report to the Board of Commissioners	Laporan terdiri atas: / The report consists of: • Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW IV Tahun 2020. / Report on Activity and Realization of KPI TW IV in 2020. • Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW I Tahun 2021. / Report on Activities and Realization of KPI TW I 2021. • Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW II Tahun 2021. / Report on Activities and Realization of KPI TW II in 2021. • Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW III Tahun 2021. / Report on Activities and Realization	4 laporan / 4 reports	8	4 laporan / 4 reports • Laporan Kegiatan KMR TW IV 2020 / TW IV 2020 KMR Activity Report • Laporan Kegiatan KMR TW I 2021 / TW I 2021 KMR Activity Report • Laporan Kegiatan KMR TW II 2021 / TW II 2021 KMR Activity Report • Laporan Kegiatan KMR TW III 2021 / TW III 2021 KMR Activity Report	8
Total				**100**		**100**

Remunerasi Komite Manajemen Risiko

Remunerasi Komite Manajemen Risiko mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan anggota Komite Manajemen Risiko berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Remuneration of Risk Management Committee

The remuneration of Risk Management Committee refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board in State-Owned Enterprises. The income of members of the Risk Management Committee is in the form of a maximum honorarium of 20% of the salary of the Company's President Director, provided that the tax is borne by the Company and they are not allowed to receive any other income other than the honorarium.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Landasan hukum pembentukan Komite NR adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN dan SK Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Nomor 24/SK/DK-PLN/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 28 Juli 2015 beserta perubahannya.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang efektif terkait pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Nominasi) dan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris mengesahkan Piagam Komite Nominasi Tahun 2021 yang merupakan revisi atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2016. Piagam tersebut menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite NR.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sebagai ketua, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 2 (dua) anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee to assist the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners. The legal bases for the establishment of the Nomination and Remuneration Committee are SOE Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOE's and Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 24/SK/DK-PLN/2015 on Nomination and Remuneration Committee dated July 28, 2015 and its amendments.

Based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, the main duty of the Nomination and Remuneration Committee is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and providing effective advice regarding the proposal of a person to be placed in a position as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners (Nomination) and the remuneration to be determined and given to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners due to the position and role assigned in accordance with their duties, authorities, and responsibilities.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Board of Commissioners validated the 2021 Nomination Committee Charter which is a revision of the 2016 Nomination Committee Charter. The charter outlines the duties, responsibilities, and obligations of the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Committee Composition

The Board of Commissioners appoints and dismisses members of the Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee consists of President Commissioner also concurrently as independent Commissioner Commissioner as the head, 3 (three) Commissioners as members, and 2 (two) members from independent external parties with expertise and experience in accordance with the required qualifications.

No	Anggota / *Member*	Inisial / *Initial*	Posisi di Komite / *Position in Committee*	Jabatan di PLN / *Position in PLN*	Periode / *Period*
1	Amien Sunaryadi	AS	Ketua merangkap Anggota / Head cum Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner cum Independent Commissioner	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris / The same as their tenure as Commissioners
2	Suahasil Nazara	SN	Anggota / Member	Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner	
3	Dudy Purwagandhi	DP	Sekretaris merangkap Anggota / Secretary cum Member	Anggota Komisaris / Member of Commissioner	
4	Eko Sulistyo	ES	Anggota / Member	Anggota Komisaris / Member of Commissioner	
5	Roikhan	R	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Anggota Komite Non Komisaris	• 24 September 2018-23 September 2019 / September 24, 2018 - September 23, 2019 • 24 September 2019-23 September 2021 / September 24, 2019 - September 23, 2021 • 24 September 2021-23 September 2023 / September 24, 2021 - September 23, 2021
6	Andi Hanif Mursid	AHM	Anggota / Member	Anggota Komite Non Komisaris / Anggota Komite Non Komisaris	1 Desember 2021-30 November 2024 / December 1, 2021 - December 30, 2024

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Non Komisaris

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjadi anggota Dewan Komisaris PLN dapat dilihat di bab profil perusahaan sub bab Dewan Komisaris. Sedangkan profil anggota komite audit non anggota dewan komisaris sebagai berikut:

Profile of Nomination and Remuneration Committee's Non-Commissioner Members

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjadi anggota Dewan Komisaris PLN dapat dilihat di bab profil perusahaan sub bab Dewan Komisaris. Sedangkan profil anggota komite audit non anggota dewan komisaris sebagai berikut:

ROIKHAN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Non Komisaris
Member of Non-Commissioner Nomination and Remuneration Committee

Usia / *Age*	61 tahun / 61 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S2 Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung (1998) / Master's Degree in Industrial Management, Institut Teknologi Bandung (1998) • S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1986) / Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1986)
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	*Certified ISO 31000 Risk Management*
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	SK Dewan Komisaris No. 18/SK/DK-PLN/2018 tanggal 21 September 2018 dan perpanjangannya No. 13/SK/DK-PLN/2019 tanggal 4 September 2019 dan No. 18/SK/DK-PLN/2021 tanggal 15 September 2021 / Decree of the Board of Commissioners No. 18/SK/DK-PLN/2018 dated September 21, 2018 and the extension No. 13/SK/DK-PLN/2019 dated September 4, 2019 and No. 18/SK/DK-PLN/2021 dated September 15, 2021

Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• Direktur SDM PT Indonesia Power (2013-2018) / Director of Human Resources at PT Indonesia Power (2013-2018) • Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum PLN Kantor Pusat (2013) / HR Management Expert at Directorate of HR and General Affairs at PLN Head Office (2013) • Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta PLN Kantor Pusat (2010-2013) / Head of HR and Talent Development Division at PLN Head Office (2010-2013)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions in accordance with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustee in SOEs.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for Competence Improvement*	• Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk manager (28-30 Jan 2021) / ISO 31000 Risk Management Training for Risk manager level (January 28-30, 2021) • Sertifikasi PECB Manajemen Risiko ISO 31000 level Risk Manager (6 Feb 2021) / ISO 31000 Risk Management PECB Certification at Risk Manager level (February 6, 2021) • *Knowledge Sharing* Keuangan Korporat (Finance Talk Series 2021) dengan topik "Pengalihan Aset Pembangkitan AMC PT PLN ke PT PJB" Direktorat Keuangan PT PLN (Persero), tanggal 26 Maret 2021 / Corporate Finance Knowledge Sharing (Finance Talk Series 2021) with the topic "Transferring PT PLN AMC Generation Assets to PT PJB" Directorate of Finance PT PLN (Persero), March 26, 2021 • PLN Power System Sharing Series 2021, 08 April 2021, oleh Expert Team dari G-PST / PLN Power System Sharing Series 2021, 08 April 2021, by the Expert Team from G-PST • PLN Finance Talk Series 2021 Edisi Spesial dengan topik "Potensi Sumberdana dari Capital Market & Obligasi untuk Pembiayaan Investasi PLN Group, nara sumber dari OJK" Direktorat Keuangan PT PLN (Persero), tanggal 27 April 2021 / PLN Finance Talk Series 2021 Special Edition with the topic "Potential Sources of Funds from the Capital Market & Bonds for Financing PLN Group Investments, resource persons from OJK" Directorate of Finance PT PLN (Persero), April 27, 2021 • PLN HSSE Talk #6 2021, 07 Juli 2021, dengan tema Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas yang kuat mendukung transformasi PLN yang hebat, oleh Tim HSSE PLN / PLN HSSE Talk #6 2021, 07 July 2021, with the theme of a strong Obvitnas Security Management System supporting a great PLN transformation, by the PLN HSSE Team • PLN Risk Talk Season 2 Episoda 2, 2021 tema: "Mitigasi Blackout Sistem Ketenagalistrikan" Tim PT PLN (Persero), tanggal 3 September 2021 / PLN Risk Talk Season 2 Episode 2, 2021 theme: "Mitigation of Electricity System Blackout" PT PLN (Persero) Team, September 3, 2021 • PLN Risk Talk Season 2 Episoda 3, 2021 tema: "Mitigasi Risiko Growth dan Oversupply" Tim PT PLN (Persero), tanggal 17 September 2021 / PLN Risk Talk Season 2 Episode 3, 2021 theme: "Growth and Oversupply Risk Mitigation" PT PLN (Persero) Team, September 17, 2021 • Kagatrik UI, Webinar Series S5E5: Sistem Interkoneksi Sumatera, Pembicara GM UIP3B Sumatera PT PLN (Persero) tanggal 17 September 2021 / Kagatrik UI, Webinar Series S5E5: Sumatra Interconnection System, Speaker for GM UIP3B Sumatra PT PLN (Persero) on September 17, 2021 • Indonesian Audit Committee Association, Audit Committee Responsibilities Webinar when the Company is Involved in Legal Issues related to Financial Statements, Thursday September 23, 2021 • Kementerian ESDM, Webinar Nasional: Transisi Energi Net Zero Emission Tantangan Ketahanan Energi dan Transformasi Sektor, tanggal 27 September 2021 / Ministry of Energy and Mineral Resources, National Webinar: Energy Transition Net Zero Emission Challenges of Energy Security and Sector Transformation, September 27, 2021

ANDI HANIF MURSID

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Non Komisaris

Member of Non-Commissioner Nomination and Remuneration Committee

Usia / *Age*	49 tahun / 49 years old
Kewarganegaraan / *Nationality*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• Management Development Program (MDP), Asian Institute of Management (2005) • S2 Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2003) • S1 Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1995) / Bachelor of Agribusiness Management, Institut Pertanian Bogor (1995)
Sertifikasi Profesi / *Profession Certificate*	-
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	SK Dewan Komisaris No. 26/SK/DK-PLN/2021 tanggal 25 November 2021 / Decree of the Board of Commissioners No.26/SK/DK-PLN/2021 dated November 25, 2021

Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• Chief Executive Officer The Next Normal (2020-2021) • Chief Executive Officer The Strengths Zone (2018-2021) • Keynote Speaker, Advisor, Trainer, Coach and Facilitator for Business & Leadership Inspiration Entrepreneurship Zone (1998-2020) • General Manager – Learning and Development PT Intraco Penta, Tbk (2011-2018) • Director – Pramana Agri Resources PT Intraco Penta, Tbk (2011-2018) • Chairman Of The Executive Board – Intraco Penta Foundation PT Intraco Penta (2014-2018) • Head of Learning & Development Division DSU Group (2008-2011) • Head of Training & People Development Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2006-2008) • Head of Training Program Development Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2000-2006) • Chairman Of The Executive Board – Quality & Safety Improvement Team – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2003-2006) • Deputy Head of Human Resources Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1998-2000) • Head of Human Resources Information System Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1997-1998) • Management Trainee (MT) PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1996-1997)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN / He does not have concurrent positions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/ MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees in SOEs.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training for Competence Improvement*	• Coaching Culture Planning & Implementation • Design Thinking • Executive Development Program • Good Corporate Government • Governance, Risk & Compliance Management System • Learning, Development & Transformation Planning & Implementation • Quality & Safety Management System • Strategic Management • Strategic Planning & Implementation • Talent Management Strategy • Transforming Into An Adaptable Organization • Generate Machine Learning Toward Your Profitable Business • Performance Management in The Future of Work • Vision, Strategy and Managing the Organization to Drive Result • Leading in the Digital World: How to Foster Creativity and Collaboration • Digital Talent Management: Strategy to Develop Digital Talent

Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Seluruh anggota Komite harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

Statement of Independence of Nomination and Remuneration Committee

Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) are independent and free from conflicts of interest so that they can be objective in providing opinions on the issues encountered. All members of the Committee shall act professionally in carrying out their duties and in providing opinions to the Board of Commissioners. All members of the Nomination and Remuneration Committee have met the following independence criteria:

Kriteria Independensi / *Independency Criteria*	AS	DP	ES	SN	AHM	R
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN. / He/she does not have any affiliations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholder of PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. / He/she does not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate of or serve as head/deputy head of local government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi / *Independency Criteria*	AS	DP	ES	SN	AHM	R
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait jabatan di PLN. / He/she does not have other positions that may cause a conflict of interest related to the position at PLN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dijabarkan di dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite;
2. Menelaah dan memantau untuk memastikan Direksi telah menetapkan sistem Nominasi dan Remunerasi secara benar;
3. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karir, nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang telah ditetapkan;
4. Merumuskan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
7. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
8. Menyusun laporan sesuai bidangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2021. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menelaah usulan penunjukkan pejabat *Chief Audit Executive* Satuan Pengawas Intern (SPI).
2. Menelaah usulan penunjukkan pejabat Direksi dan Dekom Anak-Anak Perusahaan.
3. Menyiapkan *Fit and Proper* beserta tindak lanjut balasan surat usulan Direksi.
4. Memproses pengusulan *Top Talent* BUMN pegawai PT PLN (Persero).

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

Duties and responsibilities of Nomination and Remuneration Committee as stated in Nomination and Remuneration Committee Charter are as follows:

1. Prepare Committee's Annual Work Plan and Budget;
2. Review and monitor to ensure that the Board of Directors has correctly established the Nomination and Remuneration system;
3. Review and monitor to ensure that the Board of Directors properly performs recruitment process, career development, nomination, and remuneration in accordance with the predetermined system;
4. Formulate remuneration policy in terms of fixed salary and honorarium, allowances and facilities, as well as variable incentives and tantiem for the Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Identify matters that require attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;
6. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners;
7. Coordinate with Secretary of the Board of Commissioners for smooth implementation of the Committee's duties;
8. Prepare reports based on the respective fields in accordance with the prevailing regulations.

Implementation of Nomination and Remuneration Committee's Duties in 2021

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the Nomination and Remuneration Committee's Work Program throughout 2021. The realization of the Nomination and Remuneration Committee's duties is as follows:

1. Reviewing the proposed appointment of the Chief Audit Executive of the Internal Supervisory Unit (SPI).
2. Reviewing the proposed appointment of officers for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiaries.
3. Preparing Fit and Proper along with the follow-up to the letter of recommendation from the Board of Directors.
4. Processing the proposal for Top Talent of BUMN employees of PT PLN (Persero).

5. Menelaah penunjukkan pejabat di Anak Perusahaan dan memberi masukan agar Direksi segera melaksanakan seleksi pejabat definitif dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
6. Berkontribusi dalam tanggapan tentang Pembentukan SPV PLTS Cirata.

5. Reviewing the appointment of officers in the Subsidiaries and providing input so that the Board of Directors immediately conducts a definitive selection of officers and reports the results to the Board of Commissioners.
6. Contributing in response to the establishment of SPV PLTS Cirata.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 182 kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota non-Komisaris, serta rapat dengan para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.

Meetings of Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee held 182 meetings consisting of internal Committee meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, non-Commissioner member meetings, and meetings with relevant parties in accordance with the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee.

No	Jenis Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi / *Type of Nomination and Remuneration Committee's Meetings*	Jumlah / *Total*
1	Rapat dengan Dewan Komisaris / Meeting with the Board of Commissioners	21
2	Rapat internal / Internal meeting	33
3	Rapat dengan Komite lain / Meeting with other Commintee	31
4	Rapat dengan Direktur, SEVP, EVP Terkait / Meeting with the related Directors, SEVP's, EVP's	97
	Jumlah Rapat / Total Meetings	**182**

***Key Performance Indicators* (KPI) Komite Nominasi dan Remunerasi**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan *self-assessment* untuk penilaian kinerja. Hasil pencapaian KPI Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) Komite Nominasi dan Remunerasi

Realisasi KPI Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021 sebagai berikut :

Key Performance Indicator (KPI) of Nomination and Remuneration Committee

Members of the Nomination and Remuneration Committee conduct self-assessment for performance appraisal. The results of the Nomination and Remuneration Committee's KPI achievements in 2021 are as follows:

Realization of Key Performance Indicator (KPI) of Nomination and Remuneration Committee

Realization of KPI of Nomination and Remuneration Committee in 2021 is as follows:

Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	Kuantitas/ Tolok Ukur / *Quantity/Benchmark*		Nilai Perolehan / *Acquisition Value*	
		Setahun / *In a year*	Bobot / *Value*		
1. Menyampaikan Rencana Kerja dan KPI Komite / Submitting the Committee's Work Plan and KPIs	Rencana Kerja dan KPI Komite Tahunan 2021 / 2021 Annual Committee Work Plan and KPI	1 paper	5	1 Paper	5
	Ketepatan waktu penyampaian / Delivery time	Desember 2020 / December 2020	4	Desember 2020 / December 2020	4
2. Menelaah usulan Direksi tentang Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan / Reviewing the recommendations of the Board of Directors regarding the Directors and Commissioners of Subsidiaries	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah atas usulan Direksi setelah data lengkap termasuk jika tidak ada usulan / Reviewing and submitting the results of the review on the proposal of the Board of Directors after the data is complete, including if there is no proposal	Menanggapi usulan Direksi termasuk jika tidak ada usulan / Responding to the Board of Directors' proposals, including if there are no proposals	8	100 % usulan / 100% proposal	8
	Ketepatan waktu pemberian telaah / Timeliness of review	14 hari kerja / 14 working days	4	Rata-rata 9 hari kerja / Average 9 working days	4

Program Kerja / *Work Program*	Uraian / *Description*	Kuantitas/ Tolok Ukur / *Quantity/Benchmark*		Nilai Perolehan / *Acquisition Value*	
		Setahun / *In a year*	Bobot / *Value*		
3. Menelaah penugasan Dewan Komisaris selain tentang Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan / Reviewing the assignments of the Board of Commissioners other than the Directors and Commissioners of Subsidiaries	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah kepada Dewan Komisaris / Reviewing and submitting the results of the review to the Board of Commissioners	Menanggapi penugasan Dewan Komisaris / Responding to the assignment of the Board of Commissioners	8	100% usulan / 100% proposal	8
	Ketepatan waktu pemberian telaahan / Timeliness of review	14 hari kerja / 14 working days	4	Rata-rata 8 hari kerja / Average 8 working days	4
4. Menyampaikan usulan SK terkait internal Dewan Komisaris (SK Komite, IKS, THR dll) / Submitting Decree proposals related to internal Board of Commissioners (Decree of Committee, IKS, THR, etc.)	Menelaah dan menyampaikan SK internal Dekom / Reviewing and submitting Board of Commissioners internal decree	SK internal Dekom terpenuhi / Board of Commissioners internal decree fulfilled	7	Semua SK internal tersedia / All internal decrees are available	7
	Ketepatan waktu penyampaian / Delivery time	Tanggal jatuh tempo SK / due date of decree	4	Sampai dengan tanggal jatuh tempo / Until the due date	4
5. Menyampaikan Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI Komite Triwulanan dan Tahunan / Submitting Quarterly and Annual Committee Activity and KPI Realization	Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI Komite Triwulanan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2021 / Report on Quarterly and Annual Committee KPIs for 2021 and 2021	4 kali setahun / 4 times a year	8	4 kali / 4 times	8
	Ketepatan waktu penyampaian / Delivery time	30 hari sejak berakhirnya periode / 30 days from the end of the period	4	Rata-rata 14 hari sejak berakhirnya periode / Average 14 days from the end of the period	4
6. Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting	Menghadiri Rapat Dewan komisaris / Attending Board of Commissioners Meeting	24 kali setahun / 24 times a year	15	66 kali / 66 times	15
7. Rapat Internal Komite / Committee Internal Meeting	Mengadakan rapat internal Komite / Holding Committee internal meeting	12 kali setahun / 12 times a year	15	33 kali / 33 times	15
8. Kunjungan Kerja ke Unit bila memungkinkan atau via Zoom / Working Visit to Unit if possible or via Zoom	Melakukan kunjungan kerja ke Unit/ AP / Conduct working visits to Unit/ Subsidiary	2 kali orang Setahun / Twice per person in a year	5	0, Kondisi Covid-19 / 0 due to Covid-19	5
9. Pengenalan/ Induksi / peningkatan kompetensi / Introduction/Induction/ competency	Mengikuti seminar/workshop / Attending seminars/workshops	2 kali setahun setahun / twice a year	5	14 kali / 14 times	5
10. *Self Assesment* GCG Komite / Committee GCG Self-Assessment	Pemenuhan kriteria GCG untuk Komite / Fulfillment of GCG criteria for the Committee	*Charter* Komite	4	1 Paper	4
Total			**100**		**100**

Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara mengatur remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Remuneration for Nomination and Remuneration Committee

Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board in State-Owned Enterprises regulates the remuneration of the Nomination and Remuneration Committee. The income of members of the Nomination and Remuneration Committee is in the form of a maximum honorarium of 20% of the salary of the Company's President Director, provided that the tax is borne by the Company and they are not allowed to receive any other income other than the honorarium.

Kebijakan Suksesi Direksi

PLN menyelenggarakan program *Talent Management* untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan masa depan. Serangkaian program pelatihan dengan muatan utama peningkatan kapabilitas di bidang manajemen, strategi pengembangan usaha, evaluasi rencana strategis dan sejenisnya akan diikuti oleh kader-kader yang masuk dalam *talent pool*. Dengan demikian, PLN akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh panitia *ad hoc* dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi jika dibutuhkan saat pergantian kepemimpinan. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Adapun ketentuan suksesi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Calon Direktur yang diangkat oleh RUPS berasal dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan dari internal Perusahaan;
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Direktur oleh Kementerian BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN;
3. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat;
4. Calon Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/ Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik swasta maupun milik negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Succession Policy of the Board of Directors

PLN organizes a Talent Management program to prepare future leadership cadres. A series of training programs with the main content of improving capabilities in the field of management, business development strategies, evaluation of strategic plans and the likes will be attended by cadres who are included in the talent pool. Therefore, PLN will propose internal candidates through elections conducted by an ad hoc committee and facilitated by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee if needed during a change of leadership. The results of the internal candidate selection are then submitted to the Ministry of SOEs to undergo a fit and proper test. The provisions for the succession of the Board of Directors are as follows:

1. Prospective Directors appointed by GMS shall be candidates proposed by the Shareholder and come from the Company's internal;
2. Appointment of Directors is conducted through a fit and proper test on prospective Directors by the Ministry of SOEs or a third party assigned by the Ministry of SOEs;
3. Composition of the Board of Directors shall always be adjusted to the Company's needs and development, thus enabling effective, proper, and prompt decision making;
4. Prospective Directors are prohibited to hold concurrent position as Directors or Commissioners in other SOEs/Regional-Owned Enterprises/Private-Owned Enterprises/other private companies or other positions in other companies, either private or state-owned, which may result in a conflict of interest, unless approved by the GMS.

Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Berdasarkan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PLN, Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini dimaksudkan untuk menjelaskan

Work Procedures for Board of Directors and Board of Commissioners

The Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners is a guideline for the Board of Directors and the Board of Commissioners that explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand, and consistent manner, so that it can be a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission.

Based on PLN's Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners, this work procedure of the Board of Directors and the Board of Commissioners is

hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Hubungan Kerja Informal tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.
5. Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.

intended to explain the working relationship of the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their duties in order to create a professional, transparent, and efficient management of the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners apply the following working relationship principles:

1. The Board of Commissioners respects the duties and authorities of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
2. The Board of Directors respects the duties and authorities of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the Company's management policies in accordance with the Articles of Association.
3. Every working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a standard mechanism or accountable correspondence.
4. Informal Employment Relations cannot be used as a basis for decision making. The Board of Commissioners has the right to obtain the Company's information in a timely, complete, measurable, and accurate manner.
5. The Board of Directors is responsible for the delivery of the Company's information to the Board of Commissioners in a timely, complete, measurable, and accurate manner.

DIREKSI

Menurut Pedoman Tata Kelola PLN, Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Di sisi lain, berdasarkan tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris PLN, Direksi senantiasa mengambil keputusan secara kolegial melalui Rapat Direksi. Terhadap akuntabilitas pengambilan keputusan dan pendelegasian kewenangan, Direksi memiliki kewenangan untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada Direktur, Pejabat Perseroan maupun pihak lain.

Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi

Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman kepada Pedoman GCG Perseroan dan Tata Laksana Kerja (*Board Manual*). PLN memiliki *Board Manual*

BOARD OF DIRECTORS

Based on PLN's Code of Governance, the Board of Directors is the Company's organ that is responsible for managing the Company for the benefit of the Company, in line with the purposes and objectives of the Company, and representing the Company, both inside and outside the court, in accordance with the Articles of Association.

On the other hand, based on the Board Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PLN, the Board of Directors shall always make collective decisions through the Board of Directors' Meetings. In terms of accountability for decision-making and delegation of authority, the Board of Directors is authorized to delegate a part of their decision-making authority to Directors, the Company's Officials, and other parties.

Board Charter of the Board of Directors

The Board of Directors in carrying out their duties and authorities refers to the Company's GCG Guidelines and the Board Charter. PLN has a Board Charter of the Board of

Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir ditandatangani oleh semua jajaran Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 10 Oktober 2016.

Hal-hal yang dibahas dalam *Board Manual* tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan
- Tata Laksana Kerja Terkait Batas Kewenangan
- Tata Laksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan
- Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi mengacu pada UUPT, Anggaran Dasar dan *Board Manual*, antara lain adalah:

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan
5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

Directors and the Board of Commissioners with the latest version signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners on October 10, 2016.

The matters covered in the Board Charter are as follows:

- Introduction
- Board Charter related to Position
- Board Charter related to Limits of Authority
- Board Charter related to Implementation and Supervision of the Company's Operations
- Workflow on the authority of the Board of Directors that requires approval from the Board of Commissioners and the authority of the Board of Directors that requires approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners

Duties, Responsibilities, and Authority of Board of Directors

Duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors refer to the Limited Liability Company Law, Articles of Association, and Board Manual, which include:

1. Establishing policies in leading and managing the Company;
2. Arranging provisions on employment, including the determination of salaries, retirement and old-age benefits, and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and GMS resolutions;
3. Appointing and dismissing the Company's employees based on the Company's employment regulations and the prevailing laws and regulations;
4. Arranging the delegation of authority of the Board of Directors to represent the Company in and out of court to a member or several members of the Board of Directors specifically appointed for the purpose, or to one or more employees of the Company, either individually or collectively, or to other persons or institutions; and
5. Carrying out other actions both related to management and ownership in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and resolutions of the GMS pursuant to the prevailing laws and regulations.

In performing their main duties, the Board of Directors is obligated to:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya dibahas di dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; 5
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada RUPS;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham;
7. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Strive and ensure the implementation of business and activities of the Company in accordance with its purpose and objectives and business activities;
2. Prepare for timely corporate development plans, work plans, and annual budgets, including other plans related to the implementation of the Company's business and activities, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders to be approved at the GMS;
3. Organize and maintain the Company's books and administration in accordance with the prevailing rules for a company;
4. Develop an accounting system in accordance with the financial accounting standards and the principles of internal control, especially the functions of administration, recording, storage, and supervision;
5. Provide accountability and any information regarding the circumstances and the Company's business in the form of annual reports, including annual calculations, to the GMS;
6. Provide periodic reports based on the procedures and time set out in the applicable provisions and other reports each time requested by the Shareholder;
7. Prepare the Company's organizational structure in detail with job descriptions;
8. Prepare balance sheets and income statement that have been validated by the GMS for the Minister of Law and Human Rights of Indonesia based on the laws and regulations; and
9. Perform other obligations based on the provisions stated in the Articles of Association and validated in the GMS based on the laws and regulations.

Pemilihan dan Pengangkatan Direktur

1. Direktur diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
3. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat.
4. Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik

Selection and Appointment of Directors

1. Directors are appointed by the GMS from the candidates proposed by the Shareholder and the nominations are binding for the GMS.
2. The appointment of Directors is carried out through a fit and proper test mechanism.
3. The composition of the Board of Directors shall be adjusted to the needs and developments of the Company to enable effective, precise, and fast decision making.
4. Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors or Commissioners in other SOEs/ Regional-Owned Enterprises/Private companies, or

swasta maupun milik negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

other positions in other companies, either private or state-owned, which may result in a conflict of interest, unless approved by the GMS.

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Direksi Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Apabila dalam menjalankan tugasnya Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, maka proses tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan akan didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Policies Related to the Resignation of Members of the Board of Directors Due to Involvement in Financial Crime

In performing their duties, in the event that a Director is engaged in a financial crime, then the Company shall follow up the case based on the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Program Pengenalan Bagi Direktur Baru

Program Pengenalan ditujukan bagi Direktur yang baru pertama kali diangkat di Perseroan agar Direktur tersebut segera mengenal proses bisnis Perseroan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Program Pengenalan yang diberikan kepada Direktur antara lain:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi komposisi, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. Audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit.
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang dianggap sesuai dengan Perseroan.

Pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) anggota Direksi yang baru pertama kali diangkat dan telah mengikuti program pengenalan perusahaan untuk Direktur baru. Keempat anggota Direksi baru tersebut diangkat berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel terkait komposisi anggota Direksi.

Induction Program for New Directors

The Induction Program is intended for newly appointed Directors to quickly learn the Company's business processes, including all previous, current, and potential problems, in order to work optimally for the interest of the Company. The responsibility for conducting the induction program rests with the Corporate Secretary or whoever performs the function as the Corporate Secretary. The induction program for Directors covers:

a. Implementation of Good Corporate Governance principles by the Company.
b. Description of the Company in relation to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term plans, composition, risks, and other strategic issues.
c. Information related to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, and the Audit Committee.
d. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the Supporting Organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as prohibited matters.

The induction program can be carried out in the form deemed appropriate to the Company.

In 2021, there were 4 (four) Directors who were appointed for the first time, all of whom have participated in the induction program. The four Directors were appointed based on Decree of the Minister of SOEs as the GMS, which was stipulated in 2021 as explained in the table related to the composition of members of the Board of Directors.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi Tahun 2021

Terdapat perubahan komposisi Direksi PLN di sepanjang tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero). Perubahan tersebut telah dijelaskan di bagian RUPS khususnya terkait pelaksanaan dan keputusan RUPSLB Tahun 2021 yang menjelaskan kronologis perubahan komposisi Direksi sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN yang dimaksud. Adapun komposisi Direksi PLN per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Structure, Number, Composition, and Basis for the Appointment of Members of the Board of Directors in 2021

There were changes to the composition of PLN's Board of Directors in 2021, which was determined by the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT PLN (Persero). Such changes have been explained in the GMS section, particularly on the implementation and resolutions of the 2021 EGMS describing the chronology of changes in the composition of the Board of Directors in accordance with the relevant Decree of the Minister of SOEs. The composition of the Board of Directors of PLN as of December 31, 2021 is as follows:

No	Nama / *Name*	Inisial / *Initial*	Jabatan / *Position*	Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*	Akhir Masa Jabatan / *End of Tenure*
1	Darmawan Prasodjo	DP	Direktur Utama / President Director	• Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021 • Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK- 325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK- 325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 / December 23, 2024
2	Sinthya Roesly	SR	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 / December 23, 2024
3	Yusuf Didi Setiarto	YDS	Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	7 Desember 2026 / December 7, 2026
4	Evy Haryadi	EH	Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-200/MBU/6/2021 tanggal 16 Juni 2021 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-200/MBU/6/2021 dated June 16, 2021	16 Juni 2026 / June 16, 2026
5	Bob Sahril	BS	Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management	Kepmen BUMN selaku RUPS No.SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Decree of Minister of SOEs as GMS No.SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	14 Mei 2025 / May 14, 2025
6	Rudy Hendra Prastowo	RHP	Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy	Kepmen BUMN selaku RUPS No.SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Decree of Minister of SOEs as GMS No.SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	14 Mei 2025 / May 14, 2025
7	Wiluyo Kusdwiharto	WK	Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Director of Mega Project and New and Renewable Energy	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/2017 tanggal 24 Juli 2017 jo Kepmen BUMN selaku RUPS No.SK-147/ MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-138/MBU/2017 dated July 24, 2017 jo Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020	24 Juli 2022 / July 24, 2022
8	Adi Lumakso	AL	Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	7 Desember 2026 / December 7, 2026
9	Adi Priyanto	AP	Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021	7 Desember 2026 / December 7, 2026

No	Nama / *Name*	Inisial / *Initial*	Jabatan / *Position*	Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*	Akhir Masa Jabatan / *End of Tenure*
10	Haryanto W.S	HWS	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali	Kepmen BUMN selaku RUPS No. S-211/MBU/10/2015 tanggal 8 September 2015 jo Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-357/MBU/11/2020 tanggal 4 November 2020 / Decree of Minister of SOEs as GMS No. S-211/MBU/10/2015 dated September 8, 2015 jo Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-357/MBU/11/2020 dated November 4, 2020	4 November 2025 / November 4, 2025

Masa Jabatan Dewan Direksi

Ketentuan terkait masa jabatan anggota Direksi mengacu pada Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Term of Office of the Board of Directors

Provision on the term of office of members of the Board of Directors refers to Article 28 Paragraph 3 of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, which is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office, without prejudice to the right of the GMS to make replacements at any time before their term of office ends.

Pembagian Tugas Direksi

Direksi mengatur pembagian tugas masing- masing anggota Direksi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berjalan optimal. Aturan pembagian tugas Direksi sebagai berikut:

1. Pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
2. Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) yang mengatur mengenai kewenangan setiap anggota Direksi.

Division of Duties of the Board of Directors

The Board of Directors regulates the division of duties of each member of the Board of Directors to ensure that the implementation of their duties and responsibilities runs optimally. Rules for division of duties of the Board of Directors are as follows:

1. The division of duties to the member of the Board of Directors is determined by GMS Resolutions. If the GMS does not do so, the division of duties is determined based on a meeting of the Board of Directors.
2. The description of duties, authorities, and responsibilities of members of the Board of Directors is further specified in Regulation of the Board of Directors on Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero) stipulating the authority of each member of the Board of Directors.

Pembagian tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi PLN berdasarkan struktur organisasi sesuai Perdir Nomor 0162 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan atas PERDIR Nomor: 0021.P/DIR/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

Division of duties, scope, and responsibilities of each member of PLN's Board of Directors based on the organizational structure according to Perdir Number 0021.P/DIR/2020 dated May 15, 2020 on Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero) are as follows:

DIREKTUR UTAMA

Direktur Utama bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola PLN sesuai dengan maksud dan tujuan PLN dan senantiasa meningkatkan kinerja PLN untuk mencapai visi serta menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

PRESIDENT DIRECTOR

Direktur The President Director is responsible for leading, fostering, and managing PLN in accordance with PLN's aims and objectives and continuously improving PLN's performance to achieve the vision and control, maintain, and manage PLN's assets, with the following main duties:

1. Memastikan arah pengelolaan PLN berjalan dengan benar menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN;
2. Memastikan PLN dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
3. Memastikan PLN terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan; dan
4. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota PLN sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan seluruh sumber daya PLN melangkah mencapai visi, misi, dan tujuan PLN.

1. Ensure that the direction of PLN's management is running correctly towards the realization of PLN's vision, mission, and goals;
2. Ensure that PLN is managed in accordance with business principles and good corporate governance principles ;
3. Ensure that PLN continues to grow and provide added value to stakeholders ; and
4. Carry out the corporate leader function to ensure the engagement of all PLN members as well as an inspiration and motivator who directs whole source power PLN step up reach vision , mission , and goals PLN.

WAKIL DIREKTUR UTAMA

Wakil Direktur Utama bertanggung jawab memimpin dan membina fungsi manajemen perubahan, manajemen digital, manajemen regulator, fungsi perencanaan dan pengembangan listrik perdesaan serta memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Memastikan program rasio elektrifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selesai tepat waktu termasuk penyelesaian pengembangan listrik perdesaan;
2. Memastikan pengembangan strategi digital PLN untuk mendukung unit bisnis dalam memprioritaskan inisiatif digital, mengelola portofolio proyek digital, mendorong pengembangan kapabilitas digital di PLN, dan mengelola pendokumentasian pengetahuan digital;
3. Mendorong jalannya perubahan PLN dengan cara memfasilitasi perubahan, standar *Key Performance Indicator* (KPI) dan dampak keuangan yang konsisten dalam inisiatif perubahan, dan mengkomunikasikan perubahan secara efektif kepada seluruh organisasi; dan
4. Mengikutsertakan pemerintah melalui *key account management* untuk mendukung pengembangan peraturan yang membawa keuntungan bagi PLN dan pemerintah melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap kebutuhan bisnis PLN dan tujuan seluruh entitas PLN.

VICE PRESIDENT DIRECTOR

The Vice President Director is responsible for leading and guiding the functions of change management, digital management, regulatory management, function planning and development electricity in villages as well as ensuring that PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Ensure ratio program electrification that has been set by the government done appropriate time including solution development electricity in villages;
2. Ensure PLN's digital strategy development for support business units in prioritizing digital initiatives, managing portfolio on digital projects, encouraging development digital capabilities at PLN , and managing the documentation of digital knowledge;
3. Encourage the change PLN with method facilitate change, standard Key Performance Indicators (KPIs) and impact consistent finance _ in initiative change, and communicating change by effective to whole organization ; and
4. Include government through key account management for support development the rules that bring profit for PLN and the government through thorough understanding _ to need business PLN and goals whole entity government;

DIREKTUR PERENCANAAN KORPORAT

Direktur Perencanaan Korporat bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Perencanaan Korporat yang meliputi fungsi perencanaan sistem, perencanaan strategi PLN, manajemen portofolio,

DIRECTOR OF CORPORATE PLANNING

The Director of Corporate Planning is responsible for leading, fostering, and managing the Directorate of Corporate Planning which includes function system planning, PLN strategic planning, portfolio management, compliance, and

kepatuhan, dan pengendalian kinerja PLN untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin perencanaan, implementasi, dan evaluasi fungsi perencanaan sistem ketenagalistrikan meliputi pengembangan dan pengelolaan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, peramalan beban/kebutuhan, dan desain sistem pembangkit dan transmisi listrik;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan terkait fungsi perencanaan PLN meliputi perencanaan strategis, proyeksi finansial PLN jangka panjang, pengembangan strategi bisnis baru, pengembangan regional, unit, dan Anak Perusahaan, dan strategi pendanaan proyek;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan terkait fungsi manajemen portofolio meliputi manajemen transaksi ketenagalistrikan serta pengembangan kemitraan bisnis, sinergi badan usaha milik negara, Anak Perusahaan, dan Usaha Patungan;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan terkait fungsi pengendalian kinerja PLN meliputi manajemen kinerja PLN, sistem manajemen kinerja unggul PLN, manajemen program strategis PLN, dan pelaporan kegiatan penanaman modal dan pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu kepada institusi/lembaga pemberi izin;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan terkait fungsi manajemen kepatuhan di PLN meliputi pengelolaan manajemen *fraud risk*, manajemen integritas, *whistle blowing system*, sistem manajemen anti penyuapan, *integrity due dilligence*, dan kajian *governance*, *risk management, and compliance* terkait kebijakan yang berpotensi *fraud*; dan
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Perencanaan Korporat.

DIREKTUR NIAGA DAN MANAJEMEN PELANGGAN

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Niaga dan Manajemen Pelanggan yang meliputi fungsi pusat keunggulan niaga dan pelayanan pelanggan, pemasaran dan pengembangan produk, pelayanan pelanggan PLN dan

PLN performance control to ensure PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Lead the planning, implementation, and evaluation function on the planning system of electricity which includes the development and management of business plans for electricity supply, forecasting of loads/needs, and design of power generation and transmission systems;
2. Establish and ensure the implementation of strategies and policies related to PLN's planning function including strategic planning, long-term PLN financial projections, development of new business strategies, regional, unit and subsidiary developments, and project funding strategies;
3. Establish and ensure the implementation of strategies and policies related to portfolio management functions including management of electricity transactions and development of business partnerships, synergies of state-owned enterprises, subsidiaries, and joint ventures;
4. Establish and ensure the implementation of strategies and policies related to PLN's performance control functions including PLN's performance management, PLN's superior performance management system, PLN's strategic program management, and reporting of investment activities and service management integrated one door to institution;
5. Establish and ensure the implementation of strategies and policies related to the compliance management function at PLN including the management of fraud risk management, integrity management, whistle blowing system , anti-bribery management system, integrity due diligence , and governance, risk management, and compliance studies related to policies that have the potential to fraud ; and
6. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Directorate Planning Corporate ;

DIRECTOR OF COMMERCE AND CUSTOMER MANAGEMENT

The Director of Commerce and Customer Management is responsible to lead , foster , and manage Directorate of Commerce and Customer Management which includes functions of the center of commercial excellence and customer service, marketing and product development,

institusi besar, pelayanan pelanggan retail, serta tarif dan subsidi untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan dalam pembuatan dan pengembangan produk jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mengawali strategi *marketing* yang efektif;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan dalam kinerja penjualan dan kualitas layanan baik secara langsung melalui kanal terpusat untuk layanan pelanggan di Kantor Pusat maupun secara tidak langsung melalui saluran layanan pelanggan yang tidak terpusat di wilayah berdasarkan wawasan dan pengalaman pelanggan yang dapat meningkatkan *revenue* dan kepuasan pelanggan;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan dalam manajemen hubungan pelanggan dan solusi energi terbaik guna meningkatkan revenue dan kepuasan pelanggan untuk klien *business to business*;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan dalam akuisisi dan retensi pelanggan *business to business* dan *business to consumer* melalui *best practice* dalam *data analytics*, sistem, proses bisnis, dan optimasi *customer experience*;
5. Mengembangkan dan merealisasikan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta menginisiasi strategi *marketing* yang efektif;
6. Memastikan tarif tenaga listrik memberikan margin keuntungan yang optimal bagi PLN, memenuhi asas kewajaran bagi pelanggan, kompetitif, dan taat pada aturan yang berlaku;
7. Memastikan rencana kebutuhan subsidi listrik teralokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan usaha PLN;
8. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Niaga dan Manajemen Pelanggan.

DIREKTUR MEGA PROYEK DAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan yang meliputi fungsi perencanaan dan enjiniring konstruksi,

customer service for PLN and large institutions, retail customer service, as well as tariffs and subsidies to ensure that PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Establish and ensure the implementation of strategies and policies in the manufacture and development of service products in accordance with customer needs and initiate an effective marketing strategy ;
2. Establish and ensure the implementation of strategies and policies in sales performance and service quality both directly through a centralized channel for customer service at the Head Office or indirectly through customer service channels that are not centralized in the region based on customer insights and experiences that can increase revenue and customer satisfaction;
3. Establish and ensure the implementation of strategies and policies in customer relationship management and the best energy solutions to increase revenue and customer satisfaction for business to business clients ;
4. Establish and ensure the implementation of strategies and policies in the acquisition and retention of business to business and business to consumer customers through best practices in data analytics , systems, business processes, and customer experience optimization ;
5. Develop and realize service products that are in accordance with customer needs and initiate effective marketing strategies ;
6. Ensure that electricity tariffs provide optimal profit margins for PLN, meet the principles of fairness for customers, are competitive, and comply with applicable regulations;
7. Ensure that the planned electricity subsidy needs are allocated in accordance with the needs to meet the needs of PLN's operating revenues;
8. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Directorate of Commerce and Customer Management.

DIRECTOR OF MEGA PROJECTS AND NEW RENEWABLE ENERGY

Director of Mega Projects and Renewable Energy is responsible to lead , foster , and manage Directorate of Mega Projects and New Renewable Energy which includes planning and engineering functions of construction, planning and

perencanaan dan enjiniring energi baru dan terbarukan, pengadaan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) dan *Independent Power Producer* (IPP) energi baru dan terbarukan, konstruksi pembangkit, transmisi dan gardu induk, *project management office*, dan manajemen rantai pasok untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memastikan strategi perencanaan dan penyelesaian tahapan perencanaan dan engineering proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, serta energi baru dan terbarukan sesuai dengan target sehingga manfaat proyek dapat tercapai bagi bisnis PLN;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi perencanaan dan pengadaan barang/jasa PLN, terlaksananya pembinaan pengadaan barang/jasa kepada regional dan unit, dan pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa dan kontrak PLN;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa secara online serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan PLN;
4. Merencanakan, memimpin, dan mengevaluasi monitoring pelaksanaan proses perizinan, pembebasan tanah, kontrak pembangunan, serta pengawasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, gardu induk, dan energi baru dan terbarukan;
5. Memastikan implementasi proyek *end-to-end* dan mengintegrasikan penyelesaian antar proyek sehingga proyek memberikan keuntungan yang optimal bagi PLN serta melakukan monitoring dan evaluasi seluruh manajemen investasi (*capital expenditure*) PLN;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan guna memaksimalkan efisiensi dan kepuasan pelanggan internal terkait dengan proses pengadaan Material Transmisi Utama (MTU), Material Distribusi Utama (MDU), minyak pelumas, logistik, dan manajemen inventory; dan
7. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

engineering of new and renewable energy , procurement of Engineering, Procurement, and Construction (EPC) and Independent Power Producer (IPP) for new and renewable energy , construction of power plants, transmission and substations, project management office , and supply chain management to ensure that PLN is able to develop towards realizing the vision , mission, and goals of PLN, with the main duties as follows:

1. Establish and ensure the planning strategy and completion of the planning and engineering stages of the power plant, transmission, substation, and new and renewable energy projects according to the target so that project benefits can be achieved for PLN's business;
2. Establish and ensure the implementation of policies and strategies for planning and procurement of PLN goods/services, implementation of guidance on procurement of goods/services to regional and units, and administrative management of procurement of goods/services and PLN contracts;
3. Establish and ensure the implementation of policies and strategies for managing applications for the procurement of goods/services online as well as integrating the process and centralizing the procurement of PLN;
4. Plan, lead, and evaluate the monitoring of the implementation of the licensing process, land acquisition, development contracts, as well as supervision of the development of electricity infrastructure including generators, transmissions, substations, and new and renewable energy;
5. Ensure end-to-end project implementation and integrate completion between projects so that projects provide optimal benefits for PLN as well as monitor and evaluate all PLN investment management (capital expenditures);
6. Establish and ensure the implementation of procurement policies and strategies to maximize efficiency and internal customer satisfaction related to the procurement process for Main Transmission Materials (MTU), Main Distribution Materials (MDU), lubricating oil, logistics, and inventory management ; and
7. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Directorate of Mega Projects and New Renewable Energy;

DIREKTUR ENERGI PRIMER

Direktur Energi Primer bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Energi Primer yang meliputi fungsi pengadaan, *delivery* dan logistik batu bara, gas dan bahan bakar minyak, serta *Independent Power Producer* (IPP) untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan penyediaan, *delivery*, logistik, dan kualitas batu bara untuk kebutuhan batu bara jangka pendek dan panjang serta memastikan pelaksanaan rencana pengadaan sejalan dengan rencana strategis, anggaran, dan kebutuhan bisnis;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan penyediaan, *delivery*, logistik, dan kualitas gas dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan gas dan bahan bakar minyak jangka pendek dan panjang serta memastikan pelaksanaan rencana pengadaan sejalan dengan rencana strategis, anggaran, dan kebutuhan bisnis;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan pengawasan *end-to-end* atas siklus kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP), dan mengintegrasikan dengan sistem ketenagalistrikan PLN antara lain perencanaan, kontrak, *monitoring* konstruksi dan kinerja, sampai dengan pembayaran; dan
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Energi Primer.

DIRECTOR PRIMARY ENERGY

The Director of Primary Energy is responsible to lead, foster, and manage Primary Energy Directorate which includes the functions of procurement, delivery and logistics of coal , gas and materials burn oil , and Independent Power Producer (IPP) to ensure that PLN is able develop going towards realizing vision , mission , and goals PLN, with the main duties as follows:

1. Establish and ensure the implementation of strategies and policies for supply, delivery , logistics, and quality of coal for short and long term coal needs and ensure that the implementation of the procurement plan is in line with strategic plans, budgets, and business needs;
2. Determine and ensure the implementation of strategies and policies for supply, delivery , logistics, and quality of gas and materials burn oil for gas and material needs burn oil short and long term and ensure that the implementation of the procurement plan is in line with the strategic plan, budget and business needs;
3. Establish and ensure the implementation of strategies and policies for end-to-end monitoring of the Independent Power Producer (IPP) ownership cycle , and integrating it with the PLN electricity system, including planning, contracting, monitoring construction and performance, up to payment; and
4. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Primary Energy Directorate;

DIREKTUR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia yang meliputi fungsi strategi *human capital*, pengembangan talenta, pelayanan *human capital*, umum, keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan, komunikasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan hukum serta pembinaan dan tanggung jawab kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

DIRECTOR OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Management Director Source Power Man responsible answer lead , foster , and manage Management Directorate Source Power Humans that include function human capital strategy , talent development, human capital services , general, safety, occupational health, security and environment, communication and Corporate Social Responsibility (CSR)/ Social and Environmental Responsibility (TJSL), and law and coaching and bear answer performance Education and Training Center to ensure that PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam efektivitas proses bisnis, struktur dan perangkat struktur organisasi, perencanaan tenaga kerja, strategi dan kebijakan *human capital*, dan budaya PLN yang selaras dengan strategi PLN untuk meningkatkan nilai (*value*) *human capital* dalam mencapai visi dan misi PLN;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam pengembangan talenta yang optimal sesuai dengan strategi dan kebijakan manajemen *human capital* dengan kolaborasi bersama seluruh elemen PLN untuk mencapai visi dan misi PLN;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam pelayanan kepada pegawai dan purnakarya yang didukung dengan sistem informasi serta mengelola hubungan industrial yang harmonis dan mengelola alih daya;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam pengelolaan administrasi umum secara korporat serta melakukan perencanaan dan pengelolaan administrasi, anggaran, dan pengadaan Kantor Pusat;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan serta *continuous improvement* dalam pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan di seluruh kegiatan ketenagalistrikan PLN Grup selaras dengan strategi PLN;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam komunikasi PLN, hubungan masyarakat, hubungan dengan media, hubungan komunikasi pihak internal dan eksternal, *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sesuai dengan strategi PLN;
7. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam fungsi hukum;
8. Membina dan bertanggung jawab atas kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
9. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia.

1. Establish and ensure implementation PLN 's policies and strategies in effectiveness of business processes, organizational structures and devices, workforce planning, human capital strategies and policies, and PLN's culture in line with PLN's strategy to increase the value of human capital in achieving PLN's vision and mission;
2. Establish and ensure the implementation of PLN policies and strategies in optimal talent development in accordance with human capital management strategies and policies in collaboration with all PLN elements to achieve PLN's vision and mission;
3. Establish and ensure the implementation of PLN's policies and strategies in services to employees and retirees supported by information systems as well as managing harmonious industrial relations and managing outsourcing;
4. Establish and ensure the implementation of PLN's policies and strategies in managing general administration in a corporate manner as well as planning and managing administration, budget, and procurement of the Head Office;
5. Establish and ensure the implementation of PLN's policies and strategies in safety, occupational health, security, and the environment as well as continuous improvement in the management of safety, occupational health, security, and the environment in all PLN Group's electricity activities in line with PLN's strategy;
6. Establish and ensure the implementation of PLN policies and strategies in PLN communications, public relations, relations with the media, communication relations with internal and external parties, Corporate Social Responsibility (CSR) / Social and Environmental Responsibility (TJSL) in accordance with PLN's strategy;
7. Establish and ensure the implementation of PLN's policies and strategies in the legal function;
8. Foster and be responsible for the performance of the Education and Training Center; and
9. Establish and ensure the implementation of business process development, principles of good corporate governance , and risk management and compliance at the Directorate of Management Source Power Human ;

DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko yang meliputi fungsi keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem dan teknologi informasi, manajemen risiko, pusat kebijakan, serta manajemen aset untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan pendanaan, penyediaan, dan pengelolaan keuangan serta pemenuhan terhadap kewajiban pendanaan dan *covenant* PLN;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan dalam perencanaan dan kontrol yang tepat waktu dan akurat untuk memastikan PLN memiliki alokasi dana yang cukup untuk mencapai tujuan bisnisnya yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran PLN;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan manajemen likuiditas yang akurat dan efisien untuk memastikan arus kas yang cukup untuk menopang operasi PLN dan pengelolaan investasi dari kelebihan keuangan PLN secara tepat;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi dan kebijakan pengelolaan akuntansi serta analisis pajak yang akurat, tepat waktu, hemat biaya, dan komprehensif untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan keuangan kepada PLN;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam pengelolaan sistem dan teknologi informasi serta pemusatan dan integrasi sistem dan aplikasi teknologi informasi PLN;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam pengelolaan risiko termasuk penerapan *3 Lines Model* dan *4 Eyes Principle*;
7. Memastikan pengelolaan kebijakan terpusat termasuk harmonisasi kebijakan dan dampaknya, penanggung jawab kesimpulan *governance, risk management, and compliance*, serta pengelolaan *integrated management system*;
8. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi PLN dalam pengelolaan aset operasional dan aset properti termasuk valuasi dan asuransi aset; dan

DIRECTOR OF FINANCE FINANCE AND RISK MANAGEMENT

The Director of Finance and Risk Management is responsible answer lead , foster , and manage Directorate of Finance and Risk Management which includes finance, budgeting, treasury, accounting, information systems and technology functions , risk management, policy center , and asset management to ensure that PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Set and ensure the implementation of strategies and policies on funding, provision, and financial management as well as compliance with funding obligations and PLN covenants;
2. Establish and ensure the implementation of strategies and policies in timely and accurate planning and control to ensure that PLN has sufficient allocation of funds to achieve its business objectives set out in the PLN work plan and budget;
3. Establish and ensure the implementation of accurate and efficient liquidity management strategies and policies to ensure sufficient cash flow to support PLN operations and manage investment from excess PLN finances appropriately;
4. Establish and ensure the implementation of accurate, timely, cost-effective, and comprehensive accounting management strategies and policies as well as tax analysis to provide PLN with an accurate picture of financial health;
5. Determine and ensure the implementation of PLN's policies and strategies in the management of information technology systems and technology as well as centralization and integration of PLN's information technology systems and applications;
6. Establish and ensure the implementation of PLN's policies and strategies in risk management including the application of the 3 Lines Model and 4 Eyes Principle;
7. Ensure centralized policy management including harmonization of policies and their impacts, responsible for governance conclusions, risk management, and compliance , as well as integrated management system management;
8. Establish and ensure the implementation of PLN policies and strategies in the management of operational assets and assets property including asset valuation and insurance ; and

9. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.

DIREKTUR BISNIS REGIONAL SUMATERA DAN KALIMANTAN

Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan yang meliputi fungsi perencanaan dan pengendalian strategi regional, pembangkitan dan energi baru dan terbarukan, transmisi, distribusi, dan retail dengan wilayah kerja meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Pulau Kalimantan di regional Sumatera dan Kalimantan untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan pengembangan, perencanaan anggaran investasi dan operasional, optimalisasi *profit and loss*, pengoptimalan pengelolaan aset operasional, dan pengendalian kinerja regional Sumatera dan Kalimantan untuk mencapai kinerja PLN sesuai dengan rencana strategis PLN;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam optimasi operasi dan pemeliharaan aset pembangkit dan energi baru dan terbarukan, implementasi kebijakan, dan strategi pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sumatera dan Kalimantan;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam sistem proteksi transmisi, optimasi operasi dan pemeliharaan aset transmisi, implementasi kebijakan, dan strategi pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sumatera dan Kalimantan;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam optimasi operasi dan pemeliharaan aset distribusi, implementasi kebijakan, dan strategi pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sumatera dan Kalimantan;

9. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Directorate of Finance and Risk Management;

REGIONAL BUSINESS DIRECTOR OF SUMATERA AND KALIMANTAN

The Sumatera and Kalimantan Regional Business Director is responsible to lead, foster, and manage Sumatera and Kalimantan Regional Business Directorate which includes regional strategy planning and control functions , generation and new and renewable energy, transmission, distribution, and retail with work area covers whole province on the island of Sumatra, the Riau Archipelago , the Indonesian Archipelago Bangka Belitung, and the Island Kalimantan in the Sumatera and Kalimantan regions to ensure that PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Establish and ensure the implementation of development planning, investment and operational budget planning, optimization of profit and loss , optimization of operational asset management , and regional performance control of Sumatera and Kalimantan to achieve PLN's performance in accordance with PLN's strategic plan;
2. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in optimizing the operation and maintenance of new and renewable energy and generating assets, implementing policies and strategies for asset management in order to achieve business goals and optimal performance in the Sumatera and Kalimantan regions ;
3. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in the transmission protection system, optimization of operation and maintenance of transmission assets, implementation of policies and strategies for asset management in order to achieve business goals and optimal performance in the Sumatera and Kalimantan regions ;
4. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in optimizing the operation and maintenance of distribution assets, implementing policies and asset management strategies in order to achieve business goals and optimal performance in the Sumatera and Kalimantan regions ;

5. memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi retail, pemasaran, pelayanan pelanggan, dan pengamanan pendapatan untuk mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sumatera dan Kalimantan;
6. menetapkan dan memastikan terlaksananya penyelesaian konstruksi pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi di regional Sumatera dan Kalimantan yang masih berjalan sesuai dengan kontrak konstruksi *existing* yang masih berlangsung; dan
7. menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan.

DIREKTUR BISNIS REGIONAL JAWA, MADURA, DAN BALI

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali yang meliputi fungsi perencanaan dan pengendalian strategi regional, pembangkitan dan energi baru dan terbarukan, transmisi, distribusi, dan retail dengan wilayah kerja meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa, Madura, dan Bali di regional Jawa, Madura, dan Bali, serta pembinaan dan tanggung jawab kinerja Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan pengembangan, perencanaan anggaran investasi dan operasional, optimalisasi *profit and loss*, pengoptimalan pengelolaan aset operasional, dan pengendalian kinerja regional Jawa, Madura, dan Bali untuk mencapai kinerja PLN sesuai dengan rencana strategis PLN;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam *engineering* pembangkit dan energi baru dan terbarukan, optimasi operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, implementasi kebijakan, dan strategi pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Jawa, Madura, dan Bali;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam *engineering* dan sistem proteksi transmisi, optimasi operasi dan pemeliharaan aset transmisi, implementasi kebijakan, dan strategi

5. Ensure the implementation of retail, marketing, customer service, and revenue security policies and strategies to achieve business goals and optimal performance in the Sumatera and Kalimantan regions ;
6. Establish and ensure the completion of the construction of power plants, transmissions, substations, and distributions in the Sumatera and Kalimantan regions that are still running in accordance with existing construction contracts that are still ongoing; and
7. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Sumatera and Kalimantan Regional Business Directorates;

REGIONAL BUSINESS DIRECTOR OF JAVA, MADURA AND BALI

The Regional Business Director for Java, Madura, and Bali is responsible to lead , foster , and manage Regional Business Directorate of Java, Madura, and Bali which includes the functions of planning and controlling regional strategies, new and renewable energy and generation, transmission, distribution, and retail with working areas covers whole province on the island Java , Madura, and Bali in the Java, Madura, and Bali regions, as well as coaching and responsibility for the performance of the Central Java, Madura, and Bali Load Controlling Center Main Unit to ensure that PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Determine and ensure the implementation of development planning, investment and operational budget planning, optimization of profit and loss , optimization of operational asset management , and regional performance control of Java, Madura, and Bali to achieve PLN's performance in accordance with PLN's strategic plan;
2. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in engineering and new and renewable energy, optimization of operation and maintenance of generator assets, implementation of policies and strategies for asset management in order to achieve business goals and optimal performance in the regions of Java, Madura, and Bali;
3. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in engineering and transmission protection systems, optimization of operation and maintenance of transmission assets, implementation of policies and

pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Jawa, Madura, dan Bali;

4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam optimasi operasi dan pemeliharaan aset distribusi, implementasi kebijakan, strategi pengelolaan aset, dan peningkatan kualitas dan efisiensi distribusi guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Jawa, Madura, dan Bali;

5. Memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi retail, pemasaran, pelayanan pelanggan, dan pengamanan pendapatan untuk mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Jawa, Madura, dan Bali;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya penyelesaian konstruksi pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi di regional Jawa, Madura, dan Bali yang masih berjalan sesuai dengan kontrak konstruksi *existing* yang masih berlangsung;
7. Membina dan bertanggung jawab atas kinerja Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali; dan

8. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali.

DIREKTUR BISNIS REGIONAL SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengelola Direktorat Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara yang meliputi fungsi perencanaan dan pengendalian strategi regional, pembangkitan dan energi baru dan terbarukan, transmisi, distribusi, dan retail dengan wilayah kerja meliputi seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara serta di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara untuk memastikan PLN mampu berkembang menuju terwujudnya visi, misi, dan tujuan PLN, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan pengembangan, perencanaan anggaran investasi dan operasional, optimalisasi *profit and loss*, pengoptimalan pengelolaan aset operasional, dan pengendalian kinerja regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara untuk mencapai kinerja PLN sesuai dengan rencana strategis PLN;

strategies for asset management in order to achieve business goals and optimal performance in the Java, Madura, and Bali regions;

4. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in optimizing the operation and maintenance of distribution assets, implementing policies, asset management strategies, and improving distribution quality and efficiency in order to achieve business goals and optimal performance in the Java, Madura, and Bali regions;
5. Ensure the implementation of retail, marketing, customer service, and revenue security policies and strategies to achieve business goals and optimal performance in the Java, Madura, and Bali regions;
6. Determine and ensure the completion of the construction of power plants, transmissions, substations, and distributions in the Java, Madura and Bali regions which are still running in accordance with existing construction contracts that are still ongoing;
7. Fostering and being responsible for the performance of the Central Java, Madura and Bali Load Control Center Main Unit; and
8. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Java, Madura, and Bali Regional Business Directorates;

REGIONAL BUSINESS DIRECTOR OF SULAWESI, MALUKU, PAPUA, AND NUSA TENGGARA

The Regional Business Director for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara is responsible to lead, foster, and manage Regional Business Directorate of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara which includes the functions of planning and controlling regional strategies, new and renewable energy and generation, transmission, distribution, and retail with working areas covers whole provinces on the islands of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara as well as in the regions of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara to ensure that PLN is able to develop towards realizing the vision, mission, and goals of PLN, with main duties as follows:

1. Establish and ensure the implementation of development planning, investment and operational budget planning, optimization of profit and loss , optimization of operational asset management , and regional performance control of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara to achieve PLN's performance in accordance with PLN's strategic plan;

2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam optimasi operasi dan pemeliharaan aset pembangkit dan energi baru dan terbarukan, implementasi kebijakan, dan strategi pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;

3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam sistem proteksi transmisi, optimasi operasi dan pemeliharaan aset transmisi, implementasi kebijakan, dan strategi pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;

4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam optimasi operasi dan pemeliharaan aset distribusi, implementasi kebijakan, dan strategi pengelolaan aset guna mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;
5. Memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi retail, pemasaran, pelayanan pelanggan, dan pengamanan pendapatan untuk mencapai sasaran bisnis dan kinerja yang optimal di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya penyelesaian konstruksi pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara yang masih berjalan sesuai dengan kontrak konstruksi *existing* yang masih berlangsung; dan
7. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pengelolaan risiko dan kepatuhan pada Direktorat Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

INDEPENDENSI, HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Independensi

Di setiap awal tahun anggota Direksi menandatangani Pakta Integritas untuk menyatakan status independensinya dan setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah dalam satu tahun tersebut terdapat situasi benturan kepentingan oleh Direksi atas tindakan yang dilakukan. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG. Seluruh anggota Direksi telah menandatangani Pakta Integritas pada tahun 2021 yang berisi butir-butir berikut:

2. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in optimizing the operation and maintenance of new and renewable energy and generating assets, implementing policies and asset management strategies in order to achieve business goals and optimal performance in the Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara regions;
3. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in the transmission protection system, optimization of operation and maintenance of transmission assets, implementation of policies and asset management strategies in order to achieve business goals and optimal performance in the regions of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara;
4. Establish and ensure the implementation of policies and strategies in optimizing the operation and maintenance of distribution assets, implementing policies, and asset management strategies in order to achieve business goals and optimal performance in the regions of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara;
5. Ensure the implementation of retail, marketing, customer service, and revenue security policies and strategies to achieve business goals and optimal performance in the Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara regions;
6. Establish and ensure the completion of the construction of power plants, transmissions, substations, and distribution in the regions of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara which are still running in accordance with existing construction contracts that are still ongoing; and
7. Establish and ensure the implementation of business process development, good corporate governance principles , and risk management and compliance at the Regional Business Directorates of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara.

INDEPENDENCE OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Independence

Each member of Board of Directors signs an Integrity Pact at the beginning of each year to declare his/her independence. At the end of each year, each member makes a statement disclosing any conflict of interests faced by the Board of Directors regarding actions that have been taken. The Corporate Secretary shall ensure that this practice is carried out in accordance with GCG principles. In 2021, all members of the Board of Directors signed the Integrity Pact which contains the following matters:

Pakta Integritas Direksi / Integrity Pact of Board of Directors	DP	SR	YDS	EH	BS	RHP	WK	AL	AP	HWS
Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan / Willing to perform the fiduciary duty.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mengupayakan capaian kinerja Perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip- prinsip GCG. / Striving for the Company's maximum performance by adhering to GCG principles.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent* / Being careful and prudent in making decisions (duty of care).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya Perusahaan / Taking full responsibility for the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. / Consistently prioritizing the Company's best interests over personal interests (duty of loyalty).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual. / Steering clear of any potential or actual conflict of interest (Conflict of Interest Rule).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mematuhi semua ketentuan perundangan yang berlaku. / Comply with all applicable laws and regulations (accountability).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selama menjabat, tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu. / During their tenure, they will not take advantage of the Company's position, directly or indirectly, for their personal, family, or relative's interests, or those of other groups.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hubungan Afiliasi

PLN memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi maupun hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham untuk menjaga independensi, menghindari adanya benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional.

Seluruh anggota Direksi memegang teguh aturan tersebut sehingga antar anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pengungkapan hubungan afiliasi anggota Direksi dapat dilihat di bab profil perusahaan sub bab Direksi.

Kepemilikan Saham

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di Perusahaan baik secara pribadi maupun anggota keluarganya, dan tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain baik secara pribadi maupun keluarganya.

Affiliation

PLN has a regulation that prohibits any direct or indirect affiliate relationships among members of Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholder to uphold independence, to avoid conflict of interest, and to maintain accountability in all decision-making and implementation of operational activities.

All members of the Board of Directors uphold this rule firmly, so that the current members of the Board Directors do not have any financial or family relations up to the third degree with other Directors or Commissioners either horizontally or vertically, including via marital relationships.

The disclosure of affiliation of members of the Board of Directors is available in company profile chapter, Board of Directors section.

Share Ownership

All Directors do not have shares of the Company either through personal ownership or through family members and do not have shares in other companies either through personal ownership or through family members.

Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan 105 kali rapat internal di sepanjang tahun 2021. Rapat direksi tersebut juga dihadiri oleh Direksi anak perusahaan, EVP, GM atau jajaran manajemen terkait sesuai dengan agenda yang dibahas. Tingkat kehadiran Direksi dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

Board of Directors Meeting

During 2021, Board of Directors held 105 internal meetings. The Board of Directors meetings were also attended by the Board of Directors of subsidiaries, EVP, GM, or relevant management according to the discussed agenda. The attendance rate of Board of Directors and the meeting agenda were as follows:

Tabel: Kehadiran Anggota Direksi Dalam Rapat Direksi (Periode 1 Januari – 16 Juni)

Table: Attendance of Members of the Board of Directors in Board of Directors Meeting (Period of January 1 – June 16)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
3 Januari 2021 / January 3, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
7 Januari 2021 / January 7, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
8 Januari 2021 / January 8, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
10 Januari 2021 / January 10, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
14 Januari 2021 / January 14, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
15 Januari 2021 / January 15, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
21 Januari 2021 / January 21, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	82
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
22 Januari 2021 / January 22, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
24 Januari 2021 / January 24, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
26 Januari 2021 / January 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
29 Januari 2021 / January 29, 2021	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Keuangan / Proxied by the Director of Finance	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Project / Proxied by the Director of Mega Projects	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	55
	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Project / Proxied by the Director of Mega Projects	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	64
	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Project / Proxied by the Director of Mega Projects	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	64
4 Februari 2021 / February 4, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Proxied by the Regional Business Director of Java, Madura, and Bali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
7 Februari 2021 / February 7, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
8 Februari 2021 / February 8, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
11 Februari 2021 / February 11, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	73
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	73

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
11 Februari 2021 / February 11, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	73
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	73
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	91
12 Februari 2021 / February 12, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	91
15 Februari 2021 / February 15, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	91
18 Februari 2021 / February 18, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	91
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	82
19 Februari 2021 / February 19, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Keuangan / Proxied by the Director of Finance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
22 Februari 2021 / February 22, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
26 Februari 2021 / February 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓	✓	91
28 Februari 2021 / February 28, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
1 Maret 2021 / March 1, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
4 Maret 2021 / March 4, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Proxied by the Regional Business Director of Java, Madura, and Bali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	82
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Proxied by the Regional Business Director of Java, Madura, and Bali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
5 Maret 2021 / March 5, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
7 Maret 2021 / March 7, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
12 Maret 2021 / March 12, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
15 Maret 2021 / March 15, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
19 Maret 2021 / March 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
26 Maret 2021 / March 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
28 Maret 2021 / March 28, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
30 Maret 2021 / March 30, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	91
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
1 April 2021 / April 1, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓	✓	82
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
2 April 2021 / April 2, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
3 April 2021 / April 3, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Keuangan / Proxied by the Director of Finance	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	82
8 April 2021 / April 8, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	73
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	73
9 April 2021 / April 9, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	82
14 April 2021 / April 14, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
15 April 2021 / April 15, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Proxied by the Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	✓	✓	91

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Proxied by the Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	✓	✓	91
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
17 April 2021 / April 17, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
19 April 2021 / April 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100
23 April 2021 / April 23, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
25 April 2021 / April 25, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
29 April 2021 / April 29, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
30 April 2021 / April 30, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	82

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	82
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
7 Mei 2021 / May 7, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
10 Mei 2021 / May 10, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects	✓	✓	✓	✓	82
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	82
21 Mei 2021 / May 21, 2021	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	82
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
27 Mei 2021 / May 27, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
28 Mei 2021 / May 28, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*											Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ	DP	SR	MIN	SFR	BS	RHP	HWS	WK	SH	MIA	
4 Juni 2021 / June 4, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
11 Juni 2021 / June 11, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91
13 Juni 2021 / June 13, 2021	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama / Proxied by the Vice President Director	✓	✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Proxied by the Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	✓	✓	82

Keterangan: / Description:

ZZ: Zulkifli Zaini (Direktur Utama / President Director)
DP: Darmawan Prasodjo (Wakil Direktur Utama / Vice President Director)
SR: Sinthya Roesly (Direktur Keuangan / Director of Finance)
MIN: Muhammad Ikbal Nur (Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning)
SFR: Syofvi Felienty Roekman (Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Mangement)
BS: Bob Sahril (Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management)
RHP: Rudy Hendra Prastowo (Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy)
HWS: Haryanto W. S. (Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali / Regional Business Director of Java, Madura, and Bali)
WK: Wiluyo Kusdwiharto (Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan)
SH: Syamsul Huda (Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara)
MIA: M. Ikhsan Asaad (Direktur Mega Proyek dan EBT / Director of Project and NRE)

Tabel: Kehadiran Anggota Direksi Dalam Rapat Direksi (Periode 16 Juni – 31 Desember)

Table: Attendance of Members of the Board of Directors in Board of Directors Meeting (Period of June 16 – December 31)

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*													Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ*	DP	SR	EH	SFR*	YDS**	BS	RHP	HWS	WK	AL**	SH*	AP**	MIA*	
17 Juni 2021 / June 17, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
24 Juni 2021 / June 24, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
25 Juni 2021 / June 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
27 Juni 2021 / June 27, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
1 Juli 2021 / July 1, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*													Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ*	DP	SR	EH	SFR*	YDS**	BS	RHP	HWS	WK	AL**	SH*	AP**	MIA*	
2 Juli 2021 / July 2, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
5 Juli 2021 / July 5, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
8 Juli 2021 / July 8, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
15 Juli 2021 / July 15, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
16 Juli 2021 / July 16, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
18 Juli 2021 / July 18, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
19 Juli 2021 / July 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
22 Juli 2021 / July 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
23 Juli 2021 / July 23, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
25 Juli 2021 / July 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects		✓		✓	91
1 Agustus 2021 / August 1, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
2 Agustus 2021 / August 2, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
5 Agustus 2021 / August 5, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*													Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ*	DP	SR	EH	SFR*	YDS**	BS	RHP	HWS	WK	AL**	SH*	AP**	MIA*	
9 Agustus 2021 / August 9, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
15 Agustus 2021 / August 15, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
20 Agustus 2021 / August 20, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
24 Agustus 2021 / August 24, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Perencanaan Korporat / Proxied by the Director of Corporate Planning	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
27 Agustus 2021 / August 27, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
2 September 2021 / September 2, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
5 September 2021 / September 5, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
9 September 2021 / September 9, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Keuangan / Proxied by the Director of Finance	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
10 September 2021 / September 10, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
12 September 2021 / September 12, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓	✓		✓		✓	91
17 September 2021 / September 17, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
19 September 2021 / September 19, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Keuangan / Proxied by the Director of Finance		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
23 September 2021 / September 23, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*													Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ*	DP	SR	EH	SFR*	YDS**	BS	RHP	HWS	WK	AL**	SH*	AP**	MIA*	
26 September 2021 / September 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
29 September 2021 / September 29, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
1 Oktober 2021 / October 1, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Proxied by the Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	91
7 Oktober 2021 / October 7, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Keuangan / Proxied by the Director of Finance	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		Memberi Kuasa ke Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Proxied by the Director of Commerce and Customer Management	82
8 Oktober 2021 / October 8, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	✓		✓		✓	100
10 Oktober 2021 / October 10, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
14 Oktober 2021 / October 14, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
17 Oktober 2021 / October 17, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan		✓		✓	82
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
19 Oktober 2021 / October 19, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
26 Oktober 2021 / October 26, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91

Tanggal Rapat / *Meeting Date*	Kehadiran Rapat / *Meeting Attendance*													Kehadiran (%) / *Attendance (%)*
	ZZ*	DP	SR	EH	SFR*	YDS**	BS	RHP	HWS	WK	AL**	SH*	AP**	MIA*	
1 November 2021 / November 1, 2021	Memberi Kuasa ke Wakil Direktur Utama	✓	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Proxied by the Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan	Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Proxied by the Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	73
11 November 2021 / November 11, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
18 November 2021 / November 18, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
19 November 2021 / November 19, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Proxied by the Director of Human Capital Management	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	91
22 November 2021 / November 22, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
23 November 2021 / November 23, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
26 November 2021 / November 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
2 Desember 2021 / December 2, 2021	✓	Memberi Kuasa ke Direktur Mega Proyek / Proxied by the Director of Mega Projects	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Proxied by the Regional Java, Madura, and Bali		✓	100
12 Desember 2021 / December 12, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	100
23 Desember 2021 / December 23, 2021	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Proxied by the Regional Java, Madura, and Bali		✓	100
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Memberi Kuasa ke Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali / Proxied by the Regional Java, Madura, and Bali		✓	100

Tanggal Rapat / Meeting Date	Kehadiran Rapat / Meeting Attendance														Kehadiran (%) / Attendance (%)
	ZZ*	DP	SR	EH	SFR*	YDS**	BS	RHP	HWS	WK	AL**	SH*	AP**	MIA*	

Keterangan: / Description:

ZZ: Zulkifli Zaini (Direktur Utama / President Director)*

DP: Darmawan Prasodjo (Wakil Direktur Utama, diangkat kembali sebagai Direktur Utama / Vice President Director, reappointed as President Director)

SR: Sinthya Roesly (Direktur Keuangan / Director of Finance)

EH: Evy Haryadi (Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning)

SFR: Syofvi Felienty Roekman (Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Mangement)*

YDS: Yusuf Didi Setiarto (Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Mangement)**

BS: Bob Sahril (Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management)

RHP: Rudy Hendra Prastowo (Direktur Energi Primer / Director of Primary Energy)

HWS: Haryanto W. S. (Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali / Regional Business Director of Java, Madura, and Bali)

WK: Wiluyo Kusdwiharto (Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, diangkat kembali sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan / Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan, reappointed as Director of Mega Projects and Renewable Energy)

AL: Adi Lumakso (Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan / Regional Business Director of Sumatera and Kalimantan)**

SH: Syamsul Huda (Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara)*

AP: Adi Priyanto (Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara / Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara)**

MIA: M. Ikhsan Asaad (Direktur Mega Projects / Director of Mega Projects)*

*) Berhenti menjabat per tanggal 6 Desember 2021.
**) Efektif menjabat sejak tanggal 6 Desember 2021.

*) Stopped serving as of December 6, 2021.
**) Effectively serving since December 6, 202

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2021, Direksi mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, antara lain:

Board of Directors Competency Development Program

Throughout 2021, the Board of Directors participated in the following training and competency development program:

Jabatan / Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / Training and Competency Development	Periode / Period
Darmawan Prasodjo Direktur Utama / President Director	Certified in Accounting, Finance, and Business (CAFB), Jakarta	Juni – September 2021 / June – September 2021
	Narasumber dalam International Conference on Climate Change "a Just and Affordable Transition toward Net Zero" (1st Plenary - Road to COP26 and Beyond) / Speaker at at International Conference on Climate Change "a Just and Affordable Transition toward Net Zero" (1st Plenary - Road to COP26 and Beyond)	Juli 2021 / July 2021
	Narasumber pada Acara Webinar RUMI-U Masterclass Series 2021 / Speaker at the 2021 RUMI-U Masterclass Series Webinar Event	Juli 2021 / July 2021
	Narasumber di Acara Insight with Desi Anwar tema "PLN Mobile" / Speaker at the Insight with Desi Anwar event with the theme "PLN Mobile"	Agustus 2021 / August 2021
	Narasumber Iprahumas PC KESDM : Webinar Temu Online dengan tema "Makin Asik Pakai Kendaraan Listrik" / Speaker at Iprahumas PC KEESDM: Online Meeting Webinar with the theme "It's More Fun to Use Electric Vehicles"	September 2021
	Narasumber di Acara Badan Pusat Statistik "Energi Terbarukan sebagai Alternatif Sumber Pembangkit Listrik PLN" / Speaker at Statistics Indonesia Event "Renewable Energy as an Alternative Source for PLN's Power Generation"	September 2021
Sinthya Roesly Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Webinar PWC "Membangun Equity Story yang Solid Dalam Masa Ketidakpastian" : PWC / PWC Webinar "Building a Solid Equity Story in Times of Uncertainty" : PWC	18 & 25 Maret 2021 / March 18 & 25, 2021
	Executive Briefing Sistem & Kapabilitas Implementasi Manajemen Aset utk Manajemen Puncak & Manajemen Atas di PLN Grup : Asset Management Consulting Ltd & Asset Management Academy / Executive Briefing of Asset Management System & Implementation Capability for Top Management & Top Management at PLN Group : Asset Management Consulting Ltd & Asset Management Academy	31 Maret 2021 / March 31, 2021
	Webinar Forum Manajemen Risiko BUMN "Risk Maturity Assessment" : Kementerian BUMN (Memberikan Opening Speech) / SOE Risk Management Forum Webinar "Risk Maturity Assessment" : Ministry of SOEs (Opening Speech)	5 Mei 2021 / May 5, 2021
	Microsoft APAC Public Sector Summit "Empowering Nations for a digital society" : Microsoft, Webinar	6 - 7 Mei 2021 / May 6 - 7 2021
	Webinar Leadership Sharing Forum "Woman Leadership" : ILUNI UI (Narasumber)	11 April 2021 / April 11, 2021
	Webinar on Capital Budget Execution : World Bank	3 Juni 2021 / June 3, 2021
	Pelatihan Certified in Accounting, Finance, and Business (CAFB) : Ikatan Akuntan Indonesia / Certified in Accounting, Finance, and Business (CAFB) training : Indonesian Institute of Accountants	Juni – September 2021 / June – September 2021

Jabatan / *Position*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / *Training and Competency Development*	Periode / *Period*
	Training Budget Control and Performance – Communicating For Impact : McKinsey	7 Juni 2021 / June 7, 2021
	McKinsey CFO Forum : McKinsey, Webinar	15 - 16 Juni 2021 / June 15 - 16, 2021
	Webinar Cyber Security : Kementerian BUMN	3 Agustus 2021 / August 3, 2021
	Digital Learning Ability to Execute (A2E) Finance and Performance Management : McKinsey,	15 Juli – 9 September 2021 / July 15 – September 9, 2021
	Webinar International RISKHub "Accelerating ESG: Benefits to creating the Competitive Advantage" : IRMAPA, Webinar (Narasumber / Speaker)	27 September 2021 / September 27, 2021
	Training Manajemen Aset untuk BoD PLN : Asset Management Consulting Ltd & Asset Management Academy / Asset Management Training for PLN BoD : Asset Management Consulting Ltd & Asset Management Academy	16 Oktober 2021 / October 16, 2021
	ESG Client Webinar : McKinsey	29 Oktober 2021 / October 29, 2021
	Talkshow Paviliun Indonesia COP-26 UNFCCC "Mobilizing Finance and Investment for Indonesia's Clean Energy, (Pembicara / Speaker)	1 November 2021 / November 1, 2021
	Panelist on GPST COP High level event in the US Pavilion "Unlocking Grids to Decarbonize Power Systems Globally with the G-PST Consortium"	4 November 2021 / November 4, 2021
	Conference Global Culture Survey 2021, The Link Between Culture and Competitive Advantage : PWC, Webinar	2 Desember 2021 / December 2, 2021
	Kesetaraan Gender dengan tema "Peran Penting Perempuan dalam Kemajuan Indonesia" : Media Indonesia Group, (Narasumber) / Gender Equality with the theme "The Important Role of Women in the Progress of Indonesia" : Media Indonesia Group, (Speaker)	22 Desember 2021 / December 22, 2021
	Online Talkshow Series Women Empowerment PT Angkasa Pura II (Persero) Group "Women Empowerment in Business: The Hidden Gem of Our Industry", (Narasumber)	23 Desember 2021 / December 23, 2021
	PLN Women Summit, Webinar	29 Desember 2021 / December 29, 2021
Yusuf Didi Setiarto Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital Management	Narasumber Seminar Transisi Energi Menuju Net Zero Emisi / Speaker at the Seminar on Energy Transition Towards Net Zero Emissions	2021
	Narasumber Indonesia Petroleum Association Conference : Government Incentives to Promote Upstream Oil and Gas in Indonesia / Speaker at Indonesia Petroleum Association Conference : Government Incentives to Promote Upstream Oil and Gas in Indonesia	18 Agustus 2021 / August 18, 2021
Evy Haryadi Direktur Perencanaan Korporat / Director of Corporate Planning	Pembicara acara Potensi Sumber Daya Migas dan Panas Bumi sebagai Penyangga Energi Masa Depan – Dewan Energi Nasional / Speaker at the event Potential Oil and Gas and Geothermal Resources as Future Energy Buffer – National Energy Council	11 Agustus 2021 / August 11, 2021
	Pembicara acara The Role of CCUS in Low-Carbon Development in ASEAN / Speaker at The Role of CCUS in Low-Carbon Development event	14 Agustus 2021 / August 14, 2021
	Pembicara acara Towards 12 BSCFD : Unlocking the Gas Market / Speaker at Towards 12 BSCFD : Unlocking the Gas Market	19 Agustus 2021 / August 19, 2021
	Pembicara acara Inaugural BIMP - EAGA Energy (BECE) online Conference & Exhibition / Speaker at Inaugural BIMP - EAGA Energy (BECE) online Conference & Exhibition event	23 Agustus 2021 / August 23, 2021
	Pembicara acara We care, We prepare, We Prosper - Asean Energy Business Forum / Speaker at We care, We prepare, We Prosper - Asean Energy Business Forum	16 September 2021 / September 16, 2021
	Pembicara acara Asia Clean Energy Summit at SIEW 2021 Singapore and Online / Speaker at Asia Clean Energy Summit at SIEW 2021 Singapore and Online	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
	Pavilliun Indonesia COP 26 UNFCC Glasgow. D-1 Becoming the World's Leader in Green Economy : Beyond NDC Implementation / Speaker at Indonesia Pavillion COP 26 UNFCC Glasgow. D-1 Becoming the World's Leader in Green Economy : Beyond NDC Implementation	November 2021
	Pembicara Tentative Virtual The 10th Indonesia EBTKE ConEx / Tentative Virtual Speaker at The 10th Indonesia EBTKE ConEx	23 November 2021 / November 23, 2021

Jabatan / *Position*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi / *Training and Competency Development*	Periode / *Period*
Bob Saril Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan / Director of Commerce and Customer Management	Pembicara Indonesia di Indonesia Electric Vehicle Webinar 2021 – Global Expo Management / Speaker of Indonesia at Indonesia Electric Vehicle Webinar 2021	25 Maret 2021 / March 25, 2021
	Narasumber Webinar Pekan Inovasi Energi Baru dan Terbarukan Indonesia – BPPT / Speaker of Indonesian New and Renewable Energy Innovation Week Webinar - BPPT	27 Juli 2021 / July 27, 2021
	Pembicara Webinar Membangun Social Acceptance Masyarakat Terhadap Mobil Listrik – CIGRE Indonesia / Speaker at Building Social Acceptance of the Public to Electric Vehicle – CIGRE Indonesia	27 Mei 2021 / May 27, 2021
	Pembicara di event Sustanability Action for The Future Economy (SAFE) / Speaker at Sustanability Action for The Future Economy (SAFE) event	25 Agustus 2021 / August 25, 2021
	Pembicara Diskusi Panel di event Road to COP 26 / Speaker of the Discussion Panel at Road to COP 26 Event	Oktober 2021 / October 2021
	Pembicara Talkshow Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 – BRIN / Speaker at Talkshow Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021 – BRIN	24 November 2021 / November 24, 2021
	Expert Panel Speaker Markplus Conference "Strategic Marketing Session "	8 Desember 2021 / December 8, 2021
Adi Priyanto Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara / Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	Diklat Penjenjangan ADV to INT (STR) / EXECUTIVE EDUCATION – UDIKLAT / ADV to INT (STR) / EXECUTIVE EDUCATION Training - UDIKLAT	2021
	Manajemen Keuangan Perusahaan - Preasetya Mulya / Corporate Financial Management - Preasetya Mulya	2021

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris dibantu oleh komite Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI Direksi/KPI Korporat yang tertuang dalam Kontrak Manajemen antara Direksi dengan Pemegang Saham. Kontrak Manajemen tahun 2021 telah ditetapkan dan disetujui Pemegang Saham dalam RUPS RKAP 2021 tanggal 26 Januari 2021. KPI Direksi pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan. Evaluasi atas pencapaian kinerja Perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengendalian Kinerja Korporat. Dokumen laporan hasil evaluasi ini kemudian juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Hasil pencapaian KPI Direksi disampaikan kepada RUPS dimana Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja KPI Korporat pada tahun operasional. Dalam pertanggungjawaban tersebut, Direksi harus mampu menjabarkan kaitan raihan KPI dengan kondisi lapangan dan respons operasional yang dijalankan oleh Direksi. Adapun Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan selama tahun pelaporan.

Performance Assessment of Board Of Directors

The Board of Commissioners assisted by committees of the Board of Commissioners conducts the performance assessment of the Board of Directors based on the Board of Directors/Corporate KPI which is stated in the Management Contract between the Board of Directors and Shareholder. The 2021 Management Contract has been determined and approved by the Shareholder at the 2021 RKAP GMS on January 26, 2021 The Board of Directors KPI are qualitative and quantitative measurements in reference to RKAP which serves as the target in the preparation and implementation of the activity budget. Evaluation of the Company's performance is carried out by Corporate Performance Control Unit and then audited by Public Accounting Firm (KAP).

The achievement results of the Board of Directors KPI are submitted to the GMS where the Board of Directors and Board of Commissioners are held accountable for the achievement of Corporate KPI performance in the operational year. For this accountability, the Board of Directors must be able to explain the correlation between KPI achievement and the realization and operational responses carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners explains and is accountable for supervision and advice provision during the operational year.

Berdasarkan Risalah RUPS PT PLN (Persero) tanggal 26 Januari 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021, penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) tahun 2021 ditetapkan dalam klaster Energi dengan meliputi 5 Pilar BUMN. Sesuai perspektif pada Kontrak Manajemen Tahun 2021 , capaian KPI Direksi adalah sebagai berikut:

Referring to Minutes of AGMS of PT PLN (Persero) dated January 26, 2021 concerning Validation of 2021 Work Plan and Budget, the evaluation of Soundness Level of PT PLN (Persero) in 2021 was established in the Energy cluster and includes 5 SOE Pillars. In accordance with 2021 Management Contract perspectives, the achievement of Board of Directors KPI was as follows:

No	Perspektif / *Perspective*	Nilai / *Score*
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia	43,51
2	Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation	21,68
3	Kepemimpinan Teknologi / Technological Leadership	16,81
4	Pengembangan Investasi / Development on Investments	11,00
5	Pengembangan Talenta / Talent Development	14,49
	TOTAL PENILAIAN KINERJA / TOTAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT	**107,49**

Adapun hasil capaian KPI Direksi secara lengkap adalah sebagai berikut:

The complete Board of Directors KPI achievement is as follows:

No.	Indikator Kinerja Utama / *Key Performance Indicators*	Polaritas / *Polarity*	Bobot / *Weight*	Satuan / *Unit*	Target	Realisasi / *Realization*	Pencapaian / *Achievement*	Nilai / *Score*	Keterangan / *Remarks*
A	**Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia**		**40**					**43,51**	
	1. EBITDA dan Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Economic and Social Value for Indonesia								
	a. EBITDA	↑	2	Rp Triliun / Rp Trillion	81,48	89,17	109,43%	2,19	●
	a. Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Income (Loss) for the Year	↑	2	Rp Triliun / Rp Trillion	11,35	13,17	110,00%	2,20	●
	2. ROIC – WACC	↑	4	%	-6,6	0,98	110,00%	4,40	●
	3. *Interest Bearing Debt to* EBITDA dalam rentang kisaran rasio *investment grade rated companies* / Interest Bearing Debt to EBITDA in the approximated rasio range of investment grade rated companies	↓	5	Rasio / Ratio	5,9	4,71	110,00%	5,50	●
	4. *Cash From Operation* (CFO)	↑	5	Rp Triliun / Rp Trillion	55,25	88,85	110,00%	5,50	●
	5. *Emergency Response Time* (*System Recovery Time*)	↓	5	Jam / Hour	3	2,06	110,00%	5,50	●
	6. SAIDI SAIFI								
	a. SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*)	↓	2,5	Menit/Plg /Minute/ Cust.	860	540,12	110,00%	2,75	●
	b. SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*)	↓	2,5	Kali/Plgn / Times/ Cust.	9,50	6,70	110,00%	2,75	●
	7. Persetujuan model mekanisme perubahan subsidi listrik dan struktur tarif oleh Kementerian terkait terkait / Approval of the mechanism model change on electricity subsidy and structure rates by the relevant Ministries	↓	4	Waktu / Times	Semester I 2021	6 Mei 2021 / May 6, 2021	107,85%	4,31	●
	8. Rata-Rata Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) / Average Usage on Domestic Component Level (TKDN)	↑	4	%	40	48,88	110,00%	4,40	●
	9. Rasio Elektrifikasi Nasional / National Electrification Ratio	↑	4	%	99,25	99,45	100,20%	4,00	●

No.	Indikator Kinerja Utama / *Key Performance Indicators*	Polaritas / *Polarity*	Bobot / *Weight*	Satuan / *Unit*	Target	Realisasi / *Realization*	Pencapaian / *Achievement*	Nilai / *Score*	Keterangan / *Remarks*
B	**Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation**		**20**					**21,68**	
	1. Jumlah Pengguna Aktif Aplikasi (PLN Mobile) / Total of Active Application Users (PLN Mobile)	↑	3	Juta Plgn / Millions of Customers	3	18,36	110,00%	3,30	●
	2. Pendapatan Usaha Diluar Penjualan Tenaga Listrik dan Biaya Penyambungan / Operating Income excluding Electricity Sales and Splicing Costs	↑	5	%	0,98	1,20	110,00%	5,50	●
	3. Pembangunan Infrastruktur *Electric Vehicle* / Infrastructure Development on Electric Vehicle	↑	3	Jumlah / Total SPKLU	16	67	110,00%	3,30	●
	4. Peningkatan Konsumsi Tenaga Listrik PLN pada Pelanggan *Captive* / Improvements of PLN Electricity Consumption to Captive Customers	↑	5	Rp Miliar / Rp Billion	867	2.944,47	110,00%	5,50	●
	5. *Maturity Level Enterprise Risk Management*	↑	4	Level	2,6	2,65	101,92%	4,07	●
C	**Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership**		**16**					**16,81**	
	1. Implementasi Jumlah Unit *Power Plant* yang sudah mengimplementasi teknologi digital / Implementation of Total Power Plant Units implementing digital technology	↑	3	Unit	24	42	110,00%	3,30	●
	2. Implementasi *Digital Procurement* Procurement / Implementation of Digital Procurement	↑	3	%	2	17,06	110,00%	3,30	●
	3. Implementasi *Smart Grid* / Implementation of Smart Grid	↑	4	Lokasi / Location	3	3	101,01%	4,04	●
	4. *IT Maturity Level*	↑	3	Level	3	3,03	101,00%	3,03	●
	5. *Distribution Efficiency Rate*	↓	3	%	9	8,59	104,56%	3,14	●
D	**Pengembangan Investasi / Investment Development**		**10**					**11,00**	
	1. Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT / Addition of EBT Generator Capaity	↑	5	MW	475	624,02	110,00%	5,50	●
	2. *Co-Firing Biomass*	↑	5	GW	0,1	0,30	110,00%	5,50	●
E	**Pengembangan Investasi / Investment Development**		**14**					**14,49**	
	1. *Organizational Health Index*	↑	3	Score	81	81	100,00%	3,00	●
	2. *Human Capital Readiness*	↑	3	Level	4,35	4,45	102,30%	3,07	●
	3. *Organizational Capital Readiness*	↑	3	Level	4,35	4,42	101,61%	3,05	●
	4. Pemenuhan *Talent Pool* dan *Talent Mobility* / Fulfillment of Talent Pool and Talent Mobility								
	a. % perempuan dalam *nominated talent* / % female in nominated talent	↑	2,5	%	15	16,67	110,00%	2,75	●
	b. % milenial (<40 tahun) dalam *top talent* talent / % millennials (<40 years old) in top talent	↑	2,5	%	50	52,41	104,82%	2,62	●
Total Penilaian Kinerja / Total Performance Achievement			**100**					**107,49**	

REMUNERASI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris

REMUNERATION FOR BOARD OF DIRECTORS

Procedure for Determination of Remuneration for Board of Directors

Procedure for determination and amount of remuneration for Board of Directors refers to Regulation of the Minister

BUMN beserta perubahannya No. 01/MBU/05/2019 mengatur tentang prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi di Tahun 2021.

of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determination of Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners of SOEs, and its latest amendment No. 01/MBU/05/2019.

Struktur dan Besaran Remunerasi Direksi

Besaran remunerasi Direksi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran remunerasi tersebut menerapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*), kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia. Remunerasi yang diterima Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan tantiem dengan perincian sebagai berikut:

Structure and Amount of Remuneration for Board of Directors

Remuneration for the Board of Directors is adjusted to the Company's financial conditions and capability and shall not be contrary to the laws and regulations. Determination of the amount of remuneration applies Industrial Adjustment Factor, taking into account benchmark in similar industries, business competitiveness or complexity and scarcity of human resources. The remuneration received by the Board of Directors consists of salary, allowances, and bonuses with the following details:

No	Jenis Remunerasi / *Type of Remuneration*	Direktur Utama / *President Director*	Wakil Direktur Utama / *Vice President Director*	Direktur / *Director*	Keterangan / *Description*
1	Gaji per bulan / Salary per month	Rp414.000.000	Rp393.300.000	Rp351.900.000	• Direktur Utama 100% / President Director 100% • Wakil Direktur Utama 95% dari gaji Direktur Utama / Vice President Director 95% of President Director's salary • Direktur Lainnya 85% dari gaji Direktur Utama / Other Directors 85% of President Director's salary
2	**Tunjangan / Allowance**				
	Tunjangan hari raya keagamaan / Religious holiday allowance	1 (satu) bulan honorarium / 1 (one) month honorarium			
	Tunjangan transportasi / Transportation allowance	Rp27.500.000 (jika tidak menempati rumah dinas) / Rp27,500,000 (if the director does not occupy the official house)			
	Asuransi purna jabatan / Post-tenure insurance	Premi yang ditanggung 25% dari honorarium dalam satu tahun / The premium covered 25% of the honorarium in one year			
3	**Fasilitas / Facilities**				
	Fasilitas Kendaraan Dinas / Transportation Facility	1 (satu) unit kendaraan 3000 cc / 1 (one) unit of 3000 cc vehicle			
	Fasilitas kesehatan / Health Facility	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun / 1 wife and 3 children at maximum 25 years old			
	Fasilitas bantuan hukum / Legal aid facility	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / Given in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations			
	Fasilitas keanggotaan klub bisnis / Business club membership facilities	1 (satu) keanggotaan klub bisnis / 1 (one) business club membership			
	Fasilitas kartu kredit / Credit card facilities	1 (satu) kartu kredit untuk keperluan menjamu tamu Perusahaan atau biaya representasi dinas lainnya / 1 (one) credit card for the purpose of entertaining Company guests or other service representation fees			
	Pakaian Seragam / Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun / 2 (two) sets every 1 (one) year			

Secara kumulatif, remunerasi Direksi yang diterima pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In total, the remuneration of Board of Directors received in 2021 is as follows:

Jenis Remunerasi / *Remuneration Type*	Jumlah / *Total*	Besaran (juta Rp) / *Amount (million Rp)*
Remunerasi / Remuneration		
Gaji / Salary	14 Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2021) / 14 Directors (including those who have resigned in 2021)	Rp47.362.935.484
Tantiem / Tantiem	15 Direksi (termasuk mantan direksi tahun buku 2020) / 15 Directors (including former directors for 2020 fiscal year)	Rp87.810.205.900
Tunjangan / Allowance		
Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	Tidak ada tunjangan transportasi / No transportation allowance	-
Tunjangan Perumahan / Housing Allowance	14 Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2021) / 14 Directors (including those who have resigned in 2021)	Rp2.795.685.484
Tunjangan Hari Raya / Holiday Allowance	11 Direksi / 11 Directors	Rp3.974.400.000
Jumlah / Total		**Rp141.943.226.868**

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Nonkinerja, dan/atau Opsi Saham yang Diterima Direksi

Permen BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya yang terakhir Nomor 01/MBU/05/2019 mengatur hak Direksi menerima bagian dari keuntungan Perusahaan (tantiem). Realisasi tantiem Direksi pada tahun 2021 senilai Rp87.810.205.900,- (Delapan Puluh Tujuh Miliiar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Besaran tantiem terlampir merupakan hasil pertimbangkan capaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan (TKP).

Disclosure of Performance Bonuses, Non-Performance Bonuses, and/or Stock Options Received by Board of Directors

Regulation of the Minister of SOE No: PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Salaries of the Board of Directors and Board of Commissioners of SOE and its latest amendment No. 01/MBU/05/2019 regulates the right of the Directors to receive a share of the Company's profits (tantiem). Realization of the Board of Directors tantiem in 2021 amounted to Rp87,810,205,900 (Eighty Seven Billion Eight Hundred Ten Million Two Hundred Five Thousand Nine Hundred Rupiah). The amount of tantiem is the result of consideration of KPI achievements and company soundness level (TKP).

Mengingat PLN bukan sebuah perusahaan publik, maka PLN tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*).

Considering that PLN is not a public company, PLN does not have an Employee Stock Option Program/Management Stock Option Program implemented by the Company.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antar Anggota Direksi dengan Anggota Direksi, dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham

Anggota Direksi PLN menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Disclosure of Affiliation Among Members of Board of Directors, Board of Commissioners and/or Shareholder

Members of the Company's Board of Directors do not have financial or family affiliations with each other, as well as among Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholder as explained in the following table:

Nama	Hubungan Keluarga dengan / *Family Relationship with*						Hubungan Keuangan dengan / *Financial Relationship with*					
	Anggota Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Member*		Anggota Direksi / *Board of Directors Member*		Pemegang Saham / *Shareholder*		Anggota Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Member*		Anggota Direksi / *Board of Directors Member*		Pemegang Saham / *Shareholder*	
	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*	Ya / *Yes*	Tidak / *No*
Darmawan Prasodjo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sinthya Roesly		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Yusuf Didi Setiarto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Evy Haryadi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bob Sahril		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rudy Hendra Prastowo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Wiluyo Kusdwiharto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adi Lumakso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Adi Priyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Haryanto W.S		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi ditentukan oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan aspek keahlian tertentu untuk jabatan dan tugas strategis. Secara garis besar PLN membagi tugas Direksi ke dalam dua bagian besar, yaitu tugas-tugas korporasi yang dilakukan oleh Direktur yang membidangi keuangan, perencanaan, pengadaan, dan sumber daya manusia, dan tugas-tugas operasional yang dilakukan oleh Direktur Bisnis Regional yang terbagi dalam 3 regional, yaitu Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, serta Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali.

Seluruh anggota Direksi yang saat ini menjabat, telah memenuhi komposisi dan keberagaman keahlian kolegial maupun individu yang dipersyaratkan agar kepengurusan Perusahaan berlangsung profesional, efektif, dan akuntabel sehingga dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan optimal dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Keberadaan anggota Direksi yang merupakan pegawai karir dengan pengalaman penugasan yang lengkap di lingkungan PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan talenta dan pembinaan karir di Perusahaan telah berjalan dengan baik.

Diversity of Composition of Board of Directors

The composition of the Board of Directors is determined by the Shareholder by considering the proposal of the Board of Commissioners and certain expertise for strategic positions and duties. In general, PLN divides Board of Directors duties into two major categories, namely corporate duties carried out by the Directors in charge of finance, planning, procurement, and human resources, and operational duties carried out by Regional Business Directors assigned to 3 regions, namely Regional Business of Sumatera and Kalimantan, Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara, and Regional Business of Java, Madura and Bali.

All members of Board of Directors on duty have fulfilled the composition and diversity of collegial and individual expertise required so that the management of the Company is performed professionally, effectively, and accountably so that the Board of Directors can carry out their duties optimally and is able to meet the stakeholders' expectations. The presence of Board of Directors members who are career employees with extensive assignment experience within PT PLN (Persero) shows that the talent management and career development in the Company is running properly.

Keberagaman Direksi PLN dijelaskan pada tabel berikut ini:

The diversity of PLN Board of Directors is elaborated in the following table:

Nama / *Name*	Jenis Kelamin / *Gender*	Usia per 31 Des 2021 / Age as of December 31, 2021	Pendidikan / *Education*			Keahlian / *Expertise*			
			S1 / *Bachelor's degree*	S2 / *Master's degree*	S3 / *Doctoral degree*	Ekonomi/ Keuangan / *Economics/ Finance*	Hukum / *Legal*	Teknik / *Engineering*	Lain-lain / *Others*
Darmawan Prasodjo	Laki-laki / Male	51			✓	✓		✓	
Sinthya Roesly	Perempuan / Female	52		✓		✓		✓	
Yusuf Didi Setiarto	Laki-laki / Male	47	✓				✓		
Evy Haryadi	Laki-laki / Male	52		✓				✓	
Bob Sahril	Laki-laki / Male	53		✓				✓	
Rudy Hendra Prastowo	Laki-laki / Male	57		✓				✓	
Wiluyo Kusdwiharto	Laki-laki / Male	50		✓				✓	
Adi Lumakso	Laki-laki / Male	52		✓		✓		✓	
Adi Priyanto	Laki-laki / Male	55		✓		✓		✓	
Haryanto W.S	Laki-laki / Male	62		✓				✓	
Hartanto Wibowo	Laki-laki / Male	46		✓		✓		✓	

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah individu yang diangkat oleh Direksi untuk memimpin Sekretariat Perusahaan yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Menurut Pedoman GCG PLN, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas pokok untuk memastikan bahwa kepatuhan keterbukaan yang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Proses Penetapan/Pemberhentian *Corporate Secretary*

Corporate Secretary bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian *Corporate Secretary* berdasarkan Keputusan Direksi dengan dasar mekanisme internal yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Proses pengangkatan dan pemberhentian *Corporate Secretary* digambarkan dalam diagram alir berikut:

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is an individual appointed by the Board of Directors to lead the Corporate Secretariat that carries out the functions of the Corporate Secretary.

According to PLN's GCG Guidelines, the Corporate Secretary's primary duty is to ensure disclosure compliance with the principles of Good Corporate Governance; provide information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested; act as a liaison officer; and organize the administration and safekeeping of Company documents, including but not limited to the Shareholder Register, Special Register, and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Meetings of the Board of Commissioners, and GMS.

Appointment/Dismissal of Corporate Secretary

The Corporate Secretary reports directly to President Director. Appointment and dismissal of the Corporate Secretary is based on Decree of Board of Directors with internal mechanism approved by Board of Commissioners and reported to Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX). The appointment and dismissal mechanism of the Corporate Secretary is illustrated in the following flow chart:

Penyampaian Usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris / Submission of proposal for appointment/dismissal of Corporate Secretary to the Board of Commissioners

Persetujuan Dewan Komisaris / Approval of the Board of Commissioners

Penetapan pengangkatan/ pemberhentian melalui Keputusan Direksi / Appointment/dismissal through Decree of the Board of Directors

Menyampaikan Laporan mengenai Pengangkatan/ Pemberhentian Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan mempublikasikan dalam *website* Perusahaan / Report the appointment/ dismissal of Corporate Secretary to OJK and Indonesia Stock Exchange (BEI), and published in the Company's website

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

OVA KURNIAWAN

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia / *Age*	53 tahun / years old
Domisili / *Domicile*	Depok, Jawa Barat / Depok, West Java
Kewarganegaraan / *Citizenship*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S3 FMIPA, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat / Doctoral Degree from Faculty of Mathematics and Science, Universitas Indonesia, Depok, West Java • Magister Teknik Elektro, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia / Master's Degree in Electrical Engineering. University Tenaga Nasional, Malaysia • Magister Manajemen Bisnis, Universitas Prasetya Mulya / Master's Degree in Business Management, Universitas Prasetya Mulya • Sarjana Teknik Elektro, ISTN Jakarta / Bachelor's Degree in Electrical Engineering, ISTN Jakarta • Sarjana Sosial, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat / Bachelor of Social Studies, FISIP, Universitas Indonesia, Depok, West Java
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	Keputusan Direksi No. 2441.K/SDM.02.01/DIR/2020 tanggal 27 Oktober 2020 / Board of Directors Decree No. 2441.K/SDM.02.01/DIR/2020 dated October 27, 2020
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• Direktur SDM PT Rekadaya Elektrika (2018-2020) / HR Director of PT Rekadaya Elektrika (2018-2020) • Manajer Senior Hubungan Investor & GCG, PLN Kantor Pusat (2012-2017) / Senior Manager of Investor Relations & GCG, PLN Head Office (2012-2017) • Asisten Manajer Hubungan Investor, PLN Kantor Pusat (2009-2012) / Assistant Manager of Investor Relations, PLN Head Office (2009-2012) • Analyst Laporan Manajemen, PLN Kantor Pusat (2008-2009) / Management Report Analyst, PLN Head Office (2008-2009)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak ada / None

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sesuai Perdir No. 0162.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Duties and responsibilities of Corporate Secretary are stipulated in Board of Directors Regulation No. 0021.P/ No. 0162.P/DIR/2021 concerning Organization and Work Procedures as follows:

1. Memastikan pengeloaan rapat, keadministrasian, fasilitas, dan keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengelola implementasi tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
3. Mengelola program hubungan investor;
4. Mengelola hubungan kelembagaan dalam dan luar negeri antara lain institusi/ Lembaga negara, dewan perwakilan rakyat, pemerintah daerah, dan kedutaan besar;
5. Mengelola data operasional dan laporan PLN yang diperlukan oleh pemangku kepentingan;
6. Memastikan pelaksanaan fungsi sebagai pejabat pengelola informais dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik;
7. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di Sekretariat Perusahaan berbasiskan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, dan kepatuhan, termasuk menerapkan *check and balance* melalui 4 *Eyes Principle* untuk proses bisnis yang bersifat kritikal dalam kerangka *3 Lines Model*.

1. Ensure the management, administration, facilities, and protocols of meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners ;
2. Manage implementation of good corporate governance;\
3. Manage investor relations program;
4. Manage connection domestic and foreign institutions including state institutions /agencies, representative council, regional government , and embassies;
5. Manage operational data and PLN reports required by stakeholders interests;
6. Ensure implementation of function as office manager information and documentation in accordance with need openness public information;
7. Ensure planning, implementation, and evaluation on all business processes in the Corporate Secretariat are based on principles of good corporate governance (good corporate governance), management risk, and compliance, including apply checks and balances through the 4 Eyes Principle for business processes that are critical in 3 Lines Model framework .

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan 2021

Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas di sepanjang tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Menyelenggarakan RUPS RKAP Tahun Buku 2021 dan RUPS LPT Tahun Buku 2020.
2. Melaksanakan dokumentasi risalah RUPS, akta RUPS dan hal-hal lain berkenaan dengan RUPS.
3. Membuat risalah rapat Direksi dan mendokumentasikannya.
4. Mengkoordinasikan rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi, seperti rapat bersama Dewan Komisaris, Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, dan sebagainya.
5. Menyusun laporan korporat diantaranya: Laporan Manajemen, Laporan Statistik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.
6. Melaksanakan penilaian *assessment* GCG periode tahun 2020.
7. Melaksanakan pembahasan pemutakhiran Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).
8. Melaporkan setiap informasi material kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan OJK.
9. Melakukan pengkinian informasi yang ada di dalam situs web Perusahaan.

Duty Implementation of Corporate Secretary In 2021

During 2021, the Corporate Secretary performed the following duties:

1. Organized Annual RKAP GMS for the 2021 Fiscal Year and Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Fiscal Year.
2. Organized GMS documentation, including minutes of meetings, deeds, and so forth.
3. Prepared and documented Minutes of Board of Directors Meetings.
4. Coordinated meetings attended by Board of Directors, such as Meetings with the Board of Commissioners, Hearings with DPR and so forth.
5. Prepared corporate reports including Management Reports, Statistics Reports, Annual Report and Sustainability Report.
6. Carried out GCG assessment in 2020.
7. Conducted discussion on updating Board of Commissioners and Board of Directors Work Procedure Guidelines (Board Manual).
8. Reported any material information to Indonesia Stock Exchange ("IDX") and OJK.
9. Updated information disclosure on the Company's website.

10. Berpartisipasi dalam *non-deal roadshow*.
11. Melakukan korespondensi dengan para pemangku kepentingan dari lembaga keuangan.
12. Menerima kunjungan investor dan analis terkait *update* informasi Perusahaan periode triwulanan.
13. Mengelola hubungan dengan lembaga negara dan pemangku kepentingan lainnya.
14. Mendukung kelancaran tugas Direksi dan Dewan Komisaris dari sisi keprotokolan di lingkungan PLN dan kegiatan kelistrikan strategis PLN (peresmian, peletakan batu pertama, dan peninjauan proyek kelistrikan strategis PLN).

10. Participated in non-deal roadshow.
11. Organized correspondence with financial institutions.
12. Accepted investor and analyst visits regarding quarterly update on corporate information.
13. Managed relationships with government institutions and other stakeholders.
14. Facilitated activities of Board of Directors and Board of Commissioners in terms of protocol in PLN's environment and PLN's strategic electricity activities (launching, commencement, and visit of PLN's strategic electricity project).

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjalankan fungsi audit internal di PLN. SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi SPI yang tidak terbatas hanya pada fungsi audit internal, audit khusus dan kegiatan konsultasi, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan GCG berbasis risiko.

Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI)

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI) berdasarkan Piagam Pengawasan Satuan Pengawasan Intern poin 2.1 Struktur Organisasi. Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Alur pengangkatan dan pemberhentian KSPI digambarkan pada diagram alur berikut:

INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit (SPI) performs the Internal Audit Function at PLN. SPI is led by a Chief Audit Executive who is responsible for leading, planning, implementing, evaluating and conducting training on Internal Audit, including but not limited to internal and special audits and consultation in the implementation of risk-based GCG.

Appointment of Chief Audit Executive

The Internal Audit Unit is led by a Chief Audit Executive (CAE) based on the Internal Audit Charter item 2.1 Organization Structure. CAE is appointed and dismissed by the President Director with approval of Board of Commissioners. The Appointment and dismissal mechanism of CAE is illustrated in the following flow chart:

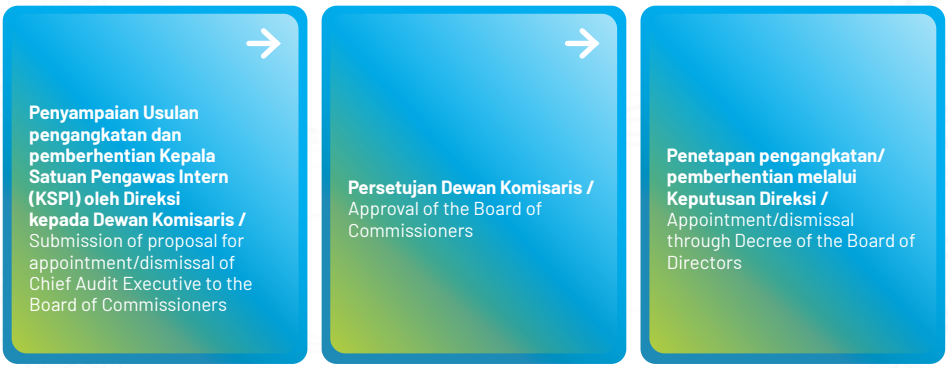

Profil Kepala Satuan Intern

Profile of Chief Audit Executive

HERRY RUKMANA

Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI)
Chief Audit Executive (CAE)

Usia / *Age*	54 tahun / years old
Domisili / *Domicile*	Jakarta
Kewarganegaraan / *Citizenship*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• Sarjana Akuntansi, IKIP / Bachelor of Accounting, IKIP • Magister Administrasi Bisnis, Jakarta Institute of Management / Master of Business Administration, Jakarta Institute of Management
Sertifikasi Profesi / *Professional Certification*	• Certified Documentary Credit Specialist (Cocs) (2008) • Gold Certificate 4DX (2010) • Bank Risk Management Level 4 (2020)
Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	Keputusan Direksi No. 0806.K/SDM.00.03/DIR/2020 tanggal 27 Februari 2020 / Decree of the Board of Directors No. 0806.K/SDM.00.03/DIR/2020 dated February 27, 2020
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• Kepala Audit Investigasi, Bank Mandiri (Maret 2018- Feb 2020) / Head of Investigation Audit, Bank Mandiri (March 2018-Feb 2020) • Regional CEO X/Sulawesi & Maluku, Bank Mandiri (2016- Maret 2018) / Regional CEO X/Sulawesi & Maluku, Bank Mandiri (2016-March 2018)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun / Holds no concurrent positions in any other company
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training to Improve Competency*	• Certified Fraud Examiner (CFE), Jakarta (2019) • Regional Leader Program, Singapure (2018) • IIA International Conference, Bali (2018)

Kedudukan SPI Dalam Struktur Perusahaan

KSPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

SPI Position in Organizational Structure

CAE directly reports to the President Director.

Jumlah pegawai SPI sebanyak 522 orang per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

SPI had 522 employees as of December 31, 2021, consisting of:

Jabatan / *Position*	Jumlah / Number
Chief Audit Executive (CAE)	1
Senior Audit Executive (SAE)	6
Head of Development Methodology, Quality Assurance, And Reporting (HoD MQAR)	1
Group Head/Head Of Division (di lingkungan Kantor Pusat / at Head Office)	9
Group Head (di luar Kantor Pusat / outside the Head Office)	9
Deputy Group Audit/Manager	66
Auditor	430
Jumlah / Total	**522**

Sertifikasi Profesi Audit internal

Para auditor di SPI telah memiliki 762 sertifikat profesi auditor internal dari berbagai lembaga sertifikasi pada tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Internal Audit Professional Certification

In 2021, 762 auditors of SPI had possessed internal auditor professional certification from various certification agencies as described below:

No	Sertifikasi / *Certification*	Dikeluarkan Oleh / *Issued by*	Jumlah Pemegang Sertifikasi / *Number of Certification Holder*
1	Qualified Internal Audit	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Jakarta / Internal Audit Education Foundation (YPIA) Jakarta	Basic: 504 Intermediate: 120 Advance (QIA): 120
2	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Jakarta / Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR) Jakarta	1
3	Dunamis Certified Human Capital Management (DCHCM)	HCMS Alignment Certification	1
4	Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI)	INIXINDO Bandung	6
5	Certified Human Resource Professional (CHRP)	Udiklat PLN Jakarta PLN Corporate University Jakarta	2
6	DF 120 – Foundations In Digital Forensic with Encase Forensic	Bounga Solusi Informatika	1
7	Certified Oxygen Forensic Detective Expert User	Bounga Solusi Informatika	2
8	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi- Mitra Kalyana Sejahtera / Professional Certification Agency - Mitra Kalyana Sejahtera)	4
9	Certified Internal Auditor (CIA)	IIA	1
		Jumlah / Total	**762**

Piagam Pengawasan Intern

Piagam Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan telah diperbaharui pada tahun 2020. SPI memiliki Piagam Pengawasan Intern yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Pengawasan Intern dibuat untuk menjelaskan mandat dan kewenangan yang diberikan kepada SPI sebagai landasan tanggung jawab, kewenangan, independensi dan pelaporan kegiatan SPI. Piagam ini tidak membatasi Auditor Internal membuat pertimbangan profesional dan audit yang inovatif.

Piagam Pengawasan Intern dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasi Perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terukur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas operasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dengan mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab KSPI

KSPI bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya program audit internal berbasis risiko dengan tugas pokok:

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter was established by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners with the latest update in 2020. SPI has an Internal Audit Charter which serves as a guideline for its duties and responsibilities. The Internal Audit Charter was prepared to describe the mandate and authority given to SPI as the basis for responsibility, authority, independence, and reporting of SPI activities. This Charter does not restrict Internal Auditors from making innovative professional and audit considerations.

Internal Audit Charter is designed to provide added value to the Company's operations in achieving its objectives through a systematic and measurable approach in evaluating and improving operational effectiveness, risk management, control and governance processes by promoting professionalism in accordance with GCG principles.

Duties and Responsibilities of CAE

CAE is responsible for ensuring implementation of risk based internal audits with the following duties:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan audit internal, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas audit Perusahaan;
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit internal yang berbasis risiko di seluruh regional dan unit Perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit internal, dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit khusus (investigasi/*fraud*) di seluruh regional dan unit Perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit khusus dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
4. Memastikan perencanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan audit Perusahaan pada fungsi korporat, bisnis regional dan unit, dalam rangka meminimalkan Risiko dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan dan regional dan unit;
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hubungan kerja dengan auditor eksternal termasuk di dalamnya Badan Pemeriksa Keuangan dan kantor akuntan publik;
6. Memastikan terlaksananya evaluasi dan melakukan koordinasi audit pada anak perusahaan dan usaha patungan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies in internal audit management, standards, methodology, system and information technology, including improvement of the Company's overall audit quality;
2. Ensuring planning, implementation and evaluation of risk-based internal audit programs in all Regions and Units, including evaluation, provision of internal audit recommendations and monitoring of follow-up actions;
3. Ensuring planning, implementation and evaluation of special (investigation/fraud) audit programs in all Regions and Units, including evaluation, provision of internal audit recommendations and monitoring of follow-up actions;
4. Ensuring planning, implementation and evaluation of the Company's audit management on corporate, regional business and unit functions, in order to minimize risks and to improve management quality of the Company, Regions and Units;
5. Ensuring planning, implementation and evaluation of work relations with external auditors, including the Audit Board and Public Accounting Firm;
6. Ensuring audit evaluation and coordination on subsidiaries and joint ventures and provision of recommendations in accordance with the applicable regulations.

Kode Etik Auditor Internal	**Code of Ethics of Internal Auditors**
Integritas / *Integrity*	Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor yang profesional, dengan: / Building trust as the basis of professional auditors, by: • Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan bertanggung jawab. / Performing internal audit with honesty, productivity, professionalism, and responsibility. • Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku. / Complying with applicable internal laws and the Company's regulations. • Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi auditor. / Not participating in any unauthorized activity or conducting activities that are prohibited by the Auditor's profession. • Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PLN. / Respecting and contributing to the legal and ethical goals set by PLN.
Objektivitas / *Objectivity*	Mempraktekkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas/kegiatan yang sedang diaudit. Auditor internal membuat penilaian secara bebas (independen) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya, dengan: / Practicing objective behavior in collecting, evaluating, and communicating information about the audited activities. The internal auditor makes the judgment freely (independently) and is not affected by the personal interest or opinion of others in providing his/her professional opinion, by: • Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat memengaruhi penilaian auditor. / Not participating in activities that may affect the Auditor's judgment. • Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi pertimbangan profesionalnya. / Not accepting anything in any form that may affect his/her professional judgment. • Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan Perusahaan. / Disclosing all the important facts in carrying out his/her duties, which, if not reported may cause harm to the Company.

Kerahasiaan / *Confidentiality*	• Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa kecuali demi hukum dan profesi. / Appreciating the value of the information received and the ownership of information and not divulging information obtained without power unless it is for the sake of law and profession. • Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan, dengan tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak sejalan dengan tujuan hukum dan etika di PLN. / • Being wise in using and protecting information obtained in his/her work, by not using the information obtained in performing its duties for his/her own sake in a way that is not legal or inconsistent with the legal and ethical purposes of PLN.
Kompetensi / *Competency*	Menggunakan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit. Hanya melakukan audit pada objek audit yang sesuai dengan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit, dengan: / Using the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit. Auditing the audit object in accordance with the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit, by: • Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Intern PLN yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal. / Performing audit in line with the PLN's Internal Audit Guidelines and Charter, in accordance w the Internal Auditor Profession Standard. • Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja. / Increasing competence through continuous professional education for the purpose of improving the quality and work efficiency.

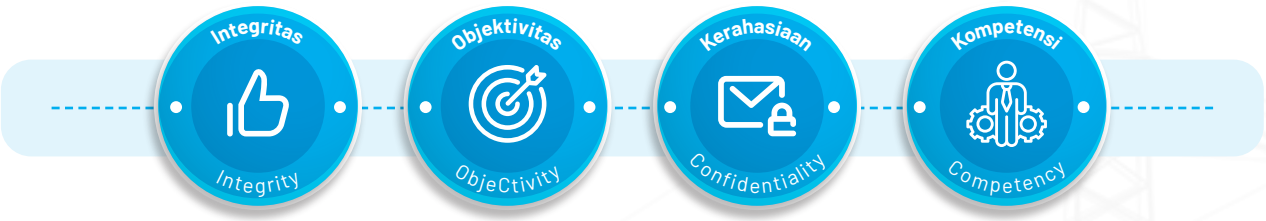

Pelaksanaan Tugas SPI tahun 2021

SPI telah melaksanakan pemeriksaan/ audit di sepanjang tahun 2021 yang meliputi :

1. Pemeriksaan operasional dan audit pendalaman atas hasil pemeriksaan operasional.
2. Pemeriksaan investigasi dan *whistleblowing system* (WBS).
3. Pemeriksaan penugasan khusus dan penugasan lainnya dari Dewan Komisaris, Direksi, divisi/satuan, dan unit induk/pelaksana.
4. Melaksanakan pemeriksaan penghapusan ATTB, Uji Petik PRR dan pemeriksaan/verifikasi status mothballed dan retired unit Pembangkit memenuhi permintaan unit.
5. Memberikan layanan konsultasi bagi manajemen.
6. Melaksanakan kegiatan *quality assurance* fungsi SPI yang terdiri dari *checklist on going review* dan penilaian kualitas LHA

PLN menggunakan audit berbasis risiko (*risk-based internal audit*) sebagai metode yang dilakukan sejak tahun 2015. Tahun 2021, SPI memiliki jumlah audit universe sebanyak 480 yang terdiri dari 50 direktorat/satuan Kantor Pusat, 49 unit induk, 19 anak perusahaan dan 362 unit pelaksana yang ditangani oleh 6 Inspektorat Audit, 1 Inspektorat Audit

Implementation of SPI Duties in 2021

SPI has performed the following audit throughout 2021:

1. Operational audits and in-depth audits on operational results.
2. Special audits on Whistleblowing System (WBS).
3. Special audit and other assignments from Board of Commissioners, Board of Directors, Divisions/Units and Parent/Implementing Units.
4. Performed sample test for ATTB and PRR write-offs and audit/verification of status of mothballed and retired power plants as requested by units.
5. Provided consultancy services to Management.
6. Performed quality assurance of SPI functions consisting of checklist ongoing review and LHA quality assessment

PLN uses a risk-based internal audit as a method that has been carried out since 2015. By 2021, SPI has a total audit universe of 480 consisting of 50 directorates/head office units, 49 parent units, 19 subsidiaries and 362 units. executives handled by 6 Audit Inspectorates, 1 Special Audit Inspectorate, 12 Audit Group Heads, 2 Special Audit

Khusus, 12 *Group Head* Bidang Audit, 2 Group Head Audit Khusus dan 1 *Group Head TI*. Dengan demikian, jumlah *audit universe* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan adanya perubahan organisasi PLN sebagai mana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Group Heads and 1 IT Group Head. Thus, the number of audit universes decreased from the previous year due to changes in the PLN organization as described in the following table:

No	Audit Universe	2018	2019	2020	2021
1	Direktorat / Directorate	35	41	70	50
2	Unit Induk / Parent Unit	56	56	56	49
3	Unit Pelaksana / Executing Unit	359	373	381	362
4	Anak Perusahaan / Subsidiaries	18	19	19	19
Jumlah / Total		**468**	**491**	**526**	**480**

Rencana Pemeriksaan Operasional (RPO) pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 43,71% dibandingkan tahun sebelumnya. RPO tersebut meliputi pemeriksaan operasional sebanyak 27 kali di direktorat/satuan PLN Pusat, 49 kali di unit induk, 150 kali di unit pelaksana dan 11 kali di anak perusahaan.

In 2021, the Company decreased its Operational Audit Plan (RPO) by 43.71% compared to the previous year. The RPO covers 27 operational audits on directorates/units in PLN Head Office, 49 in parent units, 150 in executing units and 11 in subsidiaries.

Pemeriksaan Operasional 2021

SPI melaporkan realisasi pemeriksaan tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020, yaitu Audit audit *Whistle Blowing* sebesar 60%.

Operational Audit in 2021

SPI reported an increase in audit realization in 2021 compared to 2020, namely audit on Whistleblowing of 60%

No	Uraian / *Description*	2018			2019			2020			2021		
		Target	Realisasi / *Realization*		Target	Realisasi / *Realization*		Target	Realisasi / *Realization*		Target	Realisasi / *Realization*	
			Jumlah / *Total*	%		Jumlah / *Total*	%		Jumlah / *Total*	%		Jumlah / *Total*	%
1	Pemeriksaan Operasional / Organizational Checking	474	474	100	482	482	100	421	421	100	237	236	99,58
2	Audit Investigasi / Investigation Audit	40	64	160	40	42	105	Tentative	47	100	Tentative	50	100
3	Uji Petik ATTB/PRR / ATTB/PRR Sampling Tests		66		88	47	53	Tentative	62	100	Tentative	53	100
4	Audit *Whistle Blowing* / Whistleblowing System Audit		42		50	185	370	Tentative	48	100	Tentative	120	100
5	Pemeriksaan Penugasan Khusus & Penugasan Lainnya dari Dekom, Direksi, Divisi/ Satuan dan Unit Induk/ Pelaksana / Special Audit Assignment and Other Assignments from Board of Commissioners, Board of Directors, Divisions/Units, and Parent/Executing Units		204		69	146	212	Tentative	488	100	Tentative	126	100
6	Layanan Konsultasi / Consulting Services		126		671	759	113	293	389	132	Tentative	130	100

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Surat Menteri BUMN Selaku RUPS PT PLN (Persero) tanggal No. 0253.K/DIR/2021 Tanggal 28 Juni 2021, Pemegang Saham menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) untuk tahun buku 2021. Nilai jasa audit ditetapkan sebesar Rp35,05 miliar.

Informasi Akuntan Publik Perusahaan

Jumlah Periode Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Data mengenai kantor akuntan publik dan akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

PUBLIC ACCOUNTANT

Based on the Letter of the Minister of SOEs as General Meeting of Shareholders of PT PLN (Persero) No. 0253.K/DIR/2021 Dated June 28, 2021, Shareholder approved the appointment of Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and PT PLN (Persero) Partnership and Community Development Program for 2021 fiscal year. Audit services fee were set at Rp35.05 billion.

Information on Public Accountants

Periods of Public Accountants and Public Accounting Firms (KAP) in Conducting Annual Financial Statements Audit. Data regarding public accounting firms and public accountants that audited the Company's Financial Statements in the last 5 years are as follows:

Nama / *Name*	**Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm** Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)
Alamat / *Address*	Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA
Objek Audit / *Audit Object*	PT PLN (Persero)
	PT Indonesia Power dan Entitas Anak / PT Indonesia Power and Subsidiary
	PT Haleyora Power dan Entitas Anak / PT Haleyora Power and Subsidiary
	PT PLN Gas dan Geothermal
	PT Pembangkitan Jawa Bali dan Entitas Anak / PT Pembangkitan Jawa Bali and Subsidiary
	PT PLN Batam dan Entitas Anak / PT PLN Batam and Subsidiary
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
	PT PLN Batu Bara dan Entitas Anak / PT PLN Batu Bara and Subsidiary
	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan dan Entitas Anak / PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan and Subsidiary
	PT Indonesia Comnets Plus
	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan Entitas Anak / PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and Subsidiary
	PT Energy Management Indonesia
Biaya Audit / *Audit Fee*	Rp35,05 miliar / Rp35.05 billion
Periode Penugasan / *Assignment Period*	2021

Informasi mengenai kantor akuntan publik dan akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Information on public accounting firms and public accountants that audited the Company's Financial Statements in the last 5 years are as follows:

Tahun / *Year*	Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*	Nama Akuntan / *Accountant Name*	Rincian Jasa KAP / *Details of KAP Services*	Biaya KAP (Rp Miliar) / *KAP Fees (Rp Billion)*
2021	**Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)**	**Yanto**	Audit LK PLN & entitas anak; PKBL / Audit on Financial Statements of PLN & subsidiaries; PKBL	**35,05**
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto	Audit LK PLN & entitas anak; PKBL / Audit on Financial Statements of PLN & subsidiaries; PKBL	27,5
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Dedy Sukrisnadi	Audit LK PLN & entitas anak; PKBL / Audit on Financial Statements of PLN & subsidiaries; PKBL	14,85

Tahun / *Year*	Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*	Nama Akuntan / *Accountant Name*	Rincian Jasa KAP / *Details of KAP Services*	Biaya KAP (Rp Miliar) / *KAP Fees (Rp Billion)*
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Audit LK PLN & entitas anak; PKBL / Audit on Financial Statements of PLN & subsidiaries; PKBL	15,30
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo	Audit LK PLN & entitas anak; PKBL / Audit on Financial Statements of PLN & subsidiaries; PKBL	14,78

MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan

Sebagai tindak lanjut serta pengembangan dari penerapan GRC yang diatur dalam dalam Perdir Nomor 0196.P/DIR/2019 terkait implementasi GRC, Manajemen Risiko di PLN menerapkan prinsip *Four Eyes Principles* (FEP). Implementasi FEP bertujuan untuk menciptakan skema *check & balances* dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan karena dilakukan minimal oleh 2 orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan dan unit risiko yang independen. Hasil *benchmark* PLN kepada perusahaan lain di industri perbankan yang telah menerapkan prinsip FEP menunjukkan bahwa *proses check & balances* yang diimplementasikan melalui FEP efektif untuk memastikan bahwa *return & risk* berjalan secara optimal.

RISK MANAGEMENT

Policy

As a follow-up and development of GRC implementation regulated in Perdir Number 0196.P/DIR/2019 regarding Risk Management, GRC implementation at PLN, the Company applies the Four Eyes Principles (FEP). FEP aims to create a check & balance scheme in the Company's strategic decision-making process because it is carried out by at least 2 officers, each from an independent business unit and risk unit. The results of PLN's benchmarking with other companies in banking industry that have implemented FEP show that check & balance process through FEP is effective to ensure an optimal returns & risks process.

Profil SEVP Manajemen Risiko

SEVP Risk Management Profile

CHAIRANI RACHMATULLAH

SEVP Manajemen Risiko
SEVP Risk Management

Usia / *Age*	52 tahun / years old
Domisili / *Domicile*	Jakarta
Kewarganegaraan / *Citizenship*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• S1 Sipil Universitas Sriwijaya / Bachelor of Civil Engineering, Universitas Sriwijaya • S2 Sipil Universitas Indonesia / Master of Civil Engineering, Universitas Indoneisa • S2 Energy Studies The University of Melbourne / Master of Energi Studies, the University of Melbourned
Sertifikasi Profesi / *Professional Certification*	• Insinyur Profesional Utama (IPU) / Lead Professional Engineer • Qualified Risk Governance Professional (QRGP) • PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager • Gold certification in A2E Finance and Performance Management (McKinsey & Company)
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• Executive Vice President Gas dan BBM (2015 - 2019) / Executive Vice President Gas and Fuel (2015 - 2019) • Komisaris Utama PT PLN Gas & Geothermal (2016 - 2019) / Commissioner of PT PLN Gas & Geothermal (2016 - 2019) • Senior Executive Vice President Manajemen Risiko PT PLN (Persero) (2021 - sekarang) / Senior Executive Vice President Management PT PLN (Persero) Risk (2021 - present) • Wakil Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (2020 - sekarang) / Vice Chairman General Indonesian Electricity Society (2020 - present) • Ketua Srikandi PLN (2021 - sekarang) / Chairman Srikandi PLN (2021 - present)

Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan manapun / Holds no concurrent position in any othe company
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training to Improve Competency*	• Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi - *Qualified Risk Governance Professional* / Education and Training Preparation Exam Risk Management Professional Qualified - Qualified Risk Governance Professional • Gold Certification in A2E Finance and Performance Management (McKinsey & Company) / Gold Certification in A2E Finance and Performance Management (McKinsey & Company) • Seminar Nasional Sertifikasi dan Penyelamatan Aset BUMN dan Daerah serta Launching Modul JAGA PPJ KPK / National Seminar on Certification and Rescue BUMN and Regional Assets and the Launching of the JAGA PPJ KPK Module • Integrated GRC : The Next Level of GCG Implementation / Integrated GRC: The Next Level of GCG Implementation • Pelatihan Manajemen Stratejik untuk Manajer Menengah dan Setara / Training Management strategic for Manager Intermediate and Equivalent • Live Virtual Training Project Procurement And Risk Management (PPM Manajemen) / Live Virtual Training Project Procurement And Risk Management (PPM Manajemen) • Menapaki Perekonomian Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik (*Way Academy*) / Creating A Better Indonesian Economy Through the Application of Risk Management in Public Sector (Way Academy)

Pengambilan Keputusan dan Kegiatan FEP

Decision Making and Activities of FEP

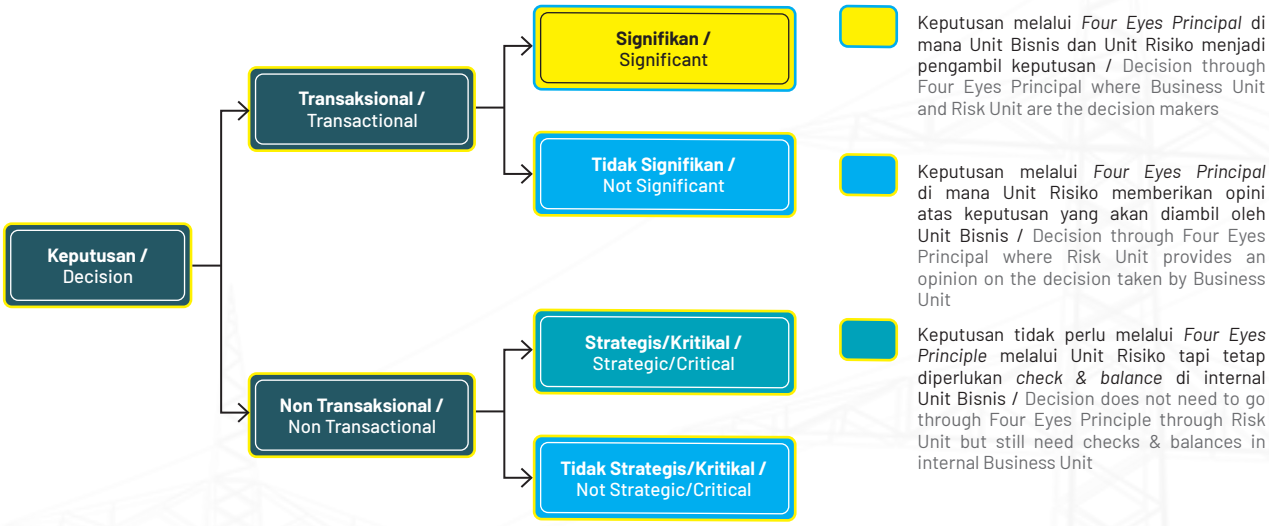

Pengukuran Tingkat Kematangan Implementasi Manajemen Risiko

PLN mengembangkan sistem pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko (*risk management maturity*) berbasis *web* menggunakan aplikasi eRMM. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko baik pada tahapan *on desk assessment* maupun tahapan wawancara.

Aplikasi eRMM mencakup proses penilaian menggunakan kriteria *Maturity Level Risk Management* 2020 berbasis web, proses skoring, serta pemberian umpan balik OFI (*Opportunity for Improvement*) berupa catatan kepada unit induk sebagai objek yang dinilai. Selain itu aplikasi eRMM juga digunakan sebagai dokumentasi eviden sebagai *database* referensi pemenuhan pencapaian tingkat kematangan perusahaan di level unit induk.

Maturity Level Measurement of Risk Management Implementation

PLN developed a web-based risk management maturity level measurement system using the eRMM application. This application is used to measure the maturity level of risk management implementation both at on desk assessment stage and interview stage.

The eRMM application includes an assessment process using web-based Maturity Level Risk Management 2020 criteria, scoring process, and provision of OFI (Opportunity for Improvement) feedback in the form of notes to the assessed parent unit. In addition, the eRMM application is also used as documentary evidence as reference database to fulfill the company maturity levels at parent unit level.

Risk Maturity Management

PLN menerapkan Risk Management Maturity sebagai suatu cara untuk mengetahui kondisi penerapan manajemen risiko di organisasi dengan melakukan proses pembandingan kondisi lapangan dengan ukuran-ukuran tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Penerapan Risk Management Maturity ini bertujuan untuk:

1. Mengenali kelemahan dan kekuatan organisasi dalam penerapan manajemen risiko
2. Mendapatkan praktik terbaik manajemen risiko di organisasi
3. Mendapatkan manfaat terbaik dari manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi
4. Untuk membuat program kerja unit dan organisasi yang sudah mempertimbangkan risiko
5. Sebagai panduan pembuatan *roadmap* pengembangan manajemen risiko organisasi
6. Kepatuhan terhadap aturan internal dan eksternal
7. Untuk mendapatkan pengakuan dari pihak tertentu baik internal maupun eksternal

Risk Maturity Management

PLN applies Risk Maturity Management as a means to understand risk management implementation conditions in the organization by comparing field conditions to certain predetermined measurements. The implementation of Risk Maturity Management aims:

1. To recognize organizational weaknesses and strengths in implementing risk management
2. To obtain risk management best practices in the organization
3. To obtain the best benefits from risk management in achieving organizational goals
4. To create work programs for units and organizations that have considered risks
5. To serve as a guide for preparing organizational risk management development roadmap
6. To comply with internal and external rules
7. To get recognition from certain parties, both internal and External

Risiko Utama PLN

PLN melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko korporat dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi secara periodik. Profil risiko tersebut meliputi laporan pengelolaan risiko strategis, keuangan, operasional dan proyek, serta penilaian atas perbaikan kontrol dan upaya penanganan risiko. Risiko-risiko utama yang dihadapi PLN pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Key Risks of PLN

PLN evaluates the effectiveness of the corporate risk management system and periodically submits risk profile report to the Board of Directors. The risk profile includes reports on strategic, financial, operational and project risk management, as well as an assessment of risk control and management improvements. The key risks faced by PLN in 2021 are as follows:

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
1	Operasional / Operational	*Oversupply* Ketersediaan Tenaga Listrik / Oversupply of Electricity Availability	1. Melakukan Pemantauan dan evaluasi realisasi pertumbuhan beban dan melakukan penyesuaian terhadap RUPTL; / Monitoring and evaluation on the realization growth load and do adjustment against RUPTL; 2. Memastikan setiap usulan investasi didukung oleh dokumen *Feasibility Study* (FS) yang komprehensif; / Ensure every proposal investment supported by a comprehensive feasibility study (FS) document; 3. Penajaman RJPP dengan pendekatan *centralized planning* / Sharpening of RJPP with centralized planning approach 4. Memastikan bahwa perhitungan estimasi *Reserve Margin* menggunakan parameter-parameter yang riil dan *forward looking*; / Ensure that calculation Reserve Margin estimation uses real and forward looking parameter; 5. *Rescheduling* COD proyek menyesuaikan realisasi pertumbuhan beban; / Project COD rescheduling adapt realization growth load; 6. Melakukan konsultasi kontrak IPP yang kemungkinan besar tidak terserap dan menimbulkan penalti *Take-or-pay* misalnya terkait dengan proyek transmisi yang terlambat dll; / Carry out consultation of IPP contracts with possibility of not being absorbed and causing take-or-pay penalty, such as matters related with project late transmission, etc; 7. Melakukan *Aggresive Marketing* dan pengembangan produk untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik; / Carry out Aggressive Marketing and Development product of products to improve electricity sales; 8. Peningkatan koordinasi dan pengawasan yang lebih ketat pada proses konstruksi yang saling terkait; / Enhancement more coordination and supervision on the interlocking construction process related; 9. Memastikan pengendalian dan integritas data dan parameter proyek termasuk aktivitas pelaksanaan proyek, mulai dari fase inisiasi sampai dengan proyek selesai, guna memastikan fungsi-fungsi yang terkait dalam pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana Roadmap Implementasi RUPTL dan memastikan seluruh BPO (*Business Process Owner*) memahami dan menjalankan fungsi sesuai jadwal yang telah disusun di dalam roadmap implementasi RUPTL dengan tetap mengacu pada *financial sustainability* perusahaan; / Ensure control and integrity of project data and parameters including activity implementation project , start from phase initiation until with project done , use ensure related functions _ in implementation project could walk in accordance with RUPTL Implementation Roadmap plan and ensure all BPO (Business Process Owner) understand and run function in accordance schedule that has been compiled in the RUPTL implementation roadmap with permanent refers to the company 's financial sustainability; 10. Memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek penyaluran yang terkait dengan proyek-proyek pembangkit; / Prioritize completion of projects related distribution with power plant projects generator; 11. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan *stakeholder* untuk mengevaluasi terkait penugasan pemerintah. / Coordinate with government and stakeholders to evaluate related assignment government.

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
2	Operasional / Operational	Pembangkit PLN Kalah Merit *Order* / Lost Merit Order of PLN Power Plant	1. Memastikan pencapaian performa pembangkit dengan terus melakukan *improvement* melalui integrasi penerapan metode manajemen yang sudah berjalan di PLN seperti Manajemen Risiko, OPI dan 4DX; / Ensure the achievement of power plant performance by continuing to make improvements through the integration of the implementation of management methods that are already running at PLN such as Risk Management, OPI and 4DX; 2. Memastikan peningkatan kinerja proses bisnis pembangkitan melalui implementasi Manajemen Aset Pembangkitan (MAP) serta peningkatan *Maturity Level* tata kelola pembangkit bagi unit yang sudah melaksanakan MAP sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan; / Ensure the improvement of the power generation business process performance through the implementation of Generation Asset Management (MAP) as well as increasing the Maturity Level of power plant management for units that have implemented the MAP in accordance with the established roadmap; 3. Melakukan strategic partnerships terutama dalam pengelolaan pembangkit yang mempunyai keandalan yang rendah/rawan gangguan; / Conduct strategic partnerships, especially in the management of power plants that have low reliability/prone to disturbances; 4. Percepatan penyelesaian penyempurnaan infrastruktur pendukung pembangkit seperti *Jetty, Coal and Ash Handling System, Dome Coal yard, intake, water way*, infrastruktur gas dan sebagainya; / Acceleration of completion of the completion of power plant supporting infrastructure such as Jetty, Coal and Ash Handling System, Dome Coal yard, intake, water way, gas infrastructure and so on; 5. Melaksanakan program kerja untuk meningkatkan kinerja pembangkit PLTU FTP di antaranya penggantian material *non-standard*, penyempurnaan sistem-sistem, penyediaan sistem redundant untuk peralatan kritikal, penyediaan strategic part dan optimasi kegiatan O&M; / Implement work programs to improve the performance of PLTU FTP generators, including replacement of non-standard materials, improvement of systems, provision of redundant systems for critical equipment, provision of strategic parts and optimization of O&M activities; 6. Memastikan berjalannya tindak lanjut pelaksanaan risk rating di setiap unit pembangkit dan memastikan unit dapat melaksanakan asesmen mandiri *risk rating*; / Ensure the follow-up to the risk rating implementation in each generating unit and ensuring that the unit can carry out an independent risk rating assessment; 7. Melaksanakan *joint inventory* peralatan *critical* pembangkit; / Carry out joint inventory of critical generator equipment; 8. Memastikan pemantauan peralatan emisi gas buang berfungsi dengan baik dan emisi yang dikeluarkan tidak melewati ambang batas; / Ensure that the exhaust gas emission monitoring equipment is functioning properly and that the emissions released do not exceed the threshold; 9. Menetapkan kebijakan pembebanan komponen infrastruktur gas sebagai komponen A pembangkit (infrastruktur gas dicatat sebagai aset PLN, sehingga pola pengadaan bersifat EPC atau BOT); / Issue a policy for charging gas infrastructure components as component A of generators (gas infrastructure is recorded as PLN's assets, so that the procurement pattern is EPC or BOT); 10. Melakukan konsultasi IPP eksisting dan yang sudah PPA terkait klausul *Take-or-pay*. / Consult existing and PPA IPPs regarding the Take-or-pay clause.
3	Operasional / Operational	Hambatan pada Pengelolaan Pasokan Gas / Challenges in Gas Supply Management	1. Alokasi gas secara multidestinasi; / Multi-destination gas allocation; 2. Optimalisasi peran Anak Perusahaan untuk masuk ke bisnis midstream Gas; / Optimize the role of Subsidiaries to enter the midstream Gas business; 3. Memanfaatkan potensi *Floating Storage and Regasification Unit* atau FSRU; / Utilize the potential of the Floating Storage and Regasification Unit or FSRU; 4. Pengembangan infrastruktur LNG dan CNG untuk PLTG/PLTGU di PLN; / Development of LNG and CNG infrastructure for PLTG/PLTGU at PLN; 5. Merencanakan alternatif pasokan melalui pembangkit teknologi *dual fuel*; / Plan alternative supply through dual fuel technology generators; 6. Memanfaatkan potensi pembelian LNG spot di pasaran; / Take advantage of the potential for spot LNG purchases on the market; 7. Berkoordinasi dengan Pemerintah (SKK Migas, BPH Migas, Dirjen Migas dan KESDM) agar PLN mendapatkan harga dan volume yang wajar baik untuk perpanjangan kontrak eksisting maupun kontrak baru; / Coordinate with the Government (SKK Migas, BPH Migas, Director General of Oil and Gas and MEMR) so that PLN gets a reasonable price and volume for both the extension of existing contracts and new contracts; 8. Merencanakan alternatif suplai bahan bakar lain (BBM) apabila terjadi kekurangan pasokan gas; / Plan alternative supply of other fuels (BBM) in the event of a gas supply shortage; 9. Meningkatkan keakurasian perencanaan; / Improve planning accuracy; 10. Menyiapkan skenario untuk meminimalkan pengenaan TOP dan memastikan penyerapan gas *make up* dan *make up cargo* berjalan optimal. / Prepare scenarios to minimize the imposition of TOP and ensure optimal absorption of make-up gas and make-up cargo.

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
4	Operasional / Operational	Pasokan Batubara di Bawah Batas *Minimum Requirement* / Coal Supplies Below the Minimum Requirement	1. Melaksanakan kontrak dengan multipemasok; / Execute contracts with multiple suppliers; 2. Optimasi pasokan batubara yang berasal dari pasokan sekitar pembangkit; / Optimize the supply of coal from supply around the power plant; 3. Penerapan *co-firing* batubara PLTU untuk unit pembangkit yang sudah siap; / Application of PLTU coal cofiring for ready-made generating units; 4. Mengusulkan agar kebijakan penetapan DMO diberlakukan bulanan (bukan per tahun) dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tambang yang disetujui ESDM; / Propose that the policy for determining the DMO is applied monthly (not annually) by referring to the Mining Work Plan and Budget (RKAB) approved by the ESDM; 5. Meminta dukungan pemerintah untuk menjaga pasokan batubara ke PLN dalam bentuk dukungan kebijakan/ regulasi termasuk sanksi yang proporsional atas pelanggaran pemenuhan DMO; / Request government support to maintain coal supply to PLN in the form of policy/regulatory support including proportional sanctions for violations of DMO compliance; 6. Menerapkan klausul minimum pasokan dalam PJBB dengan pemasok; / Implement a minimum supply clause in the PJBB with suppliers; 7. Membangun sistem informasi rantai pasok batubara terintegrasi mulai dari proses *loading*, pengangkutan sampai penerimaan termasuk prakiraan cuaca secara *real time*; / Build an integrated coal supply chain information system starting from the loading, transportation to receiving process including real time weather forecasts; 8. Membangun sistem IT untuk administrasi dokumen pembayaran pemasok, sehingga progres setiap tahapan proses dapat ditelusuri untuk mempercepat durasi pembayaran kepada pemasok (setiap tahapan proses ditetapkan *Service Level Agreement*); / Build an IT system for administration of supplier payment documents, so that the progress of each stage of the process can be tracked to speed up the duration of payments to suppliers (each stage of the process is set by a Service Level Agreement); 9. Melakukan *market intelligence* harga pasar batubara untuk menyusun strategi SCM terbaik; / Conduct market intelligence on coal market prices to develop the best SCM strategy; 10. Memberikan penalti yang proporsional kepada pemasok yang tidak memenuhi minimum pasokan dalam PJBB; / Provide a proportional penalty to suppliers who do not meet the minimum supply in the PJBB; 11. Berkoordinasi rutin dengan Ditjen Minerba untuk memonitor progres pemenuhan kewajiban DMO para pemasok; / Coordinate regularly with the Directorate General of Mineral and Coal to monitor the progress of fulfilling the DMO obligations of suppliers; 12. Melakukan evaluasi terhadap aturan batasan stok rata-rata batubara konsolidasi Perdir 0041.P/DIR/2016 tentang Pedoman Manajemen Batubara Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) yang mengacu pada EOQ, jarak, faktor eksternal (cuaca, kondisi pasar) dan faktor lainnya; / Evaluate the rules for limiting the average stock of consolidated coal Perdir 0041.P/DIR/2016 concerning Guidelines for Management of Coal Power Plants within PT PLN (Persero) which refers to EOQ, distance, external factors (weather, market conditions) and other factors other; 13. Melakukan pengembangan *coal terminal* (*coal processing plant*); / Develop a coal terminal (coal processing plant); 14. Meminta dukungan pemerintah agar PLN melalui PLN BB mendapatkan IUP OP tambang batubara eks PKP2B atau akuisisi tambang yang didedikasikan untuk mengamankan pasokan bagi kebutuhan kelistrikan nasional; / Request government support so that PLN through PLN BB obtain IUP OP for ex-PKP2B coal mines or mine acquisitions dedicated to securing supplies for national electricity needs; 15. Melaksanakan kontrak *spot* batubara; / Execute coal spot contracts; 16. Memastikan ketersediaan pasokan Gas dan BBM untuk operasional pembangkit cadangan; / Ensure the availability of gas and fuel supplies for backup generator operations; 17. Mengenakan sanksi denda sesuai Perjanjian yang berlaku. / Impose fines in accordance with the applicable agreement.
5	Proyek / Project	Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangkit, Transmisi dan GI / Delay in the Completion of Transmission and GI Power Plant Projects	1. Kolaborasi antara Unit Induk Pembangunan dengan Unit Operasi untuk pengurusan izin dan pengadaan lahan; / Collaboration between the Main Development Unit and the Operations Unit for permit processing and land acquisition; 2. Melakukan pembinaan hubungan dengan *stakeholder* yang memiliki peran dan dampak terhadap proses perizinan dan pembebasan lahan; / Develop relationships with stakeholders who have a role and impact on the licensing and land acquisition process; 3. Melakukan *review* prioritisasi proyek pembangkit, transmisi dan Gardu induk (skala Nasional dan masing-masing UIP) untuk memastikan proyek-proyek yang akan dikerjakan adalah proyek yang paling strategis dan berdampak besar bagi perusahaan; / Review the prioritization of power generation, transmission and substation projects (national scale and each UIP) to ensure that the projects to be undertaken are the most strategic projects and have a major impact on the company; 4. Meninjau ulang Kontrak kinerja menyesuaikan dengan prioritas proyek yang telah disusun; / Review the performance contract according to the project priorities that have been prepared; 5. Menghitung kemampuan eksekusi PLN dan masing-masing PLN UIP serta kebutuhan kontraktor untuk pekerjaan Pembangkit, Transmisi dan GI berdasarkan hasil DPT SUTET dan SUTT yang telah dirilis oleh Direktorat Perencanaan; / Calculate the execution capability of PLN and each PLN UIP as well as contractor needs for Generating, Transmission and GI work based on the results of DPT SUTET and SUTT which have been released by the Planning Directorate; 6. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pembangkit, transmisi dan GI sesuai urutan prioritas yang telah disusun; / Carry out the construction work of generators, transmissions and substations according to the order of priorities that have been prepared; 7. Meninjau kembali efektivitas kontrak material terpusat; / Review the effectiveness of centralized material contracts; 8. Menerbitkan kebijakan prosedur pengambilalihan pekerjaan oleh Anak Perusahaan untuk proyek yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor; / Issue a policy on procedures for taking over work by Subsidiaries for projects that cannot be completed by contractors; 9. Mendorong tumbuhnya calon penyedia barang/jasa untuk mampu melaksanakan pekerjaan Transmisi dan GI sesuai persyaratan DPT; / Encourage the growth of prospective providers of goods/services to be able to carry out Transmission and GI work in accordance with DPT requirements; 10. Mencantumkan *Credit Line* sebagai salah satu syarat peserta lelang; / Include a Credit Line as one of the requirements for bidders; 11. Melakukan *re-routing*/*redesign* jalur transmisi dengan menggunakan analisis yang akurat; / Perform rerouting/ redesign of transmission lines using accurate analysis; 12. Menyelesaikan *dispute* kontrak melalui mediasi dengan arbitrase/ BPKP; / Resolve contract disputes through mediation with arbitration/BPKP; 13. Konsultasi dengan pengembang IPP terkait COD Pembangkit. / Consultation with the IPP developer regarding the Generator COD.

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
6	Operasional / Operational	Keterlambatan *Supply* MDU dan MTU / Delays in the MDU and MTU Supply	1. Membangun Modul sistem *demand forecast digital procurement*; / Build a digital procurement demand forecast system module; 2. Berkoordinasi dengan unit untuk penetapan ROP (*Re-Order Point*) dan ROQ (*Re-Order Quantity*) di setiap unit; / Coordinate with units to determine ROP (Re-Order Point) and ROQ (Re-Order Quantity) in each unit; 3. Koordinasi terkait kebutuhan Material dengan mempertimbangkan faktor cuaca; / Coordination related to material needs by considering weather factors; 4. Mengevaluasi kebutuhan peralatan uji dan SDM yang dibutuhkan untuk memaksimalkan proses pengujian material; / Evaluate the need for test equipment and human resources needed to maximize the material testing process; 5. Memberikan masukan terhadap metodologi pengujian khususnya jumlah *sampling* ke Pusertif; / Provide input on the testing methodology, especially the number of samplings to the Pusertif; 6. Melakukan *update* DPT berdasarkan kinerja vendor/pabrikan; / Update DPT based on vendor/manufacturer performance; 7. Memperbaiki perencanaan material dari unit melalui penetapan ROP dan ROQ memungkinkan dapat memberikan kepastian skema kontrak yang mampu menarik vendor-vendor *qualified*; / Improve the material planning of the unit through the determination of ROP and ROQ allows it to provide certainty of contract schemes that are able to attract qualified vendors; 8. Melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan; / Evaluate the procurement process; 9. Memperkuat dasar perhitungan HPS sehingga lebih *marketable*; / Strengthen the basis for calculating HPS so that it is more marketable; 10. Optimalisasi fungsi logistik (termasuk gudang) di DIVMRP; / Optimization of logistics function (including warehouse) in DIVMRP; 11. SPM dibuat per *item*, bukan berdasarkan range; / SPM is made per item, not based on a range; 12. Melakukan *updating e-catalog* PLN; / Update the PLN e-catalog; 13. Meminta Pabrikan menyerahkan dokumen kapasitas produksi dan volume pasok; / Request the Manufacturer to submit documents of production capacity and supply volume; 14. Melakukan koordinasi kebutuhan material MTU dan MDU terkait program-program unggulan PLN; / Coordinate the need for MTU and MDU materials related to PLN's flagship programs; 15. Rencana pemantauan *progress* MTU di aplikasi PMO; / MTU progress monitoring plan in the PMO application; 16. Koordinasi dari PLN kepada Penyedia barang/jasa terkait *supply* dan *demand* material/jasa minimal sekali dalam setahun; / Coordination from PLN to providers of goods/services related to supply and demand for materials/services at least once a year; 17. Melakukan Pemantauan dan *Controlling* terhadap unit-unit binaan untuk penerapan SK 717 khususnya ROP (stok Minimum) dan Stok Max. / Carry out Monitoring and Controlling on the assisted units for the implementation of SK 717, especially ROP (Minimum stock) and Max Stock.
7	Operasional / Operational	Blackout pada Sistem Ketenagalistrikan / Blackout in Electricity System	1. Pengaturan pola pengoperasian dan pemeliharaan SCADA, komunikasi, dan *backup power supply*; / Set the pattern of operation and maintenance of SCADA, communication, and backup power supply; 2. *Review* dan penyesuaian defense scheme sesuai kondisi operasi terbaru, termasuk penerapan *smart defense system/smart* UFR; / Review and adjust the defense scheme according to the latest operating conditions, including the implementation of the smart defense system/smart UFR; 3. Memastikan pengujian fungsi untuk pemulihan (*synchro check relay* di GI, *house load, blackstart*, dan *line charging*) telah dilaksanakan dan berfungsi normal; / Ensure that function tests for recovery (synchro check relay at GI, house load, blackstart, and line charging) have been carried out and function normally; 4. Memastikan aturan jaringan (*gridcode*) dipatuhi oleh semua pembangkit; / Ensure network rules (gridcode) are complied with by all generators; 5. Memonitor pengaktifan sistem *governor free* pada pembangkit; / Monitor the activation of the governor free system at the generator; 6. Negosiasi dengan pembangkit IPP eksisting agar mengaktifkan AGC sesuai *gridcode*; / Negotiations with existing IPP generators to activate AGC according to the grid code; 7. Mempertegas klausul kepatuhan terhadap *gridcode* untuk pengadaan pembangkit IPP baru; / Reinforce the compliance clause with the gridcode for the procurement of new IPP generators; 8. Mendorong usulan *gridcode* yang baru agar segera disahkan; / Encourage the proposed new gridcode to be immediately ratified; 9. Melakukan prioritasi untuk kebutuhan pemeliharaan korektif maupun program investasi di pembangkit, transmisi, dan GI; / Prioritize the need for corrective maintenance and investment programs in generators, transmissions, and substations; 10. Meningkatkan kualitas pemeliharaan rutin dan prediktif pembangkit, transmisi, dan GI; / Improve the quality of routine and predictive maintenance of generators, transmissions, and substations; 11. Menjalankan kebijakan *joint inventory* untuk peralatan pembangkit, transmisi, dan GI; / Implement a joint inventory policy for generator, transmission, and GI equipment; 12. Melakukan *manual load shedding*; / Perform manual load shedding; 13. Melaksanakan SOP Pemulihan terintegrasi; / Implement an integrated Recovery SOP; 14. Menggunakan radio *broadcast* untuk mempercepat pemulihan *system*; / Use radio broadcasts to speed up system recovery; 15. Regulasi terkait pemeliharaan ROW di lokasi yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. / Regulations related to the maintenance of ROW in locations managed by the Ministry of Forestry.
8	Strategis / Strategic	Pengembangan Sumber Daya EBT Tidak Memenuhi Target / Development of NRE Resources Not Meeting the Target	1. Memastikan perencanaan, penyusunan, evaluasi kebijakan dan strategi pengembangan EBT dengan internal dan stakeholder terkait khususnya pengembangan serta kerja sama kemitraan; / Ensure the planning, preparation, evaluation of NRE development policies and strategies with internal and relevant stakeholders, especially the development and cooperation of partnerships; 2. Mendorong Pemerintah untuk menerbitkan peraturan terkait harga biomassa sesuai keekonomian dan kontrak jangka Panjang; / Encourage the Government to issue regulations related to economic biomass prices and long-term contracts; 3. Melaksanakan konversi PLTD menjadi PLT EBT; / Carry out the conversion of PLTD to PLT EBT; 4. Melakukan Pengembangan PLTS di Lokasi ex-tambang; / Develop PLTS in ex-mining locations; 5. Pengembangan PLTS terapung skala besar; / Development of large-scale floating solar power plant; 6. Melaksanakan implementasi *co-firing* dengan PLTU biomass; / Implement co-firing with PLTU biomass; 7. Pengembangan PLTM dengan memanfaatkan bendungan milik Kementerian PUPR; / Development of PLTM by utilizing the dam owned by the Ministry of PUPR; 8. Pengembangan PLTA skala besar; / Development of large-scale hydropower; 9. Pengembangan kawasan industri dengan pasokan energi hidro/PLTA; / Development of industrial estates with hydro/hydropower supply; 10. Pengembangan WKP milik PLN dan pengembangan geothermal lainya yang sinergi dengan BUMN; / Development of PLN's WKP and other geothermal developments in synergy with SOEs; 11. Peningkatan penjualan dan pendapatan dengan mengoptimalkan energi terbarukan melalui penawaran produk REC (*Renweable Energy Certificate*); / Increase sales and revenue by optimizing renewable energy through product offerings REC (Renweable Energy Certificate); 12. Mengoptimalkan pengoperasian PLTU *co-firing*; / Optimize the operation of PLTU co-firing; 13. Melakukan pemantauan BPP pembangkit IPP EBT dan *Availibility Factor Actual* (AFa) pembangkit IPP EBT; / Monitor the BPP for IPP EBT and Availability Factor Actual (AFa) for IPP EBT; 14. Meminta dukungan Pemerintah terkait kompensasi atas *Feed InTariff* (FIT) pengembangan EBT. / Request Government support regarding compensation for Feed InTariff (FIT) development of NRE.

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
9	Strategis / Strategic	Kemampuan Sistem Teknologi Informasi Kurang Memadai / Lack of Information Technology System Capability	1. Melakukan penyelarasan dan pemutakhiran ITMP 2021 – 2024; / Align and update ITMP 2021 – 2024; 2. Perencanaan *Single Source of Truth* (SSoT) di tahun 2021; / Plan for Single Source of Truth (SSoT) in 2021; 3. Terimplementasinya *Big Data Analytic* untuk *dashboard performance management* korporat sebagai penyempurnaan *dashboard* CWR; / Implementation of Big Data Analytic for the corporate performance management dashboard as a refinement of the CWR dashboard; 4. Transformasi digital peluncuran solusi digital dan teknologi pendukung (Pengembangan aplikasi New PLN Mobile); / Digital transformation, launching of digital solutions and supporting technology (Development of New PLN Mobile application); 5. Implementasi *Billing & Collection*; / Implementation of Billing & Collection; 6. *Dashboard* MDMS dan Fitur Penarikan Data Uji *Interoperbility* HES pabrikan untuk *Proof of Concept*; / MDMS Dashboard and Manufacturer HES Interoperability Test Data Retrieval Feature for Proof of Concept; 7. Perencanaan *reengineering core* aplikasi CRM; / CRM application on core reengineering planning; 8. Optimalisasi IT Service Continuity Plan (pengembangan tools ITSM untuk peningkatan operasional layanan TI); / Optimization of IT Service Continuity Plan (development of ITSM tools to improve IT service operations); 9. Sosialisasi keamanan TI secara periodik; / Periodic IT security dissemination; 10. Implementasi previlege *access management* (*user admin*); / Implementation of privilege access management (user admin); 11. *Review User* untuk SAP dan Pelayanan Pelanggan; / User Review for SAP and Customer Service; 12. Peningkatan *Maturity Level Information Technology* (COBIT 5); / Increase Maturity Level Information Technology (COBIT 5); 13. Pembentukan tim *community of practice* untuk mendukung pencapaian program strategis DIVSTI dan peningkatan kompetensi; / Establishment of a community of practice team to support the achievement of the DIVSTI strategic program and increase competence; 14. Penguatan *Security Data Center* dan WAN; / Strengthen Data Center and WAN Security; 15. Penyelesaian pembangunan jaringan fiber optik *dedicated* untuk sistem operasi Jawa Bali; / Completion of the construction of a dedicated fiber optic network for the Java Bali operating system; 16. Peremajaan *Hardware* dan Migrasi *Software* P2APST; / Hardware Upgrades and Software Migration of P2APST; 17. Perencanaan *assesment security* menggunakan konsultan untuk menganalisa *gap analysis* kondisi *as-is* dan *to-be* yang lebih akurat; / Plan a security assessment using consultants to analyze gap analysis for more accurate as-is and to-be conditions; 18. Melakukan kerja sama secara aktif dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara); / Actively cooperate with BSSN (National Cyber and Crypto Agency); 19. Perencanaan *improvement* sistem *security* untuk akses publik. / Plan security system improvement for public access.
10	Strategis / Strategic	Reputasi Perusahaan Menurun / Decline in the Company's Reputation	1. Menerapkan *framework* penggunaan capex berdasarkan prioritas dan profitabilitas; / Implement a framework for using capex based on priorities and profitability; 2. Mengurangi dominasi valas dalam *debt structure*; / Reduce the dominance of foreign exchange in the debt structure; 3. Memprioritaskan layanan pasang baru dengan mempertimbangkan analisa *cost/benefit*; / Prioritize new installation services by considering cost/benefit analysis; 4. Mengoptimalkan *Digital Platform* dalam memberikan layanan kepada pelanggan terkait permintaan layanan, pengajuan komplain, informasi produk dan pemutakhiran big data; / Optimize the Digital Platform in providing services to customers regarding service requests, filing complaints, product information and updating big data; 5. Menjalankan program *breakthrough* (BT) "*Outage Management*"; / Run the breakthrough program (BT) "Outage Management"; 6. Meningkatkan *stakeholder management*, misalnya dengan Kementerian Keuangan terkait ketepatan alokasi dan kelancaran pencairan subsidi atau kompensasi maupun koordinasi dengan stakeholder lainnya; / Improve stakeholder management, for example with the Ministry of Finance regarding the accuracy of allocation and smooth disbursement of subsidies or compensation as well as coordination with other stakeholders; 7. Menyusun SOP terkait penerapan TJSL sesuai pedoman/regulasi yang berlaku; / Prepare SOPs related to the implementation of TJSL in accordance with applicable guidelines/regulations; 8. Menyusun strategi perencanaan program TJSL untuk mendukung Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Perusahaan, melalui program-program CSR yang strategis dan mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan; / Develop a strategy for planning the CSR program to support the achievement of the Company's Sustainable Development, through strategic CSR programs that are able to support the improvement of the company's performance; 9. Melaporkan tindak penipuan yang mengatasnamakan PLN kepada aparat penegak hukum; / Report fraudulent acts on behalf of PLN to law enforcement officers; 10. Melakukan komunikasi intensif kepada *stakeholder* secara pro aktif dan tepat sasaran yang terkait isu-isu strategis yang berdampak signifikan terhadap turunnya reputasi perusahaan; / Conduct intensive communication with stakeholders in a proactive and targeted manner related to strategic issues that have a significant impact on the decline of the company's reputation; 11. Melakukan upaya hukum maksimal dalam menghadapi tuntutan hukum dari investor, pemasok atau pelanggan/masyarakat; / Carry out maximum legal efforts in dealing with lawsuits from investors, suppliers or customers/society; 12. Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang dapat menurunkan reputasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; / Provide strict sanctions for violations of employee discipline that can reduce the company's reputation in accordance with applicable regulations;

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
11	Operasional / Operational	Pertumbuhan Konsumsi Tenaga Listrik di Bawah Target / Electricity Growth Below the Target	1. Mengoptimalkan strategi intensifikasi pemakaian energi listrik pada pelanggan eksisting dan mempertahankan pelanggan eksisting; / Optimize the strategy of intensifying the use of electrical energy for existing customers and retaining existing customers; 2. Meningkatkan Strategi Ekstensifikasi kWh jual maupun pendapatan penjualan dengan melakukan penambahan pelanggan baru termasuk mengakuisi pelanggan yang memiliki captive power dan dedieselisasi; / Improve the Strategy of Extensification of selling kWh and sales revenue by adding new customers, including acquiring customers with captive power and dedieselization; 3. Peningkatan pelaksanaan pemasaran produk secara agresif dan proaktif; / Increase the implementation of product marketing aggressively and proactively; 4. Mendorong terciptanya produk layanan/ model bisnis melalui sinergi *Total Energy Solution* (SOLID) dengan anak perusahaan; / Encourage the creation of service products/business models through Total Energy Solution (SOLID) synergies with subsidiaries; 5. Mengoptimalkan skema bisnis dan pemasaran digital serta *Renewable Green Energy*; / Optimize business schemes and digital marketing as well as Renewable Green Energy; 6. Mendorong kerja sama dengan *Stakeholder*; / Encourage cooperation with Stakeholders; 7. Strategi perbaikan peringkat kemudahan mendapatkan listrik untuk konsumen bisnis dan industri daya 100-200 kVA (*Easy Getting Electricity*); / Strategy to improve the rating of the ease of obtaining electricity for business consumers and the power industry of 100-200 kVA (Easy Getting Electricity); 8. Me*review* proyeksi pertumbuhan *demand* agar lebih sesuai dengan kondisi terkini dan yang akan datang; / Review demand growth projections so that they are more in line with current and future conditions; 9. Evaluasi terkait program-program yang berjalan terkait kontribusi penjualan tenaga listrik; / Evaluation of ongoing programs related to the contribution of electricity sales; 10. Melakukan kunjungan pelanggan pada segmen Bisnis dan Industri untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dan kepuasan layanan yang telah diberikan oleh PLN, serta dengan mendorong pelanggan untuk memanfaatkan promo diskon tarif LWBP program "Makin Produktif" sehingga dapat meningkatkan produksi Industri; / Conduct customer visits to the Business and Industry segments to obtain information to find out customer needs and satisfaction with the services provided by PLN, as well as by encouraging customers to take advantage of the "More Productive" program LWBP discount rate promos so as to increase Industrial production; 11. Menambahkan target KPI untuk meningkatkan penjualan. / Added KPI targets to increase sales.
12	Strategis / Strategic	Kapasitas dan Kapabilitas *Human Capital* Tidak Selaras dengan Perkembangan Bisnis Ketenagalistrikan / Capacity and Capability of Human Capital not in line with the Electricity Business Development	1. Menyusun Perdir turunan per Direktorat atas Perdir 0162.P/DIR/2021; / Prepare a derivative Perdir per Directorate of Perdir 0162.P/DIR/2021; 2. Mengevaluasi dan menyusun strategi perbaikan *succession planning* dan *talent pool management* perusahaan; / Evaluate and develop strategies for improving the company's succession planning and talent pool management; 3. Menyusun metode perhitungan produktivitas yang mempertimbangkan bobot dan faktor-faktor lingkungan di setiap unit kerja sebagai dasar menghitung kebutuhan SDM secara komprehensif; / Develop a productivity calculation method that takes into account the weights and environmental factors in each work unit as a basis for comprehensively calculating HR needs; 4. Menyusun *career path* (struktural dan fungsional) yang kompetitif serta sistem kompensasi keahlian para SME untuk mendukung perkembangan karir seluruh karyawan PLN; / Develop a competitive career path (structural and functional) and a compensation system for the expertise of SMEs to support the career development of all PLN employees; 5. Me-*review* kebijakan proses analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mendukung rencana strategis perusahaan sampai dengan proses evaluasi; / Review the policy on the process of analyzing the educational and training needs needed to support the company's strategic plans up to the evaluation process; 6. Merancang kebijakan optimalisasi desain analisa kebutuhan pembelajaran yang diselaraskan dengan sistem *career path* pegawai; / Prepare a policy of optimizing the design of learning needs analysis that is aligned with the employee career path system; 7. Penyelarasan Direktori Kompetensi dengan Strategi Perusahaan Ter-*update*; / Alignment of Competency Directory with Updated Company Strategy; 8. Optimalisasi sistem kompensasi dan penghargaan untuk mendorong daya saing perusahaan, menyelaraskan sasaran kerja individu/kelompok dengan sasaran perusahaan, dan untuk mempertahankan pegawai yang memiliki kinerja baik; / Optimize the compensation and reward system to encourage company competitiveness, align individual/group work goals with company goals, and to retain employees who have good performance; 9. Memastikan adanya suatu pendekatan produktivitas yang mempertimbangkan berbagai faktor *input* dan *output* yang terkait baik di Unit maupun Kantor Pusat untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan; / Ensure the existence of a productivity approach that considers various input and output factors related to both the Unit and Head Office to increase the productivity of the Company; 10. Pembenahan sistem informasi untuk mendukung mitigasi risiko kapasitas dan kapabilitas SDM; / Improve the information system to support risk mitigation of human resources capacity and capability; 11. Melaksanakan pemetaan kebutuhan rekrutmen *Pro Hire* yang selaras dengan kebutuhan organisasi, baik dari kebutuhan pemenuhan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan bisnis; / Carry out mapping of Pro Hire recruitment needs that are in line with organizational needs, both from the need to fulfill competence and fulfill business needs; 12. Melaksanakan sinergi dengan *Head Hunter* yang mempunyai kredibilitas yang mempunyai jejaring skala nasional maupun internasional untuk memperkaya *resourcing* kandidat suksesor *Pro Hire* dan *Employer Branding*; / Implement synergies with Head Hunters who have credibility with national and international scale networks to enrich the resourcing of Pro Hire and Employer Branding successor candidates; 13. Mengevaluasi efektivitas hasil rekrutmen *Pro Hire* untuk memastikan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi; / Evaluate the effectiveness of Pro Hire recruitment results to ensure that they are in accordance with the needs of the organization; 14. Memasukkan peningkatan literasi digital dalam LNA. / Include digital literacy enhancement in the LNA;

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
13	Finansial / Financial	Keterbatasan Likuiditas untuk Operasional dan Investasi / Limited Liquidity for Operations and Investments	1. Melanjutkan program pemasaran aktif, mendorong terciptanya *demand* / model bisnis baru, serta menggali potensi penerimaan lain dengan sinergi PLN Grup; / Continue active marketing programs, encouraging the creation of new demand / business models, as well as exploring other revenue potentials with the synergy of the PLN Group; 2. Meningkatkan *stakeholder management*, antara lain untuk memastikan *Automatic Tariff Adjustment* (ATA) dan pembayaran kompensasi, merekomendasikan *revenue* model yang berkelanjutan, menggantikan PSO margin model (misalnya model PBR), atau merekomendasikan perubahan pada model subsidi dan struktur tarif; / Improve stakeholder management, among others to ensure Automatic Tariff Adjustment (ATA) and compensation payments, recommend a sustainable revenue model, replace the PSO margin model (e.g. PBR model), or recommend changes to the subsidy model and tariff structure; 3. Memastikan penyelesaian proyek-proyek ketenagalistrikan sesuai dengan urgensi; / Ensure the completion of electricity projects in accordance with urgency; 4. Mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan investasi dan funding *gap*, termasuk melakukan optimasi *working capital*; / Seek funding from various sources to meet investment needs and funding gaps, including optimizing working capital; 5. Melanjutkan Program Penurunan BPP secara berkesinambungan; / Continue the BPP Reduction Program on an ongoing basis; 6. Konsultasi kontrak IPP dalam rangka memastikan penambahan kapasitas IPP yang optimal dan efisien; / Consultation on IPP contracts in order to ensure the addition of optimal and efficient IPP capacity; 7. Mengupayakan kepastian regulasi/kebijakan terkait energi primer yang menguntungkan PLN; / Strive for regulatory/policy certainty related to primary energy that benefits PLN; 8. Menjalankan opsi *debt reprofiling* sebagai upaya *liability management* sesuai kebutuhan korporat; / Execute the debt reprofiling option as a liability management effort according to corporate needs; 9. Implementasi *Cash War Room* sebagai sarana pemantauan likuiditas dan penyiapan strategi/aksi yang perlu dijalankan; / Implementation of the Cash War Room as a means of monitoring liquidity and preparing strategies/actions that need to be implemented; 10. Implementasi SCT (*Spending Control Tower*) untuk mengevaluasi pengeluaran kas perusahaan serta memperkuat '*cash culture*'; / Implementation of SCT (Spending Control Tower) to evaluate the company's cash disbursements and strengthen the 'cash culture'; 11. Memastikan diperolehnya *waiver covenant* dari lender dan mengupayakan *covenant* yang lebih tepat sesuai kondisi PLN; / Ensure that waiver covenants are obtained from lenders and seek more appropriate covenants in accordance with PLN's conditions; 12. Melakukan pengaturan dan penetapan prioritisasi investasi; / Arrange and determine investment prioritization; 13. Menjalankan manajemen likuiditas dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian; / Carry out liquidity management based on prudential principles; 14. Menyiapkan kajian skema pembayaran kepada IPP serta melakukan pembayaran berdasarkan opsi terbaik bagi PLN dan IPP. / Prepare a review of payment schemes for IPPs and make payments based on the best option for PLN and IPP.
14	Strategis / Strategic	Kontribusi Anak Perusahaan Dalam Mendukung Bisnis Korporat Tidak Optimal / Contribution of Subsidiaries in Supporting Corporate Business Not Being Optimal	1. Pengelompokkan *Clustering Subsidiary* sesuai program transformasi portofolio *streamline subsidiary*; / Create Clusters of Subsidiaries according to the streamlined subsidiary portfolio transformation program; 2. Pengembangan pedoman-pedoman terkait pengelolaan portofolio PLN Group sesuai dengan *clustering subsidiary*; / Development of guidelines related to the management of the PLN Group portfolio in accordance with the clustering subsidiary; 3. Pembentukan *Working Team* Implementasi Konsolidasi Portofolio Bisnis PLN Group, sesuai Keputusan Direksi nomor 0128.K/DIR/2020 perihal Pembentukan tim Implementasi Konsolidasi Portofolio Bisnis PT PLN (Persero) Group tanggal 28 Agustus 2020; / Formation of the PLN Group Business Portfolio Consolidation Implementation Team, according to the Board of Directors Decree number 0128.K/DIR/2020 regarding the Establishment of the PT PLN (Persero) Group Business Portfolio Implementation Team on 28 August 2020; 4. Penyederhanaan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan berlaku; / Simplification of Subsidiaries in accordance with applicable regulations; 5. Pemantauan pelaksanaan RKAP melalui Laporan-laporan Anak Perusahaan berkaitan dengan pemantauan KRI Korporat yang dikelola; / Carry out monitoring on the implementation of RKAP through Subsidiary Reports related to the monitoring of managed Corporate KRIs; 6. Pengembangan Anak Perusahaan melalui pengembangan kerja sama/usaha patungan dan/atau pembentukan JV, penggabungan, akuisisi, penyertaan saham di Anak Perusahaan; / Development of Subsidiaries through the development of cooperation/joint ventures and/or formation of JVs, mergers, acquisitions, investment in shares in Subsidiaries; 7. Peningkatan peran dan fungsi serta supervisi dari Dewan Komisaris Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Korporat dan KBUMN; / Increase the roles and functions as well as supervision of the Board of Commissioners of Subsidiaries so that they are in line with Corporate and KBUMN policies; 8. Pelaksanaan dan/atau kajian khusus serta supervisi berkaitan dengan penugasan khusus yang berkaitan dengan inisiasi Korporat yakni: Beyond kWh. / Implementation and/or special studies and supervision related to special assignments related to Corporate initiatives, namely: Beyond kWh.
15	Legal	PLN Kesulitan dalam Penanganan Limbah FABA / Difficulties of PLN in FABA Waste Management	1. Pemantauan pengelolaan FABA triwulan IV 2021; / Carry out monitoring on FABA management in Q4 2021; 2. Memasukkan kriteria pengelolaan FABA dalam Penilaian kinerja; / Include FABA management criteria in performance appraisal; 3. Penjajakan kerja sama pemanfaatan FABA dengan BUMN karya berserta anak perusahaan; / Exploration of cooperation in the use of FABA with state-owned enterprises and their subsidiaries; 4. Memberikan arahan untuk membuat roadmap pengelolaan FABA; / Provide direction to create a roadmap for FABA management; 5. Melakukan arahan dan pendampingan perubahan persetujuan lingkungan untuk kegiatan pengelolaan FABA; / Provide direction and assistance on changes to environmental approvals for FABA management activities; 6. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk unit; / Carry out training and competency certification for units; 7. Mendukung usulan anggaran biaya pengelolaan FABA dalam RKAP unit sesuai dengan Roadmap Pengelolaan FABA; / Support the proposed FABA management budget in the unit's RKAP in accordance with the FABA Management Roadmap; 8. Melakukan penyusunan prosedur pengelolaan FABA (pemanfaatan internal eksternal penyimpanan pengangkutan internal dan eksternal, penimbunan, ketanggap daruratan, dokumentasi dan pelaporan); / Prepare FABA management procedures (use of internal and external storage, internal and external transportation, stockpiling, emergency response, documentation and reporting); 9. Melakukan kajian potensi pemanfaatan FABA bertujuan untuk mendorong sirkuler ekonomi;/ Conduct a study on the potential utilization of FABA with the aim of promoting a circular economy; 10. Mempelajari serta memberikan arahan tentang penerapan PERMEN LHK No. 19 tahun 2021 dan Kepmen LHK No. SK 998 Tahun 2021 untuk PLN Group. / Study and provide direction on the implementation of PERMEN LHK No. 19 of 2021 and the Minister of Environment and Forestry Decree No. SK 998 of 2021 for the PLN Group.

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Mitigasi Risiko / *Risk Mitigation*
16	Operasional / Operational	Terjadi Kecelakaan Kerja Ketenagalistrikan / Work Accident involving Electricity	1. Menyusun minimum *requirement* jumlah pengawas, pekerja dan kompetensi untuk pekerjaan distribusi; / Develop minimum requirements for the number of supervisors, workers and competencies for distribution work; 2. Meningkatkan *awareness* manajemen tentang pengelolaan risiko K3 melalui *set up zero tolerance* terhadap kriteria dampak K3; / Increase management awareness about OHS risk management through setting up zero tolerance for OHS impact criteria; 3. Membuat *framework* peningkatan budaya K3 melalui sosialisasi tentang pelaksanaan K3; / Create a framework for improving OHS culture through socialization on the implementation of OHS; 4. Membuat *framework* tata kelola K2/K3 oleh Manajemen Unit sampai ke Unit Pelaksana; / Create a framework for Electrical Safety/OHS governance by the Unit Management to the Implementing Unit; 5. Sertifikasi kompetensi bidang K3 di Unit/ AP; / Certification of competence in the field of OHS in the Unit/ Subsidiaries; 6. Me-*review* kembali Pedoman dan Kebijakan tentang pelaksanaan K3 di lingkungan PLN; / Review the Guidelines and Policies on the implementation of OHS within PLN; 7. Memastikan SDM memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugasnya; / Ensure that HC has competency certification according to their field of work; 8. Melaksanakan implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) di setiap fungsi bisnis PLN; / Implement the Contractor Safety Management System (CSMS) in every PLN business function; 9. Melaksanakan implementasi *Behaviour Based Safety* (BBS) di setiap fungsi bisnis PLN; / Implement Behavior Based Safety (BBS) in every PLN business function; 10. Melakukan simulasi tanggap darurat terkait *fire protection*, terorisme, pengamanan demonstrasi dan bencana alam untuk anggota satuan pengamanan di unit PLN; / Conduct emergency response simulations related to fire protection, terrorism, demonstration security and natural disasters for members of security units in PLN units; 11. Meningkatkan efektivitas HSSE Academy sebagai wadah pembelajaran K3 dan lingkungan bagi seluruh pegawai PLN; / Improve the effectiveness of the HSSE Academy as a place for learning OHS and the environment for all PLN employees; 12. Melakukan Audit ketenagakerjaan vendor (kesesuaian alat kerja dengan kontrak); / Conduct vendor employment audits (conformity of work tools with contracts); 13. Penguatan fungsi K3 sampai ke level Manajemen Dasar *Framework* mewujudkan budaya K3 melalui edukasi tentang pelaksanaan K3 (kontrol eksisting); / Strengthen the OHS function to the level of Basic Management Framework to create an OHS culture through education about the implementation of OHS (existing control); 14. Melakukan *set up* ISO 45001 : 2018 untuk mengganti OHSAS 18001 : 2007; / Set up ISO 45001 : 2018 to replace OHSAS 18001 : 2007; 15. Pelaksanaan *Capacity Building* khusus untuk Pejabat K3L di Unit Induk; / Implementation of Capacity Building specifically for OHSE Officials in the Main Unit; 16. Melakukan integrasi Sistem Manajemen K3 PP 50 Tahun 2020 dan ISO 45001: 2018. / Integrate the PP 50 2020 and ISO 45001:2018 OHS Management System.
17	Operasional / Operational	Hambatan Pemenuhan Baku Mutu Emisi Pembangkit / Challenges in Meeting the Emission Raw Materials of Power Plants	1. Meninjau ulang kontrak pengadaan batubara dan BBM, perihal kandungan sulfur dalam bahan bakar; / Review coal and fuel procurement contracts, regarding sulfur content in fuel; 2. Mensyaratkan penggunaan FGD (*Flue Gas Desulfurization*) dan/atau SCR (*Selective Catalyst Reduction*) untuk rencana lelang pembangkit; / Impose requirement of the use of FGD (Flue Gas Desulfurization) and/or SCR (Selective Catalyst Reduction) for the power plant auction plan; 3. Penambahan peralatan CEMS untuk pemantauan emisi bagi pembangkit yang wajib pantau namun belum memilikinya sesuai Permen LHK nomor P.15; / Addition of CEMS equipment for emission monitoring for power plants that are required to monitor but have not possessed it in accordance with Permen LHK number P.15; 4. Memasukkan program penambahan peralatan pengendali emisi berdasarkan *Roadmap* pemenuhan Baku Mutu Emisi ke dalam program prioritas anggaran investasi; / Include the program for adding emission control equipment based on the Roadmap for compliance with Emission Quality Standards into the investment budget priority program; 5. Mengurangi kadar sulfur batubara melalui penambahan amonia/*limestone* pada *boiler* CFB; / Reduce coal sulfur content by adding ammonia/limestone to CFB boilers; 6. Mengatur pola operasi pembangkit pada beban optimal (dengan tingkat emisi sesuai persyaratan lingkungan). / Regulate the generator operating pattern at optimal load (with emission levels according to environmental requirements).
18	Strategis / Strategic	Regulasi atau Perubahannya Mempengaruhi Bisnis PLN / Regulations and Its Amendments that Impact PLN's Business	1. Pendampingan penyusunan regulasi dengan regulator guna menghindari disharmonisasi regulasi, khususnya terkait kepentingan proses bisnis PLN; / Assistance in the preparation of regulations with regulators in order to avoid disharmony of regulations, particularly related to the interests of PLN's business processes; 2. Peningkatan *Stakeholder Management*. / Improvement on Stakeholder Management.
19	Strategis / Strategic	Target Penyelesaian Sertifikasi Aset Tidak Tercapai / Not Meeting the Asset Certification Completion Target	1. Melakukan *update* dan verifikasi data secara berkala dengan *asset owner*; / Update and verify data regularly with the asset owner; 2. Membangun kerja sama yang harmonis dengan BPN/Kantah setempat; / Build harmonious cooperation with the local BPN/Kantah; 3. Berkoordinasi dengan Divisi Anggaran terkait pentingnya program sertifikasi; / Coordinate with the Budget Division regarding the importance of the certification program; 4. Membangun kerja sama mulai dari perangkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemda Tkt II; / Build cooperation starting from the Village/District, Sub-district and Tkt II local government; 5. Bekerja sama dengan KPK; / Cooperate with the KPK; 6. Mengajukan usulan revisi anggaran sertifikasi Unit Induk. / Propose revision of the Parent Unit certification budget.
20	Strategis / Strategic	Perubahan Iklim dari Emisi Gas Rumah Kaca Terhadap Kerentanan Infrastruktur PLN / Climate Change and Green House Gas Emission to the Fragility of PLN Infrastructure	1. Menyusun kebijakan pengelolaan perubahan iklim bagi instalasi PLN; / Develop climate change management policies for PLN installations; 2. Melakukan *review* terhadap pedoman dan/atau peraturan terkait adaptasi perubahan iklim; / Review guidelines and/or regulations related to climate change adaptation; 3. Meningkatkan *awareness* PLN akan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; / Increase PLN's awareness of climate change mitigation and adaptation aspects; 4. Penyiapan aplikasi *Dashboard Use Case Natural Disaster Management System*. / Preparation of the Dashboard Use Case Natural Disaster Management System application.

Review Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko atau *Risk Management Maturity* (RMM) bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari implementasi manajemen risiko secara berkesinambungan PLN pada periode tertentu dan berdasarkan metodologi yang disusun dan disepakati. Pengukuran RMM di PLN dilakukan setiap semester, pada seluruh entitas yaitu Divisi/Satuan Kantor Pusat, Unit Induk/Pusat-Pusat, Anak Perusahaan, dan secara Korporat. Pengukuran RMM di PLN menggunakan level skala 5, dengan polaritas positif (semakin tinggi semakin baik). Ringkasan hasil pengukuran RMM pada semester 2 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Skor RMM Korporat pengukuran dilakukan oleh asesor independen eksternal dengan hasil sebesar 2,65 (target 2,60).
b. Skor rata-rata RMM 69 Divisi Kantor Pusat sebesar 3,01 (rata-rata target 2,60).
c. Skor rata-rata RMM 48 Unit Induk/Pusat-Pusat sebesar 3,41 (rata-rata target 3,28).
d. Skor rata-rata RMM 12 Anak Perusahaan sebesar 2,62 (rata-rata target 2,60).

Untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko di Perusahaan, manajemen mengupayakan berbagai pendekatan, diantaranya dengan melakukan pengembangan kapasitas kompetensi dan *awareness* pegawai terkait manajemen risiko secara masif bekerja sama dengan PLN Corporate University. Sesuai *roadmap* menuju tingkat *maturity* 4.0 pada tahun 2024 maka strategi *capacity building* yang ditetapkan adalah dalam 2 *stream* yaitu: program diklat pembelajaran dan program sertifikasi manajemen risiko. Sub Direktorat Manajemen Risiko bersama PLN Corporate University terus mengadakan Diklat pembelajaran untuk internal terkait Manajemen Risiko, sesuai dengan Program Pembelajaran berbasis ITN & LNA pada tahun 2021 telah diikuti sebanyak 6.972 peserta. Sub DIrektorat Manajemen Risiko juga melaksanakan program sertifikasi yang ditujukan untuk level struktural dan untuk para *risk officers* dalam rangka memperkuat fungsi manajemen risiko di lingkungan PLN level Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan Fungsional. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi manajemen risiko (*Lead Manager Risk, Qualified Chief Risk Officer, Certified Risk Management Professional* dan *Certified Risk Management Officer*) bekerjasama dengan Pusdiklat dan melibatkan Lembaga Sertifikasi di bawah BNSP.

Review on Effectiveness of Risk Management System

The assessment of the maturity level of the Company's risk management system aims to understand the achievement of risk management implementation on an ongoing basis in a certain period based on a mutually agreed methodology. Measurement of RMM at PLN is carried out every semester, in all entitiesnamely Head Office Divisions/ Units, Parent Units/Centers, Subsidiaries, and Corporate. The measurement of RMM at PLN uses a 5- level scale, with positive polarity (higher level indicates an improvement). Summary of the results of RMM measurement in the 2nd half of 2021 is as follows:

a. Corporate RMM Score measurement done by external independent assessor with results of 2.65 (target 2.60).
b. The average score of RMM 69 Head Office Division is 3.01 (average target is 2.60).
c. The average score of RMM 48 Main Units/Centers is 3.41 (average target is 3.28).
d. The average score of RMM 12 Subsidiaries is 2.62 (average target is 2.60).

To improve risk management maturity at the Company, the management strived for various approaches, including massive capacity building and employee awareness related to risk management in collaboration with PLN Corporate University. According to the roadmap towards maturity level 4.0 in 2024, the capacity building strategy set is in 2 streams, namely: learning training program and risk management certification program. The Sub-Directorate of Risk Management together with PLN Corporate University continues to hold internal education and training related to Risk Management, in accordance with the ITN & LNA-based Learning Program in 2021 which has been attended by 6,972 participants. The Sub-Directorate of Risk Management also implements a certification program aimed at the structural level and for the risk officers in order to strengthen the risk management function within PLN's Upper Management, Middle Management, Basic and Functional Management levels. The implementation of risk management competency certification (Lead Manager Risk, Qualified Chief Risk Officer, Certified Risk Management Professional and Certified Risk Management Officer) in collaboration with the Education and Training Center and involving Certification Agencies under BNSP.

Perusahaan juga melakukan *best practices sharing* dengan pihak eksternal (Jasa Raharja) dan melakukan diskusi terbuka serta *benchmarking* manajemen risiko dalam rangka peningkatan kapasitas.

Selain itu, Perusahaan juga melaksanakan Serial Webinar *Risk Talk* tahun 2021 terdiri dari 7 episode yang merupakan kelanjutan dari Serial Webinar Risk Talk tahun 2020. Pelaksanaan Risk Talk secara berkelanjutan ini diperlukan untuk mendorong pencapaian KPI *Risk Maturity Management* (RMM) dengan memberikan apresiasi kepada Unit-Unit dan Anak Perusahaan yang menunjukkan kematangan dalam implementasi manajemen risiko, memberikan contoh bagi Unit-unit yang pencapaian *Risk Maturity Management* nya masih rendah, dan membuat program tindak lanjut atas setiap hasil diskusi di setiap episode.

Upaya Meningkatkan Budaya Perusahaan

Untuk mencapai peningkatan Budaya Perusahaan khususnya melalui penerapan manajemen risiko, Sub Direktorat Manajemen RIsiko turut berperan dalam program Budaya Perusahaan dalam bentuk PLN Satu, PLN Dua dan PLN Tiga dari Sub Direktorat Manajemen Risiko dengan berpegang pada nilai utama AKHLAK.

Tema Budaya Perusahaan 2021 adalah "*Back to Basic Build the Core*" yang dijabarkan menjadi program PLN Satu, PLN Dua, dan PLN Tiga pada Sub DIrektorat Manajemen Risiko yaitu:

- PLN Satu: *Governance & Risk Compliance Culture* (tema: Bekerja dengan mengedepankan *Good Corporate Governance*).
- PLN Dua: *Collaboration & Performance Culture* (Tema: Bekerja dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas yang tinggi dan *ownership* terhadap tugas dan target, bekerja dengan menjaga kinerja keuangan yang sehat).
- PLN Tiga: *Service Culture* kepada Pelanggan (Tema: Bekerja sebagai perusahaan penyedia listrik dengan pelayanan prima).

Tujuan atau sasaran penerapan Program Budaya di Sub Direktorat Manajemen Risiko adalah untuk mencapai *Risk Maturity* 4.0 di tahun 2024 dengan fondasi penerapan GRC dan ditopang 3 pilar pendukung yaitu sistem, organisasi dan *human capital* serta teknologi.

The company also shares best practices with external parties (Jasa Raharja) and conducts open discussions and benchmarking of risk management in order to increase capacity.

In addition, the Company also held the 2021 Risk Talk Webinar Series consisting of 7 episodes which is a continuation of the 2020 Risk Talk Webinar Series. The ongoing implementation of this Risk Talk is needed to encourage the achievement of KPI Risk Maturity Management (RMM) by giving appreciation to the Units Units and Subsidiaries who show maturity in risk management implementation, provide examples for Units whose Risk Management Maturity achievement is still low, and develop follow-up programs for each discussion result in each episode.

Efforts to Improve Corporate Culture

To improve the Corporate Culture, especially through the application of risk management, the Risk Management Division plays a role in the Corporate Culture program through PLN One, PLN Two and PLN Three by the Risk Management Division while upholding the core values of AKHLAK.

The theme of Corporate Culture 2020 is "Back to Basic Build the Core" which is translated into PLN One, PLN Two, and PLN Three programs in the Risk Management Division, namely:

- PLN One: Governance & Risk Compliance Culture (theme: Working by promoting Good Corporate Governance).
- PLN Two: Collaboration & Performance Culture (Theme: Working with full responsibility, high accountability and ownership of tasks and targets, working by maintaining healthy financial performance).
- PLN Three: Service Culture to Customers (Theme: Working as an electricity supply company with excellent service).

The objective or target of Culture Program implementation in Risk Management Division is to achieve Risk Maturity 4.0 in 2024 with the foundation of GRC implementation and supported by 3 supporting pillars, namely system, organization and human capital and technology.

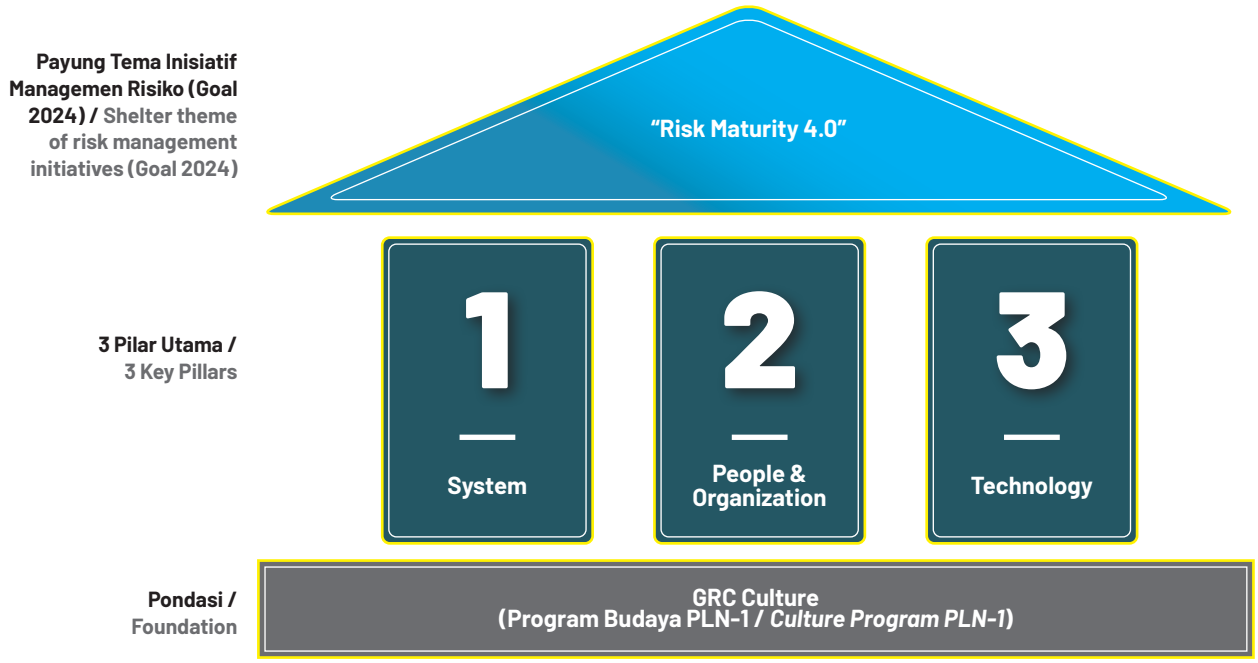

Pengelolaan Risiko Terkait Pandemi COVID-19

PLN mengelola risiko terkait pandemi COVID-19 dengan menginisiasi proses penyusunan dokumen BCP (*Bussines Continuity Plan*) dan dokumen SCP (*Specific Contingency Plan*) pada seluruh divisi dan satuan di perusahaan. Hal ini dilakukan karena pandemik menjadi risiko baru yang sangat berdampak pada proses bisnis PLN.

PLN juga telah menyusun dokumen kajian risiko di mana Perusahaan tidak dapat menjamin kondisi selalu ideal untuk menjalankan kegiatan bisnis atau terjadi kondisi di luar normal yang tidak dapat dikendalikan sehingga menyebabkan kerugian mendadak dan masif (*sudden and massive loss*).

Sub Direktorat Manajemen Risiko turut mengawal penyusunan dokumen BCP di setiap unit induk bekerja sama dengan divisi regional terkait sebagai divisi pembinanya berdasarkan pertimbangan bahwa faktor penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin meluas dan sifat layanan PLN kepada pelanggan yang sangat berkaitan dengan kontinuitas rantai pasokan material dan petugas-petugas pelayanan yang berinteraksi dengan pihak eksternal.

Risk Management Related to the COVID-19 Pandemic

PLN manages risks related to the COVID-19 pandemic by preparing BCP (Business Continuity Plan) documents and SCP (Specific Contingency Plan) documents for all divisions and units in the Company, considering that the pandemic is a new risk with massive impacts on PLN's business processes.

PLN has also prepared a risk assessment document in which the Company cannot guarantee that conditions are always ideal for conducting business activities or that there will be abnormal conditions beyond control that may cause sudden and massive losses.

The Risk Management Sub Directorate also oversees the preparation of BCP documents in each parent unit by collaborating with the relevant regional divisions as the supervisor, considering the factors of the increasingly widespread COVID-19 pandemic, the nature of PLN's services to customers that is closely related to the continuity of the supply chain of materials, and service personnel who interact with external parties.

PLN telah menyusun mitigasi risiko terkait dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2021 sebagai berikut:

PLN has prepared a risk mitigation for the COVID-19 pandemic in 2021 as follows:

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Risiko / *Risk Mitigation*
1	Operasional / Operational	Operasional dan pelayanan tidak optimal / Operations and services not being optimal	1. Skenario *Business Continuity* Pandemi Covid-19 sesuai BCP dijalankan. / Scenario of Business Continuity in the Covid-19 Pandemic according to BCP is carried out. 2. Mengoptimalkan sistem *joint inventory* MDU. / Optimize the MDU joint inventory system. 3. Melengkapi petugas dengan APD dan deteksi/proteksi dini terhadap paparan virus Corona. / Provide officers with PPE and early detection/protection to Corona virus exposure. 4. Memastikan petugas memahami dan melakukan SOP pencegahan virus Corona secara konsisten. / Ensure that officers understand and carry out SOPs for preventing the Corona virus consistent. 5. Membagi regu dan menyiapkan *contingency plan* seandainya ada petugas yang positif Corona. / Divide teams and prepare contingency plan for officers with Covid-19
2	Operasional / Operational	Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangkit / Delay in the Completion of Generator Projects	1. Meninjau ulang kontrak kinerja menyesuaikan dengan prioritas proyek yang telah disusun. / Reviewing the performance contract according to the project priorities that have been prepared. 2. Rekomposisi anggaran. / Budget recomposition. 3. Mengajukan dispensasi kepada pekerja konstruksi Proyek Strategis Nasional. / Apply for dispensation to construction workers of the National Strategic Project. 4. Optimalisasi SOP *Market Place* MTU MDU. / Optimize the MTU MDU Market Place SOPs. 5. Memaksimalkan penggunaan sarana komunikasi *online*. / Maximize the use of online communication facilities. 6. Membuat prioritas pembangunan proyek yg dieksekusi antara pembangkit dengan tetap mempertimbangkan *demand*. / Prioritize project development that is executed between power plants while still considering demand. 7. Kewajiban penerapan SOP Protokol Kesehatan COVID-19 bagi semua personil di setiap rantai pasok energi primer. / Obligation to implement the COVID-19 Health Protocol SOP for all personnel in each primary energy supply chain. 8. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemberian akses bagi pegawai PLN dan mitra PLN yang melaksanakan aktivitas kritikal. / Coordinate with relevant agencies to provide access for PLN employees and PLN partners who carry out critical activities. 9. Melaksanakan *contingency plan* pada personil yang terpapar COVID-19. / Implement a contingency plan for personnel exposed to COVID-19. 10. Membuat *Business Continuity Management* sebagai langkah kontingensi akibat keterlambatan proyek. / Create Business Continuity Management as a contingency measure due to project delays.
3	Operasional / Operational	Banyaknya pegawai dan mitra kerja yang terpapar Covid-19 / High number of employees infected by Covid-19	1. Percepatan digitalisasi bisnis proses. / Acceleration of business process digitization. 2. Program Vaksinasi Covid-19. / Covid-19 Vaccination Program. 3. Melaksanakan *Screening* dan *Tracing* berkala kepada seluruh karyawan. / Carry out periodic screening and tracing for all employees. 4. Menerapkan protokol kesehatan (5M) di lingkungan kantor. / Implement health protocols (5M) in the office area. 5. Tersedianya dokumen *Business Continuity Plan* di seluruh Unit Induk/Pusat-Pusat, Divisi-Divisi Kantor Pusat dan Anak Perusahaan. / Availability of Business Continuity Plan documents in all Parent Units/ Centers, Head Office Divisions and Subsidiaries. 6. Pemberlakuan WFH dan WFO menyesuaikan peraturan pemerintah pusat/daerah. / The implementation of WFH and WFO in accordance with the central/local government regulations. 7. Pembentukan Tim Ranger Covid. / Formation of the Covid Ranger Team. 8. *Positif Covid Rate* sebagai faktor pengurang *Key Performance Indikator* 2021. / Positive Covid Rate as a reducing factor for Key Performance Indicator 2021. 9. Melaksanakan program Manajemen Covid-19 (regulasi Covid, monitoring vaksinasi, *daily dashboard reporting*, operasional). / Implement the Covid-19 Management program (Covid regulations, vaccination monitoring, daily dashboard reporting, operations). 10. Adanya sistem SWACAM (catat meter) mandiri. / The existence of an independent SWACAM (record meter) system.
4	Keuangan / Finance	Pertumbuhan Konsumsi Tenaga Listrik di bawah target / Growth of Electricity Consumption below the target	**Strategi Intensifikasi**, strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik pada pelanggan *eksisting* dan mempertahankan pelanggan *eksisting*. / **Intensification Strategy,** this strategy aims to optimize the use of electrical energy for existing customers and retain existing customers. 1. Program *natural growth*, / Natural growth program, 2. Program tambah daya, / Power addition program, 3. Program migrasi reguler ke layanan premium, / Regular migration program to premium services, 4. Program *electrifying lifestyle*, / Electrifying lifestyle program, **Strategi Ekstensifikasi**, strategi yang ini bertujuan untuk meningkatkan kWh jual maupun pendapatan penjualan dengan melakukan penambahan pelanggan baru termasuk mengakuisi pelanggan yang memiliki *captive power* dan dedieselisasi. / **Extensification Strategy**, this strategy aims to increase sales kWh and sales revenue by adding new customers including acquiring customers who have captive power and dedieselization. 1. Program percepatan penyambungan pelanggan, / Customer connection acceleration program, 2. Program akusisi *captive*, / Captive acquisition program, 3. Program dedieselisasi, / Dedieselization program 4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi PLN Mobile. / Optimization of the use of the PLN Mobile Application.

No	Kategori Risiko / *Risk Category*	Risiko Utama / *Key Risks*	Risiko / *Risk Mitigation*
5	Keuangan / Finance	Keterbatasan Likuiditas untuk Operasional dan Investasi / Limitations of Liquidity for Operations and Investments	1. Melakukan pengaturan dan penetapan prioritisasi investasi. / Arrange and determine investment prioritization 2. Menjalankan manajemen likuiditas dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. / Carry out liquidity management based on the principle of prudence 3. Meningkatkan *stakeholder management*. / Improve stakeholder management 4. Memastikan diperolehnya *waiver covenant* dari *lender* dan mengupayakan *covenant* yang lebih tepat sesuai kondisi PLN. / Ensure that waiver covenants are obtained from lenders and seek more appropriate covenants according to PLN conditions. 5. Melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) sebagai langkah mitigasi risiko nilai tukar, khususnya bagi *eksposure* pembayaran dalam valuta asing. / Conduct hedging transactions as a measure to mitigate exchange rate risk, especially for payment exposures in foreign currencies. 6. Mengoptimalkan *Cash War Room* 2.0 untuk pemantauan pengelolaan likuiditas, *budget control*, kinerja dan manajemen investasi terintegrasi dengan dilengkapi dengan *Tableau Dasbhoard*. / Optimize Cash War Room 2.0 for monitoring liquidity management, budget control, performance and integrated investment management equipped with Tableau Dashboard. 7. Peningkatan penjualan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga menghasilkan *operating cash inflow* yang cukup untuk memenuhi kebutuhan *operasional dan debt service*. / Increase sales through intensification and extensification so as to generate sufficient operating cash inflow to meet operational needs and debt service. 8. Berkoordinasi intensif dalam pencairan kompensasi untuk perbaikan performa likuiditas. / 8. Coordinate intensively in disbursement of compensation to improve liquidity performance. 9. Melakukan efisiensi di segala lini serta mengeksekusi inisiatif *cash release* sehingga pengendalian biaya (*budget control*) dan performance menjadi lebih baik. / Perform efficiency in all lines and execute cash release initiatives so that budget control and performance are better.

Komitmen Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

PLN telah menerbitkan *Statement of Corporate Intent* tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero) yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi Perseroan pada tanggal 14 April 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh dinamika ketidakpastian di masa mendatang penuh dengan peluang dan risiko yang harus ditanggapi secara cermat, tepat, dan prudent berlandaskan praktik *Governance*, *Risk Management* and *Compliance* (GRC) yang andal untuk mencapai Visi 2024 PLN yakni menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan sebagai pilihan pertama para pelanggan untuk solusi energi.

Maksud dan tujuan penerbitan *Statement of Corporate Intent* tersebut adalah

- Meningkatkan efektivitas dan maturitas penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan PT PLN (Persero).
- Memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan secara merata di masing-masing unit, fungsi dan anak perusahaan.
- Sebagai arah dan sikap bersama yang mencerminkan cara menilai risiko pada setiap aktivitas organisasi yang akan berpengaruh pada penerapan komponen manajemen risiko, termasuk cara identifikasi risiko, jenis risiko yang diterima dan cara pengelolaan risiko.

Commitment to Integrated Risk Management Implementation

PLN has issued a Statement of Corporate Intent on the Implementation of Integrated Risk Management of PT PLN (Persero) signed by all members of the Company's Board of Directors on April 14, 2021. This is motivated by the uncertainties of a future full of opportunities and risks that must be addressed carefully, appropriately, and prudently based on reliable Governance, Risk Management and Compliance (GRC) practices to achieve the 2024 Vision of PLN, namely to become the leading electricity company in Southeast Asia and the customers' first choice for energy solutions.

The purposes and objectives of the Statement of Corporate Intent are as follows:

- Increase the effectiveness and maturity of integrated risk management implementation within PT PLN (Persero).
- Ensure the integrated risk management is carried out equally in each unit, function and subsidiary.
- As a shared direction and attitude that reflect the means of risk assessment in every organizational activity that will affect the implementation of risk management components, including means of risk identification, types of risks accepted and methods of risk management.

Tata nilai manajemen risiko yang menjadi landasan perilaku seluruh insan PT PLN (Persero) dalam mewujudkan praktik manajemen risiko di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dalam mendukung bisnis dan operasi yang dijalankan perusahaan adalah:

- Turut serta berpartisipasi optimal dalam membangun sistem manajemen risiko PLN yang tanggung sehingga secara kolektif membentuk ketahanan dan keberlanjutan perusahaan.
- Dengan penuh tanggung jawab berani mengambil risiko secara terukur berdasarkan keandalannya dalam mengendalikan dan mengelola risiko-risiko tersebut dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada selera dan toleransi risiko yang ditetapkan oleh direksi.
- Merealisasikan berbagai peluang penciptaan nilai, baik bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan secara berimbang, melalui pengembangan kapabilitas internal untuk menjalankan seluruh fungsi secara andal, dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan etika bisnis.

Strategi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan manajemen risiko terintegrasi PLN antara lain:

1. Manajemen risiko terintegrasi PLN dilaksanakan berdasarkan suatu kerangka kerja yang mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan proses bisnis dan sistem manajemen perusahaan yang diwujudkan melalui penerapan *Four Eyes principle* (4EP).
2. Perwujudan peran *Maker*, *Checker/Reviewer*, *Approval* dan *Signer* pada 4EP yang ditur selaras dan melekat dalam Model 3 Lini (*3 Lines model*) yang dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen PLN dalam praktik manajemen risiko terintegrasi di setiap aspek bisnis dan operasional PLN.
3. Pengaturan peran *Maker*, *Checker/Reviewer*, *Approval* dan *Signer* pada 4EP ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan risiko (*risk leadership*) dan budaya risiko di seluruh tingkatan perusahaan, serta mendukung terlaksananya model *Governance*, *Risk Management* and *Compliance* (GRC) terintegrasi di PLN dan dalam konteks hubungan antara induk dan anak perusahaan.
4. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk mendukung proses penciptaan dan perlindungan terhadap nilai yang hendak dicapai melalui seluruh bisnis dan operasional yang dijalankan dan dikembangkan oleh perusahaan dengan berlandaskan pada *core values* yang menjadi cerminan jati diri seluruh insan PLN.

The risk management values that form the foundation of the attitude of all PT PLN (Persero) personnel in implementing risk management practices in their respective duties and responsibilities and in supporting the business and operations run by the Company are as follows:

- Participate optimally in building a reliable PLN risk management system that collectively forms the resilience and sustainability of the Company.
- With full responsibility, dare to take measurable risks based on reliability in controlling and managing these risks while considering and referring to the risk appetite and tolerance set by the Board of Directors.
- Realizing various value creation opportunities, both for the Company and for stakeholders, in a balanced manner by developing internal capabilities to carry out all functions reliably, while prioritizing compliance and business ethics.

The strategies and mechanisms required to realize the integrated risk management implementation of PLN are as follows:

1. PLN's integrated risk management is implemented based on a framework that integrates risk management with business processes and company management systems which is implemented based on the Four Eyes principle (4EP).
2. Realization of the roles of Maker, Checker/Reviewer, Approval and Signer in the 4EP which is aligned with and inherent in the 3 Lines Model carried out by all levels of PLN management in the integrated risk management practices in every aspect of PLN's business and operations.
3. Setting the roles of Maker, Checker/Reviewer, Approval and Signer in 4EP is aimed at strengthening risk leadership and risk culture at all levels of the Company, as well as supporting the implementation of an integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) model at PLN and in the relationship between parent company and subsidiary.
4. Risk management implementation is aimed at supporting the process of value creation and protection through all businesses and operations run and developed by the Company based on core values that reflect the identity of all PLN personnel.

5. Pengelolaan risiko di seluruh lingkungan PLN juga dijalankan demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui mutu produk dan layanan prima dari perusahaan, serta meningkatkan keyakinan dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis dan operasionalnya.
6. Kelima strategi tersebut dilandasi komitmen yang kuat dari seluruh manajemen PLN untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta komitmen yang kuat terhadap kepatuhan dengan menolak secara tegas segala tindakan melawan hukum dan etika yang berlandaskan pada *code of ethics and conduct* dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

5. Risk management is implemented throughout PLN to maintain and improve customer satisfaction through excellent product and service quality of the Company, as well as to increase stakeholder confidence and support for the Company's performance in running and developing its business and operations.

6. The five strategies are based on a strong commitment of all PLN management to apply the principles of good corporate governance and a strong commitment to compliance by firmly rejecting all unlawful and unethical actions based on the code of ethics and conduct in interacting with stakeholders.

Adapun mekanisme penerapan 4EP dalam manajemen risiko terintegrasi PLN diatur dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2021 tentang Prosedur Pelaksanaan *Four-Eyes Principle* (4EP) dalam Pengambilan Keputusan.

The 4EP implementation mechanism in PLN's integrated risk management is regulated in the Board of Directors Circular Letter of PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2021 concerning Four-Eyes Implementation Procedure in Decision Making.

KEPATUHAN

PLN memerlukan sistem, regulasi, kebijakan dan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam rangka memastikan kepatuhan dan integritas di dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PLN membentuk Divisi *Compliance* berdasarkan Perdir 0021.P/DIR/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja beserta Perubahannya beberapa kali yaitu Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 076.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0162.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Divisi Kepatuhan *(Compliance Division)* dipimpin oleh Executive Vice President (EVP) Kepatuhan (*Compliance*) yang bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat.

COMPLIANCE

PLN requires systems, regulations, policies and business processes that are in accordance with the principles of good governance in order to ensure compliance and integrity in the management of the company. Based on these considerations, PLN established a Compliance Division based on Perdir 0021.P/DIR/2020 dated 15 May 2020 regarding Organization and Work Procedures and a number of its amendments, namely PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation Number 076.P/DIR/2021 concerning Organization and Governance. The work of PT PLN (Persero) and the Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) Number 0162.P/DIR/2021 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero). The Compliance Division is led by the Executive Vice President (EVP) Compliance who reports to the Director of Corporate Planning.

Struktur Organisasi Divisi

EVP Kepatuhan bertanggung jawab memimpin, membina dan mengelola Divisi Kepatuhan yang meliputi pengembangan dan pengendalian strategi, kebijakan, sistem dan program terkait anti *fraud*, *integrity management*, anti penyuapan dan kepatuhan PLN dalam rangka penyelenggaraan PLN yang bersih dan peningkatan citra Perusahaan.

Organizational Structure of Compliance Division

EVP Compliance is responsible for leading, supervising, and managing the Compliance Division which includes the development and control of policy strategies, systems and programs related to anti-fraud, integrity management, anti-bribery and Company compliance in order to maintain a clean Company and enhance the Company's image.

Dasar hukum struktur organisasi Divisi Kepatuhan adalah Perdir Nomor 0101.P/DIR/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero).

The legal basis for the organizational structure of the Compliance Division is Perdir No. 0026.P/DIR/2020 dated May 15, 2020 on Amendment to Regulation of the Board of Directors No. 0103.P/DIR/2019 on Organizational Structure and Position Formation at the Directorate of Corporate Planning.

EVP Kepatuhan membawahi 3 *Vice President* (VP) dengan lingkup tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1. VP Manajemen Risiko Kecurangan *(VP Fraud Risk Management)* yang bertanggung jawab menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan *fraud risk management system*, melaksanakan *fraud risk assesment* dan menindaklanjuti pelaksanaannya, melaksanakan pengembangan *capacity building* serta sistem dan infrastruktur kepatuhan;
2. VP Peraturan dan Urusan Kebijakan *(VP Regulations and Policy Affairs)* yang bertanggung jawab memastikan sistem dan infrastruktur untuk mengeliminasi potensi kecurangan, kerugian Perusahaan dan karyawan, memastikan harmonisasi kebijakan Perusahaan dengan regulasi internal maupun eksternal, mengawal pakta integritas manajemen dan pihak eksternal untuk mencegah potensi kecurangan;
3. VP Manajemen Integritas (*VP Integrity Management*) yang bertanggung jawab memastikan sistem dan infrastruktur dalam implementasi kebijakan dan pedoman GCG, melaksanakan *survey* GCG dan memastikan terlaksananya *gap action* untuk OFI, mengembangkan *capacity building* program kepatuhan serta internalisasi program kepatuhan.

EVP Compliance oversees 3 Vice Presidents (VC) with their respective scope of responsibilities as follows:

1. VP Fraud Risk Management is responsible for ensuring the implementation of an effective anti-fraud program in the Company, compiling corporate fraud risk profile, implementing or reviewing fraud risk assessments in order to prevent fraud in business processes and policies;
2. VP Regulatory and Policy Affair is responsible for ensuring the system and infrastructure to eliminate potential fraud, losses for the Company and employees, ensuring the harmonization of Company policies with internal and external regulations, overseeing the integrity pact of management and external parties to prevent potential fraud;
3. VP Integrity Management is responsible for ensuring systems and infrastructure in implementing GCG policies and guidelines, conducting GCG surveys and ensuring the implementation of gap actions for OFI, developing capacity building compliance programs and internalizing compliance programs.

Profil EVP Kepatuhan

EVP Compliance Profile

RACHMAT HIDAYAT

EVP Kepatuhan
EVP Compliance

Usia / *Age*	54 tahun / years old
Domisili / *Domicile*	Jakarta
Kewarganegaraan / *Citizenship*	Indonesia
Riwayat Pendidikan / *Education*	• Sarjana Teknik, Universitas Indonesia / Bachelor of Engineering, Universitas Indoneisa • Magister Management Business Administration Technique, Institut Teknologi Bandung
Sertifikasi Profesi / *Professional Certification*	• Manajemen Sistem Pembangkitan / Power Plant System Managemen • Risk Management

Dasar Hukum Penunjukan / *Legal Basis of Appointment*	Peraturan Direksi No. 0103.P/DIR/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. 0065.P/DIR/2018 / Board of Directors Regulation No. 0103.P/DIR/2018 regarding Amendment to Board of Directors Regulation No. 0065.P/DIR/2018
Pengalaman Kerja / *Work Experience*	• VP Fraud Management, Divisi Kepatuhan, PLN Kantor Pusat (2018) / Compliance Division, PLN Head Office (2018) • Manajer Senior Risiko Legal dan Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PLN Kantor Pusat (2015-2018) / Senior Manager Legal Risk and Compliance Management Division PLN Head Office Risk and Compliance (2015-2018) • Manajer Senior Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko PLN Kantor Pusat (2013-2015) / Management Division Senior Compliance Manager PLN Head Office Risk (2013-2015) • Senior Engineer I Divisi Pembangkitan Indonesia Barat PLN Kantor Pusat (2012-2013) / Power Plant Division, PLN Head Office (2012-2013)
Jabatan Rangkap / *Concurrent Position*	Komisaris Utama PT Indo Pusaka Berau / President Commissioner of PT Indo Pusaka Berau
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi / *Education and Training to Improve Competency*	Certified in Enterprise Risk Governance

Tugas dan tanggung Jawab

Divisi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan *fraud risk management system* dan *fraud risk management information system*, membangun kompetensi dan lingkungan yang memadai untuk implementasi program anti *fraud*;
2. Merencanakan dan mengevaluasi program kepatuhan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan terhadap kebijakan/regulasi yang bersifat strategis dan berdampak besar terhadap keberlangsungan Perusahaan;
3. Mengembangkan dan mengevaluasi strategi dan metode analisis kebijakan/regulasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis Perusahaan untuk memastikan terhindar dari tindakan kecurangan, tidak etis, atau tidak patut dengan mengacu pada ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan pengendalian, pembinaan, dan evaluasi sistem manajemen anti penyuapan secara *best practice* di Perusahaan dan anak perusahaan secara berkelanjutan sejalan dengan strategi dan peraturan Perusahaan;
5. Memberikan pendampingan, saran, dan/atau rekomendasi kepada Direksi atas dampak kebijakan/regulasi strategis dari aspek kepatuhan yang berpotensi terjadi kecurangan yang berdampak besar terhadap keberlangsungan Perusahaan dan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan;

Duties and Responsibilities of Compliance Division

The Compliance Division has the following duties and responsibilities:

1. To develop and evaluate policies on fraud risk management system and fraud risk management information system, to build competency and an adequate environment for the implementation of anti-fraud programs;
2. To plan and evaluate compliance programs to identify potential frauds against strategic policies/regulations that have a major impact on the Company's sustainability;
3. To develop and evaluate strategies and methods of policy/regulation analysis that affect the Company's business continuity to avoid any fraudulent, unethical, or inappropriate actions by referring to the Company's provisions and laws and regulations;
4. To ensure control, development, and evaluation of the best practice anti-bribery management system in the Company and its subsidiaries sustainably in line with the Company's strategy and regulations;
5. To provide assistance, advice, and/or recommendations to the Board of Directors on the compliance aspect of strategic policies/regulations with high potential of fraud that may significantly affect the Company's sustainability and cause losses to the Company;

6. Memastikan pengendalian kinerja, *maturity level* dan perbaikan kepatuhan Perusahaan secara berkesinambungan yang mengacu pada *best practice* sebagai bagian dari program integritas Perusahaan;
7. Mengembangkan dan mengevaluasi *integrity due diligence system* sebagai bagian dari strategi anti fraud perusahaan;
8. Memastikan pengendalian dan koordinasi pendeteksian dan respons dalam rangka program pencegahan kecurangan di Perusahaan antara lain melalui pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) dan investigasi proaktif/observasi;
9. Mengembangkan dan mengevaluasi program kerja sama dengan institusi eksternal antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka memperkuat integritas Perusahaan.

6. To ensure continuous control of performance, maturity level and improvement of the Company's compliance that refers to best practice as part of the Company's integrity program;
7. To develop and evaluate the integrity due diligence system as part of the Company's anti-fraud strategy;
8. To ensure control and coordination of detection and response in the framework of fraud prevention programs in the Company, among others through Whistleblowing System (WBS) management and proactive investigations/observations;
9. To develop and evaluate cooperation programs with external institutions including Corruption Eradication Commission (KPK), Business Competition Supervisory Commission (KPPU), Ombudsman and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) in order to strengthen the Company's integrity.

Sertifikasi profesi

SDM Divisi Kepatuhan memiliki sertifikasi profesi guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Professional Certification

The human capital of Compliance Division has professional certifications to support their duties as follows:

No	Sertifikasi / *Certifications*	Penyelenggara / *Organizer*	Jumlah Pegawai / *Total Employees*
1	Auditor ISO 37001 ABMS	PECB	3
2	Implementer ISO 37001 ABMS	PECB	4
3	Auditor Forensik / Forensic Auditor	LSP - AF	4
4	Penyuluh Anti Korupsi Muda / Junior Anti-Corruption Counselor	LSP - KPK	2

Pelaksanaan Tugas 2021

Divisi Kepatuhan melaksanakan berbagai kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Produk Divisi Kepatuhan:
   a. Kajian Kepatuhan sebanyak 172 kajian
   b. *Review* Kepatuhan sebanyak 1 *review*
   c. Tanggapan Kepatuhan sebanyak 31 tanggapan
2. Menyusun *Fraud Risk Register* untuk 5 proses bisnis.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penandatanganan Komitmen Integritas. Sampai akhir tahun 2021 seluruh insan PLN dan pasangannya telah menandatangani Komitmen Integritas.
4. Menyelesaikan pembuatan *Compliance Roadmap* 2019-2023 yang terdiri 4 fase:

Duty Implementation in 2021

Employees in Compliance Division carried out the following activities:

1. Product of Compliance Division:
   a. 172 Compliance Studies
   b. 1 review of Compliance
   c. 31 Compliance Responses
2. Compiled Fraud Risk Registration for 5 business processes.
3. Coordinated the implementation of Integrity Commitment. Until the end of 2021, all PLN personnel and their business partners have signed Integrity Commitment.
4. Completed 2019-2023 Compliance Roadmap consists of 4 phases:

a. Fase I 2019-2020: Transformasi Program *Compliance*
b. Fase II 2020: Pembangunan Infrastruktur
c. Fase III 2021: Penguatan Kelembagaan
d. Fase IV 2022-2023: Budaya Kepatuhan

5. Penguatan sistem *compliance* dengan tersedianya regulasi/kebijakan baru terkait kepatuhan yaitu:
   a. Perdir Nomor 0048.P/DIR/2020 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero)
   b. Edaran Direksi (EDIR) Nomor 009.E/DIR/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Fraud Risk Assessment* di Lingkungan PT PLN (Persero)
   c. EDIR Nomor 0011.E/DIR/2020 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero)
   d. EDIR Nomor 0012.E/DIR/2020 tentang Pedoman Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero)
   e. EDIR Nomor 0013.E/DIR/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Integrity Due Dilligence* di Lingkungan PT PLN (Persero)
6. *Capacity building* yang telah dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan sebanyak 24 Diklat/*Workshop Fraud Risk Management* Tingkat Dasar dan/atau Lanjutan dan 10 Diklat/*Workshop* PLN Berintegritas Tingkat Dasar dan/atau Lanjutan.
7. *Set-up* Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada tanggal 28 April 2020 dan telah tersertifikasi untuk DIV GBM dan DIV TRE pada tanggal 10 Agustus 2020.
8. Penilaian *Maturity Level* kepatuhan 2021 dimana pencapaian *Maturity Level* kepatuhan unit induk rata-rata pada level 4,09 (skala 5) dan divisi/satuan rata-rata pada level 4,16. (skala 5). Rata-rata *Maturity Level* keseluruhan Unit dan Divisi tahun 2021 adalah 4,125
9. Evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan hasil:
   a. Hasil evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi UPG PLN yang dilakukan oleh KPK sebesar 84,10,
   b. Konfirmasi Kejadian Gratifikasi dan COI rata-rata sampai dengan Desember 2021 sebesar 97,84%,
   c. Hasil survei *Awareness* Kepatuhan rata-rata tahun 2021 untuk seluruh Unit dan Divisi 99%.
10. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): pelaporan LHKPN PLN tahun 2020 sudah 100%. Untuk tahun 2021 Jumlah Wajib Lapor(WL) LHKPN sebanyak 8672 WL

a. Phase I 2019-2020: Transformation Program Compliance
b. Phase II 2020: Infrastructure Development
c. Phase III 2021: Institutional Strengthening
d. Phase IV 2022-2023: Compliance Culture

5. Strengthened compliance system with the availability of new regulations/policies related to compliance, namely:
   a. Perdir Number 0048.P/DIR/2020 concerning Anti-Bribery Governance within PT PLN (Persero)
   b. Board of Directors' Circular (EDIR) Number 009.E/DIR/2020 concerning Guidelines for Implementing Fraud Risk Assessment in PT PLN (Persero)
   c. EDIR Number 0011.E/DIR/2020 concerning Guidelines for Anti-Bribery Compliance Functions within PT PLN (Persero)
   d. EDIR Number 0012.E/DIR/2020 concerning Guidelines for Internal Auditing Anti-Bribery Management Systems in PT PLN (Persero)
   e. EDIR Number 0013.E/DIR/2020 concerning Guidelines for Implementing Integrity Due Diligence within PT PLN (Persero)
6. Held capacity building in the form of 24 Basic and/or Advanced Level Training/Workshop Fraud Risk Management and 10 PLN Training/Workshops with Basic and/or Advanced Level of Integrity.
7. Set-up ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System on April 28, 2020 which has been certified for DIV GBM and DIV TRE on August 10, 2020.
8. The 2021 Maturity Level assessment reached a compliance Maturity Level with the average of 4.09 (scale of 5) on the main unit and 4.16 (scale of 5) on the division/unit. Average Maturity Level on the overall Units and Divisions in 2021 was 4.125
9. Evaluated Gratification Control Unit (UPG) with the following results:
   a. Evaluation of the implementation of PLN UPG gratification control carried out by KPK obtained a score of 84.10,
   b. Confirmation of Gratification Events and COI on average until December 2020 was 93%,
   c. Compliance Awareness survey results in 2021 was an average of 99% for all Units and Divisions
10. Monitoring of State Administrators Wealth Reports (LHKPN): PLN's 2020 LHKPN reporting was 100%. For 2021, the total Mandatory Reports (WL) of LKHPN was 8672 WL

11. Penyusunan Tabel Efisiensi Kelistrikan KPK 2019 dimana semua rencana aksi dari rekomendasi sudah terlaksana seluruhnya.
12. Rencana Pengelolaan WBS dimana saat ini draf perubahan regulasi WBS telah selesai dilanjutkan dengan program penguatan infrastruktur laporan WBS dan integrasi WBS dengan KPK.

Pencapaian *Compliance* 2021

1. PLN meraih penghargaan "Pengelolaan LHKPN Terbaik untuk Kategori > 1000 wajib lapor (WL)" dari KPK,
2. Jumlah Wajib Lapor LHKPN PLN tahun 2020 sebesar 8.211 pegawai: 100%,
3. Mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Seluruh Divisi/Satuan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (70 Divisi/Satuan), 48 Unit Induk dan 11 Anak perusahaan.

Target *Compliance* 2022

1. Penyempurnaan Kebijakan, Pedoman, Standar Kepatuhan (Peraturan dan Edaran Direksi, Juklak serta Juknis)
2. Program Pengelolaan Risiko *Fraud* Korporat
3. Program Pengelolaan Risiko *Fraud* pada Poryek Strategis
4. Evaluasi dan Audit *Surveillance* SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
5. Program *Capacity Building Kepatuhan*
6. Program Peningkatan Kualitas Hasil Pembelajaran kepatuhan
7. Program pengembangan Infrastruktur Kepatuhan
8. Asesmen *Maturity Level* Kepatuhan
9. Program Pendampingan Kepatuhan

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal merupakan sistem internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan pelaksanaan transaksi telah melalui mekanisme yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal PLN melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, anggota manajemen lainnya serta seluruh personel Perusahaan agar memperoleh keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

11. Compilation of 2019 KPK Electricity Efficiency Table where all action plans of recommendations have been fully implemented.
12. WBS Management Plan where the WBS regulation changes draft has been completed and continued to strengthen WBS reporting infrastructure and WBS integration with KPK.

Compliance Achievements in 2021

1. PLN won the "Best LHKPN Management for Category > 1000 Compulsory Reports (WL)" from KPK,
2. The number of mandatory LHKPN PLN reports was 8,211 personnel: 100%,
3. PLN obtained SNI ISO 37001:2016 Certification Anti-Bribery Management System Certificate for All Divisions/Units at PT PLN (Persero) Head Office (70 Divisions/Units), 48 Parent Units, and 11 Subsidiaries.

Compliance Target in 2022

1. Completion of Policies, Guidelines, Compliance Standards (Regulations and Circulars of the Board of Directors, Technical Guidelines and Technical Guidelines)
2. Corporate Fraud Risk Management Program
3. Fraud Risk Management Program in Strategic Projects
4. Evaluation and Surveillance Audit of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System
5. Compliance Capacity Building Program
6. Program to Improve the Quality of Compliance Learning Outcomes
7. Compliance Infrastructure Development Program
8. Compliance Level Maturity Assessment
9. Compliance Assistance Program

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is an internal system of each work unit or organizational unit to ensure that every decision-making related to transactions is made correctly, fairly, and accountably. Internal control system involves the Board of Commissioners, the Board of Directors, other members of management and all the Company's personnel to provide reasonable assurance of operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

Kesesuaian Sistem Pengendalian internal Dengan Kerangka Yang Diakui Internasional (COSO)

PLN mengembangkan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*), sebuah organisasi internasional yang menyediakan kerangka dan pedoman terkait manajemen risiko pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

Definisi pengendalian internal menurut COSO adalah proses yang dirancang manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) agar dapat mencapai tujuan organisasi yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi (*effective and efficient operations*);
2. Pelaporan keuangan yang andal (*reliable financial reporting*); dan
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan (*compliance with applicable laws and regulations*).

Untuk memenuhi kriteria COSO tentang pelaporan keuangan yang andal PLN menerapkan ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*). Oleh karena itu, pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICoFR) didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan.

Conformity of Internal Control System to Internationally Recognized Framework (COSO)

PLN developed internal control system with reference to COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions), which is an international organization that provides frameworks and guidelines for internal control risk management and fraud prevention.

COSO defines internal control as a process designed by a company's management to provide reasonable assurance to achieve organizational goals divided into 3 categories, namely:

1. Effective and efficient operations;
2. Reliable financial reporting; and
3. Compliance with applicable laws and regulations.

To meet the COSO criteria regarding reliable financial reporting, PLN adopts ICoFR (Internal Control over Financial Reporting). Therefore, ICoFR is defined as a process designed and implemented by management to provide reasonable assurance regarding reliability of financial statements.

Manfaat ICoFR bagi PLN /
Benefit of ICoFR for PLN

- Mencegah salah saji material dalam pelaporan keuangan / Preventing misstatement of material in financial reporting
- Mencegah terjadinya *fraud* / Preventing fraud
- Menumbuhkan budaya peduli terhadap risiko dan kontrol / Encouraging culture that cares about risk and control
- Memperbaiki/menyempurnakan proses bisnis / Improving/ refinering business process
- Mengurangi jurnal-jurnal penyesuaian (*adjustment*) / Reducing adjustment journals
- Meningkatkan integritas data dan informasi operasional / Improving data integrity & operational information
- Meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan / Improving decision-making process quality
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan / Improving financial accountability and transparency

Dalam konteks ICoFR, laporan keuangan yang andal adalah kondisi laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material. Keandalan laporan keuangan diperoleh dari kelengkapan dan akurasi pencatatan transaksi, pengklasifikasian dan periode pencatatan yang tepat, serta seluruh aspek lainnya dari pengendalian pelaporan keuangan yang secara tradisional telah dilaksanakan. Penerapan ICoFR di PLN diharapkan tidak hanya membantu Perusahaan dalam mencapai keandalan laporan keuangan, tetapi untuk membuktikan bahwa proses bisnis sudah dijalankan secara efektif.

In terms of ICoFR, reliable financial statement is condition of financial statements that is free of material misstatements. The reliability of financial statements is derived from completeness and accuracy of transactions recording, classification and relevant recording period, as well as all other aspects of traditional and operable financial reporting controls. ICoFR implementation in PLN is expected not only to assist the Company in achieving financial statements reliability, but also to help provide evidence that the business process runs effectively.

Roadmap Pengembangan ICoFR

ICoFR Development Roadmap

Penyesuaian Rancangan ICOFR /
Adjustment of ICOFR as-is Design

Menyesuaikan rancangan *piloting* ICOFR sesuai dengan struktur organisasi baru / Adjustment of ICOFR ploting design accordance with the new organization structure

Penyesuaian Rancangan ICOFR /
Adjustment of ICOFR as-is Design

Roll-out implementasi ICOFR ke Unit seluruh Indonesia / Roll-out ICOFR implementation to units Across Indonesia.

Proses Pengelolaan dan Pelaporan ICOFR /
ICOFR Management and Reporting Process

CSA perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan pelaporan yang mudah untuk dilaksanakan. Tantangannya antara lain: / Effective and efficient CSA is necessary with easy reporting implementation. The challenges are among others:

- Pengelolaan dokumen *manual* (*hardcopy*) pendukung *test of controls* / Manual document (hardcopy) management supporting the test of controls
- Melaporkan informasi status efektivitas kontrol dari seluruh wilayah ke Kantor dengan mudah dan cepat / Easy and fast reporting on control effectiveness status information from all regions to the Office

A — **Prototipe rancangan ICOFR dan *roll-out* ke seluruh unit PLN / Prototypes of ICOFR design and roll-out to all PLN Units**

B — **Otomatisasi pelaporan ICOFR GRC *application program* / Automation of ICOFR GRC application program reporting**

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Tahun 2021

Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal melalui audit Sistem Pengendalian Intern (SPIn). Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan operasional dengan cara yang lebih efektif. Adapun kriteria penilaian audit SPIn terdiri dari 5 komponen COSO *Internal Control Integrated Framework* 2013 yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Asesssment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Aktivitas Monitoring (*Monitoring Activity*)

Pelaksanaan audit SPIn tahun 2021 dilakukan oleh bidang audit regional terhadap 43 Unit Induk dan 4 unit Kantor Pusat dengan level pemenuhan komponen pengendalian intern terhadap standar COSO adalah sebagai berikut:

Evaluation of Effectiveness of Internal Control System in 2021

The Internal Control Unit (SPI) evaluates the effectiveness of the internal control system through an Internal Control System audit (SPIn). The results of this evaluation serve as the basis for improvement and refinement of systems or policies that enable management to carry out operational activities in a more effective manner. The SPIn audit assessment criteria consist of 5 components of the 2013 COSO Internal Control Integrated Framework, namely:

1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and Communication
5. Monitoring Activity

Implementation of the 2021 SPIn audit is carried out by the regional audit department on 43 Main Units and 4 Head Office units with the compliance level to the internal control system to the COSO standards is as follows:

No	Komponen SPIn / *SPIn Component*	Implementasi (%) / *Implementation (%)*
1	Lingkungan Pengendalian / Control Environment	71
2	Penilaian Risiko / Risk Assessment	82
3	Aktivitas Pengendalian / Control Activities	81
4	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	94
5	Aktivitas Monitoring / Monitoring Activity	69

Tinjauan Efektivitas Pengendalian Internal oleh Direksi dan/Atau Dewan Komisaris

PLN telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal atas laporan keuangan *audited* periode 31 Desember 2021 dan berbagai aspek operasional serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Dewan Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2021, sistem pengendalian internal Perseroan atas telah berjalan dengan efektif dan memadai sesuai dengan lingkungan bisnis dan ekonomi serta regulasi yang dihadapi Perseroan.

Review of Internal Control Effectiveness by Board of Directors and/or Board of Commissioners

PLN has evaluated the effectiveness of the internal control system over the audited financial statements for December 31, 2021 period and various operational aspects as well as compliance with laws and regulations. Based on the evaluation, the Board of Commissioners and the Board of Directors concluded that until December 31, 2021, the Company's internal control system has been running effectively and adequately in accordance with the business and economic environment as well as regulations applicable to the Company.

PERMASALAHAN HUKUM

Berikut ini adalah informasi tentang perkara hukum yang sedang dihadapi Perusahaan dan anak perusahaan:

LEGAL ISSUES

Information on legal cases faced by the Company and subsidiaries is as follows:

No	Pokok Perkara Hukum / *Substance of the Case*	Status Penyelesaian / *Settlement Status*	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/ gugatan / *Risks faced by the company and value of claim*	Pengaruhnya Terhadap Perusahaan / *Impact on the Company*
1	Pada tanggal 20 September 2017 Perusahaan menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh PT Putera Daya Perkasa ("Penggugat") di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait aset Perusahaan berupa Gardu Induk 150 kV yang terletak di Kawasan Industri Pasar Kemis. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp86.194 Miliar. / On September 20, 2017 the Company faced a civil lawsuit filed by PT Putera Daya Perkasa (" Plaintiff ") at the South Jakarta District Court regarding Company assets of 150 kV Main Shelter located in the Pasar Kemis Industrial Estate . Plaintiff demand compensation amounting to Rp. 86,194 billion . Pada tanggal 4 April 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat. / On April 4, 2019, the South Jakarta District Court has ruled to deny the compensation demanded by the Plaintiff. Penggugat mengajukan Banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan perkara ini telah diputuskan tanggal 9 Januari 2020 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat mengajukan Kasasi atas putusan Banding tersebut ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 27 April 2021, Mahkamah Agung telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak upaya kasasi dari Pengguat. / Plaintiff appealed against the ruling to the Jakarta High Court and this has been settled on January 9 , 2020 with the ruling to strengthen the ruling of the South Jakarta District Court. . Plaintiff submitted Cassation on the ruling of the appeal to Supreme Court and on 27 April 2021, the Supreme Court has ruled to deny the cassation from the Plaintiff.	Perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi / The case has been ruled by the Supreme Court at the level of Cassation	Risiko yang dihadapi perusahaan : / Risk faced by the Company: Nilai Tuntutan : Rp86.194 Miliar / Claim Value: Rp86,194 Billion	Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. / Has no material impact to the status, position, and continuity of business activities of the Company
2	Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd ("PCML") sebagai Termohon 1 dan Perusahaan sebagai Termohon 2 di *International Court of Commerce* ("ICC"). Permohonan tersebut terkait sengketa Gas *Transportation Agreement* ("GTA") antara PCML selaku *Shipper*/Penjual, KJG selaku *Transporter*, dan Perusahaan selaku *Offtaker*/Pembeli mengenai kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati. / On August 29, 2018, the Company faced a Petition for Arbitration filed by PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") as the Petitioner against PC Muriah Ltd ("PCML") as Defendant 1 and the Company as Defendant 2 in the International Court of Commerce ("ICC"). The request is related to the Gas Transportation Agreement ("GTA") dispute between PCML as Shipper/Seller, KJG as Transporter, and the Company as Offtaker/Buyer regarding the lack of payment for gas transportation costs to PLTGU Tambak Lorok because the volume of gas sent is less than the minimum gas volume. agreed. Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternatif dengan PCML bertanggung jawab atas *Ship or Pay* ("SOP") 2016 - 2019 senilai USD144.536.674,7 (nilai penuh) ditambah biaya-biaya (*pre-award* dan *post-award*). / The Applicant demands a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's invoice since April 2018 and alternatively with PCML liable for Ship or Pay ("SOP") 2016 - 2019 amounting to USD144,536,674.7 (full amount) plus costs (pre -award and post-award)	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di International Court of Commerce Singapura / This case is still in the examination process in the Singapore International Court of Commerce	Risiko yang dihadapi Perusahaan : / Risks faced by the Company: Nilai Tuntutan : USD 144,54 Juta / Claim Value: USD 144.54 Million	Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan karena berdasarkan fakta hukum, kegagalan pengiriman volume gas yang disepakati tidak disebabkan oleh kesalahan dari Perusahaan melainkan kesalahan dari PCML karena kegagalannya dalam menyediakan gas sesuai volume gas minimum yang disepakati / Has no material impact to the status, position, and continuity of business activities of the Company as, on a legal view, the failure to deliver the agreed gas volume is not caused by the Company, but rather due to PCML not providing the agreed minimum gas volume.

No	Pokok Perkara Hukum / *Substance of the Case*	Status Penyelesaian / *Settlement Status*	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/ gugatan / *Risks faced by the company and value of claim*	Pengaruhnya Terhadap Perusahaan / *Impact on the Company*
3	Pada tanggal 31 Mei 2018, Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terhadap IP dan PT Perusahaan Gas Negara kepada BANI. Perselisihan ini disebabkan permintaan pengakhiran perjanjian sewa fasilitas penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priok oleh IP. Dalam putusan BANI tanggal 16 Juli 2019, IP harus membayar ganti rugi kepada KKLM sebesar Rp172.273. Pada tanggal 11 September 2019, IP mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dari BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diputus pada tanggal 17 Desember 2019 dengan amar putusan membatalkan putusan BANI. Pada tanggal 9 Januari 2020, KKLM mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung. / On May 31, 2018, the Kinarya Liman Margaseta Consortium ("KKLM") submitted a request for dispute resolution through arbitration against IP and PT Perusahaan Gas Negara to BANI. This dispute was caused by IP's request to terminate the lease agreement for the gas fuel distribution facility for PLTGU Priok. In BANI's decision dated July 16, 2019, IP must pay compensation to KKLM in the amount of Rp. 172,273. On September 11, 2019, IP filed a legal action to cancel the arbitration award from BANI to the South Jakarta District Court and it was decided on December 17, 2019 with the decision to cancel BANI's decision. On January 9, 2020, KKLM filed an appeal against the decision of the South Jakarta District Court which annulled the arbitration decision to the Supreme Court. Pada tanggal 12 Mei 2020, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menguatkan Putusan BANI. Pada tanggal 12 Oktober 2020, IP mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. / On May 12, 2020, the Supreme Court decided to annul the decision of the South Jakarta District Court and upheld the BANI Decision. On October 12, 2020, IP filed a judicial review of the decision to the Supreme Court	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. / This case is still in the examination process at the Supreme Court	Risiko : Nilai Tuntutan : 172,27 Miliar / Risks faced by the Company: Claim Value: 172.27 Billion	Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. / Has no material impact to the status, position, and continuity of business activities of the Company
4	Pada tanggal 24 Juni 2020, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") di BANI terkait perselisihan pelaksanaan perjanjian jual beli gas dan kesepakatan bersama dalam hal ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran jumlah minimum gas atau *Take Or Pay* ("TOP") dan jumlah penyaluran gas minimum atau *Ship Or Pay* ("SOP"). / On June 24, 2020, the Company faced a lawsuit filed by PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") at BANI regarding the dispute over the implementation of the gas sale and purchase agreement and the collective agreement in this case regarding the obligation to pay the minimum amount of gas or Take Or Pay ("TOP ") and the minimum amount of gas distribution or Ship Or Pay ("SOP"). Pemohon menuntut pembayaran TOP dan SOP tersebut mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan nilai total USD31.523.588 (nilai penuh). Pada 3 Mei 2021, BANI telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menghukum Perusahaan membayar USD27.021.871 (nilai penuh). Pada tanggal 22 Juni 2021, Perusahaan mengajukan upaya hukum pembatalan putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. / The applicant demands payment of the TOP and SOP starting from 2015 to 2019 with a total value of USD31,523,588 (full amount). On May 3, 2021, BANI has decided this case with a verdict punishing the Company to pay USD27,021,871 (full amount). On June 22, 2021, the Company filed a legal action to cancel the BANI decision to the South Jakarta District Court Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan upaya pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Perusahaan melalui Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan membatalkan Putusan BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 3 Mei 2021. Pada tanggal 21 Oktober 2021, SEG mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Putusan Arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung. / On October 11, 2021, the South Jakarta District Court has decided to cancel the arbitration award submitted by the Company through Decision No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel with the decision to cancel BANI Decision No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 dated May 3, 2021. On October 21, 2021, SEG filed an appeal against the decision of the District Court which annulled the Arbitration Award to the Supreme Court	Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. / This case is still in the examination process at the Supreme Court	Risiko : Nilai Tuntutan : USD 31,52 Juta / Risks: Claim Value: USD 31.52 Million	Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. / Has no material impact to the status, position, and continuity of business activities of the Company

No	Pokok Perkara Hukum / *Substance of the Case*	Status Penyelesaian / *Settlement Status*	Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/ gugatan / *Risks faced by the company and value of claim*	Pengaruhnya Terhadap Perusahaan / *Impact on the Company*
5	Pada tanggal tanggal 29 April 2021, perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ince Baharudin dan Ince Rahmawati sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Makasar dengan register No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks terkait kepemilikan aset tanah milik Perusahaan di Jalan Latimojong Makasar. Penggugat mengajukan kerugian materiil akibat penguasaan tanah sengketa oleh Perusahaan sebesar Rp432.647 dan kerugian non materiil sebesar Rp200.000. Penggugat mengajukan tuntutan agar Perusahaan mengosongkan tanah dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut ke Penggugat / On April 29, 2021, the company faced a lawsuit filed by Ince Baharudin and Ince Rahmawati as Plaintiffs at the Makassar District Court with register No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks regarding the ownership of land assets belonging to the Company on Jalan Latimojong Makasar. The plaintiff filed for material losses due to the Company's control of the disputed land amounting to Rp432,647 and non-material losses amounting to Rp200,000. The Plaintiff filed a demand that the Company vacate the land and then hand over the land to the Plaintiff	Perkara ini telah di Putus Pengadilan Negeri Makassar dan sedang dalam tenggang waktu pengajuan banding oleh Penggugat (Konfirmasi ke SMPN) / This case has been ruled by the Makassar District Court and currently is in the period of appeal by the Plaintiff (Confirmation to the SMPN)	Risiko : Nilai Tuntutan : Penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam bentuk pembayaran uang namun menuntut agar Perusahaan mengosongkan tanah dan diserahkan ke Penggugat / Risks: Claim Value: Plaintiff did not file the case in demanding payment of cash but demanded the Company vacate the land and then hand over the land to the Plaintiff	Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. / Has no material impact to the status, position, and continuity of business activities of the Company

Permasalahan hukum yang melibatkan Dewan komisaris dan Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tidak terdapat permasalah hukum pidana yang melibatkan Dewan komisaris dan/atau Direksi pada tahun 2021.

SANKSI ADMINISTRATIF OLEH REGULATOR

PLN menyatakan tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait pada tahun buku 2021.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai implementasi prinsip keterbukaan informasi, PLN menyediakan sarana dan fasilitas komunikasi untuk memudahkan para pemangku kepentingan memperoleh berbagai informasi terkait aktivitas dan kinerja Perusahaan yang tidak berklasifikasi rahasia. Seluruh informasi berkaitan dengan PT PLN (Persero) dapat diperoleh di:

Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. :+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax. :+62 21 7221330
Website : www.pln.co.id

Legal issues involving the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021 are as follows:

There were no civil legal cases involving the Board of Commissioners and/or Directors in 2021.

ADMINISTRATIVE SANCTION IMPOSED BY REGULATOR

PLN declares the absence of administrative sanction imposed to the Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the relevant authorities in 2021 fiscal year.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

In implementing the principle of information transparency, PLN provides easy access communication facilities for stakeholders to obtain various information on the Company's activities and performance which are not classified as confidential. All information related to PT PLN (Persero) can be obtained at:

Corporate Secretary of PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. :+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax. :+62 21 7221330
Website : www.pln.co.id

PLN memiliki beragam sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, diantaranya adalah: / PLN has various facilities that serve as channels of information disclosure, as follows:

RUPS / *GMS*	Sarana komunikasi PLN dengan Pemegang Saham untuk penyampaian informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perusahaan serta pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham. / PLN communication channel with the Shareholder for information disclosure on the Company and decision-making that requires shareholder approval.
Situs *Website* / *Website*	PLN memiliki situs web resmi http://www.pln.co.id. Para pemangku kepentingan dapat menemukan berbagai informasi terkini terkait Perusahaan, seperti profil Perusahaan, struktur organisasi, profil manajemen, inovasi dan sertifikasi, informasi kegiatan Perusahaan, tata kelola perusahaan, Pedoman Perilaku, *Whistleblowing System*, rilis media, laporan dan presentasi termasuk Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan. Publikasi informasi yang tersedia di situs web Perusahaan telah mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. / PLN has an official website at http://www.pln.co.id. The stakeholders can find the Company's latest information, such as company profile, organizational structure, management profile, innovation and certification, corporate activities, corporate governance, Code of Conduct, whistleblowing system, media release, reports and presentations, including Annual Report, Sustainability Report, and Financial Statements. Publication of information available on the Company's website refers to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuer or Public Company.
Keterbukaan Informasi Publik / *Public Information Disclosure*	Dalam rangka menerapkan prinsip GCG terutama prinsip transparansi, serta sebagai implementasi Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perusahaan berusaha meningkatkan transparansi perusahaan dan membentuk perangkat pelayanan informasi publik. Perusahaan menunjuk *Corporate Secretary* di tingkat PLN Pusat dan manajer senior/manajer bidang terkait di unit sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui pelayanan informasi publik ini hak masyarakat mendapatkan informasi mengenai perusahaan, layanan perusahaan, laporan keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan informasi terkait lainnya dapat terpenuhi. / To implement GCG principles, especially the transparency principle, as well as Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the Company seeks to improve corporate transparency and to provide public information service. The Company appoints the Corporate Secretary at PLN Head Office and senior managers/related field managers at units as Information and Documentation Management Officers (PPID). This public information service aims at fulfilling the public's rights to obtain information about the Company, the Company's services, financial statements, corporate social responsibility, and other related information. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, dapat mengunjungi situs web www.pln.co.id; atau dapat mengirimkan surat ke Perusahaan dalam rangka mendapatkan informasi sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang ada di Perusahaan. / People who wish to obtain information can visit the website www.pln.co.id or send a letter to the Company to obtain information in accordance with the Company's List of Public Information.
Email	Perusahaan membuka alamat email resmi pln123@pln.co.id bagi pemangku kepentingan yang ingin menyampaikan saran, keluhan dan meminta informasi mengenai kondisi Perusahaan terkini. Untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, perusahaan juga memiliki alamat email resmi investor.relation@pln.co.id yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi seluruh investor PLN yang membutuhkan informasi dan data terkait kondisi Perusahaan. / The Company provides official e-mail address pln123@pln.co.id for stakeholders to submit suggestions, complaints, or request information on the Company's current condition. To improve service for investors, the Company also has an official email address investor.relation@pln.co.id as a means of communication for all PLN investors who require information and data related to the condition of the Company.
Media Komunikasi Lainnya / *Other Communication Media*	• Media Internal PLN Media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh pegawai dan dipublikasikan dalam bentuk Majalah Digital FOKUS, Facebook Closed Group PLNKita (https:/www.facebook.com/groups/plnkita), Newsletter PLNKita, e-mail PLN-KITA@pln.co.id, Portal Internal PLNKita (portalkita.pln.co.id), Media Sosial PLNKita (kita.pln.co.id). / Internal media that serves as a means of information, education and dissemination of management policies for all employees and published in the form of Digital Magazine FOKUS, Facebook Closed Group PLNKita (https:/www.facebook.com/groups/plnkita), newsletter PLNKita, Internal Portal PLNKita (portalkita.pln.co.id), Social Media PLNKita (kita.pln.co.id). • Media Aplikasi Mobile Perusahaan memiliki aplikasi layanan digital PLN Mobile untuk Android dan iOS. Aplikasi ini juga memiliki fitur PLN Magazine yang menampilkan update pemberitaan korporat. / The Company provides PLN Mobile application for Android and iOS. This application also has PLN Magazine feature that provides corporate news updates.
Media Sosial / *Social Media*	• **Pelayanan atau *contact Center* PLN 123: / Contact Center PLN 123:** Twitter :@pln_123 Facebook Fanpage : PLN 123 Instagram : @pln123_official Telepon : 123 Handphone : (kode area) 123 e-mail : pln123@pln.co.id • **Informasi Korporat: / Corporate Information:** Twitter : @_pln_id Facebook Fanpage : PLN Instagram : @pln_id Youtube : PLN

TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN

Program Budaya

TRANSFORMATION OF CORPORATE CULTURE

Cultural Program

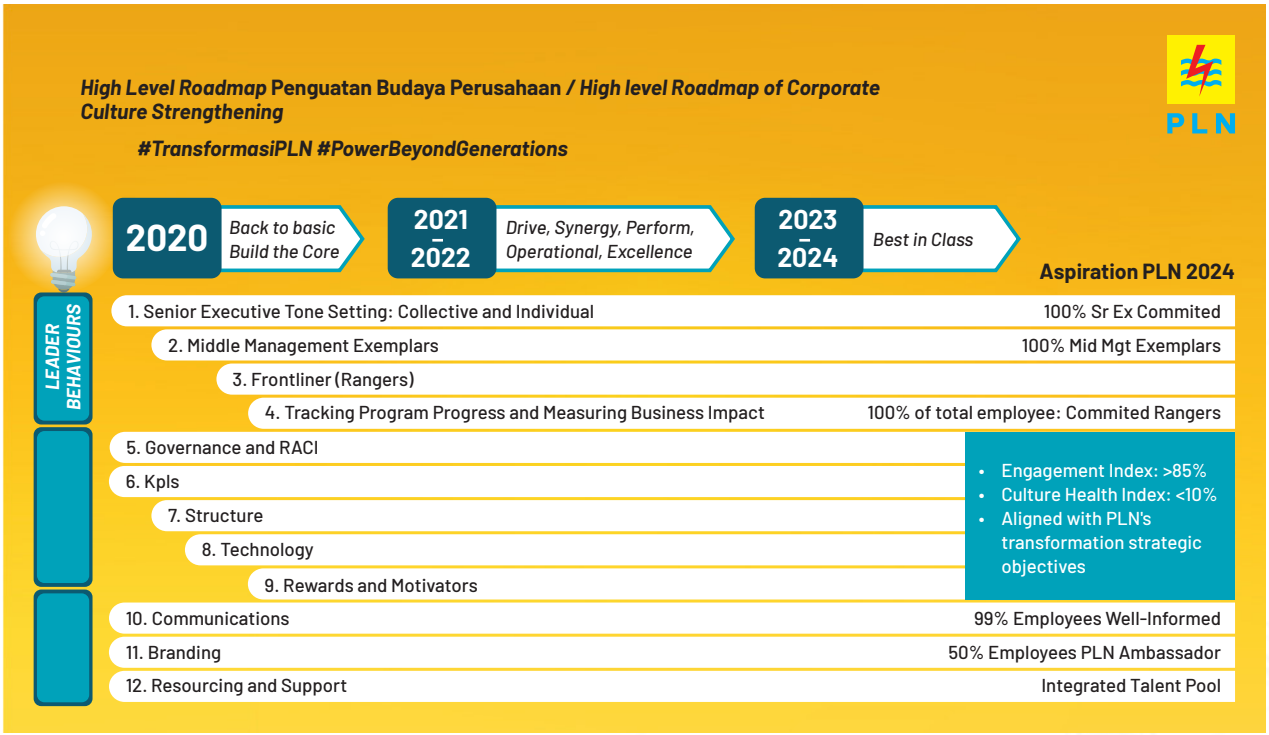

Sehubungan dengan telah selesainya implementasi *Road Map* Budaya 2017-2019, implementasi Program Transformasi dan terdapatnya perubahan Nilai-nilai Budaya kami mengintrodusir Program Budaya, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan akan berlangsung hingga beberapa tahun kedepan.

Adapun gambaran penerapan Program Budaya yang akan kami laksanakan dalam beberapa tahun mendatang dapat dilihat dari beberapa diagram berikut.

In connection with the completion of the 2017-2019 Cultural Road Map implementation, the implementation of the Transformation Program and the changes in Cultural Values, we introduced the Cultural Program, which began to be implemented in 2020 and will last for the next few years.

The description of the implementation of the Cultural Program that we will carry out in the next few years can be seen from the following diagrams.

Bagaimana PLN Mengimplementasikan Program Budaya

How PLN Implements the Cultural Program

Penyusunan program budaya melibatkan BOD, kemudian dijalankan di seluruh unit kerja (Divisi, Unit) dan Anak Perusahaan / Preparation of the cultural program involves the BOD to be implemented by all work units (Division, Unit) and Subsidiaries

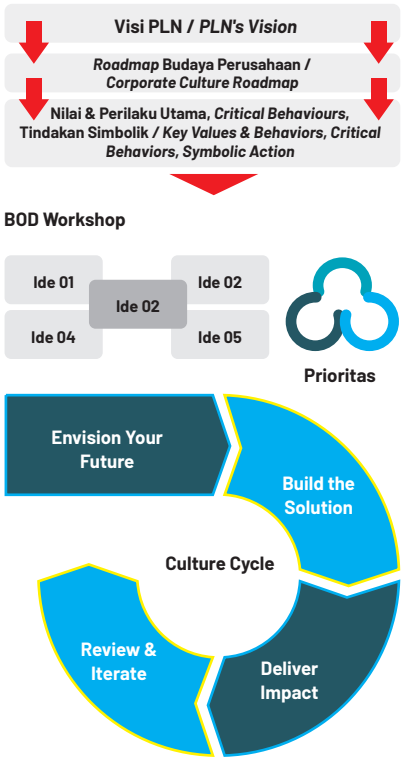

Program Budaya Nasional untuk mewujudkan GRC Culture (PLN1), *Collaboration & Performance Culture* (PLN 2), dan *Service Culture* (PLN3) / National Cultural Program to realize GRC Culture (PLN1), Collaboratio & Performance Culture (PLN 2), and Service Culture (PLN3)

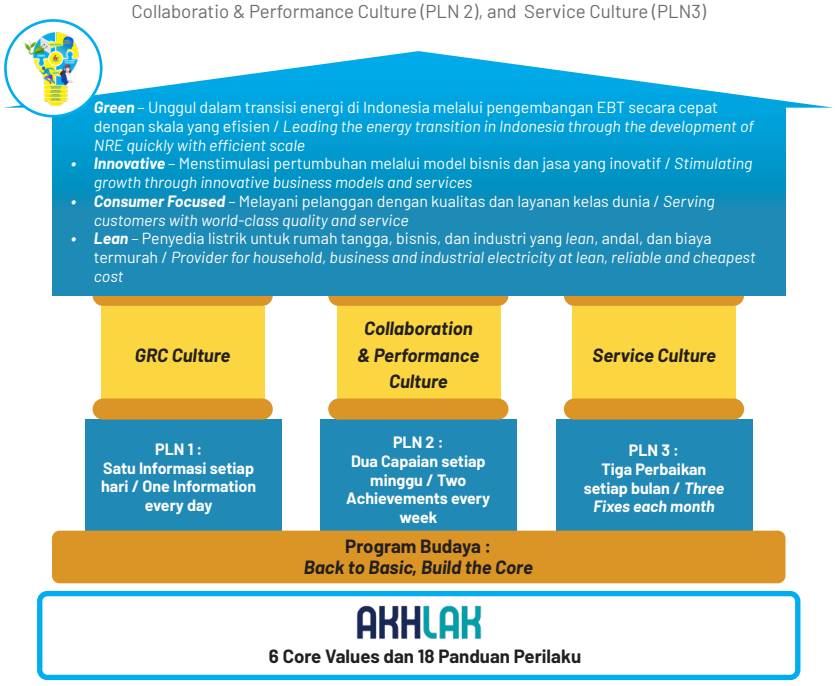

Ranger Network PLN Group baik di Divisi Kantor Pusat, Unit Induk dan Anak Perusahaan (± di 113 Unit Kerja) merupakan kombinasi formal dan informal leader dan menjadi driver utama perubahan / PLN Group Ranger Network both in the Divisions of Head Office, Main Units, and Subsidiaries (+- 113 Work Units) are combinations of formal and informal leaders which serve as key drivers of change

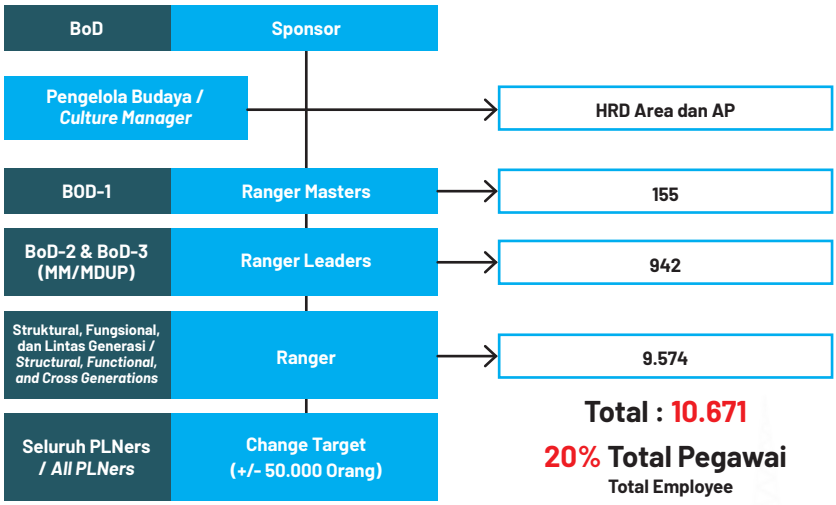

Setelah *enforcement* dalam bentuk Peraturan Direksi, *Roadmap*, *Critical Few Behavior* AKHLAK, Program budaya PLN 1, 2, dan 3 ditetapkan oleh Direksi untuk menjawab tantangan Budaya PLN Group, selanjutnya seluruh Divisi, Unit dan Anak Perusahaan (melibatkan *ranger network* dan PLNers) menyusun Program PLN 1, 2, dan 3 untuk segera dieksekusi sesuai objektif budaya dan kinerja berdasarkan panduan penyusunan program budaya. Program budaya

After the enforcement in the form of Board of Directors Regulations, Roadmaps, Critical Few Behaviors AKHLAK, PLN 1, 2, and 3 cultural programs are determined by the Board of Directors to answer the challenges of the PLN Group Culture, then all Divisions, Units and Subsidiaries (involving ranger networks and PLNers) develop a program PLN 1, 2, and 3 to be executed immediately according to cultural and performance objectives based on the guidelines

yang disusun harus *fun*, memberikan dampak pada perubahan perilaku dan budaya, serta melibatkan banyak PLNers.

for preparing cultural programs. The cultural program that is prepared must be fun, have an impact on changing behavior and culture, and involve many PLNers.

Powerful Program

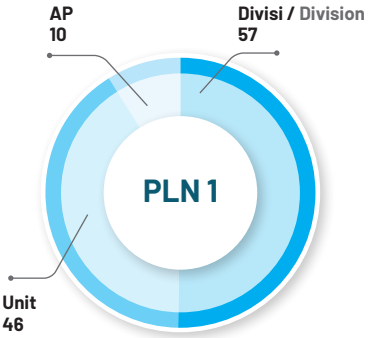

Total Program PLN 1 adalah 113 Program /
Total Programs of PLN 1 is 113 Programs

Powerful Program

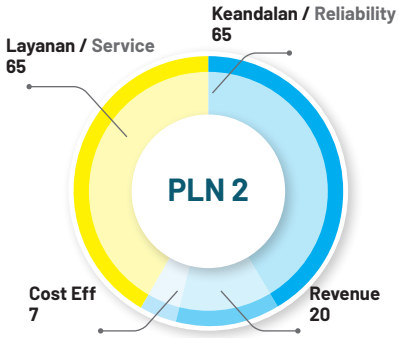

Total Program PLN 2 adalah 157 Program /
Total Programs of PLN 2 is 157 Programs

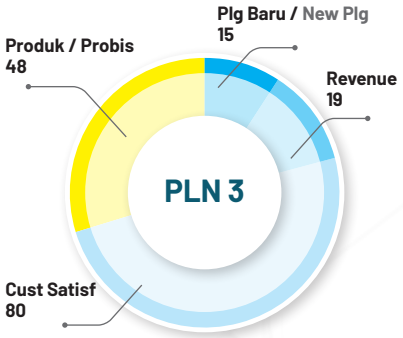

Total Program PLN 3 adalah 162 Program /
Total Programs of PLN 3 is 162 Programs

Program budaya disusun berdasarkan roadmap dan objektif budaya PLN Group. Jika tahun 2020-2021 (*milestone* 1), tema budaya adalah *"Back to basic, build the core"*, maka tema pada tahun 2021-2022 (*milestone* 2) adalah *"Drive synergy, perform operational excellence"*. Tema meneruskan upaya untuk mencapai 3 objektif budaya PLN Group, yaitu:

1. *Governance, risk and compliance culture*;
2. *Collaboration and performance culture*; dan
3. *Service culture*.

Masing-masing objektif diturunkan dalam bentuk program PLN 1 untuk menjawab *GRC Culture*, PLN 2 untuk menjawab *Collaboration & performance culture* dan PLN 3 untuk menjawab *Service Culture*. Sedangkan untuk memastikan pencapaian budaya tersebut, maka ditetapkan 5 *critical few behavior* dari AKHLAK yang melekat ke dalam semua program, yaitu:

1. Memenuhi janji dan Komitmen (*value* Amanah);
2. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama (*value* Kolaboratif);
3. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi (*value* Adaptif);
4. Bertindak proaktif (*value* Adaptif); dan
5. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik (*value* Kompeten)

The cultural program is prepared based on the PLN Group cultural roadmap and objectives. If in 2020-2021 (milestone 1), the cultural theme is "Back to basic, build the core", then the theme for 2021-2022 (milestone 2) is "Drive synergy, perform operational excellence". The theme is continuing efforts to achieve the 3 PLN Group cultural objectives, namely:

1. Governance, risk and compliance culture;
2. Collaboration and performance culture; dan
3. Service culture.

Each objective is derived in the form of PLN 1 program to answer GRC Culture, PLN 2 to answer Collaboration & performance culture and PLN 3 to answer Service Culture. Meanwhile, to ensure the achievement of this culture, 5 critical few behaviors from AKHLAK are determined which are inherent in all programs, namely:

1. Fulfilling promises and commitments (value Amanah);
2. Mobilizing the use of various resources for common goals (Collaborative value);
3. Keep following the improvements of technological developments (Adaptive value);
4. Acting proactively (Adaptive value); and
5. Completing tasks with the best quality (competent value)

Tindakan Simbolik *Leader* (BOD & BOD-1) sebagai Wujud *Leader as Role Model*

Seluruh BOD dan BOD-1 diharapkan menerapkan tindakan simbolik secara konsisten, baik kolektif maupun individu, sebagai wujud komitmen *Setting Tone from the Top*. Akan dilakukan pengukuran baik dalam bentuk *survey* maupun *callback* untuk melihat konsistensi tersebut dan dilaporkan ke Direktur Utama. Tindakan simbolik juga merupakan komitmen dalam mendorong munculnya *critical few behaviors* dalam lingkup unit kerja *senior leader*. Menindaklanjuti evaluasi Tindakan simbolik *leader* yang diimplementasikan pada *milestone* 1, maka pada agenda implementasi program budaya *milestone* 2 aksi tetap dilanjutkan dengan beberapa penguatan.

Symbolic Actions of Leaders (BOD & BOD-1) to realize Leaders as Role Models

All BOD and BOD-1 are expected to consistently implement symbolic actions, both collectively and individually, as a form of commitment to Setting Tone from the Top. Measurements will be carried out in the form of surveys and callbacks to see the consistency and reported to the President Director. The symbolic action is also a commitment to encourage the emergence of critical few behaviors within the senior leader's work unit. Following up on the evaluation of the leader's symbolic actions implemented at milestone 1, the agenda for implementing the cultural program milestone 2 will continue with several reinforcements.

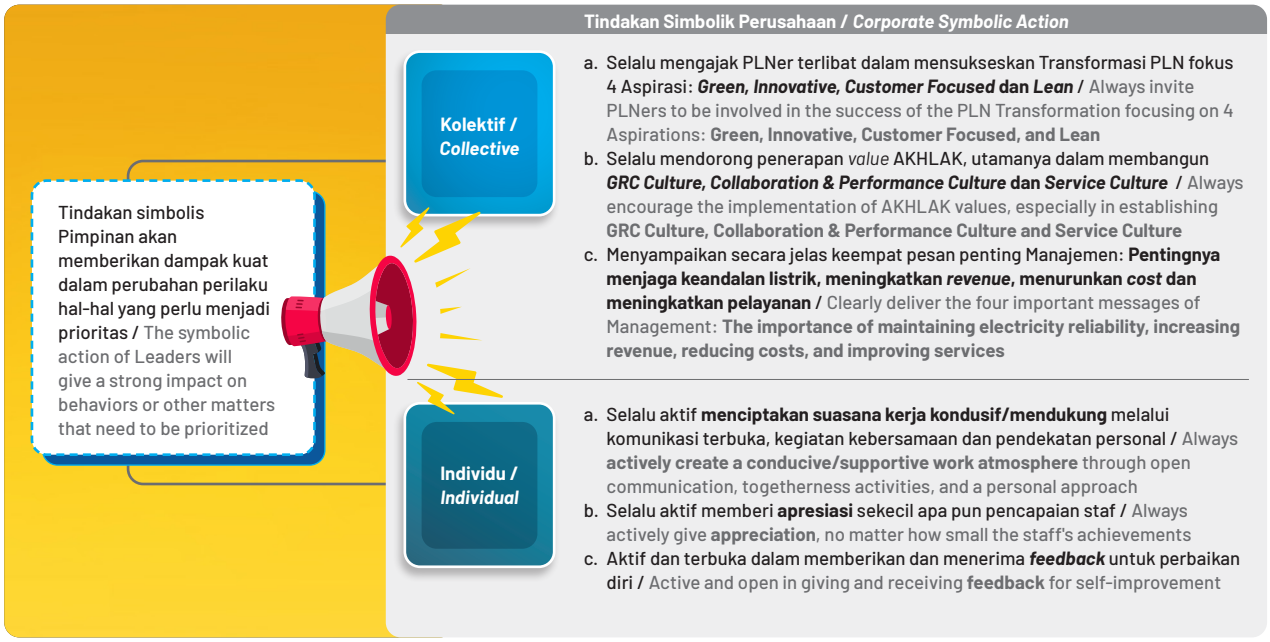

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Standar Etika Perusahaan atau Pedoman Perilaku/*Code of Conduct* (CoC) adalah pedoman bagi seluruh insan PLN dalam berperilaku secara profesional dan berintegritas di lingkungan kerjanya. Pedoman perilaku yang diterbitkan pada tahun 2005 tersebut mengatur aspek kepemimpinan di Perusahaan, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal. Selain itu, Pedoman Perilaku sebagai sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan di antara seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.

CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct (CoC) is a guide for all PLN personnel to act professionally and to uphold integrity in their work environment. The Code of Conduct was issued in 2005 and regulates aspects of leadership, responsible membership, professional relationship, and relationship with external parties. The Code of Conduct is also a means to create harmonious, synergic, and mutually beneficial relationships among all the Company's stakeholders.

Pedoman Perilaku dibuat dalam bentuk buku saku. Melalui berbagai bentuk sosialisasi dan internalisasi, PLN mendorong komitmen kepatuhan seluruh insan PLN terhadap standar etika dan mewajibkan seluruh pimpinan untuk memastikan bahwa Pedoman Perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik di jajarannya masing-masing.

The Code of Conduct is issued in the form of a compact pocketbook. Through various forms of dissemination and internalization, PLN encourages the compliance commitment of all PLN personnel to ethical standards and requires all leaders to ensure that the Code of Conduct is observed and implemented properly by their personnel.

Pada tahun 2010 Pedoman Perilaku mengalami pembaruan melalui Kepdir Nomor 548A/K/DIR/2010 untuk disesuaikan dengan Pedoman GCG dan proses bisnis Perusahaan yang telah berkembang semakin kompleks. Pada tahun 2018 Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis mengalami pembaruan kembali dan telah didiseminasi pada seluruh pegawai.

In 2010, the Code of Conduct was updated through Decree of the Board of Directors No. 548A/K/DIR/2010 to adjust to GCG Guidelines and increasingly complex business practices. In 2018, the Company's Code of Conduct and Business Ethics were updated and disseminated to all employees.

Standar Etika PLN mengatur sejumlah aspek penting seperti kepemimpinan Perusahaan, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota, dan hubungan dengan pihak eksternal.

Code of Conduct Principles PLN Code of Conduct regulates several key elements, such as the Company leadership, responsible membership, professional relationship, and relationship with external parties.

Pokok-Pokok Standar Etika /
Code of Conduct based on Guidelines for Procurement of Goods and Services

- **Hubungan dengan pelanggan /**
  Relation with customers
- **Hubungan dengan mitra kerja/pemasok /**
  Relation with partners/suppliers
- **Hubungan dengan pesaing /**
  Relation with competitors
- **Hubungan dengan investor /**
  Relation with investor
- **Hubungan dengan Pemerintah/DPR /**
  Relation with government/the House of Representatives
- **Hubungan dengan masyarakat /**
  Relation with communities
- **Hubungan dengan media /**
  Relation with media
- **Hubungan dengan organisasi profesi/institusi pendidikan /**
  Relation with professional organization/educational institution
- **Hubungan dengan penegak hukum /**
  Relation with law enforcement

Pemberlakuan Standar Etika Di Seluruh Level Organisasi dan Pemangku Kepentingan

Standar Etika Perusahaan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh:

1. Seluruh insan PLN di segala tingkatan termasuk Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung Dewan Komisaris;
2. Direksi, Dewan Komisaris serta pegawai anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian;
3. Investor Perusahaan (kreditur, pemegang obligasi, dan lain-lain);
4. Para pemangku kepentingan Perusahaan seperti pelanggan, mitra kerja/pemasok, pesaing, investor, Pemerintah/DPR, masyarakat, media, organisasi, profesi/ institusi pendidikan, penegak hukum.

Penyebarluasan Standar Etika Perusahaan

PLN senantiasa melakukan sosialisasi Standar Etika Perusahaan guna memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran seluruh insan PLN agar senantiasa menegakkan Standar Etika Perusahaan. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung ke unit bisnis maupun melalui situs web PLN yang dikenal dengan website KOMANDO (budaya.pln.co.id) di sepanjang tahun 2021.

Bahkan penyampaian Standar Etika Perusahaan telah menjadi bagian dalam indikator kinerja utama (KPI) setiap divisi/unit/unit bisnis sejak tahun 2016. Hal ini diimplementasikan dengan mengadakan *sharing session* Standar Etika Perusahaan rutin setiap minggu.

Seluruh insan PLN wajib menandatangani komitmen mematuhi Standar Etika Perusahaan. Penandatanganan komitmen dilakukan setiap tahun secara online melalui portal internal PLN sehingga lebih efisien waktu dan biaya serta lebih mudah untuk didokumentasikan. Persentase penandatanganan komitmen Standar Etika Perusahaan mencapai 99% dari seluruh pegawai Perusahaan pada tahun 2021.

Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan

PLN telah menetapkan sanksi bagi pelanggaran Standar Etika Perusahaan sebagai berikut:

Enforcement of Code of Conduct to All Levels of the Organization and Stakeholders

The Company's Code of Conduct must be observed and implemented by:

1. All PLN personnel at all levels including Board of Commissioners, Board of Directors and supporting organs of Board of Commissioners;
2. Board of Directors, Board of Commissioners and employees of subsidiaries and affiliates under control;
3. Corporate Investors (creditors, bondholders and so forth);
4. The Company's stakeholders such as customers, business partners/suppliers, competitors, investors, the Government/Parliament, public, media, organizations, professional/educational institutions, law enforcement.

Dissemination of Code of Conduct

PLN consistently disseminates the Company's Code of Conduct to build the understanding and awareness of all PLN personnel to uphold the Company's Code of Conduct. During 2021, dissemination was carried out both directly to the business units and through PLN website known as KOMANDO website (budaya.pln.co.id).

The dissemination of the Company's Code of Conduct has become part of Key Performance Indicators (KPI) of each division/unit/business unit since 2016. This has been implemented by conducting weekly Code of Conduct sharing session.

All PLN personnel are obligated to sign a commitment to complying with the Company's Code of Conduct. The commitment is signed every year online through PLN's internal portal so that it is more time and cost efficient and easier to document. In 2021, 99% of all employees have signed the Company's Code of Conduct commitment.

Sanction for Violation of Code of Conduct

PLN imposes sanctions for violation of Code of Conduct as follows:

1. Mitra kerja PLN: sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan;
2. Insan PLN: tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
3. Apabila mengakibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diproses lebih lanjut kepada pihak yang berwajib.

1. PLN partners: sanctions in accordance with the Company's regulations and decisions;
2. PLN personnel: disciplinary actions in the form of oral and written reprimands, severe warning with suspension or employment termination;
3. In case of violation of laws, the issue may be further processed by the authorities.

Sanksi atas pelanggaran telah diberikan dengan mengacu pada ketentuan internal Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) selama tahun 2021.

In 2021, sanctions for violation have been imposed based on the Company's internal provisions and Collective Labor Agreement (CLA).

Jumlah Pelanggaran Standar Etika dan Sanksi Pelanggaran tahun 2021

PLN telah mengambil tindakan tegas berupa penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku demi penegakkan disiplin pegawai di lingkungan PLN.

Number of Code of Conduct Violations and Sanctions in 2021

PLN takes strict action by imposing disciplinary sanctions in accordance with the applicable Employee Discipline Regulation to enforce employee discipline within PLN environment

Jenis Pelanggaran / *Type of Violation*	Jumlah Kasus / *Number of Cases*	Sanksi sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) / *Sanction Based on Collective Labor Agreement (CLA)*
Barang Milik Perseroan / Company Property	11	Sanksi Disiplin Sedang, Berat / Light, Moderate, Severe Disciplinary Sanction
Citra Perseroan / Company Image	7	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction
Gratifikasi / Gratuity	17	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction
Kendaraan dinas / Service Vehicle	2	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction
Mangkir / Absence	71	Sanksi Disiplin Ringan, Sedang, Bera t / Light, Moderate, Severe Disciplinary Sanction
Menolak Mutasi / Mutation Refusal	4	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction
Pemalsuan dokumen / Document Forgery	1	Sanksi Disiplin Berat / Severe Disciplinary Sanction
Pengadaan Barang dan Jasa / Procurement of Goods and Services	3	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction
SPPD	98	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction
Tindak Pidana / Criminal Acts	1	Sanksi Disiplin Sedang / Moderate Disciplinary Sanction
Tugas Kedinasan / Service Duties	22	Sanksi Disiplin Sedang, Berat / Moderate, Severe Disciplinary Sanction

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PLN memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0022.P/DIR/2020. Pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain mengatur mengenai:

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Procurement of goods and service in PLN refers to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0022.P/DIR/2020 on Guidelines for the Procurement of Goods/Services of PT PLN (Persero) and the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0156.P / DIR/2021 on Amendments to the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No.0022.P/DIR/2020. The guidelines for the procurement of goods and services regulate on:

- Ketentuan umum,
- Perencanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya,
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya,
- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi,
- Pengadaan khusus,
- Perjanjian/kontrak,
- Pengadaan barang/jasa melalui media elektronik PLN (e-*Procurement* PLN), serta
- Pengendalian dan Pengawasan.

- General provisions,
- Procurement planning for goods/construction services/other services,
- Procurement of goods/construction services/other services,
- Planning and procurement of consulting services,
- Special procurement,
- Agreements/contracts,
- Procurement of goods/services through PLN's electronic media (e-Procurement PLN), and
- Control and Supervision.

PLN melakukan sosialisasi melalui pertemuan dengan pemasok terkait penggunaan Sistem e-Procurement (e-Proc) PLN dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan. Dalam berbagai kesempatan, Perusahaan juga melakukan sosialisasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada pemasok untuk menegaskan bahwa seluruh Insan PLN berkomitmen untuk tidak menerima hadiah atau imbalan dari pihak manapun termasuk dari pemasok.

PLN conducts meetings with suppliers to disseminate the use of PLN's e-Procurement (e-Proc) System and Procurement Guidelines for Goods and Services applicable at the Company. On various occasions, the Company also disseminates Regulation of the Board of Directors No. 0076.P/DIR/2017 concerning Guidelines for Gratuity Control to suppliers to affirm that all PLN Personnel are committed not to receive any gifts or rewards from any parties, including suppliers.

PLN mewajibkan setiap mitra kerja untuk mengisi kuesioner IDD, melampirkan dokumen pendukung, dan menyampaikannya kepada PLN (secara manual atau elektronik) sehubungan dengan penerapan SMAP SNI ISO 37001:2016 dan pelaksanaan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0013.E/DIR/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Integrity Due Diligence* (IDD). PLN meminta mitra kerja menandatangani Pakta Integritas (*offline* atau *online*) sebagai bukti dukungan terhadap penerapan SMAP di lingkungan Perusahaan.

PLN requires each business partner to fill out an IDD questionnaire, attach supporting documents, and submit it to PLN (manually or electronically) in the implementation of SNI ISO 37001:2016 SMAP and the implementation of EDIR No. 0013.E/DIR/2020 regarding Guidelines for Implementation of Integrity Due Diligence (IDD). PLN requests business partners to sign an Integrity Pact (offline or online) as an evident support for SMAP implementation in the Company.

Sasaran Pengadaan

1. Tepat Mutu (*Quality*);
2. Tepat Jumlah (Quantity);
3. Tepat Lokasi;
4. Tepat Waktu;
5. Tepat Tujuan Sosial Ekonomi;
6. Tepat Harga

Procurement Target

1. Appropriate Quality;
2. Appropriate Quantity (Quantity);
3. Appropriate Location;
4. Punctual;
5. Appropriate Socio-Economic Goals;
6. Appropriate Price

Etika Pengadaan

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Procurement Ethics

1. Carry out tasks in an orderly manner, accompanied by a sense of responsibility to achieve the smoothness and accuracy of achieving the objectives of the Procurement of Goods/Services;
2. Work professionally, independently, and maintain the confidentiality of information which by its nature must be kept confidential to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services;
3. Do not influence each other directly or indirectly to prevent and avoid unfair competition;
4. Accept and be responsible for all decisions made in accordance with the agreement of the parties;
5. Avoid and prevent the occurrence of conflicts of interest (conflict of interest) of the parties involved in the process of Procurement of Goods/Services, either directly or indirectly, which is detrimental to the interests of the Users of the Goods/Services;
6. Avoid and prevent the occurrence of waste and leakage of company finances in the Procurement of Goods/Services;
7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion with the aim of personal gain, group or other parties that directly or indirectly harm the company; and
8. Not accepting, not offering or not promising to give or receive gifts, rewards of any kind to anyone who is known or reasonably suspected to be related to the Procurement of Goods/Services.

Prinsip Dasar Pengadaan

Basic Principles of Procurement

Kriteria dan Proses Seleksi Pemasok

PLN menyediakan informasi terkait kriteria dan seleksi pemasok secara rinci yang dimuat dalam situs web Perusahaan pada menu *eproc website* pln.co.id yang dapat dengan mudah diakses oleh publik. Bagi masyarakat umum yang ingin menjadi rekanan Perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa dapat mendaftar melalui eproc.pln.co.id. Panduan untuk menjadi mitra kerja Perusahaan dapat diperoleh dengan mengunduh *Terms of Condition* Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) secara Elektronik yang terdapat pada menu e-*Procurement*.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

PLN telah mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) sebagai salah satu cara untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, dan praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG.

Pedoman *Whistleblowing System*

PLN bekerja sama dengan lembaga yang kompeten sejak tahun 2012 untuk membuat kajian dan merancang sistem pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya Perusahaan, untuk diterapkan di seluruh jajaran bisnis Perusahaan, baik di unit bisnis maupun di anak usaha.

Sejak tanggal 20 Desember 2012 PLN memberlakukan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di seluruh jajaran bisnis PLN melalui Surat Edaran Direksi No. 021.E/DIR/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Surat Edaran Direksi tersebut juga mengatur mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor dan tindak lanjut dan Pedoman *Whistleblowing System* telah dimutakhirkan pada Tahun 2016 melalui Surat Edaran Direksi No. 008.E/DIR/2016 tanggal 30 September 2016.

Pihak Pengelola *Whistleblowing System*

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 008.E/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Sistem Pelaporan, penanggung jawab pelaksanaan mekanisme WBS adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI). Setelah menerima laporan pengaduan, Direktur Utama akan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Kepala SPI untuk melakukan investigasi di lapangan melalui Tim Investigasi Audit Khusus. Petugas database WBS akan mendokumentasikan

Supplier Criteria and Selection Process

PLN provides detailed information on supplier criteria and selection process on the Company's website under the eproc menu at pln.co.id, which is easily accessible by the public. The general public who wish to become PLN's goods and services supplier can register at eproc.pln.co.id. Guidance for supplier registration can be obtained by downloading the electronic document of Terms and Conditions of Goods/ Services Procurement Procedures of PT PLN (Persero) in e-Procurement menu.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

PLN implements a whistleblowing system as the most effective method to prevent and eradicate corruption, bribery and other fraudulent practices, which are contrary to GCG principles.

Whistleblowing System Guidelines

PLN has been cooperating with competent institutions since 2012 to study and design a whistleblowing system that suits the Company's conditions and culture to be applied throughout the Company's lines of business in all business units and subsidiaries.

Since December 20, 2012, the Company implemented a whistleblowing system in all PLN lines of business through the issuance of Circular Letter of Board of Directors No. 21.E/Dir/2012 concerning Whistleblowing System. The Circular Letter of Board of Directors stipulates the reporting mechanism, whistleblower protection, and follow-up. The Whistleblowing System Manual was updated in 2016 through Circular Letter of Board of Directors No. 008.E/DIR/2016 dated September 30, 2016.

Whistleblowing System Manager

Based on the Circular Letter of Board of Directors No. 008.E/DIR/2016 dated September 30, 2016 concerning Whistleblowing System, the WBS is managed by the Internal Audit Unit (SPI). Upon receipt of a whistleblowing report, the President Director will forward such report to Chief Audit Executive (CAE) to investigate through Special Audit Investigation Team. WBS database officer will document the report and the respective investigation results. The

laporan pengaduan tersebut dan hasil investigasinya. Hasil investigasi Tim Investigasi dilaporkan kepada Kepala SPI yang selanjutnya melaporkan kepada Direktur Utama dan *Executive Vice President* Pelayanan Human Capital (EVP HSC).

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pihak pelapor (internal maupun eksternal PLN) diwajibkan menyampaikan pengaduan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar laporan dapat dibuktikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelanggaran yang dilaporkan disebutkan secara singkat dan jelas,
- Pihak terlapor dan terlibat disebutkan dengan jelas nama dan unit kerjanya,
- Waktu dan tempat terjadinya pelanggaran disebutkan dengan,
- Kronologi kejadian diuraikan secara jelas dan lengkap. Lampiran bukti-bukti pelanggaran akan membantu mempercepat proses investigasi.

Penanganan Pengaduan

Prosedur penyampaian *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut.

investigation results prepared by the Investigation Team are then reported to CAE which subsequently reports them to President Director and Executive Vice President of Human Capital Services (EVP HSC).

Whistleblowing Report Submission

The whistleblower (PLN internal or external party) is required to submit a clear and accountable report to be proven by considering the following matters:

- To mention the reported violation briefly and clearly,
- To mention the name and work unit of the reported and involved persons,
- To state the clear time and place of the violation,
- To state the clear and complete chronology of the events. If necessary, to attach evidence of violation to accelerate investigation.

Whistleblowing Handling

The reporting mechanism in the Whistleblowing System is as follows.

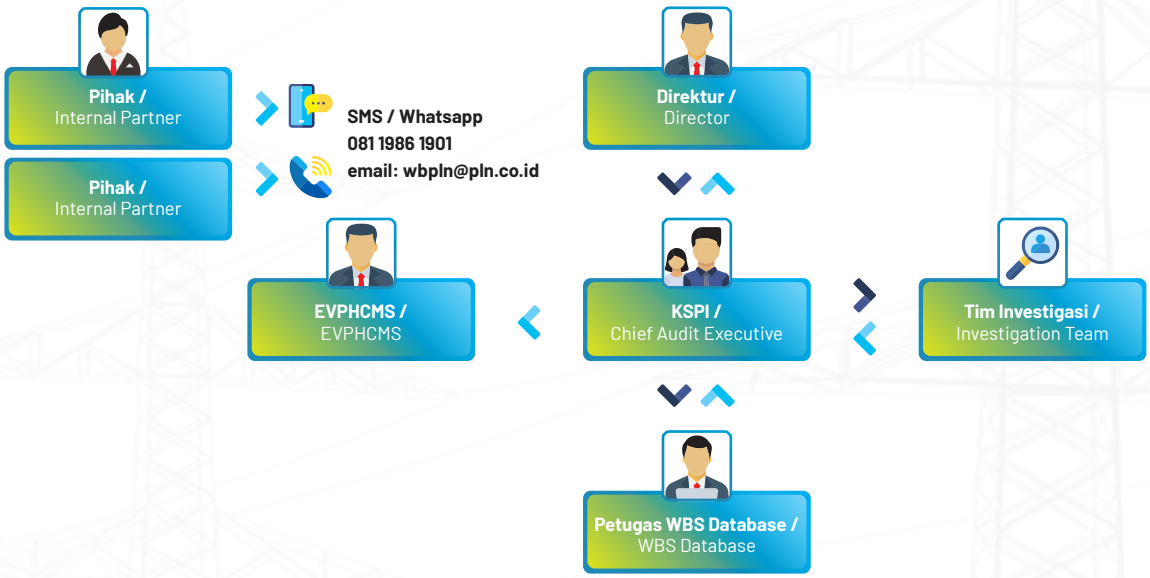

1. Laporan disampaikan melalui saluran khusus: telepon, *short message service* (SMS), atau *Whatsapp* ke nomor 08119861901, e-mail ke wbpln@pln.co.id, dan surat kepada Direktur Utama;

1. Reports are submitted via special channels: telephone, short message service (SMS), or Whatsapp to number 08119861901, e-mail to wbpln@pln.co.id, and a letter to the President Director;

2. Direktur Utama menerima pengaduan pelanggaran dan menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima;
3. Direktur Utama menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada KSPI dan diteruskan ke petugas WBS yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan;
4. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi kepada KSPI untuk diteruskan ke Direktur Utama yang akan menetapkan putusan atas pengaduan tersebut.

Beberapa putusan yang dapat diterapkan antara lain:
a. Diberhentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil audit atau hasil konfirmasi/keterangan/penjelasan menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti;
b. Meneruskan ke Divisi HSC untuk proses lebih lanjut pengenaan hukuman disiplin perusahaan apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin;
c. Dengan pertimbangan Direksi, kasus pelanggaran yang merugikan Perusahaan dapat diserahkan kepada yang berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan PLN dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim dari Satuan Hukum Korporat guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

PLN melalui SPI selaku penanggung jawab WBS memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor pelanggaran sebagai berikut:
1. Melindungi kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja, dan lain-lain). Komunikasi dengan pelapor dilakukan menggunakan media komunikasi email di luar pengelolaan perusahaan (bukan alamat email pln.co.id);
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor/lembaga pelapor;
3. Perlindungan dari tindakan internal PLN:
   a. Tekanan;
   b. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan;
   c. Pemecatan;

2. The President Director receives report of violation and establishes follow-up actions on reports that have been received;
3. The President Director forwards every report of violation to CAE which is further forwarded to the WBS officer appointed to verify data and gather sufficient and adequate initial evidence and prepare report on the receipt of complaint;
4. The investigation team conducts a thorough investigation and submits the investigation results to Chief Audit Executive to be forwarded to President Director for ruling on the report.

Some decisions that can be taken include:
a. Dismissed and declared completed if the results of the audit or the results of confirmation/information/explanation state that the report is incorrect or not proven;
b. Forwarded to the HSC Division for further processing of disciplinary action if the disciplinary violation is proven;
c. With the consideration of the Board of Directors, cases of violations that harm the Company can be submitted to the authorities for further processing in accordance with the provisions of PLN and applicable law. In this case, communication and coordination will be carried out by a Team from the Corporate Legal Unit to ensure that the evidence that has been collected is declared sufficient to be submitted to the authorities.

Whistleblower Protection

PLN through the SPI as the WBS manager guarantees whistleblower protection as follows:
1. Whistleblower identity (name, address, phone number, facsimile, e-mail, work unit, and others) is kept confidential. Communication with the whistleblower uses external email (not pln.co.id e-mail);
2. Protection from retaliation from the reported person/institution;
3. Protection from PLN internal measures, such as:
   a. Pressure;
   b. Delay in promotion;
   c. Employment termination;

d. Gugatan hukum;
e. Harta benda hingga tindakan fisik;
f. Perlindungan yang diberikan tidak hanya berlaku bagi pelapor tetapi dapat diperluas kepada anggota keluarga pelapor.

Sanksi dan Tindaklanjut Tahun 2021

Selama tahun 2021 Tim WBS menerima 120 laporan pengaduan yang terdiri dari 266 item pengaduan yang disampaikan melalui media WBS (email, surat dan *WhatsApp*). Dari laporan tersebut, sebanyak 252 item pengaduan (95%) telah selesai dilakukan pemeriksaan dan sebanyak 14 (5%) Item Pengaduan masih dalam proses pelaksanaan Audit Investigasi. Dari 266 item pengaduan tersebut terdapat 104 item pengaduan (39%) yang terbukti dan 148 item pengaduan (56%) yang tidak terbukti.

Mayoritas pengaduan yang terbukti adalah terkait perilaku pegawai dengan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan pelaksanaan pengadaan tidak sesuai ketentuan. Terhadap kasus-kasus yang terbukti SPI telah melaporkan kepada direktur utama untuk diproses tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Setiap tahun, PLN menyelenggarakan sosialisasi WBS kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Perusahaan telah melakukan sosialisasi baik secara langsung, melalui portal internal dan situs web Perusahaan termasuk melalui Banner yang dipasang pada tiap Satuan/Divisi/Unit Kerja. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran PLN yang dikelola secara profesional.

Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

PKS antara PLN dengan KPK RI tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2021, adapun maksud dan tujuan WBS Terintegrasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam rangka membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal

d. Lawsuit;
e. Seizure or physical action;
f. Protection applies not only to the whistleblower but may be extended to family members of the whistleblower.

Sanctions and Follow-Ups in 2021

During 2021 the WBS Team received 120 reports complaints consisting of 266 items of complaints that delivered via WBS media (email, letter and email and WhatsApp). From the report, as many as 252 items complaints (95%) have been investigated and 14 (5%) complaint items are still in process implementation of the Investigation Audit. Out of 266 complaint items there are 104 complaint items (39%) that are proven and 148 complaint items (56%) which were not proven.

On an annual basis, PLN conducts WBS dissemination to the Company's internal and external stakeholders. The Company carried out dissemination directly through internal portal and website and banners hung out in every Unit/Division/Work Unit. The dissemination aims to provide an understanding of the professionally managed whistleblowing system of PLN.

Whistleblowing System Dissemination

On an annual basis, PLN conducts WBS dissemination to the Company's internal and external stakeholders. The Company carried out dissemination directly through internal portal and website. The dissemination aims to provide an understanding of the professionally managed whistleblowing system of PLN.

Cooperation with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI)

The Collaboaration Agreement between PLN and the Indonesian Corruption Eradication Commission regarding the Handling of Complaints in Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption was signed on March 2, 2021, while the intent and purpose of the Integrated WBS is to serve as a guideline for the implementation of Complaint Handling cooperation in Efforts to Eradicating Criminal Acts of Corruption and in order to build and improve effectiveness

maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:
a. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan;
b. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
c. Penanganan pengaduan melalui aplikasi;
d. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
e. Pertukaran data dan/atau informasi.

Tahapan Implementasi dari WBS Terintegrasi antara lain:
a. Inisiasi, dengan dilakukan sosialisasi dan asesmen awal yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (DIT PLPM) KPK RI
b. Perencanaan, Pelaksanaan *kick off meeting* asesmen kesiapan implementasi WBS Terintegrasi oleh DIT PLPM KPK RI dan pembahasan teknis konektivitas WBS Terintegrasi antara aplikasi WBS PLN dengan aplikasi WBS KPK. Selain itu dilakukan juga pengisian kuesioner oleh seluruh pegawai di lingkungan PT PLN (Persero) yang telah terkumpul sebanyak 1.819 responden.

c. Implementasi
Pelaksanaan dari program kerja yang telah ditetapkan antara KPK dan PT PLN (Persero). Pada tahap implementasi juga dilaksanakan *capacity building* Peluit Integritas yang diselenggarakan oleh KPK RI.

d. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi implementasi penanganan pengaduan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) akan dilakukan oleh KPK minimal 2 kali dalam setahun. Tahun 2021 pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi telah dilaksanakan pada bulan Desember 2021.
e. *Improvement*
Hasil dari *monitoring* dan evaluasi dari KPK akan menjadi *improvement* dalam bentuk program kerja terkait penanganan pengaduan.

and efficiency in handling complaints both internally and externally that are integrated in a professional, transparent, accountable manner by prioritizing confidentiality in the context of optimizing the eradication of corruption.

The scope of this Cooperation Agreement is as follows:
a. Formulation and/or strengthening of internal rules related to the handling of complaints;
b. Commitment to complaint handling management;
c. Handling complaints through applications;
d. Coordination and joint activities for handling complaints; and
e. Exchange of data and/or information.

The Implementation Stages of the Integrated WBS include:
a. Initiation, by conducting dissemination and initial assessment carried out by the Directorate of Reception of Public Reports and Complaints (DIT PLPM) KPK RI
b. Planning, Implementation of the kick off meeting of the Integrated WBS implementation readiness assessment by DIT PLPM KPK RI and technical discussion of Integrated WBS connectivity between the PLN WBS application and the KPK WBS application. In addition, questionnaires were also filled out by all employees within PT PLN (Persero) which had collected as many as 1,819 respondents.
c. Implementation
Implementation of the work program that has been determined between the KPK and PT PLN (Persero). At the implementation stage, capacity building for the Integrity Whistle was also carried out by the Indonesian Corruption Eradication Commission.
d. Monitoring and Evaluation
Monitoring and evaluation of the implementation of complaint handling carried out by PT PLN (Persero) will be carried out by the KPK at least 2 times a year. In 2021 the implementation of monitoring and evaluation has been carried out in December 2021.
e. Improvement
The results of the monitoring and evaluation of the KPK will be an improvement in the form of a work program related to handling complaints.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kebijakan mengenai Penyampaian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam Perdir No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero).

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Perdir tersebut, pejabat di lingkungan PLN yang menjadi Wajib Lapor (WL) LHKPN adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi,
2. Manajemen Atas (MA),
3. Manajemen Menengah (MM),
4. Manajemen Dasar (MD),
5. Fungsional I, II, III,
6. Pejabat Perencana Pengadaan,
7. Pejabat Pelaksana Pengadaan,
8. Supervisor Atas.

Pengelola LHKPN

Perusahaan menunjuk pengelola LHKPN sebagai berikut:

1. Koordinator Pelaksana LHKPN adalah *Executive Vice President* (EVP) *Compliance* dengan tugas:
   a. Menyiapkan infrastruktur, kebijakan, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pelaporan LHKPN,
   b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pelaporan LHKPN.
2. Admin e-LHKPN yang berada di Kantor Pusat dan unit-unit PLN dengan tugas:
   a. Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di lingkungan PLN pada aplikasi e-LHKPN;
   b. Sebagai *Helpdesk* aplikasi E-LHKPN,
   c. Melakukan *monitoring* progres pelaporan LHKPN.

Penyampaian LHKPN Tahun 2021

PLN melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Periode Pelaporan tahun 2021 mencapai 100% dari 8.672Wajib Lapor. Perseroan telah mempublikasikan LHKPN dalam situs web www.pln.co.id. Adapun perkembangan pelaporan LHKPN di lingkungan PLN mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana tabel grafik berikut:

MANAGEMENT OF STATE OFFICIALS ASSETS REPORT

Policy on Reports on Assets of State Officials (LHKPN) Management

Policy on Report on Assets of State Officials (LHKPN) Form Submission is stipulated in Board of Directors Regulation No. 0074.P/DIR/2017 concerning Guidelines for Report on Assets of State Officials (LHKPN) of PT PLN (Persero).

State Officials Required to Submit LHKPN

According to the Board of Directors Regulation, PLN officials that are required to submit (WL) LHKPN include:

1. Board of Commissioners and Board of Directors,
2. Senior Management (MA),
3. Middle Management (MM),
4. Junior Management (MD),
5. Functional I, II, III,
6. Procurement Planning Officer,
7. Procurement Officer,
8. Senior Supervisor.

LHKPN Managers

The Company assigns LHKPN managers as follows:

1. LHKPN Coordinator is Executive Vice President (EVP) Compliance with the following duties:
   a. Preparing infrastructure, policies and facilities for LHKPN reporting program,
   b. Monitoring implementation of LHKPN reporting program.
2. e-LHKPN Admin at PLN Head Office and units with the following duties:
   a. Updating data of PLN Officials Required to Submit LHKPN in E-LHKPN application,
   b. Acting as Helpdesk of E-LHKPN application,
   c. Monitoring progress of LHKPN reporting program.

2021 LHKPN Submission

PLN reports that the reporting compliance rate in the 2021 reporting period reached 100% of the 8,672 Mandatory Reports. The Company publishes LHKPN on the website www.pln.co.id. The LHKPN reporting at PLN improves every year as shown in the following table:

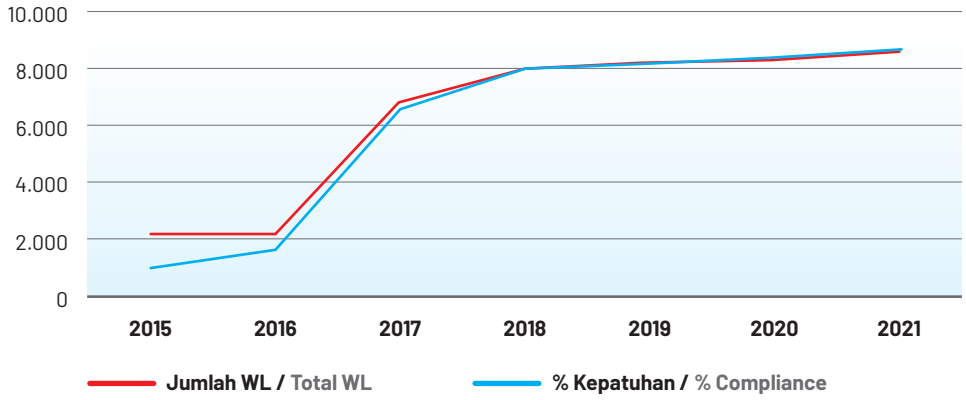

Deskripsi / *Description*	2017	2018	2019	2020	2021
Penyampaian LHKPN (jumlah) / LKHPN Submissions (total)	6.811	7.935	8.210	8.336	8.672

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN LAINNYA

Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Perseroan dalam menjalankan tata kelola perusahaan berkomitmen memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku termasuk terkait kebijakan pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Namun demikian, status PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi dasar PLN tidak menyajikan informasi terkait pengungkapan kepemilikan saham PLN oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

PLN adalah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu Perusahaan tidak menerapkan kebijakan *Employee Stock Ownership Program*/*Management Stock Ownership Program* (ESOP/MSOP).

Kebijakan Anti Korupsi:

- Program dan prosedur
- Sosialisasi

OTHER CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

In implementing corporate governance, the Company is committed to complying with applicable regulations, including the policy on the disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Report of Ownership or Any Change in Share Ownership of a Public Company. However, PLN's status is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is wholly owned (100%) by the Government of the Republic of Indonesia, so that PLN does not provide information on PLN's share ownership by members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

PLN is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the Company does not implement the Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP) policy.

Anti-Corruption Policy:

- Programs and procedures
- Dissemination

Kebijakan Anti *Fraud*

Kebijakan Anti *Fraud* ditetapkan pada tahun 2019 melalui Perdir sebagai bentuk komitmen Direksi dalam mendukung peningkatan integritas dan bagian dari nilai-nilai Perusahaan. Kebijakan tersebut menjadi landasan dari strategi dan program-program anti *fraud*, baik berupa kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan ketentuan internal Perusahaan lainnya, sehubungan dengan upaya pemetaan potensi *fraud*, pencegahan, pendeteksian, serta respons terhadap risiko dan kejadian *fraud* di lingkungan PLN.

Anti-Fraud Policy

The Anti-Fraud Policy was established in 2019 through Board of Directors Regulation as a form of the Board of Directors' commitment to improving the integrity and as a part of the Company's values. These policies are the basis of anti-fraud strategies and programs, in the form of policies, guidelines, procedures, implementation instructions, and other internal Company regulations in the efforts to map potential fraud, prevent, detect, and respond to risks and incidents of fraud in PLN environment.

Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

PLN berkomitmen kuat mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih, sehat, dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu perangkat untuk mendukung komitmen tersebut adalah kebijakan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan yang diatur dalam Perdir Nomor 0076.P/ DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Perdir Nomor 122.P/ DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Prevention of Gratuity and Conflict of Interest

PLN is committed to realizing a corporate management that is clean, healthy and free of all forms of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). One of the tools to support this commitment is the policy on gratuity and conflict of interest as stipulated in Perdir Number 0076.P/DIR/2017 concerning Guidelines for Gratuity Control and Perdir Number 122.P/ DIR/2019 concerning Management of Conflict of Interest.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi mengatur secara jelas beragam penafsiran mengenai gratifikasi, legal dan illegal yang bertujuan untuk memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pedoman pengelolaan konflik kepentingan bertujuan sebagai pedoman bagi insan PLN untuk memahami, mencegah, dan mengambil sikap yang tegas terhadap konflik kepentingan di lingkungan Perusahaan. Dengan adanya pengelolaan konflik kepentingan, diharapkan tidak terjadi adanya segelintir orang yang menikmati keuntungan, tetapi akan dicapai persamaan kepentingan menuju perusahaan yang tumbuh dan berkembang, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dan kesejahteraan pegawai meningkat.

Guidelines for Gratuity Control clearly set various interpretations of legal and illegal gratuities within the Company to strengthen its position in facing business competition, to improve efficiency and effectiveness of resource management, to maximize the Company's value in a sustainable manner and to increase the trust of stakeholders. Management of Conflict of Interest is intended as a guideline for PLN personnel to understand, prevent, and take a firm attitude towards conflict of interest within the Company. With the management of conflicts of interest, it is expected that certain people will not enjoy the benefits, but an equality of interest will be achieved for a growing and developing company, so that the Company's goals will be achieved and employee welfare will be improved.

Pengawasan Gratifikasi

Setiap bentuk gratifikasi yang diterima maupun ditolak, wajib disampaikan dan dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang ditetapkan oleh Direksi. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

Gratuity Control

Any form of gratuity received or rejected must be submitted and reported to Gratuity Control Unit established by PLN's Board of Directors. Violations shall be liable to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations as well as the Company's regulations.

Etika Gratifikasi

Dalam menjalankan kegiatannya, setiap insan PLN wajib menjunjung tinggi komitmen untuk menjalankan usaha yang bebas dengan segala bentuk kecurangan (*fraud*) dan tindakan korupsi dengan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Semua insan PLN dilarang menawarkan atau memberikan suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun.
2. Semua insan PLN dilarang meminta atau menerima gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pemangku kepentingan, mitra kerja dan/atau pihak ketiga karena jabatannya, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Semua insan PLN wajib berpartisipasi untuk menyukseskan program pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.
4. Semua insan PLN wajib melakukan penolakan secara sopan terhadap segala bentuk pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman gratifikasi.
5. Semua insan PLN harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi atas penerimaan, permintaan, dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan.

Ethics Related to Gratuity

In carrying out their activities, every PLN personnel must uphold a commitment to running a business free of all forms of fraud and corruption by complying with the following provisions:

1. All PLN personnel are prohibited from offering or giving bribes and gratuities in any form.
2. All PLN personnel are prohibited from directly or indirectly requesting or receiving gratuities from stakeholders, partners and/or third parties for their positions, contrary to their obligations or duties.
3. All PLN personnel are required to participate in corruption prevention programs within the Company.
4. All PLN personnel are required to reject courteously any gratuity that is not in accordance with the provisions of the gratuity guidelines.
5. All PLN personnel must report to Gratuity Control Unit on any receipt, request, and/or rejection of gratuity.

Pelaporan Gratifikasi

PLN membuka saluran untuk melaporkan gratifikasi dalam bentuk aplikasi *Compliance Online System* yang dapat diakses oleh seluruh insan PLN melalui http://cos.pln. co.id.

Gratuity Reporting

The Company provides channels to report gratuity through the Compliance Online System application that can be accessed by all PLN personnel on http://cos.pln.co.id.

Publikasi Pelaporan Gratifikasi

Perusahaan telah mempublikasikan rekap pelaporan Gratifikasi dalam situs web www.pln. co.id.

Gratuity Reporting Publication

The Company publishes the recapitulation of Gratuity reports on the website www.pln.co.id.

Laporan Penerimaan Gratifikasi 2021

Gratuity Acceptance Report in 2021

Periode / *Period*	Penerimaan / *Acceptance*			Kualifikasi Laporan Penerimaan / *Qualification of Acceptance Reports*					Status Pelaporan Penerimaan / *Status of Acceptance Report*		
	Jumlah Pelaporan / *Total Reports*	Salah Pelaporan / *Mistaken Reports*	Jumlah Pelaporan untuk Ditindaklanjuti / *Total Reports to be Followed Up*	Dikelola Instansi untuk Disumbangkan kepada Yayasan / *Managed by the Company to be Donated*	Milik Negara / *State-Owned*	Dikelola Instansi untuk Barang Display / *Managed by the Company as Display Product*	Dikelola Instansi untuk Menunjang Kinerja / *Manage by the Company to Support Performance*	Milik Pelapor / *Property of the Reporter*	Dalam Proses Verifikasi KPK / *In the KPK Verification Process*	Pelaporan Selesai / *Settled Report*	% Pelaporan Selesai / *% of Settled Report*
Januari / January	8	1	7	0	5	0	1	1	0	7	100%
Februari / February	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	100%
Maret / March	3	0	3	1	1	0	0	1	0	3	100%
April	18	0	18	1	16	0	1	0	0	18	100%
Mei / May	12	0	12	3	5	0	0	4	0	12	100%
Juni / June	8	0	8	2	6	0	0	0	0	8	100%
Juli / July	6	1	5	1	2	0	0	2	1	4	80%

Periode / *Period*	Penerimaan / *Acceptance*			Kualifikasi Laporan Penerimaan / *Qualification of Acceptance Reports*					Status Pelaporan Penerimaan / *Status of Acceptance Report*		
	Jumlah Pelaporan / *Total Reports*	Salah Pelaporan / *Mistaken Reports*	Jumlah Pelaporan untuk Ditindaklanjuti / *Total Reports to be Followed Up*	Dikelola Instansi untuk Disumbangkan kepada Yayasan / *Managed by the Company to be Donated*	Milik Negara / *State-Owned*	Dikelola Instansi untuk Barang Display / *Managed by the Company as Display Product*	Dikelola Instansi untuk Menunjang Kinerja / *Manage by the Company to Support Performance*	Milik Pelapor / *Property of the Reporter*	Dalam Proses Verifikasi KPK / *In the KPK Verification Process*	Pelaporan Selesai / *Settled Report*	% Pelaporan Selesai / *% of Settled Report*
Agustus / August	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0%
September	4	0	4	1	2	0	1	0	2	2	50%
Oktober / October	3	0	3	0	3	0	0	0	1	2	67%
November	4	0	4	0	2	0	1	1	2	2	50%
Desember / December	5	1	4	0	2	0	2	0	2	2	50%
TOTAL	**73**	**3**	**70**	**8**	**33**	**0**	**2**	**6**	**0**	**53**	**76%**

Laporan Penolakan Gratifikasi 2021 **Gratuity Refusal Report in 2021**

Periode / *Period*	Penolakan / *Refusal*			Status Pelaporan Penolakan / *Refusal Reporting Status*		
	Jumlah Pelaporan / *Total Reports*	Salah Pelaporan / *Mistaken Reports*	Jumlah Pelaporan untuk Ditindaklanjuti / *Total Reports to be Followed Up*	Dalam Proses Verifikasi KPK / In the KPK Verification Process	Pelaporan Selesai / Settled Report	% Pelaporan Selesai / % of Settled Report
Januari / January	7	1	6	0	6	100%
Februari / February	12	1	11	0	11	100%
Maret / March	4	0	4	0	4	100%
April	8	1	7	0	7	100%
Mei / May	10	0	10	0	10	100%
Juni / June	9	1	8	0	8	100%
Juli / July	4	1	3	0	3	100%
Agustus / August	8	6	2	0	2	100%
September	5	2	3	0	3	100%
Oktober / October	6	3	3	0	3	100%
November	6	2	4	1	3	75%
Desember / December	1	0	1	0	1	100%
TOTAL	**80**	**16**	**61**	**1**	**61**	**98%**

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980, penyuapan dapat diartikan memberi suap dan menerima suap. Memberi suap merupakan tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut

Anti-Bribery Management System

Bribery is the act of giving money, goods or other forms from the giver of bribe to the recipient of bribe which is carried out to change the attitude of recipient towards a particular interest. According to Law Number 11 of 1980, bribery can be interpreted as giving bribes and receiving bribes. Giving bribe is an act of giving or promising something to someone with the intention of persuading that person to do something or not to do something in their duties, which is contrary to their authority or obligations concerning the public interest. While receiving bribe is an act of accepting something or a

kepentingan umum. Sedangkan menerima suap merupakan tindakan menerima sesuatu atau janji, yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar penerima berbuat sesuai atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

promise, which is known or reasonably suspected that the gift is intended so that the recipient does or does not do something in their duties, which is contrary to the authority or obligation that concerns the public interest.

Untuk memperkuat sistem pencegahan tindak korupsi dan penyuapan di PLN yang dapat berisiko pada reputasi Perusahaan serta kualitas dan keandalan produk tenaga listrik bagi pelanggan, sejak tahun 2019 PLN melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dimulai dari kegiatan *gap analysis*, *capacity buliding* (pelatihan, *workshop*), sosialisasi, penyusunan dan pengembangan kebijakan, prosedur dan manual sistem manajemen anti penyuapan hingga proses pengujian efektivitas sistem.

To strengthen the system for preventing corruption and bribery at PLN which can risk the Company's reputation as well as the quality and reliability of electricity power product for customers, since 2019 PLN made various preparations to take part in ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification, starting from gap analysis, capacity building (training, workshops), dissemination, preparation and development of policies, procedures and manuals for anti-bribery management system, as well as system effectiveness test.

Setelah menjalani proses sertifikasi termasuk verifikasi kesesuaian penerapan SMAP di PLN dengan standar internasional, PLN Group berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP. Hingga akhir tahun 2021, unit PLN dan anak perusahaan yang telah memperoleh sertifikat SMAP ISO 37001:2016 sebagai berikut:

After passing the certification process, including verification of the conformity of SMAP implementation at PLN with international standards, PLN Group succeeded in obtaining ISO 37001:2016 SMAP Certificate. Until the end of 2021, PLN units and subsidiaries that have obtained the SMAP ISO 37001:2016 certificate are as follows:

No	Penerima / *Issued to*	Lingkup Sertifikasi / *Certification Scope*	Lembaga Penilai / *Assessor*	Tanggal Sertifikat / *Certification Date*
1	PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Head Office	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh Proses Bisnis semua Divisi/Satuan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes of all Divisions/ Units at PT PLN (Persero) Head Office	PT TUV NORD	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
2	PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan / Center of Education and Training	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes of all Divisions/Units at PT PLN (Persero) Center of Education and Training	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
3	PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek / Center of Project Management	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes of all Divisions/Units at PT PLN (Persero) / Center of Project Management	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
4	PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan / Center of Electricity Maintenance	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Pemeliharaan Ketenagalistrikan / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes of all Divisions/Units at PT PLN (Persero) Center of Electricity Maintenance	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
5	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi / Certification Center	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Certification Center	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
6	PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan / Center of Electricity Research and Development	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Center of Electricity Research and Development	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
7	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali / Main Distribution Unit of Bali	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Distribution Unit of Bali	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
8	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten / Main Distribution Unit of Banten	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Distribution Unit of Banten	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021

No	Penerima / *Issued to*	Lingkup Sertifikasi / *Certification Scope*	Lembaga Penilai / *Assessor*	Tanggal Sertifikat / *Certification Date*
9	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya / Main Distribution Unit of Jakarta Raya	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero)	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
10	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat / Main Distribution Unit of West Java	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Distribution Unit of Jakarta Raya	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
11	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta / Main Distribution Unit of Central Java – D.I. Yogyakarta	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Distribution Unit of Central Java – D.I. Yogyakarta	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
12	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur / Main Distribution Unit of East Java	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Distribution Unit of East Java	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
13	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung / Main Distribution Unit of Lampung	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Distribution Unit of Lampung	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
14	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / Main Generation Unit of Southern Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Generation Unit of Southern Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
15	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / Main Generation Unit of Northern Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Generation Unit of Northern Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
16	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B / Main Generation Unit of Tanjung Jati B	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Generation Unit of Tanjung Jati B	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
17	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan / Main Generation and Distribution Unit of Kalimantan	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Generation and Distribution Unit of Kalimantan	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
18	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi / Main Generation and Distribution Unit of Sulawesi	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Generation and Distribution Unit of Sulawesi	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
19	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat / Main Development Unit of Western Java	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of West Java	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
20	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah / Main Development Unit of Central Java	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Central Java	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
21	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali / Main Development Unit of Eastern Java and Bali	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Eastern Java and Bali	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
22	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat / Main Development Unit of Western Kalimanta	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Western Kalimantan	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
23	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur / Main Development Unit of Eastern Kalimantan	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Eastern Kalimantan	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
24	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua / Main Development Unit of Maluku and Papua	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Maluku and Papua	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
25	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara / Main Development Unit of Nusa Tenggara	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Nusa Tenggara	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021

No	Penerima / *Issued to*	Lingkup Sertifikasi / *Certification Scope*	Lembaga Penilai / *Assessor*	Tanggal Sertifikat / *Certification Date*
26	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan / Main Development Unit of Southern Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Southern Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
27	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah / Main Development Unit of Central Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Central Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
28	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara / Main Development Unit of Northern Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Northern Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
29	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi / Main Development Unit of Sulawesi	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Development Unit of Sulawesi	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
30	PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali / Main Central Load Control Unit of Java, Madura, and Bali	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Central Load Control Unit of Java, Madura, and Bali	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
31	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / Main Distribution and Central Load Control Unit of Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) / Main Distribution and Central Load Control Unit of Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
32	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat / Main Transmission Unit of Western Java	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Transmission Unit of Western Java	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
33	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah / Main Transmission Unit of Central Java	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Transmission Unit of Central Java	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
34	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali / Main Transmission Unit of Eastern Java and Bali	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Transmission Unit of Eastern Java and Bali	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
35	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh / Main Unit of Aceh	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of Aceh	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
36	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung / Main Unit of Bangka Belitung	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of Bangka Belitung	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
37	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat / Main Unit of West Kalimantan	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of West Kalimantan	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
38	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan / Main Unit of South Kalimantan	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of South Kalimantan	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
39	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur / Main Unit of East Kalimantan	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of East Kalimantan	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
40	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara / Main Unit of Maluku and North Maluku	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of Maluku and North Maluku	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
41	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat / Main Unit of West Nusa Tenggara	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of West Nusa Tenggara	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
42	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat / Main Unit of Papua and West Papua	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of Papua and West Papua	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021

No	Penerima / *Issued to*	Lingkup Sertifikasi / *Certification Scope*	Lembaga Penilai / *Assessor*	Tanggal Sertifikat / *Certification Date*
43	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau / Main Unit of Riau and Riau Islands	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of Riau and Riau Islands	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
44	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / Main Unit of South Sumatera, Jambi, and Bengkulu	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of South Sumatera, Jambi, and Bengkulu	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
45	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat / Main Unit of South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and West Sulawesi	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and West Sulawesi	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
46	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat / Main Unit of West Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of West Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
47	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara / Main Unit of North Sumatera	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of North Sumatera	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
48	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo / Main Unit of North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021
49	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur / Main Unit of East Nusa Tenggara	Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada seluruh proses bisnis di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur / Implementation of Anti-Bribery Management System in all Business Processes at PT PLN (Persero) Main Unit of East Nusa Tenggara	PT TUV NORD Indonesia	26 Oktober 2021 / October 26, 2021

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi digital menuntut PLN untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proses bisnis melalui pengembangan sistem dan teknologi informasi yang mampu mengoptimalkan operasional bisnis, memberikan nilai tambah serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam waktu yang relatif singkat. PLN memerlukan dukungan TI yang modern dan mengadaptasi tren teknologi seperti *big data* dan *analytics*, *integration system*, *cloud computing, mobility, social media, internet of things (IoT), artificial intelligence* dan sebagainya.

Platform aplikasi korporat dan pelayanan pelanggan, pengembangan *advanced metering infrastructure* (AMI), implementasi *big data analytics* serta penguatan integrasi data melalui pembangunan MIS (*Management Information System*) menuju SSoT *(Single Source of Truth)* menjadi fokus mendasar dalam pengembangan layanan TI selama tahun 2021. Dukungan TI diselaraskan dengan kebutuhan bisnis korporat dalam mencapai Transformasi Digital PLN dengan memperhatikan standard global ataupun *benchmark* serta memperhatikan prinsip - prinsip pengembangan TI.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The development of digital technology requires PLN to continue to improve the efficiency and effectiveness of business process management through the development of systems and information technology that is able to optimize business operations, provide added value and support decision-making processes in a relatively short time. PLN requires modern IT support and adapts technology trends such as big data and analytics, system integration, cloud computing, mobility, social media, internet of things (IoT), artificial intelligence, etc.

Corporate application platforms and customer service, development of advanced metering infrastructure (AMI), implementation of big data analytics and strengthening of data integration through the development of MIS (Management Information System) towards SSoT (Single Source of Truth) will be the fundamental focus in developing IT services during 2021. IT support is aligned with corporate business needs in achieving PLN's Digital Transformation by taking into account global standards or benchmarks as well as paying attention to the principles of IT development.

Dalam memastikan pemanfaatan TI selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, strategi dan budaya perusahaan, PLN menerapkan tata kelola TI (*IT governance*). Tata kelola TI mendeskripsikan tanggung jawab direksi dan eksekutif, struktur organisasi serta proses-proses yang memastikan sistem TI dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara komprehensif. Pada tahun 2021, telah dilakukan pengukuran *capability level* terhadap pengelolaan tata kelola TI dengan menggunakan standard COBIT *(Control Objectives for Information and Related Technologies)* 5. Berdasarkan hasil pengukuran *capability level* pada setiap proses dalam COBIT 5, tingkat *IT Maturity Level* PLN berada pada level 3,30 - *Established Process* dimana implementasi tata kelola TI sudah memiliki proses yang terdefinisi dan terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan operasional dan perencanaan pengembangan TI.

In ensuring the utilization of IT is in line with the vision, mission, values, strategy and corporate culture, PLN applies IT governance. IT governance describes the responsibilities of directors and executives, organizational structure and processes that ensure IT systems can support the comprehensive achievement of company goals. In 2021, the capability level measurement for IT governance management has been carried out using the COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) standard 5. Based on the measurement results of the capability level for each process in COBIT 5, the IT Maturity Level PLN is at level 3 ,30 - Established Process where the implementation of IT governance already has a well-defined and well-implemented process in the implementation of IT operations and development planning.

Tata Kelola Keamanan TI

Penggunaan TI memiliki sejumlah risiko yang terkait dengan *cyber security* dan *disaster recovery*. Untuk melindungi sistem TI Perusahaan dari ancaman risiko tersebut, PLN berpedoman pada 3 prinsip keamanan TI, yaitu: *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability*. Sistem keamanan TI di PLN mengacu pada kerangka kerja *National Institute of Standards and Technology* (NIST), Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 serta INDEKS KAMI. Kerangka kerja keamanan TI di PLN dapat dilihat pada gambar berikut:

IT Security Governance

The use of IT poses several risks associated with cyber security and disaster recovery. To protect the Company's IT systems from these risks, PLN refers to 3 IT security principles, namely: Confidentiality, Integrity and Availability. IT security system at PLN refers to the framework of National Institute of Standards and Technology (NIST), ISO 27001 Information Security Management and INDEKS KAMI. IT security framework at PLN is presented in the following figure:

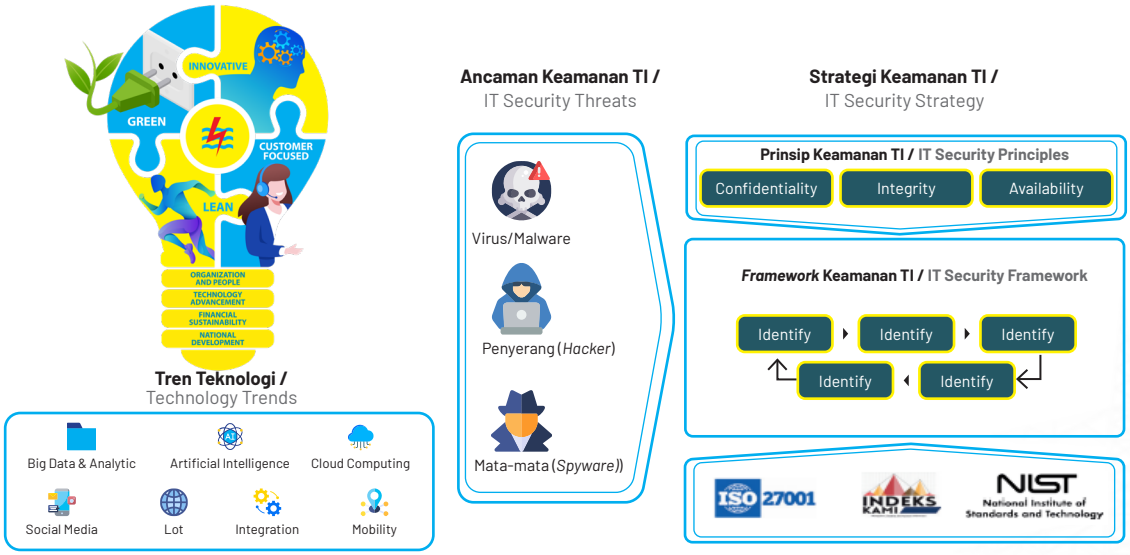

PLN melakukan *security assessment* dan *penetration testing* secara periodik terutama untuk aplikasi-aplikasi kritikal dan aplikasi yang dapat diakses secara publik untuk memastikan perlindungan keamanan data pelanggan, data perusahaan, dan sistem TI terhadap ancaman keamanan siber serta untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan kegiatan operasional bisnis. Hasil pengujian keamanan TI terutama pada aplikasi kritikal dan aplikasi yang dapat diakses secara publik selanjutnya ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan pada aplikasi untuk menjaga keandalan sistem keamanan TI dan penerapan teknologi *Secure Sockets Layer* (SSL) sehingga aman diakses dari jaringan internet.

PLN conducts periodic security assessments and penetration testing, especially for critical applications and applications that can be accessed publicly to ensure the security protection of customer data, company data, and IT systems against cyber security threats as well as to meet the demands of the organization's needs in carrying out business operational activities. . The results of IT security testing, especially on critical applications and applications that can be accessed by the public, are then followed up through recommendations for improvements to the application to maintain the reliability of the IT security system and the application of Secure Sockets Layer (SSL) technology so that it is safely accessed from the internet network..

Beberapa inisiatif terkait keamanan TI yang dilakukan hingga sekarang di antaranya adalah:

- Memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap keamanan TI,
- Memiliki *Security Operation Center* (SOC) yang melakukan monitoring keamanan TI 24x7,
- Memastikan perangkat-perangkat keamanan TI berjalan dengan baik,
- Melakukan *awareness* melalui workshop keamanan TI dan simulasi penanganan keamanan TI pada pegawai perusahaan,
- Memastikan kelangsungan bisnis dalam kondisi darurat melalui simulasi *switchover* aplikasi-aplikasi kritikal, serta bekerja sama secara aktif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
- Pada lapisan fisik di keamanan *Operation Technology* (OT), PLN memastikan keamanan jaringan SCADA melalui pemisahan jaringan OT dengan jaringan TI untuk memastikan keamanan ICS (*Industrial Control System*),
- Penguatan *security data center* dan WAN serta *improvement* sistem VPN dan penambahan *firewall*.

Strategi Pengembangan TI

Strategi utama perusahaan berimplikasi pada ICT *(Information and Communication Technology)* PLN yang harus selalu selaras dalam menghadapi tantangan di era disrupsi melalui transformasi digital dan *best practice* yang dirumuskan dalam 6 strategi pengembangan TI, yaitu:

1. Penggerak proses bisnis di domain pembangunan *(capital expenditure)*, pembangkitan, transmisi, distribusi, niaga/retail dan korporasi.
2. Optimalisasi aplikasi bisnis melalui standardisasi, konsolidasi dan integrasi.
3. Integrasi informasi eksternal dan internal untuk monitoring, analisis dan pengambilan keputusan bisnis dan operasional.
4. Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) di era industri 4.0 untuk konvergensi *Operation Technology* (OT) seperti teknologi SCADA, dengan TI seperti Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung pengoperasian dan pemeliharaan aset perusahaan.
5. Infrastruktur dan teknologi yang mendukung keandalan, *agility*, ketersediaan dan keamanan layanan TI sesuai dengan praktik terbaik.
6. Model operasi TI mendukung bisnis perusahaan yang semakin kompleks dan luas cakupannya.

Several ongoing initiatives related to IT security include:

- Having organizational structure that is responsible for IT security,
- Having Security Operation Center (SOC) to monitor IT security 24x7,
- Ensuring IT security devices are running well,
- Creating awareness through IT security workshops and simulating IT security handling for the Company's employees,
- Ensuring business continuity in emergency situations through switchover simulations of critical applications, as well as actively cooperating with National Cyber and Crypto Agency (BSSN).
- At physical layer in Operation Technology (OT) security, PLN ensures the security of SCADA network by separating of OT network from IT network to ensure ICS (Industrial Control System) security.
- Strengthening of security data center and WAN, as well as improving the VPN system and adding firewalls.

IT Development Strategy

PLN prepares IT system development strategy that is able to support PLN's main business strategy as outlined in 2020-2024 Long-Term Corporate Plan (RJPP) as formulated in 6 IT strategies, namely:

1. Driving business processes in the domains of capital expenditure, power plant, transmission, distribution, commerce/retail and corporation.
2. Optimizing business applications through standardization, consolidation and integration.
3. Integrating external and internal information for monitoring, analysis, as well as business and operational decision making.
4. Utilizing Internet of Things (IoT) in the industrial era 4.0 for OT convergence, including SCADA technology, with IT, such as Artificial Intelligence (AI), in supporting the operations and maintenance of the Company's assets.
5. Infrastructure and technology that supports reliability, agility, availability and security of IT services in accordance with best practices.
6. IT operation model that supports the Company's increasingly complex and widespread businesses.

Strategi TI Mendukung Transformasi PLN

IT Strategy to Support PLN's Transformation

Strategi TI Mendukung Transformasi PLN /
IT Strategy to Support PLN's Transformation

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi /
To be the Leading Electricity Company in Southeast Asia and #1 Customer Choice for Energy Solutions

Strategi TI Mendukung Transformasi PLN /
IT Strategy to Support PLN's Transformation

Tren Teknologi /
Technology Trends

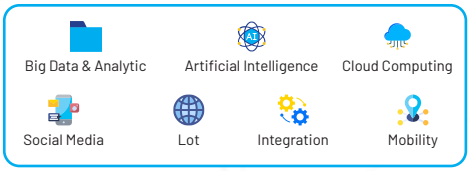

1. ***Driver* proses bisnis di *Domain* Pembangunan (CAPEX), Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Niaga/Retail dan Korporasi /** Business process drivers in the Development Domain (CAPEX), Generation, Transmission, Distribution, Commerce/Retail and Corporate
2. **Optimalisasi aplikasi bisnis melalui standardisasi, konsolidasi dan integrasi. /** Optimization of business applications through standardization, consolidation and integration.
3. **Integrasi informasi eksternal dan internal untuk monitoring, analisis dan pengambilan keputusan bisnis dan operasional. /** Integration of external and internal information for monitoring, analysis and business and operational decision making.
4. **Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) di era Industri 4.0 untuk konvergensi *Operation Technology* (OT) seperti teknologi SCADA, dengan *Information Technology* (IT) seperti *Artificial Intelligence* (AI) dalam mendukung pengoperasian dan pemeliharaan aset perusahaan /** Utilization of the Internet of Things (IoT) in the Industry 4.0 era for the convergence of Operation Technology (OT) such as SCADA technology, with Information Technology (IT) such as Artificial Intelligence (AI) in supporting the operation and maintenance of company assets.
5. **Infrastruktur dan Teknologi yang mendukung keandalan, *agility*, ketersediaan dan keamanan layanan TI sesuai dengan *best practice*. /** Infrastructure and technology that support the reliability, agility, availability and security of IT services in accordance with best practice.
6. **Model Operasi TI mendukung bisnis perusahaan yang semakin kompleks dan luas cakupannya. /** The IT Operations Model supports the company's business which is increasingly complex and broad in scope.

Dalam kerangka kerja tata kelola TI, pengembangan TI di PLN menerapkan *IT guiding principles* seperti *IT business alignment*, *IT financial management*, *IT service continuity*, *information management*, *application management*, *technology management*, *IT policies and standard*, *IT responsibilities* dan *IT talent management* agar senantiasa sesuai dengan kaidah *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan demikian, kebutuhan bisnis yang mengarah kepada penguatan proses bisnis, optimalisasi aplikasi bisnis, integrasi informasi, dan penguatan infrastruktur dapat terpenuhi.

Within IT Governance framework, IT development at PLN applies IT guiding principles, such as IT business alignment, IT financial management, IT service continuity, information management, application management, technology management, IT policies & standards, IT responsibilities and IT talent management to comply with Good Corporate Governance (GCG) principles. Thus, business needs that lead to business process re-engineering, business applications optimization, information integration and infrastructure development can be met.

IT *Master Plan* 2021 – 2024

PLN memiliki IT Master Plan (ITMP) 2021-2024 dimana TI sebagai *strategic enabler* dalam mencapai tujuan strategis korporat. Rencana Pengembangan TI tertuang dalam IT Master Plan (ITMP) 2021 – 2024 telah diselaraskan dengan program Transformasi Digtal PLN yang tertuang dalam

IT Master Plan 2021 – 2024

PLN has prepared the IT Master Plan (ITMP) for 2021-2024 where IT is a strategic enabler in achieving corporate strategic goals. The IT Development Plan contained in the IT Master Plan (ITMP) for 2021 – 2024 has been aligned with the PLN Digital Transformation program contained in the

RJPP 2020 – 2024 dan mengusung konsep *continuous improvement* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

RJPP 2020 – 2024 and carries the concept of continuous improvement in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for Preparation Information Technology Management of State-Owned Enterprises

PLN memiliki ITMP 2021-2024 di mana IT sebagai *Strategic Enabler* dalam mencapai *Strategic Objective Korporat*

PLN has prepared the 2021-2021 ITMP in which IT was placed as as Strategic Enabler in achieving corporate Strategic Objectives.

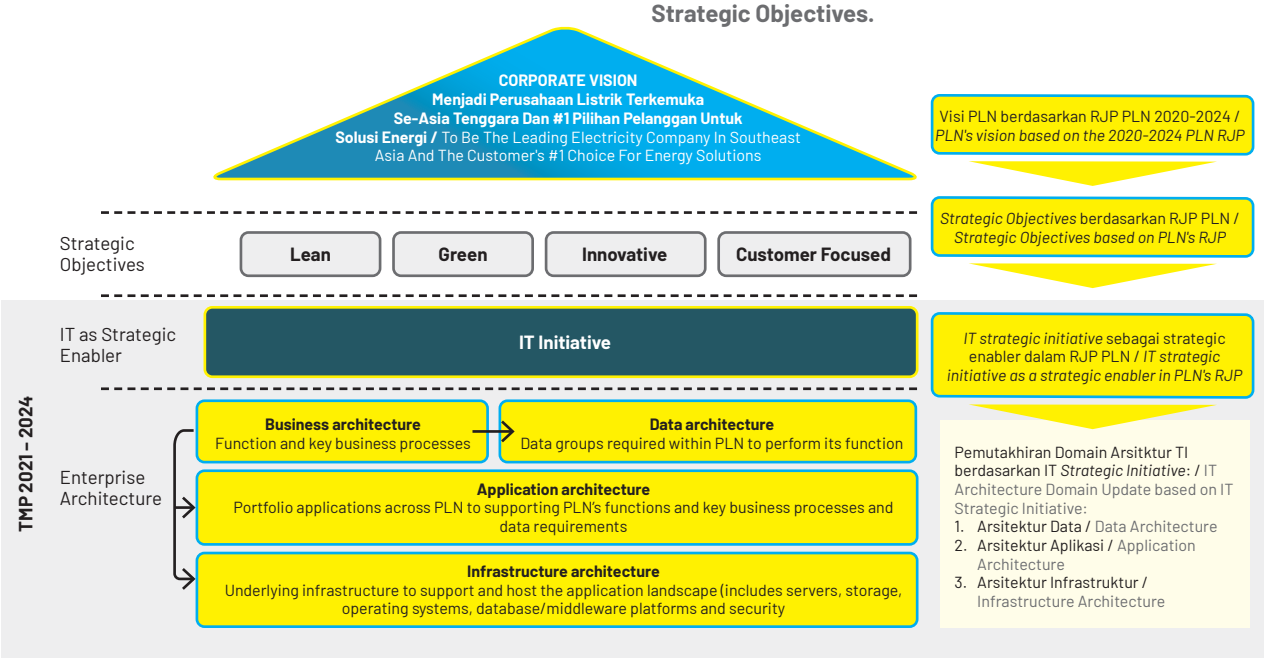

ITMP 2021 - 2024 dibagi ke dalam 3 Program Utama yang diturunkan menjadi 25 inisiatif dan 40 program TI, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Digital Transformation Breakthrough**, mencakup inisiatif TI untuk mendukung program Transformasi Digital (17 Breakthrough), yang terdiri dari 17 inisiatif dan 18 program TI
2. **Business Support Improvement Program**, mencakup inisiatif improvement sistem TI eksisting yang digunakan untuk mendukung proses bisnis korporat, yang terdiri dari 4 inisiatif dan 18 program TI
3. **Corporate Supporting Program**, mencakup inisiatif baru untuk mendukung proses bisnis korporat, yang terdiri dari 4 inisiatif TI dan 4 program TI

ITMP ITMP 2021 - 2024 is divided into 3 Main Programs which are reduced to 25 IT initiatives and 40 programs, with the following explanations:

1. **Digital Transformation Breakthrough**, includes IT initiatives to support the Digital Transformation program (17 Breakthrough), which consists of 17 initiatives and 18 IT programs
2. **Business Support Improvement Program**, which includes existing IT system improvement initiatives that are used to support corporate business processes, consisting of 4 initiatives and 18 IT programs
3. **Corporate Supporting Program**, includes new initiatives to support corporate business processes, consisting of 4 IT initiatives and 4 IT programs

Keseluruhan inisiatif TI dalam 3 (tiga) program utama tersebut dipetakan ke dalam proses bisnis menggunakan *framework Power and Utilities Maturity Model and*

All IT initiatives in the 3 (three) main programs are mapped into business processes using the Power and Utilities Maturity Model and Architecture (PUMMA) framework as a

Architecture (PUMMA) sebagai referensi kerangka kerja dalam pengembangan arsitektur bisnis untuk sektor energi dan utilitas. inisiatif TI sudah mencakup keseluruhan layer proses bisnis di PLN.

REALISASI PENGEMBANGAN TI TAHUN 2021

Pembangunan

1. ***Program Management Office* (PMO)**

   Aplikasi PMO telah digunakan secara nasional untuk memonitor *milestone* utama pembangunan proyek-proyek pembangkit, transmisi dan gardu induk. Selain itu terdapat inisiatif dari PMO Lisdes untuk pengembangan Aplikasi PMO Lisdes Mobile yang digunakan oleh seluruh Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) di PLN.

2. **Integrasi Manajemen**

   Proyek, Jadwal dan Biaya Data jadwal/*timeline* kemajuan proyek pada aplikasi Pembangunan Integrasi Monitoring dan Pengendalian Jadwal & Biaya (PIMPJB) dan biaya proyek di aplikasi PMO telah terintegrasi dengan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk data penagihan/*invoice* biaya proyek. Pengelolaan proyek di sistem PMO dilakukan sampai dengan *Work Breakdown Stucture* (WBS) level 7 dan telah diimplementasikan pada Unit Induk Pembangunan (UIP) di PLN.

3. **Manajemen Energi Primer (BBO dan BBG/BBM)**

   Sistem manajemen energi primer meliputi aplikasi pengelolaan batubara online (BBO) dan aplikasi pengelolaan bahan bakar gas dan minyak (BBG/BBM).

   - Aplikasi pengelolaan batubara *online* (BBO)

     Aplikasi pengelolan batu bara *online* (BBO) yang mencakup fungsi pengendalian dan penagihan yang telah diterapkan di regional bisnis PLN dan PLTU. Sampai dengan saat ini Aplikasi BBO telah mengimplementasikan fitur *reminder* untuk memastikan pengelolaan minimum cadangan stok baru bara serta penyempurnaan formula perhitungan harga batu bara sebagai bentuk antisipasi tehadap keamanan *supply* energi primer di PLN, fitur Geotracking, fitur percepatan pembayaran tagihan termasuk integrasi Aplikasi BBO dengan SAP untuk proses sentralisasi pembayaran di PLN, serta mengimplementasi sistem *Digital Signature*.

reference framework for developing business architecture for the energy and utility sectors. IT initiatives have covered all layers of business processes at PLN.

REALIZATION OF IT DEVELOPMENT IN 2021

Development

1. **Program Management Office (PMO)**

   The PMO application has been used nationally to monitor the main milestones in the construction of power generation, transmission and substation projects. In addition, there is an initiative from PMO Lisdes for the development of the PMO Lisdes Mobile Application which is used by all Electricity Project Implementing Units (UP2K) at PLN.

2. **Management Integration**

   Timeline of project progress in Development of Integrated Monitoring and Control of Schedules & Costs (PIMPJB) application and project costs in PMO application has been integrated with Enterprise Resource Planning (ERP) system for project cost billing/invoice data since 2017. Project management in PMO system was carried out up to Work Breakdown Structure (WBS) level 7 and has been implemented in 18 Construction Units (UIP).

3. **Primary Energy Management (BBO and CNG/BBM)**

   The primary energy management system includes an online coal management application (BBO) and a gas and oil fuel management application (BBG/BBM).

   - Online coal management application (BBO)

     Online coal management application (BBO) which includes control and billing functions that have been implemented in the regional business of PLN and PLTU. To date, the BBO application has implemented a reminder feature to ensure minimum management of new coal reserves as well as refinement of the formula for calculating coal prices as a form of anticipation of the security of primary energy supply at PLN, Geotracking features, bill payment acceleration features including integration of the BBO application with SAP for the process of centralizing payments at PLN, as well as implementing the Digital Signature system.

- Aplikasi BBG/BBM
  Aplikasi BBG/BBM mencakup fungsi monitoring stok harian dan telah diimplementasikan di unit PLTD yang tersebar di regional PLN.

Transmisi

1. Manajemen Aset Transmisi

PLN telah menerapkan sistem manajemen aset atau *Enterprise Asset Management* (EAM) transmisi di seluruh Unit Pengatur Beban dan Transmisi pada regional Sumatera dan Kalimantan, Jawa-Bali-Nusa Tenggara serta Sulawesi. Migrasi sistem menjadi terpusat, terstandar dan terintegrasi antara EAM *Legacy* dengan EAM SAP FM untuk unit transmisi secara nasional (Unit Transmisi/Penyaluran, Unit Pengatur Beban) telah dilaksanakan begitu juga dengan pemutakhiran data aset di EAM *Legacy* dan SAP untuk mendukung kelancaran operasional sistem manajemen aset (EAM) transmisi.

2. Penguatan Link Komunikasi Operational Technology (OT)

Untuk meningkatkan keandalan operasi jaringan sistem ketenagalistrikan, *link* komunikasi SCADA dirancang dengan prinsip redundansi. Fungsi Sistem Kontrol Ketenagalistrikan berfokus pada pencapaian *Mean Time To Repair* (MTTR) komunikasi SCADA *Redundant* dan *SCADA Non Redundant*, penguatan link komunikasi SCADA pada *point-point* Gardu Induk (GI) dengan pelaksanaan *project* 74 link JDA Fiber Optic (FO) dan Remedial Action Scheme (RAS) Muara Karang, Implementasi Loop Protect 500 kV STM 4 serta Implementasi *Radio Trunking Control Center* sebagai komunikasi utama saat *recovery system* pada unit Pembangkit, Transmisi dan Distribusi di Jawa Bali.

Distribusi

1. Manajemen Aset Distribusi

Manajemen aset distribusi digunakan sebagai *driver* dalam melaksanakan pendataan aset dan pencatatan seluruh aktivitas pemeliharaan aset distribusi. Sampai dengan saat ini pengembangan manajemen aset distribusi telah mencapai Pengembangan aplikasi *Enterprise Asset Management* (EAM) Distribusi modul *Asset Register* (AR), *Health Index* (HI), Pemeliharaan, dan Operasi Tahap I, implementasi modul AR dan HI untuk

- CNG/BBM Application
  The BBG/BBM application includes a daily stock monitoring function and has been implemented in PLTD units spread across PLN regions.

Transmission

1. Transmission Asset Management
   PLN has implemented a transmission asset management system or Enterprise Asset Management (EAM) in all Load and Transmission Control Units in the Sumatera and Kalimantan regions, Java-Bali-Nusa Tenggara and Sulawesi. System migration to become centralized, standardized and integrated between EAM Legacy and EAM SAP FM for national transmission units (Transmission/Distribution Units, Load Management Units) has been carried out as well as updating asset data in EAM Legacy and SAP to support smooth operation of asset management systems (EAM) transmission.

2. Strengthening Operational Technology (OT) Communication Links

To improve the reliability of the electricity system network operation, the SCADA communication link is designed with the principle of redundancy. The function of the Electricity Control System focuses on achieving Mean Time To Repair (MTTR) for SCADA Redundant and SCADA Non Redundant communications, strengthening SCADA communication links at Substation (GI) points by implementing 74 JDA Fiber Optic (FO) links and Remedial Action Scheme (RAS) Muara Karang projects, Implementation of Loop Protect 500 kV STM 4 and Implementation of Radio Trunking Control Center as the main communication during system recovery at Generation, Transmission and Distribution units in Java Bali.

Distribution

1. Distribution Asset Management

Distribution asset management is used as a driver in carrying out asset data collection and recording all distribution asset maintenance activities. To date, the development of distribution asset management has reached Enterprise Asset Management (EAM) application development. Distribution of Asset Register (AR), Health Index (HI) modules, Maintenance and Operation Phase I, implementation of AR and HI

Unit Induk DIstribusi (UID), Unit Induk Wilayah (UIW) dan Unit Pelaksana dan Pengatur Distribusi (UP2D) di PLN yang mencakup pengelolaan asset mulai trafo GI sampai jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah, *monitoring work order* untuk kegiatan inspeksi, laporan *Health Index* asset guna membantu dalam pengambilan keputusan terkait prioritas pemeliharaan aset, serta implementasi API untuk integrasi EAM dan Aplikasi Geographic Information System (GIS) serta EAM dengan Aplikasi Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT).

2. Manajemen Gangguan dan Pemadaman

Sistem manajemen gangguan dan pemadaman PLN yang telah diimplementasikan secara *web-based* maupun *mobile* guna memudahkan petugas lapangan dalam proses tindak lanjut penanganan gangguan dan meningkatkan efektivitas monitoring pengaduan di sisi operator. Integrasi SCADA dengan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) pada unit PLN sudah diintegrasikan dengan gangguan jaringan dan pemeliharaan tegangan menengah dan telah diluncurkan fitur *infoblast* terkait informasi gangguan di Jawa Bali.

PLN menginisiasi program Transformasi PLN *Breaktrough Outage Management*, yang meliputi berbagai penyempurnaan dan pengembangan proses bisnis maupun sistem aplikasi pendukung seperti penyempurnaan fitur dan *dashboard* sistem APKT, *Virtual Command Center* untuk *monitoring realtime* oleh manajemen unit serta Fitur Pengaduan dan Notifikasi Pemadaman/Pemeliharaan pada New PLN Mobile.

Telah dibangun *Data Analytic* untuk Pelayanan Teknik (Yantek) *Analytic Tools* guna melakukan *monitoring* terhadap *performance* dan beban kerja petugas Yantek secara individu sebagai salah satu *strategic inisiatif* Program Transformasi *Outage Management* PLN.

3. *Advanced Metering Infrastructure*

Advanced Metering Infrastructure (AMI) merupakan sistem informasi *metering* yang memiliki kapabilitas dalam pembacaan meter secara *realtime* untuk meningkatan keberhasilan dan kelengkapan *Load profile,* mampu menyimpan data meter, *remote connect/ disconnect*, serta VEE (*Validation, estimation, and*

modules for the Distribution Parent Unit (UID)), Regional Parent Unit (UIW) and Distribution Implementing and Regulatory Unit (UP2D) at PLN which includes asset management from GI transformers to medium and low voltage networks, monitoring work orders for inspection activities, Asset Health Index reports to assist in decision making related to asset maintenance priorities, as well as API implementation for the integration of EAM and Geographic Information System (GIS) Applications as well as EAM with the Integrated Complaints and Complaints Application (APKT).

2. Disruption and Outage Management

PLN's disruption and outage management system that has been implemented through web and mobile basis to facilitate field officers in the follow-up process for handling disturbances and improve the effectiveness of monitoring complaints on the operator side. The integration of SCADA with the Integrated Complaints and Complaints Application (APKT) at the PLN unit has been integrated with network disturbances and medium voltage maintenance and has launched an infoblast feature related to fault information in Java and Bali.

PLN initiates the PLN Breakthrough Outage Management transformation program, which includes various improvements and developments of business processes and supporting application systems such as improvements to the features and dashboard of the APKT system, Virtual Command Center for real-time monitoring by unit management and the Outage/ Maintenance Complaints and Notification Features on New PLN Mobile.

Data Analytic for Technical Services (Yantek) Analytic Tools has been built to monitor the performance and workload of individual Yantek officers as one of the strategic initiatives of the PLN Outage Management Transformation Program.

3. Advanced Metering Infrastructure

Advanced Metering Infrastructure (AMI) is a metering information system that has the capability of real -time meter reading to increase the success and completeness of Load profiles, capable of storing meter data, remote connect/disconnect, and VEE (Validation, Estimation, and Editing). In addition, the development of AMI also

Editing). Selain itu pengembangan AMI juga bertujuan untuk meningkatkan fitur *theft detection* yang lebih akurat dalam mendeteksi anomali dan pencurian listrik lebih dini.

aims to improve theft detection features that are more accurate in detecting anomalies and theft of electricity early.

Implementasi *smart meter* atau *Advanced Metering Infrastructure* (AMI) yang merupakan bagian dari *smart grid* yaitu infrastruktur dan sistem pembacaan meter dua arah yang memungkinkan pembacaan data meter secara *near-real time* merupakan pengembangan dari *Automatic Meter Reading* (AMR) untuk pembacaan meter otomatis dengan tambahan kemampuan untuk penerapan tarif dinamis dan koneksi *Home Area Network*. Ekosistem AMI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu *smart meter*, media komunikasi dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi yang terdiri dari *Head End System* (HES) dan *Meter Data Management System* (MDMS).

The implementation of smart meters or Advanced Metering Infrastructure (AMI) which is part of the smart grid, namely infrastructure and a two-way meter reading system that allows reading meter data in near-real time is the development of Automatic Meter Reading (AMR) for automatic meter reading with additional capabilities for dynamic tariff application and Home Area Network connection. The AMI ecosystem consists of 3 (three) main components, namely smart meters, communication media and information technology-based support systems consisting of Head End System (HES) and Meter Data Management System (MDMS).

PLN melakukan pengembangan sistem AMI yang terdiri dari *Head End System* (HES) dan *Meter Data Management System* (MDMS), pengembangan fitur ANEV (Analysis and Evaluation), pengembangan fitur Commisioning, serta integrasi *billing* pada Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T).

PLN has developed an AMI system consisting of the Head End System (HES) and Meter Data Management System (MDMS), the development of the ANEV (Analysis and Evaluation) feature, the development of the Commissioning feature, as well as billing integration in the Integrated Customer Service Application (AP2T).

Pelayanan Pelanggan

1. **New PLN Mobile**

   PLN Mobile dikembangkan sebagai *market place* untuk produk kelistrikan, anak perusahaan dan mitra sekaligus *partner* diluar PLN Group. Secara garis besar tujuan dari pengembangan New PLN Mobile adalah untuk menciptakan *direct marketing channel*, membangun *branding* perusahaan, memberikan nilai pada pelanggan, meningkatkan *engagement* pelanggan, menumbuhkan loyalitas pelanggan, terwujudnya Beyond Kwh dan Monetisasi serta tercapainya Transformasi Digital PLN.

   Selain itu, untuk mendukung program stimulus pemerintah pada masa pandemi sekaligus menjaga komitmen layanan pelanggan, PLN mengembangkan layanan *WhatsApp Chatbot* PLN. *WhatsApp Chatbot* PLN memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses informasi terkait program stimulus dan jumlah tagihan.

Customer service

1. **New PLN Mobile**

   PLN Mobile was developed as a marketplace for electricity products, subsidiaries and partners as well as partners outside the PLN Group. In general, the objectives of the development of New PLN Mobile are to create direct marketing channels, build company branding, provide value to customers, increase customer engagement, grow customer loyalty, realize Beyond Kwh and Monetization and achieve PLN Digital Transformation.

   In addition, to support the government's stimulus program during the pandemic while maintaining customer service commitments, PLN has developed the PLN WhatsApp Chatbot service. PLN 's WhatsApp Chatbot makes it easy for customers to access information related to the stimulus program and bill amount.

Selain layanan *chatbot*, PLN juga merilis aplikasi New PLN Mobile yang telah diperkaya dengan fitur-fitur baru yang dikembangkan dari versi sebelumnya. New PLN Mobile merupakan salah satu media *engagement* dengan pelanggan selain CC123, Web PLN, dan akun resmi PLN pada *platform* media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Fitur yang ada di aplikasi New PLN Mobile saat ini adalah:

- Permohonan Layanan PLN,
- Pengaduan Pelanggan,
- Informasi Tagihan/Token Pelanggan dan informasi TDL,
- Simulasi Layanan Listrik (pasang baru, ubah daya dan penerangan sementara),
- Informasi Pembayaran Layanan Listrik,
- Fitur *Chatting* 123,
- *Broadcast* Promo,
- Pasang Baru,
- Fitur Listriqu,
- Fitur ICONNET,
- Fitur Pembayaran Non-Taglis,
- Fitur Penyambungan Sementara.

2. Aplikasi Charge.In Eletrical Vechical (EV)

Pengembangan aplikasi Charge.In sebagai aplikasi pengisian daya (*charging*) pertama bagi eksosistem kendaraan listrik pada stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Aplikasi Charge.In dapat menunjukan lokasi SPKLU dan besaran pengisian daya, serta mengontrol dan mengendalian pengisian daya. Selain itu, aplikasi Charge.In juga telah terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile guna memperluas *user experience* pelanggan terhadap berbagai produk ketenagalistrikan.

Big Data Analytics

Pengembangan *Big Data* dan *Enterprise Data Management* (EDM) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan validitas data pada bisnis proses perusahaan, membangun pusat data transaksi PLN untuk keperluan pelaporan dan analisa, serta sebagai instrumen dalam melakukan *predictive analysis* sehingga hal-hal yang dapat menghambat operasional bisnis dapat diantisipasi. Sampai dengan saat ini PLN telah mengembangkan beberapa dashboard utama dalam mendukung implementasi *Big Data Analytics* PLN yang terdiri dari :

In addition to the chatbot service, PLN has also released the New PLN Mobile application which has been enriched with new features developed from the previous version. New PLN Mobile is one of the media engagements with customers other than CC123, PLN Web, and PLN's official accounts on social media platforms, such as Facebook and Twitter. The features in the New PLN Mobile application at this time are:

- PLN Service Application,
- Customer Complaints,
- Customer Billing/Token Information and TDL information,
- Electrical Service Simulation (new install, change power and temporary lighting),
- Electricity Service Payment Information,
- Chat Features 123,
- Promo Broadcasts,
- New Installations,
- Electrical Features,
- ICONNET Features,
- Non-Electricity Bills Payment Features,
- Temporary Connection Feature.

2. Electrical Vechical (EV) Charge.In Application

Development of the Charge.In application as the first charging application for the electric vehicle ecosystem at the Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU). The Charge.In application can show the location of the SPKLU and the amount of charging, as well as control and control charging. In addition, the Charge. In application has also been integrated with the PLN Mobile application to expand customer user experience for various electricity products.

Big Data Analytics

The development of Big Data and Enterprise Data Management (EDM) aims to increase the effectiveness of management decision making, improve the quality, completeness, and validity of data in the company's business processes, build a PLN transaction data center for reporting and analysis purposes, as well as an instrument in performing predictive analysis so that things that can hinder business operations can be anticipated. To date, PLN has developed several main dashboards to support the implementation of PLN's Big Data Analytics, which consist of:

1. ***Dashboard Cash War Room* (CWR)**
   Dashboard Cash War Room menampilkan Informasi terkait kondisi likuiditas PLN guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang akurat dan komprehensif. Terdapat 186 *Dashboard* dan turunannya yang menampilkan *insight* data terkait monitoring progres dan transparansi likuiditas, *cash release, budget control* dan performa keuangan perusahaan.
2. **Dashboard *Performance Business Review* (PBR)**
   Dashboard Performance Business Review (PBR) menampilkan informasi kinerja perusahaan secara korporat hingga turunannya pada level Divisi, Regional, Unit hingga Anak Perusahan guna untuk mengkonsolidasikaan seluruh kinerja unit PLN.
3. **Dashboard Kementerian BUMN**
   Dashboard Kementerian BUMN menampilkan Informasi pelaporan kinerja, keuangan dan proyek secara korporat yang dibutuhkan oleh 3 Kementerian yaitu Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
4. ***Dashboard* Pengadaan *(E-Procurement)***
   Dashboard Pengadaan *(E-Procurement)* menampilan informasi pengadaan yang terintegrasi guna untuk meningkatkan produktivitas proses pengadaan yang berlangsung di PLN.
5. ***Dashboard* PLN Mobile**
   Dashboard PLN Mobile menampilkan *insight* data terkait pengelolaan pelanggan PLN Mobile untuk meningkatkan jumlah pengguna dan kepuasan pelanggan.
6. ***Dashboard Customer Complaints***
   Dashboard Customer Complaints menampilkan Informasi optimalisasi biaya operasional pelayanan teknis (yantek), evaluasi kinerja operasi aset distribusi, dan personalisasi respon penanganan keluhan pelanggan untuk meningkatkan bisnis proses PLN dalam penanganan keluhan dan meminimalkan keluhan pelanggan di masa depan.
7. ***Dashboard Transmission and Distribution***
   Dashboard Transmission and Distribution menampilkan informasi terkait aset transmisi dan distribusi untuk membantu pengelolaan dan pengambilan keputusan manajemen terkait *asset performance serta Operation Maintenance Effectiveness (efektiftias Operaional dan Pemeliharaan).*

1. **Cash War Room (CWR) Dashboard**
   The Cash War Room Dashboard displays information related to PLN's liquidity conditions to assist management in making accurate and comprehensive decisions. There are 186 Dashboards and their derivatives that display data insights related to monitoring progress and liquidity transparency, cash releases, budget control and company financial performance.
2. **Performance Business Review (PBR) Dashboard**
   The Performance Business Review (PBR) dashboard displays information on the company's performance on a corporate basis to its derivatives at the Division, Regional, Unit to Subsidiary levels in order to consolidate the entire performance of PLN units.
3. **SOE Ministry Dashboard**
   The Ministry of BUMN Dashboard displays information on corporate performance, finance and project reporting required by 3 Ministries, namely the Ministry of SOEs, the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Finance.
4. **Procurement Dashboard (E-Procurement)**
   Procurement Dashboard (E-Procurement) displays information integrated procurement in order to increase the productivity of the procurement process that takes place at PLN.
5. **PLN Mobile Dashboard**
   PLN Mobile dashboard showing data insights related to the management of PLN Mobile customers to increase the number of users and customer satisfaction.
6. **Customer Complaint Dashboard**
   Customer Complaints Dashboard displays Information optimizing operational costs for technical services (yantek), evaluating distribution asset operating performance, and personalizing customer complaint handling responses to improve PLN's business processes in handling complaints and minimizing customer complaints in the future.
7. **Transmission and Distribution Dashboard**
   The Transmission and Distribution dashboard showing information related to transmission and distribution assets to assist management and management decision making related to asset performance as well as Operation Maintenance Effectiveness (Operational and Maintenance effectiveness).

8. ***Dashboard Natural Disaster Management System***
   Dashboard Natural Disaster Management System menampilkan Informasi terkait peta risiko, mitigasi, dan koordinasi pengelolaan kebencanaan di PLN.
9. ***Dashboard* Kinerja Keuangan Anak Perusahaan**
   Dashboard Kinerja Keuangan Anak Perusahaan menampilkan *insight* data terkait konsolidasi kinerja Laporan Keuangan Anak Perusahaan sehingga mampu membantu manajemen PLN *Holding* dalam pengembilan keputusan dan penentuan arah strategis anak perusahaan PLN.

Corporate Services

1. ***Finance* dan *Budgeting***
   PLN telah mengembangkan sistem e-*budgeting* untuk mendukung proses perencanaan dan *monitoring* realisasi penggunaan anggaran di level korporasi. Proses perencanaan RKAP dalam sistem ini telah terintegrasi dengan aplikasi ERP. Untuk memantau penggunaan anggaran di level unit, PLN memanfaatkan aplikasi ERP dan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Terpadu (SIPAT) yang terintegrasi dengan data perencanaan pada sistem e-*budgeting*. Sedangkan untuk memantau proyeksi arus kas masuk/keluar utama PLN telah mengembangkan *Dashboard Cash War Room*.

   Keuangan PLN saat ini menggunakan aplikasi ERP-SAP yang diterbitkan sesuai periode pelaporan dari seluruh Unit PLN yaitu Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas. Sedangkan untuk proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi antara *holding* dan anak perusahaan, PLN telah mengimplementasikan aplikasi Maxico.

   Untuk mendukung penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) baru PLN mengimplementasikan Aplikasi NAKISA *Lease Administration* dan Aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) yang telah terintegrasi dengan SAP.

   Selain itu, dalam meningkatkan akuntabilitas transaksi perpajakan, PLN mengadakan kesepakatan kerja sama dengan bank-bank BUMN dan Dirjen Pajak. PLN berkomitmen untuk melaksanakan integrasi

8. **Natural Disaster Management System Dashboard**
   Natural Disaster Management System Dashboard displays information related to risk maps, mitigation, and coordination of disaster management at PLN.
9. **Subsidiary Financial Performance Dashboard**
   The Subsidiary's Financial Performance Dashboard displays data insights related to the consolidated performance of the Subsidiary's Financial Statements so as to assist the management of PLN Holding in making decisions and determining the strategic direction of PLN's subsidiaries.

Corporate Services

1. **Finance and Budgeting**
   PLN has developed an e- budgeting system to support the planning process and monitoring the realization of budget use at the corporate level. The RKAP planning process in this system has been integrated with the ERP application. To monitor budget usage at the unit level, PLN utilizes an ERP application and the Integrated Budget Planning Information System (SIPAT) which is integrated with planning data in the e- budgeting system. Meanwhile, to monitor the main cash inflow/ outflow projections, PLN has developed a Cash War Room Dashboard.

   PLN's finances currently use the ERP-SAP application which is issued according to the reporting period of all PLN units, namely the Balance Sheet, Profit and Loss and Cash Flow. Meanwhile, for the process of preparing consolidated financial statements between the holding and its subsidiaries, PLN has implemented the Maxico application.

   To support the implementation of the new financial accounting standards (PSAK), PLN has implemented the NAKISA Lease Administration Application and the SPSS (Statistical Product and Service Solutions) application which has been integrated with SAP.

   In addition, to increase the accountability of tax transactions, PLN has entered into a cooperation agreement with state-owned banks and the Director General of Taxes. PLN is committed to implementing

data perpajakan yang diawali dengan pembangunan aplikasi terpusat pajak PLN yang mengintegrasikan proses transaksi pembayaran PPN antara PLN Pusat dan PLN Unit selaku pembayar pajak dan bank selaku pihak penerima pembayaran pajak dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku penerima setoran pajak. Pengembangan Aplikasi Integrasi Pajak bertujuan untuk meminimalisir sengketa (*dispute*) pajak, baik data maupun materiil, mencapai *cost of compliance* yang cenderung rendah, memudahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, memudahkan dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT, meningkatkan akuntabilitas transaksi perpajakan dan mitigasi penyalahgunaan oleh lawan transaksi, serta mengintegrasikan keseluruhan proses pengelolaan perpajakan (PPN dan PPh) secara *host to host* antara PLN dengan DJP.

tax data integration, starting with the development of a centralized PLN tax application that integrates the VAT payment transaction process between Central PLN and PLN Units as taxpayers and banks as recipients of tax payments and the Directorate General of Taxes (DGT) as recipients of tax payments. The development of the Tax Integration Application aims to minimize tax disputes, both on data and material, achieve a low cost of compliance, facilitate the fulfillment of tax obligations, make it easier to carry out SPT reporting obligations, increase tax transaction accountability and mitigate abuse by transaction partners, as well as integrating the entire tax management process (VAT and Income Tax) on a host-to-host basis between PLN and DGT.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM di PLN menggunakan aplikasi ERP dan aplikasi pendukung lainnya, antara lain aplikasi PLN Daily untuk mempermudah pencatatan kehadiran pegawai dan mendukung pelaksanaan *Work Form Home* (WFH), Aplikasi Manajemen Surat (AMS) Korporat untuk korespondensi internal dan eksternal di PLN, aplikasi SatuHC sebagai sistem pengelolaan data pegawai secara *self-service* yang terintegrasi dengan sistem ERP, aplikasi penilaian kinerja pegawai (SIMKP), serta portal *knowledge management* (PLNKita) sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan antar pegawai dan sebagai *social media* internal PLN.

2. Human Capital (HC)

HC management at PLN utilizes ERP applications and other supporting applications, including the PLN Daily application to facilitate employee attendance recording and support the implementation of Work Form Home (WFH), Corporate Mail Management Application (AMS) for internal and external correspondence at PLN, SatuHC application as self-service employee data management system integrated with the ERP system, employee performance appraisal application (SIMKP), and knowledge management portal (PLNKita) as a means to share knowledge between employees and as PLN's internal social media .

3. Digital Signature

Penerapan *digital signature* pada Aplikasi Manajemen Surat (AMS) Korporat dan Aplikasi Batu Bara Online (BBO) bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan mempermudah akses dokumen dengan menghemat waktu dan ruang serta meminimalisir kehilangan data/informasi/dokumen. Pengembangan *digital signature* telah melibatkan BSN (Balai Sertifikasi Elektronik) sebagai verifikator keabsahan dan proses instalasi eSign dalam server PLN. Implementasi *digital signature* di PLN juga telah diatur dalam peraturan direksi terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan PLN.

3. Digital Signature

The application of digital signatures in the Corporate Mail Management Application (AMS) and Coal Online Application (BBO) aims to simplify business processes and facilitate document access by saving time and space and minimizing data/information/document loss. The development of digital signatures has involved BSN (Electronic Certification Center) as a verifier of the validity and installation process of eSign on the PLN server. The implementation of digital signatures at PLN has also been regulated in the board of directors regulations regarding the implementation of Electronic Certificates within PLN.

4. *IT Service Management*

Untuk meningkatkan kualitas layanan TI, PLN telah membangun dan mengimplementasikan secara berkesinambungan proses pelayanan terintegrasi melalui sistem *IT Service Management* (ITSM) secara terpusat yang terdiri dari *service desk*, *IT support*, *incident management*, *problem management*, *change management*, *asset management*, dan *command center*. Seluruh komponen tersebut merupakan komponen utama dalam meningkatkan kualitas layanan TI di PLN.

5. Audit, Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Untuk mendukung kegiatan audit dan manajemen risiko, PLN membangun aplikasi audit berbasis risiko (ERBAS) yang meliputi 5 komponen utama yaitu Penilaian Risiko, *Electronic Working Paper*, *Schedule Staff & Audit*, *Reporting Time & Expense* serta *Audit Repository*. Aplikasi ERBAS yang telah diimplementasikan diseluruh unit PLN menjadi aplikasi penting dalam *tracking* dan *monitoring* proses audit di lingkungan internal PLN.

Dari sisi manajemen risiko PLN juga telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi (SMARTER) yang bertujuan untuk mengintegrasikan risiko dan memastikan pengelolaan risiko baik di level divisi/unit dan korporat berjalan selaras. Aplikasi SMARTER mencakup data terkait profil risiko divisi/unit dan korporat, peta risiko, kajian risiko, dokumen manajemen risiko, report mitigasi risiko, *key risk indicator*, dan juga sistem berupa *early warning system, reminder system* serta *verify* dan *approval*.

Sedangkan dari sisi kepatuhan PLN telah mengimplementasi Aplikasi *Compliance Online System* (COS) sebagai aplikasi sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis SNI ISO 37001:2016 dan Aplikasi *Fraud Risk Assessment* (FRA) sebagai aplikasi untuk mengidentifikas, me*monitoring* serta evaluasi risiko *fraud* yang terintegrasi pada level unit dan korporat. Aplikasi FRA berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap risiko *fraud* dan kontrol mitigasi pada masing-masing unit/divisi yang dilengkapi dengan sistem pengesahan (*verify and approval*).

4. IT Service Management

To improve the quality of IT services, PLN has built and continuously implemented an integrated service process through a centralized IT Service Management (ITSM) system consisting of a service desk, IT support, incident management, problem management, change management, asset management, and command center. All of these components are the main components in improving the quality of IT services at PLN.

5. Audit, Compliance and Risk Management

To support audit and risk management activities, PLN has developed a risk-based audit application (ERBAS) which includes 5 main components, namely Risk Assessment, Electronic Working Paper, Schedule Staff & Audit, Reporting Time & Expense and Audit Repository. The ERBAS application that has been implemented in all PLN units is an important application in tracking and monitoring the audit process in PLN's internal environment.

In terms of risk management, PLN has also implemented an Integrated Risk Management System Application (SMARTER) which aims to integrate risk and ensure that risk management at the division/unit and corporate levels runs in harmony. The SMARTER application includes data related to division/unit and corporate risk profiles, risk maps, risk studies, risk management documents, risk mitigation reports, key risk indicators, as well as systems in the form of early warning systems, reminder systems as well as verify and approval.

Meanwhile, in terms of compliance, PLN has implemented the Compliance Online System (COS) application as an anti-bribery management system application based on SNI ISO 37001:2016 and the Fraud Risk Assessment (FRA) application as an application to identify, monitor and evaluate fraud risks. integrated at the unit and corporate levels. The FRA application functions to assess fraud risk and control mitigation in each unit/division equipped with a verification and approval system.

06

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social and Environmental Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social and Environmental Responsibility

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin masif, kesadaran masyarakat global atas dampak signifikan yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas usaha terhadap lingkungan dan sosial semakin meningkat. Hal ini memengaruhi sudut pandang masyarakat global dalam menentukan keberhasilan usaha dari suatu entitas bisnis.

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Commitment on the Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility

In line with the massive business development, the global public awareness of the significant environmental and social impact incurred from the business activities has increased. This affects the point of view of global society in determining the business success of a business entity.

Adanya pergeseran perspektif masyarakat terhadap indikator yang menentukan keberhasilan usaha, dari semula yang hanya diukur berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam mencetak pertumbuhan *profit* yang maksimal, kini turut mempertimbangkan sejauh mana kontribusi yang bisa diberikan oleh Perusahaan terhadap aspek-aspek non-ekonomi, khususnya aspek lingkungan dan sosial. Pergeseran inilah yang mendorong munculnya paradigma *Sustainability* sebagai salah satu aspek yang menjadi pertimbangan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

The shifting public perspective on the indicators that determine a business success, from only measuring based on the company's capability in generating maximum profit growth, to now also considering how far the Company's contribution to non-economic aspects, particularly environmental and social aspects. Such shifting encourages the initiation of Sustainability paradigm as one of the aspects considered by business players in performing their operational activities.

Paradigma *Sustainability* dapat dimaknai sebagai suatu upaya dari entitas usaha dalam menjalankan aktivitas operasional dengan menekankan keseimbangan antara 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu *People*, *Profit*, dan *Planet*. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha di masa depan. Selain itu, paradigma *Sustainability* juga dapat menjadi acuan entitas usaha untuk berkontribusi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* melalui pelaksanaan aktivitas operasional yang sesuai dengan nilai dan prinsip *Sustainability*.

The Sustainability paradigm can be interpreted as an effort of a business entity in carrying out its operational activities by emphasizing the balance of the 3 (three) important aspects of sustainable development, which are People, Profit, and Planet. This is intended to maintain the business continuity in the future. Furthermore, the Sustainability paradigm can also be a reference for business entity in contributing to the realization of Sustainable Development Goals through the conduct of operation activities that are in accordance with the values and principles of Sustainability.

Paradigma *Sustainability* dapat dimaknai sebagai suatu upaya dari entitas usaha dalam menjalankan aktivitas operasional dengan menekankan keseimbangan antara 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu *People, Profit*, dan *Planet*. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha di masa depan.

The Sustainability paradigm can be interpreted as an effort of a business entity in carrying out its operational activities by emphasizing the balance of the 3 (three) important aspects of sustainable development, which are People, Profit, and Planet. This is intended to maintain the business continuity in the future.

Dalam upaya menjaga kelangsungan usaha dan turut berkontribusi mewujudkan SDGs, PLN berkomitmen untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan berlandaskan pada nilai dan prinsip *Sustainability*. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

In order to maintain business continuity and also contribute to realize the SDGs, PLN is committed to perform its operational activities based on the values and principles of Sustainability. The commitment is embodied in the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL), which is an activity to support the realization of sustainable development by providing benefits on economy, social, and environment, as well as legal and governance with principles that are more integrated, directed, measurable impact, and accountable, and part of the Company's business approach.

Di samping itu, PLN yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mendapat amanah dari Kementerian BUMN untuk menjadi Agen Pembangunan (*Agent of Development*) yang berperan aktif dalam pembangunan Indonesia baik secara langsung melalui keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional maupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, pelaksanaan TJSL di Perusahaan berperan sebagai aksi nyata PLN untuk aktif berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan sumbangan terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia.

Furthermore, PLN with the status as a State-Owned Enterprise (SOE) is also mandated by the Ministry of SOEs to be an Agent of Development that serves an active role in the development of Indonesia both directly by being involved in national strategic projects and indirectly. Therefore, the implementation of TJSL in the Company is PLN's actual action to actively participate in improving the welfare and equal distribution of development outcome for all Indonesian people and in making the best contribution for the country and the people.

Program TJSL dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan Analisa Risiko dan Proses Bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

The TJSL programs are implemented by implementing the principles of:

1. Integrated, which is based on the Risk Analysis and Business Process that has the relevance with stakeholders;
2. Directed, which is having clear direction to achieve the Company's purpose;
3. Measurable impact, which is having contribution and providing benefits that produce change or added value for the stakeholders and the Company;
4. Accountability, which can be accounted for in order to prevent any potential abuse and irregularities.

Program TJSL ini dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan program TJSL yang berpedoman pada rencana kerja. Program TJSL meliputi beberapa tahapan, yaitu:

The TJSL program is done systematically and integrated to guarantee the implementation and achievement of the TJSL program success based on the priority and/or achievement of the purpose of TJSL program, which is guided by the work plan. The TJSL program includes several stages, which are:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan;
4. *Monitoring* dan Evaluasi.

Pengelolaan Program TJSL dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa dasar hukum, meliputi:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Peraturan Direksi No. 0135.P/DIR/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang *Standard Operation Procedure* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero);
5. Peraturan Direksi No. 0138.P/DIR/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Pedoman CSR Berbasis ISO 26000 di PT PLN (Persero);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Direksi No. 0217.K/DIR/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pembentukan Komite *Sustainability* Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility* Berbasis ISO 26000)
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. 0006.Pt/CSR.00.01/C01060600/2021 tentang Program Kontribusi Sosial Kemasyarakatan dan Komunitas (*Community Involvement and Development*/CID) PT PLN (Persero).

1. Planning;
2. Implementation;
3. Supervision;
4. Monitoring and evaluation.

The management of TJSL program is implemented by referring to several legal bases, covering:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
2. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibilities
3. Government Regulation No. 59 of 2017 on Implementation to Achieve Sustainable Development Goals;
4. Regulation of the Board of Directors No. 0135.P/DIR/2019 dated August 28, 2019 on Standard Operating Procedure (SOP) for Implementation of Partnership and Community Development Program within PT PLN (Persero);
5. Regulation of the Board of Directors No. 0138.P/DIR/2019 dated August 29, 2019 on Guidelines for CSR Based on ISO 26000 at PT PLN (Persero);
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 on Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises;
7. Decree of the Board of Directors No. 0217.K/DIR/2021 dated May 27, 2021 on Establishment of Sustainability Committee for Corporate Social and Environmental Responsibility Based on ISO 26000)
8. Standard Operating Procedure (SOP) No. 0006.Pt/CSR.00.01/C01060600/2021 on Community Involvement and Development Program of PT PLN (Persero).

Manfaat Program TJSL / *Benefit of TJSL Program*					
Mengurangi biaya risiko proses beroperasinya Perusahaan (manajemen risiko). / Reducing the risk cost of the Company's operation process (risk management).	Menurunkan tekanan dari pihak luar. / Reducing pressure from external parties.	Meningkatkan kepuasan pegawai. / Increasing the employees' satisfaction.	Memperbaiki citra, mutu, dan produktivitas Perusahaan. / Improving the Company's image, quality, and productivity.	Meningkatkan loyalitas pelanggan. / Increasing the customers' loyalty.	Mempermudah akses dana/ modal. / Facilitating access to funds / capital.

Visi, Misi, dan Tujuan Program TJSL / *Vision, Mission, and Objectives of TJSL Program*	
Visi / *Vision*	**Misi / *Mission***
Menjadikan program TJSL dan PKBL PT PLN (Persero) terdepan dalam meningkatkan kebutuhan kelistrikan dengan tetap memperhatikan keharmonisan seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan. / To make the TJSL and PKBL programs of PT PLN (Persero) as the foremost in increasing electricity needs while continue to pay attention to the harmony of all stakeholders and the environment.	Melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu menjembatani semua kepentingan pemangku kepentingan Perusahaan agar dapat berlangsung secara sinergis demi memajukan citra Perusahaan. / To carry out social activities for bridging all the Company's stakeholders interests so that they can be held synergistically in order to increase the Company's image.

Manfaat Program TJSL / *Benefit of TJSL Program*			
Tujuan / *Objectives*			
Mewujudkan misi Perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi mitra kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media masa serta masyarakat sekitar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. / To realize the Company's mission while creating quality growth and satisfying the expectations of all stakeholders including business partners, government, employees, non-governmental organizations, mass media, and surrounding communities, as well as maintaining environmental sustainability.			
Mewujudkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat. / Realizing a harmonious relationship between the Company and the communities.	Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional. / To grow and develop small businesses and cooperatives that are independent, resilient, and competitive with professional management.	Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika. / To develop a fostering pattern of small businesses and cooperatives by prioritizing aspects of equity, independence, professionalism and ethics.	Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. / To maintain environmental preservation and to improve the communities' life quality which includes education, health, and welfare aspects.

Metode dan Lingkup *Due Diligence* terhadap Dampak Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial dari Aktivitas Perusahaan

Sebelum merumuskan program-program TJSL, PLN terlebih dahulu melakukan identifikasi risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis Perusahaan, baik risiko terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dan menentukan upaya mitigasi yang tepat melalui pelaksanaan kegiatan TJSL, dengan uraian sebagai berikut:

Method and Scope of Due Diligence to Economic, Environmental, and Social Impact of the Company's Activity

Prior to formulating the TJSL programs, PLN will initially identify the main risks that can affect the achievement of the Company's strategic targets, including risks related to economic, environmental, and social aspects, and determines the appropriate mitigation measure through the implementation of TJSL programs, with the explanation as follows:

Sasaran / *Target*	Peristiwa Risiko / *Risk Event*	Upaya Mitigasi (Program TJSL) / *Mitigation Effort (TJSL Program)*
LEAN	*Over supply* ketersediaan tenaga listrik / Over supply of electricity availability	Pengembangan kawasan kuliner, kawasan wisata, pemberdayaan petani yang membutuhkan listrik, program sambung listrik gratis untuk Rumah Tangga Miskin dan Fasilitas Umum. / Development of culinary areas, tourist areas, empowerment of farmers who need electricity, free electricity connection program for poor households and public facilities.
	Pasokan gas di bawah batas minimum *requirement* / Gas supply under the minimum requirement	Pengembangan EBT di *remote area* dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) lokal kapasitas antara 30-150 KW. / NRE development in remote areas with the potential of local natural resources capacity of 30-150 KW.
	Pasokan batu bara di bawah batas minimum *requirement* / Coal supply under the minimum requirement	
GREEN	Pengembangan EBT membebani keuangan Perusahaan / NRE development burdens the Company's finance	Pengembangan EBT di *remote area* dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) lokal kapasitas antara 30-150 KW. / NRE development in remote areas with the potential of local natural resources capacity of 30-150 KW.
INNOVATIVE	Kemampuan Sistem Teknologi Informasi kurang memadai / Insufficient Information Technology System capability	Kompetisi Inovasi Kelistrikan di kalangan SMK dan Universitas terkait dengan: / Electricity Innovation competition in SMK and universities related to: 1. EBT/NRE; 2. Inovasi Teknologi Kelistrikan;/Electricity Technology Innovation; 3. Inovasi Teknologi Layanan Pelanggan./ Customer Service Technology Innovation.

Sasaran / *Target*	Peristiwa Risiko / *Risk Event*	Upaya Mitigasi (Program TJSL) / *Mitigation Effort (TJSL Program)*
CUSTOMER FOCUSED	Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di bawah target / Electricity consumption growth is under the target	Pengembangan kawasan kuliner, kawasan wisata, pemberdayaan petani yang membutuhkan listrik, program sambung listrik gratis untuk Rumah Tangga Miskin dan Fasilitas Umum. / Development of culinary areas, tourist areas, empowerment of farmers who need electricity, free electricity connection program for poor households and public facilities.
ENABLERS	Kapabilitas dan kapasitas human capital tidak selaras dengan perkembangan bisnis ketenagalistrikan / Capabilities and capacity of human capital is not in line with the development of electricity business.	Program Vokasi dan Magang Bersertifikat. / Certified Vocational and Internship Program.
	PLN kesulitan dalam menangani limbah *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) / PLN has difficulty in handling the Fly Ash Bottom Ash waste	Pengelolaan FABA menjadi material bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. / FABA management into building materisl of public facilities and social facilities.

Pemangku Kepentingan Kunci yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Operasional Perusahaan

Output dari pelaksanaan program TJSL adalah terpenuhinya harapan dan kepentingan dari pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, PLN melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kegiatan operasional atau yang tindakannya diperkirakan dapat memengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. Dari hasil identifikasi pemangku kepentingan, diperoleh 12 (dua belas) kelompok pemangku kepentingan, yaitu:

Key Stakeholders Impacted by or Affect the Impact of the Company's Operational Activities

Output of the TJSL program implementation is the fulfilment of the stakeholders' expectations and interests. Therefore, PLN identifies the parties that are impacted by the operational activities or whose actions are expected to affect the Company's business continuity. Based on the stakeholders' identification, there are 12 (twelve) groups of stakeholders, which are:

Pemangku Kepentingan PLN / Stakeholders of PLN

Secara berkala, PLN melakukan pengelolaan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan dialog dan komunikasi dengan masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya mengetahui harapan dan kepentingan pemangku kepentingan. Dari hasil dialog dan komunikasi tersebut, Perseroan dapat menindaklanjuti harapan dan

Regularly, PLN manages the stakeholders by organizing dialogues and communication with each stakeholder in order to know the stakeholders' expectations and interests. Based on the dialogue and communication, the Company can follow up the expectations and interests of each stakeholder and formulate them into PLN's business

kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan dan merumuskannya ke dalam strategi bisnis program TJSL PLN. Berikut ini merupakan uraian mengenai harapan dan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan PLN:

strategy for TJSL programs. The following is an explanation of the expectation and interest of each PLN's stakeholder:

Harapan dan Kepentingan dari Pemangku Kepentingan PLN

Expectation and Interest of PLN's Stakeholders

Pemangku Kepentingan / *Stakeholders*	Harapan dan Kepentingan / *Expectation and Interest*
Pelanggan / Customers	• Mutu sambungan listrik dan kecukupan daya yang terjaga. / Well-maintained quality of electricity connection and power sufficiency. • Bebas pemadaman bergilir dan turun daya. / No rolling blackouts and power down. • Kemudahan penambahan daya dan penyelesaian keluhan. / Easy power addition and complaint resolution. • Pelayanan yang melebihi harapan. / Services that exceed expectation.
Pemegang Saham dan Investor / Shareholders and Investors	• Menjaga dan meningkatkan nilai investasi melalui peningkatan kinerja Perseroan. / Maintain and increase the investment value through the Company's performance improvement • Terpenuhinya hak-hak pemegang obligasi. / Fulfillment of the bondholders' rights. • Keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang substansial dan kejelasan arah pengembangan usaha. / Information transparency on substantial matters and clarity of the business development direction. • Menghormati hak-hak pemegang saham sesuai Undang-Undang, Peraturan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. / Respecting the shareholders' rights in accordance with the Laws, Regulations, Articles of Association.
Pegawai / Customers	• Kejelasan hak dan kewajiban. / Clear rights and obligations. • Kejelasan atas penilaian kompetensi, jenjang karier dan keseimbangan remunerasi dengan kinerja. / Clear competence assessment, career path, and balance between the remuneration and performance. • Kesetaraan dalam jenjang karier dan remunerasi. / Equality in career path and remuneration. • Tidak ada praktik diskriminasi. / No discriminative acts. • Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. / Guaranteed occupational security, health, and safety. • Terjaganya kenyamanan lingkungan kerja. / Well-maintained work environment comfort.
Pemerintah/ Regulator / Government/ Regulators	• Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan regulator. / Harmonious and constructive relations based on honesty with the regulators. • Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan perundang-undangan. / Compliance with the laws and regulations. • PLN berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. / PLN positively contributes to the surrounding society. • Penurunan jumlah subsidi dari anggaran negara. / Decreasing subsidy amount from the state budget.
Mitra Kerja / Business Partners	• Proses pengadaan secara adil dan transparan. / Fair and transparent procurement process. • Seleksi dan evaluasi secara objektif dalam pemilihan mitra. / Objective selection and evaluation in the partner selection. • Prosedur administrasi pengadaan yang akurat namun sederhana. / Accurate yet simple administrative procedures for procurement. • Penyelesaian pembayaran produk dan jasa yang tepat waktu. / On-time settlement of goods and services payment. • Hubungan saling menguntungkan (*mutually beneficial growth*). / Mutually beneficial growth.
Masyarakat / Public	• Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis. / Amicable and harmonious relations. • Meminimalisir dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. / Minimizing the Company's operational impact to the environment. • Turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. / Participating in the environmental conservation activities. • Melaksanakan program revegetasi dan reboisasi. / Conducting revegetation and reforestation programs. • Kontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar. / Positively contributing to the economy, social, and environmental aspects of the surrounding society.
Kreditor / Creditors	• Kejelasan rencana pengembangan. / Clear development plan. • Pembayaran kredit/pinjaman dengan tepat waktu. / On-time credit/loan payment. • Transparansi kondisi operasional. / Transparency in operational conditions. • *Update* informasi mengenai kondisi operasional dan finansial terakhir. / Information update on the latest operational and financial condition.
Media Massa / Mass Media	Keterbukaan informasi Perusahaan secara akurat dan terkini. / Transparency of the Company's information in an accurate and update manner.
Legislator / Legislators	• Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan legislator. / Harmonious and constructive relations based on honesty with the regulators. • PLN beroperasi semakin efisien dan transparan. / PLN operates in a more efficient and transparent manner. • PLN berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. / PLN positively contributes to the surrounding society. • Penurunan jumlah subsidi dari anggaran negara. / Decreasing subsidy amount from the state budget.

Isu-isu Penting di Bidang Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial yang Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

PLN telah melakukan pemetaan terhadap isu-isu eksternal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional, baik dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tuntutan Penggunaan Energi Bersih dan Terbarukan (EBT);
2. Penurunan Konsumsi Listrik;
3. Pengelolaan Limbah Pembangkit Listrik;
4. Pelestarian Lingkungan di Sekitar Pembangkit Listrik;
5. Biaya Produksi Listrik Tinggi;
6. Tingginya Angka Pengangguran;
7. Resesi Ekonomi
8. Pemadaman Listrik;
9. Kendala Pembangunan Proyek;
10. Kesalahan Baca Meter.

Important Issues in Economy, Environment, Social related to the Company's Operational Activities

PLN has done mapping of external issues that have significant impact to the operational activities, including social, economic, and environmental aspects with the explanation as follows:

1. Demand to utilize New and Renewable Energy (NRE);
2. Decreasing electricity consumption;
3. Management of power plant waste;
4. Environmental conservation around the power plant;
5. High electricity production cost;
6. High number of employment;
7. Economic recession;
8. Power blackout;
9. Constraint on project development
10. Misread of meter.

LINGKUP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

LINGKUP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN

Untuk mendukung pelaksanaan program TJSL, PLN mengadopsi standar ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program TJSL. ISO 26000 memiliki 7 subjek inti yang harus diterapkan secara komprehensif di seluruh rantai nilai, yang terdiri Tata Kelola Perusahaan, Operasi yang Adil, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Praktik Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pengembangan Sosial Kemasyarakatan, dan Isu-isu Pelanggan. Ketujuh subjek inti tersebut menjadi lingkup pelaksanaan program TJSL di PLN.

SCOPE OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

SCOPE OF THE OBLIGATORY IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

In order to support the implementation of TJSL program, PLN adopts the ISO 26000 standard as a guide for such implementation. ISO 26000 has 7 core subjects that must be applied comprehensively throughout the value chain, which consist of Corporate Governance, Human Rights, Environment, Labor Practices, Consumer Issues, Fair Operating Practices, and Community Involvement & Development (CID) and Micro and Small Enterprises (UMK). The seven core subjects are the scope of implementation of TJSL program at PLN.

Tujuh Subjek Inti Program TJSL PLN

Seven Core Subjects of PLN's TJSL Program

Holistic Integrated Approach

LINGKUP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Selain mengacu pada 7 *core subject* ISO 26000, Program TJSL PLN juga mencakup 4 (empat) pilar utama yang merupakan penggolongan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu:

1. **Pilar Sosial**, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. **Pilar Lingkungan**, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. **Pilar Ekonomi**, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusi, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
4. **Pilar Hukum dan Tata Kelola**, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

SCOPE OF BEYOND OBLIGATORY IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Besides referring to the 7 core subjects of ISO 26000, PLN's TJSL Program also covers 4 (four) main pillars, which is a classification of 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are:

1. **Social Pillar,** to achieve the fulfillment of quality human rights that are fair and equal to improve the welfare for all people;
2. **Environmental Pillar,** to manage sustainable natural and environmental resources as a support for all life.
3. **Economic Pillar,** to achieve quality economic growth through the continuity of work and business opportunities, innovation, inclusion industry, sufficient infrastructure, affordable clean energy, and supported by the partnership; and
4. **Legal and Governance Pillar,** to achieve legal certainty and effective, transparent, accountable, and participative governance to establish stability of security and achieve a nation based on law.

Integrasi Program TJSL dengan SDGs

Integration of TJSL Program and SDGs

Pilar Sosial / *Social Pillar*	
Pilar Lingkungan / *Environmental Pillar*	
Pilar Ekonomi / *Economic Pillar*	
Pilar Hukum dan Tata Kelola / *Legal and Governance Pillar*	

Pengorganisasian Inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL, PLN telah membentuk *Committee Sustainability* yang bertanggung jawab sesuai dengan 7 (tujuh) lingkup program TJSL berbasis ISO 26000. Pembentukan Komite Sustainability ini didasarkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0217.K/DIR/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Organization of Corporate Social and Environmental Responsibility Initiatives

In order to increase the effectiveness of TJSL implementation, PLN has established a Sustainability Committee, which is responsible in accordance with the 7 (seven) scopes of TJSL program based on ISO 26000. The establishment of Sustainability Committee is based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0217.K/DIR/2021 dated May 27, 2021.

Bagan Organisasi Komite *Sustainability*

Organizational Diagram of Sustainability Committee

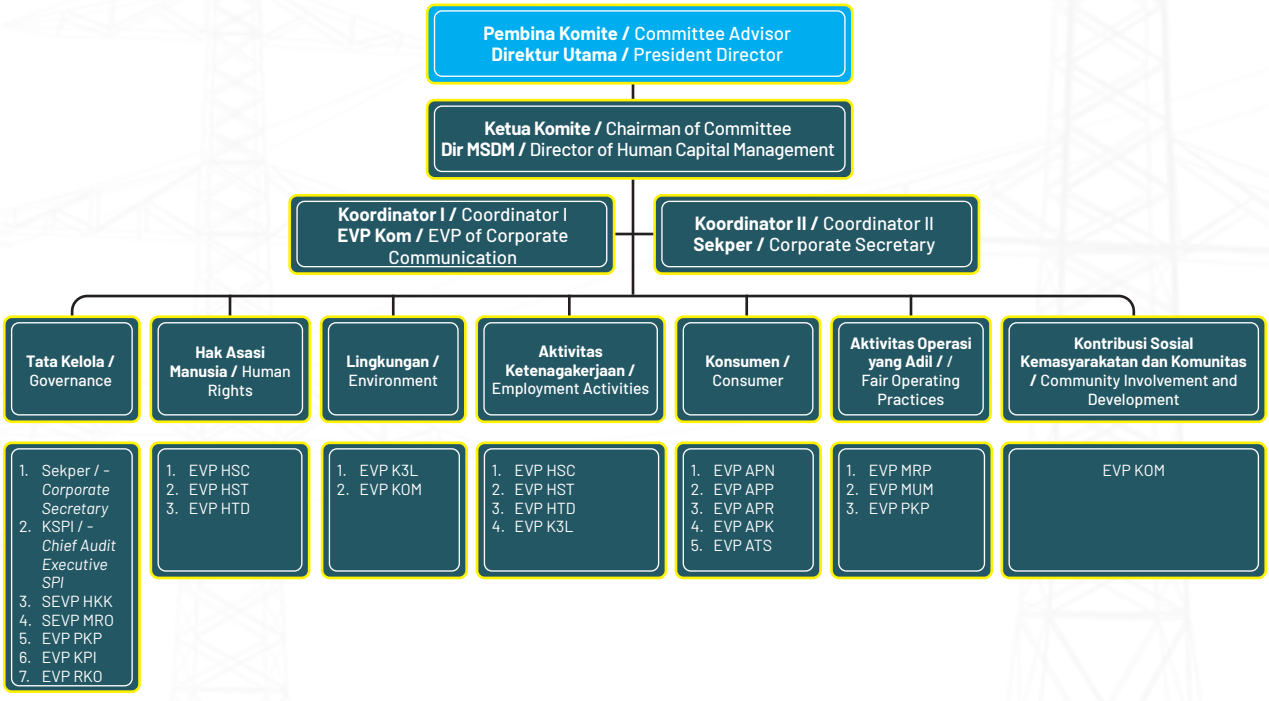

Keterangan Bagan:

1. Pembina Komite : Direktur Utama
2. Ketua Komite : Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia
3. Koordinator I : EVP Komunikasi Korporat dan CSR
4. Koordinator II : Sekretaris Perusahaan
5. Tata Kelola :
   - Sekretaris Perusahaan
   - Chief Audit Executive SPI
   - SEVP HKK
   - SEVP MRO
   - EVP PKP
   - EVP KPJ
   - EVP RKO
6. Hak Asasi Manusia :
   - EVP HSC
   - EVP HST
   - EVP HTD
7. Lingkungan :
   - EVP K3L
   - EVP KOM
8. Aktivitas Ketenagakerjaan :
   - EVP HSC
   - EVP HST
   - EVP HTD
   - EVP K3L
9. Konsumen :
   - EVP APN
   - EVP APP
   - EVP APR
   - EVP APK
   - EVP ATS
10. Aktivitas Operasi yang Adil :
    - EVP MRP
    - EVP MUM
    - EVP PKP
11. Kontribusi Sosial Kemasyarakatan dan Komunitas (CID):
    - EVP KOM

Strategi dan Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Agar pelaksanaan program TJSL PLN dapat berjalan secara efektif, Perusahaan telah menyusun strategi keberlanjutan dalam RJP PLN 2020-2024. Dari 16 *Strategic Objectives* (SO) yang tercantum dalam RJP PLN 2020-2024, terdapat 3 SO yang terkait dengan ESG, dengan uraian sebagai berikut:

Diagram Description:

1. Committee Advisor : President Director
2. Chairman of Committee : Director of Human Capital Management
3. Coordinator I : EVP of Corporate Communication and CSR
4. Coordinator II : Corporate Secretary
5. Governance :
   - Corporate Secretary
   - Chief Audit Executive SPI
   - SEVP HKK
   - SEVP MRO
   - EVP PKP
   - EVP KPJ
   - EVP RKO
6. Human Rights :
   - EVP HSC
   - EVP HST
   - EVP HTD
7. Environment :
   - EVP K3L
   - EVP KOM
8. Employment Activities :
   - EVP HSC
   - EVP HST
   - EVP HTD
   - EVP K3L
9. Consumer :
   - EVP APN
   - EVP APP
   - EVP APR
   - EVP APK
   - EVP ATS
10. Fair Operating Practices :
    - EVP MRP
    - EVP MUM
    - EVP PKP
11. Community Involvement and Development:
    - EVP KOM

Strategies and Form of Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility

In order to implement the TJSL program effectively, the Company has formulated sustainability strategies in PLN's RJP for 2020-2024. From the 16 Strategic Objectives (SO) listed in PLN's RJP for 2020-2024, there are 3 SO related to ESG, with the explanation as follows:

Strategi Keberlanjutan dalam RJP PLN 2020-2024 yang Terkait dengan ESG

Sustainability Strategies in PLN's RJP in 2020-2024 related to ESG

Strategic Objective	*Strategic Initiative*	*Program / Programs*
S05: Meningkatkan Bauran EBT / S05: Increasing NRE Mix	1.1. Mengembangkan EBT 5.0 GW / Developing 5.0 GW NRE	Mengimplementasikan dual FS/FEED dengan strategi kluster untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan EBT sehingga pelaksanaan proyek akan lebih cepat dan lebih murah. / Implementing dual FS/FEED with cluster strategies to increase the success of NRE development, so the project implementation will be faster and cheaper.
		Mengembangkan PLTA, PLTP dan PLTS skala kecil dengan review harmonisasi regulasi untuk TKDN. / Developing small-scale PLTA, PLTP, and PLTS with the review of regulation harmonization for TKDN.
	1.2. Meluncurkan "*green boosters*" / Launching "green boosters"	Implementasi *co-firing* biomassa pada semua pembangkit PLTU batu bara PLN. / Implementing co-firing biomass in all coal PLTU of PLN.
		Mengembangkan kemitraan strategis jangka panjang dengan pemasok biomassa potensial, mis. PTPN dan Perhutani, dan ekosistem pendukung biomassa. / Developing long-term strategic partnership with potential biomass suppliers, such as PTPN and Perhutani, and biomass supporting ecosystem.
		Mengganti diesel dengan pembangkit surya+storage, biomassa, atau mini hidro. / Replacing diesel with solar+storage, biomass, or mini hydro power plant.
		Membangun pembangkit surya di lokasi bekas penambangan dan waduk untuk mengurangi risiko pembebasan lahan. / Developing solar power plant in ex-mining sites and reservoir to reduce the risk of land acquisition.
		Membangun pembangkit listrik tenaga air di bendungan umum yang saat ini beroperasi dengan skema investasi bersama. / Developing hydroelectric power plant in public dams which currently are operating with joint investment scheme.
		Membangun pembangkit surya dan angin dengan pendanaan yang berasal dari *green fund* agar dapat berkompetisi dengan variabel cost pembangkit thermal. / Developing hydroelectric and wind power plant with the funding from green fund so it can compete at variable cost of thermal power plant.
	1.3. Meluncurkan EBT skala besar / Launching large-scale EBT	Mengembangkan PLTS dan PLTB skala besar sehingga lebih ekonomis./ Developing large-scale PLTS and PLTB, so it will be more economic.
		Mengembangkan skema *Renewable Energy Based on Industry* (REBID) berbasis pembangkit hidro yang terhubung ke kawasan industri untuk meningkatkan penggunaan EBT oleh konsumen dengan dukungan Pemerintah. / Developing the scheme of Renewable Energy Based on Industry (REBID) with hydroelectric power plant to increase the use of NRE by consumers with Government support.
S04: Meningkatkan kontribusi pada pembangunan Nasional / S04: Increasing the contribution in national development	1.4. Peningkatan elektrifikasi di luar Jawa-Bali / Increasing the electrification outside Java-Bali	Melaksanakan program listrik desa baik melalui program *on grid, mini grid* ataupun *off grid* dengan memanfaatkan tabung listrik dan *solar home system*. / Implementing rural electrification program through on grid, mini grid, or off grid programs by utilizing electric tune amd solar home system.
	1.5. Program pengembangan pemasok lokal (TKDN) / Development program of local supplires (TKDN)	Mengupayakan skema pembiayaan melalui PMN untuk elektrifikasi pedesaan. / Striving for the funding scheme through PMN for rural electrification.
		Mengupayakan adanya *development organization* (mis. Pemerintah/K/L) yang akan menyediakan pengembangan kapabilitas pemasok PLN. / Striving for organizational development (such as Government/K/L) that will provide the capability development of PLN's suppliers.
S012: Meningkatkan kesiapan dan efisiensi operasional / S012: Improving the operational readiness and efficiency	4.1. Digitalisasi pembangkit / Power Plant digitalization	Pemasangan sensor untuk otomasi peralatan serta melakukan advanced analytics secara real-time untuk peningkatan efisiensi. / Installation of sensors for equipment automation and perform real-time advanced analytics to improve efficiency.
		Memperpanjang waktu interval *overhaul*. / Extend the overhaul interval time.
		Meningkatkan *predictive* dan *proactive maintenance*. / Increase the predictive and proactive maintenance.
		Prognostic health management dengan *big data* dan *experts system* serta melakukan evaluasi dengan menggunakan *Gate Cycle*. / Prognostic health management with big data and expert system, as well as evaluation using Gate Cycle.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG OPERASI YANG ADIL

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan terkait Pelaksanaan Operasi yang Adil

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PLN berkomitmen untuk senantiasa menjalankan praktik operasi yang adil. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan praktik bisnis yang bersih, sehat, dan terhindar dari segala bentuk kecurangan serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara PLN dengan para pemangku kepentingan, khususnya pihak-pihak yang termasuk dalam rantai bisnis Perusahaan.

Terkait pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan di bidang operasi yang adil, Manajemen PLN berkomitmen:

1. Menjalankan usaha dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada Pedoman GCG, *Board Manual*, dan prinsip **4NO's** (*No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*);
2. Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku, dan etika bisnis Perusahaan;
3. Menjalankan prinsip ***zero tolerance*** terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
4. Tidak memperkenankan Insan PLN dan *stakeholder* Perusahaan untuk melanggar kode etik Perusahaan dan prinsip 4NO's yang berkaitan dengan tugasnya di PT PLN (Persero);
5. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko *fraud*.
6. Mengajak Insan PLN dan *stakeholder* untuk selalu menerapkan prinsip 4NO's dan pembangunan bisnis yang berintegritas di PT PLN (Persero);
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Komitmen Manajemen Anti Penyuapan dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.

Untuk mendukung pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan terkait Operasi yang Adil, Perusahaan telah memiliki beberapa kebijakan antara lain:

1. Peraturan Direksi (Perdir) No. 0112.P/DIR/2019 tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dan Panduan Pelaksanaan *Do* and *Don't*.

CORPORATE RESPONSIBILITIES IN FAIR OPERATING PRACTICES

The Company's Commitment and Policy Related to Fair Operating Practices

As a manifestation of the good corporate governance, PLN is committed to continuously conduct fair operating practices. This aims to develop business practices that are clean, healthy, and free from any forms of fraud, as well as to encourage harmonious relations between PLN and the stakeholders, particularly parties that are included in the Company's business chain.

Related to the implementation of the corporate responsibilities in fair operating practices, PLN's Management is committed to:

1. Conduct business by upholding the integrity values and adhering to the GCG Guidelines, Board Manual, and **4NO's** principles (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality);
2. Always attempt to increase and improve every business process so it is in line with the Company's GCG principles, code of conduct, and business ethics;
3. Apply the **zero tolerance** principle to any acts related to the violation of laws and regulations;
4. Not allow PLN's personnel and stakeholders to violate the Company's code of conduct and 4NO's principles that are related to their duties at PT PLN (Persero);
5. Avoid any conflict of interest and manage every conflict of interest that incur fraud risk.
6. Persuade PLN's personnel and stakeholders to always implement the 4NO's principle and develop a business with integrity at PT PLN (Persero);
7. Supervise the implementation of the Commitment on Anti-Bribery Management and every violation will be subject to a penalty based on the prevailing Company's provisions and laws and regulations;
8. Be willing to comply and fulfill earnestly the Commitment on Anti-Bribery Management.

In order to support the implementation of the Corporate Responsibility related to Fair Operating Practices, the Company has several policies, among others:

1. Regulation of the Board of Directors (Perdir) No. 0112.P/DIR/2019 on Code of Conduct and Business Ethics and Guidelines for the Implementation of Do's and Don'ts.

2. Perdir No. 0074/DIR/2017 tentang LHKPN.
3. Perdir No. 0076/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN.
4. Perdir No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero).
5. Perdir No. 0122.P/DIR/2019 mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero).
6. Perdir No. 0196.P/DIR/2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero).
7. Perdir No. 022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).
8. Perdir No. 0048.P/DIR/2020 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero).
9. Edaran Direksi (EDIR) No. 0011.E/DIR/2020 tentang Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
10. EDIR No. 0012.E/DIR/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
11. EDIR No. 0013.E/DIR/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Integrity Due Diligence* di Lingkungan PT PLN (Persero).

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Operasi yang Adil

Lingkup pengelolaan operasi perusahaan yang adil di PLN tercermin dalam upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pencegahan korupsi (*anti-corruption*).
2. Menghindari perilaku pelanggaran hukum terutama dengan menggunakan pengaruh politik (*responsible political involvement*). PLN mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan setiap aktivitas usaha sehingga terhindar dari perilaku pelanggaran hukum.
3. Berkompetisi secara jujur dan adil (*fair competition*). PLN berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. PLN menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai budaya dan menjalankan etika bisnis untuk menjaga iklim bisnis yang kondusif.
4. Proses pengadaan barang dan jasa yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
5. Menghormati hak-hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya (*respect for property rights*).

2. Perdir No. 0074/DIR/2017 on LHKPN.
3. Perdir No. 0076/DIR/2017 on Guidelines for Gratuity Control at PLN.
4. Perdir No. 0121.P/DIR/2019 on Anti-Fraud Policy within PT PLN (Persero).
5. Perdir No. 0122.P/DIR/2019 on Management of Conflict of Interest within PT PLN (Persero).
6. Perdir No. 0196.P/DIR/2019 on Implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) within PT PLN (Persero).
7. Perdir No. 022.P/DIR/2020 on Guidelines for Procurement of Goods/Services at PT PLN (Persero).
8. Perdir No. 0048.P/DIR/2020 on Anti-Bribery Governance within PT PLN (Persero).
9. Circular of Board of Directors (EDIR) No. 0011.E/DIR/2020 on Anti-Bribery Compliance Functions (FKAP).
10. EDIR No. 0012.E/DIR/2020 on Guidelines for Anti-Bribery Management System (SMAP).
11. EDIR No. 0013.E/DIR/2020 on Guidelines for the Implementation of Integrity Due Diligence within PT PLN (Persero).

Scope of Implementation of Corporate Responsibility Activities in Fair Operating Practices

Scope of the company's fair operating management at PLN is reflected in the following efforts:

1. Anti-corruption.
2. Avoiding unlawful behavior, especially with responsible political involvement. PLN complies with the laws and regulations in carrying out every business activity so as to avoid unlawful behavior.
3. Fair competition. PLN is committed to create clean business practices and to avoid all forms of fraud. PLN makes healthy business competition a culture and applies business ethics to maintain a conducive business climate.
4. Procurement of goods and services process that prioritizes fairness and transparency principles.
5. Respecting intellectual property rights, such as patents, copyrights, and others.

Perumusan Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Operasi yang Adil

Dengan penerapan GRC di seluruh PLN Group, maka setiap kebijakan harus melalui analisis kajian kepatuhan, kajian aspek hukum dan manajemen risiko. Di dalam melakukan kajian analisis kepatuhan, PLN menggunakan 3 (tiga) pendekatan untuk mengenali potensi pelanggaran di lingkungan Perusahaan, yaitu:

1. Menggunakan perangkat *Corruption Impact Analysis* (CIA) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguji apakah sebuah aturan atau kebijakan yang akan dikeluarkan manajemen memiliki potensi dampak korupsi.
2. Melakukan *Fraud Risk Analysis* (FRA) untuk menganalisa potensi terjadinya *fraud* dalam sebuah proses bisnis atau proses pengambilan keputusan dan membuat rekomendasi mitigasi kepatuhan.
3. Menguji adanya konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pemetaan mengenai individu atau pihak-pihak yang akan diuntungkan dari keputusan tersebut.

Formulation of Activities for the Corporate Responsibility in Fair Operating Practices

With GRC implementation throughout PLN Group, each policy must go through an analysis of compliance review, legal review, and risk management. In conducting compliance analysis review, PLN uses 3 (three) approaches to identify potential violations within the Company, as follows:

1. Using "Corruption Impact Analysis" (CIA) tool provided by the Corruption Eradication Commission (KPK) to verify whether a rule or policy to be issued by the management has potential corruption impact.
2. Conducting Fraud Risk Assessment (FRA) to analyze potential for fraud in business process or decision making and to prepare compliance mitigation recommendations.
3. Testing conflict of interest in decision making by mapping individuals or parties who will benefit from the decision.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Operasi yang Adil

Pada tahun 2021, Manajemen telah menyusun rencana kegiatan terkait operasi yang adil, antara lain:

1. Penguatan Sistem *Compliance* dengan tersedia regulasi/kebijakan baru;
2. Pelaporan LHKPN;
3. Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh unit induk dan divisi/satuan di kantor Pusat;
4. Pengelolaan WBS.

Plans for the Implementation of Corporate Responsibility Activities in Fair Operating Practices

In 2021, the Management has arranged activity plan related to fair operating practices, among others:

1. Strengthening Compliance System by providing new regulations/policies;
2. LHKPN reporting;
3. Certification of SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (SMAP) to all main units and divisions/units in the headquarter;
4. WBS management.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG OPERASI YANG ADIL

Pencegahan Korupsi (*Anti-corruption*)

Salah satu upaya PLN untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, suap, gratifikasi, dan praktik *fraud* lainnya dalam proses pelaksanaan aktivitas operasional tercermin dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016 yang telah diuraikan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Untuk mendukung pelaksanaan SMAP, Insan PLN bersama *stakeholder* mengedepankan penerapan prinsip **4NO's**, yaitu:

IMPLEMENTATION OF CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN FAIR OPERATING PRACTICES

Anti-corruption

One of PLN's efforts to prevent corruption, bribery, gratuity, and other fraud practices, in conducting operational activities is reflected in the implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) based on ISO 37001:2016 standard, which has been explained in the Corporate Governance chapter in this Report.

In order to support the SMAP implementation, PLN's personnel along with the stakeholders prioritize the implementation of **4NO's** principles, which are:

1. ***No*** *Bribery* (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan).
2. ***No*** *Kickback* (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
3. ***No*** *Gift* (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
4. ***No*** *Luxurious Hospitality* (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Adapun realisasi kegiatan yang dilakukan Perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya praktik korupsi dan benturan kepentingan selama tahun 2021 antara lain:

1. Pemantauan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar 100% dari 8.672 Wajib Lapor. PLN meraih penghargaan "Pengelolaan LHKPN Terbaik untuk Kategori > 1000 wajib lapor (WL)" dari KPK;
2. Mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Seluruh Divisi/Satuan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (70 Divisi/Satuan), 48 Unit Induk dan 11 Anak perusahaan;
3. Untuk memperkuat sistem pencegahan tindak korupsi dan penyuapan di PLN yang dapat berisiko pada reputasi Perusahaan serta kualitas dan keandalan produk tenaga listrik bagi pelanggan, sejak tahun 2019 PLN melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dimulai dari kegiatan gap analysis, *capacity buliding* (pelatihan, *workshop*), sosialisasi, penyusunan dan pengembangan kebijakan, prosedur dan manual sistem manajemen anti penyuapan hingga proses pengujian efektivitas sistem.

Keterlibatan Politik yang Bertanggung Jawab

Seluruh Pegawai, selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, memengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. PLN senantiasa menghargai hak setiap pegawai untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Perusahaan memberi batasan keterlibatan kepada segenap Pegawai dalam aktivitas politik dan sosial, yakni:

1. **No** Bribery (avoid/reject any bribery and extortion).
2. **No** Kickback (avoid/reject commission, gratuity, either in cash or any other forms).
3. **No** Gift (avoid/reject gift or gratification that violates the prevailing rules and regulations).
4. **No** Luxurious Hospitality (avoid/reject unnecessary welcoming and entertainment).

The realization of activities performed by the Company in order to prevent corruption and conflict of interest during 2021 was among others:

1. Monitoring the submission of State Administrators Asset Reports (LHKPN) of 100% from 8,672 PLN's officials who are categorized as required to report. PLN received the award of "The Best LHKPN Management for Category of 1,000 Officials Required to Submit LHKPN (WL)" from KPK;
2. Obtaining the Certificate of SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System for All Divisions/Units at the headquarter of PT PLN (Persero) (70 Divisions/ Units), 48 Main Units, and 11 subsidiaries;
3. In order to strengthen the system preventing corruption and bribery at PLN which can risk the Company's reputation as well as the quality and reliability of electricity power product for customers, since 2019 PLN has made various preparations to take part in ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification, starting from activities gap analysis, capacity building (training, workshops), dissemination, preparation and development of policies, procedures and manuals for anti-bribery management systems to process of system effectiveness test.

Responsible Political Involvement

All employees, as a citizen, has the basic rights to associate and assemble, organize, and convey their political and social aspirations. The Company does not force, influence, or direct the individual participations in make political contribution. PLN constantly respects the rights of every employee to use their political rights in accordance with the prevailing laws and regulations. However, the Company limits the involvement of all employees in the political and social activities, which are:

1. Wajib menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, bertindak dan bersikap profesional serta netral;
2. Pegawai dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik;
3. Tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik;
4. Dilarang menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perseroan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu;
5. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kerja Perseroan;
6. Pegawai yang ingin aktif menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik, dan/atau anggota dewan legislatif harus mengundurkan diri sebagai Pegawai.

1. The employees are required to conduct the duties based on the responsibilities, to act, and to behave professionally and neutral;
2. The employees are prohibited to become a member or to involve directly in a political party;
3. The employees are not allowed to serve as a political party official;
4. The employees are prohibited to use their position, assets, and the Company's facilities to support certain political activities and interest;
5. The employees are prohibited to wear the attributed of a party or social organization within the Company's work environment;
6. The employees who want to be a member and/or official of a political party, and/or legislative council member must resign as an employee.

Fair Competition

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, PLN harus dapat menghindari konflik kepentingan atau hal-hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan PLN. Konflik kepentingan adalah situasi di mana Insan PLN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Fair Competition

To encourage healthy business competition, PLN must be able to avoid any conflict of interest or any matters that are potentially lead to conflict of interest that may cause harm to PLN's interest. Conflict of interest is a situation where PLN personnel have or are suspected to have a personal interest to any use of authorization, so it can affect the quality of his/her decision and/or action.

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, Insan PLN harus melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melaporkan Dokumen Pemilik Manfaat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menghindari perangkapan jabatan;
3. Menolak dan menghindari pemberian hadiah/gratifikasi yang terkait jabatan;
4. Menghindari melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan saat ini yang dapat mengganggu pekerjaan saat ini;
5. Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
6. Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang dapat dipersepsikan Konflik Kepentingan oleh publik;
7. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas;

In order to avoid the conflict of interest, PLN personnel must do some efforts, including:

1. Submitting the Document on Beneficiaries based on the prevailing regulations;
2. Avoiding concurrent positions;
3. Rejecting and avoiding any gifts/gratuity related to the position;
4. Avoiding to carry out another job outside the current job that may disrupt the current job;
5. Limiting or avoiding asset ownership in other companies related to the performance of duties;
6. Avoiding and limiting to directly interact with parties that are prohibited by the prevailing laws and regulations or may be assumed to have conflict of interest by the public;
7. Limiting and lessening any personal interest that may affect the implementation of duties;

8. Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di PLN untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan konflik kepentingan dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi; dan
9. Insan PLN yang telah purnakarya, mengundurkan diri, atau diberhentikan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan/manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan pada perusahaan pesaing, mitra atau calon mitra dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terbitnya keputusan purnakarya, pengunduran diri, atau pemberhentian tersebut.

8. Encouraging improvement of management system of conflict interest at PLN to close any gaps for violation of rules/policies on conflict of interest and to facilitate the management if occur; and
9. PLN's personnel who have been retired, resigned, or terminated are not allowed to be involved in managing/ authorized management of decision making in competitors, partner, or candidate of partners in the period of 6 (six) months after the issuance of decision on the retirement, resignation, or termination.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Adil dan Transparan

PLN menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi melalui sarana *e-Procurement*. Proses pengadaan telah diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang memuat uraian mengenai ketentuan umum, perencanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/ jasa lainnya, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi, pengadaan khusus, perjanjian/kontrak, pengadaan barang/jasa melalui media elektronik PLN (*e-Procurement* PLN), serta Pengendalian dan Pengawasan. Uraian lebih lengkap mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa Perusahaan telah diuraikan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Procurement Process of Goods Services that are Fair and Transparent

PLN organizes the procurement process of goods and services, which prioritizes the fairness and transparency principle through e-Procurement facilities. The procurement process has been regulated in the Guidelines for Procurement of Goods/Services of PT PLN (Persero), which include the description on general provisions, planning of procurement of goods/construction services/ other services, implementation of procurement of goods/ construction services/other services, planning and implementation of consulting service provision, special procurement, agreement/ contract, procurement of goods/ services of PLN's electronic media (PLN e-Procurement), as well as Control and Monitoring. More complete description on the Company's policies of goods and services has been explained in the Corporate Governance chapter in this Report.

Menghormati Hak Kekayaan Intelektual

PLN menyadari bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu aset penting yang perlu dijaga bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan cara melindungi kekayaan intelektual Perusahaan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada. Dalam upaya menghormati HAKI, selama tahun 2021 PLN menyelenggarakan PLN *Innovation and Competition in Electricity* (ICE) 2021 dengan tajuk "*Electrifying Lifestyle*", dengan kegiatan kompetisi desain inovasi kendaraan listrik, desain peralatan kelistrikan serta ide program bisnis teknologi tepat guna.

Respecting Intellectual Property Rights

PLN realizes that intellectual property is one of the important assets that need to be maintained for the Company's business continuity. Intellectual Property Right (HAKI) is a way to protect the Company's intellectual property by using the existing legal instruments. In an effort to respect Intellectual Properties, during 2021 PLN will organize PLN Innovation and Competition in Electricity (ICE) 2021 with the title "Electrifying Lifestyle", with competition activities electric vehicle innovation design, electrical equipment design as well as the idea of an appropriate technology business program.

Sejak tahun 2011 dengan terbitnya SK DIR no. 002.K/DIR/2011 tentang Pengelolaan-Pemanfaatan-Pengembangan dan Perlindungan Karya Inovasi, PLN menunjukkan komitmen untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap karya inovasi yang dibuat oleh pegawai PLN dan juga mewadahi *knowledge sharing* antar pegawai, sehingga diharapkan pegawai termotivasi untuk terus berkarya dan dapat lebih merasa ikut berperan, bertanggungjawab dan rasa memiliki dalam menjalankan bisnis perusahaan serta pengembangan potensi diri.

Mekanisme Pengaduan Masalah terkait Operasi yang Adil

PLN memberi kesempatan bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran di bidang Operasi yang Adil yang terjadi di lingkungan Perusahaan melalui:

1. Pelaporan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
   Pelaporan ke UPG terdiri atas:
   a. Penerimaan, penolakan, dan pemberian honor, hadiah, jamuan, donasi, pembayaran fasilitas, atau keuntungan serupa lainnya dalam bentuk apa pun, baik secara langsung atau tidak langsung;
   b. Potensi terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan.

   Adapun dokumen pendukung yang dilaporkan sekurang-kurangnya mencakup:
   a. Informasi nilai pembayaran/penerimaan;
   b. Siapa penerima/pemberi pembayaran;
   c. Justifikasi kebutuhan atas pembayaran yang dilakukan.

   Laporan penerimaan/penolakan gratifikasi paling lambat dilaporkan 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan/penolakan. Sarana pengaduan ke UPG dapat disampaikan melalui aplikasi *Compliance Online System* (COS).

2. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* (WBS)
   Pelaporan melalui WBS dilakukan terkait pelaporan/pengaduan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, peraturan Perusahaan, atau perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan. Pelaporan melalui WBS dapat disampaikan melalui telepon/SMS/*Whatsapp* ke nomor 08119861901,

Since 2011 with the issuance of SK DIR no. 002.K/DIR/2011 on Management Use-Development and Protection of Innovation Works, PLN shows commitment to give recognition and appreciation to innovation works made by PLN employees and also accommodate knowledge sharing between employees, so that employees are expected to be motivated to continue working and can feel more involved, responsible and a sense of ownership in running the company's business as well as self potential development.

Mechanism of Complaints Related to Fair Operating Practices

PLN provides opportunities for the stakeholders, both internal and external, to report any forms of violation in Fair Operating Practices in the Company through:

1. Reporting to Gratuity Control Unit (UPG)
   Reporting to UPG consists of:
   a. Receipt, rejection, and grant of honorarium, gift, entertainment, donation, payment of facilities, or other similar advantages in any form, both directly and indirectly;
   b. Potential conflict of interest that may cause harm to the Company.

   The supporting documents reported must at least include:
   a. Information on the amount of payment/receipt;
   b. The person receives/accepts payment;
   c. Justification of needs for the payment needed.

   Report on receipt/rejection of gratuity must be reported not later than 30 days since the date of receipt/rejection. The complaint to UPG can be submitted via email upg.pln@pln.co.id or the Compliance Online System (COS) application.

2. Reporting via Whistleblowing System (WBS)
   Reporting via WBS is related to report of/complaint on any violation of or acts that were against the law, the Company's regulations, or any act that may cause harm to the Company and the stakeholders. The reporting through WBS can be submitted via phone/SMS/WhatsApp to 08119861901, e-mail wbpln@pln.co.id,

alamat *e-mail* wbpln@pln.co.id, atau Surat kepada Direktur Utama ditujukan ke alamat PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia.

Bila pelapor internal tidak menginginkan identitasnya diketahui, disarankan untuk menggunakan email non korporat agar tidak terlacak oleh pengelola sistem informasi perusahaan. Demikian pula untuk pelapor eksternal. Komunikasi lebih lanjut atas laporan yang disampaikan akan dilakukan melalui *channel* di atas ke nomor atau email pengirim laporan.

or letter to the President Director at the Headquarter of PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia.

If the internal reporting party would like to remain unknown, it is advised to use a non-corporate email so it is no traceable by the Company's information system manager. The same arrangement also applies to an external reporting party. Further communication on the report will be done through the above channel to the number or email of the report sender.

Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Operasi yang Adil

1. Mendapatkan Penghargaan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Seluruh Divisi/Satuan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (70 Divisi/Satuan), 48 Unit Induk dan 11 Anak perusahaan;
2. Evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan hasil:
   a. Hasil evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi UPG PLN yang dilakukan oleh KPK sebesar 84,10%;
   b. Konfirmasi Kejadian Gratifikasi dan COI rata-rata sampai dengan Desember 2021 sebesar 97,84%;
   c. Hasil survei *Awareness* Kepatuhan rata-rata tahun 2021 untuk seluruh Unit dan Divisi 99%.
3. Di tahun 2021, dua karya inovatif PT PLN (Persero) yakni PMCB (*Pole Mounted Circuit Breaker*) meraih penghargaan di Kaohsiung Invention & Design Expo (KIDE) di Taiwan, dan Avator (*Automatic Vibration Monitor Calibrator*) meraih penghargaan di Invention, *Innovation & Technology Exhibition* (ITEX) di Malaysia.

Achievement of Corporate Responsibilities in Fair Operating Practices

1. Obtaining the Award for Certificate of SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System for All Divisions/Units at the headquarter of PT PLN (Persero) (70 Divisions/Units), 48 Main Units, and 11 subsidiaries;
2. Evaluation of Gratuity Control Unit (UPG) with the result as follows:
   a. Evaluation of the implementation of PLN UPG gratuity control carried out by KPK obtained a score of 84.10;
   b. Confirmation of Gratuity Events and COI on average until December 2021 was 97.84%;
   c. Compliance Awareness survey in 2021 resulted an average score of 99% for all Units and Divisions.
3. In 2021, two innovative works of PT PLN (Persero) namely PMCB (Pole Mounted Circuit Breaker) achieved award at Kaohsiung Invention & Design Expo (KIDE) in Taiwan, and Avator (Automatic Vibration Monitor Calibrator) won awards at Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) in Malaysia.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan terkait Penegakan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

CORPORATE RESPONSIBILITIES IN HUMAN RIGHTS

The Company's Commitment and Policy Related to Enforcement of Human Rights

Based on Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 1999 on Human Rights, Human Rights are a set of rights bestowed by the Almighty God in the essence and existence of humans as creations of the Almighty God and which must be respected, upheld in the highest esteem and protected by the State, law, Government, and every person for respectability as well as protection of human dignity and worth.

Berangkat dari definisi tersebut, PLN menyadari pentingnya menjunjung tinggi dan menghormati HAM dalam menjalankan pengelolaan bisnis dan SDM di Perusahaan. Perlindungan HAM juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional Perusahaan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Komitmen PLN dalam menegakkan HAM pada pelaksanaan aktivitas operasional tidak semata ditujukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan dalam menghormati dan melindungi harkat dan martabat dari sesama manusia. Untuk mendukung komitmen penegakan HAM, PLN telah menetapkan beberapa kebijakan, di antaranya:

1. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT PLN (Persero);
2. Perdir No. 1003.K/DIR/2011 tentang Cuti dan Izin Tidak Masuk Kerja;
3. Perdir No. 0015.P/DIR/2020 tentang Perlindungan, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan PT PLN (Persero);
4. Keputusan Direksi No. 0191.K/DIR/2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Srikandi PT PLN (Persero).

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap HAM di lingkungan PLN mencakup pemenuhan hak-hak karyawan, penerapan prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi, penghapusan tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa, serta penghormatan hak pemangku kepentingan, termasuk privasi pelanggan.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Hak Asasi Manusia

Sebagai upaya menurunkan potensi terjadinya pelanggaran HAM selama proses pelaksanaan aktivitas operasional, PLN telah merumuskan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab Perusahaan di bidang HAM dengan:

1. Bertanggung jawab atas semua risiko yang mungkin terjadi akibat situasi kerja di Perusahaan yang berisiko melanggar HAM.
2. Menyelesaikan keluhan pemangku kepentingan terkait HAM (*resolving grievances*).

Based on the definition, PLN realizes the importance of upholding and respecting human rights in managing business and human resources in the Company. The protection of human rights is also an inseparable part from the Company's daily operational activities and the interaction with both internal and external stakeholders.

PLN's commitment on enforcing the human rights in the operational activities is not only intended as a compliance to the laws and regulations, but also as the Company's responsibilities in respecting and protecting human honor and dignity. In order to support the human rights enforcement, PLN has stipulated several policies, including:

1. Code of conduct and business ethics of PT PLN (Persero);
2. Board of Directors Regulation No. 1003.K/DIR/2011 on Leaves and Absence;
3. Board of Directors Regulation No. 0015.P/DIR/2020 on Protection, Prevention, and Handling of Sexual Harassment in PT PLN (Persero);
4. Decision of the Board of Directors No. 0191.K/DIR/2021 regarding Formation of PT PLN's Heroine Task Force Team (Persero).

Scope of Implementation of Corporate Responsibility Activities in Human Rights

The implementation of Corporate Responsibility Activities in Human Rights in PLN include the fulfilment of employees' rights, implementation of equality and anti-discrimination principles, elimination of child labor and forced labor, as well as respecting stakeholders' rights, including customers' privacy.

Plans for the Implementation of Corporate Responsibility Activities in Human Rights

As an effort to reduce the potential of human rights violation during the operational activities, PLN has formulated the implementation of corporate responsibility activities in human rights by:

1. Being responsible for all risks that may incur due to the working situation violating human rights at the Company.
2. Resolving the stakeholders' grievances related to human rights.

3. Mengantisipasi hal-hal yang bersifat diskriminatif dan penanganan kelompok-kelompok rentan (*discrimination and vulnerable groups*).
4. Menghormati hak-hak sipil dan politik yang dimiliki masing-masing individu (*civil and political rights*).
5. Menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (*economic, social and cultural rights*).
6. Menghormati hak dasar pegawai ketika berada di tempat kerja (*fundamental rights at work*).

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Penjaminan Kebebasan Berserikat

PLN menghormati hak-hak pegawai untuk berserikat dan berkumpul di dalam wadah serikat pekerja. Hingga akhir tahun 2021, terdapat 4 (empat) serikat pekerja di PLN yaitu:

1. Serikat Pekerja (SP) PLN yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Sudinakertrans Jakarta Selatan Nomor: 22/V/ IV/2001 tanggal 6 April 2001 dengan jumlah anggota 20.214 orang.
2. Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Sudinakertrans Kota Palembang Nomor: 285/Disnaker/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan jumlah anggota 1.280 orang.
3. Serikat LASKAR PLN yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Sudinakertrans Jakarta Selatan Nomor: 762/ SP/JS/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan jumlah anggota 4.401 orang.
4. Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Suku Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Nomor: 330/Disnaker/2019 tanggal 9 Januari 2019 dengan jumlah anggota 426 orang.

Sifat keanggotaan pegawai dalam serikat pekerja adalah sukarela. Sampai akhir tahun 2021, jumlah pegawai PLN yang tergabung di dalam serikat pekerja sebanyak 26.321 orang atau 60,84% dari seluruh pegawai PLN.

Pemberian Hak Cuti dan Izin Tidak Masuk Kerja

Pemberian cuti dan izin tidak masuk kerja kepada pegawai bertujuan agar pegawai dapat memiliki waktu khusus untuk keluarga atau untuk beristirahat sehingga diharapkan dapat memulihkan kesegaran fisik dan mental yang dapat berdampak pada peningkatan kinerja.

3. Anticipating discrimination and handling vulnerable groups.
4. Respecting civil and political rights of each individual.
5. Respecting public economic, social, and cultural rights.
6. Respecting the employees' fundamental rights at work.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN HUMAN RIGHTS

Guarantee of Freedom of Association

PLN respects the rights of employees to associate and assemble in a labor union organization. At the end of 2021, there were 4 (four) labor unions at PLN, which were:

1. Serikat Pekerja (SP)-PLN which was registered with South Jakarta Sudinakertrans Registration No. 22/V/ IV/2001 dated April 6, 2001 with 20,214 members.
2. Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara which was registered with Palembang Sudinakertrans Registration No. 285/Disnaker/2015 dated August 13, 2015 with 1,280 members.
3. LASKAR PLN which was registered with South Jakarta Sudinakertrans Registration No. 762/SP/JS/II/2016, dated February 9, 2016 with 4,401 members.
4. Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia which was registered with Palembang Sudinakertrans Registration No. 330/Disnaker/2019, dated January 9, 2019 with 426 members.

Membership in these unions is voluntary. At the end of 2021, there were 26,321 PLN's employees who were members of these labor unions or 60.84% of the total PLN's employees.

Granting of Leaves and Absence

Granting of leaves and absence to employees is intended for employees to have special time with their family or to take a rest, so they can recover their physical and mental health that can have an impact on performance improvement.

Hak-hak cuti yang diberikan kepada pegawai PLN meliputi:

1. Hak Cuti Tahunan yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja selama 1 tahun terus-menerus.
2. Hak Cuti Besar yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut. Cuti besar disertai dengan tunjangan cuti sebesar 4 kali penghasilan tetap dengan lama cuti besar adalah 3 bulan.
3. Hak Cuti Haid dan Gugur Kandungan, di mana pegawai wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid dan pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan istirahat paling lama 1,5 bulan dengan menerima penghasilan penuh.
4. Hak Cuti Bersalin bagi pegawai wanita diberikan selama tiga bulan dengan menerima penghasilan penuh.

Selain hak cuti, Perusahaan juga memberikan izin untuk tidak bekerja dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

1. Izin haid dan gugur kandungan di mana pegawai wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid dan pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan istirahat paling lama 1,5 bulan dengan menerima penghasilan penuh.
2. Izin karena alasan penting berupa:
   - Pegawai yang bersangkutan melangsungkan pernikahan;
   - Anak pegawai melangsungkan pernikahan;
   - Istri pegawai melahirkan;
   - Anak pegawai dikhitan;
   - Anak pegawai dibaptis;
   - Saudara kandung pegawai menikah atau meninggal dunia;
   - Orang tua, mertua, dan menantu pegawai meninggal dunia;
   - Istri, suami, dan anak pegawai meninggal dunia;
   - Melaksanakan ibadah haji yang pertama kali.

Pemenuhan Hak Pekerja atas Fasilitas Sosial Khusus seperti Hak untuk Pekerja Difabel, Ibu Menyusui, dan Lainnya

Perusahaan menghormati hak-hak dasar kaum perempuan sebagaimana diatur di dalam UU 13/2003. Setiap pegawai perempuan mendapat hak cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti gugur kandungan. Perusahaan juga memberikan

PLN's employees' rights for leave include:

1. The right for annual leave, which is granted for employees with 1 years of continuous service.
2. The right for sabbatical leave, which is granted for employees with 6 years of continuous service. The sabbatical leave is granted along with leave allowances of 4 times monthly payment and the period of sabbatical leave is 3 months.
3. The right for menstrual and miscarriage leave, where female employees are not required to work on the first and second of menstrual period and female employees who experience miscarriage are entitled to have a maximum of 1.5 months of rest will full payment.
4. The right for maternity leave, with a period of 3 month and full payment.

In addition to the rights for leave, the Company also granted a permission for not working in a certain period of time after fulfilling specific requirements, among others:

1. Menstruation and miscarriage absence, where female employees are not required to work on the first and second days of menstruation period and female employees who experience miscarriage are entitled to have a maximum of 1.5 months of rest will full payment.
2. Absence due to urgent matters as follows:
   - Wedding of the respective employee;
   - Wedding of the employee's child;
   - The employee's child birth;
   - Circumcision of the employee's child;
   - Baptism of the employee's child;
   - Wedding or death of the employee's sibling;
   - Death of the employees' parents, parent in-laws, or son/daughter-in-law;
   - Death of the employee's spouse or child;
   - Performing Hajj for the first time.

Fulfillment of Employee Rights for Special Social Facilities, such as the Rights for Disabled Workers, Lactating Mothers, and Others

The Company recognizes the basic rights of women as regulated in Law 13/2003. Every female employee has the right for menstrual leave, maternity leave, and miscarriage leave. The Company provides accommodations for lactating

kesempatan bagi ibu menyusui untuk menyusui bayinya dengan menyediakan ruang menyusui di kantor. Lebih dari itu, di Kantor Pusat PLN dan beberapa unit tertentu telah tersedia ruang bermain anak (*day care*) yang dilengkapi petugas pengasuhnya, sehingga para ibu dapat fokus bekerja tanpa harus meninggalkan anaknya di rumah.

mothers at work. Furthermore, PLN Head Office and a number of units are equipped with day care units and caregivers, so that mothers can focus on working without leaving their children at home.

Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pegawai PLN baik laki-laki ataupun perempuan dalam bekerja di lingkungan PLN, Perusahaan menerbitkan Perdir No. 0015.P/DIR/2020 tentang Perlindungan, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan PT PLN (Persero).

As an effort to create a sense of security and comfort for PLN's employees, both male and female, in working within PLN, the Company issued Perdir No. 0015.P/DIR/2020 on Protection, Prevention, and Handling of Sexual Harassment within PT PLN (Persero).

Pemenuhan Hak Remunerasi Pegawai

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras dalam menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai PLN, Perusahaan memberikan remunerasi sebagai salah satu upaya pemenuhan hak karyawan. Pemberian remunerasi didasarkan pada hasil pengukuran kinerja dengan memperhatikan beban kerja, tanggung jawab serta kinerja yang telah dicapai oleh pegawai tersebut.

Fulfillment of the Employee's Rights for Remuneration

As an appreciation for the dedication and hard work in fulfilling the duties and obligations as PLN's employees, the Company gives remuneration as an effort to fulfill the employees' rights. Remuneration is given based on the performance appraisal result by considering work load, responsibilities, and performance achieved by other employees.

Komponen penghasilan yang diberikan karyawan terdiri dari P1 (*pay for person*) yaitu penghasilan tetap berdasarkan kompetensi, P2 (*pay for position*) yaitu tunjangan-tunjangan, dan P3+insentif kinerja perusahaan/IKP) yaitu penghasilan berbasis kinerja dan bonus. Selain komponen P1, P2 dan P3, pegawai PLN juga mendapatkan remunerasi dan benefit lainnya seperti tunjangan cuti, tunjangan hari raya, fasilitas kesehatan PLN, program jaminan sosial pegawai, kepesertaan pada BPJS Kesehatan, kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan serta kepesertaan dalam program pensiun, yakni Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dari Dana Pensiun PLN (DP-PLN) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

The components of income given to employees consist of P1 (pay for person) representing fixed income based on competence, P2 (pay for position) representing allowances, and P3+corporate performance incentives (IKP) representing performance-based income and bonuses. In addition to the components of P1, P2, and P3, PLN's employees also other remuneration and benefits, such as leave allowance, religious holiday allowance, PLN's health insurance, employee social security program, membership of BPJS Health and BPJS Employment, as well as participation in pension program, namely Defined Benefit Pension Program (PPMP) provided by PLN Pension Fund (DP-PLN) and Defined Contribution Pension Program (PPIP) provided by Financial Institution Pension Fund (DPLK).

Penerapan Prinsip Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi

PLN berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Salah satu bentuk penerapan prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi yang dilakukan adalah pemberian kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai PLN melalui proses rekrutmen dan seleksi serta mendapatkan pengembangan individu guna

Implementation of Equality and Anti-Discrimination Principles

PLN is committed to implement equality and anti-discrimination principles in performing its operational activities. An implementation of the equality and anti-discrimination principle is in the form of having the same opportunities to be PLN's employees through recruitment and selection process, as well as individual development to improve skills and talents and fulfill the needs for

mengembangkan ketrampilan dan bakat yang dimiliki dan memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan melalui pembelajaran, penugasan dan kegiatan lain yang didukung dengan standar, prosedur, dan ketentuan internal Perusahaan.

position competence through learning, assignment, and other activities supported by the Company's standard, procedures, and internal provisions.

Selain itu, prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi juga menjadi landasan etika pegawai dalam menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan. Para pegawai wajib memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen tanpa membedakan latar belakang konsumen dan tanpa pamrih dengan berorientasi pada kepentingan Perusahaan. Dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja/pemasok, pegawai juga dituntut menghindari penilaian yang bersifat subjektif dan diskriminatif.

Moreover, the equality and anti-discrimination principles are also a basis for the employees' ethics in establishing relationship with stakeholders. All employees must provide the best service for the consumers without discriminating their backgrounds and selflessly by orienting to the Company's interest. In establishing relationship with business partners/suppliers, employees are also required to avoid any subjective and discriminatory judgments.

Penghormatan Hak Pemangku Kepentingan

PLN senantiasa menghormati hak-hak pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan selalu berusaha untuk mengedepankan sikap menghargai dan menghormati terhadap adat istiadat, budaya, dan norma yang berlaku dalam menjalin interaksi dan komunikasi dengan masyarakat lokal.

Respecting Stakeholders' Rights

PLN continuously respects the rights of stakeholders in order to strengthen harmonious relationship with all stakeholders. The Company always strives to promote an attitude of respect and honor of the prevailing customs, culture, and norms in establishing interactions and communication with local communities.

Perusahaan juga senantiasa menjunjung tinggi hak warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaan. Hal tersebut tercermin dari adanya toleransi bagi seluruh pegawai PLN, mitra kerja, tamu Perusahaan, dan masyarakat sekitar untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu.

The Company also constantly upholds the citizen rights for embracing religions and belief. This is reflected from the tolerance to all PLN's employees, business partners, corporate guests, and surrounding community in carrying out their worship according to each infidel religion and belief.

Selain itu, penghormatan hak pemangku kepentingan juga diwujudkan dengan melakukan perlindungan data pelanggan dalam upaya menjaga privasi pelanggan.

Furthermore, the respect of the stakeholders' rights is also realized by protecting customers' data in order maintain their privacy.

Mekanisme Pengaduan Masalah terkait Hak Asasi Manusia

PLN memberi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran HAM. Bagi para pegawai PLN, pelaporan terkait pelanggaran hak-hak karyawan dapat dilakukan melalui:

1. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan
   Pengaduan masalah ketenagakerjaan dapat diadukan melalui beberapa kanal. Diantaranya dapat melalui surat yang ditujukan kepada atasan langsung, kepada pejabat terkait yang menangani Manajemen SDM atau melalui media *whistle blowing system* (WBS).

Mechanism of Complaints Related to Human Rights

PLN provides opportunities for the stakeholders to report any forms of human rights violation. For all PLN's personnel, the reporting related to employees' rights can be done through:

1. Mechanism for filing complaints on employment issues
   Complaints about labor issues can be lodged through several channels. Among them can be through letters addressed to direct superiors, to relevant officials who handle HR Management or through the media whistle blowing system (WBS).

2. Mekanisme Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
   Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara manajemen dengan perwakilan pegawai/serikat pekerja. Melalui LKS Bipartit, para pihak dapat mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan manajemen, mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan yang mungkin dan/atau telah terjadi serta mendapatkan masukan perbaikan untuk meminimalisasi potensi terjadinya masalah ketenagakerjaan, termasuk pelanggaran hak-hak karyawan.

2. Mechanism of Bipartite Cooperation Agency
   Bipartite Cooperation Agency (LKS Bipartite) is a forum for communication and consultation between the management and representatives of employees/ labor unions. Through LKS Bipartite, all parties can communicate management policies, find alternative solutions for potential and/or existing problems, and gather input for improvements to minimize potential employment issues, including violation of employees' rights.

Sementara itu, pelaporan pengaduan masalah atau pelanggaran HAM bagi pemangku kepentingan eksternal dapat dilakukan melalui mekanisme WBS atau *Contact Center* PLN 123.

Meanwhile, external stakeholders can file any human rights problems or violation through the mechanism of WBS or Contact Center at PLN 123.

Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Hak Asasi Manusia

HRExcellence Awards 2021 peringkat Silver dalam kategori *Excellence in Workplace Culture* dari HumanResourcesOnline.Net.

Achievement of Corporate Responsibilities in Human Rights

HR Excellence Awards 2021 Silver rank in category Excellence in Workplace Culture from Human Resources Online.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sejalan dengan misi Perusahaan, yaitu "Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan", PLN berkomitmen penuh untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas operasional melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup. Kami turut mendukung komitmen Pemerintah pencapaian target penurunan emisi GRK nasional sebesar 29% di tahun 2030 mendatang.

CORPORATE RESPONSIBILITIES IN ENVIRONMENT

The Company's Commitment and Policy Related to Environmental Management

In line with the Company's mission, which is "carrying out environmentally-friendly business", PLN is fully committed to minimizing the negative impacts occurred as a result of the operational activities on the environment by performing environmental management efforts. We also support the Government's commitment to achieving the target of reducing national GHG emission by 29% in 2030.

Untuk mendukung komitmen PLN dalam menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, Perusahaan menetapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan yang dinyatakan oleh Direksi sejak tanggal 1 November 2015. Implementasi dan penjabaran dari kebijakan lingkungan di level korporat tersebut kemudian dilaksanakan oleh masing-masing Unit Induk/Pelaksana dengan menetapkan kebijakan sejenis diikuti perencanaan dan penerapan program-program pengelolaan lingkungan sesuai kondisi yang dihadapi, dengan merujuk pada garis-garis besar target dan tujuan

In order to support PLN's commitment in carrying out an environmentally-friendly business, the Company established a Policy on Occupational Safety and Health and Environmental Security and Protection stated by the Board of Directors since November 1, 2015. The implementation and explanation of the environmental policy at the corporate level was then carried out by each Main/Executing Unit by establishing similar policies followed by planning and implementation of environmental management programs according to the condition, by referring to the major sections of corporate target and objectives in managing

korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Kebijakan Lingkungan serta Program Lingkungan di tingkat Unit Induk/Unit Pelaksana harus terintegrasi dengan penerapan Penerapan ISO 14001:2015 atau Sistem Manajemen Lingkungan yang menjadi acuan program pengelolaan lingkungan korporasi.

Selain itu, sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan, PLN telah menetapkan aspek pengelolaan lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, PLN dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen seluruh unit bisnis PLN di bidang lingkungan.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, PLN juga mengadopsi sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berstandar Internasional. Kami bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Asian Development Bank (ADB) tentang penggunaaan *Safeguard System*.

PENERAPAN SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN (*SAFEGUARDS*) BERSTANDAR INTERNASIONAL

Selaras dengan visi PLN untuk menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara, PLN terus berupaya menunjukkan komitmen meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengadopsi sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan standar Internasional. Saat ini PLN terus melakukan kerja sama dengan berbagai Stakeholder seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), WWF Indonesia tentang pengembangan penerapan Sistem Perlindungan Lingkungan (*Safeguard System*) di PLN. Selain sebagai upaya untuk menjamin pembangunan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, penerapan *Safeguard System* ini juga untuk memenuhi syarat pendanaan proyek dalam mendukung transisi energi PLN.

Pada tahun 2019, PLN menerbitkan Peraturan Direksi mengenai penerapan PLN *Safeguard System* yang kemudian diuraikan dalam Pedoman Teknis Perlindungan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pada tahun ini, PLN yang didukung oleh World Bank sedang mengembangkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial atau *Environment and Social Management System* (ESMS). ESMS merupakan standar internasional yang diacu

environment. The environmental policies and environmental program at the Main Units/Executing Units must be integrated with the implementation of ISO 14001:2015 or Environmental Management System which is the reference of the corporate environmental management.

Furthermore, as a realization of the commitment to the environmental management and protection, PLN has set the environmental management aspect as one of the elements for performance appraisal of PLN's business units throughout Indonesia. With such performance appraisal, PLN can evaluate the commitment fulfilment of all PLN's business units in terms of environment

In order to improve the environmental management, PLN also adopts international-standard environmental protection and management. We cooperate with National Development Planning Agency (Bappenas) and Asian Development Bank (ADB) on the utilization of Safeguard System.

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL-STANDARD ENVIRONMENTAL SAFEGUARD SYSTEM

In line with PLN's vision to be the Leading Electricity Company in Southeast Asia, PLN strives to show its commitment to improving the environmental management by adopting environmental protection and management system based on international standards. Currently, PLN cooperates with various stakeholders, such as World Bank, Asian Development Bank (ADB), and WWF Indonesia, for the development of Environmental Safeguard System at PLN. Besides as an effort to guarantee environmentally friendly and sustainable electricity development, the implementation of Safeguard System is intended to fulfill the requirements for project funding to support PLN's energy transition.

In 2019, PLN issued Regulation of the Board of Directors on implementation of PLN's Safeguard System, which is then elaborated in the Technical Guidelines for Environmental Protection in Electricity Infrastructure Development. In this year, PLN supported by the World Bank was developing the Environmental and Social Management System (ESMS). ESMS is an international standard referred to by funding institutions in order to ensure that the environmental

oleh lembaga pemberi dana untuk memastikan penerapan perlindungan lingkungan dan sosial berjalan secara terstruktur dan menyeluruh (*management system*).

ESMS juga digunakan sebagai salah satu bagian dari kerangka *Environmental, Social and Governance* (ESG) PLN untuk mendapatkan pendanaan hijau *(green financing)*.

Sebagai upaya penerapan pengelolaan safeguard yang berkelanjutan, kami juga terus menyelenggarakan penyiapan dari Sumber Daya Manusia dengan melakukan *Capacity Building* dan *training* untuk seluruh personil Unit yang terlibat dalam proyek pendanaan luar negeri. Selain itu, perangkat teknis seperti Pedoman Teknis (*Technical Guidance*), Prosedur atau SOP (*Standard Operating Procedur*) terus dikembangkan sehingga dapat Safeguard System hingga level Unit dapat diterapkan secara berkelanjutan. Pedoman dan SOP tersebut menjadi panduan bagi unit-unit PLN untuk memenuhi persyaratan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan standar internasional sekaligus memenuhi peraturan Indonesia. Berikut ialah Pedoman yang telah dikeluarkan dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan:

- Petunjuk Teknis Implementasi PAP Perlindungan Lingkungan dan Sosial untuk Program Akses Energi Berkelanjutan di Sulawesi dan Nusa Tenggara (RBL-SNT) ;
- Petunjuk Teknis Perlindungan Lingkungan dan Sosial untuk Program Akses Energi Keberlanjutan di Kalimantan, Maluku, dan Papua (RBL-KMP) ;
- Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial Pekerjaan Distribusi oleh Mitra Kerja
- Prosedur Pengelolaan Limbah B3, PCBs, dan Asbestos untuk Pekerjaan Distribusi dengan Pembiayaan international;
- Prosedur Pencegahan Kontaminasi Silang PCB Jaringan Distribusi dengan Pembiayaan Internasional;
- Prosedur Warisan Budaya untuk Distribusi;
- Prosedur Material Bekas dan Non LB3 untuk Kegiatan Transmisi dan Distribusi dengan Pembiayaan Internasional;
- Prosedur Penanganan Ceceran Oli untuk Kegiatan Transmisi dan Distribusi dengan Pembiayaan Internasional;
- Prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan.

and social protection is implemented structurally and thoroughly (management system).

ESMS is also used as a part of PLN's Environmental, Social, and Governance framework to obtain green financing.

As an attempt to implement sustainable safeguard, we also continuously prepare the human capital by carrying out capacity building and training for all of the personnel of units involved in foreign funding projects. Moreover, the technical equipment, such as Technical Guidance or Standard Operating Procedures (SOP), are continually developed, so that the Safeguard System up to the unit level can be implemented sustainably. The guidance and SOP become the guidelines for PLN's units to fulfill the requirements of environmental protection and management based on international standards, as well as to fulfill Indonesian regulations. The following are the guidelines that have been issued and continually developed in accordance with the needs:

- Technical Guidelines for PAP Implementation of Environmental and Social Protection for Sustainable Energy Access Program in Sulawesi and Nusa Tenggara (RBL-SNT);
- Technical Guidelines for Environmental and Social Protection for Sustainable Energy Access Program in Kalimantan, Maluku, and Papua (RBL-KMP);
- Procedures for Environmental and Social Protection of Distribution Work by Business Partners;
- Procedures for B3 Waste Management, PCBs, and Asbestos for Distribution Work with International Funding;
- Procedures for Preventing PCB Cross Contamination of Distribution Network with International Funding;
- Procedures for Cultural Heritage to be Distributed;
- Procedures for Used Materials and Non-B3 Waste for Transmission and Distribution Activities with International Funding;
- Procedures for Handling of Oil Spill for Transmission and Distribution Activities with International Funding;
- Procedures for Mechanism of Complaint Handling.

Untuk proyek pendanaan yang sedang dalam proses loan agreement maupun sedang berjalan, kami melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perlindungan lingkungan dan sosial pada kegiatan perencanaan, konstruksi, dan operasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan memenuhi standar internasional dan peraturan Indonesia. Berikut ialah proyek pendanaan yang sedang dalam proses penyiapan dokumen *safeguard* (seperti ESIA atau *Environmental and Social Impact Assesement*) ialah sebagai berikut:

1. PLTA Matenggeng (ESIA);
2. PLTP tersebar "*Geothermal Resources Risk Mitigation* (GREM)" di Songa, Atedai, Gunung Tangkuban Parahu (ESIA);
3. PLTP Ulumbu dan PLTP Mataloko (Update ESIA)
4. PLTA Kumbih-3 (ESIA) ;
5. PLTA Masang II (ESIA);
6. PLTB Banten (ESIA).

Adapun program pendanaan yang dalam tahap implementasi ialah sebagai berikut:

1. *Result Based Lending* (RBL) Kalimantan Maluku dan Papua;
2. *Result Based Lending* (RBL) Sulawesi dan Nusa Tenggara;
3. *Result Based Lending* (RBL) SREAP (*Sustainable Reliable Energy Access Program*) Jawa;
4. *Strengthening Distribution Network* Bali & Jatim;
5. *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Power Project*.

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup

Lingkup pelaksanaan kegiatan tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan hidup mencakup upaya-upaya untuk mendukung penurunan emisi GRK, meliputi pengembangan energi baru dan terbarukan, mengalihkan penggunaan bahan bakar (*fuel switching*) dan berupaya memanfaatkan gas buang, serta berupaya menggunakan teknologi rendah karbon dan efisien. Selain itu, pelaksanaan kegiatan tanggung jawab perusahaan di bidang lingkungan hidup juga mencakup pengelolaan sumber air dan ekosistem badan air yang sesuai dengan standar baku lingkungan, upaya konservasi keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna, serta pengelolaan limbah yang tepat.

As for funding projects that are in the loan agreement process and are currently running, we monitor, evaluate, and report the environmental and social protection activities during the planning, construction, and operation in order to ensure that the activities have been running according to international standards and Indonesian regulations. The following are the funding projects that are in the process of safeguard document preparation (such as ESIA or Environmental and Social Impact Assessment):

1. PLTA Matenggeng (ESIA);
2. Spreading PLTP "Geothermal Resources Risk Mitigation (GREM)" in Songa, Atedai, Gunung Tangkuban Parahu (ESIA);
3. PLTP Ulumbu and PLTP Mataloko (Update ESIA);
4. PLTA Kumbih-3 (ESIA);
5. PLTA Masang II (ESIA);
6. PLTB Banten (ESIA).

Meanwhile, the funding projects that are in the implementation stage are as follows:

1. Result Based Lending (RBL) in Kalimantan Maluku and Papua;
2. Result Based Lending (RBL) in Sulawesi and Nusa Tenggara;
3. Result Based Lending (RBL) SREAP (Sustainable Reliable Energy Access Program) in Java;
4. Strengthening Distribution Network Bali & Jatim;
5. Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Power Project.

Scope of Implementation of Corporate Responsibility Activities in Environment

Scope of implementation of corporate responsibility activities in environment covers the efforts to support the decrease in GHG emission, including the development of new and renewable energy, fuel switching and usage of lean combustion, as well as utilization of low-carbon and efficient technology. Furthermore, the implementation of corporate responsibility activities in environment include management of water resources and water-body ecosystem in accordance with the environmental standards, biodiversity conservation both flora and fauna, and proper waste management.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Lingkungan Hidup

Tujuan umum pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan adalah memenuhi seluruh baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga seluruh tahapan kegiatan operasional PLN bersama unit-unit Induk/Pelaksana tidak memberi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, PLN menetapkan beberapa target spesifik pada aspek lingkungan, mencakup:

- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan pada seluruh unit-unit induk/pelaksana.
- Perolehan Sistem Manajemen Terintegrasi.
- Perolehan minimal PROPER peringkat Biru pada seluruh unit-unit induk/pelaksana. Target perolehan peringkat ini akan ditingkatkan secara bertahap menjadi Hijau.
- Pencapaian persentase bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Pemerintah terhadap Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dari skenario *Business as Usual* di tahun 2030.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

PLN menyadari bahwa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari operasional pembangkit berbahan bakar fosil, yaitu batu bara, BBM, dan gas dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan dan penurunan emisi GRK menjadi salah satu poin penting dalam Perjanjian Paris yang diadopsi pada kesepakatan KTT Perubahan Iklim pada Desember 2015, yang menjadi salah satu acuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam kerangka Perjanjian Paris, para penandatangan konvensi perubahan iklim sepakat untuk mengendalikan dan menurunkan emisi GRK agar pemanasan global tidak melebihi 2°C, bahkan mengupayakan pembatasan 1.5°C. Untuk memastikan tercapainya tujuan global tersebut, setiap tahun *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menyelenggarakan Sidang *Conference of Parties* (COP) untuk mengevaluasi realisasi capaian pengendalian emisi GRK global dan realisasi komitmen seluruh negara penandatangan konvensi Perjanjian Paris.

Plans for the Implementation of Corporate Responsibility Activities in Environment

The general objective of environmental management is to fulfill all of the environmental quality standards as stipulated in the prevailing laws and regulations, so that the entire stages of PLN's operational activities with the Main/Executing Units do not have negative impact to the environmental sustainability.

In order to achieve the general objective, PLN has set several specific target in environmental aspects, including:

- Implementation of Environmental Management System in all Main/Executing units.
- Acquisition of Integrated Management System.
- Acquisition of minimum Blue Rating in PROPER assessment in all main/executing units. The rating target will be increased gradually to Green.
- Achievement of new and renewable energy mix target percentage of 23% in 2025 in order to support the achievement of Government's commitment to Paris Agreement in order to decrease the greenhouse gas (GHG) of 29% from the scenario of Business as Usual in 2030.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN ENVIRONMENT

Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emission

PLN realizes that the greenhouse gas (GHG) emission produced from the operation of fossil fuel plant, which are coal, oil fuel, and gas, can have significant impact to the environment. The management and reduction of GHG emission becomes one of the important points in Paris Agreement adopted in the agreement of Climate Change Conference in December 2015, which was one of the references for Sustainable Development Goals (SDGs). In the framework of Paris Agreement, all signers of the climate change conference agreed to control and reduce GHG emission, so the global warming did not exceed 2°C, even attempted to limit to 1.5°C. In order to ensure the achievement of global objectives, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) holds annual Conference of Parties (COP) to evaluate the realization of achievement to control global GHG emission and realization of commitment of all countries signing the Paris Agreement.

Sebagai salah satu penandatangan konvensi Perjanjian Paris, Indonesia telah menindaklanjuti dengan menyusun dan memberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Pemerintah Indonesia juga kemudian mengeluarkan beberapa regulasi sebagai pedoman dalam implementasi upaya pencapaian NDC, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, Permen LHK No. P.72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi dan Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim, dan Permen LHK No. P.73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

As one of the signers of the Paris Agreement, Indonesia has followed up it by preparing and enforcing Law No. 16 of 2016 on Ratification of Paris Agreement. The Indonesian Government has also issued several regulations as guidelines for the implementation of efforts to achieve NDC, including Regulation of Minister of Environment and Forestry (Permen LHK) No. P.71 of 2017 on Implementation of National Registry System for Climate Change Control, Permen LHK No. P.72 of 2017 on Guidelines for Implementation of Measurement, Reporting, and Verification of Action and Resources for Climate Change Control, and Permen LHK No. P.73 of 2017 on Guidelines for Implementation and Reporting of National Greenhouse Gas Inventory.

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam penurunan emisi GRK nasional hingga 29% dari *Business as Usual Scenario* di tahun 2030, PLN berupaya untuk menurunkan emisi GRK dengan memprioritaskan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), mengalihkan penggunaan bahan bakar (*fuel switching*), dan menggunakan teknologi rendah karbon dan efisien. Selain itu, Perusahaan juga melakukan program efisiensi energi pada pembangkit listrik untuk mereduksi jumlah emisi yang dilepaskan ke udara dan inventarisasi emisi GRK untuk memonitor tingkat dan status emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas operasional PLN.

In order to realize the Government's commitment to reduce national GHG emission up to 29% from the Business as Usual Scenario in 2030, PLN strives to reduce the GHG emission by prioritizing the development of New and Renewable Energy (NRE), fuel switching, and using low-carbon and efficient technology. Furthermore, the Company also performs energy efficient program in power plants to reduce the amount of emission released to the air and GHG emission inventory to monitor the level and status of the emission produced from PLN's operational activities.

Pada tanggal 1-5 November 2021, delegasi PLN menghadiri COP26 di Glasgow. Partisipasi PLN dalam COP26 bertujuan untuk menegaskan komitmen, strategi dan program dekarbonisasi PLN kepada pemangku kepentingan nasional dan internasional sehingga diharapkan program dekarbonisasi PLN mendapatkan dukungan penuh baik berupa kebijakan, pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Agenda PLN di COP26 terdiri dari delapan sesi presentasi, satu penandatanganan *Memorandum of Understanding*, pertemuan bilateral dengan *Green Climate Fund*, kunjungan lapangan ke Strathclyde University, dan *stakeholder engagement*.

On November 1-5 2021, PLN's delegation attended the COP26 in Glasgow. PLN's participation in COP26 was intended to affirm PLN's decarbonization commitment, strategy, and program to national and international stakeholders, so that PLN's decarbonization program can be fully supported in the form policies, funding, technology transfer, and capacity improvement. PLN's agenda in COP-26 included eight sessions of presentation, one signing of a Memorandum of Understanding, bilateral meeting with Green Climate Fund, field visitation to Strathclyde University, and stakeholder engagement.

Lima presentasi PLN dilaksanakan di Paviliun Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan Pavilion United Kingdom (tuan rumah) dan Pavilion UNFCCC sebagai penyelenggara COP. Paviliun Indonesia difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai focal point Indonesia untuk negosiasi Perubahan Iklim. Paviliun ini merupakan sarana "soft diplomacy" untuk mengkomunikasikan strategi, aksi

Five PLN's presentation was held in Indonesian Pavilion, which was located near the United Kingdom Pavilion (host) and UNFCCC Pavilion facilitated by the COP organizer. The Indonesian Pavilion was facilitated by the Ministry of Environment, as the Indonesian focal point for negotiation of climate change. This pavilion was a "soft diplomacy" facility to communicate strategies, actions, and measurable

dan inovasi terukur terkait mitigasi perubahan iklim ke komunitas internasional. Selain itu, Paviliun Indonesia membagi informasi secara konstruktif dan terintegrasi tentang upaya pengendalian perubahan iklim serta membuka kesempatan untuk mengeksplorasi ide, peluang, dan jaringan dalam rangka memperkuat pengendalian perubahan iklim. PLN juga melakukan presentasi di Paviliun Sustainable Development Goal No. 7 yaitu "affordable, reliable, sustainable and modern energy for all" (SDG 7), Paviliun Amerika Serikat, dan di pertemuan tingkat tinggi *Global Powers System Transformation Partners*.

Komunikasi komitmen, strategi dan peta jalan dekarbonisasi PLN sebagai kontribusi terhadap pencapaian NDC Indonesia di tahun 2030 dan *carbon neutral* tahun di 2060, mendapatkan sorotan dari media. Terpantau sejumlah lebih dari 180 pemberitaan positif di media nasional dan internasional pada kurun waktu 1 – 7 November 2021.

PLN juga senantiasa melakukan pengembangan kapasitas yang salah satunya bertujuan untuk mengikuti dan mengantisipasi perkembangan regulasi, kebijakan, maupun teknologi, dalam pengelolaan perubahan iklim. Berikut adalah kegiatan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan perubahan iklim yang telah diikuti selama tahun 2021:

1. ADB Asia Clean Energy Forum 2021: *Accelerating the Low-Carbon Transition in Asia and the Pacific*;
2. *Webinar* Uji Coba Kerjasama Artikel 6 Perjanjian Paris oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan ADB;
3. Pelatihan Skema Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca – Seri 1 (ISO 17029:2019, 14065:2020, 14066:2011);
4. Pelatihan Skema Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca – Seri 2 (ISO 14064-1:2018, 14064-2:2018, 14064:3-2019);
5. *Focus Group Discussion* oleh Badan Kebijakan Fiskal dengan tema Pembahasan Dampak *Zero Coal* pada PLN dan Kondisi Fiskal;
6. *Webinar* TEMPO: *Energy Transition Finance – Possible Derisking Instruments on Re-development to support the Decarbonization Process*;
7. *Benchmarking Climate Policy* dengan Électricité de France (EDF);
8. *Sustainability & Resilience Workshop*: *Unlocking Possibilities in Achieving NDC from Energy Transition and Land-Use Mitigation* oleh su.re.co;

innovations related to the mitigation of climate change to international community. Furthermore, the Indonesian Pavilion shared information in constructive and integrated manner regarding the efforts of climate change control and provided opportunities to explore ideas, chances, and network in order to strengthen the climate change control. PLN also gave presentation in the Pavilion of Sustainable Development Goal No. 7, i.e., "affordable, reliable, sustainable and modern energy for all" (SDG 7), the United States Pavilion, and high level meeting of Global Powers System Transformation Partners.

The communication of PLN's commitments, strategies, and road map of decarbonization as a contribution to Indonesian NDC achievement in 2030 and carbon neutral in 2060 was highlighted by the media. There were a total of more than 180 positive news in national and international media during November 1-7, 2021.

PLN also continuously develops its capacity in order to follow and anticipate the development of regulations, policies, and technology in managing climate change. The following are the activities to develop the capacity in managing climate change during 2021:

1. ADB Asia Clean Energy Forum 2021: Accelerating the Low-Carbon Transition in Asia and the Pacific;
2. Webinar on Cooperation Trial of Article 6 of the Paris Agreement by the Coordinating Ministry for Economic Affairs and ADB;
3. Training on Greenhouse Gas Validation/Verification Scheme – Series 1 (ISO 17029:2019, 14065:2020, 14066:2011);
4. Training on Greenhouse Gas Validation/Verification Scheme – Series 2 (ISO 14064-1:2018, 14064-2:2018, 14064:3-2019);
5. Focus Group Discussion by Fiscal Policy Agency with the theme of Discussion on Zero Coal Impact to PLN and Fiscal Condition;
6. TEMPO's Webinar: Energy Transition Finance – Possible Derisking Instruments on Re-development to support the Decarbonization Process;
7. Benchmarking Climate Policy with Électricité de France (EDF);
8. Sustainability & Resilience Workshop: Unlocking Possibilities in Achieving NDC from Energy Transition and Land-Use Mitigation by su.re.co;

9. *Focus Group Discussion* oleh DJK KESDM dengan tema *Approach to ETS Schemes in Power Sector*;
10. *Webinar Private Sector Dialogue on Carbon Pricing Instrument in ASEAN* oleh UNFCCC/IGES – *Regional Collaboration Centre for Asia and the Pacific*;
11. *Capacity Building Emissions Trading System oleh German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety*;
12. *Sustainable Energy Finance Dialogue*: Peran dan Implementasi *Sustainable Finance* menuju Transisi Energi dan *Net Zero Emission* di Indonesia; dan
13. *Webinar* 2021 *Electric Utilities Benchmark Companies* oleh World Benchmarking Alliances (WBA).

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi sebesar 23% pada tahun 2025, PLN berupaya untuk mendukung pengembangan EBT pada pembangkit listrik. Sebagaimana yang tertuang dalam RUPTL 2021-2030, PLN memproyeksikan pembangunan EBT sebesar 10 GW sampai dengan 2025 dan 15 GW sampai dengan tahun 2029. Hingga akhir tahun 2021, sebanyak 38 pembangkit EBT mulai beroperasi secara komersial dengan total kapasitas sebesar 624,02 MW.

Pengalihan Penggunaan Bahan Bakar (*Fuel Switching*)

Untuk mengurangi pemakaian BBM, PLN berencana mengalihkan pemakaian BBM ke gas pada PLTG, PLTGU dan PLTMG serta penggunaan campuran biofuel pada PLTD. Langkah *fuel switching* secara langsung juga akan mengurangi emisi GRK karena faktor emisi gas lebih rendah daripada faktor emisi BBM. *Fuel switching* juga diterapkan pada PLTU melalui program *co-firing* dengan memanfaatkan biomassa hutan tanaman energi, pelet sampah, dan limbah perkebunan atau pertanian sebagai subtitusi penggunaan bahan bakar batu bara di PLTU. Implementasi *co-firing* pada PLTU tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi karbon, tetapi turut mendorong efisiensi dari operasional pembangkit listrik.

Selama tahun 2021, PLN menggunakan bahan baku terbarukan dari biomassa sebanyak 282.627.614 kg, naik signifikan dari penggunaan biomassa tahun 2020 sebanyak 9.731.324 kg.

Penggunaan Teknologi Rendah Karbon dan Efisien

Perusahaan menyadari bahwa pembakaran batu bara menghasilkan emisi GRK yang relatif besar, sehingga

9. Focus Group Discussion by DJK KESDM with the theme of Approach to ETS Schemes in Power Sector;
10. Webinar of Private Sector Dialogue on Carbon Pricing Instrument in ASEAN by UNFCCC/IGES – Regional Collaboration Centre for Asia and the Pacific;
11. Capacity Building Emissions Trading System by German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety;
12. Sustainable Energy Finance Dialogue: Role and Implementation of Sustainable Finance to Energy Transition and Net Zero Emission in Indonesia; and
13. 2021 Webinar on Electric Utilities Benchmark Companies by World Benchmarking Alliances (WBA).

Development of New and Renewable Energy (NRE)

In line with the Government's policy to increase renewable energy mix to 23% in 2025, PLN attempts to support the NRE development in power plants. As explained in the RUPTL for 2021-2030, PLN projects the NRE development of 10 GW up to 2025 and 15 GW up to 2029. Until the end of 2021, a total of 38 NRE plant has started to operate commercially with the total capacity of 624.02 MW.

Fuel Switching

In order to reduce the use of oil fuel, PLN plans to switch oil fuel to gas in PLTG, PLTGU, and PLTMG, as well as to biofuel mix in PLTD. The fuel switching will directly reduce the GHG emission because the emission factor of gas is lower than oil fuel. Fuel switching is also applied in PLTU through the co-firing program by utilizing biomass from energy forestry, waste pellets, and plantation or agricultural waste as a substitution of coal fuel in PLTU. The implementation of co-firing in PLTU does not only reduce carbon emission, but also drives the efficiency of power plant operation.

During 2021, PLN 282,627,614 kg pf used renewable fuel from biomass, increasing significantly from the 2020 biomass usage of 9,731,324 kg.

Utilization of Low-Carbon and Efficient Technology

The Company realizes that the use of coal will produce relatively high GHG emission, so it is necessary to do some

diperlukan upaya penurunan emisi GRK yang bersumber dari PLTU. Kebijakan PLN terkait hal ini adalah menetapkan penggunaan teknologi *boiler supercritical, ultra-supercritical* untuk PLTU batu bara yang akan dikembangkan di Pulau Jawa dan Sumatra serta teknologi yang lebih efisien di Indonesia Timur sehingga dapat mengurangi penggunaan batu bara.

efforts to reduce the GHG emission from PLTU. PLN's policy related to this matter is to determine the use of boiler supercritical, ultra-supercritical technology for coal PLTU that will be developed in Java and Sumatra, as well as more efficient technology in East Indonesia, so the use of coal can be reduced.

Program Efisiensi Energi

Komitmen PLN dalam mereduksi jumlah emisi yang dilepaskan ke udara dari aktivitas pembangkitan telah direalisasikan ke berbagai upaya pengurangan emisi, termasuk program efisiensi energi pada kegiatan pembangkit listrik. Beberapa program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi energi di antaranya adalah melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara rutin dan berkala, rehabilitasi/ *refurbishment* peralatan pembangkitan dengan tujuan mempertahankan kapasitas, menjaga keandalan mesin dan meningkatkan efisiensi pembangkit, serta menerapkan teknologi pembangkitan listrik terkini secara bertahap. Program efisiensi energi ini telah diterapkan secara intensif pada berbagai unit pembangkit PLN.

Energy Efficiency Program

PLN's commitment in reducing the amount of emission released to the air from the power plant activities has been realized in various emission reduction efforts, including energy efficiency program in power plants. Several programs have been executed in order to increase the energy efficiency, among others performing routine and regular repair and maintenance, rehabilitation/ refurbishment of power plant equipment to maintain the capacity, managing the machine reliability, increasing the power plant efficiency, and applying the latest power plant technology gradually. The energy efficiency program has been implemented intensively in many PLN's generating units.

Inventarisasi Emisi GRK dan Emisi Konvensional

PLN secara berkala melakukan inventarisasi emisi GRK untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK. Selain itu, tujuan lain dari inventarisasi emisi GRK adalah untuk me-*monitor* tingkat dan status emisi GRK, merancang dan mengevaluasi kegiatan mitigasi perubahan iklim, serta menyusun laporan status emisi GRK Perusahaan. Ruang lingkup inventarisasi GRK meliputi:

1. Emisi cakupan atau *scope* 1 (mengacu pada GHG Protokol) yaitu emisi GRK langsung yang berasal dari sumber yang dimiliki perusahaan, antara lain Pembangkit listrik, pemanasan, pendinginan, *boiler*, dan emisi *fugitive*;
2. Emisi cakupan atau *scope* 2 yaitu emisi tidak langsung mencakup emisi dari pembangkitan listrik yang dibeli atau diperoleh, pemanasan, pendinginan dan lain - lain;
3. Emisi cakupan atau *scope* 3 yaitu emisi tidak langsung lainnya termasuk emisi hulu dan hilir, e.q kegiatan yang mengekstraksi dan memproduksi material yang dibeli; transport bahan bakar dan penguraian limbah.

GHG Emission Inventory and Conventional Emission

PLN regularly compiles GHG emission inventory in order to obtain data and information regarding level, status, and tendency of change in GHG emission. Furthermore, GHG emission inventory also aims to monitor the level and status of GHG emission, to design and evaluate activities to mitigate climate change, as well as to draw up reports on the Company's GHG emission status. The scope of GHG investment covers:

1. Scope 1 emission (referring to GHG Protocol) is direct GHG emission deriving from the sources owned by the company, including power plant, heating, cooling, boiler, and fugitive emission.
2. Scope 2 emission is indirect emission, which includes emission deriving from the power plant purchased or obtained, heating, cooling, and others;
3. Scope 3 emission is the other indirect emission, including the upstream and downstream emission, such as activities to extract and produce materials purchased; to transport fuel and waste decomposition.

Terdapat 4 (empat) tahapan pelaksanaan inventarisasi emisi GRK, yaitu identikasi sumber GRK, pemantauan dan pengumpulan data, penghitungan, dan validasi emisi GRK. Penghitungan emisi pembangkit listrik berpedoman pada Pedoman Penghitungan dan Inventarisasi GRK Sub-sektor Ketenagalistrikan yang mengacu kepada IPCC *Guideline*, "2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories" (disingkat IPCC-2006). Pedoman tersebut menjelaskan empat metode perhitungan, yaitu Metode-1, Metode-2, Metode-3, dan Metode-4, yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan data.

There are 4 (four) stages to implement the GHG emission inventory, which are identifying the source of GHG, monitoring and collecting data, calculating, and validating GHG emission. Calculation of power plant emission refers to the Guidelines for GHG Calculation and Inventory in the Electricity Sub-Sector, referring to IPCC Guideline, "2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories" (shortened as IPCC-2006). The guideline explains four calculation methods, which are Method-1, Method-2, Method-3, and Method-4, which the utilization can be adjusted to the data availability.

Validasi emisi GRK dilakukan baik melalui prosedur internal maupun dilakukan oleh pihak eksternal. Prosedur validasi internal dilakukan terhadap data yang dibutuhkan untuk menghitung emisi GRK dan memastikan semua unit pembangkit menggunakan data yang telah tervalidasi dalam melakukan penghitungan emisi GRK. Adapun validasi eksternal terhadap penghitungan emisi GRK pembangkit listrik dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk memastikan data yang dilaporkan memenuhi prinsip dasar *Transparency, Accuracy, Completeness, Comparability,* dan *Consistency*.

GHG emission is validated through both internal and external procedures. Internal validation procedures are done upon the data needed to calculate GHG emission and it ensures that all generating units use the validated data in calculating the GHG emission. Meanwhile, external validation on GHG emission calculation of a power plant is done by the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM) to ensure that the data reported fulfill the basic principles of Transparency, Accuracy, Completeness, Comparability, and Consistency.

Secara periodik, masing-masing unit pembangkit melaporkan hasil inventarisasi GRK kepada Pemerintah, yaitu KESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelaporan ke KESDM dilakukan secara daring melalui Aplikasi Penghitungan & Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE-Gatrik) dan kepada KLHK melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Hasil inventarisasi ini akan dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan pengurangan emisi GRK korporat.

Periodically, each generating unit reports the GHG inventory result to the Government, i.e., KESDM and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The reporting to KESDM is done online through the Application of Calculation & Reporting of Electricity Emission (APPLE-Gatrik) and to KLHK through the application of Environment Electronic Reporting Information System (SIMPEL). The inventory result will be a reference in determining the policy on reduction of corporate GHG emission.

Selama tahun 2021, total emisi GRK Perseroan dari *scope* 1, 2, dan 3 sebesar 253.602.475 Ton CO2, naik 12,84% dibanding tahun 2020 yang mencapai 224.738.450 Ton CO_2. Kenaikan emisi ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas bisnis dan mobilitas untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID19, sebaliknya dari aktivitas langsung Perseroan (*scope* 1) emisi GRK tahun 2021 justru berhasil ditekan dibanding kondisi pra pandemi di tahun 2019 meskipun produksi listrik meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk terus memperbaiki kinerja lingkungan

During 2021, the Company's total GHG emission from scope 1, 2, and 3 was 253,602,475 ton of CO2, increasing by 12.84% from 2020 at 224,738,450 ton CO2. The increasing emission was a result of the more intense business activities and mobilities to support the Company's operation in line with the improved COVID-19 pandemic condition. In contrast, from the Company's direct activities (scope 1), the GHG emission in 2021 was managed to be reduced compared to pre pandemic condition in 2019 although the electricity production increased. This shows the Company's commitment to keep improving the environmental performance.

Berikut ini merupakan hasil perhitungan emisi GRK, baik Cakupan 1 maupun Cakupan 2 dan 3 dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

The following is a result of GHG emission calculation, both Scope 2 and Scope 2 and 3 in the last three years:

Total Emisi GRK PLN **PLN's Total GHG Emission**

Jenis Emisi / *Type of Emission*	Satuan / *Unit*	2021	2020	2019
Emisi Cakupan 1 / Scope 1 Emission	Ton CO_2	155.695.358	149.904.626	157.683.292
Emisi Cakupan 2 / Scope 2 Emission		7.775.293	6.959.546	6.082.871
Emisi Cakupan 3 / Scope 3 Emission		82.517.108	67.874.278	59.183.988
Total		**253.602.475**	**224.738.450**	**222.950.151**

Selain inventaris emisi GRK, PLN juga melakukan perhitungan beban emisi konvensional berupa Sox, NOx, dan partikulat sebagai salah satu persyaratan penilaian Penghargaan PROPER. Berikut ini merupakan hasil perhitungan emisi konvensional dari Unit Beyond PROPER 2021, yaitu 28 pembangkit listrik PLN dan Anak Perusahaan yang meraih PROPER EMAS dan HIJAU, dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

In addition to GHG emission, PLN also calculates the conventional emission load in the form of Sox, NOx, and particulate matter as one of the requirements of PROPER Award. The following is the result of conventional emission calculation from the 2021 Beyond PROPER Unit, which were 28 PLN's power plants and subsidiaries obtaining GOLD and GREEN PROPER in the last 3 (three) years:

Total Beban Emisi Konvensional **Total Conventional Emission Load**

Jenis Emisi / *Type of Emission*	Satuan / *Unit*	2021	2020	2019
Sox	Ton	143.244	185.820	162.098
NOx		136.762	150.291	173.203
Partikulat / Particulate Matter		33.681	42.868	34.690
NH_3		6.304	8.752	6.810
H2S		3.866	45.591	15.043

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa secara konsisten total beban emisi (NOx, SOx, dan Partikel Debu) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan efektifitas yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan emisi.

Based on the data above, it can be seen that the total emission load (NOx, SOx, and dust particles) consistently decreased from year to year. This shows the effective actions done by the Company to reduce emission.

Program Penghijauan

PLN berkomitmen penuh melaksanakan program penghijauan guna melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Komitmen tersebut tercermin dari pelaksanaan penanaman pohon di seluruh unit usaha PLN secara serentak pada Hari Pohon Sedunia. Penghijauan yang dilakukan melibatkan instansi terkait, pelajar, dan LSM yang peduli terhadap penghijauan.

Reforestation Program

PLN is fully committed to performing reforestation program in order to conserve and improve the environmental quality. The commitment is reflected in the implementation of tree planting in all PLN's business units simultaneously on the World Tree Day. The reforestation involved the related institutions, students, and NGOs that have concerns about reforestation.

Realisasi Penanaman Pohon pada Program Penghijauan **Realization of Tree Planting in Reforestation Program**

Uraian / Description	Satuan / *Unit*	2021	2020	2019
Jumlah pohon yang ditanam / Total Trees Planted	Pohon / Tree	431.430	135.644	152.476
Jumlah area yang ditanami pohon / Total Area Planted with Trees	Hektar / Hectare	237,92	60,74	87,97

Pengelolaan Sumber Air dan Ekosistem Badan Air

Pada proses pelaksanaan aktivitas operasional PLN, air memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai media penggerak turbin (dalam PLTU dan PLTA) dan sebagai media pendingin atau penjaga stabilitas suhu generator pada seluruh tipe pembangkit.

Komitmen PLN dalam menjaga sumber air dan ekosistem badan air dilakukan dengan memastikan seluruh pembangkit dilengkapi sarana pengolahan air dari proses pendinginan generator pembangkit, agar air yang diolah memenuhi standar baku lingkungan sebelum dikembalikan ke badan air. Selain itu, air yang telah diolah juga dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk pendingin generator dalam satu rangkaian tertutup, penyiraman tanaman atau penyiraman debu batu bara di *coal yard*.

Dalam upaya menggunakan air secara bijak dan berkelanjutan, PLN melakukan efisiensi air dengan mengimplementasikan berbagai program inovatif, di antaranya modifikasi Pola Injeksi *Air Boiler* untuk menurunkan beban pencemar Fosfat (PO_4), pengendalian pemakaian *Make-up Water* melalui perubahan skema pola operasi *Sootblower*, modifikasi *Line Outlet Overflow Cooling Tower*, dan lainnya.

Konservasi Keanekaragaman Hayati

Perusahaan berkomitmen penuh untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di setiap wilayah operasional Perusahaan sebagai bentuk pelestarian warisan bagi generasi yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai upaya konservasi keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna, dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Pengelolaan keanekaragaman hayati yang diterapkan telah sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) dan persyaratan PROPER.

Management of Water Sources and Water-Body Ecosystem

In PLN's operational activities, water has 2 (two) main functions, which are as a medium that moves the turbines (in PLTU and PLTA) and as a cooling medium or a medium to maintain the temperature stability of generators in all types of power plants.

PLN's commitment to maintain the water resources and water-body ecosystem is done by ensuring that all power plants are equipped with the water processing facilities from the cooling process of plant generators, so the processed water fulfills the environmental standards before being returned to the water body. Furthermore, the processed water is also reused for many purposes, including cooling generators in one closed circuit, watering plants, or watering the coal dust in coal yard.

In the attempt to use water wisely and sustainably, PLN performs water efficiency by implementing various innovative programs, among others modification of Injection Pattern of Air Boiler to reduce the pollutant load of Phospate (PO4), control of the use of Make-up Water through the change of scheme on Scootblower operational pattern, modification of Line Outlet Overflow Cooling Tower, and others.

Biodiversity Conservation

The Company is fully committed to maintain and preserve the biodiversity in each operational area of the Company as an effort to preserve the heritage to the next generation. Such effort is done through various biodiversity conservation programs, both flora and fauna, by involving many parties to generate maximum result. The implementation of biodiversity management is in accordance with the Environmental Management Plan and the Environmental Monitoring Plan (RKL-RPL) and PROPER requirements.

Selama tahun 2021, PLN melakukan konservasi terhadap 62 flora dan 41 fauna. Dari total jumlah flora yang dikonservasi, terdapat 2 flora termasuk dalam jenis tanaman yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu Pohon Saninten (*Castanopsis argentea*) dan Pohon Gaharu (*Aetoxylon sympetalum*).

Sedangkan untuk fauna, terdapat 7 fauna termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, yaitu Elang Bondol (*Haliastur indus*), Burung Bondol (*Lonchura punctulata*), Burung Kuntul (Egretta sp), Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*).

Pengelolaan Limbah

Limbah yang dihasilkan PLN Group dari kegiatan operasional ketenagalistrikan terdiri dari 2 jenis limbah, yaitu Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Limbah Non-B3. Dalam hal pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3, unit usaha senantiasa berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. it kelolaan. Tujuan dari Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3 adalah:

1. Mencegah terjadinya pencemaran;
2. Melindungi kesehatan manusia;
3. Melindungi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
4. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan terjadinya kebakaran dan ledakan;
5. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Pengelolaan Limbah B3

Kami mewajibkan unit usaha melakukan Pengelolaan Limbah B3 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sampai dengan tahun 2021, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dalam proses kegiatan ketenagalistrikan dari seluruh unit PLTU dan unit yang mendapatkan predikat Proper Biru, Hijau dan Emas sebanyak 1.987.853,70 ton, berasal dari *fly ash, bottom ash*, minyak pelumas dan oli

During 2021, PLN conserved 62 flora and 41 fauna. From the total flora conserved, there were 2 flora categorized as the type of protected plant based on Regulation of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 on Second Amendment to Regulation of the Ministry of Environment and Forestry Number P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 on Types of Protected Flora and Fauna, which are Saninten Tree (Castanopsis argentea) and Gaharu Tree (Aetoxylon sympetalum).

As for fauna, there were 7 fauna included in the type of protected fauna based on Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, which were Brahminy Kite (Haliastur indus), Bondol Bird (Lonchura punctulata), Herons (Egretta sp), Javan Hawk-Eagle (Nisaetus bartelsi), Javan Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus), Silvery Gibbon (Hylobates moloch), and Green Sea Turtle (Chelonia mydas).

Waste Management

Waste produced by the PLN Group from power-generating operations consists of 2 types, namely Hazardous and Toxic Waste (B3 Waste) and Non-B3 Waste. In managing B3 and non-B3 waste, the business units are always guided by the prevailing laws and regulations. The objectives of the Management of B3 and non-B3 waste are:

1. Preventing pollution;
2. Protecting human health;
3. Protecting the survival of humans and other creature;
4. Preventing work accidents and fire and explosion;
5. Preventing environmental damage.

B3 Waste Management

We require business units to implement B3 Waste Management by referring to Government Regulation No. 101 of 2014 on Management of Hazardous and Toxic Waste. Until 2021, the total B3 waste produced in the electricity process from all units of PLTU and units that obtain the predicate of Proper Blue, Green, and Gold was 1,987,853.70 ton, deriving from fly ash, bottom ash, lubricants oil and used oil, used batteries, used dustbills, TL lamp, used filters, and

bekas, baterai/aki bekas, majun bekas, lampu TL, filter bekas dan bahan kimia kadarluarsa. Dalam mengelola limbah B3, semua unit telah memiliki izin penyimpanan sementara, beberapa unit bahkan memiliki izin *landfill* dan izin pemanfaatan sendiri. Selain upaya pemanfaatan sendiri, Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang berizin.

Sebagai bentuk komitmen PLN untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah B3 yang dihasilkan, maka PLN berinisiatif melakukan beberapa program Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) di beberapa unit pembangkit listrik. Berikut ini merupakan uraian pelaksanaan PLB3 yang berdampak pada pengurangan limbah B3 secara signifikan selama tahun 2021 di 3 (tiga) unit sebagai contoh dari beberapa unit yang mendapatkan predikat Proper Hijau dan Emas pada pembangkit PLN:

1. PLTU Tanjung Jati B
   Beberapa program PLB3 yang dilakukan antara lain pengurangan limbah Ash dengan metode *coal blending*, pengurangan limbah *gypsum* dengan modifikasi pipa oxidation air blower pada FGD, dan pemanfaatan limbah gypsum sebagai produk bahan baku industri.
2. PLTU Indramayu
   Beberapa program PLB3 yang dilakukan antara lain *Tuning Nozzle Boiler*, pemanfaatan FABA sebagai bahan dasar semen, dan purifier minyak pelumas.
3. PLTU 2 Banten Labuan
   Beberapa program PLB3 yang dilakukan antara lain blending batu bara LRC (*Low Rank Coal*) dengan batu bara MRC (*Middle Rank Coal*), pengurangan timbulan limbah FABA dengan pengaturan udara pembakaran di *boiler*, dan pembuatan batako, *paving block*, *ready mix* dari limbah FABA.

Pengelolaan Limbah Non-B3

Pengelolaan limbah padat non-B3 atau sampah domestik dilakukan dengan menerapkan program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di berbagai unit-unit pembangkit kelolaan. Pelaksanaan program 3R tersebut selaras dengan tema Deklarasi KLHK pada Hari Lingkungan Hidup Tahun 2018, yaitu "*Beat Plastic Pollution* (Kendalikan Sampah Plastik)". Pada tahun 2021, PLN menghasilkan limbah padat non-B3 (sampah organik dan non-organik) dari unit yang mendapatkan Proper Hijau dan Emas sebanyak 2.106,75 ton, di mana sebanyak 445,04 ton atau 19,54% dari total limbah padat non-B3 telah didaur ulang dan 205,05 ton atau 9,00% dari total limbah padat non-B3 dimanfaatkan sebagai kompos.

expired chemicals. In managing B3 waste, all units have temporary storage permits, with some even already have their own landfill and utilization permits. In addition to our own utilization efforts, we collaborate with licensed third parties.

As PLN's commitment to prevent the environmental pollution and damage due to the B3 waste, PLN has an initiative to carry out several programs for B3 Waste Management (PLB3) in several power plant units. The following is an explanation of the PLB3 implementation that has an impact of reducing B3 waste significantly during 2021 in 3 (three) units as the example of several units obtaining the predicate of Proper Green and Gold in PLN's power plants:

1. PLTU Tanjung Jati B
   Several PLB3 programs performed were, among others, reduction of Ash waste with coal blending method, reduction of gypsum waste by modification of oxidation air blower pipe in FGD, and utilization of gypsum waste as industrial raw material.
2. PLTU Indramayu
   Several PLB3 program performed included Tuning Nozzle Boiler, utilization of FABA as the cement raw materials, and purifier of lubricant oil.
3. PLTU 2 Banten Labuan
   Several PLB3 programs carried out were blending of LRC (Low Rank Coal) with MRC (Middle Rank Coal), reduction of FABA waste output by combustion air setting in the boiler and production of concrete brick, paving blocks, and ready mix from FABA waste.

Non-B3 Waste Management

Non-B3 solid waste management or domestic waste is done by implementing the 3R program (Reuse, Reduce, Recycle) in the generating units managed. The implementation of 3R program is in line with the theme of the KLHK Declaration on Environment Day 2018, namely "Beat Plastic Pollution". In 2021, PLN produced 2,106.75 ton of solid non-B3 waste (organic and non-organic trash) from the units obtaining the predicate of Proper Green and Gold, where 445.04 ton or 19.54% of the total solid non-B3 waste had been recycled and 205.05 ton or 9.00% of the total solid non-B3 waste was used as compost.

PLN juga berinisiatif melakukan beberapa program Pengelolaan Limbah Non-B3 di beberapa unit pembangkit listrik dalam rangka mengurangi jumlah limbah non-B3 yang dihasilkan. Berikut ini merupakan uraian pelaksanaan Pengelolaan Limbah Non-B3 yang berdampak pada pengurangan limbah non-B3 secara signifikan selama tahun 2021 di 3 (tiga) unit sebagai contoh dari beberapa unit yang mendapatkan predikat Proper Hijau dan Emas pada:

1. PLTU Gresik
   Beberapa program Pengelolaan Limbah Non-B3 yang dilakukan antara lain pemanfaatan sampah daun untuk kompos dan sampah organik selain daun untuk dijadikan campuran kompos serta pengurangan kertas dengan penerapan sistem Paperless.
2. PLTU Suralaya 1-7
   Beberapa program Pengelolaan Limbah Non-B3 yang dilakukan antara lain BOY-SLA (*Black Soldier Fly*-Suralaya), pengurangan Timbulan Sampah dengan Pola POP-J, dan composting sampah organik.
3. PLTU Tanjung Jati B
   Beberapa program Pengelolaan Limbah Non-B3 yang dilakukan antara lain PaTen, *Woodniture*: *Wood for Future*, dan JALADARA. Dari pelaksanaan inisiatif tersebut, PLTU Tanjung Jati B mampu mengurangi jumlah limbah non-B3 sebanyak 76,28 ton.

Sebagai catatan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran XIV yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021, jenis limbah *Fly Ash & Bottom Ash* (FABA) telah berubah menjadi kategori limbah Non-B3. Dengan dihapusnya FABA dari daftar limbah B3, membuka peluang pemanfaatan FABA yang lebih luas. Di antaranya dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku batako, *paving block*, pagar panel, beton dan *road base*.

Mekanisme Pengaduan Masalah terkait Lingkungan Hidup

PLN membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan pengaduan terkait masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong praktik terbaik dalam mengelola lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan terkait lingkungan hidup yang berlaku. Adapun mekanisme pelaporan pengaduan masalah terkait lingkungan hidup dapat dilakukan melalui surat resmi kepada PT PLN (Persero) yang ditujukan kepada pimpinan Unit terkait atau melalui media *Whistle Blowing System* (WBS).

PLN also has the initiatives to carry out several Non-B3 Waste Management programs in some generating units in order to reduce the amount of non-B3 waste produced. The following is an explanation of the implementation of Non-B3 Waste Management that has an impact of reducing the non-B3 waste significantly during 2021 in 3 (three) units as the example of several units obtaining the predicate of Proper Green and Gold:

1. PLTU Gresik
   Several Non-B3 Waste Management programs performed are utilization of leaf litter for compost and organic trash other than leaves for compost mix, as well as reduction of paper usage by adopting paperless system.
2. PLTU Suralaya 1-7
   Several Non-B3 Waste Management programs performed are BOY-SLA (Black Soldier Fly-Suralaya), Reduction of Waste Output by POP-J pattern, and organic waste composting.
3. PLTU Tanjung Jati B
   Several Non-B3 Waste Management programs performed are PaTen, Woodniture: Wood for Future, and JALADARA. From the implementation of such intiatives, PLTU Tanjung Jati B was able to reduce 76.28 ton of the total non-B3 waste.

As a note, based on the Government Regulation Number 22 of 2021 on Implementation of Protection and Management of Environment Attachment XIV, which has been effective since February 2, 2021, the Fly Ash & Bottom Ash (FABA) has been categorized as non-B3 waste. With the removal of FABA from the list of B3 waste, it opens up opportunities for wider use of FABA. Some of them can be used as raw materials for brick, paving blocks, fence panels, concrete and road bases.

Mechanism of Complaints Related to Environment

PLN provides opportunities for the stakeholders to report any complaints related to environment, which occurs from the Company's operational activities. This is conducted in order to encourage the best practices in managing environment and compliance with the prevailing regulations related to environment. The complaint reporting mechanism problems related to the environment can be done through official letter to PT PLN (Persero) addressed to Head of related Unit or through Whistle Blowing media Systems (WBS).

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Layanan *Carbon Offset*

Pada tanggal 11 Januari 2021, telah dilaksanakan *Virtual Ceremony of Carbon Credit Issuance*, di mana PLN kembali mendapatkan sertifikat penurunan emisi (*carbon credit*) sejumlah 1,2 juta ton CO_2 ekuivalen yang dihasilkan dari PLTA Renun, PLTA Musi, dan PLTA Sipansihaporas melalui mekanisme *Verified Carbon Standard* (VCS). Pencapaian ini menjadikan PLN sebagai *benchmark* bagi perusahaan energi di Indonesia terkait pengelolaan kredit karbon.

PLN telah mempromosikan program *carbon offset* yang merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus salah satu sumber *beyond kWh revenue*. Penjualan *carbon credit* dilakukan baik kepada perorangan maupun perusahaan. Adapun pendapatan dari penjualan kredit karbon pada tahun 2021 mencapai 2,1 miliar.

Partisipasi dalam Uji Coba Sistem Perdagangan Emisi

Melalui Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) 2021, PLN berpartisipasi pada ajang penghargaan tersebut dan turut melakukan uji coba perdagangan kuota emisi. Uji coba ini dilaksanakan oleh PLTU PLN Group dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan *cap and trade* yang ditetapkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral RI. Tercatat sebesar lebih dari dari 42 (empat puluh dua) ribu ton karbon telah ditransaksikan oleh 26 PLTU tersebut pada uji coba yang telah dilakukan oleh PLN Grup. Jumlah tersebut dapat dikatakan cukup baik dan melebihi ekspektasi karena pada Semester sebelumnya, Divisi K3L hanya memprioritaskan keikutsertaan oleh PLTU yang telah mendapatkan predikat PROPER *Beyond Compliance*.

Penghargaan di Bidang Lingkungan

Pada tahun 2021, sebanyak 96 unit pembangkit listrik PLN dan Anah Perusahaan berhasil meraih Penghargaan PROPER *Compliance* (PROPER Biru) dan 28 pembangkit listrik PLN dan Anak Perusahaan berhasil meraih Penghargaan PROPER *Beyond Compliance* (PROPER Hijau dan Emas).

Pada pengumuman PSBE tahun 2021 yang diselenggarakan tanggal 28 September 2021, PLN Grup berhasil meraih juara 1 untuk empat dari lima kategori penghargaan dengan total sembilan unit PLTU PLN Grup berhasil meraih penghargaan, dengan uraian sebagai berikut:

ACHIEVEMENT OF CORPORATE RESPONSIBILITIES IN ENVIRONMENT

Carbon Offset Service

On January 11, 2021, the Virtual Ceremony of Carbon Credit Issuance was carried out, where PLN again received the carbon credit of 1.2 million ton CO2, which is equivalent to the production of PLTA Renun, PLTA Musi, and PLTA Sipansihaporas through the mechanism of Verified Carbon Standard (VCS). This achievement has made PLN as the benchmark of energy company in Indonesia related to the credit carbon management.

PLN has promoted the carbon offset program, which is an effort to mitigate the climate change and a source of the beyond kWh revenue. Carbon credit sales is carried out to individuals and companies. The revenue from the carbon credit sales in 2021 reached 2.1 billion.

Participation in Trial of Emission Trading System

Through the 2021 Subroto Award in Energy Efficiency (PSBE), PLN participated in the event and also carried out the trial of emission quota trading. The trial was conducted by PLTU of PLN Group with the mechanism referring to the cap and trade determined by the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. There was a total of more than 42 (forty two) thousand ton of carbon traded by 26 PLTU during the trial carried out by PLN Group. Such amount can be considered good and beyond expectation because in the previous semester, the K3L Division only prioritize the participation of PLTU that has obtained the PROPER Beyond Compliance.

Awards in Environmental Field

In 2021, there were 96 PLN's power plant units and subsidiaries succeeded to obtain the PROPER Compliance Award (PROPER Blue) and 28 PLN's power plants and subsidiaries succeeded to obtain PROPER Beyond Compliance Award (PROPER Green and Gold).

During the announcement of 2021 PSBE held on September 28, 2021, PLN Group won the first place for four of five award categories with the total nine PLTU units of PLN Group succeeded to obtain awards, with the explanation as follows:

Kategori Penurunan & Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik / *Category of Emission Reduction & Trading in Power Plant Sector*	Penghargaan / *Award*	Unit Peraih Penghargaan / *Units Receiving the Award*
Seller untuk PLTU Non MT >400 MW / Seller for PLTU Non MT >400 MW	Juara 1 / 1st Position	PLTU Tanjung Jati B Unit 4
Seller untuk PLTU Non MT 100-400 MW / Seller for PLTU Non MT 100-400 MW	Juara 1 / 1st Position	PLTU Labuan Unit 1
	Juara 2 / 2nd Position	PLTU Suralaya Unit 2
	Juara 3 / 3rd Position	PLTU Paiton Unit 2
Buyer untuk PLTU Non MT >400 MW / Buyer for PLTU Non MT >400 MW	Juara 1 / 1st Position	PLTU Jawa Tengah 2 Adipala
	Juara 2 / 2nd Position	PLTU Suralaya Unit 8
Buyer untuk PLTU Non MT 100-400 MW / Buyer for PLTU Non MT 100-400 MW	Juara 1 / 1st Position	PLTU Pelabuhan Ratu Unit 2
	Juara 2 / 2nd Position	PLTU Tanjung Awar-awar Unit 2
		PLTU Banten 3 Lontar Unit 1

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan terkait Pengelolaan Ketenagakerjaan

Bagi PLN, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting bagi Perusahaan yang memiliki peranan strategis dalam menggerakkan roda operasional demi mendorong tercapainya target dan rencana kerja serta visi dan misi Perusahaan. Dengan semangat perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan saat ini dan masa yang akan datang, serta dalam rangka pelaksanaan program transformasi "*Power Beyond Generations*" sebagai *strategic enabler*, PLN melakukan Transformasi *Human Capital*.

Semangat PLN adalah untuk melakukan transformasi pengelolaan *Human Capital*, dengan melakukan perubahan sistem manajemen sumber daya saat ini. Sistem manajemen sumber daya manusia eksisting di PLN menerapkan pendekatan *Human Capital Management System* (HCMS) yang bercirikan kompetitif, adil dan transparan, sebagai alat untuk menjalankan program pengembangan SDM agar menjadi insan-insan profesional, berkompeten dan berintegritas tinggi guna mendukung strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Perseroan dengan internalisasi tata nilai dan budaya perusahaan.

HCMS memiliki 7 pilar, yaitu:
1. Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja
2. Sistem Rekrutmen Pegawai
3. Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karier Pegawai

CORPORATE RESPONSIBILITIES IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

EMPLOYMENT

The Company's Commitment and Policy related to Employment Management

For PLN, the human capital (HC) is an important asset for the Company that has strategic role in driving the operational in order to support the achievement of target and work plan as well as the Company's vision and mission. With the enthusiasm to change in order to adjust with the current and future needs and challenges, as well as in the event of transformation program of "Power Beyond Generations" as the strategic enabler, PLN carries out Human Capital Transformation.

PLN's spirit is to transform Human Capital management by changing the current resource management system. The existing human resource management system at PLN applies the Human Capital Management System (HCMS) approach, which is characterized by being competitive, fair and transparent, as a tool to carry out HR development programs to become professional, competent, and high-integrity individuals to support short-term, medium-term, and long term strategies of the Company by internalizing corporate values and culture.

HCMS has 7 pillars, which are:
1. Organizational Development and Manpower Planning System
2. Employee Recruitment System
3. Employee Competence and Career Development System

4. Sistem Pembelajaran Pegawai
5. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
6. Sistem Penghargaan Pegawai
7. Sistem Hubungan Industrial

Ke depannya melalui program transformasi *Human Capital* PLN berupaya untuk mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang baru yang menerapkan pendekatan *Human Experience Management System* (HXMS) yang merupakan sistem manajemen sumber daya manusia yang berbasis pengalaman. HXMS memiliki 4 pilar utama, yang disingkat sebagai 4R yaitu:

i) Right Size
ii) Right Skill
iii) Right Spend
iv) Right System

Program Keseimbangan Hidup

PLN berkomitmen menciptakan dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pekerjaan penyediaan tenaga listrik dan kehidupan di luar pekerjaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan spiritual, fisik, dan mental pegawai. Untuk mendukung hal tersebut PLN menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 0170.P/DIR/2021 tentang Program Keseimbangan Hidup di Lingkungan PT PLN (Persero).

Maksud dari penerbitan peraturan tersebut adalah sebagai pedoman penyelenggaraan program keseimbangan hidup di lingkungan PLN. Selain untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan di luar pekerjaan, peraturan tersebut juga bertujuan untuk menjalin kebersamaan dan keakraban antar pegawai; menjadi media ekspresi dan menggali potensi minat dan bakat pegawai; serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berdampak pada peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai.

Kebijakan *Hybrid Working*

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 sampai dengan saat ini membawa perubahan dalam pengaturan lokasi bekerja baik dari kantor (*Work From Office*) dan dari rumah (*Work From Home*). Untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual tersebut, maka PLN menganggap perlunya disiapkan kebijakan yang dapat memelihara *wellbeing*/ kesejahteraan pegawai yang dapat meningkatkan keterikatan kerja dan performansi pegawai yang berdampak pada produktivitas melalui kebijakan *hybrid working*.

4. Employee Learning System
5. Employee Performance Management System
6. Employee Reward System
7. Industrial Relations System

In the future, through the Human Capital transformation program, PLN seeks to develop a new human resource management system that applies the Human Experience Management System (HXMS) approach, which is an experience-based human resource management system. HXMS has 4 main pillars, which are abbreviated as 4Rs, namely:

i) Right Size
ii) Right Skill
iii) Right Spend
iv) Right System

Life Balance Program

PLN is committed to creating and maintaining a balance between the work life of providing electricity and the life outside of work in the form of improving the spiritual, physical, and mental well-being of employees. To support this, PLN has issued Regulation of the Board of Directors No. 0170.P/DIR/2021 on Life Balance Program within PT PLN (Persero).

The purpose of the issuance of these regulations is as a guideline for the implementation of life balance program within PLN. In addition to creating a balance between the work life and the life outside of work, the regulation also aims to establish togetherness and intimacy between employees; to become a medium of expression and to explore the potential interests and talents of employees; as well as to increase transparency and accountability in the use of the budget, which has an impact on improving employee performance and productivity.

Hybrid Working Policy

The COVID-19 pandemic that has lasted since 2020 has brought about changes in the arrangement of work locations both from the office (WFO) and from home (WFH). To adjust to these actual conditions, PLN considers it is necessary to prepare policies that can maintain employee well-being/ welfare that can increase work engagement and employee performance, which have an impact on productivity through a hybrid working policy.

Sejak awal Pandemi Covid-19 sampai saat ini Pegawai telah beradaptasi terhadap cara bekerja yang baru, sehingga PLN memandang perlunya ditetapkan pengaturan cara bekerja yang seterusnya digunakan untuk menjaga motivasi pegawai dalam berkontribusi.

Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan panduan yang jelas kepada pegawai terkait pengaturan kerja sehingga dapat meningkatkan kepuasan pegawai; Sebagai upaya dalam meningkatkan *employee wellbeing* (kesejahteraan pegawai) dengan salah satunya memberikan fleksibilitas pegawai dalam menentukan lokasi dan waktu bekerja dan memberikan pengalaman positif kepada pegawai terkait dengan kondisi kerja sehingga dapat meningkatkan keterikatan kerja dan produktivitas pegawai.

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan

Lingkup dari pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di bidang ketenagakerjaan mencakup 7 pilar dalam HCMS, yaitu sistem pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen pegawai, sistem pembinaan kompetensi dan karier pegawai, sistem pembelajaran pegawai, sistem manajemen kinerja pegawai, sistem penghargaan pegawai, dan sistem hubungan industrial.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan

1. Rekrutmen pegawai baru jenjang sarjana dan diploma;
2. Diklat bagi pegawai dari beberapa level jabatan;
3. Pencapaian *Organizational Health Index*, *Human Capital Readiness*, *Organizational Capital Readiness* dan *Talent Poll serta Talent Mobility*.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Sistem Rekrutmen Karyawan

Rekrutmen adalah proses mencari, mengidentifikasi, mengangkat sejumlah orang, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal Perseroan dan menempatkannya pada FJ dengan ketentuan sesuai syarat kompetensi jabatan serta kebutuhan FTK yang telah ditetapkan berdasarkan proses perencanaan sumber daya manusia di Perseroan

Since the beginning of the COVID-19 Pandemic, employees have adapted to new ways of working, so PLN sees the need to set up work arrangements which are then used to maintain employee motivation in contributing to the Company.

The purpose of this policy is to provide clear guidance to employees regarding work arrangements so as to increase employee satisfaction; As an effort to improve employee wellbeing, one of which is providing employee flexibility in determining the location and time of work and providing positive experiences for employees related to working conditions so as to increase work engagement and employee productivity.

Scope of Implementation of Corporate Responsibility Activities in Employment

The scope of implementation of corporate responsibility activities in employment covers 7 pillars in HCMS, which are organizational development and labor planning system, employee recruitment system, employee competence and career development system, employee learning system, employee performance management system, employee reward system, and industrial relations system.

Plans for the Implementation of Corporate Responsibility Activities in Employment

1. Recruitment of new employees with bachelor's degree and diploma degree;
2. Education and training for employees at several levels of position;
3. Achievement of Organizational Health Index, Human Capital Readiness, Organizational Capital Readiness, and Talent Poll and Talent Mobility.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN EMPLOYMENT

Employee Recruitment System

Recruitment is a process of searching for, identifying, appointing a number of people, both from the Company's internal and external sources, and designating them in FJ in accordance with the requirements of position competence and FTK needs that have been determined based on human capital planning process in the Company (Decree of the

(SK DIR PT PLN (Persero) Nomor: 264.K/DIR/2008 Tentang Sistem Rekrutmen). Upaya PT PLN (Persero) dalam menarik talenta yang tepat tidak lepas dari perencanaan sumber rekrutmen. Adapun sumber rekrutmen calon pegawai terbagi dalam dua jenis yakni:

- **Rekrutmen Umum**
  Rekrutmen umum diumumkan secara terbuka bagi lulusan Lembaga Pendidikan, pasar tenaga kerja dan Institusi lain melalui *website* rekrutmen (rekrutmen.pln.co.id), website korporat, informasi pada *Job fair*, surel dan lainnya yang dianggap sesuai serta dapat dengan mudah diakses masyarakat luas.

- **Rekrutmen Khusus**
  Rekrutmen khusus diumumkan secara terbatas bagi lulusan Lembaga Pendidikan, pasar Tenaga Kerja dan Institusi lain yang dituju, melalui penawaran langsung atau kerjasama dengan Lembaga Pendidikan tertentu, pasar tenaga kerja dan institusi lain yang dituju. Adapun jenis Rekrutmen khusus antara lain:
  a. Direct *Shopping;*
  b. Program Rekrutmen Diaspora;
  c. Program Rekrutmen Difabel;
  d. Program Rekrutmen Bersama BUMN;
  e. Program Rekrutmen PDKB;
  f. Program Rekrutmen Afirmasi;
  g. Program Rekrutmen Kelas Kerjasama;
  h. Program Rekrutmen *Pro Hire;*
  i. Program Beasiswa Ikatan Dinas;
  j. Program Rekrutmen Magang Bersertifikat.

Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 264.K/DIR/2008 on Recruitment System). The effort of PT PLN (Persero) in recruiting the appropriate talents is related to the recruitment source planning. There are two types of recruitment sources for employee candidates:

- **General Recruitment**
  General recruitment is announced openly for graduates of educational institutions, labor market, and other institutions through the recruitment website (rekrutmen.pln.co.id), corporate website, information at job fair, emails, and others considered appropriate and can be accessed easily by public.

- **Special Recruitment**
  Special recruitment is announced limitedly for educational institutions, labor market, and other institutions intended through direct offering or cooperation with specific educational institutions, labor market, and other institutions intended. The types of special recruitment include:
  a. Direct Shopping
  b. Diaspora Recruitment Program
  c. Disabled Recruitment Program
  d. SOEs Joint Recruitment Program
  e. PDKB Recruitment Program
  f. Affirmation Recruitment Program
  g. Cooperation Class Recruitment Program
  h. Pro Hire Recruitment Program
  i. Scholarship Program with Service Bond
  j. Certified Apprentice Recruitment Program

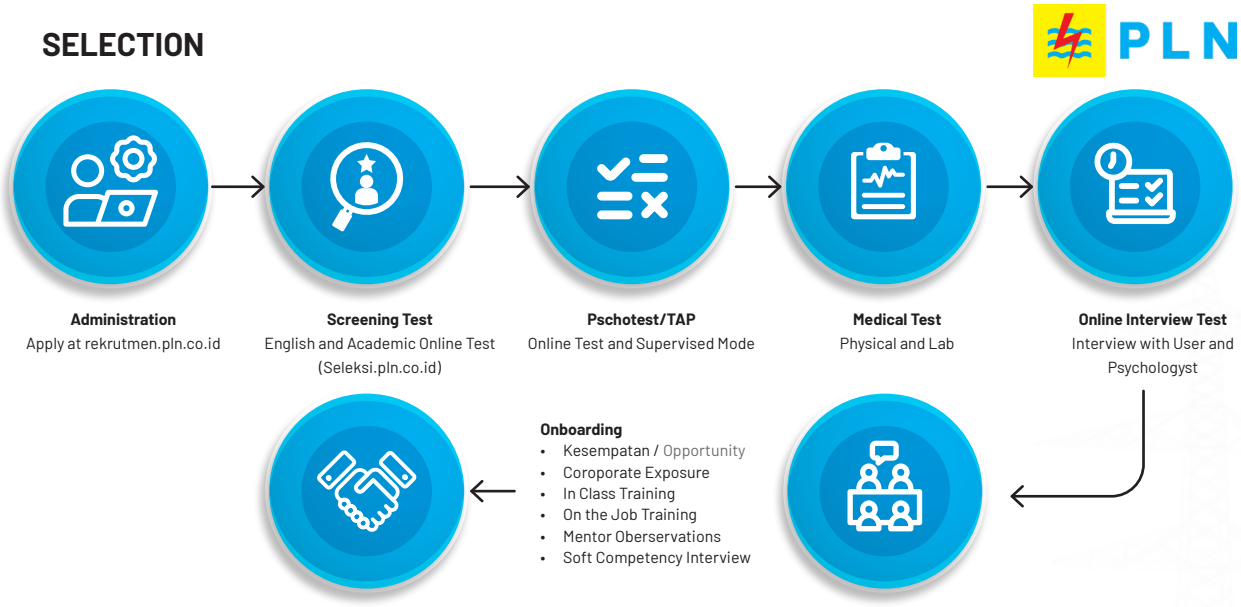

Program Pengembangan Kompetensi

PLN menyediakan berbagai program pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi *human capital* dalam menjalani tugas dan pekerjaannya yang diharapkan mampu memberikan *sustainable revenue* bagi PLN di masa mendatang. PLN menyadari semakin mudah bagi PLN untuk menghasilkan inovasi dan keunggulan kompetitif di industrinya apabila ditunjang oleh kualitas dan tingkat pengetahuan individu yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan organisasi. Penyediaan program pengembangan kompetensi tersebut merupakan realisasi komitmen PLN dalam mewujudkan pegawai PLN sebagai modal manusia (*human capital*) yang memiliki kombinasi pengetahuan, keterampilan, gagasan, inovasi, energi dan komitmen untuk memberikan kontribusi kinerja bagi kemajuan perusahaan.

Competence Development Program

PLN provides various continuous competency development programs to generate added value for human capital in carrying out their duties and work, which are expected to produce sustainable revenue for PLN in the future. PLN is aware that it is easier for PLN to develop innovation and competitive advantage in its industry if it is supported by high quality and level of individual knowledge so as to increase the organizational knowledge. The provision of the competency development program is a realization of PLN's commitment upon its employees to be human capital who has a combination of knowledge, skills, ideas, innovation, energy, and commitment to contributing to the Company's progress.

Sistem pembelajaran yang dikembangkan PLN adalah berjenjang dengan mengacu kepada kebutuhan organisasi. Jenis pelatihan PLN terbagi atas beberapa jenjang mulai dari pelatihan khusus operasional hingga pelatihan manajerial. Program pendidikan dan pelatihan meliputi seminar dan kursus yang dilaksanakan baik di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan meliputi:

The learning system developed by PLN is tiered with reference to the needs of the organization. The training type is divided into several levels ranging from special operational training to managerial training. Education and training programs consist of seminars and courses that are held both at home and abroad to improve employee competence. The types of education and training include:

Diklat Prajabatan / *Pre-service Training*	Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Prajabatan adalah syarat bagi calon pegawai untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Secara umum, diklat bertujuan untuk mempersiapkan kompetensi pesertanya agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan di PLN, sehingga mampu menjadi pegawai yang siap bekerja. / Pre-service education and training is a requirement for prospective employees to be appointed as employees permanent. In general, the education and training aims to prepare the participants' competencies to suit their needs competency requirements for positions at PLN, so that they are able to become employees who are ready to work.
Diklat Profesi / *Professional Training*	Diklat yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada setiap jabatan dan profesi di PLN. / Training that aims to meet the field competencies required for each position and profession at PLN.
Diklat Penjenjangan / *Leveling Training*	Diklat yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi peran, termasuk kompetensi utama dan kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada setiap jenjang jabatan struktural dan fungsional di PLN. / Training that aims to fulfill role competencies, including key competencies and field competencies required at every level of structural and functional positions at PLN.
Diklat Penunjang / *Supporting Training*	Diklat yang bertujuan untuk memenuhi prasyarat pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan Perusahaan, di luar Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi dan Program Pembelajaran Kepemimpinan. Pengembangan *hard competency* pegawai dilakukan melalui sertifikasi, pembelajaran, dan penugasan yang dilaksanakan dalam mekanisme program HCR (*Human Capital Readiness*). / Education and training that aims to meet the educational and training prerequisites needed by the Company, in outside the Professional Learning and Certification Program and the Leadership Learning Program. Development employee hard competency is carried out through certification, learning, and assignments carried out in mechanism of the HCR (Human Capital Readiness) program.
Diklat Purnabakti / *Retirement Training*	Diklat yang bertujuan memberikan pembekalan *soft competency* terkait sikap, mental dan perilaku pegawai yang akan pensiun agar siap mengisi masa purna bakti dengan kegiatan yang bermanfaat. Program yang ditawarkan terdiri dari program reguler berupa pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta program Alternatif, yaitu: Sertifikasi Asesor dan Kerohanian. / Training that aims to provide soft competency training related to the attitudes, mentality and behavior of employees who are will retire so that they are ready to fill their retirement period with useful activities. Programs offered consists of regular programs in the form of entrepreneurship training, as well as alternative programs, namely: Assessor and Spirituality Certification.
Diklat Strategis / *Strategic Training*	Diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja unit/ korporat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. / Training that aims to improve unit/corporate performance in the short and long term.

Di tahun 2021, jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan ada sebanyak 40.819 karyawan dengan rata-rata jam pelatihan adalah 18,49 jam per karyawan. Informasi detil terkait pendidikan dan pelatihan karyawan kami sampaikan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 pada Bab Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan-Kepegawaian.

In 2021, the number of employees participating in the training was 40,819 employees with an average training hour of 18.49 hours per employee. Detailed information regarding the education and training of our employees is presented in the 2021 Sustainability Report in the Social Performance Chapter Employement Aspect-Employee.

Selain dengan metode pembelajaran dengan pendidikan dan pelatihan, upaya Perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan juga dengan melaksanakan *knowledge management*.

In addition to learning methods with education and training, the Company's efforts to improve employee competence are also by implementing knowledge management.

Knowledge management telah menjadi salah satu budaya yang mengakar di PLN lewat berbagai kegiatan seperti *Community of Practice*, *Knowledge Sharing*, *Knowledge Capturing*. Implementasi *Knowledge Management* menjadi salah satu ukuran dalam indikator kinerja *Organisation Capital Readiness*, di mana akan berpengaruh pada penilaian kinerja semesteran bagi aspek *Teamwork* dan juga penilaian individu karyawan.

Knowledge management has become one of the cultures rooted in PLN through various activities such as Community of Practice, Knowledge Sharing, Knowledge Capturing. The implementation of Knowledge Management is one of the measures in the performance indicators of Organization Capital Readiness, which will affect the semester performance assessment for the Teamwork aspect as well as individual employee assessments.

Tingkat kematangan pelaksanaan kegiatan *Knowledge Management* diukur setiap tahun. Di tahun 2021, tingkat kematangan kegiatan *Knowledge Management* di PLN secara korporat adalah 4,45 (skala 5). Angka ini didapatkan dari perpaduan antara kematangan proses dan hasil dari kegiatan *Knowledge Management*.

The maturity level of the implementation of Knowledge Management activities is measured annually. In 2021, the maturity level of Knowledge Management activities at PLN corporately is 4.45 (scale 5). This figure is obtained from a combination of process maturity and results from Knowledge Management activities.

Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan kompetensi pegawai selain melalui diklat, dilakukan juga melalui lewat pelaksanaan *internship* (magang) pada perusahaan sejenis atau perusahaan mitra dengan realisasi jumlah pegawai yang melaksanakan *internship*/ magang di dalam negeri pada tahun 2021 adalah sebanyak 26 Orang.

Apart from the education and training, employee competence and insight development is also carried out through the implementation of internships at similar companies or partner companies. There were 26 employees who carried out domestic internships in 2021.

Pengembangan kompetensi juga dilaksanakan melalui program pemenuhan kandidat suksesor jabatan *technical expert* untuk setiap kebutuhan jabatan *technical expert* PLN dengan tujuan mendapatkan kandidat *expert* yang paling berkompeten untuk mengisi jabatan *technical expert* PLN dan realisasi untuk tahun 2021 adalah sebanyak 5 orang kandidat suksesor *expert* untuk setiap nomenklatur jabatan *expert* di COE.

Competency development is also conducted through a program to fulfill the candidate of technical expert successor for every need of a technical expert position at PLN with the aim of obtaining the most competent expert candidate to fill the technical expert position at PLN. There were 5 expert successor candidates for each expert position nomenclature at COE.

Pemenuhan *talent pool* dan *talent mobility* merupakan salah satu program pengembangan pegawai PLN, dalam rangka percepatan karier dan peningkatan akselerasi

Fulfillment of the talent pool and talent mobility is one of PLN's employee development programs. For accelerating careers and increasing the company's acceleration with

perusahaan dengan ide – ide kreatif dari *talent* perempuan pada tahun 2021 realisasi program pemenuhan jumlah *talent* perempuan dalam *nominated talent* adalah 16,7% dari total jumlah *nominated talent* dan untuk percepatan karier dan peningkatan akselerasi perusahaan dengan ide - ide kreatif dari *talent milenial* pada tahun 2021 realisasi program pemenuhan jumlah *talent milenial* dalam *top talent* adalah 52,4% dari total jumlah *top talent*.

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP)

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP) merupakan sistem manajemen strategis dan terpadu untuk menyelaraskan pencapaian kinerja pegawai terhadap sasaran kinerja korporat melalui optimalisasi SDM. SIMKP menjadi pedoman untuk mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan terukur.

SIMKP bertujuan untuk meningkatkan target kinerja PLN melalui peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mewujudkan pengukuran kinerja pegawai yang berkeadilan untuk membina budaya pembelajar dan berprestasi (*high performance culture*) serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.

Proses pelaksanaan SIMKP terbagi dalam 3 tahap:

1. Tahap perencanaan kinerja pegawai, yaitu tahap penyusunan sasaran kinerja pegawai yang dilakukan pada awal tahun untuk semester 1 dan 2. Sasaran kinerja disusun berdasarkan hasil *cascading Key Performance Indicators* (KPI) strategi organisasi ke dalam tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Tahap pemantauan kinerja pegawai, yaitu tahap pemantauan kinerja pegawai di mana atasan dan pegawai mengkomunikasikan aktivitas *monitoring* pencapaian KPI, CMC (*coaching, mentoring, counseling*), dan revisi sasaran kinerja pegawai.
3. Tahap evaluasi kinerja pegawai, yaitu tahap evaluasi yang dilakukan oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung terhadap sasaran kinerja pegawai (bawahan) termasuk program pengembangan diri pegawai dan pengukuran kompetensi individu pegawai (bawahan) dalam kurun waktu satu semester (6 bulan). Salah satu terobosan dalam pengelolaan SIMKP pada

creative ideas from female talents in 2021, the realization of female talent fulfillment program in nominated talent was 16.7% of the total nominated talent. Furthermore, for career acceleration and increasing the company's acceleration with creative ideas from millennial talent in 2021, the realization of the program to fulfill the number of millennial talents in top talent was 52.4% of the total number of top talents.

Employee Performance Management System (SIMKP)

Employee Performance Management System (SIMKP) is a strategic and integrated management system to align employees' performance achievement with corporate performance targets through HR optimization. SIMKP serves as a guideline for evaluating employee performance achievement in an objective, transparent, and measurable manner. SIMKP is stipulated in Regulation of Board of Directors No. 045.P/DIR/2017 on Employee Performance Management System (SIMKP).

SIMKP aims to increase PLN's performance targets by improving employee competence and performance, as well as realizing fair employee performance measurement to foster high performance culture and to motivate employees to improve their competence and performance.

SIMKP process is divided into 3 stages:

1. Employee performance planning stage, which is the stage of preparing employee performance targets at the beginning of the year for the first and second semesters. Performance targets are set by cascading Key Performance Indicators (KPI) of the organization's strategy into the main tasks and functions of the organization.
2. Employee performance monitoring stage, which is the stage where supervisors and employees communicate the monitoring of the KPI achievement, CMC (coaching, mentoring, counseling), and revision of employee performance targets.
3. Employee performance evaluation stage, which is the stage of evaluation by direct supervisors and/or supervisors of direct supervisors on employee (subordinate) performance targets, including employee self-development program and measurement of individual employee (subordinate) competence within one semester (6 months). A breakthrough in SIMKP

adalah upaya meningkatkan keselarasan antara KPI organisasi dengan KPI individu melalui standardisasi KPI individu berupa penyetaraan bobot KPI, standardisasi satuan KPI, standardisasi penetapan target dan standardisasi bobot pencapaian.

management was the effort to improve the harmony between organizational and individual KPI through standardization of individual KPI by equalizing KPI weights, standardizing KPI units, standardizing target setting, and standardizing achievement weights.

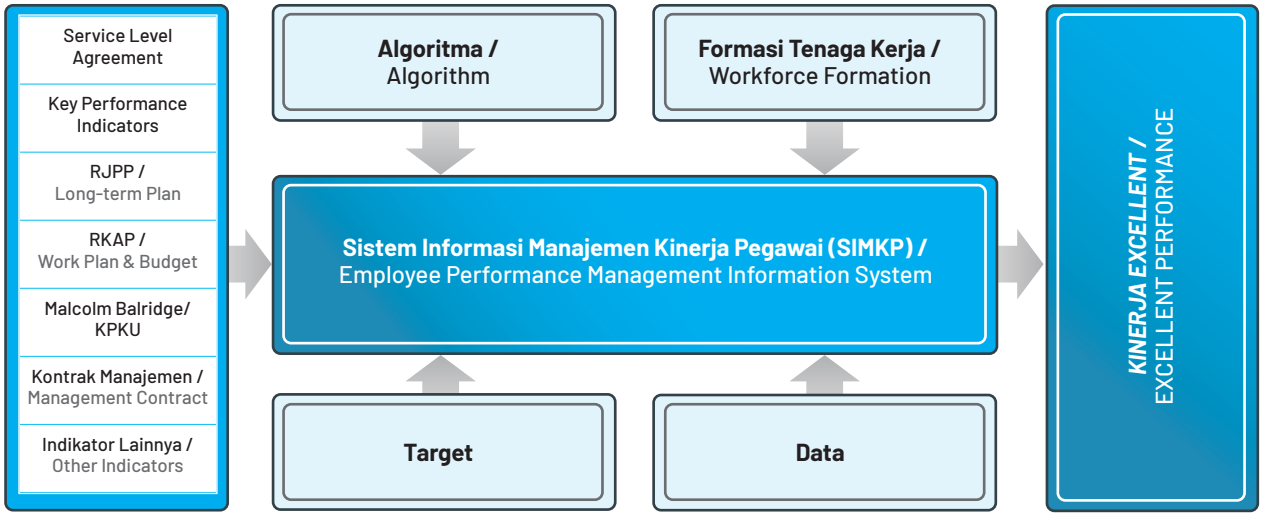

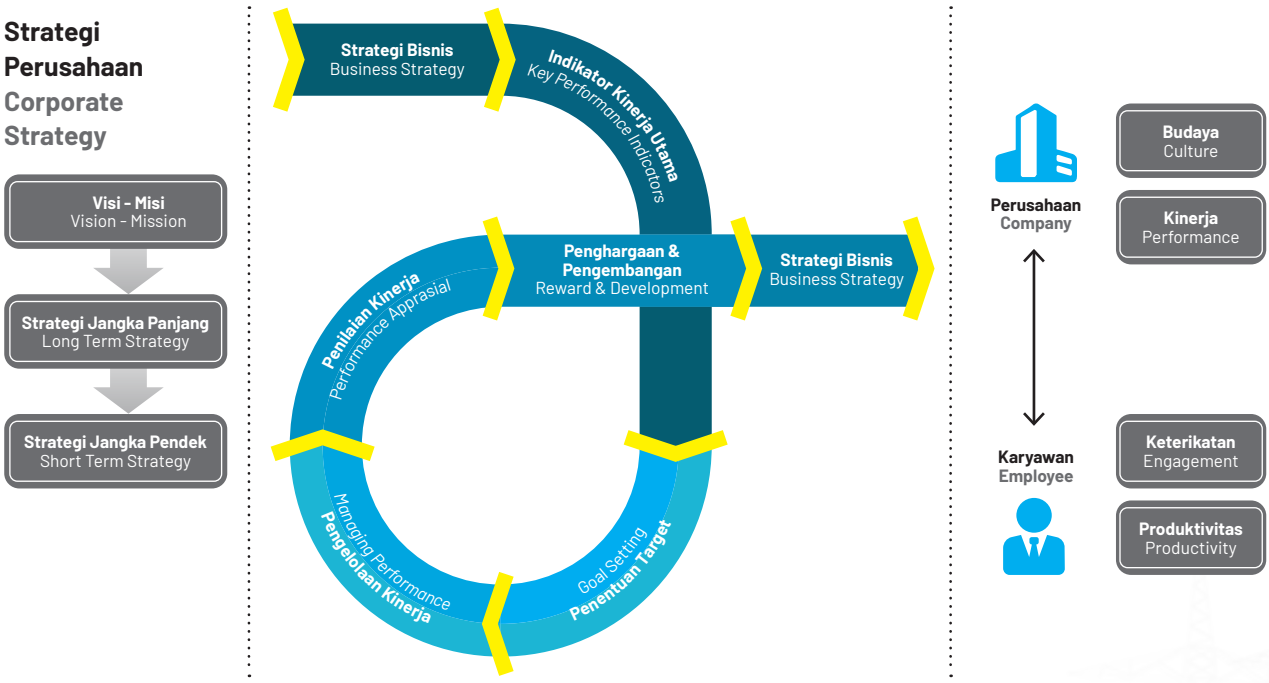

Kesejahteraan Pegawai

PLN memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai sebagai salah satu wujud komitmen Perseroan terhadap pegawai sebagai salah satu aset penting perusahaan yang harus dijaga. PLN menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja di mana besaran kompensasi

Employee Welfare

PLN pays attention to the employee welfare as a manifestation of the Company's commitment to employees as one of the Company's important assets that must be maintained. PLN applies performance-based remuneration system where the final compensation amount for an

final seorang pegawai mengacu pada pengukuran kinerja dengan memperhatikan beban kerja, tanggung jawab serta kinerja yang telah dicapai oleh pegawai tersebut. Dengan sistem ini, komposisi penghasilan total tahunan berdasarkan performansi individu pegawai akan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan tetap yang pasti didapatkan oleh pegawai tersebut (*fix annual cash*).

Komponen penghasilan pegawai terdiri dari P1 (*pay for person*) yaitu penghasilan tetap berdasarkan kompetensi, P2 (*pay for position*) yaitu tunjangan-tunjangan, dan P3+insentif kinerja perusahaan/IKP) yaitu penghasilan berbasis kinerja dan bonus. Sejak tahun 2014, komposisi P3+IKP secara bertahap semakin besar dan komponen penghasilan P1 dan P2 semakin kecil.

Pada tahun 2021, komposisi penghasilan P3+IKP naik jika dibanding tahun 2020, menjadi 50% dari jumlah penghasilan tahunan yang diterima pegawai karena strategi Perusahaan untuk menyesuaikan anggaran biaya pegawai di dalam RKAP yang sudah disetujui Kementerian BUMN.

Selain komponen P1, P2 dan P3, pegawai PLN mendapatkan remunerasi dan benefit lainnya seperti: tunjangan cuti, tunjangan hari raya, fasilitas kesehatan PLN, program jaminan sosial pegawai, kepesertaan pada BPJS Kesehatan, kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan serta kepesertaan dalam program pensiun yakni pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dari Dana Pensiun PLN (DP-PLN) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Kepesertaan Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

PLN telah mendaftarkan 42.602 pegawai (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) pada program JKN KIS BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021. Total besaran Iuran Pemberi Kerja yang dibayarkan PLN untuk program BPJS Kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp154,75 miliar. Sejak April 2018, Direksi dan Dewan Komisaris PLN telah terdaftar pada program BPJS Kesehatan dan sejak tahun 2019, pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris telah terdaftar 100% pada program JKN KIS dengan sertifikat kepesertaan Nomor: 02/SER/0907/0819.

employee refers to the performance measurement by taking into account workload, responsibilities, and performance achieved by the employee. With this system, composition of annual total income based on the individual employee performance is greater than the fixed annual payment.

Employee income composition consists of P1 (pay for person) representing the fixed income based on competence, P2 (pay for position) representing the allowances, and P3+corporate performance incentives/IKP representing the performance-based income and bonuses. Since 2014, the composition of P3+IKP has been gradually increasing while P1 and P2 components have been decreasing.

In 2021, the income composition of P3+IKP increased compared to that of 2020 to 50% of the total annual income received by employees due to the Company's strategy to adjust personnel cost budget in RKAP that was approved by the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).

In addition to P1, P2, and P3 components, PLN's employees obtain remuneration and other benefits, such as leave allowances, holiday allowances, PLN health facilities, employee social security programs, BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan membership, as well as participation in pension program, namely Pay-As-You-Go Pension Plan (PPMP) provided by PLN Pension Fund (DP-PLN) and Fully-Funded Pension Plan (PPIP) provided by Financial Institution Pension Fund (DPLK).

Participation in National Health Insurance Program

The Company registered 42,602 employees (including Board of Directors and Board of Commissioners) for the JKN KIS program of BPJS Kesehatan as of December 31, 2021. The total employer contribution paid by PLN for BPJS Kesehatan program in 2021 was Rp154.75 billion. Since April 2018, the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN have been registered for the BPJS Kesehatan program and since 2019, all employees, Board of Directors, and Board of Commissioners have been 100% registered for the JKN KIS program with a certificate of participation No. 02/SER/0907/0819.

Kepesertaan Pada Program Jaminan Ketenagakerjaan

PLN telah mendaftarkan seluruh pegawai pada Program jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dengan sertifikat kepesertaan Nomor: 1000000005922. Sejak Maret 2018, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah terdaftar pada program jaminan ketenagakerjaan dengan sertifikat kepesertaan Nomor: 180000000407008. Jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 42.712 yang terdiri dari seluruh pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dengan total luran Pemberi Kerja yang dibayarkan untuk program BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 sebesar Rp699,61 miliar sampai dengan 31 Desember 2021.

Pengelolaan Hubungan Industrial

PLN membangun hubungan industrial yang harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan industrial di PLN dilaksanakan melalui sarana serikat pekerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama Bipartit, Pembinaan Hubungan Industrial, dan Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai.

Serikat Pekerja

Penjelasan mengenai pembentukan Serikat Pekerja di lingkungan PLN telah diuraikan pada bahasan Penjaminan Kebebasan Bersetikat.

Perjanjian Kerja Bersama

Sehubungan dengan rencana perundingan pembaruan PKB, pada tahun 2021 manajemen telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan draf PKB PT PLN (Persero) periode 2021-2023.
2. Manajemen telah meminta kepada SP PLN dan Laskar PLN sebagai serikat pekerja yang berhak berunding sesuai dengan hasil verifikasi untuk segera mengirimkan nama tim perunding dan *draft* PKB gabungan sebagai upaya untuk melanjutkan perundingan pembaruan PKB 2021-2023.
3. Manajemen telah mengadakan 3 kali pertemuan antara Manajemen dengan SP PLN dan Laskar PLN untuk menentukan sikap masing-masing pihak dalam persiapan perundingan PKB karena adanya perbedaan pendapat mengenai serikat pekerja yang berhak berunding PKB dengan Manajemen.

Participation in Employment Insurance Program

PLN registered all employees for the Employment Insurance Program organized by BPJS Ketenagakerjaan, which covers Occupational Accident Insurance (JKK), Life Insurance (JKM), Old Age Insurance (JHT) and Pension Insurance (JP) with membership certificate No. 1000000005922. Since March 2018, all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company have been registered for the Employment Insurance Program with membership certificate No. 180000000407008. There were 42,712 registered participants as of December 31, 2021 consisting of all employees, Board of Directors, and Board of Commissioners with the total Employer Contribution paid for the BPJS Ketenagakerjaan program in 2021 amounting to Rp699.61 billion as of December 31, 2021.

Industrial Relation Management

PLN develops harmonious industrial relations in accordance with the laws and regulations in the manpower sector. Industrial relations at PLN are carried out through the means of labor union, Collective Labor Agreements (CLA), Bipartite Cooperation Agency, Development of Industrial Relations, and Enforcement of Employee Discipline Regulations.

Labor Union

Explanation of the formation of Trade Unions in PLN's environment has been described in the Guarantee Freedom of Association.

Collective Labor Agreements

In connection with the plan of CLA renewal negotiation, in 2021, the management conducted the following:

1. Preparing the CLA draft of PT PLN (Persero) for the period of 2021-2023.
2. Management has requested SP PLN and Laskar PLN as the labor unions that have the right to negotiate in accordance with the verification results to immediately send the name of the negotiating team and the joint CLA draft as an effort to continue the negotiations for the renewal of the 2021-2023 CLA.
3. Management has held 3 meetings with SP PLN and Laskar PLN to determine the attitude of each party in the preparation of CLA negotiations due to differences of opinion regarding the unions that have the right to negotiate CLA with Management.

4. Manajemen memutuskan Manajemen memutuskan untuk menempuh langkah-langkah sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan segera meminta Perundingan Bipartit kepada SP PLN karena tidak ada kesepakatan mengenai serikat pekerja yang berhak berunding PKB dengan Manajemen.
   a. Perundingan Bipartit antara Manajemen dan SP PLN telah dilakukan 2 (dua) kali namun tidak tercapai kesepakatan sehingga akhirnya kedua pihak sepakat untuk melanjutkan ke tahap Mediasi.
   b. PLN telah mencatatkan perselisihan ke Kemnaker RI sesuai Surat EVP HSC No. Surat EVP HSC No. 51013/SDM.12.01/C01060300/2021 tanggal 21 September 2021 Hal Hasil Perundingan Bipartit.
   c. Manajemen untuk mendapatkan kepastian hukum telah di klarifikasi bersama SP PLN sebanyak 4 (empat) kali oleh Mediator Kemnaker RI untuk mendapatkan kepastian agar pembahasan Perjanjian Kerja Bersama dapat segera dilaksanakan dengan SP PLN dan Laskar PLN, namun menurut Kemnaker RI pencatatan serikat pekerja bukan merupakan objek perselisihan, maka pencatatan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kemnaker RI. Hal ini tercantum dalam Notulen Klarifikasi PT PLN (Persero) tanggal 1 November 2021.

4. Management decided to take the steps as regulated in Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relation Disputes by immediately requesting Bipartite Negotiations to SP PLN because there was no agreement on the labor unions entitled to negotiate the CLA with Management.
   a. Management and SP PLN have carried out 2 (two) bipartite negotiations, but no agreement was reached so that finally both parties agreed to proceed to the Mediation stage.
   b. PLN has registered the dispute with the Indonesian Ministry of Manpower in accordance with EVP HSC Letter No. EVP HSC Letter No. 51013/SDM.12.01/C01060300/2021 dated September 21, 2021 Regarding Results of Bipartite Negotiations.
   c. In order to obtain legal certainty, Management with SP PLN has been clarified for 4 (four) times by the Mediator of the Indonesian Ministry of Manpower so that the discussion of Collective Labor Agreements can be immediately carried out with SP PLN and Laskar PLN, but according to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, the registration of labor unions is not an object of dispute, then the said record cannot be followed up by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. This is stated in the Minutes of Clarification of PT PLN (Persero) dated November 1, 2021.

Lembaga Kerja Sama Bipartit

Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara manajemen dengan perwakilan pegawai/serikat pekerja. Melalui LKS Bipartit, para pihak dapat mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan manajemen, mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan yang mungkin dan/atau telah terjadi serta mendapatkan masukan perbaikan untuk meminimalisir potensi terjadinya masalah ketenagakerjaan. Sesuai dengan ketentuan PERMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja sama Bipartit Pasal 14 bahwa LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (kali) dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu. Dengan demikian, pada tahun 2021, seluruh unit PLN dan anak perusahaan yang telah memenuhi syarat telah dihimbau untuk melaksanakan LKS Bipartit secara rutin setiap bulan.

Bipartite Cooperation Agency

Bipartite Cooperation Agency (LKS Bipartite) is a forum for communication and consultation between the management and the representatives of employees/labor unions. Through LKS Bipartite, all parties can communicate management policies, find alternative solutions for potential and/or existing problems, and gather input for improvements to minimize potential industrial relations issues. In accordance with the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. PER.32/MEN/XII/2008 on Procedures for Formation and Membership Structure of Bipartite Cooperation Institutions, Article 14 states that LKS Bipartite holds a meeting at least once in a month or whenever deemed necessary. Thus, in 2021, all PLN units and subsidiaries that have met the requirements have been urged to carry out LKS Bipartite every month.

Pembinaan Hubungan Industrial

Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, pada tahun 2021 PLN telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menetapkan pembinaan hubungan industrial di seluruh unit PLN sebagai salah kegiatan yang wajib dilakukan setiap semester. Tujuannya untuk mengedukasi pegawai di seluruh unit agar memiliki pemahaman mengenai ketentuan hubungan industrial dan dapat mengimplementasikan praktik kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial tahun 2021 mengambil tema "Peran dan Fungsi Atasan Dalam Penguatan Disiplin Pegawai" dan "LKS Bipartit untuk Mewujudkan Hubungan Industrial Harmonis, Dinamis, Berkeadilan Perusahaan dan Pekerja".
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hubungan industrial di lingkungan PLN untuk mempercepat penyelarasan persepsi dan pengetahuan mengenai hubungan industrial.
c. Melakukan studi banding (*benchmarking*) ke beberapa perusahaan untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan hubungan industrial.

Industrial Relations Advisory

To create harmonious, dynamic, and fair industrial relations, PLN conducted the following activities in 2021:

a. Stipulating industrial relations advisory in all PLN units as a mandatory activity carried out biannually. The objective was to educate employees in all units to have an understanding on industrial relations and to be able to implement industrial relations pursuant to the applicable laws and regulations. The 2021 Industrial Relations Advisory activity took the theme of "Role and Functions of Superiors in Strengthening Employee Discipline" and "LKS Bipartite to Realize Harmonious, Dynamic, Equitable Industrial Relations between Companies and Workers".
b. Organizing education and training regarding industrial relations at PLN to accelerate the alignment of perception and knowledge of industrial relations.
c. Benchmarking with several companies to observe the best practices in industrial relations management.

Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai

PLN telah menjatuhkan sanksi disiplin atas berbagai jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan disiplin pegawai yang berlaku pada tahun 2021. Sebanyak 238 pegawai telah menerima sanksi kategori ringan (32 pegawai), sedang (190 pegawai) dan berat (16 pegawai).

Employee Discipline Enforcement

PLN imposed disciplinary sanctions for various types of violations in accordance with the prevailing employee discipline regulations in 2021. Sanctions were imposed on a total of 238 employees with the categories of mild (32 employees), moderate (190 employees), and severe (16 employees).

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021, Perusahaan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di bidang Ketenagakerjaan sebesar Rp25,09 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Allocation of Fund for Implementation of Corporate Responsibilities in Employment

In 2021, the Company allocates funds for support the implementation of activities Responsibilities Companies in the field of Manpower amounting to Rp25.09 trillion with the following details:

Alokasi Dana untuk Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2021

Allocation of Fund for Corporate Responsibility Activities in Employment in 2021

No.	Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Ketenagakerjaan / *Corporate Responsibility Activities in Environment*	Alokasi Dana (Rp Juta) / *Fund Allocation (Rp Million)*
1.	Jasa produksi dan insentif prestasi kerja / Bonus and performance incentives	7.019.176
2.	Imbalan kerja / Employee Benefit	5.933.357
3.	Gaji / Salary	4.980.766
4.	Tunjangan / Allowance	3.147.401
5.	Lain-Lain / Others	4.012.056
	Jumlah / Total	**25.092.756**

Mekanisme Pengaduan Masalah terkait Ketenagakerjaan

Ada beberapa sarana untuk mengajukan masalah ketenagakerjaan, misalnya melalui email, surat kepada fungsi terkait, konsultasi dengan atasan langsung dan inovasi terbaru berbasis teknologi adalah melalui media Konsultasi *Employee Care Center* (ECC) yang terdapat pada aplikasi PLN Daily.

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. **Survei Keterikatan Pegawai/*Employee Engagement Survey* (EES)**

   Aon Hewitt (2017) mendefinisikan *employee engagement* sebagai tingkat keterikatan psikologis karyawan di organisasi mereka yang dicirikan dengan *say* (berbicara positif tentang organisasi), *stay* (memiliki keinginan untuk tinggal) dan *strive* (berusaha memberikan yang terbaik untuk organisasi).

   Setiap tahun PLN melakukan pengukuran indeks keterikatan pegawai (*employee engagement index*) melalui *Employee Engagement Survey* (EES). Ada total 12 dimensi yang diukur dengan *output* indeks : 75 – 100% (Sangat *Engage*), 50- <75% (*Engage*), 25-<50% (Tidak *Engage*) dan <25% Sangat Tidak *Engage*). Pada tahun 2021, survei EES diikuti sebanyak 39,464 pegawai atau sekitar 90% dari total pegawai. Hasil Indeks *Employee Engagement Survey* (EES) tahun 2021 adalah : **85,6.**

   Secara umum, skor dimensi pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020. Hanya saja, berdasarkan skor masing-masing dimensi, dimensi *brand reputation* memiliki indeks tertinggi (88,72%). Sedangkan dimensi terendah adalah *work condition* (82,76%). Hasil indeks tertinggi dan terendah ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Khusus untuk dimensi *work condition*, kondisi pandemi memberikan cukup banyak pengaruh, hal ini juga tergambar dari pernyataan pegawai saat sesi *Focus Group Discussion*. Berikut gambaran perbandingan Hasil EES tahun 2020 dan tahun 2021:

Mechanism of Complaints Related to Employment

There are several facilities to report personnel issues, such as via emails, letters to the related functions, consultation with direct superiors, and the latest technology-based innovation is via the consulting media of Employee Care Center (ECC), which is available in PLN Daily application.

ACHIEVEMENT OF CORPORATE RESPONSIBILITIES IN EMPLOYMENT

1. **Employee Engagement Survey (EES)**

   Aon Hewitt (2017) defines employee engagement as the level of psychological attachment of employees in their organization, which is characterized by say (talk positively about the organization), stay (have a desire to stay), and strive (attempt to provide the best for the organization).

   Every year PLN measures the employee engagement index through the Employee Engagement Survey (EES). There are a total of 12 dimensions measured with index outputs: 75 - 100% (Highly Engaged), 50 - <75% (Engaged), 25 - <50% (Not Engaged) and <25% (Highly Not Engaged). In 2021, the EES survey was attended by 39,464 employees or around 90% of the total employees. The result of the 2021 Employee Engagement Survey (EES) Index was **85.6.**

   In general, the dimension score in 2021 increased from 2020. However, based on the scores for each dimension, the brand reputation dimension had the highest index (88.72%), while the lowest dimension was work condition (82.76%). The results of the highest and lowest indexes were not much different from 2020. Particularly for the dimension of work condition, the pandemic condition has had quite a lot of influence as illustrated by employee statements during the Focus Group Discussion session. The following is an overview of the comparison of EES Results in 2020 and 2021:

DIMENSI EES:	2020	2021	
1. Company Policy (D)	81,70	86,29	↑
2. Work Condition (D)	74,30	82,76	↑
3. Organization Culture (D)	79,23	84,92	↑
4. Brand Reputation (D)	85,91	88,72	↑
5. Leadership & Supervision (D)	81,08	86,22	↑
6. Career Management (D)	77,15	83,92	↑
7. Compensation of Benefit (D)	80,22	85,59	↑
8. Teamwork and Relationship (D)	84,03	87,59	↑
9. Performance Management (D)	80,39	85,37	↑
10. Training & Development (D)	79,23	85,54	↑
11. Recognition (D)	77,71	84,07	↑
12. Meaningful Work/Work Engagement (O)	81,50	86,12	↑
Hygiene Factors			
Instrinsic Factors			

Responden 2021:
39,464 (90% pegawai / employees)

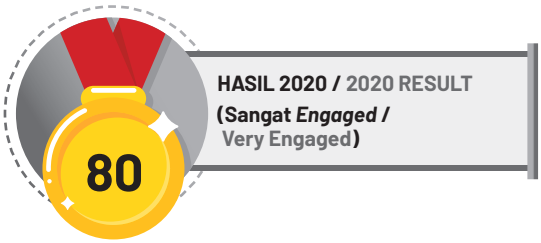

Most Strength

Brand Reputation

Most OFI

Working Condition

2. Pencapaian Kinerja *Organizational Health Index, Human Capital Readiness, Organizational Capital Readiness* dan *Talent Pool* serta *Talent Mobility*

- Kinerja *Organizational Health Index* tercapai 81 atau 100% dari target
- Kinerja *Human Capital Readiness* tercapai 4,45 dari target 4,35
- Kinerja Organizational *Capital Readiness* tercapai 4,42 dari target 4,35
- Kinerja *Talent Pool* dan *Talent Mobility*
  - *Talent* Perempuan dalam talent nominasi tercapai 16,67 dari target 15
  - *Talent* Milineal (<40 tahun) dalam top talent tercapai 52,41 dari target 50

Capaian di Bidang Ketenagakerjaan

HRExcellence Awards 2021 peringkat Silver dalam kategori Excellence in Workplace Culture dari HumanResourcesOnline.Net.

2. Performance Achievement of Organizational Health Index, Human Capital Readiness, Organizational Capital Readiness, and Talent Pool and Talent Mobility.

- The Organizational Health Index performance reached 81 or 100% of the target.
- The Human Capital Readiness performance reached 4.45 of the target at 4.35.
- The Organizational Capital Readiness performance reached 4.42 of the target at 4.35
- Talent Pool and Talent Mobility Performance
  - Female talents in the nomination talent reached 16.67 of the target at 15.
  - Millennial talents (<40 years old) in the top talent reached 52.41 from the target at 50.

Achievement in Employment

HRExcellence Awards 2021 Silver rating for Excellence in Workplace Culture Category from HumanResourcesOnline.Net.

BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan terkait Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PLN selalu menempatkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional dengan berupaya membangun budaya keselamatan kerja dalam rangka mencapai target jangka panjang *zero-accident* pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PLN, baik itu kegiatan Konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu Induk maupun kegiatan Operasional yang meliputi operasional pembangkitan, transmisi, distribusi dan gardu induk. Dengan berorientasi pada pencapaian target *zero-accident*, diharapkan seluruh kegiatan di PLN dapat berjalan lebih efisien dan produktivitas kerja dapat meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan yang pada akhirnya dapat menjamin kesinambungan usaha.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PLN menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 dan memastikan agar seluruh unit di PT PLN (Persero) telah memiliki dan menerapkan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Kebijakan PLN dalam pengelolaan K3 menyatu dengan kebijakan Perlindungan Lingkungan, dengan prinsip-prinsip kebijakan sebagai berikut:

1. Mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan dalam setiap aktivitas di PT PLN (Persero).
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan.
3. Melaksanakan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi ancaman keamanan dan identifikasi aspek perlindungan lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan melakukan upaya-upaya pencegahan, perlindungan dan pengendalian serta penanggulangannya yang ditinjau secara berkala dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi Pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, andal dan ramah lingkungan.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)

The Company's Commitment and Policy Related to Occupational Safety and Health (OSH)

PLN constantly places occupational health and safety (OSH) as one of our top priorities in our operations by striving to build safe work culture to achieve the long-term target of zero accident in each of PLN's activities, both Construction, which includes the constructions of power plants, transmissions, and substations, and Operations, which include the operations of generation, transmission, distribution and substation. With the orientation to achieve zero-accident target, it is expected that PLN will run more efficiently and have higher work productivity, so it will improve financial performance, and that all will ultimately ensure its business sustainability.

To realize this commitment, PLN implements an Occupational Health and Safety Management System (SMK3) pursuant to Government Regulation No. 50 of 2012 on Implementation of SMK3 and ensures that all units at PT PLN (Persero) have and implement an occupational safety and health management system (SMK3) certification.

PLN's policy on OSH management is integrated into its Environmental Protection policy, with the following policy principles:

1. Prioritizing the aspects of occupational, health, and safety and security and environmental protection in every activity at PT PLN (Persero).
2. Complying with the laws and regulations and other requirements related to occupational safety, health, security, and environmental protection.
3. Identifying the hazards of occupational health and safety, and health; identifying security threats; and identifying environmental protection aspects based on the level of risk and undertake preventive, protective and control measures while reviewing and handling the risks periodically and continuously.
4. Increasing employee awareness and competence so the employees can do their work in a safe, reliable, and environmentally friendly manner.

5. Menciptakan dan memelihara harmonisasi hubungan dengan *stakeholders* pada kegiatan usaha PT PLN (Persero) untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Rencana dan Target Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam rangka menjadikan K3L atau *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) PLN sebagai rujukan aspek K3 di bidang ketenagalistrikan Indonesia di tahun 2023, PLN menjalankan serangkaian program strategis jangka panjang berupa:

1. Mengintegrasikan K3L ke dalam tata nilai perusahaan dan internalisasi budaya K3L;
2. Merumuskan dan internalisasi peran dan tanggung jawab HSSE dalam proses bisnis PLN;
3. Penguatan kapabilitas organisasi K3L;
4. Peningkatan daur ulang sumber daya yang terintegrasi (*circular economy*) untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dan mewujudkan *Zero Waste Material*, di antaranya optimalisasi pemanfaatan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA);
5. Merumuskan *roadmap* dan program pengurangan emisi udara & Gas Rumah Kaca untuk mitigasi perubahan iklim.
6. Mengkaji pembentukan anak/cucu Perusahaan pengelola limbah.
7. Peningkatan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan bisnis Perusahaan.

Target pelaksanaan program-program kerja di bidang K3 adalah *Zero Accident* and *Zero Incident*. Untuk mendukung terwujudnya *Safety Culture* di Seluruh Unit Induk, telah dilakukan berbagai program Quick Wins Zero Accident, sebagai berikut:

1. Penerapan *Contractor Safety Management System* (CSMS)
2. Pembangunan *Reporting Culture* untuk *Hazard* dan *Risk* melalui INSPEKTA
3. Pembangunan *Safety Mindset*: *Safety for Executive dan Safety for Management*
4. Melaksanakan *Safety Campaign*: Peningkatan Kampanye K3

5. Creating and maintaining harmonious relationships with stakeholders in business activities of PT PLN (Persero) to build mutually beneficial partnerships.

Plan and Target of the Implementation of Corporate Responsibility Activity in Occupational Safety and Health (OSH)

In order to make PLN's OSH or Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) as a reference for OSH aspects in Indonesia's electricity sector in 2023, we are running a series of long-term strategic programs by:

1. Integrating the HSSE into corporate values and internalizing the HSSE culture;
2. Formulating and internalizing HSSE roles and responsibilities in the business process of PLN;
3. Strengthening HSSE organizational capabilities;
4. Intensifying recycling of integrated resources (circular economy) to increase the Company's added value and realize Zero Waste Material, including optimizing the use of Fly Ash and Bottom Ash (FABA);
5. Formulating a roadmap and program to reduce air and Greenhouse Gases emission to mitigate climate change.
6. Reviewing the formation of subsidiaries for waste management.
7. Increasing biodiversity and community empowerment in the Company's business activities.

The target of work programs in the OSH sector is Zero Accident and Zero Incident. In order to support the realization of Safety Culture in all main units, various Quick Wins Zero Accident programs have been implemented as follows:

1. The implementation of a Contractor Safety Management System (CSMS)
2. The development of Reporting Culture for Hazard and Risk through INSPEKTA
3. The development of a Safety Mindset: Safety for Executive and Safety for Management
4. The implementation of a Safety Campaign: Improving OSH Campaign

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta mewujudkan Visi PLN yaitu "Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi", maka salah satu program K3 yang diterapkan adalah integrasi SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 sebagai standar nasional, dengan ISO 45001:2018 sebagai standar internasional.

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian bahaya dan risiko dalam kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. SMK3 mencakup seluruh unit kerja PLN dan juga berlaku bagi seluruh jajaran pegawai PLN. Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)

Implementation of Occupational Health and Safety Management System (SMK3)

To improve the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and realize PLN's Vision to "Become the Leading Electric Company in Southeast Asia and the #1 Customer Choice for Energy Solutions", one of the OSH programs that PLN implements is the integration of SMK3 based on Government Regulation No. 50 of 2012 as the national standard, with ISO 45001: 2018 as the international standard.

SMK3 is part of the Company's management system related to the handling of hazards and risk control in work activities in order to create a safe, healthy, and productive workplace. SMK3 covers all PLN's work units and also applies to all levels of PLN's employees. Implementation of SM3 is intended to:

1. Increase the effectiveness of protection on planned, measured, structured and integrated occupational health and safety.
2. Prevent and reduce occupational accidents and work-related illness by involving elements of management, workers/labors, and/or trade/labor unions.
3. Create a safe, comfortable, and efficient workplace to boost productivity.

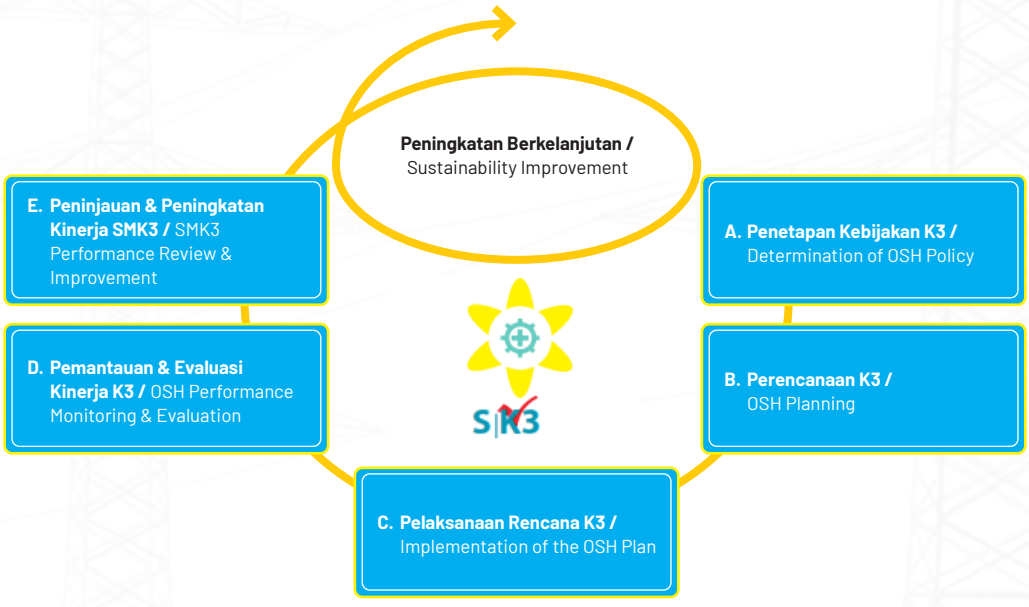

Melalui penerapan sistem K3 berstandar nasional dan internasional tersebut secara konsisten, PLN meyakini kesadaran dan kedisiplinan seluruh jajaran dalam menerapkan prosedur kerja yang lebih menjamin aspek K3 akan semakin meningkat dan insiden kecelakaan kerja akan semakin berkurang.

Pada praktiknya, dalam rangka mencegah terjadinya insiden kecelakaan, pada setiap tahapan kegiatan operasional di lapangan, jajaran PLN akan senantiasa berpedoman pada:

1. Pada setiap tahapan pekerjaan selalu melengkapi dan melaksanakan apa yang ada dalam Dokumen K3, yaitu:
   - Standar Operasional Prosedur (SOP)
   - Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR)
   - *Job Safety Analysis* (JSA)
   - *Working Permit* (WP)
2. Pelaksanaan *Safety Briefing* di lapangan sebelum memulai pekerjaan.
3. Peningkatan kompetensi Pengawas K3 dan Pengawas Pekerjaan.
4. Penerapan Disiplin.

With consistent implementation of OSH system using national and international standards, PLN believes that the awareness and discipline of employees of all levels in running work procedures, which further ensure OSH aspects, will improve and work accidents can be minimized.

In practice, in order to prevent work accidents, at every stage of operational activities in the field, PLN's staff will always be guided by:

1. At every stage of work always completes and implements as stated in the OSH document, namely:
   - Standard Operating Procedures (SOP)
   - Hazard Identification, Assessment, and Risk Control (IBPPR)
   - Job Safety Analysis (JSA)
   - Working Permit (WP)
2. Conducting Safety Briefing in the field before starting work.
3. Increasing the competence of OSH Supervisors and Work Supervisors.
4. Implementation of Discipline

Jumlah Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Grup PLN Tahun 2021 /
Number of Work Accidents in PLN Group in 2021

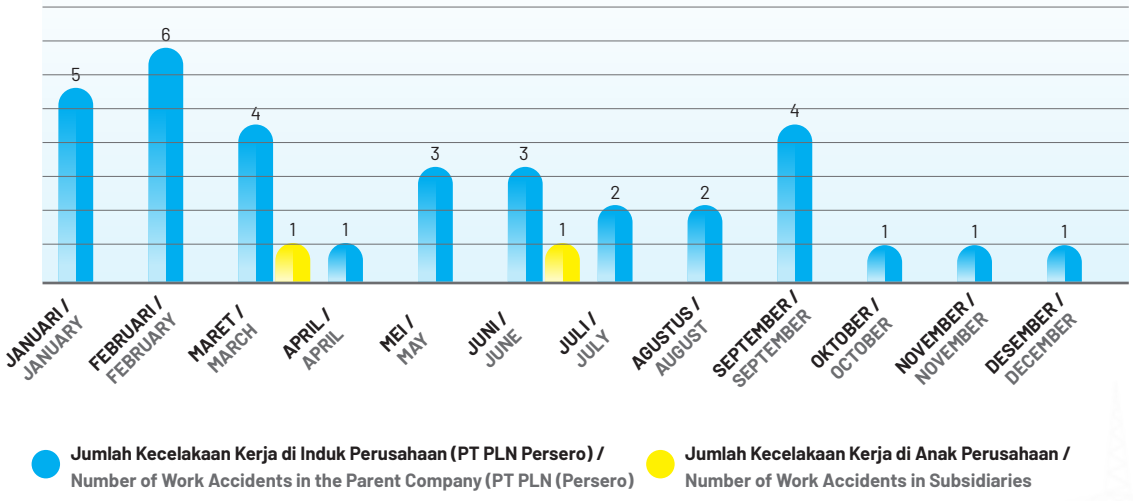

Jumlah Kecelakaan Kerja di Induk Perusahaan (PT PLN Persero) /
Number of Work Accidents in the Parent Company (PT PLN (Persero)

Jumlah Kecelakaan Kerja di Anak Perusahaan /
Number of Work Accidents in Subsidiaries

Jumlah Kecelakaan Kerja Tahun 2021 Berdasarkan Penyebabnya /
Number of Work Accidents in 2021 Based on Causes

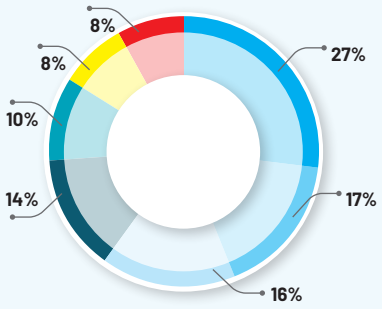

- **Tidak Mengikuti SOP/ Rambu /** Not Complying with the SOP/Signs
- **Tidak Menggunakan APD /** Not Wearing PPE
- **Tidak Ada Indentifikasi Bahaya /** No Identification of Danger
- **Tidak Menggunakan Peralatan Kerja yang Sesuai /** Not Using the Appropriate Working Equipment
- **Peralatan Tidak Standard /** Non-Standard Equopment
- **Tidak Ada Pengawas /** No Supervisors
- **Pekerja Tidak Kompeten /** Incompetent Workers

PETA KORBAN KECELAKAAN KERJA 2021 /
MAP OF WORK ACCIDENT VICTIMS IN 2021

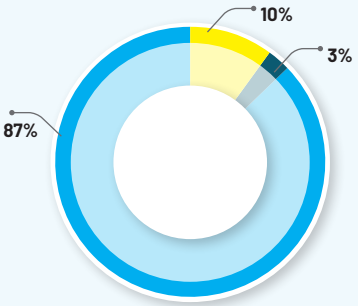

- **Pegawai PLN /** PLN's Employees
- **Pegawai Anak Perusahaan /** Subsidaries' Employees
- **Yantek/Vendor** Yantek Officer/ Vendor

PETA AREA KECELAKAAN KERJA 2021 /
PETA AREA KECELAKAAN KERJA 2021

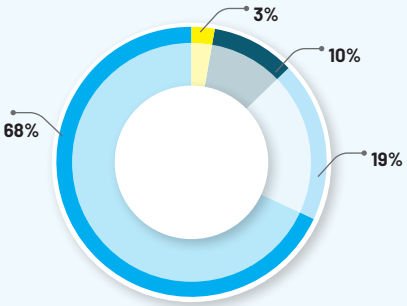

- **Pembangkit /** Generating
- **Transmisi /** Transmission
- **Konstruksi /** Construction
- **Distribusi /** Distribution

Budaya *Zero-Accident*

Guna mengurangi risiko insiden kecelakaan kerja, PLN melaksanakan kegiatan operasional di lapangan yang berfokus pada 3 (tiga) komponen utama, yakni pelaksana pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan pengawas K3. Ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan dengan taat asas dan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang mengacu pada UU No. 1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.

Berdasarkan angka statistik kecelakaan kerja yang terjadi di PLN, sebagian besar terjadi pada Unit Distribusi/Wilayah, sehingga diperlukan suatu terobosan dalam membangun budaya K3 pada unit distribusi agar mencapai *Zero Accident* yang berkelanjutan. PLN menjalin kerja sama dengan konsultan internasional yang expert dan capable dalam membangun budaya K3 di Perusahaan dalam periode waktu 3 tahun. *Pilot Project* pembangunan Budaya K3 akan diimplementasikan di UID Banten dan selanjutnya akan di roll out ke Unit PLN yang lainnya.

Peningkatan Kapasitas *Leaders* dan Pegawai dalam Kepatuhan K3

Selama tahun 2021, PLN melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman pentingnya kepatuhan K3, sehingga diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan K3, antara lain:

1. Melaksanakan *Safety Leadership Capacity Building* (*Safety for Manager*);
2. Melaksanakan *Safety Town Hall Meeting* kepada seluruh Unit PLN dan Anak Perusahaan;
3. Melaksanakan sertifikasi CSMS BNSP untuk pengelola CSMS seluruh Unit;
4. Melaksanakan inspeksi, edukasi, dan arahan K3 oleh Manajemen;
5. Menyusun Materi Pembelajaran K3 untuk *Executive Education* (EE) I s.d IV;
6. Penyusunan Materi Pembelajaran K3 sesuai *Grand Design HSSE Academy*.

Pengembangan Aplikasi INSPEKTA

Dalam upaya untuk terus meningkatkan partisipasi para pegawai PT PLN (Persero) melaporkan *unsafe action, unsafe condition, near miss, dan accident* melalui aplikasi

Zero-Accident Culture

\In order to reduce the risk of accidents at work, there should be at least 3 (three) main components of field operations, which are OSH job executors, job supervisors, and supervisors. The three components must be carried out in accordance with the principles and meet the Standard Operating Procedures (SOP) as referred to in Law No. 1 of 1970 on Occupational Health and Safety, Law No. 13 of 2003 on Employment, Law No. 30 of 2009 on Electricity, and PP No. 50 of 2012 on OSH Management System.

Based on the statistics of the work accident in PLN, most accidents occurred in Distribution/Regional Units, so a breakthrough is needed to develop OSH culture in Distribution Units to achieve continuous Zero Accident. PLN establishes cooperation with expert and capable international consultants in developing OSH culture in the Company within 3-year period. The pilot project of OSH culture development will be implemented in UID Banten and will be further rolled out to other PLN Units.

Capacity Improvement for Leaders and Employees in OSH Compliance

During 2021, PLN had carried out several efforts to increase the understanding on the importance of OSH compliance, so it is expected that there will be improvement of OSH compliance, including:

1. Performing Safety Leadership Capacity Building (Safety for Manager);
2. Performing Safety Town Hall Meeting to all PLN's Units and Subsidiaries;
3. Performing CSMS BNSP certification for CSMS management of all Units;
4. Performing inspection, education, and direction on OSH by the Management;
5. Preparing OSH Learning Material for Executive Education (EE) I until IV;
6. Preparing OSH Learning Material based on the Grand Design of HSSE Academy.

Development of INSPEKTA Application

In order to increase the participation, all employees of PT PLN (Persero) report any unsafe actions, unsafe conditions, near miss, and accidents through INSPEKTA application

INSPEKTA (https://hsse.pln.co.id/). Pada tahun 2021, lingkup pengembangan INSPEKTA yang dilakukan adalah penyesuaian struktur organisasi baru, integrasi menjadi satu korporat karena sebelumnya domain masih berada di masing-masing unit, dan penambahan fitur terkait *Maturity Level* K3.

Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS)

Kegiatan konstruksi, pemeliharaan jaringan transmisi, distribusi dan gardu induk merupakan area-area yang memiliki risiko insiden K3 tinggi dalam operasional kami. Data empiris menunjukkan 80-90% insiden kecelakaan kerja di bidang ketenagalistrikan terjadi pada saat mitra kerja melaksanakan kegiatan konstruksi maupun pemeliharaan tersebut. Oleh sebab itu, PLN menerapkan *Contractor Safety Management System* (CSMS) dan memberikan penyuluhan terhadap kontraktor, maupun mitra kerja PLN di seluruh Indonesia untuk mengurangi dan mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja.

Contractor Safety Management System (CSMS) adalah suatu sistem manajemen K3 yang diterapkan kepada kontraktor, meliputi beberapa K3 yang sesuai dengan standar yang dijadikan rujukan. Pemenuhan CSMS merupakan pertimbangan awal bagi Perusahaan dalam menilai kinerja kontraktor yang akan mengikuti proses tender pengerjaan konstruksi maupun pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan, baik saat pembangunan maupun saat pemeliharaan PLTU, jaringan transmisi, distribusi dan gardu induk.

Prosedur CSMS Kami terapkan untuk menekan angka insiden kecelakaan kerja secara periodik di mana seluruh kontraktor utama telah menjalani program tersebut secara berkala. Pada penerapan CSMS, PLN secara rutin melakukan koordinasi dengan mitra kerja, kontraktor pembangunan atau perawatan pembangkit atau gardu induk, dengan mengadakan pertemuan *Safety Committee*. Dengan demikian, hasil akhir yang diharapkan adalah semua pihak senantiasa melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan aturan keselamatan ketenagalistrikan dengan sebaik-baiknya.

(https://hsse.pln.co.id/). In 2021, the scope of INSPEKTA development is adjustment of new organizational structure, integration into one corporate as previously the domain was still in each unit, and addition of features related to OSH Maturity Level.

Implementation of Contractor Safety Management System (CSMS)

The activities of construction, transmission network maintenance, distribution, and substations are the areas that have high risk of OSH incidents in our operations. The empirical data shows that 80%-90% of the work accident incidents in electricity sector occur when the business partners perform construction and maintenance activities. Therefore, PLN applies Contractor Safety Management System (CSMS) and provides counseling to contractors and business partners of PLN throughout Indonesia to reduce and prevent work accident incidents.

Contractor Safety Management System (CSMS) is an OSH management system that is applied to all contractors, including several OSH in accordance with the standards referred. The fulfillment of CSMS is the Company's initial consideration in assessing the performance of contractors participating in our tender for the construction work and maintenance of electricity installations, during construction and maintenance of PLTUs transmission networks, distribution, and substations.

We are running CSMS procedures to reduce accidents at work periodically where all of our key contractors have undergone the program periodically. In the application of CSMS, PLN regularly coordinates with work partners, contractors of construction or maintenance of power plants or substations, by holding meetings of Safety Committee. Thus, the end result expected is that all parties carry out the best possible implementation of all provisions under electricity safety regulations.

Tahapan CSMS terdiri dari:
1. Penilaian risiko
2. Pra-kualifikasi
3. Pemilihan/seleksi
4. Kegiatan awal pekerjaan
5. Kegiatan saat pekerjaan
6. Evaluasi akhir

Selama tahun 2021, PLN telah menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Kontraktor PLN Korporat yang tertuang dalam SPLN U1.006:2021 Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System*/CSMS) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0325.K/DIR/2021 tanggal 1 September 2021. Dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PLN PT PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020, penyedia terseleksi harus memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penyedia Barang/Jasa sebagai syarat untuk dapat lolos. Untuk pekerjaan yang mengandung risiko menengah atau tinggi/ekstrem dalam pelaksanaannya, dalam rangka mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat dan ramah lingkungan bagi para pekerja dan instalasi ketenagalistrikan harus dapat memenuhi persyaratan:
1. Mempunyai Sistem Manajemen K3 (SMK3), tidak terbatas pada SMK3 sesuai peraturan Pemerintah Indonesia.
2. Mempunyai kemampuan dalam memenuhi aspek-aspek K3 sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan yang tercantum dalam ketentuan sistem manajemen kinerja K3 kontraktor atau *Contractor Safety Management System* (CSMS) yang berlaku di PT PLN (Persero).
3. Untuk jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang diwajibkan mengikuti ketentuan sistem manajemen kinerja K3 kontraktor atau *Contractor Safety Management System* (CSMS) yaitu jenis Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terkait ketenagalistrikan dan proses bisnis di PT PLN (Persero).

Untuk menunjang implementasi CSMS, telah dilakukan pengembangan Aplikasi CSMS di mana terdapat fitur untuk memproses tahap Prakualifikasi vendor sampai dengan tahap *Final Evaluation* sehingga diharapkan implementasi CSMS yang akan mulai dijalankan di tahun 2022 dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

The CSMS stages consist of:
1. Risk Assessment
2. Pre-qualification
3. Selection/appointment
4. Initial work activities
5. Activities at work
6. Final Evaluation

During 2021, PLN has established Guidelines for Contractor Management System of PLN Corporate in SPLN U1.006:2021 on Contractor Safety Management System (CSMS), which is stipulated through Decree of the Board of Directors No. 0325.K/DIR/2021 dated September 1, 2021. In the Guidelines for Procurement of Goods/Services in PT PLN (Persero) Number 022.P/DIR/2020, the selected supplier must fulfill the requirements of Occupational Safety and Health (OSH) for Suppliers of Goods/Services in order to pass the selection. For any jobs with medium or high/extreme risk in the implementation, in order to achieve a safe, healthy, and environmentally-friendly workplace for employees and electricity installation, the following conditions must be fulfilled:

1. Having OSH Management System (OSHMS), which is not limited to the OSHMS based on the regulations of the Government of Indonesia.
2. Having the capabilities to fulfill the OSH aspects in accordance with the risk of work listed in the provisions on Contractor Safety Management System applicable in PT PLN (Persero).
3. For types of Procurement of Goods/Construction Work/Other Services that are required to follow the provisions on Contractor Safety Management System (CSMS), it includes Procurement of Goods/Construction Work/Other Services related to electricity and business process at PT PLN (Persero).

In order to support the implementation of CSMS, the CSMS application has been developed where there is a feature to process the pre-qualified vendors up to the Final Evaluation stage. Therefore, it is expected that the CSMS that will be implemented in 2022 can run effectively and optimally.

Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan

Dalam rangka mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi setiap ancaman, gangguan, dan kerawanan pada Objek Vital milik PT PLN (Persero), Perusahaan menerapkan pola dan metode pengamanan yang terencana, terkoordinir, sistematis dan terpadu yaitu Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), berdasarkan:

1. Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan;
2. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 477.K/DIR/2012 tentang Sistem Pengamanan PT PLN (Persero).

Terdapat banyak perubahan atas kebijakan penerapan Sistem Pengamanan pada internal Kepolisian sehingga muncul beberapa Peraturan Polisi baru, yang selanjutnya menjadi dasar penerapan Sistem Manajemen Pengamanan dan proses sertifikasi kedepannya, sebagai berikut:

1. Perpol No. 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Objek Vital Nasional/Objek Tertentu;
2. Peraturan Kabaharkam (PERKABA) Polri No. 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan SMP Pada Objek Vital Nasional/Objek Tertentu.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang sangat pesat di era global ini, mempengaruhi penggunaan teknologi informasi di perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di segala bidang. Hal tersebut berkaitan juga dengan implementasi Sistem Pengamanan yang berlaku di lingkup PLN, di mana saat ini tidak lagi berfokus pada pengelolaan personil Satuan Pengamanan, akan tetapi juga meningkat pada Tata Kelola Sistem Pengamanan dengan penggunaan Teknologi Informasi yang sangat mendukung terciptanya kondisi dan situasi aman dalam sebuah lingkungan kerja. Dalam hal peningkatan kinerja sebuah organisasi dibutuhkan kondisi yang aman dan nyaman. Peningkatan Tata Kelola Sistem Pengamanan Korporat harus menjadi salah satu perhatian utama dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, diperlukannya pengelolaan teknologi informasi yang dituangkan dalam tata kelola Sistem Pengamanan untuk mengelola ancaman maupun hambatan yang muncul, sebagai berikut:

Implementation of Security Management System

In order to anticipate, prevent, and overcome threats, disturbance, and vulnerability to PT PLN (Persero)'s Vital Objects, we apply planned, coordinated, systematic, and integrated security patterns and methods, which is the Implementation of Security Management System (SMP), based on:

1. National Police Regulation No. 24 of 2007 on Security Management System;
2. Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 477.K/DIR/2012 on Security System of PT PLN (Persero).

There have been many changes made internally to the policy, which have resulted in several new Police Regulations, which then become the basis for implementing the Security Management System and the certification process in the future, as follows:

1. Perpol No. 7 of 2019 on Provision of Security Assistance on National Vital Objects/Certain Objects;
2. Regulation of Kabaharkam (PERKABA) Polri No. 1 of 2019 on Procedures for Provision of Security Services and Security Management System at National Vital Objects/ Certain Objects.

The development of information technology that becomes more advanced and improve rapidly in this global era has affected the use of information technology in large and small companies in any sectors. This is also related to the implementation of the applicable Security System within PLN, where currently no longer focuses on the management of security unit personnel, but also to increase the Security System Governance using Information Technology that highly supports the establishment of safe condition and situation in a workplace. In order to increase the performance of an organization, safe and comfortable conditions are needed. The improvement of Corporate Security System Governance must be one of the main focuses of a company. Therefore, it is necessary to have information technology management contained in the Security System governance to manage any threats and obstacles posed, as follows:

1. Melakukan *review* dan revisi peraturan Sistem Pengamanan sesuai Perdir 477.K/DIR/2012 tentang Sistem Manajemen Pengamanan;
2. Melaksanakan Supervisi dan *Audit Performance System* Pengamanan;
3. Menyusun dan *Update* Materi Pembelajaran Keamanan;
4. Menyusun Tim *Audit Internal Set Up* Dokumen dan *Monitoring* Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan;
5. Menyusun standar dokumen Sistem Manajemen Pengamanan di lingkungan korporat dalam bentuk Pedoman, sudah dimasukkan dalam usulan Pembentukan Edaran Direksi dan melalui proses GRC.

1. Reviewing and revising the regulations on Security System based on Regulation of the Board of Directors No. 477.K/DIR/2012 on Security Management System;
2. Performing Supervision and Audit Performance on the Security System;
3. Preparing and updating the learning materials on Security;
4. Establishing an Internal Audit Team to set up documents and monitor the implementation of Security Management System;
5. Preparing standard documents on Security Management System within corporate in the form of Guidelines, which has been included in the suggestion of Stipulation on Circular Letter of the Board of Directors and through GRC process.

Peningkatan Kualitas Pengamanan melalui Penyediaan *Infrastruktur Visitor Management System* (VMS)

Pengelolaan data dan informasi keamanan saat ini pada umumnya masih belum didukung dengan teknologi terkini, sehingga kurang mampu menyajikan data/informasi yang cepat dan akurat, hal ini menjadikan suatu permasalahan dalam pengelolaan pengamanan Aset pada Objek Vital Nasional, Objek Tertentu dan lingkungan kantor.

Implementasi Teknologi Berbasis IT diperlukan dalam upaya memperbaiki Sistem Pengelolaan Pengamanan yang akan berdampak terhadap perbaikan sistem pengelolaan data dan informasi maupun terhadap optimalisasi *man-powered* dalam pengamanan di lingkungan PT PLN (Persero). Teknologi yang handal dan tepat guna sangat diperlukan dalam menunjang keamanan Aset, sehingga kedepannya peningkatan pengamanan berbasis IT akan dilakukan dengan penyediaan infrastruktur *Visitor Management System* (VMS).

Improvement of Security Quality through the Provision of Visitor Management System (VMS) Infrastructure

Currently, the management of security data and information in general is not yet supported by the latest technology, so it is still not able to present rapid and accurate data/information. This becomes an issue in managing security of Assets in National Vital Objects, Specific Objects, and office environment.

The implementation of IT-based technology is needed in order to improve the Security Management System that will have an impact on improved data and information management system and man-powered optimization in security within PT PLN (Persero). Reliable and effectively appropriate technology is highly needed to support the asset security, so in the future, the improvement of IT-based security will be carried out by providing Visitor Management System (VMS) infrastructure.

Program Kesehatan Kerja

PLN senantiasa memperhatikan kesehatan para pegawai maupun keluarga pegawai, yaitu melalui program pemeriksaan rutin bagi para pekerja yang bekerja pada lingkungan dan kondisi tertentu, misalnya terhadap para operator pada mesin pembangkit yang kesehariannya bekerja dengan kondisi kebisingan yang melewati ambang batas. Perusahaan juga melakukan upaya pemantauan lingkungan di unit bisnis yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan agar terhindar dari limbah pembuangan yang dapat mencemarkan lingkungan.

Occupational Health Program

PLN continuously pays heed to the health of our employees and their families, which are through routine check-up for workers who are stationed at work places with specific environment and conditions, such as the operators of the generating units who work daily with a deafening level of noise. The Company also undertakes environmental monitoring measures in the business units to maintain environmental conditions in order to avoid polluting waste disposal.

Dalam kaitan pemantauan kondisi lingkungan ini, PLN menetapkan Surat Edaran Direksi No. 109 Tahun 2014 yang mewajibkan pemeriksaan berkala bagi tenaga kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit akibat kerja dan buruknya lingkungan kerja, seperti pemeriksaan instalasi, perbaikan instalasi Gardu Induk, Transmisi dan Gardu Induk, pemeliharaan generator pembangkit dan sebagainya.

In terms of monitoring this environmental condition, PLN imposed Circular Letter of the Board of Directors No. 109 of 2014, which requires periodic examination for workers who have a high risk of work-related illness and poor working environment, such as inspection of installations, repair of substation installations, transmissions and substations, maintenance of generators, and others.

Sementara untuk menjaga kesehatan keluarga pegawai, kami memberikan pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan pengontrolan terhadap KJM, risiko terjangkitnya berbagai penyakit serius maupun penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya, selain menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala serta memberikan biaya penggantian pengobatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Meanwhile, to maintain the health of the employees' families, we provide education, training, counselling, prevention, and control of KJM, the risk of contracting serious and infectious diseases, such as dengue fever, malaria and others, in addition to providing periodic health check and providing treatment reimbursement costs based on the applicable provisions.

Dalam hal pemeriksaan kesehatan secara berkala, PLN telah menetapkan kebijakan khusus yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PLN No. 168.K/DIR/2011 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung (pasal 4, ayat 9, poin c) dan *Maturity Level* K3L tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi pegawai secara berkala. Aturan-aturan tersebut menegaskan PLN wajib melakukan pemeriksaan setiap 1 tahun sekali bagi para pegawai yang berumur ≥ 40 tahun dan bertugas pada jenis-jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

For periodic health checks, PLN has established a special policy as outlined in Decree of the Board of Directors of PLN No. 168.K/DIR/2011 on Implementation of Health Care for Employees and Families Covered (Article 4, paragraph 9, point c) and HSSE Maturity Level on Regular Health Checks for employees. These regulations emphasize that PLN is obliged to conduct examination every 1 year for employees aged ≥40 years who are assigned with high-risk works.

Pada aspek Kesehatan Kerja ini, PLN konsisten melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja dalam lingkungan PT PLN (Persero) agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Perusahaan juga memberikan fasilitas perawatan kesehatan yang sangat memadai bagi seluruh karyawan yang dikelola secara mandiri oleh Perusahaan. PT PLN juga mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

In this aspect of Occupational Health, PLN consistently implements Government Regulation No. 88 of 2019 on Occupational Health as an effort to protect everyone in the workplaces of PT PLN (Persero) so they live healthy and free of any health issues and bad influences from their daily work. The Company provides adequate health care facilities for all employees which are managed independently by the Company. PLN also registers all of its employees in the BPJS Employment program.

Untuk memastikan pemenuhan komitmen tersebut, Perusahaan menyiapkan fasilitas kesehatan di lokasi kerja, terutama pada lokasi kerja dengan dampak atas risiko kesehatan yang tinggi dan bekerja sama dengan rumah sakit rujukan yang bisa digunakan oleh karyawan jika mengalami gangguan kesehatan akibat tugas rutin. Untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik, kami bekerja sama dengan

To ensure the fulfillment of this commitment, the Company has prepared health facilities at work sites, especially at work locations with high health risks and collaborate with referral hospitals to which workers can go or be taken if they experience health problems due to routine tasks. To ensure that the health care provided properly, we also work with the company doctors to evaluate the health services.

dokter Perusahaan untuk mengevaluasi layanan kesehatan yang dimiliki. Dalam rangka menunjang kesehatan karyawan, Perusahaan juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga seperti *fitness*, karate, zumba, yoga, basket, tenis, golf, renang, hingga menyelam.

Pengendalian Penularan Covid-19 di Lingkungan Kerja

Pandemi Covid-19 yang mulai merebak sejak Maret 2020 memberi dampak luar biasa bagi kegiatan operasional PLN yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19, PLN mengembangkan kebijakan dan protokol pelaksanaan kerja dan perilaku Adaptasi Kebiasaan Baru secara *update* sesuai peraturan/regulasi pemerintah dan kondisi kasus harian Covid-19. Landasan sebagai dasar pelaksanaan kerja dan perilaku Adaptasi Kebiasaan Baru tercantum dalam:

1. Perdir No. 0024.P/DIR/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0017.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan PT PLN;
2. Edir No. 0008.E/DIR/2020 tentang Protokol Pelaksanaan Kerja Tahap Persiapan dan Tahap New di Lingkungan PT PLN (Persero); dan
3. Kepdir PT PLN (Persero) No. 0023.K/DIR/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0021.K/DIR/2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Krisis.

Tim krisis Manajemen PLN telah menerbitkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai panduan bekerja secara aman dan sehat, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

In addition, in order to support employees' health, the Company also facilitates sports activities, such as fitness, karate, zumba, yoga, basketball, tennis, golf, swimming, and diving.

Control of COVID-19 Transmission at Work Environment

The COVID-19 pandemic that has spread since March 2020 has caused tremendous impact for PLN's operational activities, which included all areas in Indonesia. In order to prevent the spread of and handling the COVID-19, PLN developed policies and protocols for work implementation and adaptation of updated new normal behavior based on government regulations and the daily COVID-19 cases. The bases for the implementation of work and adaptation of new normal behavior are covered in::

1. Regulation of the Board of Directors No. 0024.P/DIR/2020 on Amendment to Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0017.P/DIR/2020 on Guidelines for Prevention of Corona Virus Disease (COVID-19) Spread within PT PLN;
2. Circular Letter of the Board of Directors No. 0008.E/DIR/2020 on Work Protocols at Preparation Stage and New Stage within PT PLN (Persero); and
3. Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0023.K/DIR/2020 on Amendment to Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0021.K/DIR/2020 on Establishment of Crisis Management Team.

The Crisis Management Team of PLN has issued health protocol related to COVID-19 as guidelines to work safely and healthily as shown in the picture below:

Protokol Kesehatan Covid-19

- Penerapan *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO). / Implementation of Work from Home (WFH) and Work from Office (WFO).
- *Monitoring* kesehatan pegawai dan protokol ODP, PDP, dan POS. / Monitoring employees' health and protocol of ODP, PDP, and POS.
- Penerapan aplikasi PLN Daily sebagai portal absensi menggantikan *fingerprint* serta konsultansi seputar Covid-19. / Implementation of PLN Daily application as an attendance portal to replace fingerprint and consulting on COVID-19.

Health Protocol Related to COVID-19

- Penyusunan *Business Continuity Plan* Grup PLN. / Preparing Business Continuity Plan of PLN Group.
- Penyusunan *Emergency Call Tree* Grup PLN. / Preparation of Emergency Call Tree of PLN Group.
- Prosedur dan Simulasi Mitigasi Semi dan *Lockdown*. / *Procedures and Simulation of Mitigation with Semi and Lockdown.*
- *Access pass* personil layanan harian. / Access pass for daily service personnel.

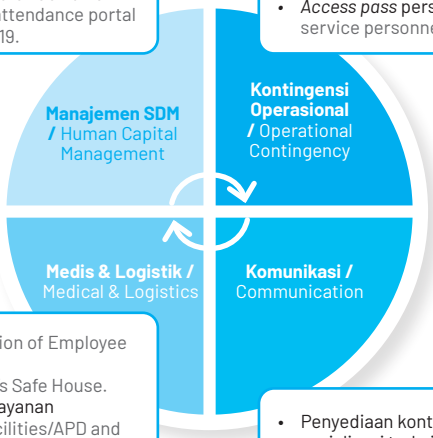

- Penyediaan *Employee Assistant Centre*. / Provision of Employee Assistant Center.
- Penyediaan *Safe House* PLN. / Provision of PLN's Safe House.
- Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan/APD dan Layanan Kesehatan. / Provision of Health Equipment Facilities/APD and Health Services.
- Prosedur Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Pemeriksaan Masuk Area Kerja, Sterilisasi Area Kerja, Dapur Umum, Pelayanan Kesehatan). / Procedures for Prevention of Covid-19 Spread (Examination when entering the working area, sterilization of working area, public kitchen, health services).
- Prosedur Penanganan Covid-19 (ODP-PDP-POS, Pemeriksaan Kesehatan, *Rapid Test*). / Procedures for handling COVID-19 (ODP-PDP-POS, Health Examination, Rapid Test).

- Penyediaan konten edukasi, motivasi, media informasi, serta sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. / Provision of educational contents, motivation, information media, and dissemination related to prevention and handling of COVID-19.
- Penyediaan jaringan informasi dan komunikasi serta penyebarluasan informasi. / Provision of information and communication network as well as information dissemination.
- Juru bicara Tim Manajemen Krisis Covid-19 PLN. / Spokesman of PLN's COVID-19 Crisis Management Team.

Penguatan peningkatan kedisiplinan terhadap protokol Covid-19 secara konsisten terus dilakukan guna beradaptasi mematuhi ketentuan Pemerintah dan mengantisipasi perkembangan pandemi/peta zona risiko sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan PLN Group. Penguatan peningkatan kedisiplinan antara lain:

1. Ketentuan tentang persentase WFO sesuai dengan ketentuan wilayah, peta zona risiko dan perkembangan kasus harian di Pusat/Unit/Pusat-Pusat, termasuk ketentuan prosedur pelaksanaan WFO melalui pelaksanaan *screening test* Covid-19 dan protokol kesehatan sebelum memasuki dan berada di ruangan kerja;
2. Penundaan pertemuan tatap muka, kecuali bersifat *emergency* serta penerapan protokol kesehatan ketat selama pertemuan tatap muka;
3. Pembatasan mobilitas melalui penundaan Perjalanan Dinas, kecuali bersifat *emergency* dan pembatasan Perjalanan Non Kedinasan serta penerapan protokol kesehatan dan *screening test* COVID-19 setelah melakukan Perjalanan Dinas dan Non Kedinasan.

Discipline in consistently implementing the health protocol related to COVID-19 must be improved in order to adapt with Government provisions and to anticipate the development of pandemic/risk zone map as an attempt to control and prevent the spread of COVID-19 within PLN Group. The discipline is improved by:

1. Provisions on the percentage of employees who are WFO are based on the regional provisions, risk zone map, and development of daily cases in the Headquarter/Units/Centers, including the provisions on procedures for performing WFO through COVID-19 screening test and health protocol prior to entering and in the working room;
2. Delayed any physical meetings, except emergency meetings, and implementation of strict health protocol during physical meetings;
3. Limited mobility by delaying business travel, except emergency, and limited non-business travel, as well as implementation health protocol and COVID-19 screening test after business and non-business travel.

4. Penanganan bagi Pegawai dan Tenaga Alih Daya dengan hasil test Covid-19 positif ditindaklanjuti dengan prosedur penelusuran Riwayat Kontak Erat, penutupan ruang kerja sampai dengan pelaksanaan tes Covid-19 yang masuk dalam Riwayat Kontak Erat. Penanganan bagi Konfirmasi Positif juga dimonitor selama masa perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Bagi Konfirmasi Positif yang menjalani isolasi mandiri, telah disediakan *Safe House* PLN yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Pertamina.

4. Any employees and outsourced staff with positive COVID-19 test result will be followed up by the tracing procedures for Close Contact History, closing the working room until the COVID-19 test is carried out to the Close Contacts. Any positive confirmed cases will be monitored during the treatment in hospitals and self-isolation. For any positive confirmed cases in self isolation, the Company provides PLN's Safe House in cooperation with Rumah Sakit Pusat Pertamina.

PLN dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan kerja dan perilaku Adaptasi Kebiasaan Baru mampu menekan/mengendalikan tingkat penyebaran COVID-19 di PLN.

By implementing the health protocol related to the COVID-19 within working area and adapting new normal behaviour, PLN is able to reduce/control the COVID-19 spread in PLN.

Sebagai persiapan guna mensukseskan program vaksinasi Pemerintah, PLN telah menetapkan kriteria prioritas Pekerja PLN yang mendapatkan program vaksinasi, terdiri dari:

Prioritas 1, yaitu:
1. Dispatcher (Pengatur Beban di Transmisi dan Distribusi);
2. BOD dan Manajemen (struktural *layer* 1 sd *layer* 4);
3. Operator & Regu Pemeliharaan KIT;
4. Operator & Regu Pemeliharaan GI;
5. Petugas Layanan Teknik;
6. Petugas Pelayanan Pelanggan ULP;
7. Proyek Konstruksi.

Prioritas 2, yaitu:
1. Petugas Catat Meter;
2. *Driver*;
3. Pekerja *supporting* lainnya.

As a preparation to make the Government's vaccination program a success, PLN has determined the criteria of PLN's personnel prioritized for the vaccination program, which are:

Priority 1, including:
1. Dispatcher (Load Control in Transmission and Distribution);
2. BOD and Management (layer 1 until layer 4 structural);
3. Operator & Team of KIT Maintenance;
4. Operator & Team of GI Maintenance;
5. Technical Service Officer;
6. ULP Customer Service Officer;
7. Construction Project.

Priority 2, including:
1. Meter-Recording Officer;
2. Driver;
3. Other supporting workers.

Pemenuhan Kesiapan Penanggulangan Bencana

Untuk meningkatkan efektivitas dan mewujudkan keseragaman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana maka Divisi K3L menyusun Peraturan Direksi tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PT PLN (Persero) yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) pada tanggal 28 April 2021.

Fulfilment of Readiness for Disaster Management

To improve the effectiveness and realize uniformity in implementing disaster management, the HSSE Division stipulated Regulation of the Board of Directors on Guidelines for Implementing Disaster Management at PT PLN (Persero), which has been approved by the President Director of PT PLN (Persero) on April 28, 2021.

Mekanisme Pengaduan Masalah terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam rangka optimalisasi *monitoring* pelaporan Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum di lingkungan PT PLN (Persero), maka PLN telah mengatur mekanisme pengaduan masalah terkait K3, meliputi:

1. Pelaporan Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: 0250.P/DIR/2016, 0251.P/DIR/2016, dan 0252.P/DIR/2016.
2. Laporan sementara kejadian Kecelakaan dilaporkan via group whatsapp HSSE PLN dan kepada EVP K3L, VP K3 dan KAM, tembusan Manager K3 Kantor Pusat dalam kurun waktu 1x24 jam. Laporan minimal berisi: Tanggal, Lokasi, Data Korban, dan Kronologis/Analisa sementara Kejadian.
3. Laporan kejadian Kecelakaan *Form* 1A atau *Form* 1 dilaporkan via grup Whatsapp K3L PLN dan kepada EVP K3L, VP K3 dan KAM, tembusan Manager K3 Kantor Pusat dalam kurun waktu 2x24 jam.
4. Laporan Investigasi dengan format sesuai Perdir Nomor 0250.P/DIR/2016, 0251.P/DIR/2016 dan 0252.P/DIR/2016 wajib dilaporkan menggunakan AMS Korporat PLN kepada Ketua P2K3 Kantor Pusat (Dir HCM) serta ditembuskan ke Ketua P2K3 Regional (Dir Regional) dan Sekretaris P2K3 Kantor Pusat (EVP K3L), selambatnya 7 hari kerja sejak kejadian Kecelakaan.
5. Perihal pelaporan kecelakaan pada Kepala Surat AMS Korporat menggunakan format: Pelaporan Kecelakaan (Kerja/Instalasi/Masyarakat Umum) (Unit Induk dan Unit Pelaksana) (Tanggal Kejadian).
6. Sifat Penyampaian dan sifat mengamanan pada kepala surat AMS Korporat dipilih pada Sangat Segera dan Rahasia.
7. Melampirkan dokumentasi berupa foto lokasi kejadian dan kondisi terakhir korban (jika ada korban manusia) serta dokumen pekerjaan (WP, JSA, SOP, IK, Sertifikat Kompetensi Pekerja, Visum/Diagnosa Korban) untuk kejadian Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan Instalasi.

Mechanism of Complaints related to Occupational Safety and Health (OSH)

To optimize the monitoring of reporting on Work Accidents, Installation Accidents, and Public Accidents within PT PLN (Persero), PLN has regulated the mechanisms of complaints related to OSH, including:

1. Reporting on Work Accidents, Installation Accidents, and Public Accidents refers to Regulations of the Board of Directors Numbers: 0250.P/DIR/2016, 0251.P/DIR/2016, and 0252.P/DIR/2016.
2. The Accident Temporary Report is informed via whatsapp group of HSSE PLN and to EVP HSSE, VP K3 and KAM, with a copy to OSH Manager of the Headquarter within 1x24 hours. The report should at least contain: Date, Location, Data of Victim, and Chronology/Temporary Analysis of the Accident.
3. Form 1A or Form 1 of Accident Report is reported via Whatsapp group of HSSE PLN and to EVP HSSE, VP K3 and KAM, with a copy to OSH Manager of the Headquarter within 2x24 hours.
4. Investigation Report based on the format in Regulations of the Board of Directors Numbers: 0250.P/DIR/2016, 0251.P/DIR/2016, and 0252.P/DIR/2016 must be submitted using PLN's Corporate AMS to the Head of P2K3 of the Headquarter (HCM Director) with a copy to Head of Regional P2K3 (Regional Director), and Secretary of P2K3 of Headquarter (EVP HSSE), not later than 7 working days since the work accident.
5. The accident reporting to the Corporate AMS uses the format: Reporting on (Work/Installation/Public) Accident of (Main Unit and Executing Unit) (Date of Accident).
6. The nature of submission and security in the letterhead of the Corporate AMS is Urgent and Private.
7. Attaching a documentation in the form of photos of location and last condition of the victim (if any) and work documents (WP, JSA, SOP, IK, Worker Competence Certificate, Medical Examination Result/Diagnosis of the Victim) for Work Accident and Installation Accident.

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Realisasi Kinerja K3

Untuk mewujudkan *zero accident* di lingkungan PLN, terdapat pengukuran *leading indicator* dalam Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu:

1. ***Loss of Life***
   Merupakan kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia di luar *force majeur* (konsolidasi kejadian di Unit dan Anak Perusahaan) sesuai laporan hasil investigasi sidang engineering yang disetujui oleh GM Unit terkait dan EVP K3L dan diketahui Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia. Per Desember 2021, realisasi jumlah kecelakaan *Fatality* tercatat sebesar 13 kali.
2. ***Loss of Productivity***
   Merupakan jumlah hari kerja hilang di seluruh unit (secara konsolidasi) per 1 juta jam orang/tahun. Realisasi sampai dengan Desember 2021 dengan nilai 178 hari kerja hilang/1 juta jam orang/tahun.
3. ***Frequency Rate Accident***
   Merupakan frekuensi kecelakaan kerja yang tergolong *Fatality* (secara konsolidasi) per 1 juta jam orang/tahun. Realisasi sampai dengan Desember 2021 dengan nilai 0,030 kali kejadian/1 juta jam orang/tahun dari target 0,055 kali kejadian/1 juta jam orang/tahun.
4. ***Positive Covid Rate***
   Merupakan rata-rata perbandingan jumlah yang terpapar positif Covid-19 dengan jumlah yang melakukan *screen test* Covid-19. Pencapaian Positive Covid Rate di PLN Holding sampai dengan Desember 2021 adalah 1,99%.

Sementara itu, untuk realisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana di PLN memakan selama 118 hari kalender pada tahun 2021, berhasil tercapai dari target ketersediaan pada Pedoman Penanganan Tanggap Darurat Bencana sejak tanggal 1 Januari 2021 yaitu 120 hari kalender.

Maturity Level K3L

Secara berkala, PLN melakukan pengukuran terhadap *Maturity Level* K3L di tiap unit kerja untuk memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan aspek K3L. *Maturity Level* K3L merupakan alat ukur dalam tingkat kematangan dan konsistensi Implementasi K3L yang terdiri dari:

ACHIEVEMENT OF CORPORATE RESPONSIBILITIES IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)

Realization of OSH Performance

In order to achieve zero accident within PLN, there is a measurement of leading indicator in Occupational Safety and Health Performance:, which are:

1. **Loss of Life**
   This is a work accident causing the employee to pass away besides force majeure (consolidation of events in Units and Subsidiaries) based on the investigation report of engineering meeting approved by the related GM Unit and EVP of HSSE and is known by the Director of Human Capital Management. As of December 2021, the realization of Fatality accident was 13 times.
2. **Loss of Productivity**
   This is the number of working days lost in all units (consolidated) per 1 million man hour/year. The realization up to December 2021 was at 178 working days lost/1 million man hour/year.
3. **Rate Accident Frequency**
   This is a frequency of work accident classified as Fatality (consolidated) per 1 million man hour/year. The realization until December 2021 was 0.030 time of event/1 million man hour/year of the target 0.055 time of event/1 million man hour/year.
4. **Positive COVID-19 Rate**
   This is the average comparison of the number of positive COVID-19 cases and the number of COVID-19 screen test. The positive COVID-19 Rate at PLN Holding up to December 2021 was 1,99%.

As for the realization of Disaster Emergency Response at PLN, it needed 118 calendar days in 2021. It succeeded to achieve the availability target in the Guidelines for Disaster Emergency Response since January 1, 2021, which was 120 calendar days.

HSSE Maturity Level

Periodically, PLN also measures the HSSE Maturity Level of each work unit to ensure compliance with HSSE aspects. HSSE Maturity Level is a measuring tool on the maturity and consistency level of HSSE implementation which consists of:

1. Kepemimpinan, Kebijakan dan Komitmen Manajemen
2. Kuesioner K3
3. Kuesioner Pengamanan
4. Kuesioner Lingkungan Hidup
5. Integritas Laporan

1. Leadership, policy, and management commitment
2. OSH questionnaire
3. Security questionnaire
4. Environmental questionnaire
5. Report Integrity

Maturity Level K3L dinilai dan diverifikasi tiap semester. Berikut ini merupakan *Maturity Level* K3L pada tahun 2021:

The HSSE Maturity Level is assessed and verified every semester. The following is the HSSE Maturity Level in 2021:

No	Aspek *Maturity Level* / *Maturity Level Aspects*	Level
1	Leadership & Management Commitment	4,02
2	Audit, Assessment and Inspection	3,82
3	Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko / Implementation of Danger Identification, Risk Assessment and Control	3,52
4	Safety Training and Education	3,24
5	Safety Campaign and Communication	4,17
6	Reporting	3,72
	Final Score	**3,75**

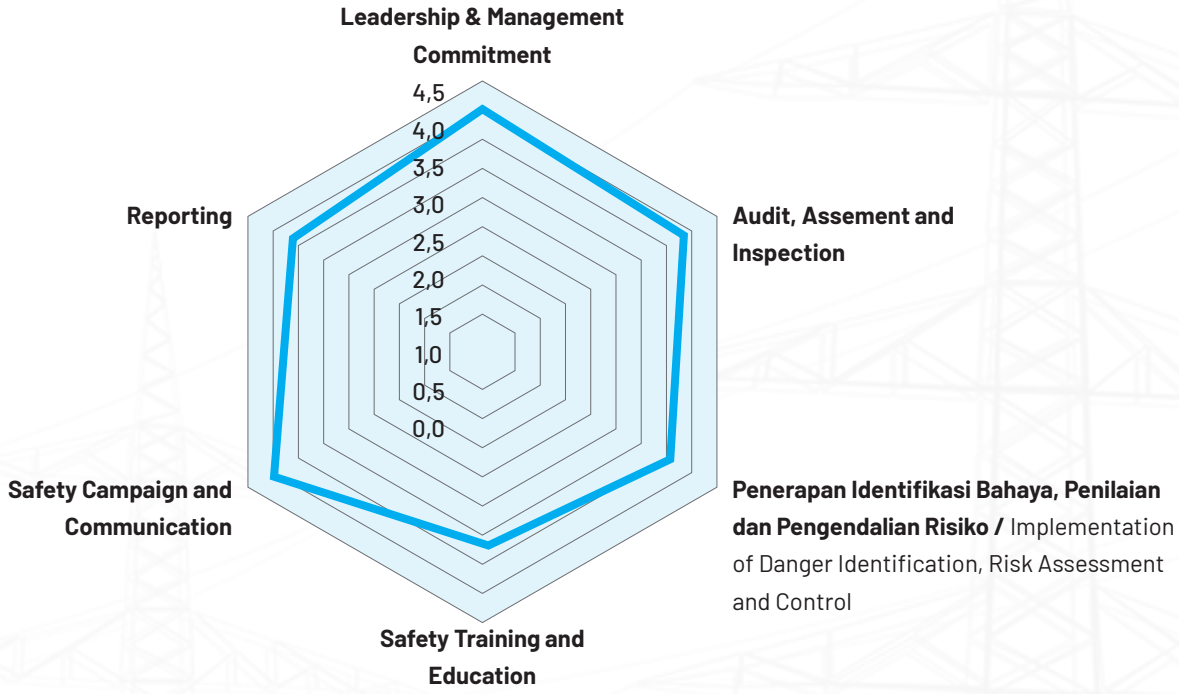

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

PLN berkomitmen untuk menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan, PLN memiliki beberapa kebijakan, antara lain:

1. Perdir No. 135.P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero);
2. Perdir No. 0138.P/DIR/2019 tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis ISO 26000;

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Lingkup pelaksanaan kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan di PLN mencakup Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Anggaran program TJSL tahun 2021 disusun dalam Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT PLN (Persero) Tahun 2021 No. RIS-13/DSI.MBU.B/01/2021 tanggal 5 Januari 2021.

Program TJSL PLN menggunakan sumber pendanaan Program *Community Involvement and Development* (CID) sebesar Rp315,3 miliar, terdiri dari alokasi untuk Program

CORPORATE RESPONSIBILITIES IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The Company's Commitment and Policy Related to Social and Community Development

PLN is committed to making electricity as a medium to improve the quality life of the public, making every effort for electricity as an economic booster, and operating an environmentally friendly business. In order to achieve the effort, PLN is determined to align the development of the three aspects in providing electricity, which are economic, social, and environmental, through the implementation of the corporate responsibilities in social and community development.

In order to support the implementation of corporate responsibility activities in social and community development, PLN has several policies, among others:

1. Perdir No. 135.P/DIR/2019 on Standard Operation Procedures (SOP) for Partnership and Community Development Program (PKBL) within PT PLN (Persero);
2. Perdir No. 0138.P/DIR/2019 on Guidelines for Corporate Social Responsibility (CSR) Based on ISO 26000;

Scope of Implementation of Corporate Responsibility in Social and Community Development

The scope of implementation of corporate responsibility in social and community development in PLN includes Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program and Micro and Small Enterprises (UMK) Funding Program.

Plans for the Implementation of Corporate Responsibility Activities in Social and Community Development

The 2021 TJSL budget was specified in the Minutes of 2021 TJSL Work Plan and Budget Meeting of PT PLN (Persero) No. RIS-13/DSI.MBU.B/01/2021 dated January 5, 2021.

PLN's TJSL program used the CID Program funding sources amounting to Rp315.3 billion, consisting of allocation for TJSL Program amounting to Rp313 billion, by using the

TJSL sebesar Rp313 miliar, dengan menggunakan alokasi sumber pendanaan tambahan anggaran Perusahaan dan Program Pendanaan UMK sebesar Rp2,3 miliar dengan menggunakan saldo dana tersedia.

allocation of additional funding sources of the Company's budget and UMK Funding Program amounting to IDR2.3 billion using the available fund balance.

Namun selain menggunakan anggaran khusus tersebut, PLN juga menggunakan anggaran operasi untuk kegiatan TJSL yang akan dilaporkan lebih lanjut.

However, apart from using the special budget, PLN also uses the operating budget for activities TJSL which will be reported further.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) – *Community Involvement Development* (CID)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, program TJSL PLN meliputi 4 Pilar, yakni Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola yang dirancang untuk mendukung tercapainya 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk pelaksanaan program TJSL CID, selama tahun 2021 PLN telah melaksanakan beberapa program, di antaranya 5 program CSV dan 9 program yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Prioritas.

Program *Creating Shared Value* (CSV)

Tujuan dari pelaksanaan program CSV adalah untuk mendukung bisnis inti PLN, utamanya terkait peningkatan penjualan energi listrik dan peningkatan ketersediaan bahan baku bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari pengelolaan sampah menjadi bahan baku *co-firing* dan menciptakan *shared value* bagi para pemangku kepentingan. Pada tahun 2021, PLN telah merealisasikan 5 program CSV dengan serapan anggaran mencapai Rp29,56 miliar atau 84,79% dari RKA tahun 2021. Berikut ini merupakan deskripsi pelaksanaan program CSV pada tahun 2021:

IMPLEMENTATION OF RESPONSIBILITY ACTIVITIES COMPANIES IN THE FIELD OF SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIETY IMPLEMENTATION

Implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) – Community Involvement Development (CID) Programs

As explained before, PLN's TJSL program includes 4 pillars, i.e. Social Pillar, Economic Pillar, Environmental Pillar, and Legal and Governance Pillar, which are designed to support the achievement of 16 Sustainable Development Goals. To implement the TJSL CID Programs, PLN during 2021 has carried out several programs, including 5 CSV programs and 9 programs that were aligned with the Priorities of Sustainable Development Goals (SDG).

Creating Shared Value (CSV) Program

The objective of the CSV program implementation is to support PLN's core business, mainly related to increasing sales of electricity energy and increasing the availability of mix raw materials of New and Renewable Energy (NRE) from the waste management into co-firing raw materials and create shared value for all stakeholders. In 2021, PLN has realized 5 CSV program by absorbing budget amounting to Rp29.56 billion or 84.79% of 2021 RKA. The following is a description of the CSV program implementation in 2021:

Pelaksanaan Program CSV Tahun 2021 **Implementation of CSV Program in 2021**

No.	Program CSV / *CSV Program*	SDGs	Penerima Manfaat / *Benefit Recipient*	Nilai Manfaat bagi Perusahaan / *Value of Benefit for the Company*
1.	Sambung Listrik Gratis / Free Electricity Connection		18.324 Kepala Keluarga yang tersebar di 20 provinsi. / 18,324 households in 20 provinces.	Peningkatan penjualan energi listrik sebesar Rp3,98 miliar. / Increase in sales of electricity energy of Rp3.98 billion.
2.	Pengelolaan Sampah Organik menjadi bahan baku *Co-Firing* / Organic waste management into co-firing raw materials	7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	295 orang di 4 provinsi, dengan jumlah sampah termanfaatkan sebanyak 21.990 ton. / 295 people in 4 provinces, with the total waste used of 21, 990 ton.	Peningkatan ketersediaan bahan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar Rp2,80 miliar. / Increase in the availability of New and Renewable Energy (NRE) of Rp2.80 billion.
3.	*Electrifying Agriculture*		2.563 orang, 19 kelompok, 1 pesantren, dan 4 UMK di 25 provinsi, dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 795 orang. / 2,563 people, 19 groups, 1 Islamic boarding school, and 4 UMK in 25 provinces, with the total labor absorbed of 795 people.	Peningkatan penjualan energi listrik sebesar Rp863,93 juta. / Increase in sales of electricity energy of Rp863.93 million.
4.	Kampung Kompor Induksi / Induction Stove Village	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	1.178 orang, 817 UMK di 22 provinsi, dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 30 orang. / 1,178 people, 817 UMK in 22 provinces, with the total labor absorbed of 30 people.	Peningkatan penjualan energi listrik sebesar Rp880,07 juta. / Increase in sales of electricity energy of Rp880.07 million.
5.	*Electrifying Marine*		249 orang, 2 UMK di 4 provinsi, dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 16 orang. / 249 people, 2 UMK in 4 provinces, with the total labor absorbed of 16 people.	Peningkatan penjualan energi listrik. / Increased sales of electrical energy.

Program TJSL Selaras SDGs Prioritas

PLN memiliki 9 program unggulan untuk mendukung ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan serapan anggaran mencapai Rp53,01 miliar atau 115,35% dari RKA tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

TJSL Programs Aligned with Prioritized SDGs

PLN has 9 featured programs to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDG), which absorbed the budget amounting to Rp53.01 billion or 115.35% of the 2021 RKA amounting to Rp45.95 billion, with details as follows:

Pelaksanaan Program TJSL Selaras SDGs Prioritas **Implementation of TJSL Programs Aligned with Prioritized SDGs**

No.	Nama Program / *Name of Program*	Penerima Manfaat / *Recipient of Benefits*	SDGs
1.	Pengolahan Potensi Lokal menjadi Energi Terbarukan di *Remote Area* / Management of Local Potential into Renewable Energy in Remote Areas	1.195 orang di 7 provinsi, dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 25 orang. / 1,195 people in 7 provinces, with the total labor absorbed of 25 people.	7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU
2.	Program Potensi Desa Wisata / Tourism Village Potential Program	1.071 orang, 200 UMK, 48 titik lokasi di 23 provinsi, dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 692 orang. / 1,071 people, 200 UMK, 48 points of location in 23 provinces, with the total labor absorbed of 692 people.	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
3.	Bantuan Gerobak Listrik (GELIS) untuk UMKM / Electric Carts (GELIS) Support for UMKM	50 UMK di 6 provinsi. / 50 UMK in 6 provinces.	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
4.	Pengolahan FABA / FABA Management	321 orang di 12 provinsi, dengan jumlah FABA termanfaatkan sebanyak 2.619 ton dan tenaga kerja terserap sebanyak 14 orang. / 321 people in 12 provinces, with the total FABA used of 2,619 ton and labor absorbed of 14 people.	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

No.	Nama Program / *Name of Program*	Penerima Manfaat / *Recipient of Benefits*	SDGs
5.	Program Penghijauan / Reforestation Program	1.860 orang di 25 provinsi, dengan jumlah pohon/bibit tanaman yang ditanam sebanyak 172.094 pohon dan luas area yang ditanami pohon sebesar 44,75 ha. / 1,860 people in 25 pronvinces with the total trees/seed planted of 172,094 trees and the total area planted with trees of 44.75 ha.	
6.	Konservasi Lingkungan Laut / Sea Environment Conservation	628 orang di 17 provinsi, dengan luas area konservasi sebesar 334 ha, jumlah bibit pohon sebanyak 500 bibit, dan tenaga kerja terserap sebanyak 125 orang. / 628 people in 17 provinces, with the total conservation area of 334 ha, the total tree seeds of 500 seeds, and labor absorbed of 125 people.	
7.	Pengolahan Bank Sampah (bayar listrik dengan Sampah) / Waste Bak Management (paying electricity with waste)	1.678 orang, 3 UMK, 457 kelompok Bank Sampah di 26 provinsi, dengan tenaga kerja terserap sebanyak 971 orang dan jumlah sampah yang terolah sebanyak 325 ton. / 1,678 people, 3 UMK, 457 Waste Bank groups in 26 provinces, with the total labor absorbed of 971 people and the total waste processed of 325 ton.	
8.	Pemberdayaan Perempuan / Woman Empowerment	1.212 perempuan, 16 UMK/KWT di 21 provinsi, dengan tenaga kerja terserap sebanyak 496 orang. / 1,212 women, 16 UMK/KWT in 21 provinces, with the total labor absorbed of 496 people.	
9.	Bantuan Difabel/Kelompok Rentan/ Kelompok Adat / Aids for Difable/ Vulnerable Group/Traditional Group	8.558 orang, 847 UMK di 20 provinsi, dengan tenaga kerja terserap sebanyak 1.868 orang. / 8,558 people, 847 UMK in 20 pronvinces, with the total labor absorbed of 1,868 people.	

Pelaksanaan Program Pendanaan UMK

Untuk mendorong percepatan program pembangunan diberbagai daerah dan mendukung kemandirian Usaha Mikro Kecil (UMK) serta dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata, perlu dilakukan dukungan program kegiatan di berbagai sektor serta pemberdayaan UMK, baik akses permodalan, manajemen, maupun kegiatan lainnya.

Pada tahun 2021, telah dilakukan penyaluran Program Pendanaan UMK kepada 46 Mitra Binaan dan selanjutnya dilakukan pembinaan dan pendampingan agar bisa naik kelas. Terkait dengan jumlah UMK yang naik kelas, pada tahun 2021 berhasil terealisasi sebanyak 31 Mitra Binaan atau tercapai 218,81% dari target sebanyak 11 Mitra Binaan.

Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Pada tahun 2021, jumlah penyaluran dana untuk program TJSL terealisasi sebesar Rp835,83 miliar, di mana realisasi dana untuk program TJSL-CID sebesar Rp297,40 miliar. Dari

Implementation of UMK Funding Program

In order to support the acceleration of development program in various areas and the independency of Micro and Small Enterprises (UMK) as well as to achieve fair, prosperous, and equitable society, support is needed for the programs in many sectors and UMK empowerment, in terms of access to capital, management, and other activities.

In 2021, the UMK Funding was distributed to 46 fostered partners and development and assistance were carried out so they can upgrade their level. As for UMK that managed to upgrade their level, in 2021, there were 31 fostered partners or 218.81% of the target, which was 11 fostered partners.

Allocation of Fund for Implementation of Corporate Responsibilities in Social and Community Development

In 2021, the realized amount of fund distributed for TJSL program was Rp853.83 billion, where the funding realization for TJSL-CID program was Rp297.40 billion. From the overall

keseluruhan program TJSL yang diselenggarakan selama tahun 2021, terdapat 5 program TJSL yang mendukung CSV dengan realisasi penyaluran dana sebesar Rp29,56 miliar dan 9 program unggulan untuk mendukung TPB Prioritas dengan realisasi penyaluran dana sebesar Rp53,01 miliar.

TJSL programs held in 2021, there were 5 TJSL programs that supported CSV with the realization of fund distribution of Rp29.56 billion and 9 featured programs to support the Prioritized SDG with the realization of fund distribution of Rp53.01 billion.

Alokasi Dana Program TJSL Tahun 2021 **Allocation of Fund for TJSL Programs in 2021.**

No.	TPB / *SDG's*	RKA Tahun 2021 (Rp) / *Budget Plan Year 2021*	Realisasi s.d. TW 4 Tahun 2021 (Rp) / *Realization until 2021 (Rp)*	Persentase Capaian / *Achievement* Real / RKA Tahunan / *Realization/ Yearly Budget*
A.	**PILAR SOSIAL / *SOCIAL PILLAR***			
1.	TPB 1 / SDG 1	513.766.870.586	445.673.736.426	0,87
2.	TPB 2 / SDG 2	8.683.930.000	14.890.233.230	1,71
3.	TPB 3 / SDG 3	24.080.340.175	26.459.504.705	1,10
4.	TPB 4 / SDG 4	69.372.457.131	52.535.576.523	0,76
5.	TPB 5 / SDG 5	4.556.000.000	4.395.070.100	0,96
B.	**PILAR EKONOMI / *ECONOMI PILLAR***			
1.	TPB 7 / SDG 7	159.974.126.150	89.884.184.561	0,56
2.	TPB 8 / SDG 8	95.948.477.540	80.266.966.030	0,84
3.	TPB 9 / SDG 9	15.941.740.000	15.644.589.802	0,98
C.	**PILAR LINGKUNGAN / *ENVIRONMENTAL PILLAR***			
1.	TPB 6 / SDG 9	6.872.926.862	8.850.461.175	1,29
2.	TPB 11 / SDG 11	26.260.402.187	34.805.345.783	1,33
3.	TPB 12 / SDG 12	10.192.050.900	10.476.091.979	1,03
4.	TPB 13 / SDG 13	680.000.000	2.023.666.300	2,98
5.	TPB 14 / SDG 14	4.182.194.642	4.122.681.343	0,99
6.	TPB 15 / SDG 15	11.003.380.969	8.821.177.219	0,80
D.	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA / *LEGAL AND GOVERNANCE PILLAR***			
1.	TPB 16 / SDG 16	42.759.631.174	36.980.547.196	0,86
	Total	**994.274.528.316**	**835.829.832.372**	**84,06**

Alokasi Dana Program TJSL-CID Tahun 2021 **Allocation of Fund for TJSL-CID Programs in 2021.**

No.	TPB / *SDG's*	Alokasi Dana (Rp) / *Fund Allocation (Rp)*
A. Pilar Sosial / *Social Pillar*		
1.	TPB 1 / SDG 1	3.276.049.812
2.	TPB 2 / SDG 2	14.890.233.230
3.	TPB 3 / SDG 3	26.459.504.705
4.	TPB 4 / SDG 4	52.535.576.523
5.	TPB 5 / SDG 5	4.395.070.100
Sub-total		**101.556.434.370**
B. Pilar Ekonomi / *Economi Pillar*		
1.	TPB 7 / SDG 7	24.486.301.561
2.	TPB 8 / SDG 8	79.555.235.030*
3.	TPB 9 / SDG 9	15.294.379.381

No.	TPB / *SDG's*	Alokasi Dana (Rp) / *Fund Allocation (Rp)*
Sub-total		**119.335.915.972**
C. Pilar Lingkungan / *Environmental Pillar*		
1.	TPB 6 / SDG 6	8.850.461.175
2.	TPB 11 / SDG 11	34.805.345.783
3.	TPB 12 / SDG 12	8.952.075.499
4.	TPB 13 / SDG 13	2.023.666.300
5.	TPB 14 / SDG 14	4.122.681.343
6.	TPB 15 / SDG 15	8.821.177.219
Sub-total		**67.575.407.319**
D. Pilar Hukum dan Tata Kelola / *Legal and Governance Pillar*		
1.	TPB 16 / SDG 16	6.930.547.196
Sub-total		**6.930.547.196**
Jumlah / Total		**295.398.304.857**

*) Termasuk penyaluran dana untuk program UMK senilai Rp3.128.260.000

Sementara itu, efektivitas penyaluran dana untuk Program Pendanaan UMK tahun 2021 sebesar Rp3,13 miliar. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp1,33 miliar disalurkan secara mandiri, sedangkan sisanya senilai Rp1,80 miliar disalurkan melalui Program Pendanaan UMK Sinergi dengan BUMN lain. Realisasi penyaluran Program Pendanaan UMK ini bersumber dari dana bergulir hasil pengembalian pinjaman mitra binaan dan pendapatan jasa administrasi pinjaman serta dari pendapatan bunga bank. Pada tahun 2021, PLN tidak mengalokasikan tambahan dana dari sumber dana operasi Perusahaan.

Sementara itu, pengembalian pinjaman mitra binaan sampai dengan akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1,90 miliar, dengan tingkat kolektibilitas sebesar 14,84 %. Untuk mendorong tingkat pengembalian pinjaman Program Pendanaan UMK, telah dilakukan upaya penagihan dan pemulihan piutang pinjaman PUMK kepada mitra binaan dan pemulihan program sinergi penyaluran dengan BUMN lain.

Mekanisme Pengaduan Masalah terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perusahaan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menerima manfaat dari Program PKBL maupun CSR untuk melaporkan segala keluh kesah dan pengaduan terkait pelaksanaan Program PKBL dan CSR melalui mekanisme

*) Including fund distribution for UMK program amounting to Rp3,128,260,000

Meanwhile, the effectiveness of fund distribution for UMK Funding Program in 2021 amounted to Rp3.13 billion. From the realization, a total of Rp1.33 billion was distributed independently, while the remaining amount of Rp1.80 billion was distributed through UMK Funding Program in Synergy with Other SOEs. Realization of distribution of UMK Funding Program was sourced from the revolving fund of loan repayment by fostered partners and loan administrative service revenue and bank interest revenue. In 2021, PLN did not allocate additional fund from the Company's operational fund.

Moreover, the loan repayment by fostered partners until the end of 2021 was realized at Rp1,90 billion, with the collectability level of 14.84%. To increase the level of loan repayment in UMK Funding Program, some efforts have been done, including collecting and recovering PUMK loan receivables to the fostered partners and recovering distribution program in synergy with other SOEs.

Mechanism of Complaints Related to Social and Community Development

The Company provides opportunities for people who receive the benefits from PKBL and CSR programs to report any complaints and criticism related to the PKBL and CSR program through the reporting mechanism of WBS

pelaporan melalui channel WBS yaitu Telepon, *Short Message Service* (SMS) atau Whatsapp ke nomor resmi Pengaduan Pelanggaran di 08119861901; atau Email ke wbpln@pln.co.id

channels, which are phone, Short Message Service (SMS), or Whatsapp to the official number for violation report at 08119861901; or email to wbpln@pln.co.id.

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Penghargaan terkait Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan dapat dilihat pada bahasan Penghargaan dan Sertifikasi pada Bab Kilas Kinerja.

ACHIEVEMENT OF CORPORATE RESPONSIBILITIES IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The awards in Social and Community Development can be seen on Awards and Certification in Chapter Performance Highlights.

Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Beberapa program TJSL yang telah dilakukan oleh PLN selama tahun 2021, di antaranya Program Pertanian Modern Terpadu Berbasis Listrik, Program MoList *Booth*: Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan untuk UMKM, dan Program Pemanfaatan Limbah FABA untuk Masyarakat memiliki dampak terhadap alam (*nature*), sosial, ekonomi, dan *wellbeing*, dengan uraian sebagai berikut:

Impact of Implementation of Responsible Activities Companies in the Field of Social Development and Society

Several CSR programs that have been carried out by PLN during 2021, including the Agricultural Program Modern Electric Based Integrated MoList Booth Program: Environmentally Friendly Electric Vehicles for MSMEs, and FABA Waste Utilization Program for Society have an impact on nature, social, economic, and wellbeing, with the following description:

Program TJSL / TJSL Programs	Dampak Program terhadap / *Impact of the Programs on*			
	Alam / *Nature*	Sosial / *Social*	Ekonomi / *Economy*	*Wellbeing*
Program Pertanian Modern Terpadu Berbasis Listrik / Electricity-Based Integrated Modern Agricultural Program	• Luas lahan yang teroptimalkan sebesar 614 hektar. / The optimized land area was 614 hectare. • Penghematan jumlah BBM sebesar 44,17 juta liter atau setara dengan Rp227,48 miliar. / Savings on fuel oil of 44.17 million liter or equal to Rp227.48 billion.	Terbentuknya komunitas pertanian berbasis listrik sebanyak 45 kelompok. / The establishment of 45 groups of electricity-based agricultural communities.	• Peningkatan pendapatan petani sebesar Rp1,25 miliar. / Increasing farmers' revenue of Rp1.25 billion. • Peningkatan panen sebesar 90.135 kg. / Increasing harvest of 90,135 kg • Percepatan waktu pa.nen rata-rata selama 31 hari. / Accelerated harvest period with the average of 31 days. • Penghematan biaya produksi sebesar Rp111,44 juta / Savings on production costs of Rp111.44 million.	Jumlah Penerima Manfaat sebanyak 2.148 orang. / The number of benefit recipients was 2,148 people.
Program Molist *Booth*: Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan untuk UMKM / Molist Booth Program: Environmentally-Friendly Electric Vehicles for UMKM	• Reduksi emisi CO_2e sebesar 332 ton per tahun. / Reduction of CO_2e emission of 332 ton per year. • Mengurangi potensi pemakaian bahan bakar fosil sebesar 83.160 liter per tahun. / Reduction of potential utilization of fossil fuel of 83,160 liter.	Peningkatan lapangan kerja untuk produksi Molist Booth di 3 UMK Pelaksana / Increasing number of employment for Molist booth production in 3 executing UMK.	• Peningkatan pendapatan total Rp462 juta untuk 77 UMK. / Increasing total revenue of Rp462 million for 77 UMK. • Penekanan biaya operasional usaha dari UMK Binaan sebesar Rp399,17 juta per tahun. / Reduction of operating costs of fostered UMK of Rp399.17 million per year. • Peningkatan penjualan energi listrik mencapai Rp155,23 juta per tahun. / Increasing sales of electricity of Rp155.23 million.	Peningkatan pendapatan total Rp462 juta untuk 77 UMK. / Increasing total revenue of Rp462 million for 77 UMK.

Program TJSL / TJSL Programs	Dampak Program terhadap / *Impact of the Programs on*			
	Alam / *Nature*	Sosial / *Social*	Ekonomi / *Economy*	*Wellbeing*
Program Pemanfaatan Limbah FABA untuk Masyarakat / FABA Waste Utilization Program for Public	• Pengurangan timbunan FABA di Pembangkit sebesar 11,997 ton. / Reduction of FABA pile in power plants of 11.997 ton. • Pengurangan pencemaran lingkungan akibat FABA. / Reduction of environmental pollution due to FABA.	• Peningkatan kompetensi keahlian baru membangun rumah. / Improvement of new skill competences in developing houses. • Infrastruktur Fasilitas umum lebih lengkap dan nyaman. / More complete and comfortable public infrastructure facilities.	• Peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1,02 miliar. / Increasing public revenue of Rp1.02 billion. • Penyerapan tenaga kerja hingga 1.172 orang. / Absorption of up to 1,172 labors. • Pelibatan pembentukan UMK sebanyak 33 UMK. / Involvement of 33 UMK establishment. • Efisiensi biaya pembangunan sebesar Rp7,46 juta. / Development cost efficiency of Rp7.46 million.	• Memperbaiki ekonomi dan sosial dengan rumah layak huni sebanyak 18 unit. / Improving economy and social with 18 units of livable houses. • Ekonomi tumbuh melalui UMKM sebanyak 33 buah. / Economic growth through 33 UMKM. • Pengelolaan FABA mendukung pemenuhan kriteria SDGs khususnya Goals 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, dan 17. / FABA management supports the fulfillment of SDGs criteria, particularly Goals 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, and 17.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG PRODUK DAN JASA

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan terkait Produk dan Jasa

Seiring dengan persaingan bisnis yang semakin masif, PLN menyadari pentingnya memberikan pelayanan terbaik dalam rangka meningkatkan kepuasan para pelanggan. Hal ini sejalan dengan peran PLN dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan menopang kehidupan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkualitas. Untuk memenuhi tanggung jawab Perusahaan di bidang produk dan jasa, PLN berkomitmen untuk melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat, menyusun program kerja dan merealisasikannya dalam rangka memenuhi harapan para pelanggan, khususnya dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik seluruh masyarakat di Indonesia, PLN memiliki kebijakan tanggung jawab kepada konsumen sebagai bentuk komitmen kuat Perusahaan dalam upaya memperbaiki kualitas layanan, serta melaksanakan tugas penyediaan tenaga listrik yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan di bidang produk dan jasa adalah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Tingkat Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta aturan-aturan teknis lainnya, yang bertujuan untuk:

CORPORATE RESPONSIBILITIES IN PRODUCTS AND SERVICES

The Company's Commitment and Policy Related to the Products and Services

Parallel with the more massive business competition, PLN realizes the importance to give the best service to improve the customer sastisfaction. This is in line with PLN's role in driving the national economy and support the public to achieve better life through the provision of reliable and quality electricity infrastructure. In order to fulfill the corporate responsibilities in products and services, PLN is committed to performing fast and appropriate services, preparing work plans, and realizing them to meet the expectation of customers in particular and stakeholders in general.

To ensure that the public need for electricity throughout Indonesia is fulfilled, PLN has a policy on responsibility to consumers to demonstrate its strong commitment to improve service quality while doing the key task of providing adequate supply of electricity to all Indonesians. One of policies issued to support implementation Company responsibilities in the field of products and services is the decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) regarding the level of Quality of Service for the Provision of Electric Power in the Environment PT PLN (Persero) along with other technical regulations, which aims to:

- Menjamin tegangan listrik yang disalurkan kepada pelanggan sesuai dengan kualitas tegangan yang disyaratkan baik untuk pelanggan tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah.
- Menjamin frekuensi listrik yang disalurkan kepada pelanggan sesuai dengan kualitas yang disyaratkan.
- Meminimalkan frekuensi dan durasi gangguan listrik per pelanggan.
- Memastikan kecepatan pelayanan sambungan listrik baru dan perubahan daya pelanggan.
- Memastikan kualitas pelayanan dan tanggapan atas pengaduan pelanggan.
- Memastikan kualitas pencatatan kWh meter.
- Memastikan kecepatan waktu perbaikan/koreksi rekening listrik pelanggan.

- Ensure the electrical voltage supplied to the customers according to the quality of the voltage required both for high voltage customers, medium and low voltage.
- Ensuring the frequency of electricity supplied to customer according to the required quality.
- Minimize the frequency and duration of electrical disturbances per customer.
- Ensure the speed of service of the electricity connection new and changing customer power.
- Ensure service quality and response to customer complaints.
- Ensure the quality of the kWh meter recording.
- Ensure the speed of repair/correction time customer electricity bill.

Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Produk dan Jasa

Lingkup pelaksanaan kegiatan tanggung jawab Perusahaan di bidang produk dan jasa mencakup pengembangan inovasi produk dan layanan, pemberian program insentif dalam rangka memudahkan calon pelanggan untuk mendapatkan akses sambungan listrik, meningkatkan keandalan dan ketersediaan pasokan listrik, pengendalian mutu dan keamanan produk, peningkatan kualitas layanan pelanggan, serta pemasaran dan komunikasi pemasaran.

Scope of Implementation of Corporate Responsibility in Products and Services

The scope of implementation of corporate responsibilities in products and services include the development of product and service innovation, provision of incentive program in order to ease potential customers in accessing the electricity, improving the reliability and availability of electricity supply, controlling the product quality and safety, improving the customer service quality, and carrying out marketing and marketing communication

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Produk dan Jasa

Pada tahun 2021, Manajemen telah menyusun rencana kegiatan terkait pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan di bidang produk dan jasa, antara lain:

1. Pengembangan inovasi produk dan layanan dalam bentuk digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan atas kebutuhan pelanggan.
2. Program Insentif untuk mengajak pelanggan mendapatkan pelayanan sambungan listrik.
3. Menjaga keandalan dan pasokan listrik pelanggan.
4. Pengembangan mutu, keamanan produk dan kualitas pelayanan.

Plans for the Implementation of Corporate Responsibility Activities in Products and Services

In 2021, the Managemen prepared activity plan related to the implementation of corporate responsibilities in products and services, among others:

1. Development of product and service innovation in a form of digitization to improve services for customer needs.
2. Incentive Program to invite customers get electrical service.
3. Maintain customer reliability and electricity supply.
4. Quality development, product safety and quality service.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG PRODUK DAN JASA

Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan

Sejalan dengan upaya transformasi untuk menjadi perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan, PLN terpacu untuk semakin proaktif dalam memahami

IMPLEMENTATION OF CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN PRODUCTS AND SERVICES

Development of Product and Service Innovation

In line with the effort to achieve transformation into a customer-oriented company, PLN is triggered to be more proactive in understanding the needs of customers and

kebutuhan pelanggan dan calon pelanggan dengan menghadirkan berbagai inovasi produk dan layanan. Hingga tahun 2021, PLN telah meluncurkan beberapa inovasi produk dan layanan terbaik, antara lain:

1. **Layanan Fasilitas Ekstra**

   Seiring dengan perkembangan teknologi, prevalensi kebutuhan dan kepuasan Pelanggan berubah. Tingkat kepuasan yang awalnya telah dipenuhi melalui pasokan listrik yang memadai, kini berkembang menjadi menginginkan kualitas penyaluran yang lebih baik dari Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) reguler yang diberikan.

   Salah satu perubahan level kebutuhan muncul pada pelanggan segmen bisnis atau industri yang memiliki peralatan listrik yang sensitif terhadap tegangan kedip. Pelanggan ini menghadapi risiko biaya pemulihan apabila terjadi tegangan kedip yang sangat tinggi, sehingga pasokan kualitas listrik terbaik menjadi keharusan. Untuk mengatasinya, mereka harus berinvestasi menggunakan fasilitas teknologi untuk mengantisipasi fenomena tegangan kedip antara lain DRUPS/RUPS, Baterai, *Automatic Voltage Conditioning*, dan sebagainya.

   Pengembangan inovasi ini dinilai sebagai potensi untuk memperoleh sumber pendapatan baru, karena PLN dapat tetap meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada pelanggan sekaligus berinvestasi pada peralatan tersebut. Adapun *recovery* atas biaya investasi yang dikeluarkan untuk penyediaan fasilitas teknologi tersebut dapat dimasukkan menjadi *service charge* atau penyesuaian TTL layanan khusus ke Pelanggan.

   Untuk maksud tersebut, PLN menghadirkan Layanan Ekstra Fasilitas guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah tersebut. Produk ini sangat tepat untuk ditawarkan pada daerah kawasan bisnis dan/atau industri yang membutuhkan pasokan tenaga listrik yang sangat berkualitas.

2. ***New* PLN *Mobile***

   PLN Mobile dikembangkan sebagai *market place* untuk produk kelistrikan, anak perusahaan dan mitra sekaligus partner diluar PLN Group. Secara garis besar tujuan dari pengembangan New PLN Mobile adalah untuk menciptakan *direct marketing channel*, membangun branding perusahaan, memberikan nilai pada pelanggan,

potential customers by providing various product and service innovation. Up to 2021, PLN has launched several best product and service innovations, among others:

1. **Extra Facility Services**

   In line with the development of technology, there has been a change of prevalence in customers' needs and satisfaction. Before the customers would usually be satisfied with adequate electricity supply, but now they are demanding for better than the regular Service Quality Level (TMP).

   An example of the change is in the business or industrial segment which have electrical equipment that is sensitive to dip voltage. These customers are exposed to the risk of cost recovery in the event of very high dip voltage, so supplying the best electricity power has become a must for this type of customers. To overcome this, they must invest into technological facilities to anticipate the dip voltage phenomenon, including DRUPS/RUPS, Batteries, Automatic Voltage Conditioning, etc.

   The innovation development is seen as opportunity to generate new income sources as PLN can still improve the quality of electricity supply to the customers by making investments in the equipment. As for the recovery of the investment cost incurred to provide the technology facilities, it can be included in the service charge or adjustments to the TTL of special services to the customers.

   For this purpose, PLN features Facility Extra Services to meet the changing needs of customers. This product is very suitable for business and/or industrial areas that require highly quality electricity supply.

2. **New PLN Mobile**

   PLN Mobile is developed as a market place for electricity products, subsidiaries, and partners, as well as partners outside the PLN Group. In overall, the objective of New PLN Mobil development is to create direct marketing channel, building the Company's brand, proving value to customers, increasing engagement with customers,

meningkatkan engagement pelanggan, menumbuhkan loyalitas pelanggan, terwujudnya *Beyond* Kwh dan Monetisasi serta tercapainya Transformasi Digital PLN.

Rencana pengambangan fitur di tahun 2021 berfokus pada 5 fitur utama yaitu Fitur Pasang Baru, Fitur Listriqu, Fitur ICONNET, Fitur Pembayaran Non-Taglis, dan Fitur Penyambungan Sementara.

Progres Pencapaian:

- Go Live Fitur Pasang Baru pada bulan Februari 2021
- Go Live Fitur Listriqu pada bulan April 2021
- Go Live Fitur ICONNET pada bulan April 2021
- Go Live Fitur Pembayaran Non-Taglis pada bulan Juli 2021
- Go Live Fitur Penyambungan Sementara pada bulan September 2021
- Integrasi PLN Mobile dengan Charge.IN pada bulan April 2021
- Loyalty Management System untuk sistem referral pada bulan November 2021
- Pengembangan OCR Swacam pada bulan Oktober 2021

Untuk pengembangan selanjutnya, PLN berencana untuk melakukan progress *improvement infrastructure* yang terdiri dari pengembangan API Management dan *Microservices Architecture and Integration*.

3. Layanan SwaCam

Aplikasi Catat Meter Mandiri atau swaCAM merupakan salah satu fitur aplikasi yang dikembangkan dalam aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini dihadirkan untuk melaporkan angka *stand* pada kWh meter pascabayar Pelanggan yang dilakukan secara mandiri, sehingga dapat menjaga privasi hunian Pelanggan tanpa diganggu oleh Petugas catat meter. Secara garis besar, konsep aplikasi ini meliputi notifikasi untuk melakukan *capture* angka *stand* kWh meter yang akan muncul di *smartphone* (Aplikasi PLN Mobile) Pelanggan sesuai jadwal baca meter setiap bulannya. Dengan hadirnya aplikasi ini, diharapkan dapat mengurangi keluhan tagihan listrik akibat kesalahan dalam pembacaan angka *stand* pada kWh meter pascabayar.

cultivating customers' loyalty, achieving Beyond Kwh and Monetization, and realizing PLN Digital Transformation.

The feature development plan in 2021 focused on 5 main features, which were New Installation Feature, Listriqu Feature, ICONNET Feature, Non-Taglist Payment Feature, and Temporary Connection Feature.

Achievement Progress:

- Go-Live of New Installation Feature in February 2021
- Go Live of Listriqu Feature in April 2021
- Go Live of ICONNET Feature in April 2021
- Go Live of Non-Taglis Payment Feature in July 2021
- Go Live of Temporary Connection Feature in September 2021
- Integration of PLN Mobile with Charge.IN in April 2021
- Loyalty Management System for referral system in November 2021
- Development of OCR Swacam in October 2021

For the next development, PLN plans to develop progress improvement infrastructure, consisting of API Management development and Microservices Architecture and Integration.

3. SwaCam Service

The Self-Service Meter Reading Application or swaCAM is one of the application features of PLN Mobile. This application helps customers report the stand number on the kWh postpaid meter. The customers can read and report themselves, so they can maintain their privacy and no PLN officer will bother them to read the meter. In principle, the application notifies customers to capture the stand number on the kWh meter using their smartphones (PLN Mobile Application) based on the schedule every month. PLN hopes that the application reduces complaints on electricity bills due to errors in reading the stand number on the kWh postpaid meter

4. ***Renewable Energy Certificate* (REC)**

Produk layanan ini lahir dari semakin menguatnya komitmen global yang ingin menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan energi yang bersumber dari *renewable energy* sehingga tidak menambah emisi yang dapat mengotori lingkungan. Dalam konsensusnya, penggunaan *renewable energy* dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama dengan pemilik jaringan dalam hal ini PLN, sehingga mereka dapat tetap fokus ke bisnis intinya masing-masing.

Dengan mekanisme kepemilikan *Renewable Energy Certificate* (REC), pelanggan dapat membuktikan bahwa pemilik REC adalah pihak yang berhak mengklaim kepemilikan atas sejumlah unit *renewable energy*. 1 Unit REC setara dengan 1 MWh energi listrik. Dengan mekanisme kepemilikan REC, pemiliknya dapat mengklaim atau menyatakan bahwa tenaga listrik yang digunakan bersumber dari *renewable energy*. Pada prosesnya, REC tidak serta merta dapat dikeluarkan oleh PLN secara sepihak, melainkan harus melalui suatu proses *tracking system* dan *due diligence* yang dilakukan oleh suatu *platform*/badan internasional, sehingga REC yang diterbitkan dapat diterima oleh semua pihak. Setelah REC diterbitkan, maka kepemilikannya dapat dialihkan dari PLN ke Pelanggan/non-Pelanggan yang menginginkan pengakuan penggunaan *renewable energy*.

Dengan hadirnya layanan REC ini, diharapkan dapat memenuhi dan memuaskan apa yang dibutuhkan oleh Pelanggan maupun konsumen lainnya. Selain itu, dengan tumbuhnya *market* atas kebutuhan REC, diharapkan dapat menjadi *trigger* dan *awareness* bagi semua pihak agar turut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan listrik yang bersumber dari *renewable energy*, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan REC.

5. **Penambahan SIP Trunk**

Pada tahun 2021, PLN melakukan penambahan SIP Trunk di kota Jambi dan Pekanbaru untuk mengurangi biaya Regionalisasi Telekomunikasi, dengan penghematan biaya sebesar Rp300 juta per bulan atau sebesar Rp3,6 miliar selama tahun 2021.

4. **Renewable Energy Certificate (REC)**

This service was established to respond to the growing commitment of global movement to preserve the environment using renewable energy sources so as not to add emissions that damage the environment. In the consensus, the use of renewable energy can be done through a cooperation contract with grid owner, in this case PLN, so that they can focus on their respective core businesses.

With the Renewable Energy Certificate (REC) ownership mechanism, customers can prove that the REC owner is the party entitled to claim ownership of a certain amount of renewable energy units. One REC unit is equivalent to 1 MWh of electrical energy. With this mechanism, the owner can claim or state that the electricity they use is produced from renewable energy. In the process, PLN alone cannot issue an REC since issuing the certificate takes tracking and due diligence processes to be undertaken by an international platform/agency to make the REC issued acceptable to all parties. After an REC is issued, PLN will then transfer the REC ownership to customers/non-customers who want recognition for the use of renewable energy.

With the presence of REC services, it is expected that PLN can meet and satisfy the needs of the customers and other consumers. Furthermore, the growing market of the needs for REC can stimulate and encourage awareness of all parties to preserve the environment by using electricity from renewable energy, which can be proven through the REC ownership.

5. **Addition of SIP Trunk**

In 2021, PLN added SIP Trunk in Jambi and Pekanbaru to reduce the Telecommunication Regionalization cost, by cost saving of Rp300 million per month or Rp3.6 billion in 2021.

Pemberian Program Insentif

Sejalan dengan komitmen PLN untuk menerangi seluruh pelosok negeri, PLN memberikan berbagai program insentif agar calon pelanggan lebih mudah mendapatkan akses sambungan listrik. Beberapa program insentif yang diberikan selama tahun 2021 antara lain:

1. Terangi Negeri
   Dalam rangka melanjutkan akselerasi pencapaian rasio elektrifikasi nasional serta pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan sambungan listrik. PLN menyadari bahwa salah satu kendala dalam meningkatkan pencapaian rasio elektrifikasi yaitu kemampuan ekonomi dari masyarakat itu sendiri dalam hal biaya penyambungan pasang baru listrik.

2. *Super Electrilife*
   Harga spesial biaya penyambungan tambah daya kepada konsumen melalui program Layanan Paket Listrik 2021.

3. Super Hemat UMKM
   Harga spesial Biaya Penyambungan Tambah Daya yang diberikan kepada merchant/mitra bisnis dari e-Commerce/*marketplace* yang bekerja sama dengan PLN tanpa syarat pembelian alat elektronik.

4. Ramadhan Berkah
   Harga spesial penyambungan tambah daya hingga 11.000 VA sebesar Rp150 ribu yang dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile.

5. Ramadhan Peduli
   Voucher tambah daya hingga 11.000 VA dengan harga harga spesial sebesar Rp202.100 dengan membeli REC.

6. *Home Charging Services*
   Pemilik KBLBB juga dapat melakukan tambah daya dengan harga spesial dan integrasi *Charge-IN* yang memudahkannya untuk mendapatkan diskon tarif sebesar 30% untuk pengisian daya kendaraan listrik pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB.

7. Gebyar PON Papua
   PLN memberikan harga spesial biaya tambah daya dengan harga lebih murah dari harga normal seharga Rp160.000 khusus bagi pelanggan di wilayah Papua dan Papua Barat selama PON berlangsung.

Grant of Incentive Programs

In line with PLN's commitment to light throughout the nation, PLN also provides various incentive programs so it is easier for prospective customers to access electricity. The following are the various incentive provided in 2021:

1. Light up the Country
   In order to continue the acceleration of achievement national electrification ratio and empowerment economy for the underprivileged Haven't got a power connection yet. PLN realizes that one of the obstacles in improving achievement of the electrification ratio, namely the ability the economy of the community itself in terms of costs new plug of electricity.

2. Super Electrolife
   Special price connection fee to add power to consumers through the 2021 Electricity Package Service program.

3. Super Saving MSMEs
   Special price Connection Fee Add Power given to merchants/business partners of e-Commerce/ marketplaces incollaboration with PLN without conditions for purchasing electronic equipment.

4. Ramadan Blessings
   Special price for adding power up to 11,000 VA for Rp. 150 thousand which can be accessed via PLN Mobile application.

5. Ramadan Cares
   Voucher add power up to 11,000 VA with price special price of IDR 202,100 by buying REC.

6. Home Charging Services
   KBLBB owners can also add power with special prices and integrated Charge-IN make it easy to get discount rates 30% for electric vehicle charging at 22.00 WIB to 05.00 WIB.

7. PON Papua Celebration
   PLN provides special prices for additional power costs at a lower price than the normal price for IDR 160,000 specifically for customers in the Papua region and West Papua during PON.

8. Layanan Extra Daya
   Extra Daya memberikan kapasitas daya tambahan di atas permohonan daya calon Konsumen untuk hunian baru dengan prasarana kompor induksi, yang dibangun oleh pengembang perumahan dan pemukiman (*developer*) yang bekerjasama dengan PLN.

9. Super Merdeka Listrik
   Pemberian harga spesial untuk biaya penyambungan pada layanan tambah daya bagi konsumen tegangan rendah 1 phasa daya 450 VA dan 900 VA. Untuk semua golongan tarif yang mengajukan permohonan penambahan daya akhir mulai daya 900 VA hingga daya 5.500 VA. Harga yang dikenakan untuk layanan ini pun hanya sebesar Rp202.100.

10. Nyaman Kompor Induksi
    PLN memberikan harga khusus tambah daya hanya sebesar Rp150 ribu melalui program Nyaman Kompor Induksi 2021 bagi pelanggan yang membeli kompor induksi melalui *partner* yang memiliki kerja sama dengan PLN.

11. Super Dahsyat Hari Listrik
    Untuk mengikuti Promo Listik "Super Dahsyat", pelanggan bisa mengakses aplikasi PLN Mobile dengan melakukan redeem kode promo HLN76. Promo ini menjadi lebih mudah diakses berkat kehadiran PLN Mobile yang memberikan solusi pelayanan kelistrikan dari PLN.

Keandalan dan Ketersediaan Pasokan Listrik

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan prima bagi para pelanggan, PLN berupaya untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan pasokan listrik. Pada tahun 2021, *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) terealisasi sebesar 540,12 menit/pelanggan atau 62,81% dari sasaran sebesar 860 menit/pelanggan, sedangkan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) tahun 2021 terealisasi sebesar 6,70 kali/pelanggan atau 70,47% dari sasaran sebesar 9,50 kali/pelanggan. Sementara itu, Susut Jaringan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 8,59%, lebih rendah dari sasaran sebesar 8,95%. Untuk ketiga indikator kinerja menunjukkan hasil yang baik karena semakin kecil angka/ nilai yang dicapai maka kinerjanya semakin baik.

8. Extra Power Service
   Extra Power provides additional power capacity on top of potential consumer power application for new housing with induction cooker infrastructure, which was built by housing and settlement eveloper (developer) n collaboration with PLN.

9. Super Merdeka Electric
   Special pricing for connection fees on power-added services for voltage consumers low 1 phase power 450 VA and 900 VA. For all tariff classes applying for final power addition from 900 VA to power 5,500 VA. The price charged for this service too only IDR 202,100.

10. Convenient Induction Cooker
    PLN provides a special price for added power only IDR 150 thousand through the Comfy Stove program Induction 2021 for customers who buy stoves induction through partners who have cooperation with PLN.

11. Super Powerful Electric Day
    To take part in the "Super Powerful" Electric Promo, customers can access the PLN Mobile application by redeem promo code HLN76. This promotion become more accessible thanks to the presence of PLN Mobile that provides electrical service solutions from PLN.

Reliability and Availability of Electricity Supply

As the Company's commitment to providing excellent service to all customers, PLN strives to improve the reliability and availability of electricity supply. In 2021, the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) was realized at 540.12 minutes/customer or 62.81% of the target of 860 minutes/customer, while the System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) in 2021 was realized at 6.70 times/customer or 70.47% of target of 9.50 times/customer. Meanwhile, the network loss in 2021 was realized at 8.59%, lower than the target of 8.95%. The three performance indicators show better results because the smaller the number/rate, it means the performance is better.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja SAIDI dan SAIFI selama tahun 2021 antara lain:

1. Pemeliharaan jaringan dan peralatan sistem kelistrikan;
2. Perbaikan konstruksi sistem kelistrikan;
3. Menjaga ROW dari kemungkinan gangguan dari faktor alam seperti pepohonan, hewan, layang – layang, cuaca dan lain – lain;
4. Meningkatkan kualitas kinerja petugas yantek;
5. Memaksimalkan *call center* dan PLN Mobile untuk layanan gangguan.

Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan Susut Jaringan pada tahun 2021 antara lain dengan perbaikan jaringan, peralatan kelistrikan, perbaikan akurasi pembacaan meter dan sosialisasi kepada pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bertanggungjawab.

Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk

Untuk memastikan agar mutu layanan memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan keamanan, baik untuk pelanggan maupun tempat kerja, PLN menerapkan sistem Lingkungan dan Keselamatan Kerja (LK2), pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Monitoring* dan evaluasi implementasinya dilaksanakan setiap semester melalui sistem penilaian tingkat kinerja sesuai Keputusan Direksi No. 031.K/DIR/2010 dan No. 032.K/DIR/2010.

Guna memastikan keamanan dan keselamatan pengguna tenaga listrik, PLN memberikan tanda-tanda pengingat besaran tegangan/voltase yang mengalir di beberapa titik strategis di dekat maupun pada instalasi penyalur tenaga listrik di area publik dan di area pelanggan. Secara berkala, PLN juga membagikan *booklet*/iklan layanan yang berisi konten cara-cara menggunakan listrik dengan aman, termasuk saran dan imbauan agar menggunakan peralatan listrik sesuai standar yang ditetapkan dan memasang instalasi listrik dengan menugaskan tenaga lapangan bersertifikasi. Selain itu, pada tahun 2021, PLN menyelenggarakan *workshop* terkait Penggunaan Listrik yang Aman dan Produktif dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menggunakan listrik secara aman dan produktif.

Some efforts done to improve the performance of SAIDI and SAIFI during 2021 were, among others:

1. Maintaining electricity network and system equipment;
2. Improving of electricity system construction;
3. Maintaining the ROW from the possibilities of disruption from natural factors, such as trees, animals, kites, weather, and others;
4. Improving the performance quality of yantek officers;
5. Maximizing the call center and PLN Mobile for disruption service.

Furthermore, the efforts done to reduce the network loss in 2021, among others, by improving network and electricity equipment, improving the accuracy of meter reading, and disseminating information to customers to use electricity safely and responsibly.

Product Quality and Safety Control

To ensure that service quality meets health, safety, and security standards for both customers and workplaces, PLN implements a Work Environment and Safety (LK2) system and environmental management in accordance with Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety. PLN also implements an Occupational Health and Safety Management System in accordance with Regulation of the Minister of Manpower No. PER.05/MEN/1996 on Occupational Safety and Health Management System. Monitoring and evaluation of the implementation is carried out every semester through performance assessment system based on Decree of the Board of Directors No. 031.K/DIR/2010 and No. 032.K/DIR/2010.

To ensure the safety and security of electricity users, PLN provides warning signs of the voltage flowing at several strategic points near and at electrical power distribution installations in public and customer areas. In addition, PLN also regularly hands out booklets/service advertisements containing materials on how to use electricity safely, including suggestions and reminder to use electrical equipment that meets the established standards and to always assign certified field workers when installing electricity. Moreover, in 2021, PLN conducted a workshop related to Safe and Productive Electricity Usage in order to improve the public awareness on the importance of utilizing electricity safely and productively.

Peningkatan Kualitas Layanan Pelanggan

PLN berkomitmen penuh untuk memperbaiki kualitas layanan kepada pelanggan agar setara dengan pelayanan teknik kelas dunia melalui optimalisasi perkembangan sistem teknologi informasi yang didesain sesuai dengan kebutuhan perkembangan Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional dan pelanggan. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, PLN melakukan beberapa program perbaikan layanan pelanggan, antara lain:

1. Kemudahan menghubungi PLN 123 tanpa menggunakan Kode Area, cukup Tekan Nomor 123 dari seluruh Wilayah Indonesia;
2. Kemudahan Pembayaran tagihan dan Estimasi Biaya Listrik, Progress Pengaduan atau Pengajuan Layanan Niaga, serta Pencatatan Meter semudah dalam Gengaman melalui New PLN Mobile.

Selain itu, sejak tahun 2018, PLN telah mengembangkan pedoman PS4 yaitu Penampilan, Sikap, Senyum, Salam dan Sapa untuk diterapkan seluruh petugas Yantek sebagai *Standard Operational Procedure* (SOP) petugas dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Di dalam SOP ini, telah ditentukan di antaranya seragam yang dikenakan, kerapian penampilan fisik, keramahan, serta etika berkomunikasi dengan pelanggan. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara PLN dan setiap Unit Usaha, agar para petugas senantiasa disiplin dalam menerapkan standar PS4 dengan mengutamakan *response, recovery, quality, integrity,* dan *safety* dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan. Terdapat 7 (tujuh) ketentuan umum PS4, terdiri dari:

1. Petugas Yantek wajib mengenakan seragam standar yang didesain PLN, memakai kartu identitas, mengenakan APD, dan membawa nomor pengaduan pelanggan.
2. Petugas Yantek harus berpenampilan rapi, panjang rambut pegawai laki-laki rapi/tidak gondrong, menjaga kebersihan pribadi agar senantiasa tampil segar dan bebas bau tak sedap.
3. Petugas Yantek harus bekerja dengan sopan, menyampaikan salam sapa, tidak merokok selama melaksanakan tugas.
4. Petugas Yantek harus memohon izin saat memasuki halaman/persil pelanggan.
5. Petugas Yantek harus mematuhi ketentuan K2/K3 (Keselamatan Ketenagalistrikan/Keselamatan dan Kecelakaan Kerja).

Improvement in Customer Service Quality

PLN is fully committed to improving the quality of service to customers so it can be equal to world-class technical service by optimizing the information technology system development designed in accordance with the Company's development needs to meet the national and customers' electricity need. In order to realize such commitment, PLN conducts several programs to improve the customer service, as follows:

1. Ease of contacting PLN 123 without using Area Code, just Dial Number 123 from all Regions Indonesia;
2. Ease of Bill Payment and Cost Estimation Electricity, Complaint Progress or Service Submission Commerce, as well as Meter Recording as easy as in Griangan via New PLN Mobile.

Furthermore, since 2018, PLN has developed PS4 guidelines, which are Appearance, Attitude, Smile, Greet and Salute, to be applied by all Technical Service (Yantek) officers as the Standard Operating Procedure (SOP) for them in providing the best service for customers. This SOP has specified the uniforms, tidiness of physical appearance, friendliness, and ethics of communicating with customers. This has become a joint commitment between PLN and each Business Unit, so the officers are always disciplined in implementing PS4 standards by prioritizing response, recovery, quality, integrity, and safety, in delivering services to customers. There are 7 (seven) general provisions of PS4, including:

1. Yantek officers must wear a standard uniform designed by PLN, an identity card, and PPE, as well as carry the customer complaint number.
2. Yantek officers must look neat, the hair length of the male personnel must be neat/not long, and maintain personal hygiene to always look fresh and be odor-free.
3. Yantek officers must work politely, greet, and refrain from smoking while working.
4. Yantek officers must request for permission prior to entering a customer's yard and/or premises.
5. Yantek officers must must comply with the K2/K3 (Electrical Safety/Work Safety and Accident) procedures.

6. Petugas Yantek harus meminta tanda tangan Laporan Gangguan dan menginformasikan kepada Pelanggan untuk memberikan penilaian tingkat kepuasan layanan.
7. Petugas Yantek harus menjaga integritas, tidak menerima *tip* selama bertugas.

Pemasaran dan Komunikasi Pemasaran

Sebagai bagian dari upaya transformasi korporasi, PLN kini semakin aktif melaksanakan program pemasaran. Kegiatan pemasaran juga dilakukan sebagai upaya untuk membangun hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama para pelanggan, baik terkait dengan penjualan produk usaha maupun lainnya, seperti pembelian produk kelistrikan.

Beberapa kegiatan terkait program pemasaran dan komunikasi pemasaran yang dilakukan selama tahun 2021 antara lain:

1. *Contact Center* PLN 123 melakukan Telesales dan Telemarketing untuk menyasar pelanggan dengan pemakaian di atas 500 Jam Nyala, untuk dilakukan probing Pengajuan Program Tambah Daya;
2. Publikasi penggunaan aplikasi New PLN Mobile kepada masyarakat untuk mempermudah akses pemasangan, pengaduan dan pembayaran kepada pelanggan.

Mekanisme Pengaduan dan Keluhan Pelanggan

PLN menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi para pelanggan dan *stakeholder* lainnya untuk melaporkan segala pengaduan dan keluhan terkait produk dan jasa yang disediakan oleh Perusahaan maupun kualitas pelayanan yang diberikan. Seluruh laporan pengaduan dan keluhan dapat disampaikan melalui:

- *Contact Center* PLN 123 via telepon
- *E-mail*: pln123@pln.co.id
- *Website*: www.pln.co.id
- Twitter: @pln_123
- Facebook: PLN123
- Instagram: @pln123_official

PLN telah memasukkan kriteria penyelesaian keluhan pelanggan sebagai target kinerja unit untuk memastikan tindak lanjut penanganan keluhan pelanggan. Adapun standar waktu pelayanan per jenis gangguan pada unit pelaksana, adalah:

6. Yantek officers must request the customer to sign the Interference Report and ask the customer to provide satsifaction assessment on the service.
7. Yantek officers must maintain integrity and not accept tip while on duty.

Pemasaran dan Komunikasi Pemasaran

As part of its corporate transformation, PLN becomes more active in running marketing programs. Marketing activities are also designed to build a harmonious relationship with stakeholders, especially customers related to the sale of products or for the purpose of purchasing electricity products.

Several activities carried out related to the marketing and marketing communication programs during 2021 were as follows:

1. PLN 123 Contact Center conducts Telesales and Telemarketing to target customers with usage above 500 Hours On, to do probing of the Power-Up Program Submission;
2. Publication of the use of the New PLN Mobile application to community to facilitate access to installation, complaints and payments to customers.

Mechanism of Customer Reports and Complaints

PLN provides communication channels that are easy to be accessed by customers and other stakeholders to report any complaints and criticism related to products and services provided by the Company and the service quality provided. Any reports on complaints and criticism can be submitted via:

- Contact Center PLN 123 via phone
- E-mail: pln123@pln.co.id
- Website: www.pln.co.id
- Twitter: @pln_123
- Facebook: PLN123
- Instagram: @pln123_official

PLN has included customer complaint resolution criteria as a unit performance target to ensure follow-up in handling customer complaints. The standard service time per type of disruption to the implementing unit is:

1. Kedatangan petugas: 30 menit
2. Gangguan trafo: 4 jam
3. Gangguan JTR: 1,5 jam
4. Gangguan SR: 30 menit

1. Officer arrival: 30 minutes
2. Disruption in transformer: 4 hours
3. Disruption in JTR: 1,5 hours
4. Disruption in SR: 30 minutes

Mekanisme Pengaduan dan Keluhan Pelanggan

Mechanism for Customers' Reporting and Complaints

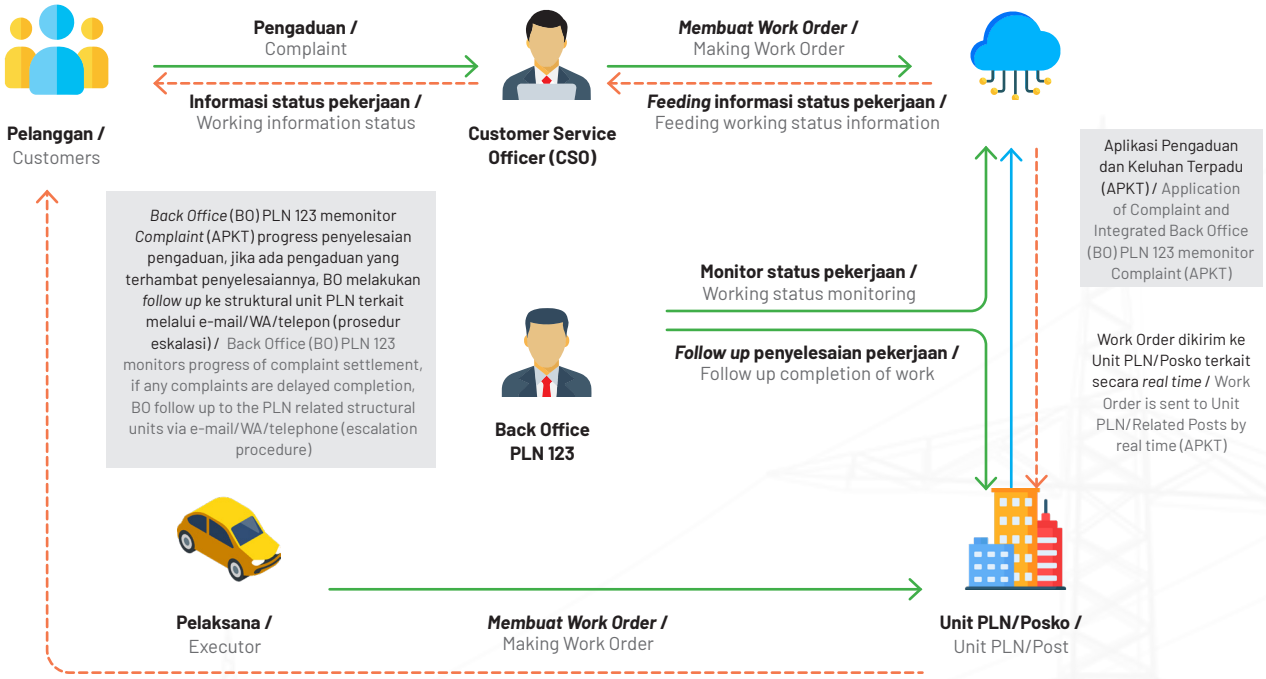

Jumlah keluhan di tahun 2021 meningkat sebesar 1.440.891 atau 91% dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 752.696 keluhan. Peningkatan ini dikarenakan semakin banyaknya kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Meskpun begitu, Perseroan masih tetap dapat menjaga tingkat penyelesaian pengaduan yaitu mencapai 100%.

The number of complaints in 2021 reached of 1,440,891 or increased 91% from the previous year which only amounted to 752,696 complaints. This increase is due to the increasing number of complaint channels that can be accessed by the public, making it easier for the public to submit their complaints. Even so, the Company is still able to maintain the level of 100% complaint settlement.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE), apabila standar pelayanan terlampaui dari yang dijanjikan maka akan diberikan kompensasi sebesar 10% biaya beban. Kompensasi ini dilaksanakan di seluruh unit pelaksana pelayanan pelanggan.

Based on Decision of Director General of Electricity and Energy Utilization, if the service standard exceeds the promised, the assigned officer will get a 10% compensation of the cost incurred. This compensation applies to all customer service units.

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI BIDANG PRODUK DAN JASA

Survei Kepuasan Pelanggan

Setiap tahun, PLN menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) dalam rangka mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan jasa serta pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan. SKP mengukur 9 (sembilan) parameter kepuasan pelanggan, yaitu:

ACHIEVEMENT OF CORPORATE RESPONSIBILITIES IN PRODUCTS AND SERVICES

Customer Satisfaction Survey

Every year, PLN holds Customer Satisfaction Survey (CSS) in order to measure the customer satisfaction on the products and service and the service provided by the Company. The CSS measures 9 (nine) parameters of customer satisfaction as follows:

Realisasi Hasil SKP Tahun 2021 **Realization of CSS Result in 2021**

No.	Parameter SKP / *CSS Parameter*	Hasil SKP / *CSS Result*
1.	Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index	95,17%
2.	Indeks Ketidakpuasan Pelanggan / Customer Dissatisfaction Index	0,46%
3.	Indeks Loyalitas Pelanggan / Customer Loyalty Index	98,43%
4.	Indeks Keterikatan Pelanggan / Customer Engagement Index	97,24%
5.	Indeks Kepedulian Pelanggan / Customer Care Index	98,14%
6.	Indeks Efektivitas Pintu Layanan (Call Center) / Index of Effectiveness of Service Doors (call center)	95,70%
7.	Indeks Efektivitas Pintu Layanan (Website) / Index of Effectiveness of Service Doors (website)	93,20%
8.	Indeks Efektivitas Pintu Layanan (PLN Mobile) / Index of Effectiveness of Service Doors (PLN Mobile)	91,96%
9.	Indeks Kepuasan Pelanggan Relatif terhadap Pesaing / The Customer Satisfaction Index is Relative to Competitors	1,40%

Secara umum, terdapat kenaikan indeks pada keseluruhan survei. Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil SKP Nasional, perbaikan prioritas yang masih perlu untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya adalah pada dimensi Informasi Pelayanan, Pengaduan dan Mutu Listrik.

In general, there is an increase in the overall index survey. Based on the results of the analysis of the results of SKP National, priority improvements that still need to be improved in the following year is on the dimensions Service Information, Complaints and Electrical Quality.

Penghargaan terkait Tanggung Jawab Perusahaan di Bidang Produk dan Jasa

Penghargaan di bidang Produk dan Jasa dapat dilihat pada bahasan Penghargaan dan Sertifikasi Contact Center PLN 123 sebagai pintu layanan utama PLN dimana dalam periode tahun 2021 yang memperoleh 61 penghargaan, terdiri dari:

a. 51 Medali dari Penghargaan The Best Contact Center Indonesia - TBCCI 2021 yang merupakan ajang penghargaan tingkat Dunia Contact Center Tingkat Nasional di Indonesia dan mendapat pengakuan secara internasional oleh CC Association of Asia Pacific (CC-APAC);
b. 1 Medali dari Kompetisi The Best Contact Center Asia Pacific (APAC) 2021;
c. 3 Penghargaan Contact Center Service Excellence Award (CCSEA);
d. 3 Penghargaan Contact Center World Asia Pacific - CCW APAC;
e. 3 Medali dari Kompetisi The Best Contact Center World (CCW) 2021, kompetisi skala Internasional yang diikuti oleh 50 Negara. Pada tahun 2021, *Contact Center* PLN pertama kali mengikuti ajang kompetisi berskala internasional ini.

Award related to the Corporate Responsibilities in Products and Services

Awards in the field of Products and Services can be seen at PLN Contact Center Award and Certification discussion 123 as the main service door for PLN which in the period of in 2021 which won 61 awards, consisting of:

a. 51 Medals from The Best Contact Center Award Indonesia - TBCCI 2021 which is the event World-level award Contact Center Level National in Indonesia and received international recognition internationally by the CC Association of Asia Pacific (CCAPAC);
b. 1 Medal from The Best Contact Center Asia Competition Pacific (APAC) 2021;
c. 3 Contact Center Service Excellence Awards Awards (CCSEA);
d. 3 World Asia Pacific Contact Center Awards - CCW APAC;
e. 3 Medals from The Best Contact Center World Competition (CCW) 2021, International scale competition to be participated in by 50 countries. In 2021, Contact Center For the first time, PLN participated in a large-scale competition this international.

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2021 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2022

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

SUAHASIL NAZARA
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

RIDA MULYANA
Komisaris
Commissioner

TEDI BHARATA
Komisaris
Commissioner

SUSIWIJONO MOEGIARSO
Komisaris
Commissioner

MOHAMAD IKHSAN
Komisaris
Commissioner

DUDY PURWAGANDHI
Komisaris
Commissioner

EKO SULISTYO
Komisaris
Commissioner

HERU WINARKO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

ALEX ISKANDAR MUNAF
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2021 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2021 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the content of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Annual Report.
This Statement is made truthfully.

Jakarta, June 2022

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

DARMAWAN PRASODJO
Direktur Utama
President Director

SINTHYA ROESLY
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

EVY HARYADI
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

BOB SARIL
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan
Director of Commerce and Customer Management

HARTANTO WIBOWO
Direktur Energi Primer
Director of Primary Energy

YUSUF DIDI SETIARTO
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital Management

WILUYO KUSDWIHARTO
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan
Director of Mega Project and New Renewable Energy

ADI PRIYANTO
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara

HARYANTO WS
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
Director of Regional Business for Java, Madura, and Bali

ADI LUMAKSO
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan
Director of Regional Business for Sumatera and Kalimantan

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1.	Nama/*Name*	:	DARMAWAN PRASODJO
	Alamat kantor/*Office address*	:	PT PLN (PERSERO) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card*	:	The Green Cluster Grand Canyon Blok I-2 No. 25 BS RT. 009, RW. 005, Kec Serpong, Tangerang Selatan
	Nomor telepon/*Phone number*	:	(021) 7261122
	Jabatan/*Position*	:	DIREKTUR UTAMA / *PRESIDENT DIRECTOR*
2.	Nama/*Name*	:	SINTHYA ROESLY
	Alamat kantor/*Office address*	:	PT PLN (PERSERO) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card*	:	APT Taman Rasuna TWR 17-14 D RT 003 RW 010 Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Selatan
	Nomor telepon/*Phone number*	:	(021) 7261122
	Jabatan/*Position*	:	DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO / *DIRECTOR OF FINANCE AND RISK MANAGEMENT*

menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles;*
3. a. *All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;*
   b. *The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts;*
4. *We are responsible for the Company and its Subsidiaries Internal control system.*

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 23 Mei 2022 / May 23 2022

DARMAWAN PRASODJO	SINTHYA ROESLY
Direktur Utama / *President Director*	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / *Director of Finance and Risk Management*

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as at December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles.

JAKARTA
23 Mei/*May* 2022

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0241

Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara
00978/2.1025/AU.1/02/0241-2/1/V/2022

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS AT DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
ASET				***ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	1,427,058,358	1,401,888,487	*Property, plant and equipment*
Aset hak guna	7	29,762,537	31,193,985	*Right-of-use assets*
Properti investasi	8	5,451,410	5,408,572	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	17,810,839	14,112,585	*Investments in associates and joint ventures*
Pajak dibayar di muka	19	17,112,377	8,898,076	*Prepaid taxes*
Aset pajak tangguhan	48	264,705	195,289	*Deferred tax assets*
Piutang pihak berelasi	10	1,160,081	1,309,326	*Receivables from related parties*
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	4,861,882	5,882,934	*Restricted cash in banks*
Piutang lain-lain	17	1,145,976	886,052	*Other receivables*
Piutang dari Pemerintah	16	18,254,891	17,275,490	*Receivables from Government*
Aset tidak lancar lain	12	4,422,025	4,635,419	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1,527,305,081**	**1,491,686,215**	***Total Non-current Assets***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	13	37,968,399	54,735,434	*Cash and cash equivalents*
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	206,279	-	*Restricted cash in banks*
Investasi jangka pendek	14	297,720	366,708	*Short-term investments*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	15	2,142,886	1,784,056	*Related parties*
Pihak ketiga	15	21,659,500	19,494,360	*Third parties*
Piutang dari Pemerintah	16	8,300,000	819,067	*Receivables from Government*
Piutang lain-lain	17	1,249,618	1,746,344	*Other receivables*
Persediaan	18	10,393,419	10,277,289	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	19	2,701,520	7,287,693	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	808,968	640,881	*Prepaid expenses and advances*
Piutang pihak berelasi	10	183,066	76,673	*Receivables from related parties*
Jumlah Aset Lancar		**85,911,375**	**97,228,505**	***Total Current Assets***
JUMLAH ASET		**1,613,216,456**	**1,588,914,720**	***TOTAL ASSETS***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS AT DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Equity attributable to owners of the parent*
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham				*Capital stock - par value of Rp1 per share*
Modal dasar - 439.000.000 saham				*Authorised - 439,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 135.460.886 saham pada 31 Desember 2021 dan 135.342.182 saham pada 31 Desember 2020	21	135,460,886	135,342,182	*Subscribed and paid-up 135,460,886 shares, as at December 31, 2021 and 135,342,182 shares, as at December 31, 2020*
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	22	10,075,210	-	*Stock subscription from Government in issuance process*
Tambahan modal disetor	22	34,608	5,216,571	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	21	64,657,026	64,657,026	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	21	84,962,218	71,928,554	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		685,408,045	661,734,097	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		980,597,993	938,878,430	*Equity attributable to owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		1,009,130	934,162	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		**981,607,123**	**939,812,592**	***Total Equity***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	48	45,576,375	31,746,600	*Deferred tax liabilities*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities - net of current portion*
Penerusan pinjaman	24	31,778,793	35,501,803	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	25	2,927,754	3,649,146	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa	26	10,471,903	14,035,913	*Lease liabilities*
Utang bank	27	139,045,012	154,489,751	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	187,734,643	192,850,308	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	29	5,711,211	6,097,857	*Electricity purchase payables*
Utang KIK - EBA	28	-	655,772	*KIK - EBA loans*
Utang pihak berelasi	30	-	9,432	*Payable to related party*
Utang lain-lain	32	466,379	182,093	*Other payables*
Pendapatan ditangguhkan	23	13,271,056	5,644,472	*Deferred revenue*
Liabilitas imbalan kerja	50	48,087,727	54,609,453	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**485,070,853**	**499,472,600**	***Total Non-current Liabilities***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS AT DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	31	20,566,633	10,163,212	*Related parties*
Pihak ketiga	31	27,338,123	28,985,343	*Third parties*
Utang pajak	33	1,998,768	1,747,279	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	34	6,528,616	6,990,380	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	50	10,320,993	8,959,711	*Short-term employee benefits liabilities*
Uang jaminan langganan	35	15,584,069	14,802,396	*Customer security deposits*
Utang biaya proyek	36	114,546	153,983	*Project cost payables*
Pendapatan ditangguhkan	23	740,906	1,617,725	*Deferred revenue*
Liabilitas derivatif	57	107,271	327,544	*Derivative liabilities*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturities of long-term liabilities*
Penerusan pinjaman	24	2,920,412	3,033,168	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	25	1,960,686	2,416,967	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa	26	4,570,040	4,450,390	*Lease liabilities*
Utang bank	27	26,841,397	18,816,957	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	5,420,392	14,970,000	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	29	457,545	427,974	*Electricity purchase payables*
Utang KIK - EBA	28	569,578	871,177	*KIK - EBA loans*
Utang lain-lain	32	20,498,505	30,895,322	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**146,538,480**	**149,629,528**	***Total Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**631,609,333**	**649,102,128**	***TOTAL LIABILITIES***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**1,613,216,456**	**1,588,914,720**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUE***
Penjualan tenaga listrik	37	288,862,726	274,898,464	*Sales of electricity*
Penyambungan pelanggan	23	493,437	312,725	*Customer connection fees*
Subsidi listrik Pemerintah	38	49,796,949	47,988,114	*Government electricity subsidy*
Pendapatan kompensasi	16	24,594,425	17,904,508	*Compensation income*
Lain-lain	39	4,426,733	4,311,826	*Others*
Jumlah Pendapatan Usaha		368,174,270	345,415,637	*Total Revenue*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	40	118,419,490	106,014,285	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	41	103,553,472	96,250,367	*Purchased electricity*
Sewa	42	4,772,014	5,502,571	*Leases*
Pemeliharaan	43	22,600,774	21,940,509	*Maintenance*
Kepegawaian	44	25,092,756	24,965,707	*Personnel*
Penyusutan aset tetap	6	38,327,468	36,662,917	*Property, plant and equipment depreciation*
Penyusutan aset hak guna	7	3,113,803	2,479,663	*Right-of-use assets depreciation*
Lain-lain	45	7,239,348	7,192,146	*Others*
Jumlah Beban Usaha		323,119,125	301,008,165	*Total Operating Expenses*
LABA USAHA		**45,055,145**	**44,407,472**	***OPERATING PROFIT***
(Beban)/penghasilan lain-lain - bersih	47	(4,921,682)	1,916,966	*Other (expense)/income - net*
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih		2,676,145	(7,742,152)	*Gain/(loss) on foreign exchange - net*
Penghasilan keuangan		787,231	1,125,519	*Finance income*
Beban keuangan	46	(20,375,755)	(27,415,886)	*Finance costs*
LABA SEBELUM PAJAK		**23,221,084**	**12,291,919**	***PROFIT BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK	48	**(10,046,207)**	**(6,298,491)**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**13,174,877**	**5,993,428**	***PROFIT FOR THE YEAR***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
LABA TAHUN BERJALAN		**13,174,877**	**5,993,428**	***PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	9	610,789	107,890	*Share of other comprehensive income from associates and joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	6	19,559,900	(1,657,836)	*Changes in property, plant and equipment revaluation surplus*
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	50	8,533,129	1,915,369	*Remeasurement of defined benefit plans*
Beban pajak terkait	48.b	(4,696,115)	(56,657)	*Related income tax expense*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		**24,007,703**	**308,766**	***Other comprehensive income for the year after tax***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**37,182,580**	**6,302,194**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Profit for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		13,128,626	5,950,884	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		46,251	42,544	*Non-controlling interests*
Jumlah		**13,174,877**	**5,993,428**	***Total***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		37,107,612	6,259,650	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		74,968	42,544	*Non-controlling interests*
Jumlah		**37,182,580**	**6,302,194**	***Total***
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	49	**96,972**	**48,439**	***EARNINGS PER SHARE BASIC/DILUTED (in Rupiah full amount)***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 3/1 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent entity*											
					Saldo laba/*Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*						
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-in capital*	Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ *Stock subscription from Government in issuance process*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas program manfaat pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans*	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income from associates and joint ventures*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		**115,181,002**	**10,528,230**	**9,919,958**	**60,334,896**	**70,997,731**	**673,854,483**	**(12,793,858)**	**449,327**	**928,471,769**	**908,644**	**929,380,413**	***Balance as at December 31, 2019***
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan	59	-	-	-	-	(782,552)	-	-	-	(782,552)	-	(782,552)	*Opening balance adjustment for adoption SFAS 71: Financial Instruments*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		**115,181,002**	**10,528,230**	**9,919,958**	**60,334,896**	**70,215,179**	**673,854,483**	**(12,793,858)**	**449,327**	**927,689,217**	**908,644**	**928,597,861**	***Balance as at January 1, 2020***
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	22	15,161,180	(10,528,230)	(4,703,387)	-	-	-	-	-	(70,437)	-	(70,437)	*Reclassification from additional paid-in capital*
Penambahan modal disetor tahun berjalan	21, 22	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	*Additions of paid-in capital during the year*
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,026)	(17,026)	*Dividends*
Cadangan umum tahun berjalan	21	-	-	-	4,322,130	(4,322,130)	-	-	-	-	-	-	*Appropriation during the year*
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	6	-	-	-	-	84,621	(84,621)	-	-	-	-	-	*Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus to retained earnings*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	5,950,884	(1,293,112)	1,493,988	107,890	6,259,650	42,544	6,302,194	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		**135,342,182**	**-**	**5,216,571**	**64,657,026**	**71,928,554**	**672,476,750**	**(11,299,870)**	**557,217**	**938,878,430**	**934,162**	**939,812,592**	***Balance as at December 31, 2020***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 3/2 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent entity*											
							Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*						
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-in capital*	Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ *Stock subscription from Government in issuance process*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings*		Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas program manfaat pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans*	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income from associates and joint ventures*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
					Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*							
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021		**135,342,182**	**-**	**5,216,571**	**64,657,026**	**71,928,554**	**672,476,750**	**(11,299,870)**	**557,217**	**938,878,430**	**934,162**	**939,812,592**	***Balance as at January 1, 2021***
Penambahan modal dari penerbitan saham	21	118,704	-	-	-	-	-	-	-	118,704	-	118,704	*Addition from shares issuance*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	5, 22	-	-	(106,753)	-	-	-	-	-	(106,753)	-	(106,753)	*Difference in restructuring transactions between entities under common control*
Penambahan modal Negara dalam proses penerbitan saham	21,22	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	*Stock subscription from Government in issuance process*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	22	-	5,075,210	(5,075,210)	-	-	-	-	-	-	-	-	*Reclassification from additional paid-in capital*
Dividen	21	-	-	-	-	(400,000)	-	-	-	(400,000)	-	(400,000)	*Dividends*
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	6	-	-	-	-	305,038	(305,038)	-	-	-	-	-	*Reclassification of property, plant, and equipment revaluation surplus*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	13,128,626	16,741,074	6,627,123	610,789	37,107,612	74,968	37,182,580	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**135,460,886**	**10,075,210**	**34,608**	**64,657,026**	**84,962,218**	**688,912,786**	**(4,672,747)**	**1,168,006**	**980,597,993**	**1,009,130**	**981,607,123**	***Balance as at December 31, 2021***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/1 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		301,069,399	288,905,327	*Cash receipts from customers*
Penerimaan subsidi listrik	38	46,155,349	48,700,398	*Government subsidy received*
Penerimaan kompensasi		17,904,508	45,426,981	*Compensation received*
Penerimaan pajak penghasilan badan		479,309	563,423	*Cash receipts for corporate income tax*
Penerimaan restitusi pajak lainnya		5,798,026	548,572	*Cash receipts for other taxes*
Penerimaan bunga		787,231	1,125,519	*Interest received*
Pembayaran kas kepada pemasok		(246,824,172)	(241,142,339)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan		(21,894,618)	(21,713,221)	*Cash paid to employees*
Pembayaran bunga		(20,229,812)	(28,594,725)	*Interest expense paid*
Pembayaran pajak penghasilan		(1,760,566)	(1,781,804)	*Income tax paid*
Pembayaran surat ketetapan pajak		(12,863,580)	(428,180)	*Payment of tax assessment letters*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		**68,621,074**	**91,609,951**	***Net cash provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama		323,358	303,346	*Dividends received from associates and joint ventures*
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi		23,240	2,044,600	*Proceeds from sale of assets not used in operations*
Akuisisi entitas anak		(552,605)	-	*Acquisition of subsidiary*
Perolehan aset tetap		(59,633,724)	(69,946,508)	*Addition of property, plant and equipment*
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	(179,664)	(1,933,292)	*Acquisition of investments in associates and joint ventures*
Penarikan rekening bank dibatasi penggunaannya		8,092,156	9,202,844	*Withdrawal of restricted cash in banks*
Penempatan rekening bank dibatasi penggunaannya		(7,618,115)	(8,654,745)	*Placement of restricted cash in banks*
Penarikan investasi jangka pendek		577,776	-	*Withdrawal of short-term investments*
Penempatan investasi jangka pendek		(30,000)	(31,962)	*Placement of short-term investments*
Penambahan aset tidak lancar lain		(554,450)	-	*Addition of other non-current assets*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(59,552,028)**	**(69,015,717)**	***Net cash used in investing activities***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/2 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Perolehan penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	21	5,000,000	-	*Proceeds from stock subscription from Government in issuance process*
Penambahan modal disetor	21	-	5,000,000	*Additional paid-in capital*
Pembayaran dividen	22	(400,000)	(17,026)	*Payment of dividends*
Penerimaan penerusan pinjaman		894,658	2,102,313	*Proceeds of two-step loans*
Pembayaran penerusan pinjaman		(3,044,547)	(3,040,001)	*Repayments of two-step loans*
Penerimaan utang dari Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		8,423	-	*Proceeds of Government and non-bank Government financial institution loans*
Pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		(750,000)	(1,043,793)	*Repayments of Government and non-bank Government financial institution loans*
Penerimaan utang bank - jangka pendek		3,400,000	11,022,250	*Proceeds of bank loans - short term*
Penerimaan utang bank - jangka panjang		31,428,400	17,923,059	*Proceeds of bank loans - long term*
Pembayaran utang bank - jangka pendek		(2,384,541)	(15,339,700)	*Repayments of bank loans - short term*
Pembayaran utang bank - jangka panjang		(38,783,470)	(49,008,122)	*Repayments of bank loans - long term*
Penerimaan utang obligasi dan sukuk ijarah		-	29,994,565	*Proceeds of bonds payable and sukuk ijara*
Pembayaran utang obligasi dan sukuk ijarah		(15,166,000)	(6,946,478)	*Repayments of bonds payable and sukuk ijara*
Pembayaran utang KIK - EBA		(883,666)	(909,480)	*Repayments of KIK - EBA loans*
Pembayaran utang sewa		(4,765,662)	(3,938,744)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran utang listrik swasta		(434,255)	(418,748)	*Payments of electricity purchase payable*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(25,880,660)**	**(14,619,905)**	***Net cash used in financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(16,811,614)**	**7,974,329**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		44,621	164,464	*Effect of changes in foreign currency*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas kas dan setara kas		(42)	(2,142)	*Allowance for expected credit loss of cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**54,735,434**	**46,598,783**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**37,968,399**	**54,735,434**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

Lihat Catatan 51 untuk penyajian informasi arus kas.

Refer to Note 51 for the presentation of cash flow information.

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi lainnya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan Akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 1 September 2021 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C-527.HT.03.02-Th.2001.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia dan 13 entitas anak. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and other information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or the "Company") was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia and include, among others, the following: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the status of the Company was changed into a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on the Notarial Deed of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to a Limited Liability Company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.

The Articles of Association of the Company have been amended several times, with the most recent change by the Notarial Deed No. 02, dated September 1, 2021 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta regarding the increase in subscribed and paid-up shares. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Ministerial Decree No. C-527.HT.03.02-Th.2001.

The Company is domiciled in Jakarta, with 48 business unit offices across Indonesia and 13 subsidiaries. The Head Office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi lainnya (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka mendukung pembangunan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin tertentu yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 38).

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memiliki 52.116 karyawan tetap (2020: 53.385 karyawan tetap) (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power, entitas anak Perusahaan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and other information (continued)

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Purpose and Objective of the Company is to engage in an electricity business for public use in sufficient quantity and quality and also to earn profit and perform the Government's assignment in electricity business in order to support the development of the country with the application of the principles of a Limited Liability Company.

Based on Law No. 19 year 2003, regarding State-Owned Enterprises ("SOE"), the Government is obliged to provide compensation to SOEs, which were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including certain expected return (margin). The Company is an SOE, that performs the special assignment of providing subsidised electricity to the public (Note 38).

As at December 31, 2021 the Group had 52,116 permanent employees (2020: 53,385 permanent employees) (unaudited). The total number of employees does not include employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. PT Haleyora Powerindo is a subsidiary of PT Haleyora Power, the Company's subsidiary.

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

b. The Company's public offering of bonds

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

	Tanggal efektif/ *Effective date*	Bursa pencatatan/ *Listed on *)*	Tanggal pencatatan/ *Listed date*	Jumlah yang ditawarkan/ *Offered amount* Rp	
Obligasi Rupiah					*Rupiah Bonds*
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ *August 31, 2020*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 September 2020/ *September 8, 2020*	1,500,000	*Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ *August 31, 2020*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 September 2020/ *September 8, 2020*	376,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara IV PLN Phase I Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	6 Mei 2020/ *May 6, 2020*	1,737,135	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	18 Februari 2020/ *February 18, 2020*	4,812,430	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	18 Februari 2020/ *February 18, 2020*	115,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase VI Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	1 Oktober, 2019 *October 1, 2019*	1,912,900	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	1 Oktober, 2019 *October 1, 2019*	797,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	1 Agustus 2019/ *August 1, 2019*	2,953,620	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	1 Agustus 2019/ *August 1, 2019*	1,250,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	19 Februari 2019/ *February 19, 2019*	2,393,000	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019*

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

**) On July 22, 1995 the Indonesia Parallel Exchange was acquired by the Surabaya Stock Exchange. On November 30, 2007, Surabaya Stock Exchange and Jakarta Stock Exchange merged and changed their name into the Indonesia Stock Exchange.*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut: (lanjutan)

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***b. The Company's public offering of bonds** (continued)*

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows: (continued)

	Tanggal efektif/ *Effective date*	Bursa pencatatan/ *Listed on *)*	Tanggal pencatatan/ *Listed date*	Jumlah yang ditawarkan/ *Offered amount* Rp	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	19 Februari 2019/ *February 19, 2019*	863,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	10 Oktober 2018/ *October 10, 2018*	832,000	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	10 Oktober 2018/ *October 10, 2018*	224,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	10 Juli 2018/ *July 10, 2018*	1,278,500	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	10 Juli 2018/ *July 10, 2018*	750,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	23 Februari 2018/ *February 23, 2018*	2,535,000	*Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018*
Sukuk Ijara Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	23 Februari 2018/ *February 23, 2018*	698,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	2 November 2017/ *November 2, 2017*	2,545,500	*Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	2 November 2017/ *November 2, 2017*	694,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Juli 2017/ *July 12, 2017*	1,600,000	*Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Juli 2017/ *July 12, 2017*	400,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	1,244,000	*Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	429,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	879,000	*Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	121,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	2,500,000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	500,000	*Sukuk Ijara V PLN Year 2010*
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	2,703,000	*PLN XI Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	297,000	*Sukuk Ijara IV PLN Year 2010*
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	1,440,000	*PLN X Bonds Year 2009*
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	760,000	*Sukuk Ijara III PLN Year 2009*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	2,700,000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	300,000	*Sukuk Ijara II PLN Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2016/ *June 22, 2016*	2,200,100	*PLN VIII Bonds Year 2006*
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2016/ *June 22, 2016*	200,000	*Sukuk Ijara I PLN Year 2006*
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 November 2004/ *November 3, 2004*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 November 2004/ *November 12, 2004*	1,500,000	*PLN VII Bonds Year 2004*
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ *June 27, 1997*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Agustus 1997/ *August 12, 1997*	600,000	*PLN VI Bonds Year 1997*
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ *June 28, 1996*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	28 Agustus 1996/ *August 28, 1996*	1,000,000	*PLN V Bonds Year 1996*
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ *June 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	4 September 1995/ *September 4, 1995*	680,000	*PLN IV Bonds Year 1995*
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ *January 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	18 April 1995/ *April 18, 1995*	318,430	*PLN III Bonds Year 1995*
Obligasi PLN II Tahun 1993	28 September 1993/ *September 28, 1993*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	8 November 1993/ *November 8, 1993*	600,000	*PLN II Bonds Year 1993*
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ *September 25, 1992*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	10 November 1992/ *November 10, 1992*	300,000	*PLN I Bonds Year 1992*
Jumlah				**51,541,115**	***Total***

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

**) On July 22, 1995 the Indonesia Parallel Exchange was acquired by the Surabaya Stock Exchange. On November 30, 2007, Surabaya Stock Exchange and Jakarta Stock Exchange merged and changed their name into the Indonesia Stock Exchange.*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah PLN, sebagai berikut: (lanjutan)

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***b. The Company's public offering of bonds** (continued)*

The Company has issued several PLN Medium Term Notes, as follows: (continued)

	Tanggal efektif/ *Effective date*	Bursa pencatatan/ *Listed on*	Tanggal pencatatan/ *Listed date*	Jumlah yang ditawarkan/ *Offered amount* USD *)	
Surat Utang Jangka Menengah Global - USD					***Global Medium Term Notes - USD***
Penerbitan tahun 2020	30 Juni 2020/ *June 30, 2020*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	1 Juli 2020/ *July 1, 2020*	1,500,000,000	*Issued in 2020*
Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ *November 5, 2019*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	7 November 2019/ *November 7, 2019*	1,000,000,000	*Issued in 2019*
	17 Juli 2019/ *July 17, 2019*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	18 Juli 2019/ *July 18, 2019*	1,400,000,000	
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ *October 25, 2018*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	26 Oktober 2018/ *October 26, 2018*	1,000,000,000	*Issued in 2018*
	21 Mei 2018/ *May 21, 2018*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	16 Mei 2018/ *May 16, 2018*	2,000,000,000	
Penerbitan tahun 2017	15 Mei 2017/ *May 15, 2017*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	16 Mei 2017/ *May 16, 2017*	2,000,000,000	*Issued in 2017*
Penerbitan tahun 2012	24 Oktober 2012/ *October 24, 2012*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012*	1,000,000,000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	22 November 2011/ *November 22, 2011*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	23 November 2011/ *November 23, 2011*	1,000,000,000	*Issued in 2011*
Jumlah				**10,900,000,000**	***Total***
Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR					***Global Medium Term Notes - EUR***
Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ *November 5, 2019*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	7 November 2019/ *November 7, 2019*	500,000,000	*Issued in 2019*
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ *October 25, 2018*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	26 Oktober 2018/ *October 26, 2018*	500,000,000	*Issued in 2018*
Jumlah				**1,000,000,000**	***Total***
Surat Utang Jangka Menengah Global - JPY					***Global Medium Term Notes - JPY***
Penerbitan tahun 2019	20 September 2019/ *September 20, 2019*	Tidak tercatat/ *Not listed*	N/A	23,200,000,000	*Issued in 2019*
Jumlah				**23,200,000,000**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

	Tanggal efektif/ *Effective date*	Bursa pencatatan/ *Listed on*	Tanggal pencatatan/ *Listed date*	Jumlah yang ditawarkan/ *Offered amount* USD *)	
Obligasi Terjamin - USD					***Guaranteed Notes - USD***
Penerbitan 2009	6 November 2009/ *November 6, 2009*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	9 November 2009/ *November 9, 2009*	1,250,000,000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2009	7 Agustus 2009/ *August 7, 2009*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	11 Agustus 2009/ *August 11, 2009*	750,000,000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2007	28 Juni 2007/ *June 28, 2007*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	1,000,000,000	*Issued in 2007*
Penerbitan 2006	16 Oktober 2006/ *October 16, 2006*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	17 Oktober 2006/ *October 17, 2006*	1,000,000,000	*Issued in 2006*
Jumlah				**4,000,000,000**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

c. Management and other information

As at December 31, 2021 and 2020, the Company's management consisted of the following:

	2021	2020	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Suahasil Nazara	Suahasil Nazara	*Vice President Commissioner*
Komisaris	Rida Mulyana	Rida Mulyana	*Commissioners*
	Susiwijono Moegiarso	Ilya Avianti	
	Mohamad Ikhsan	Mohamad Ikhsan	
	Dudy Purwagandhi	Dudy Purwagandhi	
	Ardan Adiperdana	Muhammad Yusuf Ateh	
	Eko Sulistyo	Mohammad Rudy Salahuddin	
		Eko Sulistyo	
Komisaris Independen	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi	*Independent Commissioners*
	Heru Winarko	Deden Juhara	
	Alex Iskandar Munaf	Murtaqi Syamsuddin	
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Darmawan Prasodjo	Zulkifli Zaini	*President Director*
Wakil Direktur Utama	-	Darmawan Prasodjo	*Vice President Director*
Direktur Keuangan	-	Sinthya Roesly	*Director of Finance*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Sinthya Roesly	-	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur Perencanaan Korporat	Evy Haryadi	Muhammad Ikbal Nur	*Director of Corporate Planning*
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia	Yusuf Didi Setiarto	Syofvi Felienty Roekman	*Director of Human Capital Management*
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan	Bob Saril	Bob Saril	*Director of Commerce and Customer Management*
Direktur Energi Primer	Rudy Hendra Prastowo	Rudy Hendra Prastowo	*Director of Primary Energy*
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	Haryanto W.S	Haryanto W.S	*Director of Regional Business of Java, Madura and Bali*
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan	Adi Lumakso	Wiluyo Kusdwiharto	*Director of Regional Business of Sumatera and Kalimantan*
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	Adi Priyanto	Syamsul Huda	*Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara*
Direktur *Mega Projects*	-	M Ikhsan Asaad	*Director of Mega Projects*
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan	Wiluyo Kusdwiharto	-	*Director of Mega Projects and New Renewable Energy*
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Amien Sunaryadi	Amien Sunaryadi	*Chairman*
Anggota	Heru Winarko	Deden Juhara	*Members*
	Alex Iskandar Munaf	Murtaqi Syamsuddin	
	Tomi Parisianto Wibowo	Achmad Wahyudi	
	Krisna Simbaputra	Krisna Simbaputra	
	Nizam Burhanudin	Nizam Burhanudin	
Sekretaris Perusahaan			***Corporate Secretary***
Sekretaris Perusahaan	Ova Kurniawan	Ova Kurniawan	*Corporate Secretary*

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020, dinyatakan sebagai berikut:

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
  Direktur Pengadaan Strategis 1 menjadi Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan; Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur *Energy* Primer; Direktur *Human Capital Management* menjadi Direktur *Human Capital* dan *Management*; Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan; Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara; dan Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara menjadi Direktur *Mega Projects*.

Based on Decision Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020, stated as follows:

- *Changed the nomenclature for positions of the members of the Company's Board of Directors as follows:*
  Director of Strategic Procurement 1 became Director of Commerce and Customer Management; Director of Strategic Procurement 2 became Director of Primary Energy; Director of Human Capital Management became Director of Human Capital and Management; Director of Regional Business of Sumatera became Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan; Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan became Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara; and Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara became Director of Mega Projects.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain (lanjutan)

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-330/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, Eko Sulistyo diangkat sebagai Komisaris.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-49/MBU/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 telah disetujui sebagai berikut:

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
  - Direktur *Mega Projects* menjadi Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan;
  - Direktur *Energy* Primer menjadi Direktur Energi Primer;
  - Direktur *Human Capital* dan *Management* menjadi Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; dan
  - Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-90/MBU/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- Pemberhentian Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris Perusahaan yang diakangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK0305/MBU/09/2020 tanggal 23 September 2020 terhitung sejak 15 Maret 2021;
- Pengangkatan Ardan Adiperdana sebagai Komisaris Perusahaan.

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Management and other information *(continued)*

Based on Decision Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. SK-330/MBU/10/2020 dated October 9, 2020, Eko Sulistyo was appointed as a Commissioner.

Based on the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. SK-49/MBU/02/2021 dated February 17, 2021, the Minister of State-Owned Enterprises approved the following:

- *Change in the nomenclature of positions of the members of the Company's Board of Directors as follows:*
  - *Director of Mega Projects became Director of Mega Projects and New Renewable Energy;*
  - *Director of Primary Energy became Director of Primary Energy;*
  - *Director of Human Capital and Management became Director of Human Capital Management;*
  - *Director of Finance became Director of Finance and Risk Management; and*
  - *Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan became Director of Regional Business of Sumatera and Kalimantan.*

Based on the Decree of the Minister of BUMN which represents the General Meeting of Shareholders No. SK-90/MBU/03/2021 dated March 17, 2021, the following matters have been approved:

- *Dismissal of Muhammad Yusuf Ateh as Commissioner of the Company who was appointed based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK0305/MBU/09/2020 dated September 23, 2020, effective starting from March 15, 2021;*
- *Appointment of Ardan Adiperdana as Commissioner of the Company.*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-200/MBU/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 telah disetujui sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Direksi M. Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan;
- Mengalihkan penugasan anggota-anggota Dewan Direksi:
  - Muhammad Ikbal Nur semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan;
  - Wiluyo Kusdwiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan menjadi Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan; dan
- Pengangkatan Evy Haryadi sebagai Direktur Perencanaan Korporat.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, pemegang saham menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

- Pemberhentian Ilya Avianti dan M. Rudy Salahuddin sebagai Komisaris serta pemberhentian Deden Juhara dan Murtaqi Syamsuddin sebagai Komisaris Independen Perusahaan;
- Pengangkatan Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris dan pengangkatan Heru Winarko dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 16/SK/DK-PLN/2021 tanggal 19 Juli 2021, Heru Winarko ditunjuk sebagai anggota komite audit.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/DK-PLN/2021 tanggal 19 Juli 2021, Alex Iskandar Munaf ditunjuk sebagai anggota komite audit.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***c. Management and other information** (continued)*

Based on the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. SK-200/MBU/06/2021 dated June 16, 2021, the Minister of State-Owned Enterprises approved the following:

- *Honourably discharged member of the Board of Directors M. Ikhsan Asaad as Director of Mega Project and New Renewable Energy;*
- *Transferred the assignments of the members of the Board of Directors:*
  - *Muhammad Ikbal Nur who was previously Director of Corporate Planning became Director of Regional Business of Sumatera and Kalimantan;*
  - *Wiluyo Kusdwiharto who was previously Director of Regional Business of Sumatera and Kalimantan became Director of Mega Project and New Renewable Energy; and*
- *Appointment of Evy Haryadi as Director of Corporate Planning.*

Based on the Decree of the Minister of BUMN which represents the Company's General Meeting of Shareholders No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021, the shareholders have been approved:

- *Dismissal of Ilya Avianti and M. Rudy Salahuddin as Commissioners as well as dismissal of Deden Juhara and Murtaqi Syamsuddin as Independent Commissioners of the Company;*
- *Appointment of Susiwijono Moegiarso as Commissioner of the Company as well as appointment of Heru Winarko and Alex Iskandar Munaf as Independent Commissioner.*

Based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. 16/SK/DK-PLN/ 2021 dated July 19, 2021, Heru Winarko was appointed as a member of the Audit Committee.

Based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. 17/SK/DK-PLN/ 2021 dated July 19, 2021, Alex Iskandar Munaf was appointed as a member of the Audit Committee.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 24/SK/DK-PLN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 memberhentikan dengan hormat Ade Ikhwan sebagai anggota Komite Audit Non-Komisaris pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero) terhitung sejak tanggal 1 November 2021.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 25/SK/DK-PLN/2021 pada tanggal 1 November 2021, Tomi Parisianto Wibowo diangkat sebagai Anggota Komite Audit Non-Komisaris pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero) dengan masa jabatan 3 tahun yang terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2024.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021, dinyatakan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama;
- Mengalihkan penugasan Darmawan Prasodjo, semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021, dinyatakan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Muhammad Ikbal Nur sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
- Mengangkat Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Adi Lumakso sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Adi Priyanto sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Management and other information *(continued)*

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 24/SK/DK-PLN/2021 dated October 29, 2021, honourably discharged Ade Ikhwan as a member of the Audit Committee Non-Commissioners of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) effective on November 1, 2021.

Based on the Decision Letter of the Commissioners of PT PLN (Persero) No. 25/SK/DK-PLN/2021 dated November 1, 2021, Tomi Parisianto Wibowo was appointed as a member of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) with 3 years tenure and effective starting from December 1, 2021 until November 30, 2024.

Based on Decision Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021, stated as follows:

- *Honourably discharged Zulkifli Zaini as President Director;*
- *Transferred the assignment of Darmawan Prasodjo, who was previously Vice President Director to become President Director.*

Based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-392/MBU/12/2021 date December 7, 2021, stated the following:

- *Honourably discharged Syofvi Felienty Roekman as Director of Human Capital and Management, Muhammad Ikbal Nur as Director of Regional Business of Sumatera and Kalimantan, and Syamsul Huda as Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara;*
- *Appointed Yusuf Didi Setiarto as Director of Human Capital and Management, Adi Lumakso as Director of Regional Business of Sumatera and Kalimantan, Adi Priyanto as Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara.*

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU")

a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No. 6")

Grup mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA") dan Kontrak Penjualan Energi ("ESC"), dengan Penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Grup menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 8: "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" ("ISAK No. 8") dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa (Catatan 3.k).

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No. 6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No. 6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli listrik. POJK No. 6 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengizinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No. 6 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017.

Grup memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No. 6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (Catatan 3.k), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016, Grup juga melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES ("GAAP")

a. Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No. 6")

The Group has entered into Power Purchase Agreements ("PPAs") and Energy Sales Contracts ("ESCs"), with Independent Power Producers ("IPPs"). Those IPPs are holders of Electricity Business Licenses for public use.

Before January 1, 2016, the Group applied Interpretation of Financial Accounting Standards ("IFAS") No. 8: "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" ("IFAS No. 8") in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease (Note 3.k).

On March 1, 2017, the Financial Services Authority ("FSA") issued POJK No. 6 which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No. 6, transactions based on a power purchase agreement are treated as sale and purchase transactions, even though the PPAs contain a substance other than that of sale and purchase of electricity. POJK No. 6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017 and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No. 6 is valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructure development in accordance with Presidential Regulation No. 14 year 2017.

The Group decided to early implement POJK No. 6 prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on PPAs which contain a lease (Note 3.k), since January 1, 2016 are presented as purchased electricity in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Group also adjusted the related assets and liabilities.

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU") (lanjutan)

a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No. 6") (lanjutan)

Jumlah bersih penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait sebesar Rp43.428.454 dan telah dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES ("GAAP") *(continued)*

a. Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No. 6") *(continued)*

The net adjustments on related assets and liabilities amounted to Rp43,428,454 and were recorded as an adjustment to retained earnings on January 1, 2016, the details of which are as follows:

	1 Januari 2016 sebelum penyesuaian/ *January 1, 2016 before adjustment*	**Penyesuaian saldo awal/ *Beginning balance adjustment***	**1 Januari 2016 setelah penyesuaian/ *January 1, 2016 after adjustment***	
Aset tetap	1,187,879,590	(72,227,600)	1,115,651,990	*Property, plant and equipment*
Aset pajak tangguhan	29,088,271	(14,787,769)	14,300,502	*Deferred tax assets*
	1,216,967,861	(87,015,369)	1,129,952,492	
Liabilitas jangka panjang				*Non-current liabilities*
Utang listrik swasta	7,093,280	755,783	7,849,063	*Electricity purchase payable*
Utang sewa	149,621,763	(128,065,144)	21,556,619	*Lease Liabilities*
Liabilitas jangka pendek				*Current liabilities*
Utang sewa	6,759,138	(3,313,534)	3,445,604	*Lease liabilities*
Biaya masih harus dibayar	10,627,055	(2,216,084)	8,410,971	*Accrued expenses*
Utang listrik swasta	311,196	9,968	321,164	*Electricity purchase payable*
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	8,910,438	380,409	9,290,847	*Related parties*
Pihak ketiga	17,715,563	1,998,142	19,713,705	*Third parties*
Utang lain-lain	20,188,608	6,637	20,195,245	*Other payables*
	221,227,041	(130,443,823)	90,783,218	
Dampak penerapan POJK No. 6 terhadap saldo laba awal		**43,428,454**		***The effect of POJK No. 6 appplication on beginning retained earnings***

Mulai 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73, "Sewa". Standar akuntansi ini menggantikan standar akuntansi berikut:
- PSAK No. 30: "Sewa"
- ISAK No. 8: "Penentuan apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa"
- ISAK No. 23: "Sewa Operasi-Insentif"
- ISAK No. 24: "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa"
- ISAK No. 25: "Hak atas Tanah"

Starting January 1, 2020, the Group implemented SFAS 73, "Leases" replacing the previous accounting standards as follows:
- *SFAS No. 30: "Leases"*
- *IFAS No. 8: "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease"*
- *IFAS No. 23: "Operating Leases-Incentives"*
- *IFAS No. 24: "Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease"*
- *IFAS No. 25: "Land Rights"*

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU") (lanjutan)

a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No. 6") (lanjutan)

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang diikuti oleh Grup tetap mengacu pada POJK No. 6 karena peraturan tersebut masih berlaku sampai berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden. Dengan demikian perlakuan akuntansi untuk PPA dan ESC dengan IPP masih tetap sama seperti sebelum Grup menerapkan PSAK No. 73, yaitu diperlakukan sebagai transaksi jual beli dan dikecualikan dari ruang lingkup penerapan PSAK No. 73.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021

Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- PSAK No. 112: "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amendemen PSAK No. 71: Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111: "Akuntansi Wa'd"
- Amandemen PSAK 73: "COVID-19 terkait Konsesi Rental"
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK No. 13: "Properti Investasi", PSAK No. 48: "Penurunan Nilai Aset", PSAK No. 66: "Pengaturan Bersama", ISAK No. 16: "Pengaturan Jasa Konsesi"

2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES ("GAAP") *(continued)*

a. Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No. 6") *(continued)*

The PPAs entered into by the Group are still accounted for under POJK No. 6 because it remains valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructure development in accordance with Presidential Regulation. Therefore, the accounting treatment for PPAs and ESCs with IPPs remains the same as before the Group implemented SFAS No. 73, i.e treated as sale and purchase transactions and hence excluded from the scope of SFAS No. 73.

b. New, amendments and annual improvements of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") effective for years beginning on or after January 1, 2021

The adoption of the following new standards, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from January 1, 2021 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- *SFAS No. 112: "Accounting for Endowments"*
- *Amendment to SFAS No. 22: "Business Combinations - Business Definition"*
- *Amendment to SFAS No. 71: Amendment to SFAS No. 55, Amendment to SFAS No. 60, Amendment to SFAS No. 62 and Amendment to SFAS No. 73 regarding "Interest Rate Benchmark Reform 2"*
- *Annual improvement to SFAS No. 110: "Sukuk Accounting"*
- *Annual improvement to SFAS No. 111: "Wa'd Accounting"*
- *Amendment to SFAS No. 73: "COVID-19 related Rent Concessions"*
- *2021 annual improvements to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements", SFAS No. 13: "Investment Property", SFAS No. 48: "Impairment of Assets", SFAS No. 66: "Joint Arrangements", IFAS No. 16: "Service Concession Arrangements"*

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU") (lanjutan)

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 (lanjutan)

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 dan No. 73, Grup saat ini memiliki beberapa pinjaman yang mengacu pada *US Dollar London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") dan berlaku hingga lebih dari tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

Standar baru, amandemen, revisi, dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16: "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Amandemen PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa"
- Revisi PSAK No. 107: "Akuntansi Ijarah"

2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES ("GAAP") *(continued)*

b. New, amendments and annual improvements of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") effective for years beginning on or after January 1, 2021 *(continued)*

With respect to the amendments to SFAS No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 and No. 73, the Group currently has several loans which refer to US Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and extend beyond 2021. As at December 31, 2021, the alternative interest rate benchmark has not yet been determined.

New standards, amendments, revision, and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2021 are as follows:

- *SFAS No. 74: "Insurance Contracts"*
- *Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"*
- *Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendment to SFAS No. 16: "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"*
- *Amendment to SFAS No. 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Framework"*
- *Amendment to SFAS No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendment to SFAS No. 46: "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"*
- *Amendment to SFAS No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract"*
- *Amendment to SFAS No.74: "Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"*
- *Annual improvement to SFAS No. 69: "Agriculture"*
- *Annual improvement to SFAS No. 71: "Financial Instruments"*
- *Annual improvement to SFAS No. 73: "Leases"*
- *Revision to SFAS No. 107: "Ijarah Accounting"*

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU") (lanjutan)

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 (lanjutan)

Standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, Amandemen PSAK No. 16, Amandemen PSAK No. 25, Amandemen PSAK No. 46 dan Revisi PSAK No. 107 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

2 IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES ("GAAP") *(continued)*

b. New, amendments and annual improvements of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") effective for years beginning on or after January 1, 2021 *(continued)*

The above new standards, amendments, revision and annual improvements are effective beginning January 1, 2022, except for Amendments to SFAS No. 1, Amendment to SFAS No. 16, Amendment to SFAS No. 25, Amendment to SFAS No. 46 and Revision to SFAS No. 107 which are effective beginning January 1, 2023 and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74, which are effective beginning January 1, 2025, but early adoption is permitted.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments, revision and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Pernyataan kepatuhan

Sejak 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan PABU, yang mencakup sebagai berikut:

(a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), yang meliputi PSAK dan ISAK;
(b) Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAS-IAI"), yang meliputi Standar Akuntansi Syariah ("SAS"); dan
(c) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, terdiri dari Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 6 POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Statement of compliance

Since January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian GAAP, which covers the following:

(a) Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), which cover SFAS and IFAS;
(b) Syariah Financial Accounting Standards issued by the Syariah Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants ("DSAS-IAI"), which cover Syariah Accounting Standards ("SAS"); and
(c) Applicable Capital Market Regulations as stated by the FSA, including FSA Regulation No. VIII.G.7 consisting of Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board ("CM-FISB") No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Companies, and FSA Regulation No. 6 POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Group. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on the going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill.* Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

***i.2. Acquisition** (continued)*

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired are recorded as goodwill. If these amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

- **Akuisisi**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura Bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura Bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- ***Acquisitions***

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- ***Equity method of accounting***

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas** (lanjutan)

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***iv. Accounting for associates and joint ventures** (continued)*

- ***Equity method of accounting** (continued)*

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. *Goodwill*

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Disposals***

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from partial disposal or dilution of an investment in an associate and a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

e. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp" or "IDR"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency were adjusted to reflect the exchange rates prevailing at this date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia were as follows:

	2021 **Kurs tengah/** ***Middle rate****	**2020** **Kurs tengah/** ***Middle rate****	
Yen Jepang (JPY)	124	136	*Japan Yen (JPY)*
Dolar AS (USD)	14,269	14,105	*US Dollars (USD)*
Euro (EUR)	16,127	17,330	*Euro (EUR)*
Dolar Australia (AUD)	10,344	10,771	*Australian Dollars (AUD)*
Franc Swiss (CHF)	15,544	15,982	*Swiss Franc (CHF)*
Pound Sterling Inggris (GBP)	19,200	19,085	*British Pound Sterling (GBP)*
Dolar Selandia Baru (NZD)	9,729	10,116	*New Zealand Dollars (NZD)*

*) dalam jumlah penuh

*) *in full amount*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

iii. Entitas dalam Grup

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup (tidak ada yang mata uang fungsionalnya mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut:

(a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;

(b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan

(c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

f. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan OJK No. VIII.G.7:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Foreign currency translation *(continued)*

iii. Group companies

The results of the operations and financial position of all of the Group's subsidiaries (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows:

(a) The assets and liabilities presented in the consolidated statement of financial position are translated at the closing rate at the date of the consolidated statement of financial position;

(b) The income and expenses for each item of profit or loss are translated at the average exchange rates (unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates in force on the dates of the transactions); and

(c) All of the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

f. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7: "Related Party Disclosures" and OJK Regulation No. VIII.G.7:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  (i) Has control or joint control over the reporting entity;
  (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
  (iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Transactions with related parties *(continued)*

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:

(i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to each others);
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

g. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi); dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Transactions with related parties *(continued)*

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:
- *those to be measured at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss); and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***g. Financial assets** (continued)*

***i. Classification, recognition and measurement** (continued)*

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan dan beban kurs mata uang asing dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments (continued)

- *Fair value through other comprehensive income ("FVOCI"): Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income and expenses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses on foreign exchanges, net and impairment expenses in other expenses.*

- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***g. Financial assets** (continued)*

***i. Classification, recognition and measurement** (continued)*

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. In cases where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gains/(losses) in the consolidated statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and the reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

ii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tahun pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tahun pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan "pendekatan umum" untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

i. Aset tetap

Pada tanggal akuisisi, Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset Tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected credit loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since initial recognition. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception to the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

i. Property, plant and equipment

At acquisition date, the Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of these land and land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group accounts for these transactions as leases under SFAS No. 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, "Fixed Assets" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama tahun tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama tahun tersebut.

Kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:
- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadangan utama.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Tanah dan hak atas tanah tidak didepresiasi. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset tersebut ditransfer ke aset tidak digunakan dalam operasi; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Property, plant and equipment *(continued)*

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular year for purposes other than to produce inventories during that year.

The following classes of assets are measured using the revaluation method:
- *Land and land rights;*
- *Buildings, reservoirs and infrastructure;*
- *Installations and power plants;*
- *Transmission equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

The classes of asset above are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the FSA. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value must be re-evaluated at least every 3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income including the assets that are transferred to assets not used in operations; all other decreases are charged to profit or loss.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Property, plant and equipment *(continued)*

Property, plant and equipment are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10 - 50	*Buildings, reservoirs, and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	40	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	10 - 40	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	10 - 40	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	10	*Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	10	*Other telecommunications and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	10 - 25	*Vessels and equipment*

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3.j).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.j).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs incurred to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For property, plant and equipment which can no longer be utilised or sold, the carrying amount is eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

Jika aset yang direvaluasi tidak digunakan lagi atau dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are no longer utilised or sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer dan sedang diperbaiki. Aset yang tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be relocated/transferred and will be repaired. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill,* tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill,* diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui langsung dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Property, plant and equipment *(continued)*

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

j. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill - are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment testing was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

Pendapatan sewa dari operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 20 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised as revenue on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment. Rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 20 years but may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:
- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:
- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan jaminan.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Leases** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:
- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivables;*
- *variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:
- *where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *uses a build-up approach that starts with a risk free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, where there is no recent third-party financing; and*
- *makes adjustments specific to the lease, e.g., term, currency and security.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:
- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima; dan
- biaya langsung awal, dan biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.j).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Leases** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:
- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received; and*
- *any initial direct costs, and restoration costs.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use assets are depreciated over the underlying assets' useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3.j).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise of general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Modifikasi sewa

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur Kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revision menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Leases** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

Residual value guarantees

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases.

Lease modification

A lessee shall account for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, a lessee shall:

- *allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease; and*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the measurement of the lease liability by:

- *decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.*
- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

m. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

m. Investment properties

Investment properties are properties (land and land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya.

Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan alam, lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan.

Penentuan nilai wajar investasi dilakukan pada tanggal posisi keuangan didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

Pengalihan dilaksanakan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahan pemakaian.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***m. Investment properties** (continued)*

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the year in which it arises.

Fair value is based on active market prices, adjusted, if necessary, for differences in the nature, location or condition of the specific asset. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections.

The fair value of investment property as at the financial position date is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the year of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset takberwujud

Piranti lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya antara 4 sampai dengan 5 tahun.

Biaya legal terkait pembaruan tanah dan hak atas tanah

Biaya legal terkait dengan pembaruan tanah dan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum tanah dan hak atas tanah antara 20 sampai dengan 30 tahun.

o. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama periode manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

q. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan jenis persediaan pada masa mendatang.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

n. Intangible assets

Computer software

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets. Directly attributable costs are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads. Computer software development costs recognised as assets are amortised using the straight line method over their estimated useful lives between 4 to 5 years.

Legal costs to renew land and land rights

Legal costs related to renewal of land and land rights are recognised as intangible assets and amortised over the period of the land or land rights between 20 to 30 years.

o. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight line method.

p. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

q. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage of individual inventory items.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

i. identifikasi kontrak dengan pelanggan;
ii. identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
iii. penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
iv. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin; dan
v. pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Revenue and expense recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows:

i. identify contract(s) with a customer;
ii. identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
iii. determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
iv. allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
v. recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied at the following:
- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Umumnya, pelanggan dapat membeli token mereka sendiri ("prabayar") atau ditagih setiap bulan ("pascabayar"). Untuk pelanggan pascabayar, pendapatan dari penjualan listrik diakui setiap bulan berdasarkan hasil baca meter atas pemakaian pelanggan. Untuk pelanggan prabayar, Grup mengakui pendapatan berdasarkan estimasi jumlah penggunaan token pelanggan pada periode tertentu.

Subsidi listrik Pemerintah

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah marjin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang diberlakukan penyesuaian tarif menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral ("ESDM") No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020.

Subsidi listrik Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan berita acara verifikasi bulanan dimana tertera berapa jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai subsidi listrik Pemerintah pada akhir tahun perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK").

Pendapatan kompensasi

Pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami perubahan kenaikan tarif. Kompensasi dari Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") dan/atau BPK Republik Indonesia dan jumlahnya telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia.

Nilai kompensasi merupakan estimasi manajemen yang pada akhir tahun akan direviu oleh BPKP dan/atau BPK.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Revenue and expense recognition *(continued)*

Sale of electricity

Revenue from the sale of electricity is recognised based on customers' electricity usage (kWh). Generally, customers can buy their own token ("prepaid") or are billed monthly ("postpaid"). For postpaid customers, revenue from sale of electricity is recognised monthly based on the metre reading result of each customer. For prepaid customers, the Group recognises the revenue based on estimated usage of the customer during the period.

The Government's electricity subsidy

Subsidy revenue represents the revenue from the Government of Indonesia for the difference between allowable cost plus 7% margin with the actual sales price for each tariff group except for tariff groups for which tariff adjustments were applied based on the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") Regulation No. 28 Year 2016 regarding tariff for electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara with the latest amendment by Regulation of the Minister of ESDM No. 3 Year 2020.

The Government's electricity subsidy is recognised as revenue based on a monthly verification report where the amount of subsidy to be paid by the Government is stated and has been recognised as an obligation by the Government of Indonesia. The Government's electricity subsidy value at the end of the year subjected to Supreme Audit Agency ("BPK") audit.

Compensation income

Compensation income is income from the Government of Indonesia for non-subsidy tariff groups which since 2017, have not experienced a tariff adjustment. Compensation from the Government is recognised as income based on the Audit Report ("LHP") of the State Development Audit Agency ("BPKP") and/or BPK of the Republic of Indonesia and the amount has been recognised as an obligation by the Government of Indonesia.

The compensation value is a management estimate which at the end of the year will be reviewed by BPKP and/or BPK.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Biaya penyambungan pelanggan

Grup menganggap biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang digunakan untuk membangun atau mengakuisisi aset tetap untuk menghubungkan pelanggan secara tidak langsung berkaitan erat dengan pasokan listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan merupakan satu kesatuan karena pelanggan tidak dapat memperoleh manfaat dari kedua layanan ini sendiri. Infrastruktur penyambungan berfungsi untuk memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan pada dasarnya sama, dan memiliki pola transfer yang sama ke pelanggan. Oleh karena itu, biaya penyambungan dan pasokan tenaga listrik merupakan satu kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, biaya penyambungan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi dengan tarif 5% per tahun terhitung sejak tanggal koneksi.

Penjualan batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika mengontrol transfer ke pelanggan. Kontrol beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika batu bara dimuat ke kapal dimana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Revenue and expense recognition *(continued)*

Customer connection fees

The Group views connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers as indirectly related to the promise of providing supply of electricity to the customers. Supply of electricity and connection fees are not distinct because the customers cannot benefit from these two services on their own. The connection infrastructure is to fulfil the obligation to supply electricity to the customers. Both the supply of electricity and connection fees are substantially the same and have the same pattern of transfer to the customers. Therefore, connection fees and the supply of electricity are one performance obligation. As such, connection fees are recognised as deferred revenue and amortised at the rate of 5% per annum starting from the connection date.

Sales of coal

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customer and sales revenue is recognised when the coal is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customer's premises.

The Group generally sells its coal products under Free on Board ("FOB") terms, where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has passed at the loading port. For this term there is only one performance obligation, being for provision of product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal under Cost, Insurance and Freight ("CIF") terms, but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan batubara (lanjutan)

Oleh karena itu, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut telah diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan servis aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total servis yang akan diberikan karena pelanggan telah menerima dan menggunakan manfaat secara simultan.

Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Revenue and expense recognition** (continued)*

Sales of coal (continued)

As such, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation with the sale of coal, because the control over coal supplies passes to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

Other revenues

Other revenues consist of telecommunications network and services, transformer rental and other administrative services. Revenue from providing services is recognised in the accounting period in which the services are rendered. For fixed-price contracts, revenue is recognised based on the actual service provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided because the customers received and consumed the benefit simultaneously.

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan")) atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

s. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current period and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") (before January 1, 2021: Labour Law No. 13/2003 (the "Labour Law")), or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Job Creation Law or Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Job Creation Law or Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension program is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment award.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the consolidated statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to publicly or privately pension plans. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada Perjanjian Kerja Bersama.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

t. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Employee benefits *(continued)*

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefits paid are based on the Group's Collective Labour Agreement.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least 6 years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

t. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provisions are measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Provisi (lanjutan)

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

u. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***t. Provisions** (continued)*

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received, and the amount of the receivable can be measured reliably.

u. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

v. Aset donasi dari Pemerintah

Aset donasi dari Pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan aset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***u. Income tax** (continued)*

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

v. Government contributed assets

Assets contributed by the Government of Indonesia, in its capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the Government contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional paid-in capital by the shareholder.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

x. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

y. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap area of interest pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

z. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan *(pooling-of-interest)*. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

w. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding for the year.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume the conversion of all dilutive potential ordinary shares.

x. Segment information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their for segment operation performance.

Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location of where electricity sales are made.

y. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure includes costs directly attributable to the construction of mines and related infrastructure and excludes physical assets and land rights (i.e., right to build, right to cultivate and right to use), which are recorded as fixed assets.

z. Business combinations of entities under common control

Business combinations of entities under common control are accounted for using the pooling-of-interest method. The difference between the transfer price and the book value of each restructuring transaction between entities under common control is recorded as part of additional paid-in capital in the equity section of the consolidated statement of financial position.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap tahun tersebut, atau pada tahun revisi dan tahun berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi tahun tersebut.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau tahun setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the year in which the estimate is revised if the revision affects only that year, or in the year of the revision and future years if the revision affects both current and future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or years after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Pendapatan dari jasa penyambungan pelanggan

Sebagai bagian dari implementasi PSAK No. 72, Grup telah menilai kembali perlakuan yang diterapkan pendapatan dari penyambungan pelanggan. Grup mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Grup perlu menentukan kewajiban pelaksanaan yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan. Grup mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik. Penerimaan biaya penyambungan menimbulkan kewajiban bagi Grup untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan. Grup menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan kewajiban yang tidak terpisah dengan penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies *(continued)*

Revenues from customer connection fees

As a result of the implementation of SFAS No. 72, the Group has reassessed its treatment of revenue from customer connection fees. The Group has considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Group needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees. The Group considered the fact that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Group charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of the Republic of Indonesia. The receipt of connection fees creates an obligation for the Group to provide ongoing electricity supply to its customers. The Group has concluded that connecting the customers to its network is an obligation which cannot be separated from the delivery of electricity.

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  - *the legal form of the separate vehicle;*
  - *the terms of the contractual arrangement; and*
  - *other facts and circumstances (when relevant).*

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama (lanjutan)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, lihat Catatan 9 untuk daftar ventura bersama tersebut. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies *(continued)*

Interest in joint arrangements *(continued)*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, see Note 9 for the list of joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting year, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Provision for expected credit losses of trade receivables and other financial assets

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating and other forms).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Pengakuan pendapatan

Penjualan tenaga listrik prabayar

Penjualan tenaga listrik prabayar mencakup estimasi atas listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan antara tanggal pembelian token terakhir dan akhir tahun keuangan Grup. Estimasi dilakukan dengan memproratakan jumlah hari antara tanggal terakhir pembelian token yang dibeli dengan tanggal laporan keuangan Grup dengan konsumsi historis pelanggan.

Biaya penyambungan pelanggan

Jasa koneksi yang diserahkan kepada pelanggan tidak merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri *(stand-alone value)* untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Grup mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Grup sebagai pendapatan yang diakui sepanjang waktu dan diamortisasi sejak tanggal penyambungan sesuai masa estimasi konsumsi pelanggan. Konsumsi pelanggan diestimasi berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi. Dengan mempertimbangkan banyaknya variasi aset distribusi dan masa manfaat atas aset-aset tersebut, Grup telah menerapkan rata-rata masa manfaat 20 tahun yang di percaya telah merepresentasikan keseluruhan masa manfaat. Perubahan estimasi atas masa manfaat aset distribusi akan mengakibatkan perubahan pada pengakuan pendapatan dari biaya penyambungan.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Provision for expected credit losses of trade receivables and other financial assets

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

Revenue recognition

Prepaid sales of electricity

Prepaid sales of electricity includes an estimate of electricity consumed by customers between the date of the last token purchased and the financial year end of the Group. An estimate is made by prorating the total days between the date of the last token purchased and the date of the Group's financial statement using the historical consumption of the customers.

Customer connection fees

A service connection which is provided to the customer does not represent a stand-alone value for that customer. Consequently, the Group recognises connection fees received from customers to connect the customers to its network as revenue over time and amortises it starting from the connection date based on the estimated consumption pattern of the customer. The customers' consumption is estimated based on the average useful life of the distribution assets. Given the wide variety of distribution assets and remaining useful lives, the Group has applied an average life of 20 years which the Group believes to be representative of the useful lives of the assets. A change in the estimated useful lives of distribution assets would result in a change in the revenue recognised from connection fees.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta tahun pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses revaluasi aset, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 8.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair value of property, plant and equipment and investment properties that use revaluation model

In the process of assets revaluation, management, with the assistance of the independent public valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses valuation methods, and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 8, respectively.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 50.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Post-employment benefits

The determination of the post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, the discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from assumptions are accumulated and amortised over future periods and therefore, generally affect the recognised expense and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the post-employment benefits liability of the Group.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefits are disclosed in Note 50.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Sewa - estimasi suku bunga pinjaman inkremental

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

***Sources of estimation uncertainty** (continued)*

Leases - estimation of the incremental borrowing rate

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

5. ENTITAS ANAK / *5. SUBSIDIARIES*

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)* 2021	2020	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operation*	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ *Total assets before elimination* **) 2021	2020
PT Indonesia Power ("IP") dan entitas anak/*and subsidiaries*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99.99	99.99	1995	207,252	212,048
PT Cogindo Daya Bersama ("CDB") *)	Jakarta	Kogenerasi , pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy service and management*	99.99	99.99	1999	1,204	1,252
PT Artha Daya Coalindo ("ADC") *)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	80.00	80.00	1998	896	531
PT Indo Ridlatama Power ("IRP") *)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	90.00	90.00	2018	1,503	1,624
PT Putra Indotenaga ("PIT") dan entitas anak/*and its subsidiaries *)*	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99.99	99.99	2016	4,536	3,605
PT Indo Tenaga Hijau ("ITH") *) (d/h PT Tangkuban Parahu Geothermal Power)	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/*Development of new and renewable energy*	95.45	95.45	***)	86	84
PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") dan entitas anak/*and its subsidiary ***)*	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99.99	99.99	***)	3,293	2,426
PT Putra Suralaya Indo Tenaga ("PSI") ***	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99.99	99.99	***)	3,293	2,426
PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB") dan entitas anak/*and subsidiaries*	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99.99	99.99	1995	172,164	175,561
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services ("PJBS") *) dan entitas anak/*and subsidiaries*	Surabaya	Jasa/*Service*	98.00	98.00	2001	1,414	1,415
PT Mitra Karya Prima ("MKP") *)	Surabaya	Jasa/*Service*	92.00	92.00	2005	146	111
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik *)	Jakarta	Jasa/*Service*	-	95.00	2015	-	9
PT Rekadaya Elektrika ("RE") *) dan entitas anak/*and subsidiary*	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ *Electricity and engineering*	98.90	98.90	2004	1,437	1,825
PT Rekadaya Elektrika Consult ("REC") *)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ *Supervision and consultation*	99.80	99.80	2010	123	169
PT Navigat Innovative Indonesia ("NII") *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trading, construction, mining and agriculture*	72.97	72.97	2002	395	357

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: (lanjutan)

5. *SUBSIDIARIES (continued)*

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)* 2021	2020	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operation*	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ *Total assets before elimination* ** 2021	2020
PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi ("PJBI") *)	Jakarta	Investasi/ *Investment*	99.99	99.99	2015	6,428	5,339
PT Pembangkitan Jawa-Bali Investindo ("PJB Investindo") *)	Jakarta	Investasi/ *Investment*	99.99	99.99	2020	118	24
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata ("PJBIC")	Jakarta	Investasi/ *Investment*	99.99	99.99	2020	123	24
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLN SC") *)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa enjiiring supply chain dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector*	100.00	100.00	2018	299	426
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan entitas anak/ *and subsidiary*	Batam	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99.99	99.99	2000	20,269	19,904
PT Pelayanan Energi Batam ("PEB")	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ *Construction of gas pipeline and other energy sector*	99.99	99.99	2016	904	846
PT Indonesia Comnets Plus ("ICON")	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ *Telecommunication provider*	99.99	99.99	2000	5,327	4,513
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE") dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99.90	99.90	2003	1,167	1,204
PT Prima Power Nusantara ("PPN")	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99.99	99.99	2017	241	273
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PLN Tarakan") dan entitas anak/*and subsidiary*	Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ *Maintenance and operation*	99.97	99.97	2004	685	623
PT Paguntaka Cahaya Nusantara ("PCN") *)	Balikpapan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ *Maintenance and operation*	99.96	99.96	2018	93	2
Majapahit Holding B.V. ("MH") dan entitas anak/*and subsidiary*	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	100.00	100.00	2006	5,225	5,345
Majapahit Finance B.V. ("MF") *)	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	100.00	100.00	2006	12,795	37,314
PT PLN Batubara ("PLN Batubara") dan entitas anak/*and subsidiaries*	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	99.99	99.99	2009	6,113	8,323
PT Jambi Prima Coal ("JPC")	Jambi	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	60.00	60.00	2010	267	232
PT PLN Batubara Investasi ("BBI") dan entitas anak/*and subsidiaries*	Jakarta	Investasi/ *Investment*	99.96	99.96	2018	1,880	1,983
PT Bangun Persada Jambi Energi ("BPJE")*)	Jambi	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	80.00	80.00	***)	36	51
PT Mahakarya Abadi Prima ("MAP")*)	Jambi	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	80.00	80.00	***)	3	5
PT Bayan Koalindo Lestari *) ("BKL")	Palembang	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	51.00	51.00	2018	464	484
PT Prima Bara Indonesia *) ("PBI")	Kalimantan Tengah/ *Central Kalimantan*	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	51.00	51.00	***)	139	159
PT PLN Batubara Niaga ("BBN")	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	100.00	100.00	***)	283	421
PT Pengembang Listrik Nasional Gas Dan Geothermal ("PLN Gas & Geothermal")	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99.99	99.99	2010	890	479
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG")	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	99.99	99.99	2011	3,703	2,173
PT Haleyora Power ("HP") dan entitas anak/*and subsidiary*	Jakarta	Jasa pemeliharaan dan operasi/ *Maintenance and operation*	99.99	99.99	2013	1,375	1,225

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: (lanjutan)

***5. SUBSIDIARIES** (continued)*

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)* 2021	2020	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operation*	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ *Total assets before elimination* **) 2021	2020
PT Haleyora Powerindo ("HPI") *)	Jakarta	Jasa/*Service*	95.00	95.00	2013	527	516
PT Energy Management Indonesia ("EMI")****) dan entitas anak/*and subsidiary*	Jakarta	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan/*Energy and environmental conservation service and new renewable energy*	99.99	-	1987	64	-
PT Energi Biomasa Indonesia ("EBI")*)	Jakarta	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan/*Energy and environmental conservation service and new renewable energy*	99.00	-	2015	3	-
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (*MCTN)****)	Jakarta	Jasa pengelolaan energi/*Energy Services*	95.00	-	2000	450	-

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*
**) Dalam miliaran Rupiah/*Stated in billions of Rupiah*
***) Dalam tahap pengembangan/*Under development stage*
****) Diakuisisi pada tahun berjalan/*Acquired during the year*

Efektif pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai dengan Akta Notaris No. 7 dari Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notaris di Surabaya, PJBS mengadakan perjanjian jual beli saham untuk menjual saham SKP ke Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, dimana PJBS menjual seluruh kepemilikan saham SKP atau setara dengan 95% kepemilikan atas SKP dengan nilai pengalihan sebesar Rp9.785. Nilai buku bersih SKP untuk porsi kepemilikan PJBS adalah sebesar Rp6.158. Keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp3.627 disajikan sebagai bagian dari (beban)/penghasilan lain-lain – bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian Grup.

Effective on December 20, 2021, in accordance with Notarial Deed No. 7 of Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notary in Surabaya, PJBS entered into a share sale and purchase agreement to sell shares of SKP to Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, under which PJBS sold all shares or equivalent to 95% ownership of SKP with a total transaction value of Rp9,785. The net book value of PJBS's ownership portion in SKP was Rp6,158. The gain on sale of investment amounted to Rp3,627 is presented as part of other (expenses)/income - net in the Group's consolidated statements of profit or loss.

Akuisisi EMI

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. S-603/MBU/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021, pemegang saham menyetujui penambahan penyertaan modal saham Pemerintah sebesar 118.704 saham dengan nilai Rp118.704 yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Pemerintah di EMI.

Acquisition of EMI

Based on Decision Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. S-603/MBU/08/2021 dated August 20, 2021, the shareholders approved the addition of the Government's share capital of 118,704 shares with a value of Rp118,704 from the transfer of all series B shares owned by the Government in EMI.

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Akuisisi EMI (lanjutan)

Efektif pada tanggal 7 September 2021, sesuai dengan Akta No. 34 dari Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian pengalihan saham EMI, entitas sepengendali, dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan modal saham (Catatan 21) dimana Perusahaan mengakuisisi 15.554 lembar saham biasa atau setara dengan 99,99% kepemilikan atas EMI dengan jumlah imbalan yang dialihkan sebesar Rp118.704.

Jumlah tercatat aset bersih EMI untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar Rp11.951, sehingga selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah aset tercatat bersih yang diterima sebesar Rp106.753 dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor (Catatan 22).

Akuisisi MCTN

Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan melakukan akuisisi 95% saham MCTN dengan biaya perolehan sebesar Rp647.195. Perincian nilai wajar pada aset bersih MCTN yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

***5. SUBSIDIARIES** (continued)*

Acquisition of EMI (continued)

Effective on September 7, 2021, in accordance with Deed No. 34 of Dewi Kusumawati, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into a share transfer agreement with EMI, an entity under common control, from the Government of the Republic of Indonesia by issuing capital stock (Note 21) whereby the Company acquired 15,554 ordinary shares or equivalent with 99.99% ownership of EMI with a consideration amount of Rp118,704.

EMI's net asset amount for the Company's ownership portion is Rp11,951, therefore, the difference of Rp106,753 between the consideration amount and the net asset amount received is recorded in the equity account as additional paid-in capital (Note 22).

Acquisition of MCTN

On August 6, 2021, the Company acquired 95% of the shares of MCTN at an acquisition cost of Rp647,195. The detail of MCTN's fair value of identifiable net assets acquired is as follows:

	Rp	
Aset lancar	222,670	*Current assets*
Aset tidak lancar	770,567	*Non-current assets*
Liabilitas jangka pendek	(122,628)	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	(7,033)	*Non-current liabilities*
Aset bersih	**863,576**	***Net assets***

Tabel berikut merangkum harga perolehan yang dibayar atas akuisisi MCTN, jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

The following table summarises the consideration paid for the acquisition of MCTN, the amounts of the assets acquired and liabilities assumed as at the acquisition date:

	Rp	
Imbalan yang dialihkan		***Consideration transferred***
Pembayaran kas	647,195	*Cash payment*
Jumlah yang diakuisisi dari nilai wajar aset teridentifikasian yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih		***Recognised fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed***
Kas dan setara kas	81,511	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	68,029	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	1,629	*Other receivables*
Pajak dibayar di muka	57,626	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	3,527	*Prepaid and advances*
Persediaan	24,348	*Inventories*
Aset tetap, bersih	756,567	*Property, plant and equipment, net*
Utang usaha	(281)	*Trade payables*
Utang lain-lain	(12,221)	*Other payables*
Biaya yang masih harus dibayar	(73,698)	*Accrued expenses*
Utang pajak	(36,428)	*Taxes payable*
Kewajiban pajak tangguhan, bersih	(3,441)	*Deferred tax liabilities, net*
Liabilitas imbalan kerja	(3,592)	*Employee benefit liabilities*

5. ENTITAS ANAK (lanjutan) / ***5. SUBSIDIARIES*** *(continued)*

Nilai wajar aset neto teridentifikasian yang diperoleh	863,576	*Fair value of identifiable net assets acquired*
Imbalan yang dialihkan	(647,195)	*Consideration transferred*
Keuntungan dari pembelian dengan diskon atas akuisisi MCTN (Catatan 47)	216,381	*Gain on bargain purchase of MCTN (Note 47)*
Harga perolehan:		*Purchase consideration:*
Pembayaran kas	647,195	*Cash payment*
Kas dan setara kas MCTN	(81,511)	*Cash and cash equivalents in MCTN*
Arus kas keluar neto untuk akuisisi MCTN	**565,684**	***Net cash outflow for acquisition of MCTN***

Nilai wajar aset neto tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") berdasarkan laporannya No. 00221/2.0012-00/BS/02/0006/1/VII/2021, tertanggal 2 Juli 2021, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

The fair value of identifiable net assets which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR") based on its report No. 00221/2.0012-00/BS/02/0006/1/VII/2021, dated July 2, 2021, independent valuers registered in the Ministry of Finance and the Financial Services Authority ("OJK").

Estimasi nilai wajar ditentukan didasarkan pada tingkat diskonto sebesar 10.48% dan diklasifikasikan sebagai pengukuran nilai wajar Tingkat 3 dalam hierarki nilai wajar.

The fair value estimate is based on discount rate of 10.48% and it classified as Level 3 fair values in fair value hierarchy.

Total pendapatan usaha dan laba dari MCTN sejak tanggal akuisisi yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp185.080 dan Rp117.529.

The total revenue and net income of MCTN from the acquisition date until the reporting date which was recognised in profit or loss for the year ended December 31, 2021 amounted to Rp185,080 and Rp117,529, respectively.

Total pendapatan usaha dan laba dari MCTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 seolah-olah MCTN telah diakuisisi sejak tanggal 1 Januari 2021 masing-masing adalah sebesar Rp716.060 dan Rp274.311.

The total revenue and net income of MCTN for the year ended December 31, 2021 as if MCTN had already been acquired from January 1, 2021, would have amounted to Rp716,060 and Rp274,311, respectively.

Grup menelaah kembali pengakuan dan pengukuran aset neto teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih, dan menyimpulkan bahwa seluruh aset neto yang diakuisisi telah diakui dan bahwa prosedur penilaian dan pengukuran hasilnya sudah wajar.

The Group reassessed the recognition and measurement of identifiable net assets acquired and liabilities assumed, and concluded that all acquired net assets were recognised and that the valuation procedures and resulting measures were appropriate.

Akuisisi MCTN telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan OJK.

The acquisition of MCTN has been conducted in accordance with OJK Regulation.

6. ASET TETAP / *6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

	2021							
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Akuisisi/ *Acquisitions*)*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan								***At cost***
Pemilikan langsung								*Direct acquisitions*
Tanah dan hak atas tanah	155,990,777	3,754	54,259	-	803,447	6,983,675	163,835,912	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	79,287,430	4,419	170,390	-	2,538,710	(5,420,532)	76,580,417	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	605,697,073	648,697	659,128		8,479,042	(58,148,340)	557,335,600	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	195,233,525	-	86,471	-	17,828,307	(7,555,851)	205,592,452	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	236,963,683	-	93,123	-	11,900,664	(13,916,436)	235,041,034	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	18,869,706	2,022	230,661	-	436,066	-	19,538,455	*General equipment*
Kendaraan bermotor	2,581,618	-	45,457	-	113,590	-	2,740,665	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	4,307,260	-	29,766	-	(1,206,616)	(35,382)	3,095,028	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	7,732,432	-	20,142	-	678,136	(2,231,889)	6,198,821	*Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	3,535,114	-	1,751	-	669,487	-	4,206,352	*Other telecommunications and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	1,607,664	-	83,649	-	(97)	-	1,691,216	*Vessels and equipment*
Subjumlah	1,311,806,282	658,892	1,474,797	-	42,240,736	(80,324,755)	1,275,855,952	*Subtotal*
Aset dalam pembangunan	165,830,608	101,502	46,917,138	-	(45,796,490)	-	167,052,758	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	19,480,452	-	-	(728,490)	2,243,238	(336,380)	20,658,820	*Assets not used in operations*
Jumlah	1,497,117,342	760,394	48,391,935	(728,490)	(1,312,516)	(80,661,135)	1,463,567,530	*Total*
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai								***Accumulated depreciation and impairment***
Pemilikan langsung								*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	5,085,712	-	2,347,004	-	10,351	(7,443,067)	-	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	36,014,570	-	18,644,822	-	(593,795)	(54,065,597)	-	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	8,982,409	-	5,481,988	-	79,855	(14,544,252)	-	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	14,716,399	-	8,336,371	-	(153,652)	(22,899,118)	-	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	13,580,555	-	1,777,090	-	748,798	-	16,106,443	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1,715,025	-	317,667	-	13,395	-	2,046,087	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	243,349	-	96,006	-	(69,204)	(270,151)	-	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	1,729,199	-	960,551	-	(33,762)	(2,655,988)	-	*Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,147,699	-	346,659	-	(3,586)	-	2,490,772	*Other telecommunications and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	673,368	-	133,168	-	-	-	806,536	*Vessels and equipment*
Subjumlah	84,888,285	-	38,441,326	-	(1,600)	(101,878,173)	21,449,838	*Subtotal*
Aset tidak digunakan dalam operasi	10,132,148	-	671,660	(717,213)	2,599,232	(343,250)	12,342,577	*Assets not used in operations*
Jumlah	95,020,433	-	39,112,986	(717,213)	2,597,632	(102,221,423)	33,792,415	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	208,422	-	2,508,335	-	-	-	2,716,757	*Provision for impairment*
Jumlah Tercatat	**1,401,888,487**						**1,427,058,358**	***Net Carrying Value***

*) Penambahan aset tetap dari akuisisi EMI dan MCTN (Catatan 5) / **) Additions of property, plant and equipment from acquisitions of EMI and MCTN (Note 5)*

6. ASET TETAP (lanjutan) / 6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

	2020						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak PSAK No. 73/ *Impact of SFAS No. 73* (Catatan/ *Note 7*)	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan							***At cost***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah dan hak atas tanah	153,533,842	-	64,320	-	2,392,615	155,990,777	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	74,124,016	-	162,746	-	5,000,668	79,287,430	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	586,294,379	-	1,057,067	-	18,345,627	605,697,073	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	166,247,673	-	172,230	-	28,813,622	195,233,525	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	221,422,577	-	188,602	-	15,352,504	236,963,683	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	16,625,493	-	578,628	-	1,665,585	18,869,706	*General equipment*
Kendaraan bermotor	2,247,623	-	60,640	-	273,355	2,581,618	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	4,231,687	-	74,570	-	1,003	4,307,260	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	6,229,325	-	42,375	-	1,460,732	7,732,432	*Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	3,028,857	-	4,839	-	501,418	3,535,114	*Other telecommunications and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	1,400,443	-	-	-	207,221	1,607,664	*Vessels and equipment*
Subjumlah	1,235,385,915	-	2,406,017	-	74,014,350	1,311,806,282	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Tanah dan hak atas tanah	276,355	(276,355)	-	-	-	-	*Land and land rights*
Instalasi dan mesin pembangkit	40,970,265	(40,970,265)	-	-	-	-	*Installations and power plants*
Subjumlah	41,246,620	(41,246,620)	-	-	-	-	*Subtotal*
Aset dalam pembangunan	182,708,041	-	65,330,483	-	(82,207,916)	165,830,608	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	12,408,822	-	-	(1,030,948)	8,102,578	19,480,452	*Assets not used in operations*
Jumlah	1,471,749,398	(41,246,620)	67,736,500	(1,030,948)	(90,988)	1,497,117,342	*Total*
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai							***Accumulated depreciation and impairment***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,542,598	-	2,213,059	-	330,055	5,085,712	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	18,066,043	-	18,538,740	-	(590,213)	36,014,570	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	4,034,857	-	4,904,133	-	43,419	8,982,409	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	6,990,709	-	7,761,362	-	(35,672)	14,716,399	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	11,962,664	-	1,614,760	-	3,131	13,580,555	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1,443,206	-	298,509	-	(26,690)	1,715,025	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	138,307	-	115,737	-	(10,695)	243,349	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	815,925	-	901,880	-	11,394	1,729,199	*Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,872,664	-	294,077	-	(19,042)	2,147,699	*Other telecommunications and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	555,610	-	117,758	-	-	673,368	*Vessels and equipment*
Subjumlah	48,422,583	-	36,760,015	-	(294,313)	84,888,285	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	14,747,990	(14,747,990)	-	-	-	-	*Installations and power plants*
Aset tidak digunakan dalam operasi	7,683,404	-	338,615	(51,402)	2,161,531	10,132,148	*Assets not used in operations*
Jumlah	70,853,977	(14,747,990)	37,098,630	(51,402)	1,867,218	95,020,433	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	210,303	-	-	-	(1,881)	208,422	*Provision for impairment*
Jumlah Tercatat	**1,400,685,118**					**1,401,888,487**	***Net Carrying Value***

Sebagai dampak penerapan awal PSAK No. 73, "Sewa", Grup mereklasifikasi aset sewaan ke aset hak guna pada 1 Januari 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp41.246.620 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp14.747.990 (Catatan 7).

As a result of the initial implementation of SFAS No. 73, "Leases", the Group reclassified leased assets to right-of-use assets on January 1, 2020 amounted to Rp41,246,620 and accumulated depreciation amounted to Rp14,747,990 (Note 7).

6. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2021	2020	
Beban usaha	38,327,468	36,662,917	*Operating expenses*
Aset dalam pembangunan	113,858	97,098	*Construction in progress*
Beban lain-lain	671,660	338,615	*Other expenses*
Jumlah	**39,112,986**	**37,098,630**	***Total***

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2022 sampai dengan 2051, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2021, bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, sebagai penanggung utama dengan jumlah pertanggungan sebesar USD24.258.526.246 (nilai penuh) atau setara dengan Rp346.144.911 (2020: USD26.325.232.309 (nilai penuh) atau setara dengan Rp371.317.402) dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai penanggung risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp2.896.627 (2020: Rp2.378.867). Grup tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal. Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian yang berkaitan dengan aset yang tidak diasuransikan tersebut dapat dikelola oleh Grup sehubungan dengan pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Jumlah tercatat dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.147.650 dan Rp11.360.403.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") berdasarkan laporannya No. 00142/2.0012-00/PI/02/0006/1/IV/2022, tertanggal 26 April 2022, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

***6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (continued)*

Depreciation expense was allocated as follows:

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2022 to 2051, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land and land rights, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

As at December 31, 2021, the buildings, installations and power plants, transmission equipment, other telecommunications and data processing equipment and vessels were insured with several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead insurer with total insurance coverage of USD24,258,526,246 (full amount) or equivalent to Rp346,144,911 (2020: USD26,325,232,309 (full amount) or equivalent to Rp371,317,402) and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama acting as the insurer against fire and other possible risks with total insurance coverage of Rp2,896,627 (2020: Rp2,378,867). The Group does not insure property, plant and equipment other than buildings, installations and power plants, transmission equipment, other telecommunications and data processing equipment and vessels. Management believes that the risks of losses related to the uninsured assets can be managed by the Group in consideration of the costs that would be spent and the benefits that would be obtained. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

The carrying amount of property, plant and equipment that has been fully depreciated but is still in use as at December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp13,147,650 and Rp11,360,403 respectively.

As at December 31, 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its property, plant and equipment which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR") based on its report No. 00142/2.0012-00/PI/02/0006/1/IV/2022, dated April 26, 2022, independent valuers registered in the Ministry of Finance and OJK.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 dan berdasarkan valuasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

***6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (continued)*

The table below analyses fixed assets recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 and based on valuation as at December 31, 2021:

	Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan/ *Fair value measurement at December 31, 2021 using*				
	Level 1/ *Level 1*	**Level 2/ *Level 2***	**Level 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Pengukuran nilai wajar berulang					***Recurring fair value measurement***
Tanah dan hak atas tanah	-	36,735,664	126,806,369	163,542,033	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	6,988,067	69,138,909	76,126,976	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	556,182,532	556,182,532	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	-	204,873,601	204,873,601	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	-	-	235,012,113	235,012,113	*Distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi data yang digunakan dalam penyediaan listrik	-	-	6,134,499	6,134,499	*Telecommunications and processing equipment used for electricity supply*
Material cadang utama	-	-	3,090,753	3,090,753	*Major spare parts*
Jumlah	**-**	**43,723,731**	**1,201,238,776**	**1,244,962,507**	***Total***

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pda data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

There were no fixed assets which could be classified at Level 1 fair value.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

There were no transfers between Levels 1 and Level 2 during the year.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

The Level 2 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach, while the value of building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of the following:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembangan; dan
i. Indeks kemahalan konstruksi.

a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square metre;
f. Depreciation rate;
g. Operational expense;
h. Developers margin; and
i. Construction cost index.

6. ASET TETAP (lanjutan) / *6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	1 Januari/ *January* 2021	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Jumlah yang diakui pada laba rugi/ *Amount recognised in profit or loss*		Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/*Amount recognised in other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2021	
				Depresiasi/ *Depreciation*	Penurunan nilai/ *Impairment*			
Tanah	120,748,069	90	344,881	-	(233,550)	5,946,879	126,806,369	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	68,575,318	11,935	1,396,506	(2,075,199)	(326,876)	1,557,225	69,138,909	*Building, reservoirs and infrastructures*
Instalasi dan mesin pembangkit	569,627,746	1,307,825	9,073,213	(18,644,822)	(1,098,687)	(4,082,743)	556,182,532	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	186,216,183	86,471	17,752,609	(5,481,988)	(688,075)	6,988,401	204,873,601	*Transmissions equipment*
Perlengkapan distribusi	222,243,033	93,123	12,051,446	(8,336,371)	(21,800)	8,982,682	235,012,113	*Distributions equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	5,997,253	20,142	711,983	(960,551)	(58,427)	424,099	6,134,499	*Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply*
Material cadangan utama	4,063,814	29,766	(1,137,411)	(96,006)	(4,179)	234,769	3,090,753	*Major spare parts*
Jumlah	**1,177,471,416**	**1,549,352**	**40,193,227**	**(35,594,937)**	**(2,431,594)**	**20,051,312**	**1,201,238,776**	***Total***

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Perubahan surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan final dan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai Surplus revaluasi aset tetap dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

The changes in revaluation surplus, net of final income tax and applicable deferred income taxes, was charged to other comprehensive income and is presented in Property, plant, equipment revaluations surplus in the consolidation statements of equity.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya, selain aset yang menggunakan model revaluasi.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than assets that have applied the revaluation model.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	672,476,750	673,854,483	*Beginning balance*
Kenaikan surplus revaluasi	21,560,288	-	*Increase on revaluation surplus*
Penghapusan aset tetap	(2,000,388)	(1,657,836)	*Disposals of property, plant and equipment*
	19,559,900	(1,657,836)	
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas aset tetap yang telah dijual	(305,038)	(84,621)	*Reclassification of revaluation surplus to retained earnings from disposals of property, plant and equipment*
(Beban)/manfaat pajak terkait	(2,818,826)	364,724	*Related income tax (expense)/benefit*
Saldo akhir	**688,912,786**	**672,476,750**	***Ending balance***

6. ASET TETAP (lanjutan)

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, dan lainnya.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants and others.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021/ *Fair value as at 31 December 2021*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi yang dipakai/ *Range of unobservable inputs used*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah						***Land***
Tapak Tower	51,471,076	Pendekatan biaya dengan metode penjumlahan/ *The cost approach with summation method*	- Luas *Right of Way* ("ROW")/ *ROW area*	60.00% - 70.00%*	- Semakin tinggi luas dan kompensasi ROW maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the ROW area and compensation the higher fair value*	*Land for tower site*
			- Kompensasi ROW/ *Compensation ROW*			
Tanah gardu dan pembangkit	75,335,293	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ *The income approach with the land development method*	- Peruntukan sesuai pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	60.00% - 80.00%*	- Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher KLB, the higher fair value*	*Land for Land for substation and power plant*
			- Data luas dan aspek legal/ *Land area and legal aspects*		- Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ *Certified land will have higher fair value*	
			- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes*		- Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ *Zoning of neighboring land might have higher fair value*	
Bangunan						***Buildings***
Bangunan umum	52,306,552	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Indeks koefisien/ *Index coefficient*	0.45 - 5.46	- Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*General buildings*
			- Volume bangunan/ *Building volumes*	60.00% - 70.00%*	- Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher building volumes, the higher*	
Waduk dan prasarana	16,832,357	Tren/ *Trending*	- Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.27	- Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Reservoirs and infrastructures*
Instalasi dan mesin pembangkit	556,182,532	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat kemunduran fungsional/ *Functional obsolescence rate*	1.00% - 30.00%	- Semakin besar tingkatnya, maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher rate, the lower fair value*	***Installations and power plants***
			- Tingkat kemunduran ekonomis/ *Economical obsolescence rate*	1.00% - 3.00%	- Semakin besar tingkatnya, maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher rate, the lower fair value*	
			- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 2.00	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	
Perlengkapan transmisi	204,873,601	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Transmissions equipment***
Perlengkapan distribusi	235,012,113	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 1.65	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Distributions equipment***
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	6,134,499	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.01 - 1.02	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply***
Material cadang utama	3,090,753	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Major spare parts***

*) Terdapat banyak input yang tidak dapat diobservasi. Hal ini merepresentasikan kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi./*There are too many unobservable inputs. This represents the weights of the unobservable inputs.*

6. ASET TETAP (lanjutan)

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lain dan disajikan sebagai "surplus revaluasi aset tetap" pada laba komprehensif lain.

Terdapat penurunan nilai aset tetap yang melebihi seluruh nilai surplus revaluasi aset sebesar Rp2.508.335 yang dibebankan pada "(beban)/penghasilan lain-lain - bersih" (Catatan 47). Penurunan nilai tersebut sebagian besar terkait dengan kelas aset "instalasi dan mesin pembangkit" disebabkan kenaikan tingkat kemunduran fungsional dan ekonomis.

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp603.974.534 dan Rp585.372.458.

***6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (continued)*

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, was credited to other comprehensive income and is shown in "property, plant and equipment revaluation surplus" in other comprehensive income.

Impairment in the value of fixed assets which exceeded the total asset revaluation surplus amounting to Rp2,508,335 was charged to "other (expenses)/income - net" (Note 47). The impairment was mostly related to the asset class "installation and power plants" due to an increase in the functional and economic obsolescence rate.

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of property, plant and equipment as at December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp603,974,534 and Rp585,372,458, respectively.

Aset dalam pembangunan / ***Construction in progress***

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows:

	2021	2020	
Proyek penugasan - program percepatan:			*Mandatory project - fast track program:*
Pembangkitan	6,549,381	8,883,128	*Power plants*
Transmisi	5,253,215	5,238,007	*Transmission*
Subjumlah	11,802,596	14,121,135	*Subtotal*
Konstruksi rutin:			*Regular construction:*
Pembangkitan	63,569,898	59,927,125	*Power plants*
Transmisi	81,842,276	80,645,571	*Transmission*
Distribusi	9,633,793	10,951,939	*Distribution*
Perlengkapan	204,195	184,838	*Equipment*
Subjumlah	155,250,162	151,709,473	*Subtotal*
Jumlah	**167,052,758**	**165,830,608**	***Total***

(i) Program percepatan / ***(i) Fast track program***

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Grup. Aset dalam pembangunan untuk program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dikapitalisasi.

The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Group. Construction in progress under the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalised expenditures.

6. ASET TETAP (lanjutan)

(i) Program percepatan (lanjutan)

Pembangkitan

Program percepatan aset dalam pembangunan pembangkitan terutama merupakan PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW dan PLTU 2 Kalimantan Barat Bengkayang 2x27,5 MW.

Transmisi

Program percepatan aset dalam pembangunan transmisi terutama terdiri dari proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV *New* Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Paket 1.

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan

Aset dalam pembangunan untuk pembangkitan terutama merupakan PLTU Lontar *Extension* 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW dan PLTA Peusangan 2x88 MW.

Transmisi

Aset dalam pembangunan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi 500 kV untuk Sumatera, Jawa - Bali, 150 kV untuk luar Sumatera, Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Distribusi

Aset dalam pembangunan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Perlengkapan

Perlengkapan untuk aset dalam pembangunan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

***6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (continued)*

***(i) Fast track program** (continued)*

Power plants

The fast track program of power plants under construction consists mainly of PLTU 1 West Kalimantan - Parit Baru 2x50 MW and PLTU 2 West Kalimantan Bengkayang 2x27.5 MW.

Transmission

The fast track program of transmission under construction mainly consists of project Extra High Voltage Substations 500 kV New Rawalo (Kesugihan), Underground Cable (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Package 1.

(ii) Regular construction

Power plants

Power plants under construction consist mainly of PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW and PLTA Peusangan 2x88 MW.

Transmission

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of 500 kV in Sumatera, Java - Bali, 150 kV outside Sumatera, Java - Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribution

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Equipment

Equipment under construction consists of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam pembangunan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, estimasi persentase jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

Construction in progress *(continued)*

As at December 31, 2021, the estimated percentage of completion of the Group's construction in progress projects was as follows:

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai/ *Amount*	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*
PLTU Lontar Extension (1x315 MW)	8,212,141	98%
PLTA Peusangan (2 x 88 MW)	6,162,695	88%
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	5,778,829	78%
PLTU Sulsel Barru-2 Coal Fired Steam Power Plant (1x100 MW)	3,494,427	95%
PLTA Jatigede (2x55 MW)	2,922,247	91%
PLTMG Bangkanai 2 (140 MW)	2,620,885	92%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,727,311	86%
PLTU Palu 3 (2x50 MW)	1,190,677	20%
PLTU 1 Sulut 2x50 MW	1,046,279	15%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	785,778	86%
Transmisi lainnya/*Various transmission lines*	87,095,492	2%-98%
Pembangkitan lainnya/*Other power plants*	36,178,008	2%-98%
Lainnya/*Others*	9,837,989	2%-98%
Jumlah/*Total*	**167,052,758**	

Pada tanggal 31 Desember 2020, estimasi persentase jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2020, the estimated percentage of completion of the Group's construction in progress projects was as follows:

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai/ *Amount*	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*
PLTU Lontar Extension 1x315 MW	8,466,528	97%
PLTA Peusangan 2x88 MW	5,592,899	88%
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	5,225,015	75%
PLTU Sulsel Barru-2 Coal Fired Steam Power Plant (1x100 MW)	2,896,646	76%
PLTA Jatigede 2x55 MW	2,618,955	82%
PLTGU Muara Karang Peaker	2,573,657	97%
PLTMG Bangkanai 2 140 MW	2,565,326	90%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,695,189	86%
PLTU Palu 3 (2x50 MW)	916,718	5%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	747,726	86%
PLTU 2 NTB - Lombok 2x25 MW	557,635	93%
Transmisi lainnya/*Various transmission lines*	85,883,578	2% - 98%
Pembangkitan lainnya/*Other power plants*	34,953,960	2% - 98%
Lainnya/*Others*	11,136,776	2% - 98%
Jumlah/*Total*	**165,830,608**	

Setelah penyelesaian suatu proyek, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek aset dalam pembangunan menerima Sertifikat Laik Operasi.

After completion of a project, there are still a number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are Certified for Operations.

6. ASET TETAP (lanjutan) / *6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

Aset dalam pembangunan (lanjutan) / ***Construction in progress** (continued)*

Selama tahun berjalan, Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman mencakup bunga pinjaman dan selisih kurs mata uang asing ke pekerjaan dalam pelaksanaan aset dalam pembangunan sebesar Rp5.205.448 (2020: Rp 4.913.992). Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu masing-masing sebesar 5,40% (2020: 3,34%)

During the year, the Group has capitalised borrowing costs including interest expense and foreign exchange differences to construction in progress amounted to Rp5,205,448 (2020: Rp4,913,992). Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of general borrowings of 5.40% (2020: 3.34%)

Aset tidak digunakan dalam operasi / ***Assets not used in operations***

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset akan diperbaiki.

Assets not used in operations comprised of property, plant and equipment to be relocated, those temporarily not in use in operations, and assets to be repaired.

Kerugian penurunan nilai dari penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp671.660 dan Rp338.615 yang disajikan sebagai bagian dari (beban)/penghasilan lain-lain - bersih (Catatan 47).

Loss on write-off of assets not used in operations for the years ended December 31, 2021 and 2020 was amounting to Rp671,660 and Rp338,615, respectively, which are presented as part of the other (expense)/income - net (Note 47).

Keuntungan penjualan aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp11.963 dan Rp1.065.054 (Catatan 47).

Gain on sale of certain assets not used in operations for the years ended December 31, 2021 and 2020 was amounting to Rp11,963 and Rp1,065,054, respectively (Note 47).

Berdasarkan penelaahan manajemen, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai Grup adalah cukup untuk menutupi kemungkinan adanya kerugian yang timbul dari nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on management's assessment, management is of the opinion that the provision for impairment is adequate to cover the possible impairment losses of the carrying amount of fixed assets as at December 31, 2021 and 2020.

7. ASET HAK GUNA / *7. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*)*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***At cost***
Tanah	1,059,995	6,083	(118)	(12,462)	1,053,498	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,193,643	149,532	(150,931)	(5,003)	2,187,241	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	43,703,504	245,682	(482,780)	374,887	43,841,293	*Installations and power plants*
Perlengkapan umum	126,053	6,068	(10,650)	(14,338)	107,133	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1,768,985	668,149	(353,964)	(344,075)	1,739,095	*Motor vehicles*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	79,955	918	(78,859)	-	2,014	*Telecommunications and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	-	1,208,346	-	-	1,208,346	*Vessels and equipment*
Jumlah	48,932,135	2,284,778	(1,077,302)	(991)	50,138,620	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah	21,520	22,014	(118)	-	43,416	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	521,251	214,920	(52,239)	(23,744)	660,188	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	16,559,809	2,299,134	(215,760)	108,663	18,751,846	*Installations and power plants*
Perlengkapan umum	26,212	38,143	(10,095)	6,621	60,881	*General equipment*
Kendaraan bermotor	575,156	582,949	(182,219)	(233,554)	742,332	*Motor vehicles*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	34,202	1,175	(35,390)	1,537	1,524	*Telecommunications and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	-	115,896	-	-	115,896	*Vessels and equipment*
Jumlah	17,738,150	3,274,231	(495,821)	(140,477)	20,376,083	*Total*
Jumlah tercatat	**31,193,985**				**29,762,537**	***Net carrying value***

*) Termasuk penambahan asset hak guna dari akuisisi EMI

**) Including additions of right-of-use assets from acquisition of EMI*

7. ASET HAK GUNA (lanjutan) / *7. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

	2020						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak penyesuaian atas penerapan awal PSAK No. 73/ *Adjustment upon initial application of SFAS No. 73*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan							***At cost***
Tanah	-	1,048,897	11,098	-	-	1,059,995	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	2,086,772	106,871	-	-	2,193,643	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	42,876,764	826,740	-	-	43,703,504	*Installations and power plants*
Perlengkapan umum	-	74,098	51,955	-	-	126,053	*General equipment*
Kendaraan bermotor	-	1,124,445	644,540	-	-	1,768,985	*Motor vehicles*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	77,964	1,991	-	-	79,955	*Telecommunications and data processing equipment*
Jumlah	-	47,288,940	1,643,195	-	-	48,932,135	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Tanah	-	-	21,520	-	-	21,520	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	315,499	205,959	-	(207)	521,251	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	14,408,673	1,677,236	-	473,900	16,559,809	*Installations and power plants*
Perlengkapan umum	-	-	26,202	-	10	26,212	*General equipment*
Kendaraan bermotor	-	2,398	579,735	-	(6,977)	575,156	*Motor vehicles*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	21,420	12,719	-	63	34,202	*Telecommunications and data processing equipment*
Jumlah	-	14,747,990	2,523,371	-	466,789	17,738,150	*Total*
Jumlah Tercatat	-					**31,193,985**	***Net carrying value***

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 73, "Sewa" dengan mengakui aset hak guna sebesar Rp6.042.320 dan reklasifikasi dari aset tetap untuk aset sewaan sebesar Rp41.246.620 (Catatan 6) dan termasuk akumulasi depresiasinya sebesar Rp14.747.990 ke Aset Hak Guna ("AHG").

On January 1, 2020, the Group implemented SFAS No. 73, "Leases" by recognising the right-of-use assets of Rp6,042,320 and reclassification from property, plant and equipment of leased assets amounted to Rp41,246,620 (Note 6) together with accumulated depreciation amounted to Rp14,747,990 to Right-of-Use ("ROU") assets.

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Tanjung Jati B 4x660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY390.139.188.104 (nilai penuh) atau setara dengan Rp48.334.266 (2020: JPY440.294.744.121 (nilai penuh) atau setara dengan Rp60.087.024) dan USD4.320.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp61.642 (2020: USD4.320.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp60.934). Manajemen Grup berpendapat bahwa aset hak guna tersebut telah diasuransikan secara memadai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

As at December 31, 2021, assets of Tanjung Jati B Steam Power Plant ("PLTU") 4x660 MW were insured with PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY390,139,188,104 (full amount) or equivalent to Rp48,334,266 (2020: JPY440,294,744,121 (full amount) or equivalent to Rp60,087,024) and USD4,320,000 (full amount) or equivalent to Rp61,642 (2020: USD4,320,000 (full amount) or equivalent to Rp60,934). The Group's management believes that the right-of-use assets were adequately insured as at December 31, 2021 and 2020.

7. ASET HAK GUNA (lanjutan) / *RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)*

Beban penyusutan untuk aset hak guna dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense for right-of-use assets was allocated to the following:

	2021	2020	
Beban usaha	3,113,803	2,479,663	*Operating expenses*
Persediaan	115,896	-	*Inventories*
Aset dalam pembangunan	44,532	43,708	*Construction in progress*
Jumlah	**3,274,231**	**2,523,371**	***Total***

Nilai beban penyusutan yang dikapitalisasi sebagai persediaan, sebagian telah dibebankan pada beban bahan bakar dan pelumas saat persediaan digunakan.

The amount of depreciation expense which is capitalised as inventories, has been partially charged to fuel and lubricants expense when the inventories are used.

Berdasarkan penelaahan manajemen, Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on management's assessment, the Group is of the opinion that there were no indications of impairment of right-of-use assets as at December 31, 2021 and 2020.

8. PROPERTI INVESTASI / *INVESTMENT PROPERTIES*

	2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Change in fair value*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung						***Direct acquisitions***
Tanah dan bangunan	**5,408,572**	**36,192**	**-**	**6,646**	**5,451,410**	*Land and buildings*

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Change in fair value*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung						***Direct acquisitions***
Tanah dan bangunan	**5,283,708**	**106,217**	**-**	**18,647**	**5,408,572**	*Land and buildings*

Akun ini merupakan tanah milik Grup, yaitu IP, PJB dan PLN Batam yang terletak di Pademangan - Jakarta Utara, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Asahan - Sumatera Utara dan Kramatwatu Serang dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali dan beberapa tanah yang disewakan ke pihak ketiga.

This account represents pieces of land owned by members of the Group comprised of IP, PJB and PLN Batam, located in Pademangan North Jakarta, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Asahan - North Sumatera and Kramatwatu Serang with HGB for periods between 7 to 40 years until 2032, which are leased to PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali and several pieces of land that are leased to third parties.

Penghasilan sewa yang diperoleh dari properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp42.691 dan Rp51.365.

Rental income earned from investment properties for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp42,691 and Rp51,365, respectively.

8. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi yang dilakukan oleh KJPP RHR dan KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan berdasarkan laporannya masing-masing No. 00142/2.0012-00/PI/02/0006/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dan No. 00155/2.0027-00/PI/02/0196/1/IV/2021 tanggal 12 April 2021, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hierarki nilai wajar.

Nilai wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan; dan
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, tanah dan hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp36.192 dan Rp106.217 yang disajikan sebagai bagian dari (beban)/penghasilan lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 47).

Berdasarkan penilaian manajemen, Grup berpendapat bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Grup tidak memiliki pinjaman bank yang dijaminkan dengan properti investasi.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Grup tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk perbaikan dan perawatan di masa depan.

***8. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)*

As at December 31, 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by KJPP RHR and KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners based on the reports No. 00142/2.0012-00/PI/02/0006/1/IV/2022 dated April 26, 2022 and No. 00155/2.0027-00/PI/02/0196/1/IV/2021 dated April 12, 2021, independent valuers registered in the Ministry of Finance and OJK.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

The level 2 fair value of land is calculated using the market approach and income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:
a. Sale or rental price per square meter;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate; and
d. Discount and capitalisation rate.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and land rights and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value amounted to Rp36,192 and Rp106,217, respectively, were presented as part of other (expense)/income - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended December 31, 2021 and 2020 (Note 47).

Based on the management's assessment, the Group is of the opinion that there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of investment properties as at December 31, 2021 and 2020.

The Group does not have any bank loans secured by the investment property.

As at December 31, 2021 and 2020, the Group does not have any contractual obligations for future repairs and maintenance.

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA / *9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES*

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/*Entity*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi/ *Year of commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* (%) 2021	2020
Entitas asosiasi/*Associates*					
PT Geo Dipa Energi ("GDE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2002	5.50	6.67
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2004	30.00	30.00
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	49.00	49.00
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2013	20.00	20.00
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2013	45.00	45.00
PT Tanjung Kasam Power ("TJK")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2012	10.00**)	10.00**)
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2005	46.53	46.53
PT PBM Adhiguna Putera ("PBM AP")	Jakarta	Pelayaran/*Shipping*	1987	25.00	25.00
PT Musi Mitra Jaya ("MMJ")	Palembang	Transportasi batubara/ *Coal transportation*	2011	25.50	25.50
PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL")	Musi Banyuasin	Transportasi batubara/ *Coal transportation*	2014	25.50	25.50
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2018	10.00**)	10.00**)
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")	Sumatera Selatan	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	10.00**)	10.00**)
Ventura bersama/*Joint ventures*					
PT Unelec Indonesia ("Unindo")	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ *Electricity supports*	1988	32.35	32.35
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2011	36.61	36.61
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit tenaga listrik uap panas/ *Steam gas electricity power plant*	2015	40.25	40.25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49.00	49.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51.00	51.00
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	51.00	51.00
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ *Transportation and storage of LNG*	2015	35.00	35.00
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ *Electricity controller and distribution*	2014	49.00	49.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	30.00	30.00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2021	35.00	35.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	30.00	30.00
PT North Sumatra Hydro Energy ("NSHE")	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	25.00	25.00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi ("PMSE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51.00	51.00
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik, kelistrikan, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya/*Power generation, supporting activities electricity, wholesaler of office machinery and industry, spare parts and fittings*	*)	30.00	30.00
PT Industri Baterai Indonesia ("IBI")	Jakarta	Industri EV *Battery* dan ESS/ *EV Battery and ESS Industry*	*)	25.00	-

*) Dalam tahap pengembangan
**) PLN memiliki perwakilan di perusahaan-perusahaan tersebut

*) *In development stage*
**) *PLN has representative in those Companies*

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

***9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES** (continued)*

All the associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

As at December 31, 2021 and 2020, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

	2021						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2021/ *Carrying amount January 1, 2021*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas/ *Share in net income/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2021/ *Carrying amount December 31, 2021*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	3,590,968	-	(229,042)	1,830,745	-	5,192,671	*S2P*
SBL	333,847	-	-	(8,483)	736	326,100	*SBL*
MMJ	258,697	-	-	(13,572)	207	245,332	*MMJ*
MEB	130,617	-	(1,500)	657	344	130,118	*MEB*
IPB	124,619	-	-	(671)	-	123,948	*IPB*
TJK	98,402	-	-	23,568	-	121,970	*TJK*
GDE	114,458	-	-	-	-	114,458	*GDE*
DEB	103,997	-	(6,000)	9,315	-	107,312	*DEB*
EPI	60,538	-	-	(8,394)	-	52,144	*EPI*
RDM	61,384	-	-	(6,887)	-	54,497	*RDM*
PBM AP	48,526	-	(6,107)	1,566	9,407	53,392	*PBM AP*
SS Pewali	25,491	-	-	14	-	25,505	*SS Pewali*
Subjumlah	**4,951,544**	**-**	**(242,649)**	**1,827,858**	**10,694**	**6,547,447**	***Subtotal***
Ventura bersama							***Joint ventures***
SGPJB	2,589,521	-	-	662,544	58,278	3,310,343	*SGPJB*
IRT	2,657,595	-	-	31,697	603,579	3,292,871	*IRT*
BPI	1,343,653	-	-	94,782	63,992	1,502,427	*BPI*
NSHE	1,094,049	35,858	-	271,330	(164,254)	1,236,983	*NSHE*
BDSN	843,371	-	(74,268)	129,982	37,880	936,965	*BDSN*
GCL	420,817	38,115	-	154,648	-	613,580	*GCL*
REP	73,906	-	-	50,337	1,384	125,627	*REP*
PMSE	23,742	56,740	-	(10,519)	(720)	69,243	*PMSE*
Komipo PJB	60,295	-	(6,441)	5,633	-	59,487	*Komipo PJB*
PDG	40,125	-	-	15,829	-	55,954	*PDG*
IBI	-	48,951	-	-	-	48,951	*IBI*
MCB	8,234	-	-	1	-	8,235	*MCB*
GTPJB	2,474	-	-	296	(44)	2,726	*GTPJB*
CPSI	3,259	-	-	(3,259)	-	-	*CPSI*
Subjumlah	**9,161,041**	**179,664**	**(80,709)**	**1,403,301**	**600,095**	**11,263,392**	***Subtotal***
Jumlah	**14,112,585**	**179,664**	**(323,358)**	**3,231,159**	**610,789**	**17,810,839**	***Total***

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES** (continued)*

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows: (continued)

	2020						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2020/ *Carrying amount January 1, 2020*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas/ *Share in net income/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2020/ *Carrying amount December 31, 2020*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	2,632,009	-	(203,776)	1,161,997	738	3,590,968	*S2P*
SBL	332,783	-	-	86	978	333,847	*SBL*
MMJ	257,894	-	-	53	750	258,697	*MMJ*
MEB	123,860	-	-	6,757	-	130,617	*MEB*
IPB	121,099	-	-	3,520	-	124,619	*IPB*
GDE	114,458	-	-	-	-	114,458	*GDE*
DEB	101,254	-	-	2,743	-	103,997	*DEB*
TJK	91,379	-	-	7,023	-	98,402	*TJK*
RDM	58,704	-	-	2,680	-	61,384	*RDM*
EPI	53,725	-	-	6,813	-	60,538	*EPI*
PBM AP	39,599	-	-	8,927	-	48,526	*PBM AP*
SS Pewali	26,291	-	-	(800)	-	25,491	*SS Pewali*
Subjumlah	**3,953,055**	**-**	**(203,776)**	**1,199,799**	**2,466**	**4,951,544**	***Subtotal***
Ventura bersama							***Joint ventures***
IRT	522,170	1,901,280	-	234,145	-	2,657,595	*IRT*
SGPJB	2,041,731	-	-	528,737	19,053	2,589,521	*SGPJB*
BPI	1,282,000	-	-	44,024	17,629	1,343,653	*BPI*
NSHE	1,009,527	-	-	445	84,077	1,094,049	*NSHE*
BDSN	794,886	-	(99,570)	138,275	9,780	843,371	*BDSN*
GCL	426,856	-	-	(6,039)	-	420,817	*GCL*
REP	123,126	-	-	(26,837)	(22,383)	73,906	*REP*
Komipo PJB	33,481	-	-	26,814	-	60,295	*Komipo PJB*
PDG	43,262	-	-	(3,137)	-	40,125	*PDG*
PMSE	-	23,778	-	(36)	-	23,742	*PMSE*
MCB	-	8,234	-	-	-	8,234	*MCB*
CPSI	16,350	-	-	(10,117)	(2,974)	3,259	*CPSI*
GTPJB	1,945	-	-	287	242	2,474	*GTPJB*
Unindo	52,376	-	-	(52,376)	-	-	*Unindo*
Subjumlah	**6,347,710**	**1,933,292**	**(99,570)**	**874,185**	**105,424**	**9,161,041**	***Subtotal***
Jumlah	**10,300,765**	**1,933,292**	**(303,346)**	**2,073,984**	**107,890**	**14,112,585**	***Total***

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

***9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES** (continued)*

The following table contains the summarised financial information for associates and joint ventures as at December 31, 2021 and 2020 which are accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi / ***Associates***

	2021					
	S2P	**MMJ**	**SBL**	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah/ *Total***	
Kas dan setara kas	1,139,399	5,145	3,841	1,690,406	2,838,791	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	3,024,301	160,122	251,838	1,560,044	4,996,305	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	4,163,700	165,267	255,679	3,250,450	7,835,096	*Total current assets*
Aset tidak lancar	29,863,035	681,642	319,253	9,827,436	40,691,366	*Non-current sssets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	1,246,735	161,461	94,302	236,732	1,739,230	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	5,077,251	149,379	54,922	1,115,597	6,397,149	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	6,323,986	310,840	149,224	1,352,329	8,136,379	*Total current liabilities*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	9,424,681	-	-	3,263,752	12,688,433	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	6,558,646	442,269	153,623	1,004,899	8,159,437	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	15,983,327	442,269	153,623	4,268,651	20,847,870	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	11,719,422	93,800	272,085	7,456,906	19,542,213	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	5,742,516	23,919	69,381	855,678	6,691,494	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(549,845)	221,413	256,719	(72,334)	(144,047)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**5,192,671**	**245,332**	**326,100**	**783,344**	**6,547,447**	***Total carrying value***
Pendapatan	11,645,263	108,742	89,598	1,595,518	13,439,121	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(5,775,285)	(92,042)	(68,401)	(1,020,675)	(6,956,403)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(207,503)	-	-	(27,289)	(234,792)	*Depreciation and amortisation*
Pendapatan keuangan	7,322	-	-	1,280	8,602	*Finance income*
Beban keuangan	(999,357)	(21)	-	(46,905)	(1,046,283)	*Finance costs*
Beban operasi	(1,960,675)	(2,254)	(412)	(196,524)	(2,159,865)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	1,388,446	(67,649)	(54,052)	(35,578)	1,231,167	*Other income/(expenses) - net*
Beban pajak penghasilan	(361,997)	-	-	(67,942)	(429,939)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	3,736,214	(53,224)	(33,267)	201,885	3,851,608	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih asosiasi tahun berjalan	**1,830,745**	**(13,572)**	**(8,483)**	**19,168**	**1,827,858**	***The Group's share in net income/(loss) for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	-	812	2,886	38,776	42,474	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	**-**	**207**	**736**	**9,751**	**10,694**	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	**(229,042)**	**-**	**-**	**(13,607)**	**(242,649)**	***Dividends received from associates***

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Entitas asosiasi (lanjutan) / ***Associates** (continued)*

	2020					
	S2P	**MMJ**	**SBL**	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah/ *Total***	
Kas dan setara kas	2,234,735	12	354	2,486,076	4,721,177	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	2,694,706	82,405	121,122	1,340,228	4,238,461	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	4,929,441	82,417	121,476	3,826,304	8,959,638	*Total current assets*
Aset tidak lancar	29,615,216	674,118	426,664	8,269,883	38,985,881	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	5,135,469	182,452	95,816	453,643	5,867,380	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	1,028,276	479,964	187,527	622,957	2,318,724	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	6,163,745	662,416	283,343	1,076,600	8,186,104	*Total current liabilities*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	9,330,123	-	-	3,122,764	12,452,887	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	9,165,324	5,155	3,667	1,027,384	10,201,530	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	18,495,447	5,155	3,667	4,150,148	22,654,417	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	9,885,465	88,964	261,130	6,869,439	17,104,998	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	6.67% - 46.53%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	4,843,878	22,686	66,588	1,062,280	5,995,432	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(1,252,910)	236,011	267,259	(294,248)	(1,043,888)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**3,590,968**	**258,697**	**333,847**	**768,032**	**4,951,544**	***Total carrying value***
Pendapatan	12,379,726	44,745	41,427	1,808,031	14,273,929	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(5,364,159)	(44,708)	(51,724)	(1,243,741)	(6,704,332)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(29,484)	-	-	(23,350)	(52,834)	*Depreciation and amortisation*
Pendapatan keuangan	14,105	-	-	3,316	17,421	*Finance income*
Beban keuangan	(1,005,532)	-	-	(134,852)	(1,140,384)	*Finance costs*
Beban operasi	(2,226,030)	(288)	(675)	(298,228)	(2,525,221)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(625,765)	459	11,309	(297,067)	(911,064)	*Other income/(expense) - net*
Beban pajak penghasilan	(771,439)	-	-	(112,092)	(883,531)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	2,371,422	208	337	(297,983)	2,073,984	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	6.67% - 46.53%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih asosiasi tahun berjalan	**1,161,997**	**53**	**86**	**37,663**	**1,199,799**	***The Group's share in net income for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	1,506	2,941	3,835	-	8,282	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	**738**	**750**	**978**	**-**	**2,466**	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	**(203,776)**	**-**	**-**	**-**	**(203,776)**	***Dividends received from associates***

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama / *Joint ventures*

	2021							
	BPI	IRT	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	293,902	190,433	1,929,434	355,570	92,070	1,138,289	3,999,698	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	561,615	123,443	6,224,185	320,009	2,033	714,415	7,945,700	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	855,517	313,876	8,153,619	675,579	94,103	1,852,704	11,945,398	*Total current assets*
Aset tidak lancar	4,657,167	16,176,156	24,039,202	5,437,068	5,841,849	8,459,289	64,610,731	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan								*Financial liabilities*
Utang usaha	769,800	138,193	19,442	60,560	-	295,215	1,283,210	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	647,454	839,298	4,245,300	453,895	614,308	324,595	7,124,850	*Other financial liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	1,417,254	977,491	4,264,742	514,455	614,308	619,810	8,408,060	*Total current liabilities*
Liabilitas								*Liabilities*
Liabilitas keuangan	-	8,580,033	15,650,358	1,872,532	-	6,150,947	32,253,870	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	539,072	475,897	1,243,255	942,450	373,710	973,919	4,548,303	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	539,072	9,055,930	16,893,613	2,814,982	373,710	7,124,866	36,802,173	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	3,556,358	6,456,611	11,034,466	2,783,210	4,947,934	2,567,317	31,345,896	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	51.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,431,434	3,292,871	3,310,339	1,018,933	1,236,983	964,144	11,254,704	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	70,993	-	4	(81,968)	-	19,659	8,688	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,502,427**	**3,292,871**	**3,310,343**	**936,965**	**1,236,983**	**983,803**	**11,263,392**	***Carrying value***
Pendapatan	1,046,089	4,665,015	8,492,010	664,441	1,380,437	2,314,556	18,562,548	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(601,323)	(3,579,708)	(5,324,028)	(65,024)	(871,073)	(1,200,144)	(11,641,300)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	-	(4,634)	-	(855)	-	(18,343)	(23,832)	*Depreciation and amortisation*
Pendapatan keuangan	1,464	51	330,615	158	2,514	2,326	337,128	*Finance income*
Beban keuangan	(34,199)	(405,850)	(687,586)	(182,674)	(81,235)	(168,837)	(1,560,381)	*Interest expense*
Beban operasi	(82,257)	(19,415)	(238,453)	3,095	(77,822)	(403,829)	(818,681)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	13,170	(483,700)	(23,771)	83,826	867,335	88,872	545,732	*Other income/(expense) - net*
Beban pajak penghasilan	(107,461)	(109,608)	(340,307)	(147,922)	(134,836)	(43,616)	(883,750)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	235,483	62,151	2,208,480	355,045	1,085,320	570,985	4,517,464	*Profit for the year*
% kepemilikan	40.25%	51.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00%-51.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	**94,782**	**31,697**	**662,544**	**129,982**	**271,330**	**212,966**	**1,403,301**	***The Group's share of net income for the year of joint ventures***
Penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya	158,988	1,183,487	194,261	103,470	(657,017)	1,156	984,345	*Other comprehensive income/(loss)*
Bagian atas penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya ventura bersama	**63,992**	**603,579**	**58,278**	**37,880**	**(164,254)**	**620**	**600,095**	***Share of other comprehensive income/(loss) of joint ventures***
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	**-**	**-**	**-**	**(74,268)**	**-**	**(6,441)**	**(80,709)**	***Dividends received from joint ventures***

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Ventura bersama (lanjutan) / ***Joint ventures** (continued)*

	2020							
	BPI	IRT	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	267,942	104,067	1,161,181	396,984	406,625	993,862	3,330,661	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	496,257	2,602	4,471,202	238,719	6,410	1,087,003	6,302,193	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	764,199	106,669	5,632,383	635,703	413,035	2,080,865	9,632,854	*Total current assets*
Aset tidak lancar	5,004,813	10,667,878	24,302,015	5,475,140	4,408,975	7,305,254	57,164,075	*Non current-assets*
Liabilitas keuangan								*Financial liabilities*
Utang usaha	275,363	15,139	3,128,846	259,400	552,702	508,909	4,740,359	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	1,133,706	2,920,621	20,754	318,476	-	999,483	5,393,040	*Other financial liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	1,409,069	2,935,760	3,149,600	577,876	552,702	1,508,392	10,133,399	*Total current liabilities*
Liabilitas								*Liabilities*
Liabilitas keuangan	487,094	2,549,735	14,510,002	2,103,702	18,131	5,745,984	25,414,648	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	508,710	78,081	3,543,806	817,883	-	471,219	5,419,699	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	995,804	2,627,816	18,053,808	2,921,585	18,131	6,217,203	30,834,347	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	3,364,139	5,210,971	8,730,990	2,611,382	4,251,177	1,660,524	25,829,183	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	51.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00%-51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,354,066	2,657,595	2,619,297	956,027	1,062,794	562,970	9,212,749	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	(10,413)	-	(29,776)	(112,656)	31,255	69,882	(51,708)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,343,653**	**2,657,595**	**2,589,521**	**843,371**	**1,094,049**	**632,852**	**9,161,041**	***Carrying value***
Pendapatan	1,019,174	5,744,783	8,564,860	652,097	-	1,334,976	17,315,890	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(436,498)	(5,103,141)	(5,843,729)		-	(690,835)	(12,074,203)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	-	-	-	(907)	-	(78,117)	(79,024)	*Depreciation and amortisation*
Pendapatan keuangan	2,655	2,958	19,114	-	-	6,455	31,182	*Finance income*
Beban keuangan	(67,390)	(114,966)	(812,259)	(205,536)	-	(214,922)	(1,415,073)	*Finance costs*
Beban operasi	(77,237)	(18,610)	(141,693)	(72,894)	-	(369,234)	(679,668)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(477,699)	82,616	17,902	920	1,780	(197,920)	(572,401)	*Other income/(charges) - net*
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	146,371	(134,532)	(41,738)	4,018	-	(2,254)	(28,135)	*Income tax benefit/(expense)*
Laba/(rugi) tahun berjalan	109,376	459,108	1,762,457	377,698	1,780	(211,851)	2,498,568	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	40.25%	51.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00%-51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih ventura bersama tahun berjalan	**44,024**	**234,145**	**528,737**	**138,275**	**445**	**(71,441)**	**874,185**	***The Group's share of net income/(loss) for the year of joint ventures***
Penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya	43,799	-	63,510	26,714	336,308	(49,150)	421,181	*Other comprehensive income/(loss)*
Bagian atas penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya ventura bersama	**17,629**	**-**	**19,053**	**9,780**	**84,077**	**(25,115)**	**105,424**	***Share of other comprehensive income/(loss) of joint ventures***
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama		**-**	**-**	**(99,570)**	**-**	**-**	**(99,570)**	***Dividends received from joint ventures***

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there is no indication of impairment.

10. PIUTANG PIHAK BERELASI / *10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES*

	2021	2020*)	
SGPJB	806,425	797,169	*SGPJB*
REP	358,699	333,984	*REP*
PDG	114,012	179,464	*PDG*
PMSE	9,632	-	*PMSE*
Lain-lain	54,379	75,382	*Others*
Jumlah	1,343,147	1,385,999	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**183,066**	**76,673**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**1,160,081**	**1,309,326**	***Non-current portion***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61 / *) *As reclassified, see Note 61*

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES *(continued)*

SGPJB

Pada tanggal 20 November 2018, PJBI, entitas anak PJB, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD56.516.733 kepada SGPJB dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo piutang masing-masing sebesar USD56.516.733 (setara dengan Rp806.425) dan USD56.516.733 (setara dengan Rp797.169).

SGPJB

On November 20, 2018, PJBI, a PJB subsidiary, granted a long-term loan to SGPJB amounted to USD56,516,733 with an interest rate of LIBOR 6 month + 4%. The loan will mature on December 15, 2033. The interest will be due every January 15 and July 15. As at December 31, 2021 and 2020 the balance of receivables amounted to USD56,516,733 (equivalent to Rp806,425) and USD56,516,733 (equivalent to Rp797,169), respectively.

REP

Pada tanggal 4 Juli 2014, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD9.399.962 kepada REP, entitas asosiasi, untuk membiayai proyek 46,6 Megawatt di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 17,5 tahun setelah grace period selama pembangunan. Tanggal operasi komersial PLTA telah diamandemen, terakhir kali melalui Amandemen Pertama atas PJBTL tertanggal 10 Agustus 2017, menjadi 57 bulan setelah tanggal pendanaan. Pada tanggal 12 Mei 2019, PLTA Rajamandala 1 x 47 MW telah beroperasi secara komersial berdasarkan sertifikat tanggal operasi komersial No. 188.BA/159/REP/2019. Pokok pinjaman akan ditagihkan dan terutang setiap enam bulan sejak tanggal operasi komersial.

REP

On July 4, 2014, IP, a subsidiary, provided a long-term loan of USD9,399,962 to REP, an associate, for the financing of the 46.6 Megawatt project in Hydroelectric Power Plant ("HPP") Citarum River at Cianjur, West Java. This loan bears interest of 10% per annum with a 17.5 years terms of repayment after a grace period during construction. The COD has been amended, most recently through the First Amendment of PPA dated August 10, 2017, 57 months after financial close date. On May 12, 2019, the Rajamandala 1 x 47 MW HPP was commercially operated based on COD certificate No. 188.BA/159/REP/2019. The principal shall be invoiced and due every six months starting on COD.

Pada tanggal 23 November 2016, IP memberikan tambahan pinjaman sebesar USD5.724.490 kepada REP dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

On November 23, 2016, IP provided additional loans of USD5,724,490 to REP with similar terms and conditions to the previous loan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pokok pinjaman IP kepada REP masing-masing adalah sebesar USD15.124.452 (setara dengan Rp215.811) dan USD15.124.452 (setara dengan Rp213.330) dan piutang bunga masing-masing sebesar USD9.947.670 (setara dengan Rp142.329) dan USD8.462.224 (setara dengan Rp119.360). Piutang lainnya sebesar Rp559 (2020: Rp1.294) merupakan biaya relokasi pegawai dan pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan.

As at December 31, 2021 and 2020, IP's principal outstanding loan balance to REP was USD15,124,452 (equivalent to Rp215,811) and USD15,124,452 (equivalent to Rp213,330), respectively, and interest receivables amounted to USD9,947,670 (equivalent to Rp142,329) and USD8,462,224 (equivalent to Rp119,360), respectively. Other receivables of Rp559 (2020: Rp1,294) represents costs of employee relocation and operation and maintenance services revenue.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar USD1.512.445 (setara dengan Rp21.685) dan USDRp1.516.589 (setara dengan Rp22.184) yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

As at December 31, 2021 and 2020, interest income amounted to USD1,512,445 (equivalent to Rp21,685) and USD1,516,589 (equivalent to Rp22,184) which is presented in the consolidated statements of profit or loss.

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

REP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan oleh REP. IP tidak berhak untuk meminta pembayaran kembali atas pokok pinjaman yang diberikan kepada REP sebelum Tanggal Pembebasan Fasilitas Senior, namun untuk pembayaran bunga yang dilakukan oleh REP harus memenuhi syarat dan kondisi yang tertuang dalam perjanjian pemegang saham sebagai berikut:
- Uang yang ada pada kredit dari Rekening Distribusi; atau
- Sumber - sumber lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh Agen Antar Kreditur.

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD18.837.112 kepada PDG, ventura bersama, untuk membiayai proyek PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi USD18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi delapan tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun.

Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek *(Interest During Construction*) dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023. Pada tahun 2021, PDG melakukan pembayaran atas pinjaman sebesar USD5.489.093 atau setara dengan Rp78.324 (2020: nihil). Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo piutang masing-masing terdiri dari pokok dan bunga sebesar USD7.704.827 (setara dengan Rp109.940) dan USD12.618.091 (setara dengan Rp177.979). Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, piutang lainnya sebesar Rp4.072 dan Rp1.485, merupakan piutang atas bunga dan biaya pegawai.

PMSE

Pada tanggal 20 Mei 2021, PJBIC, entitas anak PJB, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD663.000 kepada PMSE, ventura bersama, dengan suku bunga tahunan sebesar 4,7%.

Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang pihak berelasi tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

***10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES** (continued)*

***REP** (continued)*

As at December 31, 2021 and 2020, there was no repayment of the loan principal and interest paid by REP. IP is not entitled to request repayment of loan principal provided to REP before the Senior Facility Release Date, while interest paid by REP should fulfil several terms and conditions as stated in the shareholder agreement as follows:

- *The monies standing to the credit of the Distribution Accounts; or*
- *Other sources as may be approved in writing by the Intercreditor Agent.*

PDG

On June 12, 2013, IP, a subsidiary, granted a long-term loan amounted to USD18,837,112 to PDG, a joint venture, for financing the PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 30, 2015, IP made an amendment to the long-term loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan granted to become USD18,191,529 in accordance with the fund transferred up to January 9, 2014, and the tenor of the loan was amended to eight years and will be due on December 1, 2023. This loan bears interest of 6.5% per annum.

The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) is effective from the date of cash withdrawal until May 30, 2014 and was fully paid on June 1, 2016. The principal shall be collected every 6 months from dated June 1, 2016 until December 1, 2023. In 2021, PDG made payment of the receivables amounted to USD5,489,093 or equivalent to Rp78,324 (2020: nil). As at December 31, 2021 and 2020, the outstanding principal and accrued interest of the receivables amounted to USD7,704,827 (equivalent to Rp109,940) and USD12,618,091 (equivalent to Rp177,979). As at December 31, 2021 and 2020, other receivables amounted to Rp4,072 and Rp1,485 respectively, represent interest receivables and employee costs.

PMSE

On May 20, 2021, PJBIC, subsidiary of PJB, granted a long-term loan to PMSE, a joint venture, amounted to USD663,000 with an annual interest rate of 4.7%.

Management of the Group is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from related parties is not material, therefore, a provision for expected credit losses is not considered necessary as at December 31, 2021 and 2020.

Refer to Note 52 for the information on the details of transaction and balances with related parties.

11. REKENING BANK DIBATASI PENGGUNAANNYA / *11. RESTRICTED CASH IN BANKS*

	2021	2020	
Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi			***Lease instalments and operation guarantees***
Rekening bank			*Cash in banks*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura			*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore*
JPY	4,039,648	5,038,653	*JPY*
USD	741,073	703,981	*USD*
Jaminan bank garansi			***Bank guarantees***
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
Rupiah	10,000	60,648	*Rupiah*
USD	150,792	-	*USD*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	53,827	50,880	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	10,902	9,264	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ("BPD Jatim")	268	-	*Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ("BPD Jatim")*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	16,750	19,796	*PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")*
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")	44,910	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")*
Subjumlah	5,068,170	5,883,222	*Subtotal*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(9)	(288)	*Allowance for expected credit loss*
Jumlah	**5,068,161**	**5,882,934**	***Total***
Dikurangi: bagian lancar	**206,279**	**-**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**4,861,882**	**5,882,934**	***Non-current portion***

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY32.606.787.926 dan USD51.935.860 pada tanggal 31 Desember 2021 (2020: JPY36.920.916.571 dan USD49.910.033) untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* (Catatan 26).

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounted to JPY32,606,787,926 and USD51,935,860 as at December 31, 2021 (2020: JPY36,920,916,571 and USD49,910,033) to fulfil the requirements of the Financial Lease Agreement (Note 26).

Jaminan bank garansi merupakan rekening bank yang digunakan untuk jaminan pelaksanaan proyek dan pemberian jasa oleh Grup.

Bank guarantees represent cash in banks which were used as collateral for projects and services provided by the Group.

Rincian rekening bank dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of restricted cash in banks in foreign currencies are as follows:

	2021		2020		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	**Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)***	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	
JPY	32,606,787,926	4,039,648	36,920,916,571	5,038,653	*JPY*
USD	62,503,640	891,865	49,910,033	703,981	*USD*
Jumlah		**4,931,513**		**5,742,634**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 52 for information on the details of transactions and balances with related parties.

12. ASET TIDAK LANCAR LAIN / *12. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	2021	2020*)	
Properti pertambangan	1,810,266	1,873,042	*Mining properties*
Uang muka			*Advances*
Pengembangan proyek	1,457,182	1,541,045	*Project development*
Pembelian batubara	43,500	156,508	*Purchase of coal*
Subjumlah	1,500,682	1,697,553	*Subtotal*
Biaya dibayar di muka			*Prepayments*
Pembelian gas	127,770	83,409	*Gas purchased*
Lain-lain	79,306	399,044	*Others*
Subjumlah	207,076	482,453	*Subtotal*
Aset takberwujud			*Intangible assets*
Piranti lunak	566,134	418,927	*Software*
Biaya legal terkait perpanjangan tanah dan hak atas tanah	327,462	137,743	*Legal costs for renewal of land rights*
Subjumlah	893,596	556,670	*Subtotal*
Lain-lain	10,405	25,701	*Others*
Jumlah	**4,422,025**	**4,635,419**	***Total***

Manajemen Grup meyakini bahwa properti pertambangan, uang muka, dan biaya dibayar di muka dapat dipulihkan.

Management of the Group believes that the mining properties, advances, and prepayments are recoverable.

Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp217.524 dan Rp130.919 disajikan sebagai beban usaha lain-lain (Catatan 45).

Amortisation of intangible assets for the years ended December 31, 2021 and 2020, amounted to Rp217,524 and Rp130,919 respectively, are presented as part of other operating expenses (Note 45).

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

13. KAS DAN SETARA KAS / *13. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2021	2020	
Kas	8,868	9,676	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
BNI		*BNI*	
Rupiah	10,665,609	12,209,640	*Rupiah*
USD	1,303,639	2,396,127	*USD*
JPY	126,208	260,665	*JPY*
EUR	7,573	29,355	*EUR*
MYR	3,106	2,120	*MYR*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	10,586,554	15,249,959	*Rupiah*
USD	1,366,973	792,175	*USD*
MYR	47,329	-	*MYR*
EUR	32,781	135,658	*EUR*
JPY	1,276	12,052	*JPY*
BRI			*BRI*
Rupiah	5,828,760	10,799,110	*Rupiah*
USD	2,157,559	2,210,926	*USD*
EUR	272,134	82,807	*EUR*
JPY	18,799	74,414	*JPY*

13. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / ***13. CASH AND CASH EQUIVALENTS** (continued)*

	2021	2020	
Bank (lanjutan)			*Cash in banks (continued)*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)			*Government related entities (continued)*
Bank Tabungan Negara			*Bank Tabungan Negara*
Rupiah	587,275	2,619,238	*Rupiah*
PT Bank DKI ("Bank DKI")			*PT Bank DKI ("Bank DKI")*
Rupiah	132,968	586,623	*Rupiah*
USD	40,757	40,202	*USD*
JPY	942	1,038	*JPY*
Bank Syariah Indonesia ("BSI")			*Bank Syariah Indonesia ("BSI")*
Rupiah	176,279	-	*Rupiah*
Subjumlah	33,356,521	47,502,109	*Subtotal*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(40)	(1,875)	*Allowance for expected credit losses*
Jumlah entitas yang berelasi dengan Pemerintah	33,356,481	47,500,234	*Total Government related entities*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin			*Bank Bukopin*
JPY	37,046	293,087	*JPY*
Rupiah	29,065	2,665,254	*Rupiah*
USD	9,497	261,171	*USD*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")			*PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")*
Rupiah	252,514	392,301	*Rupiah*
PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC NISP")			*PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC NISP")*
Rupiah	280,943	333,443	*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")			*PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")*
Rupiah	101,452	144,677	*Rupiah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia") (dahulu Bank Internasional Indonesia)			*PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia") (formerly Bank Internasional Indonesia)*
Rupiah	1,145	15	*Rupiah*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
USD	1,174,510	1,184,956	*USD*
Rupiah	153,154	555,071	*Rupiah*
Dinar	8	-	*Dinar*
EUR	-	1	*EUR*
Subjumlah	2,039,334	5,829,976	*Subtotal*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(2)	(267)	*Allowance for expected credit losses*
Jumlah pihak ketiga	2,039,332	5,829,709	*Total third parties*
Jumlah kas dan bank	35,404,681	53,339,619	***Total cash on hand and in banks***

13. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *13. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	2021	2020	
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
BNI			*BNI*
Rupiah	802,670	740,000	*Rupiah*
USD	159,869	-	*USD*
BRI			*BRI*
Rupiah	555,600	322,600	*Rupiah*
USD	751,700	-	*USD*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	122,000	263,104	*Rupiah*
USD	76,767	-	*USD*
BSI			*BSI*
Rupiah	55,000	-	*Rupiah*
Jumlah pihak berelasi	2,523,606	1,325,704	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin			*Bank Bukopin*
Rupiah	40,000	10,000	*Rupiah*
Lain-lain			*Others*
Rupiah	112	60,111	*Rupiah*
Jumlah pihak ketiga	40,112	70,111	*Total third parties*
Jumlah deposito berjangka	2,563,718	1,395,815	***Total time deposits***
Jumlah	**37,968,399**	**54,735,434**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	1.90% - 4.75%	3.00% - 7.52%	*Rupiah*
USD	0.20% - 3.50%	0.80% - 2.50%	*USD*
Jangka waktu	1 - 3 Bulan/*Months*	1 - 3 Bulan/*Months*	*Maturity*

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows:

	2021		2020		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	**Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)***	**Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent***	
USD	493,466,308	7,041,271	488,164,220	6,885,557	*USD*
EUR	19,376,891	312,488	14,300,021	247,821	*EUR*
JPY	1,487,378,556	184,271	4,698,822,769	641,256	*JPY*
Lain-lain	3,535,211	50,443	150,293	2,120	*Others*
Jumlah		**7,588,473**		**7,776,754**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

**) In full amount*

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 52 for information on the details of transactions and balances with related parties.

14. INVESTASI JANGKA PENDEK / *14. SHORT-TERM INVESTMENTS*

	2021	2020	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
BRI			*BRI*
Rupiah	260,000	305,171	*Rupiah*
USD	-	33,898	*USD*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	103	20,000	*Rupiah*
BNI			*BNI*
Rupiah	30,229	-	*Rupiah*
Jumlah pihak berelasi	290,332	359,069	*Total related parties*
Investasi lain-lain			*Other investments*
Rupiah	7,388	7,660	*Rupiah*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian	-	(21)	*Allowance for expected credit losses*
Jumlah	**297,720**	**366,708**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	1.90% - 3.00%	3.75% - 6.00%	*Rupiah*
USD	-	2.50%	*USD*
Jangka waktu			*Maturity*
Rupiah	6 - 12 Bulan /*Months*	6-12 Bulan /*Months*	*Rupiah*
USD	-	6-12 Bulan /*Months*	*USD*

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 52 for information on the details of transactions and balances with related parties.

15. PIUTANG USAHA / *15. TRADE RECEIVABLES*

	2021	2020*)	
Pihak berelasi			***Related parties***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah	2,280,440	1,891,306	*Government related entities*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(137,554)	(107,250)	*Allowance for expected credit losses*
Subjumlah	2,142,886	1,784,056	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
Umum	24,052,028	21,631,126	*Public*
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI dan POLRI)	698,113	960,996	*Tentara Nasional Indonesia and Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI and POLRI)*
Subjumlah	24,750,141	22,592,122	*Subtotal*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(3,090,641)	(3,097,762)	*Allowance for expected credit losses*
Subjumlah	21,659,500	19,494,360	*Subtotal*
Jumlah, bersih	**23,802,386**	**21,278,416**	***Total, net***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

15. PIUTANG USAHA (lanjutan) / ***15. TRADE RECEIVABLES** (continued)*

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade receivables is as follows:*

	2021	2020	
Belum jatuh tempo	21,604,276	21,050,384	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo			*Past due*
1 s/d 30 hari	1,024,877	215,116	*1 to 30 days*
31 s/d 60 hari	163,810	495,039	*31 to 60 days*
61 s/d 360 hari	585,985	162,600	*61 to 360 days*
Lebih dari 360 hari	3,651,633	2,560,289	*More than 360 days*
Jumlah	**27,030,581**	**24,483,428**	***Total***

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:*

	2021	2020	
Saldo awal	3,205,012	1,956,714	*Balance at beginning*
Penyesuaian saldo awal atas penerapan awal PSAK No. 71	-	782,488	*Opening balance adjustments upon initial application of SFAS No. 71*
Penambahan	24,452	469,838	*Additions*
Penghapusan	(1,269)	(4,028)	*Write-off*
Saldo akhir	**3,228,195**	**3,205,012**	***Ending balance***

Piutang usaha Perusahaan dan PLN Batam dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 35).

The Company and PLN Batam's trade receivables are secured by the customer security deposits in case of default (Note 35).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh nilai tercatat piutang usaha berdominasi Rupiah.

As at December 31, 2021 and 2020, all carrying amount of Group's trade receivables were dominated in Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang usaha sebesar Rp27.030.581 mengalami penurunan nilai dan telah diprovisikan sebesar Rp3.228.195. Piutang usaha yang diturunkan nilainya terutama terkait dengan pelanggan umum yang belum melakukan pembayaran piutang lebih dari tiga bulan.

As at December 31, 2021, trade receivables of Rp27,030,581 were impaired and have been provided for by Rp3,228,195. The impaired trade receivables mainly relate to public customers who have not paid the receivables more than three months.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk atas piutang usaha karena Grup memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakup segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Grup atas piutang usaha yang baik selama beberapa periode. Oleh karena itu, manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha adalah cukup.

Management believes there is no heightened risk of poor credit quality of trade receivables because the Group has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Group's good historical collection rates of trade receivables across the periods. Therefore, management is of the opinion that the allowance for expected credit loss of trade receivables is adequate.

16. PIUTANG DARI PEMERINTAH / *16. RECEIVABLES FROM GOVERNMENT*

Piutang dari Pemerintah terdiri atas piutang kompensasi, piutang subsidi listrik dan kekurangan bayar atas stimulus COVID-19 kepada Perusahaan.

Receivables from Government consists of compensation receivables, electricity subsidy receivables and underpayment of COVID-19 stimulus to the Company.

	2021	2020	
Piutang kompensasi	24,594,425	17,904,508	*Compensation receivables*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian	-	(629,018)	*Allowance for expected credit losses*
	24,594,425	17,275,490	
Piutang subsidi listrik (Catatan 38)	1,974,633	-	*Receivables for electricity subsidy (Note 38)*
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian	(147,748)	-	*Allowance for expected credit losses*
Piutang stimulus COVID-19	133,581	819,067	*COVID-19 stimulus receivables*
	1,960,466	819,067	
Jumlah	26,554,891	18,094,557	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**8,300,000**	**819,067**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**18,254,891**	**17,275,490**	***Non-current portion***

Piutang kompensasi / *Compensation receivables*

Piutang kompensasi merupakan piutang atas kompensasi dari Pemerintah untuk penggantian perbedaan tarif aktual dan tarif yang dikalkulasi oleh Grup. Sejak tahun 2017, Grup selalu menerima keputusan tarif tetap dari Pemerintah. Dengan kata lain, perhitungan yang dilakukan oleh Grup terkait tarif listrik tidak disetujui oleh Kementerian ESDM. Grup diharuskan menggunakan tarif listrik tetap yang sudah disetujui.

Compensation receivables represents compensation from Government for the difference between the actual tariffs charged versus the tariffs calculated by the Group. Since 2017, the Group has always accepted fixed electricity tariff decision from the Government. In other words, the calculation of electricity tariff proposed by the Group is not approved by the Ministry of ESDM. The Group was required to use a fixed electricity tariff which has been approved.

Berdasarkan surat BPKP No. S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 kepada Menteri Keuangan, disampaikan penggantian biaya pokok penyediaan dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2020 sebesar Rp17.904.508. Grup telah menerima pembayaran piutang kompensasi tahun 2020 tersebut secara penuh pada tanggal 23 Desember 2021.

Based on the letter from BPKP No. S-454/K/D4/2021 dated April 20, 2021, to the Minister of Finance, the reimbursement for cost of electricity supply in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for non-subsidy tariff groups for the year 2020 amounts to Rp17,904,508. The Group has received full payment of the 2020 compensation receivables in full on December 23, 2021.

Pada tanggal 7 April 2022, BPK menyampaikan LHP No. 26/S/IX-XX.1/4/2022 atas perhitungan kompensasi tahun 2020. Berdasarkan LHP tersebut, nilai dana kompensasi pada tahun 2020 sebesar Rp16.702.245 sehingga terdapat kelebihan penerimaan kompensasi tahun 2020 yang diterima oleh Grup sebesar Rp1.202.263. Kelebihan penerimaan tersebut dicatat sebagai utang kepada Pemerintah pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 25).

On April 7, 2022, BPK submitted an LHP No. 26/S/IX-XX.1/4/2022 for the calculation of compensation in 2020. Based on the LHP, the amount of the compensation in 2020 was amounted to Rp16,702,245, so there was an excess of 2020 compensation received by the Group amounted to Rp1,202,263. The excess of compensation is recorded as payable to Government in the consolidated statement of financial position (Note 25).

16. PIUTANG DARI PEMERINTAH (lanjutan)

Piutang kompensasi (lanjutan)

Berdasarkan surat BPKP No. SP-137/D4/04/2022 tanggal 8 Februari 2022 kepada Menteri Keuangan, disampaikan penggantian biaya pokok penyediaan dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2021 sebesar Rp24.594.425. Grup menyajikan jumlah kompensasi ini sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Berdasarkan PMK No. 159/PMK.02/2021, Perusahaan mencatat pendapatan dan piutang kompensasi sesuai dengan asersi manajemen dan akan ditetapkan sebagai kebijakan dana kompensasi oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil reviu oleh BPKP. Finalisasi kebijakan dana kompensasi tersebut akan dilakukan berdasarkan LHP BPK. Perbedaan yang timbul dari hasil audit BPK akan mempengaruhi laba rugi pada tahun audit tersebut difinalisasi.

Piutang stimulus COVID-19

Saldo piutang stimulus COVID-19 tahun 2020 terkait diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri sebesar Rp819.067. Grup telah menerima seluruh jumlah tersebut pada tanggal 31 Mei 2021.

Selama tahun 2021, pendapatan stimulus COVID-19 terkait diskon tarif, pembebasan rekening minimum, dan abonemen sebesar Rp9.971.721 yang dicatat oleh manajemen sebagai penjualan tenaga listrik. Perusahaan telah menerima pembayaran stimulus COVID-19 sebesar Rp10.962.162, termasuk di dalamnya pembayaran piutang stimulus COVID-19 terkait pembebasan rekening minimum dan abonemen tahun 2020 sebesar Rp304.955. Saldo piutang stimulus COVID-19 tahun 2021 adalah sebesar Rp133.581 terkait diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri sebesar Rp114.758 dan pembebasan rekening minimum dan abonemen sebesar Rp18.823.

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang ini telah mencukupi.

***16. RECEIVABLES FROM GOVERNMENT** (continued)*

***Compensation receivables** (continued)*

Based on the letter from BPKP No. SP-137 /D4/04/2022 dated February 8, 2022 to the Minister of Finance, the reimbursement for cost of electricity supply in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for non-subsidy tariff groups for the year 2021 amounts to Rp24,594,425. The Group presents this compensation amount as part of revenue in the consolidated statement of profit or loss.

Based on PMK No. 159/PMK.02/2021, the Company records compensation income and receivables in accordance with management estimates which and will be finally determined based on the compensation fund policy by the Minister of Finance based on the results of the review by BPKP. Finalisation of the compensation fund policy will be made based on the LHP of the BPK. Any differences from the audit of BPK will impact profit or loss in the year the audit is finalised.

COVID-19 stimulus receivables

The balance of COVID-19 stimulus receivables represents the tariff discount for household, business and industrial customers in 2020 amounted to Rp819,067. The Group has received the amounts in full on May 31, 2021.

During 2021, revenue from COVID-19 stimulus in relation to tariff discount, minimum account exemption, and subscription fees amounted to Rp Rp9,971,721 and were recorded by management as sales of electricity. The Company has received COVID-19 stimulus payments amounted to Rp10,962,162 including payment of COVID-19 stimulus receivables for minimum account exemption and subscription fees for the year 2020 amounted to Rp304,955. COVID-19 stimulus receivables in 2021 were amounted to Rp133,581 related to tariff discounts for household, business, and industrial customers amounted to Rp114,758 and exemption from minimum accounts and subscriptions amounted to Rp18,823.

Refer to Note 52 for information on the details of transactions and balances with related parties.

Management believes that the allowance for expected credit losses on these receivables is adequate.

17. PIUTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER RECEIVABLES*

	2021	2020*)	
Karyawan	771,668	707,134	*Employees*
Lain-lain	1,623,926	1,925,262	*Others*
Jumlah	2,395,594	2,632,396	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**1,249,618**	**1,746,344**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**1,145,976**	**886,052**	***Non-current portion***

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah, pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

Piutang untuk lain-lain sebagian besar terdiri dari piutang dari vendor yang akan dilunasi dengan pembayaran tunai atau pemotongan tagihan vendor.

Receivables from others mostly consist of receivables from vendors which will be settled through cash repayments or deduction of vendor invoices.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang lain-lain tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Management of the Group believes that the allowance for expected credit losses of other receivables is not material, therefore, a provision for expected credit losses is considered not necessary as at December 31, 2021 and 2020.

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

18. PERSEDIAAN / *18. INVENTORIES*

	2021	2020	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	6,598,383	6,181,718	*Coal, fuel and lubricants*
Persediaan umum	2,791,735	2,622,514	*General supplies*
Switchgear dan jaringan	710,475	981,889	*Switchgear and network*
Alat ukur, pembatas dan kontrol	519,029	470,673	*Meter recording devices, circuit breaker, and control equipment*
Kabel	59,044	74,620	*Cables*
Transformator	55,690	60,440	*Transformers*
Jumlah	10,734,356	10,391,854	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang	(340,937)	(114,565)	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Jumlah, bersih	**10,393,419**	**10,277,289**	***Total, net***

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of changes in allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	114,565	142,579	*Beginning balance*
Penambahan	226,372	-	*Additions*
Pemulihan	-	(28,014)	*Recovery*
Saldo akhir	**340,937**	**114,565**	***Ending balance***

18. PERSEDIAAN (lanjutan)

Grup tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp82.350.492 dan Rp66.668.494.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

***18. INVENTORIES** (continued)*

The Group does not have any insurance to cover the possible losses in inventories.

The total amount of inventories recognised as expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp82,350,492 and Rp66,668,494, respectively.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories and inventory obsolescence.

19. PAJAK DIBAYAR DI MUKA / ***19. PREPAID TAXES***

	2021	2020	
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	2,321,200	1,951,580	*Value-Added Tax ("VAT")*
Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan") lebih bayar			*Overpayment of Corporate Income Tax ("CIT")*
2021	537,168	-	*2021*
2020	890,457	994,383	*2020*
2019	210,830	973,175	*2019*
Bea meterai	74,935	69,319	*Stamp duty*
Pembayaran di muka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Catatan 48)	20,298,544	12,197,312	*Prepayments of Tax Assessment Letters for Underpayment (Note 48)*
Jumlah	24,333,134	16,185,769	*Total*
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak	(4,519,237)	-	*Allowance for uncertainty over tax treatment*
Jumlah, bersih	19,813,897	16,185,769	*Total, net*
Dikurangi: bagian lancar	**2,701,520**	**7,287,693**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**17,112,377**	**8,898,076**	***Non-current portion***

Lihat Catatan 48 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 48 for income tax expense information and tax assessment letters.

20. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA / ***20. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES***

	2021	2020	
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Sewa	28,015	42,790	*Rent*
Premi asuransi	66,665	17,636	*Insurance*
Subjumlah	94,680	60,426	*Subtotal*
Uang muka			*Advances*
Pembelian bahan bakar	168,329	155,661	*Purchases of fuel*
Proyek	124,155	79,820	*Projects*
Pembelian barang	120,435	25,815	*Purchases of goods*
Lain-lain	301,369	319,159	*Others*
Subjumlah	714,288	580,455	*Subtotal*
Jumlah	**808,968**	**640,881**	***Total***

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

Modal saham

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan mempunyai modal dasar masing-masing sebesar Rp439.000.000 yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-477/MBU/07/2020 tanggal 8 Juli 2020, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui penambahan penyertaan modal Pemerintah sebesar 10.528.230 saham dengan nilai Rp10.528.230 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp125.709.232 dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp6.500.000 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019.
- Sebesar Rp4.028.230 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2019 tanggal 12 September 2019.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-784/MBU/07/2020 tanggal 30 September 2020, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 9.632.950 saham dengan nilai Rp9.632.950 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp135.342.182 dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp4.632.950 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020.
- Sebesar Rp5.000.000 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020.

21. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS

Capital stock

The Company's shares of stock are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia.

As at December 31, 2021 and 2020, the Company has authorised capital amounted to Rp439,000,000, consisting of 439,000,000 shares, with par value of Rp1 per share.

Based on letter of Minister of SOE No. S-477/MBU/07/2020 dated July 8, 2020 the decision of Minister of SOE as General Meeting of Shareholders ("GMS") approved additional Government equity participation of 10,528,230 shares amounted to Rp10,528,230, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp125,709,232 with details as follows:

- *Amounted to Rp6,500,000 from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 51 year 2019 dated July 19, 2019.*
- *Amounted to Rp4,028,230 from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 60 year 2019 dated September 12, 2019.*

Based on letter of Minister of SOE No. S-784/MBU/07/2020 dated September 30, 2020 the decision of Minister of SOE as GMS approved additional Government equity participation of 9,632,950 shares amounted to Rp9,632,950, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp135,342,182 with details as follows:

- *Amounted to Rp4,632,950 from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 36 year 2020 dated July 7, 2020.*
- *Amounted to Rp5,000,000 from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 37 year 2020 dated July 8, 2020.*

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-603/MBU/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui penambahan penyertaan modal Pemerintah sebesar 118.704 saham dengan nilai Rp118.704 yang berasal dari pengalihan selisih saham seri B milik Pemerintah di EMI sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp135.460.886 (Catatan 5).

Saldo laba

Saldo laba terdiri dari sebagai berikut:

i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tahun 2019 No. 0052.RIS/DIR2020 pada tanggal 18 Juni 2020, cadangan umum dari saldo laba tahun 2019 sebesar Rp4.322.130 telah disetujui.

ii. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp84.962.218 dan Rp71.928.554.

Dividen

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tahun 2020 No. 0253.K/DIR2021 yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2021, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun 2020 sejumlah Rp400.000 (Rp3.256/saham - nilai penuh). Dividen tunai final tahun 2020 ini telah dibayarkan pada tanggal 26 Juli 2021.

21. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS *(continued)*

Capital stock (continued)

Based on letter of Minister of SOE No. S-603/MBU/08/2021 dated August 20, 2021 the decision of Minister of SOE as GMS approved additional Government equity participation of 118,704 shares amounted to Rp118,704 from the transfer of all series B shares owned by the Government in EMI, thereby increasing the subscribed and paid-in capital to Rp135,460,886 (Note 5).

Retained earnings

Retained earnings consists of the following:

i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounted to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

Based on decision result of GMS for the year 2019 No. 0052.RIS/DIR2020 dated June 18, 2020, an appropriation from the 2019 retained earnings amounted to Rp4,322,130 was approved.

ii. Unappropriated retained earnings

As at December 31, 2021 and 2020, the balance of the unappropriated retained earnings amounted to Rp84,962,218 and Rp71,928,554, respectively.

Dividends

Based on decision result of GMS for the year 2020 No. 0253.K/DIR2021 dated June 28, 2021, the shareholders agreed to distribute cash dividends from 2020 net income amounted to Rp400,000 (Rp3,256/share - full amount). This cash dividend for 2020 was paid on July 26, 2021.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PROSES PENERBITAN SAHAM

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND STOCK SUBSCRIPTION FROM GOVERNMENT IN ISSUANCE PROCESS

a. Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor terdiri dari tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan dan sebagai akibat keikutsertaan Perusahaan dalam pengampunan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Additional paid-in capital

Additional paid-in capital consists of the Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined and as a result of the Company's participation in tax amnesty program with the following details:

	2021	2020	
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya:			*Government's participation in which the status has not been determined:*
Bantuan proyek	1,241,253	1,241,253	*Project aid*
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA")	3,904,394	8,537,344	*List of Project Fund ("LPF")*
Penghapusan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	(70,437)	(70,437)	*Write-off government's participation in which the status has not been determined*
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	(5,075,210)	(4,632,950)	*Stock subscription from Government in issuance process*
Subjumlah	-	5,075,210	*Subtotal*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(106,753)	-	*Difference in restructuring transactions between entities under common control*
Aset pengampunan pajak	141,361	141,361	*Tax amnesty assets*
Jumlah	**34,608**	**5,216,571**	***Total***

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

DIPA merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Kementerian ESDM.

The LPF represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of ESDM.

Jumlah aset yang didonasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dicatat sebagai penambahan aset.

The total amount of assets donated by the Government of the Republic of Indonesia have been recognised as additions of assets.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berasal dari akuisisi EMI oleh Perusahaan dengan harga Rp118.704 sehingga menghasilkan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp106.753 (Catatan 5). Transaksi tersebut telah dicatat Perusahaan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Bisnis Entitas Sepengendali".

The difference in restructuring transactions between entities under common control came from the Company's acquisition of EMI at a price of Rp118,704 resulting in a difference in restructuring transactions between entities under common control amounted to Rp106,753 (Note 5). The transaction has been recorded by the Company using the pooling of interest method as required in SFAS No. 38 (Revised 2012), "Business of Entities Under Common Control".

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PROSES PENERBITAN SAHAM (lanjutan)

b. Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 tahun 2021, tanggal 10 Agustus 2021, penambahan penyertaan modal Negara secara tunai yang masih dalam proses penerbitan saham adalah sebesar Rp5.000.000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 dan 122 tahun 2021, tanggal 6 Oktober 2021 dan 29 Desember 2021, penambahan penyertaan modal Negara non-kas yang masih dalam proses penerbitan saham masing-masing adalah sebesar Rp802.014 dan Rp4.273.196. Sehingga total penambahan penyertaan modal non-kas selama tahun 2021 adalah sebesar Rp5.075.210.

***22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND STOCK SUBSCRIPTION FROM GOVERNMENT IN ISSUANCE PROCESS** (continued)*

b. Stock subscription from Government in issuance process

Based on the Government Regulation No. 83 year 2021, dated August 10, 2021, the additions of stock subscription from Government in cash which is still in the issuance process was amounted to Rp5,000,000.

Based on the Government Regulation No. 103 and 122 year 2021 dated October 6, 2021 and December 29, 2021, the additions of non-cash stock subscription from Government which is still in the issuance process amounted to Rp802,014 and Rp4,273,196, respectively. Therefore, the total of additions of non-cash stock subscription during 2021 was Rp5,075,210.

23. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan berupa jasa penyambungan dan diakui sepanjang waktu oleh Grup dengan rincian sebagai berikut:

23. DEFERRED REVENUE

This account represents connection fees received from customers and recognised over time by the Group. Details of the deferred revenue are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	7,262,197	1,049,231	*Beginning balance*
Penambahan	7,243,202	6,525,691	*Additions*
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(493,437)	(312,725)	*Recognised as revenue during the year*
Saldo akhir	14,011,962	7,262,197	*Ending balance*
Dikurangi: bagian jangka pendek	**740,906**	**1,617,725**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**13,271,056**	**5,644,472**	***Long-term portion***

Biaya penyambungan diamortisasi sejak tanggal penyambungan sesuai masa estimasi konsumsi pelanggan. Konsumsi pelanggan diestimasi berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi.

Connection fees are amortised starting from connection date based on the estimated consumption pattern of the customer. The customer consumption is estimated based on the average useful life of distribution assets.

24. PENERUSAN PINJAMAN / *TWO-STEP LOANS*

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are passed on to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	2021	2020*)	Periode/ *Period***)
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")			
USD			
IBRD - 7940 IND - 1238	2,304,997	2,400,407	2011 - 2034
IBRD 8280 ID - 1256	1,423,012	1,486,166	2014 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	478,690	495,874	2012 - 2035
IBRD - 7905 IND - 1235	236,619	246,414	2010 - 2034
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	139,484	277,255	2004 - 2023
Asian Development Bank ("ADB")			
USD			
ADB - 1982 INO - 1170	1,188,897	1,312,438	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	807,523	891,434	2004 - 2027
ADB 3015 INO - 1255	558,106	586,459	2014 - 2033
ADB - 2619 INO - 1236	478,480	489,067	2010 - 2035
ADB 3083 INO - 1257	212,699	222,782	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	23,548	24,664	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman ("KFW")			
EUR			
KFW F 26180 - 1262	183,092	222,987	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)			
JPY			
JICA IP 515 - 1177	4,275,455	5,086,424	2004 - 2034
JICA IP 512 - 1163	3,927,041	4,686,342	2004 - 2033
JICA IP 538 - 1221	2,684,212	3,047,990	2009 - 2047
JICA IP 532 - 1214	1,936,955	1,225,758	2006 - 2048
JICA IP 525 - 1197	1,533,847	1,761,517	2005 - 2045
JICA IP 513 - 1164	1,198,521	1,430,257	2004 - 2033
JICA IP 527 - 1211	964,674	1,127,044	2007 - 2037
JICA IP 539 - 1222	941,120	1,103,579	2009 - 2037
JICA IP 560 - 1253	453,827	499,915	2013 - 2053
JICA IP 517 - 1178	441,827	508,329	2004 - 2044
JICA IP 555 - 1231	124,412	162,916	2013 - 2039
JICA IP 561- 1252	89,438	98,280	2013 - 2053
JICA IP 526 - 1198	64,662	74,260	2005 - 2045
JICA IP 516 - 1196	51,028	58,709	2004 - 2044
JICA IP 572- 1265	38,397	32,575	2016 - 2055
JBIC IP - 1243	23,935	79,135	2012 - 2022
JBIC -1250	8,745	37,811	2013 - 2025
JICA IP 537 - 1220	6,379	7,480	2009 - 2037
Banque Paribas			
GBP			
Banque Paribas - 1063	19,433	38,633	1998 – 2022
Kerajaan Belgia/*Kingdom of Belgium*			
EUR			
Kerajaan Belgia/*Kingdom of Belgium* - 1185	21,860	25,449	2005 - 2033
Export Finance Australia			
AUD			
Efic Australia - 1071	7,461	23,307	1997 - 2022
China Exim Bank			
USD			
China Exim Bank - 1261	3,834,515	4,236,378	2015 - 2029
China Exim Bank - 1260	2,628,924	2,923,826	2015 - 2029
China Exim Bank - 1248	944,118	1,076,846	2013 - 2027

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61/*As reclassified, see Note 61*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/*Include grace periods in terms of payments*

24. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan) / *24. TWO-STEP LOANS (continued)*

	2021	2020*)	Periode/ *Period***)
Agence Francaise de Developpement ("AFD")			
USD			
AFD CID 1024 01B - 1254	334,567	381,603	2013 - 2028
AFD CID 1019 01F - 1237	66,142	84,061	2010 - 2035
AFD CID 1039 01H - 1259	87,938	100,300	2014 - 2026
Jumlah/*Total*	34,744,580	38,574,671	
Biaya transaksi belum diamortisasi/*Unamortised transaction costs*	(45,375)	(39,700)	
Jumlah, bersih/*Total, net*	**34,699,205**	**38,534,971**	
Dikurangi/*less*: bagian jatuh tempo dalam satu tahun/*current maturities*			
IBRD			
USD			
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	139,484	139,374	2004 - 2023
IBRD - 7940 IND - 1238	129,572	121,903	2011 - 2034
IBRD - 8280 ID - 1256	84,343	79,510	2014 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	24,311	22,853	2012 - 2035
IBRD - 7905 IND - 1235	13,301	12,515	2010 - 2034
ADB			
USD			
ADB - 1982 INO - 1170	153,302	137,205	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	104,126	93,193	2004 - 2027
ADB 3015 INO - 1255	36,952	34,767	2014 - 2033
ADB - 2619 INO - 1236	17,942	16,087	2010 - 2035
ADB 3083 INO - 1257	13,315	12,527	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	1,474	1,387	2014 - 2033
KFW			
EUR			
KFW F 26180 - 1262	24,412	26,234	2017 - 2027
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)			
JPY			
JICA IP 515 - 1177	342,036	376,772	2004 - 2034
JICA IP 512 - 1163	327,253	360,488	2004 - 2033
JICA IP 538 - 1221	105,263	116,408	2009 - 2047
JICA IP 513 - 1164	99,877	110,020	2004 - 2033
JICA IP 525 - 1197	65,270	71,899	2005 - 2045
JICA IP 539 - 1222	60,717	66,884	2009 - 2037
JICA IP 527 - 1211	58,465	64,403	2007 - 2037
JBIC IP - 1243	23,935	52,769	2012 - 2022
JICA IP 555 - 1231	23,485	25,870	2013 - 2039
JICA IP 517 - 1178	19,637	21,631	2004 - 2044
JBIC -1250	8,745	28,178	2013 - 2025
JICA IP 526 - 1198	2,752	3,031	2005 - 2045
JICA IP 516 - 1196	2,268	2,498	2004 - 2044
JICA IP 537 - 1220	412	453	2009 - 2037
JICA IP 532 - 1214	165	182	2006 - 2048
Banque Paribas			
GBP			
Banque Paribas - 1063	19,433	19,317	1998 - 2022
Kerajaan Belgia/*Kingdom of Belgium*			
EUR			
Kerajaan Belgia/*Kingdom of Belgium* - 1185	1,822	1,958	2005 – 2033
Export Finance Australia			
AUD			
Efic Australia - 1071	7,461	15,538	1997 – 2022

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61/*As reclassified, see Note 61*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/*Include grace periods in terms of payments*

24. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan) / *24. TWO-STEP LOANS (continued)*

	2021	2020*)	Periode/ *Period***)
China Exim Bank			
USD			
China Exim Bank - 1261	451,119	445,935	2015 - 2029
China Exim Bank - 1260	328,615	324,870	2015 - 2029
China Exim Bank - 1248	145,249	143,579	2013 - 2027
AFD			
USD			
AFD CID 1024 01B - 1254	51,472	50,880	2013 - 2028
AFD CID 1019 01F - 1237	18,898	18,677	2010 - 2035
AFD CID 1039 01H - 1259	13,529	13,373	2014 - 2026
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/*Current portion*	**2,920,412**	**3,033,168**	
Bagian jangka panjang/*Long-term portion*	**31,778,793**	**35,501,803**	

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61/*As reclassified, see Note 61*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/*Include grace periods in terms of payments*

	2021	2020	
Tingkat suku bunga per tahun			*Interest rate per annum*
USD	0.81% - 5.39%	0.98% - 5.35%	*USD*
JPY	0.01% - 3.36%	0.01% - 4.41%	*JPY*
EUR	0.35% - 2.35%	0.35% - 5.13%	*EUR*
AUD	3.85%	3.85%	*AUD*
GBP	3.84%	3.84%	*GBP*

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perjanjian penerusan pinjaman yang berlaku pada tanggal laporan.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment within the agreements of the two-step loans as at the reporting date.

Rincian saldo penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans balance in foreign currencies are as follows:

	2021		2020		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
USD	1,103,669,420	15,748,259	1,221,976,318	17,235,974	*USD*
JPY	151,461,016,318	18,764,475	154,085,810,829	21,028,321	*JPY*
EUR	12,708,786	204,952	14,335,516	248,436	*EUR*
Lain-lain**)	1,884,757	26,894	4,391,350	61,940	*Others **)*
Jumlah		**34,744,580**		**38,574,671**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date*

25. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN PEMERINTAH NON-BANK / *25. GOVERNMENT AND NON-BANK GOVERNMENT FINANCIAL INSTITUTION LOANS*

	2021	2020	
PT Sarana Multi Infrastruktur	3,677,754	4,399,146	*PT Sarana Multi Infrastruktur*
Pengembalian kompensasi (Catatan 16)	1,202,263	-	*Excess of compensation (Note 16)*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	8,423	-	*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
Pengembalian subsidi (Catatan 38)	-	1,666,967	*Excess of subsidy (Note 38)*
Jumlah	4,888,440	6,066,113	*Total*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**1,960,686**	**2,416,967**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**2,927,754**	**3,649,146**	***Long-term portion***
Tingkat suku bunga per tahun			*Interest rate per annum*
Rupiah	5.25% - 10.5%	4.00% - 5.25%	*Rupiah*

PT Sarana Multi Infrastruktur / *PT Sarana Multi Infrastruktur*

	2021	2020	
Pokok pinjaman	3,750,000	4,500,000	*Principal*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(6,825)	(9,550)	*Unamortised transaction cost*
Perbedaan nilai wajar	(65,421)	(91,304)	*Fair value difference*
Jumlah	**3,677,754**	**4,399,146**	***Total***

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained a soft loan facility from the Government Investment Center ("PIP") under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounted to Rp7,500,000 with an annual interest rate of 5.25% with a 15-year term.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the equipment installation of transmission and distribution and also other capital expenditures.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggungjawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, PIP and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI, including interest and responsibility in the Company's investment agreement.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

In relation to this loan facility, the Company has complied with the covenants in this agreement.

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 52 for information on the details of transactions and balances with related parties.

25. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN PEMERINTAH NON-BANK (lanjutan)

25. GOVERNMENT AND NON-BANK GOVERNMENT FINANCIAL INSTITUTION LOANS (continued)

PT Sarana Multi Infrastruktur (lanjutan)

***PT Sarana Multi Infrastruktur** (continued)*

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

Government and non-bank Government Financial Institution Loans by instalment schedules at the nominal amount, are as follows:

	2021	2020	
Dibayarkan:			*Payable:*
Dalam satu tahun	1,960,686	2,416,967	*Within one year*
Pada tahun kedua	750,000	750,000	*In the second year*
Pada tahun ketiga	750,000	750,000	*In the third year*
Pada tahun keempat	750,000	750,000	*In the fourth year*
Pada tahun kelima dan keenam	750,000	1,500,000	*In the fifth and sixth years*
Jumlah	**4,960,686**	**6,166,967**	***Total***

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga utang kepada Pemerintah sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan dalam perjanjian utang kepada Pemerintah yang berlaku pada tanggal laporan.

The Company made payments of principal and interest on Government loan in accordance with the schedule of payments and complied with the restrictions specified within the agreements of Government loan as at the reporting date.

Pengembalian kompensasi

Excess of compensation

Berdasarkan hasil audit BPK atas kompensasi listrik tahun 2020, terdapat kelebihan penerimaan kompensasi listrik oleh Perusahaan sebesar Rp1.202.263.

Based on audit result of BPK regarding electricity compensation for the year 2020, there was an excess of compensation received by the Company amounted to Rp1,202,263.

Pengembalian subsidi

Excess of subsidy

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan menerima subsidi listrik melebihi dari yang seharusnya diterima sebesar Rp1.666.967. Pada tahun 2021, jumlah tersebut disalinghapuskan dengan realisasi penerimaan subsidi listrik selama tahun berjalan (Catatan 38).

As at December 31, 2020, the Company received an electricity subsidy more than its entitlement amounted Rp1,666,967. In 2021, this amount has been offset with realisation of electricity subsidy during the current year (Note 38).

26. UTANG SEWA

26. LEASE LIABILITIES

Akun ini terdiri dari utang Perusahaan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan pembangunan kompresor gas di berbagai daerah.

This account represents the Company's liabilities to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement 4x660MW on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, and several lease contracts in relation to the construction of gas compressors at the various locations.

Pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai penerapan awal PSAK No. 73, Grup mengakui tambahan Rp6.042.320 aset hak guna, termasuk di dalamnya reklasifikasi dari biaya dibayar di muka sebesar Rp72.607 dan utang sewa sebesar Rp5.969.713. Saat mengukur utang sewa, Grup mendiskontokan pembayaran sewa menggunakan tingkat pinjaman inkremental tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental yang diterapkan berkisar 8,29% sampai dengan 10,22%.

On January 1, 2020, as a result of initial implementation of SFAS No. 73, the Group recognised an additional Rp6,042,320 in right-of-use assets, which comprised reclassification of prepaid expense amounted to Rp72,607 and lease liabilities amounted to Rp5,969,713. The Group discounted lease payments using its incremental borrowing rate at January 1, 2020. The weighted average of the incremental borrowing rate applied was ranging from 8.29% to 10.22%.

26. UTANG SEWA (lanjutan) / *26. LEASE LIABILITIES (continued)*

Nilai kini pembayaran minimum atas utang sewa tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities as at December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Berdasarkan jatuh tempo / ***By due date***

	2021	2020	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	5,849,483	6,069,594	*Not later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	9,246,554	13,896,250	*Later than one year and not later than five years*
Lebih dari lima tahun	5,268,722	5,511,455	*Later than five years*
Jumlah	20,364,759	25,477,299	*Total*
Dikurangi: bunga	5,322,816	6,990,996	*Less: interest*
Nilai kini pembayaran sewa masa datang	15,041,943	18,486,303	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**4,570,040**	**4,450,390**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**10,471,903**	**14,035,913**	***Long-term portion***

Total arus kas keluar untuk seluruh sewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.286.021 dan Rp8.929.802.

The total cash outflow for all leases as at December 31, 2021 and 2020 were Rp11,286,021 and Rp8,929,802, respectively.

	2021	2020	
Pihak berelasi			*Third parties*
Pelabuhan Indonesia (Persero)	1,116,388	1,349,139	*Pelabuhan Indonesia (Persero)*
Dana Pensiun PLN	525,431	662,881	*Dana Pensiun PLN*
Subjumlah	1,641,819	2,012,020	*Subtotal*
Pihak ketiga			*Third parties*
CJP	7,789,447	11,509,763	*CJP*
PT Gas Benoa Terminal	1,061,829	1,220,188	*PT Gas Benoa Terminal*
PT Perta Daya Gas	793,539	847,495	*PT Perta Daya Gas*
PT Batam Trans Gasindo	614,531	743,601	*PT Batam Trans Gasindo*
PT Indah Bima Prima	476,454	-	*PT Indah Bima Prima*
PT Lumoso	473,844	-	*PT Lumoso*
PT Sumber Petrindo Perkasa	421,214	504,386	*PT Sumber Petrindo Perkasa*
Lain-lain	1,769,266	1,648,850	*Others*
Subjumlah	13,400,124	16,474,283	*Subtotal*
Jumlah	15,041,943	18,486,303	*Total*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**4,570,040**	**4,450,390**	***Less: current maturity***
Bagian jangka panjang	**10,471,903**	**14,035,913**	***Long-term portion***
Tingkat suku bunga per tahun:			*Interest rate per annum:*
Rupiah	4.76% - 16.84%	7.95% - 22.43%	*Rupiah*
USD	13.19%	13.19%	*USD*
JPY	7.57% - 18.10%	7.57% - 18.10%	*JPY*

26. UTANG SEWA (lanjutan) / *LEASE LIABILITIES (continued)*

Berdasarkan pemberi sewa (lanjutan) / ***By lessor** (continued)*

Rincian utang sewa dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: / *Details of the lease liabilities in foreign currencies are as follows:*

	2021		2020		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
JPY	62,874,000,998	7,789,447	84,338,220,555	11,509,763	*JPY*
USD	43,067,554	614,531	52,718,936	743,601	*USD*
Jumlah		**8,403,978**		**12,253,364**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh / **) In full amount*

Beban bunga dan keuangan terkait utang sewa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.645.416 dan Rp4.547.512 (Catatan 46).

Interest expense and financial charges related to lease liabilities for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp4,645,416 and Rp4,547,512, respectively (Note 46).

27. UTANG BANK / *BANK LOANS*

	2021	2020	
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			***Government related entities***
Agen: BNI			*Agent: BNI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
- BNI	349,995	437,493	*BNI* -
- BRI	349,995	437,493	*BRI* -
- Bank Mandiri	349,995	437,493	*Bank Mandiri* -
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")	349,994	437,494	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")* -
Subjumlah	1,399,979	1,749,973	*Subtotal*
BRI	-	299,017	*BRI*
Agen: Bank DKI			*Agent: Bank DKI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
- Bank DKI	616,071	780,357	*Bank DKI* -
- Sarana Multi Infrastruktur ("SMI")	214,286	271,429	*Sarana Multi Infrastruktur ("SMI")* -
- Bank Jateng	107,143	135,714	*Bank Jateng* -
- BPD Aceh	53,571	67,857	*BPD Aceh* -
- Bank Kalteng	53,571	67,857	*Bank Kalteng* -
- Bank Riau	53,571	67,857	*Bank Riau* -
- Bank Kalbar	53,571	67,857	*Bank Kalbar* -
- BPD Bali	40,179	50,893	*BPD Bali* -
Subjumlah	1,191,963	1,509,821	*Subtotal*

27. UTANG BANK (lanjutan) / ***27. BANK LOANS** (continued)*

	2021	2020	
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Pihak ketiga			***Third parties***
The Export-Import Bank of China ("CEXIM")	5,404,541	7,178,431	*The Export-Import Bank of China ("CEXIM")*
Agen: Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC")			*Agent: Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	2,437,151	3,643,477	*Third parties*
Agen: Bank of China Limited ("BOC")			*Agent: Bank of China Limited ("BOC")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	308,312	2,301,218	*Third parties*
Subjumlah	8,150,004	13,123,126	*Subtotal*
Jumlah pinjaman terkait program percepatan	**10,741,946**	**16,681,937**	***Total loans related to fast track program***
Pinjaman tidak terkait program percepatan			***Loans not related to fast track program***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			***Government related entities***
Agen: BNI			*Agent: BNI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BNI	1,699,680	1,043,046	*BNI* -
- BRI	618,273	379,417	*BRI* -
- BPD Papua	1,390,772	853,478	*BPD Papua* -
Subjumlah	3,708,725	2,275,941	*Subtotal*
Agen: BRI			*Agent: BRI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BRI	9,849,899	11,040,513	*BRI* -
- BRI Agro	60,000	100,000	*BRI Agro* -
- BNI	1,980,312	2,188,947	*BNI* -
- Bank Mandiri	6,266,027	6,546,090	*Bank Mandiri* -
- LPEI	607,143	892,857	*LPEI* -
- SMI	1,250,000	1,464,286	*SMI* -
- BPD Papua	450,000	450,000	*BPD Papua* -
Pihak ketiga	4,466,027	4,774,662	*Third parties*
Subjumlah	24,929,408	27,457,355	*Subtotal*
Agen: Bank Mandiri			*Agent: Bank Mandiri*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- Bank Mandiri	3,005,648	4,516,675	*Bank Mandiri* -
- BRI	1,170,431	1,354,756	*BRI* -
- SMI	1,656,645	1,963,092	*SMI* -
- BPD Papua	68,422	74,642	*BPD Papua* -
- Bank BJB	22,807	-	*Bank BJB* -
- LPEI	357,143	428,572	*LPEI* -
Pihak ketiga	4,548,256	5,395,705	*Third parties*
Subjumlah	10,829,352	13,733,442	*Subtotal*

27. UTANG BANK (lanjutan) / ***27. BANK LOANS*** *(continued)*

	2021	2020	
Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)			***Loans not related to fast track program*** *(continued)*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)			***Government related entities*** *(continued)*
Agen: BSI			*Agent: BSI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BSI	1,090,316	292,892	*BSI* -
- BNI Syariah	-	101,276	*BNI Syariah* -
- BRI Syariah	-	101,276	*BRI Syariah* -
Pihak ketiga	178,302	81,021	*Third parties*
Subjumlah	1,268,618	576,465	*Subtotal*
Bank Tabungan Negara ("BTN")	1,500,000	1,500,000	*Bank Tabungan Negara ("BTN")*
LPEI	2,000,000	-	*LPEI*
Pihak ketiga			***Third parties***
Agen: BCA			*Agent: BCA*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BNI	-	642,857	*BNI* -
- BRI	-	2,571,429	*BRI* -
- Bank Mandiri	-	2,428,571	*Bank Mandiri* -
- SMI	-	1,000,000	*SMI* -
- LPEI	-	1,000,000	*LPEI* -
Pihak ketiga	-	7,357,143	*Third parties*
Subjumlah	-	15,000,000	*Subtotal*
Agen: Bank CIMB Niaga			*Agent: Bank CIMB Niaga*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- SMI	750,000	750,000	*SMI* -
- BSI	150,000	-	*BSI* -
- BNI Syariah	-	150,000	*BNI Syariah* -
Pihak ketiga	4,600,000	2,600,000	*Third parties*
Subjumlah	5,500,000	3,500,000	*Subtotal*
Agen: Bank Maybank Indonesia			*Agent: Bank Maybank Indonesia*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BNI Syariah	-	500,000	*BNI Syariah* -
- BSI	1,285,714	-	*BSI* -
- Bank Syariah Mandiri ("BSM")	-	1,000,000	*Bank Syariah Mandiri ("BSM")* -
- SMI	857,143	1,000,000	*SMI* -
Pihak ketiga	1,542,857	1,800,000	*Third parties*
Subjumlah	3,685,714	4,300,000	*Subtotal*
Bank HSBC Indonesia	1,546,722	1,045,880	*Bank HSBC Indonesia*
ADB	19,837,591	16,768,246	*ADB*
Asian Infrastructue Investment Bank ("AIIB")	884,678	-	*Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB")*

27. UTANG BANK (lanjutan) / ***27. BANK LOANS** (continued)*

	2021	2020	
Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)			***Loans not related to fast track program** (continued)*
Pihak ketiga (lanjutan)			***Third parties** (continued)*
Agen: Credit Agricole CIB Paris			*Agent: Credit Agricole CIB Paris*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	2,413,038	2,492,477	*Third parties*
Agen: Bank DBS Indonesia			*Agent: DBS Bank Indonesia*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	27,111,100	12,694,500	*Third parties*
Agen: Export Guarantee and Insurance Corporation			*Agent: Export Guarantee and Insurance Corporation*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	182,069	199,974	*Third parties*
Agen: Servizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE")			*Agent: Servizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	442,606	528,479	*Third parties*
Agen: Korea Exim Bank ("KEXIM")			*Agent: Korea Exim Bank ("KEXIM")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	759,824	834,546	*Third parties*
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")	6,971,552	7,052,215	*International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")*
Islamic Development Bank ("IDB")	2,744,415	2,286,252	*Islamic Development Bank ("IDB")*
Agen: Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")			*Agent: Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	9,571,639	11,168,676	*Third parties*
Agen: MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")			*Agent: MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	5,515,263	1,410,500	*Third parties*
Agen: Export Development Canada ("EDC")			*Agent: Export Development Canada ("EDC")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	4,013,156	4,495,969	*Third parties*
Agen: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")			*Agent: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	14,224,235	21,812,459	*Third parties*
Agence Francaise De Developpment ("AFD")	659,177	740,526	*Agence Francaise De Developpment ("AFD")*
Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")	869,701	658,931	*Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")*
Agen: BNP Paribas SA			*Agent: BNP Paribas SA*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	1,287,301	1,521,689	*Third parties*
Agen: Standard Chartered Bank ("SCB")			*Agent: Standard Chartered Bank ("SCB")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	1,254,602	1,572,917	*Third parties*

27. UTANG BANK (lanjutan) / *27. BANK LOANS (continued)*

	2021	2020	
Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)			***Loans not related to fast track program** (continued)*
Pihak ketiga (lanjutan)			***Third parties** (continued)*
Kreditanstalt fur Wiederaufbau ("KfW")	1,556,508	892,120	*Kreditanstalt fur Wiederaufbau ("KfW")*
Mizuho Bank	898,457	1,047,105	*Mizuho Bank*
Subjumlah	156,165,451	157,566,664	*Subtotal*
Jumlah	**166,907,397**	**174,248,601**	***Total***
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1,020,988)	(941,893)	*Unamortised transaction costs*
Jumlah, bersih	**165,886,409**	**173,306,708**	***Total, net***
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun			***Less: current maturities***
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			***Government related entities***
Agen: BNI			Agent: *BNI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BRI	87,499	87,499	*BNI* -
- BRI	87,499	87,499	*BRI* -
- Bank Mandiri	87,499	87,499	*Bank Mandiri* -
- LPEI	87,498	87,498	*LPEI* -
Subjumlah	349,995	349,995	*Subtotal*
BRI	-	299,017	*BRI*
Agen: Bank DKI			*Agent: Bank DKI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- Bank DKI	164,286	164,286	*Bank DKI* -
- SMI	57,142	57,142	*SMI* -
- Bank Jateng	28,571	28,571	*Bank Jateng* -
- BPD Aceh	14,286	14,286	*BPD Aceh* -
- Bank Kalteng	14,286	14,286	*Bank Kalteng* -
- Bank Riau	14,286	14,286	*Bank Riau* -
- Bank Kalbar	14,286	14,286	*Bank Kalbar* -
- BPD Bali	10,714	10,714	*BPD Bali* -
Subjumlah	317,857	317,857	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
CEXIM	1,857,354	1,836,007	*CEXIM*
Agen: ICBC			*Agent: ICBC*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	812,384	1,234,337	*Third parties*
Agen: BOC			*Agent: BOC*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	308,311	1,495,486	*Third parties*
Subjumlah	3,645,901	5,532,699	*Subtotal*

27. UTANG BANK (lanjutan) / ***27. BANK LOANS** (continued)*

	2021	2020	
Pinjaman tidak terkait program percepatan			***Loans not related to fast track program***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			***Government related entities***
Agen: BRI			*Agent: BRI*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BRI	1,975,726	1,353,539	*BRI* -
- BRI Agro	40,000	40,000	*BRI Agro* -
- BNI	435,963	357,143	*BNI* -
- Bank Mandiri	935,963	428,571	*Bank Mandiri* -
- LPEI	285,714	285,714	*LPEI* -
- SMI	294,643	214,286	*SMI* -
- BPD Papua	48,214	-	*BPD Papua* -
Pihak ketiga	862,749	457,143	*Third parties*
Subjumlah	4,878,972	3,136,396	*Subtotal*
Agen: Bank Mandiri			*Agent: Bank Mandiri*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- Bank Mandiri	526,487	1,511,027	*Bank Mandiri* -
- BRI	184,325	184,325	*BRI* -
- SMI	306,448	306,448	*SMI* -
- BPD Papua	6,220	6,220	*BPD Papua* -
- Bank BJB	2,073	-	*Bank BJB* -
- LPEI	71,429	71,429	*LPEI* -
Pihak ketiga	822,568	824,641	*Third parties*
Subjumlah	1,919,550	2,904,090	*Subtotal*
BTN	214,286	-	*BTN*
Lembaga Pembiayaan Ekspor	2,000,000	-	*Lembaga Pembiayaan Ekspor*
Pihak ketiga			***Third parties***
Agen: BCA			*Agent: BCA*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BNI	-	214,286	*BNI* -
- BRI	-	557,143	*BRI* -
- Bank Mandiri	-	409,524	*Bank Mandiri* -
- SMI	-	133,333	*SMI* -
- LPEI	-	133,333	*LPEI* -
Pihak ketiga	-	1,152,381	*Third parties*
Subjumlah	-	2,600,000	*Subtotal*

27. UTANG BANK (lanjutan) / ***27. BANK LOANS** (continued)*

	2021	2020	
Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)			***Loans not related to fast track program** (continued)*
Pihak ketiga (lanjutan)			***Third parties** (continued)*
Agen: Bank CIMB Niaga			*Agent: Bank CIMB Niaga*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BSI	16,071	-	*BSI* -
- SMI	80,357	-	*SMI* -
Pihak ketiga	278,571	-	*Third parties*
Subjumlah	374,999	-	*Subtotal*
Agen: Bank Maybank Indonesia			*Agent: Bank Maybank Indonesia*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
- BNI Syariah	-	71,429	*BNI Syariah* -
- BSI	214,286	-	*BSI* -
- BSM	-	142,857	*BSM* -
- SMI	142,857	142,857	*SMI* -
Pihak ketiga	257,143	257,143	*Third parties*
Subjumlah	614,286	614,286	*Subtotal*
Bank HSBC Indonesia	254,347	87,157	*Bank HSBC Indonesia*
Asian Development Bank ("ADB")	838,120	616,083	*Asian Development Bank ("ADB")*
Agen: Credit Agricole CIB Paris			*Agent: Credit Agricole CIB Paris*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	332,943	329,117	*Third parties*
Agen: Bank DBS Indonesia			*Agent: DBS Bank Indonesia*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	2,568,420	-	*Third parties*
Agen: Export Guarantee and Insurance Corporation			*Agent: Export Guarantee and Insurance Corporation*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	20,230	19,997	*Third parties*
Agen : SACE			*Agent : SACE*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	49,178	52,848	*Third parties*
Agen: KEXIM			*Agent: KEXIM*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	84,425	83,455	*Third parties*
IBRD	325,320	235,074	*IBRD*
Agen : JBIC			*Agent : JBIC*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	1,249,391	1,329,080	*Third parties*

27. UTANG BANK (lanjutan) / *27. BANK LOANS (continued)*

	2021	2020	
Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)			***Loans not related to fast track program** (continued)*
Pihak ketiga (lanjutan)			***Third parties** (continued)*
Agen: MUFG Bank			*Agent: MUFG Bank*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	570,760	-	*Third parties*
Agen: EDC	535,088	528,937	*Agent: EDC*
Agen: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")			*Agent: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	5,484,197	35,903	*Third parties*
AFD	77,240	36,084	*AFD*
BGK	108,609	27,455	*BGK*
Agen: BNP Paribas SA			*Agent: BNP Paribas SA*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	128,730	138,335	*Third parties*
Agen: SCB			*Agent: SCB*
Sindikasi:			*Syndicated:*
Pihak ketiga	209,100	224,702	*Third parties*
KfW	237,511	156,526	*KfW*
Mizuho Bank	119,794	128,733	*Mizuho Bank*
Subjumlah	23,195,496	13,284,258	*Subtotal*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**26,841,397**	**18,816,957**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**139,045,012**	**154,489,751**	***Long-term portion***

	2021	2020	
Tingkat suku bunga per tahun			*Interest rate per annum*
Rupiah	3.44% - 6.50%	5.67% - 9.15%	*Rupiah*
USD	0.66% - 4.41%	0.77% - 4.41%	*USD*
JPY	0.60% - 1.74%	1.58% - 1.74%	*JPY*
EUR	0.00% - 2.10%	0.00% - 2.20%	*EUR*

27. UTANG BANK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

***27. BANK LOANS** (continued)*

As at December 31, 2021 and 2020, the details of bank loans in foreign currency are as follows:

	2021		2020		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
USD	6,020,925,730	85,912,589	5,604,729,583	79,054,711	*USD*
EUR	889,320,094	14,341,887	891,596,493	15,451,456	*EUR*
JPY	85,876,011,874	10,639,162	57,450,951,627	7,840,418	*JPY*
Jumlah		**110,893,638**		**102,346,585**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

**) In full amount*

Pinjaman terkait program percepatan

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* ("EPC") untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 14 Juli 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan surat No. B.706-SOO/NSD/07/2020 mengenai Pemberitahuan pengalihan pinjaman Perusahaan dari PT Bank Bukopin Tbk kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk pendanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Timur, Pacitan dan PLTU 3 Banten, Teluk Naga. Pada tanggal 4 Agustus 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan surat yang menyatakan menerima pemberitahuan pengalihan piutang tersebut.

Loans related to fast track program

The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction ("EPC") contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Perpres No. 91 Year 2007, which superseded Perpres No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

On July 14, 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk submitted letter No. B.706-SOO/NSD/07/2020 regarding Notification of the Company's loan transfer from PT Bank Bukopin Tbk to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for funding for the Steam Power Plant (PLTU) 1 East Java, Pacitan and PLTU 3 Banten, Teluk Naga projects. On August 4, 2020, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued an acceptance letter regarding the transfer of the receivables.

27. UTANG BANK (lanjutan) / *27. BANK LOANS (continued)*

Pinjaman terkait program percepatan (lanjutan) / ***Loans related to fast track program** (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: / *As at December 31, 2021 and 2020, the details of such loan facilities are as follows:*

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ *Creditor and type of loan*	Mata uang/ *Currency*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2021	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2020	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2021	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2020	Periode pinjaman/ *Loan term*
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	Dolar AS/ *US Dollar*	592	-	27	27	55	27 Mei/*May* 2008 - 27 Mei/*May* 2021
2	The Export/ Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	Dolar AS/ *US Dollar*	331	48	72	24	24	30 Januari/*January* 2008 - 21 Juli/*July* 2023
3	The Export Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	Dolar AS/ *US Dollar*	284	47	71	24	24	30 Januari/*January* 2008 - 21 Juli/*July* 2023
4	China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/*Central Java*	Dolar AS/ *US Dollar*	262	-	-	-	39	3 Desember/*December* 2008 - 31 Maret/*March* 2021
5	BRI/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	Rupiah	1,606,612	-	168,276	168,276	178,512	29 Juli/*July* 2008 - 29 Juli/*July* 2021
6	BRI/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/*East Java*	Rupiah	1,045,924	-	130,741	130,741	130,741	29 Juli/*July* 2008 - 29 Juli/*July* 2021
7	The Export Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	Dolar AS/ *US Dollar*	482	163	210	47	47	4 Mei/*May* 2009 - 21 Januari/*January* 2025
8	The Export Import Bank of China/ PLTU NAD	Dolar AS/ *US Dollar*	124	32	43	11	11	4 Mei/*May* 2009 - 21 Juli/*July* 2024
9	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	Dolar AS/ *US Dollar*	455	22	65	43	43	4 Mei/*May* 2009 - 4 Mei/*May* 2022
10	The Export Import Bank of China/ PLTU Pacitan	Dolar AS/ *US Dollar*	293	88	113	25	25	17 Juli/*July* 2009 - 21 Januari/*January* 2025
11	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	Dolar AS/ *US Dollar*	625	171	228	57	57	14 Oktober/*October* 2009 - 2 November/*November* 2024
12	China Development Bank/ PLTU Sumbar	Dolar AS/ *US Dollar*	138	-	31	31	12	14 Oktober/*October* 2009 - 21 Juni/*June* 2023
13	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar - awar	Dolar AS/ *US Dollar*	372	-	71	71	36	14 Desember/*December* 2009 - 14 Desember/*December* 2022
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* BRI/ Transmisi/*Transmission*	Rupiah	1,067,684	-	-	-	149,547	27 Desember/*December* 2010 - 23 November 2020
15	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	Rupiah	2,225,000	1,191,964	1,509,821	317,857	317,857	12 November 2015 - 12 November 2025
16	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* BNI/ PLTU Kalimantan Timur/*East Kalimantan*	Rupiah	2,449,963	1,399,978	1,749,973	349,995	349,995	17 Desember/*December* 2015 - 16 Desember/*December* 2025

*) Dalam jutaan mata uang asal / *) *In million original currency*

	2021	2020	
Tingkat suku bunga per tahun			*Interest rate per annum*
Rupiah	4.95% - 5.25%	5.25% - 7.00%	*Rupiah*
USD	0.99% - 2.95%	1.04% - 5.76%	*USD*

27. UTANG BANK (lanjutan) / *27. BANK LOANS (continued)*

Pinjaman tidak terkait program percepatan / *Loans not related to fast track program*

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ *Creditor and type of loan*	Mata uang/ *Currency*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2021	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2020	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2021	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2020	Periode pinjaman/ *Loan term*
1	Bank Mandiri							
	- Pinjaman Perusahaan 2016/ *Corporate Loan 2016*	Rupiah	12,000,000	8,571,432	10,285,716	1,714,284	1,714,284	19 Desember/*December* 2016 - 23 November 2026
	- Pinjaman Perusahaan 2018/ *Corporate Loan 2018*	Rupiah	9,900,000	2,257,920	2,463,185	205,265	7,436,814	21 Agustus/*August* 2018 - 21 Agustus/*August* 2023
	- Fasilitas *Non Cash Loan/ Non Cash Loan Facility*	Rupiah	2,000,000	-	984,540	984,540	-	4 September 2020 - 21 Juni/*June* 2021
	- Pinjaman Perusahaan 2011/ *Corporate Loan 2011*	Rupiah	7,000,000	-	-	-	1,750,000	27 Desember/*December* 2017 - 23 Oktober/*October* 2021
	Subjumlah			10,829,352	13,733,441	2,904,089	10,901,098	*Subtotal*
2	BRI							
	- Pinjaman Perusahaan 2019/ *Corporate Loan 2019*	Rupiah	13,250,000	13,250,000	13,250,000	-	-	23 April 2019 - 23 April 2029
	- Pinjaman Perusahaan 2015/ *Corporate Loan 2015*	Rupiah	12,000,000	6,857,143	8,571,428	1,714,286	1,714,285	17 Desember/*December* 2015 - 17 Desember/*December* 2025
	- Pinjaman Perusahaan 2016/ *Corporate Loan 2016*	Rupiah	4,402,500	1,704,595	2,840,991	1,136,397	1,136,396	23 Mei/*May* 2016 - 23 Mei/*May* 2023
	- Pinjaman Sindikasi 2018/ *Syndicated Loan 2018*	Rupiah	4,506,787	2,260,526	1,652,077	-	-	14 November 2018 - 14 November 2028
	- Pinjaman Perusahaan 2014/ *Corporate Loan 2014*	Rupiah	2,000,000	857,143	1,142,857	285,714	285,714	17 Desember/*December* 2014 - 17 Desember/*December* 2024
	- Kredit Modal Kerja 2011/ *Working Capital Loan 2011*	Rupiah	28,000,000	-	-	-	5,800,000	21 Juni/*June* 2020 - 21 Juni/*June* 2021
	- Pinjaman Perusahaan 2016/ *Corporate Loan 2016*	Rupiah	8,500,000	-	-	-	3,642,857	21 Desember/*December* 2012 - 23 November 2022
	Subjumlah			24,929,407	27,457,353	3,136,397	12,579,252	*Subtotal*
3	BNI							
	- Pinjaman Perusahaan 2020/ *Corporate Loan 2020*	Rupiah	5,071,000	3,708,725	2,275,941	-	-	18 Desember/*December* 2019 - 18 Desember/*December* 2029
	- Pinjaman Perusahaan 2014/ *Corporate Loan 2014*	Rupiah	6,500,000	-	-	-	4,642,857	18 Desember/*December* 2014 - 18 Desember/*December* 2024
	- Pinjaman Perusahaan 2016/ *Corporate Loan 2016*	Rupiah	12,000,000	-	-	-	11,571,429	9 September 2016 - 23 Agustus/August 2026
	Subjumlah			3,708,725	2,275,941	-	16,214,286	*Subtotal*
4	BSI							
	- Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ *Bilateral Working Capital loan Facility 2019*	Rupiah	2,846,000	1,268,618	576,465	-	-	18 Desember/*December* 2019 - 18 Desember/*December* 2029
5	BTN							
	- Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ *Bilateral Working Capital loan Facility 2019*	Rupiah	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	24 April 2019 - 24 April 2029
6	BCA							
	- Pinjaman Perusahaan 2017/ *Corporate Loan 2017*	Rupiah	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	2 November 2017 - 2 November 2027
	- Pinjaman Perusahaan 2013/ *Corporate Loan 2013*	Rupiah	7,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,000,000	23 Desember/*December* 2013 - 23 Desember/*December* 2023
	- Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ *Bilateral Working Capital loan Facility 2019*	Rupiah	2,000,000	-	-	-	2,000,000	6 September 2019 - 6 Maret/*March* 2022
	Subjumlah			-	15,000,000	15,000,000	3,000,000	*Subtotal*
7	Bank Danamon Indonesia							
	- Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ *Bilateral Working Capital loan Facility 2019*	Rupiah	2,000,000	-	-	-	1,000,000	12 Desember/*December* 2020 - 12 Desember/*December* 2021
8	Bank Maybank Indonesia							
	- Pinjaman Perusahaan 2017/ *Corporate Loan 2017*	Rupiah	4,300,000	3,685,714	4,300,000	614,286	-	2 November 2017 - 2 November 2027
9	Bank CIMB Niaga							
	- Pinjaman Perusahaan 2019/ *Corporate Loan 2019*	Rupiah	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	23 April 2019 - 23 April 2029
	- Pinjaman Perusahaan 2018/ *Corporate Loan 2018*	Rupiah	4,000,000	-	-	-	4,000,000	21 Agustus/*August* 2018 - 21 Agustus/*August* 2023
	- Pinjaman Perusahaan 2021/ *Corporate Loan 2021*	Rupiah	1,000,000	1,000,000	-	-	-	4 Desember/*December* 2020 - 23 Desember/*December* 2026
	- Pinjaman Perusahaan 2021 (syariah)/ *Corporate Loan 2021 (sharia)*	Rupiah	1,000,000	1,000,000	-	-	-	4 Desember/*December* 2020 - 23 Desember/*December* 2026
	Subjumlah			5,500,000	3,500,000	-	4,000,000	*Subtotal*
10	Bank HSBC Indonesia							
	- Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2018/ *Bilateral Working Capital loan Facility 2018*	Rupiah	1,400,000	-	-	1,400,000	-	22 April 2021 - 22 April 2022
	- Pinjaman Perusahaan 2018/ *Corporate Loan 2018*	Dolar AS/ *US Dollar*	214	108	74	18	-	19 Februari/*February* 2019 - 19 Agustus/*August* 2032
	Subjumlah			108	74	1,400,018	-	*Subtotal*
11	Bank DBS Indonesia							
	- Fasilitas Kredit Berjangka 2019/ *Term Loan Facilities 2019*	Dolar AS/ *US Dollar*	1,000	900	900	-	70	25Juni/*June* 2019 - 25 Juni/*June* 2024
	- Fasilitas Kredit Berjangka MIGA 2020/ *MIGA Term Loan Facilities 2020*	Dolar AS/ *US Dollar*	500	500	-	-	-	23 Desember/*December* 2020 - 23 Desember/*December* 2025
	- Fasilitas Kredit Berjangka 2021/ *Term Loan Facilities 2021*	Dolar AS/ *US Dollar*	500	500	-	-	-	22 Desember/*December* 2021 - 22 Desember/*December* 2026
	- Pinjaman Revolving 2018/ *Revolving Loan 2018*	Dolar AS/ *US Dollar*	150	-	-	-	150	28 Desember/*December* 2018 - 28 November 2022
	Subjumlah			1,900	900	-	220	*Subtotal*
12	MUFG Bank							
	- Fasilitas Kredit Berjangka 2020/ *Term Loan Facilities 2020*	JPY	33,000	33,000	-	-	-	5 Maret/*March* 2020 - 5 Maret/*March* 2025
	- Pinjaman Perusahaan 2018/ *Corporate Loan 2018*	Dolar AS/ *US Dollar*	100	100	100	-	-	13 Desember/*December* 2018 - 13 Desember/*December* 2023
	Subjumlah			33,100	100	-	-	*Subtotal*

27. UTANG BANK (lanjutan) / *27. BANK LOANS (continued)*

Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan) / *Loans not related to fast track program (continued)*

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ *Creditor and type of loan*	Mata uang/ *Currency*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2021	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2020	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2021	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2020	Periode pinjaman/ *Loan term*
13	SCB							
	- Fasilitas Arun 2013/ *Arun Facility 2013*	EUR	90	42	49	7	7	11 Desember/*December* 2013 - 30 September 2027
	- Fasilitas Bangkanai 2013/ *Bangkanai Facility 2013*	EUR	71	35	41	6	6	23 Desember/*December* 2013 - 30 September 2027
	Subjumlah			77	90	13	13	*Subtotal*
14	AFD							
	- Pinjaman Perusahaan 2015/ *Corporate Loan 2015*	EUR	100	41	43	2	-	7 Mei/*May* 2015 - 7 Mei/*May* 2030
	- Pinjaman Perusahaan 2015/ *Corporate Loan 2015*	EUR	1	-	-	-	0.6	7 Mei/*May* 2015 - 7 Mei/*May* 2020
	Subjumlah			41	43	2	0.6	*Subtotal*
15	KfW							
	- Fasilitas Kredit untuk Bangkanai Peaker/ *Credit Facility for Bangkanai Peaker*	EUR	83	52	50	8	8	15 September 2017 - 15 Desember/*December* 2028
	- Fasilitas Kredit untuk Geothermal Energy Programme Ulumbu & Mataloko 2018/ *Credit Facility for Geothermal Energy Programme Ulumbu & Mataloko 2018*	EUR	150	1.2	-	-	-	11 Oktober/*October* 2018 - 15 November/*November* 2033
	- Fasilitas Kredit untuk Kumbih 03 2017/ *Credit Facility for Kumbih 03 2017*	EUR	85	0.6	0.3	-	-	15 Desember/*December* 2017 - 30 Desember/*December* 2032
	- Fasilitas Kredit untuk Hydropower Programme 2019/ *Credit Facility for Hydropower Programme 2019*	EUR	295	0.5	-	-	-	5 September/September 2019 - 15 November 2033
	- Fasilitas Kredit untuk Kamojang PP 2015/ *Credit Facility for Kamojang PP 2015*	EUR	60	-	0.1	0.4	1	8 Mei/*May* 2015 - 30 Juni/*June* 2030
	- Fasilitas Kredit untuk 1000 Pulau *Renewable* Energi untuk *Electrification* Program (Nusa Tenggara Timur)/ *Credit Facility for 1000 Islands Renewable Energy for Electrification Program (Nusa Tenggara Timur)*	EUR	65	-	0.8	1	0.3	8 Mei/*May* 2015 - 30 Juni/*June* 2030
	- Fasilitas Kredit untuk RBL SNT/ *Credit Facility for RBL SNT Bangkanai Facility 2013*	EUR	45	42	-	3	-	23 Mei/*May 2016* - 30 Juni/*June* 2028 30 September 2027
	Subjumlah			96.3	51.2	12.4	9.3	*Subtotal*
16	ADB							
	- Fasilitas Kredit akses Energi berkelanjutan Di Kawasan Indonesia Timur 2017/ *Credit Facility for* Sustainable Energy *Access in Eastern Indonesia 2017*	Dolar AS/ *US Dollar*	600	548	533	-	-	10 Oktober/*October* 2015 - 15 Mei 2037/ *May 15, 2037*
	- Fasilitas Kredit Penguatan Gardu Sumatera 2015/ *Credit Facility Grid Strengthening Sumatera* 2015	EUR Dolar AS/	490 36	457 27	490 29	33 2	- -	4 Desember/*December* 2015 - 15 September 2035
	- Fasilitas Kredit Penguatan Gardu 2015/ *Credit Facility Grid Strengthening* 2015	Dolar AS/ *US Dollar*	25	23	25	2	-	4 Desember/*December* 2015 - 15 September 2035
	- Fasilitas Kredit akses Energi berkelanjutan Di Kawasan Indonesia Timur 2020 (Tahap II)/ *Credit Facility for Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia 2020 (Phase II)*	Dolar AS/ *US Dollar*	600	276	-	-	-	8 Desember/*December 2020* - 15 Oktober/*October* 2040
	Subjumlah			1,331	1,077	37	-	*Subtotal*
17	EDC dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company ("HEXIM")							
	- Fasilitas Kredit untuk Batam Mobile Power Plant 2016/ *Credit Facility for Batam Mobile Powe Plant 2016*	Dolar AS/ *US Dollar*	436	272	309	36	36	2 Desember/*December* 2016 - 27 Januari/*January* 2029
	- Fasilitas Kredit untuk Batam Mobile Power Plant 2017/ *Credit Facility for Batam Mobile Power Plant 2017*	Dolar AS/ *US Dollar*	14	9	10	1	1	1 Mei/*May* 2017- 27 Januari/*January* 2029
	Subjumlah			281	319	37	37	*Subtotal*
18	JBIC							
	- Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Jawa 2 Priok 2016/ *Credit Facility for Construction of Jawa 2 Priok Steam Electricity Power Plant 2016/*	JPY Dolar AS/ *US Dollar*	31,763 45	24,210 36	26,857 40	2,647 4	2,647 4	20 Oktober/*October* 2016 - 30 April 2031
	- Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Lontar 2016/ *Credit Facility for Construction of Lontar Steam Electricity Power Plant 2016/*	JPY Dolar AS/ *US Dollar*	16,430 179	12,071 116	13,399 130	1,369 15	1,369 15	14 Maret/*March* 2016 - 1 Oktober/*October* 2031
	- Fasilitas Kredit untuk Pembangunan Fasilitas Muara Karang 2017/ *Credit Facility for Construction of Muara Karang Facility 2017/*	JPY Dolar AS/ *US Dollar*	15,450 37	11,327 29	10,515 29	1,287 3	1,287 3	10 Maret/*March* 2017 - 29 Mei/*May* 2031
	- Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Kalseteng 2 2017/ *Credit Facility for Construction of Kalseteng 2 Steam Electricity Power Plant 2017/*	JPY Dolar AS/ *US Dollar*	16,939 89	5,269 30	6,680 38	1,412 7	- -	20 Juni/*June* 2017 - 15 September 2032
	Subjumlah			53,088	57,688	6,744	5,325	*Subtotal*
19	IBRD							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai Power Distribution Development Program 2016/ *Credit Facility to Finance Power Distribution Development Program 2016*	Dolar AS/ *US Dollar*	500	489	500	11	-	20 Mei/*May* 2016 - 15 Maret/*March* 2036
20	KEXIM							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ *Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016*	Dolar AS/ *US Dollar*	71	53	59	6	6	24 Juni/*June* 2016 - 23 Desember/*December* 2030
21	IDB							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai Power Grid Enhancement Program 2017/ *Credit Facility to Finance Power Grid Enhancement Program 2017*	Dolar AS/ *US Dollar*	330	192	162	-	-	10 Januari/*January* 2017 - 6 Agustus/*August* 2023

27. UTANG BANK (lanjutan) / *27. BANK LOANS (continued)*

Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan) / ***Loans not related to fast track program** (continued)*

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ *Creditor and type of loan*	Mata uang/ *Currency*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2021	Jumlah pinjaman/ *Outstanding balance*)* 2020	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2021	Pembayaran kembali/ *Repayment*)* 2020	Periode pinjaman/ *Loan term*
22	SMBC							
	- Fasilitas Kredit Berjangka 2018/ *Term Loan Facilities 2018*	Dolar AS/ *US Dollar*	1,320	948	1,320	372	-	1 Agustus/*August* 2018 - 1 Agustus/*August* 2023
	- Fasilitas Kredit Bilateral 2018/ *Bilateral Loan Facilities 2018*	Dolar AS/ *US Dollar*	175	-	175	175	-	18 Desember/*December* 2018 - 18 Desember/*December* 2023
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai Power Grid Enhancement Program 2017/ *Credit Facility to Finance Power Grid Enhancement Program 2017*	Dolar AS/ *US Dollar*	73	49	51	3	-	30 Maret/*March* 2017 - 30 Maret/*March* 2031
	- Fasilitas Kredit Bergulir 2018/ *Revolving Loan Facilities 2018*	*Dolar AS/ US Dollar*	300	-	-	-	300	1 Agustus/*August* 2018 - 1 Agustus/*August* 2021
	Subjumlah			997	1,546	550	300	*Subtotal*
23	Mizuho							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai *Lombok Peaker* 2017/ *Credit Facility to Finance Lombok Peaker 2017*	EUR	74	56	60	7	7	24 Mei/*May* 2017 - 24 Januari/*January* 2029
24	Credit Agricole CIB PARIS							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai *PLTGU Muara Tawar* 2017/ *Credit Facility to Finance PLTGU Muara Tawar 2017*	Dolar AS/ *US Dollar*	280	169	177	23	12	8 November 2017 - 8 Mei/*May* 2032
25	BNP Paribas SA							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai *Sumbagut 2 Peaker* 2018/ *Credit Facility to Finance Sumbagut 2 Peaker 2018*	EUR	108	80	88	8	7	9 Februari/*February* 2018 - 9 Oktober/*October* 2031
26	BGK							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTU Lombok FTP-2 2018/ *Credit Facility to Finance PLTU Lombok FTP-2 2018*	EUR	81	54	38	3	-	21 Februari/*February* 2018 - 28 Februari/*February* 2033
27	SACE							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ *Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016*	EUR	40	27	31	3	3	24 Juni/*June* 2016 - 23 Desember/*December* 2030
28	Exportni Garancni a Pojistovaci Spolecnost ("EGAP")							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ *Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016*	Dolar AS/ *US Dollar*	17	13	14	1	1	24 Juni/*June* 2016 - 23 Desember/*December* 2030
29	AIIB							
	- Fasilitas Kredit untuk Membiayai Proyek Penguatan Distribusi Tenaga Listrik Jawa Timur&Bali 2021/ *Credit Facility to FinanceEast Java & Bali Power Distribution Strenghthening Project 2021*	Dolar AS/ *US Dollar*	310	62	-	-	-	10 Februari/*February* 2021 - 15 Oktober/*October* 2040
30	LPEI							
	- Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ *Bilateral Working Capital loan Facility 2019*	Rupiah	2,000,000	2,000,000	-	-	-	10 Februari/*February* 2021 - 15 Oktober/*October* 2040

*) Dalam jutaan mata uang asal / **) In million original currency*

	2021	2020	
Tingkat suku bunga per tahun			*Interest rate per annum*
Rupiah	3.44% - 6.50%	5.26% - 7.00%	*Rupiah*
USD	0.66% - 4.41%	1.04% - 5.77%	*USD*
EUR	0.00% - 2.10%	0.41% - 2.10%	*EUR*
JPY	0.60% - 1.74%	1.58% - 2.00%	*JPY*

Sebagian utang bank yang tidak terkait dengan program percepatan ini tidak diikat dengan jaminan aset apapun, namun dijamin oleh Pemerintah.

Parts of the loans that are not related to fast-track program are not bound by any collateral assets but are guaranteed by the Government.

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman bank sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perjanjian pinjaman bank yang berlaku pada tanggal laporan.

The Company has made payments of principal and interest on the bank loans in accordance with the schedule of payment specified within the agreements of the bank loans as at the reporting date.

Selama tahun 2021, Grup melakukan penarikan seluruh pinjaman bank sebesar USD1.572.775.584 (setara dengan Rp20.799.901), EUR80.170.215 (setara dengan Rp1.336.102), JPY35.140.128.242 (setara dengan Rp4.559.011) dan Rp8.133.386 dan (2020: USD833.467.849 (setara dengan Rp12.207.042), EUR138.603.055 (setara dengan Rp2.250.356), JPY 10.856.528.247 (setara dengan Rp 1.516.967), dan Rp12,970,945). Pelunasan lebih awal secara sukarela atas pokok pinjaman untuk periode 12 bulan adalah sebesar USD614.169.282 (setara dengan Rp8.789.966) dan IDR12.400.000 (2020: USD78.852.689 (setara dengan Rp1.149.041) dan Rp29.245.536)

During 2021, the Group made withdrawals from all bank loans amounted to USD1,572,775,584 (equivalent to Rp20,799,901), EUR80,170,215 (equivalent to Rp1,336,102), JPY35,140,128,242 (equivalent to Rp4,559,011) and Rp8,133,386 and (2020: USD833,467,849 (equivalent to Rp12,207,042), EUR138,603,055 (equivalent to Rp2,250,356), JPY10,856,528,247 (equivalent to Rp 1,516,967), and Rp.12,970,945). The voluntary early repayments of the loan principal for 12 months period were amounting to USD614,169,282 (equivalent to Rp8,789,966) and Rp12,400,000 (2020: USD78,852,689 (equivalent to Rp1,149,041) and Rp,29,245,536).

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA / *28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS*

Obligasi dan sukuk ijarah / *Bonds and sukuk ijara*

	2021	2020	
Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah			*Rupiah Bonds and Sukuk Ijara*
Obligasi Berkelanjutan IV			*Shelf Registration Bonds IV*
PLN Tahap I Tahun 2020	1,500,000	1,500,000	*PLN I Year 2020*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV			*Shelf Registration Sukuk Ijara IV*
PLN Tahap I Tahun 2020	376,500	376,500	*PLN I Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap VII Tahun 2020	1,737,135	1,737,135	*PLN VII Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap VI Tahun 2020	4,812,430	4,812,430	*PLN VI Year 2020*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap VI Tahun 2020	115,500	115,500	*PLN VI Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap V Tahun 2019	1,912,900	1,912,900	*PLN V Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap V Tahun 2019	797,500	797,500	*PLN V Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap IV Tahun 2019	2,953,620	2,953,620	*PLN IV Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap IV Tahun 2019	1,250,000	1,250,000	*PLN IV Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap III Tahun 2019	2,393,000	2,393,000	*PLN III Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap III Tahun 2019	863,000	863,000	*PLN IIIYear 2019*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap II Tahun 2018	832,000	832,000	*PLN II Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap II Tahun 2018	224,000	224,000	*PLN II Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap I Tahun 2018	1,278,500	1,278,500	*PLN I Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap I Tahun 2018	750,000	750,000	*PLN I Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II			*Shelf Registration Bonds II*
PLN Tahap III Tahun 2018	2,535,000	2,535,000	*PLN III Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			*Shelf Registration Sukuk Ijara II*
PLN Tahap III Tahun 2018	698,500	698,500	*PLN III Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II			*Shelf Registration Bonds II*
PLN Tahap II Tahun 2017	2,545,500	2,545,500	*PLN II Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			*Shelf Registration Sukuk Ijara II*
PLN Tahap II Tahun 2017	694,500	694,500	*PLN II Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan II			*Shelf Registration Bonds II*
PLN Tahap I Tahun 2017	1,600,000	1,600,000	*PLN I Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			*Shelf Registration Sukuk Ijara II*
PLN Tahap I Tahun 2017	400,000	400,000	*PLN I Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan I			*Shelf Registration Bonds I*
PLN Tahap II Tahun 2013	651,000	651,000	*PLN II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I			*Shelf Registration Sukuk Ijara I*
PLN Tahap II Tahun 2013	108,000	108,000	*PLN II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan I			*Shelf Registration Bonds I*
PLN Tahap I Tahun 2013	697,000	697,000	*PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1,855,000	1,855,000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340,000	340,000	*Sukuk Ijara PLN V Year 2010*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	1,200,000	1,200,000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	-	865,000	*PLN VIII Bonds Year 2006*

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan) / *BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)*

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan) / ***Bonds and sukuk ijara** (continued)*

	2021	2020	
Surat Utang Jangka Menengah Global – USD			*Global Medium Term Notes – USD*
Penerbitan tahun 2020	21,403,500	21,157,500	*Issued in 2020*
Penerbitan tahun 2019	34,245,600	33,852,000	*Issued in 2019*
Penerbitan tahun 2018	42,807,000	42,315,000	*Issued in 2018*
Penerbitan tahun 2017	28,538,000	28,210,000	*Issued in 2017*
Penerbitan tahun 2012	14,269,000	14,105,000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	-	14,105,000	*Issued in 2011*
Surat Utang Jangka Menengah Global – EUR			*Global Medium Term Notes – EUR*
Penerbitan tahun 2019	8,063,400	8,665,050	*Issued in 2019*
Penerbitan tahun 2018	8,063,400	8,665,050	*Issued in 2018*
Obligasi – JPY			*Bonds – JPY*
Penerbitan tahun 2019	2,874,243	3,166,139	*Issued in 2019*
Obligasi Terjamin – USD			*Guaranteed Notes – USD*
Penerbitan tahun 2007	4,113,924	4,066,641	*Issued in 2007*
Subjumlah	199,498,652	214,292,965	*Subtotal*
Biaya emisi belum diamortisasi	(6,343,617)	(6,472,657)	*Unamortised debt issuance costs*
Jumlah	**193,155,035**	**207,820,308**	***Total***
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			*Presented in consolidated statements of financial position:*
Liabilitas jangka pendek	5,420,392	14,970,000	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	187,734,643	192,850,308	*Non-current liabilities*
Jumlah	**193,155,035**	**207,820,308**	***Total***

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with the following details:

	Pokok/ *Principal*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ Ijara fee per annum*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Wali amanat/ *Trustee*	
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020						*Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020*
Seri A	312,000	8 September 2020-8 September 2025	6.70%			*Series A*
Seri B	28,000	8 September 2020-8 September 2027	7.25%			*Series B*
Seri C	158,000	8 September 2020-8 September 2030	7.90%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	841,000	8 September 2020-8 September 2035	8.65%			*Series D*
Seri E	161,000	8 September 2020-8 September 2040	8.86%			*Series E*
Subtotal	1,500,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020						*Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Year 2020*
Seri A	39,000	8 September 2020-8 September 2025	6.70%			*Series A*
Seri B	35,000	8 September 2020-8 September 2027	7.25%			*Series B*
Seri C	200,000	8 September 2020-8 September 2030	7.90%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	56,000	8 September 2020-8 September 2035	8.65%			*Series D*
Seri E	46,500	8 September 2020-8 September 2040	8.86%			*Series E*
Subtotal	376,500					

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

***Bonds and sukuk ijara** (continued)*

	Pokok/ *Principal*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ Ijara fee per annum*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Wali amanat/ *Trustee*	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020						*Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020*
Seri A	316,700	6 Mei/*May* 2020-6 Mei/*May* 2023	7.92%			*Series A*
Seri B	99,155	6 Mei/*May* 2020-6 Mei/*May* 2025	8.25%	Kuartalan/	Bank Tabungan	*Series B*
Seri C	312,180	6 Mei/*May* 2020-6 Mei/*May* 2027	8.55%	*Quarterly*	Negara	*Series C*
Seri D	1,009,100	6 Mei/*May* 2020-6 Mei/*May* 2030	9.10%			*Series D*
Subtotal	1,737,135					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020						*Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020*
Seri A	540,630	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2025	7.20%			*Series A*
Seri B	672,500	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2027	7.70%			*Series B*
Seri C	544,250	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2030	8.00%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	1,459,000	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2035	8.70%			*Series D*
Seri E	1,596,050	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2040	9.05%			*Series E*
Subtotal	4,812,430					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020						*Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Year 2020*
Seri A	40,500	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2027	7.70%			*Series A*
Seri B	3,500	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2030	8.00%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Seri C	9,000	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2035	8.70%			*Series C*
Seri D	62,500	18 Februari/*February* 2020-18 Februari/*February* 2040	9.05%			*Series D*
Subtotal	115,500					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019						*Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019*
Seri A	795,700	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2024	7.90%			*Series A*
Seri B	445,000	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2026	8.40%			*Series B*
Seri C	6,200	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2029	8.60%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	166,000	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2034	9.40%			*Series D*
Seri E	500,000	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2039	9.90%			*Series E*
Subtotal	1,912,900					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019						*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019*
Seri A	6,500	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2024	7.90%			*Series A*
Seri B	10,000	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2026	8.40%			*Series B*
Seri C	92,000	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2029	8.60%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	135,000	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2034	9.40%			*Series D*
Seri E	554,000	1 Oktober/*October* 2019-1 Oktober/*October* 2039	9.90%			*Series E*
Subtotal	797,500					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019						*Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019*
Seri A	637,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2024	8.00%			*Series A*
Seri B	315,250	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2026	8.50%			*Series B*
Seri C	549,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2029	8.70%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	395,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2034	9.50%			*Series D*
Seri E	1,057,370	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2039	9.98%			*Series E*
Subtotal	2,953,620					

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijara (continued)

	Pokok/ *Principal*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ Ijara fee per annum*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Wali amanat/ *Trustee*	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019						*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019*
Seri A	274,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2024	8.00%			*Series A*
Seri B	368,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2026	8.50%			*Series B*
Seri C	20,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2029	8.70%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	49,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2034	9.50%			*Series D*
Seri E	539,000	1 Agustus/*August* 2019-1 Agustus/*August* 2039	9.98%			*Series E*
Subtotal	1,250,000					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019						*Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019*
Seri A	369,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2022	8.50%			*Series A*
Seri B	1,212,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2024	9.10%			*Series B*
Seri C	183,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2026	9.35%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	211,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2029	9.60%			*Series D*
Seri E	263,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2034	9.80%			*Series E*
Seri F	155,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2039	9.95%			*Series F*
Subtotal	2,393,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019						*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019*
Seri A	263,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2022	8.50%			*Series A*
Seri B	263,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2024	9.10%			*Series B*
Seri C	204,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2026	9.35%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	45,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2029	9.60%			*Series D*
Seri E	60,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2034	9.80%			*Series E*
Seri F	28,000	19 Februari/*February* 2019-19 Februari/*February* 2039	9.95%			*Series F*
Subtotal	863,000					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018						*Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018*
Seri A	210,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2023	8.65%			*Series A*
Seri B	483,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2025	9.00%			*Series B*
Seri C	78,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2028	9.10%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	15,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2033	9.30%			*Series D*
Seri E	46,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2038	9.65%			*Series E*
Subtotal	832,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018						*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018*
Seri A	114,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2023	8.65%			*Series A*
Seri B	45,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2025	9.00%			*Series B*
Seri C	15,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2028	9.10%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	50,000	10 Oktober/*October* 2018-10 Oktober/*October* 2038	9.65%			*Series D*
Subtotal	224,000					

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijara (continued)

	Pokok/ *Principal*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ Ijara fee per annum*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Wali amanat/ *Trustee*	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018						*Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018*
Seri A	78,500	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2023	7.80%			*Series A*
Seri B	442,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2025	8.35%			*Series B*
Seri C	138,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2028	8.40%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	281,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2033	8.90%			*Series D*
Seri E	339,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2038	9.00%			*Series E*
Subtotal	1,278,500					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018						*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018*
Seri A	127,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2023	7.80%			*Series A*
Seri B	150,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2025	8.35%			*Series B*
Seri C	258,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2028	8.40%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	105,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2033	8.90%			*Series D*
Seri E	110,000	10 Juli/*July* 2018-10 Juli/*July* 2038	9.00%			*Series E*
Subtotal	750,000					
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018						*Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018*
Seri A	457,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2023	6,50%			*Series A*
Seri B	10,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2025	6,80%			*Series B*
Seri C	341,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2028	7,25%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series C*
Seri D	362,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2033	8,20%			*Series D*
Seri E	1,365,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2038	8,75%			*Series E*
Subtotal	2,535,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018						*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018*
Seri A	104,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2023	6.50%			*Series A*
Seri B	88,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2028	7.25%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Seri C	57,500	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2033	8.20%			*Series C*
Seri D	449,000	22 Februari/*February* 2018-22 Februari/*February* 2038	8.75%			*Series D*
Subtotal	698,500					
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017						*Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017*
Seri A	451,500	3 November 2017-3 November 2022	7.20%			*Series A*
Seri B	201,000	3 November 2017-3 November 2024	7.50%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Seri C	800,000	3 November 2017-3 November 2027	8.20%			*Series C*
Seri D	1,093,000	3 November 2017-3 November 2032	8.70%			*Series D*
Subtotal	2,545,500					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017						*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017*
Seri A	83,500	3 November 2017-3 November 2022	7.20%			*Series A*
Seri B	121,000	3 November 2017-3 November 2027	8.20%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Seri C	490,000	3 November 2017-3 November 2032	8.70%			*Series C*
Subtotal	694,500					

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

***Bonds and sukuk ijara** (continued)*

	Pokok/ *Principal*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ Ijara fee per annum*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Wali amanat/ *Trustee*	
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017						*Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017*
Seri A	214,000	11 Juli/*July* 2017-11 Juli/*July* 2022	7.70%			*Series A*
Seri B	169,000	11 Juli/*July* 2017-11 Juli/*July* 2024	8.10%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Seri C	1,217,000	11 Juli/*July* 2017-11 Juli/*July* 2027	8.50%			*Series C*
Subtotal	1,600,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017						*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017*
Seri A	186,000	11 Juli/*July* 2017-11 Juli/*July* 2022	7.70%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series A*
Seri B	214,000	11 Juli/*July* 2017-11 Juli/*July 11, 2027*	8.50%			*Series B*
Subtotal	400,000					
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013						*Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013*
Seri B	651,000	10 Desember/ *December 2013* - 10 Desember/ *December 2023*	9.60%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Permata	*Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013						*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013*
Seri B	108,000	10 Desember/ *December 2013* - 10 Desember/ *December 2023*	9.60%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Permata	*Series B*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013						*Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013*
Seri B	697,000	5 Juli/*July* 2013-5 Juli/*July* 2023	8.25%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Permata	*Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Obligasi PLN XII Tahun 2010						*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN XII Bonds Year 2010*
Seri B	1,855,000	8 Juli/*July* 2010-8 Juli/*July* 2022	10.40%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010						*Sukuk Ijara PLN V Year 2010*
Seri B	340,000	8 Juli/*July* 2010-8 Juli/*July* 2022	10.40%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Obligasi PLN IX Tahun 2007						*PLN IX Bonds Year 2007*
Seri B	1,200,000	10 Juli/*July* 2017-10 Juli/*July* 2022	10.90%	Kuartalan/ *Quarterly*	Bank Tabungan Negara	*Series B*
Jumlah	**35,120,585**					***Total***

Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah.

The Company has complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bonds and sukuk ijara.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah digunakan untuk mendanai proyek transmisi, proyek distribusi, dan modal kerja.

The proceeds from the issuance of bonds payable and sukuk ijarah are used to finance the transmission project, distribution project, and working capital.

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

***28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS** (continued)*

***Bonds and sukuk ijara** (continued)*

Rating details on all outstanding bonds and Sukuk Ijara bonds issued by the Company are as follows:

	2021	
	Peringkat/ *Rating*	**Lembaga pemeringkat/ *Rating agency***
Obligasi/*Bonds*		
Obligasi/*Bonds* idAAA		
PLN IX Tahun/*Year* 2007	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XII Tahun/*Year* 2010	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 *Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 *Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 *Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 *Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 *Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 *Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 *Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 *Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 *Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 *Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020/ *Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020/ *Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020/ *Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah/*Sukuk Ijara* idAAA		
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010/ *Sukuk Ijara PLN V Year 2010*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 *Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 *Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 *Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 *Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 *Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 *Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019/ *Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019/ *Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019/ *Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020/ *Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase VI Year 2020*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020/ *Shelf Registration Sukuk Ijara IV PLN Phase I Year 2020*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan) / *BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS (continued)*

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin / *Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes*

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin dalam Dolar Amerika adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes in US Dollars are as follows:

	Pokok/ *Principal*)* USD	Harga penerbitan/ *Issuing price*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	Wali amanat/ *Trustee*	
Surat utang jangka menengah						***Global medium global term notes***
Penerbitan tahun 2020						*Issued in 2020*
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.15%	30 Juni/*June* 2020-30 Juni/*June* 2030	3.00%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2030*
Jatuh tempo 2050	1,000,000,000	98.28%	30 Juni/*June* 2020-30 Juni/*June* 2050	4.00%		*Due in 2050*
Subjumlah	1,500,000,000					*Subtotal*
Penerbitan tahun 2019						*Issued in 2019*
Jatuh tempo 2029	700,000,000	99.39%	17 Juli/*July* 2019-17 Juli/*July* 2029	3.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2029*
Jatuh tempo 2049	700,000,000	98.83%	17 Juli/*July* 2019-17 Juli/*July* 2049	4.88%		*Due in 2049*
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.78%	5 November 2019-5 Februari/*February* 2030	3.38%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2030*
Jatuh tempo 2050	500,000,000	99.57%	5 November 2019-5 Februari/*February* 2050	4.38%		*Due in 2050*
Subjumlah	2,400,000,000					*Subtotal*
Surat utang jangka menengah						***Global medium global term notes***
Penerbitan tahun 2018						*Issued in 2018*
Jatuh tempo 2028	1,000,000,000	99.62%	21 Mei/*May* 2018-21 Mei/*May* 2028	5.45%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2028*
Jatuh tempo 2029	500,000,000	99.00%	25 Oktober/*October* 2018-25 Januari/*January* 2029	5.38%		*Due in 2029*
Jatuh tempo 2048	1,000,000,000	99.32%	21 Mei/*May* 2018-21 Mei/*May* 2048	6.15%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2048*
Jatuh tempo 2049	500,000,000	99.29%	25 Oktober/*October* 2018-25 Oktober/*October* 2049	6.25%		*Due in 2049*
Subjumlah	3,000,000,000					*Subtotal*
Penerbitan tahun 2017						*Issued in 2017*
Jatuh tempo 2027	1,500,000,000	98.99%	15 Mei/*May* 2017-15 Mei/*May* 2027	4.13%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2027*
Jatuh tempo 2047	500,000,000	98.51%	15 Mei/*May* 2017-15 Mei/*May* 2047	5.25%		*Due in 2047*
Subjumlah	2,000,000,000					*Subtotal*
Penerbitan tahun 2012						*Issued in 2012*
Jatuh tempo 2042	1,000,000,000	98.51%	24 Oktober/*October* 2012-24 Oktober/*October* 2042	5.25%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2042*
Obligasi terjamin						***Guaranteed notes***
Penerbitan tahun 2007						*Issued in 2007*
Jatuh tempo 2037	288,312,000	98.59%	28 Juni/*June* 2007-29 Juni/*June 2037*	7.87%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2037*
Jumlah	**10,188,312,000**					***Total***

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dalam Euro adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium Term Notes in Euro are as follows:

	Pokok/ *Principal*)* EUR	Harga penerbitan/ *Issuing price*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	Wali amanat/ *Trustee*	
Surat utang jangka menengah						***Global medium global term notes***
Penerbitan tahun 2019						*Issued in 2019*
Jatuh tempo 2031	500,000,000	99.42%	5 November 2019-5 November 2031	1.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2031*
Penerbitan tahun 2018						*Issued in 2018*
Jatuh tempo 2025	500,000,000	99.22%	25 Oktober/*October* 2018-25 Oktober/*October* 2025	2.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	*Due in 2025*
Jumlah	**1,000,000,000**					***Total***

*) Dalam jumlah penuh / *In full amount*

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin (lanjutan)

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dalam Yen Jepang adalah sebagai berikut:

***28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS** (continued)*

***Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes** (continued)*

The details of Global Medium Term Notes in Japanese Yen are as follows:

	Pokok/ *Principal*)* JPY	Harga penerbitan/ *Issuing price*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	Wali amanat/ *Trustee*	
Surat utang jangka menengah						***Global medium global term notes***
Penerbitan tahun 2019						*Issued in 2019*
Jatuh tempo 2022	3,700,000,000	100%	20 September 2019-20 September 2022	0.43%	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	*Due in 2022*
Jatuh tempo 2024	18,500,000,000	100%	20 September 2019-20 September 2024	0.87%		*Due in 2024*
Jatuh tempo 2029	1,000,000,000	100%	20 September 2019-20 September 2029	1.05%		*Due in 2029*
Jumlah	**23,200,000,000**					***Total***

Grup memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

The Group complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin, dan untuk tujuan umum korporasi.

The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.

Rincian peringkat untuk seluruh surat utang jangka menengah global, obligasi terjamin, dan *Japanese Yen bond* yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

Rating details on all outstanding global medium term notes, guaranteed notes, and Japanese Yen bond owned by the Company are as follows:

	Lembaga pemeringkat/*Rating agency*			
	Moody's Investor Service, Inc.,	Standard and Poor's	Fitch	Japan Credit Rating
Surat utang jangka menengah global/ *Global medium term notes*				
Penerbitan tahun 2020/*Issued in 2020*	Baa2	BBB	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2019/*Issued in 2019*	Baa2	BBB	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2018/*Issued in 2018*	Baa2	n/a	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2017/*Issued in 2017*	Baa2	n/a	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2012/*Issued in 2012*	Baa2	BBB	BBB	n/a
Obligasi terjamin/*Guaranteed notes*				
Penerbitan tahun 2007/*Issued in 2007*	Baa2	BBB	BBB	n/a
Japanese Yen Bond				
Penerbitan tahun 2019/*Issued in 2019*	Baa2	BBB	n/a	BBB+

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

***28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS** (continued)*

Kredit Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset ("KIK - EBA")

Collective Investment Contract of Asset Backed Securities ("KIK - EBA")

	2021	2020	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	587,288	986,421	*Not later than one year*
Lebih dari satu tahun	-	657,614	*More than one year*
Jumlah pembayaran minimum	587,288	1,644,035	*Total minimum payments*
Biaya keuangan	(17,710)	(117,086)	*Finance cost*
Jumlah	**569,578**	**1,526,949**	***Total***
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian:			*Presented in the consolidated statements of financial position:*
Liabilitas jangka pendek	569,578	871,177	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	-	655,772	*Non-current liabilities*
Jumlah	**569,578**	**1,526,949**	***Total***

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") dan Bank Rakyat Indonesia menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa IP PLN I - Piutang Usaha ("KIK-DIPP1"). Perjanjian tersebut mengalami beberapa kali amandemen, terakhir pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

On April 25, 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") and Bank Rakyat Indonesia signed a deed of Collective Investment Contract Asset Backed Securities Danareksa of IP PLN I - Accounts Receivable ("KIK-DIPP1"). The agreement has been amended several times, the latest on September 14, 2017. Based on the agreement, DIM will act as Investment Manager and BRI will act as Custodian Bank.

Pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang komponen A dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ("PJBTL"), Perusahaan menyetujui IP, entitas anak, untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A Suralaya ("SLA") unit 1, 2, 3 dan 4 atas PJBTL SLA unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang telah diamandemen pada tanggal 22 Agustus 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Piutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

On September 11, 2017 based on the statement of approval for the transfer of receivables of component A under the power purchase agreement ("PJBTL"), the Company approved IP, a subsidiary, to transfer the receivables arising from the cash payment obligations of Component A Suralaya steam power plant ("SLA") unit 1, 2, 3 and 4 of PJBTL SLA unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 which have been amended on August 22, 2017 and applied retroactively since January 1, 2017. The receivables were transferred to a third party for KIK-DIPP1 with a maximum amount of Rp5,000,000.

Pada tanggal 14 September 2017, IP menandatangani perjanjian pengikatan transaksi sekuritisasi piutang usaha IP - PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan DIM dan BRI. Di dalam perjanjian tersebut, IP setuju dan mengikat diri untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga Rp4.000.000.

On September 14, 2017, IP entered into an agreement for trade receivables securitisation transaction of IP - PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 with DIM and BRI. Under this agreement, IP agreed and was bound to sell their trade receivables amounted to Rp4,932,107 at a value price of Rp4,000,000.

28. UTANG OBLIGASI, SUKUK IJARAH DAN KIK - EBA (lanjutan)

Kredit Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset ("KIK - EBA") (lanjutan)

Sejak penandatanganan akta perjanjian ("*Cessie*") tersebut semua pembayaran atas piutang usaha yang dialihkan tetap dilakukan oleh Perusahaan kepada IP yang dalam hal ini akan menerima Dana hasil koleksi pelunasan piutang usaha, namun tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai kapasitas yang bertindak untuk dan atas nama KIK-DIPP1.

Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1 sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian pokok dan hasil investasi dilakukan dengan angsuran tetap ("anuitas") berdasarkan dari nilai investasi dan yield 8,25%. Tanggal akhir pelunasan investasi adalah 19 September 2022. KIK-DIPP1 merupakan investasi dengan peringkat idAAA berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Pada laporan keuangan konsolidasian, penerimaan kas dari transaksi sekuritisasi tersebut dicatat sebagai utang Kredit Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset ("KIK - EBA").

Berdasarkan KIK-DIPP1, EBA diterbitkan oleh Bank Kustodian dalam 2 (dua) kelas yaitu:
1. EBA Kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp3.688.000 mewakili 92,20% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA Kelas A memiliki hak untuk menerima arus kas tetap setiap 3 (tiga) bulan sekali yang terdiri dari pelunasan bertahap pokok investasi dan pembagian hasil investasi EBA Kelas A.
2. EBA Kelas B dengan total nilai nominal sebesar maksimum 7,80% dari total aset keuangan. Pemegang EBA kelas B memiliki hak untuk menerima arus kas tidak tetap pada setiap tanggal pelunasan bertahap dan tanggal pembagian hasil investasi EBA Kelas B.

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari Perusahaan atas piutang usaha milik IP yang disekuritisasi. Pemegang EBA kelas A mempunyai hak untuk dibayar mendahului pemegang EBA kelas B. Pemegang EBA kelas B akan menerima pembayaran pelunasan bertahap dan hasil investasi EBA kelas B setelah dilakukan pembayaran penuh atas semua EBA kelas A menurut tata urutan pembayaran (*payment waterfall*).

***28. BONDS PAYABLE, SUKUK IJARA AND KIK - EBA LOANS** (continued)*

***Collective Investment Contract of Asset Backed Securities ("KIK - EBA")** (continued)*

Since the signing of the deed ("Cessie") agreement, all payments made to the transferred trade receivables from the Company are still managed by the IP who will collect the receivables settlement, however those will not for itself, but act for and on behalf of KIK-DIPP1.

On September 15, 2017, DIM together with BRI initiate a public offering of KIK-DIPP1 amounted to Rp4,000,000 with a principal rate of return and investment proceeds settled with fixed instalments ("annuity") based on the investment value and 8.25% yield. The final date of settlement of the investment is September 19, 2022. The KIK-DIPP1 is an investment with idAAA rating based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia.

In the consolidated financial statements, cash receipts from securitisation transactions were recorded as Collective Investment Credit - Asset Backed Securities ("KIK - EBA") loans.

Based on KIK-DIPP1, ABS is issued by Custodian Bank in 2 (two) classes, namely the following:
1. *Class A ABS with a total nominal value of Rp3,688,000 represents 92.20% of total financial assets. Class A ABS holders have the right to receive a fixed cash flow on every 3 (three) months consist of principal gradual settlement and investment return of Class A ABS.*

2. *Class B ABS with a nominal maximum of 7.80% of total financial assets. Class B ABS holders have the right to receive variable non-fixed cash flow on each date of principal gradual settlement and investment return of ABS Class B.*

All ABS payments are solely derived from the Company on securitised IP's trade receivables. Class A ABS holders have the privilege to be paid before Class B ABS holders. Class B ABS holders will receive the principal gradual settlement and investment returns after full payment of all Class A ABS according to the payment waterfall.

29. UTANG LISTRIK SWASTA / *29. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLES*

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan IPP.

This account represents electricity purchase payables, which were restructured through renegotiation with the IPPs.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

Details according to creditors and payment schedules are as follows:

a. Berdasarkan pemasok / *a. By creditor*

	2021	2020	
PT Paiton Energy			*PT Paiton Energy*
2021: USD382.877.185			*2021: USD382,877,185*
2020: USD411.696.415	5,463,274	5,806,978	*2020: USD411,696,415*
PT Jawa Power			*PT Jawa Power*
2021: USD49.441.610			*2021: USD49,441,610*
2020: USD50.964.371	705,482	718,853	*2020: USD50,964,371*
Jumlah	6,168,756	6,525,831	*Total*
Dikurangi : bagian jangka pendek	**457,545**	**427,974**	***Less : current portion***
Bagian jangka panjang	**5,711,211**	**6,097,857**	***Long-term portion***

b. Berdasarkan jadwal pembayaran / *b. By instalment schedule*

	2021	2020	
Dibayarkan:			*Payable:*
Dalam satu tahun	457,545	427,974	*Within one year*
Pada tahun kedua	484,013	452,287	*In the second year*
Pada tahun ketiga	512,578	478,450	*In the third year*
Pada tahun keempat	543,504	506,687	*In the fourth year*
Setelah lima tahun	4,171,116	4,660,433	*After five years*
Jumlah	**6,168,756**	**6,525,831**	***Total***

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga sebesar 4,81% dan 18,45% yang dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, and are payable in 360 monthly instalments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

30. UTANG PIHAK BERELASI / *30. PAYABLE TO RELATED PARTY*

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat saldo utang pihak berelasi (2020: Rp9.432) (Catatan 52).

As at December 31, 2021, there were no outstanding payables to related parties (2020: Rp9,432) (Note 52).

31. UTANG USAHA / *31. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2021	2020*)	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	14,400,585	5,391,839	*Purchase of fuel, goods and services*
Pembelian tenaga listrik	6,166,048	4,771,373	*Purchase of electricity*
Subjumlah	20,566,633	10,163,212	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	17,773,195	16,808,135	*Purchase of fuel, goods and services*
Pembelian tenaga listrik	9,564,928	12,177,208	*Purchase of electricity*
Subjumlah	27,338,123	28,985,343	*Subtotal*
Jumlah	**47,904,756**	**39,148,555**	***Total***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of trade payables in foreign currencies are as follows:

	2021		2020		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies**)	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies**)	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
USD	1,627,546,149	23,223,456	1,005,095,950	14,176,883	*USD*
Lain-lain**)	13,474,124	192,262	7,940,980	112,008	*Others**)*
Jumlah		**23,415,718**		**14,288,891**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Utang usaha dalam mata uang lainnya disajikan dalam jumlah setara USD, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Trade payables in other currencies are presented in USD equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date*

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 52 for information on the details of transactions and balances with related parties.

32. UTANG LAIN-LAIN / *32. OTHER PAYABLES*

	2021	2020	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan			*Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress*
Rupiah	9,411,031	16,089,598	*Rupiah*
USD	3,666,000	6,714,525	*USD*
EUR	833,825	1,350,719	*EUR*
JPY	668,684	1,556,454	*JPY*
CHF	-	110,033	*CHF*
Pemerintah daerah	2,188,109	1,911,700	*Local government*
Uang muka penjualan tenaga listrik	1,362,106	1,922,525	*Advances received on sale of electricity*
Karyawan	62,328	23,491	*Employees*
Lain-lain	2,772,801	1,398,370	*Others*
Jumlah	20,964,884	31,077,415	*Total*
Dikurangi: bagian jangka pendek	**20,498,505**	**30,895,322**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**466,379**	**182,093**	***Non-current portion***

Pemerintah Daerah

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

Local Government

The payables to Local Government represent the amount collected by the Company from the customers for streetlight taxes. This is subsequently remitted to the respective Local Government.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Advances received on sale of electricity

This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan di muka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Employees

Payable to employees mainly represents receipt of advance instalment payments from employees related to house instalments.

33. UTANG PAJAK / *33. TAXES PAYABLE*

	2021	2020	
PPN	952,659	637,314	*VAT*
PPh Badan	152,683	299,245	*CIT*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 21	307,299	412,625	*Article 21*
Pasal 22	219,103	64,510	*Article 22*
Pasal 23 dan 26	208,801	202,868	*Articles 23 and 26*
Pasal 4(2)	152,605	125,713	*Article 4(2)*
Pasal 15	5,163	4,550	*Article 15*
Lain-lain	455	454	*Others*
Jumlah	**1,998,768**	**1,747,279**	***Total***

34. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *34. ACCRUED EXPENSES*

	2021	2020*)	
Bunga dan beban keuangan			***Interest and financing charges***
Pihak berelasi			*Related parties*
Utang penerusan pinjaman	253,127	287,522	*Two-step loans*
Utang bank	206,671	414,322	*Bank loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non bank	-	59,719	*Government and non bank Government financial institution loans*
Jumlah pihak berelasi	459,798	761,563	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2,154,701	2,289,608	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang bunga sewa	858,823	802,703	*Lease liability interest*
Utang bank	588,555	727,925	*Bank loans*
Utang listrik swasta	33,216	45,004	*Electricity purchase payables*
Jumlah pihak ketiga	3,635,295	3,865,240	*Total third parties*
Subjumlah	4,095,093	4,626,803	*Subtotal*
Biaya operasional	2,433,523	2,363,577	***Operational charges***
Jumlah	**6,528,616**	**6,990,380**	***Total***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:

	2021		2020		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies**)	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies**)	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
USD	158,563,272	2,262,539	163,432,293	2,305,212	*USD*
JPY	7,631,184,204	945,426	5,825,213,651	794,976	*JPY*
EUR	6,206,804	100,096	6,191,197	107,294	*EUR*
Lain-lain**)	15,788	225	42,613	601	*Others***)
Jumlah		**3,308,286**		**3,208,083**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara USD dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date*

Lihat Catatan 52 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 52 for information on the details of transactions and balances with related parties.

35. UANG JAMINAN LANGGANAN / *35. CUSTOMER SECURITY DEPOSITS*

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

This account represents customer security deposits determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

36. UTANG BIAYA PROYEK / *PROJECT COST PAYABLES*

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorisation* atau dokumen lain yang sejenis.

This account represents payable to contractors arising from construction expense and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account at the issuance of the Withdrawal Authorisation or other similar documents.

37. PENJUALAN TENAGA LISTRIK / *SALES OF ELECTRICITY*

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

Sales of electricity by customer are as follows:

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 52)			***Related parties (Note 52)***
Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah	17,884,988	17,127,270	*Government related entities*
Pihak ketiga			***Third parties***
Umum	269,565,910	256,618,162	*Public*
TNI dan Polri	1,592,317	1,486,844	*TNI and Polri*
Subjumlah	271,158,227	258,105,006	*Subtotal*
Jumlah	289,043,215	275,232,276	*Total*
Masa uji coba	(180,489)	(333,812)	*Commissioning test period*
Jumlah, bersih	**288,862,726**	**274,898,464**	***Total, net***

Pendapatan sebesar Rp288.862.726 (2020: Rp274.898.464) diakui sepanjang waktu.

Revenue of approximately Rp288,862,726 (2020: Rp274,898,464) is recognised overtime.

Pengujian dan masa uji coba (*commissioning test*) merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa uji coba dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi secara komersial.

Testing and commissioning (commissioning test) are a series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are going into operation. The costs and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalised into construction in progress because the electrical installation has not yet been commercially operated.

Penjualan tenaga listrik untuk tahun 2021 dan 2020 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam.

Sales of electricity for the years 2021 and 2020 are based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:

- *Regulation of the Minister of ESDM No. 28 Year 2016 most recently amended by Regulation of the Minister of ESDM No. 3 Year 2020.*
- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 Year 2017, regarding the tariff of electricity provided by PLN Batam.*

37. PENJUALAN TENAGA LISTRIK (lanjutan)

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, total penjualan tenaga listrik termasuk penerimaan stimulus COVID-19 dari pemerintah masing-masing adalah sebesar Rp9.971.721 dan Rp14.260.502. Penerimaan stimulus COVID-19 terdiri dari diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri dan pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah menerima pembayaran stimulus COVID-19 terkait diskon tarif untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri, dan pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen masing-masing adalah sebesar Rp10.962.162 dan Rp13.136.479.

Untuk memberikan perlindungan sosial menghadapi COVID-19, Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia dan ditindak lanjuti dengan surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM melalui surat No. 707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 Maret 2020, memberikan diskon atas tarif tenaga listrik sebagai berikut: (i) pelanggan rumah tangga reguler (pascabayar) daya 450 VA diberikan rekening listrik gratis selama tiga bulan untuk pemakaian listrik di bulan Maret, April dan Mei 2020; (ii) pelanggan rumah tangga pra bayar daya 450 VA diberikan gratis token untuk pembelian token bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir; (iii) pelanggan rumah tangga reguler (pascabayar) daya 900 VA diberikan rekening listrik gratis 50% atas pemakaian listrik bulan Maret, April dan Mei 2020; (iv) pelanggan rumah tangga pra bayar daya 900 VA diberikan token gratis sebesar 50% untuk pembelian token bulan April, Mei dan Juni 2020 sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir.

Selanjutnya, piutang dari golongan pelanggan tersebut akan dibayar Pemerintah kepada Perusahaan. Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon atas tarif tenaga listrik tersebut masing-masing sejumah 24 juta pelanggan untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan 7 juta pelanggan untuk pelanggan dengan daya 900 VA. Kebijakan ini diperpanjang sampai dengan bulan September 2020 melalui Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No.1005/23/DJL.3/2020 pada tanggal 5 Juni 2020.

***37. SALES OF ELECTRICITY** (continued)*

The Company has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total sales of electricity.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the total sales of electricity includes receipts of COVID-19 stimulus from the Government of Indonesia amounted to Rp9,971,721 and Rp14,260,502, respectively. COVID-19 stimulus receipts consist of tariff discount for households, business and industrial customers and minimum account exemption, expenses and subscription fees.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the Company received COVID-19 stimulus payments related to tariff discounts for household, business and industrial customers, and exemption of minimum account, expense and subscription fees amounted to Rp10,962,162 and Rp13,136,479, respectively.

To provide social protection against COVID-19, the Government through the President of the Republic of Indonesia and followed by Directorate General of Electricity of the Ministry of ESDM through letter No. 707/26/DJL.3/2020 dated March 31, 2020, provides discounts on electricity tariffs as follows: (i) 450 VA regular (postpaid) household class electricity customers is given free electricity bills for three months for electricity usage in March, April and May 2020; (ii) 450 VA prepaid household class electricity customers are given free tokens for the purchase of tokens in April, May and June 2020 at the highest monthly usage of the last three months' usage; (iii) 900 VA regular (postpaid) household class electricity customers are given a 50% free electricity bill for electricity usage in March, April and May 2020; and (iv) prepaid 900 VA household class electricity customers are given free tokens of 50% for the purchase of tokens in April, May and June 2020, at the highest monthly usage of the last three months' usage.

Subsequently, the receivables from those classes of electricity customers will be paid by the Government to the Company. The total amount of customers receiving electricity tariff discounts are 24 million customers for 450 VA class electricity customer and 7 million customers for 900 VA class electricity customers. This policy was extended until September 2020 through the Letter of the Directorate General of Electricity of the Ministry of ESDM No.1005/23/DJL.3/2020 dated June 5, 2020.

37. PENJUALAN TENAGA LISTRIK (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2020, Pemerintah melalui Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No. 847/23/DJL.3/2020 memperluas pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik dengan memberikan rekening listrik gratis dan token gratis kepada golongan pelanggan Bisnis dan Industri dengan daya 450 VA yang berlaku mulai bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020. Kebijakan ini diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2020 melalui Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No. 1475/23/DJL.3/2020 pada tanggal 3 Agustus 2020 kepada golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, pelanggan 950 VA subsidi dan golongan pelanggan Bisnis dan Industri dengan daya 450 VA.

Pada tanggal 29 Juli 2020, Pemerintah melalui Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No. 1458/23/DJL.3/2020 memberikan diskon tarif tenaga listrik dalam bentuk pembebasan rekening minimum dan biaya beban untuk pelanggan tertentu periode Juli sampai dengan Desember 2020.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. B-227/TL.04/DLB.3/2021, tanggal 1 Februari 2021, dan mengacu pada surat No. 2350/AGA.02.01/B01000000/2021 tanggal 25 Januari 2021, perihal kebutuhan Dana Pelaksanaan Program Diskon Tarif, pembebasan biaya/abonemen dan rekening minimum periode Januari-Maret 2021 menyatakan bahwa rencana pemberian stimulus ketenagalistrikan diperpanjang sampai dengan triwulan II tahun 2021, dengan besaran triwulan II tahun 2021 akan sebesar 50% dari triwulan I tahun 2021.

Selanjutnya, berdasarkan Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. B-467/TL.04/DJL.03/2021 tanggal 2 Maret 2021 mengacu pada hasil Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020 serta tindak lanjut kesepakatan 3 (tiga) Menteri (Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN) tanggal 31 Desember 2020 yang membahas Kebijakan Subsidi Listrik dan Program Stimulus Sektor Ketenagalistrikan, disampaikan hal-hal pokok sebagai berikut:

***37. SALES OF ELECTRICITY** (continued)*

On April 30, 2020, the Government through the Letter of the Directorate General of Electricity of the Ministry of ESDM No. 847/23/DJL.3/2020 expanded the implementation of the discount on the electricity tariff rate by providing free electricity bills and tokens for 450 VA Business and Industry class electricity customers from May 2020 until October 2020. This policy was extended until December 2020 through the Letter of the Directorate General of Electricity of the Ministry of ESDM No. 1475/23/DJL.3/2020 dated August 3, 2020 for 450 VA household class electricity customers, 900 VA subsidised household class electricity customers and 450 VA Business and Industry class electricity customers.

On July 29, 2020 the Government through the Letter of the Directorate General of Electricity of the Ministry of ESDM No. 1458/23/DJL.3/2020 provided discount on electricity tariff rate in the form of minimum account exemption and expense fees for certain customers for the period July until December 2020.

Based on the letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources and Directorate General of Electricity No. B-227/TL.04/DLB.3/2021, dated February 1, 2021, and referring to the letter No. 2350/AGA.02.01/B01000000/2021 dated January 25, 2021, regarding funding for Application for Discount Tariff, and relief of subscription charges/minimum account period of January-March 2021, the plan for electricity stimulus will be extended until the second quarter of 2021, with the amount for the second quarter of 2021 being half of that for the first quarter of 2021.

Furthermore, based on the letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity No. B-467/TL.04/DJL.03/2021 dated March 2, 2021 referring to the results of the Limited Meeting on December 28, 2020 of the 3 (three) Ministers (Minister of ESDM, Minister of Finance and Minister of SoE) on December 31, 2020 which covered the Electricity Subsidy Policy and the Electricity Sector Stimulus Program the following main points were delivered:

37. PENJUALAN TENAGA LISTRIK (lanjutan)

1. Pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik Perusahaan bagi Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri Tahun 2021 diperpanjang untuk rekening listrik dan pembelian token bulan April sampai dengan Juni 2021, dengan ketentuan:
   a) Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA):
      i) Reguler (Pascabayar): rekening listrik diberikan diskon sebesar 50% (biaya pemakaian dan biaya beban);
      ii) Prabayar: diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50%;

   b) Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA):
      i) Reguler (Pascabayar): rekening listrik diberikan diskon sebesar 25% (biaya pemakaian dan biaya beban);
      ii) Prabayar: diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 25%;

2. Dalam pemberian diskon tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada butir 1, Perusahaan wajib memperhatikan besaran konsumsi energi listrik pelanggan dengan mempertimbangkan batasan maksimal jam nyala per bulan;

3. Pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum diperpanjang untuk rekening bulan April sampai dengan Juni 2021 dengan ketentuan pembebasan sebesar 50%.

Perpanjangan sampai dengan triwulan III berdasarkan surat tanggal 2 Juli 2021 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. B-1641/TL.04/DJL.3/2021.

Perpanjangan sampai dengan triwulan IV berdasarkan melalui surat tanggal 22 Juli 2021 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. B-1734/TL.04/DJL.3/2021.

***37. SALES OF ELECTRICITY** (continued)*

1. The implementation of the Company's electricity tariff discounts for Household, Business and Industrial Customers in 2021 is extended for electricity bills and token purchases from April to June 2021, with the following conditions:

   a) Customers of 450 VA (R1 / TR 450 VA) power households, 450 VA (B1 / TR 450 VA) small businesses, and 450 VA (I1 / TR 450 VA) small businesses:
      i) Regular (Postpaid): electricity bills are given a discount of 50% (usage fees and charges);
      ii) Prepaid: given a 50% discount on electricity rates for token purchases;

   b) Subsidised 900 VA power household customers (R1 / TR 900 VA):
      i) Regular (Postpaid): electricity bills are given a discount of 25% (usage fees and load charges);
      ii) Prepaid: given a 25% discount on electricity rates for token purchases;

2. In granting electricity tariff discounts as referred to in point 1, the Company is obliged to pay attention to the amount of electricity consumption of customers by taking into account the maximum limit on hours per month;

3. The implementation of exemption from expense or subscription fees, as well as exemption from the application of the minimum accounts are extended for the April to June 2021 accounts with exemption policy of 50%.

The extension until the third quarter is informed by letter dated July 2, 2021 of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity No. B-1641/TL.04/DJL.3/2021.

The extension until the fourth quarter is informed by letter dated July 22, 2021 of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity No. B-1734/TL.04/DJL.3/2021.

38. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH / *38. GOVERNMENT'S ELECTRICITY SUBSIDY*

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah marjin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Subsidy revenue represents the revenue from the Government of Indonesia for the difference between allowable cost plus 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff group which received automatic tariff adjustment based on the Minister of ESDM Regulation No. 3 Year 2020 regarding the fourth amendment on the Minister of ESDM Regulation No. 28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2021 dan 2020 masing-masing menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.02/2021, tanggal 7 Desember 2021 dan No. 174/PMK.02/2019, tanggal 22 November 2019. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di bawah Kementerian ESDM.

The Government of the Republic of Indonesia provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for calculation and payment of electricity subsidy for Budget years 2021 and 2020 are using the Minister of Finance Regulation No. 178/PMK.02/2021, dated December 7, 2021 and No. 174/PMK.02/2019, dated November 22, 2019, respectively. The electricity subsidy is calculated from the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff Group less the cost of electricity supplies (Rp/kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by the electricity sales volume (kWh) for each tariff Group. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, which is determined by the Directorate General of Electricity, under the Ministry of ESDM.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2021 revisi ke-1 dan No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2020 revisi ke-1, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2021 dan 2020 ditetapkan masing-masing sebesar Rp53.587.310 dan Rp62.817.768. Pagu tertinggi tersebut termasuk 7% marjin di atas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List ("DIPA") No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2021 first revision and No. SP.DIPA-999.07.1.979321/2020 first revision, the electricity subsidy ceiling for budget year 2021 and 2020 amounted to Rp53,587,310 and Rp62,817,768 respectively. The ceiling amount includes 7% margin above the costs of electricity supplies.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran, di bawah Kementerian Keuangan.

The amount of the electricity subsidy within a budget year is finalised based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

Pendapatan subsidi listrik dirinci selama tahun berjalan sebagai berikut:

The details of revenue from electricity subsidy during the years are as follows:

	2021	2020	
Subsidi listrik (Catatan 52)	49,796,949	47,988,114	*Electricity subsidy (Note 52)*
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan:			*Realisation of subsidy from current year budget:*
Penerimaan tunai	(46,155,349)	(48,700,398)	*Cash received*
Saling hapus dengan kelebihan penerimaan subsidi tahun anggaran sebelumnya (Catatan 25)	(1,666,967)	(954,683)	*Offset with excess subsidy receipt from prior year budget (Note 25)*
Piutang subsidi listrik (Catatan 16)/ (kelebihan subsidi yang diterima) (Catatan 25)	**1,974,633**	**(1,666,967)**	***Receivables for electricity subsidy (Note 16)/(excess subsidy received) (Note 25)***

39. PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN / *39. OTHER REVENUES*

	2021	2020	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	1,730,517	1,623,099	*Telecommunication network and service*
Penjualan batubara	1,705,419	1,461,342	*Coal sales*
Jasa pemeliharaan	459,245	436,150	*Maintenance services*
Sewa transformator	396,300	401,932	*Transformer rental*
Perubahan daya tersambung dan administrasi	58,974	3,445	*Upgrading of electricity power and administration fees*
Lain-lain	76,278	385,858	*Others*
Jumlah	**4,426,733**	**4,311,826**	***Total***

40. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS / *40. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE*

	2021	2020	
Bahan bakar minyak			***Fuel oils***
High speed diesel	21,513,624	13,831,217	*High speed diesel*
Fuel marine oil	1,170,788	797,241	*Fuel marine oil*
Lain-lain	1,518,947	1,169,139	*Others*
Subjumlah	24,203,359	15,797,597	*Subtotal*
Bahan bakar - non minyak			***Non-oil fuels***
Batubara	52,934,976	46,158,057	*Coal*
Gas alam	37,153,944	40,050,431	*Natural gas*
Panas bumi	3,507,676	3,540,237	*Geothermal*
Air	399,568	346,831	*Water*
Subjumlah	93,996,164	90,095,556	*Subtotal*
Minyak pelumas	219,967	121,132	*Lubricants*
Jumlah	**118,419,490**	**106,014,285**	***Total***

Tidak ada pembelian dari pemasok tunggal yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

No purchases from a single supplier exceeded 10% of the total revenue.

41. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK / *41. PURCHASED ELECTRICITY EXPENSES*

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account includes the purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, the purchase of electricity during the commissioning stage and the purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	2021	2020*)	
Pihak berelasi			***Related parties***
S2P	12,227,323	12,818,397	*S2P*
SGPJB	8,117,710	5,054,423	*SGPJB*
Lain-lain	6,847,904	6,960,390	*Others*
Subjumlah	27,192,937	24,833,210	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Paiton Energy	13,614,258	13,439,941	*PT Paiton Energy*
PT Jawa Power	8,598,938	7,723,929	*PT Jawa Power*
Lain-lain	54,147,339	50,253,287	*Others*
Subjumlah	76,360,535	71,417,157	*Subtotal*
Jumlah	**103,553,472**	**96,250,367**	***Total***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

42. BEBAN SEWA / *42. LEASE EXPENSES*

	2021	2020*)	
Beban yang berkaitan dengan sewa dengan pembayaran variabel yang tidak termasuk dalam utang sewa	3,604,647	4,115,541	*Expense relating to variable lease payments not included in lease liabilities*
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	1,079,954	1,320,254	*Expense relating to short-term leases*
Beban yang berkaitan dengan sewa nilai rendah	87,413	66,776	*Expense relating to leases of low value assets*
Jumlah	**4,772,014**	**5,502,571**	***Total***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

43. BEBAN PEMELIHARAAN / *43. MAINTENANCE EXPENSES*

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details of maintenance expenses are as follows:

	2021	2020	
Jasa borongan	17,009,231	16,793,728	*Contractor fees*
Pemakaian material	5,591,543	5,146,781	*Spare parts used*
Jumlah	**22,600,774**	**21,940,509**	***Total***

44. BEBAN KEPEGAWAIAN / *44. PERSONNEL EXPENSES*

	2021	2020	
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	7,019,176	6,390,611	*Bonus and performance incentives*
Imbalan kerja (Catatan 50)	5,933,357	6,698,719	*Employee benefits (Note 50)*
Gaji	4,980,766	4,867,697	*Salaries*
Tunjangan	3,147,401	3,140,188	*Allowances*
Lain-lain	4,012,056	3,868,492	*Others*
Jumlah	**25,092,756**	**24,965,707**	***Total***

45. BEBAN USAHA LAIN-LAIN / *45. OTHER OPERATING EXPENSES*

	2021	2020	
Honorarium	1,536,915	1,081,234	*Honorarium*
Pengelolaan pelanggan	1,086,735	887,558	*Customer maintenance*
Pembacaan meter	809,312	992,945	*Meter reading*
Teknologi informasi	643,707	657,170	*Technological information*
Amortisasi aset takberwujud	217,524	130,919	*Amortisation of intangible assets*
(Pemulihan)/penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang	(458,087)	1,098,856	*(Recoverable)/provision of expected credit losses of receivables*
Lain-lain	3,403,242	2,343,464	*Others*
Jumlah	**7,239,348**	**7,192,146**	***Total***

46. BEBAN KEUANGAN / *46. FINANCE COSTS*

	2021	2020	
Pihak berelasi			***Related parties***
Utang bank	2,411,989	4,487,159	*Bank loans*
Instrumen derivatif	756,338	910,220	*Derivative instruments*
Penerusan pinjaman	646,372	941,948	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah	249,335	303,784	*Government loans*
Subjumlah	4,064,034	6,643,111	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
Utang obligasi	8,046,095	11,660,760	*Bonds payable*
Utang sewa (Catatan 26)	4,645,416	4,547,512	*Lease liabilities (Note 26)*
Utang bank	2,801,255	4,109,442	*Bank loans*
Utang listrik swasta	398,093	441,580	*Electricity purchase payables*
Lain-lain	420,862	13,481	*Others*
Subjumlah	16,311,721	20,772,775	*Subtotal*
Jumlah	**20,375,755**	**27,415,886**	***Total***

47. (BEBAN)/PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH / *47. OTHER (EXPENSE)/INCOME - NET*

	2021	2020	
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama (Catatan 9)	3,231,159	2,073,984	*Share in net income of associates and joint ventures (Note 9)*
Penghasilan denda administrasi	1,425,978	1,287,652	*Administrative penalty income*
Keuntungan dari pembelian dengan diskon atas akuisisi MCTN (Catatan 5)	216,381	-	*Gain on bargain purchase of MCTN (Note 5)*
Penghasilan jasa dan klaim	71,915	169,187	*Claim and service income*
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 8)	36,192	106,217	*Increase in the fair value of investment properties (Note 8)*
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	11,963	1,065,054	*Gain on sale of assets not used in operations (Note 6)*
Beban penelitian	(101,052)	(71,073)	*Research expenses*
Program pemberdayaan lingkungan	(371,782)	(315,546)	*Community development programs*
Kerugian penurunan nilai aset tetap tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	(671,660)	(338,615)	*Loss on impairment of assets not used in operations (Note 6)*
Penyesuaian kompensasi berdasarkan hasil audit BPK (Catatan 25)	(1,202,263)	-	*Adjustment of compensation based on audit result by BPK (Note 25)*
Penurunan nilai aset tetap (Catatan 6)	(2,508,335)	-	*Provision for impairment of property, plant and equipment (Note 6)*
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak (Catatan 19)	(4,519,237)	-	*Allowance for uncertainty over tax treatment (Note 19)*
Lain-lain	(540,941)	(2,059,894)	*Others*
Jumlah	**(4,921,682)**	**1,916,966**	***Total***

48. PAJAK PENGHASILAN / *48. INCOME TAX*

	2021	2020	
Pajak kini			*Current tax*
Perusahaan	(117,478)	-	*The Company*
Entitas anak	(897,257)	(709,414)	*Subsidiaries*
	(1,014,735)	(709,414)	
Pajak tangguhan			*Deferred tax*
Perusahaan	(5,716,619)	(677,102)	*The Company*
Entitas anak	(3,314,853)	(4,911,975)	*Subsidiaries*
	(9,031,472)	(5,589,077)	
Jumlah beban pajak	**(10,046,207)**	**(6,298,491)**	***Total income tax expense***

a. Pajak kini / *a. Current tax*

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak konsolidasian dengan estimasi laba/(rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the consolidated profit/(loss) before tax and the estimated tax profit/(loss) is as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	23,221,084	12,291,919	*Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak entitas anak	(17,060,573)	(25,240,493)	*Profit before tax attributable to subsidiaries*
Laba/(rugi) sebelum pajak Perusahaan	6,160,511	(12,948,574)	*Profit/(loss) before tax - the Company*
Koreksi fiskal:			*Fiscal correction:*
Beban sewa	(2,598,722)	(511,043)	*Lease expenses*
Penyambungan pelanggan	6,605,916	6,122,817	*Customer connection fees*
Penyusutan aset tetap	(23,749,929)	(21,959,181)	*Depreciation of property, plant and equipment*
Imbalan kerja	2,233,807	2,432,564	*Employee benefits*
Penyusutan biaya dikapitalisasi	(1,148,050)	-	*Depreciation of capitalised expense*
Biaya/(pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Non-deductible expenses/ (non-taxable income):*
Kesejahteraan karyawan	993,659	915,416	*Employee welfare*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang dan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(402,200)	888,700	*Allowance for expected credit losses of receivables and allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(607,725)	(834,853)	*Interest income subjected to final tax*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	13,046,725	7,188,054	*Other non-deductible expenses*
Estimasi laba/(rugi) fiskal Perusahaan tahun berjalan	**533,992**	**(18,706,100)**	***The Company's estimated tax income/(loss) for the year***
Pajak kini			*Current tax*
Perusahaan	117,478	-	*The Company*

48. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) / *48. INCOME TAX (continued)*

a. Pajak kini (lanjutan) / *a. Current tax (continued)*

	2021	2020	
Pembayaran pajak di muka:			*Prepayment of taxes:*
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 22	-	75,212	*Article 22*
Pasal 23	-	28,714	*Article 23*
Jumlah	-	103,926	*Total*
Lebih bayar pajak kini			*Current tax overpayment*
Perusahaan	-	103,926	*The Company*
Entitas anak	537,168	890,457	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan badan lebih bayar (Catatan 19)	**537,168**	**994,383**	***Total overpayment of corporate income tax (Note 19)***
Kurang bayar pajak kini			*Current tax underpayment*
Perusahaan	(23,291)	-	*The Company*
Jumlah pajak penghasilan badan kurang bayar	**(23,291)**	**-**	***Total underpayment of corporate income tax***

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual CIT Return.

Rugi pajak Perusahaan yang dibawa ke depan yang masih dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa depan untuk jangka waktu lima tahun dari tahun di mana kerugian itu terjadi pada tanggal kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

Tax losses carried-forward that can still be offset against future taxable income for a period of five years from the period in which the loss was incurred, with expiration dates as follows:

Tahun pajak/ *Fiscal year*	Tanggal kedaluwarsa/ *Expiry year*	Disajikan sebelumnya/ *Previously stated*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending Balance*
2020	2025	18,706,100	(18,706,100)	-

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2017, 2018 dan 2019 dimana Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menetapkan laba fiskal Perusahaan untuk masing-masing tahun sebesar Rp865.213, Rp28.913.961 dan Rp22.589.855. Rugi pajak Perusahaan tahun 2016 yang dibawa ke depan adalah sebesar Rp33.054.473 telah digunakan seluruhnya untuk masing-masing laba fiskal tersebut. Untuk jumlah sisanya, Perusahaan telah melakukan pembayaran di muka atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 adalah sebesar Rp3.061.305 (Catatan 48.c).

The Company received Underpayment of Tax Assessment Letters ("SKPKB") on Corporate Income Tax for fiscal years 2017, 2018 and 2019 in which Directorate General of Taxation ("DGT") assessed that the Company's taxable income for each year amounts to Rp865,213, Rp28,913,961 and Rp22,589,855, respectively. The Company's 2016 tax loss carried-forward of Rp33,054,473 has been fully utilised on the aforementioned taxable income. For the remaining balance, the Company has made prepayments for 2019 Corporate Income Tax amounted to Rp3,061,305 (Note 48.c).

48. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) / *48. INCOME TAX (continued)*

b. Pajak tangguhan / *b. Deferred tax*

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group deferred tax assets and liabilities are as follows:

	2021						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penyesuaian tarif pajak/ *Adjustment of tax rate*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Akuisisi entitas anak/ *Acquisition of subsidiaries*)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan							***Deferred tax assets***
Akumulasi rugi fiskal	-	-	1,019	-	-	1,019	*Accumulated tax losses*
Liabilitas imbalan kerja	79,335	-	20,371	(4,746)	719	95,679	*Employee benefit liabilities*
Sewa pembiayaan	28,021	538	(21,557)	-	-	7,002	*Finance leases*
Aset tetap	24,578	-	(7,044)	-	-	17,534	*Property, plant and equipment*
Penyisihan penurunan nilai piutang	53,082	-	24,318	-	-	77,400	*Provision for impairment losses of receivables*
Penyisihan persediaan	-	-	(24,051)	-	25,171	1,120	*Provision for inventories*
Bonus	-	-	74,820	-	(29,331)	45,489	*Bonuses*
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama	10,273	-	(10,276)	-	-	(3)	*Share net income from associates and joint ventures*
Lainnya	-	-	19,465	-	-	19,465	*Others*
Jumlah	**195,289**	**538**	**77,065**	**(4,746)**	**(3,441)**	**264,705**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan							***Deferred tax liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	11,520,499	1,024,724	617,055	(1,872,542)	-	11,289,736	*Employee benefit liabilities*
Pendapatan ditangguhkan	1,465,884	112,889	1,478,653	-	-	3,057,426	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	(2,594,037)	(223,346)	(382,036)	-	-	(3,199,419)	*Finance leases*
Aset tetap	(42,363,139)	(3,588,816)	(8,196,389)	(2,818,827)	-	(56,967,171)	*Property, plant and equipment*
Bonus	208,904	-	(12,047)	-	-	196,857	*Bonuses*
Penyisihan persediaan	12,886	326	21,095	-	-	34,307	*Provision for inventories*
Penyisihan penurunan nilai piutang	2,401	(133)	38,950	-	-	41,218	*Provision for impairment losses of receivables*
Lainnya	2	-	-	-	(29,331)	(29,329)	*Others*
Jumlah	**(31,746,600)**	**(2,674,356)**	**(6,434,719)**	**(4,691,369)**	**(29,331)**	**(45,576,375)**	***Total***
		(2,673,818)	**(6,357,654)**	**(4,696,115)**	**(32,772)**		

*) Penambahan pajak tangguhan dari akuisisi EMI dan MCTN (Catatan 5) / *) *Additions of deferred tax from acquisitions of EMI and MCTN (Note 5)*

	2020						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penyesuaian tarif pajak/ *Adjustment of tax rate*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Ditransfer ke/ dari aset/ (liabilitas) pajak/ *Transfer to/ from deferred tax assets/(liabilities)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan							***Deferred tax assets***
Akumulasi rugi fiskal	3,030,046	-	(3,030,046)	-	-	-	*Accumulated tax losses*
Liabilitas imbalan kerja	1,609,308	(95,171)	(8,455)	(31,518)	(1,394,829)	79,335	*Employee benefit liabilities*
Sewa pembiayaan	-	-	28,021	-	-	28,021	*Finance leases*
Aset tetap	(2,727,988)	359,662	(2,404,146)	164,239	4,632,811	24,578	*Property, plant and equipment*
Bonus	215,673	(14,514)	7,745	-	(208,904)	-	*Bonuses*
Penyisihan persediaan	9,932	(600)	3,554	-	(12,886)	-	*Provision for inventories*
Penyisihan penurunan nilai piutang	19,436	-	33,646	-	-	53,082	*Provision for impairment losses of receivables*
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama	59,556	-	(49,283)	-	-	10,273	*Share net income from associates and joint ventures*
Jumlah	**2,215,963**	**249,377**	**(5,418,964)**	**132,721**	**3,016,192**	**195,289**	***Total***

48. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) / *48. INCOME TAX (continued)*

b. Pajak tangguhan (lanjutan) / *b. Deferred tax (continued)*

	2020						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penyesuaian tarif pajak/ *Adjustment of tax rate*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to income*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Ditransfer ke/ dari aset/ (liabilitas) pajak/ *Transfer to/ from deferred tax assets/(liabilities)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Liabilitas pajak tangguhan							***Deferred tax liabilities***
Akumulasi rugi fiskal	3,331,340	-	(3,331,340)	-	-	-	*Accumulated tax losses*
Liabilitas imbalan kerja	12,415,845	(1,492,294)	(408,018)	(389,863)	1,394,829	11,520,499	*Employee benefit liabilities*
Pendapatan ditangguhkan	241,836	(29,020)	1,253,068	-	-	1,465,884	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	(3,091,408)	368,404	128,967	-	-	(2,594,037)	*Finance leases*
Aset tetap	(40,920,088)	5,023,351	(2,034,076)	200,485	(4,632,811)	(42,363,139)	*Property, plant and equipment*
Bonus	-	-	-	-	208,904	208,904	*Bonuses*
Penyisihan penurunan nilai piutang	1,334	(293)	1,360	-	12,886	15,287	*Provision for impairment losses of receivables*
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(100,101)	-	100,101	-	-	-	*Share net income from associates and joint ventures*
Lainnya	(298)	-	300	-	-	2	*Others*
Jumlah	**(28,121,540)**	**3,870,148**	**(4,289,638)**	**(189,378)**	**(3,016,192)**	**(31,746,600)**	***Total***
		4,119,525	**(9,708,602)**	**(56,657)**	**-**		

Pajak atas laba sebelum pajak konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba/(rugi) masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable of profit/(loss) of the consolidated subsidiaries as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif konsolidasian	23,221,084	12,291,919	*Profit before income tax per consolidated statements of comprehensive income*
Beban pajak sesuai tarif pajak yang berlaku yaitu 22%	5,108,638	2,704,222	*Tax expense at prevailing tax rate of 22%*
Pengaruh pajak atas:			***Tax effect of:***
Penghentian pengakuan pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal	-	6,361,386	*Unrecognised deferred tax on accumulated fiscal losses*
Perubahan tarif pajak	2,673,818	(4,119,525)	*Tax rate adjustment*
Biaya yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Non-deductible expenses*
Kesejahteraan karyawan	313,800	412,912	*Employee welfare*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(797,915)	(389,580)	*Share in net income of associates and joint ventures*
Penyusutan rumah dinas	-	560	*Depreciation of guest house*
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(154,775)	(208,572)	*Interest income subject to final tax*
Bunga obligasi internasional	295,269	312,425	*Interest on global bonds*
Revaluasi aset	796,301	-	*Revaluation of assets*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	1,811,071	1,224,663	*Other non-deductible expenses*
Jumlah	**10,046,207**	**6,298,491**	***Total***

48. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) / *48. INCOME TAX (continued)*

c. Surat ketetapan pajak / *c. Tax assessment letters*

Jenis pajak/*Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal Year*	Surat ketetapan pajak/ *Tax assessment letter*	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ *Dispute amount in IDR* 2021	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ *Dispute amount in IDR* 2020	Status/*Status*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	-	1,748,123	Putusan diterima, pengembalian diterima dari Direktorat Jendral Pajak ("DJP")/ *Verdict accepted, refund received from DJP*
PPh pasal 4 ayat (2)/ *Income tax art 4(2)*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	-	1,097,908	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/ *Verdict accepted, received refund from DJP*
PPN dalam negeri/*Domestic VAT*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	-	1,111,978	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/ *Verdict accepted, refund received from DJP*
PPN pemungut/*VAT collector*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	75,325	578,409	Putusan diterima, permohonan pengembalian ke DJP/ *Verdict accepted, request of refund to DJP*
STP PPN dalam negeri 2016/ *Tax assessment letter domestic VAT 2016*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	-	254,002	Putusan diterima, pengembalian diterima dari DJP/ *Verdict accepted, refund received from DJP*
PPh pasal 21/*Income tax art 21*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	288,991	288,991	Banding/*Appeal*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	912,336	912,336	Banding/*Appeal*
PPh pasal 23/*Income tax art 23*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	189,066	189,066	Banding/*Appeal*
PPh pasal 4 ayat (2)/ *Income tax art 4(2)*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	1,320,606	1,320,606	Banding/*Appeal*
PPN dalam negeri/*Domestic VAT*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	1,455,199	1,455,199	Banding/*Appeal*
PPN pemungut/*VAT collector*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	733,725	733,725	Banding/*Appeal*
PPN pemungut/*VAT collector*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	1,024,941	1,072,402	Banding/*Appeal*
STP PPN dalam negeri 2017/ *Tax assessment letter domestic VAT 2017*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	219,486	219,486	Menunggu hasil banding PPN DN 2017/*Waiting for appeal PPN DN 2017*
PPh pasal 21/*Income tax art 21*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	336,283	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	176,068	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 23/*Income tax art 23*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	2,380,167	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 4 ayat (2)/ *Income tax art 4(2)*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	3,034,000	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 26/*Income tax art 26*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	226,103	-	Keberatan/*Objection*
Bea meterai/*Stamp duty*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	220,863	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 4 ayat (2)/ *Income tax art 4(2)*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	-	78,241	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 26/*Income tax art 26*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	-	4,351	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 21/*Income tax art 21*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	121,325	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	499,208	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 4 ayat (2)/ *Income tax art 4(2)*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	532,139	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 26/*Income tax art 26*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	313,480	-	Keberatan/*Objection*
Bea meterai/*Stamp Duty*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	188,692	-	Keberatan/*Objection*
PPh Badan/*Corporate income tax*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	3,061,305	-	Keberatan/*Objection*
PPN pemungut/*VAT collector*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	1,581,636	-	Keberatan/*Objection*
PPN/*VAT*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	20,110	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	307,089	307,318	Peninjauan kembali/*Judicial review*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	172,520	172,521	Banding/*Appeal*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	162,946	162,947	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	136,172	-	Keberatan/*Objection*
PPh Badan/*Corporate income tax*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	16,094	-	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	161,344	161,345	Banding/Appeal
PPh pasal 23/*Income tax art 23*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	75,775	75,775	Banding/Appeal
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	46,372	46,372	Banding/Appeal
PPh pasal 21/*Income tax art 21*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	-	248	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 21/*Income tax art 21*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	-	1,366	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	35,750	36,014	Banding/*Appeal*
PPh pasal 23/*Income tax art 23*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	19,925	19,925	Banding/*Appeal*
PPh pasal 26/*Income tax art 26*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	60	153	Banding/*Appeal*
PPh pasal 4 ayat (2)/ *Income tax art 4(2)*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	136,071	136,071	Banding/*Appeal*
PPN dalam negeri/*Domestic VAT*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	116	4,609	Banding/*Appeal*
PPN pemungut/*VAT collector*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	-	7,825	Keberatan/*Objection*
PPh pasal 22/*Income tax art 22*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	108,289	-	Keberatan/*Objection*
PPN pemungut/*VAT collector*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	8,967	-	Keberatan/*Objection*
Jumlah/*Total*			**20,298,544**	**12,197,312**	

48. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pada bulan Januari dan Februari 2022, Perusahaan telah menerima beberapa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tahun pajak 2018 sebagai berikut:

***48. INCOME TAX** (continued)*

***c. Tax assessment letters** (continued)*

In January and February 2022, the Company has received several Decrees of the Director General of Taxes concerning Objections to the 2018 Tax Assessment Letters as follows:

Jenis pajak/ *Tax type*	Surat ketetapan pajak/*Tax assessment letter*	Periode pajak/ *Fiscal period*	Nomor Surat Keputusan/ *Number of Decree*	Tanggal surat keputusan/ *Date of Decree*	Hasil/ *Result*
PPh pasal 22/ *Income tax art 22*	Kurang bayar/ *Underpayment*	Januari - Desember/ *January - December* 2018	KEP-00121-00132/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	24 Januari/ *January* 2022	Ditolak/*Rejected*
Bea meterai/ *Stamp duty*	Kurang bayar/ *Underpayment*	Januari - Desember/ *January - December* 2018	KEP-00164-00175/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	8 Februari/ *February* 2022	Dikabulkan sebagian/ *Partially accepted*
PPh pasal 21/ *Income tax art 21*	Kurang bayar/ *Underpayment*	Januari - Desember/ *January - December* 2018	KEP-00189/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	15 Februari/ *February* 2022	Ditolak/*Rejected*
PPh badan/ *CIT*	Nihil/*Nil*	2018	KEP-00190/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	15 Februari/ *February* 2022	Ditolak/*Rejected*
PPh pasal 23/ *Income tax art 23*	Kurang bayar/ *Underpayment*	Desember/*December* 2018	KEP-00192/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	15 Februari/ *February* 2022	Ditolak/*Rejected*
PPh pasal 4 ayat(2)/ *Income tax art 4(2)*	Kurang bayar/ *Underpayment*	Desember/*December* 2018	KEP-00194/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	16 Februari/ *February* 2022	Dikabulkan sebagian/ *Partially accepted*
PPh pasal 26/ *Income tax art 26*	Kurang bayar/ *Underpayment*	Januari, April, Juli/ *January, April, July* 2018	KEP-00195-00197/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	18 Februari/ *February* 2022	Dikabulkan/*Accepted*
PPh pasal 26/ *Income tax art 26*	Kurang bayar/ *Underpayment*	Agustus/*August* 2018	KEP-00198/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	18 Februari/ *February* 2022	Dikabulkan sebagian/ *Partially accepted*
PPh pasal 26/ *Income tax art 26*	Kurang bayar/ *Underpayment*	September - Desember/ *September - December* 2018	KEP-00201-00204/ KEB/PJ/WPJ.19/2022	22 Februari/ *February* 2022	Dikabulkan sebagian/ *Partially accepted*

Pada bulan Maret dan April 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak atas keputusan keberatan sebesar Rp257.502, dengan rincian pengembalian dana atas kelebihan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Desember 2018 sebesar Rp83.443, Bea Meterai masa Januari sampai Desember 2018 sebesar Rp21.522, dan PPh Pasal 26 masa Januari, April, dan Juli sampai Desember 2018 sebesar Rp152.537 melalui penerimaan kas sebesar Rp254.473 dan pemotongan utang pajak sebesar Rp3.029.

In March and April 2022, the Company has received tax refunds regarding the objection decisions amounted to Rp257,502, consisting of refunds for excess Income Tax Art. 4 (2) for the period December 2018 amounted to Rp83,443, Stamp Duty for the period January to December 2018 amounted to Rp21,522 and Income Tax Art. 26 for the period of January, April, and July to December 2018 amounted to Rp152,537 through cash receipts amounted to Rp254,473 and deduction of tax payable amounted to Rp3,029.

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan telah mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 22 tahun pajak 2018.

On April 22, 2022, the Company has submitted the tax appeal regarding the Decrees of the Director General of Taxes concerning Objections to the Tax Assessment Letter for underpayment regarding Income Tax Art. 22 for fiscal year 2018.

Pada tanggal 28 April 2022, Perusahaan telah mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bea Meterai tahun pajak 2018.

On April 28, 2022, the Company has submitted the tax appeal regarding the Decrees of the Director General of Taxes concerning Objections to the Tax Assessment Letter for underpayment regarding Stamp Duty for fiscal year 2018.

Pada tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan telah mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2) tahun pajak 2018.

On May 13, 2022, the Company has submitted the tax appeal regarding the Decrees of the Director General of Taxes concerning Objections to the Tax Assessment Letter for underpayment regarding Income Tax Art. 21, Income Tax Art. 23, Income Tax Art. 26 and Income Tax Art. 4 (2) for fiscal year 2018.

48. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pada tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan telah mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPh Badan tahun pajak 2018.

d. Tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, dengan demikian tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022, serta pengenaan pajak karbon mulai 1 Juli 2022 dengan tarif minimal sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

e. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terhutangnya pajak.

***48. INCOME TAX** (continued)*

***c. Tax assessment letters** (continued)*

On May 13, 2022, the Company has submitted the tax appeal regarding the Decrees of the Director General of Taxes concerning Objections to the Nil Tax Assessment Letter regarding Corporate Income Tax for fiscal year 2018.

d. Tax rates

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%, Taxpayer Voluntary Disclosure Program which starts from January 1 to June 30, 2022, and imposition of a carbon tax which starts from July 1, 2022 at a minimum rate of Rp30 per kilogram of carbon dioxide equivalent to carbon emissions that have a negative impact on the environment.

e. Administration

Based on the taxation laws in Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self-assessment. The DJP may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

49. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN / *49. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE*

	2021	2020	
Laba konsolidasian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	13,128,626	5,950,884	*Consolidated profit for the year attributable to the owners*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan lembar saham)	135,385	122,853	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousand of shares)*
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	**96,972**	**48,439**	***Basic earnings per share attributable to the owners of the parent entity (in Rupiah full amount)***

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, therefore basic earnings per share is the same as the dilutive earnings per share.

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2021	2020*)	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek			***Short-term employee benefit liabilities***
Bonus dan insentif prestasi kerja	6,727,558	6,166,084	*Bonus and performance incentives*
Liabilitas pascakerja jangka pendek	3,593,435	2,793,627	*Post-employment benefits liability-current portion*
Jumlah	**10,320,993**	**8,959,711**	***Total***
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang			***Long-term employee benefit liabilities***
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun	1,246,389	1,413,281	*Pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	13,422,644	12,661,355	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	35,481,478	42,024,517	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	1,530,651	1,303,927	*Other long-term benefits*
Jumlah	**51,681,162**	**57,403,080**	***Total***
Dikurangi: bagian jangka pendek	**3,593,435**	**2,793,627**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**48,087,727**	**54,609,453**	***Long-term portion***
Beban diakui di laba rugi (Catatan 44):			***Expense recognised in profit or loss (Note 44):***
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun manfaat pasti	171,818	88,700	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	1,765,533	2,056,518	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	3,521,835	4,076,884	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	474,171	476,617	*Other long-term benefits*
Jumlah	**5,933,357**	**6,698,719**	***Total***
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			***Remeasurement on defined benefit plan recognised in other comprehensive income:***
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun manfaat pasti	205,065	1,658,810	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	76,624	(913,950)	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	(8,814,818)	(2,660,229)	*Health care benefits*
Jumlah	**(8,533,129)**	**(1,915,369)**	***Total***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 61

*) *As reclassified, see Note 61*

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan manfaat pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 16,20% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Imbalan jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja.

***50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

Defined benefit pension program

The Group established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-20/NB.1/2017 dated April 26, 2017 in relation to the increase in pension benefits provided by the Group's pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 16.20% from basic pension income, respectively.

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for pensioners and their eligible dependents.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

Other long-term benefits

The Group also provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefits.

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

50. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

The principal assumptions used in the calculations of post employment benefits obligation

Tabel mortalita	CSO-58	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*Years*	*Normal retirement age*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which is applied in calculating the long-term benefits liability recognised within the consolidated statements of financial position.

Perhitungan aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") yang terdaftar yaitu KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan (sebelumnya PT Binaputera Jaga Hikmah) dalam laporannya masing-masing tertanggal 26 April 2022 dan 18 April 2021.

The actuarial calculations of pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended December 31, 2021 and 2020 were calculated by a registered Actuarial Consulting Firm ("KKA"), KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan (formerly PT Binaputera Jaga Hikmah), based on its reports dated April 26, 2022 and April 18, 2021, respectively.

Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

The Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profiles. In the study, the Group has considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, and TMI-2019. Based on the study, the Group found that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners is CSO-58.

i. Program pensiun

i. Pension program

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

The liability recognised in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

	2021	**2020**	
Nilai kini kewajiban yang didanai	10,463,943	10,321,138	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(9,217,554)	(8,907,857)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**1,246,389**	**1,413,281**	***Liability in the consolidated statement of financial position***

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

i. Program pensiun (lanjutan) / ***i. Pension program*** *(continued)*

Pergerakan kewajiban program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit pension program obligation over the year is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	10,321,138	9,420,639	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	132,184	136,573	*Current service cost*
Biaya bunga	726,946	707,402	*Interest expense*
	859,130	843,975	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	134,885	67,229	*Loss from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial dari perubahan kombinasi asumsi	-	13,819	*Actuarial loss from combination of changes in assumptions*
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	28,083	831,326	*Experience loss*
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(6,755)	*Gain from change in demographic assumptions*
	162,968	905,619	
Pembayaran manfaat	(898,326)	(849,095)	*Benefit payments*
Liabilitas yang diambil alih melalui kombinasi bisnis	19,033	-	*Liabilities assumed in business combination*
Saldo akhir	**10,463,943**	**10,321,138**	***Ending balance***

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets over the year is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	8,907,857	9,144,196	*Beginning balance*
Imbal hasil atas aset program	644,386	709,711	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	550,454	610,672	*Employer's contributions*
Iuran pekerja	42,926	45,564	*Employee contributions*
Pembayaran manfaat	(898,326)	(849,095)	*Benefit payments*
Kerugian aktuarial pada aset program	(42,097)	(753,191)	*Actuarial loss on plan assets*
Kombinasi bisnis (Catatan 5)	12,354	-	*Business combination (Note 5)*
Saldo akhir	**9,217,554**	**8,907,857**	***Ending balance***

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

i. Program pensiun (lanjutan) / *i. Pension program (continued)*

Aset program terdiri dari: / *Plan assets comprise the following:*

	2021				2020				
	Dikutip/ *Quoted*	Tidak dikutip/ *Unquoted*	Jumlah/ *Total*	%	Dikutip/ *Quoted*	Tidak dikutip/ *Unquoted*	Jumlah/ *Total*	%	
Tabungan dan deposito									***Savings and time deposits***
Tabungan	-	96,310	96,310	1.04%	-	90,298	90,298	1.01%	*Saving accounts*
Deposito on call	-	18,005	18,005	0.20%	-	25,850	25,850	0.29%	*On call deposits*
Deposito berjangka	-	324,900	324,900	3.52%	-	796,800	796,800	8.94%	*Time Deposits*
Instrumen ekuitas									***Equity instruments***
Surat Berharga Negara	1,850,709	-	1,850,709	20.08%	1,281,317	-	1,281,317	14.38%	*Government Securities*
Saham	638,255	-	638,255	6.92%	919,701	-	919,701	10.32%	*Stocks*
Instrumen utang									***Debt instruments***
Obligasi	2,649,476	-	2,649,476	28.74%	2,551,466	-	2,551,466	28.64%	*Corporate bonds*
Sukuk	383,980	-	383,980	4.17%	25,178	-	25,178	0.28%	*Sukuk*
Unit penyertaan reksa dana	896,400	-	896,400	9.72%	1,077,222	-	1,077,222	12.09%	*Investment units of mutual funds*
Efek beragunan aset	8,996	-	8,996	0.10%	20,179	-	20,179	0.23%	*Asset backed securities*
Penempatan langsung	-	975,923	975,923	10.59%	-	938,385	938,385	10.53%	*Direct placement*
Properti									***Property***
Tanah dan hak atas tanah	-	117,095	117,095	1.27%	-	117,095	117,095	1.31%	*Land and land rights*
Bangunan	-	412,089	412,089	4.47%	-	412,089	412,089	4.63%	*Buildings*
Tanah dan bangunan	-	604,594	604,594	6.56%	-	420,995	420,995	4.73%	*Land and buildings*
Lain-lain	-	240,822	240,822	2.62%	-	231,282	231,282	2.62%	*Others*
Jumlah	**6,427,816**	**2,789,738**	**9,217,554**	**100.00%**	**5,875,063**	**3,032,794**	**8,907,857**	**100.00%**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut: / *The principal actuarial assumptions used were as follows:*

	2021	2020	
Tingkat diskonto	6.66% - 7.59%	7.34% - 7.83%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	5.00%	5.00%	*Pension benefit increase rate*

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.237.766 dan Rp1.365.947. / *Expected contributions to post-employment benefit plans for the years ended December 31, 2021 and 2020 are Rp1,237,766 and Rp1,365,947, respectively.*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut: / *The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:*

	Dampak atas kewajiban manfaat pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(190,136)	174,663	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	173,033	(190,863)	*Salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban manfaat pasti kesehatan atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban manfaat pasti kesehatan dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. / *The sensitivity analyses are based on a change in an actuarial assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting year) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.*

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

ii. Imbalan pascakerja lainnya / ***ii. Other post-employment benefits***

Pergerakan kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the other post-employment benefits obligation over the year is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	12,661,355	12,946,513	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	879,587	945,846	*Current service cost*
Biaya bunga	892,340	981,477	*Interest expense*
Biaya jasa lalu	1,443	128,382	*Past service cost*
Imbal hasil atas aset program	(7,837)	813	*Return on plan assets*
	1,765,533	2,056,518	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(329,948)	(1,225,766)	*Experience gains*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	409,272	342,260	*Loss from change in financial assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	(2,693)	(21,443)	*Gain from combination of changes in assumptions*
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(7)	(9,001)	*Gain from change in demographic assumptions*
	76,624	(913,950)	
Pembayaran manfaat	(1,083,748)	(1,427,726)	*Benefit payments*
Liabilitas yang diambil alih melalui kombinasi bisnis	2,880	-	*Liabilities assumed in business combination*
Saldo akhir	**13,422,644**	**12,661,355**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7.12% - 7.60%	7.01% - 7.82%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	1.00% - 7.12%	6.50% - 8.51%	*Rate of salary increase per annum*

Sensitivitas dari imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas imbalan pascakerja lainnya/ *Impact on other post-employment benefits*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(1,180,259)	1,556,545	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	1,590,922	(1,231,697)	*Salary growth rate*

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

***50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan

Grup memiliki beberapa skema imbalan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

Pergerakan kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

iii. Health care benefits

The Group operates a number of post-employment medical benefit schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

The movement in the health care benefits obligation over the year is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	42,024,517	41,796,191	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	477,856	742,441	*Current service cost*
Biaya bunga	3,043,979	3,223,527	*Interest expense*
Biaya jasa lalu	-	110,916	*Past service cost*
	3,521,835	4,076,884	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(8,505,354)	2,456,797	*(Gain)/loss from change in financial assumptions*
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(517,226)	(4,981,221)	*Experience gains*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	207,762	(14,304)	*Loss/(gain) from combination of changes in assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(121,501)	*Gain from change in demographic assumptions*
	(8,814,818)	(2,660,229)	
Pembayaran manfaat	(1,250,056)	(1,188,329)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**35,481,478**	**42,024,517**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7.41% - 7.60%	7.34% - 7.83%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	5.35%	7.00%	*Future health cost increase*

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan (lanjutan) / ***iii. Health care benefits*** *(continued)*

Sensitivitas dari imbalan pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas imbalan pemeliharaan kesehatan/ *Impact on health care benefits*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(3,934,363)	4,844,888	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	4,892,398	(4,030,873)	*Medical inflation rate*

iv. Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***iv. Other long-term benefits***

Pergerakan kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the other long-term benefits obligation over the year is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	1,303,927	1,051,578	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	387,652	403,536	*Current service cost*
Biaya bunga	86,519	73,081	*Interest expense*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(36,665)	*Gain from change in demographic assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	80,279	10,148	*Loss from change in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(80,534)	26,739	*Experience (gains)/losses*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	255	(222)	*Loss/(gain) from combination of changes in assumptions*
	474,171	476,617	
Pembayaran manfaat	(247,905)	(224,268)	*Benefit payments*
Liabilitas yang diambil alih melalui kombinasi bisnis	458	-	*Liabilities assumed in business combination*
Saldo akhir	**1,530,651**	**1,303,927**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	4.41% - 7.60%	7.14% - 7.70%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6.31% - 7.12%	6.50% - 8.51%	*Rate of salary increase per annum*

Sensitivitas dari imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term benefits po changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term benefits*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(37,504)	39,765	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	41,705	(40,045)	*Salary growth rate*

50. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve*. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Grup menempatkan investasi aset program pada beragam jenis aset investasi agar dapat terdiversifikasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak kinerja buruk dari satu aset terhadap seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen ekuitas, meskipun Grup juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Grup meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti untuk program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah 8,96 tahun, 17,24 tahun, 14,66 tahun dan 3,79 tahun secara berurutan.

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***50. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

The Group places its investment plan assets in various types of investment assets so that it can be properly diversified to minimise the impact of the bad performance of one asset on all asset groups. The largest proportion of assets is invested in equities, although the Group also invests in property, bonds, mutual funds and cash. The Group believes that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Life expectancy

Life expectancy the majority of the plans' obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

The weighted average duration of the defined benefit obligations for pension program, other post-employment benefits program, health-care benefits, and other long-term benefits are 8.96 years, 17.24 years, 14.66 years and 3.79 years, respectively.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the Job Creation Law or Labour Law.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	Antara 1 - 2 tahun/ *Between 1 - 2 years*	Antara 2 - 5 tahun/ *Between 2 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/*Total*	
Program pensiun manfaat pasti	917,731	939,791	3,001,175	12,523,638	17,382,335	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	1,109,217	1,051,168	4,120,985	154,378,913	160,660,283	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,512,058	1,585,693	5,241,392	112,060,580	120,399,723	*Health care benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	54,429	58,514	484,565	975,083	1,572,591	*Other long-term benefits*
Jumlah	**3,593,435**	**3,635,166**	**12,848,117**	**279,938,214**	**300,014,932**	***Total***

51. INFORMASI ARUS KAS / *51. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas / *a. Non-cash transactions*

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Group's liabilities arising from investing and financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flow were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statements of cash flows as cash flows from financing activities.

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas adalah sebagai berikut:

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activities are as follows:

	2021	2020	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:			***Non-cash investing and financing activities:***
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui penarikan pinjaman dan utang proyek	14,579,540	25,821,329	*Additions to property, plant and equipment and construction in progress through drawdown of loans and project cost payables*
Penambahan aset hak guna melalui utang sewa	2,284,778	7,685,515	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito berjangka	23,347	-	*Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from time deposits*
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito jangka panjang	122,111	-	*Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from long-term time deposits*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan / *b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions*)***	**Pembayaran/ *Repayments***	**Perubahan lainnya/ *Other changes***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Penerusan pinjaman	38,534,971	894,658	(3,044,547)	(1,685,877)	34,699,205	*Two-step loans*
Utang kepada lembaga keuangan Pemerintah non-bank	4,399,146	8,423	(750,000)	28,608	3,686,177	*Non-bank Government financial institution loans*
Utang bank	173,306,708	34,828,400	(41,168,011)	(1,080,688)	165,886,409	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	207,820,308	-	(15,166,000)	500,727	193,155,035	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang sewa	18,486,303	2,284,778	(4,765,662)	(963,476)	15,041,943	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	6,525,831	-	(434,255)	77,180	6,168,756	*Electricity purchase payables*
Utang KIK - EBA	1,526,949	-	(883,666)	(73,705)	569,578	*KIK - EBA loans*
Jumlah	**450,600,216**	**38,016,259**	**(66,212,141)**	**(3,197,231)**	**419,207,103**	***Total***

*) Termasuk penambahan utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non-bank dari akuisisi EMI

**) Including additions of government and non-bank government financial institution loans from acquisitions of EMI*

51. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan) / *51. CASH FLOW INFORMATION (continued)*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (lanjutan) / ***b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities** (continued)*

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pembayaran/ *Repayments*	Perubahan lainnya/ *Other changes*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Penerusan pinjaman	37,977,546	2,102,313	(3,040,001)	1,495,113	38,534,971	*Two-step loans*
Utang kepada lembaga keuangan Pemerintah non-bank	5,403,362	-	(1,043,793)	39,577	4,399,146	*Non-bank Government financial institution loans*
Utang bank	205,717,158	28,945,309	(64,347,822)	2,992,063	173,306,708	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	181,238,776	29,994,565	(6,946,478)	3,533,445	207,820,308	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang sewa	14,109,484	7,685,515	(3,938,744)	630,048	18,486,303	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	6,830,906	-	(418,748)	113,673	6,525,831	*Electricity purchase payables*
Utang KIK - EBA	1,941,262	-	(909,480)	495,167	1,526,949	*KIK - EBA loans*
Jumlah	**453,218,494**	**68,727,702**	**(80,645,066)**	**9,299,086**	**450,600,216**	***Total***

52. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI / *52. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

Sifat hubungan berelasi / ***Nature of related parties***

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
c. Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 9).
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

a. The Government is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and SOE.
b. The Company is related to other SOE owned by the Ministry of Finance.
c. The Group has significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 9).
d. The Board of Commissioners and Directors are members of the key management of the Group.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: / *Below is the list of related parties that engage in transactions with the Group:*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
Pemerintah Republik Indonesia/ *Government of the Republic of Indonesia* ("Pemerintah")	Pemegang saham akhir/ *Ultimate shareholder*	Penerimaan subsidi listrik dan kompensasi, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah/ *Receipt of electricity subsidy and compensation, two step loan and Government loans*
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ *Placement of restricted cash in banks and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investments, and receipt of bank loans*
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ *Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, short-term investments, and receipt of bank loans*
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank/ *Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans*
Bank DKI	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/*Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans*
Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/*Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans*
BTN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/*Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans*
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/*Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans*
LPEI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penerimaan utang bank/*Receipt of bank loans*

52. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***52. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

***Nature of related parties** (continued)*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi dan saldo/ *Nature of transaction and balance*
PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
Pertamina	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar batubara/ *Purchase of coal*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas*
NR	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("AJI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ *Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels*
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
SMI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ *Receipt of non-bank government financial institution loans*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ *Receipt of non-bank government financial institution loans*
GDE	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
TJK	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
DEB	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
MEB	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
S2P	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
BDSN	Ventura bersama/*Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
Komipo PJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang/ *Purchase of electricity and issuance of long-term loans*
BPI	Ventura bersama/*Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
SGPJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
PDG	Ventura bersama/*Joint venture*	Pemberian pinjaman jangka panjang/ *Issuance of long-term loans*
REP	Ventura bersama/*Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/*Purchase of electricity*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WK")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Wika")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services*
Pemerintah Daerah	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/*Government related entity*	Utang lain-lain/ *Other payables*

52. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

52. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi:

Details of transactions and balances with related parties:

	Catatan/ *Notes*	2021 Rp	2021 %*)	2020 Rp	2020 %*)	
Piutang pihak berelasi	**10**					***Receivables from related parties***
SGPJB		806,425	0.05	797,169	0.05	*SGPJB*
REP		358,699	0.02	333,984	0.02	*REP*
PDG		114,012	0.01	179,464	0.01	*PDG*
PMSE		9,632	0.00	-	-	*PMSE*
Lain-lain		54,379	0.00	75,382	0.00	*Others*
Subjumlah		1,343,147	0.08	1,385,999	0.08	*Subtotal*
Rekening bank dibatasi penggunaannya	**11**					***Restricted cash in banks***
BRI		160,792	0.01	60,648	0.00	*BRI*
Bank Mandiri		53,827	0.00	50,880	0.00	*Bank Mandiri*
BNI		10,902	0.00	9,264	0.00	*BNI*
BPD Jatim		268	0.00	-	-	*BPD Jatim*
Subjumlah		225,789	0.01	120,792	0.00	*Subtotal*
Kas dan setara kas	**13**					***Cash and cash equivalents***
BNI		13,048,674	0.81	15,637,907	0.98	*BNI*
Bank Mandiri		12,233,680	0.76	16,452,948	1.04	*Bank Mandiri*
BRI		9,584,552	0.59	13,489,857	0.85	*BRI*
BTN		587,275	0.04	2,619,238	0.16	*BTN*
Bank DKI		174,667	0.01	627,863	0.04	*Bank DKI*
BSI		231,279	0.01	-	-	*BSI*
Subjumlah		35,860,127	2.22	48,827,813	3.07	*Subtotal*
Investasi jangka pendek	**14**					***Short-term investments***
BRI		260,000	0.02	339,069	0.02	*BRI*
BNI		30,229	0.00	-	-	*BNI*
Bank Mandiri		103	0.00	20,000	0.00	*Bank Mandiri*
Subjumlah		290,332	0.02	359,069	0.02	*Subtotal*
Piutang usaha	**15**					***Trade receivables***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah		2,280,440	0.14	1,891,306	0.12	*Government related entities*
Piutang dari Pemerintah	**16**	26,554,891	1.65	18,094,557	1.14	***Receivables from Government***
Jumlah		**66,554,726**	**4.12**	**70,679,536**	**4.43**	***Total***
Penerusan pinjaman	**24**	34,699,205	5.49	38,534,971	5.94	***Two-step loans***
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	**25**					***Government and non-bank Government financial institution loans***
SMI		3,677,754	0.58	4,399,146	0.68	*SMI*
Pemerintah Republik Indonesia		1,202,263	0.19	1,666,967	0.26	*Government of the Republic of Indonesia*
PPA		8,423	0.00	-	-	*PPA*
Subjumlah		4,888,440	0.77	6,066,113	0.94	*Subtotal*
Utang bank	**27**					***Bank loans***
BRI		12,048,598	1.91	16,182,625	2.49	*BRI*
Bank Mandiri		11,012,442	1.74	14,782,307	2.28	*Bank Mandiri*
SMI		4,728,074	0.75	6,448,807	0.99	*SMI*
BNI		4,029,987	0.64	4,312,343	0.66	*BNI*
LPEI		3,314,280	0.52	2,758,922	0.43	*LPEI*
BSI		2,526,030	0.52	2,758,922	0.43	*BSI*
BTN		1,500,000	0.24	1,500,000	0.23	*BTN*
Bank DKI		616,071	0.10	780,357	0.12	*Bank DKI*
BPD Papua		518,422	0.08	524,642	0.08	*BPD Papua*
Bank Jateng		107,143	0.02	135,714	0.02	*Bank Jateng*
BPD Aceh		53,571	0.01	67,857	0.01	*BPD Aceh*
Bank Kalteng		53,571	0.01	67,857	0.01	*Bank Kalteng*
Bank Riau		53,571	0.01	67,857	0.01	*Bank Riau*
Bank Kalbar		53,571	0.01	67,857	0.01	*Bank Kalbar*
BPD Bali		40,179	0.01	50,893	0.01	*BPD Bali*
Bank BJB		22,807	0.00	-	-	*Bank BJB*
BSM		-	0.00	1,292,892	0.20	*BSM*
BRI Syariah		-	0.00	101,276	0.02	*BRI Syariah*
BNI Syariah		-	0.00	751,276	0.12	*BNI Syariah*
Subjumlah		40,678,317	6.45	49,893,482	7.69	*Subtotal*
Utang pihak berelasi	**30**					***Payable to related party***
PDG		-	-	9,432	0.00	*PDG*
Utang usaha	**31**					***Trade payables***
Pertamina		10,176,188	1.61	1,331,938	0.21	*Pertamina*
S2P		2,207,233	0.35	2,036,041	0.31	*S2P*
SGPJB		1,815,259	0.29	1,009,299	0.16	*SGPJB*
Pertagas		1,797,585	0.28	1,034,735	0.16	*Pertagas*
PTBA		1,110,309	0.18	747,095	0.12	*PTBA*
PGE		899,346	0.14	1,105,288	0.17	*PGE*
PGN		532,523	0.08	609,040	0.09	*PGN*
NR		111,259	0.02	488,432	0.08	*NR*
Lain-lain (masing - masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha)						*Others (each below 5% of total trade payables)*
Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia		1,022,114	0.16	1,180,599	0.18	*Control through the Government of the Republic of Indonesia*
Ventura Bersama		569,118	0.09	448,431	0.07	*Joint ventures*
Entitas asosiasi		325,699	0.05	172,314	0.03	*Associates*
Subjumlah		20,566,633	3.25	10,163,212	1.58	*Subtotal*

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) *Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses*

52. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

52. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi: (lanjutan)

***Details of transactions and balances with related parties:** (continued)*

	Catatan/ *Notes*	2021 Rp	2021 %*)	2020 Rp	2020 %*)	
Utang lain-lain	**32**					***Other payable***
WK		2,308,042	0.37	1,740,035	0.27	*WK*
Pemerintah Daerah		2,188,109	0.35	1,911,700	0.29	*Local Government*
Wika		537,942	0.09	949,461	0.15	*Wika*
Lainnya		383,578	0.06	510,249	0.08	*Others*
Subjumlah		5,417,671	0.87	5,111,445	0.79	*Subtotal*
Biaya masih harus dibayar	**34**					***Accrued expenses***
Bunga dan beban keuangan						*Interest and financing charges*
Penerusan pinjaman		253,127	0.04	287,522	0.04	*Two-step loans*
Utang bank						*Bank loans*
Bank Mandiri		92,030	0.01	163,148	0.03	*Bank Mandiri*
BRI		43,418	0.01	99,647	0.02	*BRI*
SMI		32,583	0.01	67,858	0.01	*SMI*
BNI		31,698	0.01	49,137	0.01	*BNI*
BTN		1,777	0.00	1,893	0.00	*BTN*
Bank DKI		539	0.00	723	0.00	*Bank DKI*
LPEI		3,230	0.00	30,335	0.00	*LPEI*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga Keuangan Pemerintah non-bank		-	-	59,719	0.01	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Lainnya		1,396	0.00	1,581	0.00	*Others*
Subjumlah		459,798	0.08	761,563	0.12	*Subtotal*
Jumlah		**106,710,064**	**16.91**	**110,540,218**	**17.06**	***Total***
Penjualan tenaga listrik	**37**					***Sale of electricity***
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah		17,884,988	6.19	17,127,270	6.23	*Government related entities*
Subsidi listrik Pemerintah	**38**	**49,796,949**	**100.00**	**47,988,114**	**100.00**	***Government electricity subsidy***
Pendapatan kompensasi	**16**	**24,594,425**	**100.00**	**17,904,508**	**100.00**	***Compensation income***
Beban bahan bakar dan pelumas	**40**					***Fuel and lubricants expenses***
Pertamina		17,865,526	15.09	17,817,108	16.81	*Pertamina*
NR		5,393,114	4.55	6,786,937	6.40	*NR*
PGN		6,101,339	5.15	8,137,852	7.68	*PGN*
PTBA		5,231,289	4.42	5,290,977	4.99	*PTBA*
Jumlah		34,591,268	29.21	38,032,874	35.88	*Total*
Beban pembelian tenaga listrik	**41**					***Purchased electricity expenses***
S2P		12,227,323	11.81	12,818,397	13.32	*S2P*
SGPJB		8,117,710	7.84	5,054,423	5.25	*SGPJB*
PGE		2,592,940	2.50	2,993,613	3.11	*PGE*
BPI		1,327,640	1.28	1,024,354	1.06	*BPI*
GDE		894,908	0.86	880,641	0.91	*GDE*
BDSN		891,808	0.86	872,218	0.91	*BDSN*
TJK		480,139	0.46	499,208	0.52	*TJK*
REP		234,312	0.23	236,145	0.25	*REP*
DEB		191,326	0.18	190,498	0.20	*DEB*
Perum Jasa Tirta		186,638	0.18	214,807	0.22	*Perum Jasa Tirta*
MEB		48,193	0.05	48,906	0.05	*MEB*
Jumlah		27,192,937	26.25	24,833,210	25.80	*Total*
Beban pemeliharaan	**43**					***Maintenance expenses***
Komipo PJB		1,462,484	6.47	205,449	0.94	*Komipo PJB*
Beban usaha lain-lain	**45**					***Other operating expenses***
Asuransi						*Insurance*
AJI		456,366	6.30	247,887	3.44	*AJI*
Beban keuangan	**46**					***Finance costs***
Utang bank		2,411,989	11.84	4,487,159	16.37	*Bank loans*
Penerusan pinjaman		646,372	3.17	941,948	3.44	*Two-step loans*
Instrumen derivatif		756,338	3.71	910,220	3.32	*Derivative instruments*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga Keuangan Pemerintah non-bank		249,335	1.22	303,784	1.11	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Jumlah		4,064,034	19.94	6,643,111	24.24	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) *Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses*

52. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp68.679 dan Rp25.957.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp159.589 dan Rp62.937.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Grup ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 50.

52. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Total compensation of the Company's Board of Commissioners for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp68,679 and Rp25,957, respectively.

Total compensation of the Company's Board of Directors for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp159,589 and Rp62,937, respectively.

All the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

Information about the contributions made by the Group to DP-PLN is disclosed in Note 50.

53. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

53. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As at December 31, 2021 and 2020, the Group had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2021				
	JPY*)	USD*)	EUR*)	Lain-lain/ *Others***)	
Aset moneter					***Monetary assets***
Kas dan setara kas	1,487,378,556	493,466,308	19,376,891	3,535,211	*Cash and cash equivalents*
Piutang pihak berelasi	-	89,293,682	-	-	*Receivables from related parties*
Rekening bank dibatasi penggunaannya	32,606,787,926	62,503,640	-	-	*Restricted cash in banks*
Jumlah aset moneter*)	34,094,166,482	645,263,630	19,376,891	3,535,211	*Total monetary assets*)*
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	151,461,016,318	1,103,669,420	12,708,786	1,884,757	*Two-step loans*
Utang sewa	62,874,000,998	43,067,554	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank	85,876,011,874	6,020,925,730	889,320,094	-	*Bank loans*
Utang obligasi, sukuk ijarah dan KIK EBA	23,200,000,000	10,188,312,000	1,000,000,000	-	*Bonds payable, sukuk ijara and KIK EBA*
Utang listrik swasta	-	432,318,795	-	-	*Electricity purchase payables*
Utang lain-lain	5,397,407,034	256,920,608	51,704,167	-	*Other payables*
Utang biaya proyek	63,222,291	6,285,354	180,550	-	*Project cost payables*
Utang usaha	-	1,627,546,149	-	13,474,124	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	7,631,184,204	158,563,272	6,206,804	15,788	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter*)	336,502,842,719	19,837,608,882	1,960,120,401	15,374,669	*Total monetary liabilities*)*
Liabilitas moneter bersih*)	(302,408,676,237)	(19,192,345,252)	(1,940,743,510)	(11,839,458)	*Net monetary liabilities*)*
Ekuivalen dalam jutaan Rupiah	**(37,465,350)**	**(273,855,574)**	**(31,297,982)**	**(168,937)**	***Equivalent in millions of Rupiah***
Jumlah bersih - dalam jutaan Rupiah	**(342,787,843)**				***Net total - in millions of Rupiah***

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara USD dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date*

53. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

53. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

	2020				
	JPY*)	USD*)	EUR*)	Lain-lain/ *Others***)	
Aset moneter					***Monetary assets***
Piutang pihak berelasi	-	69,134,824	-	-	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	36,920,916,571	49,910,033	-	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	4,698,822,769	488,164,220	14,300,021	150,293	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	-	2,403,261	-	-	*Short-term investments*
Jumlah aset moneter*)	41,619,739,340	609,612,338	14,300,021	150,293	*Total monetary assets*)*
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	154,085,810,829	1,232,260,546	14,335,516	4,391,350	*Two-step loans*
Utang sewa	84,338,220,555	52,718,936	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank	57,450,951,627	5,604,729,583	891,596,493	-	*Bank loans*
Utang obligasi, sukuk ijarah dan KIK EBA	23,200,000,000	11,188,312,000	1,000,000,000	-	*Bonds payable, sukuk ijara and KIK EBA*
Utang listrik swasta	-	462,660,786	-	-	*Electricity purchase payables*
Utang lain-lain	11,404,973,409	476,038,606	77,940,621	7,801,010	*Other payables*
Utang biaya proyek	161,991,446	6,602,978	328,718	-	*Project cost payables*
Utang usaha	-	1,005,095,950	-	7,940,980	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	5,825,213,651	163,432,293	6,191,197	42,613	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter*)	336,467,161,517	20,191,851,678	1,990,392,545	20,175,953	*Total monetary liabilities*)*
Liabilitas moneter bersih*)	(294,847,422,177)	(19,582,239,340)	(1,976,092,524)	(20,025,660)	*Net monetary liabilities*)*
Ekuivalen dalam jutaan Rupiah	**(40,238,270)**	**(276,207,486)**	**(34,245,881)**	**(282,462)**	***Equivalent in millions of Rupiah***
Jumlah bersih - dalam jutaan Rupiah	**(350,974,099)**				***Net total - in millions of Rupiah***

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara USD dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date*

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 20 Mei 2022, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Grup akan mengalami kenaikan sebesar Rp4.958.577 (2020: kenaikan sebesar Rp4.547.875).

If assets and liabilities in foreign currencies as at December 31, 2021 had been translated using the closing rates at issuance of May 20, 2022, the total net foreign currency liabilities of the Group would have been increased by Rp4,958,577 (2020: increased by Rp4,547,875).

54. SEGMEN OPERASI

Informasi wilayah geografis

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasikan sebagai pengambil keputusan operasional utama Grup, dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif operasi geografis yang terdiri dari Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku dan Papua.

54. OPERATING SEGMENTS

Geographical information

The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors, which has been identified as the Group's chief operating decision maker and which makes strategic decisions. The Board of Directors considers the business operations from the geographical consist of Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi and Maluku and Papua.

54. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *54. OPERATING SEGMENTS (continued)*

Informasi wilayah geografis (lanjutan) / ***Geographical information** (continued)*

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, rinciannya adalah sebagai berikut:

For management reporting purposes, as at December 31, 2021 and 2020, the Group is divided into the geographical areas of Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua. These geographical operations are the basis on which the Group reports segment information, with the following details:

	2021						
	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	40,616,465	300,266,454	13,939,628	10,821,525	2,530,198	368,174,270	*External revenue*
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-	-	*Inter-segment revenue*
Jumlah pendapatan usaha	40,616,465	300,266,454	13,939,628	10,821,525	2,530,198	368,174,270	*Total revenue*
Hasil segmen							***Segment results***
Beban usaha	31,184,990	225,980,246	11,851,842	9,112,896	3,547,880	281,677,854	*Operating expenses*
Beban penyusutan	8,428,717	27,265,469	2,606,643	2,211,720	928,722	41,441,271	*Depreciation expenses*
Laba/(rugi) usaha	1,002,758	47,020,739	(518,857)	(503,091)	(1,946,404)	45,055,145	*Operating profit/(loss)*
(Beban)/penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan	140,555	940,589	157,466	50,316	261,950	1,550,876	*Unallocated (expenses)/revenue*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	412,813	2,819,017	(671)	-	-	3,231,159	*Share in net income of associates and joint ventures*
Penghasilan keuangan	15,684	771,196	351	-	-	787,231	*Finance income*
Beban keuangan	(2,899,587)	(15,856,362)	(755,437)	(663,043)	(201,326)	(20,375,755)	*Finance costs*
Penurunan nilai aset tetap	(534,108)	(454,583)	(263,562)	(434,839)	(821,243)	(2,508,335)	*Provision for impairment of property plant and equipment*
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak	-	(4,519,237)	-	-	-	(4,519,237)	*Allowance for uncertainty over tax treatment*
Beban pajak	(628,657)	(9,349,040)	(68,510)	-	-	(10,046,207)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) bersih	**(2,490,542)**	**21,372,319**	**(1,449,220)**	**(1,550,657)**	**(2,707,023)**	**13,174,877**	***Profit/(loss) for the year***
Aset segmen							***Segment assets***
Jumlah aset konsolidasian	286,951,543	1,130,134,788	89,597,084	77,755,638	28,777,403	1,613,216,456	*Total consolidated assets*
Liabilitas segmen							***Segment Liabilities***
Jumlah liabilitas konsolidasian	279,265,620	147,252,735	91,308,439	78,313,229	35,469,310	631,609,333	*Total consolidated liabilities*

	2020						
	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	40,921,170	280,720,716	11,499,288	9,833,702	2,440,761	345,415,637	*External revenue*
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-	-	*Inter-segment revenue*
Jumlah pendapatan usaha	40,921,170	280,720,716	11,499,288	9,833,702	2,440,761	345,415,637	*Total revenue*
Hasil segmen							***Segment results***
Beban usaha	30,990,156	211,487,315	9,191,085	7,448,956	2,748,073	261,865,585	*Operating expenses*
Beban penyusutan	6,186,133	29,047,271	1,830,227	1,503,693	575,256	39,142,580	*Depreciation expenses*
Laba/(rugi) usaha	3,744,881	40,186,130	477,976	881,053	(882,568)	44,407,472	*Operating profit/(loss)*
(Beban)/penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan	(1,168,197)	(7,009,706)	7,587	216,637	54,473	(7,899,206)	*Unallocated (expenses)/revenue*
Bagian atas labar bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	198,606	1,871,894	3,520	-	-	2,074,020	*Share in net income of associates and joint bentures*
Penghasilan keuangan	18,234	1,106,600	685	-	-	1,125,519	*Finance income*
Beban keuangan	(3,357,747)	(22,059,595)	(956,613)	(784,082)	(257,849)	(27,415,886)	*Finance costs*
Penurunan nilai aset tetap	-	-	-	-	-	-	*Provision for impairment of property plant and equipment*
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak						-	*Allowance for uncertainty over tax treatment*
Beban pajak	43,605	(6,327,182)	(14,914)	-	-	(6,298,491)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) bersih	**(520,618)**	**7,768,141**	**(481,759)**	**313,608**	**(1,085,944)**	**5,993,428**	***Profit/(loss) for the year***
Aset segmen							***Segment assets***
Jumlah aset konsolidasian	284,561,500	1,118,103,838	84,838,936	73,464,390	28,091,117	1,589,059,781	*Total consolidated assets*
Liabilitas segmen							***Segment Liabilities***
Jumlah liabilitas konsolidasian	274,087,913	186,655,451	85,359,933	72,815,193	30,328,699	649,247,189	*Total consolidated liabilities*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI / *55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memiliki perjanjian penting sebagai berikut:

As at December 31, 2021, the Group has significant agreements, as follows:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar / *a. Fuel supply agreements*

Gas / *Gas*

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity*
Muara Karang – Priok	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	2004-2022	Bbtu	679,954
Cilegon	PGN	2019-2030	Bbtu	32,531
Muara Karang			Bbtu	29,557
Muara Tawar			Bbtu	38,910
Tanjung Priok			Bbtu	65,005
Sutami			Bbtu	2,683
MPP 100 MW Lampung			Bbtu	15,387
Talang Duku			Bbtu	2,482
New Tarahan			Bbtu	1,168
Muara Tawar Payo Selincah Rengat Siberida Duri Kotogasib	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	2019-2022*)	Bbtu	42,720
Keramasan Inderalaya Borang	PT Medco E&P Indonesia PT Medco E&P Lematang	2017-2027	Bbtu	70,260
Gresik Grati	Kangean Energy Indonesia Ltd.	2012-2027	Bbtu	371,000
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2022*)	Bbtu	540,376
Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd.	2006-2026	Bbtu	440,000
Teluk Lembu PLTGU Riau, Balai Pungut	EMP Korinci Baru Ltd.	2021-2022*)	Bbtu	11,610
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2022*)	Bbtu	35,012
Payo Selincah Sei Gelam	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2023	Bbtu	137,579
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2022*)	Bbtu	7,739
Nunukan	PT Pertamina EP	2012-2022	Bbtu	5,660
Bontang Tanjung Batu	PT Pertamina (Persero)	2022	Bbtu	2,190
Batam	PGN	2004-2023	Bbtu	72,270
Grati	PT Medco Sampang (Lapangan Oyong)	2012-2022	Bbtu	55,827
Bangkanai	Medco Indonesia (Bangkanai) Ltd.	2013-2033	Bbtu	130,000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	2012-2022	Bbtu	51,945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2018-2024	Bbtu	29,244
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2014-2029	Bbtu	219,000
Grati	PT Medco Sampang (Lapangan Wortel)	2012-2022	Bbtu	55,827
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	Bbtu	280,100
Melibur	PT Energi Mega Persada Malacca Strait	2020-2025	Bbtu	711
Tarakan	PT Medco E&P Tarakan PT Medco E&P Indonesia	2022	Bbtu	1,095
Muara Karang Priok Muara Tawar	PT Nusantara Regas	2012-2022	Kargo	191
Pulau Bunyu Kaltim	PT Pertamina EP	2012-2022*)	Bbtu	609
Gresik dan Grati	Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd.	2013-2022	Bbtu	57,795
Purwodadi	PT Energasindo Heksa Karya	2019-2022	Bbtu	1,693
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	2013-2023	Bbtu	46,468

*) Kontrak ini masih dalam proses perpanjangan./*The contract is still in the process of amendment.*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut: (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Gas (lanjutan)

55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

As at December 31, 2021, the Group has significant commitments and contingencies, as follows: (continued)

a. Fuel supply agreements *(continued)*

Gas (continued)

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity*
Arun Belawan Paya Pasir Muara Karang Priok Muara Tawar Jawa 1	a) Tangguh PSC Contract Parties	2016-2034	Kargo	696
Kertas Kraft Aceh	PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore, Pertamina Hulu Energi North Sumatera B dan/*and* Pertamina Geothermal Energi	2019-2022	Bbtu	8,060
Tana Tidung	PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan/*and* PT Medco E&P Simenggaris	2015-2021*)	Bbtu	805
Jawa Barat via NR Benoa Muara tawar via FSRU Lampung Arun Belawan Paya Pasir	PT Pertamina (Persero)	2017-2022	Kargo	34
Benoa	PT Pertamina (Persero)	2018-2022	Kargo	
PLTGU Riau Balai Pungut Duri	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2023	Bbtu	6,600
Sambera	PT Pertagas Niaga	2017-2023	Bbtu	14,256
Tambak Lorok	PGN	2021-2022**)	Bbtu	6,820
Batam	Petrochina Company Limited	2016-2023	Bbtu	41,556
Sorong	PT Malamoi Olom Wobok	2020-2025	Bbtu	14,060
Multidestinasi	a) Tangguh PSC Contract Parties	2022-2035	Kargo	200
Tambak Lorok Gresik	PT Pertamina Hulu Energi	2022-2035	Bbtu	456,100
Simenggaris	JOB PT PHE Simenggaris dan/*and* PT Medco E&P Simenggaris	2021-2028	Bbtu	20,440
Luwuk	JOB PT PHE Tomori dan/*and* PT Medco E&P Tomori	2021-2027	Bbtu	11,829

*) Kontrak ini masih dalam proses perpanjangan/*The contract is still in the process of amendment.*
**) Kontrak tahunan/*Yearly contract*
a) Tangguh PSC terdiri dari kontraktor BP Berau Ltd., KCT Berau Petroleum Ltd., MI Berau B.V., Nippon Oil Exploration (Berau).Ltd., BP Muturi Holdings B.V., CNOOC Muturi Limited, Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc., BP Wiriagar Petroleum Ltd. dan Talisman Wiriagar Overseas Limited./*Tangguh PSC consists of BP Berau Ltd., KCT Berau Petroleum Ltd., MI Berau B.V., Nippon Oil Exploration (Berau).Ltd., BP Muturi Holdings B.V., CNOOC Muturi Limited, Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc., BP Wiriagar Petroleum Ltd. and Talisman Wiriagar Overseas Limited.*

Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas *stand-by letter of credit* dengan rincian sebagai berikut:

In relation with the above agreements, the Company has stand-by letter of credit facilities with the following details:

Bank penerbit/ *Issuing Bank*	Penerima manfaat/ *Beneficiary*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah/ *Total* *)
BRI	Ophir Indonesia (Sampang) Pty	USD	22,267,044
	PGN	USD	14,417,100
	PT Transportasi Gas Indonesia	USD	953,120
	Kangean Energy Ind	USD	20,970,228
	PT Petrogas Jatim Utama	IDR	93,754,990,350
	PT Petrochina Internasional Jabung Ltd.	USD	3,746,630
Bank Mandiri	Pearl Oil (Sebuku) Ltd.	USD	1,510,920
	BP Berau Ltd. *(On behalf of Tangguh)*	USD	81,781,474
BNI	Conoco Philips	USD	4,600,000
	Malamoi Olom Wobok	USD	3,431,970

*) dalam jumlah penuh

*) *in full amount*

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara USD3,60 sampai dengan USD12,72 per *Million British Thermal Units* ("MMBTU").

Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from USD3.60 to USD12.72 per Million British Thermal Units ("MMBTU").

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Batubara

55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel supply agreements *(continued)*

Coal

Pemasok/*Suppliers*	Jumlah metrik ton per tahun/ *Quantity per year in metric tons*)*	Periode/ *Period*
Rutin/*Regular*		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1,700,000	2004-2031
PT Berau Coal	1,642,000	2009-2022
PT Adaro Indonesia	1,572,000	2019-terpenuhi
PT Kaltim Prima Coal	3,120,000	2016-2022
PT Oktasan Baruna Persada	1,800,000	2019-2026
PT Artha Daya Coalindo	2,263,500	2017-2027
PT Arutmin Indonesia	2,400,000	2019-terpenuhi
PT Indominco Mandiri	500,000	2017-2022
PT Jembayan Muara Bara	500,000	2017-2022
CV Tahiti Coal	120,000	2017-terpenuhi
PT Allied Indo Coal	350,000	2017-2022
CV Bara Mitra Kencana	90,000	2019-2025
PT Cahaya Bumi Perdana	48,000	2019-2025
CV Putri Surya Pratama Natural	48,000	2019-2025
PT Dasrat Sarana Arang Sejati	63,000	2019-2025
PT Kideco Jaya Agung	150,000	2019-2022
Kerjasama konsorsium/*Consortium*		
PT Arutmin Indonesia dan/*and* PT Darma Henwa	2,699,125	2007-2026
Program Percepatan/*Fast Track Program*		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	17,000,000	2010-2030
PT Titan Infra Energy **)	2,920,000	2007-2026
PT Hanson Energy	2,128,000	2011-2033
PT Rizki Anugrah Pertama	1,186,000	2016-2022
PT Tunas Inti Abadi	600,000	2020-2025
PT Dizamatra Powerindo	500,000	2020-2025
PT Samantaka Batubara	500,000	2017-2022
PT Bara Energi Lestari	500,000	2017-terpenuhi
PT Indexim Coalindo	300,000	2018-2023
PT Lanna Harita Indonesia	300,000	2015-2025

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*
**) Sebelumnya/*formerly* PT Titan Mining Energy
***) Kontrak ini masih dalam proses perpanjangan./*The contract is still in the process of amendment.*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Batubara (lanjutan)

55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel supply agreements *(continued)*

Coal (continued)

Pemasok/*Suppliers*	Jumlah metrik ton per tahun/ *Quantity per year in metric tons*)*	Periode/ *Period*
Kerjasama konsorsium/*Consortium*		
PT Arutmin Indonesia dan/*and* PT Darma Henwa	4,858,875	2007-2026
PT Dwi Guna Laksana dan/*and* PT Borneo Indo Bara	1,890,000	2009-2033
PT Oktasan Baruna Persada dan/*and* PT Buana Rizky Armia	1,241,000	2009-2031
PT Exploitasi Energi Indonesia, CV Multi Bara Persada	1,178,520	2011-2022
PT Energi Batubara Lestari dan/*and* PT Batara Batari Sinergy Nusantara	221,000	2014-2034

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Pada tanggal 9 Maret 2018, Kementerian ESDM menerbitkan surat keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Sesuai surat keputusan tersebut, harga batubara ditetapkan sebesar maksimal USD70/metrik ton dengan acuan pada kalori 6.322 kcal/kg. Surat keputusan tersebut juga mengatur formula untuk menghitung harga dengan spesifikasi yang berbeda seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut. Pada tanggal 26 Desember 2019, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Keputusan No. 261 K/30/MEM/2019 mengenai pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Surat keputusan ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

On March 9, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 1395 K/30/MEM/2018 regarding the coal selling price for electricity supply for public interest which was retroactively valid from January 1, 2018. According to the decree, the coal price was regulated at a maximum price of USD70/metric ton referenced to coal at 6,322 kcal/kg. The decree also regulated the formula to calculate the price for different specifications of coal as listed in the decree. On December 26, 2019, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 261K/30/MEM/2019 regarding the fulfillment of domestic coal needs in 2020 which was effective on January 1, 2020. This decree revokes the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1395K/30/MEM/2018 regarding the selling price of coal for the supply of electricity for public purposes.

Pada tanggal 2 November 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Poin utama peraturan tersebut yang berkaitan dengan Grup adalah hasil pertambangan batubara termasuk dalam jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka seluruh pembelian batubara dikenakan PPN terhitung mulai tanggal tersebut dengan tarif 10%. Sesuai dengan UU HPP yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021, tarif PPN yang akan berlaku per tanggal 1 April 2022 adalah sebesar 11%.

On November 2, 2020, the Minister of Law and Human Rights issued Law No. 11 year 2020 on Job Creation. The main point of the law relating to the Group relates to the inclusion of coal mining products in the types of goods subject to Value Added Tax (VAT), and therefore all purchases of coal are subject to VAT tariff 10%. In accordance with the HPP Law which has been approved on October 29, 2021, the VAT rate that will be applied as at April 1, 2022 is 11%.

Harga pembelian batubara pada tahun berjalan berkisar antara Rp256.699 sampai dengan Rp1.167.701 per ton (2020: Rp233.363 sampai dengan Rp942.736 per ton) yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT") dan *Hardgrove Grindability Index* ("HGI").

The price of coal purchases for the current year ranges from Rp259,699 to Rp1,167,701 per ton (2020: Rp233,363 to Rp942,736 per ton), which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT") and Hardgrove Grindability Index ("HGI").

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Batubara (lanjutan)

Bahan bakar minyak

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah di addendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai surveyor independen.

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017, PLN dan Pertamina menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel supply agreements *(continued)*

Coal (continued)

Fuel

The Company and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment is using a monthly rate of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounted to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated May 16, 2017, PLN and Pertamina agreed to extend the period of supply until 2020.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Bahan bakar minyak (lanjutan)

Atas perjanjian ini sudah diamandemen berdasarkan Addendum VII tanggal 3 Juni 2021, PLN dan Pertamina menyepakati adanya riviu harga dan perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2023.

Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada addendum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
b. Sehubungan dengan hal tersebut, formula harga baru akan disepakati untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Uap panas bumi

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi adalah sebagai berikut:

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***a. Fuel supply agreements** (continued)*

Fuel (continued)

This agreement has been amended based on Amendment VII dated June 3, 2021, in which PLN and Pertamina agreed on a price review and to extend the supply period until 2023.

Based on Amendment VIII dated December 17, 2021, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from January 1, 2021 to December 31, 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

a. During the negotiation period, the new price formula for the period of January 1, 2021 to December 31, 2021, using the provisional price formula agreed in the amendment for the period of January 1, 2018 to December 31, 2020.

b. Based on the above situation, a new price formula will be agreed for the period starting from January 1, 2022 to December 31, 2023.

Geothermal steam

As at December 31, 2021 and 2020, the Group entered into geothermal steam purchase agreements with several suppliers are as follows:

Sektor/*Sector*	Pemasok/*Supplier*	Periode/ *Period*
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PGE	2012-2040
Lahendong Unit 1	PGE	2002-2032
Lahendong Unit 2 & 3	PGE	2007-2039
Lahendong Unit 4	PGE	2011-2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PGE	2012-2042
Hululais Unit 1 & 2	PGE	30 tahun/*years**)
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PGE	30 tahun/*years**)
Kotamobagu Unit 1,2,3 & 4	PGE	30 tahun/*years**)
Darajat Unit 1	PT Pertamina, Star Energy Geothermal Darajat I Ltd., Texaco Darajat Ltd., Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.	1994-2030
Gunung Salak Unit 1,2 & 3	PT Pertamina, Unocal Geothermal of Indonesia Ltd., Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.	1993-2040

*) Sejak *Commercial Date/Since Commercial Date*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan PPA dan ESC dengan IPP skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PT PLN (Persero) dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik IPP dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, perjanjian signifikan antara Grup dengan IPP adalah sebagai berikut:

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

b. Power purchase agreements and energy sales contracts

Prior to 1997, the Company entered into PPAs and ESCs with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPAs and ESCs through a Working Group on PT PLN (Persero) Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other subjects, equalisation in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPPs and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

As at December 31, 2021, the significant agreements between the Group with IPPs are as follows:

Sudah beroperasi / *In operation*

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF[b] (%)	Periode/ *Period*[b]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial operation date*
1	PT Energi Sengkang	PLTGU Sengkang, Sulawesi selatan/ *South Sulawesi*	Gas	315	85	1998-2022	11 September 1998/ *September 11, 1998*
2	PT Cikarang Listrindo	PLTGU Cikarang, Jawa Barat/ *West Java*	Gas	300	72	1998-2031	1 Desember 1998/ *December 1, 1998*
3	Pertamina Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Darajat Unit 2&3, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	220	80	2000-2030 2007-2037	1 Februari 2000/ *February 1, 2000* 1 Agustus 2007/ *August 1, 2007*
4	Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Wayang Windu Unit 1&2, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	220	95	2000-2030 2009-2039	1 Juni 2000/ *June 1, 2000* 1 Maret 2009/ *March 1, 2009*
5	PT Paiton Energy	PLTU Paiton I, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	1,230	85	2000-2040	1 Juli 2000/ *July 1, 2000*
6	PT Jawa Power	PLTU Paiton II, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	1,220	83	2000-2030	1 November 2000/ *November 1, 2000*
7	Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Salak Unit 4-6, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	195	85	2000-2040	1 Desember 2000/ *December 1, 2000*
8	GDE	PLTP Dieng, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	55	95	2002-2032	1 Oktober 2002/ *October 1, 2002*
9	PT Asrigita Prasarana	PLTGU Palembang Timur, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Gas	150	85	2004-2024	1 September 2004/ *September 1, 2004*
10	Perum Jasa Tirta	PLTA Ir. H. Djuanda, Jawa Barat/ *West Java*	Tenaga Air/ *Hydro*	187	-	2017-2022	1 Agustus 2006/ *August 1, 2006*
11	S2P	PLTU Cilacap, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	562	80	2007-2037	1 Februari 2007/ *February 1, 2007*
12	PT Meppo Gen	PLTGU Gunung Megang, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Gas	110	80	2007-2027	10 November 2007/ *November 10, 2007*
13	PGE	PLTP Kamojang Unit 4, Jawa Barat *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	60	90	2008-2038	26 Januari 2008/ *January 26, 2008*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

Sudah beroperasi (lanjutan)

55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Power purchase agreements and energy sales contracts *(continued)*

In operation (continued)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF[b] (%)	Periode/ *Period*[b]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial operation date*
14	PT Bajradaya Sentranusa	PLTA Asahan, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga Air/ *Hydro*	180	1.175 GWh/th	2011-2041	18 Januari 2011/ *January 18, 2011*
15	PT Paiton Energy	PLTU Paiton III, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	815	85	2012-2042	18 Maret 2012/ *March 18, 2012*
16	PT Cirebon Electric Power	PLTU Cirebon, Jawa Barat/ *West Java*	Batubara/ *Coal*	660	80	2012-2042	27 Juli 2012/ *July 27, 2012*
17	PT Bosowa Energi	PLTU Jeneponto, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	200	80	2012-2042	1 November 2012/ *November 1, 2012*
18	PT Bosowa Energi	PLTU Jeneponto-2, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	250	80	2018-2048	1 April 2018/ *April 1, 2018*
19	PT Poso Energy	PLTA Poso, Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	195	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember 2012/ *December 30, 2012*
20	PT Bekasi Power	PLTGU Bekasi Power, Jawa Barat/ *West Java*	Gas	118.8	80	2013-2033	5 Januari 2013/ *January 5, 2013*
21	PT GH EMM Indonesia	PLTU Simpang Belimbing Muara Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	227	80	2013-2043	27 Februari 2013/ *February 27, 2013*
22	PT Cahaya Fajar Kaltim	PLTU Embalut Ekspansi, Kalimantan Timur/*East Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	50	87	2014-2039	14 Agustus 2014/ *August 14, 2014*
23	GDE	PLTP Patuha, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	55	95	2014-2044	27 September 2014/ *September 27, 2014*
24	PT Kertanegara Energi Perkasa	PLTGU Senipah, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	Gas	82	85	2015-2040	17 Desember 2015/ *December 17, 2015*
25	BPI	PLTU Banjarsari, Lahat, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	220	80	2015-2045	29 Mei 2015/ *May 29, 2015*
26	PT General Energy Bali	PLTU Celukan Bawang, Bali	Batubara/ *Coal*	380	85	2015-2045	23 September 2015/ *September 23, 2015*
27	PT Priamanaya Energi	PLTU Keban Agung, Lahat, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	240	80	2016-2046	1 Mei 2016/ *May 1, 2016*
28	S2P	PLTU Cilacap Ekspansi, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	614	80	2016-2046	9 Juni 2016/ *June 9, 2016*
29	PGE	PLTP Ulubelu Unit 3, Sumatera	Panas bumi/ *Geothermal*	55	90	2016-2046	26 Juli 2016/ *July 26, 2016*
30	PT DSSP Power Sumsel	PLTU Sumsel-5, Banyuasin, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	300	80	2016-2041	20 Desember 2016/ *December 20, 2016*
31	Sarulla Operation Ltd	PLTP Sarulla 1 Unit 1, Sumatera Utara/*North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2017-2047	18 Maret 2017/ *March 18, 2017*
32	PGE	PLTP Ulubelu Unit 4, Sumatera	Panas bumi/ *Geothermal*	55	90	2017-2047	25 Maret 2017/ *March 25, 2017*
33	PT Lestari Banten Energi	PLTU Banten, Jawa Barat/ *West Java*	Batubara/ *Coal*	625	80	2017-2042	28 Maret 2017/ *March 28, 2017*
34	PT Lombok Energy Dynamics	PLTU Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara*	Batubara/ *Coal*	50	80	2017-2042	10 April 2017/ *April 10, 2017*
35	Sarulla Operation Ltd	PLTP Sarulla 1 Unit 2, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2017-2047	2 Oktober 2017/ *October 2, 2017*
36	Sarulla Operation Ltd	PLTP Sarulla 1 Unit 3, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2018-2048	3 April 2018/ *April 3, 2018*
37	PT UPC Sidrap Bayu Energi	PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Angin/ *Wind*	70	198.7 GWh/th	2018-2048	5 April 2018/ *April 5, 2018*
38	PT Tanggamus Electric Power	PLTA Semangka, Sumatera	Tenaga Air/ *Hydro*	56	57	2018-2048	7 Juli 2018/ *July 7, 2018*
39	PT Rekind Daya Mamuju	PLTU Mamuju, Sulawesi Barat/ *West Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	50	80	2018-2043	18 September 2018/ *September 18, 2018*
40	PT Indo Ridlatama Power	PLTU (MT) Kaltim - Muara Jawa, Kalimantan Timur/*East Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	55	80	2018-2048	30 November 2018/ *November 30, 2018*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

b. Power purchase agreements and energy sales contracts (continued)

Sudah beroperasi (lanjutan)

In operation (continued)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF[b] (%)	Periode/ *Period*[b]	komersial/ *Commercial operation date*
41	PT Dalle Energy Batam	PLTG Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	85	90	2005-2025	1 Desember 2005/ *December 1, 2005*
42	PT Mitra Energi Batam	PLTG Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	55	84	2004-2034	29 Oktober 2004/ *October 29, 2004*
43	PT Tanjung Kasam Power	PLTU Tanjung Kasam, Pulau Batam/ *Batam Island*	Batubara/ *Coal*	99	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012* 1 November 2012/ *November 1, 2012*
44	PT Energi Listrik Batam	PLTGU Tanjung Uncang, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	70	85	2016-2038	1 Mei 2016/ *May 1, 2016*
45	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	90	2019-2049	1 September 2019/ *September 1, 2019*
46	PT Energi Bayu Jeneponto	PLTB Tolo Jeneponto, Sulawesi Selatan/*South Sulawesi*	Angin/ *Wind*	60	201,7 GWh/th	2019-2049	14 Mei 2019/ *May 14, 2019*
47	PT DSS Power Kendari	PLTU Kendari-3, Sulawesi Tenggara/ *South east Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	100	80	2019-2044	28 Oktober 2019/ *October 28, 2019*
48	PT Tanjung Power Indonesia	PLTU Kalsel-1, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	200	80	2019-2044	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
49	PT Sumber Segara Primadaya	PLTU Jawa-8, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	945	80	2019-2049	9 November 2019/ *November 9, 2019*
50	PT Shenhua Guohua PJB	PLTU Jawa-7, Banten	Batubara/ *Coal*	2,000	86	2021-2046	8 Juli 2021/ *July 8, 2021*
51	PT Supreme Energy Muara Laboh	PLTP Muara Laboh, Sumatera Barat/ *West Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	80	90	2019-2049	16 Desember 2019/ *December 16, 2019*
52	PT Graha Power Kaltim	PLTU Kaltim-2, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	200	80	2020-2045	31 Maret 2020/ *March 31, 2020*
53	PT Indonesia Energi Dinamika	PLTU Kaltim-4, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	200	80	2020-2045	14 April 2020/ *April 14, 2020*
54	PT Tenaga Listrik Bengkulu	PLTU Bengkulu	Batubara/ *Coal*	200	80	2020-2045	27 Juli 2020/ *July 27, 2020*
55	PT SKS Listrik Kalimantan	PLTU Kalteng-1 / Kalselteng-1, Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	200	80	2020-2045	4 November 2020/ *November 4, 2020*
56	PT Malea Energy	PLTA Malea, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Air/ *Hydro*	90	60	2021-2051	2 Juli 2021/ *July 2, 2021*
57	PT GCL Indo Tenaga	PLTU Kalbar-1, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	200	80	2021-2046	25 Juni 2021/ *June 25, 2021*
58	PT Minahasa Cahaya Lestari	PLTU Sulut-3, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	100	80	2021-2046	1 Juli 2021/ *July 1, 2021*
59	PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dedap, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	86	90	2021-2051	26 Desember 2021/ *December 26, 2021*
60	Lainnya/*Others* c)			430			
	Jumlah			**16,212**			***Total***

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Grup juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi.

Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan)

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***b. Power purchase agreements and energy sales contracts** (continued)*

In addition to the above PPAs, the Group also entered into rental agreements that fall into the category of operating leases.

Not yet in operation (development stage)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF[b] (%)	Periode/ *Period*[a]	Status/ *Status*
1	PT Bhumi Jati Power	PLTU Jawa-4 (FTP2)	Batubara/*Coal*	2,000	86%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
2	PT Indo Raya Tenaga	PLTU Jawa-9&10	Batubara/*Coal*	2,000	86%	2024 - 2049	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
3	PT Bhimasena Power Indonesia	PLTU Jawa Tengah	Batubara/*Coal*	1,900	86%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
4	PT Jawa Satu Power	PLTGU Jawa-1	LNG	1,760	60%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
5	PT Tanjung Jati Power Company	PLTU Jawa-3 (FTP2)	Batubara/*Coal*	1,320	80%	2025 - 2055	Tahap Pendanaan/*Financing Stage*
6	PT Huadian Bukit Asam Power	PLTU MT Sumsel-8	Batubara/*Coal*	1,200	80%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
7	PT Cirebon Energi Prasarana	PLTU Jawa-1 (FTP2)	Batubara/*Coal*	924	86%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
8	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB	PLTU MT Jambi-1	Batubara/*Coal*	600[d]	80%	2027 - 2052	Tahap Pendanaan/*Financing Stage*
9	PT Pembangkitan Perkasa Daya	PLTU MT Jambi-2	Batubara/*Coal*	600	80%	2026 - 2051	Tahap Pendanaan/*Financing Stage*
10	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	PLTU MT Sumsel-1	Batubara/*Coal*	600	80%	2023 - 2053	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
11	PT North Sumatra Hydro Energy	PLTA Batang Toru	Tenaga Air/*Hydro*	510	47%	2026 - 2056	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
12	PT Meulaboh Power Generation	PLTU Meulaboh 3&4	Batubara/*Coal*	400	80%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
13	PT Kerinci Merangin Hidro	PLTA Merangin	Tenaga Air/*Hydro*	350	41%	2025 - 2055	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
14	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	PLTU MT Sumbagsel-1	Batubara/*Coal*	300	80%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
15	PT Medco Ratch Power Riau	PLTGU Riau	Gas Pipa/*Gas pipe*	275	60%	2022 - 2042	Tahap Pembangunan/*Construction Stage* *Operation 195 MW*
16	PT Poso Energy	PLTA Poso	Tenaga Air/*Hydro*	515	37%	2023 - 2053	COD 2012 (*existing* 3X65 MW); CD January & February 2020 *(Extension Stage* 1 4x30 MW); *SLO* 4x50 MW (*Extension Stage* 2)
17	PT Banyuasin Power Energy	PLTU MT Banyuasin	Batubara/*Coal*	240	80%	2022 - 2052	Tahap Pendanaan/*Financing Stage*
18	PT Supreme Energy Rajabasa	PLTP Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/*Geothermal*	220	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/*Exploration*
19	PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dedap, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Panas Bumi/*Geothermal*	134	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/*Exploration*
20	Star Energy Geothermal Ltd.	Wayang Windu #3, Jawa Barat/*West Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	60	95%	2026 - 2056	Eksplorasi/*Exploration*
21	PT Sejahtera Alam Energy	PLTP Baturraden, Jawa Tengah/*Central Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	220	90%	2028 - 2058	Eksplorasi/*Exploration*
22	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas Bumi/*Geothermal*	150	90%	2022 - 2051	- Unit 1 telah COD 45 MW (1 *October* 2019) - Unit 2 telah COD 45 MW (27 *July* 2021) - Unit 3 Tahap Pembangunan 50 MW (Estimasi COD Juli 2022)
23	PGE	PLTP Lumut Balai, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Panas Bumi/*Geothermal*	165	90%	2022 - 2052	- *Under Construction* (Unit 2 55 MW) - Eksploitasi/*Exploitation Unit* 3 & 4 (2x55 MW)
24	PT Bakrie Darmakarya Energi	PLTP Telaga Ngebel, Jawa Timur/*East Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	165	90%	2027 - 2057	Eksplorasi/*Exploration*
25	PT Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar dan/*and* PT PJBI	PLTS Cirata	Surya/*Solar*	145	-	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/*Construction Stage*
26	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muara Laboh, Sumatera Barat/*West Sumatera*	Panas Bumi/*Geothermal*	140	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/*Exploration*
27	GDE	PLTP Dieng #2,3 Jawa Tengah/*Central Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	110	95%	2025 - 2055	Pengembangan/*Development*
28	PT Medco Cahaya Geothermal	PLTP Ijen, Jawa Timur/*East Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	110	90%	2024 - 2054	Eksplorasi/*Exploration*
29	PT Sintesa Banten Geothermal	PLTP Rawadano, Banten	Panas Bumi/*Geothermal*	110	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/*Exploration*
30	PGE	PLTP Hululais	Panas Bumi/*Geothermal*	110	85%	2025 - 2055	Tahap Pendanaan/*Financing Stage* .
31	PGE	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/*Geothermal*	110	90%	2028 - 2058	Eksplorasi/*Exploration*
32	PT Gorontalo Listrik Perdana	PLTU Sulbagut-1	Batubara/*Coal*	100	80%	2022 - 2047	Uji coba/*Commissioning*
33	PGE	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi/*Geothermal*	80	90%	2026 - 2056	Eksplorasi/*Exploration*
34	Lainnya/*Others* c)			1,041			
	Jumlah			**18,664**			***Total***

a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.
b) AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
c) Meliputi kontrak dengan IPP, yang terdiri dari IPP dalam tahap pembangunan dan IPP dalam tahap pembiayaan PPA berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan *mini hydro* dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.
d) Sedang dalam proses pembatalan

a) The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.
b) AF = Power supply factor which must be absorbed by the Company.
c) Represents contracts with IPPs, consisting of IPPs under construction and IPPs in the financing stage, and PPAs which are located in several areas of Indonesia which will use coal, geothermal and mini hydro for generation with each power plant's capacity less than 50 MW.

d) In the process of cancellation

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan) (lanjutan)

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***b. Power purchase agreements and energy sales contract** (continued)*

Not yet in operation (development stage) (continued)

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among other subjects, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as stated in the agreement, involving, among other things, Energy Charge and Capacity Charge.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

c. Capital expenditures

As at December 31, 2021 and 2020, total commitments for capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows:

	2021			
	Mata Uang/ *Currencies*	**Jumlah dalam mata uang asing/ *Amount in foreign currencies*)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent)***	
Program percepatan				*Fast track program*
Kontrak pembangkitan	USD	45,929,500	655,368	*Power plant contracts*
	Rupiah		1,301,947	
			1,957,315	
Kontrak transmisi	Rupiah		121,795	*Transmission contracts*
Kontrak konstruksi rutin	USD	817,364,382	11,662,976	*Regular construction contracts*
	EUR	234,869,272	3,787,699	
	JPY	22,542,890,164	2,792,834	
	NZD	542,100	5,274	
	Rupiah		35,407,623	
	Lain-lain/*Others**)*		12	
			53,656,418	

*) Dalam jumlah penuh
**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

***c. Capital expenditures** (continued)*

	2020			
	Mata Uang/ *Currencies*	**Jumlah dalam mata uang asing/ *Amount in foreign currencies*)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent)***	
Program percepatan				*Fast track program*
Kontrak pembangkitan	USD	51,334,108	724,068	*Power plant contracts*
	Rupiah		1,396,316	
			2,120,384	
Kontrak transmisi	Rupiah		126,554	*Transmission contracts*
Kontrak konstruksi rutin	USD	781,361,798	11,021,112	*Regular construction contracts*
	EUR	274,516,500	4,757,405	
	JPY	31,632,175,610	4,316,889	
	NZD	542,100	5,484	
	Rupiah		42,800,729	
	Lain-lain/*Others**)*	13,418,555,905	174,039	
			63,075,658	

*) Dalam jumlah penuh
**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date*

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran di muka yang sudah dibayarkan oleh Grup sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Grup.

The above amount excludes the remaining advance payments that has been paid by the Group in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Group.

Program percepatan

Fast track program

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired PLTU at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.

Kontrak pembangkitan

Power plant contracts

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Until December 31, 2021, the Company has signed 37 EPC contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with aggregate capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Based on the EPC contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

Program percepatan (lanjutan)

Kontrak pembangkitan (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar USD876.217.780 dan Rp4.790.016 untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai aset dalam pembangunan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Kontrak konstruksi rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri Perusahaan dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

d. Fasilitas pinjaman yang belum digunakan

Penerusan pinjaman

Mata uang/*Currencies*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies*)*	Setara/ *Equivalent* Rp
USD	8,058,663	114,989
JPY	49,010,483,490	6,071,899
Jumlah/*Total*		**6,186,888**

*) Dalam jumlah penuh

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, fasilitas pinjaman belum digunakan masing-masing setara Rp4.717.771 dan Rp5.206.848 dikenakan provisi sebesar 0,10% per tahun, sedangkan fasilitas masing-masing sebesar Rp1.469.117 dan Rp2.436.550 tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2022 sampai dengan 2025.

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***c. Capital expenditures** (continued)*

***Fast track program** (continued)*

***Power plant contracts** (continued)*

Until December 31, 2021, the Company has made down payment amounted to USD876,217,780 and Rp4,790,016 for 35 EPC contracts which is recorded as construction in progress (Note 6). The down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Transmission contracts

Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Regular construction contracts

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.

d. Unused loan facilities

Two-step loans

**) In full amounts*

As at December 31, 2021 and 2020, the unused facilities each equivalent to Rp4,717,771 and Rp5,206,848 bear a provision charge of 0.10% per annum, while the remaining facilities each of Rp1,469,117 and Rp2,436,550 do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2022 and 2025.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan (lanjutan)

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***d. Unused loan facilities** (continued)*

Loan agreements for non fast track program

Up to the completion date of the consolidated financial statements, details of loan facilities non-related to the fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities*)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period**)* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam USD/*USD loan facilities*				
1	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.A	108	20	14 Maret 2016/ *March 14, 2016*	16
2	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.B	72	13	14 Maret 2016/ *March 14, 2016*	16
3	Islamic Development Bank Power Grid Enhacement Project	330	138	10 Januari 2017/ *January 10, 2017*	15
4	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. A	53	31	20 Juni 2017/ *June 20, 2017*	15
6	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. B	36	21	20 Juni 2017/ *June 20, 2017*	15
7	Asian Development Bank Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia	600	52	10 Oktober 2017/ *October 10, 2017*	20
8	Credit Agricole CIB Paris PLTGU Muara Tawar	280	76	8 November 2017/ *November 8, 2017*	15
9	HSBC PLTGU Tambak Lorok III	214	88	19 Februari 2018/ *February 19, 2018*	15
10	Asian Development Bank ADB 4009-INO - RBL KMP	600	324	8 Desember 2020/ *December 8, 2020*	20
11	Asian Development Bank ADB 4264-INO - RBL KMP	600	600	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	20
12	AIIB AIIB L0292A – East Java & Bali Power Distribution	310	248	10 Februari 2021/ *February 10, 2021*	19.5
13	Sumitomo Mitsui Banking Corporation PLTA Jatigede	73	22	30 Maret 2017/ *March 30, 2017*	14
	Jumlah dalam USD/*Total in USD*	**3,276**	**1,633**		
	Fasilitas pinjaman dalam EUR/*EUR loan facilities*				
1	Agence Francaise De Developpment Trans GIS	71	28	7 Mei 2015/ *May 7, 2015*	15
2	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bangkanai Peaker	83	6	15 September 2017/ *September 15, 2017*	11
3	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Power Plant Kumbih	85	84	15 Desember 2017/ *December 15, 2017*	15
4	BGK PLTU Lombok FTP-2	81	24	21 Februari 2018/ *February 21, 2018*	15
5	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Geothermal Energy Program	150	149	11 Oktober 2018/ *October 11, 2018*	15
6	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bakaru I + II Hydro Power Project`	225	225	5 September 2019/ *September 5, 2019*	14
7	Kreditanstalt fur Wiederaufbau 1000 Islands Renewable Energy for electrification Program	70	70	5 September 2019/ *September 5, 2019*	14
8	Mizuho Bank Riau Peaker – Finvera Covered Facility	85	85	13 Maret 2020/ *March 13, 2020*	12
9	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Transmisi/*Transmission*	45	45	23 Mei 2016/ *May 23, 2016*	13
10	KfW KfW 29069 - RBL SNT	255	255	8 Desember 2020/ *December 8, 2020*	15
	Jumlah dalam EUR/*Total in EUR*	1,150	971		

*) Dalam jutaan
**) Termasuk masa tenggang

*) *In million*
**) *Include grace period*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

55. *SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan (lanjutan)

d. *Unused loan facilities* *(continued)*

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)

Loan agreements for non fast track program (continued)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities*)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period**)* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam JPY/*JPY loan facilities*				
1	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar	16,430	1,620	14 Maret 2016/ *March 14, 2016*	16
2	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2	16,939	10,259	20 Juni 2017/ *June 20, 2017*	15
	Jumlah dalam JPY/*Total in JPY*	33,369	11,879		
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*				
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bank Loan Capex Sindikasi 2018 PKS 6 - JBT	4,506,787	2,246,261	14 November 2018/ *November 14, 2018*	10
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kredit Modal Kerja Standby Loan (Revolving)	28,000,000	28,000,000	19 Agustus 2021/ *August 19, 2021*	1
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Agen Sindikasi) 11 proyek PLTU dan PLTMG Tahap I	5,071,000	1,362,275	18 Desember 2019/ *December 18, 2019*	10
4	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (Agen Sindikasi) 4 proyek PLTU dan PLTMG Tahap II	2,846,000	1,577,382	18 Desember 2019/ *December 18, 2019*	10
5	PT Bank Central Asia Tbk. (Bilateral) Corporate Loan Facilities BCA 2019 - Revolving	2,000,000	2,000,000	18 Desember 2021/ *December 18, 2021*	1
6	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kredit Modal Kerja 2019 -Danamon - Revolving Syariah	2,000,000	2,000,000	11 Desember 2021/ *December 11, 2021*	1
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Supply Chain Financing 2020	2,000,000	2,000,000	4 September 2021/ *September 4, 2021*	1
8	PT Bank UOB Indonesia Kredit Modal Kerja 2021 – UOB – Revolving	1,000,000	1,000,000	11 Februari 2021/ *February 11, 2021*	1
9	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Supply Chain Financing 2020	1,000,000	1,000,000	19 Agustus 2021/ *August 19, 2021*	1
10	PT Bank HSBC Indonesia Kredit Modal Kerja 2021 – HSBC – Revolving	1,400,000	1,400,000	22 April 2021/ *April 22, 2021*	1
11	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Agen Sindikasi) Bank Loan Capex Sindikasi 2020	8,800,000	8,800,000	4 Desember 2020/ *December 4, 2020*	10
	Jumlah dalam IDR/*Total in IDR*	58,623,787	51,385,918		

*) Dalam jutaan
**) Termasuk masa tenggang

*) *In million*
**) *Include grace period*

Tingkat suku bunga per tahun	**2021**	**2020**	***Interest rate per annum***
Rupiah	3.44% - 6.50%	5.67% - 7.75%	*Rupiah*
USD	0.66% - 4.41%	0.95% - 4.41%	*USD*
JPY	0.60% - 1.74%	1.58% - 1.74%	*JPY*
EUR	0.00% - 2.10%	0.84% - 2.20%	*EUR*

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

e. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

e. Operation and maintenance programs

In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

Pembangkitan/ *Power plant*	Kontraktor/ *Contractors*	Nilai kontrak setara/*Contract amount equivalent* Rp	Periode/ *Period*
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	1,462,484	2011-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/*consortium of* Fortum Service OY & PT Medco Energy	725,259	2005-2029
Jumlah		**2,187,743**	***Total***

f. Kontinjensi

f. Contingencies

(i) Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd ("PCML") sebagai Termohon 1 dan Perusahaan sebagai Termohon 2 di International Court of Commerce ("ICC"). Permohonan tersebut terkait sengketa *Gas Transportation Agreement* ("GTA") antara PCML selaku *Shipper*/Penjual, KJG selaku *Transporter*, dan Perusahaan selaku *Offtaker*/Pembeli mengenai kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati.

Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternatif dengan PCML bertanggung jawab atas Ship or Pay ("SOP") 2016-2019 senilai USD144.536.677 (nilai penuh) ditambah biaya-biaya (pre-award dan post-award). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di ICC.

(i) On August 29, 2018, the Company faced an Arbitration request filed by PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") as the Applicant against PC Muriah Ltd ("PCML") as first defendant and the Company as the second defendant in the International Court of Commerce ("ICC"). The application is related to the Gas Transportation Agreement ("GTA") dispute between PCML as the Shipper/Seller, KJG as the Transporter, and the Company as the Offtaker/Buyer regarding the underpayment of gas transportation costs to the PLTGU Tambak Lorok since the volume of gas sent is less than the minimum gas volume agreed.

The Applicant demands a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's invoice since April 2018 and alternatively with PCML being responsible for Ship or Pay ("SOP") for 2016-2019 amounted to USD144,536,677 (full amount) plus costs (pre-award and post-award). Up to the completion date of these consolidated financial statements, this case is still in the process of being examined at the ICC.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Kontinjensi (lanjutan)

Manajemen meyakini bahwa Perusahaan memiliki posisi yang kuat karena berdasarkan fakta hukum, kegagalan pengiriman volume gas yang disepakati tidak disebabkan oleh kesalahan dari Perusahaan melainkan kesalahan dari PCML karena kegagalannya dalam menyediakan gas sesuai volume gas minimum yang disepakati. Selain itu, KJG dengan Perusahaan telah menyepakati bahwa KJG membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab pembayaran SOP 2016-2019, apapun putusan Majelis ICC nantinya. Oleh sebab itu, tidak ada provisi yang perlu diakui berkaitan dengan hal ini.

(ii) Pada tanggal 31 Mei 2018, Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terhadap IP dan PGN kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Perselisihan ini disebabkan permintaan pengakhiran perjanjian sewa fasilitas penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priok oleh IP. Pada tanggal 16 Juli 2019, BANI memutuskan bahwa IP harus membayar ganti rugi kepada KKLM sebesar Rp172.273. Pada tanggal 11 September 2019, IP mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dari BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 17 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan amar putusan berupa membatalkan putusan BANI. Pada tanggal 9 Januari 2020, KKLM mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 12 Mei 2020, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menguatkan Putusan BANI. Pada tanggal 12 Oktober 2020, IP mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***f. Contingencies** (continued)*

Management believes that the Company has a strong position because based on legal facts, the failure to deliver the agreed gas volume was not caused by the Company's fault, but was PCML's fault due to its failure to supply gas according to the agreed minimum gas volume. In addition, KJG and the Company have agreed that KJG frees the Company from the responsibility from paying the 2016-2019 SOP, whatever the decision of the ICC Assembly will be. Therefore, there is no provision that needs to be recognised in this regard.

(ii) On May 31, 2018, Consortium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") filed an arbitration request for dispute settlement against IP and PGN to Indonesian National Arbitrage Agency ("BANI"). The dispute was caused by the termination of the lease of gas fuel distribution facility agreement for PLTGU Priok by IP. On July 16, 2019, BANI ruled in favor of KKLM and required IP to pay compensation to KKLM amounted to Rp172,273. On September 11, 2019, IP submitted a petition to annul the BANI arbitration verdict to the District Court of South Jakarta. On December 17, 2019, the District Court of South Jakarta granted the petition by annulling the arbitration verdict from BANI. On January 9, 2020, KKLM submitted an appeal against the District Court of South Jakarta decision annulling the arbitration verdict to the Supreme Court.

On May 12, 2020, the Supreme Court has decided to annul the verdict from the District Court of South Jakarta and strengthen the arbitration verdict from BANI. On October 12, 2020, IP submitted a Civil Case Review in the Supreme Court.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Kontinjensi (lanjutan)

KKLM juga mengajukan Sita Eksekusi dalam rangka eksekusi putusan BANI tanggal 16 Juli 2019, yang kemudian diterbitkan Keputusan Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/Eks.ARB/2020/PN.Jkt/Sel, tanggal 1 Juli 2021 dan Berita Acara No. 55/Eks.ARB/2020/PN.Jkt/Sel tanggal 29 Juli 2021 oleh Pengadilan Negeri terhadap kepemilikan saham IP di CDB (entitas anak IP) dan juga pemblokiran salah satu rekening bank milik IP. IP mengajukan Gugatan Perlawanan/Verzet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Penetapan Sita Eksekusi tersebut dengan perkara No. 669/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Sel. Proses sidang terakhir masih dalam tahap pembuktian.

Pada tanggal 10 Agustus 2021, KKLM mengajukan tuntutan pailit melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara No. 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst kepada IP atas putusan BANI tanggal 16 Juli 2019 yang terdiri atas pengalihan tagihan kepada PT Baloi 128 sebesar Rp5.000 dan KKLM sebesar Rp167.273. Pada tanggal 1 November 2021, Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh KKLM.

(iii) Pada November 2018, terdapat perbedaan terkait dengan penyediaan gas atas penerapan Amandemen II Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN Batam dengan PT Energi Listrik Batam ("ELB"). Atas perbedaan tersebut, ELB mengajukan gugatan arbitrase melalui BANI, yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam. Pada tanggal 25 Januari 2022, ELB telah mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung terkait hasil pembatalan di Pengadilan Negeri Batam. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil keputusannya belum keluar.

55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Contingencies *(continued)*

KKLM also filed for Execution Seizure in relation to the execution BANI's decision dated July 16, 2019, which was issued as Execution Seizure Decision No. 55/Eks.ARB/2020/PN.Jkt/Sel, dated July 01, 2021 and Minutes No. 55/Eks.ARB/2020/PN.Jkt/Sel dated 29 July 2021 by District Court, South Jakarta, on IP's share ownership in CDB (a subsidiary of IP) and also blocking one of the IP's bank account. IP filed a Countersuit/Verzet in the South Jakarta District Court against the Execution Seizure Decision with case No. 669/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Sel. The final trial process is still in the evidentiary stage.

On August 10, 2021, KKLM filed a bankruptcy claim through the Commercial Court at the Central Jakarta District Court under case No. 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, against IP on the decision of BANI dated July 16, 2019 which was consists of the transfer of claims to PT Baloi 128 amounted Rp5,000 and KKLM amounted to Rp167,273. On November 1, 2021, the Panel of Judges has decided to reject the petition for a declaration of bankruptcy submitted by KKLM.

(iii) In November 2018, there was a dispute regarding the supply of gas over the implementation of the Amendment II of the Power Purchase Agreement between PLN Batam and PT Energi Listrik Batam ("ELB"). Regarding the dispute, ELB filed an arbitration lawsuit through BANI, which was canceled by Batam District Court. On January 25, 2022, ELB submitted an appeal to the Supreme Court regarding the cancellation result at Batam District Court. Up to the completion date of these consolidated financial statements, the result has not yet been issued.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Kontinjensi (lanjutan)

(iv) Pada tanggal 24 Juni 2020, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") di BANI terkait perselisihan pelaksanaan perjanjian jual beli gas dan kesepakatan bersama dalam hal ini yaitu mengenai kewajiban pembayaran jumlah minimum gas atau *Take or Pay* ("TOP") dan jumlah penyaluran gas minimum atau SOP.

Pemohon menuntut pembayaran TOP dan SOP tersebut mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan nilai total USD31.523.588 (nilai penuh). Pada 3 Mei 2021, BANI telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menghukum Perusahaan membayar USD27.021.871 (nilai penuh). Pada tanggal 22 Juni 2021, Perusahaan mengajukan upaya hukum pembatalan putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan upaya pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Perusahaan melalui Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/ 2021/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan membatalkan Putusan BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 3 Mei 2021. Pada tanggal 21 Oktober 2021, SEG mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Putusan Arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***f. Contingencies** (continued)*

(iv) On June 24, 2020, the Company faced an Arbitration Request filed by PT Sumsel Energi Gemilang ("SEG") in the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") regarding dispute in the implementation of gas sales and purchase agreement and mutual agreement regarding the obligation to pay minimum gas amount or Take or Pay ("TOP") and minimum gas distribution amount or SOP.

The Claimant demanded TOP and SOP payment starting from 2015 to 2019 amounted to USD31,523,588 (full amount). On May 3, 2021, BANI has decided that the Company must pay compensation to the Plaintiff amounted to USD27,021,871 (full amount). On June 22, 2021, the Company submitted a petition to annul the BANI arbitration verdict to District Court of South Jakarta.

On October 11, 2021 the District Court of South Jakarta has decided a lawsuit filed by the Company with register No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel with a verdict to annul the arbitration decision No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 dated May 3, 2021. On October 21, 2021, SEG submitted an appeal to the Supreme Court to annul the decision of the Supreme Court. Up to the completion date of these consolidated financial statements, this case is still in the process of being examined in the Supreme Court.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Kontinjensi (lanjutan)

(v) Pada tanggal tanggal 29 April 2021, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ince Baharudin dan Ince Rahmawati sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar dengan register No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks terkait kepemilikan aset tanah milik Perusahaan di Jalan Latimojong Makassar. Penggugat mengajukan kerugian materiil akibat penguasaan tanah sengketa oleh Perusahaan sebesar Rp432.647 dan kerugian non materiil sekitar Rp200.000. Penggugat mengajukan tuntutan agar Perusahaan mengosongkan tanah dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut ke Penggugat. Manajemen meyakini Perusahaan memiliki posisi yang kuat karena faktanya Perusahaan memiliki dokumentasi bukti kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda (NV OGEM).

Pada tanggal 3 Februari 2022, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan amar putusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 16 Februari 2022, Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Makassar.

(vi) Grup juga menghadapi gugatan sengketa ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi atau distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Terhadap gugatan serta ganti rugi yang bersifat tidak materiil tersebut, Grup telah menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Grup.

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***f. Contingencies** (continued)*

(v) On April 29, 2021, the Company faced a lawsuit filed by Ince Baharudin and Ince Rahmawati as a Plaintiff in the District Court of Makassar with register No. 152/Pdt.G/2021/PN.Mks regarding the Company's land located at Latimojong Street, Makassar. The Plaintiff filed for material losses due to the Company's control of the disputed land amounted to Rp432,647 and non-material losses of approximately Rp200,000. The Plaintiff filed a demand that the Company vacate the land and then hand over the land to the Plaintiff. Management believes the Company has a strong position due to the fact that the Company has documentation showing proof of ownership of land rights originating from the nationalisation of the Dutch Electricity Company (NV OGEM).

On February 3, 2022, the District Court of Makassar has decided to deny the entire Plaintiff's claim. On February 16, 2022, the Plaintiff filed an appeal to the High Court of Makassar. Up to the completion date of these consolidated financial statements, the case is still in the process of being examined in the High Court of Makassar.

(vi) The Group also faces claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, in several areas of its transmission or distribution facilities, disputes with its employees and cases with customers and suppliers. With respect to the claim and compensation that is not material, the Group has followed up in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Group's operations.

55. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Kontinjensi (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, hasil litigasi di atas tidak dapat diestimasi secara andal atau Grup memiliki alasan yang kuat untuk mendukung kasus tersebut, oleh karena itu, Grup berpendapat bahwa keputusan yang merugikan dalam setiap proses hukum yang tertunda atau terancam atau bahwa setiap jumlah yang mungkin harus dibayar dengan alasan tersebut tidak mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasinya.

***55. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***f. Contingencies** (continued)*

Up to the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigation cannot be reliably estimated or the Group has strong grounds supporting the case, therefore, the Group is of the opinion that adverse decisions in any pending or threatened proceedings or that any amount it may be required to pay by reason thereof is unlikely to have a material adverse effect on its financial condition or the results of operations.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang dari Pemerintah, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi, rekening bank dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek sebesar Rp97.430.298 (2020: Rp104.376.444) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya masih harus dibayar, uang jaminan langganan, utang biaya proyek, utang penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank, utang sewa, utang bank, utang obligasi dan sukuk ijarah, utang listrik swasta, utang KIK - EBA, utang pihak berelasi dan utang lain-lain sebesar Rp511.506.237 (2020: Rp544.449.344) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas derivatif yang diklasifikasikan oleh Grup sebagai instrumen keuangan derivatif yang dicatat pada laba rugi sebesar Rp107.271 (2020: Rp327.544).

56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

As at December 31, 2021, the Group classified its cash and cash equivalents, trade receivables, receivables from Government, other receivables, receivables from related parties, restricted cash in banks and short term investments amounted to Rp97,430,298 (2020: Rp104,376,444) as financial assets at amortised cost.

As at December 31, 2021, the Group classified its trade payables, accrued expenses, customer security deposits, project cost payable, accrued expenses, two-step loans, Government and non-bank Government financial institution loan, lease liabilities, bank loan, bonds payable and sukuk ijara, electricity purchase payable, KIK - EBA loans, payable to related party, and other payables amounted to Rp511,506,237 (2020: Rp544,449,344) as financial liabilities carried at amortised cost and derivative liabilities classified by the Group as derivative financial instrument through profit or loss amounted to Rp107,271 (2020: Rp327,544).

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

b. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman (Catatan 24, 25, 26, 27, 28 dan 29) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 21), saldo laba, dan tambahan modal disetor (Catatan 22).

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Subdirektorat Manajemen Risiko *("SEVP Risk Management")* yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Grup. Subdirektorat ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Grup. *SEVP Risk Management* bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

***56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

b. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of debt (Notes 24, 25, 26, 27, 28 and 29) and equity attributable to owners of the parent consisting of capital stock (Note 21), retained earnings and additional paid-in capital (Note 22).

The Directors of the Company periodically review the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Company's loan covenants require among other things, the fullfilment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

The Group aims to minimise the cost of debt in order to maximise their value. Therefore, in its financing policies, the Group always takes into account the financial risk that may arise in the future.

c. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Group's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group operates within defined policies approved by the Directors.

In managing those risks, the Group established a subdirectorate of Risk Management ("SEVP Risk Management") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Group's environment. The subdirectorate is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Group's management. SEVP Risk Management is responsible to the Director of Finance and Risk Management.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Grup telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Grup mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

Terkait dengan risiko keuangan, Grup telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTPL. Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Grup. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk klasifikasi instrumen keuangan. Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut.

***56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Financial risk management objectives and policies** (continued)*

The Group has established a risk taxonomy by dividing risk into five categories, such as strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Group considers prioritisation based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Related to financial risks, the Group has established management's policy related to hedging transactions. As an SOE, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognised in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented at the amount of unrealised gain or loss from derivative contracts. The Group's derivative contracts are classified as financial assets measured at FVTPL. These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payment due in the 1-3 months of the Group's reporting period. Refer to Note 3 for the accounting policy of financial assets and liabilities for the financial instruments classification. The Group does not apply hedge accounting on those transactions.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko mata uang asing

Grup memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Grup telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia ("BI") untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Grup kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 53.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

56. *FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)*

c. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

Foreign currency risk management

The Group undertakes many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations.

The Group holds regular discussions with Bank Indonesia ("BI") to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Group then incorporates this outlook into its internal financial forecasts and develops a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

The Group's foreign currency exposure as at the reporting date is disclosed in Note 53.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

Dampak terhadap laba setelah pajak/
Effect to profit after tax*

	2021								
	USD		JPY		EUR		Lain-lain/*Others***		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan									***Financial assets***
Piutang pihak berelasi	99,382	(99,382)	-	-	-	-	-	-	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito Berjangka dibatasi penggunaannya	69,565	(69,565)	315,093	(315,093)	-	-	-	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	549,219	(549,219)	14,373	(14,373)	24,374	(24,374)	3,935	(3,935)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	718,166	(718,166)	329,466	(329,466)	24,374	(24,374)	3,935	(3,935)	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	(1,228,364)	1,228,364	(1,463,629)	1,463,629	(15,986)	15,986	(2,098)	2,098	*Two-step loans*
Utang sewa	(47,933)	47,933	(607,577)	607,577	-	-	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(6,701,182)	6,701,182	(829,855)	829,855	(1,118,667)	1,118,667	-	-	*Bank loans and medium term notes*
Utang obligasi	(11,339,408)	11,339,408	(224,191)	224,191	(1,257,890)	1,257,890	-	-	*Bonds payable*
Utang listrik swasta	(481,163)	481,163	-						*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	(285,948)	285,948	(52,157)	52,157	(65,038)	65,038	-	-	*Other payables*
Utang biaya proyek	(6,995)	6,995	(611)	611	(227)	227	-	-	*Project cost payables*
Utang usaha	(1,811,430)	1,811,430	-	-	-	-	(14,996)	14,996	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(176,478)	176,478	(73,743)	73,743	(7,807)	7,807	(18)	18	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(22,078,901)	22,078,901	(3,251,763)	3,251,763	(2,465,615)	2,465,615	(17,112)	17,112	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(21,360,735)**	**21,360,735**	**(2,922,297)**	**2,922,297**	**(2,441,241)**	**2,441,241**	**(13,177)**	**13,177**	***Total-net***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

**) Not considering the effect of borrowing cost capitalisation*
***) Other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date*

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management objectives and policies (continued)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

***Foreign currency sensitivity** (continued)*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*)* 2020								
	USD		JPY		EUR		Lain-lain/*Others***)		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan									***Financial assets***
Kas dan setara kas	537,073	(537,073)	50,018	(50,018)	19,330	(19,330)	165	(165)	*Cash and cash equivalents*
Piutang dari pihak berelasi	76,061	(76,061)	-	-	-	-	-	-	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito Berjangka dibatasi penggunaannya	54,911	(54,911)	393,015	(393,015)	-	-	-	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Investasi jangka pendek	2,644	(2,644)	-	-	-	-	-	-	*Short-term investments*
Jumlah aset keuangan	670,689	(670,689)	443,033	(443,033)	19,330	(19,330)	165	(165)	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	(1,355,721)	1,355,721	(1,640,209)	1,640,209	(19,378)	19,378	(4,831)	4,831	*Two-step loans*
Utang sewa	(58,001)	58,001	(897,762)	897,762	-	-	-	-	*Lease liabilities*
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(6,166,267)	6,166,267	(611,553)	611,553	(1,205,214)	1,205,214	-	-	*Bank loans and medium term notes*
Utang obligasi	(12,309,269)	12,309,269	(246,959)	246,959	(1,351,748)	1,351,748	-	-	*Bonds payable*
Utang listrik swasta	(509,015)	509,015							*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	(523,733)	523,733	(121,403)	121,403	(105,356)	105,356	(8,583)	8,583	*Other payables*
Utang biaya proyek	(7,265)	7,265	(1,724)	1,724	(444)	444	-	-	*Project cost payables*
Utang usaha	(1,105,797)	1,105,797	-	-	-	-	(8,737)	8,737	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(179,807)	179,807	(62,008)	62,008	(8,369)	8,369	(47)	47	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(22,214,875)	22,214,875	(3,581,618)	3,581,618	(2,690,509)	2,690,509	(22,198)	22,198	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(21,544,186)**	**21,544,186**	**(3,138,585)**	**3,138,585**	**(2,671,179)**	**2,671,179**	**(22,033)**	**22,033**	***Total - net***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

**) Not considering the effect of borrowing cost capitalisation*
***) Other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date*

Manajemen risiko tingkat suku bunga

Grup memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup dengan risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Interest rate risk management

The Group has transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir tahun pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

56. *FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)*

c. *Financial risk management objectives and policies (continued)*

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2021		
	+ 50 bp	**- 50 bp**	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas dan setara kas	148,077	(148,077)	*Cash and cash equivalents*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	19,766	(19,766)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Investasi jangka pendek	1,161	(1,161)	*Short-term investments*
Subjumlah laba/(rugi)	169,004	(169,004)	*Subtotal income/(loss)*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(135,504)	135,504	*Two-step loans*
Utang bank	(650,939)	650,939	*Bank loans*
Subjumlah (rugi)/laba	(786,443)	786,443	*Subtotal (loss)/income*
Total (rugi)/laba	**(617,439)**	**617,439**	***Total (loss)/income***

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2020		
	+ 50 bp	**- 50 bp**	
Aset keuangan			***Financial assets***
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	22,943	(22,943)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	213,468	(213,468)	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	1,430	(1,430)	*Short-term investments*
Subjumlah laba/(rugi)	237,841	(237,841)	*Subtotal income/(loss)*
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	(150,852)	150,852	*Two-step loans*
Utang bank	(675,896)	675,896	*Bank loans*
Subjumlah (rugi)/laba	(826,748)	826,748	*Subtotal (loss)/income*
Total (rugi)/laba	**(588,907)**	**588,907**	***Total (loss)/income***

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Grup diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Grup menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Grup mengelola rekening pada beberapa bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan pada satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 56.a untuk rinciannya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp97.421.430 (2020: Rp104.366.768). Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang dari Pemerintah, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi, rekening bank dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek.

Kualitas kredit piutang usaha

Grup berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas signifikan yang terpusat karena piutang usaha Grup tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai jenis pelanggan baik ritel maupun industrial yang tersebar di setiap wilayah geografis. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas piutang usaha secara berkala. Lihat Catatan 15 untuk rincian umur piutang usaha dan analisa cadangan penurunan nilai.

Kualitas kredit piutang dari pemerintah

Grup berkeyakinan bahwa piutang dari pemerintah dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Grup berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

***56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Financial risk management objectives and policies** (continued)*

Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Group. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Group is obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimising the risk of uncollected receivables, the Group collects customer security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three-months to minimise the Group's credit risk. For cash and cash equivalents, the Group maintains accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk. See Note 56.a for details.

As at December 31, 2021, total maximum exposure from credit risk was Rp97,421,430 (2020: Rp104,366,768). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, receivables from Government, other receivables, receivables from related parties, restricted cash in banks and short-term investments.

Credit quality of trade receivables

The Group believes that there is no significant concentration of credit quality risk because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries covering various types of customers, both retail and industrial, which are spread across a number of geographic areas. The Group also performs ongoing credit evaluation of its trade receivables. See Note 15 for detailed information of the aging of trade receivables and impairment assessment of trade receivables.

Credit quality of receivables from Government

The Group believes that receivables from Government can be fully recovered in time from the Government of the Republic of Indonesia. The Group believes there is no risk of default by the Government.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit kas di bank, deposito berjangka dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya

Grup menempatkan kas di bank, deposito berjangka dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik. Oleh karena itu, Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak terkait yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN lainnya.

Kualitas kredit piutang lainnya

Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Grup. Oleh karena itu, Grup dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Grup memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

***56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Financial risk management objectives and policies** (continued)*

***Credit risk management** (continued)*

Credit quality of cash in banks, time deposits and restricted cash in banks

The Group places cash in banks, time deposits and restricted cash in banks with reputable counterparties that have a good credit rating or standing. Consequently, the Group believes that the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and other SOEs.

Credit quality of other receivables

Other receivables are to be collected from the Group's related parties and employees. Therefore, the Group can closely monitor the collectability of these receivables. The Group has a good historical collection rate of these financial assets.

Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, which have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's, short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Group maintains an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash should there be any unforeseen interruption to its cash collections.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management objectives and policies (continued)

Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

***Liquidity risk management** (continued)*

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak didiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga.

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amount disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments.

	2021					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	3,827,187	10,331,657	6,745,508	17,987,738	38,892,090	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	976,953	2,545,313	769,688	-	4,291,954	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa	5,849,483	6,833,464	2,413,090	5,268,722	20,364,759	*Lease liabilities*
Utang bank	31,604,720	88,290,611	28,610,621	33,763,893	182,269,845	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	17,852,937	47,809,367	43,615,649	241,519,998	350,797,951	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	839,017	1,678,034	1,678,034	4,277,846	8,472,931	*Electricity purchase payables*
Utang KIK - EBA	603,560	-	-	-	603,560	*KIK - EBA loans*
Utang usaha	47,904,756	-	-	-	47,904,756	*Trade payables*
Uang jaminan langganan	15,584,069	-	-	-	15,584,069	*Customer security deposits*
Utang biaya proyek	114,546	-	-	-	114,546	*Project cost payables*
Liabilitas derivatif	107,271	-	-	-	107,271	*Derivative liabilities*
Biaya masih harus dibayar	6,528,616	-	-	-	6,528,616	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	20,498,505	466,379	-	-	20,964,884	*Other payables*
Jumlah	**152,291,620**	**157,954,825**	**83,832,590**	**302,818,197**	**696,897,232**	***Total***

	2020					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	3,812,118	7,534,601	7,153,933	25,385,119	43,885,771	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	2,646,490	1,839,281	1,679,922	679,060	6,844,753	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa	5,637,447	12,512,751	941,910	2,772,569	21,864,677	*Lease liabilities*
Utang bank	25,524,318	84,780,323	41,829,864	55,123,926	207,258,431	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	26,534,264	29,110,329	36,190,130	282,589,488	374,424,211	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	838,284	1,708,230	1,707,061	4,991,177	9,244,752	*Electricity purchase payables*
Utang KIK - EBA	973,933	681,513	-	-	1,655,446	*KIK - EBA loans*
Utang pihak berelasi	-	9,432	-	-	9,432	*Related parties payables*
Utang usaha	39,148,555	-	-	-	39,148,555	*Trade payables*
Uang jaminan langganan	14,802,396	-	-	-	14,802,396	*Customer security deposits*
Utang biaya proyek	153,983	-	-	-	153,983	*Project cost payables*
Liabilitas derivatif	327,544	-	-	-	327,544	*Derivative liabilities*
Biaya masih harus dibayar	6,990,380	-	-	-	6,990,380	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	30,895,322	182,093	-	-	31,077,415	*Other payables*
Jumlah	**158,285,034**	**138,358,553**	**89,502,820**	**371,541,339**	**757,687,746**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki modal kerja negatif sebesar Rp60.627.105 yang sebagian besar berasal dari saldo utang usaha, utang bank dan utang lain lain. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah likuiditas karena Grup memiliki cadangan fasilitas kredit yang memadai, adanya jaminan Pemerintah untuk pembayaran utang bank terkait, dan pendapatan subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyediaan listrik.

As at December 31, 2021, the Company had a negative working capital of Rp60,627,105 predominantly from balance of trade payables, bank loans, and other payables. Management believes that there will be no liquidity issue as the Group has sufficient standby credit facilities, government guarantees for related debt repayment and subsidy revenue from the Government of Indonesia for provision of electricity.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan, pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 68, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

***56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

d. Fair value of financial instruments

The fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

SFAS No. 68, "Fair value measurement", requires disclosure of fair value measurements through the following fair value measurement hierarchy:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

The table below describes the carrying amount of the financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					***Liabilities at amortised cost***
Penerusan pinjaman	34,699,205	34,790,895	38,534,971	39,687,602	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	4,399,914	4,055,147	5,421,569	4,870,185	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	193,155,035	216,805,824	207,820,308	240,971,072	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang bank	165,886,409	167,078,254	173,306,708	176,235,716	*Bank loans*

Penerusan pinjaman dan utang bank merupakan liabilitas keuangan dengan tingkat bunga mengambang, sehingga nilai tercatat setara dengan nilai wajar.

Two-step loans and bank loans are financial liabilities with floating interest rates, thus the carrying amount of the financial liabilities approximate their fair values.

56. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

d. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Beberapa pinjaman dengan suku bunga tetap, nilai tercatat atas liabilitas keuangan tidak menunjukkan nilai wajarnya, sehingga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai wajar atas pinjaman diukur dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan di atas diklasifikasikan sebagai nilai wajar Tingkat 2 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasian dalam pasar aktif pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi di atas diklasifikasikan sebagai nilai wajar Tingkat 1 dalam hirarki nilai wajar.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, instrumen keuangan derivatif dihitung menggunakan Tingkat 2. Nilai wajar diukur pada nilai tunai estimasi arus kas masa depan berdasarkan kurva pendapatan yang dapat diobservasi.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya telah berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena memiliki sifat jangka pendek dari instrumen keuangannya.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat pengalihan antar tingkat.

***56. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Fair value of financial instruments** (continued)*

Certain loans with fixed interest rates, the carrying amount of the financial liabilities does not represent their fair values, thus as at December 31, 2021 and 2020, the fair value of loans is measured using discounted cash flows based on the interest rate based on credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are classified as Level 2 fair values in the fair value hierarchy.

The fair value of bonds payable is determined by the quoted market price at the reporting date. The fair values of the bonds payable is classified as Level 1 fair values in the fair value hierarchy.

As at December 31, 2021 and 2020, the derivative financial instruments are measured using a Level 2 method. The fair value is measured as the present value of the estimated future cash flows based on observable yield curves.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximate their fair values due to the short-term nature of the financial instruments.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, there were no transfers between levels.

57. ASET/(LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan melaksanakan *hedging* terbatas untuk memitigasi risiko selisih kurs atas transaksi-transaksi tertentu. Jenis transaksi *hedging* yang dilaksanakan adalah kontrak-kontrak *currency forward* dengan jumlah rincian pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

57. DERIVATIVE ASSETS/(LIABILITIES)

The Company has implemented limited hedging on certain transactions to mitigate its foreign currency exposure. The type of hedge transaction is a currency forward contract with details as at December 31, 2021 and 2020, as follows:

		2021	
Pihak lawan/ *Counterparties*	**Jangka waktu *hedging*/ *Hedging periods***	**Jumlah notional/ *Notional amount***	**Liabilitas derivatif/*Derivative liabilities***
BRI	> 1 Bulan/*Month*	10,099,555	(49,080)
Mandiri	> 1 Bulan/*Month*	7,358,790	(44,504)
BNI	> 1 Bulan/*Month*	1,226,450	(6,581)
BRI	< 1 Bulan/*Month*	1,078,200	(7,106)
Jumlah/*Total*		**19,762,995**	**(107,271)**

57. ASET/(LIABILITAS) DERIVATIF (lanjutan)

***57. DERIVATIVE ASSETS/(LIABILITIES)** (continued)*

Pihak lawan/ *Counterparties*	Jangka waktu *hedging*/ *Hedging periods*	2020 Jumlah notional/ *Notional amount*	2020 Liabilitas derivatif/*Derivative liabilities*
Mandiri	> 1 Bulan/*Month*	3,999,425	(118,513)
BRI	> 1 Bulan/*Month*	4,656,000	(56,932)
BNI	> 1 Bulan/*Month*	1,131,600	(77,196)
Mandiri	< 1 Bulan/*Month*	2,840,350	(26,171)
BRI	< 1 Bulan/*Month*	3,552,250	(34,214)
BNI	< 1 Bulan/*Month*	1,421,375	(14,518)
Jumlah/*Total*		**17,601,000**	**(327,544)**

58. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PENERAPAN POJK NO. 6

Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan secara prospektif POJK No. 6 untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan IPP. Dampak penerapan POJK No. 6 telah disesuaikan ke saldo laba 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

Sesuai POJK No. 6, setiap transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun sebenarnya mengandung substansi selain jual beli (Catatan 3.k). Tabel berikut ini disajikan sebagai informasi tambahan jika perjanjian jual beli listrik dianggap mengandung sewa.

58. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO IMPLEMENTATION OF POJK NO. 6

Since January 1, 2016, the Company has implemented POJK No. 6 prospectively for transactions based on Power Purchase Agreements with IPPs. The effect of POJK No. 6 implementation has been accounted for by adjustment to retained earnings as at January 1, 2016 (Note 2.a).

In accordance with POJK No. 6, all transactions based on Power Purchase Agreements are treated as sale and purchase transactions, although containing a substance other than sale and purchase (Note 3.k). The following tables are presented as additional information if PPAs were deemed to contain a lease.

	Dengan/*Under* PSAK/*SFAS* No. 73 2021	Dengan/*Under* PSAK/*SFAS* No. 73 2020	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			***Consolidated statement of financial position***
Aset tidak lancar			*Non-current assets*
Aset tetap	1,611,915,102	1,573,980,560	*Property, plant and equipment*
Ekuitas			*Equity*
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	27,800,958	17,784,360	*Retained earnings - unappropriated*
Liabilitas jangka panjang			*Non-current liabilities*
Utang sewa	261,073,413	249,387,044	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	5,031,822	5,400,483	*Electricity purchase payables*
Liabilitas pajak tangguhan	29,251,500	16,235,838	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka pendek			*Current liabilities*
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak berelasi	19,529,527	8,002,261	*Related parties*
Pihak ketiga	25,166,918	28,510,400	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	9,224,392	9,590,411	*Accrued expenses*
Utang listrik swasta	431,451	406,495	*Electricity purchase payables*
Utang sewa	13,529,428	12,059,933	*Lease liabilities*

58. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PENERAPAN POJK NO. 6 (lanjutan)

***58. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO IMPLEMENTATION OF POJK NO. 6** (continued)*

	Dengan/*Under* PSAK/*SFAS* No. 73 2021	Dengan/*Under* PSAK/*SFAS* No. 73 2020	
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian			***Consolidated statement of comprehensive income***
Beban usaha:			*Operating expenses:*
Bahan bakar dan pelumas	154,607,490	135,363,422	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	3,126,881	5,919,629	*Purchased electricity*
Sewa	5,046,219	5,700,564	*Leases*
Pemeliharaan	30,482,533	29,487,013	*Maintenance*
Penyusutan aset tetap	47,279,429	44,856,604	*Property, plant and equipment depreciation*
Laba usaha	92,185,811	89,450,889	*Operating profit*
Kerugian/(keuntungan) kurs mata uang asing - bersih	303,100	(9,842,324)	*Loss/(gain) on foreign exchange - net*
Pendapatan keuangan	(68,971,359)	(74,231,203)	*Finance income*
Laba sebelum pajak	19,383,102	8,419,696	*Profit before tax*
Beban pajak	(9,185,739)	(7,429,185)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	10,197,363	990,511	*Profit for the year*
Laporan arus kas konsolidasian			***Consolidated statement of cash flows***
Arus kas dari aktivitas operasi			*Cash from operating activities*
Pembayaran kas kepada pemasok	(191,966,078)	(187,977,563)	*Cash paid to suppliers*
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	87,208,703	79,214,543	*Cash provided from operation activities*
Pembayaran bunga	(67,900,593)	(75,820,246)	*Interest expense paid*
Kas bersih dari aktivitas operasi	75,808,386	97,549,207	*Net cash provided from operating activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			*Cash from financing activities*
Pembayaran utang listrik swasta	(412,776)	(401,121)	*Payment of electricity purchase payable*
Pembayaran utang sewa	(11,974,453)	(9,895,626)	*Payment of lease liabilities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(33,067,972)	(20,559,161)	*Net cash used in financing activities*

Nilai kini pembayaran minimum atas utang sewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 jika Grup menerapkan PSAK No. 73, "Sewa" adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments on lease liabilities as at December 31, 2021 and 2020, if the Group applied SFAS No. 73, "Leases" are as follows:

	2021	2020	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	57,450,831	53,750,913	*Not later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	200,065,761	192,014,968	*Later than one year and not later than five years*
Lebih dari lima tahun	610,475,668	591,545,599	*Later than five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	867,992,260	837,311,480	*Total minimum lease payments*
Dikurangi: bunga	(593,389,421)	(575,864,504)	*Less: interest*
Nilai kini pembayaran minimum sewa masa datang	274,602,839	261,446,976	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**13,529,428**	**12,059,933**	***Less: current maturity***
Bagian jangka panjang	**261,073,411**	**249,387,043**	***Long-term portion***

59. INFORMASI LAINNYA

Sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit COVID-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") sebagai pandemi. Pandemi sangat mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

Di saat yang sulit ini, Grup terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan ("K3LH") di lapangan dan di Jakarta telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Grup, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Prioritas utama Grup adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok. Beberapa kegiatan utama yang telah Grup lakukan pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

a. Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan Grup.
b. Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan.
c. Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional Grup.
d. Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan.
e. Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok.
f. Mengembangkan rencana Grup sebagaimana diperlukan.

Grup telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis Grup. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Grup sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Grup.

59. OTHER INFORMATION

Since early 2020, there has been an outbreak of COVID-19 around the world, which the World Health Organisation ("WHO") has declared a pandemic. The pandemic may severely affect, among others, global demand for products and services and supply chains.

In this challenging time, the Group continues to strive to maintain its operational activities and continues to focus on staying efficient and protecting the health and safety of its employees. The health, safety, and environment ("K3LH") teams in the sites and in Jakarta have implemented preventive measures and health procedures that every employee must comply with, including improvement of the hygienic behaviour, the prohibition of non-essential travel, implementation of physical distancing in the workplace, identification of high risk groups in the Group, and wherever possible to work from home for employees who are not directly involved in production activities. Each business unit has prepared a crisis management plan and prepared the necessary preventive measures.

The Group's main priority continues to be the health, safety and well-being of the Group's employees, customers, and suppliers. Some of the key activities that the Group has carried out during this pandemic, include among others:

a. Conducting promotional, preventive, curative, and rehabilitative programmes, to ensure the health of the employees.
b. Providing guidance and support to employees.
c. Closely monitoring infrastructure capacity and the security of operational activities.
d. Following guidance from the Government and health organisations.
e. Continuing to serve and engage with customers and vendors.
f. Evolving the Group's plans as necessary.

The Group has assessed the effects of the event on the Group's operations and business plan. Based on the assessment, management does not foresee any material uncertainty that may have a significant adverse impact on the Group's business and operations up to the completion date of these consolidated financial statements. Management will closely monitor the developments of the COVID-19 pandemic and take the necessary actions in relation to its impact on the business, the financial position and operating results of the Group.

60. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2022.

60. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements is the responsibility of the management and were approved by the Directors for issuance on May 23, 2022.

61. REKLASIFIKASI

Laporan keuangan 2020 telah direklasifikasi agar konsisten dengan presentasi laporan keuangan konsolidasian 2021. Rincian akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

61. RECLASSIFICATIONS

The 2020 financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2021 consolidated financial statements. The details of the accounts being reclassified are as follows:

	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassifications*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassifications*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				***Consolidated statements of financial position***
Aset				*Assets*
Aset lancar				*Current assets*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	731,817	1,052,239	1,784,056	*Related parties*
Pihak ketiga	20,546,599	(1,052,239)	19,494,360	*Third parties*
Piutang pihak berelasi	1,486	75,187	76,673	*Receivables from related parties*
Aset tidak lancar				*Non-current assets*
Piutang lain-lain	1,295,416	(409,364)	886,052	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	975,149	334,177	1,309,326	*Receivables from related parties*
Aset tidak lancar lain	4,780,480	(145,061)	4,635,419	*Other non-current assets*
Liabilitas				*Liabilities*
Liabilitas jangka pendek				*Current liabilities*
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	8,505,191	1,658,021	10,163,212	*Related parties*
Pihak ketiga	30,643,364	(1,658,021)	28,985,343	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	7,449,309	(458,929)	6,990,380	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	8,500,782	458,929	8,959,711	*Short-term employee benefits liabilities*
Penerusan pinjaman	3,062,879	(29,711)	3,033,168	*Two-step loans*
Liabilitas jangka panjang				*Non-current liabilities*
Penerusan pinjaman	35,617,153	(115,350)	35,501,803	*Two-step loans*
Laporan laba rugi konsolidasian				***Consolidated statements of profit or loss***
Beban usaha				*Operating expenses*
Sewa	3,101,334	2,401,237	5,502,571	*Leases*
Pembelian tenaga listrik	98,651,604	(2,401,237)	96,250,367	*Purchased electricity*
Laporan arus kas konsolidasian				***Consolidated statements of cash flows***
Arus kas dari aktivitas operasi				*Cash flows from operating activities*
Pembayaran kas kepada pemasok	(236,872,141)	(4,270,198)	(241,142,339)	*Cash paid to suppliers*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	-	563,423	563,423	*Cash receipts for corporate income tax*
Penerimaan restitusi pajak lainnya	-	548,572	548,572	*Cash receipts for other taxes*
Pembayaran surat ketetapan pajak	-	(428,180)	(428,180)	*Payment of tax assessment letters*
Arus kas dari aktivitas investasi				*Cash flows from investing activities*
Penarikan rekening bank dibatasi penggunaannya	1,698,900	7,503,944	9,202,844	*Withdrawal of restricted cash in banks*
Penempatan rekening bank dibatasi penggunaannya	(819,720)	(7,835,025)	(8,654,745)	*Placement of restricted cash in banks*
Arus kas dari aktivitas pendanaan				*Cash flows from financing activities*
Pembayaran utang sewa	(7,856,208)	3,917,464	(3,938,744)	*Payments of lease liabilities*

61. REKLASIFIKASI (lanjutan)

Reklasifikasi di atas tidak berdampak secara material karena reklasifikasi ini tidak mempengaruhi keputusan ekonomis yang dibuat oleh pengguna atas dasar laporan keuangan konsolidasian sehingga penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tiga periode tidak diperlukan.

***61. RECLASSIFICATIONS** (continued)*

The above reclassifications have no material impact because the reclassifications do not affect economic decisions made by users on the basis of consolidated financial statements and therefore a restatement of the three-period consolidated financial statements is not necessary.

62. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(i) Berdasarkan surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-2/MBU/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 telah disetujui:
- Memberhentikan dengan hormat Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PT PLN (Persero);
- Mengangkat Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer PT PLN (Persero).

(ii) Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-106MBU/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 10.075.210 saham dengan nilai Rp10.075.210 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp145.536.096. Atas persetujuan Penyertaan Modal Negara tersebut, maka penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

(iii) Berdasarkan surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 telah disetujui:
- Memberhentikan dengan hormat Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PT PLN (Persero);
- Mengangkat Tedi Bharata sebagai Komisaris PT PLN (Persero).

(iv) Penandatanganan perjanjian pinjaman baru

Pada tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank DKI sebesar Rp500.000 untuk fasilitas kredit modal kerja, jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan. Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp500.000.

62. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

(i) Based on the letter of the Minister of SOE No. SK-2/MBU/01/2022 dated January 6, 2022, the following have been approved:
- *Honourably discharged Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy of PT PLN (Persero);*
- *Appointed Hartanto Wibowo to become Director of Primary Energy of PT PLN (Persero).*

(ii) Based on the letter of the Minister of SOE No. S-106/MBU/02/2022 dated February 14, 2022 the decision of Minister of SOE as the GMS approved additional Government equity participation of 10,075,210 shares for a value of Rp10,075,210, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp145,536,096. Following the approval of the Government Participation, the stock subscription from Government in issuance process has therefore been reclassified to subscribed and paid-up capital.

(iii) Based on the letter of the Minister of SOE No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022, the followings have been approved:
- *Honourably discharged Ardan Adiperdana as Commissioner of PT PLN (Persero);*
- *Appointed Tedi Bharata to become Commissioner of PT PLN (Persero).*

(iv) Signing of new loan agreements

On March 28, 2022, the Company entered into a loan agreement with Bank DKI amounting to Rp500,000 for working capital facilities, the term of the credit facility is 12 months from the signing of the agreement. This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurred. In 2022, the Company has made drawdown amounting to Rp500,000.

62. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Penandatanganan perjanjian pinjaman baru (lanjutan)

Pada tanggal 21 Februari 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pembiayaan musyarakah dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebesar Rp1.000.000 untuk fasilitas kredit modal kerja dan tujuan korporasi umum, jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan. Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pembiayaan Musyarakah dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp1.000.000 untuk fasilitas kredit modal kerja dan tujuan korporasi umum, jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan.

Pada tanggal 6 April 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan MUFG Bank sebesar Rp1.000.000 jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun sejak tanggal perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari kreditur. Tujuan perjanjian ini untuk fasilitas kredit modal kerja dan tujuan korporasi umum sehubungan dengan Proyek Pembangkitan Listrik, dengan ketentuan bahwa tidak satu pun dari hasil fasilitas kredit akan dipergunakan untuk tujuan apa pun dalam bentuk yang berhubungan dengan batubara. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan di Bank pada tanggal penarikan.

Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Penerusan Pinjaman dengan Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD380.000.000 (nilai penuh) dari *International Bank for Reconstruction and Development Loan Agreement* Nomor 9278-ID terkait dengan pembiayaan *Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project* dengan jangka waktu pinjaman adalah paling lama 24 tahun dan 6 bulan termasuk masa tenggang 9 tahun. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan ketentuan suku bunga acuan ditambah variable *credit spread.*

62. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Signing of new loan agreements (continued)

On February 21, 2022, the Company entered into a musyarakah financing agreement with PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk amounting to Rp1,000,000 for working capital facilities and general corporate purposes, the term of the agreement is 12 months from the signing of the agreement. This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurred. In 2022, the Company has made drawdown amounting to Rp1,000,000.

On March 14, 2022, the Company entered into a Musyarakah financing agreement with PT Bank Maybank Indonesia, Tbk amounting to Rp1,000,000 for working capital facilities and general corporate purposes, the term of the agreement is 12 months from the signing of the agreement. This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurred.

On April 6, 2022, the Company entered into a loan agreement with MUFG Bank amounting to Rp.1,000,000. The term of the agreement is one year from the date of the agreement and can be extended with the approval from the lender. The purpose of this agreement is for working capital facilities and general corporate purposes in relation with the Power Generation Project, provided that none of the proceeds of the credit facility will be used for any purpose in the form of coal-related. This loan bears interest rate in accordance with Bank reference rate when the drawdown occurred.

On March 14, 2022, the Company entered into a two-step loan agreement with the Government of the Republic of Indonesia amounting to USD380,000,000 (full amount) from the International Bank for Reconstruction and Development Loan Agreement Number 9278-ID in relation with financing the Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project, with a maximum term of 24 years and 6 months including a grace period of 9 years. This loan bears interest rate in accordance with loan reference rate plus variable credit spread.

LAPORAN TAHUNAN
2021
ANNUAL REPORT

PLN

Transition to Net Zero Emissions
Transisi Menuju *Net Zero Emissions*

PLN

PT PLN (Persero)

KANTOR PUSAT
Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160,
Indonesia
Telp : 021 – 7251234, 7261122
Fax : 021 – 7221330

www.pln.co.id

LAPORAN TAHUNAN *ANNUAL REPORT* 2021